IVAN TANIPUTERA

AR-RUZZ MEDIA

JILID 1

ENSIKLOPEDI

KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH

BHINNEKA TUNGGAL IKA

IVAN TANIPUTERA

AR-RUZZ MEDIA

JILID 1

ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH

ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA
Hikayat dan Sejarah

Ivan Taniputera

Editor: Aziz Safa & Meita Sandra
Proofreader: M. Faiz
Desain Cover: Anto
Desain Isi: Joko P.

Diterbitkan Oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-602-313-179-2 (jil.1)
Cetakan I, 2017

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 22710564
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

AR·RUZZ MEDIA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Ivan Taniputera
Ensiklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara: Sejarah & Hikayat (Jilid 1)/Ivan Taniputera; ed. Aziz Safa & Meita Sandra-Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
xxvi + 718 hlm, 18,5 X 25,5 cm
ISBN: 978-602-313-178-5 (no. jil. lengkap)
978-602-313-179-2 (jil. 1)

1. Sejarah
I. Judul II. Ivan Taniputera

KATA PENGANTAR

Bagi negeri kita yang terdiri dari beribu pulau dengan beragam suku bangsa, adat istiadat, dan bahasanya, sejarah lokal sesungguhnya merupakan bagian sejarah nasional yang sangat penting dan tak terpisahkan. Sebelumnya, riwayat berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara pascakeruntuhan Majapahit selaku sejarah lokal masih belum banyak disentuh. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minim dan terseraknya berbagai sumber sejarah. Dewasa ini, nampak kebangkitan minat masyarakat kita terhadap sejarah, baik umum maupun lokal. Banyak buku kajian sejarah lokal telah ditulis, baik oleh para sejarawan dalam maupun luar negeri. Buku ini dimaksudkan sebagai pelengkap kepustakaan sejarah lokal di negeri kita, di mana seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dan kaum cendekiawan, penulis terdorong merangkum sejarah berbagai kerajaan tersebut.

Dengan mencermati berbagai peristiwa penting di berbagai kerajaan itu, yang umumnya tumbuh dan berkembang semenjak abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pandangan terhadap sejarah nasional secara keseluruhan akan menjadi semakin utuh. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara merupakan bagian khazanah budaya bangsa yang berharga. Penelaahan terhadap sejarah berbagai kawasan di seluruh penjuru tanah air akan melengkapi wawasan sejarah bangsa kita.

Tentu saja, buku ini masih jauh dari sempurna. Terdapat lebih dari 300 kerajaan di Kepulauan Nusantara yang eksis hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sumber-sumber sejarah yang tersedia masih sangat minim dan tidak selalu terdapat informasi memadai bagi masing-masing kerajaan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa karya ini semata-mata merupakan rintisan dan perlu penyempurnaan lebih

lanjut. Pada mulanya sebelum menyusun buku ini timbul perasaan pesimis dalam diri penulis. Meskipun demikian, akhirnya timbul pemikiran jika tidak memberanikan diri merintis penulisan karya semacam ini, kapan lagi kita akan mempunyai dokumen sejarah lengkap mengenai kerajaan-kerajaan di negeri kita? Selain itu, penulis teringat akan pepatah "perjalanan ribuan kilometer hanya dimulai dari satu langkah saja." Itulah sebabnya, penulis memberanikan diri menghasilkan karya sejarah yang masih jauh dari sempurna ini, dengan harapan membangkitkan minat masyarakat terhadap riwayat kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Bumi Nusantara. Buku ini juga ditujukan membantu para guru sejarah menggali muatan lokal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, besar pula harapan penulis agar karya ini sedikit banyak sanggup memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan sejarah di negeri kita.

Terdapatnya gambar lambang negara kita pada sampul buku ini memperlihatkan bahwa para raja Nusantara telah mempersiapkannya sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 semenjak lama. Meskipun wujudnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai contoh, Raja Airlangga telah mempergunakan garuda sebagai simbol kerajaannya.Pencantuman gambar tersebut mencerminkan pula tekad para raja menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Yang Terhormat Presiden RI Y.M. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Yang Terhormat Wakil Presiden RI Y.M. Prof. DR. Boediono, serta Badan Pekerja Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara, khususnya Yang Mulia Paduka Raja Samu Samu VI-Upu Latu M.L. Benny Ahmad Samu Samu, Yang Mulia Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon-Sultan Y.M. Arief Natadiningrat, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat-Y.M. GRAY Koes Murtiah Wandansari (Gusti Mung), Y.M. K.P. Edi Wirabhumi, Yang Mulia Sultan Skala Brak Lampung-Y.M. Sultan Edwardsyah Pernong.

Yang Mulia Bapak Dr. Alexander Usfinit dari Kerajaan Insana.

Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa, selaku Raja/Pemangku Adat Kerajaan Letta, yang telah memberikan data berharga mengenai Kerajaan Letta.

Yang Mulia Ibu Andi Sitti Huzaimah, selaku Cenning Luwu.

Yang Mulia Bapak Don Leopold Nisnoni, selaku Raja Kupang.

Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek, selaku pewaris Kerajaan Amanatun, yang telah memberikan buku *Raja-raja Amanatun yang berkuasa*.

Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan, selaku kerabat Kerajaan Tayan, yang telah memberikan banyak informasi dan foto berharga.

Yang Mulia Bapak Ismael Bauw yang memberikan informasi mengenai kerajaan-kerajaan di Papua.

Yang Mulia Bapak La Tenri Peppang yang telah memberikan silsilah dan data Kerajaan Luwu.

Yang Mulia Usif Louis Nope, yang telah memberikan data dan foto mengenai Kerajaan Amanuban.

Yang Mulia Bapak Muhamad Walidad, selaku kerabat Kerajaan Selimbau, yang telah memberikan informasi berharga mengenai sejarah Kerajaan Selimbau.

Yang Mulia Bapak Ridwan Paoh, selaku kerabat Kerajaan Baranusa, yang telah memberikan manuskrip berharga mengenai sejarah Kerajaan Baranusa.

Yang Mulia Tuanku Bosa XIV Dr. H. Fadlan Maalip SKM gelar Tuanku Sorualam KRHT Husododiningrat, yang telah memberikan buku-buku berharga tentang Nagari Talu, Kesultanan Pagarruyung, dan otobiografi beliau.

Bapak Abdullah Masrur, pemilik Penerbit Ar-Ruzz Media atas kesediaannya membantu penerbitan buku ini.

Bapak Abdur-Razzaq Lubis, pengelola website www.mandailing.org, yang mengizinkan pengambilan gambar-gambar dari *website*nya.

Bapak Alexander Bell dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saudari Amalia Pranoto, yang telah banyak memberikan bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Bapak Ardian Cangianto, yang telah banyak memberikan bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Bapak Arif Hidayat, yang telah memberikan literatur-literatur berharga mengenai Sejarah Sumbawa.

Mr. Donald Pietro Tick, yang telah memberikan informasi mengenai raja-raja di Kepulauan Nusantara.

Bapak Dori Girsang, yang telah memberikan informasi berharga mengenai sejarah Simalungun.

Bapak Elmustian Rahman, yang telah menyediakan informasi mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Rokan.

Bapak Fadly La Pene, yang telah memberikan informasi dan foto-foto mengenai Kerajaan Banggai.

Bapak Fredy Resley, yang telah memberikan data sejarah Kerajaan Amahai, Nunusaku, Sahulau, dan lain sebagainya.

Mr. Hans Hägerdal, yang telah memberikan informasi berharga mengenai silsilah raja-raja Bali dan Lombok.

Bapak Harto Juwono, yang telah memberikan literatur mengenai kerajaan-kerajan Inderagiri dan Gorontalo beserta arsip-arsip terkait Kuantan dan Singingi.

Bapak Iwan Sinaga yang telah memberikan informasi mengenai Kerajaan Tanah Jawa.

Bapak Jefri Lilipadang yang memberikan informasi mengenai silsilah para *puang* di Tana Toraja.

Saudara Johan Sadikin atas sumbangannya berupa foto-foto keraton Pontianak.

Bapak Jon Kenedi Kasdun, yang telah memberikan foto-foto mengenai Kerajaan Indrapura

Mr. Jan van Rosmalen (Special Collections Coordinator KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies)

Bapak Jemi Nenobahan, yang telah memberikan berbagai informasi mengenai kerajaan-kerajaan di Timor

Mr. John Duncan McMeekin, atas informasinya mengenai bendera-bendera kerajaan Nusantara

Saudari Juliya Yi, atas sumbangan foto-foto.

Bapak Junaidi Syam yang telah menyediakan informasi mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Rokan.

Bapak King Hian (Subada)

Bapak Laurentius Dyson yang telah memberikan data sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur.

Bapak M. Farid W. Makkulau, yang telah memberikan buku mengenai sejarah ke*karaeng*an di Pangkep.

Bapak Masrul Purba Dasuha, yang telah memberikan informasi berharga mengenai sejarah Simalungun.

Bapak Munandjar Widiyatmika, yang telah memberikan informasi mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara Timur.

Ibu Mika Okushima, yang telah memberikan informasi mengenai sejarah Tanah Tidung.

Mr. Mohd. Rusydi Azfar, yang telah memberikan informasi mengenai bendera dan lambang-lambang berbagai kerajaan.

Bapak Muhlis Sahaeri, yang telah mengizinkan digunakannya foto-foto mengenai perayaan Robo-robo dan Tumpang Negeri.

Bapak M. Muhar Omtatok, atas informasinya mengenai sejarah Tanjung Kasau dan kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara.

Bapak Narpati Wisjnu Ari Pradana, yang telah meminjamkan beberapa literatur mengenai sejarah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Bapak Parlindungan Damanik, yang telah memberikan informasi berharga mengenai sejarah Simalungun.

Pengelola *website* www.inimaumere.com yang telah mengizinkan pengambilan foto-foto dari *website*nya.

Bapak Priambodo Prayitno

Ratna Saraswati, yang telah banyak membantu penulisan buku ini.

Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung yang telah memberikan data dan foto-foto mengenai Kerajaan Tanah Jawa.

Bapak Drs. Sayuti Amin

Bapak Sugeng Arianto yang telah memberikan informasi mengenai sejarah Kerajaan Bulungan dan Tidung.

Bapak Ir. Sugiri Kustedja.

Bapak Suryadin Laoddang, yang telah menyediakan buku mengenai sejarah Kerajaan Wajo dan Sulawesi Selatan.

Bapak Suwardi M. Samin, yang telah memberikan data mengenai sejarah Kuantan Singingi.

Bapak Syafaruddin Usman, yang telah menyediakan berbagai buku berharga mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di Kalimantan.

Ibu Tengku Dini, pengelola web www.TengkuDini.com, yang telah memberikan buku *Terombo Siri Kerajaan Tambusai*.

Bapak Yusri Syam, yang telah menyediakan informasi mengenai kerajaan-kerajaan di Rokan.

Bapak Winata Taniputera dan Ibu Handajani Tanuhadi.

Penyerahan naskah buku Sejarah Kerajaan-kerajaan Nusantara pada Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono pada 31 Mei 2011
Foto koleksi Ibu Dezzy

Penulis bersalaman dengan Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono pada 31 Mei 2011

SAMU SAMU De Laatste Van Koning Stamboom
Abubu – Nusa Laut. Maluku. 1556 M

Perihal : **Rekomendasi Buku Kerajaan - Kerajaan Nusantara Pasca <u>Keruntuhan Majapahit.</u>**

Jakarta, Agustus 2011.

Kepada Yth,
Sdr. Ivan Taniputera.
Di –
<u>SURABAYA.</u>

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Diringi puji dan syukur kehadirat **Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa**, atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat beraktivitas dan memberikan sumbangsih kepada **Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Pada kesempatan yang baik ini beta atas nama: **RAJA SAMU SAMU VI. De Laatstse Van Koning Stamboom Abubu – Nusa Laut, Maluku**, adalah salah satu **Raja Adat** yang ada di Maluku sejak abad **XVI (Tahun 1556 Masehi)**, dimana Moyang **RAJA SAMU SAMU** adalah seorang Petarung Samudra atau Lautan. Sehingga dalam **Kapata Lama Moyang Samu Samu** lebih banyak berpetualang dalam menjelajah atau berperang menghadapi lawan khususnya di laut, saat ini darah terus mengalir dari turun menurun untuk membawa Sejarah Lama yang tidak boleh dilupakan oleh generasi penrus maupun selanjutnya, dan beta kita pemikiran yang sama akan dilakukan oleh para penerus, pewaris dan keturunan dari Raja – Raja ataupun Sultan – Sultan yang dahulu pernah ada di bumi Nusantara Indonesia ini, dan dari sejak dahulu kami tetap mencintai dan merupakan bagian daripada Bangsa dan Negara Indonesia.

Berkaitan dengan rencana penerbitan buku **KERAJAAN KERAJAAN PASCA KERUNTUHAN KERAJAAN MAJAPAHIT**, beta berharap bahwa dalam buku tersebut dapat memuat dan mengangkat Raja – Raja dan/atau Sultan – Sultan yang pernah ada di bumi Nusantara, dan tentunya beta atas nama: **RAJA SAMU SAMU VI. De Laatstse Van Koning Stamboom Abubu – Nusa Laut, Maluku**, sangat mendukung dan memberikan Rekomendasi kepada **Sdr. Ivan Taniputera**, selaku Penulis dan/atau Penerbit buku Sejarah Raja dan Sultan Nusantara agar dapat menyelesaikan dan menampilkan hasil karya yang baik, yang kelak bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia untuk tetap mengenal dan mengetahui Sejarah Bangsanya sendiri. Pepatah almarhum **Bung KARNO "JASMERAH"** yang diartikan " **JANGAN SEKALI KALI MELUPAKAN SEJARAH"**.

Alamat : Jl. Sembung I/134.K.P.AD. KODAM – Cibubur. Jakarta Timur 13720. Indonesia
Telp.No.: 0818.08205195 – 0813.81060706. Email : b_samusamu@yahoo.com
Website: www.rajasamusamuvi.blogspot.com

SAMU SAMU De Laatste Van Koning Stamboom
Abubu – Nusa Laut. Maluku. 1556 M

Semoga harapan beta: **RAJA SAMU SAMU VI. De Laatstse Van Koning Stamboom Abubu – Nusa Laut, Maluku**, selaku Pemerakarsa **SILATURAHMI NASIONAL RAJA DAN SULTAN NUSANTARA** bersama **Yang Mulia; DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga Trah Hamengku Buwono III)** dan **Yang Mulia. K.R.M.H. Japto S. Soerjosoemarno (Trah V. Mangkunegoro Surakarta – Solo)** serta beberapa Raja dan Sultan Nusantara lainnya, menginginkan agar Sejarah Raja dan Sultan serta Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tetap dapat diketahui dan dikenal oleh seluruh elemen bangsa, khususnya generasi penerus Bangsa dan Negara, mulai dari tingkat Pelajar dan Mahasiswa.

Atas nama: **RAJA SAMU SAMU VI. De Laatstse Van Koning Stamboom Abubu – Nusa Laut, Maluku**, menyampaikan semoga **Sdr. Ivan Taniputera**, berhasil (Sukses) dan maju dalam mengangkat Sejarah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan diberikan semoga bermanfaat.

Wassalaum'alaikum, Wr, Wb.

RAJA SAMU SAMU VI.
De Laatstse Van Koning Stamboom
Abubu – Nusa Laut, Maluku.

Upu Latu M.L. Benny A. Samu Samu.

Alamat : Jl. Sembung I/134.K.P.AD. KODAM – Cibubur. Jakarta Timur 13720. Indonesia
Telp.No.: 0818.08205195 – 0813.81060706. Email : b_samusamu@yahoo.com
Website: www.rajasamusamuvi.blogspot.com

Jakarta, 13 Februari 2012.

Kepada Yth,
Sdr. Ivan Taniputera.
Di –
SURABAYA.

Perihal : Penerbitan Buku Kerjaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Dengan hormat,

Dengan senang sekali kami dari Kesultan Bima, Nusa Tenggara Barat menyambut baik rencana Saudara untuk menrbitkan Buku Kerjaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit, bahwa dahulu banyak Kerajaan dan/atau Kesultanan di bumi Nusantara ini, namun perlu diketahui Saudara bahwa terdapat Kerajan yang menjadi bagian dari suatu Kerjaan yang menjadi penguasa pada saat itu, sehingga Saudara kami sarankan agar lebih teliti dalam memasukan Daftar Kerajaan sebelum penerbitannya.

Kesultanan Bima, sudah lama menginginkan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat mengembalikan Sejarah Kerajaan dan Kesultanan yang pernah ada di bumi Nusantara agar dapat dikenal kembali oleh para generasi muda sebagai tombak dan pemimpin dikemudian hari.

Kami ucapkan selamat bekerja dan sukses kepada Saudara.

KESULTANAN BIMA
Nusa Tenggara Barat

DR. Hj. Siti Mariyam Salahoeddin, SH.

Perihal: Rekomendasi Buku Kerajaan Pasca
Keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Kepada,
Penulis/Pnerbit Buku
Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.
Di –
SURABAYA.

Up. Sdr. Ivan Taniputera,

Assalamu'alaikum, Wr, Wb,
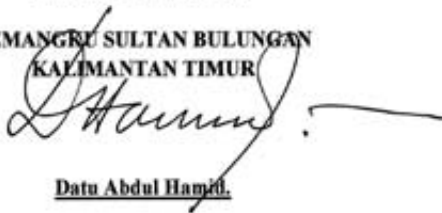
Riwayat atau Sejarah Kerajaan – Kerajaan yang ada di Bhumi Nusantara – Indonesia ini tidaklah sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan Riwayat atau Sejarah Kerjaan yang ada i negara – negara lain, karena dari seluruh negara yang paling banyak Raja atau Sultan hanya ada di Bhumi Nusantara, yang bila diperhitunkan mulai dari Aceh sampai dengan Papua, tidak kurang lebih sebanyak 700-an, dan Daftar Raja dan Sultan atau Kerajaan dan Kesultanan Nusantara sudah diinventarisir oleh Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara – Indonesia.

Di Borneo atau lebih dikenal dengan sebutan Kalimantan mulai dari Barat, Tengah, Selatan dan Timur dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Utara yang masuk dalam wilayah Negara Brunei, Malaysia, banyak sekali Kesultanan yang saling terkait hubungan keluarga dan saudara, yang asal usulnya dari keturunan Melayu, Dayak, Cina dan Jawa yang mempunyai pengaruh adat dan budaya yang cukup kuat.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Jakarta, 13 Februari 2012.

PEMANGKU SULTAN BULUNGAN
KALIMANTAN TIMUR

Datu Abdul Hamid.

Kesultanan Atjeh Darussalam, 13 Februari 2012.

Kepada Yth.
Sdr. Ivan Taniputera.
Selaku Penulis/Penerbit Buku
Kerajaan – Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.
Di –
SURABAYA.

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Pertama – tama kami atas nama seluruh keluarga besar Kesultanan Atjeh – Provinsi Nagroe Aceh Darussalam menyampaikan semoga Sdr. Ivan senantiasa dalam lindungan Tuhan Y.M.E. Amin.

Bersama ini pula kami menyampaikan bahwa kami sangat senang sekali mengetahui bahwa Saudara selaku Penulis rencana akan menerbitkan sebuah buku yang mengenalkan serta mengingatkan kembali Kerajaan – Kerajaan dan Kesultanan – Kesultanan yang dahulu ada di bhumi nusantara tercinta ini. Kami sangat bangga dan menyambut baik rencana Saudara untuk memberikan perbendaharaan bagi masyarakat bangsa Inonesia dan khususnya lagi bagi para pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), Sekaolah Lanjutan Atas (SLTA), dan masyarakat umumnya, semoga apa yang Saudara buat akan memberikan manfaat agar masyarakat bangsa Indonesia tidak melupakan Sejarah yang pernah ada sejak dahulu, sehingga dengan demikian akan memperkuat jatidiri kita sebagai bangsa yang beradab dan bermatabat.

Harapan kami buku Sejarah Kerajaan – Kerajaan dan Kesultanan – Kesultanan nantinya dapat menjadi bekal pelajaran di Sekolah – Sekolah di seluruh Inonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikna, dan kami ucapkan selamat serta sukses.

KESULTANAN ATJEH DARUSSALAM
Putro Mahkota Raja Ibrahim bin
Sultan Alaidin Muhammad Daudsyah
Sultan Atjeh Darussalam,

Teungku Putro Afiatuddin Cahaya Nur Alam
Penerus/Pewaris Kesulatanan Atjeh Darussalam

Jakarta, 13 Februari 2012.

Kepada Yth,
Sdr. Ivan Taniputera.
Penulis/Penerbit Buku
Di – SURABAYA
JAWA TIMUR

Hal.: **Buku Kerjaan Pasca Keruntuhan Kerjaan Majapahit.**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb,

Kami atas nama Pewaris dari Kerjaan Inderapura, Pesisir Sumatera Barat yang merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di Sumatera, mempunyai riwayat dan hubungan dengan Raja – Raja berasal dari Tanah Jawa.
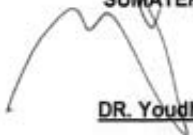
Sehingga rencana Sdr. Ivan Taniputera untuk menerbitkan buku Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit, kami atas nama Pewaris dari Kerajaan Inderapura mendukung baik, dengan harapan Buku tersebut dapat menjadi acuan dan pedoman bagi generasi penerus sejarah Bangsa dan Negara Indonesia ini.

Maka dengan ini pula kami menyampaikan selamat bekerja dan sukses kepada Saudara, diakhir dengan ucapan terima kasih atas inisiatif dan partisipasi Saudara dalam memelihara dan menjaga serta mengangkat kembali nilai – nilai sejarah masyarakat Indonesia yang kaya Adat – Istiadat dan Budaya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Jakarta, 13 Februari 2012.

PEWARIS KERAJAAN INDERAPURA
SUMATERA BARAT

DR. Youdhi Prayogo.

Perihal: Penerbitan Buku Kerajaan Pasca
Keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Kepada,
Yth. Sdr. Ivan Taniputera.
Di –
SURABAYA.

Shalom,

Pertama – tama beta sampaikan Salam Sejahtera kepada kita semua, semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati dan melindungi kita semua dalam beraktivitas. Amin.

Sehubungan dengan berita Sdr. Ivan Taniputera akan menerbitkan Buku Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajan Majapahit, beta menyambut baik sekali, karena bahwa Kerajaan Majapahit dalam masa kejayaannnya mempunyai hubungan yang erat dengan Raja – Raja yang ada di Nusantara – Indonesia ini, namun saran beta agar Saudara selaku Penulis dan Penerbit, dimana mudah - mudahan Buku yang mempunyai nilai Sejarah Bangsa dan Negara Indonesia tersebut dapat digali lebih dalam agar dapat memberi hasil yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai gnerasi penerus Bangsa dan Negara yang tidak melupakan Sejarah Bangsa yang bernilai tinggi.

Semoga Saudara dapat menambah atau mengambil perbendaharaan menyangkut kebenaran dari suatu Kerajaan – Kerajaan secara langsung ke daerah atau wilayah – wilayah yang masuk dalam Daftar Pustaka Buku

Jakarta, 13 Februari 2012.

RAJA KAIBOBO
SERAM BAGIAN BARAT - MALUKU

Upu Latu Intan Permata Samuel Lodewijk Riry.

Jakarta, 13 Februari 2012.

Kepada Yth,
Sdr. Ivan Taniputera.
Penulis / Penerbit
Buku Kerjaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.
Di –
SURABAYA – JAWA TIMUR.
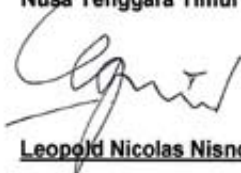
Salam sejahtera,

Suatu kebahagian bagi kami sebagai bangsa yang beradab dan bermatabat atas rencana Sdr. Ivan Taniputera untuk menerbitkan buku Kerjaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit, dan seperti yang Saudara ketahui bahwa Kerajaan Kupang adalah salah satu dari banyak Kerajaan yang ada di Nusantara – Indonesia, yang sejak dahulu sampai sekarang masih eksis keberadaannya dan masih memiliki kewibawaan di daerah Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami berharap buku Saudara kelak dapat memberi manfaat bagi Bangsa dan Negara dalam memelihara, menjaga dan memperkenalkan kekayaan Bangsa dan Negara Indonesia.

Atas nama Raja Kupang, dan seluruh masyarakat daerah Kupang , Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Sdr. Ivan Taniputera.

RAJA KUPANG
Nusa Tenggara Timur

Leopold Nicolas Nisnoni.

Perihal : Rekomendasi Penerbitan Buku Kerajaan Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Jakarta, 13 Februari 2012.

Kepada,
Yth. Sdr. Ivan Taniputera.
Penulis / Penerbit Buku Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.
Di –
SURABAYA – JAWA TIMUR.

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.,

Bersama ini kami atas nama Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa kami menyambut baik rencana Saudara akan menerbitkan Buku Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit yang Saudara, dan harapan kami Pertama Saudara harus lebih teliti dengan kehati-hatian dalam merangkum Kerajaan – Kerajaan yang akan dimasukan dalam buku tersebut, sehingga data yang ada dalam buku tersebut benar – benar akurat dan dapat diterima semua pihak.

Semoga Buku tersebut dapat menjadi materi pembelajaran di Sekolah – Sekolah, dan generasi muda dapat mengetahui kekayaan budaya yang ada di Nusantara – Indonesia.

Kedatuan Luwu, Sulawesi Selatan mengucapkan Selamat bekerja dan sukses kepada Sdr. Ivan Taniputera.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

KEDATUAN LUWU
SULAWESI SELATAN

Andi Siti Huzaimah Opu Cening Luwu.

Jakarta, 13 Februari 2012.

Kepada Yth,
Sdr. Ivan Taniputera.
Penulis/Penerbit Buku Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit.
Di –
TEMPAT.

Assalamu'alaiku, Wr, Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini untuk dan atas nama Kesultanan Deli, Sumatera Utara menyambut baik rencana penerbitan Buku tentang Kerajaan Pasca Keruntuhan Kerajaan Majapahit yang Sdr. Ivan Taniputera, semoga buku tersebut bermanfaat bagi seluruh masyarakat serta menjadikan pustaka sejarah bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Kami berharap buku tersebut dapat masuk dalam kurikulum bagi pelajar di Sekolah Tingkat SD, SLTP, dan SLTA di seluruh negeri Indonesia.

Salam sukses dan selamat kepada Saudara.

Wassalamu'laikum, Wr, wb.

KESULTANAN DELI
Kepala Urung Sepuluh Dua
Kuta Kesultanan Deli

Datuq Adil Freddy Haberham.

DAFTAR ISI

Bab 1

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara pascakeruntuhan Majapahit mencakup rentang waktu semenjak kurang lebih tahun 1500 hingga awal era kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa ini adalah masuknya agama Islam dan datangnya kolonialisme Barat. Kedua peristiwa ini mewarnai bangkitnya berbagai kerajaan di seluruh penjuru Kepulauan Nusantara. Memang benar bahwa agama Islam telah hadir di Kepulauan Nusantara beberapa ratus tahun sebelumnya, terbukti dengan berdirinya Samudera Pasai selaku kerajaan Islam tertua di ujung utara Sumatera pada sekitar abad ke-13. Tetapi, perkembangannya yang pesat di Kepulauan Nusantara baru terjadi setelah keruntuhan Majapahit dan berdirinya Demak. Kita menyaksikan bahwa kerajaan yang berdiri di pesisir pantai utara Pulau Jawa tersebut banyak berperanan dalam penyebaran Islam. Di samping itu, majunya perdagangan antarpulau juga turut mendorong bangkitnya berbagai kerajaan yang tersebar di seantero Kepulauan Nusantara. Berikut ini akan diulas berbagai tonggak sejarah penting di atas, sebagai gambaran kondisi umum kurun waktu saat terbentuknya kerajaan-kerajaan tersebut.

A. KEDATANGAN AGAMA ISLAM

Sejarah membuktikan bahwa kedatangan agama atau budaya baru sedikit banyak menghasilkan perombakan terhadap tatanan kemasyarakatan. Kedatangan agama Hindu dan Buddha pada awal-awal abad Masehi membangkitkan berbagai kerajaan

bercorak Hindu Buddha; seperti Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di pulau Jawa bagian Barat. Satuan kesukuan dan adat lama berubah menjadi sistem kerajaan seperti di India. Ini tercermin dalam silsilah raja pada prasasti Raja Mulawarman di Kutai, di mana kakek Mulawarman disebutkan bernama Kudungga. Nama ini tampaknya merupakan nama Indonesia asli dan belum terpengaruh budaya India; sementara itu, anaknya yang bernama Aswawarman (ayah Mulawarman) jelas sekali mencerminkan nama bercorak India. Kendati demikian, pengaruh India ini tak menjangkau seluruh Kepulauan Nusantara dan di beberapa tempat tidak pula bertahan lama. Selain itu, pengaruhnya tidak pula menjangkau seluruh lapisan kehidupan dan masyarakat. Banyak tradisi-tradisi lama tetap dipertahankan dan bercampur dengan aspek-aspek budaya serta agama baru.

Kini dengan hadirnya agama Islam, para penguasa kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya baik bercorak Hindu Buddha ataupun tradisional, mulai menganut Islam, terutama setelah kurun waktu 1500-an. Dengan demikian, bangkitlah kesultanan-kesultanan Islam di berbagai penjuru Nusantara, yang diawali oleh Samudera Pasai pada kurang lebih abad ke-13. Tatanan pemerintahan lama mulai digantikan oleh yang baru. Gelar-gelar lama digantikan oleh berbagai gelar baru yang bercorak Islam. Sebagai contoh, para raja setelah menganut agama Islam mulai menyandang gelar sultan.

Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan dan siapakah yang membawa agama Islam ke Kepulauan Nusantara. Masih ada berbagai teori tentang hal itu. Kendati demikian, dapat dipastikan bahwa masuk dan berkembangnya agama Islam di berbagai pelabuhan Majapahit erat hubungannya dengan aktivitas perdagangan; terutama setelah berdirinya Samudera Pasai[1]. Terdapat dugaan bahwa para pedagang dari Gujarat, India telah menyebarkan agama ini seiring dengan kegiatan perniagaan mereka[2]. Waktu masuknya agama Islam di berbagai pelosok Kepulauan Nusantara tidaklah sama dan sangat bervariasi. Menjelang abad ke-15, rakyat pesisir timur Sumatera telah menganut agama Islam. Ma Huan mencatat bahwa pada tahun 1416 sudah ada orang-orang Muslim yang berdiam di Gresik. Hal ini membuktikan bahwa sebelum runtuhnya Majapahit, telah terbentuk komunitas Muslim di pesisir utara Pulau Jawa. Tradisi setempat meriwayatkan bahwa orang-orang Arab sudah ada di Kepulauan Maluku pada kurang lebih abad ke-14. Konon, raja Ternate bernama

1. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia III*, halaman 5.
2. Lihat *Nusantara: Sejarah Indonesia*, halaman 93.

Molomateya (1350–1357) telah menjalin persahabatan dengan orang-orang Arab, yang mengajarkan teknik pembuatan kapal padanya[3]. Hanya saja, kontak yang terjadi belumlah dalam bidang keagamaan. Raja Ternate yang benar-benar menganut agama Islam adalah Sultan Zainal Abidin (1486–1500). Sementara itu, agama Islam baru tersiar di Sulawesi pada kurang lebih awal abad ke-17. Di tempat-tempat lain, Islam bahkan masuk pada masa-masa yang lebih kemudian lagi.

Perang saudara akut yang melanda pusat pemerintahan Majapahit menjadikan kota-kota pelabuhan semakin otonom dan akhirnya melepaskan diri dari pemerintah pusat. Demak, selaku salah satu bandar perdagangan utama di pesisir utara Jawa bertambah pesat perkembangannya dan bertumbuh menjadi suatu kerajaan di bawah Raden Patah. Bangkitnya Demak ini menenggelamkan sisa-sisa kejayaan Majapahit. Kemudian Banten dan Cirebon menyusul tumbuh menjadi kerajaan-kerajaan Islam utama di Jawa bagian barat. Banten belakangan menghancurkan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat.

Tersebarnya agama Islam tak luput dari peran ulama yang dengan giat berupaya menyiarkan keyakinannya. Di Jawa para penyebar agama Islam pertama bergelar *sunan* dan disebut *wali*. Dalam naskah-naskah *babad* dikenal adanya sembilan *wali* yang tersohor dengan sebutan *walisongo*. Nama-nama mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Drajat, Sunan Gunungjati (Syarif Hidayat), Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Muria, dan Sunan Rahmat. Peran para ulama tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, melainkan merangkap pula sebagai penasihat dalam berbagai urusan pemerintahan dan hal-hal lainnya. Sunan Gunungjati juga seorang raja, sehingga digelari *pandita ratu*. Sunan Kalijaga tersohor sebagai ulama yang berkecimpung di dunia seni. Sunan Giri kerap memberikan restunya saat penobatan seorang raja. Selain *walisongo*, di Jawa masih ada tokoh-tokoh yang disetarakan dengan para *wali*, seperti Maulana Magribi, Syekh Bentong, Syekh Majagung, dan lain sebagainya. Patut pula disebutkan nama Syekh Yusuf, ulama asal Makassar, yang menjadi penasihat Sultan Ageng Tirtayasa. Di luar Jawa dikenal nama Dato' ri Bandang yang menyebarkan agama Islam sampai ke Sulawesi dan Tuan Tunggang Parang, penyiar agama Islam di Kalimantan.

3. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia III*, halaman 21. Menurut sumber tersebut raja ini dikatakan memerintah 1350–1357. Tetapi, buku *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950* menyebutkan bahwa raja ini bernama Ngolo Macahaya.

B. KEMAJUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU DAN PELAYARAN

Kepulauan Nusantara memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Masing-masing daerah mempunyai hasilnya sendiri-sendiri; sehingga memicu perdagangan antar kawasan yang telah berlangsung semenjak lama. Lebih jauh lagi, perdagangan antar pulau ini pada gilirannya membangkitkan berbagai kerajaan maritim, seperti Samudera Pasai, Aceh, Indragiri, Jambi, Demak, Palembang, Banten, Cirebon, Gowa, Banjar, Ternate, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan jenis lebih mengandalkan perdagangan dan pelayaran ketimbang kegiatan agraris. Komoditas yang dihasilkan masing-masing pulau itu antara lain dapat dapat dirangkum sebagai berikut.

- Sumatera: emas, belerang, besi, kain sutra damar, madu, lilin, tir, lada, beras, dan lain sebagainya. Hasil-hasil ini dipertukarkan dengan kain yang berasal dari India.
- Jawa Barat: emas, beras, lada, asam Jawa.
- Jawa Tengah dan Timur: emas, beras, lada, asam Jawa, batu-batu berharga, kain, dan lain sebagainya. Komoditas ini dipertukarkan dengan kain India yang bermutu baik dan barang-barang yang berasal dari Cina.
- Kalimantan: beras, emas, intan, dan lain sebagainya.
- Sulawesi: beras, emas, dan lain sebagainya.
- Bali dan Nusa Tenggara: beras, kain bermutu kasar, kuda, cendana, dan lain sebagainya.
- Maluku: pala, cengkih, sagu, dan rempah-rempah.

Tomé Pires (1468-1539)[4], penjelajah Portugis, menjadi saksi mata ramainya perdagangan antar pulau di atas. Menurut catatannya, di awal abad ke-16, Banda telah mengimpor kain halus buatan negeri-negeri Asia Barat, seperti India yang dibawa oleh para pedagang Portugis. Sementara itu, pedagang-pedagang kecil dari Jawa dan Melayu memperdagangkan kain yang lebih kasar mutunya. Para penguasa Gresik di pesisir pantai utara Jawa kerap membeli seluruh kain berkualitas halus tersebut. Selain dijual kembali ke Banda dan kawasan sekitarnya, tekstil bermutu tinggi itu dijadikan pakaian raja atau disimpan sebagai barang berharga di perbendaharaan kerajaan. Kain

4. Ia tiba di Malaka pada 1512 dan mengunjungi Jawa Barat dan Timur. Penjelajah Portugis ini pernah diangkat sebagai duta besar ke Cina pada 1517, di mana ia ditawan dan kemudian meninggal dalam tahanan tersebut. Karyanya yang terkenal dan kerap menjadi salah satu rujukan sumber sejarah masa itu adalah *Suma Oriental.*

yang kasar juga laku di Banda karena dapat ditukar dengan sagu dan rempah-rempah dari Halmahera dan Papua. Sagu yang diperoleh pula dari Kepulauan Kei dan Aru merupakan makanan pokok penduduk Maluku dan dapat disimpan sebagai bekal selama melayari samudera karena tahan lama.

Pada zaman itu, mata uang belum banyak dikenal, terutama di Kepulauan Nusantara bagian timur, sehingga sagu banyak dipakai sebagai alat tukar, dan demikian pula halnya dengan lada. Komoditas perdagangan penting lainnya adalah rempah-rempah, terutama pala dan cengkih. Maluku Utara merupakan penghasil cengkih yang penting; namun karena sebagian warganya memusatkan perhatian pada budi daya tanaman tersebut, bahan pangan harus didatangkan dari tempat lain. Sedangkan pala banyak tumbuh di Maluku Selatan (seperti Seram dan Ambon) dan Banda. Kendati demikian, pada abad ke-16, harga pala dan cengkih ini pernah jatuh; sehingga para petani pala di Banda lebih suka membuang atau membakar palanya, ketimbang menjualnya dengan harga rendah. Rempah-rempah ini pula yang menjadi sumber kemalangan bagi Maluku, karena belakangan bangsa Barat memaksakan monopoli dagang terhadap komoditas tersebut, sebagaimana halnya dengan hasil-hasil bumi dari bagian Kepulauan Nusantara lainnya. Bangsa Barat yang kelak menguasai Maluku tidak mengizinkan perdagangan rempah-rempah dengan bangsa lain kecuali mereka sendiri. Bahkan Belanda pernah melarang budi daya rempah-rempah di luar Maluku.

Hasil bumi penting di belahan barat Kepulauan Nusantara adalah lada. Pelabuhan-pelabuhan utama pengekspor lada terletak di pantai timur Sumatera (Pasai, Pidie, Jambi, Palembang, serta Lampung), pantai barat Sumatera (Pariaman, Tiku, beserta Barus), dan Jawa Barat (Banten).

Selain perdagangan dan pelayaran domestik, hubungan diplomatik dengan luar negeri telah terjalin setidaknya semenjak abad pertama dan kedua Masehi. Hal ini terbukti dari berita China yang mencatat adanya hubungan diplomatik dengan pelbagai kerajaan pada masa itu dan ditemukannya tembikar China di berbagai penjuru Kepulauan Nusantara. Beberapa pelabuhan yang letaknya strategis, seperti Aceh, Banten, dan Demak, makin kaya dan berkembang menjadi kesultanan yang kuat berkat perdagangan ini. Sumatera mengekspor pula hasil-hasilnya, seperti emas, kelembak, kapur, barus, dan lain sebagainya ke Malaka, tetapi para pedagang Gujarat juga datang sendiri membelinya.

Budak termasuk komoditas yang ramai diperdagangkan, mengingat pada saat itu jumlah penduduk belum banyak, sehingga terjadi kelangkaan tenaga kerja. Untuk itulah, budak-budak didatangkan demi menutupi kekurangan tersebut. Budak belian biasa diperkerjakan di istana raja, bangsawan, dan orang kaya. Mereka diperlukan pula sebagai tenaga kerja kasar di pelabuhan atau pendayung kapal perang. Seseorang terjerumus ke dalam perbudakan karena kalah perang atau terjerat hutang. Biasanya terdapat hukum adat yang menyatakan bahwa kedudukan sebagai budak karena terlilit hutang itu sementara saja sifatnya. Jadi, bila telah sanggup melunasi hutangnya, ia harus dibebaskan dari perbudakan; walaupun hal ini merupakan sesuatu yang sulit dan bahkan mustahil. Ada kalanya seseorang dihukum menjadi budak karena melanggar hukum adat. Budak-budak diperoleh pula melalui penyerbuan ke daerah lain dan menawan penduduknya; di mana selanjutnya para tawanan itu dijual sebagai hamba. Daerah penghasil budak yang umum adalah Palembang, pedalaman Jawa Barat, Blambangan, dan Nusatenggara. Kelak dalam menjalankan usahanya, VOC memanfaatkan pula tenaga para budak, seperti di perkebunan pala Banda yang diduduki Belanda semenjak tahun 1621.

Tumbuhan Pala
Sumber: wikipedia.org
Reproduksi dari *Köhler's Medizinal-Pflanzen*,
karya Franz Eugen Köhler (1887)

Perkembangan teknologi pelayaran di kalangan rakyat Indonesia telah berlangsung semenjak kurang lebih abad ke-9. Hal ini terbukti dari relief candi Borobudur yang menampilkan gambar berbagai jenis perahu, seperti perahu lesung, perahu bercadik, dan kapal besar yang tak bercadik[5]. Tetapi kemajuan dalam bidang pelayaran ini tidak sama di tiap-tiap bagian Kepulauan Nusantara. Maluku merupakan salah satu kawasan yang maju pelayarannya. Antonio Galvao, wakil Portugis di Maluku, melaporkan pada kurang lebih tahun 1544 mengenai bagaimana cara orang Maluku Utara membuat kapalnya. Bagian tengah kapal bentuknya menyerupai telur dengan kedua ujungnya melengkung ke atas. Oleh karenanya, kapal semacam itu dapat bergerak maju atau

5. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia III*, halaman 112.

mundur. Proses pembuatannya tidak menggunakan paku ataupun dempul, melainkan bagian-bagiannya diikat dengan tali ijuk.

Jenis-jenis kapal lain yang umum di Maluku adalah *juanga*, *lakafunu*, *kora-kora*, dan *kalulus*. Tetapi yang terpenting di antara semuanya adalah *juanga*. Konon kapal jenis ini sanggup memuat hingga 200 orang. Menurut laporan Willem Lodwycksz yang turut serta dalam ekspedisi Belanda pimpinan Cornelis de Houtman, orang Banten telah mempunyai kapal perang mirip kapal galai bertiang dua. Beberapa orang Portugis diberitakan telah membocorkan teknik pembuatan kapal model Eropa pada raja-raja setempat.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan alat-alat navigasi apa yang dipergunakan para pelaut Indonesia zaman itu. Tidak diketahui apakah mereka telah menggunakan kompas atau belum. Namun, kendati tak menggunakan kompas sekalipun tampaknya hal itu bukan masalah besar bagi mereka. Para pelaut di Kepulauan Nusantara kemungkinan terbiasa berlayar berdasarkan pengalaman atau berpedoman pada bintang-bintang di langit. Pengenalan terhadap alat-alat navigasi kemungkinan terjadi saat perjumpaan dengan pedagang-pedagang Arab dan China yang marak mengunjungi Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-9.

C. KEDATANGAN BANGSA BARAT

Kedatangan bangsa Barat ke Kepulauan Nusantara tak dapat dipisahkan dari perkembangan politik, keagamaan, sosial, beserta budaya yang terjadi di benua Eropa dan sekitarnya. Semenjak lama rempah-rempah merupakan komoditas yang digemari di Eropa. Harganya di Eropa sangatlah tinggi, karena biaya transportasinya yang besar. Kepulauan Nusantara–penghasil rempah-rempah tersebut–telah tersohor sejak dahulu sebagai sumber kekayaan Timur Jauh. Berakhirnya Abad Gelap dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan serta pelayaran mendorong Bangsa Barat mencari sumber rempah-rempah tersebut. Misi ini juga dipicu oleh semangat keagamaan, karena pada saat itu terjadi persaingan dengan para pedagang Arab dan Turki yang beragama Islam; apalagi setelah jatuhnya Konstantinopel di tahun 1453 ke tangan Turki. Di antara berbagai bangsa Eropa yang pertama kali mengembangkan teknologi penjelajahan samudera mereka adalah Portugis.

Dengan mengitari ujung selatan Afrika (Tanjung Harapan), Vasco da Gama, yang diperintahkan raja Portugis agar menghentikan seluruh aktivitas pelayaran

Arab antara Mesopotamia dan India, berhasil tiba di Goa, India, pada tahun 1498. Penjelajah Portugis lainnya, Alfonso de Albuquerque, berlayar lebih ke timur lagi. Ia memantapkan jalur perdagangan Portugis di Timur Jauh dan kerap memerangi para pedagang Gujarat yang berlalu lalang antara India–Malaka. Albuquerque menghimpun armada yang terdiri dari 19 kapal dan 800 prajurit serta bertolak menuju Malaka. Ia memaksa sultan agar memberikan izin pendirian benteng Portugis di wilayah kekuasaannya. Sultan menolaknya dengan tegas, karena merasa bahwa hal itu sungguh merendahkan martabat negerinya. Tentu saja penolakan itu terdengar di telinga orang-orang Portugis sebagai tantangan berperang.

Serangan pertama Portugis dilancarkan tak lama kemudian, tetapi boleh dibilang berujung pada kegagalan. Baru pada serangan kedua tanggal 10 Agustus 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah menduduki Malaka, mereka membangun benteng-benteng pertahanan dan tanpa ampun merusak pemakaman penduduk setempat guna memperoleh bahan bangunan. Karena kerap memaksakan monopoli perdagangannya, kedatangan Portugis memancing ketidak-puasan para pedagang Asia lainnya, seperti Arab dan China. Dengan demikian, tak sedikit di antara mereka yang mengalihkan aktivitas perniagaannya ke tempat lain. Selain itu, Albuquerque melakukan kesalahan utama dengan menghukum mati pedagang utama Jawa karena dituduh menentang Portugis.

Penerapan monopoli dagang ini dimaksudkan Portugis sebagai perang ekonomi atau pembangkrutan terhadap Turki, saingan mereka yang beragama Islam. Menurut orang-orang Portugis, "setiap kilo pala yang diambil dari pedagang Muslim adalah pukulan terhadap kemakmuran kota-kota perdagangan di Suriah dan Mesir."[6] Albuquerque menyadari bahwa sebagai strategi terbaik, mereka harus mengikat persahabatan dengan para penguasa Maluku, kepulauan penghasil rempah utama di Nusantara. Ternyata, masalahnya tak sesederhana itu, karena penguasa Maluku telah menganut agama Islam kurang lebih seperempat abad sebelumnya.

Albuquerque mengutus D'Abreu berlayar ke Maluku pada akhir 1511. Tetapi, ekspedisi ini boleh dikatakan tidak membuahkan hasil maksimal. Salah satu perahu mereka hilang antara Jawa dan Banda. Dua kapal lainnya tiba di Banda dan sudah cukup puas dengan memuat rempah-rempah dari sana. Mereka tidak berniat lagi melanjutkan perjalanannya ke Ternate dan Tidore. Dalam perjalanan pulang ke

6. Lihat *Nusantara: Sejarah Indonesia*, halaman 101.

Malaka, satu di antara dua kapal yang tersisa terdampar di Ambon karena amukan badai. Hanya satu kapal saja yang tiba dengan selamat di Malaka.

Meskipun ekspedisi D' Abreu sebagaimana yang diuraikan di atas tak sesuai harapan, peristiwa ini sedikit banyak membuka lembaran baru bagi hubungan antara Portugis dan raja-raja di Maluku, karena awak kapal yang karam di Ambon itu kemudian meneruskan perjalanannya ke Ternate. Dengan demikian, sultan Ternate mendengar perihal mengenai kedatangan bangsa Portugis. Perdagangan kemudian terjalin baik antara Ternate dan Portugis. Waktu itu, di Maluku sedang berkecamuk persaingan akut antara Ternate dan Tidore. Kedua belah pihak mengundang Portugis yang dianggap unggul persenjataannya agar membangun benteng di tempat mereka. Baik raja Ternate maupun Tidore ingin menjadikan Portugis sebagai pelindung mereka. Selain itu, raja-raja Maluku mengetahui bahwa Portugis membeli komoditas rempah-rempah mereka dengan harga lebih tinggi dibandingkan para pedagang lainnya. Para raja telah menyadari bahwa dengan menerima perlindungan terhadap musuhnya, kedudukan mereka akan berada di bawah raja Portugis. Kendati demikian, hal ini bukanlah persoalan besar bagi mereka.

Tentunya, Portugis harus menentukan pihak dan mereka akhirnya memilih Ternate. Otomatis dengan dijatuhkannya pilihan ini, Tidore menjadi musuh mereka. Sebagai imbalan atas perlindungan tersebut, sultan Ternate memberikan izin monopoli perdagangan rempah bagi Portugis. Persekutuan antara Ternate dan Portugis ini sebenarnya boleh dipandang aneh; mengingat raja Ternate menerapkan agama Islam lebih ketat ketimbang Tidore. Tetapi pada kenyataannya aliansi ini dimungkinkan juga mengingat keuntungan dari segi perniagaan dan pertahanan yang dipetik kedua belah pihak. Berdasarkan fakta di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perseteruan antara sesama raja-raja Maluku mengakibatkan kepulauan tersebut jatuh ke tangan Portugis.

Portugis terus berupaya meluaskan pengaruhnya melalui jalinan hubungan dengan raja-raja pedalaman yang belum menganut agama Islam, seperti Pajajaran dan Blambangan. Selama bercokol di Kepulauan Nusantara, tidak jarang Portugis terlibat peperangan dengan raja-raja setempat. Aceh yang saat itu diperintah oleh Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu musuh bebuyutan Portugis. Pertempuran yang terjadi antara Aceh dan Portugis membuahkan kemenangan yang silih berganti. Pada tahun 1614, Aceh berhasil mengalahkan Portugis yang menduduki Bintan. Meskipun

demikian, kedigdayaan angkatan perang Sultan Iskandar Muda tidak berlangsung selamanya, karena Aceh kerap menghabiskan tenaganya dalam perselisihan dengan negara tetangganya, seperti Johor, Kedah, dan lain sebagainya. Akibatnya, pada tahun 1629 giliran Aceh menuai kekalahan terhadap Portugis.

Menyaksikan keberhasilan Portugis di Timur Jauh, bangsa-bangsa Eropa lain tidak tinggal diam. Spanyol yang berhasil mematangkan kemampuan navigasi dan teknik pelayarannya memasuki pula era pelayaran samudera. Pada tahun 1521, Magellan tiba di Brunai, pantai utara Kalimantan. Perjalanan diteruskan ke Filipina, tetapi Magellan menemui ajalnya di sana. Rombongan Spanyol ini akhirnya tiba di Maluku. Kehadiran tamu tak diundang ini jelas sekali merupakan mimpi buruk bagi Portugis. Mereka merasakan bahwa orang-orang Spanyol yang baru tiba tersebut berpotensi menjadi pesaing mereka.

Guna menengahi persaingan antara Portugis dan Spanyol, paus selaku pemimpin tertinggi Gereja Katolik mengeluarkan surat keputusan (*bulla*) yang membagi daerah pengaruh kedua bangsa. Pada mulanya Paus Aleksander VI mengeluarkan surat keputusan *Inter Caetera* tanggal 4 Mei 1493–tidak lama setelah Kolombus menemukan benua Amerika. Isinya menetapkan adanya garis khayal yang membujur dari utara ke selatan 300 mil sebelah barat Kepulauan Azores. Seluruh daerah di sebelah barat garis ini menjadi milik Spanyol, sedangkan sisanya di sebelah timur menjadi hak Portugis. Raja John II dari Portugal kurang puas dengan ketetapan ini dan meminta pada raja Spanyol, Ferdinand berserta ratunya, Isabella, agar menggeser batas daerah pengaruh ini lebih ke barat lagi.

Spanyol menyepakatinya dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Tordesillas (7 Juni 1494), yang memindah letak garis batas mereka ke 370 *league* sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Kini letaknya kurang lebih 48° hingga 49° Bujur Barat. Pembagian ini tidak menyelesaikan permasalahan, karena bumi berbentuk bulat. Sekalipun dua orang berjalan ke arah berlawanan, yakni barat dan timur, suatu saat mereka akan bertemu juga. Titik pertemuan mereka ternyata adalah Kepulauan Maluku. Tibanya armada Spanyol di Maluku diprotes oleh Portugis, yang mereka tuduh sebagai pelanggaran Perjanjian Tordesillas. Guna mengatasi perselisihan antara kedua kekuatan adidaya di Eropa masa itu, diadakanlah Perjanjian Saragossa (22 April 1529). Garis demarkasi baru ditetapkan 297 1/2 *league* sebelah timur Maluku. Berkat perjanjian ini Portugis berkuasa penuh di Maluku, tetapi penaklukan

Spanyol atas Pilipina tampaknya merupakan pelanggaran bagi perjanjian tersebut. Penerapan perjanjian-perjanjian di atas mengundang permasalahan tersendiri, karena kemampuan menetapkan jarak atau lokasi beserta garis lintang dan bujurnya belum semaju sekarang; sehingga kerap terjadi persengketaan berkenaan dengannya. Hasil perhitungan letak Maluku antara para ahli geografi serta navigasi Spanyol dan Portugal saja berselisih 47° [7].

Karena Portugis telah menerima pinangan Ternate, kedatangan orang-orang Spanyol disambut gembira oleh sultan Tidore. Ia mengundang orang-orang Spanyol sebagai pengimbang atas aliansi Portugis–Ternate. Dengan demikian, meskipun perdamaian di Eropa tercapai antara Portugis dan Ternate melalui Perjanjian Saragossa, tetapi angkatan perang mereka terlibat persaingan di Timur Jauh. Sementara itu, pemain lain, bergerak semakin dekat ke Kepulauan Nusantara.

Belanda kini turun ke gelanggang persaingan memperebutkan daerah-daerah jajahan. Pada 5 Juni 1596, empat kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman merapat di pantai barat Sumatera dan tiba di Banten. Sebenarnya Belanda telah mempersiapkan diri semenjak lama. Ahli geografi terkemuka Belanda, Jan Huyghen van Linschoten, hidup bertahun-tahun di Goa, India, dan mengumpulkan berbagai informasi penting mengenai pelayaran. Para pelaut Belanda sendiri telah terbiasa berlayar ke Brazil, baik dengan mengibarkan bendera mereka sendiri atau Portugis. Karena itu, tibanya mereka di Kepulauan Nusantara hanya masalah waktu saja. Awak kapal Belanda yang tiba di Banten tersebut disambut baik oleh penduduk setempat.

Sultan Banten mengikat perjanjian persahabatan dengan para pelaut Belanda, tetapi perilaku kasar Cornelis de Houtman merusaknya tak lama kemudian. Persahabatan akhirnya dapat dipulihkan kembali dan Cornelis de Houtman meneruskan pelayarannya ke arah barat. Di Madura terjadi insiden yang dipicu oleh kecurigaan dan kesalah-pahaman awak kapal Belanda terhadap dua orang utusan penguasa setempat. Akibatnya, kapal-kapal Belanda segera berlabuh meninggalkan tempat itu dan bertolak kembali ke negerinya. Kedatangan empat kapal dagang di atas merupakan perintis bagi misi-misi perdagangan Belanda di kemudian hari.

Tidak berapa lama setelah itu, kapal-kapal dagang Belanda semakin ramai mengunjungi Timur Jauh. Cornelis de Houtman memimpin lagi suatu armada

---

7. Lihat *Nusantara: Sejarah Indonesia*, halaman 113.

dagang pada tahun 1599. Tetapi kecerobohan dan perilaku kasarnya menyebabkan dirinya menemui ajal di Aceh. Frederick, saudaranya, ditawan oleh orang Aceh selama dua tahun dan terus-menerus terancam dihabisi nyawanya. Namun selama masa penahanannya itu, ia berkesempatan menyusun kamus Melayu-Belanda serta terjemahan Melayu bagi doa-doa Kristen. Meskipun demikian, armada Belanda di bawah pimpinan van Neck berhasil mencapai Maluku.

Armada-armada dagang Belanda yang semakin ramai mengunjungi Kepulauan Nusantara tidak disambut gembira oleh orang-orang Portugis. Saat itu, kedigdayaan mereka telah menurun drastis. Tidak berbeda dengan Spanyol, orang-orang Belanda itu dianggapnya sebagai saingan-saingan mereka. Suatu misi Portugis dibawah pimpinan de Brito diutus ke Banten guna menjelek-jelekkan pelaut-pelaut Belanda tersebut di hadapan sultan. Namun, alih-alih berhasil dalam misinya, malah orang-orang Portugis yang mendatangkan reputasi buruk bagi diri mereka sendiri. Raja-raja Nusantara justru gembira dengan persaingan antara Portugis dan Belanda, karena berkesempatan menaikkan harga komoditas mereka beberapa kali lipat. Kepala pelabuhan setempat menaikkan bea pelabuhan setiap bulannya. Namun para pedagang Belanda yang berlomba-lomba mendapatkan kargo terbaik selalu bersedia membayar berapapun harga yang diminta para penguasa setempat. Relasi Belanda dengan para penguasa setempat mulanya baik-baik saja, tetapi belakangan timbul konflik karena mereka mulai memaksakan monopoli dagangnya guna mematikan para pesaing lainnya.

Portugis menghadapi masalah di Maluku karena kesewenang-wenangannya, sultan Ternate, Khairun, akhirnya bangkit melawan Portugis. Hubungan Portugis dan Ternate memburuk. Apalagi setelah Sultan Khairun ditipu dan dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Pimpinan perlawanan kini beralih pada Sultan Baabullah, pengganti Khairun. Kedudukan Portugis mulai terdesak dan terhalau dari Maluku pada 28 Desember 1577. Alur sejarah selanjutnya tak terpisahkan dari perkembangan penting yang terjadi di benua Eropa. Semenjak tanggal 15 November 1582, Portugis disatukan dengan Spanyol di bawah Raja Felipe II. Raja Spanyol memerintahkan agar anak buahnya yang berada di Pilipina membantu Portugis mendapatkan lagi daerah kekuasaannya di Ternate.

Upaya ini menemui jalan buntu akibat kemunculan armada Belanda di bawah pimpinan Steven van der Haghen. Satu per satu benteng Portugis jatuh ke tangan

Belanda. Steven van der Haghen merebut benteng Belanda di Amboina pada 23 Februari 1605 dan setelah itu menyusul benteng-benteng lainnya. Tetapi pasukan Spanyol sanggup merebut kembali benteng di Tidore pada tahun 1606 karena hanya dijaga sejumlah kecil pasukan Belanda saja. Benteng Gamalama direbut pula dari tangan Belanda dan Sultan Said, raja Ternate ditawan serta diasingkan ke Pilipina.

Belanda mengirimkan pasukannya pada tahun 1607 dan dengan dukungan rakyat Ternate yang membenci Spanyol karena mengasingkan rajanya melakukan perlawanan terhadap Spanyol. Kedudukan Portugis dan Spanyol semakin terdesak dari Kepulauan Nusantara, sehingga Belanda berkesempatan menanamkan hagemoni mereka. Akhirnya yang tersisa sebagai daerah kekuasaan Portugis hanyalah ujung timur Pulau Timor, yang bertahan dalam genggaman mereka hingga 1975.

Guna memantapkan kegiatan perniagaannya, Belanda mendirikan persekutuan dagangnya yang disebut *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Banten pada tahun 1603. Kepalanya yang pertama adalah Francois Wittert. Pengambil keputusan tertinggi para persekutuan dagang ini adalah 17 orang direktur. Mereka berhak mengangkat seorang gubernur jenderal VOC yang berkedudukan di Batavia. Parlemen Belanda memberi kuasa pada VOC melakukan monopoli perdagangan di Asia. Armada-armada dagang mereka juga dilengkapi senjata-senjata berat guna menghadapi saingan mereka dan menghadapi perlawanan rakyat setempat. Demi memaksakan monopolinya, VOC menggerogoti kekuasaan raja-raja Nusantara baik melalui peperangan ataupun diplomasi.

Beberapa kawasan di Indonesia jatuh ke tangan VOC. Kurang lebih setengah abad kemudian, VOC menguasai jalur-jalur perdagangan antara Teluk Benggala serta Srilanka hingga mencapai Nagasaki di Jepang. Kendati demikian, wilayah yang berada di bawah pengendalian mereka belum terlampau luas. Dalam rangka memaksakan monopoli perdagangan, VOC tidak jarang menghadapi perlawanan gigih raja-raja Nusantara, seperti Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Sultan Hasanuddin dari Gowa. Kendati demikian, semua perlawanan ini akhirnya berhasil dipatahkan dan kebanyakan di antara mereka dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan serta memberikan keleluasaan semakin besar pada VOC dalam mencampuri permasalahan internal kerajaan mereka. Inilah yang merupakan titik pangkal keruntuhan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara.

Bangsa Eropa lain yang pernah mengunjungi Kepulauan Nusantara adalah Inggris. Tetapi pengaruh mereka tidak besar dan tidak panjang usianya. Penguasaan riil Inggris atas Kepulauan Nusantara hanyalah berlaku antara 1811 hingga 1816. Selain itu, mereka pernah pula menduduki Bengkulu, sebelum wilayah itu diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Orang-orang Inggris datang ke Aceh pada tahun 1636 dan disambut baik oleh sultan. Mereka dibebaskan dari bea perdagangan dan diberi izin mendirikan kantor dagang. Kini giliran Belanda yang tidak senang terhadap kehadiran mereka dan menganggap para pedagang Inggris itu tak lebih dari kaum perompak. Awalnya, hubungan terjalin baik antara Inggris dan Aceh, tetapi sultan akhirnya menyadari bahwa Inggris merupakan sahabat Portugis–musuh bebuyutan Aceh; sehingga ketidak-senangan terhadap Inggris mulai merebak. Sikap Aceh ini menguntungkan Belanda, karena VOC terlibat permusuhan dengan Portugis.yang berbasis di Malaka.

VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799. Semenjak saat itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Kepulauan Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dalam kurun waktu antara abad ke-19 hingga 20, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda makin diperluas hingga mencapai pelosok-pelosok terjauh Kepulauan Nusantara. Pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia berupaya menanamkan kekuasaan mereka dengan memaksa para raja dan penguasa setempat menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai *lang contract* (*lange verklaring* atau plakat panjang) dan *korte verklaring* (plakat pendek). Kendati *lang contract* pada hakikatnya menyatakan kesetaraan kekuasaan antara berbagai kerajaan tersebut dengan pemerintah kolonial Belanda, pemegang inisiatif sebenarnya adalah Belanda. Sedangkan *korte verklaring* intinya adalah pernyataan takluk terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka wajib menyetujui ditempatkannya pejabat-pejabat pemerintah kolonial Belanda sebagai pengawas bagi jalannya roda pemerintahan beserta segenap kebijakan di negeri mereka, yang sudah pasti menguntungkan Belanda; di mana segenap arahan pejabat-pejabat Belanda ini harus dipatuhi oleh para raja dan penguasa setempat.

Proses pengakuan atas kedaulatan pemerintah kolonial Belanda ini tak selamanya berjalan mulus dan kerap dilanda gejolak. Tidak jarang Belanda harus mengerahkan kekuatan militernya guna memaksa para raja mengakui kekuasaan mereka. Raja Bone dan Gowa, sebagai contoh, pada awal abad ke-20 melakukan perlawanan yang gigih

terhadap pasukan kolonial, tetapi dapat dikalahkan. Secara umum, kondisi Indonesia saat itu terpecah belah atas ratusan kerajaan dan kesatuan adat, yang tak jarang bermusuhan satu sama lain. Itulah sebabnya, tidak sulit bagi Belanda menerapkan politik *devide et impera*nya dalam memangkas kekuasaan para raja atau pemuka masyarakat setempat. Pada tahun 1894, Belanda menaklukkan Kerajaan Mataram di Lombok dengan dalih melindungi masyarakat Sasak yang tertindas. Lalu satu persatu kerajaan-kerajaan di Bali masuk ke dalam payung kekuasaan pemerintah kolonial. Kini tinggal Aceh yang masih memusingkan Belanda dan proses penaklukannya memakan biaya serta korban jiwa yang tak sedikit.

D. PENGARUH KOLONIALISME BARAT TERHADAP KERAJAAN-KERAJAAN DI KEPULAUAN NUSANTARA

Semenjak abad ke-16, Belanda menggencarkan aneksasi wilayah dan monopoli perdagangan. Tindakan ini menyusutkan kekuasaan para penguasa tradisional, terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Salah satu penentang yang gigih terhadap sistem monopoli Belanda adalah Sultan Hasanuddin dari Gowa. Dalam surat balasannya terhadap VOC, Sultan Hasanuddin menyatakan: "Apakah maksud Anda bahwa Tuhan telah mempersembahkan untuk perdagangan Anda semata pulau-pulau ini yang letaknya begitu jauh dari negeri Anda?..."[8] Monopoli perdagangan yang dipaksakan VOC dirasa Gowa bukan hanya sebagai ancaman dalam bidang perekonomian melainkan juga politik.

Seiring dengan kekalahan yang diderita kerajaan-kerajaan Nusantara, Belanda melakukan campur tangan terhadap urusan internal dan birokrasi negara-negara tradisional tersebut. Masalah suksesi pemerintahan dan pengangkatan pejabat harus dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan Belanda. Sebagai contoh, setiap sultan Bima yang baru harus melapor pada pejabat pemerintah kolonial di Makassar. Hak-hak para penguasa tradisional dalam memungut pajak serta bea ekspor-impor diambil alih oleh Belanda. Sebagai gantinya, para penguasa tradisional menerima tunjangan dari pemerintah kolonial, sehingga memperbesar ketergantungan mereka pada Belanda. Sementara itu, rakyat selaku salah satu sumber daya kerajaan dipaksa oleh Belanda bekerja paksa (rodi) demi kepentingan penjajah[9]. Seluruh kebijakan

8. Lihat *Warisan Arung Palakka*, halaman 60.
9. Sebenarnya, sebelum kedatangan Belanda rakyat kerajaan yang kalah juga dipaksa bekerja atau diperbudak oleh kerajaan pemenang. Sebagai contoh adalah rakyat Bone yang diperbudak oleh Gowa.

kolonialis ini makin menggerus kekuasaan para raja, disamping menambah penderitaan rakyat.

Agar kekuasaan Belanda bertambah kokoh, diadakanlah perjanjian dengan para penguasa tradisional, yang tak jarang mengabaikan nilai-nilai tradisi setempat. Kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan lemah umumnya menerima saja perjanjian atau kontrak politik tersebut. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan yang lebih kuat melakukan perlawanan bila merasa kedaulatan mereka terancam. Setelah menundukkan para penguasa yang membangkang tersebut, Belanda tidak jarang menghapuskan kerajaan mereka. Contoh kerajaan yang kurang beruntung dan menjadi korban penghapusan Belanda ini antara lain: Banjar, Palembang, Jambi, Aceh, Lombok, dan lain sebagainya. Tetapi penghapusan kerajaan tidak semata-mata disebabkan kekalahan dalam perang. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda melakukan reorganisasi administrasi pemerintahan. Beberapa kerajaan yang lebih kecil digabungkan menjadi satu sehingga menjadi kerajaan yang lebih besar. Sebagai contoh, *nusak-nusak* (kerajaan) di Pulau Rote digabungkan menjadi Swapraja (Kerajaan Rote). Kerajaan Kupang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil pada tahun 1917. Sebaliknya, beberapa persekutuan adat dinaikkan kedudukannya sebagai kerajaan atau swapraja. Manggarai sebagai contoh, baru diakui sebagai kerajaan tersendiri pada awal abad ke-20.

Pemerintah kolonial Belanda mengakui kerajaan-kerajaan tradisional sebagai daerah berpemerintahan sendiri (*zelfbestuurende landschappen*) atau swapraja. Apa yang disebut swapraja ini adalah satuan pemerintahan otonom yang dikepalai para raja atau penguasa tradisional setempat. Sementara itu, pejabat pemerintah kolonial hanya ditempatkan langsung sebagai pengawas. Para pemimpin swapraja itulah yang berhadapan langsung dengan rakyatnya. Jumlah swapraja atau daerah yang bersifat kerajaan ini terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Beberapa swapraja dihapuskan atau digabungkan dengan swapraja lainnya. Kerajaan-kerajaan yang telah dihapuskan tidak memperoleh status swapraja dan diperintah langsung oleh Belanda atau berada di bawah koordinasi kerajaan lainnya. Kerajaan Bunut dan Jongkong di Kalimantan, sebagai contoh, ditempatkan langsung di bawah pemerintahan Belanda. Sementara itu, Kerajaan Nita dan Kangae disatukan dengan Sikka dan para rajanya diturunkan statusnya menjadi *kapitan* (penguasa distrik) saja. Hubungan masing-masing swapraja ini dengan pemerintah Hindia Belanda

diatur oleh kontrak politik berupa *korte verklaring* yang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal van Heutz (1851–1924) mengeluarkan ketetapan bahwa setiap pergantian raja akan diadakan pembaharuan kontrak. Secara umum kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai daerah swapraja menjamin hak raja menerapkan hukum adat di wilayah wewenangnya; meskipun demikian, kekuasaan raja tidak sebesar masa sebelum pendudukan Belanda.

E. PEMBENTUKAN DAERAH SWAPRAJA

Raja selaku kepala swapraja berdasarkan perjanjian yang ditanda-tanganinya wajib memberikan wewenang-wewenang tertentu pada Belanda apabila dikehendaki. Isi perjanjian juga lebih bersifat paksaan, karena wajib diterima oleh raja bersangkutan; baik berupa *lange* atau *korte verklaring*. Swapraja diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom, termasuk dalam hal penerapan hukum-hukum adat–sebab perjanjian atau kontrak yang ditanda-tangani para raja tidak mengatur semua aturan ketatanegaraan yang berlaku. Oleh karenanya, wewenang atau status suatu daerah swapraja mencakup:[10]

- Wewenang-wewenang yang tertera dalam kontrak politik dengan pemerintah kolonial beserta ketetapan-ketetapan Belanda lainnya;
- Hukum adat ketatanegaraan swapraja itu sendiri dan hukum tertulisnya; dan
- Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum antarnegara (volkenrecht), seperti larangan melakukan perompakan di lautan bebas dan lain sebagainya.

Dengan masuknya swapraja-swapraja yang ada sebagai bagian Hindia Belanda, secara otomatis mereka tergabung pula dengan masyarakat internasional. Itulah sebabnya hukum antar negara berlaku pula bagi masing-masing daerah swapraja.

Pertimbangan Belanda dalam membentuk pemerintahan swapraja itu didasari oleh berbagai pertimbangan. Pertama-tama Belanda memanfaatkan para raja sebagai kepanjangan tangannya karena tak memiliki cukup aparat dalam mengendalikan pemerintahan di seluruh Kepulauan Nusantara. Alasan lainnya, pemerintah kolonial berpandangan bahwa rakyat daerah jajahannya lebih mudah dikendalikan oleh pemimpin tradisionalnya sendiri. Oleh karenanya, penerapan sistem swapraja ini menguntungkan Belanda karena tak perlu berhubungan langsung dengan rakyat jajahannya. Asal-muasal daerah swapraja dapat dikategorikan menjadi: 1) Kerajaan

10. Lihat *Swapradja: Sekarang dan dihari Kemudian*, halaman 3.

yang sejak dahulu merupakan kerajaan berdaulat atau berdiri sendiri; 2) Swapraja yang berasal dari bagian suatu kerajaan yang melepaskan diri dari induknya; 3) Kesatuan adat atau suku bangsa yang tak memiliki raja atau kepala sendiri; dan 4) Swapraja baru hasil penggabungan beberapa kerajaan yang ada. Contoh kategori pertama adalah Kerajaan Gowa, Bone, Asahan, dan lain sebagainya. Kategori kedua umpamanya adalah Kerajaan Una-Una yang dipisahkan dari Tojo. Sedangkan contoh bagi kategori ketiga adalah Tanah Toraja yang dijadikan swapraja pada tahun 1946. Contoh kategori keempat adalah Swapraja Kupang yang terbentuk dari kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Belanda membagi wilayahnya menjadi berbagai karesidenan yang dibawahi seorang residen. Karesiden dibagi lagi menjadi beberapa *afdeeling* yang dipimpin seorang asisten residen. Wilayah *afdeeling* terbagi menjadi beberapa *onderafdeeling* dengan seorang kontrolir sebagai pimpinannya. Masing-masing *onderafdeelin*g ini baru dibagi menjadi beberapa swapraja (*zelfbestuurende landschappen*). Seorang kontrolir berfungsi pula sebagai pengawas bagi kepala-kepala swapraja (*zelfbestuurder*) yang berada di dalam ruang lingkup daerah wewenangnya. Semasa pendudukan Jepang sistem administrasi pemerintahan warisan Belanda ini tidak banyak berubah. Hanya namanya saja yang diganti. Sebagai contoh, kontrolir diganti sebutannya dengan *bunken-karikan*; sedangkan kepala swapraja atau raja disebut *suco*.

F. SEPINTAS UNDANG-UNDANG SWAPRAJA

Sebelum membahas mengenai swapraja (*zelfsbestuurende landschappen*), perlu diketahui terlebih dahulu pembagian jenis daerah jajahan, yakni daerah yang diperintah langsung oleh Belanda (*gouvernementsgebied* atau *rechtstreeksch bestuurgebied*) dan daerah yang pemerintahannya diserahkan pada raja-raja atau rakyat setempat. Daerah jenis kedua inilah yang dikenal sebagai swapraja (*zelfsbetuurende landschappen*). Keduanya merupakan bagian daerah jajahan yang disebut Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie)[11]. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, hubungan antara pemerintah kolonial dengan swapraja, diatur dengan kontrak politik, baik berupa *lange* maupun *korte verklaring*, yang pada intinya merupakan pengakuan terhadap

11. Lihat *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Kerajaan-kerajaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, halaman 33.

pertuanan Kerajaan Belanda. Pengakuan tersebut dimaksudkan agar Kerajaan Belanda benar-benar menjadi penguasa tertinggi (*opperbestuur*) atas Hindia Belanda[12].

Kemudian akan dibahas persamaan beserta perbedaan antara *lange* dan *korte verklaring*. Persamaannya adalah pemerintah-pemerintah swapraja tidak diperkenankan mengadakan hubungan dan perjanjian dengan bangsa asing. Musuh kerajaan Belanda juga akan menjadi musuh pemerintah swapraja dan begitu pula sebaliknya (pasal 2 *korte verklaring* jenis umum dan pasal 4 *lange verklaring* jenis Oostkust). Sementara itu perbedaannya, *korte verklaring* pada umumnya mencakup tiga pasal saja terkait pengakuan atas pertuanan pemerintah kolonial, sedangkan *lange verklaring* berisikan beberapa puluh hak dan kewajiban swapraja terhadap pemerintah kolonial. Oleh karenanya, secara ringkas dapat dikatakan bahwa di dalam *lange verklaring* terdapat pemisahan yang jelas antara hak dan kewajiban, namun tidak demikian halnya dengan *korte verklaring*. Terdapat swapraja yang diikat dengan *korte verklaring* dan ada pula *lange verklaring*, namun kedudukan tinggi rendah swapraja-swapraja tersebut tidaklah ditentukan oleh hal itu. Swapraja itu sendiri tidak identik dengan raja-raja dan perangkat yang memerintahnya, melainkan telah menjadi suatu badan tersendiri (*rechtspersoon*), dengan para raja sebagai pengemudinya[13].

Kini akan diulas Peraturan Swapraja (*Zelfsbestuursregelen*) yang dikeluarkan pada 10 Mei 1927. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa wilayah swapraja tidak mencakup kawasan lautnya: „Djajahan landschap itoe tiada sekali-kali melipoeti djajahan laoet." Meskipun demikian, penduduk swapraja boleh memanfaatkan hasil lautnya sesuai dengan adat beserta tradisi setempat (pasal 1 ayat 2)[14]. Pasal 2 membahas mengenai penetapan wilayah dan penyelesaian perselisihan wilayah antar swapraja. Pasal 3 mengenai penyerahan tanah pada pemerintah kolonial jika diminta: „Djikalau Goebernemen menghendaki tanah didalam seboeah Landschap, maka tanah itoe haroes diserahkan atau diberikan oleh Zelfsbestuur tidak dengan bajaran serta Goebernemen boleh memilih tanah itoe, akan tetapi Goebernemen wadjib membajar ganti keroegian jang patoet kepada jang berhak dan djoega dengan membajar kepada Landschap itoe dalam hal jang dimaksoed dalam ajat 2 pasal 30."

12. Lihat *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Kerajaan-kerajaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, halaman 49.
13. Lihat *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Kerajaan-kerajaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, halaman 54.
14. Lihat *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Kerajaan-kerajaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, halaman 273.

Pada pasal 6 dibahas mengenai pemberhentian kepala swapraja jika tak dianggap cakap dalam memerintah. Pasal 6 ayat 1 menyatakan: „Djikalau ada pangkat radja Zelfsbestuur (bestuurder) terboeka atau dijkalau seorang bestuurder tiada tjakap melakoekan djabatannja atau berkelaoean tidak patoet maka Kepala pemerintahan daerah memasoekkan porstel kepada Toean Besar Gobernoer Djenderal akan mengangkat penggantinja itoe atau akan memperhentikan bestuurder jang tiada tjakap atau jang berkelakoean tidak patoet itoe."[15] Seorang kepala swapraja menjadi wakil seluruh swaprajanya (pasal 10 ayat 1).

Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman, terdapat hal-hal yang diadili berdasarkan peraturan swapraja atau hukum setempat, namun ada juga yang harus diadili oleh hakim pemerintah kolonial Belanda, di mana hal ini diatur dalam pasal 17. Contoh kasus-kasus yang harus diadili oleh hakim pemerintah kolonial antara lain adalah: "b. sebab kedjahatan dan pelanggaran jang meroesakkan keamanan Negeri atau tentang kepoenjaan dan penghasilan Negeri. c. sebab melanggar Oendang-oendang oemoem dan keur daerah, jang berlakoe dilandschap itoe." Pasal 20 menyebutkan bahwa orang asing yang belum mendapatkan izin pemerintah kolonial tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah swapraja. Secara keseluruhan peraturan ini memiliki 31 pasal.

G. SUMBER-SUMBER SEJARAH

Karya sejarah klasik di Kepulauan Nusantara dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama bersifat mitos atau legenda berkenaan dengan masa lalu. Isinya adalah cikal-bakal atau silsilah dan riwayat para penguasa kerajaan tertentu. Oleh karena itu, peristiwa yang digambarkannya meliputi berbagai zaman. Contoh bagi karya sastra jenis ini adalah *Hikayat Raja Pasai*, *Hikayat Banjar*, *Salasilah Kutai*, *Babad Tanah Jawi*, *La Galigo*, dan berbagai *babad* lainnya. Sementara itu, kategori sumber sejarah kedua hanya mengamati suatu peristiwa dalam satu babak saja; seperti: *Hikayat Negeri Johor*, *Tuhfat al-Nafis*, *Aturan Setia Bugis dan Melayu*, *Syair Perang Mengkasar*, *Syair Kerajaan Bima*, dan lain sebagainya[16].Kebanyakan karya-karya klasik ini tidak mencantumkan angka tahun dan peristiwa-peristiwa yang diriwayatkan di dalamnya terkadang bercampur dengan hal-hal gaib dan tak masuk akal. Selain itu, pemberitaan suatu

15. Lihat *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Kerajaan-kerajaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, halaman 273.
16. Lihat *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, halaman 58.

sumber klasik terkadang bertentangan dengan sumber lainnya. Meskipun demikian, karya-karya semacam ini tetapi merupakan sumber kajian sejarah yang berharga dan tak dapat diabaikan begitu saja.

Sumber lain yang tidak kalah pentingnya adalah catatan para pengunjung bangsa Barat, seperti Tomé Pires (1468–1539), Alfred Russel Wallace (1823–1913), dan lain sebagainya. Tomé Pires mulanya adalah seorang apoteker dari Lisabon yang dikirim ke India sebagai agen obat-obatan. Setelah bertugas di Cannanoree dan Cochin di pantai barat India Selatan selama kurang lebih setahun, Tomé Pires dinaikkan pangkatnya dan dikirim ke Malaka oleh Alfonso d.Albuquerque. Semasa bertugas di Malaka itulah, Tomé Pires mengadakan kunjungan ke berbagai penjuru Kepulauan Nusantara, seperti Pantai Utara Jawa. Selanjutnya, ia ditugaskan memimpin sebuah delegasi ke Tiongkok pada tahun 1517. Namun kali ini tugasnya menuai kegagalan, karena kaisar China mendengar perihal penaklukan Portugis terhadap Malaka; padahal Kekaisaran China memihak Malaka. Itulah sebabnya Tomé Pires kemudian ditahan di Tiongkok dan meninggal di sana.

Alfred Russel Wallace menjelajahi Kepulauan Nusantara antara tahun 1854–1860-an dan mencatat mengenai kondisi alam daerah-daerah yang dikunjunginya. Dalam catatannya, Wallace menyebutkan pula perjumpaannya dengan beberapa orang raja di Kepulauan Nusantara. Kendati demikian, karya Wallace ini lebih merupakan informasi berharga mengenai keragaman hayati di Kepulauan Nusantara. Selama pengembaraannya, Wallace mengumpulkan serta mengawetkan berbagai spesies makhluk hidup dan mencatatnya dengan teliti. Uraian Wallace mengenai keadaan alam berbagai penjuru Kepulauan Nusantara sungguh hidup dan menarik diikuti.

Bab 2

KERAJAAN-KERAJAAN DI JAWA DAN MADURA

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI JAWA BARAT

I. BANTEN

a. Berdirinya Kerajaan Banten

Semenjak lama Banten merupakan pusat perdagangan penting di pantai Barat Jawa dan telah menjalin hubungan internasional dengan India serta China. Karenanya, tak mengherankan apabila pedagang-pedagang asing yang berasal dari dua kawasan tersebut banyak berdiam di sana. Pada mulanya Banten merupakan wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Menjelang abad ke-16, kekuatan lain bangkit di pantai utara Jawa Tengah, yakni Demak yang telah menganut agama Islam, di mana kerajaan tersebut merupakan pendorong berdirinya Banten. Penegak atau perintis kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayat (Sunan Gunungjati); sehingga kedua kerajaan yang baru saja disebutkan itu saling bersaudara satu sama lain. Menurut naskah *Sajarah Banten* atau *Babad Banten*, silsilah Sunan Gunungjati adalah sebagai berikut[17]: Nabi Adam–Nabi Sis–Nabi Yunus–Kinayah–Malik–Pasir–Nabi Idris–Saleh–Lamak–Nuhud–Asim–Paseh–Palih–Runi–Saro–Pakir–Najur–Nabi Ibrahim–Nabi Ismail–Sabit–Yasjar–Yurad–Yarad–Japar–Manawi–Udad–Malab–Malah–Ud–Almuhar–Galib–Asim–Abdulmanap–Asim–Abdulmutalib–Abdullah–Nabi Muhammad–

17. Lihat *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, halaman 17.

Patimah–Usen–Jenulabidin–Jenulkubra–Jumadilkubra–Jumadilkabir–Sultan Bani Israil–Mahdum Gunung Jati (Sunan Gunungjati). Meskipun demikian, terdapat perbedaan dengan silsilah yang berasal dari sumber lainnya.

Maulana Hasanuddin (± 1552–1570), pengganti Sunan Gunungjati, memperluas kekuasaannya hingga ke Lampung yang semenjak dulu merupakan salah satu penghasil lada utama. Dengan demikian, ia adalah peletak dasar bagi kemakmuran Banten selaku pusat perniagaan lada di penghujung barat Pulau Jawa. Semasa pemerintahan Hasanuddin, Banten mengalami kemajuan pesat. Banten saat itu merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang mancanegara, seperti Portugis dan China. Kerajaan ini tersohor pula sebagai pusat penyebaran agama Islam, yang pengaruhnya mencapai Lampung, Bengkulu, dan daerah-daerah sekitar Tulangbawang[18].

Dalam bidang kegamaan, pendidikan bagi putra putri raja dipercayakan pada seorang guru agama yang khusus didatangkan guna mengajar keluarga raja. Meskipun demikian, ada kalanya pendidikan putra raja diserahkan pada para kerabat raja yang tak berdiam lagi di keraton. Pangeran Arya, putra Hasanuddin dikirim ke Jepara, yakni tempat kediaman Ratu Kalinyamat, bibi Pangeran Arya. Sesudah kemangkatannya, Hasanuddin dianugerahi gelar anumerta Pangeran Sabakingking sesuai dengan tempat pemakaman beliau.

Penguasa Banten ketiga, Maulana Yusuf (± 1570–1580)–putra tertua Hasanuddin–menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Hindu Pajajaran pada kurang lebih tahun 1579. Ini merupakan akhir kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Seiring dengan penaklukan ini para bangsawan dan elite Sunda berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ia melakukan pula pembangunan perkotaan, mendirikan benteng-benteng berbahan batu bata, dan memajukan pertanian beserta sistem irigasinya. Tidak ketinggalan kemajuan mesjid dan pesantren mendapat perhatian Maulana Yusuf. Raja ketiga Banten ini mangkat pada 1580 dan dianugerahi gelar anumerta Pangeran Pasarean. Beliau dimakamkan tidak jauh dari kota Serang sekarang.

Putra Maulana Yusuf bernama Maulana Muhammad (1580–1596) ketika itu masih berusia 9 tahun. Karenanya, ia diwakili oleh suatu dewan perwalian yang terdiri dari *kadi* (hakim) Surasaji, Senapati Pontang, Dipati Jayanagara, Ki Waduaji, dan Ki Wijamanggala. Berdasarkan penuturan *Sajarah Banten*, *mangkubumi* atau perdana menteri Banten berniat mengangkat Pangeran Japara, paman Maulana

18. Lihat *Sejarah Daerah Jawa Barat*, halaman 73.

Muhammad, sebagai sultan[19]. Tetapi keinginan ini dihalang-halangi dan digagalkan oleh dewan perwalian Peristiwa penting pada zaman pemerintahan Maulana Yusuf adalah kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Maulana Muhammad mangkat di tahun 1596 dalam pertempuran di Palembang. Beliau dikebumikan di kompleks pemakaman yang sama dengan Hasanuddin. Gelarnya setelah wafat adalah Panembahan Sedaing Rana.

Mahkota Kesultanan Banten
(Foto koleksi pribadi, diambil di Museum Nasional Indonesia–Jakarta pada 24 Juli 2010)

b. Perkembangan Kerajaan Banten

Sultan Abdul Kadir atau Abulmufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596–1651)–pengganti Maulana Muhammad–memberikan izin bagi VOC dan EIC membuka lojinya di Banten pada 1603. Timbul kekacauan di Banten, karena para bangsawan berebut jabatan *mangkubumi* dan walinegara. Sewaktu Aria Ranamanggala menjadi *mangkubumi*, Banten mulai bersikap keras terhadap Belanda, Inggris, dan orang-orang asing lainnya. Pada saat bersamaan, Jayakarta atau Sunda Kelapa tumbuh menjadi pesaing Banten. Kendati demikian, perseteruan antara keduanya dapat dicegah oleh Aria Ranamanggala[20]. Belanda berhasil merebut dan menghancurkan Jayakarta

19. Lihat *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, halaman 40.
20. Lihat *Sejarah Daerah Jawa Barat*, halaman 74.

atau Sunda Kelapa serta mengubah namanya menjadi Batavia. Akibatnya, timbul permusuhan yang berujung peperangan antara Banten dengan kompeni Belanda. Perselisihan antara kedua belah pihak diakhiri oleh perjanjian tahun 1645 yang isinya boleh dibilang merugikan Banten.

Kerajaan Banten mengalami kemajuan dan kemakmuran besar semasa pemerintahan Sultan Abdul Fatah yang lebih tersohor sebagai Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1683), pengganti Sultan Abdul Kadir. Beliau berjuang sekeras-kerasnya memajukan perniagaan Banten. Dijalinnya persahabatan dengan para pedagang Inggris, Denmark, dan Perancis. Sultan Ageng Tirtayasa memberi kelonggaran sebesar-besarnya pada mereka agar mau berdagang di Banten. Berkat bantuan mereka, Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan armada dagang yang berlayar hingga ke Pilipina, Makau, India, Persia, dan Arab. Akibat jatuhnya Malaka pada tahun 1641 dan Makassar di tahun 1667 ke tangan Belanda, pedagang-pedagang Tionghua beserta Arab berbondong-bondong mengalihkan aktivitasnya ke Banten. Oleh karena itu, Banten semakin bertambah ramai dan makmur.

Saingan utama Banten hanyalah Batavia yang kini berada di bawah cengkeraman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengusir saingannya itu dan menjalin persekutuan dengan Sultan Sibori dari Ternate. Berkali-kali Sultan Ageng Tirtayasa menyerang benteng-benteng VOC di Sumatera. Demi memperkuat kedudukan Banten, ia mengirim surat ke London pada 1682 guna meminta bala bantuan melawan Belanda. Selain itu, hubungan diplomatik dengan Turki dibinanya pula.

Pamor Kesultanan Banten mulai suram ketika timbul perpecahan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Putra sultan ini pernah berlayar ke Arab guna membina relasi dengan sesama raja Muslim dan sekaligus menunaikan ibadah haji. Setibanya kembali di Banten, Sultan Haji ingin segera menggantikan ayahnya. Kendati demikian, Sultan Ageng Tirtayasa lebih memilih Pangeran Purbaya sebagai penggantinya. Hal ini memicu pertikaian antara keduanya. Sultan Haji lantas meminta bantuan Belanda. Tentu saja Belanda yang gemar memancing di air keruh menyambut dengan gembira permohonan bala bantuan ini. Perang saudara pecah antara Sultan Haji yang didukung VOC dan ayahnya. Sultan Ageng Tirtayasa mendapat bantuan Syekh Yusuf, ulama terkenal asal Makassar yang besar pengaruhnya di Banten.

Kurang lebih bersamaan dengan itu, meletus pemberontakan Trunajaya sehingga perhatian Belanda terpecah dan terpaksa mengirimkan sebagian besar pasukannya mematahkan pergolakan tersebut. Setelah pemberontakan Trunajaya dipadamkan, VOC baru sanggup memusatkan kembali perhatiannya terhadap Banten. Kedigdayaan dan majunya persenjataan Belanda akhirnya tidak mampu lagi ditandingi oleh para pejuang Banten. Menyadari hal ini, Sultan Ageng Tirtayasa yang sebelumnya bertahan di istana Tirtayasa melarikan diri ke Lebak setelah membumi-hanguskan keratonnya tersebut. Belanda terus-menerus mengejar dan mempersempit ruang gerak Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada 1683, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipatahkan dan Sultan Haji (1683–1687) dinobatkan oleh VOC sebagai sultan Banten berikutnya. Dengan demikian, jatuhlah Banten ke dalam genggaman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia dan mangkat pada 1695.

Mesjid di Banten
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, Deel I, halaman 339.

Lukisan Kedatangan Cornelis de Houtman di Ban
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, D

c. Kemunduran dan Keruntuhan Banten

Sultan Haji digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Abdu'l Fadhl Muhammad Yahya (1687–1690). Tidak seperti ayahnya, ia merupakan seorang penentang Belanda. Masa pemerintahannya tidak panjang dan hanya berlangsung selama tiga tahun saja. Ia dikebumikan di samping kanan makam Sultan Hasanuddin di Pasarean Sedakingking. Kendati tak lama memerintah, ia berusaha menata kembali pemerintahan kesultanan yang dirasanya telah porak-poranda.
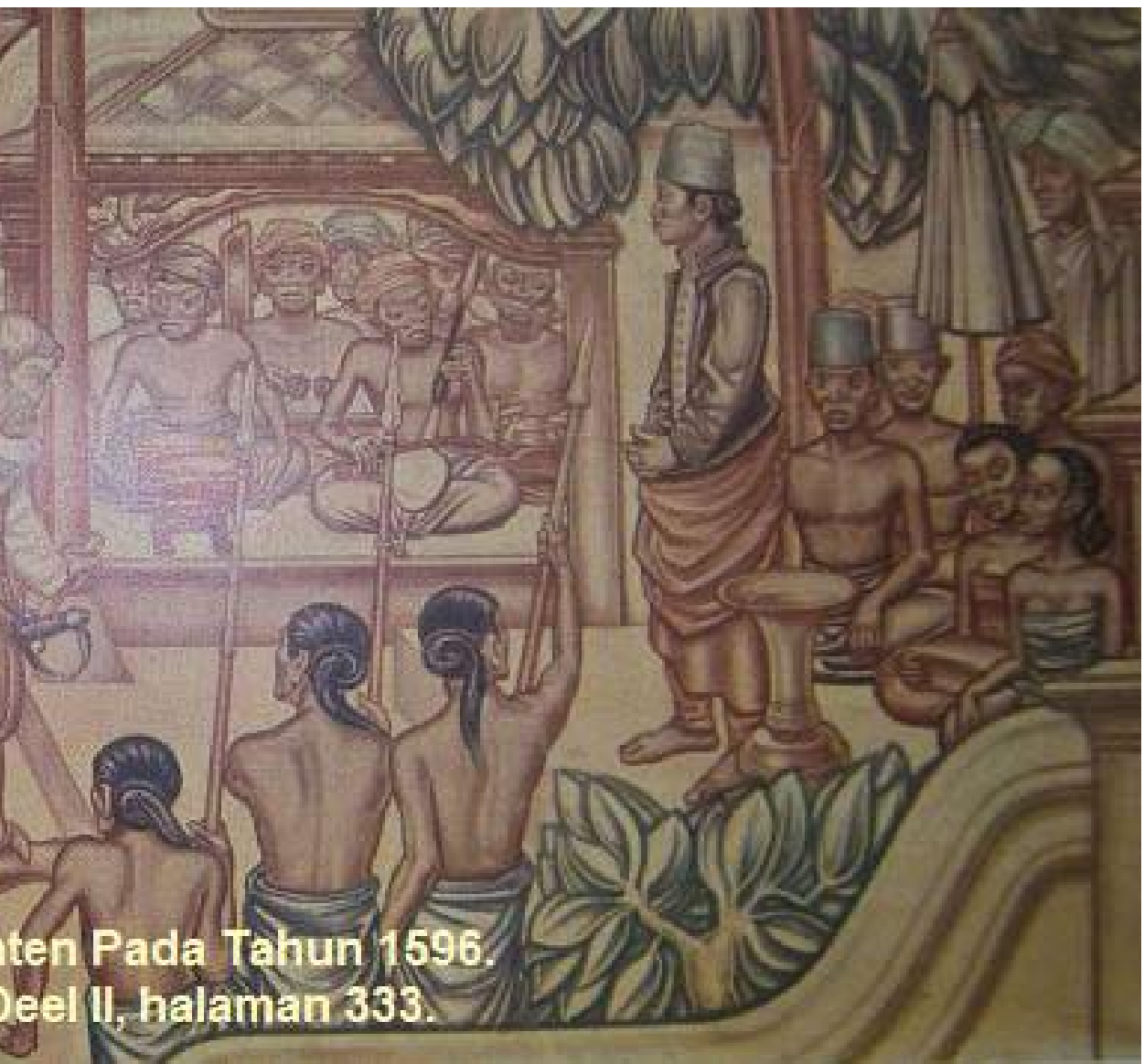
Karena tidak mempunyai putra, sultan digantikan oleh adiknya yang bergelar Abdu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690–1733). Catatan sejarah memperlihatkan kemewahan saat penobatannya. Dentuman meriam berkali-kali ditembakkan dari Istana Surosowan, benteng Speelwijk, dan kapal-kapal kompeni yang berlabuh di Teluk Banten. Tembakan meriam Belanda ini menandakan pengakuan kompeni bagi kekuasaan sultan. Selain itu, juga memperlihatkan pulihnya hubungan baik antara kedua pihak, yang sebelumnya kerap dilanda perselisihan. Diberitakan pula bahwa hadirin yang datang memperoleh hadiah sesuai dengan jabatannya. Seorang

pangeran memperoleh 1 Real Spanyol, Kyai Arya 0,75 Real Spanyol, sedangkan Ngabehi 0,5 Real Spanyol. Hadiah ini menunjukkan jalinan hubungan antara sultan dengan bawahannya, di mana ia memerlukan layanan dan kesetiaan mereka. Sementara itu, rakyat biasa memperoleh hadiah sepotong kecil benang perak. Kaum bangsawan dan penghuni istana mengenakan baju yang sangat mewah. Istana Surosowan dihias dengan kain sutera aneka warna. Utusan-utusan yang berasal dari berbagai daerah taklukan Banten juga datang menghaturkan sembah.

Sultan Banten berikutnya merupakan putra kedua Zainul Abidin dan naik takhta dengan gelar Abdulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733–1747). Ia sangat dipengaruhi oleh permaisurinya yang bernama Ratu Syarifat Fatimah. Semasa pemerintahannya kerap terjadi pemberontakan rakyat Banten, karena mereka dipaksa oleh kompeni menanam tebu, kopi, dan komoditas lainnya yang sanggup mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dagang tersebut. Kemudian, komoditas yang ditanam rakyat itu dibeli dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh Belanda. Karena fitnahan permaisurinya, sultan diasingkan ke Ambon oleh VOC. Sebagai penggantinya diangkat putra Ratu Fatimah dengan suaminya terdahulu, seorang letnan Melayu dari Batavia. Gelar bagi sultan baru ini adalah Sultan Syarifuddin Ratu Wakil (1747–1750). Meski secara teoritis ia merupakan penguasa tertinggi Banten, tetapi kendali pemerintahan berada di tangan Ratu Fatimah. Kesultanan kembali dirudung pemberontakan rakyat, yang antara lain dipimpin oleh Ki (Kyai) Tapa dan Ratu Bagus Buang, karena rakyat tidak menyukai ratu tersebut. Para pemuka istana sendiri kurang puas dengan gaya kepemimpinan ratu yang jarang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan[21]. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda mengasingkan Ratu Fatimah ke Saparua dan Sultan Syarifuddin ke Banda serta mengangkat adik Sultan Zainul Arifin, yang bernama Pangeran Arya Adisantika sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Abdulma'ali Muhammad Wasi'Zainul 'Alimin (1750–1753). Peristiwa ini menandakan kemunduran kekuasaan para sultan Banten, karena pengangkatan dan pemberhentian sultan kini diatur oleh Belanda.

Tentu saja, seperti di bagian Kepulauan Nusantara lainnya, sultan baru yang diangkat oleh Belanda diharuskan menandatangani suatu kontrak politik, tetapi isinya sangat merugikan pihak kesultanan. Pergolakan di kalangan rakyat masih terus saja berlanjut. Dengan harapan agar kerusuhan cepat berakhir, Belanda memberhentikan

21. Lihat *Sejarah Indonesia Modern*, halaman 162.

Sultan Zainul 'Alimin dan mengangkat Pangeran Gusti, putra tertua Sultan Zainul Arifin yang sebelumnya diasingkan ke Srilanka, sebagai sultan baru dengan gelar Sultan Abdu'l Nasr Muhammad Arif Zainul Asiqin (1753–1773). Setelah sultan wafat, putranya naik takhta dengan gelar Sultan Abdu'l Mafakhir Muhammad Aliuddin (Aliuddin I, 1773–1799). Ia digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Muhidin dengan gelar Sultan Sultan Abdu'l Muhammad Muhidin Zainussolihin (1799–1801). Sultan ini tidak lama memerintah dan dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Tubagus Ali. Peristiwa yang baru saja disebutkan mencerminkan adanya intrik dalam Kesultanan Banten. Secara perekonomian, Banten telah mengalami kemunduran drastis dan berada di ambang kehancuran.

Penguasa berikutnya, Sultan Abdu'l Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802), putra Sultan Aliudin dari seorang selir, hanya sempat berkuasa selama satu tahun. Ia wafat setahun setelah dinobatkan. Penggantinya, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802–1803), juga memerintah selama setahun saja. Meskipun demikian, ia dinobatkan dalam suasana yang penuh kemegahan. Perayaan dilangsungkan selama berhari-hari dan dentuman meriam terdengar setiap hari, baik dari kapal perang Belanda, benteng Speelwijk, maupun Istana Surosowan sebagai tanda penghormatan. Saat tibanya hari penobatan, panji-panji serta bendera nampak berkibar di mana-mana. Di perkampungan China juga dikibarkan bendera-bendera negerinya dan terdengar pula alunan alat musik-musik tradisionalnya. Musik Eropa dan tradisional dimainkan demi memeriahkan acara ini. Sultan juga membagi-bagikan hadiah berupa uang bagi para prajurit yang hadir. Secara ringkas, perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi Kesultanan Banten yang sedang menjelang ajalnya ini tetap berniat menampilkan sisa kejayaan mereka. Sementara itu, pihak Belanda juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang unjuk kekuatan. Dentuman meriam yang tiada habis-habisnya itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Belanda memiliki banyak amunisi dan kekuatan militer yang hebat. Fakta sejarah membuktikan bahwa inilah upacara besar terakhir yang dilaksanakan Kesultanan Banten.

Takhta Kesultanan Banten selanjutnya diduduki oleh putra kedua Sultan Aliuddin yang naik takhta dengan gelar Sultan Aliuddin II (1803–1808). Ia berselisih paham dengan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Akibatnya Belanda menyerang Keraton Surosowan dan menangkap serta mengasingkan sultan ke Ambon. Belanda lalu mengangkat Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808–1809)

sebagai penggantinya. Saat itu, kekuasaan sultan boleh dikatakan telah terhapuskan. Wilayahnya langsung diperintah oleh Belanda dan sultan mendapatkan gaji sebesar 15.000 Real per tahunnya. Kesultanan Banten boleh dikatakan telah berakhir. Kendati demikian, rakyat yang merasa tidak puas dengan kenyataan ini kerap menimbulkan gangguan keamanan terhadap Belanda sehingga mereka mencurigai bahwa ini semua didalangi oleh Kesultanan Banten. Belanda lantas menangkap Sultan Aliyuddin dan memenjarakannya di Jakarta. Bahkan, tindakan ini belum dirasa cukup sehingga Belanda juga meluluh-lantakkan Istana Surosowan.

Kerabat kesultanan yang masih hidup lalu menyingkir ke Istana Kaibon yang terletak 1 kilometer di sebelah selatan Surosowan. Sebagai sultan baru diangkatlah Muhammad Syafiudin (1809–1832), yang sebenarnya hanya berlaku sebagai kepala keluarga kesultanan saja dan tanpa kekuasaan politis sama sekali. Ketika Inggris berkuasa di Indonesia antara tahun 1811–1816, mereka memaksa sultan turun takhta dan menyerahkan negerinya pada pihak Inggris. Ini merupakan penghapusan secara resmi Kesultanan Banten. Kendati demikian, ia masih boleh menyandang gelar sultan dan memperoleh tunjangan 10.000 Ringgit Spanyol per tahun dari pihak Inggris. Kesultanan hanya tinggal namanya saja. Pada 1832, Belanda mengasingkan Sultan Syafiudin ke Surabaya.

d. Sistem Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan

Banten diperintah oleh seorang sultan dan tatanan pemerintahan mirip dengan Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Kendati demikian, raja-raja Banten pertama belum bergelar sultan dan menyandang gelar *panembahan* saja. Selain itu, mereka juga digelari *maulana* yang berarti "tuan" atau "penguasa."[22] Gelar sultan sendiri baru dipakai pada 1638[23], yakni semasa pemerintahan Sultan Abdul Kadir (1596–1651). Calon pengganti sultan adalah putra mahkota yang *digelari pangeran dipati anom* atau *pangeran ratu*. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan akan dibantu oleh mangkubumi (setingkat perdana menteri) beserta dewan menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Para penguasa Banten pada kesempatan-kesempatan tertentu mengadakan pertemuan dengan para pejabat atau rakyat kebanyakan. Saat berlangsungnya pertemuan, sultan biasanya duduk di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Apabila tidak ada tempat duduk, hadirin boleh duduk berdekatan dengan sultan.

---

22. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia III*, halaman 235.
23. Lihat *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, halaman 208.

Pertanyaan yang diajukan sultan tatkala berlangsungnya audiensinya biasanya seputar keadaan daerah masing-masing, perdagangan di pasar, dan kondisi berbagai pelabuhan. Selanjutnya, sultan akan menanyakan pula kondisi-kondisi negara-negara lainnya, seperti Aceh, Jambi, Gowa, Palembang, Mataram, dan lain sebagainya. Beliau menanyakan pula perihal Batavia yang dipandangnya sebagai benteng terhadap agresi Mataram. Selain itu, ia akan menanyakan masalah peradilan, karena segenap perkara yang berlarut-larut akan dimintakan keputusan sultan. Pertemuan akan ditutup dengan pandangan sultan mengenai kondisi umum negerinya dan acara santap bersama. Ketika memasuki musim penghujan acara pertemuan ini lebih jarang digelar. Di Banten tempat berlangsungnya audiensi disebut *dipangga*.

Keluarga raja di Banten disebut *warga* dan mereka biasanya hadir saat berlangsungnya audiensi antara sultan dan rakyatnya. Kendati demikian, interaksi antara golongan bangsawan dan keluarga raja sangat terbatas. Tidak hanya status mereka sebagai kerabat raja berperan sebagai dinding pembatas, melainkan juga kondisi ekonomi mereka yang jauh berada di atas rakyat kebanyakan. Wujud fisik bagi sekat ini adalah tembok keraton, yang memisahkan tempat kediaman kaum bangsawan dengan rakyat jelata.

e. Perekonomian

Kesultanan Banten boleh dikatakan mengalami kejayaan karena kegiatan perdagangan dan perkebunan ladanya. Saat kebutuhan atau permintaan lada sedang meningkat pesat, penduduk mengalihkan kegiatan pertaniannya pada budidaya lada. Namun, bila permintaan menurun mereka kembali bertani. Tatkala Belanda mengepung Banten, armada dagang yang hendak membeli lada tidak dapat merapat di kota pelabuhan tersebut sehingga warga terpaksa kembali menanam padi.

Pada masa Tomé Pires, Banten masih menduduki tempat kedua setelah Sunda Kalapa (kelak berganti nama menjadi Jayakarta, Batavia, dan terakhir Jakarta). Di pelabuhan ini berkumpul para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, seperti Palembang, Pariaman, Lawe, Tanjungpura (Kalimantan Selatan), Makassar, Jawa Timur, dan Madura. Sementara itu, kapal-kapal dari Kepulauan Maladewa juga datang untuk mengangkut budak belian. Banten berhasil merebut Sunda Kalapa pada tahun 1527 sehingga kegiatan perniagaan di sana banyak dialihkan ke Banten yang semakin menanjak kejayaannya. Kini akan dianalisa beberapa musabab kemunduran Banten sebagai kota pelabuhan. Pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan

Suasana Pasar di Banten
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie,

putranya, Sultan Haji, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas adalah salah satu penyebabnya. Faktor lain adalah dikuasainya Jayakarta (dahulu Sunda Kalapa dan kemudian Belanda mengganti namanya menjadi Batavia) oleh VOC pada tahun 1619. Agar pusat perniagaan dapat mereka alihkan ke Batavia, VOC memblokade Banten, sehingga makin sedikit kapal dagang yang mengunjunginya. Arsip VOC berangka tahun 1643 menyatakan bahwa perniagaan Banten telah pindah ke Batavia. Jadi sampai di sini, dapat disaksikan beberapa kali perpindahan pusat perniagaan–mulai dari Sunda Kalapa ke Banten dan kembali ke Sunda Kalapa lagi.

Sebagai kota pelabuhan yang ramai, Banten didatangi oleh pedagang-pedagang baik dari dalam maupun luar negeri. Para pedagang mancanegara yang singgah di Banten ini membuka perkampungannya sendiri-sendiri. Dengan demikian

Deel II, halaman 327.

terbentuklah perkampungan Pegu, Siam, Persia, Arab, Turki, dan China. Sementara itu, para pedagang dari dalam negeri sendiri juga tidak ketinggalan mendirikan pemukimannya. Oleh karena itu, di samping perkampungan bangsa asing, terdapat pula perkampungan Bugis, Melayu, Ternate, dan lain sebagainya.

II. CIREBON

a. Cikal-Bakal Kesultanan Cirebon

Menurut Kitab *Purwaka Caruban Nagari* di daerah Cirebon sebelumnya terdapat enam kerajaan kecil yang disebut *nagari*, yakni Nagari Surantaka, Singapura, Japura, Wanagiri, Rajagaluh, dan Talaga[24]. Di antara *nagari-nagari* tersebut yang terbesar

24. Lihat *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, halaman 11.

adalah Wanagiri; walaupun apabila ditilik pada masa sekarang luasnya hanya mencakup kurang lebih empat kecamatan saja. Kerajaan atau Nagari Surantaka berpusat di desa Keraton sekarang, yakni di Kecamatan Cirebon Utara. Masih menurut Kitab *Purwaka Caruban Nagari*, penguasanya bernama Ki Gedeng Sidhang Kasih. Konon ia memiliki seorang putri bernama Nyai Ambet Kasih, yang menikah dengan saudara sepupunya bernama Raden Pamanah Rasa. Menurut *Babad Siliwangi*, Raden Pamanah Rasa ini adalah nama Prabu Siliwangi ketika masih muda. Sebagai hadiah perkawinan ini, Ki Gedeng Sedhang Kasih memberikan kawasan Sindang kasih pada menantu sekaligus kemenakannya itu. *Purwaka Caruban Nagari* lebih jauh lagi menjelaskan bahwa Nagari Surantaka merupakan bawahan Kerajaan Galuh.

Silsilah Sunan Gunung Jati

Dari garis ayah

Kanjeng Nabi Muhammad SAW ➔ Siti Fatimah ➔ Sayid Khusein ➔ Sayid Jaenal Abidin ➔ Muhammad Bakir ➔ Jafar Siddiq ➔ Kasim al Kamil ➔ Idris ➔ Albakir ➔ Akhmad ➔ Baidillah ➔ Muhammad ➔ Alwi ➔ Ali Gajam ➔ Muhammad ➔ Alwi (di Mesir) ➔ Abdulmalik (di India dari Hadramaut) ➔ Amir ➔ Jalaluddin (di Kamboja) ➔ Nurul Alim ➔ Syarif Abdullah ➔ Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Dari garis ibu

Prabhu Ciung Wanara ➔ Prabhu Dewi Purbasari ➔ Prabhu Lingga Hiang ➔ Prabhu Lingga Wesi ➔ Prabhu Wastu Kancana ➔ Prabhu Susuk Tunggal ➔ Prabhu Banyak Larang ➔ Prabhu Banyak Wangi ➔ Prabhu Mundingkawati ➔ Prabhu Anggalarang ➔ Prabhu Siliwanti ➔ Ratu Mas Rarasantang/Syarifah Muda'im ➔ Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati).

Sumber: *Sejarah Cirebon*, halaman 52-53.

Raden Pamanah Rasa memiliki dua orang istri. Selain Nyai Ambet Kasih, ia menikah pula dengan Nyai Subang Larang, putri mangkubumi atau perdana menteri Kerajaan Singapura bernama Ki Gedeng Tapa. Saat itu, Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan pertandingan adu ketangkasan senjata sebagai ajang mencari jodoh bagi putrinya. Ternyata pemenangnya tak lain dan tak bukan adalah Raden Pamanah Rasa.

Nagari Singapura terletak sekitar 4 km sebelah utara Giri Amparan Jati (makam Sunan Gunungjati). Batasnya diperkirakan sebagai berikut: utara berbatasan dengan Surantaka; barat berbatasan dengan Wanagiri; selatan dan timurnya dengan Japura; dan sebelah timurnya dibatasi Laut Jawa. Raja Negeri Singapura adalah Ki Gedeng Surawijaya Sakti, saudara Ki Gedeng Sedhang Kasih, raja Nagari Surantaka. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh mangkubuminya bernama Ki Gedeng Tapa, yang memiliki seorang putri cantik jelita bernama Nyai Subang Larang (lahir 1404). Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, Nyai Subang Larang kelak bersuamikan Raden Pamanah Rasa.

Pada kurang lebih tahun 1418 datanglah seorang ulama bernama Syeh Hasanudin bin Yusuf Sidik[25] yang berkenalan dengan Ki Gedeng Tapa. Setelah itu, ia bertolak ke Krawang dan mendirikan pesantren di sana. Namanya kemudian dikenal sebagai Syeh Quro. Karena memberikan kesan yang baik, Ki Gedeng Tapa merestui putrinya belajar ilmu agama Islam di pesantren Syeh Quro. Pada 1420 tiba seorang ulama lain dari Bagdad bernama Syeh Datuk Kahfi atau Syeh Idofi dengan disertai dua belas pengikutnya, yang terdiri dari 10 orang pria dan 2 wanita. Syeh Datuk Kahfi diizinkan oleh Ki Gedeng Tapa bermukim dan mendirikan pesantren di Pesambangan. Di masa -masa selanjutnya, Syekh Datuk Kahfi tersohor pula dengan nama Syeh Nurul Jati. Peristiwa kedatangan dua ulama di atas menandai masuknya agama Islam ke Cirebon.

Nagari Japura terletak 17 km sebelah tenggara Giri Amparan Jati, yang kini berada di Kecamatan Astana Japura, Sindanglaut, dan Ciledug. Rajanya bernama Prabu Amuk Marugul. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Japura pada kurang lebih tahun 1422. *Nagari* Wanagiri kini letaknya berada di Kecamatan Palimanan. Nama Wanagiri sendiri hingga saat ini masih ada sebagai nama kampung di Desa Kalangenan,

25. Lihat *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, halaman 18.

Kecamatan Palimanan[26]. Konon, rajanya bernama Ki Gedeng Kasmaya, kakak Ki Gedeng Surawijaya. Menurut cerita rakyat, ia kerap berada di Cirebon Girang. Oleh karena itu, boleh diperkirakan bahwa raja tersebut kemungkinan mempunyai istana di sana atau hadir ke kawasan tersebut guna mengikuti upacara-upacara keagamaan. *Nagari* Rajagaluh letaknya sekitar 30 km sebelah barat Giri Amparan Jati atau Muara Jati. Rajanya adalah Prabu Cakraningrat. *Nagari* Talaga wilayah sebelah utaranya berbatasan dengan Rajagaluh dan sebelah baratnya Sumedang Larang. Berdasarkan penuturan ceritra rakyat, pusat kerajaan Talaga berada di kota kecamatan Talaga sekarang. Konon raja Talaga bernama Prabu Pucukumum.

Pernikahan Raden Pamanah Rasa dengan Nyai Subang Larang membuahkan dua orang putra dan seorang putri. Putra-putranya masing-masing bernama Raden Walangsungsang dan Raja Sangara. Sedangkan putrinya bernama Nyai Lara Santang. Ketika Raden Walangsungsang menginjak usia dewasa, ibunya meninggal dunia dan mengembaralah ia meninggalkan istana. Pertama-tama Raden Walangsungsang singgah di tempat kediaman Ki Gedeng Danuwarsih, seorang pendeta Hindu, guna menuntut ilmu. Tidak lama berselang, adiknya, Nyai Subang Larang, datang menyusulnya. Raden Walangsungsang kemudian dinikahkan dengan putri Ki Gedeng Danuwarsih bernama Nyai Indang Geulis.

Setelah beberapa waktu belajar di bawah bimbingan Ki Gedeng Danuwarsih, Raden Walangsungsang disertai istri dan adiknya meneruskan perjalanannya dan kini menuju pesantren yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi. Di sanalah beliau menuntut ilmu selama tiga tahun. Setamatnya belajar, Raden Walangsungsang diberi nama baru Ki Samadullah oleh gurunya. Syekh Datuk Kahfi menyarankan agar Raden Walangsungsang membuka negeri baru di tepi pantai sebelah timur Pasambangan, yang masuk dalam wilayah *nagari* Singapura.

Demikianlah, Raden Walangsungsang membangun perkampungan baru yang kelak dikenal sebagai Tegal Alang-Alang. Sebenarnya kawasan ini telah ada penghuninya yang dipimpin oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang, adik Ki Gedeng Danuwarsih. Berkat kedatangan Raden Walangsungsang, tempat pemukiman tersebut semakin berkembang. Berbagai suku bangsa berdatangan ke sana, seperti Sunda, Jawa, Arab, dan China. Oleh karenanya, tempat itu lantas disebut Caruban, yang artinya "campuran." Raden Walangsungsang kemudian diangkat sebagai *pangraksabumi*,

26. Lihat *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, halaman 26.

yakni pemuka masyarakat yang bertugas mengurusi masalah pertanian dan perikanan. Sementara itu, Ki Danusela menjadi *kuwu* atau kepala kampung itu.

Semasa menduduki jabatan sebagai *pangraksabumi* ini, Raden Walangsungsang yang telah menganut agama Islam berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sewaktu berada di Mekkah, Raden Walangsungsang tinggal di tempat kediaman Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi, dan memperdalam pengetahuan agamanya di bawah bimbingan Syekh Abdul Yazid. Sepulangnya dari ibadah haji ini, Raden Walangsungsang dikenal pula sebagai Haji Abdullah Iman. Dengan giat disebarkannya agama Islam di Cirebon. Nyai Lara Santang turut pula beribadah haji ke Mekkah dan di sana menikah dengan seorang bangsawan Arab bernama Syarif Abdullah dan berputra Syarif Hidayatullah.

Sepeninggal Ki Danusela, Raden Walangsungsang diangkat sebagai penggantinya dan mulai saat itu beliau menyandang gelar Pangeran Cakrabuana. Lama-kelamaan status Caruban ditingkatkan menjadi kerajaan dan disebut Caruban Larang. Dengan cepat Caruban Larang menggeser kedudukan *nagari* Singapura. Ayah Raden Walangsungsang (Raden Pamanah Rasa) kini telah bergelar Prabu Siliwangi mendengar perihal pendirian kerajaan oleh anaknya yang telah lama menghilang itu dan menganugerahkan gelar Sri Mangana.

Sementara itu, Syarif Hidayatullah telah dewasa dan memperdalam pengetahuan agama Islam dari berbagai guru. Ia kemudian berniat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, kampung halaman ibunya. Setibanya di Jawa, Syarif Hidayatullah berguru pada Sunan Ampel yang mengajarkannya berbagai metoda penyiaran agama Islam dan memperkenalkan pada wali-wali lainnya. Setelah itu, barulah Syarif Hidayatullah bertolak ke Caruban Larang. Kedatangan Syarif disambut baik oleh pamannya, Raden Walangsungsang. Ia kemudian ditunjuk sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang baru meninggal dunia. Dibangunnya sebuah pesantren di Dukuh Sembung, Pasambangan, yang letaknya agak jauh dari pusat kerajaan.

Syarif Hidayatullah terus mengajar sambil mempelajari adat-istiadat setempat. Namanya kemudian tersohor sebagai Syekh Maulana Jati atau Syekh Jati. Beliau mengajar pula di dukuh Babadan dan menikahi Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, kepala kampung di kawasan tersebut. Malangnya, Nyai Babadan tidak berumur panjang dan meninggal dunia tak berapa lama setelah menikah.

Sepeninggal istri pertamanya, Syarif Hidayatullah pindah ke Pasambangan dan menikah lagi dengan Dewi Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, atau saudari sepupunya sendiri. Belakangan, beliau menikah pula dengan Nyai Lara Bagdad, putri Abdulrahman al-Bagdady. Pernikahan dengan Nyai Lara Bagdad ini dikaruniai dua orang putra, yakni Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Beberapa utusan dari Banten mengunjungi Syarif Hidayatullah dan memintanya mengajarkan agama Islam di sana. Menanggapi permintaan ini, setelah mendapat restu Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah atau Syekh Maulana Jati bertolak ke Banten. Di sana beliau menikah lagi dengan Nyai Kawunganten dan dikaruniai seorang putri bernama Ratu Winaon dan putra bernama Pangeran Sabakingkin. Putranya inilah yang kelak menjadi raja pertama Banten bergelar Hasanuddin.

Beberapa waktu lamanya, Syekh Maulana Jati mengajarkan agama Islam di Banten. Suatu ketika datanglah utusan Pangeran Cakrabuana yang memintanya kembali ke Caruban. Pamannya yang sudah lanjut usia itu ingin menobatkan Syekh Maulana Jati sebagai penggantinya dan memajukan Caruban Larang. Demikianlah, pada kurang lebih tahun 1479, Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Tumenggung (Susuhunan) Syarif Hidayatullah. Para wali lain yang mendengar perihal pengangkatan ini menganugerahinya gelar *Panetep Panatagama Rasul* di Tanah Sunda[27]. Pemberian gelar ini menandakan bahwa Syarif Hidayatullah yang kelak juga dikenal sebagai Sunan Gunungjati disejajarkan kedudukannya dengan para wali.

Syekh Maulana Jati mengunjungi Demak atas undangan Raden Patah, sultan Demak, beserta para wali lainnya guna membantu penyelesaian mesjid Demak. Pada kunjungan kali ini, Syekh Maulana Jati menikah lagi dengan Nyai Tepasari, putri Ki Ageng Tepasan, bangsawan Majapahit yang mengabdi pada Raden Patah, dan dikaruniai seorang putri bernama Nyai Ratu Ayu dan putra bernama Pangeran Muhammad Arifin (Pangeran Pasarean). Bersama dengan para wali lainnya dibahas pula rencana-rencana pengembangan agama Islam ke Pajajaran, yang penduduk beserta rajanya masih menganut agama Hindu. Waktu itu, Caruban Larang (Cirebon) merupakan vasal Kerajaan Pajajaran yang diperintah oleh Prabu Siliwangi, kakek Syekh Maulana Jati atau Syarif Hidayatullah.

27. Lihat *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, halaman 61.

Setibanya kembali di Caruban Larang, Syekh Maulana Jati menolak membayar upeti pada Pajajaran dan menyatakan kemerdekaan negerinya. Tindakan cucunya ini dianggap sebagai pembangkangan yang tak dapat dibiarkan begitu saja oleh Prabu Siliwangi. Pajajaran mengirimkan pasukannya menyerang Caruban Larang di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya. Ternyata pasukan Pajajaran dapat dikalahkan dengan mudah dan Tumenggung Jagabaya berbalik mengabdi pada Syekh Maulana Jati. Ikatan persahabatan dan kekeluargaan dengan Kesultanan Demak makin diperkuat, antara lain melalui perkawinan Pangeran Muhammad Arifin dengan putri Raden Patah, Ratu Nyawa.

Pada 1511, Portugis merebut Malaka dan Demak memutuskan membantu sultan Malaka mengusir Portugis. Suatu ekspedisi militer di bawah pimpinan Dipati Unus dikirimkan ke Malaka, tetapi berhasil dikalahkan oleh armada Portugis pada tahun 1513. Portugis sendiri berupaya memperluas pengaruhnya di seluruh penjuru Nusantara dan menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran. Bahkan kini mereka diizinkan oleh Pajajaran membangun benteng pertahanan di Sunda Kelapa pada tahun 1522. Oleh karenanya, Demak mempersiapkan armada yang dipimpin Fatahillah atau Faletehan guna menghalau Portugis dari Sunda Kelapa dan mereka tak ketinggalan pula meminta dukungan Cirebon.

Pasukan gabungan Demak dan Cirebon bergerak ke Sunda Kelapa pada tahun 1526. Kini giliran Portugis yang mengalami kekalahan telak sehingga harus hengkang perairan Nusantara. Sebagai peringatan atas kemenangan ini, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Portugis terpaksa melarikan diri dari Sunda Kelapa dan tak pernah menginjakkan kakinya lagi di sana. Aliansi Portugis–Pajajaran mengalami kegagalan. Fatahillah yang berjasa memimpin ekspedisi mengalahkan Portugis dinikahkan dengan putri Syekh Maulana Jati bernama Nyai Ratu Ayu. Pernikahan mereka membuahkan seorang putri bernama Nyai Mas Wanawati Raras dan putra bernama Pangeran Sedang Garuda.

Kini, Syekh Maulana Jati menyatukan berbagai *nagari* yang ada di sekitarnya. Satu per satu *nagari* yang masih berdaulat ditaklukkan dan digabungkan dengan Cirebon. Perlahan tapi pasti Cirebon tumbuh menjadi negara besar. Setelah bertahun-tahun berjuang memajukan negerinya, Syekh Maulana Jati mangkat pada 1568. Konon sewaktu meninggal dunia beliau berusia 120 tahun. Pangeran Pasarean berputra Pangeran Swarga yang menikah dengan Nyai Mas Wanawati Raras, putri

Fatahillah. Putra mereka yang bernama Pangeran Emas diangkat sebagia penguasa Cirebon menggantikan Syekh Maulana Jati. Gelarnya adalah Panembahan Ratu I (1568–1649).

b. Perkembangan dan Perpecahan Cirebon

Pangeran Emas mewarisi kemajuan Cirebon yang telah dirintis oleh Syekh Maulana Jati. Cirebon telah menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi kaum pedagang baik dari dalam maupun luar negeri. Kendati demikian, pada zamannya Banten semakin menanjak pamornya; apalagi setelah Maulana Yusuf (± 1570–1580) berhasil menaklukkan Pajajaran. Akibatnya, Cirebon merosot pamornya dibanding Banten. Panembahan Ratu atau Pangeran Emas menikah dengan putri sultan Pajang. Inilah yang memicu kecurigaan Maulana Yusuf terhadap Panembahan Ratu. Raja Banten itu khawatir apabila Pajang memanfaatkan Cirebon sebagai batu loncatan menguasai seluruh Jawa Barat. Meskipun terjadi sikap curiga mencurigai antara Banten dan Cirebon, raja Banten masih bersedia menghormati Cirebon, karena merupakan negeri asal-muasal leluhurnya. Selain itu, Cirebon dianggap sebagai perintis penyiaran agama Islam di Jawa Barat.

Kesultanan Pajang tidak panjang usianya, karena kekuasaan tak lama kemudian beralih ke tangan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati (1586–1601). Kendati merupakan menantu sultan Pajang, Panembahan Ratu I tidak menerapkan politik permusuhan pada Panembahan Senopati yang telah menggulingkan mertuanya. Cirebon justru menjalin persekutuan yang erat dengan Mataram. Bahkan, Panembahan Senopati membantu pembangunan tembok benteng di Cirebon pada 1590[28]. Hubungan kekerabatan antara dua kerajaan diperkokoh melalui perkawinan Sultan Agung, cucu Panembahan Senopati, dengan seorang putri Cirebon.

Panembahan Emas wafat pada 1649 dan digantikan oleh cucunya bernama Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Ratu II. Karena beliau kelak ditawan oleh Mataram dan dimakamkan di bukit Girilaya, namanya dikenal pula sebagai Pangeran Girilaya. Ia menikahi putri Amangkurat I, yakni raja Mataram yang menggantikan Sultan Agung. Pernikahan Pangeran Girilaya dengan putri Mataram ini membuahkan tiga orang putra, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Oleh karena pernikahan-pernikahan yang kerap terjadi antara keluarga kerajaan Cirebon dan Mataram inilah, semenjak tahun 1615 pengaruh Mataram di

---

28. Lihat *Sejarah Daerah Jawa Barat*, halaman 75.

Cirebon makin menguat. Bahkan, menurut F. de. Haan, Cirebon harus menyerahkan wilayahnya di sebelah barat Sungai Cimanuk pada Mataram[29]. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Cirebon telah menjadi vasal Mataram dan mulai diwajibkan menyerahkan upeti.

Para penguasa Cirebon hanya dianggap sebagai raja-raja keagamaan saja, mengingat mereka merupakan keturunan Syarif Hidayat (Sunan Gunungjati). Pada mulanya mereka belum menyandang gelar sultan dan hanya pangeran atau panembahan saja. Baru pada tahun 1662, Cirebon meluaskan daerah kekuasaannya ketika terjadi peperangan antara Galuh dan Telaga. Ketika Sultan Agung menyerang Batavia, tempat bercokolnya VOC, Cirebon dijadikan pangkalan militer terpenting Mataram pada tahun 1628 karena letaknya yang strategis.

Bertolak belakang dengan ayahnya, Sultan Agung yang anti-Belanda, Amangkurat I malah menjalin persahabatan dengan VOC. Padahal, jelas-jelas VOC hendak melemahkan Mataram. Amangkurat I kerap melakukan tindakan semena-mena sehingga menjadi penguasa yang tidak populer di mata rakyatnya. Waktu itu timbul perseteruan dengan Banten yang semenjak zaman Sultan Agung dianggap penghalang cita-cita Mataram menguasai seluruh Pulau Jawa. Karena khawatir Cirebon jatuh ke dalam pengaruh Banten, Amangkurat I berencana menaklukkan Cirebon dengan tipu muslihat yang sangat licik. Ia mengundang menantunya dan sekaligus raja Cirebon, Pangeran Girilaya, ke Mataram pada kurang lebih tahun 1666 atau 1667. Ternyata setibanya di sana, Pangeran Girilaya beserta kedua orang anaknya–Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya–malah ditawan. Demi mengisi kekosongan kekuasaan di Cirebon, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Pangeran Wangsakerta sebagai pejabat raja Cirebon. Selanjutnya, Cirebon menjadi daerah protektorat Banten.

Pangeran Girilaya wafat sebagai tawanan dan putranya, Pangeran Martawijaya beserta Kartawijaya diharuskan tinggal di Mataram sebagai sandera. Amangkurat I menyangka bahwa tindakan liciknya itu akan mengakhiri eksistensi Cirebon selama-lamanya. Sejarah membuktikan bahwa dugaannya itu keliru. Kedua orang pangeran ini bersimpati pada Trunajaya yang berontak melawan Amangkurat I. Dengan dukungan sultan Banten, Trunajaya membebaskan kedua orang pangeran itu dan membawa mereka ke Banten. Ternyata baik Pangeran Martawijaya maupun Kartawijaya sama-sama ingin menjadi sultan. Berkat bantuan Banten beserta Trunajaya mereka berhasil

29. Lihat *Sejarah Daerah Jawa Barat*, halaman 75.

meraih kekuasaan lagi atas Cirebon dan sepakat membagi negeri mereka menjadi dua, sehingga pecahlah Cirebon. Banten menganugerahi kedua pangeran itu gelar sultan pada tahun 1678. Pangeran Martawijaya kemudian dikenal sebagai Sultan Sepuh Syamsuddin, sedangkan saudaranya–Pangeran Kartawijaya bergelar Sultan Anom I Muhammad Badruddin.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, ketika kedua orang kakaknya diharuskan tinggal di Mataram sebagai tawanan, Pangeran Wangsakerta telah bertindak selaku pelaksana sultan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Kini Pangeran Wangsakerta diangkat pula sebagai sultan Kacerbonan. Belakangan salah satu putra Sultan Anom I Muhammad Badruddin mendirikan Kaprabonan. Dengan demikian, terpecahlah Cirebon menjadi empat, yakni Kasepuhan, Kanoman, Kacerbonan, dan Kaprabonan.

Penobatan sultan-sultan Cirebon ini tampaknya dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten sebagai balas jasa atas dukungan yang diberikan Cirebon terhadap negerinya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa hendak memperlihatkan bahwa Banten merupakan pelindung bagi Cirebon[30]. Ini merupakan sesuatu yang rumit, karena Mataram menganggap pula Cirebon sebagai vasalnya. Panembahan Tohpati yang menjadi sultan Kacerbonan akhirnya hanya dianggap sebagai pembantu kakak-kakaknya saja. Karena itu, kini tinggal dua kesultanan saja yang benar-benar memiliki kekuasaan teritorial beserta politik.

VOC mengirimkan pasukannya menyerang Cirebon agar negeri tersebut tidak membantu Mataram. Pada Januari 1681[31], Kasepuhan dan Kanoman dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang isinya menyatakan bahwa kedua kerajaan di Cirebon itu akan menjadi sekutu setia VOC. Ini menandakan bahwa Cirebon telah jatuh ke tangan Belanda; kendati Mataram tetap menganggapnya sebagai salah satu vasal atau daerah taklukan mereka. Baru pada 1705, dalam perjanjian dengan Pakubuwono I, diakui bahwa Cirebon terlepas dari Mataram.

30. Lihat *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, halaman 150.
31. Buku *Sejarah Daerah Jawa Barat* mencatat bahwa tanggalnya adalah 4 Januari, sedangkan buku *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809* mencatat bahwa tanggalnya adalah 23 Januari.

c. Kerajaan-Kerajaan di Cirebon

i. KANOMAN

Sultan Anom I Muhammad Badruddin (1677–1703) demikianlah gelar Pangeran Kartawijaya setelah diangkat sebagai sultan Kanoman. Ia mendirikan istananya di bekas rumah pertama Pangeran Cakrabuwana ketika baru tiba Tegal Alang-Alang sehabis menuntut ilmu di pondok pesantren Syekh Datuk Kahfi. Selanjutnya yang memerintah sebagai sultan-sultan Kanoman secara berturut-turut adalah Sultan Anom II Raja Madureja Kadiruddin (1703–1706), Raja Kusuma (wali, memerintah 1706–1719), Tumenggung Bau Denda (1719–1744), Sultan Anom III Alimuddin (1744–1798), Sutan Anom IV Muhammad Kaeruddin (1798–1803), dan Sultan Anom V Abusoleh Imamuddin (1803–1811).

Pada 1798, ketika Sultan Anom III mangkat, yang diangkat sebagai pengganti adalah putra kesayangannya sekalipun tidak sah menurut tradisi. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan kaum bangsawan. Keadaan mungkin masih dapat dikendalikan bila sultan baru tak menyia-nyiakan kakaknya (pewaris sah) yang hidup dalam kemiskinan[32]. Bahkan, pihak Kasepuhan turut pula mempermasalahkan putra yang telah dicabut hak warisnya tersebut. Hal ini memicu berbagai pemberontakan.

Semasa pemerintahan Sultan Anom V, Daendels mengeluarkan peraturan *Reglement op het beheer van de Cheribonsche Landen tertanggal 2 Februari 1809*, yang menyatakan bahwa sultan-sultan Cirebon tak lagi memiliki kekuasaan politik dan dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Peran mereka dalam pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Belanda. Masih pada zaman Sultan Anom V, Pangeran Raja Kanoman, putra Sultan Anom IV, berniat membangun kerajaan sendiri dengan nama Kesultanan Kacerbonan. Niat ini didukung oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengeluarkan *besluit* bahwa semenjak tahun 1807, Pangeran Raja Kanoman diangkat sebagai Sultan Carbon Kacerbonan. Meskipun demikian, para penggantinya tak berhak lagi menyandang gelar sultan dan cukup pangeran saja.

Ketika Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris, tidak dilakukan perubahan terhadap kebijaksanaan ini. Bahkan di tahun 1815, Inggris memberikan

---

32. Lihat *Cerbon*, halaman 59.

pensiun pada para sultan Cirebon sebesar 8000 Rupee per tahun[33]. Saat itu yang memerintah di Cirebon adalah Sultan Anom VI Komaruddin (1811–1858). Dengan demikian fungsinya hanya menjadi pemangku adat saja. Ketika Belanda memperoleh kembali Kepulauan Nusantara dari tangan Inggris, mereka memberikan gaji tahunan sebesar 18.000 Gulden pada sultan Kasepuhan dan Kanoman. Rangkaian sultan-sultan Kanoman terakhir adalah Sultan Anom VII Muhammad Komaruddin (1858–1873), Sultan Anom VIII Raja Zulkarnaen (1873–1934), Sultan Anom IX Raja Nurbuwat (1934–1935), Sultan Anom Nurus (1935-1989), Sultan Anom Pangeran Raja Adipati Haji Djalaludin (1989-2002), dan Sultan Anom Emiruddin.

ii. KASEPUHAN

Pangeran Martawijaya naik takhta dengan gelar Sultan Sepuh Syamsuddin (1667–1697). Ia memerintah dari keraton Pakungwati yang terletak di sebelah timur keraton Kasepuhan sekarang. Para penggantinya secara berturut-turut adalah: Sultan Raja Tajul Arifin Jamaluddin (1697–1723), Sultan Raja Jaenuddin (1723–1753), Sultan Raja Amir Sena Jaenuddin (1753–1773), Sultan Sepuh Shafiuddin Matangaji (1773–1786), Sultan Sepuh Hasanuddin (1786–1791), Sultan Sepuh Joharuddin (1791–1815), Sultan Raja Udaka (1815–1845), Sultan Raja Sulaeman (1845–1880), Sultan Raja Atmaja (1880–1899), Sultan Sepuh Raja Aluda Tajul Arifin (1899–1942), Sultan Sepuh Raja Rajaningrat (1942–1969), Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Maulana Pakuningrat, dan Sultan Sepuh Arief Natadiningrat[34]. Sebagai catatan, ketika Sultan Sepuh Hasanuddin mangkat pada tahun 1791, putranya, Sultan Sepuh Joharuddin baru berusia sepuluh tahun, sehingga diangkatlah Tumenggung Jayadriya sebagai walinya.

Peran sultan-sultan Kasepuhan makin terpuruk dengan dikeluarkannya *Reglement op het beheer van de Cheribonsche Landen* tertanggal *2 Februari 1809*, yang menyatakan bahwa sultan-sultan Cirebon tak lagi memiliki kekuasaan politik dan dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Saat Daendels mengeluarkan peraturan tersebut yang memerintah Kasepuhan adalah Sultan Joharuddin. Pada tahun 1815, Raffles memensiunkan tiga sultan Cirebon dengan memberikan mereka tunjangan. Semenjak itu, peran sultan Kasepuhan beserta

33. Lihat *Cerbon*, halaman 63.
34. Lihat *Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara hingga Prabu Siliwangi (Naskah Keraton Kasepuhan Cirebon*, halaman 389.

sultan-sultan Cirebon lainnya hanyalah sebagai pemangku adat saja. Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa kembali di Kepulauan Nusantara tak merubah kebijaksanaan Inggris di atas.

Foto bersama Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat pada 31 Mei 2011
(foto koleksi pribadi)

Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal di Batavia tertanggal 13 November 1905, Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa ketika itu para sultan Cirebon hendaknya menerima tunjangan f.3000. Pendapatan para sultan Cirebon menurutnya perlu dinaikkan karena mereka perlu membiayai pemeliharaan makam Sunan Gunung Jati[35]. Disebutkan pula bahwa Sultan Sepuh ketika itu memiliki uang yang telah ditabungnya semenjak kecil dan beliau menjalani kehidupan tertib bersama istrinya yang berpendidikan. Snouck menambahkan bahwa tunjangan yang diberikan pada para sultan Cirebon hendaknya dilestarikan.

Masih berdasarkan surat Snouck Hurgronje tersebut, diberitakan bahwa Sultan Sepuh menikah dengan putri bupati Ciamis, sebagaimana halnya bupati Serang. Dengan demikian, bupati Serang merupakan ipar beliau. Bupati Serang berulang

35. Lihat *Nasihat-nasihat C.Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936: Seri Khusus INIS V*, halaman 683.

kali mengundang iparnya itu mengunjungi daerah Banten. Kendati demikian, sewaktu Sultan Sepuh mengajukan rencana kunjungan tersebut, pemerintah daerah selalu mengajukan banyak keberatan. Oleh karenanya, Sultan Sepuh memilih tidak membicarakannya lagi dan menganggap bahwa dirinya adalah semacam tahanan negara, di mana beliau hanya dapat memperoleh izin mengunjungi mertuanya di Ciamis tanpa banyak kesulitan. Keinginan beliau mengunjungi Batavia yang telah diajukannya berkali-kali senantiasa dihalangi oleh pemerintah. Sedangkan perjalanan ke Banten yang para rajanya seasal dengan beliau tidak diperkenankan pula oleh Belanda. Snouck menyarankan agar kecurigaan semacam itu hendaknya dihapuskan karena tidak memiliki dasar yang wajar.

d. Kerajaan-kerajaan yang berasal dari garis keturunan Kanoman

i. KACERBONAN

Pangeran Wangsakerta yang bergelar Panembahan Tohpati (Panembahan Gusti I, memerintah 1667–1714) merupakan raja Kacerbonan pertama. Setelah terbaginya Cirebon, untuk sementara waktu ia tetap berdiam di bersama-sama sultan Kasepuhan di kompleks keraton Pakungwati. Kedudukannya, hanya sebagai pembantu kakak-kakaknya. Kendati demikian, menurut pandangan Banten dan VOC, Panembahan Tohpati adalah tetap seorang sultan yang sederajat dengan kakak-kakaknya. Selanjutnya yang berkuasa di Kacerbonan adalah Temenggung Secadipura (pemangku, 1714–1725), Panembahan Gusti II (1725–1731), Temenggung Secadipura (pemangku, 1731–1752), dan Panembahan Gusti III (1752–1773). Ternyata Panembahan Gusti III tidak mempunyai keturunan, sehingga tatkala beliau mangkat kerajaannya dibagi antara Kasepuhan dan Kanoman. Dengan demikian, sementara waktu di Cirebon hanya tinggal tiga kerajaan saja; Kasepuhan, Kanoman, dan Kaprabonan.

Ketika Sultan Anom V memerintah, Pangeran Raja Kanoman, putra Sultan Anom IV, menyampaikan niatnya membangun kerajaan sendiri yang seluas Kasepuhan dan Kanonam bernama Kacerbonan. Pemerintah kolonial Belanda yang sangat senang menyaksikan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan tanpa ragu-ragu mendukungnya. Sebuah *besluit* dikeluarkan yang mengukuhkan bahwa semenjak tahun 1807, Pangeran Raja Kanoman diangkat sebagai Sultan Carbon Kacerbonan dengan gelar Sultan Carbon Amirrul Mu'minin (1808-1814). Meskipun demikian, para penggantinya tak berhak lagi menyandang gelar

sultan dan cukup pangeran saja. Para pengganti Pangeran Raja Kanoman adalah sebagai berikut: Pangeran Raja Hidayat "Raja Madenda" (1814-1851), Pangeran Raja Dendawijaya "Raja Madenda" (1851-1914), Pangeran Martaningrat "Raja Madenda" (1914-1931), Pangeran Raharjadiraja "Raja Madenda" (1931-1950), Pangeran Sidik Arjaningrat "Sultan Kacirebonan" (1950-1956), Pangeran Harkat Natadiningrat "Sultan Kacirebonan" (1960-1968), Pangeran M. Mulyono Amir Natadiningrat (1968-1994), dan Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE (1994, 1997-sekarang).

ii. KAPRABONAN

Pusaka Keraton Kaprabonan Cirebon di Museum Konperensi Asia Afrika Bandung
(foto koleksi pribadi)

Pendiri Kaprabonan adalah putra Sultan Anom Muhammad Badruddin bernama Pangeran Raja Adipati Kaprabon. Para penguasanya tidak bergelar sultan melainkan pangeran. Selanjutnya yang memerintah Kaprabonan adalah: Pangeran Kusuma Waningyun Kaprabon (1734-1766), Pangeran Brataningrat (1766-1798), Pangeran Raja Sulaeman Sulendraningrat Kaprabon (1798-1838), Pangeran Arifudin Kusumabratawirya Kaprabon (1838-1878), Pangeran Adikusuma Adiningrat (1878-1918), Pangeran Angkawijaya Kaprabon (1918-1946), Pangeran Aruman Raja Kaprabon (1946-1974), Pangeran Herman Raja Kaprabon (1974-2001), dan Pangeran Hempi Raja Kaprabon (2001-sekarang).

e. Kesenian dan kebudayaan

Seni arsitektur Cirebon nampak pada bangunan-bangunan istana. Sebagai contoh adalah Siti Inggil Keraton Kasepuhan yang berasal dari masa awal perkembangan agama Islam. Corak bangunannya mengingatkan pada bangunan tradisional di Jawa Timur abad ke-13 dan 14[36]. Motif yang banyak dipergunakan pada seni arsitektur Cirebon adalah motif awan dan karang. Ternyata, corak-corak semacam ini telah dikenal semenjak zaman Majapahit. Contoh lain buah karya kesenian Cirebon adalah Taman Sunyaragi yang indah. Taman ini dibangun oleh salah seorang sultan Kasepuhan sebagai tempat bermeditasi. Panoramanya cukup memesona karena dilengkapi dengan kolam beserta bunga-bungaan aneka warna.

Taman Sunyaragi
(Digambar ulang dari *Arkeologi Islam Nusantara*, halaman 101)

36. Lihat *Cerbon*, halaman 68.

Selain arsitektur, Cirebon tersohor pula akan seni musik gamelannya. Jenis alat musiknya mirip dengan gamelan di Jawa, walau ada pula perbedaannya. Sama seperti di Jawa, mereka mengenal dua deretan tangga nada (*laras*), yakni *slendro* dan *pelog*. Gamelan biasa dimainkan saat upacara adat, menyambut tamu, atau mengiringi permainan wayang kulit. Kesenian-kesenian Cirebon lain yang patut disebutkan adalah seni pedalangan (wayang), batik, pembuatan topeng, dan lain sebagainya. Seni ukir Cirebon dapat disaksikan pada kereta istana Kasepuhan yang bernama *Paksi Nagaliman.*[37]

III. PRIANGAN

a. Kerajaan Sumedang Larang di Priangan

Priangan merupakan suatu kawasan yang luasnya hampir meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat sekarang. Di sebelah utara, Priangan berbatasan dengan Cirebon, di sebelah timur dengan Banyumas serta Cirebon, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Banten. Pembahasan tentang Priangan dimasukkan dalam buku ini, karena di wilayah itu pernah pula berdiri sebuah kerajaan, yang kemudian berubah menjadi kabupaten. Meskipun demikian, para bupatinya memiliki kekuasaan besar yang hampir dapat disejajarkan dengan para penguasa wilayah swapraja.

Di Priangan pernah berdiri Kerajaan Sumedang Larang yang beribukota di Kutamaya. Pendiri kerajaan ini adalah Prabu Taji Malela, yang hidup pada sekitar abad ke-15 (sumber lain menyebutkan abad ke-9). Beliau digantikan oleh putranya, Prabu Gajah Agung. Ketika pusat pemerintahan Sumedang Larang berada di Ciguling. Raja Sumedang Larang berikutnya adalah Sunan Pagulingan. Ia menikahkan putrinya, Ratu Rajamantri dengan Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ratu Rajamantri digantikan saudaranya bernama Sunan Guling. Para penguasa Sumedang Larang berikutnya secara berturut-turut adalah Sunan Tuakan, Nyimas Ratu Patuakan, dan Nyimas Ratu Dewi Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun[38]. Beliau digantikan oleh putranya, Prabu Geusan Ulun (1580–1608). Sementara itu, Galuh–daerah lain di Priangan–diperintah oleh para bupati, tetapi kemudian ditaklukkan oleh Panembahan Senopati (1586–1601) dari Mataram. Setelah Prabu Geusan Ulun mangkat, ia digantikan oleh putranya, Raden Aria Suradiwangsa (memerintah sebagai raja, 1608–1624, sebagai bupati 1620–1624).

---

37. Lihat *Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama,* halaman 199.
38. Lihat *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, halaman 72.

Sementara itu, menurut sumber lainnya disebutkan bahwa cikal-bakal Kerajaan Sumedang Larang adalah Prabu Guru Aji Putih (Raja Tembong Agung). Beliau digantikan secara berturut-turut oleh: Batara Tuntang Buana (Prabu Tajimalela), Jayadewata (Prabu Lembu Agung), Atmabrata (Prabu Gajah Agung), Jayabaya (Prabu Panggulingan), Mertalaya (Sunan Guling), Tirtakusuma (Sunan Tuakan), Sintawati (Nyi Mas Ratu Patuakan), Satyasih (Ratu Inten Dewata Pucuk Umum, 1530-1578). Pangeran Kusumadinata I (Pangeran Santri, suami Ratu Inten Dewata Pucuk Umum), dan Pangeran Geusan Ulun (Pangeran Kusumadinata II, 1579-1601)[39]. Dengan demikian, nampak bahwa angka tahun pemerintahan bagi Prabu Geusan Ulun terdapat perbedaan antara kedua sumber. Oleh karenanya, diperlukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Masih menurut sumber yang sama, pada tahun 1579 sewaktu keruntuhan Kerajaan Pajajaran, raja terakhir bernama Prabu Raga Mulya menyerahkan mahkota emas kepada Prabu Geusan Ulun. Semenjak saat itu, Kerajaan Sumedang Larang memperoleh tambahan wilayah berupa seluruh bekas daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran[40].

Kerajaan Mataram semakin bertambah jaya di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613–1645). Oleh karenanya, Raden Aria Suradiwangsa menyatakan takluk pada Mataram di tahun 1620 dan semenjak itu, status Sumedang berubah menjadi kabupaten. Ada beberapa penyebab tunduknya Raden Aria Suradiwangsa pada Mataram. Ia merasa bahwa kedudukan Sumedang terjepit di antara tiga kekuatan besar yang sedang tumbuh saat itu, yakni Mataram, Banten, dan VOC (Kompeni) yang bercokol di Batavia; sehingga ia harus segera menentukan pihak. Karena ibunya yang bernama Ratu Harisbaya merupakan kerabat Mataram, ia memutuskan bergabung dengan kerajaan tersebut. Tunduknya Raden Arya Suradiwangsa ini merupakan suatu keberuntungan bagi Mataram, karena dapat menjadikan daerah Priangan sebagai benteng serta basis pertahanan di penjuru sebelah barat terhadap ancaman serbuan VOC dan Banten.

b. Priangan di bawah kekuasaan Mataram

Raden Aria Suradiwangsa diangkat sebagai wedana bupati Priangan dan sekaligus bupati Sumedang dengan gelar Rangga Gempol I. Pada tahun 1624 ia pernah diminta Mataram turut serta menaklukkan Madura. Oleh karenanya, selama Rangga Gempol

---

39. Lihat *Atlas Lengkap Kabupaten Sumedang*, halaman 8.
40. Lihat *Atlas Lengkap Kabupaten Sumedang*, halaman 11.

I mengemban tugas dari Sultan Agung, jabatan wedana bupati Priangan sementara waktu diwakilkan pada adiknya, Pangeran Rangga Gede (memerintah 1624–1633). Banten menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Sumedang dan Rangga Gede mengalami kekalahan. Karenanya, Sultan Agung memberikan hukuman padanya berupa penahanan di Mataram. Sultan Agung menyerahkan jabatan wedana bupati pada Dipati Ukur, penguasa Tanah Ukur yang berpusat di Bandung. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan Dipati Ukur boleh dikatakan sangat luas, yakni meliputi Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, sebagian Cianjur, Karawang, Pemanukan, dan Ciasem. Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur merebut Batavia dari tangan Belanda. Namun saat menyerang Batavia pada 1628 ternyata Dipati Ukur mengalami kekalahan, sehingga gagal mengusir Belanda dari sana. Karena khawatir mendapat hukuman berat dari Sultan Agung akibat kegagalannya tersebut, Dipati Ukur memutuskan berontak melawan Mataram. Pergolakan ini baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada 1632 dengan bantuan beberapa kepala daerah setempat yang masih setia pada Mataram.

Kedudukan Pangeran Rangga Gede sebagai wedana bupati dipulihkan kembali dan ia diizinkan pulang ke kampung halamannya. Demi mengatasi kekacauan yang terjadi di Priangan akibat pemberontakan Dipati Ukur, Sultan Agung melakukan reorganisasi pemerintahan di kawasan tersebut. Karawang yang merupakan daerah penghasil padi utama, dijadikan suatu kabupaten tersendiri, tetapi kedudukannya masih berada di bawah wedana bupati. Priangan tengah dibagi menjadi empat kabupaten: (1) Sumedang, yang diperintah oleh Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata II (Rangga Gempol II, memerintah 1633–1656) merangkap sebagai wedana bupati Priangan; (2) Sukapura dengan Ki Wirawangsa Umbul Sukakerta yang bergelar Tumenggung Wiradadaha sebagai bupatinya; (3) Bandung dengan bupatinya Ki Astamanggala Umbul Cihaurbeuti yang bergelar Tumenggung Wiraangunangun; dan (4) Parakanmuncang dengan bupatinya Ki Somahita Umbul Sindangkasih yang bergelar Tumenggung Tanubaya. Galuh juga dibagi menjadi empat kawasan, yakni Utama, Kertabumi (Bojonglopang), Kawasen, dan Imbanagara.

Amangkurat I (1645–1677) yang menggantikan Sultan Agung kembali melakukan penataan ulang wilayah kekuasaannya. Ia membagi Mataram menjadi 12 daerah yang disebut *ajeg* (dapat disetarakan dengan kabupaten). Sembilan di antara 12 *ajeg* itu berada di Jawa Barat; yakni: Sumedang dengan bupatinya Rangga Gempol III

(1656–1706), Parakanmuncang dengan bupatinya Tumenggung Tanubaya, Bandung dengan bupatinya Tumenggung Wiraangunangun, Sukapura dengan bupatinya Tumenggung Wiradaha, Karawang dengan bupatinya Tumenggung Panatayuda, Imbanagara dengan bupatinya Ngabehi Ngastanagara, Kawasen dengan bupatinya Mas Managara, Wirabaja, dan Sekace[41]. Reorganisasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan Priangan terhadap ancaman yang berasal dari Banten maupun VOC. Akibat penataan ulang ini, jabatan wedana bupati dihapuskan dan statusnya menjadi sama dengan bupati-bupati lainnya; di mana sebelumnya bupati Sumedang yang bergelar pangeran dan merangkap sebagai wedana bupati Priangan dianggap yang tertinggi di antara para bupati lainnya.

Setelah tertanamnya otoritas Mataram di Priangan, model pemerintahan para bupati dibangun seturut kerajaan besar tersebut. Bupati-bupati di atas mirip replika raja Mataram dalam skala yang lebih kecil; di mana mereka seperti penguasa Mataram mempunyai simbol-simbol kebesaran pula, yakni payung kebesaran (*songsong*), busana kebesaran, senjata pusaka, dan lain sebagainya. Dengan demikian, bupati di Priangan dapat dianggap sebagai wakil atau kepanjangan tangan penguasa Mataram. Mereka menduduki strata tertinggi di Priangan dan disebut *dalem* atau *pagusten* oleh masyarakat setempat.

Salah satu sumber penghasilan bupati berasal dari tanah yang dimilikinya dan disebut *cacah*. Luasnya tanah milik ini menentukan tinggi rendahnya kedudukan bupati yang bersangkutan dan bukannya luas wilayah kabupatennya. Tanah tersebut sangat penting artinya dan ketika seorang bupati pindah ke daerah lain, *cacah* yang semula dimilikinya tidak perlu dilepaskan. Begitu pula bila seorang bupati membuka lahan di tempat jabatan barunya, maka tanah itu akan menjadi haknya. Dengan demikian, tidak mengherankan bila dalam suatu kabupaten terdapat daerah-daerah kantong (*enclave*) milik bupati lain yang telah pindah tugas atau baru bertugas. Tidak jarang hal ini ini memicu perselisihan atau sengketa antar bupati; misalnya antara bupati Parakanmuncang dengan Sukapura mengenai *cacah* di Taraju. Bila terjadi perselisihan semacam ini, raja Mataram yang akan menjadi penengahnya. Persengketaan masalah tanah ini tentu saja memberi kesempatan bagi Mataram memperkuat pengaruhnya.

41. Menurut artikel *Bupati di Priangan* karya A. Sobana Hardjasaputra, catatan kaki 30, halaman 24 disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara *Babad Cirebon* dan *Babad Pasundan*; di mana *Babad Cirebon* sebagai ganti Sekace mencantumkan Sindangkasih.

c. Kabupaten Priangan pada zaman VOC dan Hindia Belanda

Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram semakin merosot dan beberapa daerah jatuh ke tangan VOC, termasuk Priangan. Pada perjanjian yang ditanda tangani pada 19–20 Oktober 1677, VOC memperoleh Priangan Tengah dan Barat. Selanjutnya, semenjak tanggal 5 Oktober 1705, VOC mendapatkan lagi Priangan Timur dan Cirebon; sehingga kini praktis seluruh daerah Priangan jatuh ke tangan Belanda. Mulanya, Priangan itu hanya disewakan saja kepada Belanda. Namun karena penguasa Mataram makin lemah dan kerap meminta bantuan Belanda; lama-kelamaan daerah itu jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan Belanda.

Dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, Belanda mengangkat para bupati bumi putra sebagai kepanjangan tangan mereka dalam memerintah rakyat. Pengangkatan yang berlangsung pada 15 November 1685 itu disertai pula dengan penganugerahan sejumlah tanah lungguh (*apanage*) yang dihitung berdasarkan satuan *cacah*: pangeran Sumedang menerima 1.015 *cacah*, demang Timbanganten menerima 1.125 *cacah*, tumenggung Sukapura menerima 1.125 *cacah*, tumenggung Parakanmuncang menerima 1.076 *cacah*, gubernur Imbanagara menerima 708 *cacah*, dan lurah-lurah Bojonglopang menerima 20 *cacah* serta 10 desa. Untuk mengawasi dan mengatur mereka, VOC mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai bupati kompeni yang bertugas pula melakukan koordinator antar bupati yang berada di bawah kekuasaannya dengan *besluit* atau surat pengangkatan tertanggal 19 Februari 1706.

Agar melakukan tugasnya dengan baik, Belanda menganugerahi mereka berbagai hadiah di luar penghasilan resmi. Adapun tugas-tugas para bupati pada masa itu antara lain:

- Melakukan penanaman kopi, lada, kapas, dan tumbuhan lainnya yang menguntungkan Belanda.
- Menyerahkan hasil di daerahnya pada VOC setiap tahunnya dan bertanggung jawab pula atas transportasinya.
- Mengatur penanaman kopi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Belanda dan menyerahkan hasilnya sebanyak yang telah ditentukan Belanda pula.
- Menyediakan tenaga kerja rodi.
- Menjaga keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya masing-masing
- Tidak diperkenankan memecat bawahannya tanpa persetujuan Belanda atau bupati kompeni.

- Mengadakan sensus setiap tahun dan melaporkan hasilnya pada Belanda.
- Mengawasi kegiatan keagamaan di daerahnya.
- Menghadap secara berkala pada gubernur jenderal di Batavia.

Eksploitasi kompeni berupa penyerahan hasil bumi secara paksa ini disebut *Preangerstelsel* atau Sistem Priangan. Karena kopi saat itu sangat tinggi nilainya di pasaran dunia, maka tumbuhan itu menjadi tanaman wajib utama yang penanamannya secara besar-besaran diawali pada 1707. Penguasa Priangan yang pertama kali menyerahkan hasilnya pada VOC di tahun 1711 adalah Raden Aria Wiratanudatar dari Cianjur.

Belanda masih mempertahankan hak para bupati dalam memungut pajak seperti di zaman Mataram. Pada masa itu, terdapat berbagai jenis pungutan pajak, seperti pajak jembatan, pajak pasar dan warung, pajak penangkapan ikan, pajak penjualan hewan ternak dan kuda, pajak penjualan sawah dan tanah, pajak pemotongan hewan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, setiap ekor kerbau yang dipotong, pajaknya adalah f 1. Selain itu, tanduk, kepala, dan kulitnya harus diserahkan pada bupati. Pajak ada pula yang berupa barang, contohnya adalah pungutan yang disbut *cuke*, yakni 1/10 hasil panen padi. Para bupati juga berhak memperoleh tenaga kerja wajib dari rakyatnya (*pancendiensten*). Ini berarti rakyat diwajibkan bekerja pada bupati sejumlah hari-hari tertentu setiap tahunnya.

Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan Belanda semakin besar dan mereka mulai turut campur dalam roda pemerintahan kabupaten. Belanda mempunyai hak memutuskan sesuatu tanpa berunding atau meminta persetujuan bupati yang bersangkutan terlebih dahulu. Hak mewariskan jabatan secara turun-temurun, kini ditentukan oleh kompeni. Agar hasil yang mereka peroleh lebih maksimal, Belanda belakangan menempatkan orangnya secara langsung untuk mengawasi penanaman kopi di Priangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku ia memerintah kabupaten bersama dengan bupati yang berkuasa di sana; meskipun demikian, secara praktiknya kekuasaan pengawas yang ditempatkan Belanda itu lebih besar.

Borosnya kehidupan para bupati serta makin meningkatnya jumlah hasil bumi yang wajib diserahkan menyebabkan banyak di antara mereka yang terjerumus dalam hutang pada pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya, Belanda merasa bahwa mereka adalah pemilik sah bagi tanah dan wilayah para bupati itu. Sementara itu, para bupati hanya dianggap meminjam atau menyewa saja dari Belanda. Kendati

demikian, Belanda tetap memanfaatkan mereka, karena pengaruhnya yang cukup besar di kalangan rakyat. Dengan kata lain, Belanda cukup menjalin relasi saja dengan para bupati; sedangkan hubungan dengan rakyat dibebankan pada masing-masing bupati tersebut.

Karena mengalami kebangkrutan pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dan selanjutnya Kepulauan Nusantara diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Ketika Gubernur Jenderal H.W. Daendels berkuasa antara tahun 1808–1811, ia mengadakan banyak perombakan, termasuk dalam hal kebupatian di Priangan. Ia mengubah status bupati dari penguasa yang berdaulat penuh (swapraja) menjadi pegawai pemerintah. Dengan kata lain, mereka akan digaji oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, dalam hal surat menyurat mereka diwajibkan menggunakan stempel resmi pemerintah. Oleh karenanya, semasa pemerintahan Daendels, para bupati semakin menurun kekuasaannya. Posisi mereka berada di bawah seorang pejabat berpangkat *perfect*, yang kedudukannya setingkat residen.

Kebijaksanaan penting Daendels adalah pembuatan Jalan dari Anyer hingga Panarukan (*Grote Postweg*) guna melancarkan birokrasi pemerintahannya. Para bupati Priangan terutama yang daerahnya dilalui oleh proyek jalan itu wajib menyediakan tenaga kerja rodi. Keberhasilan para bupati tak lepas dari kedudukan mereka di tengah masyarakat yang didasari oleh ikatan feodal; sehingga hanya perintah mereka yang bersedia ditaati oleh rakyat. Ketaatan berdasarkan feodalisme ini terbukti sangat sulit dihancurkan oleh pemerintah Belanda.

Daendels mengetahui bahwa Priangan merupakan penghasil kopi yang penting dan memperkirakan bahwa daerah itu mampu menghasilkan kopi sebanyak 10.000 *pikul* (1 *pikul* setara dengan kurang lebih 62 kg) setiap tahunnya. Karenanya, ia berniat menggalakkan penanaman kopi di Priangan. Demi mewujudkan rencananya, Daendels meneliti dan membagi daerah Priangan menjadi daerah penghasil kopi dan bukan penghasil kopi. Bagi daerah produsen kopi utama, Daendels menentukan jumlah kopi yang harus ditanam dan menyampaikan kebijaksanaan tersebut pada para bupatinya; di mana mereka selanjutnya meneruskan perintah itu pada rakyat.

Karena para bupati merupakan pegawai pemerintah kolonial Belanda, mereka dapat dipecat atau dimutasi bila gagal memenuhi tugas yang harus diembannya. Sebagai contoh, Raden Tumenggung Aria Wira Tanureja dari Parakanmuncang pernah dipecat dari kedudukannya karena menolak penanaman pohon kopi sejumlah

300.000 batang. Dengan ketetapan (*besluit*) pemerintah tertanggal 14 Januari 1809, Raden Aria Adiwijaya diangkat sebagai penggantinya. Bupati Sukapura, Raden Demang Anggadipa atau Raden Tumenggung Wiradadaha VIII (1807–1811) pernah pula menjadi korban kebijaksanaan pemerintah kolonial ini. Ia menolak perintah penanaman nila di sawah sebagai pengganti padi; karena bila tanaman padi yang ada di sawah diganti dengan nila, para petani akan kehilangan pendapatannya yang berasal dari pembudi-dayaan padi serta palawija; sehingga terancam bahaya kelaparan. Karena sikap bupatinya yang menentang ketetapan Belanda tersebut, kabupaten Sukapura dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan Limbangan di bawah pimpinan Bupati Raden Tumenggung Wangsareja (1805–1811). Pembangkangan yang dilakukan bupati-bupati di atas menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak ingin menjadi hamba Belanda semata. Meskipun demikian, para bupati daerah penghasil kopi yang sanggup memenuhi kuota pemerintah Belanda justru akan semakin kuat kedudukannya.

Di antara para bupati Priangan ada yang sangat memerdulikan kepentingan rakyat, seperti Raden Adipati Wiranatakusumah II (1794–1829) dari Bandung. Ia merupakan pelopor pembangunan kota Bandung. Warga Balubur Hilir pernah dibebaskan dari pembayaran pajak karena keikut-sertaan mereka dalam membangun kota Bandung. Para bupati tidak hanya berpartisipasi dalam bidang politik dan ekonomi saja, jabatan mereka juga meliputi bidang kemiliteran. Oleh karena itu, gelar-gelar mereka juga diasosiasikan dengan kepangkatan dalam militer. Gelar *tumenggung* setara dengan mayor; *adipati* dan *aria* setara dengan letnan kolonel; dan pangeran disejajarkan dengan kolonel. Itulah sebabnya, bupati Sumedang yang bernama Pangeran Adipati Kusumanegara atau Pangeran Kusmadinata (1791–1828) juga disebut "Pangeran Kornel (dari kata "kolonel").

Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansens, yang sempat memerintah selama 4 bulan saja, karena serbuan armada Inggris pada tahun 1811. Belanda tidak sanggup menahan serbuan tersebut, sehingga Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris melalui penanda-tanganan Perjanjian Tuntang (17 September 1811). Sebagai wakilnya, pemerintah Inggris menempatkan T.S. Raffles. Beberapa kebijaksanaan Daendels tetap dijalankan oleh Raffles, seperti penghapusan hak bupati memerintah secara turun-temurun, di mana jabatan bupati masih tetap sebagai pegawai pemerintah. Tujuannya adalah menghapuskan ikatan feodal

bupati dengan rakyatnya. Hak bupati dalam mengadili rakyatnya juga dihapuskan dan semenjak tahun 1813, mereka hanya menjadi pengawas urusan kepolisian. Ternyata terbukti bahwa Raffles gagal memutuskan ikatan feodal antara bupati dan rakyatnya ini, karena wibawa mereka selaku penguasa tradisional tetaplah besar. Sebagai contoh adalah saat meletusnya pemberontakan Bagus Rangin pada 1812. Pemerintah kolonial Inggris gagal mengatasinya, sehingga harus meminta bantuan bupati Sumedang, Cianjur, dan Karawang; barulah dengan demikian pemberontakan dapat ditumpas.

Semenjak tahun 1816 kekuasaan atas Pulau Jawa balik lagi pada Belanda. Kini, kekuasaan bupati dikurangi kembali dengan peraturan-peraturan tertentu, sehingga memancing ketidak-puasan di kalangan bupati. Gubernur Jenderal van der Capellen mengetahui kenyataan ini dan menyadari betapa besarnya kharisma seorang bupati di mata rakyatnya. Oleh karenanya, dengan *besluit* tertanggal 1 Februari 1820 para bupati dipulihkan kedudukannya sebagai kepala daerah; sehingga mereka bukan lagi pegawai biasa. Van der Capellen menulis surat pada menteri jajahan yang menyatakan bahwa pengurangan kekuasaan beserta hak seorang penguasa tradisional bukanlah tindakan bijaksana karena ia dapat dimanfaatkan sebagai jembatan atau mediator antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat. Pada tahun 1820 dikeluarkan keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa para bupati harus dihormati layaknya penguasa tertinggi di kabupatennya. Meskipun kedudukannya berada di bawah asisten residen, tetapi baik asisten residen maupun bupati harus saling memberikan saran atau nasihatnya. Ditetapkan pula bahwa simbol-simbol kebesaran seorang bupati perlu terus-menerus dipertontonkan pada rakyat. Pemerintah kolonial berharap menuai keuntungan dari semakin kokohnya kekuasaan bupati tersebut. Kendati tugas-tugas seorang bupati dalam mengatur masalah pertanian, peternakan, pengairan, pemeliharaan infrastruktur, penarikan pajak dan lain sebagainya dipaparkan dengan jelas; tetapi pada sisi lain tidak ada peraturan yang pasti mengenai hak dan kekuasaan mereka.

Gubernur Jenderal van den Bosch (1830–1833) yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pertanian di Pulau Jawa menerapkan sistem Tanam Paksa (*Kultuurstelsel*). Demi menyukseskan peraturan baru ini diperlukan kerjasama dengan para penguasa tradisional, termasuk bupati. Untuk itulah mereka perlu dirangkul, melalui restorasi hak-hak lama mereka, seperti mewariskan jabatan

secara turun-temurun[42]. Kebijaksanaan Van den Bosch ini membuahkan hasil, karena para bupati menjadi lebih giat menggerakkan rakyatnya meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan sebagaimana yang dikehendaki penjajah. Atas usahanya ini, mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial. Raden Adipati Wiranatakusumah IV (1846–1874), bupati Bandung, mendapatkan pembagian keuntunguan sebesar f 800.000 per tahunnya, sehingga ia menjadi bupati Priangan terkaya pada masa itu dan saat meninggal, kekayaannya mencapai f. 4.000.000. Dalam melaksanakan kewajibannya, bupati Bandung tidak hanya mendorong rakyat bekerja keras, melainkan juga memajukan pertanian dan kehidupan rakyat. Bupati-bupati lain yang sanggup meraup keuntungan besar adalah bupati Sumedang, Cianjur, dan Sukapura.

Lebih jauh lagi, di antara para bupati ada juga yang bertindak sewenang-wenang dan menindas rakyatnya, karena ingin menunjukkan loyalitasnya pada Belanda serta mendapatkan imbalan besar. Bupati Limbangan pada 7 Januari 1838 pernah memerintahkan para wedana menghukum berat orang yang tak bersedia mengolah sawah dengan mengikatkan tangan beserta kakinya pada dua bilah papan kayu selama sehari. Selain itu, banyak pula penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh anak buah bupati, umpamanya saat mengumpulkan pungutan dari rakyat. Tindakan-tindakan negatif semacam ini tentu saja merusak nama bupati yang bersangkutan, sehingga wibawanya merosot di mata rakyat. Apabila ketidak-puasan telah semakin merebak, meletus beberapa pemberontakan, seperti di Cilegon pada tahun 1888.

Menjelang pertengahan abad ke-19, bangkit gerakan liberal di Belanda yang menentang praktik-praktik tak manusiawi Tanam Paksa. Oleh karena itu, secara bertahap pelaksanaan tanam paksa dihapuskan. Penentangan ini semakin kuat, setelah terbitnya buku karya Multatuli berjudul *Max Havellar* dan tulisan Frans van de Putte berjudul *Suiker Contracten*. Isinya memaparkan penderitaan rakyat yang timbul akibat sistem Tanam Paksa tersebut. Akhirnya pada tahun 1870, Tanam Paksa secara resmi dihapuskan, terkecuali bagi tanaman kopi yang baru berakhir tahun 1917. Selanjutnya, pada kurun waktu akhir abad ke-19, Belanda melakukan berbagai reorganisasi pemerintahan Priangan, berupa pembagian ulang kawasan itu menjadi 9 *afdeeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen atau patih *afdeeling* (*zelfstandige-patih*): *Afdeeling* Bandung dengan bupati Raden Adipati

42. Dengan Peraturan Pemerintah (*Regeringsreglement*/ RR) tahun 1836.

Wiranatakusumah IV dan patihnya Raden Kusumadilaga; *Afdeeling* Cicalengka (ibukota Cicalengka) dengan patihnya Raden Demang Wiradikusuma; *Afdeeling* Cianjur (ibukota Cianjur) dengan bupati Raden Tumenggung Prawiradirja dan patihnya Raden Aria Wiradireja; *Afdeeling* Sumedang (ibukota Sumedang) dengan bupati Pangeran Suria Kusumadinata dan patihnya Raden Sacadipraja; *Afdeeling* Limbangan (ibukota Garut) dengan bupati Raden Adipati Surianatakusuma dan patihnya Raden Rangga Anggaadiwijaya; *Afdeeling* Sukapura (ibukota Manonjaya) dengan bupati Raden Tumenggung Wiratanubaya IV dan patihnya Raden Rangga Danukusuma; *Afdeeling* Sukapura Kolot (ibukota Mangunreja) dengan bupati Raden Prawirakusuma; *Afdeeling* Tasikmalaya (ibukota Tasikmalaya) dengan patihnya Raden Rangga Somanagara; dan *Afdeeling* Sukabumi (ibukota Sukabumi) dengan patih Raden Rangga Wangsareja. Dengan adanya ketetapan baru ini, wewenang bupati semakin menurun, karena patih *afdeeling* yang lebih besar kekuasaannya dan segenap kewenangan berada di tangan residen Belanda. Dengan demikian, seorang bupati hanya ditampilkan sebagai figur atau simbol saja di hadapan rakyatnya. Semenjak 1 Januari 1871, hak bupati menarik pajak baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi serta memerintahkan kerja wajib bagi rakyatnya dihapuskan. Namun khusus bagi bupati-bupati Priangan, mereka masih diperbolehkan memiliki tenaga kerja wajib sebanyak 40 orang setiap harinya. Inilah pembeda antara bupati-bupati Priangan dengan tempat-tempat lainnya.

Sebagai pengganti hak mereka dalam memungut pajak yang telah diambil alih pemerintah kolonial, para bupati tersebut menerima gaji beserta tunjangan yang cukup tinggi dan selain itu masih mendapatkan komisi atau bonus atas penyerahan hasil kopi dari daerah mereka. Gaji yang diterima oleh bupati-bupati Priangan boleh dikatakan tinggi dan melebihi daerah lainnya. Rata-rata mereka menerima gaji f 20.000 per tahun (bandingkan dengan bupati Semarang dan Surabaya yang hanya menerima f 14.000 dan tunjangan f 2.400 per tahunnya). Yang paling tinggi tunjangannya adalah bupati Bandung, yakni sebesar f 100.000. Selain itu, mereka masih mendapatkan bonus sebesar f 1 tiap *pikul* kopi yang diserahkan.

Para bupati yang berjasa meningkatkan produksi kopi atau kemajuan daerahnya akan memperoleh tanda penghargaan dari Belanda. Terdapat sederetan bupati yang menerima penghargaan semacam itu menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 atas keberhasilan mereka memajukan daerahnya. Raden Adipati Aria

Kusumadiningrat (1839–1886) dari Galuh memperoleh anugerah berupa payung kebesaran dan bintang jasa *Ridder in de Orde van den Nederlanschen Leeuw*; yang masing-masing dianugerahkan pada tahun 1874 dan 1878, atas jasanya membangun tiga pabrik penggilingan kopi, membuka areal persawahan baru, membangun jalan antara Panjalu–Kawali, dan mendirikan sekolah bernama *Sakola Sunda* pada tahun 1876 di Kawali serta Ciamis. Raden Adipati Wiranatakusumah IV (1846–1874) dari Bandung berjasa memajukan perkebunan kopi dan pertanian. Itulah sebabnya, Belanda menganugerahkan bintang *Ridder in de Orde van den Nederlanschen Leeuw*, sehingga ia dikenal pula dengan sebutan Dalem Bintang. Raden Adipati Kusumadilaga (1874–1893) yang menggantikan Wiranatakusumah IV sebagai bupati Bandung tercatat keberhasilannya dalam memajukan kehidupan rakyat melalui koperasi. Bupati Limbangan (Garut) yang bernama Raden Adipati Wiratanudatar (1871–1915) berhasil memajukan pendidikan dan perdagangan di kabupatennya, sehingga mendapat penghargaan berupa bintang *Officier in de Orde van Oranje Nassau* dan Bintang Mas. Pangeran Aria Suria Atmaja (1882–1919) mendapat penghargaan berupa Bintang Mas karena berjasa menanggulangi wabah penyakit dan memajukan kabupaten yang diperintahnya. Selain itu, ia masih menerima anugerah berupa payung kebesaran (*Songsong Kuning*) pada tahun 1906.

Bupati Bandung, Raden Adipati Aria Martanagara (1893–1918) berjasa meningkatkan hasil kopi, memproduksi genteng bagi tempat kediaman rakyatnya, membangun sarana pengairan dan infrastruktur berupa jembatan, membuka areal pertanian, dan lain sebagainya. Dengan *besluit* no.2 tertanggal 27 Agustus 1900, ia memperoleh anugerah Bintang Mas dan gelar adipati (*besluit* tertanggal 29 Agustus 1906). Bahkan, ia pernah menerima kunjungan raja Siam dan menerima penghargaan *Officier Kroon Orde van Siam*. Selain itu, ia tersohor pula sebagai sastrawan yang menulis *Babad Sumedang, Wawacan Angling Darma, Babad Raden Adipati Aria Martanagara* (otobiografi dirinya), dan *Wawacan Batara Rama*. Bupati yang terkenal memajukan kebudayaan adalah Raden Adipati Wiranatakusumah V (Raden Adipati Kusumadilaga). Ia tercatat menghidupkan kembali kesenian wayang. Bupati lainnya yang juga memperoleh penghargaan adalah Raden Prawiradireja (1863–1910) dari Cianjur berupa hak memakai gelar adipati dan demikian pula dengan Raden Wirahadiningrat (1874–1906) dari Sukapura, yang masih ditambah lagi dengan bintang *Oranye Nassau*. Pangeran Suriakusumah Adinata (1836–1882) dari Sumedang

memerhatikan pendidikan di daerahnya dengan mendirikan sekolah atas biayanya sendiri pada tahun 1867; di mana seseorang berkebangsaan Belanda bernama G. Warnaar menjadi salah satu gurunya.

d. Sistem pemerintahan

Para bupati di Priangan pernah mengalami pasang surut dari segi wewenang dan kekuasaannya, sebagaimana yang baru saja diulas di atas. Sebelum jatuh ke tangan Mataram, di sana pernah berdiri Kerajaan Sumedang Larang. Namun kemudian turun posisinya menjadi wedana bupati Priangan (merangkap bupati Sumedang), yang masih lebih tinggi kedudukannya dibandingkan bupati-bupati Priangan lainnya. Jabatan wedana bupati ini pada perkembangan selanjutnya dihapuskan. Pada zaman Belanda, kedudukan bupati sebagai kepala daerah yang bebas pernah berubah sebagai pegawai biasa, di mana wewenang mereka kerap berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

Jalinan bupati dengan rakyatnya boleh dikatakan sangat kuat karena ikatan feodal masa itu. Belanda berupaya memutuskan mata rantai ikatan ini, tetapi gagal. Secara umum Belanda menggunakan sistem pemerintahan tak langsung, di mana mereka tidak berhubungan langsung dengan rakyat; melainkan melalui perantaraan para bupati tersebut. Untuk selanjutnya, para bupati itu yang meneruskan perintah Belanda pada rakyatnya. Di bawah bupati masih terdapat lagi wedana (*cutak*) dan para lurah, yang menjadi saluran perintah Belanda pada rakyat. Secara umum, strukturnya adalah sebagai berikut:

Gubernur jenderal

Residen

Bupati — **Asisten residen**

Wedana (*cutak*)

Kepala desa
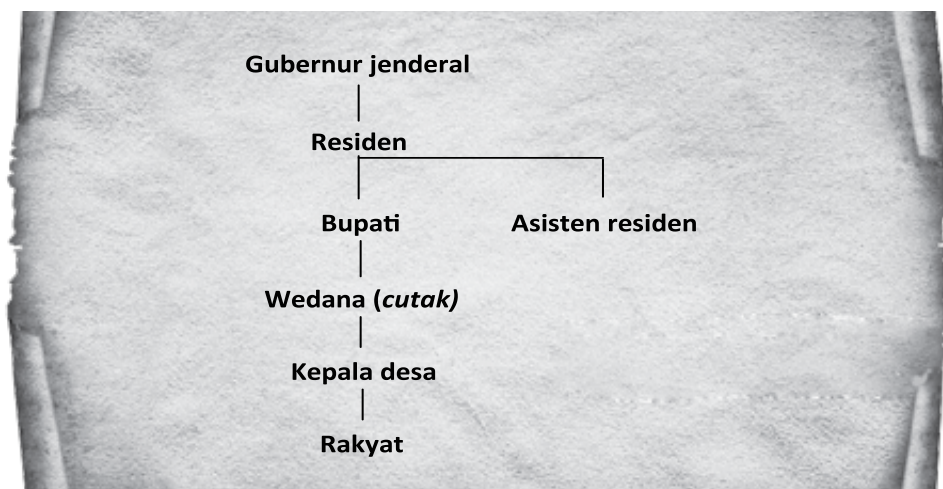
Rakyat

Belanda memerlukan para bupati ini sebagai perantara karena kuatnya ikatan mereka dengan rakyatnya. Hanya perintah mereka yang bersedia ditaati oleh rakyat.

B. KERAJAAN-KERAJAAN DI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

Peta Lama Pulau Jawa
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, Deel II, halaman 349.

Menjelang dan setelah berakhirnya Kerajaan Majapahit, di pantai utara Jawa Tengah serta Jawa Timur tumbuh dan berkembang kerajaan-kerajaan setengah merdeka dan setelah itu merdeka penuh. Meskipun demikian, sebagian besar kerajaan-kerajaan tersebut tidak panjang usianya. Berikut ini akan diulas beberapa kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di pantai utara Jawa Tengah serta Jawa Timur. Raja pertama Pati adalah Ki Panjawi, yang merupakan kawan seperjuangan Kyai Gede Pemanahan[43] (Ki Gede Pamanahan-cikal-bakal raja-raja Mataram). Ki Panjawi beserta Kyai Gede Pemanahan mengabdi dalam ketentaraan Demak. Namun setelah kejatuhan Demak, Ki Panjawi berkesempatan memerdekakan dirinya, di mana peristiwa ini terjadi pada pertengahan abad ke-16. Sesudah berdirinya Pajang, Ki Panjawi mengakui kekuasaan kerajaan tersebut. Putri Ki Panjawi kemudian diberitakan menikah dengan Panembahan Senopati, putra Kyai Gede Pemanahan. Pengganti Ki

43. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 102.

Panjawi adalah putranya bernama Pragola. Timbul permusuhan antara Pragola dengan saudara iparnya, Panembahan Senopati. Pemicunya adalah pengambilan paksa putri Panembahan Mas, keturunan keluarga raja Demak, sebagai istri muda Panembahan Senopati; di mana hal ini menyinggung perasaan Pragola karena dianggap sebagai penghinaan terhadap saudara perempuannya. Serangan Panembahan Senopati yang kala itu telah menjadi raja Mataram pada tahun 1598 dan 1599, dianggap sebagai tantangan bagi Pati. Itulah sebabnya, Pragola lantas melancarkan serangan ke Mataram pada tahun 1600, namun berhasil dipukul mundur. Pragola kemudian digantikan oleh putranya yang disebut Pragola II. Ia merupakan raja Pati terakhir. Peperangan pada 1627 menamatkan riwayat Kerajaan Pati dan Pragola II gugur karenanya. Putranya yang masih kecil lantas diungsikan ke Prawata.

Selanjutnya, terdapat Jepara yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat (abad ke-16). Suami beliau dibunuh oleh Arya Penangsang. Karena perasaan dendamnya yang membara, konon Ratu Kalinyamat bersumpah telanjang dengan tubuh hanya ditutupi oleh rambutnya yang panjang mengurai, selama Arya Penangsang masih hidup. Akhirnya, Jaka Tingkir berhasil menghabisi Arya Penangsang, sehingga berakhir pulalah sumpah Ratu Kalinyamat. Menurut berita Portugis, Kerajaan Tanah Hitu di Maluku pernah meminta bantuan Jepara guna melawan Portugis[44]. *Hikayat Tanah Hitu* karya Rijali juga memberitakan mengenai hubungan antara Ambon dan Jepara ini. Ratu Kalinyamat yang diperkirakan meninggal pada sekitar 1579 kemudian digantikan oleh kemenakan dan sekaligus anak angkatnya, Pangeran Jepara. Menjelang akhir abad ke-16, Jepara masih memiliki armada laut yang tangguh. Terbukti pada tahun 1593, Pangeran Jepara memerintahkan penguasaan Pulau Bawean di Laut Jawa. Demikian pula laporan Belanda tahun 1598 memberitakan bahwa Jepara nampak mempunyai kekuatan besar. Kendati demikian, Kerajaan Mataram yang semakin tumbuh tampaknya mengakhiri kedaulatan Jepara, di mana keruntuhan ini diperkirakan terjadi awal abad ke-17.

Tuban semenjak lama menjadi kota penting di pantai utara Jawa Timur. Menurut laporan Tomé Pires, Tuban memiliki keraton yang mewah dengan tembok pertahanan tangguh. Meskipun demikian, peranannya dalam dunia perniagaan tidak setenar Gresik[45]. Konon cikal-bakal para penguasa Tuban adalah Dandang Wacana dengan

44. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 120.
45. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 150.

putranya bernama Ronggolawe, pahlawan Majapahit[46]. Meskipun para penguasanya telah menganut Islam, Gresik tetap menjalin hubungan yang baik dengan Majapahit di pedalaman. Masih menurut Tomé Pires, pada abad ke-16, Tuban diperintah oleh raja bernama Pate Vira. Berdasarkan hikayat-hikayat yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada masa itu Tuban diperintah oleh raja bergelar Aria Wila-Tikta. Kemungkinan Pate Vira ini sama dengan Aria Wila-Tikta. Beliau merupakan putra ulama keturunan Arab bernama Abdurrahman yang kemudian digelari Aria Teja. Raja Tuban masa itu, Aria Dikara, menganut agama Islam berkat Abdurrahman. Selanjutnya, ia dinikahkan dengan putri Aria Dikara dan dikaruniai putra bernama Aria Wila-Tikta. Dengan demikian, Aria Wila-Tikta merupakan cucu raja Tuban pertama yang menganut Agama Islam. Para adipati Tuban pengganti Aria Wila-Tikta secara berturut-turut adalah Kyai Ageng Ngraseh, Kyai Ageng Gegilang, Kyai Ageng Batabang, Raden Aryo Balewot, Pangeran Sekartanjung, Pangeran Ngangsar, dan Pangeran Aria Pamalad[47]. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Aria Pamalad menikah dengan putri sultan Pajang. Beliau seharusnya digantikan oleh putranya bernama Pangeran Dalem. Namun karena Pangeran Dalem masih kecil, tampuk pemerintahan Tuban dipegang oleh Pangeran Aria Salampe. Setelah Pangeran Dalem dewasa, barulah ia mewarisi singgasana Tuban. Kerajaan Tuban ditundukkan pada tahun 1619 oleh Mataram dan setelah itu di sana memerintah para bupati yang didudukkan oleh sultan Mataram.

Tomé Pires menganggap Gresik sebagai pelabuhan terkaya dan terpenting di seluruh Jawa[48]. Ketika itu ada dua penguasa di Gresik yang saling bersaing satu sama lain, yakni Pate Cucuf dan Pate Zeinall. Wilayah kekuasaan mereka dipisahkan oleh sungai kecil. Pate Cucuf memerintah bagian terpenting kota yang terkait dengan perniagaan. Katanya, ia masih kerabat Kerajaan Malaka. Sementara itu, Pate Zeinall memerintah bagian pedalaman yang masyarakat masih bersifat agraris.

Di sebelah timur Gresik terhadap Surabaya yang diperintah oleh Panembahan Jayalengkara. Menurut Tomé Pires, Surabaya tidaklah sepenting Gresik dan rajanya bernama Pate Bobat. Ia berasal dari kalangan budak belian yang mengabdi pada kakek

46. Menurut **http://adipatironggolawe.blogspot.com** (diunduh tanggal 7 Desember 2011), para adipati Tuban setelah Ronggolawe adalah Raden Sirolawe, Raden Hariyo Sirowenang, dan Raden Hariyo Lena. Raden Hariyo Lena digantikan oleh Aria Dikara.
47. Lihat **http://adipatironggolawe.blogspot.com** (diunduh tanggal 7 Desember 2011).
48. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 157.

seorang tokoh bernama Guste Pate[49]. Pada perkembangan selanjutnya, Guste Pate menganugerahkan gelar bagi raja Surabaya yang dalam transliterasi Portugis menjadi berbunyi *jurupa galacam jmteram*. Tampaknya bunyi aslinya adalah Surapati Ngalaga in Terung atau "Panglima Unggul dari Terung." Menurut sumber lainnya, disebutkan bahwa Sunan Ngampel Denta diangkat sebagai imam Masjid Surabaya oleh seorang *pecat tandha* di Terung bernama Aria Sena[50]. Dengan demikian, pemberitaan ini selaras dengan laporan Tomé Pires. Penjelajah Portugis lainnya Mendéz Pinto menyebutkan setelah mangkatnya Sultan Trenggono dari Demak, Pate Sudayo dari Surabaya dipilih sebagai raja dalam sidang para raja. Dalam daftar urutan para penguasa Surabaya, terdapat nama Sunjaya[51]. Barangkali beliaulah yang dimaksud oleh Mendéz Pinto. Meskipun demikian, tidak ada bukti kuat bahwa para penguasa Surabaya sesudahnya merupakan keturunan Surapati Ngalaga ing Terung. Pangeran Jayalengkara merupakan penguasa Surabaya berdaulat terakhir yang gigih berjuang melawan ekspansi Mataram. Perjuangan ini berakhir dengan takluknya Surabaya pada tahun 1625.

Masih menurut laporan Tomé Pires, penguasa Pasuruan bernama Pate Sepetat, putra tokoh bernama Guste Pate. Ia merupakan menantu penguasa Blambangan bernama Pati Pentor (Pate Pimtor) dan juga menantu raja Madura. Tokoh ini tampaknya dapat disamakan dengan Menak Sepetak, pendiri Pasuruan, menurut legenda setempat[52]. Ia digantikan putranya bernama Adipati Dengkol. Seiring dengan berjalannya waktu, di Madura memerintah seorang raja bernama Lemah Duwur yang menikah dengan putri sultan Pajang. Pernikahan ini membuahkan seorang putri yang kemudian dinikahkan dengan penguasa Pasuruan berikutnya, Ki Gede Kapulungan. Pada tahun 1590, pasukan Mataram berhasil mengalahkan laskar Pasuruan di bawah pimpinan Adipati Kaniten, bawahan raja Pasuruan. Sebagai akibat kekalahannya itu, Adipati Kaniten dijatuhi hukuman mati. Kedaulatan Pasuruan berakhir pada tahun 1616 dengan didudukinya kawasan tersebut oleh Sultan Agung dari Mataram. Berikut ini kita akan mengulas kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang lebih panjang usianya.

---

49. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 178.
50. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, halaman 179.
51. Nama urutan raja-raja setelah Surapati Ngalaga ing Terung menurut **http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchs_of_Java#Rulers_of_Surabaya** (diunduh pada 7 Desember 2011) adalah Pangeran Tundung musuh, Pangeran Lena, Pangeran Jebuk, Pangeran Wanakrama, Panembahan Rama, Pangeran Surabaya, Pangeran Sunjaya, dan Pangeran Jayalengkara.
52. Lihat *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, hlm. 201.

Menara Mesjid di Kudus
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, Deel I, halaman 363.

I. BLAMBANGAN (BALAMBANGAN)

Blambangan merupakan kerajaan terakhir di Pulau Jawa yang bercorak Hindu dan wilayahnya dahulu pernah meliputi penghujung timur Jawa Timur hingga Lumajang di bagian selatan serta Panarukan di utara. Letaknya cukup strategis dan dikelilingi oleh lautan di ketiga sisinya; sehingga banyak memiliki pelabuhan. Salah satu pelabuhan di pesisir utara Blambangan yang paling terkenal adalah Panarukan, yang dalam sumber China disebut Ben-zi-gun-an[53]. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan transit atau persinggahan terpenting bagi kapal-kapal yang hendak melanjutkan pelayarannya ke Maluku untuk berniaga rempah-rempah.

Kerajaan ini dulunya merupakan vasal Majapahit. Meskipun demikian, pada mulanya tidak mudah bagi Majapahit menguasai Blambangan karena medannya relatif sulit menurut ukuran zaman itu. Raden Wijaya sendiri–pendiri Majapahit–mengalami kesulitan dalam menaklukkan Adipati Viraraja (Wiraraja), penguasa Blambangan, dan kawasan tersebut tetap menjadi daerah yang otonom hingga wafatnya Nambi, putra Wiraraja, pad tahun 1316. Ketika terjadi perang perebutan takhta di Majapahit, salah satu pihak yang tersingkir, Bhre Wirabumi, melarikan diri ke Blambangan dan dari sana ia terus-menerus menentang Wikramawardhana hingga kematiannya di tangan Narapati pada tahun 1406. Pada tahun 1478, giliran keluarga Kertabhumi yang melarikan di ke Blambangan setelah Trowulan diluluh-lantakkan oleh Girindrawardhana. Menurut sumber yang berjudul *Babad Sembar*, rombongan yang melarikan diri tersebut dipimpin oleh Lembu Miranda (Lembu Miruda), putra Kertabhumi.

Masih menurut *babad* yang sama, Lembu Miranda yang merupakan putra Brawijaya tiba di hutan Blambangan dan mendirikan pertapaan Watuputih[54]. Ia bersamadi dan memohon anak laki-laki yang keturunannya akan menjadi raja di ujung timur Pulau Jawa. Doanya terkabul dan ia dikaruniai seorang putra bernama Mas Sembar yang kemudian memerintah di Blambangan dan seorang anak perempuan bernama Mas Ayu. Mas Sembar memiliki tiga orang anak, yang masing-masing bernama Gdhe Punir Cindhe Amoh, Bima Nabrang Wijaya, dan Bima Koncar.

Menjelang awal abad ke-16, cucu Lembu Miranda yang bernama Bima Koncar telah berhasil meneguhkan dirinya sebagai raja Blambangan. Bima Koncar berputra

53. Lihat *Kerajaan-kerajaan Awal di Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*, halaman 417.
54. Lihat *Babad Blambangan*, halaman 53.

tiga orang: Menak Pentor, Menak Kadru, dan Menak Cucu. Laporan selanjutnya mengenai Kerajaan Blambangan datang dari Tomé Pires dalam bukunya *Suma Oriental*. Ia menyebutkan bahwa putra Bima Koncar yang bernama Menak Pentor (Pati Pentor) telah memperluas wilayah Blambangan. Di bawah kekuasaannya, negeri di penghujung timur Pulau Jawa tersebut merupakan kawasan yang kuat, kaya, dan makmur. Jumlah penduduknya cukup banyak dengan panen yang melimpah. Selain itu, Blambangan juga banyak menghasilkan kuda beserta budak. Masalah yang dihadapi Pati Pentor adalah serangan dari penguasa Surabaya, yang telah menganut agama Islam. Kedua kawasan itu, yakni Surabaya dan Blambangan sebenarnya adalah vasal-vasal Majapahit, namun karena kedudukannya yang strategis pada kenyataannya merupakan negara-negara merdeka.

Seiring dengan berjalannya waktu, Majapahit semakin melemah dan kekuasaan mulai bergeser ke kota-kota pelabuhan di pesisir yang kebanyakan penguasanya telah memeluk agama Islam, seperti Demak, Jepara, Gresik, dan Surabaya. Saat itu, Surabaya boleh dikatakan merupakan wilayah atau negara otonom yang cukup kuat di Jawa Timur. Pada saat yang bersamaan, kawasan Panarukan, Probolinggo, dan Pasuruan telah disatukan oleh seorang tokoh bernama Patih Tular. Untuk mengamankan kedudukannya dari penguasa kota-kota pantai lainnya, ia bersekutu dengan Surabaya. Tindakan ini, menurut pandangan Pati Pentor merupakan ancaman bagi Blambangan. Itulah sebabnya, ia lantas menginvasi wilayah yang dikuasai Patih Tular.

Demak yang terus bertumbuh dianggap pula sebagai ancaman oleh Pati Pentor. Itulah sebabnya, ia menjalin hubungan dengan Portugis di Malaka. Kendati demikian, Portugis sendiri kekurangan sumber daya manusia karena begitu luasnya daerah yang telah mereka taklukkan. Selain itu, Pulau Jawa kurang menarik perhatian mereka dibandingkan Kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah; di mana tujuan utama orang-orang Portugis adalah mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan rempah-rempah secepat dan sebanyak mungkin. Pati Pentor digantikan oleh putranya yang bernama Merak Pangseng pada tahun 1531. Pasukan Sultan Trenggana dari Demak menaklukkan Pasuruan pada tahun 1535, tetapi gagal karena perlawanan yang dashyat dari pihak Blambangan. Kurang lebih sepuluh tahun kemudian (1545), Demak menguasai lembah Sungai Brantas, Singosari, dan Malang. Selanjutnya, mereka mengupayakan kembali serangan terhadap Panarukan. Pengepungan itu berlangsung selama tiga bulan dan selama itu, pasukan Demak menjarah, membakar, serta

memperbudak penduduknya. Mereka bahkan menyerbu Blambangan dan membakar daerah pinggirannya. Tetapi, karena Trenggana dibunuh pada tahun 1546, pasukan Demak terpaksa melarikan dirinya dan dikejar oleh Blambangan.

Selama konflik berkepanjangan dengan Demak itu, sumber daya negeri ini terkuras habis. Sawah-sawah dibakar, pemukiman penduduk dihancurkan, dan warganya banyak yang dijadikan budak. Setelah Demak mundur, giliran Bali di bawah pimpinan Raja Dalem Watu Renggong menyerang Blambangan, sehingga antara tahun 1550–1570, Blambangan berada di bawah pengaruh Kerajaan Gelgel dari Bali. Panarukan juga jatuh ke tangan Wirakrama, penguasa Surabaya. Menurut laporan Portugis, pada tahun 1570, bangkit lagi seorang tokoh bernama Santa Guna menjadi raja Blambangan. Oleh Francis Drake dari Inggris ia disebut Raja Denan. Raja ini tampaknya merupakan keturunan Bima Koncar dan menjadi penguasa kawasan Candi Bang saat berlangsungnya invasi Demak. Wilayah yang dikuasainya itu terlindung oleh pengunungan, sehingga tidak begitu terpengaruh dengan agresi militer Demak. Inilah yang memungkinkannya menguasai kembali kawasan sekitarnya yang telah runtuh dan ditinggalkan pendudukannya akibat ekspansi Demak tersebut.

Santa Guna berhasil merebut Panarukan dan memperkuat Blambangan kembali pada tahun 1575. Francis Drake, salah seorang penjelajah dari Inggris, mengunjungi Blambangan pada bulan Maret 1580 dan menggambarkannya sebagai "lelaki yang sangat aristokratik."[55] Semasa pemerintahannya, ia pernah pula menerima kunjungan delegasi Portugis. Empat orang misionaris Katolik yang berasal dari ordo Fransiskan tiba di Blambangan dan Panarukan pada tahun 1584/1585. Putra mahkota Blambangan masuk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Fransisco. Di Panarukan kemenakan raja Blambangan juga beralih mengikuti keyakinan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidak-senangan sebagian kalangan, sehingga misionaris Portugis yang berkunjung ke sana dibunuh oleh orang-orang Blambangan. Kejayaan Demak makin pudar dan setelah itu digantikan secara berturut-turut oleh Pajang serta Mataram. Panembahan Senapati dari Mataram berambisi menyatukan berbagai kerajaan merdeka di sekelilingnya termasuk Blambangan. Pada tahun 1588, Santa Guna mengundurkan diri dari pemerintahan dan menyerahkan takhta pada putranya guna menjadi pertapa sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu.

---

55. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*, halaman 420.

Putra Santa Guna merupakan penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan kemunduran Blambangan. Ia tidak dapat menolak permintaan penguasa Pasuruan yang telah menganut agama Islam untuk menikahi putrinya pada tahun 1596. Sehari setelah berlangsungnya upacara pernikahan putri itu dibunuh oleh suaminya dengan alasan tidak bersedia menganut agama Islam[56]. Setelah insiden pembunuhan ini, Pasuruan mengirimkan pasukannya menaklukkan Blambangan. Meskipun Panarukan, Bali, dan Sumbawa turun membantu Blambangan, negeri itu dapat dihancurkan pada tahun 1597.

Seluruh keluarga raja terbunuh, kecuali istri Santa Guna yang telah lanjut usianya. Ia merupakan putri Menak Cucu sehingga dianggap paling berhak menduduki singgasana Blambangan. Kendati demikian, salah seorang raja bawahan Blambangan yang bernama Mas Krian membunuh ibusuri dan merampas kedudukan sebagai raja Blambangan (1597–1632/ 1633)[57]. Demi membendung ambisi Mataram, Mas Krian mengupayakan aliansi dengan VOC. Pada tahun 1631, ia mengundang Belanda menetap di negerinya dan bersedia menyediakan beras, sapi, babi, beserta budak bagi VOC. Kendati demikian, undangan ini ditolak oleh Belanda.

Mataram semakin kuat pada masa itu, sehingga mengancam kedudukan Pasuruan selaku salah satu kawasan yang masih merdeka. Oleh karena itu, Pasuruan lantas menarik mundur pasukannya dari Blambangan. Kesempatan ini dimanfaatkan Bali menduduki Blambangan lagi. Mereka menempatkan wakilnya bernama Singasari, buyut Menak Kadru, yang bergelar Tawang Alun I sebagai penguasa di Blambangan. Singasari lantas menghabisi nyawa Mas Krian di tahun 1633. Sultan Agung dari Mataram tidak tinggal diam dan mengirimkan angkatan perangnya merebut Blambangan pada tahun 1635. Serangan Mataram baru barhasil tiga tahun kemudian (1638). Tawang Alun I meminta bantuan Bali, namun sia-sia belaka. Ia terpaksa melarikan diri, tetapi putra mahkotanya bernama Mas Kembar ditawan pasukan Mataram.

Kurang lebih tahun 1645, Mas Kembar kembali ke Blambangan dan dinobatkan sebagai raja Blambangan dengan gelar Tawang Alun II (± 1645–1691). Bali melancarkan serangannya terhadap Blambangan, sehingga Tawang Alun II terpaksa menyerah. Mataram yang kini dipimpin oleh Amangkurat I mengirimkan

56. Lihat *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*, halaman 421.
57. Lihat *Babad Blambangan*, halaman 312.

pasukannya. Pertempuran antara Bali dan Mataram pun berkobar. Laskar Bali menderita kekalahan, tetapi di pihak Mataram jatuh korban yang tak sedikit. Belakangan Blambangan melepaskan diri dari Mataram. Akibatnya, Mataram berulang kali menyerang Blambangan, tetapi negeri di penghujung Jawa Timur itu tetap sanggup mempertahankan kedaulatannya. Ketika Amangkurat II menjadi raja Mataram menggantikan ayahnya, Tawang Alun II tetap tak sudi mengakui kekuasaan Mataram.

Tawang Alun II menegakkan kembali kejayaan Blambangan dan kerajaannya menjadi makmur. Pada tahun 1684/1685, utusan VOC bernama Jeremias van Vliet menyarankan Tawang Alun II agar menghentikan permusuhannya terhadap Mataram. Meskipun demikian, ia tak bersedia mematuhi saran tersebut. Ketika usianya telah lanjut, Tawang Alun II memerintah bersama tiga putranya, yakni Dalam Agung, Dalam Pati, dan Mancanegara. Menjelang akhir masa pemerintahannya, meletus pemberontakan Untung Surapati.

Sepeninggal Tawang Alun II, tiga orang putranya memerintah bersama. Kendati demikian, tak lama kemudian mereka berebut kekuasaan. Dalam Pati (Senapati) berupaya menjadi satu-satunya raja di Blambangan; tetapi niatnya ini digagalkan oleh saudara-saudaranya yang lantas membunuhnya. Istri beserta putranya bernama Pangeran Putra melarikan diri ke Pasuruan dan diterima dengan baik oleh Untung Surapati. Mancanegara yang ingin bersekutu dengan VOC dalam menumpas pemberontakan Surapati dibunuh pada tahun 1692. Kini penguasa Blambangan tinggal Dalam Agung (Mancanapura, memerintah sendiri 1692–1697). Ia mengadakan perjanjian dengan Pasuruan dan bersedia menyerahkan kawasan Panarukan, Jember, dan Malang. Dengan demikian, wilayah Blambangan yang tersisa tinggal pesisir timur Jawa. Dalam Agung tidak bersedia menjalin persekutuan dengan VOC meski kedua belah pihak tetap bersahabat.

Persahabatan antara Blambangan dan Belanda ini kurang disukai oleh Bali, sehingga memicu serangan angkatan perang Bali pada tahun 1692. Bali melarang Blambangan memusuhi Untung Surapati. Sewaktu menyeberang kembali ke negerinya, laskar Bali memboyong pusaka-pusaka Blambangan tanpa sanggup dicegah oleh raja Blambangan. Putra Dalam Pati yang menyingkir ke Pasuruan berkeinginan menuntut takhta yang dirasa menjadi haknya. Ia lantas meminta bantuan Panji Sakti, raja Buleleng guna menggulingkan kekuasaan pamannya, Dalam Agung.

Balatentara Buleleng menyerang Blambangan (1697) dan Dalam Agung terpaksa melarikan diri ke Prabalingga. Pangeran Putra (1697–1736) lantas dinobatkan sebagai raja Blambangan dengan gelar Danureja. Bali menuntut agar Jayalelana, bupati Prabalingga, menyerahkan Dalam Agung. Karena Jayalelana menolak tuntuntan ini, serangan dilancarkan terhadap Prabalingga. Akibatnya, Dalam Agung menyingkir lagi ke arah barat. Bersamaan dengan itu, Mengwi yang merupakan salah satu kerajaan di Bali makin melebarkan sayapnya dan Blambangan masuk dalam payung pengaruh Mengwi.

Danuningrat (Mas Sepuh, 1736–1767), putra Pangeran Putra menggantikan ayahnya pada tahun 1736. Namun dalam menjalankan roda pemerintahan Blambangan ia didampingi oleh wali-walinya. Baru pada tahun 1745 ia memerintah sendiri. Mataram menyerahkan beberapa wilayahnya di Jawa Timur termasuk Blambangan pada VOC berdasarkan perjanjian tahun 1743; padahal Mengwi juga menganggap Blambangan sebagai daerah pengaruhnya. Dengan demikian, kepemilikan VOC atas Blambangan boleh dianggap hanya di atas kertas belaka. Mengwi mengirimkan pasukannya pada tahun 1764 karena menganggap Blambangan tak lagi mengakui kekuasaannya. Danuningrat minta bantuan Prabalingga, tetapi ditolak. Raja Mengwi memerintahkan agar Danuningrat datang ke Bali, namun ia dibunuh di pantai Seseh (Bali) pada tahun 1767. Konon sebelum menemui ajalnya Mas Sepuh atau Danuningrat sempat mengutuk Mengwi. Belanda memanfaatkan kesempatan ini dan menguasai Blambangan serta mengusir orang-orang Bali.

Pangeran Wilis yang merupakan saudara Danuningrat menerbitkan pemberontakan secara terbuka melawan VOC pada 21 Maret 1768. Pergolakan akhirnya dapat dipadamkan dan Pangeran Wilis diasingkan ke Banda beserta putra-putranya. Hingga sejauh ini berdasarkan uraian di atas, setelah menegakkan dirinya sebagai sebuah kerajaan, Blambangan selanjutnya secara bergantian dikuasai oleh Bali dan Mataram. Meskipun demikian, tidak jarang Blambangan berhasil menegakkan kembali kemerdekaannya. Setelah pemberontakan Pangeran Wilis dipadamkan, Blambangan jatuh ke dalam payung kekuasaan Belanda.

Salah seorang cabang anggota keluarga raja-raja Blambangan bernama Mas Alit, saudara Nawangsari–istri Danuningrat, diangkat oleh Belanda sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Banyuwangi I (1773–1782). Pusat pemerintahannya mula-mula berada di Pampang; tetapi setelah itu dipindahkan ke Banyuwangi. Ia digantikan

oleh saudaranya, Mas Talib, selaku Tumenggung Banyuwangi II (1782–± 1818). Selanjutnya, para penguasa berikutnya adalah Raden Suranegara (putra Mas Talib, Tumenggung Banyuwangi III, 1820–1832), Raden Wiryahadikusuma (cucu Mas Alit, Tumenggung Banyuwangi IV, 1832–1867), dan Raden Pringgakusuma (putra Raden Suranegara, Tumenggung Banyuwangi V, 1867–1881). Pringgakusuma merupakan penguasa penghabisan dari dinasti tersebut.

II. DEMAK, PAJANG, & MATARAM

Uraian mengenai sejarah Demak, Pajang, dan Mataram dijadikan satu karena masing-masing kerajaan tersebut merupakan kelanjutan yang lainnya, sehingga bila dipisahkan akan membingungkan. Belakangan, Mataram sendiri akan terbagi menjadi empat kerajaan; yakni Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman.

a. DEMAK

Setelah kematian Hayam Wuruk di tahun 1389, imperium Majapahit memasuki masa kekacauan yang panjang. Kerajaan yang pernah "mempersatukan" Kepulauan Nusantara itu semakin melemah dan kerap mengalami intrik perebutan kekuasaan di istananya. Sementara itu, daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa bagian tengah dan timur telah banyak yang menganut agama Islam. Kota-kota pelabuhan yang berada di daerah pesisir itu, seperti Cirebon, Demak, dan Jepara semakin berkembang pesat karena perniagaan; sehingga akhirnya sanggup melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sumber sejarah yang ada, belum sanggup memastikan kapan runtuhnya Majapahit. Tomé Pires, penjelajah Portugis yang mengunjungi Jawa pada sekitar tahun 1511 melaporkan adanya penguasa di daerah pedalaman yang kuat. Kemungkinan yang dimaksud adalah penerus Majapahit yang telah memindahkan pusat kekuasaannya ke Kediri.

Meskipun demikian, Majapahit tampaknya telah ditaklukkan oleh Demak pada kurang lebih tahun 1520–1530an. *Babad-babad* dan karya sastra sejarah Jawa yang ditulis pada masa itu dan belakangan menyajikan gambaran yang berbeda-beda mengenai penaklukan tersebut. Tetapi masing-masing berupaya memberikan kesan bahwa Demak merupakan penerus Majapahit yang sah. Demak dicitrakan sebagai pengganti langsung Majapahit. Raden Patah, sultan pertama Demak disebut sebagai putra raja Majapahit terakhir dengan seorang putri China.

Raden Patah mangkat pada tahun 1518 dan digantikan oleh putranya bernama Pati Unus (1518–1521). Dalam kurun waktu pemerintahannya yang tak begitu

panjang itu, Pati Unus melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Namun, angkatan perang Demak bukanlah tandingan Portugis, sehingga berhasil dicerai-beraikan oleh Portugis.

Sepeninggal Pati Unus, singgasana Demak beralih pada saudaranya, Sultan Trenggana (Trenggono, memerintah 1521–1546). Semasa pemerintahannya, Demak berambisi menaklukkan seluruh Pulau Jawa. Tuban yang merupakan salah satu pelabuhan penting ditundukkan pada tahun 1527. Pelabuhan ini usianya telah sangat tua dan sudah disebutkan oleh berita-berita China semenjak abad ke-11. Kendati telah menganut agama Islam, penguasanya masih setia pada raja Hindu-Buddha yang berada di pedalaman. Madiun giliran direbut pada tahun 1529–1530. Surabaya dan Pasuruan dengan segera mengakui kekuasaan Demak. Pada tahun 1543, Demak menundukkan Gunung Penanggungan yang menjadi tempat keramat bagi penganut agama Hindu saat itu.

Peristiwa penting pada masa kekuasaannya adalah kedatangan seorang ulama terkemuka bernama Fatahillah yang melarikan diri dari kepungan Portugis. Bahkan Fatahillah diterima dengan tangan terbuka oleh Sultan Trenggana dan dinikahkan dengan adiknya. Bangsa Portugis menjalin persekutuan dengan Kerajaan Hindu Pajajaran dan diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kalapa pada tahun 1522. Pasukan Demak yang dipimpin Fatahillah dengan dibantu Cirebon bergerak cepat merebut Sunda Kalapa serta mengubah namanya menjadi Jayakarta. Orang-orang Portugis yang berniat membangun kubu pertahanan di Sunda Kalapa pada tahun 1527, terpaksa membatalkan rencananya.

Sultan Trenggana berupaya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur, tetapi ia tewas saat mengepung Blambangan pada tahun 1546. Saat itu, pembawa tempat sirih sultan merasa dendam pada Trenggana karena pernah dihina olehnya. Oleh sebab itu, ia lantas menikam rajanya dengan keris dan Trenggana pun menemui ajalnya. Terbunuhnya Trenggana ini mengakhiri perang di Blambangan dan sekaligus mengawali perselisihan perebutan takhta di Demak yang berlangsung selama kurang lebih seperempat abad, di mana kerabat Trenggana saling berebut kekuasaan.

Perebutan kekuasaan mula-mula terjadi antara putra dan kakek Trenggana. Pangeran Prawata (1546–1561), putra Trenggana, berhasil menewaskan kakek Trenggana yang belakangan digelari Pangeran Seda Lepen. Tetapi putra Pangeran Seda

Lepen bernama Arya Penangsang membalas dendam dan membunuh Prawata. Dengan tewasnya Prawata perebutan takhta bergejolak kembali. Kali ini pemenangnya adalah adipati Pajang bernama Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggana. Arya Penangsang ditewaskannya dan segera setelah kekuasaan berada dalam genggaman tangannya segenap pusaka Demak diboyong ke Pajang. Dengan demikian, padamlah era Kesultanan Demak dan digantikan oleh Pajang. Putra Pangeran Prawata bernama Arya Pangiri diangkat sebagai bupati atau adipati Demak yang tunduk pada Pajang.

Mesjid Demak
Foto koleksi pribadi

b. PAJANG

Salah seorang menantu Trenggana bernama Jaka Tingkir keluar sebagai pemenang di tengah-tengah kekacauan yang melanda Demak. Sebelumnya, ia menjabat sebagai bupati daerah Pajang. Segera setelah berhasil merebut kekuasaan, ia memboyong segenap pusaka Demak ke Pajang dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana. Peristiwa ini mengakhiri riwayat Kesultanan Demak dan mengangkat Kesultanan Pajang ke panggung sejarah Nusantara. Gelar Jaka Tingkir adalah Sultan Adiwijaya (Adiwijoyo, memerintah 1568–1586).

c. MATARAM

i. Cikal-bakal Kerajaan Mataram

Karena jasanya yang besar terhadap sultan Pajang, Kyai Gede Pemanahan–cikal-bakal raja-raja Mataram–mendapat anugerah tanah di Mataram sebagai hadiah. Kawasan yang berpusat di Kota Gede itu merupakan daerah perdagangan yang makmur dan ramai semenjak lama. Ada kisah menarik mengenai Kyai Gede Pemanahan. Konon, beliau mempunyai seorang sahabat bernama Ki Gede Giring atau Paderesan, yang berprofesi sebagai penyadap nira. Suatu ketika, saat Ki Gede Giring sedang bekerja terdengarlah suara dari sebuah kelapa muda yang berada di dekatnya. Suara itu menyatakan bahwa barangsiapa yang meminum air buah kelapa muda tersebut, keturunannya akan menjadi raja atas Tanah Jawa. Dengan gembira Ki Gede Giring memetik dan membawa pulang buah kelapa muda ajaib itu. Karena belum haus, ia meletakkan begitu saja buah di atas pada sebuah papan. Tak berapa lama kemudian, datanglah Kyai Gede Pemanahan mengunjungi sahabatnya dan melihat buah ajaib itu. Kebetulan ia sedang haus, sehingga tanpa prasangka apa-apa dibelahnya buah kelapa muda sahabatnya serta meneguk airnya hingga habis. Ki Gede Giring tak sempat mencegahnya dan terpana menyaksikan kelakuan sahabatnya. Namun semuanya telah terlambat. Akhirnya, Ki Gede Giring hanya sempat memohon dengan rendah hati agar keturunannya kelak boleh menggantikan keturunan Kyai Gede Pemanahan. Setelah didesak berulang kali, Kyai Gede Pemanahan merasa kasihan dan mengizinkan keturunan Ki Gede Giring menguasai Mataram setelah tujuh turunan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Mataram mulai menggeser peran Pajang selalu pusat pemerintahan. Kyai Gede Pemanahan mangkat pada tahun 1575 dan digantikan oleh putranya bernama Sutawijaya (Sutowijoyo). Bersamaan dengan itu, Pajang mulai melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Sutawijaya untuk memperbesar kekuasaannya. Ia menghalang-halangi dan menghasut para bupati yang tidak suka terhadap Pajang agar tak lagi membayar pajak terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, sultan Pajang mengambil tindakan tegas terhadap pembangkangan Sutawijaya itu, hingga pecahlah peperangan antara Pajang dan Mataram.

Sebelumnya, Sultan Adiwijaya sebenarnya pernah mengangkat Sutawijaya sebagai anaknya dan dididik bersama dengan Pangeran Benawa (Benowo), putra

sultan sendiri[58]. Kedua orang itu, yakni Sutawijaya dan Pangeran Benawa menjadi sahabat karib. Ketika pembangkangan Sutawijaya terdengar oleh Adiwijaya, diutusnya Pangeran Benawa ke Mataram guna memastikan kebenaran berita itu. Namun, karena Pangeran Benawa merupakan sahabat karib Sutawijaya, ia merasa tidak mendapati sesuatupun yang layak dicurigai. Oleh sebab itu, Sultan tidak lagi mendengarkan bisikan-bisikan mengenai rencana Sutawijaya merebut kekuasaan.

Pajang berhasil dikalahkan dan Sultan Adiwijaya gugur karena jatuh dari gajah tunggangannya. Kematian Adiwijaya menimbulkan kekalutan di Pajang, karena menantu dan putra-putra beliau mulai berebut kekuasaan. Di antara mereka, Aria Pengiri–bupati Demak–keluar sebagai pemenang dan mengklaim takhta Pajang. Aria Pengiri melakukan kesalahan besar yang melukai hati orang-orang Pajang. Ia merampas sepertiga sawah rakyat Pajang dan menyerahkannya pada kaum pengikutnya di Demak. Rakyat Pajang merasa terhina dan meminta bantuan Sutawijaya mengenyahkan Aria Pengiri. Pada mulanya, Sutawijaya pura-pura menolak. Namun, setelah mendengar bahwa Aria Pengiri berniat membunuhnya beserta Pangeran Benawa, barulah ia bergerak menggempur Aria Pengiri. Mataram meraih kemenangan dan berhasil menghalau Aria Pengiri kembali ke Demak.

Sutawijaya kemudian memboyong segenap perangkat kebesaran beserta pusaka Pajang yang diserahkan Pangeran Benawa padanya ke Mataram. Dengan demikian, runtuhlah Pajang dari panggung sejarah dan berdirilah Kerajaan Mataram pada 1586. Pangeran Benawa dianugerahi jabatan sebagai bupati Pajang. Dengan demikian, Pajang berbalik statusnya menjadi bawahan Mataram. Sutawijaya naik takhta Kerajaan Mataram pertama dengan gelar Senapati ing Alogo Sayidin Panotogomo (Panembahan Senopati, memerintah 1586–1601). Pada mulanya, wilayah Mataram hanya meliputi Mataram, Kedu, dan Banyumas saja. Bekas wilayah lain yang pernah dikuasai Pajang belum bersedia menakluk pada Mataram, dan demikian pula halnya dengan daerah pesisir utara Pulau Jawa. Perlawanan dan pemberontakan kerap mengisi pemerintahan pendiri Mataram ini, yang tak jarang dipadamkan dengan kekerasan. Panembahan Senapati sebenarnya berambisi mempersatukan seluruh Pulau Jawa, termasuk Banten–saat itu merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan di penghujung barat Pulau Jawa. Diharapkan

58. Lihat *Asia dan Dunia Sedjak 1500*, halaman 188.

dengan dikuasainya Banten, Mataram dapat menjadi penguasa perdagangan internasional ke India dan China. Demi mewujudkan ambisinya, Panembahan Senopati menaklukkan Cirebon pada 1595. Meskipun demikian, sebelum cita-citanya terlaksana Panembahan Senopati terburu wafat pada 1601.

Ambisi Panembahan Senopati ini diteruskan oleh putra dan penggantinya, Sultan Hanyakrawati (Anyokrowati, memerintah 1601–1613). Meskipun demikian, kekuatan Mataram sendiri masih belum sanggup menaklukkan Banten dan berbagai hambatan terus saja timbul, yakni dari daerah-daerah yang masih menentang kekuasaan Mataram. Sultan Hanyakrawati wafat pada 1613 di desa Krapyak. Itulah sebabnya, ia disebut Panembahan Sedo Krapyak.

ii. Mataram di Bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo

Setelah mangkatnya Sultan Hanyakrawati, putranya yang bergelar Sultan Agung (1613–1645) tampil ke puncak pimpinan Mataram. Sultan Agung merupakan penerus bagi cita-cita Panembahan Senopati dalam mempersatukan Pulau Jawa dan bahkan ia berniat menaklukkan seluruh Kepulauan Nusantara. Meskipun demikian, Jawa adalah prioritas utamanya, karena saat itu di sana masih bercokol beberapa daerah atau kerajaan yang berdiri sendiri, seperti Banten, Blambangan, Cirebon, Surabaya, Giri, dan Mataram sendiri. Selain itu, daerah-daerah pesisir juga masih belum mengakui kekuasaan Mataram. Padahal, kawasan pantai utara tersebut merupakan pusat perdagangan yang ramai dan penting. Karenanya, Sultan Agung mengerahkan tentaranya terlebih dahulu untuk menguasai pesisir utara. Secara berturut-turut, Wirosobo jatuh ke tangan Mataram pada 1615, Lasem pada 1615, Pasuruan pada 1616, Gresik pada 1618 dan 1622, serta Tuban pada 1619. Setelah itu, Sultan Agung berniat menaklukkan Surabaya. Oleh sebab itu, ia terlebih dahulu menyerang Sukadana di Kalimantan yang merupakan sekutu Surabaya pada 1622. Akhirnya, Surabaya jatuh ke tangan Mataram pada 1625.

Sultan Agung menaklukkan Blambangan–kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa–pada 1635 dan berniat menyeberang ke Bali pada 1639, tetapi upaya ini gagal. Sementara itu, pecah pula berbagai pemberontakan pada 1627. Misi penaklukan yang dilakukan Mataram ini justru merusak sendi-sendi perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa, karena pasukan Sultan menghancurleburkan kota-kota yang tak bersedia menyerah. Akibatnya banyak pedagang yang melarikan diri ke Makassar dan Banjarmasin. Ini justru mematikan perdagangan di pesisir Jawa

tengan serta timur. Sultan Agung kemudian mengarahkan serangannya ke arah barat, atau tepatnya pada Kesultanan Banten dan orang-orang Belanda di Batavia. Keduanya dipandang sebagai penghalang ambisi Sultan Agung menjadikan Mataram sebagai satu-satunya penguasa di Pulau Jawa. Sebenarnya, Banten juga bermusuhan dengan Belanda; namun karena takut dengan ancaman Mataram, pihak Kesultanan Banten membiarkan saja Belanda bercokol di Batavia. Sultan Agung sebenarnya pernah mengajak Belanda untuk bersama-sama memerangi Banten, tetapi karena ditolaknya ajakan tersebut, hubungan antara Sultan Agung dan Belanda menjadi tegang; yang berakhir dengan pecahnya perang terbuka antara keduanya.

Batavia diserbu oleh Sultan Agung pada tahun 1628, tetapi Belanda yang dipimpin oleh J.P. Coen sanggup mempertahankan kota tersebut, sehingga pihak Mataram tidak memperoleh kemajuan apa-apa. Gagal dengan serangan pertama, Sultan Agung melancarkan lagi serangan kedua pada tahun 1629 dengan kekuatan yang lebih besar. Selama 30 hari ribuan laskar Mataram bekerja keras membendung Sungai Ciliwung agar pasukan VOC kekurangan pasokan air minum. Pemimpin pasukan Mataram memerintahkan serangan nekat yang berbuah kegagalan. Sebagai catatan, di tengah-tengah kancah pertempuran antara Batavia dan Mataram ini telah berlaku kekejaman yang dilakukan oleh panglima Mataram terhadap anak buahnya sendiri. Ketika gagal menaklukkan Batavia, panglima perang Mataram menghukum mati 800 laskarnya. J.P. Coen seolah tak percaya menyaksikan tindakan biadab yang disaksikannya itu. Kendati Mataram kembali memetik kegagalan, J.P. Coen tewas karena terserang penyakit tropis. Sultan Agung tidak berputus asa. Kali ini, ia menempuh jalan diplomatik, yakni menjalin hubungan persahabatan dengan Portugis, saingan Belanda, di Malaka. Blokade dalam bidang ekonomi dilakukannya pula, yakni dengan melarang rakyatnya menjual beras pada Belanda. Meskipun demikian, hingga Sultan Agung wafat Belanda tetap bercokol di Batavia.

Sumbangsih lain Sultan Agung adalah dalam bidang penanggalan. Sebelum masuknya agama Islam, orang Jawa menggunakan kalender Saka, yang didasari oleh peredaran matahari dan terdiri dari 365 hari. Pada saat agama Islam tersiar di Kepulauan Nusantara, orang mulai menggunakan Kalender Hijriyah, yang didasari oleh peredaran rembulan serta terdiri dari 354 hari. Pada tahun Saka 1555 atau

Masehi 1633, Sultan Agung mengumumkan diberlakukannya penanggalan baru yang disebut kalender Jawa. Sistem penanggalan ini merupakan perpaduan antara penanggalan Saka dan Hijriyah.

iii. Perkembangan Kerajaan Mataram setelah Sultan Agung

Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan singgasana Mataram diwariskan pada putranya yang bergelar Amangkurat I (1645–1677). Berbeda dengan ayahnya yang memusuhi Belanda, Amangkurat I lebih bersifat lunak. Ia mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1646, yang pada intinya berupa pengakuan terhadap kekuasaan Belanda di Batavia. Mataram sebaliknya diizinkan berdagang secara bebas, terkecuali di Ternate, Ambon, dan Banda. Larangan ini sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap Mataram, sehingga melemahkan kerajaan tersebut. Sementara itu, Belanda makin besar kekuasaannya, terutama dalam hal perdagangan. Amangkurat I merupakan penguasa yang tidak begitu populer, karena kurang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Pernah disampaikannya secara terang-terangan pada utusan VOC bernama Rijcklof van Guns, bahwa ia tidak ingin rakyatnya sejahtera. Ia khawatir kekuasaannya terancam apabila rakyat hidup makmur. Bahkan, Amangkurat juga tidak ingin para bangsawan menjadi makmur, terutama yang tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, Amangkurat berupaya membatasi penghasilan mereka yang berasal dari perdagangan; yakni dengan mengeluarkan aturan monopoli beras dan larangan mengadakan pelayaran. Akibatnya, semenjak tahun 1657 para bangsawan pesisir dan kaum pedagang di sana tidak lagi diperbolehkan mengirim beras ke Batavia atau tempat lainnya. Hal ini berdampak negatif pada kemampuan berlayar orang-orang Jawa. Pada akhir pemerintahan Amangkurat I, penduduk Mataram telah kehilangan kecakapannya dalam bidang pelayaran.

Amangkurat I juga bertindak kurang bijaksana terhadap para ulama, yakni dengan membunuhi mereka secara semena-mena. Itulah sebabnya, kaum ulama ikut menentang kekuasaannya. Karena sikap Amangkurat yang sewenang-wenang itu, timbul berbagai perlawanan, termasuk dari kalangan bangsawan sendiri. Bahkan timbul perselisihan dengan putra mahkotanya yang bernama Pangeran Adipati Anom. Pertikaian ini makin meruncing akibat masalah asmara, yakni karena keduanya jatuh cinta pada seorang gadis yang sama. Amangkurat kemudian berupaya menghabisi nyawa putranya tersebut. Pada saat yang bersamaan, pecah

pemberontakan dipimpin Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang ayahnya (Raden Demang Melayukusuma) pernah dibunuh oleh Amangkurat (lihat ulasan khusus mengenai Madura). Karena permusuhan dengan ayahnya ini, Pangeran Adipati Anom bergabung dengan Trunajaya. Adipati Anom menjanjikan bahwa bila ia berhasil merebut takhta Mataram, Trunajaya akan diangkat sebagai penguasa Madura.

Pemberontakan Trunajaya pecah pada tahun 1671 di Pamekasan. Beberapa tokoh penting bergabung dengannya, termasuk Pangeran Adipati Anom, Karaeng Galesong–tokoh pejuang Gowa yang tak setuju dengan Perjanjian Bungaya, ulama-ulama Giri yang sangat anti pada Mataram, Raden Bugan, dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat mereka dapat menguasai Madura dan sebagian besar Jawa Timur, termasuk Surabaya yang dijadikan sebagai basis gerakan Trunajaya. Pasukan berkekuatan 80.000 orang dikirim oleh Mataram guna mematahkan pergolakan tersebut, di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom. Namun karena dicurigai telah menjalin persekutuan rahasia dengan Trunajaya, ia disertai dan diawasi pula oleh saudara-saudaranya. Pada pertempuran yang terjadi di Gegodok pada 13 Oktober 1676, pihak Mataram kalah telak oleh pasukan gabungan Trunajaya. Pasukan Trunajaya bergerak maju dan menguasai kota-kota di pantai utara Jawa. Kekalahan ini memperkuat kecurigaan terhadap Pangeran Adipati Anom. Meskipun demikian, Adipati Anom yang semula memihak kaum pemberontak belakangan menjadi ragu-ragu. Karena khawatir dengan masa depannya sendiri, ia lalu berbalik meninggalkan Trunajaya dan meminta bantuan VOC. Dengan demikian pecahlah persekutuan mereka. Turun tangannya Belanda ikut memperkeruh suasana. Awalnya VOC menawarkan bantuan pada Trunajaya tetapi rayuan Belanda itu bertepuk sebelah tangan, sehingga mereka kini mendekati Mataram. Dalam rangka mengalahkan Trunajaya, VOC menyerang dan menguasai Surabaya terlebih dahulu, guna memotong jalur perbekalannya. Tetapi pada tahun 1677, Trunajaya justru berhasil merebut Plered, yang merupakan ibukota Mataram, sehingga raja terpaksa mengungsi ke benteng Belanda di Semarang dan wafat di Tegalwangi.

Sebelum meninggal, Amangkurat I telah mewariskan singgasananya pada Pangeran Adipati Anom yang setelah naik takhta menyandang gelar Amangkurat II (1677–1701). Amangkurat I berpesan pada penggantinya itu agar memohon

bala bantuan pada Belanda di Batavia. Tetapi Amangkurat II hanya perlu pergi ke Jepara dan berjumpa dengan Cornelis Speelman selaku wakil VOC. Inti pertemuan tersebut, Belanda tak keberatan memberikan bantuan pada Mataram, asalkan Sultan Amangkurat II bersedia menandatangani perjanjian dengan VOC yang berisikan:

- Seluruh pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa, yakni mulai dari Karawang hingga ujung timur Pulau Jawa digadaikan pada VOC. Akibatnya Priangan Tengah dan Barat jatuh ke tangan Belanda
- Pelabuhan-pelabuhan itu akan dikembalikan pada Mataram, apabila hutang-hutangnya kepada VOC akibat memadamkan pemberontakan Trunajaya telah dilunasi.
- Seluruh kawasan yang terletak di sebelah barat Kali Pamanukan hingga Samudera Hindia akan diserahkan pada Belanda.
- VOC mempunyai hak monopoli bagi kain dari India dan Persia serta beras di seluruh wilayah Mataram.
- Pasukan pengawal Belanda akan ditempatkan di Kartasura.

Belanda baru bersedia menurunkan bala bantuannya menumpas pemberontakan Trunajaya setelah perjanjian di atas ditanda-tangani pada tahun 1677. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Anthony Hurl dengan dibantu laskar Bugis dan Ambon (dipimpin Kapten Jonker) menyerang kubu pertahanan Trunajaya di Kediri. Kini giliran Trunajaya terdesak dan terpaksa menyerah di Ngantang. Belanda kemudian menyerahkan Trunajaya pada Amangkurat II yang membunuhnya dengan tikaman keris. Dengan demikian, berakhir sudah pemberontakan Trunajaya yang mengakibatkan banyak kerugian bagi Mataram. Plered dianggap tercemar karena pernah diduduki kaum pemberontak, sehingga Amangkurat II memindahkan ibukotanya ke Kartasura. Selanjutnya sesuai dengan perjanjian tahun 1677, dengan dalih melindungi sunan, Belanda menempatkan pasukan pengawalnya di ibukota yang baru tersebut; padahal tujuan sebenarnya adalah memata-matai para penguasa Mataram.

Beberapa tahun kemudian muncul pemberontak lain bernama Untung Surapati. Di tahun 1684, ia mengunjungi ibukota Mataram dan mengajak Amangkurat II bersama-sama melawan Belanda. Karena dukungan Untung Surapati tersebut,

Amangkurat II merasa mendapat angin, sehingga mulai berani menentang Belanda. Perjanjian yang dahulu ditanda-tanganinya pada 1677 kini disesalinya. Karena itu, Amangkurat II sepakat bergabung dengan Surapati melawan VOC. Belanda mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Tack guna membasmi pemberontakan tersebut. Pertempuran antara pengikut Surapati dengan Belanda segera pecah, yang berujung dengan tewasnya Kapten Tack. Meskipun demikian, dalam benak Amangkurat II timbul keraguan terhadap Untung Surapati. Karena menyadari sikap raja yang mudah bimbang dan mendua, Surapati beserta pengikutnya meninggalkan Kartasura dan pindah ke Jawa Timur.

Amangkurat II wafat pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat III atau Sunan Mas. Karena sikapnya yang berani membangkang perintah Belanda, ia merupakan penguasa yang kurang populer di mata Belanda. Sunan Mas melakukan pembersihan di kerajaannya terhadap orang-orang yang pro Belanda. Akibatnya, pamannya bernama Pangeran Puger melarikan diri ke Semarang dan meminta suaka pada VOC. Kesempatan ini dimanfaatkan Belanda menanamkan semakin banyak pengaruhnya di Mataram dengan memberikan dukungan hingga Pangeran Puger sanggup merebut takhta dan menjadi raja Mataram berikutnya. Pada saat bersamaan, Sunan Mas juga mengirim utusan pada Belanda dan meminta perlindungan mereka, sesuai dengan isi perjanjian-perjanjian yang pernah ditanda-tangani sebelumnya. Kendati demikian, Belanda tidak percaya pada Sunan Mas sehingga menolak memenuhinya dan lebih condong pada Pangeran Puger. VOC setuju mengangkat Pangeran Puger sebagai raja, asalkan bersedia menanda tangani pernjanjian dengan Belanda. Perjanjian yang akhirnya disepakati pada 1705 itu mengandung butir-butir ketetapan pokok sebagai berikut.

- Seluruh daerah di sebelah barat Sungai Cilosari dan Silodona di Cilacap diserahkan sepenuhnya pada VOC. Selain itu, Priangan Timur dan Cirebon jatuh pula ke tangan Belanda.
- Madura Timur diserahkan pada VOC.
- Apabila Mataram menepati semua janjinya pada VOC dan menjunjung hak VOC dalam melakukan monopoli perdagangan, semua utang Mataram akan dihapus.

- Mataram diwajibkan membayar 800 *koyan* beras setiap tahun selama 25 tahun.
- Belanda akan menempatkan 200 orang tentaranya untuk menjaga keselamatan raja di Kartasura.

Pasal-pasal perjanjian yang ditanda-tangani di Semarang tersebut jelas sekali memperkecil kekuasaan Mataram, yang seolah-olah hanya menjadi negara vasal VOC saja. Semenjak saat itu, Mataram tidak pernah mencapai puncak kejayaannya seperti dahulu lagi.

Begitu Pangeran Puger menandatanganinya, Belanda mengirimkan pasukan ke Kartasura guna mendongkel kekuasaan Sunan Mas. Pasukan itu masih ditambah pula dengan pengikut Pangeran Puger sendiri sehingga jumlah totalnya menjadi 4.000 orang. Sunan Mas sesungguhnya memiliki kekuatan yang jumlahnya jauh lebih besar, yakni mencapai 40.000 orang. Tetapi, pasukan yang dipusatkan di Ungaran guna menahan serangan VOC dan Pangeran Puger itu menjadi tidak efektif sama sekali, karena para panglimanya adalah pengikut Pangeran Puger. Oleh karenanya, pasukan yang jumlahnya lebih kecil itu dapat dengan mudah meraih kemenangan. Kartasura dapat direbut pada 1705 oleh pasukan gabungan dan Pangeran Puger dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pakubuwono I (1705–1719). Sementara itu, Sunan Mas terpaksa melarikan diri dan bergabung dengan Untung Surapati. Belanda mengalihkan pasukannya mengejar Sunan Mas dan sekaligus memadamkan pemberontakan Surapati. Dalam pertempuran di daerah Bangil, Untung Surapati terluka parah dan gugur dalam perjalanan ke Pasuruan. Semenjak saat itu, para pengikutnya makin terdesak dan Sunan Mas menyerahkan diri ke Batavia. Ia lalu ditangkap dan diasingkan ke Srilanka pada 1708.

Semasa pemerintahan Pakubuwono I ini timbul pemberontakan oleh bupati Surabaya, yakni pada tahun 1714, yang dapat ditumpas dengan bantuan Belanda. Kendati demikian, ketika Pakubuwono I mangkat pada 1719, keamanan belum sepenuhnya pulih. Pakubuwono I digantikan oleh Pangeran Prabu yang bergelar Sunan Prabu (1719–1727). Terkadang ia juga digelari Amangkurat III, karena Sunan Mas tidak diakui sebagai raja. Namun ada pula sumber yang menggelarinya Amangkurat IV. Dalam penggantian takhta ini, Belanda banyak ikut campur sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan.

Mereka lalu menyingkir ke Jawa Timur dan bergabung dengan sisa-sisa pengikut Untung Surapati yang dahulu pernah memberontak melawan Belanda. Meskipun demikian, upaya perlawanan ini sia-sia dan mereka yang tertawan lantas diasingkan ke Srilanka.

Sunan Prabu mangkat pada 1727 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono II (1727–1749). Semasa pemerintahan Pakubuwono II pecah pemberontakan orang-orang China melawan Belanda yang dipicu oleh pembunuhan orang China di Batavia. Pergolakan kemudian menyebar hingga pesisir utara Jawa Tengah dan akhirnya menjalar ke Kartasura. Karena rakyat di sana telah memendam kebencian terhadap Belanda, tidak mengherankan apabila mereka turut menggabungkan diri dengan kaum pemberontak. Benteng Belanda di Kartasura diserbu dan pasukan pengawalnya dihabisi seluruhnya. Pakubuwono II mulanya mendukung pemberontakan ini, tetapi karena ragu-ragu ia berbalik menentangnya. Oleh sebab itu, kaum pemberontak lantas mengangkat Raden Mas Garendi sebagai raja baru dengan gelar Sunan Kuning atau Amangkurat IV (bila Pangeran Prabu dianggap sebagai Amangkurat III). Kendati demikian, pengangkatan penguasa baru ini menimbulkan perpecahan di kalangan pemberontak, karena sebagian di antara mereka ada yang masih mendukung Paku Buwono II. Hal ini sedikit banyak melemahkan pemberontakan.

Adipati Cakraningrat IV dari Madura berpihak pada Belanda, karena telah dijanjikan kemerdekaan dari kekuasaan Mataram, apabila bersedia membantu Belanda memadamkan pemberontakan. Pada tahun 1740, ibu kota Mataram berhasil dibebaskan dari cengkeraman para pemberontak dengan bantuan Cakraningrat. Ketika Kartasura jatuh ke tangan para pemberontak, Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Dengan demikian, kedatangan pasukan Belanda yang didukung Adipati Cakraningrat IV seolah-olah merupakan bintang penolong bagi Pakubuwono II. Tentu saja pertolongan ini tidaklah cuma-cuma, karena tak lama setelah itu, Mataram dipaksa lagi mengadakan perjanjian dengan VOC. Kali ini Mataram diharuskan melimpahkan wewenang pada Belanda dalam hal pengangkatan dan pemberhentian para pejabat kerajaan beserta bupati. Seluruh pantai utara serta ujung timur Pulau Jawa diserahkan pada Belanda dan demikian pula dengan sisa Pulau Madura (Madura bagian timur). Mataram juga wajib menyerahkan hasil-hasil buminya, seperti beras, nila, kapas, dan lain sebagainya.

Sebagai tambahan, penguasaan pantai utara Pulau Jawa oleh Belanda ini ditujukan untuk mematikan pelayaran Mataram selaku kerajaan maritim. Sebelumnya, meskipun Belanda telah memberlakukan monopoli perdagangan, tetapi banyak pelaut Jawa yang melanggarnya, sehingga VOC mengalami kerugian yang tidak sedikit. Setelah penyerahan ini, Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih tegas; sehingga mematikan sama sekali jiwa maritim rakyat daerah pesisir.

Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Pakubuwono II adalah kesepakatannya dengan Gubernur Jenderal van Imhoff pada tahun 1744 mengenai pendirian sebuah bengkel uang di Batavia. Bengkel ini merupakan tempat pencetakan uang dirham emas (dirham jawi) dan dinar Perak, yang dimaksudkan sebagai pengganti mata uang lainnya. Meskipun demikian, bengkel ini tidak berusia panjang dan ditutup pada tahun 1751[59]. Oleh karena itu, upaya menyatukan sistem mata uang ini menuai kegagalan.

iv. Pecahnya Kerajaan Mataram Menjadi Yogyakarta dan Surakarta

Masa pemerintahan Pakubuwono II bukanlah zaman yang damai. Pemberontakan pecah lagi di bawah pimpinan Raden Mas Said dan Martapura. Saat itu, Raden Mas Said berhasil menguasai daerah Sukawati. Karenanya, raja mengeluarkan sayembara pada 1745: barangsiapa yang dapat memadamkan pemberontakan itu akan dianugerahi daerah Sukawati. Di antara para bangsawan dan bupati, hanya Pangeran Arya Mangkubumi saja yang berani melaksanakannya. Raja menyetujui hal ini dan Mangkubumi diberi pusaka Kyai Plered sebagai pegangannya. Mangkubumi kemudian menyiapkan pasukannya guna menghadapi pemberontak. Sebagai hasilnya, Raden Mas Said dapat dipukul mundur dari Sukawati. Sementara waktu keamanan dapat dipulihkan. Meskipun demikiran, raja ternyata ingkar janji sehingga Pangeran Mangkubumi berbalik menerbitkan pemberontakan dan bergabung dengan Radan Mas Said yang kini bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro.

Ingkar janjinya ini disebabkan oleh hasutan Pringgoloyo, *pepatih dalem* Surakarta saat itu. Ia merupakan seorang berkepribadian licik yang kelak mati bunuh diri. Pakubuwono II dipengaruhinya agar tidak menyerahkan Sukawati pada Mangkubumi, dengan alasan penyerahan itu dapat mengancam kedudukan sunan sendiri dan juga berpotensi membangkitkan rasa iri hati di kalangan

---

59. Lihat *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid 1, halaman 149.

bangsawan lainnya. Meskipun demikian, sebagai seorang raja pada awalnya Pakubuwono II masih ingin berpegang pada kata-katanya. Tetapi bersamaan dengan itu, datanglah Gubernur Jenderal van Imhoff ke Surakarta. Ia dibujuk oleh Pringgoloyo agar ikut menentang penyerahan hadiah pada Mangkubumi. Secara terbuka, ia mengecam Mangkubumi sebagai tak tahu berterima kasih, karena berani menuntut hadiah dari rajanya. Kecaman ini sangat menusuk hati Mangkubumi dan membangkitkan amarah dalam dadanya. Oleh karena itu, pada malam harinya ia meninggalkan istana dan menuju ke Sukawati. Pangeran Mangkubumi kemudian bergabung dengan Raden Mas Said. Dengan demikian, timbul pemberontakan yang lebih dashyat.

Setelah kekacauan berkecamuk tiga tahun lamanya, Pakubuwono II sakit parah dan dalam kondisi kritis masih harus menerima kunjungan wakil Belanda, yang mendesak agar Kerajaan Mataram diserahkan kepada mereka tanpa syarat apa pun pada 1749. Desakan ini dipenuhi oleh Pakubuwono II dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Bersamaan dengan itu, Belanda menyadari betapa sulitnya memadamkan pemberontakan Raden Mas Said beserta Pangeran Mangkubumi. Korban yang berjatuhan dan biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak. Oleh karenanya, Belanda lalu mengajak berunding Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755. Hasilnya, Belanda sepakat membagi Mataram menjadi dua bagian, di mana sebagian wilayah akan diserahkan pada Mangkubumi, yang kelak disebut Kesultanan Yogyakarta (Yogyakarta Hadiningrat). Dengan demikian, terpecahlah Mataram menjadi dua. Pangeran Mangkubumi menaiki takhta dengan gelar Hamengkubuwono I. Kesepakatan yang membagi kerajaan peninggalan Panembahan Senapati menjadi dua ini dikenal sebagai Perjanjian Giyanti dan sekaligus menandai berakhirnya pertikaian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Perjanjian Giyanti[60], wilayah-wilayah Surakarta adalah Jagaraga, Panaraga, sebagian Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace (Nganjuk–Berbek), Wirasaba (Majaagung), Blora, Banyumas, dan Kaduwang. Sementara itu, Yogyakarta menerima daerah-daerah sebagai berikut: Madiun, Magetan, Caruban, sebagian Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen ?), Kedu, Sela, Warung

60. Lihat *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755–1992*, halaman 13.

Kuwu (Kuwu Wirasari ?), dan Grobogan. Pembagian wilayah Kerajaan Mataram berdasarkan Perjanjian Giyanti ini ternyata menimbulkan masalah, karena ada wilayah-wilayah Surakarta yang terletak di tengah-tengah wilayah Yogyakarta; dan demikian pula sebaliknya. Sengketa wilayah sangat mudah terjadi dan juga komunikasi antar daerah yang terpencar-pencar itu menjadi terhambat. Namun, memang kondisi semacam inilah yang diinginkan Belanda; yakni agar kerajaan-kerajaan tersebut tidak dapat membangun kekuatan. Dengan kata lain, pembagian kerajaan menjadi dua ini justru menguntungkan Belanda.

v. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram

Pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Mataram adalah seorang sultan yang semenjak Amangkurat I disebut *sunan* atau *susuhunan* ("yang disembah"). Sultan atau sunan dibantu oleh seorang patih, yang setingkat dengan perdana menteri. Wilayah kerajaan Mataram terbagi antara pusat kerajaan yang diperintah langsung oleh sultan dan daerah-daerah yang ditaklukkannya di bawah pemerintahan para bupati. Pusat kerajaan terbagi lagi menjadi Kutagara atau Kutanegara dan Negara Agung atau Negara Gede. Sementara itu, Kutagara dibagi menjadi *Peprintahan Lebet* (pemerintahan dalam istana) dan *Peprintahan Jawi* (pemerintahan luar istana). Pembagian struktur tersebut dapat ditampilkan dalam diagram berikut.

Mataram

Pusat Kerajaan **Daerah taklukan**

Kutanegara **Negara Agung**

Peprintahan Lebet **Peprintahan Jawi**
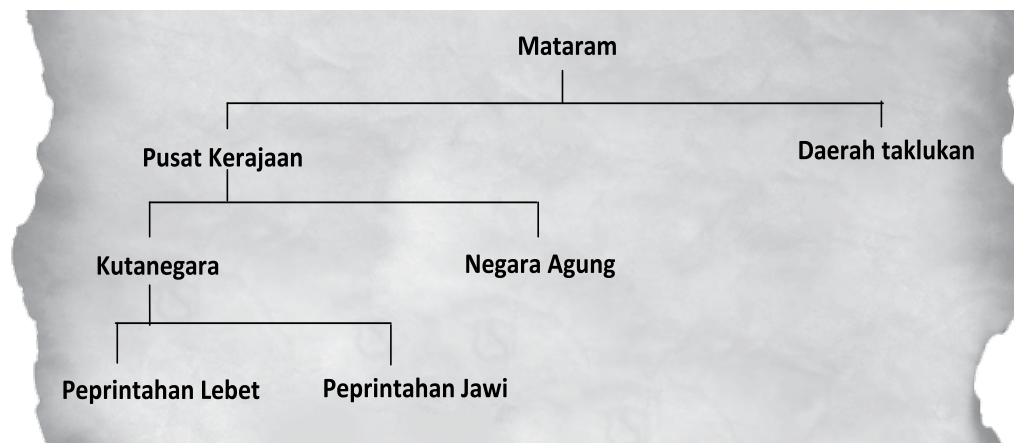
Peprintahan lebet dijalankan oleh empat orang *wedana lebet*, yakni *wedana gedong kiwa*, *wedana gedong tengen*, *wedana keparak kiwa*, dan *wedana keparak tengen*. Mereka masih dibantu lagi oleh bawahannya masing-masing. Keempat wedana itu bergelar pangeran atau tumenggung dan berada di bawah pengawasan seorang *patih lebet*. Pejabat bawahan wedana adalah *papatih* (kliwon atau lurak

carik), kebayan yang bergelar *ngabehi, rangga*, atau *raden*; dan 40 orang mantri jajar. Pejabat lainnya adalah wedana *miji* dengan gelar tumenggung yang langsung berada di bawah perintah sultan. *Wedana miji* ada dua orang dan setingkat dengan jabatan walikota pada zaman sekarang. Kedudukannya sangat penting dan bersama-sama dengan empat *wedana lebet* merupakan pejabat-pejabat tertinggi Kerajaan Mataram. *Wedana miji* yang terkemuka antara lain Tumenggung Danupojo, yang memegang jabatan ini pada akhir masa pemerintahan Sultan Agung. Selain itu, masih ada lagi Wiroyogo dan Nitinegoro, yang menjabat pada masa Amangkurat I.

Kawasan Negara Agung dibagi menjadi delapan daerah yang dipimpin oleh seorang *wedana jawi* (wedana luar) dan berada di bawah pengawasan seorang *patih jawi*. *Wedana-wedana jawi* itu mendapat sebutan sesuai dengan daerah kekuasaannya: *wedana bumi* berkuasa di daerah Bumi, *wedana bumija* berkuasa di daerah Bumija, *wedana sewu* berkuasa di daerah Sewu, *wedana numbak anyar* berkuasa di daerah Numbak Anyar, *wedana siti ageng kiwa* berkuasa di Siti Ageng Kiwa, *wedana siti ageng tengen* berkuasa di Siti Ageng Tengen, *wedana panumping* berkuasa di Panumping, dan *wedana panekar* berkuasa di Panekar. Masing-masing wedana itu juga mempunyai bawahannya masing-masing. Berikut ini adalah daerah kekuasaan mereka beserta luasnya:

- Daerah Bumi meliputi Kedu di sebelah barat Sungai Progo, luasnya 6.000 *cacah*.
- Daerah Bumija meliputi Kedu di sebelah timur Sungai Progo, luasnya 6.000 *cacah*.
- Daerah Sewu meliputi Bagelen yang terletak antara Sungai Bogowonto dan Progo, luasnya 6.000 *cacah*.
- Daerah Numbak Anyar meliputi daerah antara Sungai Bogowonto dan Progo, luasnya 6.000 *cacah*.
- Daerah Siti Ageng Kiwa meliputi daerah sebelah kiri jalan besar antara Pajang dan Demak, luasnya 10.000 *cacah*.
- Daerah Siti Ageng Tengen meliputi daerah sebelah kanan jalan besar antara Panjang dan Demak, luasnya 10.000 *cacah*.
- Daerah Panumping meliputi Sukawati, luasnya 10.000 *cacah*.
- Daerah Panekar meliputi Pajang, luasnya 10.000 *cacah*.

Sementara itu, daerah taklukan atau kawasan-kawasan yang terletak di luar negara agung disebut *mancanegara*. Daerah tersebut merupakan tanah-tanah lungguh (*apanage*) kaum bangsawan, yang pada waktu tertentu diwajibkan menyerahkan upeti ke keraton. Oleh karena kewajibannya sebagai pembayar pajak atau upeti itulah, kawasan tersebut juga dinamakan *Siti Dalem Pamaosan*. Pembagian kawasan mancanegara adalah sebagai berikut:

- Mancanegara Kulon, yang meliputi: Banjar, Pasir (Purwokerto), dan Ngayah seluas 5.000 *karga*; Kalibeber dan Rono (Karanganyar) seluas 800 *karga*; Karangbolong seluas 400 *karga*; Merden seluas 400 *karga*; Warah, Tersono, dan Karencang seluas 300 *karga*; Bobotsari dan Kertonegoro seluas 100 *karga*; Lebaksiu dan Balapulang seluas 102 *karga*; serta Bentar dan Jogoluhur seluas 600 *karga*.
- Mancanegara Wetan, yang meliputi: Ponorogo meliputi 16.000 *karga*; Madiun seluas 16.000 *karga*; Pacitan seluas 1.000 *karga*; Kaduwang seluas 1.500 *karga*; Pace seluas 300 *karga*; Karsono seluas 600 *karga*; Sarengat dan Blitar seluas 1.000 *karga*; Jipang seluas 8.000 *karga*; Grobogan seluas 5.000 *karga*; Warung seluas 3.000 *karga*; Selo seluas 500 *karga*; Blora seluas 3.000 *karga*; Rowo (Tulungagung) seluas 800 *karga*; Kalangbret seluas 600 *karga*; Japan (Mojokerto) seluas 600 *karga*; serta Wirosobo (Mojoagung) seluas 1.000 *karga*.
- Pesisiran Kulon meliputi daerah pantai utara sebelah barat.
- Pesisiran Wetan meliputi daerah pantai utara ke sebelah timur.

Berbagai daerah di atas masing-masing dikepalai oleh seorang wedana bupati. Daerah-daerah yang berada di bawah pemerintahan wedana bupati itu masih terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten yang dikepalai seorang bupati; di mana merka biasanya diberi gelar *tumenggung* atau *raden arya*.

vi. Kesusastraan

Istana Mataram mewariskan berbagai karya sastra, seperti Kitab *Sewaka* yang ditulis pada tahun 1699, yakni semasa pemerintahan Amangkurat II, kakak Pangeran Puger. Karya sastra yang menggunakan bahasa Jawa baru ini mengungkapkan mengenai nasihat-nasihat bagi orang yang hendak mengabdi raja. Kitab *Menak* ditulis pada tahun 1714 atas kehendak Kanjeng Ratu Mas Balitar,

permaisuri Pakubuwono I (Pangeran Puger). Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan, yang terbukti dari penggunaan kata *reke, reka, tan asari, tan asantun, katengsun*, dan sebagainya. Isinya serupa dengan hikayat Panji. Rupanya kitab ini amat digemari orang, sehingga versi ceriteranya tersebar hingga Lombok dan Palembang.

Kitab *Manikmaya* ditulis oleh Kartomarsadah, yang mungkin sekali berasal dari daerah Pasundan; di mana pada masa awal berdirinya istana di Kartasura banyak orang dari sana yang pindah berdiam di ibukota Mataram tersebut. Tujuan kepindahan mereka adalah mengenal lebih jauh adat istiadat Jawa sambil mempelajari perihal agama Islam. Memang pada saat itu, banyak ulama terkemuka yang berdiam di Kartasura dan sekitarnya. Tidak sedikit di antara kaum pendatang dari Tanah Sunda itu yang merupakan kerabat para bupati Priangan. Oleh karenanya, ada kemungkinan penulis kitab Manikmaya juga merupakan salah seorang kerabat bupati Priangan[61]. Kitab *Manikmaya* mengisahkan mengenai sang Manik yang menjadi Batara Guru dan sang Maya yang menjelma menjadi Semar.

Seiring dengan majunya kesusastraan, bahasa Jawa juga mengalami perkembangan. Sebelum tahun 1600, bahasa Jawa lebih sederhana sifatnya; yakni tidak begitu mengenal tingkatan. Kosa kata bahasa tinggi atau halus (*tembung kromo*) juga masih sangat terbatas dan tidak begitu diwajibkan penggunaannya saat berbicara dengan orang yang lebih dihormati. Namun belakangan bahasa Jawa berkembang menjadi lebih rumit dan timbul beberapa tingkatan dalam berbahasa. Dengan demikian, terdapat kata-kata biasa, sopan, dan sangat sopan.

III. MANGKUNEGARAN

a. Cikal-bakal dan perkembangan Mangkunegaran

Setelah Sunan Pakubuwono III berdamai dengan Pangeran Mangkubumi, Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Meskipun demikian, Raden Mas Said masih meneruskan perlawanannya hingga tahun 1757, yang berakhir dengan diadakannya perjanjian perdamaian di Salatiga. Berdasarkan perjanjian tersebut, Raden Mas Said menghentikan pemberontakannya dan menerima daerah kekuasaan seluas 4.000 *cacah*, yang diambil dari sebagian bekas wilayah Surakarta dan Yogyakarta.

61. Lihat *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, halaman 106.

Ia diakui sebagai raja merdeka dengan gelar Mangkunegara I (1757–1795). Semenjak saat itu dan seterusnya wilayah atau kerajaannya disebut Kadipaten Mangkunegaran. Adipati Mangkunegara I membangun pula berbagai kesatuan keprajuritan sebagai wahana mempertahankan negerinya[62].

Sesudah Adipati Mangkunegara I mangkat pada tahun 1795, cucunya dinobatkan sebagai pengganti dengan gelar Mangkunegara II (1796–1835). Oleh Daendels, ia diangkat sebagai kolonel dan diizinkan memiliki pasukannya sendiri, yang disebut Legiun Mangkunegaran. Bersamaan dengan masa pemerintahannya, Kepulauan Nusantara dipindah-tangankan dari Belanda kepada Inggris. Oleh Inggris, Kadipaten Mangkunegaran diberi tambahan tanah seluas 1.000 cacah. Ketika Belanda kembali bercokol di Kepulauan Nusantara pada tahun 1816, pemerintah kolonial bermaksud memanfaatkan Mangkunegaran sebagai pengimbang bagi kekuasaan sunan di Surakarta.

Sebagai pengganti Adipati Mangkunegara II yang wafat pada 1835, karena tidak mempunyai putra mahkota, ia digantikan oleh cucunya dengan gelar Mangkunegara III (1835–1853), yang juga dikenal sebagai Aryo Adipati Prangwadono. Tampuk pemerintahan Mangkunegaran kemudian beralih pada Mangkunegara IV (1853–1881). Tatkala berusia 10 tahun, ia dititipkan pada saudara sepupunya, Mangkunegoro III. Raja Mangkunegaran ke-4 ini juga aktif menghasilkan beberapa karya sastra tersohor. Beliau digantikan oleh Mangkunegara V (1881–1896) dan selanjutnya Mangkunegara VI (1896–1916). Mangkunegara VI sendiri merupakan putra ke-4 Mangkunegara IV. Para raja Mangkunegaran berikutnya adalah Mangkunegara VII (1916 -1944), Mangkunegara VIII (1944–1987), dan Mangkunegara IX (1987–sekarang).

Mangkunegara VII pernah mengunjungi Negeri Belanda pada 1913–1915[63]. Di sana ia berkenalan dengan pasangan Belanda bernama Coenraad dan Betsy van Deventer Maas. Persahabatan mereka kemudian menjadi akrab dan bahkan Mangkunegara VII sempat mengeluhkan pilihan sulitnya antara tinggal di Negeri Belanda guna meneruskan pendidikannya atau kembali ke kampung halamannya. Pendirian

62. Kesatuan-kesatuan itu adalah Ladrang Mangungkung (prajurit putri), Jayengsastra, Bijigan Prajurit, Tatramudita Prajurit, Kepilih Prajurit, Taruastra, Margarudita, Mijen, Nurayu, Gulang-gulang, Surageni, Trunakrodha, Trunapedaka, Menakan, Tambakbaya, Tambakrata, Dasawani, Dasarambata, Prangtandang, Dasamuka, Gunatalikrama, Gunasemita, Handaka Lawung, Handaka Watang, Marangge,. Dasarati, Kauman, Danuwirutama, Danuwirupaksa, Ciptaguna, Madyaprabata, Madyantama, Madyaprajangka, Kurawinangun, Kuthawinangun, Singakurda, Maradada, Brajawenang, Samaputra, Prawirasekti, dan Prawirasana. Lihat *The History of Javanese Kings: Sejarah Raja-raja Jawa*, halaman 550–551.
63. Lihat *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900–1942,* halaman 175.

Keraton Mangkunegaran

Sekolah van Deventer di Surakarta memperkokoh relasi mereka. Mangkunegara beserta Ratu Timur, permaisurinya, sangat mendukung pendirian sekolah itu. Hubungan persahabatan ini berlangsung selama 24 tahun. Saat peringatan tiga windu bertakhtanya Mangkunegara VII, pasangan suami istri ini mempersembahkan buku *Triwindoe-Gedenkboek* (Buku Kenangan Triwindu)[64] berisikan gambar-gambar indah yang mencerminkan pesona Jawa.

Mangkunegoro VII merupakan sosok yang peduli terhadap perkembangan kebudayaan tradisional dan merupakan pelopor penyiaran di Indonesia. Ketika itu, lagu-lagu dan budaya Barat dirasa mengancam kebudayaan tradisional. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan teknologi masa itu, demi meredam maraknya lagu-lagu Barat, Mangkunegoro VII merekam lagu-lagu tradisional Jawa dalam piringan hitam yang diberi merek "Columbia GLX."[65] Kualitasnya ternyata tidak kalah dengan produksi Eropa. Kendati demikian, masih terdapat kekurangan, yakni terbatasnya kemampuan piringan hitam dalam merekam sebuah lagu yang hanya berdurasi tiga menit, padahal perlu 30 menit dalam mementaskan gending Jawa. Itulah sebabnya perlu dicari jalan lain demi menyiasati hal ini.

Beliau kemudian menggunakan pemancar radio sebagai wahana menyebar-luaskan budaya tradisional Jawa agar tak terdesak oleh budaya Barat. Memang ketika itu beliau telah mempunyai pemancar radio dengan kode panggil PK2MN. PK2 sebenarnya merupakan kode radio amatir bagi Jawa Tengah; sedangkan MN merupakan singkatan dari Mangkunegoro VII. Meskipun demikian, PK2MN juga dianggap sebagai singkatan bagi "Perkumpulan Karawitan Kring Mangkunegaran." Siaran-siaran PK2MN seluruhnya berkaitan dengan kebudayaan Jawa, seperti *klenengan* dan wayang orang. Pada mulanya karena kondisi pemancar yang masih kurang baik, siaran yang diterima dipenuhi suara dengungan. Karena itu, beliau lantas meminta agar stasiun radio PK2MN melakukan pembenahan total[66].

Biaya yang diperlukan guna memperbaharui pemancar radio itu sangatlah besar, sehingga RM. Ir. Sarsito Mangunkusumo menyarankan agar melibatkan masyarakat luas. Demi mewujudkan niat itu, diadakan rapat pada 1 April 1933, yang kemudian melahirkan *Solosche Radio Vereniging* (SRV) atau bila diterjemahkan adalah Persatuan Radio Solo. Ketuanya adalah Ir Sarsito Mangunkusumo, sedangkan bendaharanya

64. Lihat *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900–1942,* halaman 174.
65. Lihat *Mangkunegoro VII dan Awal Penyiaran Indonesia*, halaman 79.
66. Lihat *Mangkunegoro VII dan Awal Penyiaran Indonesia*, halaman 81.

adalah Liem Tik Liang. Sembilan orang hadirin menyumbangkan masing-masing f.1, sehingga terkumpul f.9 selaku modal awal SRV. Jumlah anggota SRV kemudian semakin meningkat pesat dan berdirinya stasiun radio ini dianggap sebagai perintis dunia penyiaran di Indonesia.

b. Kesusastraan dan kebudayaan

Selain prajurit handal, Mangkunegara I juga merupakan seorang budayawan. Hal ini terbukti dengan beberapa tari-tarian yang beliau ciptakan, seperti Bedhaya Anglirmendung Senapaten, Bedhaya Dradamenta Senapaten, Bedhaya Sukapratama, dan lain sebagainya. Mangkunegara IV terkenal sebagai pujangga tersohor yang membuahkan karya-karya sastra Jawa terkemuka, seperti *Serat Wedhatama, Sendhon Langen Swara, Babad Wanagiri, Babad Giriputra, Babad Tegalganda*, dan lain sebagainya. Karya-karya sastra yang berkaitan dengan seni pedalangan dan pewayangan banyak dihasilkan oleh Mangkunegara VII. Adapun judulnya adalah *Serat Pedhalangan Ringgit Purwa*, yang menjadi acuan para dalang penganut gaya Surakarta. Mahakarya seni pedalangan ini terdiri dari 37 jilid dan memuat 177 lakon. Masih pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, Kyai Trunodipo dari Baturetno, Solo, menciptakan wayang menak; yang dipergunakan menggelar lakon-lakon asal *Kitab Serat Menak* dengan Wong Agung Jayengrana, Umar Maya, Umar Madi, serta Prabu Nursiwan sebagai tokoh-tokohnya.

IV. PAKU ALAMAN

a. Cikal-bakal dan perkembangan Paku Alaman

Berdirinya Kadipaten Paku Alaman berawal dari pengangkatan Pangeran Notokusumo, saudara Hamengkubuwono II dari Yogyakarta, sebagai raja yang merdeka (*pangeran merdiko*) dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I (1813–1829) pada tahun 1813. Terdapat berbagai pandangan mengenai berdirinya kerajaan kecil pecahan Yogyakarta ini. Ada yang beranggapan bahwa Paku Alaman hadir sebagai akibat politik pecah belah pemerintah kolonial, yakni demi melemahkan Kesultanan Yogyakarta. Kendati demikian, sumber lain menyatakan bahwa berdirinya Paku Alaman adalah atas kehendak Hamengkubuwono III atau raja Yogyakarta sendiri. Kemungkinan hal ini merupakan balas jasa pada Pangeran Notokusumo yang telah membantunya menyingkirkan Hamengkubuwono II.

Pangeran Adipati Paku Alam II (1829–1858) yang mengantikan Paku Alam I, tetap menunjukkan kesetiaannya pada pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya,

ia memperoleh berbagai hak istimewa dan penghargaan dari pemerintah kolonial. Sebagai contoh, pada tahun 1839 Paku Alam II memperoleh anugerah berupa bintang penghargaan *Ridder in de Orde van den Nederlanschen Leeuw* (Ordo Panglima Singa Negeri Belanda). Putra tertua Paku Alam II bernama G.B.H. Suryoputro dianugerahi pangkat sebagai letnan kolonel, namun mangkat sebelum sempat menggantikan ayahnya. Oleh sebab itu, putra keduanya yang bernama G.B.H. Suryaningrat dicalonkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Arya Suryaningrat pada tahun 1841. Tetapi ia menderita sakit ingatan akibat hal-hal yang berkaitan dengan mistik[67]. Karenanya, Paku Alam II menyampaikan keinginannya pada pemerintah Belanda agar salah seorang di antara putra-putranya yang lain dijadikan penggantinya. Setelah mendengar amanat tersebut, Belanda menyanggupi bahwa apabila Paku Alam mangkat dan putra mahkotanya itu belum sembuh, maka salah seorang di antara putranya yang lain akan diangkat sebagai penggantinya. G.B.H. Nataningprang, putra ketiga Paku Alam II, yang banyak membantu tugas-tugas ayahnya wafat pada tahun 1857; sehingga akhirnya pewarisan singgasana Pakualaman beralih pada putra keempat bernama G.B.H. Sasraningrat. Ia kemudian dinobatkan sebagai Paku Alam III (1858–1864)

Semasa pemerintahan Paku Alam III, kaum kerabat Pakualaman telah semakin banyak jumlahnya. Paku Alam III mengajukan permohonan pada pemerintah kolonial Belanda agar legiun Pakualaman diperbesar jumlahnya, sehingga sanggup memberikan kesempatan kerja bagi anggota keluarga Pakualaman. Ketika Paku Alam III mangkat pada tahun 1864, beliau belum memiliki putra-putra berusia dewasa yang layak dijadikan penggantinya. Atas usulan G.K. Ratu Ayu, permaisuri Paku Alam II, yang dinobatkan sebagai penerus dinasti Pakualaman adalah cucunya bernama K.G.P.A. Suryo Sasraningrat. Beliau yang setelah mewarisi singgasana Pakualaman bergelar Paku Alam IV (1864–1878) adalah putra almarhum G.B.H. Nataningprang. Paku Alam IV mangkat tanpa meninggalkan keturunan dewasa, sehingga yang diangkat sebagai Paku Alam V (1878–1900) adalah K.P.H. Suryodilogo, putra Paku Alam II.

Karena luasnya yang tidak begitu besar, Kadipaten Paku Alaman tampaknya kurang dapat mengembangkan kekuatan militernya. Itulah sebabnya, penguasa dan para bangsawan Paku Alaman lebih memusatkan perhatian pada bidang intelektual

67. Lihat *Puro Pakualaman: Sejarah Kontribusi dan Nilai Kejuangannya*, halaman 29. Sumbernya adalah *Gedenkschrift jarig bestuurjubileum ZH Paku Alam VII*, halaman 21.

serta kemajuan masyarakat. Di kalangan mereka timbul semangat pembaharuan karena menyadari bahwa masyarakat Jawa saat itu telah berubah. Dengan demikian, mengikuti arus perkembangan zaman adalah sesuatu yang sangat diperlukan demi mempertahankan eksistensi mereka. Paku Alam V merupakan penguasa yang memelopori perkembangan pendidikan di daerahnya, dan demikian pula halnya dengan para bangsawan seperti Pangeran Kusunoyuda dan Notodirojo (putra Paku Alam V). Mereka menganjurkan agar rakyat Paku Alaman dan orang Jawa pada umumnya mempelajari ilmu pengetahuan modern, yakni dengan memasuki sekolah-sekolah Belanda. Paku Alam V bahkan menyekolah putra dan putrinya ke Belanda. R.M. Surarjo yang kelak naik takhta sebagai Paku Alam VII telah dipondokkan di suatu keluarga Belanda semasa mudanya. Ia kemudian menempuh pendidikannya di HBS Semarang dan *afdeeling* B *Gymnasium* Willem III Jakarta.

Semasa R.M. Surarjo masih menuntut ilmu di HBS, Kadipaten Paku Alaman diperintah oleh dewan perwalian, dengan Pangeran Notodirojo sebagai salah seorang anggotanya. Ia merupakan bangsawan yang berwawasan maju pula sehingga menyekolahkan empat di antara lima putranya ke Negeri Belanda. Mereka ada yang menjadi dokter, insinyur, guru besar di Universitas Gajah Mada (UGM), ahli hukum, dan penyair. Di samping itu, salah seorang putrinya meraih akta pendidikan Eropa (*Europeeschacte*). Pangeran Notodirojo menyadari bahwa banyak orang tua ingin menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Eropa, tetapi terbentur masalah biaya. Oleh karenanya, ia lalu mendirikan yayasan beasiswa bernama Darmoworo.

Di kalangan bangsawan Paku Alaman lahir pula tokoh-tokoh yang peduli terhadap pergerakan kebangsaan, seperti Kusumoyudo, Notosuroto, Notodiningrat (Wreksodiningrat), Suryapranata, dan Suwardi Suryaningrat. Tokoh bernama Suwardi Suryaningrat ini lebih tersohor sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan bersama Douwes Dekker beserta Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij. Sementara itu, Suryapranata berkiprah lewat SI dan Sarekat Buruh. Pangeran Notodirojo ikut aktif menjadi pengurus Budi Utomo dan terpilih sebagai ketuanya pada tahun 1911. Semua perkembangan ini memperlihatkan bangkitnya nasionalisme di kalangan kaum bangsawan Paku Alaman, walaupun coraknya masih kedaerahan.

Paku Alam V merupakan penguasa Pakualaman pertama yang dimakamkan di Pasareyan (Pemakaman) Astana Girigondo. Sebelumnya, raja-raja Pakualaman belum

mempunyai kompleks pemakaman sendiri. Asal-muasal Pasareyan Girigondo berawal dari permohonan seorang *sinshe* (tabib keturunan China) pada Paku Alam V. Tabib itu memohon agar ia diizinkan membuat makam di lokasi yang kelak menjadi *pasareyan* tersebut, karena tanahnya yang sangat bagus. Raja menjawab bahwa bila memang demikian halnya, biarlah beliau sendiri dan para pewarisnya yang memanfaatkannya sebagai kompleks pemakaman.

Paku Alam VI (1901–1902) melakukan perombakan besar di kerajaan yang dipimpinnya. Ia merupakan seorang raja yang mementingkan pendidikan, di mana hal ini menyebabkan kesenian di istananya menjadi kurang berkembang. Semenjak Paku Alam VI, kesusastraan yang dihasilkan Paku Alaman mengalami masa surut dan hanya berkembang dalam lingkungan keraton saja. Paku Alam VI tidak lama memerintah. Setengah tahun setelah dinobatkan sebagai raja, ia jatuh sakit dan wafat tak lama kemudian. Pada masa hidupnya, Paku Alam VI merupakan pribadi yang pendiam dan tak banyak bicara, sehingga sedikit saja orang yang dapat mengetahui isi hatinya. Kendati demikian, orang-orang dekatnya memuji budi pekerti beliau yang tinggi.

Putra mahkota yang bernama R.M. Surarjo (Surarjodiningrat) masih terlampau muda, sehingga pemerintah kolonial menghendaki dibentuknya dewan perwalian Kadipaten Pakualaman dengan R.J. Couperus, residen Yogyakarta, sebagai ketuanya. Tokoh-tokoh yang duduk dalam dewan itu adalah K.P.H. Sasraningrat (putra Paku Alam III dan ayah Nyi Hajar Dewantara), K.P.H. Notodirojo (putra Paku Alam V dan adik Paku Alam VI), P.H. van Andel (asisten residen Yogyakarta), F.C.H. van der Moore (asisten residen Kulonprogo), dan C. Canne (sekretaris karesiden Yogyakarta)[68]. R.M. Surarjodiningrat menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya di Afdeeling B. Gymnasium Willem III, Jakarta, dan setelah itu mengadakan kunjungan ke berbagai penjuru Kepulauan Nusantara selama sebulan. Beliau kemudian dinobatkan sebagai Paku Alam VII (1903–1938).

Paku Alam VII diam-diam mendukung kegiatan politik Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) yang berjuang keras menumbuhkan semangat kebangsaan demi mencapai Indonesia merdeka. Beliau merupakan seorang pemimpin dengan wawasan pengetahuan luas, sehingga sanggup bekerja secara sistematis dalam memajukan ekonomi dan pendidikan di kadipatennya. Berbagai peraturan yang dirasa tak sesuai dengan arus perkembangan zaman disederhanakannya. Kesenian Jawa tak luput pula

68. Lihat *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi, dan Nilai Kejuangannya*, halaman 73.

dari perhatian beliau. Para seniman, sastrawan, pelukis, dan budayawan Jawa, beliau angkat sebagai pegawai kadipaten. Selain itu, Paku Alam VII kerap membantu para ilmuwan Belanda yang mengadakan penelitian tentang budaya Jawa. Sebagai contoh, Dr. Groneman dalam karya-karyanya banyak mendapat bahan dari beliau. Raja berpandangan luas ini bahkan memiliki perpustakaan berisikan literatur berbobot, yang diselenggarakannya bersama Profesor Kera, seorang pakar ketimuran tersohor.

Putra-putri Paku Alam VII tak ketinggalan mendapat pendidikan Barat. Beliau bukanlah penguasa yang kolot dan anti-perubahan. Segenap perombakan yang bermanfaat akan beliau dukung. Di hadapan rakyatnya, Paku Alam VII merupakan raja yang sederhana sehingga sanggup memperoleh kepercayaan mereka. Semasa pemerintahan beliau dikeluarkan berbagai peraturan dan perundangan sebagai berikut:[69]

- *Rijksblad* atau lembaran negara yang membuat segenap aturan di Pakualaman (1917).
- Peraturan yang memperkuat hak rakyat dalam menggunakan tanah.
- Peraturan yang menentukan harga tertinggi bagi bahan makanan serta larangan menimbun bahan pangan (1919).
- Peraturan mengenai pembuatan rumah dan penyuntikan mayat demi mencegah menularnya penyakit pes (1917 dan 1922).

Guna memelihara saluran-saluran air, pada tahun 1924 didirikanlah Waterschap Opak Progo. Bank Kalurahan didirikan pada tahun 1938 dengan tujuan menolong rakyat kecil dalam bidang permodalan. Atas jasa-jasanya memajukan negerinya, Paku Alam VII dianugerahi bintang penghargaan *Ridder van den Nederlanschen Leeuw*. Paku Alam VII mangkat pada 16 Februari 1937. Ketika itu, putra mahkota B.R.M.H. Suryo Sularso Kunto Suratno tengah mengadakan perjalanan ke Eropa untuk menghadari upacara pernikahan Ratu Juliana. Berita kematian ayahnya terdengar saat ia berada di Swiss. Oleh karenanya, beliau segera bertolak kembali ke tanah air pada 19 Februari 1937 dengan menumpang kapal api *Dempo*.

B.R.M.H. Suryo Sularso Kunto Suratno yang menggantikan ayahnya sebagai Paku Alam VIII (1938–1998) merupakan pribadi yang sederhana dan semenjak kecil telah membaur dengan rakyat. Semasa mudanya, beliau tak berpikir menjadi raja. Setelah lulus MULO, gubernur jenderal bertanya padanya hendak melanjutkan ke

69. Lihat *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi, dan Nilai Kejuangannya*, halaman 75.

mana. Beliau menjawab ingin bersekolah di akademi militer Belanda. Tetapi gubernur jenderal menanggapi dengan spontan bahwa bila sudah lulus tentu beliau akan menjadi pemberontak. Pada kenyataannya, keinginan ini memang tidak dikabulkan oleh gubernur jenderal. Karena itu, beliau lantas melanjutkan pendidikannya di AMS-B dan kemudian memasuki *Rechts Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta. Selama dua tahun beliau mengenyam pendidikan di sekolah tersebut dan kembali ke Yogyakarta serta bekerja di bagian agraria. Harapan beliau memilih pekerjaan tersebut adalah dapat bertatap muka langsung dengan rakyatnya.

Olah raga kegemaran Paku Alam VIII adalah panahan. Semenjak kecil beliau telah belajar cabang olah raga ini. Ibunya membuatkan anak panah yang dinamai Bramastro. Itulah sebabnya, Bramastro menjadi nama julukan beliau. Karena kecintaannya pada dunia panah memanah, Paku Alam VIII merupakan pencetus lahirnya Perpani (Persatuan Panahan Nasional) dan dimasukkannya olah raga ini secara resmi ke dalam PON (Pekan Olah Raga Nasional). Kiprah Paku Alam VIII dalam panahan diakui dunia internasional, yang diwujudkan dalam pengangkatan beliau sebagai juri oleh FITA (Federasi Panahan Internasional).

Paku Alam VIII bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX ikut menyatakan dukungannya pada pemerintah RI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dua hari kemudian kembali dikirim telegram yang isinya ucapan selamat atas terpilihnya Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya pada 5 September 1945 dikeluarkan lagi amanat yang menyatakan bahwa Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya, pada era kemerdekaan Kadipaten Paku Alaman beserta Kesultanan Yogyakarta dikukuhkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah dan Paku Alam VIII selaku wakilnya.

Setelah Paku Alam VIII mangkat pada tahun 1998, terjadi kemelut masalah pergantian takhta. KPH Ambarkusumo telah dinobatkan sebagai Paku Alam IX; kendati demikian, pangeran lainnya yang juga saudara tiri KPH Ambarkusumo, KPH Anglingkusumo juga merasa berhak atas gelar tersebut[70]. Ia berniat mengadakan upacara *jumenengan* (penobatan atau pengukuhan sebagai raja). Tetapi kubu

70. Lihat *Jawa Pos* edisi tanggal 19 Oktober 2009, halaman 11; dengan judul *Geger Pakualaman Mencuat Kembali*.

KPH Ambarkusumo terkesan mengabaikan saja rencana tersebut. Menurut KPH Tjondrokusumo, adik kandung KPH Ambarkusumo masalah pergantian takhta itu sudah final, yakni dengan pengukuhan kakaknya sebagai Paku Alam IX pada Mei 1999. Ia mempersilakan KPH Anglingkusumo mengadakan *jumenengan*, asalkan di luar Puro (Istana) Pakualaman. Ditambahkannya pula semenjak kakaknya naik takhta telah diupayakan rekonsiliasi antar keduanya, tetapi kubu Anglingkusumo tidak pernah datang.

Paku Alam IX kerap menghadiri dan memberikan sambutannya terhadap berbagai acara yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan; seperti Penutupan Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar 2009 di Yogyakarta (10 Januari 2009), Sosialisasi Program Raskin 2009 di Yogyakarta (21 Januari 2009), Pembekalan Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Anggota Sekaligus Peresmian Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kantor Cabang Yogyakarta di Yogyakarta (4 Februari 2009), Seminar Internasional "Wisata Ilmu, Jogja Dentistry 2009" di Yogyakarta (6 Februari 2009), Penanaman Pohon dan Sarasehan Pelestarian Lingkungan di Yogyakarta (10 Februari 2009), Upacara Adat "Ngrowhod" Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman (22 Februari 2009), Kendurenan Syukuran 12 Tahun Forum Persaudaraan Umat Beriman (27 Februari 2009), Festival Game dan Animasi Pendidikan (24 Maret 2009), Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Wilayah I Tahun 2009 (17 Mei 2009), Perayaan Peh Cun 2009 "Melestarikan Seni Budaya Tionghua Sebagai Khazanah Budaya Indonesia (27 Mei 2009), Temu Kader Penyuluh P4GN di Lingkungan Pendidikan (3 Juni 2009), dan lain sebagainya.

b. Kesusastraan dan kebudayaan

Tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan pecahan Mataram lainnya, istana Pakualaman menghasilkan pula berbagai karya sastra terkemuka. Paku Alam I pernah menulis karya-karya sebagai berikut: *Babad Betawi, Serat Rama, Serat Piwulang, Kitab Sarahdarma, Kitab Kyai Jati Pusaki,* dan *Kitab Kyai Sujarah Darma Sujayeng*. Lebih jauh lagi, Paku Alam II membuahkan karya-karya berjudul *Serat Dewaruci, Serat Baratayuda, Ladrang Anom, Lawung Ageng, Gadhung Melathi, Puspawarna,* dan *Beksan Bandayuda*. Paku Alam V menghasilkan karya-karya berjudul: *Serat Babad Segaluh* dan *Cerita Banjaransari*. Paku Alam VII pernah menulis buku mengenai riwayat Paku Alam I–VI.

V. SURAKARTA

a. Perkembangan Kasunanan Surakarta

Setelah pembagian Mataram pada tahun 1755, Sunan Pakubuwono III tetap berkuasa di Surakarta hingga wafatnya pada tahun 1788. Semasa hidupnya Sunan Pakubuwono III terkenal aktif memajukan kesenian dan kebudayan. Beliau digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono IV (1788–1820). Raja Surakarta ini dijuluki pula Sunan Bagus, karena wajahnya yang tampan[71]. Usianya saat memangku kedudukannya masih tergolong muda, yakni 19 tahun. Dalam rangka memasyarakatkan budaya Jawa, Pakubuwono IV mengganti pakaian prajurit yang bergaya Belanda dengan seragam lain bercorak Jawa. Setiap pelayan atau abdi dalem keraton diwajibkan mengenakan busana santri. Barangsiapa yang tak mematuhinya akan dipecat[72]. Sunan Pakubuwono IV mengangkat adik-adiknya sebagai pangeran[73] tanpa memberitahukannya pada sultan Yogyakarta, adipati Mangkunegaran, dan VOC. Tindakan ini dilakukan atas hasutan Bahman, Wiradigda, Panengah, Nursaleh, Raden Santri, dan Kandhuruwan Akibatnya pasukan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan VOC mengepung Surakarta serta meminta agar keenam orang itu diserahkan pada mereka. Sunan menyadari bahwa tidak jalan yang lebih baik selain memenuhi tuntutan tersebut.

Pada 22 September 1788, Sunan Pakubuwono IV menandatangani perjanjian dengan VOC yang isinya antara lain:

- Sunan dan VOC akan menyelesaikan segenap permasalahan bersama-sama dalam ikatan persaudaraan.
- Pengangkata patih atau putra mahkota (pangeran adipati anom) harus dengan persetujuan VOC.
- Sunan tidak diperkenankan meminta lagi Madura yang telah diserahkan oleh leluhurnya.

Ketika kekuasaan diserahkan lagi dari tangan Inggris kepada Belanda para tahun 1816, para raja di Jawa bergembira karena menyangka bahwa Belanda akan mengembalikan lagi hak-hak mereka yang telah diambil alih oleh Inggris. Ternyata

71. Lihat *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*, halaman 17.
72. Lihat *Keraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesusastraan, dan Kebudayaan*, halaman 165.
73. Raden Mas Tala diangkat sebagai Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Sayidi diangkat sebagai Pangeran Arya Buminata.

dugaan ini meleset, karena Belanda menganggap bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Inggris tetap berlaku. Inilah yang memicu kekecewaan para raja, baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta.

Suatu peristiwa menarik terjadi ketika usia Pakubuwono IV menjelang senja. Datanglah seorang ulama dari Arab mempersembahkan tiga biji buah kurma. Sunan merasa kebingungan, karena tidak mungkin ulama itu datang dari jauh hanya untuk menyerahkan tiga biji kurma saja. Setelah ditanyakan langsung, ulama itu menjawab bahwa penyerahan tiga biji kurma itu hanya perlambang saja. Ia menjelaskan bahwa maknanya adalah tiga putra Pakubuwono IV masing-masing akan menjadi raja di keraton Surakarta. Ramalan ini terbukti kelak dengan naik takhtanya Pakubuwono V, VII, dan VIII.

Pakubuwono IV digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono V (1820–1823). Beliau dikenal pula dengan sebutan Sinuhun Sugih[74], karena bersedia membagikan seluruh warisan peninggalan ayahnya pada saudara-saudaranya; sementara itu, seluruh hutang orang tuanya, justru beliau sendiri yang mengambil alihnya[75]. Setelah memerintah hanya selama tiga tahun, beliau mangkat dan digantikan oleh Pakubuwono VI (1823–1830). Kendati terikat perjanjian-perjanjian terdahulu dengan Belanda, yang mewajibkan Surakarta mengirimkan bantuan militer pada Belanda bila diminta, beliau merupakan raja yang anti-Belanda serta bersimpati pada Pangeran Diponegoro, sehingga diasingkan ke Ambon pada tahun 1830 dan wafat di sana tanggal 2 Juni 1849[76]. Oleh presiden Republik Indonesia, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada 1964. Pakubuwono VI terkenal sebagai raja yang gemar bertapa sehingga digelari Sinuhun Bangun Tapa[77].

Pakubuwono VII (1830–1858), putra Pakubuwono IV, mengeluarkan naskah undang-undang bagi penduduk desa yang disebut *Serat Angger-Angger Gunung* atau *Serat Angger Negari*. Karya yang ditulis beliau adalah mengenai *Pranata Mangsa Jawa*. Semasa pemerintahannya, wilayah Surakarta makin menyempit dan hanya tinggal seluas karesiden Surakarta. Raja Surakarta berikutnya adalah Pakubuwono VIII (1858–1861) yang tak panjang usia pemerintahannya. Beliau juga merupakan putra

74. Dalam bahasa Jawa, *sugih* berarti "kaya."
75. Lihat *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, halaman 85.
76. Terdapat sumber yang menyatakan bahwa Sunan Pakubuwono VI telah dijatuhi hukuman tembak oleh Belanda.
77. Lihat *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, halaman 86.

Pakubuwono IV, sehingga menggenapi apa yang diramalkan oleh seorang ulama dari tanah Arab di atas. Gelar lain bagi Pakubuwono VIII adalah Sinuhun Behi.

Sunan Pakubuwono IX (1861-1893) memerhatikan pula masalah persurat-kabaran di negerinya. Saat itu, terbit Bromartani, surat kabar berbahasa Jawa. Kendati demikian, usianya tidak panjang. Sebagai penggantinya, delapan tahun kemudian terbit *Djoeroemartani* (1865). Atas permintaan Sunan Pakubuwono IX namanya diganti menjadi *Bromartani* lagi pada 1871[78]. Surat kabar ini ternyata dapat bertahan hingga 1932 setelah berganti redaksi sebanyak 4 kali.

Pengganti Sunan Pakubuwono IX, yakni Pakubuwono X (1893-1939) menikah dengan putri Sultan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta dan pesta perkawinannya dirayakan besar-besaran dengan melibatkan seluruh organisasi sosial setempat; seperti Narpo Wandowo (organisasi para bangsawan), Abipraya (organisasi priyayi pegawai kerajaan), Boedi Oetomo (organisasi priyayi terpelajar), dan Sarekat Islam (organisasi para kawula)[79].

Semasa mudanya, Pakubuwono X memiliki "kumis yang bagus, mulut yang kecil, dan bibir yang berbentuk bagus."[80] Oleh sebab itu tak mengherankan bila *Serat Wedhamadya* yang digubah saat beliau berulang tahun ke-33 menyamakannya dengan Kresna, salah satu penjelmaan Dewa Wisnu. Meskipun demikian, para pejabat kolonial memiliki kesan negatif terhadap Pakubuwono X. Sebagai contoh, Residen van Wijk mencatat bahwa beliau memiliki kepribadian lemah dan terkesan sebagai anak manja. Kelemahan ini barangkali disebabkan karena ia diangkat sebagai putra mahkota dalam usia yang sangat belia, yakni 3 tahun. Sunan Pakubuwono X menggemari pakaian kebesaran yang bagus, bintang penghargaan, perempuan, dan makanan lezat–bahkan sampai badannya menjadi gemuk. Raja Surakarta ini dikabarkan pula kerap minum alkohol dan merokok. Namun belakangan Pakubuwono X menghentikan kebiasaan tersebut dan hanya minum air Belanda saja agar tetap awet muda.

Sunan Pakubuwono X dikenal pula sebagai pencipta lambang Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada simbol terdapat sebuah perisai yang di atas bergambar bulan, bintang, dan matahari. Matahari melambangkan Raden Mas Gusti Suryo (surya berarti matahari); bulan melambangkan Raden Mas Gusti Sasongko (sasongko artinya bulan); dan bintang melambangkan Raden Mas Gusti Sudomo (*sudomo* artinya bintang).

78. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia V*, halaman 294.
79. Lihat *Raja Priyayi dan Kawula*, halaman 3-4.
80. *Raja Priyayi dan Kawula*, halaman 21.

Ketiga tokoh tersebut merupakan putra Sunan Pakubuwono I. Dengan demikian, lambang itu hendak memperlihatkan bahwa para raja Surakarta merupakan keturunan ketiga bangsawan agung itu. Di bawah ketiga lambang itu, terdapat gambar bumi yang dipaku. Ini mengacu pada gelar raja-raja Surakarta, yakni Pakubuwono. Untaian padi dan kapas yang terdapat di luar perisai melambangkan bahwa Kesunanan Surakarta mencita-citakan kemakmuran bagi rakyatnya.

Lebih jauh lagi, Sunan Pakubuwono X hanya belajar bahasa Jawa beserta Melayu. Tidak banyak kemajuan yang dicapai ketika beliau mempelajari bahasa Belanda. Sunan juga kurang pandai berhitung. Ketika ditanya sudah berapa pal mengendarai mobil, beliau tak dapat menjawabnya. Dari segi pemerintahan, Pakubuwono X hanya memiliki pikiran yang sederhana. Menurut surat kabar *Darmo Kondo*, pertanyaan sunan terhadap patihnya cuma seputar saat itu sedang musim apa, kegiatan apakah yang sedang dikerjakan para petani, atau bagaimana kondisi air sungai. Tatkala bepergian, Pakubuwono X kerap membawa pengikut sebanyak 200 orang. Jumlah ini dikurangi lagi menjadi 36 oleh Residen van Wijk dan berkurang kembali menjadi 18 pada tahun 1916 atas perintah Residen F.P. Sollewijn Gelpke (1914-1918). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sunan Pakubuwono X merupakan raja yang gemar kemegahan.

Sunan memiliki kegemaran mengunjungi rumah-rumah dansa (seperti *Schowburg* atau *Societeit Harmonie*) Belanda serta bersedia memanggil *eyang* (*groot vader* atau kakek) pada gubernur jenderal dan *bapa* (*vader* atau ayah) terhadap residen. Selain itu, ia menerima pula pangkat jenderal mayor dari pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian, di tahun 1907 dan 1915 sunan dengan berani pula mengirimkan utusan mengunjungi makam pendahulunya--Sunan Pakubuwono VI-yang diasingkan pemerintah Belanda ke Ambon akibat simpatinya pada perjuangan Pangeran Diponegoro. Pakubuwono X pernah menentang kegiatan *zending* atau misi penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1896, sunan menulis bahwa beliau berkeberatan dengan adanya *zending* di kerajaannya. Beliau menjelaskan pada residen bahwa dirinya secara pribadi tidak memusuhi agama Kristen, tetapi sebagai seorang *panatagama* (pemimpin agama) ia berkeberatan warganya menganut agama lain. Residen W de Vogel (1897-1905) sanggup memahami kesulitan dan dilema yang dihadapi sunan. Oleh karenanya, ia mengusulkan pada gubernur jenderal agar jangan memberikan izin bagi *zending*.

Akhirnya, gubernur jenderal memang menolak pemberian izin bagi misi *zending* di Surakarta. Meskipun demikian, pihak *zending* masih belum berputus asa dan mencoba strategi lain melalui pendirian rumah sakit. Upaya ini pun ditolak oleh sunan dan gubernur jenderal juga tak menyetujuinya. Dewan Gereja Protestan Surakarta melaporkan pada Dewan Gereja Hindia Belanda bahwa di Surakarta sudah ada 40-60 orang pribumi yang menghadiri kebaktian setiap hari Minggunya. Meskipun demikian, gubernur jenderal tetap menolak memberikan izin pendirian gereja khusus bagi orang Jawa. Belakangan, pada 1910 Sunan mengizinkan pendirian gereja pribumi dan rumah sakit Kristen di tahun 1913 yang dibangun oleh *Gereformeerde Kerk* (Gereja Reformis)[81].

Sunan Pakubuwono XI (1939-1945) yang sebelumnya bergelar Pangeran Hangabehi meneruskan kepemimpinan ayahnya. Pada mulanya, Sunan Pakubuwono X lebih memilih saudaranya bernama Pangeran Kusumayuda sebagai penggantinya. Pemerintah Belanda sendiri condong pada Pangeran Kusumayuda, karena menganggapnya sebagai tokoh yang berkepribadian kuat, mandiri, serta tertarik pada administrasi dan keuangan keraton. Di lain pihak, posisi Pangeran Hangabehi boleh dikatakan kuat karena mendapatkan dukungan para bangsawan yang anti-Belanda. Oleh karena itu, pengangkatan Kusumayuda sebagai raja Surakarta berikutnya diurungkan. Sebelum menduduki jabatan sebagai raja Surakarta, Pangeran Hangabehi pernah diserahi jabatan penting sebagai *wedana tengen* dan wakil ketua *Raad Nagari* (dewan pertimbangan kerajaan). Bahkan, beliau pernah diutus ke Negeri Belanda menghadiri peringatan naik takhtanya Ratu Wilhemina. Berdasarkan peraturan (*pranatan*) yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 1930 dan dimuat dalam *Rijksblad* Surakarta 1930 no.6, dalam lingkungan swapraja atau Kerajaan Surakarta dibentuklah lembaga-lembaga peradilan sebagai berikut: Pradoto, Surambi, dan Pradoto Gedhe. Pemerintahan Pakubuwono XI menghadapi guncangan dengan pecahnya Perang Dunia II dan masuknya balatentara Jepang.

Pakubuwono XI mangkat pada 1945 dan digantikan oleh putra sulungnya dengan permaisuri kedua, Bendoro Raden Mas (BRM) Suryo Guritno–yang selanjuitnya menyandang gelar Pakubuwono XII. Ada yang mengatakan bahwa pengangkatan Pakubuwono XII ini erat kaitannya dengan Bung Karno. BRM Suryo Guritno yang dipilih dengan pertimbangan beliau masih berusia muda, sehingga sanggup mengikuti

81. Lihat *Raja Priyayi dan Kawula*, halaman 42.

perkembangan zaman. Sebelum wafat, ayah beliau pernah berpesan agar putranya itu bersiap-siap menghadapi masuknya keraton Surakarta ke zaman kegelapan. Amanat ini terbukti kebenarannya ketika pecah gerakan menentang kerajaan atau swapraja. Meskipun telah sah terpilih sebagai raja Surakarta berikutnya, wakil pemerintah Jepang menentang penobatannya da menyatakan tak berani menjamin keselamatan calon raja. Belum lama Pakubuwono XII menduduki singgasananya Republik Indonesia diproklamasikan. Ir. Soekarno, presiden pertama RI mengeluarkan piagam pengesahan kedudukan Pakubuwono XII yang berbunyi sebagai berikut:

Repoeblik Indonesia

Kami, Presiden Repoeblik Indonesia, menetapkan: Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XII, Senopati Ing Ngalogo, Abdoerrahman Sajidinpanotogomo, Ingkang Kaping XII ing Soerakarta Hadiningrat.

pada kedoedoekannja

dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjoerahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.

Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia

ttd

(Ir. Soekarno)[82]

Kurang lebih dua minggu kemudian, tepatnya 1 September 1945, Sunan Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan bagian R:

82. *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, halaman 106.

MAKLOEMAT SERI PADOEKA INGKANG SINOEHOEN KANDJENG SOESOEHOENAN

kepada

Seloeroeh pendoedoek negeri Soerakarta Hadiningrat

Kami Pakoeboewono XII, Soesoehoenan Negeri Soerakarta Hadiningrat menjatakan Negeri Soerakarta Hadiningrat, jang sifatnya keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia, dan berdiri di belakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia.

Kami menjatakan, bahwa pada dasarnja segala kekoesaan dalam daerah Negeri Soerakarta Hadiningrat, terletak di tangan Soesoehoenan Soerakarta Hadiningrat, dan oleh karena itoe, berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekoesaan-kekoesaan jang sampai kini tidak ditangan kami dengan sendirinja kembali ketangan kami.

Kami menjatakan, bahwa perhoeboengan antara Negeri Soerakarta Hadiningrat dengan pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.

Kami memerintahkan dan percaja kepada seloeroeh pendoedoek Negeri Soerakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesoeai dengan sabda Kami terseboet di atas.

Soerakarta Hadiningrat
1 September 1945

ttd.

PAKOEBOEWONO XII[83]

83. *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, halaman 107.

Pada tahun 1946, pemerintahan Pakubuwono XII dilanda prahara dengan pecahnya gerakan menentang swapraja. Pergolakan ini berhasil merampas segenap sisa kekuasaan yang berada di tangan Pakubuwono XII.

b. Revolusi Pembubaran Swapraja Surakarta

Gerakan rakyat menuntut pembubaran Daerah Istimewa Surakarta ini sebenarnya dipicu oleh ketidak-puasan rakyat terhadap para penguasa mereka. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang bekerja sama dengan penguasa lokal dianggal tidak berpihak pada rakyat. Masuknya perusahaan perkebunan swasta asing yang menyewa tanah dari penguasa setempat menimbulkan berbagai penyelewengan. Pemerasan terhadap kaum petani semakin menjadi-jadi yang didukung oleh lembaga peradilan dan kepolisian kepangeranan. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila polisi banyak dibenci oleh penduduk desa[84]. Penghapusan kerja rodi oleh pemerintah kolonial tidak menghapuskan penderitaan di kalangan rakyat, karena sebagai buruh upahan mereka menerima gaji kecil serta sanksi-sanksi yang berat.

Penderitaan di kalangan rakyat menjatuhkan martabat penguasa tradisional di kawasan ini, baik sunan di Surakarta maupun adipati di Mangkunegaran. Apalagi terjadi persaingan politis antara keduanya yang disalurkan dalam wujud unjuk kemewahan beserta kemegahan masing-masing di tengah-tengah kesengsaraan rakyat pada masa itu. Tentu saja simpati rakyat terhadap mereka semakin memudar. Pada era 1930-an terjadi kelesuan ekonomi yang disebut malaise, sehingga harga-harga hasil perkebunan mengalami kemerosotan. Krisis ini merupakan pukulan bagi kaum bangsawan, sehingga berdampak pada gaya hidup mereka. Meskipun demikian, sesungguhnya yang paling menanggung akibatnya adalah rakyat sendiri. Setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Daerah Istimewa Surakarta Hadiningrat, perselisihan antara Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran tak kunjung mereda. Mangkunegaran selaku pemilik sepertiga wilayah kota Surakarta menuntut persamaan hak dengan Kasunanan. Berbeda dengan di Yogyakarta, di mana Paku Alam bersedia menjadi wakil sultan selaku kepala Daerah Istimewa Yogyakarta; Sunan dan Adipati Mangkunegara tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing ingin menjadi kepala daerah, sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan di dewan pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta Hadiningrat. Sementara keduanya saling bersaing satu sama lain, masalah sosial kemasyarakatan menjadi terabaikan.

---

84. Lihat *Yang Berlawanan*, halaman 128.

Di kalangan Kasunanan Surakarta sendiri timbul gejolak berupa penculikan Patih Sosrodiningrat yang dituduh memihak Jepang. Komite Nasional Indonesia (KNI) Surakarta yang diketuai adik ipar sunan bernama Mr. Sumodiningrat mengalami kelumpuhan dan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Guna meredakan perseteruan kedua kerajaan ini, pada 19 Oktober 1945 diutuslah R.P. Suroso selaku komisaris tinggi pemerintah dengan tugas menjadi koordinator antara Kasunanan dan Mangkunegaran. Partai-partai politik yang ada segera bereaksi menuntut penghapusan kekuasaan swapraja-swapraja tersebut. Sebagai langkah lebih lanjut, dewan pemerintahan di Surakarta yang diwarnai pertikaian dihapuskan berdasarkan keputusan BP KNI; dan selanjutnya dibentuk suatu badan yang disebut Direktorium agar di kawasan Surakarta hanya ada satu pemerintahan saja. Anggota-anggota Direktorium pada masa itu adalah Daljono, Prodjosudodo, Ronomarsono, Dasuki Sirad, dan Djuwardi. Kendati demikian, pada kenyataannya, Direktorium tidak dapat berjalan efektif karena adanya pihak-pihak yang menghendaki agar kedua kerajaan, baik Kasunanan Surakarta maupun Mangkunegaran, dikembalikan sebagaimana kondisinya sebelum kedatangan balatentara Jepang. Dengan kata lain, terdapat pihak-pihak yang menyabot berfungsinya Direktorium. Selain itu, Mangkunegaran sendiri kurang setuju dengan keberadaan badan tersebut.

Kaum muda makin membenci kalangan keraton karena ketika perlawanan terhadap kedatangan NICA yang membonceng pasukan Sekutu berkecamuk di mana-mana, para bangsawan dalam istana malah hidup dalam kemewahan. Terlebih lagi setelah terdengar kabar bahwa Pangeran Surjohamidjojo, salah seorang paman raja Surakarta, mendirikan *Commite van Ontvangst* (Panita Penyambutan), yang bertujuan menyambut kedatangan kembali tentara Belanda. Pada bulan Januari 1946, Barisan Banteng yang dipimpin Dr. Muwardi menculik Sunan Pakubuwono XII, Kanjeng Ratu, dan Surjomidjojo. Ketiga orang bangsawan tersebut ditahan beberapa hari dan disadarkan mengenai betapa besarnya kebencian rakyat terhadap mereka. Setelah menyadari kesalahan-kesalahannya, mereka dilepaskan kembali. Pada 19 April 1946, Barisan Banteng kembali memasuki keraton dan memaksa sunan agar bersedia menyerahkan kekuasaannya pada rakyat.

Tiga hari kemudian, pemerintahan BP KNI Klaten, salah satu kabupaten yang kaya dalam lingkungan Kasunanan, mengadakan pertemuan dengan 60 organisasi politik dan kemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut bagi pertemuan ini, empat hari

kemudian mereka mengangkat bupati Klaten baru dan menyatakan melepaskan diri dari keraton. Tindakan radikal ini diikuti pula oleh Kabupaten Sragen. Gerakan anti istana bergulir terus dengan dikeluarkannya mosi bersama antara Kepolisian, Angkatan Muda Pamong Praja, Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Sosialis, BTI, BPRI, Barisan Banteng, dan PNI pada 29 April 1946 yang isinya menuntut pembubaran Daerah Istimewa Surakarta Hadiningrat dan statusnya diturunkan menjadi karesidenan biasa. Kedua raja, yakni Sunan Pakubuwono XII dan Adipati Mangkunegoro VIII tidak lagi memegang fungsi pemerintahan dan hanya bertugas sebagai pemangku adat saja. Bersamaan dengan dikeluarkannya mosi ini, polisi tidak bersedia lagi melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan keraton. Bahkan, sembilan orang pejabat tinggi kantor kepatihan diculik oleh pegawai-pegawai bawahan mereka.

Menyadari adanya tekanan-tekanan yang semakin gawat terhadap Kasunanan Surakarta, pada 30 April 1946 Pakubuwono XII mengeluarkan pernyataan, yang pada intinya memaklumkan kesediaan beliau menyerahkan kekuasaan pada pemerintah Republik Indonesia apabila rakyat menghendakinya. Kadipaten Mangkunegaran menyusul mengeluarkan pengumuman senada pada 1 Mei 1946, yang menyatakan bahwa pihak mereka menghargai keinginan rakyat menegakkan demokrasi serta keadilan sosial. Karenanya, mereka sepakat merancang dan mengeluarkan undang-undang baru yang berlaku dalam wilayah Kadipaten Mangkunegaran dengan Adipati Mangkunegara sebagai kepala Daerah Istimewa Mangkunegaran yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden RI. Ia juga bersedia menerima pasal-pasal UUD yang diberlakukan pemerintah RI. Proses demokratisasi di Mangkunegaran akan diwujudkan dalam pembentukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas mendampingi Adipati Mangkunegara menjalankan roda pemerintahannya. Anggota dewan akan dipilih langsung dari rakyat kawasan tersebut. Mencermati isi maklumat tersebut, berbeda dengan Kasunanan, Mangkunegaran nampak berniat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah arus perubahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, kelihatan pula niat kedua raja tersebut berlindung dalam naungan pemerintah pusat RI.

Seiring dengan itu, rakyat menuntut agar Kasunanan maupun Mangkunegaran menyerahkan pabrik-pabrik dan perkebunan mereka pada kaum buruh beserta pegawainya masing-masing. Saat itu, terjadi pertentangan yang tajam antara pihak yang pro dan kontra terhadap swapraja. Menteri dalam negeri Dr. Sudarsono diutus

mengadakan pembicaraan dengan kedua faksi yang saling berseberangan di Surakarta. Dicapai kesepakatan bahwa akan dibentuk suatu badan guna menyelesaikan krisis yang berlarut-larut itu. Menyikapi perkembangan baru ini, golongan anti swapraja menggelar rapat raksasa pada 9 Mei 1946. Rapat memutuskan bahwa mereka akan berjuang mati-matian menjegal pihak keraton mendudukkan wakilnya dalam badan di atas.

Dr. Sudarsono pada 17 Mei 1946 mengumumkan dibentuknya panitia pemilihan di Surakarta dengan Subadio Sastrosatomo sebagai ketuanya. Meskipun demikian, krisis makin menjadi-jadi karena keempat kabupaten di Surakarta menyatakan melepaskan diri dari Kasunanan. Di samping itu, petinggi-petinggi militer yang terkenal radikal mendukung gerakan anti swapraja. Demi meningkatkan kondisi keamanan di Surakarta, pemerintah pusat mengganti Komisaris Tinggi Suroso dengan Suryo, gubernur Jawa Timur, yang dianggap lebih berwibawa. Dr. Muwardi dan sebelas tokoh anti swapraja lainnya ditahan demi menjaga ketertiban; namun karena timbul aksi unjuk rasa yang menentang penangkapan mereka, tokoh-tokoh tersebut dibebaskan kembali.

Karena persoalan tak kunjung selesai, digelar sidang yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya. Hasilnya, Pemerintah Daerah Rakyat dan Tentara yang disingkat PDRT akan dibentuk pada 1 Juni. Dengan adanya perombakan tatanan pemerintahan ini, swapraja Surakarta, Mangkunegaran, dan Direktorium dibubarkan. Oleh sebab itu, berakhir sudah status Surakarta dan Mangkunegaran sebagai swapraja. Kawasan Surakarta semenjak saat itu dijadikan salah satu karesidenan dalam wilayah NKRI.

c. Perjalanan Kasunanan Surakarta Dewasa Ini

Semasa berlangsungnya revolusi fisik menegakkan kemerdekaan, Pakubuwono XII mendapatkan pangkat lituler berupa letnan jenderal dari Presiden Soekarno. Oleh Bung Karno beliau kerap diajak meninjau berbagai medan pertempuran, terutama semenjak Agresi Militer II. Beliau banyak menyumbangkan baik perbekalan logistik maupun perlengkapan perang pada para pejuang. Karenanya, beliau memperoleh penghargaan bintang gerilya serta piagam dan medali penghargaan dari Dewan Harian Angkatan 45 pada 28 Oktober 1995.

Hilangnya kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa tak menyurutkan niat Pakubuwono XII memperjuangkan hal tersebut; apalagi belum ada ketetapan

yang pasti mengenai kedudukan Surakarta maupun Mangkunegaran. Menjelang berlangsungnya Konperensi Meja Bundar (KMB), Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran melayangkan surat pada pemerintah pusat tertanggal 26 Juli 1949. Surat tersebut merupakan permohonan penyampaian pendapat dalam konperensi yang hendak digelar mengenai nasib Surakarta beserta Mangkunegaran. Hingga tahun 1951 tidak terdapat keputusan pamungkas mengenai nasib kedua kerajaan tersebut, karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal peraturan perundangan terkait antara Kementerian Dalam Negeri dengan pihak kerajaan.

Menteri Dalam Negeri, yang dijabat oleh Mr. Ishak Tjokrohadisurjo, mengusulkan pada kabinet agar dikeluarkan penegasan mengenai penghapusan Swapraja Surakarta dengan menimbang berbagai kondisi politik saat itu. Kendati demikian, kabinet tidak menindak lanjuti saran Mr. Ishak Tjokrohadisurjo sampai dikeluarkannya UU no. 1 tahun 1957 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, pengganti UU no. 22 tahun 1948. Perjuangan memperoleh kembali status daerah istimewa bagi Kasunanan Surakarta menemui jalan buntu. Namun kenyataan ini tak memupuskan niat Sunan Pakubuwono XII dalam melestarikan budaya keraton. Berbagai upacara adat tetap dijalankan sebagaimana biasanya.

Musibah kebakaran melanda istana Surakarta pada 31 Januari 1985. Bangunan-bangunan penting keraton, seperti Bangsal Parasadya, Sasana Sewaka, Paningrat, Bangsal Maligi, dan Sasana Handrawina, musnah dilalap si jago merah. Tim peneliti menyimpulkan bahwa kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik, walaupun ada yang menghubungkannya dengan ramalan kuno bahwa keraton Surakarta hanya akan berusia 200 tahun saja. Pakubuwono XII sendiri yang pernah mencemaskan betapa rapuhnya kondisi instalasi listrik di keraton meyakini bahwa musabab kebakaran memang disebabkan oleh hubungan pendek tersebut. Dengan dukungan Presiden Soeharto, pembangunan kembali keraton Surakarta dapat dilangsungkan.

Dua tahun sebelum runtuhnya Orde Baru, Sunan Pakubuwono XII tampaknya telah sanggup membaca pertanda zaman. Pada 1996, beliau menyarankan para pemimpin negara agar mengadakan perombakan di segala bidang, mengingat betapa beratnya penderitaan rakyat serta maraknya praktik-praktik politik yang bertentangan dengan moralitas. Sejarah membuktikan bahwa pada 1998, Orde Baru tumbang. Setelah memerintah selama hampir 60 tahun, Sunan Pakubuwono XII mangkat pada 11 Juni 2004. Sebelumnya, beliau beberapa waktu dirawat di Rumah Sakit Panti

Kosala Dr. Oen, Surakarta, karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Jenazah beliau dimakamkan di Imogiri. Saat prosesi pemberangkatan jenazah almarhum, rakyat Surakarta berbondong-bondong menghaturkan penghormatan terakhirnya.

Mangkatnya Pakubuwono XII menyisakan masalah mengenai suksesi. Terjadi silang pendapat mengenai siapakah putra-putra Pakubuwono XII yang layak dinobatkan sebagai Pakubuwono XIII. Beberapa orang calon yang merasa berhak antara lain adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi, KGPH Kusumayudha, KGPH Tedjowulan, dan KGPH Hadiprabowo. Beberapa minggu setelah meninggalnya Pakubuwono XII belum ada keputusan mengenai siapakah di antara putra-putra beliau yang akan dinobatkan sebagai raja Surakarta berikutnya. Akhirnya pada 24 Juni 2004, keluarlah pengumuman yang menetapkan KGPH Hangabehi sebagai pengganti Pakubuwono XII. Namun tampaknya ketetapan ini tidak didukung oleh seluruh elemen keraton. Tidak semua pangeran maupun pemuka istana Surakarta hadir saat diumumkannya keputusan pengangkatan KGPH Hangabehi tersebut. Pecahlah pertentangan di antara para putra Pakubuwono XII dan petinggi keraton maupun para *abdi dalem*. Apalagi saat itu tidak institusi legal yang secara resmi bertanggung jawab atas dikeluarkannya ketetapan di atas. Bahkan pada surat keputusannya tidak tampak adanya stempel ataupun tanda tangan pihak yang berwenang mengeluarkannya.

KGPH Hangabehi dan saudara-saudara kandungnya yang berasal dari satu ibu merasa berhak menyandang gelar Pakubuwono XIII berdasarkan surat wasiat Pakubuwono XII. Wasiat tersebut dibuat di Tawangmangu dan telah dibubuhi cap jempol oleh almarhum sendiri. Masalahnya, tidak seluruh putra-putri Pakubuwono XII, terutama yang berasal dari lain ibu, mengetahui keberadaan surat wasiat di atas. Beberapa pihak merasa keberatan dengan mekanisme penggantian raja atas dasar surat wasiat semata. GPH Dipokusumo berpendapat bahwa penetapan pengganti raja harus melibatkan sembilan komponen; yakni permintaan raja yang akan digantikan, penghulu keraton, pujangga keraton, komandan prajurit, patih, penguasa, Pengageng Kasentanan, Pengageng Parentah, serta Pengageng Kaputren[85].

Polemik makin memanas, ketika pada 15 Juli 2004 dibentuk sebuah forum yang menamakan dirinya Forum Belo Raos Abdidalem. Lahirnya forum ini didasari kepedulian atas masalah suksesi yang melanda keraton Surakarta. Anggotanya berasal

85. Lihat *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, halaman 123.

dari kelompok-kelompok di luar keraton Surakarta, seperti Brayat Ageng Surakarta, Trah Gagatan Surakarta, Paguyuban Lesanpura Surakarta, Paguyuban Mekar Kusuma Surakarta, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Surakarta. Forum Belo Raos Abdidalem bermaksud memberikan masukan mengenai penggantian kekuasaan di istana Surakarta dan menyatakan bahwa masalah suksesi tidak boleh diputuskan oleh putra-putri raja saja; melainkan harus mendapatkan dukungan para *abdi dalem*. Mereka menolak penetapan KGPH Hangabehi sebagai calon pengganti almarhum ayahnya dan menuntut agar penobatan ditunda demi menampung berbagai aspirasi yang barangkali timbul belakangan. Kaum kerabat keraton Surakarta yang berada di Jakarta pada 27 Juli 2004 sepakat menolak pula pencalonan Hangabehi. Meskipun demikian, KGPH Hangabehi tetap merencanakan acara *jumenengan* beliau pada 10 September 2004.

Keaslian surat wasiat Pakubuwono XII mulai dipertanyakan, karena dokumen sepenting itu memerlukan legalitas yang kuat. Pengujian di laboratorium forensik mengukuhkan bahwa cap jempol beliau memang asli. Tetapi polemik tidak berhenti sampai di situ saja. Muncul pertanyaan apakah pembubuhan cap jempol itu dilakukan saat almarhum masih sehat, sedang sakit, atau bahkan telah wafat. Selain itu, saksi matanya hanya putra-putri almarhum yang berasal dari satu ibu, yakni Pradapaningrum.

Di tengah-tengah ketidak-pastian masalah suksesi ini, tampil KGPH Tedjowulan, putra lain almarhum Pakubuwono XII dengan istrinya bernama KRAy Retnodiningrum. Beliau merupakan satu-satunya putra Pakubuwono XII yang berdinas aktif di militer dengan pangkat saat itu kolonel (inf). Para *pengageng* keraton secara resmi menolak pencalonan KGPH Hangabehi pada 3 Agustus 2004 serta menentang *jumenengan*nya yang akan dilangsungkan pada bulan September tahun itu. KGPH Tedjowulan dikukuhkan oleh para *pengageng* keraton Surakarta sebagai pengganti Pakubuwono XII. Menurut sebagian kalangan, pengangkatan KGPH Tedjowulan ini dianggap sebagai pemecahan terbaik atas kemelut yang melanda istana Surakarta.

Sedianya, *jumenengan* KGPH Tedjowulan akan dilangsungkan di Sasana Sewaka sebagaimana halnya raja-raja Surakarta sebelumnya. Tetapi rencana ini tak mungkin dilaksanakan karena pada lokasi penobatan tersebut sedang dilakukan kerja bakti mempersiapkan prosesi penobatan KGPH Hangabehi. Penobatan KGPH Tedjowulan akhirnya diselenggarakan pada 31 Agustus 2004 bertempat di Dalem Purnama,

Badran, Laweyan, Solo. Pada kesempatan tersebut, KGPH Tedjowulan menerima pengalungan daun kelapa (*janur*) oleh rakyat, yang melambangkan konsep bersatunya raja dengan rakyat (*manunggaling kawula gusti*). Karena akses menuju keraton telah ditutup, acara penobatan berlangsung sangat sederhana.

Penobatan KGPH Tedjowulan sebagai Pakubuwono XIII di luar tembok keraton Surakarta tidak menyurutkan langkah KGPH Hangabehi. Namun sehari sebelum acara *jumenengan* yang direncanakan, dunia dikejutkan oleh meletusnya bom bunuh diri di Kuningan, Jakarta, pada 9 September 2004. Acara penobatan KGPH Hangabehi juga diteror isu bom oleh orang-orang tak dikenal. Kendati demikian, acara tetap dilangsungkan juga keesokan harinya dengan pengamanan sangat ketat. *Jumenengan* KGPH Hangabehi diselenggarakan penuh kemegahan, lengkap dengan pementasan tarian sakral Bedaya Ketawang. Prof. KGPH Haryomataram, paman KGPH Hangabehi, menyematkan bintang kebesaran *suryawisesa* pada kemenakannya. Dengan usainya rangkaian upacara penobatan KGPH Hangabehi bertakhtalah dua orang raja di Surakarta.

Era raja kembar di keraton Surakarta ini berakhir pada 16 Mei 2012. Proses rekonsiliasi dilangsungkan di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, KGPH Hangabehi tetap meneruskan gelarnya sebagai Pakubuwono XIII, sedangkan KGPH Tedjowulan diangkat sebagai mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan. Upaya pendamaian antara kedua belah pihak ini tidak luput dari peranan walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), yang telah berupaya merukunkan mereka selama delapan bulan. Beliau turut menjadi saksi dalam acara penanda-tanganan maklumat rekonsiliasi di Hotel Grand Mahakam tersebut.[86]

d. Sistem pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahannya, sunan dibantu oleh seorang *patih* yang diangkat dengan persetujuan Belanda. Sebenarnya patih inilah yang mengurusi seluk beluk pemerintahan di Surakarta dan disebut *Kanjeng Parentah Ageng*[87]. Semenjak raja-raja Surakarta mengakui kedaulatan Belanda yang dituangkan dalam berbagai perjanjian maupun kontrak politik, kekuasaan politis raja boleh dikatakan terbatas

86. Lihat *Jawa Pos*, tanggal 21 Mei 2012, Berita Utama, halaman 3.
87. Lihat *Raja Priyayi dan Kawula*, halaman 3.

dan hanya berdaulat penuh di lingkungan istananya saja. Hubungan keluar harus melalui residen Belanda terlebih dahulu.

e. Kesusastraan dan kebudayaan

Hampir seluruh raja Surakarta merupakan sastrawan dan budayawan handal. Sunan Pakubuwono III menulis *Serat Wiwaha Jarwa* dan menyempurnakan *Serat Iskandar*. Sunan Pakubuwono IV menulis karya berjudul *Wulangreh*, yang berisikan nasihat mengenai bagaimana berperilaku benar dalam kehidupan. Ia juga menciptakan berbagai tarian seperti, tari Kusuma Asmara, yang dipentaskan saat resepsi pernikahan. Dalam tarian tersebut dikisahkan mengenai Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih yang diutus memberikan restunya pada mempelai berdua. Pasangan dewa dewi di atas kemudian menghancurkan musuh jahat bernama Prabu Dirgarencana yang melambangkan pelbagai halangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Sesudah musuh dikalahkan, kedua dewa menyerahkan pusaka berupa "sekar merah dan putih," yang melambangkan pria dan wanita. Setelah menyerahkan pusaka yang juga dinamai Kusuma Asmara tersebut, kedua dewa mohon diri dan kembali ke kahyangan. Secara umum tarian Kusuma Asmara mencerminkan pula berbagai ajaran bagi orang yang telah menikah.

Tari lain yang diciptakan oleh Sunan Pakubuwono IV adalah tari Tunggul Sakti yang mengajarkan kesetiaan pada negara bagi segenap prajurit dan abdi negara. Tarian ini mengisahkan mengenai Prabu Kelana yang berjuang mencari sarana demi memuliakan dan memajukan negaranya. Saat memohon petunjuk dewata, Prabu Kelana diperintahkan mencari pusaka berupa keris Tunggul Sakti yang berada di keraton Jenggala. Kebetulan saat itu pusaka tersebut sedang raib dari Jenggala, sehingga Raden Panji dari Jenggala turut mencarinya. Dengan demikian, Prabu Kelana dan Raden Panji sama-sama berusaha menemukan keris itu. Ternyata Prabu Kelana yang terlebih dahulu mendapatkannya. Namun karena keris Tunggul Sakti benar-benar sangat bertuah, Prabu Kelana kalah wibawanya, sehingga tidak sanggup memboyong pusaka itu ke negerinya. Ketika Raden Panji yang tiba belakangan hendak mengambil keris Tunggul Sakti, Prabu Kelana mencegahnya, karena merasa bahwa ia yang pertama kali menemukannya; walau tidak sanggup mengambilnya. Akhirnya pecah perang tanding antara kedua bangsawan tersebut. Prabu Kelana berhasil dikalahkan dan ia tunduk pada Raden Panji. Setelah Raden Panji mengambil pusaka yang sebelumnya memang milik negerinya, kedua orang tokoh itu berjalan pulang. Dalam tarian ini,

keris Tunggul Sakti sebenarnya melambangkan tugas-tugas dan kewajiban kawula kerajaan yang harus dipikul bersama-sama, sehingga negara menjadi maju.

Sunan Pakubuwono IX aktif pula menulis karya sastra. Buah karya beliau adalah *Wulang Putri, Serat Jayeng Sastra, Serat Menak Cina,* dan *Serat Wirayatna*[88]. Selain raja-rajanya yang merupakan sastrawan atau pemerhati kesusastraan, keraton Surakarta menjadi saksi lahirnya buah karya para pujangga terkemuka, seperti Yasadipura I, Yasadipura II, Ranggawarsita, dan lain sebagainya. Yasadipura I (1729–1801) dilahirkan di Pengging pada tahun 1729. Beliau juga dikenal sebagai Bagus Banjar, Jaka Subuh, dan Jenal Ngalim. Ayahnya adalah bupati Pengging bernama Raden Tumenggung Paduranegara. Karier Yasadipura I diawali pada usia 14 tahun saat magang di keraton Kartasura. Sebagai seorang sastrawan beliau menggubah karya-karya klasik Jawa kuno ke dalam bahasa Jawa baru. Dengan adanya gubahan tersebut, generasi yang berasal dari masa lebih kemudian sanggup dengan mudah memahami serta mengapreasi naskah-naskah klasik itu. Buah-buah karyanya antara lain adalah *Serat Arjunawiwaha, Serat Rama Jarwa, Serat Bratayuda Jarwa, Serat Panitisastra, Serat Dewaruci Jarwa, Serat Menak, Serat Ambiya, Serat Tajussalatin, Serat Cebolek, Serat Bima Suci* dan *Serat Babad Giyanti*. Sebagai catatan, *Serat Tajussalatin* ini merupakan terjemahan naskah berbahasa Melayu. Dengan demikian, ini menandakan adanya persinggungan antara budaya Melayu dan Jawa sebagai bagian Kebudayaan Nusantara.

Yasadipura II merupakan putra Yasadipura I. Hasil karya beliau antara lain *Serat Wicara Keras, Serat Sasana Sunu*, *Serat Dewaruci*, dan lain sebagainya. Pujangga Surakarta ini merupakan sahabat karib Pakubuwono V, bahkan semasa yang bersangkutan masih menjadi putra mahkota. Bersama dengan Pangeran Adipati Anom dan Kyai Rangga Sutresna, Yasadipura II menggubah *Serat Centhini*.

Karya sastra berjudul *Serat Centhini* ini merupakan salah satu mahakarya dalam kesusastraan Jawa. Isinya merupakan rangkuman tradisi-tradisi Jawa, termasuk yang berkembang di daerah pinggirannya. Dengan kata lain, *Serat Centhini* boleh dianggap sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa. Centhini sendiri mengacu pada nama seorang tokoh wanita dalam karya sastra tersebut yang kurang penting dan hanya muncul sekali-sekali saja[89].Oleh karena itu, pemilihan namanya sebagai judul kisah ini sulit dicari alasannya. Salah satu versi *Serat Centhini* yang masih ada terdiri dari 722 pupuh

---

88. Lihat *Di Balik Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta*, halaman 89.
89. Lihat *Nusa Jawa Silang Budaya* (jilid 3): *Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, halaman 149.

dan terbagi atas dua bagian besar. Masing-masing pupuh terbagi lagi menjadi bait-bait yang tak tentu jumlahnya (berkisar antara 20 hingga 70 buah). Setiap bait terdiri dari 4 hingga 9 larik tergantung jenis *tembang*nya. Apabila dihitung secara keseluruhan, *Serat Centhini* memiliki 200.000 larik lebih. Sebagai perbandingan, wiracarita tersohor Yunani, Illiad dan Odyssey hanya terdiri dari masing-masing 15.537 serta 12.263 larik[90].

Kisah Centhini diawali dengan riwayat penyerangan Giri oleh pasukan Sultan Agung. Meskipun Sunan Prapen mendapatkan bantuan dari Endrasena, pedagang keturunan China yang telah menganut agama Islam, ia tertawan dan dibawa ke Mataram. Tiga orang anaknya yang masing-masing bernama Jayengresmi, Jayengsari, dan Rancangkapti (seorang wanita) berhasil melarikan diri. Mereka kemudian mengembara dan menimba pengetahuan pada berbagai tokoh dan makhluk halus setempat. Sebagai contoh Jayengresmi yang ditemani oleh abdinya, Gatak dan Gatuk, menjumpai antara lain:

- Kanjeng Ratu Trenggono Wulan, pemimpin makhluk halus di hutan Bagor, yang mengajarkannya mengenai isyarat burung prenjak dan manfaat hewan-hewan buruan.[91]
- Ki Kaplang, seorang pandai besi, yang mengajarkan mengenai perihal perkerisan.[92]
- Ki Pariwara, seorang juru kunci desa Sela, yang mengajarkan mengenai kehidupan.[93]
- Wasi Narawita, seorang pertapa, yang mengajarkan mengenai perhitungan penanggalan Jawa beserta baik dan buruknya hari.[94]
- Syekh Sekardelima, yang mengajarkan ilmu-ilmu tentang makrifat.[95]

Jayengsari dan Rancangkapti melarikan diri ke arah timur dengan disertai abdinya bernama Buras. Mereka mengunjungi candi-candi peninggalan kerajaan di zaman dahulu. Di daerah Tengger mereka berjumpa dengan Resi Satmaka yang mengajarkan mereka mengenai ajaran Hindu dan Buddha. Demikianlah, setiap berjumpa dengan

90. Lihat *Nusa Jawa Silang Budaya* (jilid 3): *Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, halaman 150.
91. Lihat *Ensiklopedi Serat Centhini*, halaman 49–55.
92. Lihat *Ensiklopedi Serat Centhini*, halaman 59.
93. Lihat *Ensiklopedi Serat Centhini*, halaman 73.
94. Lihat *Ensiklopedi Serat Centhini*, halaman 133–154.
95. Lihat *Nusa Jawa Silang Budaya* (jilid 3): *Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris,* halaman 151.

seorang tokoh pengetahuan mereka mengenai aspek-aspek kebudayaan Tanah Jawa akan bertambah.

Ranggawarsita atau Raden Ngabehi Ranggawarsita dilahirkan pada 15 Maret 1802. Beliau adalah putra sulung Mas Pajangswara, carik di Kadipaten Anom. Semasa muda, Ranggawarsita yang dikenal dengan nama Bagus Burham, gemar mengembara guna memperdalam berbagai jenis ilmu. Karya-karya beliau antara lain *Serat Wirid, Hidayat Jati, Suluk Saloka Jiwa, Suluk Supanalaya, Serat Pamoring Kawula Gusti, Suluk Suksma Lelana, Serat Paramayoga, Serat Jayengbaya, Serat Jayengtilam, Pustaka Raja Purwa, Kalatidha, Sabdatama, Sabdajati, Cemporet, Joko Lodhang, Wedharaga, Wedhapurwaka, Sabdapranawa, Sadu Budi, Jitapsara, Candrarini,* dan *Witaradya*.

Lambang Kasunanan Surakarta pada surat kabar
Sumber: dokumen koleksi pribadi

Pangeran Arya Kusumadilaga merupakan sastrawan Surakarta yang mendalami kisah-kisah pewayangan. Buah karya beliau antara lain: *Jagal Bilawa, Lingga Pura, Semar Njantur, Kartawiyoga Maling,* dan *Serat Sastramiruda*. Kyai Sindusastra adalah pujangga yang memiliki kedekatan dengan Sunan Pakubuwono VII. Hasil karya beliau adalah *Serat Arjuna Sasrabahu, Lakon Sugriwa Subali, Serat Partayadnya, Srikandi Maguru Manah, Sembadra Larung, Cekel Waneng Pati,* dan *Parta Krama*.

R.M.A Jayadiningrat I menulis *Serat Mas Jenthu Inggih Mas Nganten* yang diterbitkan oleh cucunya bernama R.T. Jayadiningrat pada tahun 1907[96]. Isinya menekankan pentingnya hirarki sosial yang dituangkan dalam bentuk cerita. Dalam karya tersebut pengarang berpendapat bahwa tak mungkin rakyat jelata (*wong cilik*) mengenakan simbol-simbol *priyayi* (kaum terkemuka). Konsepsi semacam ini dipertegas lagi pada bagian penutup dengan ungkapan "*desa cara desa, priyayi cara priyayi*." Artinya, seorang rakyat jelata hendaknya berlaku sebagai rakyat jelata dan sebaliknya, *priyayi* bertindak tanduk sebagai *priyayi*. Tokoh sastrawan lainnya bernama Padmasusastra banyak menulis mengenai kebudayaan Jawa, seperti *Serat Pathibasa* (membahas mengenai upacara-upacara), *Serat Tatakrama* (mengenai etiket), dan *Serat Subasita* (membahas mengenai perilaku-perilaku santun yang pantas dilakukan oleh seorang *priyayi* Jawa). *Serat Wedhamadya* yang tidak diketahui pengarangnya karena menggunakan nama samaran berisikan pujian bagi raja Surakarta. Menurut dugaan, penulisnya adalah salah seorang pangeran dari Pakualaman, yang dekat hubungannya secara budaya dengan Surakarta.

96. Lihat *Raja Priyayi dan Kawula*, halaman 56.

Keraton Kasunanan Surakarta (I)

Keraton Kasunanan Surakarta (II)

VI. YOGYAKARTA

a. Masa awal Kesultanan Yogyakarta

Kesultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 dan Pangeran Mangkubumi menjadi rajanya yang pertama dengan gelar Hamengkubuwono I (1755–1792). Karena Kerajaan Yogyakarta didirikannya melalui peperangan, ia sedikit banyak tetap mempertahankan ciri-ciri pemerintahan militeristik yang giat dan gesit. Inilah pembeda dengan Surakarta yang kehidupan istananya jauh lebih halus dan lemah[97]. Mangkubumi sanggup mengenali berbagai kelemahan VOC yang saat itu bercokol di Pulau Jawa, tetapi ketimbang melakukan perlawananan frontal, ia lebih memilih menunggu saja hingga kekuasaan maskapai dagang Belanda itu runtuh dengan sendirinya akibat kesulitan keuangan yang mendera mereka. Apabila VOC sudah tamat riwayatnya, Mangkubumi berencana menyatukan kembali wilayah-wilayah di yang pernah berada di bawah kekuasaan Mataram. Saat Hamengkubuwono I mangkat pada tahun 1792, Yogyakarta telah menjadi negeri yang mapan, makmur, dan kuat secara militer; sehingga memudarkan pengaruh saingannya di Surakarta.

Semenjak tahun 1757 di Yogyakarta telah berdiri institusi pendidikan tradisional yang disebut Sekolah Tamanan[98]. Adapun mata pelajarannya meliputi:

1. Bahasa dan kesusastraan Jawa baru serta Kawi.
2. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa.
3. Tembang Jawa
4. Tata negara
5. Angger Pradata (hukum perdata) dan Angger Pidana (hukum pidana)
6. Undang-undang Sepuluh
7. Keagamaan
8. Ketentaraan, pertanian, dan kebudayaan.

Pelajaran ke-1 dan 2 khusus diajarkan oleh para abdi dalem Reh Kawedanan Kapunjaggaan yang diketuai oleh Tumenggung Tambakbojo. Pelajaran mengenai tembang atau lagu Jawa diberikan oleh *abdidalem* Kawedanan Reh Karawitan. Sementara itu pelajaran mengenai hukum diberikan oleh *abdidalem* Kawedanan Reh Pancaniti yang diketuai oleh Tumenggung Sudjanapura. Masalah-masalah keagamaan diajarkan oleh *abdidalem* Reh Kawedanan Rapangulon dengan Kanjeng Kyai Pengulu

---

97. Lihat *Asal Usul Perang Jawa*, halaman 3.
98. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, halaman 20.

Diponingrat selaku ketuanya. Meskipun demikian, sekolah jenis ini lama-kelamaan mengalami kemunduran karena pelajaran yang diberikan semakin sedikit. Bahkan sewaktu Ngabei Djajengwisraba menjadi kepala sekolahnya tinggal dua pelajaran saja yang diberikan; yakni membaca huruf Jawa dan mengaji. Sekolah Tamanan baru berakhir riwayatnya semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VIII.

Meskipun demikian, penggantinya yang bergelar Hamengkubuwono II (1792–1812) tidak meneruskan kebijaksanaan pendahulunya, sehingga Kesultanan Yogyakarta mengalami kemunduran. Memang benar, bahwa salah satu faktor penentu maju dan tidaknya kesultanan bergantung pada faktor kepribadian penguasanya sendiri. Raja ini merupakan pribadi yang cerdik, hanya saja sombong dan menggemari wanita (permaisurinya ada 2 orang dan selirnya 31 orang). Sultan Hamengkubuwono II menerapkan berbagai kebijaksanaan yang berlawanan dengan penguasa sebelumnya. Selama masa pemerintahannya, para penasihat senior telah diganti dengan orang yang lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi sanggup mengambil hati sultan. Berbagai intrik istana yang berakar di masa pemerintahan Hamengkubuwono I menjadi matang pada era sultan kedua ini; terutama yang berkaitan dengan masalah pemilihan putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono II sendiri kurang memerhatikan masalah pemerintahan dan lebih sering mengundurkan diri di pondok-pondok perburuannya. Ia juga bertindak sewenang-wenang dengan menaikkan pajak, yang hasilnya banyak dipergunakan untuk membiayai pembangunan pesanggrahan-pesanggrahan tempat peristirahatan sultan. Selain dibebani pajak, kewajiban rakyat bekerja paksa (*rodi*) demi kepentingan sultan semakin bertambah berat. Terhadap para pejabat VOC, sultan juga menunjukkan sikap angkuh; kemungkinan karena Hamengkubuwono II menyadari kesulitan keuangan yang sedang menimpa mereka.

VOC benar-benar runtuh pada 31 Desember 1799 dan penguasaan atas Kepulauan Nusantara diambil alih secara langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja dengan bergantinya penguasa, berubah pula kebijaksanaan yang diambil. Ketika pada tahun 1808, Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal, ia melakukan perombakan radikal yang menimbulkan keberatan bagi kalangan istana. Daendels menuntut agar wakil-wakil pemerintah kolonial Belanda yang ada di istana kerajaan diperlakukan setara dengan para raja. Para residen Belanda ini akan disebut menteri dan kedudukannya harus dianggap sederajat dengan raja-raja Jawa. Raja Surakarta tidak keberatan dengan hal ini, tetapi tidak demikian halnya dengan

Sultan Hamengkubuwono II. Ia mengatakan bahwa Daendels telah bertindak terlalu jauh dengan mencampuri pranata pemerintahan kerajaannya. Akibatnya, Hamengkubuwono II kurang disukai oleh Belanda. Hubungan antara kedua belah pihak menjadi makin tegang, apalagi Daendels memaksakan pemberian hak monopoli atas penebangan kayu jati di kawasan Mancanegara Timur; di mana hal ini sangat membebani penduduk kawasan itu.

Akibat penderitaan rakyat tersebut, timbul pemberontakan di bulan November 1810 yang dipimpin oleh Raden Rangga Prawirodirjo, pejabat daerah Mancanegara timur dan salah seorang ipar sultan. Pemberontakan ini memperoleh banyak dukungan berbagai kalangan di Yogyakarta, termasuk sultan sendiri. Mereka menaruh harapan pada pemberontakan itu, karena Raden Rangga mengaitkan gerakannya dengan kedatangan Ratu Adil, yang akan membebaskan Jawa dari kekuasaan bangsa asing dan selanjutnya memerintah dengan bijaksana; sehingga negaranya menjadi makmur (*gemah ripah loh jinawi*). Apalagi ia bertekad menjadi pelindung baik bagi orang-orang Jawa maupun China serta memulai peperangannya dari Sungai Katangga, yang diyakini masyarakat berkaitan dengan Ratu Adil. Meskipun demikian, pergolakan ini dapat ditindas dengan mudah oleh Daendels dan Raden Rangga sendiri gugur. Menurut sumber *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman*, halaman 16, disebutkan bahwa Raden Rangga Prawirodirjo ini melindungi perampok yang melancarkan aksinya di daerah Panaraga; padahal wilayah tersebut masuk dalam Kasunanan Surakarta. Karenanya, sunan mendesak sultan agar menindak Raden Rangga, menantunya itu. Namun Hamengkubuwono II malah melindunginya. Itulah sebabnya, sunan lantas beralih meminta bantuan Daendels menangkap Raden Rangga. Menyadari sulitnya kedudukan sultan, Raden Rangga dengan sukarela keluar dari tempat persembunyiannya dan melakukan perlawanan hingga tewas dalam pertempuran tersebut. Insiden ini merupakan salah satu pemicu permusuhan sultan dengan Daendels.

Pada tahun 1810, Daendels memimpin sendiri pasukannya dan memaksa sultan meletakkan jabatannya (30 Desember 1810). Untuk selanjutnya pemerintahan dipegang oleh putra mahkotanya[99] yang naik takhta dengan gelar Hamengkubuwono III (pemerintahan pertama: 1810–1811; pemerintahan kedua 1812–1814). Penguasa

99. Sebelumnya, atas desakan salah seorang permaisurinya, Hamengkubuwono II berniat mengganti putra mahkotanya itu dengan orang lain. Namun dengan campur tangan Daendels ini, niat tersebut tidak tercapai.

baru ini dipaksa menyerahkan sebagian Kedu pada pemerintah kolonial. Selain itu, ia diwajibkan memenuhi tuntutan Daendels, yakni dalam hal memberikan penghormatan terhadap pejabat-pejabat yang mewakili pemerintah kolonial Belanda. Bahkan ongkos ekspedisi militer sebesar f. 196.320 dibebankan pada Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1811, pemerintah kolonial tidak lagi membayar uang sewa daerah pantai utara pada Kerajaan Yogyakarta. Dengan kata lain, kini kawasan tersebut menjadi sepenuhnya milik Belanda. Hal ini tentu saja menimbulkan kegetiran bagi rakyat, karena dengan lepasnya daerah pesisir itu, mereka kehilangan pula hak atas makam keramat para *wali* dan leluhur keluarga kerajaan yang berada di sana.

Meskipun kekuasaan kini dipegang atas nama putranya, Sultan Hamengkubuwono II (selanjutnya disebut sebagai Sultan Sepuh) masih tinggal dalam keraton. Intrik dalam keraton Yogyakarta masih ditambah lagi dengan peristiwa pengasingan saudara laki-laki sultan bernama Pangeran Natakusuma beserta putranya atas perintah Daendels. Peristiwa menggusarkan hati sultan. Akibatnya ia curiga pada patihnya bernama Danureja II (1799–1811), yang diduga telah menjelek-jelekkan saudaranya itu. Ketika kekuasaan beralih dari tangan Belanda ke Inggris pada tahun 1811, raja Yogyakarta dan Surakarta melihatnya sebagai kesempatan memulihkan kekuasaan mereka. Hamengkubuwono II mengangkat dirinya lagi sebagai penguasa dan menyingkirkan putranya. Pemerintahan Hamengkubuwono II yang kedua kalinya ini berlangsung hanya setahun, yakni dari 1811–1812. Sultan menggunakan kesempatan ini untuk melecehkan residen Belanda dan menghukum mati patih yang dianggapnya pro Belanda. Menanggapi sepak terjang sultan di atas, residen Inggris yang baru, John Crawford, dalam laporannya pada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyatakan bahwa ia lebih suka mendudukkan kembali putra mahkota yang sebelumnya memegang kekuasaan ke atas singgasana. Meskipun demikian, Raffles beranggapan bahwa kekuatan militer Inggris saat itu belum sanggup mendukung konsekuensi tindakan yang terlampau keras pada raja-raja Jawa.

Pada bulan Desember 1811, Raffles mengadakan perundingan dengan raja-raja Jawa dan sepakat mengembalikan seluruh daerah yang direbut oleh Daendels. Sikap Raffles yang lunak ini justru nampak sebagai kelemahan di mata raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Oleh karenanya, kedua raja itu saling berkirim surat secara rahasia dan menjalin kesepakatan untuk bersama-sama melawan Inggris guna mendapatkan kemerdekaan yang jauh lebih besar. Sultan segera melakukan persiapan-

persiapan militer di kerajaannya. Selain itu, sultan berniat pula menyingkirkan putra mahkotanya karena menganggapnya sebagai pengkhianat yang bersedia menerima kekuasaan pemerintahan atas perintah Daendels. Tetapi tanpa mereka sadari, Raffles telah menempatkan sekutunya sebagai mata-mata di dalam istana Yogyakarta, yakni Pangeran Natakusuma beserta putranya yang telah dikembalikan dari pengasingannya oleh pihak Inggris. Meskipun, Pangeran Natakusuma kurang menyukai putra mahkota, tetapi ia melaporkan segenap gerakan yang terjadi di keraton Yogyakarta pada pemerintah Inggris. Akhirnya, pada tahun 1812 pemerintah kolonial Inggris menyadari bahwa aksi militer terhadap Yogyakarta tidak dapat dihindari lagi, karena nyawa putra mahkota semakin terancam dan selain itu perserikataan rahasia antara Yogyakarta dan Surakarta telah bocor pula ke telinga Inggris. Sepasukan tentara Inggris di bawah pimpinan Raffles dikirim ke keraton Yogyakarta. Karena sultan menolak berunding dengan mereka, keraton diserbu pada 19-20 Juni 1812. Sultan beserta kerabatnya ditangkap oleh Inggris setelah gagal menuntut diadakannya perdamaian. Pasukan Inggris merampas harta kekayaan keraton, termasuk beberapa naskah penting beserta daftar daerah taklukan yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta dan menurunkan lagi Sultan Hamengkubuwono II dari singgasananya. Putra mahkota yang bergelar Hamengkubuwono III kemudian dinobatkan kembali sebagai sultan Yogyakarta. Sementara itu, pihak Surakarta tidak berbuat banyak, karena mereka hanya menempatkan pasukannya menyilang garis komunikasi pasukan Inggris, sambil menanti perkembangan lebih lanjut yang berlaku di Yogyakarta. Sebagai hukuman bagi pemberontakan tersebut, raja-raja Yogyakarta dan Surakarta dipaksa menyerahkan sebagian wilayah mereka.

Sultan Hamengkubuwono II ditawan dan dihadapkan pada Raffles tanggal 3 Juli 1812, yang ketika itu sedang berada di Semarang. Raffles menyampaikan bahwa akibat perlawanannya itu, Sultan Hamengkubuwono II seharusnya dijatuhi hukuman mati; namun karena usianya yang telah lanjut serta belas kasih pemerintah Inggris, ia hanya diasingkan saja dari Yogyakarta[100]. Mulanya Sultan Hamengkubuwono diasingkan ke Batavia dan ditempatkan di sebuah paviliun khusus dalam kompleks sekretariat negara. Karena dikhawatirkan masih dapat berhubungan dengan para pengikutnya di Yogyakarta, sultan kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang oleh Inggris.

100. Lihat *Sultan Hamengkubuwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*, halaman 163.

Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta diwajibkan membangun pos-pos polisi yang permanen serta menyelenggarakan peradilan yang benar terhadap para pelanggar hukum. Pihak Inggris menuntut pula penyerahan kayu jati, sarang burung, pasar, serta pengelolaan rumah cukai pada mereka. Sehubungan dengan rumah-rumah cukai itu, raja mendapatkan ganti rugi atas penyerahannya. Kerajaan diwajibkan pula menghapuskan hukuman penyiksaan dan memenuhi saran-saran yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dengan kata lain, para raja mengakui pertuanan Inggris atas negeri mereka. Seluruh kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertanggal 1 Agustus 1812. Guna mengawasi sultan, pada tahun 1813 Inggris mengangkat Pangeran Natakusuma, saudara Hamengkubuwono II, sebagai raja yang merdeka dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I. Ini merupakan awal berdirinya Kadipaten Paku Alaman. Dengan demikian, pada saat ini di daerah Jawa Tengah telah berdiri 4 kerajaan, yang dianggap sebagai pecahan Mataram. Penyerbuan terhadap keraton tersebut tentu saja dipandang sebagai penghinaan oleh kaum bangsawan keraton. Mereka memandang pamor kerajaan sudah tercemar. Kekecewaan ini mereka tuangkan dalam surat-surat pada Sultan Hamengkubuwono II, yakni saat ia dipulihkan kembali kedudukannya sebagai penguasa semasa berkecamuknya Perang Diponegoro. Hampir seluruh surat-surat itu mengungkapkan kegetiran mereka atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1812.

Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono III berupaya memperbaiki kondisi negerinya. Ia menerapkan berbagai upaya penghematan demi meringankan beban kaum petani. Sultan menetapkan pula bahwa pajak kini sedapat mungkin dibayar dalam bentuk kerja wajib dan bukannya uang. Proyek-proyek pembangunan istana semenjak masa Hamengkubuwono II yang menghamburkan banyak biaya dihentikannya. Dengan demikian, uang sewa tahunan pelabuhan dan pasar yang diterima dari pihak Inggris sebesar 100.000 Dollar Spanyol menjadi cukup untuk membayar gaji para pegawai keraton. Hubungan dengan pemerintah kolonial Inggris diperbaikinya. Meskipun demikian, reformasi yang dicanangkan Hamengkubuwono III ini masih belum berhasil membuahkan hasil nyata berjangka panjang, karena pemerintahannya yang terlalu singkat. Pada 3 November 1814, Hamengkubuwono III secara mendadak menemui ajalnya pada usia 43 tahun.

Sebagai penggantinya diangkat Raden Mas Sudama, putra sultan dengan istri resminya. Raja baru yang menyandang gelar Hamengkubuwono IV (1814–1822,

juga dikenal sebagia Sultan Jarot) ini masih berusia 10 tahun ketika naik takhta. Oleh karena itu, diangkatlah suatu dewan perwalian yang juga bertanggung jawab terhadap terhadap uang sejumlah 1.000.000 Dollar Spanyol yang diterima setiap tahunnya dari pemerintah kolonial sebagai ganti penyewaan wilayah kerajaan. Sedangkan cap kerajaan untuk sementara waktu dipegang oleh residen. Mula-mula jabatan sebagai wali ini dipegang oleh Adipati Paku Alam I; dengan kuasa penuh atas perbendaharaan kerajaan. Tetapi karena menyalah gunakan kekuasaannya demi memperkaya diri sendiri, ia digantikan oleh ibu sultan dan Patih Danureja IV (1813–1847). Patih ini sebenarnya berdarah Bali dan masih keturunan Untung Surapati. Ia berhasil mendapatkan kedudukan berkat Hamengkubuwono III dan masih dianggap sebagai pendatang baru di lingkungan keraton. Itulah sebabnya untuk mengokohkan posisinya, ia perlu menjalin hubungan baik dengan Belanda. Dengan demikian, kaum bangsawan dan pemuka keraton terpecah menjadi dua faksi; yakni yang pro dan anti-Belanda. Salah satu tokoh penentang Belanda adalah Pangeran Diponegoro, yang kelak meletuskan pemberontakan besar di tanah Jawa.

b. Perkembangan hingga pecahnya Perang Diponegoro

Setelah mencapai usia 16 tahun, Sultan Hamengkubuwono IV dianggap sanggup memerintah sendiri dan dibebaskan dari perwaliannya sesuai dengan surat keputusan no.11 tanggal 30 Desember 1819. Saat dinobatkan sebagai raja, Hamengkubuwono IV menandatangani kontrak politik yang menjanjikan bahwa ia akan menjalankan segenap perjanjian sebelumnya yang pernah dibuat oleh para pendahulunya dengan pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamengkubuwono IV kemudian menikah dengan Raden Ajeng Suradinah, putri Tumenggung Purwokusumo dan Ratu Anom, putri Sultan Sepuh. Pada masanya, penyewaan tanah oleh bangsa Eropa semakin meluas, sebagai akibat kebijaksanaan liberal Gubernur Jenderal van der Capellen (1816–1826). Pada satu sisi, uang sewa ini merupakan pemasukan bagi kaum bangsawan. Sayangnya, pada sisi lain mereka tidak menggunakannya dengan bijaksana guna perbaikan dan penyehatan modal mereka. Pendapatan itu malah dihamburkan untuk membeli berbagai perabotan mewah atau kendaraan dari Eropa beserta keborosan lainnya, seperti minuman keras dan lain sebagainya. Dengan demikian, masuklah gaya hidup Belanda di kalangan bangsawan. Sebagai contoh, di Surakarta, Pangeran Ngabehi, salah seorang putra Pakubuwono IV, melengkapi tempat tinggalnya dengan berbagai perabotan khas Belanda dan pada suatu jamuan makan ia menenggak

berliter-liter minuman keras. Perubahan gaya hidup di Yogyakarta mungkin tidak seekstrim di Surakarta, kendati demikian pengaruh ini tetap tampak nyata. Sultan Hamengkubuwono IV memerintahkan para pengawal-pengawalnya mengenakan seragam bergaya Eropa dan ia sendiri kerap tampil dengan busana mayor jenderal tentara Belanda. Gaya hidup seperti inilah yang dibenci oleh Pangeran Diponegoro.

Sementara itu, di kalangan rakyat penyewaan tanah menimbulkan berbagai permasalahan. Penduduk suatu desa ada yang dipindahkan secara paksa karena tempat kediaman mereka hendak dijadikan perkebunan atau dipaksa bekerja sebagai buruh upahan. Memang benar, bahwa ada juga yang merasa senang diperkerjakan sebagai buruh dengan menerima gaji tetap, tetapi banyak pula yang merasa kesal terhadap kebijakan baru tersebut. Mereka juga tidak dapat mengajukan protes terhadap sultan atas penggusuran paksa itu, karena sultan sendiri telah setuju sebelumnya. Selain itu, pemilik perkebunan bangsa Eropa tidak memahami bahasa dan adat istiadat yang dianut rakyat setempat, sehingga sedikit banyak menimbulkan ketetangan. Sistem pajak tanah yang berat memicu pula kemerosotan sosial dan ekonomi di kalangan rakyat. Sebagai contoh, para petani tembakau harus menjual seluruh hasil mereka agar dapat melunasi pajaknya. Kehidupan rakyat menjadi berat dan bahkan menjadikan mereka sulit memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini masih diperparah dengan korupsi yang dilakukan oleh para pengumpul pajak yang direkrut dari kalangan bumi putra. Keborosan kaum bangsawan yang berupaya mengikuti gaya hidup Barat, memaksa mereka memeras rakyat demi memperbesar pemasukannya sendiri.

Pada tahun 1821, terjadi kegagalan panen padi di daerah Kedu. Bencana ini disertai pula dengan berjangkitnya wabah kolera. Akibatnya, harga beras naik secara drastis menjadi f. 5,50 per pikulnya (61, 761 kg). Kenyataan ini memicu pergolakan di bawah pimpinan kakek paman Pangeran Diponegoro, yang bernama Pangeran Dipasana. Pemberontakan ini dapat dianggap sebagai pendahulu bagi pergolakan lain yang lebih besar, yakni Perang Diponegoro.

c. Perang Diponegoro

Pangeran Diponegoro yang lahir pada tahun 1785 merupakan putra tertua Hamengkubuwono III dengan salah seorang selirnya. Ia menghabiskan hampir sebagian besar masa kecilnya di Tegalrejo, sebuah kawasan milik neneknya yang terletak beberapa mil dari ibukota. Diponegoro muda banyak menimba pengetahuan keagamaan dan bergaul akrab dengan guru-guru agama serta ulama

terkemuka. Waktunya kerap dihabiskan untuk melaksanakan kegiatan spiritual dan merenungkan masalah keagamaan. Berbeda dengan kaum bangsawan lainnya, ia jarang berkunjung ke ibukota, dan biasanya hanya hadir saat berlangsungnya hari–hari besar Islam, seperti perayaan *garebeg*. Diponegoro kemudian mewarisi Tegalrejo pada tahun 1803 dan tetap berdiam di sana hingga meletusnya pemberontakan yang dikobarkannya.

Diponegoro sendiri kerap memberikan saran dan nasihat pada ayahnya, terutama seputar pemecahan terhadap intrik-intrik yang terjadi di kalangan istana. Selain itu, ia juga kerap menyarankan pada ayahnya agar meringankan penderitaan rakyat dengan mengurangi beban pajak. Pada tahun 1814, Diponegoro menikah dengan putri Raden Rangga, yang pernah memberontak terhadap Daendels dan gugur dalam pergolakan tersebut. Diponegoro secara diam-diam amat mengagumi almarhum mertuanya itu. Saat ayahnya meninggal pada tahun 1814, Diponegoro sebenarnya telah mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan istana. Kendati menghabiskan sebagian besar waktunya di Tegalrejo, Diponegoro tetap memerhatikan pengajaran bagi sultan yang baru; yakni dengan menganjurkannya membaca naskah-naskah mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pihak Inggris pernah berniat mengangkat Diponegoro sebagai putra mahkota. Hal ini timbul karena ketidak-pahaman mereka terhadap adat Jawa, di mana terdapat perbedaan antara anak dari permaisuri (istri resmi atau *garwa padmi*) dan selir. Inggris hanya berpedoman bahwa sebagai anak tertua, Diponegoro layak menjadi putra mahkota. Meskipun demikian, Diponegoro yang paham dengan tradisi Jawa menolak penunjukkan ini, karena menyadari bahwa ada saudaranya yang lebih berhak. Selain itu, ia juga tidak begitu berminat terhadap kekuasaan yang bersifat duniawi di Yogyakarta. Tetapi berhembus desas-desus di kalangan keraton bahwa Diponegoro menginginkan mahkota kesultanan, yang terus-menerus disebarkan karena kritikannya terhadap kelompok yang pro Belanda.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, kebencian Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dipicu oleh gaya hidup kebarat-baratan yang berkembang di kalangan keraton. Selain penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penyewaan tanah dan pajak yang tinggi, pemberontakan ini ditimbulkan pula oleh apa yang dinamakan cukai gerbang tol. Untuk mengangkut dan menjual hasil buminya, para petani harus melewati berbagai pintu perlintasan dan harus membayar untuk melewatinya. Pemerintahan

kolonial menyewakan gerbang tol ini pada orang-orang Tionghua, yang tidak jarang menyewakannya lagi pada orang lain. Masing-masing penyewa itu menarik keuntungan dengan menaikkan ongkos lewat yang harus dibayarkan. Adanya gerbang-gerbang tol ini merupakan beban yang berat, karena tak jarang hanya untuk melewati suatu jarak yang pendek saja mereka harus melewati beberapa gerbang tol. Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada tahun 1823 yang menetapkan bahwa ongkos-ongkos lewat itu harus ditulis dengan jelas, sehingga terbaca dengan mudah oleh semua orang. Namun peraturan ini tidak berjalan efektif dan kerap penjaga gerbang itu mengharuskan para petani membayar lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, karena mereka menghendaki lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Lebih keterlaluan lagi, wanita yang sedang mengendong anaknya juga dikenai pajak, karena ia dianggap sedang membawa beban. Dengan demikian, tidak mengherankan sistem gerbang tol ini menimbulkan antipati yang besar di kalangan rakyat.

Para petani kerap diharuskan menunggu lama sebelum diperiksa barang-barang bawaannya dan diizinkan lewat. Apabila hewan bawaan mereka merumput di tanah milik bandar tol itu, maka pemiliknya harus membayar denda atau hewan milik mereka akan disita. Kerap kali pada saat panen mereka harus mengeluarkan sebagian terbesar keuntungan mereka untuk menebus kembali hewan-hewan milik mereka sendiri dari bandar setempat. Para bupati merasa kesal pula terhadap adanya gerbang tol ini, karena saat menyetorkan pajak ke ibukota kerajaan dua kali setahun (saat *mulud* dan *puasa*), mereka harus digeledah secara kasar guna menemukan apakah mereka menyembunyikan permata atau barang permata lainnya yang dikenai pajak. Dengan demikian, menjelang meletusnya Perang Diponegoro yang kerap disebut Perang Jawa, rakyat merasakan penderitaan sosial dan ekonomi yang mendalam; sehingga merupakan lahan persemaian yang subur bagi pergolakan.

Gubernur Jenderal van der Capellen mengadakan kunjungan ke kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Ia menyaksikan kondisi kehidupan rakyat yang tidak layak itu dan melakukan perubahan radikal. Ia mulai melarang sistem penyewaan tanah dan memerintahkan mereka mengembalikan tanah tersebut pada raja dan kaum bangsawan. Sepintas hal ini memang bertujuan memperbaiki nasib rakyat, tetapi efek yang ditimbulkannya sungguh berlawanan. Para penyewa tanah baik Belanda maupun China meminta kembali uang muka yang telah mereka bayarkan pada raja beserta kaum bangsawan dan selain itu, menuntut ganti rugi atas pembangunan

prasarana yang mereka upayakan sebelumnya. Kaum bangsawan yang hidup boros umumnya sudah menghabiskan uang muka yang mereka terima, sehingga tentu saja mengalami kesulitan saat diminta mengembalikannya. Bahkan kerajaan juga tidak luput dari keharusan mengembalikan uang sewa ini. Residen Smissaert dari Yogyakarta menuntut pengembalian 40.000 Dollar Spanyol. Namun karena kekosongan kas kesultanan, dilakukan tawar menawar; sehingga pihak kerajaan akhirnya hanya perlu membayar 26.000 Dollar Spanyol. Para bangsawan kini terjerumus dalam kesulitan karena tidak lagi menerima uang sewa tanah, yang sebelumnya mengalir masuk ke kas mereka. Rakyat sendiri tidak diuntungkan oleh perubahan ini, dan bahkan semakin sengsara karena mereka harus menghamba kembali pada para tuan tanah, yakni kaum bangsawan itu sendiri. Akibatnya, rakyat dan kaum bangsawan sama-sama memiliki alasan membenci Belanda.

Pada 9 Desember 1822, Sultan Hamengkubuwono IV meninggal secara mendadak akibat serangan penyakit sawan saat sedang berpesta pora dan berpesiar bersama sahabat-sahabatnya orang Belanda[101]. Peristiwa menyedihkan ini dianggap sebagai hukuman Tuhan oleh Pangeran Diponegoro. Putra mahkota dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono V (1822–1826 dan 1828–1855; juga dikenal sebagai Raden Mas Menol); tetapi saat itu ia masih berusia tiga tahun, sehingga dibentuklah suatu dewan perwalian, yang beranggotakan Ratu Kencana (ibu Hamengkubuwono V), Pangeran Mangkubumi (paman Pangeran Diponegoro), dan Pangeran Diponegoro. Kendati demikian, wewenang dewan ini hanya menyangkut masalah keuangan saja. Sementara itu, urusan pemerintahan kerajaan dipegang oleh Patih Danureja yang berada di bawah pengawasan residen Belanda. Berkat pengaruhnya yang besar, Danureja berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro beserta pamannya.

Sesudah tersingkir dari istana, Pangeran Diponegoro mengembara dan bertapa di gua-gua yang dianggap keramat guna mengumpulkan kekuatan batin sebagai bekal dalam menghadapi Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro merasa memperoleh wahyu yang mengangkatnya sebagai raja Jawa dengan amanat mengenyahkan Belanda dari tanah airnya. Sejak itu, ia memandang dirinya sebagai *amirul mukminin* atau *panatagama*, yakni pemimpin agama atau umat Islam di Jawa. Meskipun demikian, alasannya untuk mencetuskan pemberontakan timbul ketika Residen Smissaert

101. Oleh karenanya, ia juga diberi gelar anumerta Sultan Seda Ing Pesiyar (Raja yang Mangkat Saat Berpesiar).

memutuskan membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melintasi Tegalreja. Hal ini menggusarkan hati Diponegoro, karena residen Belanda itu tidak meminta izin terlebih dahulu padanya. Sebagai wujud kegusarannya ini, Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok yang dipergunakan menandai jalan. Tindakan yang terjadi pada 20 Juli 1825 ini mendorong residen mengirimkan pasukan berkuda guna menangkapnya, di mana peristiwa ini merupakan awal pemberontakan yang kelak tersohor sebagai Perang Diponegoro.

Begitu kabar mengenai perlawanan Diponegoro ini tersiar, rakyat berbondong-bondong menggabungkan diri dengannya. Ternyata, tidak hanya rakyat saja yang mendukungnya, banyak bangsawan yang meninggalkan keraton dan ikut serta dalam pemberontakan. Karena dukungan yang begitu luas, tidak berapa lama kemudian Pangeran Diponegoro sanggup menyusun pasukan berseragam dengan senjata sederhana. Guna memimpin pasukannya itu, diangkatlah beberapa orang perwira dan pemuka pasukan. Diponegoro kemudian berkelana ke segenap pelosok guna mengumpulkan pengikut dan menggelari dirinya Sultan Abdulhamid Erucakra Amirul Mukminin Sayidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawa. Bila dicermati, dalam gelarnya yang panjang itu tercantum kata *erucakra,* yang mengacu pada ratu adil. Dengan demikian, Diponegoro memandang dirinya sebagai ratu adil yang akan membebaskan negerinya dari penjajahan Belanda.

Laskar Pangeran Diponegoro menyerang dan membakar kota Yogyakarta, sehingga sultan yang masih kecil terpaksa melarikan diri ke benteng Vredenburg demi menyelamatkan jiwanya. Perlawanan rakyat meluas sampai ke Magelang, sehingga mengancam jiwa orang-orang Belanda dan Tionghua. Perusahaan-perusahaan perkebunan dan pintu-pintu atau gerbang tol dihancurkan oleh laskar rakyat. Orang Belanda yang dulunya berkuasa kini terpaksa mengungsi dan hidup berjejal-jejal dalam benteng guna mengamankan dirinya; sementara itu, bahan makanan boleh dikatakan sangat langka. Residen Smissaert saat itu juga melarikan diri. Di awal perlawanannya, gerakan Diponegoro ini nampak berada di atas angin. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan sumbangsih berharga, seperti Sentot Alibasyah Prawirodirjo, putra bupati Madiun bernama Raden Rangga Prawirodirjo yang dulu pernah melawan Daendels. Meskipun baru berusia 19 tahun, Sentot memiliki kecakapan dalam memimpin pasukannya. Selain itu, masih ada lagi Kyai Maja yang diangkat Diponegoro sebagai penasihatnya.

Diponegoro membagi tentaranya menjadi beberapa batalion, yang antara lain bernama Turkiyo, Bulkiyo, dan Arkijo. Pasukan-pasukan tersebut dilengkapi pula dengan senjata api, peluru, dan mesiu yang dibuat di dalam hutan rimba. Sementara itu, yang lainnya dipersenjatai dengan keris dan senjata seadanya. Demi meredakan amarah rakyat, pemerintah kolonial menghapuskan gerbang-gerbang tol dan melakukan perombakan lainnya; tetapi hal ini telah terlambat. Ketika perang berkobar, Belanda sebenarnya sedang menghadapi kesulitan lain, karena harus menerjunkan pasukannya di Sumatera Barat guna memadamkan pemberontakan kaum paderi. Oleh karenanya, sementara diadakan gencatan senjata terlebih dahulu dengan kaum paderi, sehingga pasukan Belanda dapat ditarik ke Jawa. Selain itu, Belanda masih mendapatkan pula bala bantuan dari Negeri Belanda dengan kekuatan 3.000 orang. Kekuatan militer Belanda masih ditambah dengan pasukan dari Indonesia Timur yang sengaja dilibatkan memadamkan perang ini.

Meskipun demikian, upaya menundukkan Pangeran Diponegoro yang menerapkan strategi perang gerilya tidaklah mudah. Hal ini sangat memusingkan Belanda, karena para pengikut Pangeran Diponegoro sekonyong-konyong melancarkan serangannya dan setelah itu tiba-tiba menghilang kembali. Sentot Alibasyah Prawirodirjo yang menjadi komandan pasukan Diponegoro benar-benar dipuji oleh para opsir Belanda. Pemerintah kolonial mencoba akal lain dengan mendudukkan kembali Hamengkubuwono II yang sebelumnya pernah diasingkan. Dengan demikian, ini merupakan pemerintahan kembalinya yang ketiga (1826–1828). Belanda berharap dengan dikembalikan Sultan Sepuh (Hamengkubuwono II) ke singgasana Kesultanan Yogyakarta, perlawanan akan mereda. Namun sejarah membuktikan bahwa harapan Belanda ini sia-sia belaka.

Belanda menerapkan strategi baru yang disebut benteng *stelsel* atau "siasat benteng." Caranya dengan mendirikan benteng-benteng di daerah yang telah dikuasai kembali oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda berupaya mengepung kedudukan Diponegoro sedikit demi sedikit. Tentu saja siasat ini memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi, pada akhirnya pasukan Diponegoro memang mulai terdesak akibat diberlakukannya siasat ini. Diponegoro terpaksa memindahkan markasnya ke suatu daerah di antara Sungai Progo dan Bogowonto. Kedudukan Pangeran Diponegoro semakin melemah, apalagi dengan menyerahnya Sentot Alibasyah Prawirodirjo pada tahun 1829. Meskipun keadaannya semakin terdesak

Diponegoro tetap tidak sudi menyerah pada Belanda. Sementara itu, Belanda sangat ingin menuntaskan peperangan yang banyak merugikan mereka tersebut selekas mungkin. Jenderal de Kock mengundang Diponegoro datang ke markasnya di Magelang untuk diajak berunding. Ia menjanjikan bila perundingan gagal, Pangeran Diponegoro boleh pergi lagi dengan bebas. Tetapi Diponegoro hanya mau berunding dengan Gubernur Jenderal van den Bosch dan tak bersedia melepaskan tuntutannya agar diakui sebagai sultan serta pemimpin umat Islam di Jawa. Perundingan menemui jalan buntu dan Jenderal de Kock ternyata ingkar janji. Ia menangkap Pangeran Diponegoro di tengah-tengah perundingan tersebut. Peristiwa yang terjadi pada 28 Maret 1830 ini mengakhiri secara total Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro lalu dibawa ke Ungaran dan setelah itu ke Batavia guna selanjutnya diasingkan ke Manado. Pada tahun 1834, ia dipindahkan lagi ke Makassar, hingga wafatnya pada tahun 1855 di usia 70 tahun. Selama masa penahanan dan pengasingannya tersebut, Pangeran Diponegoro menulis sebuah karya dalam tembang macapat yang diberi judul *Babad Diponegoro*. Karya ini merupakan sumber sejarah yang sangat berharga untuk memahami asal-muasal pecahnya Perang Diponegoro.

d. Perkembangan Kesultanan Yogyakarta selanjutnya

Hamengkubuwono V dianggap berjasa oleh Belanda, sehingga dianugerahi bintang penghargaan *Ridder in de Orde van den Nederlanschen Leeuw* (Ordo Panglima Singa Negeri Belanda). Pada bulan Februari 1840 meletus pemberontakan yang dipimpin oleh Sarip Prawirosentono atau Amad Sliman, seorang keturunan Arab yang lahir di Yogyakarta[102]. Ia mendapat bantuan dua orang keturunan China yang mengaku Arab. Sarip Prawirosentono mengaku mendapat mandat dari Mekkah menegakkan kerajaan baru. Tidak berapa lama ia berhasil mengumpulkan pengikut di kawasan Sungai Progo dan Bogowonto. Pemberontak mengambil kesempatan saat berlangsungnya pesta di ibukota, di mana para kepala daerah diundang menghadirinya. Pergolakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial dengan bantuan Paku Alam beserta adipati Nanggulan. Prawirosentono beserta dua orang China yang mengobarkan pemberontakan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Sultan mangkat pada tahun 1855 dan karena tidak meninggalkan seorang putra, yang dinobatkan sebagai pengganti adalah adiknya, Pangeran Adipati Mangkubumi.

102. Lihat *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, halaman 131.

Sultan baru ini bergelar Hamengkubuwono VI (1855–1877). Ia membuka lembaran baru dalam hubungan antara Yogyakarta dan Surakarta, karena menikahi seorang putri Surakarta, yakni kemenakan Pakubuwono V atau cucu Pakubuwono IV. Dengan demikian, kedua kerajaan yang semula memendam permusuhan kini menjalin hubungan kekeluargaan. Diharapkan melalui pernikahan tersebut, relasi antara dua kerajaan keturunan Mataram ini dapat menjadi lebih harmonis.

Pemerintahan Hamengkubuwono VI dapat dikatakan cukup aman, kendati kerajaan saat itu lebih merupakan kesatuan adat saja; karena kekuatan kemiliteran dipegang oleh Belanda. Meskipun demikian, terjadi intrik yang ditimbulkan oleh sekelompok bangsawan yang menghendaki agar Raden Mas Akhadiyat diangkat sebagai raja. Tokoh ini sebenarnya adalah putra Hamengkubuwono V dari permaisurinya. Sayangnya, saat ayahnya mangkat, ia masih dalam kandungan; sehingga pamannya yang diangkat sebagai raja. Belakangan timbul desakan-desakan agar ia diangkat sebagai sultan. Ketika Hamengkubuwono VI mangkat, Raden Mas Akhadiyat telah berusia 22 tahun dan banyak pihak yang kembali menginginkan agar ia diangkat sebagai penggantinya. Tetapi sultan telah menetapkan putranya, Kanjeng Gusti Hadipati Hanom (Adipati Anom) Hamengku Negoro, sebagai calon sultan berikutnya; di mana keputusan ini tak dapat dibatalkan lagi.

Setelah ayahnya mangkat, Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengku Negoro naik takhta dengan gelar Hamengkubuwono VII (1877–1921). Pada masanya, banyak didirikan berbagai pabrik gula, yang secara keseluruhan berjumlah 17 buah. Setiap pendirian pabrik memungkinkan sultan menerima pemasukan sebesar f. 200.000,- ; sehingga tidak heran apabila beliau menerima uang dengan jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya, ia juga disebut Sultan Sugih (kaya). Salah satu peristiwa menarik semasa pemerintahan Hamengkubuwono VII adalah terjadinya pemogokan buruh pabrik gula di Yogyakarta pada tahun 1882. Pemicunya adalah tekanan yang diberikan para majikan terhadap buruh-buruhnya. Tetapi pemogokan dapat diakhiri dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, walau sedikit. Bidang pendidikan juga ikut mengalami kemajuan semasa Hamengkubuwono VII. Berbagai sekolah didirikan di wilayah kesultanan. Sultan yang peduli dengan pendidikan ini, bahkan mengirim putra mahkota untuk menuntut ilmu ke Negeri Belanda.

Peristiwa menarik yang terjadi semasa pemerintahan Hamengkubuwono VII adalah munculnya gerakan di bawah pimpinan seorang tokoh bernama Dietz pada

sekitar tahun 1918[103]. Dietz mengaku bahwa dirinya adalah putra Ratu Kedaton, permaisuri almarhum Sultan Hamengkubuwono V. Bersama-sama dengan ibunya ia dibuang ke Menado dan diangkat anak oleh Mayor Dietz, pensiunan opsir kesehatan. Oleh karena itu, ia lantas diberi nama Dietz. Nama asli sesungguhnya adalah Gusti Muhammad, namun semenjak usia 15 ia menyandang gelar Pangeran Suryenggalogo. Dietz berniat menuntut takhta Yogyakarta dan dikenal pula sebagai Gusti Muhammad Herutjokro. Dari namanya itu dapat disimpulkan bahwa gerakannya tergolong gerakan ratu adil. Masyarakat mengenalnya sebagai dukun sakti, sehingga Dietz berhasil menghimpun ribuan pengikut (dua ribu orang menyambutnya di Surakarta). Para pengikutnya percaya bahwa ia akan menjadi ratu adil yang akan menyelamatkan umat manusia. Meski berhasil mengumpulkan banyak pengikut gerakan Dietz ini akhirnya berhasil dipadamkan juga.

Seiring dengan pergantian abad, bangkitlah kesadaran nasional bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan mulai didirikan, seperti Budi Utomo yang mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Muhammadiyah juga mendirikan pusatnya di Yogyakarta. Menginjak tahun 1920 sultan memasuki usia 80 tahun. Karena merasa telah lanjut usia, sultan mengajukan permohonan berhenti dan mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Oleh karena itu, putra mahkota yang sedang melanjutkan studinya di Negeri Belanda dipanggil pulang. Penobatannya sebagai Hamengkubuwono VIII (1921–1939) berlangsung pada tahun 1921. Sementara itu, mantan sultan sendiri mangkat pada akhir tahun yang sama. Sultan baru ini sangat memikirkan masalah pendidikan. Sejumlah besar dana dipergunakan beliau membiayai sekolah-sekolah kesultanan.. Hamengkubuwono VIII menyekolahkan putra-putrinya sampai ke perguruan tinggi, dan ada pula yang sampai ke Negeri Belanda. Putra mahkota yang bernama Raden Mas Dorojatun (kelak Sultan Hamengkubuwono IX) ternyata memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, karena beliau senantiasa memasang bendera merah putih pada mobilnya selama menuntut ilmu di Belanda. Sultan pernah menyerahkan mobil ambulans pada R.S. Panti Rapih, yang memperlihatkan perhatian beliau pada dunia medis.

Perang Dunia II pecah pada tahun 1939 dan pada saat bersamaan kesehatan Sultan Hamengkubuwono VIII semakin memburuk. Karenanya, Raden Mas Dorojatun selaku putra mahkota, yang masih melanjutkan studinya di Negeri Belanda

103. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,* halaman 59.

dipanggil pulang oleh sultan. Waktu itu, sultan menjemput sendiri putranya yang telah tiba kembali di Jakarta dari Negeri Belanda dan menyerahkan keris pusaka Kyai Jaka Piturun. Ini merupakan wujud pengukuhan putra mahkota sebagai penerus takhta Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta dengan kereta api, Hamengkubuwono VIII jatuh sakit. Uniknya, setibanya di stasiun Tugu terdengar gelegar halilintar, kendati saat itu merupakan siang hari yang cerah. Banyak orang takjub menyaksikan pertanda alam ini. Ternyata keesokan harinya, sultan wafat di RS. Panti Rapih, yakni tepatnya pada 22 Oktober 1939.

e. Kesultanan Yogyakarta memasuki zaman kemerdekaan

Sultan Hamengkubuwono IX (1940–1988), demikianlah gelar Raden Mas Dorojatun setelah resmi menduduki singgasana Kesultanan Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Beliau merupakan penguasa yang menunjukkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Dalam penutup pidato saat penobatannya, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan, "Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya."[104] Karena menyadari bahwa kedudukan *pepatih dalem* lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda, sultan melakukan perombakan. Kantor pepatih dipindahkannya ke dalam keraton dan kedudukannya digantikan oleh enam orang menteri yang langsung bertanggung jawab pada sultan; sehingga pemerintah kolonial Belanda tak mempunyai kesempatan lagi mengadu domba antara sultan dan *pepatih dalem*. Pembaharuan lain adalah diadakannya ujian saringan untuk menjadi pegawai kesultanan yang terbuka untuk umum. Sebagai seorang raja yang memerhatikan rakyatnya, sultan menolak ajakan Belanda untuk mengungsi ke Australia ketika Jepang hendak menduduki Indonesia. Sultan menyatakan bahwa apapun yang terjadi ia tak akan meninggalkan istananya demi keselamatan rakyat.

Ketika Jepang menduduki Yogyakarta, rakyat dipaksa melakukan kerja *romusha*. Perintah Jepang ini tidak dapat dihalangi oleh sultan. Biasanya para pekerja paksa *romusha* itu dipekerjakan di tempat-tempat yang jauh dari kampung halamannya demi kepentingan militer Jepang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, dengan cerdik sultan dapat mengalihkan pekerjaan itu untuk membangun sarana pengairan yang menyalurkan air dari Sungai Praga ke Opak. Dengan demikian, selain

104. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman*, halaman 53.

bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat sendiri, mereka tidak harus bekerja terlalu jauh dari kampung halamannya.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX bersama Adipati Paku Alam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat pada Bung Karno dan Bung Hatta. Dua hari kemudian mereka kembali mengirimkan ucapan selamat pada kedua proklamator tersebut karena masing-masing terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Semua ini menunjukkan dukungan sultan beserta Paku Alam VIII terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya, pada 5 September 1945 kembali Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Paku Alaman merupakan daerah istimewa dalam Republik Indonesia:[105]

105. *Ibid*. halaman 68–69.

Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876
atau 5–9- 1945

Hamengkubuwono IX

Telegram-telegram beserta maklumat di atas dikeluarkan sultan maupun Paku Alam VIII secara terpisah. Kendati demikian, semenjak tanggal 30 Oktober 1945 demi meningkatkan persatuan antara rakyat Yogyakarta dan Paku Alaman, mereka berdua sepakat mengeluarkan satu pernyataan saja yang ditanda-tangani bersama. Demikianlah pada tersebut dikeluarkan keputusan bersama, yang berisikan tekad

menyelanggarakan pemerintahan secara demokratis berdasarkan Undang-undang Dasar RI. Pemerintah RI menyambut hangat dukungan kedua penguasa tersebut dan mengeluarkan suatu piagam penetapan yang menerima maklumat mereka dengan baik.

Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX banyak memberikan sumbangsihnya. Ia mengizinkan istananya dijadikan tempat perlindungan bagi para pejuang. Sultan aktif pula membantu perjuangan dengan perbendaharaan kekayaannya. Berapa besarnya bantuan itu tidak dapat dihitung lagi, karena saat memberikannya sultan hanya meraup saja dari tempat penyimpanan uang emasnya[106]. Sultan mengizinkan rakyatnya berlindung di keraton saat berlangsungnya Agresi Militer Belanda ke II pada 19 Desember 1948 hingga keadaan aman. Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam bidang pendidikan cukup besar. Beliau mengizinkan kompleks istananya dipergunakan sebagai sarana perkuliahan Universitas Gajah Mada. Teladan yang diberikan sultan ini kemudian diikuti oleh kaum bangsawan Yogyakarta lainnya, yang memperbolehkan rumah mereka dijadikan tempat belajar mengajar.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki kedekatan dengan rakyat. Beliau kerap mengunjungi warung sate sederhana kegemarannya dan memperlihatkan sikap merakyat. Suatu kali seorang pedagang beras hendak membawa dagangannya dari desa ke kota. Tetapi transportasi pada zaman itu masih belum baik, sehingga para pedagang sering diharuskan menunggu lama sebelum mendapatkan kendaraan ke kota. Ketika pedagang beras tadi melihat sebuah jip yang lewat, ia menghentikannya. Karena barang bawaannya yang berat, ia meminta supir jip membantu mengangkatnya ke mobil. Setibanya di tempat tujuan, sopir jip kembali diminta membantu menurunkan berasnya. Setelah itu, pedagang beras berniat memberikan sekedar uang sebagai pembayaran jasa supir tadi, yang ternyata ditolak oleh yang bersangkutan. Mengira uangnya kurang, pedagang beras menambah lagi uangnya dan kembali ditolak oleh supir jip, yang segera meninggalkan tempat tersebut. Pedagang beras marah-marah dan mengomel karena supir jip tidak bersedia menerima uangnya. Setelah diberi tahu rekannya, bawa supir jip tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pedagang beras itu langsung jatuh pingsan.

106. Lihat *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, halaman 63. Masih menurut sumber yang sama, Ibu Hatta (istri wakil presiden pertama RI, Drs. Moh. Hatta) masih menyimpan sejumlah uang emas pemberian Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kenang-kenangan.

Guna menggeliatkan perekonomian di daerahnya, Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1957 mendirikan kembali Pabrik Gula Madukismo yang hancur saat revolusi kemerdekaan. Beliau memasyarakatkan pula tembakau Virginia di daerahnya. Peran sultan dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak dapat dikatakan kecil. Semasa Orde Baru, Beliau menjabat sebagai menteri negara bidang ekonomi, keuangan, dan industri (ekuin). Berkat upaya keras beliau, RI berhasil menarik modal asing dan menjadwalkan kembali hutang luar negerinya. Dengan demikian, Republik Indonesia sanggup mengangsur kembali utang-utang luar negerinya. Selanjutnya, beliau dipilih sebagai wakil presiden untuk masa jabatan 1973–1978. Dengan demikian, Sultan Hamengkubuwono IX bukan lagi milik masyarakat Yogyakarta, melainkan seluruh bangsa Indonesia.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX mangkat pada 3 Oktober 1988. Atas jasa-jasanya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan presiden tertanggal 8 November 1990. Penerus beliau adalah putra mahkota bernama Raden Mas Herjuno Darpito, yang naik takhta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono X. *Jumenengan* atau penobatan beliau dilangsungkan pada 8 Maret 1989 dengan mendapatkan sambutan yang hangat dan antusias dari masyarakat. Ini membuktikan masih kuatnya eksistensi kesultanan di tengah-tengah rakyat. Pada kesempatan ini diadakan kirab yang berawal dari istana dan melalui pagelaran, alun-alun lor, mengelilingi benteng searah jarum jam, sebelum akhirnya kembali ke istana. Rakyat berbondong-bondong memberikan penghormatan pada raja baru mereka yang duduk dalam kereta kerajaan ditarik 4 hingga 8 ekor kuda.

Semasa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono X berhasil membuktikan dirinya sebagai raja yang demokratis dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagaimana ayahnya. Saat pecahnya kerusuhan Mei 1998, berkat karisma sultan, kondisi Yogyakarta tetap aman. Sultan Hamengkubuwono X dengan tegas mendukung reformasi. Sehari sebelum lengsernya mantan Presiden Soeharto, Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam VIII pada 20 Mei 1998 menggelar pertemuan besar-besaran atau *pisowanan ageng*. Kedua orang raja mengajak rakyat agar bersatu padu mendorong berlakunya reformasi di segala bidang. Diserukan pula agar masyarakat menghindari tindakan anarkis yang dapat menjurus pada aksi-aksi SARA. *Pisowanan ageng* yang diselenggarakan Hamengkubuwono X dan Pakualam VIII berlangsung dengan tertib, aman, serta damai.

f. Sistem pemerintahan

Pemimpin tertinggi berada di tangan sultan. Semenjak zaman pemerintahan Hamengkubuwono I ditetapkan dewan menteri yang terbagi menjadi *nayoko* urusan dalam dan luar[107]. Adapun susunan *nayoko* urusan dalam terdiri dari *kanayakan keparah kiwa* dan *kanayakan keparah tengen* yang mengurusi masalah pekerjaan umum; *kanayakan gedong kiwa* dan *kanayakan gedong tengen* yang mengurusi masalah hasil bumi; serta *kananayakan* yang berkaitan dengan keuangan. *Nayoko* urusan luar terdiri dari *kananyakan siti sewu* yang mengurusi masalah pertanahan dan praja; *kanayakan penumping* dan *kanayakan numbakanyar* yang mengurusi soal pertahanan; serta *kananayakan bumijo*. Dewan menteri ini dipimpin oleh pepatih dalem yang tertanggung jawab pada sultan. Segenap surat yang hendak disampaikan pada sultan harus melalui *kanayakan keparah kiwa* terlebih dahulu.

Guna membantu pekerjaan *pepatih dalem* yang setingkat perdana menteri, masing-masing lembaga kanayakan mengirimkan bantuan tenaga 10 orang. Kantor *pepatih dalem* berkolasi di Danurejan. Para *nayoko* juga bertugas mengesahkan peraturan-peraturan baru berdasarkan keputusan rapat *nayoko*. Semasa pemerintahan Hamengkubuwono I–VII para pegawai kesultanan diberi gaji berupa tanah dan sawah. Selain itu, mereka masih menerima gaji berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat jabatan mereka.

g. Kesenian dan kebudayaan

Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Seni *karawitan* mengalami pertumbuhan pesat semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII. Waktu itu, R. T. Kertonegoro–bupati nayoko lurah bumijo– melakukan penelitian terhadap gending Jawa yang terdiri dari *slendro* dan *pelog*[108]. Hasilnya dihimpun dalam bentuk buku. Partiturnya yang berisikan tanda *titi raras* saat itu masih ditulis dalam huruf Jawa. Meskipun demikian, R.T. Wiroguno dengan dibantu M.L. Puspakanto, M. L. Brantamara, M. Panewu Demang Mangun, dan R.L. Barlayar menciptakan titi raras rantai atau not balok yang dipergunakan mencatat nada-nada dalam *tembang* Jawa. Guna mewadahi seni karawitan di atas dibentuk berbagai perkumpulan, seperti Hermani (1908), yang berganti nama menjadi Mardi Guno pada tahun 1919.

---

107. Lihat *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, halaman 166.
108. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,* halaman 26–27.

Pendiri Hermani adalah R.M. Joyodipuro, R.M. Prawiroatmojo, R.M. Prawirodipuro, dan Lie Jeng Kiem. Seiring dengan masuknya siaran radio di Pulau Jawa, Lie Jeng Kiem kemudian mendirikan Dayapradongga yang juga berkecimpung dalam seni karawitan. Selain melestarikan seni karawitan, lembaga tersebut juga mengajarkan seni tari sejak 1926. Mereka menyelenggarakan pameran wayang orang pada tahun 1930. Demi menarik perhatian para turis waktu pementasannya dipersingkat dari 12 jam menjadi 2 jam saja[109]. Ternyata pagelaran selama dua jam itu telah berhasil memeragakan berbagai tarian klasik. Seni tari yang sebelumnya tidak pernah menembus tembok keraton kini dapat disaksikan oleh khalayak ramai, sehingga membangkitkan minat masyarakat terhadap seni tari dan kebudayaan Jawa pada umumnya.

Seni tari utama yang berkembang di keraton Yogyakarta adalah Bedaya dan Srimpi. Mulanya kedua jenis tarian ini tak boleh dipagelarkan di luar istana. Kendati demikian, atas usaha perkumpulan Krida Beksa Wirama yang didirikan tanggal 17 Agustus 1918 seni tari di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat. Susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut[110]:

Ketua	: B.P.H. Suryadiningrat.
Pemimpin pelajaran tari	: G.P.H. Tejokusumo.
Pemimpin pelajaran gamelan	: K.R.T. Wiroguno.
Pemimpin kapujanggan	: K.R.T. Joyodipuro.
Sekretaris	: R.W. Suryamurcita (K.R.T. Wiranegara).
Bendahara	: K.R.T. Puspadiningrat.
Komisaris	: R.T. Amowiyoga, R.W. Puspodirjo, R.W. Sastrasuprapta, dan R.L. Jayapragola.

Pewayangan merupakan cabang seni lain yang tumbuh di Yogyakarta. Terdapat berbagai jenis pertunjukan wayang yang dikenal oleh rakyat, seperti *wayang purwo (wayang kulit), wayang gedog, wayang wong (orang), wayang klitik (wayang krucil), wayang golek,* dan *wayang madya.*[111] *Wayang purwo* atau *wayang kulit* pementasannya bersumber dari Mahabarata dan Ramayana. Wayang madya mengambil cerita

109. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,* halaman 83.
110. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,* halaman 84.
111. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta,* halaman 28.

epik yang ditulis oleh Ronggowarsito. Wayang klitik mengambil ceritera mengenai Damarwulan. Sedangkan wayang golek biasa dipergunakan mementaskan kisah Menak. Dalam bidang kesusateraan, Sultan Hamengkubuwono V pernah menulis karya berjudul *Serat Purwakanda*.

h. Kadipaten-kadipaten berumur singkat di Yogyakarta

Berikut ini adalah kadipaten-kadipaten berumur singkat yang pernah ada di wilayah Kesultanan Yogyakarta; yakni Nangulan dan Kalibawang. Kadipaten-kadipaten ini diperintah oleh para pangeran berdaulat, yang dilarang mengunjungi ibukota, terkecuali mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda.

i. KALIBAWANG

Kawasan ini diberikan pada Pangeran Prabu Adiningrat pada tahun 1832 dan terletak di antara Sungai Progo dan Bogowonto.

ii. NANGULAN

Wilayah ini diberikan pada Pangeran Notoprojo, yakni putra satu-satunya Pangeran Mangkudiningrat yang pernah menuntut haknya atas takhta Yogyakarta dan bersama-sama dengan ayahnya, Sultan Sepuh, dibuang ke Ambon oleh pemerintah kolonial Inggris. Berdasarkan perjanjian tertanggal 24 Desember 1832, Pangeran Notoprojo dianugerahi daerah seluas 500 *cacah* di antara Sungai Progo dan Bogowonto yang dulu pernah dimiliki oleh Pangeran Mangkudiningrat. Selain itu, ia juga mendapat tunjangan sebesar f. 500 sebulan dan di luar pendapatan tersebut, masih diterima pula uang untuk menggaji para pembesar beserta pangerannya. Kadipaten ini dihapuskan pada 1853.

Ini tampaknya merupakan foto salah seorang sultan Yogyakarta sewaktu muda
Sumber: foto koleksi pribadi

Pasukan pengawal sultan Yogyakarta
Sumber: dokumen lama

Barisan pasukan Kesultanan Yogyakarta
Sumber: dokumen lama

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI MADURA

I. Gambaran sejarah umum Madura

a. Cikal Bakal Penguasa Madura

Di Pulau Madura terdapat tiga kabupaten yang pernah memperoleh status swapraja atau setara dengan kerajaan, yakni Madura atau Madura Barat (kini Kabupaten Bangkalan dan Sampang); serta Madura Timur yang terdiri dari Sumenep dan Pamekasan. Sejarah awal Madura memiliki keterkaitan erat dengan Majapahit, karena Aria Wiraraja yang membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit berasal dari sana. *Babad Madura* dan ceritera-ceritera rakyat mengisahkan bahwa para penguasa Madura Barat adalah keturunan dua orang tokoh bernama Aria Lembu Petteng (Ario Lembupeteng) dan Aria Damar (Ki Dilah). Kemungkinan besar kedua tokoh Majapahit itu dimasukkan dalam legenda sebagai wujud pencarian legitimasi bagi para penguasa Madura Barat. Para penguasa Madura Timur juga perlu mencari legitimasi semacam itu. Kurang lebih bersamaan dengan kurun waktu kehidupan Aria Lembu Petteng, muncul tokoh legenda lain yang bernama Jaka Tole atau Kuda Panolih. Beberapa versi cerita menyatakan bahwa karya sastra mengenai Jaka Tole ini digubah sebagai penghormatan terhadap seorang adipati bernama Setiadiningrat. Adipati ini memerintah Madura pada tahun 1415–1460 dan berkedudukan di Lapataman (Dungkek). Semasa muda konon ia bernama Jaka Tole.

Kisah hidup tokoh legendaris tersebut dipenuhi berbagai keajaiban, antara lain kesanggupannya mendirikan pintu besi istana Majapahit seorang diri. Karena keberhasilannya menyelesaikan pintu gerbang itu, ia dinikahkan dengan seorang putri Majapahit. Adik Jaka Tole menurut legenda tersebut bernama Jaka Wide, di mana nama ini mirip dengan nama lain Arya Wiraraja, yakni Banyak Wide. Dikisahkan pula kehebatan Jaka Tole memenangkan persaingan dengan Patih Gajah Mada dalam menundukkan pemberontak Blambangan. Ia berhasil memenggal kepala pemimpin perusuh tersebut dan menyerahkan kepalanya sebagai bukti keberhasilannya. Kisah ini mengandung kemustahilan mengingat Gajah Mada telah meninggal pada tahun 1364. Selain itu, alur ceritanya mirip pula dengan kisah Damarwulan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa legenda Jaka Tole itu digubah dari sumber-sumber yang lebih tua. Keajaiban lain dalam legenda ini nampak pula pada riwayat perang tanding antara Jaka Tole melawan Dampo Awang yang menunggang perahu terbang.

Jaka Tole diriwayatkan dapat membunuh Dampo Awang dengan cemetinya. Dampo Awang di sini mengacu pada juru mudi kapal Laksamana Zhenghe.

Meskipun demikian, pengaruh legenda Jaka Tole pada masyarakat Madura sungguh besar, di mana beberapa tempat di Madura dinamai seturut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi semasa petualangannya. Antara lain adalah Soca yang berarti "mata." Asal-muasal tempat ini adalah tongkat Jaka Tole yang sanggup mengeluarkan air ajaib, sehingga menyembuhkan kebutaan istrinya yang merupakan putri raja Majapahit tersebut. Ada lagi tempat bernama Omben, yang berasal dari kata *amben* (kain pembalut wanita). Menurut ceritera rakyat, kain yang dipakai istri Jaka Tole hilang di mata air desa itu. Jaka Tole lalu mengutuk mata air itu agar airnya tidak dapat mengalir keluar dari desa tersebut. Namun, kini mata air itu memasok kebutuhan air kota Pamekasan. Tentu saja, riwayat asal usul nama tempat di atas tak dapat dipercaya begitu saja.

Betapapun saktinya Jaka Tole, tokoh sejarah yang dipersonifikasikan sebagai dirinya, yakni Adipati Setiadiningrat ternyata mati dibunuh para penyerang dari Bali pada 1460. Menjelang keruntuhan Majapahit, Madura menjadi kurang aman, sehingga para adipati keturunan Setiadiningrat harus berpindah-pindah tempat kediaman. Para pembesar dan raja bawahan juga kerap berperang satu sama lain. Hingga keruntuhan Majapahit pada abad ke-16, tidak ada peristiwa penting yang terjadi di Madura.

b. Tersiarnya Agama Islam di Madura

Masuknya agama Islam di Madura juga masih diliputi legenda. Menurut sumber-sumber yang ada, tersebarnya Islam di Sumenep terkait dengan Kerajaan Demak. Adipati Majapahit terakhir di Madura bernama Aria Wanabaya (Ario Wonoboyo) masih belum bersedia menganut agama Islam, sehingga raja Demak mengutus putranya bernama Raden Wangkawa menyebarkan agama Islam di sana. Terjadi peperangan antara keduanya dan Aria Wanabaya berhasil dikalahkan. Raden Wangkawa diangkat sebagai penguasa Sumenep dengan gelar Pangeran Kanduruwan. Sumber lain, berupa *Babad Tanah Jawi*, menyatakan bahwa Kanduruwan adalah saudara tiri Sultan Trenggana dari Demak serta menantu Pecat Tanda Terung (penguasa Surabaya yang telah menganut agama Islam dan memberontak terhadap Majapahit).

Kanduruwan merupakan penguasa yang memerhatikan rakyatnya. Ia berjuang keras meningkatkan hasil produksi pertanian dan perdagangan warga Sumenep. Legenda menyatakan bahwa ia telah menyempurnakan tata cara karapan sapi–

permainan rakyat khas Madura yang tersohor itu. Kanduruwan menikahkan putranya dengan putri Aria Wanabaya yang baru saja dikalahkannya. Ia mendirikan keraton pusat pemerintahannya di desa Karang Sabu, yang kini terletak dalam Kota Sumenep. Guna membenarkan aksi penaklukan yang dilakukan Kanduruwan, dikaranglah sebuah legenda yang melibatkan seorang ratu Majapahit dari Japan, tempat Kanduruwan mengabdikan dirinya. Ratu itu jatuh cinta pada Wanabaya, tetapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Untuk itulah, ia menugaskan Kanduruwan menaklukkan Wanabaya. Dalam pertempuran, Wanabaya terbunuh, sehingga ratu menjadi murka dan mengusir Kanduruwan. Namun, ia diterima dan dilindungi oleh Raja Demak, yang bahkan menganugerahkan kedudukan baginya di Sumenep.

Kisah tentang Kanduruwan juga tercatat dalam *Babad Tanah Jawi*. Menurut sumber tersebut, ia mempunyai saudara bernama Raden Pamekas, yang diutus menyebarkan agama Islam ke Madura, tetapi tidak menjadi penguasa di sana. Meskipun demikian, ia dianggap sebagai leluhur Bendara Saud (Bendoro Saut) yang kelak secara turun-temurun menjadi penguasa Sumenep. Barangkali namanya itu menjadi asal usul nama Pamekasan, tempatnya berdiam, yang selanjutnya berubah menjadi desa dan kemudian kota.

Masuknya Islam di Madura Barat agak berbeda. Riwayatnya berkaitan dengan pernikahan Aria Puja (keturunan Aria Damar) dan Nyai Agung Budha (keturunan Lembu Petteng). Pernikahan mereka membuahkan seorang putra yang kelak menjadi penguasa bergelar demang dan berkedudukan di Palakaran, dekat Torjun. Salah seorang putra Demang ini berhasil menjadi adipati yang berkedudukan di dekat Arosbaja dan bergelar Pangeran Palakaran (Kyai Pragalbo). Penjelajah Portugis memberitakan pula adanya penguasa-penguasa di Madura yang belum menganut agama Islam. Ia diberitakan sebagai menantu Patih Udara dari Majapahit. Kejatuhan Majapahit memberikan kesempatan bagi Palakaran memaklumkan dirinya sebagai raja merdeka yang berdaulat penuh. Keturunan Lembu Petteng juga membuka wilayah pemukiman baru (Jamburingin, Katapang, Lomaer, Lombang Lor, Banarana, dan Batoampar) yang merdeka dan diperintah oleh raja-raja setempat beragama Islam.

Setahun setelah runtuhnya Majapahit, putra mahkota Madura Barat (Arosbaja, Bangkalan) bernama Pratanu dikabarkan menganut agama Islam secara sukarela. Tetapi, ayahnya (Pangeran Palakaran) belum bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru saat hendak meninggal pada 1531, ia mengisyaratkan kesediaannya

mengucapkan kedua kalimat tersebut. Namun, Pangeran Palakaran sudah tidak dapat berkata-kata lagi sehingga harus dituntun mengucapkannya, dan ia hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Oleh karenanya, dalam *Babad Madura*, Pangeran Palakaran dikenal sebagai Pangeran Islam Onggu' atau pangeran yang menyatakan keislamannya dengan anggukan kepala saja.

Pratanu mengawali pemerintahannya dengan berbagai hal baru, seperti ibu kota, keraton, dan agama yang baru. Ia memindahkan ibu kotanya ke Kotta Anyar. Alasan Pratanu menganut agama Islam kemungkinan adalah pertimbangan politis. Ia tak ingin mengalami nasib seperti Wanabaya dan berharap dapat menjalin hubungan politik dengan berbagai kerajaan Islam yang sedang bermunculan di Jawa. Pratanu yang bergelar Panembahan Lemah Duwur memerintah Madura selama lebih dari 60 tahun. Ia menaklukkan pula kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya, sehingga makin memperkokoh kedudukannya. Bahkan ada pula sumber-sumber yang menyatakan bahwa Pratanu melakukan penaklukan hingga sejauh Sedayu, Gresik, dan Pasuruan. Tetapi wilayah kekuasaannya di Jawa ini tidak bertahan lama, karena direbut kembali oleh Pajang yang merupakan penerus Demak.

Pajang berupaya menanamkan pengaruhnya di Madura melalui perkawinan politik. Pratanu dinikahkan dengan salah seorang putri Sultan Pajang. Setelah mundurnya kekuasaan Pajang, Mataram mulai bangkit dan kerajaan tersebut melancarkan ekspansinya ke arah timur, termasuk Madura. Kendati demikian, Lemah Duwur berhasil menahan serangan Mataram di Japan pada tahun 1589. Di lain pihak, Lemah Duwur tidak memiliki ambisi ekspansif untuk meluaskan kekuasaannya di Madura dengan mencaplok wilayah-wilayah yang dikuasai kaum kerabatnya. Jadi saat itu, pada waktu yang bersamaan di Madura memerintah Pangeran Zuhra di Jamburingin dan kemenakannya Pangeran Sukawati di Pamekasan. Selama kurun waktu beberapa puluh tahun sesudahnya, Madura diperintah oleh kerajaan kecil-kecil yang merdeka. Ini disebabkan Demak serta Pajang tidak sekuat Majapahit dan selain itu, Mataram sendiri juga masih dalam proses pertumbuhannya.

Belanda yang tiba di Kepulauan Nusantara juga menyinggahi Madura. Mereka tiba di pelabuhan Arosbaja pada 6 Desember 1596 dengan kapal *Mauritius*, *Hollandia*, *Amsterdam*, dan *Duyfken*. Rombongan Belanda itu diterima dengan baik oleh Pangeran Tengah (putra dan pengganti Lemah Duwur) yang mengutus patih dan penghulunya menemui mereka. Namun, Belanda yang merasa curiga membunuh kedua utusan

tersebut. Karena takut terhadap pembalasan rakyat Madura, kapal-kapal Belanda segera meninggalkan pulau itu. Mereka lantas bertolak ke Bawean, Bali, dan kembali ke negerinya. Dua tahun kemudian, muncul kapal Belanda lainnya. Rakyat Madura masih teringat pada insiden pembunuhan utusan Pangeran Tengah oleh misi Belanda sebelumnya. Mereka lalu menyerang kapal tersebut dan membunuhi serta menawan awaknya. Setelah ditebus dengan harga yang mahal, barulah anak buah kapal Belanda yang ditawan dapat dibebaskan.

c. Madura di bawah kekuasaan Mataram

Pada awal abad ke-17, Madura diperintah oleh beberapa kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Cicit Kanduruwan baru saja dinobatkan sebagai putra mahkota Sumenep dengan gelar Pangeran Cakranegara. Panembahan Ronggo Sukowati (Pangeran Rangga Sukawati) di Pamekasan yang telah lanjut usia menyerahkan takhta pada putranya, Pangeran Purbaya (Purboyo). Di Madura Barat (Bangkalan) terjadi intrik kekuasaan. Ketika Pangeran Tengah (Raden Koro) meninggal yang menduduki takhta Arosbaja adalah Pangeran Mas, adiknya, dan bukan putranya yang bernama Raden Praseno. Sementara itu, Praseno sendiri diserahi kedudukan sebagai adipati Sampang. Anak-anak Lemah Duwur lainnya menjabat sebagai adipati di Pakacangan, Bliga (Blega), dan Jamburingin, yang semuanya berada di bawah kekuasaan Arosbaja. Meskipun terkadang terjadi perselisihan di antara mereka, tetapi biasanya dapat diselesaikan dengan baik karena adanya semangat kekeluargaaan di antara mereka. Ikatan kekeluargaan yang erat ini timbul karena merasa bahwa mereka semua masih keturunan Lembu Petteng.

Ternyata kemerdekaan Madura ini terancam oleh pertumbuhan Mataram. Pada tahun 1613, Sultan Agung menaiki singgasana Mataram. Ia berambisi menyatukan seluruh Pulau Jawa dan demikian pula dengan bagian-bagian lain Kepulauan Nusantara. Selain itu, Sultan Agung berkeinginan mengusir Belanda yang bercokol di Batavia. Demi mewujudkan niatnya, Mataram secara bertahap menaklukkan berbagai daerah di sekitarnya, termasuk Madura. Sultan Agung melancarkan serangkaian serangan yang kurang berhasil ke daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya, selaku kerajaan terkuat di sana. Meski daerah pinggiran Surabaya sudah jatuh ke tangan Mataram, tetapi kota tersebut belum dapat ditaklukkan karena Madura masih dapat membantunya dari belakang. Itulah sebabnya, Mataram mengalihkan serangannya ke Madura yang terjadi pada Juni 1624. Serangan itu dipimpin Adipati Sujanapura

dari Mataram dan dibantu oleh Tumenggung Demak, Adipati Pragola dari Pati, pangeran atau bupati Sumedang bergelar Rangga Gempol I, dan Patih Tumenggung Singaranu. Pasukan Mataram berkekuatan 50.000 orang didaratkan di Kesek, sebelah timur Kamal. Serbuan pertama ini berhasil digagalkan karena dihadang oleh pasukan Madura. Beberapa hari kemudian dilakukan pendaratan tahap kedua. Setelah bertempur selama setengah hari, pasukan Madura yang hanya berjumlah 5.000 orang terpaksa mengundurkan diri. Meskipun demikian, pada malam harinya, 400 anggota pasukan berani mati Madura menyelinap ke dalam perkemahan tentara Mataram dan mengamuk sejadi-jadinya, sehingga menewaskan para petinggi pasukan Mataram, seperti Adipati Sujanapura, Tumenggung Demak, 17 perwira tinggi, puluhan perwira rendahan, dan ribuan prajurit lainnya.

Menghadapi malapetaka ini, Pangeran Selarong diperintahkan kembali ke ibukota Mataram guna memohon bala bantuan. Sultan Agung lalu melancarkan serangan kedua dengan melibatkan pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya, yakni dengan kekuatan 80.000 orang. Mataram juga menurunkan seorang perwira muda yang masih segar bernama Wiraguna[112]. Uniknya, kali ini serangan juga melibatkan seorang tokoh spiritual bernama Kyai Juru Kiting yang usianya sudah tua renta, sehingga harus ditandu.

Gelombang kedua serangan ini bertolak dari Pasuruan menuju Sampang. Sebagai tokoh spiritual, Kyai Juru Kiting turun ke medan perang dan membagi-bagikan nasi liwet pada para prajurit. Mereka tampaknya meyakini bahwa nasi yang dibagi-bagikan itu bertuah, sehingga makin menambah rasa percaya diri para prajurit Mataram. Untuk menakut-nakuti musuh ia melakukan gerakan-gerakan seperti sedang mengerahkan ilmu gaibnya. Menghadapi kekuatan musuh yang luar biasa besar itu, Adipati Praseno dari Sampang ciut nyalinya, sehinga memutuskan menyerah. Menyerahnya Adipati Praseno ini melemahkan pertahanan pasukan Madura. Meskipun demikian, Raja Madura Barat (Arosbaja), Pangeran Mas, dan Adipati Bliga masih terus berjuang sekuat tenaga menghadapi ekspansi Mataram. Akhirnya mereka terpaksa melarikan diri. Pangeran Mas menyeberang ke Jawa dan meminta perlindungan Sunan Giri, tokoh yang disegani saat itu. Sementara itu Adipati Bliga tertangkap dan dibawa ke Mataram. Namun begitu tiba di daerah Jurang Jero, Klaten, pihak Mataram membunuhnya dengan tikaman keris. Raja Sumenep Pangeran Sepuh gugur pula

112. Kelak ia menjadi seorang tumenggung terkemuka dan namanya diabadikan dalam ceritera Rara Mendut.

dalam pertempuran di Sampang. Putra mahkota Sumenep, Pangeran Cakranegara terpaksa mengundurkan dirinya dan meminta perlindungan Sultan Banten. Tetapi, penguasa Banten yang takut terhadap Mataram kemudian menyerahkan Pangeran Cakranegara beserta keluarganya. Namun, Raden Bugan, putranya yang baru berusia 3 tahun dititipkan pada Sunan Giri. Di Mataram, Cakranegara beserta petinggi-petinggi Madura lainnya dihukum mati dengan tikaman keris.

Perjuangan diteruskan oleh Pangeran Jamburingin hingga ia gugur dalam peperangan. Setelah menaklukkan Madura Barat, pasukan Mataram terus bergerak ke arah timur menuju Pamekasan. Di sana pasukan Mataram juga mengalami perlawanan yang gigih, bahkan istri para prajurit juga ikut serta membakar semangat suaminya. Mereka menghalangi para prajurit yang hendak melarikan diri dan bahkan tidak segan-segan menghabisi nyawa prajurit Madura yang terluka di punggungnya; yakni pertanda bahwa mereka telah lari membelakangi musuh sehingga menunjukkan sikap pengecutnya. Belakangan para wanita itu ikut berjuang hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Menyadari bahwa kekalahan sudah di ambang pintu, raja Pamekasan beserta seluruh pengikutnya bertekad melakukan perang puputan seperti di Bali, sehingga mereka semua tewas.

Pada akhir bulan Agustus 1624, seluruh Madura boleh dikatakan telah jatuh ke tangan Mataram. Ratusan pembesar Madura yang ikut melawan Mataram ditawan dan dijatuhi hukuman mati di ibukota Mataram. Sementara itu, Adipati Sampang yang menyerahkan diri diakui sebagai penguasa seluruh Madura. Meskipun demikian, jabatan itu hanya kosong belaka, karena ia harus berkedudukan di Mataram dan bukannya Madura. Agar lebih mudah diawasi, ia dinikahkan dengan salah seorang adik Sultan Agung. Setelah Madura jatuh ke tangan Mataram, diadakan penataan pemerintahan yang baru. Raden Santamerta ditugaskan untuk mengelola pemerintahan Madura Barat yang berkedudukan di Sampang. Pamekasan diserahkan pada Pangeran Magetsari (Megasari), putra Pangeran Jamburingin yang gugur dalam perang. Sumenep diserahkan pada Tumenggung Anggadipa, panglima armada Mataram yang berasal dari Jepara. Jatuhnya Madura ini memudahkan Sultan Agung dalam menaklukkan Surabaya pada tahun 1625.

Kini seluruh Jawa Timur telah ada dalam genggaman tangan Mataram. Sultan Agung melakukan reorganisasi kawasan tersebut. Sebanyak kurang lebih 40.000 warga Madura dipindahkan ke Gresik dan daerah lain yang masih jarang penduduknya.

Mataram saat itu memang membutuhkan banyak bahan pangan, sehingga harus membuka areal persawahan baru. Itulah sebabnya, mereka memerlukan banyak tenaga kerja. Selain itu, pemindahan penduduk ditujukan untuk mematahkan semangat pemberontakan dalam diri mereka. Sultan Agung ternyata bersikap bijaksana pada penduduk Madura dan tidak berniat memberatkan mereka. Ketika pada tahun 1625 diterapkan pajak kepala, rakyat Madura hanya dikenai ¼ Ringgit saja; sedangkan rakyat Mataram harus membayar 4 ½ Ringgit dan pedagang China 18 Ringgit. Madura tidak jarang membantu Mataram dalam berbagai ekspedisi milliliternya; sebagai contoh, pada tahun 1629 Sultan Agung menyerang Batavia dan pasukan Madura yang dipimpin seorang bergelar Adipati Sumenep juga dilibatkannya.

Demi memantapkan kekuasaannya di Madura, Tumenggung Anggadipa menikahi salah seorang keturunan Lemah Duwur. Ia disukai oleh rakyat Sumenep karena banyak kebijaksanaannya yang menguntungkan mereka. Anggadipa juga memerhatikan bidang agama dengan mendirikan mesjid jami' pertama di Sumenep, yakni di kampung Kapanjin. Sultan Agung mengganti tahun Saka yang dilandasi peredaran matahari dengan tahun Jawa yang didasari oleh peredaran rembulan seperti penanggalan Hijriah pada tahun 1633. Perubahan ini diterima dengan baik oleh masyarakat Madura. Adipati Sampang kurang menyenangi Anggadipa dan memfitnahnya, sehingga dicopot dari kedudukannya pada tahun 1644 dan digantikan oleh Jayengpati, menantu adipati Sampang yang memfitnahnya itu. Namun karena kecintaannya pada Sumenep, Anggadipa tetap berdiam di sana hingga akhir hayatnya.

Sultan Agung digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I (1645–1677). Raja Mataram baru ini kurang cakap dalam memerintah dan bersikap sewenang-wenang; sehingga timbul berbagai pemberontakan menentangnya. Saudara raja yang bernama Pangeran Alit membunuh Raden Praseno, adipati Sampang, pada tahun 1647, sehingga menimbulkan kemarahan putra penguasa Madura yang terbunuh tersebut. Ia ganti menghabisi nyawa Pangeran Alit dan ikut tewas dalam insiden tersebut. Amangkurat I sebenarnya senang dengan kematian saudaranya itu, tetapi ia pura-pura marah dan membantai ribuan warga Madura yang ada di Mataram sebagai wujud pembalasan dendam.

Amangkurat I mengangkat salah seorang putra adipati Sampang lainnya bernama Raden Demang Melayakusuma sebagai penguasa baru Madura. Namun, sama seperti

para adipati sebelumnya, ini adalah jabatan kosong, karena ia tak diperkenankan meninggalkan Mataram dan memerintah wilayah kekuasaannya secara langsung. Itulah sebabnya, Malayakusuma tidak sempat menyaksikan kelahiran putranya yang bernama Trunajaya. Belakangan, raja Mataram membunuh Melayakusuma beserta ibu dan saudaranya pada tahun 1656. Kedudukannya sebagai adipati Sampang diserahkan pada saudara tirinya yang bernama Raden Undakan (putra Raden Praseno). Ia juga diharuskan tetap tinggal di Mataram.

Kekacauan di Mataram makin menjadi-jadi berkat ketidak-becusan Amangkurat I. Ia melakukan berbagai kekejaman; antara lain membunuh para ulama kerajaan yang tidak sepakat dengannya. Adanya intrik percintaan memperuncing keadaan. Hubungan putra mahkota Mataram, Pangeran Adipati Anom, dengan ayahnya memang sudah kurang harmonis, dan kini ayah dan anak itu malah jatuh cinta pada gadis yang sama. Amangkurat I lalu mencoba membunuh putranya tersebut. Hal ini mendorong Pangeran Adipati Anom bersekutu dengan Trunajaya, putra Melayakusuma, guna menggulingkan Amangkurat I, ayahnya itu. Pangeran Adipati Anom menjanjikan bila ia dengan bantuan Trunajaya berhasil merebut takhta Mataram, maka Trunajaya akan didudukkan sebagai penguasa Madura, yang memang sudah merupakan haknya selaku putra Raden Demang Melayakusuma.

Trunajaya sendiri baru berusia tujuh tahun, ketika ayahnya dibunuh oleh raja Mataram. Ia lalu diasuh oleh Raden Undakan yang menggantikan ayahnya sebagai adipati Sampang. Menjelang dewasa, terjadi perselisihan antara paman dan kemenakan tersebut, sehingga Trunajaya harus hidup terlunta-lunta sampai ia diangkat sebagai menantu oleh Raden Kajoran, tokoh spiritual terkemuka di Mataram. Mulanya ia hendak mengabdi Pangeran Adipati Anom, tetapi selalu dihalang-halangi oleh pamannya.

Pemberontakan Trunajaya diawali di Pamekasan pada sekitar tahun 1671. Trunajaya berhasil menguasai Madura tanpa perlawanan berarti. Saat itu, rakyat memang dilanda ketidak-puasan terhadap para pemimpinnya, sehingga mereka mendukung Trunajaya. Selain itu, ia mendapat dukungan pula dari para ulama di Giri, Raden Kajoran, sultan Banten, dan tokoh-tokoh lainnya. Trunajaya menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Raden Bugan, putra Cakranegara I yang dititipkan pada Sunan Giri saat berusia 3 tahun. Sementara itu, Jayengpati, wakil adipati Sampang yang memerintah di Sumenep, diserahi Madura Barat. Setelah kekuasaannya bertambah

kokoh, Trunajaya diangkat sebagai Panembahan Maduratna oleh para pengikutnya. Ia lalu menyeberang ke Jawa Timur dan menjadikan Surabaya sebagai pusat kegiatannya. Pada saat yang bersamaan, kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan baru saja diporak-porandakan oleh kekuatan VOC, sehingga banyak orang Makassar menyingkir dari sana dan mengganggu keamanan pelayaran di Jawa serta Nusatenggara. Salah satu kelompok petualang Makassar yang dipimpin oleh Karaeng Galesong diterima dengan baik oleh Trunajaya dan mereka membangun persekutuan. Agar ikatan itu semakin kokoh, Karaeng Galesong dinikahkan dengan kemenakan Trunajaya pada tahun 1674.

Mataram tentu tidak berpangku tangan saja menyaksikan pemberontakan itu. Raja Mataram mengirim pasukan berkekuatan 80.000 orang di bawah pimpinan Pangeran Adipati Anom yang ditugaskan memadamkan pemberontakan Trunajaya. Tetapi karena putra mahkota Mataram itu dicurigai bersekutu dengan Trunajaya, ia didampingi oleh saudara-saudaranya sebagai pengawas atas segenap gerak-geriknya. Di tengah-tengah pertempuran yang terjadi di Gegodok pada 13 Oktober 1676, Mataram kalah telak oleh pasukan gabungan Trunajaya, bahkan Amangkurat harus kehilangan adiknya dalam peperangan itu. Pasukan Trunajaya bergerak maju dengan menguasai kota-kota di pantai utara Jawa. Kekalahan ini memperkuat kecurigaan terhadap Pangeran Adipati Anom. Namun, akhirnya Adipati Anom mengingkari persekutuannya dengan Trunajaya dan meminta bantuan VOC yang sangat dibenci Trunajaya.

VOC berupaya menarik keuntungan dari peperangan itu. Mula-mula mereka mendekati Trunajaya dan menawarkan bantuan dalam mengalahkan Mataram. Tetapi, Trunajaya menampik rayuan tersebut, sehingga VOC akhirnya berpaling pada Mataram. Tentu saja bantuan itu tidak cuma-cuma, karena Mataram membayarnya dengan perjanjian dagang yang menguntungkan VOC. Dalam rangka mengalahkan kaum pemberontak, VOC menduduki Surabaya guna memotong jalur bantuan Madura terhadap Trunajaya. Oleh karenanya, Trunajaya terpaksa menyingkir ke Kediri. Pada tahun 1677, Plered yang merupakan ibukota Mataram diserang dan berbagai barang berharga serta pusaka kerajaan diangkut ke Kediri. Jatuhnya ibukota ke tangan pemberontak ini memaksa Amangkurat I melarikan dirinya. Sunan terpaksa mengambil rute memutar karena jalan menuju benteng Belanda di Semarang telah dikuasai Trunajaya. Amangkurat I yang telah sakit-sakitan ini akhirnya wafat di Tegalwangi.

Pangeran Adipati Anom diangkat sebagai raja Mataram baru dengan gelar Amangkurat II. Ia tak mempunyai pilihan selain meneruskan kerja sama dengan VOC. Padahal saat itu Trunajaya telah sepakat menghentikan pemberontakannya asal Amangkurat II bersedia memutuskan persekutuannya dengan Belanda. Ia tidak akan menuntut lebih selain diakui sebagai Panembahan Maduratna, penguasa Madura, yang sudah menjadi haknya.

Sebagai imbalan bantuan VOC dalam menaklukkan Trunajaya, Mataram harus menggadaikan daerah pesisir pantai utara Jawa, seperti Semarang beserta wilayah sekitarnya, Surabaya, dan lain sebagainya, sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1678. Selain itu, semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Belanda dalam menumpas pemberontakan Trunajaya menjadi tanggungan Mataram. Pasukan VOC yang dibantu laskar Bone di bawah pimpinan Arung Palakka menyerang Kediri. Trunajaya tidak dapat menandingi kekuatan gabungan tersebut, sehingga terpaksa melarikan diri ke Ngantang. Kedudukannya makin terjepit karena kekurangan bahan makanan dan sarana lainnya. Trunajaya akhirnya menyerah pada pamannya, bupati Sampang. Tetapi ada sumber lain menyebutkan bahwa Trunajaya menyerah pada Kapten Jonker, yang memberikan jaminan kesalamatan padanya. Kendati demikian, Belanda lalu menyerahkan Trunajaya pada Amangkurat II, yang membunuhnya dengan tikaman keris. Trunajaya dipenggal kepalanya dan jenazahnya dihancurkan sampai halus. Hal ini memang disengaja agar makamnya tidak dikeramatkan oleh orang Madura.

Raden Undakan yang banyak membantu Mataram diberi penghargaan dan kedudukan yang setingkat dengan patih. Selain itu, ia dianugerahi gelar Cakraningrat pada tahun 1678. Inilah awal mula berkuasanya Dinasti Cakraningrat di Madura. Sebagai penghormatan kepada ayahnya (Adipati Praseno) yang terbunuh pada tahun 1647, gelar Cakraningrat I dianugerahkan secara anumerta pada ayahnya itu; sehingga ia langsung menyandang gelar sebagai Pangeran Adipati Arya Cakraningrat II. Sementara itu, ayah Trunajaya, Raden Melayakusuma, tidak memperoleh gelar sama sekali dan sengaja dilupakan.

Setelah berakhirnya pemberontakan yang menggoyahkan sendi-sendi Mataram itu, pemerintahan Madura ditata kembali. Raden Bugan yang sebelumnya telah diangkat oleh Trunajaya sebagai penguasa Sumenep, makin dikokohkan kedudukannya oleh Amangkurat, dan bahkan dianugerahi gelar Raden Tumenggung Yudanegara.

Jayengpati tetap dipercaya sebagai wakil Cakraningrat dalam mengelola Madura Barat, karena rakyat Sampang dan Bliga di bawah pimpinan para ulama kurang menyukai Cakraningrat.

Mataram makin tergantung pada Belanda dan terasing dari dunia luar. Beberapa daerah telah diserahkan Mataram pada VOC. Meskipun demikian, budaya Jawa makin tersebar luas di Madura. Bahasa Jawa menjadi bahasa resmi birokrasi di Madura dan sistem pemerintahan di sana juga mengacu pada model Mataram. Pengaruhnya juga nampak pada segi penamaan. Umumnya keturunan bangsawan Madura memiliki dua nama, yaitu nama kecil bercorak Arab dan gelar atau nama tua yang berbahasa Jawa.

d. Madura berada di bawah VOC

Secara bertahap, wilayah kekuasaan Mataram digerogoti oleh VOC, termasuk Madura. Pada tahun 1705, Madura timur diserahkan Mataram pada VOC dan menyusul Madura barat pada 1743. Jatuhnya Madura ke tangan VOC berawal dari upaya Raden Bugan (Raden Tumenggung Yudanegara) menjalin persahabatan dengan VOC. Hal itu tampaknya dilatar-belakangi oleh dendam kesumatnya terhadap Cakraningrat dan Mataram. Ia merasa bahwa ayah dan seluruh kerabatnya gugur akibat ekspansi Mataram, di mana semua itu sedikit banyak disebabkan oleh pengkhianatan Cakraningrat I. Selain itu, ia juga masih merasa berhutang budi pada Trunajaya. Karenanya, semenjak tahun 1680, ia tak lagi menghormati Cakraningrat II dan Amangkurat II; kendati telah diberi gelar kehormatan Yudanegara.

Demi membebaskan diri dari pengaruh kedua penguasa yang dibencinya itu, Raden Bugan mencari sekutu lain, yakni VOC. Hal ini tentu saja disambut gembira oleh VOC. Meskipun Madura tidak menguntungkan secara ekonomis, tetapi kekuasaan mereka di pulau tersebut menunjang penaklukan daerah lainnya. Semenjak saat itu terjalin kerja sama antar keduanya. Bahkan, Raden Bugan ikut membantu Belanda menumpas pemberontakan Sunan Giri. Hal ini memicu pemberontakan beberapa ulama di Madura timur, namun perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Ketika Yudanegara yang tidak memiliki keturunan laki-laki meninggal pada tahun 1684, keempat menantunya berebut kekuasaan. VOC segera turun tangan mendamaikan berbagai pihak yang bertikai itu, dengan membagi kekuasaan Sumenep beserta Pamekasan antara Pangeran Pulang Jiwa dan Pangeran Baskara. VOC tentu saja kembali menuntut upah atas bantuannya tersebut, yakni berupa izin pendirian

benteng yang disebut loji oleh orang Madura. Dengan pendirian benteng tersebut, VOC menganggap Sumenep sebagai daerah pengaruhnya.

Kendati tidak pernah tinggal di Madura, Cakraningrat memindahkan pusat pemerintahannya ke Tonjung di ujung Barat Madura. Penyebabnya adalah ketidak sukaan rakyat Sampang terhadap dirinya. Cakraningrat tidak menyukai kedekatan bupati Sumenep dan Pamekasan dengan VOC. Meskipun demikian, pada akhirnya ia juga bersekutu dengan VOC demi melemahkan Mataram. Cakraningrat juga telah mengkhianati persekutuannya dengan Surapati yang memberontak melawan Mataram. Mulanya ia membangun aliansi dengan Surapati demi meningkatkan pengaruh dan kedudukannya. Ketika raja mencurigainya, ia malah diperintahkan membantu VOC menghancurkan mantan sekutunya tersebut. Sesungguhnya saat itu kedudukan VOC sedang lemah; sehingga terpaksa merekrut banyak laskar Jawa dan Madura. Merekalah yang sebenarnya berperanan dalam mengalahkan Surapati. Penyewaan laskar yang sedemikian banyak itu tentu saja biayanya dibebankan pada Mataram; sehingga kerajaan itu pada akhirnya terbelit hutang dengan VOC.

Ketergantungan Mataram yang semakin besar pada Belanda membangkitkan ketidak-senangan sebagian kalangan istana. Bahkan, raja kini semakin bertindak dan berperilaku kebarat-baratan. Ketika Amangkurat II meninggal pecahlah perang perebutan takhta. Pada kesempatan kali ini, Cakraningrat terpaksa memihak calon yang didukung Belanda. Putra mahkota yang sempat didudukkan di atas takhta bergelar Amangkurat III tidak disukai oleh Belanda; sehingga ia dicopot dari kedudukannya dan dibuang ke Srilanka. Sebagai penggantinya, Belanda menempatkan Pakubuwana I ke atas singgasana Mataram. Demi membalas jasa Belanda itu, Pakubuwana I menyerahkan secara resmi Sumenep dan Pemekasan pada tahun 1705.

Cakranegara disetujui oleh VOC menggantikan Pangeran Pulang Jiwa sebagai bupati Sumenep pada tahun 1704 berdasarkan perjanjian yang ditanda-tanganinya di Semarang. Imbalannya, Cakranegara wajib menandatangani kontrak politik yang disebut *acte van verband*. Isi pokoknya merupakan pengakuan Cakranegara terhadap kekuasaan Belanda. Walaupun seolah-olah diperbolehkan memerintah daerahnya sendiri secara swapraja, ia sesungguhnya harus tunduk pada Belanda selaku yang dipertuan atas wilayah itu. Cakranegara tidak menyadari bahwa ia sebenarnya hanya pegawai Belanda yang digaji dengan sebagian pajak yang dipungutnya demi kepentingan penjajah.

Ketika ada bupati Sumenep bernama Raden Sudarma melakukan kebijaksanaan dan tindakan yang kurang disukai VOC, Belanda menghasut warga agar membunuhnya pada tahun 1707. Peristiwa ini tidak dimuat dalam ceritera *babad*, namun tercatat dalam sumber-sumber Belanda.

Adipati Cakraningrat II yang sudah tua mengunjungi Madura pada tahun 1707, tetapi wafat di Kamal. Penggantinya tidak dapat segera diangkat, karena terjadi perebutan kekuasaan antara anak dan kemenakannya yang sama-sama merasa berhak atas kedudukan tersebut. Perselisihan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1715, ketika Pakubuwana I akhirnya mengangkat putra Cakraningrat II sebagai bupati dengan gelar Cakraningrat III. Kini, tidak seperti para pendahulunya, ia diperbolehkan memerintah langsung di Madura. Pusat pemerintahannya kala itu berada di Tonjung. Namun, selama kekuasaannya banyak kemelut terjadi; antara lain pemberontakan menantunya, yakni bupati Pamekasan yang bernama Adikara (Adikoro I). Selanjutnya, terjadi pula konflik dengan adiknya sendiri, Raden Tumenggung Aria Suraadiningrat (Tumenggung Suroadiningrat).

Bersamaan dengan itu, pecahlah pemberontakan melawan Mataram dan VOC yang dipimpin oleh Jayapuspita (Adipati Joyopuspito), bupati Surabaya. Cakraningrat diminta oleh Pakubuwana membantu memadamkan pemberontakan yang melanda wilayah tetangganya itu. Namun, karena sedang dilanda kemelut di daerah kekuasaannya sendiri, permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Cakraningrat. Kekeruhan tersebut dimanfaatkan oleh Tumenggung Suroadiningrat dengan memfitnah saudaranya. Ia melaporkan bahwa Cakraningrat sedang merencanakan pemberontakan melawan Mataram. Menyadari adanya gelagat yang kurang menguntungkan tersebut, Cakraningrat lari ke kapal VOC yang sedang berlabuh di Kamal guna meminta bantuan dan perlindungan. Tetapi terjadilah suatu insiden, karena Belanda telah berlaku kurang senonoh terhadap istrinya. Pecah keributan dan Cakraningrat membunuh kapten kapal tadi, tetapi ia kemudian mati dikeroyok dan jenazahnya dibuang ke laut. Pakubuwana II berterima kasih pada Suroadingrat dan mengangkatnya sebagai adipati baru dengan gelar Cakraningrat IV menggantikan kakaknya. Penguasa baru ini lalu memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya dari Tonjung ke Sambilangan.

Cakraningrat IV berniat membebaskan Madura dari kekuasaan Mataram. Karena itulah ia melakukan pendekatan dengan Belanda. Sebenarnya tindakan ini juga tidak membawa kemerdekaan penuh bagi negerinya, karena kelak setelah lepas dari

Mataram, Belanda justru tidak menepati janjinya. VOC sangat senang mendengar keinginan ini dan mencari saat yang tepat untuk mewujudkannya. Kesempatan yang dinantikan terjadi saat pecah pemberontakan orang-orang China semasa pemerintahan Pakubuwana II (1726–1749). Pemberontakan itu disulut oleh pembantaian orang-orang China di Batavia pada tahun 1740. Akibatnya, warga China yang berdomisili di berbagai bagian Pulau Jawa bangkit memberontak melawan Belanda. Banyak orang Belanda yang terbunuh di Jawa Tengah dan terjadi pula penjarahan serta pembakaran di kota-kota pelabuhan. Pakubuwana II awalnya mendukung dan memberikan bantuan bagi kaum pemberontak Tionghua. Bahkan, ia turut menghancurkan benteng VOC yang ada di Kartasura. Sedianya kehadiran benteng itu bertujuan melindungi Pakubuwana sendiri; tetapi lama-kelamaan ia merasa bahwa benteng tersebut hanya merupakan sarana VOC mengawasi dan memata-matai dirinya. Di tengah-tengah kondisi yang gawat ini, Belanda mengajak Cakraningrat IV ikut serta memadamkan kerusuhan tersebut. Sebagai imbalannya, ia akan diangkat oleh Belanda sebagai raja merdeka yang terlepas dari payung kekuasaan Mataram. Berkat bantuan Cakraningkrat beserta pasukan Maduranya, pesisir utara yang telah dikuasai pemberontak dapat direbut kembali dan kini pasukan gabungan VOC serta Madura mulai bergerak ke Kartasura. Menyaksikan kondisi itu, Pakubuwana II berbalik mendukung Belanda. Oleh karenanya, rakyat yang berjuang bersama orang China melawan Belanda menjadi marah dan menggempur serta membakar istana. Mereka lalu mendudukkan Mas Garendi (putra Amangkurat III) sebagai raja baru dengan gelar Amangkurat IV (juga dikenal dengan sebutan Sunan Kuning). Tidak lama kemudian pasukan gabungan dapat merebut kembali ibu kota dan menumpas kaum pemberontak. Mataram harus membayar mahal kepada VOC atas "bantuan" mereka memadamkan pemberontakan tersebut dengan menyerahkan seluruh daerah pantai utara Jawa beserta Madura Barat pada tahun 1743.

Meskipun telah menjadi penguasa seluruh Madura, Belanda tidak menepati janjinya pada Cakraningrat, yang saat itu masih menduduki pantai Jawa Timur bagian utara. Oleh karenanya, Cakraningrat kini berbalik melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC, seperti Sedayu, Lasem, Lamongan, Rembang, dan kawasan pantai utara lainnya yang diperkuatnya dengan tentara dari Bali. Meskipun demikian, keunggulan Cakraningrat ini tidak berlangsung selamanya. Keadaan berubah ketika pasukan Cakraningrat secara terus-menerus

dikalahkan oleh Belanda. Perpecahan timbul ketika para bupati di wilayah yang ditaklukan mulai memusuhinya, termasuk putranya sendiri yang menjabat sebagai bupati Sedayu. Karena terus terdesak Cakraningrat terpaksa melarikan diri pada tahun 1745 ke Banjarmasin. Namun, Banjarmasin menyerahkannya pada VOC yang lantas mengasingkan Cakraningrat ke Tanjung Harapan (Kaap de Goede Hoop). Mantan bupati Madura itu wafat pada tahun 1753 di sana. Itulah sebabnya, ia juga disebut Pangeran Sedingkap (Pangeran yang mangkat di Kaap).

Sebagai pengganti Cakraningrat, Belanda mengangkat bupati Sedayu, putra Cakraningrat, dengan gelar Raden Adipati Setiadiningrat (Setyoadiningrat). Sama seperti penguasa lainnya, ia diharuskan menandatangani kontrak politik dengan Belanda serta menikrarkan kesetiaannya. Demi menarik hati Setiadiningrat, Belanda menaikkan gelarnya menjadi pangeran pada tahun 1747. Pada saat yang sama, ibukota kadipaten dipindahkan dari Sambilangan ke Bangkalan, tak jauh dari sebuah benteng VOC. Belanda kerap pula meminta bantuannya memadamkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah kekuasaan mereka lainnya.

Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah pemberontakan Ke Lesap (Pa Lesap) pada tahun 1750. Tokoh ini katanya merupakan anak hasil hubungan gelap antara Setiadiningrat dengan seorang gadis desa. Ketika dewasa, ia diberitahu ibunya mengenai siapa ayahnya yang sebenarnya; sehingga merasa berhak menuntut kehormatan yang pantas diperolehnya sebagai anak bupati. Ke Lesap merupakan seorang yang gemar bertapa dan terkenal pandai mengobati penyakit serta dekat dengan rakyat kecil. Kendati Bupati Setiadiningrat tidak mau mengakuinya sebagai anak, ia diberi juga daerah kekuasaan yang meliputi beberapa desa. Karena masih belum puas dengan perolehannya itu, ia melarikan diri ke daerah pegunungan di Sumenep. Pengikutnya semakin banyak, karena rakyat tampaknya yakin dengan kesaktiannya serta melihat dirinya sebagai calon pemimpin yang sanggup memimpin mereka melawan Belanda.

Setelah waktunya dirasa tepat, Ke Lesap menerbitkan pemberontakan dan mengalahkan bupati Sumenep, yang lantas melarikan diri ke Surabaya. Kemudian ia bergerak menuju Pamekasan dan mengalahkan serta membunuh bupati Adikara IV yang sekaligus merupakan menantu Setiadiningrat. Serangan lalu diarahkannya ke Bangkalan dan sanggup meluluh-lantakan pertahanan Setiadiningrat, sehingga yang bersangkutan terpaksa meminta suaka ke benteng VOC. Kemenangan yang diraihnya

dengan relatif mudah itu menjadikan Ke Lesap lupa diri. Ia hanyut dalam kesenangan dan terjebak tipu muslihat musuhnya. Ke Lesap bermabuk-mabukan bersama seorang wanita nakal yang katanya dikirim oleh musuhnya guna membatalkan ilmu yang dimilikinya. Akibat sikapnya yang lupa diri itu, Ke Lesap dapat dibunuh oleh musuh-musuhnya dan pemberontakan berhasil dipadamkan[113].

Belanda semakin mempercayai Setiadiningrat, sehingga pada tahun 1762, pangkatnya dinaikkan dan dianugerahi gelar Cakraningrat (Cakraadiningrat atau Cokroadiningrat V. Ia pernah membantu Belanda menumpas pemberontakan di Blambangan yang meletus pada 1764–1767. Perang ini banyak menghabiskan penduduk daerah tersebut yang lalu diisi dengan orang Madura. Karena jasanya dalam membantu VOC, Cakraningrat V diangkat pula sebagai bupati Madura dan pantai utara Jawa Timur, hingga wafatnya di tahun 1770.

Secara administratif, Belanda membedakan pengelolaan pemerintahan berbagai bagian Pulau Madura yang telah dikuasainya secara utuh itu. Bagi daerah Madura barat, penguasanya, yakni Cakradiningrat V, dianggap sebagai raja yang berada di bawah perlindungan VOC. Oleh karenanya, kontrak politik yang ditanda-tanganinya disahkan dengan melibatkan gubernur jenderal di Batavia. Sementara itu, penguasa Sumenep dan Pemekasan hanya dianggap setingkat bupati swapraja saja, sehingga penanda-tanganan kontrak politik mereka cukup disaksikan oleh perwakilan dagang VOC setempat. Kini VOC boleh dikatakan menggantikan kedudukan Mataram selaku atasan para penguasa Madura. Bedanya, di bawah VOC para penguasa Madura diwajibkan menandatangani suatu kontrak politik yang menjamin kesetian mereka terhadap penjajah. VOC juga bebas mengangkat siapa saja sebagai pengganti raja atau bupati bawahan. Dengan kata lain, keturunan para penguasa itu belum tentu mewarisi jabatan ayahnya.

VOC berhak pula memungut upeti atau mewajibkan rakyat mengikuti kerja paksa (rodi). Selain itu, mereka juga berhak menuntut para penguasa pribumi mengirimkan

---

113. Seperti Joko Tole, Ke Lesap juga merupakan tokoh legendaris di Madura. Berbagai kisah hidupnya dianggap menjadi asal-muasal nama-nama tempat di Madura. Konon saat tiba di suatu tempat, ia disambut orang dengan payung tertutup (*songsong ennep*); itulah sebab itu tempat itu kemudian disebut Songennep atau Sumenep. Konon sebelum terbunuh, Ke Lesap menurut ceritera rakyat pernah mengeluarkan kutukan yang meramalkan kedatangan balatentara Jepang: "*Gu'-laggu' bakal dateng bala parjurit akalambi kalaras abul-ombul are dari mordaya kaangguy males tang pate*" (Kelak akan datang bala tentara dari timur laut berbaju dedaunan kering serta berpanji-panji matahari terbit untuk membalas kematianku)–lihat *Lintasan Sejarah Madura*, halaman 69. Pasukan Jepang saat menyerang menyamarkan dirinya dengan dedaunan kering, itulah barangkali yang dimaksud dengan "berbaju dedaunan kering."

pasukannya guna membantu mereka. Pungutan upeti yang mereka bebankan pada rakyat juga kerap menimbulkan penderitaan karena tumpang tindih dengan penguasa setempat. Ada dua jenis upeti yang harus dibayarkan rakyat. Yang pertama disebut, *contingenten*; yakni upeti yang harus diserahkan kepada VOC tanpa pembayaran apapun. Berikutnya adalah upeti yang disebut *verplichte leveranties* (secara harafiah berarti "penyerahan wajib"); yakni pungutan berupa hasil bumi dengan jumlah dan harga yang ditetapkan Belanda.

Menjelang pertengahan abad ke-18, seorang tokoh bernama Bendara Saud (yang konon keturunan Raden Pamekas) diangkat sebagai bupati Sumenep. Dalam kontrak politik yang ditanda-tanganinya saat diangkat sebagai bupati pada tahun 1751, ia diwajibkan menyerahkan upeti dari daerahnya sebagai berikut:

- 30 *pikul* (30 x 60 kg) gula siwalan
- 80 *koyan* (80 x 30 pikul) kacang hijau
- 700 *takar* (700 x 25 liter) minyak kelapa
- 30 *pikul* dendeng sapi
- 10 ekor ikan kakap (*bangbangan*) kering
- 20 pikul benang kapas halus[114]

Adanya pungutan-pungutan semacam ini juga menguntungkan bupati, sehingga pengganti Bendara Saud berhasil membangun istana kadipaten pada tahun 1763 serta masjid jami' Sumenep pada tahun 1781 yang megah. Kendati demikian, yang memperoleh keuntungan jauh lebih besar adalah VOC; yakni dari hasil penarikan upeti semacam itu dari seluruh penjuru Kepulauan Nusantara yang telah mereka kuasai. VOC membangun kantor perwakilan yang jauh lebih megah di depan istana kadipaten. Selama era abad ke-17 dan 18, VOC benar-benar mencapai puncak kemakmurannya. Namun adanya korupsi yang meraja lela di dalamnya menjadikan perusahaan dagang Belanda itu mengalami kebangkrutan; sehingga akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kini daerah-daerah yang dahulu dikuasai VOC, termasuk Madura, diambil alih oleh pemerintah Belanda secara langsung.

e. Madura pada zaman pemerintahan Belanda secara langsung

Setelah bubarnya VOC, Madura menjadi jajahan suatu negara kolonial. Dampak perubahan ini tidak begitu terasa. Para bupati dan penguasa masih diwajibkan

114. *Lintasan Sejarah Madura*, halaman 47.

menandatangani perjanjian politik. Ketika putra Adipati Cakraningrat VII diangkat sebagai bupati Pamekasan pada tahun 1804, ia juga harus menandatangani perjanjian yang sama seperti pendahulunya. Bedanya kalau dulu dengan VOC, kini dengan pemerintah Belanda. Hal yang sama berlaku pula dengan Natakusuma yang diangkat sebagai bupati Sumenep pada tahun 1805.

Suasana perubahan baru terjadi ketika Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Waktu itu Belanda berada di bawah jajahan Perancis dan ia diserahi tugas oleh Raja Louis Napoleon untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris (musuh bebuyutan Perancis). Oleh karena itu, Daendels merasa perlu menciptakan suatu birokrasi yang dianggapnya lebih baik dengan merombak tatanan lama yang sudah ada. Para raja kini diperlakukannya benar-benar sebagai taklukan. Meskipun demikian, karena Bangkalan yang dipimpin Cakraningrat VII ikut berjasa mempertahankan Cilincing dari serangan pasukan Inggris, Daendels menerapkan sikap yang berbeda terhadap penguasa Madura tersebut dan bahkan mengangkatnya sebagai sultan dengan gelar Cakraadiningrat I. Oleh karenanya, Madura barat statusnya berubah menjadi kesultanan. Jasa lainnya terhadap Belanda adalah bantuannya dalam memadamkan pemberontakan di Cirebon pada 1806 dan demikian pula dengan pergolakan di Yogyakarta. Daendels menghadiahkan pula sebuah kereta kebesaran padanya.

Karena kekuatan armadanya, pada tahun 1811 Inggris berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai penguasa baru atas Jawa dan Madura diangkat Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles yang banyak melakukan perubahan pula terhadap tatanan pemerintahan di Kepulauan Nusantara. Ia menerapkan peraturan bahwa kendaraan harus berjalan pada sisi kiri jalan yang masih berlaku hingga sekarang. Raffles menghapuskan berbagai pungutan upeti yang dirasanya tidak adil dan menggantinya dengan pajak tanah (*landrent*). Kendati demikian, Madura dikecualikan dari pembayaran pajak semacam ini. Karena ingin melakukan perbaikan terhadap perekonomian di Madura, Raffles menghapuskan monopoli garam di sana pada tahun 1813. Dengan demikian, penghasilan utama pemerintah kolonial Inggris tidak lagi berasal dari monopoli hasil bumi, sebagaimana halnya VOC atau pemerintah kolonial Belanda. Berbeda dengan kebijaksanaan Belanda, Raffles ingin agar Kepulauan Nusantara dapat menjadi pangsa pasar bagi hasil industri Inggris.

Sehubungan dengan para penguasa Madura, Raffles menaikkan jabatan mereka. Bupati Sumenep dan Pamekasan diangkatnya menjadi raja yang setingkat dengan sultan di Bangkalan (Madura Barat) atau sunan dan sultan di Surakarta serta Yogyakarta. Hal ini dilakukannya, antara lain karena Panembahan Sumenep memiliki pengetahuan luas mengenai kebudayaan Jawa kuno, sehingga banyak membantunya dalam penyusunan buku *History of Java*. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan bahasa Jawa di kalangan bangsawan Madura.

Pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara dikembalikan pada pemerintah Belanda. Beberapa gagasan Raffles terlalu progresif bagi zamannya, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Tetapi sebagian pembaharuan yang dicanangkannya diteruskan oleh pemerintah Belanda. Penguasa Sumenep yang telah dinaikkan jabatannya oleh Raffles dikukuhkan sebagai sultan oleh Belanda pada tahun 1825. Ini berlaku pula dengan bupati Pamekasan yang disahkan sebagai panembahan pada tahun 1829. Terdapat pula indikasi bahwa kenaikan jabatan ini dilakukan dengan menyuap pegawai pemerintah Belanda. Korupnya pegawai VOC juga berlaku pada zaman pemerintahan langsung oleh Raja Belanda.

Pada sisi lain, pengangkatan mereka sebagai sultan dan panembahan itu juga menguntungkan Belanda, karena memudahkan Belanda mendapatkan bantuan yang sangat mereka perlukan guna memadamkan berbagai pergolakan dan pemberontakan. Sebagai contoh, pada tahun 1824, pasukan Bangkalan yang terdiri dari 900 prajurit bersenapan, 600 penombak, serta 80 pasukan berkuda dikirim ke Bone demi mematahkan pergolakan yang terjadi di sana. Dalam perang Diponegoro, pasukan Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan juga kerap diminta membantu Belanda.

Semenjak saat itu, prajurit-prajurit Madura makin tersohor keberaniannya. Berbagai bintang jasa Kerajaan Belanda dianugerahkan pada para panglima perang Madura. Sebagai penghargaan terhadap raja-raja Madura yang berjasa mengerahkan rakyatnya itu, Belanda menganugerahkan gelar panglima tinggi tituler. Selanjutnya, Belanda membentuk Korps Barisan di setiap kerajaan Madura. Mereka ini yang kemudian dikerahkan melawan bangsanya sendiri, seperti pada peperangan di Jambi (1833), Minangkabau (1836), Bali (1844), Aceh (1873), dan lain sebagainya.

Meskipun dibebaskan dari kewajiban tanam paksa, rakyat Madura dibebani kewajiban-kewajiban lainnya, baik demi kepentingan rajanya maupun Belanda. Ada sebagian rakyat yang diwajibkan mengerjakan tanah pertanian milik raja, bekerja

bakti membersihkan halaman istana, atau melayani di dapur raja. Masing-masing desa juga dibebani kewajibannya sendiri-sendiri. Ada yang diwajibkan menyerahkan beras dengan jenis dan jumlah tertentu. Ada pula desa yang dikhususkan sebagai penghasil minyak kelapa. Lebih jauh lagi, masih ada orang-orang yang wajib melayani kepentingan dalam kemiliteran. Oleh karena sistem yang memberatkan rakyat ini, banyak orang Madura yang merantau ke luar daerahnya.

Di lain pihak, kaum bangsawan hidup dalam kemewahan, yang barangkali bertujuan menutupi rasa rendah diri mereka di hadapan penjajah. Mereka berupaya merekrut sebanyak mungkin pelayan atau pengikut. Kaum bangsawan merasa bangga pula apabila dapat memiliki pengawal atau pembantu pribadi orang Belanda. Padahal sebagian pengawal atau pembantu pribadi tadi kerap berfungsi sebagai mata-mata. Sebagai contoh adalah penguasa Sumenep yang memperkerjakan seorang Belanda bernama L. Andre sebagai pemegang keuangannya. Sultan Bangkalan ke-2 mempunyai seorang perwira Belanda bernama Toontje Poland sebagai pengawal pribadinya. Saat pernikahan putrinya dengan Pakubuwana VII dari Surakarta pada tahun 1832, perwira Belanda ini turut mengawal putrinya tersebut.

f. Berakhirnya status swapraja (zelfstandig) di Madura

Berbagai kemewahan di atas memperlihatkan bahwa para penguasa gagal menampilkan kekuasaan mereka dalam politik dan ekonomi karena semua itu dikendalikan oleh kaum penjajah. Oleh karenanya, untuk membebaskan diri mereka dari rasa tertekan itu adalah dengan menggelar upacara yang mewah serta besar-besaran. Namun, tindakan semacam ini justru membuat beban hutang mereka semakin berat. Kendati upacara itu katanya untuk menyenangkan dan menghibur rakyat; namun pada kenyataannya justru menyengsarakan serta membebani rakyat. Belanda sendiri diuntungkan dengan pemberian status pemerintah swapraja bagi para penguasa Madura tersebut, karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang guna menyelenggarakan suatu sistem birokrasi di sana. Selain itu, Belanda juga seolah-olah dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam menindas terhadap rakyat, karena mereka tidak terlibat langsung di dalamnya. Belanda tampaknya hanya mempertahankan suatu sistem yang telah lama ada sebelumnya saja. Memang pada kenyataannya dalam sistem ini, Belanda tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Mereka hanya berurusan dengan para raja atau panembahan saja. Seterusnya, para penguasa lokal itu yang berhubungan dengan rakyatnya, sebagai kepanjangan tangan Belanda.

Kesengsaraan rakyat ini sampai ke telinga kaum liberal di Belanda yang memikirkan masalah etis. Mereka mengeluarkan kritikan yang keras terhadap sistem tersebut; sehingga pemerintah Belanda mulai mempertimbangkan lagi penerapan sistem swapraja di Madura dan menghapus sedikit demi sedikit kekuasaan para raja beserta panembahan Madura. Tatkala penguasa Pamekasan wafat pada tahun 1842, kesempatan itu dipergunakan Belanda menghembuskan angin perubahan. Penggantinya yakni Pangeran Suriakusuma dibiarkan mengambang kedudukannya. Selama 15 tahun menjabat, kontrak politiknya tidak juga disahkan oleh Belanda. Selanjutnya, penerus takhta Sumenep, Sultan Pakunataningrat (1811–1854) diturunkan jabatannya menjadi panembahan saja. Seorang residen khusus Madura ditempatkan di pulau tersebut semenjak 1857 dan setahun kemudian sistem swapraja di Pamekasan dihapuskan. Wilayah itu seterusnya diperintah langsung oleh Belanda dan kepalanya diturunkan statusnya sebagai bupati (*regent*) biasa yang digaji oleh pemerintah kolonial.

Belanda mengambil kesempatan menerapkan sistem baru ini di kerajaan Madura lainnya dengan menunggu hingga penguasanya wafat. Pengganti Panembahan Natakusuma II yang wafat pada 1879 tidak langsung diangkat. Ia baru ditunjuk sebagai bupati biasa pada tahun 1883 dan tidak menikmati status sebagai penguasa berswaparaja seperti ayahnya. Daerah kekuasaan Madura barat yang beribu kota di Bangkalan semakin dipersempit, yakni dengan diambilnya wilayah Sampang pada tahun 1863. Bangkalan baru berakhir status swaprajanya pada tahun 1885. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan di Madura berakhir sudah dan selanjutnya berubah menjadi kabupaten yang masing-masing dipimpin oleh para bupati selaku pegawai pemerintah Belanda. Perubahan ini secara lambat laun mengikis sistem feodal di Madura. Rakyat tentu saja menuai keuntungan dari kebijaksanaan tersebut. Mereka tidak lagi terbebani keharusan menanggung kehidupan para penguasanya itu.

g. Sistem pemerintahan

Madura sesungguhnya merupakan suatu kabupaten pada zaman Mataram, VOC, ataupun Belanda. Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi tiga; yakni: Madura Barat (kerap disebut Madura saja) yang ibukotanya terakhir berada di Bangkalan dan Madura Timur (terdiri dari Pamekasan beserta Sumenep). Para bupati ini pernah dinaikkan jabatannya oleh Inggris dan Belanda menjadi setingkat sultan. Dengan demikian, mereka tidak dapat disetarakan dengan bupati bawahan

biasa dan boleh dianggap sebagai seorang raja atau panembahan (bupati yang dirajakan; Belanda: *vorstelijke regent*). Kedudukannya setingkat dengan negara sekutu yang merdeka (*onafhankelijke bondgenoten*) dan tidak bergantung pada pemerintah Belanda. Demikianlah kedudukan para penguasa Madura menurut hukum ketatanegaraan Belanda, sebelum posisi mereka diturunkan sebagai bupati biasa pada abad ke-19.

Namun bila kita cermati lagi, sebagaimana halnya penguasa swapraja lain di kepulauan nusantara, kemerdekaan itu hanya bersifat semu. Ketergantungan para penguasanya terhadap Belanda sungguh besar. Meskipun secara status disebut *onafhankelijke* atau "tidak bergantung," namun para penguasa Madura di atas tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan pihak asing dan harus melalui perantaraan pemerintah Belanda. Apabila terjadi pertikaian antara sesamanya, mereka harus patuh pada keputusan apapun yang diambil pemerintah Belanda. Kekuasaan dalam hal peradilan juga dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian, meski menyandang gelar sultan atau panembahan para bupati ini masih menikmati kedaulatan yang terbatas. Bahkan dalam hal mengangkat pembesar atau patih kerajaan (*rijkbestuurder*) pun mereka harus meminta persetujuan Belanda.

h. Ekonomi dan sosial kemasyarakatan

Madura merupakan pulau penghasil garam semenjak zaman dahulu. Hal ini diperkuat pula oleh berita China, yakni *Xingcha Shenglan* (1436), yang berasal dari Dinasti Ming. Pulau Madura yang ditransliterasi menjadi *zhòngjiāluó* (重迦羅), telah disebutkan sebagai penghasil garam dengan cara menguapkan air laut[115]. Pemerintah Belanda membangun pabrik garam modern di Kalianget, yang mutunya juga disesuaikan dengan kebutuhan saat itu; umpamanya dengan menambahkan kandungan yodium. Madura bertanah tandus; sehingga pada zaman pemerintahan kolonial Belanda beras harus didatangkan dari luar. Pertandingan yang khas Madura adalah karapan sapi, yang konon disempurnakan oleh Kanduruwan. Sapi Madura sendiri berukuran kecil, berdaging sedikit, dan tidak banyak menghasilkan susu. Meskipun demikian, sapi jenis ini yang cocok diperkerjakan di alam Madura yang keras. Oleh karenanya, ada ahli peternakan yang menyatakan bahwa sapi Madura

115. Lihat buku *Nusantara dalam Catatan Tionghua*, halaman 78-79. Menurut catatan tersebut, Madura mengekspor antilop, burung nuri, kapas, kelapa, dan kain kasa katun. Sedangkan barang-barang yang diimpor adalah perak serta kain sutra bermotif bunga-bungaan.

merupakan varietas khusus, sehingga sapi dari luar tidak boleh didatangkan agar tidak merusak keturunannya yang murni.

Agama Islam mempunyai pengaruh kuat bagi masyarakat Madura. Umumnya mereka telah mendapatkan pendidikan dasar agama Islam semenjak usia dini. Pendidikan itu diselenggarakan melalui pengajian di surau atau mesjid-mesjid yang ada di tiap kampung. Bagi yang ingin mendapatkan pengetahuan tingkat lanjut dapat berguru pada berbagai pondok pesantren. Pada akhir abad ke-19, terdapat pondok pesantren terkemuka di Kademangan, dekat Bangkalan, yang diasuh oleh Kyai Haji Mohammad Khalil. Para santri beliau berasal dari berbagai penjuru Jawa dan banyak di antara mereka yang kelak menjadi tokoh terkenal, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri pondok pesantren di Tebuireng. Di tengah-tengah masyarakat Madura, kepercayaan lama sebelum masuknya Islam masih tampak pula jejaknya, seperti pemberian sesaji di tempat-tempat yang dianggap angker.

Karapan Sapi
(foto dibuat pada tahun 1913)
Sumber: http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/album/144 9jpg

i. Kesusastraan

Penggunaan bahasa Jawa di kalangan keraton Madura menjadikan bahasa Madura sendiri tersisihkan, sehingga tidak banyak karya sastra dalam bahasa ini. Karya-karya bahasa Madura yang berasal dari masa kemudian, seperti *Bangsacara ban Ragapadmi*, *Tanda Anggrek ban Tanda Serap*, *Radin Sagara*, *Caretana Barakay*, dan *Jaka Tole*, biasanya merupakan pengembangan dari karya-karya yang lebih tua. Dengan demikian, terkadang di dalamnya terdapat ketidak sesuaian waktu (anakronisme) sehubungan dengan pengisahannya. Umpamanya kisah-kisah zaman Hindu yang dicangkokkan pada masa Islam, sehingga nampak berbagai kejanggalan.

Buku-buku berbahasa Madura yang diterbitkan juga masih sedikit. Tokoh bernama A.C. Vreede berjasa besar dalam mengumpulkan ceritera-ceritera rakyat Madura. Berbagai karya sastra asing diterjemahkan ke dalam bahasa Madura pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20; seperti *Robinson Crusoe*, *Gulliver*, *Sam Pek Eng Tay*, dan lain sebagainya. Dengan demikian, para siswa di Madura mulai mengenal kisah-kisah asing tersebut. Pihak misionaris menerjemahkan pula Injil dalam bahasa Madura yang diberi judul *Careta Saratos Empa'*.

Sebagai wujud lebih jauh kepedulian terhadap bahasa Madura, H. N. Kiliaan menyusun kamus bahasa Madura. Interaksi dengan penjajah memperkaya bahasa Madura dengan berbagai kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda, seperti *sakola* (*school*), *bunces* (*boontjes*), *gadringan* (*vergadering*), dan lain sebagainya. Sementara itu, dari bangsa Portugis, bahasa Madura menyerap kata-kata seperti *calana*, *mandira*, dan *jandila*.

II. Perkembangan kerajaan-kerajaan di Madura

a. BANGKALAN

Cikal-bakal para penguasa Bangkalan adalah Kyai Pragalbo (gelar: Pangeran Palakaran) yang memerintah di Arosbaja. Pangeran Palakaran memiliki tiga orang istri, yakni Nyai Angsuko yang berasal dari Proppo (Pamekasan), Nyai Padopo yang juga berasal dari Proppo, serta Nyai Ageng Mamah, yang berasal dari Madekan (Sampang). Agar lebih mudah diikuti, para keturunan Pangeran Palakaran dengan masing-masing istrinya akan disajikan dalam bentuk silsilah berikut ini:

Nyai Angsuko x Pangeran Palakaran x Nyai Ageng Mamah

x

Nyai Padopo

1. Kyai Pratanau

2. Kyai Prakoso (Pangeran Welaran)

3. Kyai Pranoto (Pangeran Tanjungpuro)

Pangeran Malojo

Pangeran Jungabaringin
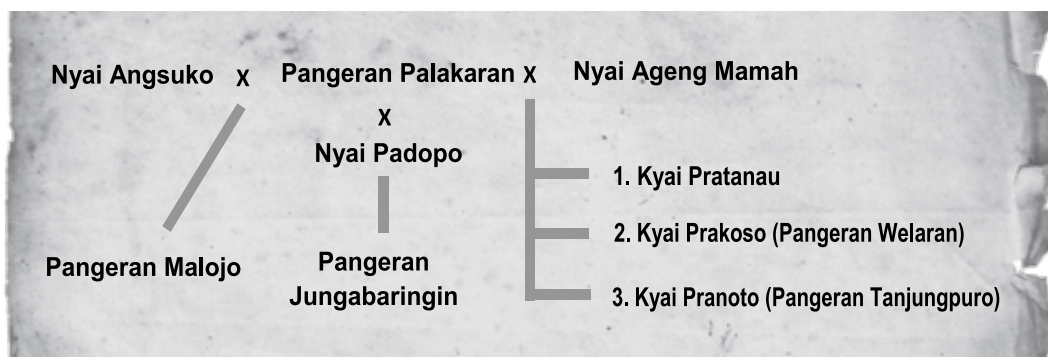
Kyai Pratanu ini dicalonkan sebagai pengganti ayahnya. Konon suatu ketika, Pratanu bermimpi didatangi seseorang yang mengaku bernama Sayid Magrabi. Dalam mimpinya itu, Pratanu diperintahkan menganut agama Islam dan berguru pada Sunan Kudus. Setelah dua kali mengalami mimpi yang sama, Pratanu memberitahukan hal ini pada orang tuanya. Pangeran Palakaran mengutus patihnya bernama Empu Bageno guna mempelajari seluk beluk agama Islam pada Sunan Kudus. Empu Bageno lantas memeluk agama Islam dan setelah cukup menimba ilmu, pulanglah ia ke Arosbaja. Pratanu kemudian turut menganut agama Islam dan mengizinkan penyiarannya ke tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, Pangeran Palakaran baru bersedia mengucapkan kalimat syahadat sesaat sebelum ajal menjemputnya. Karena sudah tak dapat berkata-kata lagi, Palakaran harus dituntun mengucapkannya dan ia hanya membalasnya dengan anggukan kepala saja. Oleh karenanya, Pangeran Palakaran dikenal pula sebagai Pangeran Islam Onggu'.

Sepeninggal Palakaran pada 1531, Pratanu menggantikan ayahnya dengan gelar Panembahan Lemah Duwur (1531–1592). Beliau menikah dengan putri sultan Pajang dan dikarunai putra beserta putri yang masing-masing bernama: Pangeran Sidhing Gili, Raden Koro (Pangeran Tengah), Pangeran Blega, Raden Mas Pasuruan, dan Ratu Ayu. Lembah Duwur meninggal pada 1592, yang konon diakibatkan oleh sakit bisul di punggungnya. Ia digantikan oleh putranya–Raden Koro (Kara)– yang juga digelari Pangeran Tengah (1592–1621). Semasa pemerintahannya terjadi perselisihan dengan Blega yang diperintah oleh saudaranya, Pangeran Blega. Saat itu, Blega tak mau lagi mengakui kekuasaan Pangeran Tengah yang berkedudukan di Arosbaja. Meskipun demikian, Blega akhirnya bersedia tunduk lagi pada Pangeran Tengah.

Pada 6 Desember 1596 terjadilah kontak dengan bangsa Eropa. Empat kapal Belanda yang masing-masing bernama *Mauritius*, *Hollandia*, *Amsterdam*, dan *Duyfken*,

merapat di Arosbaja. Pangeran Tengah menyambut mereka dengan baik dan mengutus patihnya bernama Kyai Ronggo beserta penghulu Arosbaja bergelar Pangeran Mussarip naik ke atas kapal. Para awak kapal Belanda yang sebelumnya pernah dirampok di Sidayu menjadi curiga terhadap kedatangan rombongan pejabat Arosbaja beserta pengikutnya. Terjadi kesalah-pahaman yang berujung pada pertengkaran antara kedua belah pihak. Akibatnya, Kyai Ronggo dan Pangeran Mussarip menemui ajalnya. Setelah terjadinya insiden ini, awak-awak kapal Belanda bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Dua buah kapal dagang Belanda di bawah pimpinan van Neck yang masing-masing bernama Warwijck dan Heemskerck singgah lagi di Arosbaja pada 5 Februari 1597. Kendati demikian, para pemuka Arosbaja masih mengingat pengalaman buruk sebelumnya dengan orang-orang Belanda. Mereka lantas merampok, membunuh, dan menawan awak kapal. Setelah membayar tebusan sebesar 2.000 Real barulah para tawanan dibebaskan kembali dan dua kapal Belanda di atas diperkenankan meninggalkan Arosbaja pada 14 Februari 1597.

Pangeran Tengah mangkat pada 1621. Karena Raden Praseno–putranya –masih kecil, roda pemerintahan Arosbaja dijalankan oleh saudara Pangeran Tengah bernama Pangeran Mas (1621–1624). Sementara itu, Praseno beserta ibunya pindah ke Madekan dan menjadi adipati Sampang. Semasa pemerintahan Pangeran Tengah, Sultan Agung menaklukkan Mataram. Raden Praseno diangkat sebagai penguasa seluruh Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat I (1624–1647). Meskipun demikian, kedudukan ini adalah jabatan kosong semata, karena Praseno harus berkedudukan di Mataram dan bukannya Madura.

Menurut penuturan ceritera rakyat, Ratu Ibu, istri Raden Praseno, pernah bertapa dan dijumpai oleh Nabi Hedir yang menanyakan apa keinginannya[116]. Ratu Ibu menjawab bahwa ia mengharapkan tujuh keturunannya dapat menjadi raja. Nabi Hedir bersedia mengajukan permohonan tersebut pada Tuhan. Setelah itu, Ratu Ibu melaporkan segenap pengalamannya pada suaminya, yang begitu mendengarnya nampak merasa kurang puas. Ternyata Raden Praseno menyayangkan mengapa istrinya hanya mohon tujuh keturunan saja. Atas izin suaminya, Ratu Ibu melanjutkan tapanya di Aermata, Bangkalan, hingga meninggal. Sebelum wafat, istri Raden Praseno ini

116. Lihat *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, halaman 84.

mengatakan bahwa sesudah tujuh keturunan akan kembali sebagaimana asalnya. Namun tak seorangpun mengetahui secara pasti makna ungkapan ini.

Saudara Amangkurat I bernama Pangeran Alit berniat merebut kekuasaan. Ia beserta pengikutnya bersiap memasuki istana dan membunuh Amangkurat I. Di pintu gerbang istana, mereka berjumpa dengan Raden Praseno yang sedang mengawasi pekerjaan membakar batu. Dengan lemah lembut, Raden Praseno membujuk Pangeran Alit agar mengurungkan niatnya. Ia memegang kekang kuda yang ditunggangi Pangeran Alit dan bermaksud memutar arahnya. Tanpa dinyana-nyana Pangeran Alit mencabut kerisnya dan menikam Raden Praseno hingga tewas. Salah seorang putra Raden Praseno bernama Raden Ario Atmojanagoro menyaksikan pembunuhan ayahnya. Ia segera maju menghadapi Pangeran Alit, sehingga keduanya terlibat perang tanding dan sama-sama tewas. Insiden ini terjadi pada tahun 1647[117].

Piring emas yang dihadiahkan oleh EIC (Inggris)
Sumber: *Madoera en zijn Vorstenhuis*, halaman 40

Raden Undakan menggantikan ayahnya yang terbunuh dengan gelar Cakraningrat II (1647–1707). Waktu itu, wilayahnya hanya terdiri dari Bangkalan dan Sampang

117. Sumber lain menyebutkan tahun 1648.

saja. Kedudukannya kemudian diwariskan pada Cakraningrat III (1707–1718) yang bermenantukan Adikoro I, penguasa Pamekasan. Suatu ketika terjadi pertengkaran keluarga, sehingga putri Cakraningrat III pulang ke rumah orang tuanya. Adikoro I menghadap mertuanya dan memohon izin agar diperkenankan membawa pulang istrinya. Tetapi, Cakraningrat III tidak mengizinkannya sehingga menimbulkan dendam kesumat dalam diri Adikoro I yang lantas menerbitkan perlawanan terhadap mertuanya.

Cakraningrat III memerintahkan saudaranya, Tumenggung Suroadiningrat memadamkan pemberontakan tersebut, tetapi ia malah berbalik memihak Adikoro I dan bermaksud merebut kekuasaan. Karenanya, Cakraningrat III terpaksa meminta bantuan Bali. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, kurang lebih bersamaan dengan peristiwa tersebut, bupati Surabaya bernama Joyopuspito memberontak terhadap kekuasaan VOC dan Mataram. Oleh karenanya, Mataram meminta bantuan Cakraningrat III memadamkan pemberontakan yang berlangsung di dekat wilayahnya itu. Tetapi karena kekuasaannya sendiri sedang terancam, Cakraningrat III tak dapat memenuhi permintaan Mataram. Tumenggung Suroadiningrat berupaya memancing di air keruh dan memfitnah saudaranya dengan mengirim laporan palsu bahwa Cakraningrat sedang merencanakan pemberontakan melawan Mataram dan bergabung dengan Adipati Joyopuspito.

Menyadari adanya gelagat yang kurang menguntungkan, Cakraningrat lari ke kapal VOC yang sedang berlabuh di Kamal guna meminta bantuan dan perlindungan. Kendati demikian, timbul insiden karena kapten kapal Belanda dianggap berlaku kurang senonoh terhadap istrinya. Sebenarnya ini hanya kesalah-pahaman, menurut adat kesopanan Belanda apabila menerima seorang istri pembesar, setelah berjabat tangan mereka akan menciumnya. Istri Cakraningrat yang tak mengetahui adat istiadat ini sangat marah dan memanggil suaminya. Pecah keributan dan Cakraningrat III membunuh kapten kapal tadi, tetapi ia kemudian mati dikeroyok dan jenazahnya dibuang ke laut (1718).

Pakubuwana II berterima kasih pada Suroadingrat dan mengangkatnya sebagai adipati baru dengan gelar Cakraningrat IV (1718–1745) menggantikan kakaknya. Setelah Madura aman kembali, Cakraningrat IV memimpin pasukannya ke Surabaya guna membantu Mataram. Tak berapa lama setelah itu, ia mendengar kabar bahwa pasukan Bali telah mendarat di Madura. Kedatangan mereka dimaksudkan memenuhi

permohonan bala bantuan yang sebelumnya telah dilayangkan Cakraningrat III di atas. Raden Ario Cokronegoro, adik Cakraningrat IV, diperintahkan memimpin pasukan menghalau laskar-laskar Bali. Ternyata, pasukan Bali dapat dikalahkan dengan mudah. Karena kagum terhadap kepandaian Raden Ario Cokronegoro, pemimpin pasukan Bali berniat mengangkatnya sebagai raja Madura. Tentu saja Cokronegoro sangat senang mendengarnya dan ia dinobatkan sebagai penguasa dengan gelar Pangeran Jimat. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan keraton Bangkalan, akibatnya sebagian dari mereka melarikan diri ke Surabaya, menjumpai Cakraningrat IV, dan melaporkan perkembangan yang terjadi.

Sesudah pergolakan di Surabaya dapat dipadamkan, Cakraningrat IV bertolak kembali ke Madura dan siap menyingkirkan Pangeran Jimat yang mengkhianati dirinya. Pangeran Jimat yang didukung oleh laskar Bali terpukul mundur di Mlaja dan akhirnya terpaksa melarikan diri ke Bali. Setelah Pangeran Jimat tersingkir, Cakraningrat IV dapat memerintah negerinya dengan tenang. Ketika meletus pemberontakan orang-orang China, Cakraningrat bersedia membantu Belanda memadamkan pemberontakan tersebut asalkan diberi daerah kekuasaan di belahan timur Pulau Jawa yang merdeka dari kekuasaan Mataram. Gubernur jenderal VOC pada mulanya menyetujui permintaan Cakraningrat ini. Pasukan Bangkalan dipecah menjadi dua guna menghadapi kaum pemberontak.

Pasukan pertama dipimpin oleh Raden Joyosudiro dan Raden Sirnomenggolo yang bergerak melalui Madiun. Sedangkan pasukan kedua bergerak menyusuri pantai utara Pulau Jawa di bawah pimpinan Raden Wasingsari. Pasukan pertama berhasil menghalau kaum pemberontak beserta Sunan Kuning ke arah Kedu. Sunan Pakubuwono II ingin menduduki kembali istananya, tetapi dihalangi oleh pasukan Madura. Mereka tidak memperkenankan Pakubuwono II memasuki keratonnya, sampai VOC memenuhi janjinya. Belanda yang kebingungan mengirim seorang kapten yang bersahabat dengan Cakraningrat dan membujuknya agar mengabulkan keinginan Pakubuwono II. Cakraningrat akhirnya menarik mundur pasukan Madura dari Kartasura. Bersamaan dengan itu, pasukan pemberontak berbalik lagi mengepung Kartasura, tetapi dapat dikalahkan oleh VOC. Sunan Kuning diasingkan ke Srilanka dan berakhir sudah pergolakan ini.

Adipati Cakraningrat IV menagih janji yang tak kunjung ditepati oleh Belanda. Beliau akhirnya mengatakan bahwa jika Belanda memang tak sanggup (atau memang

tak bersedia) memenuhi janjinya, ia hanya meminta Kabupaten Surabaya, Sumenep, dan Sidayu saja. Dengan catatan bahwa Sidayu selamanya akan diperintah oleh kaum keturunan beliau. Kedua putranya yang masing-masing bernama Raden Tumenggung Sosrodiningrat dan Raden Tumenggung Ronodiningrat diutus ke Batavia guna menyampaikan keinginan tersebut pada gubernur jenderal. Kendati demikian, upaya ini sia-sia saja karena VOC tak memberikan jawaban apapun. Karena kesal dengan Belanda yang telah ingkar janji, Cakraningrat lantas mengirim putranya bernama Raden Tumenggung Wirodiningrat ke Bengkulu dan meminta bantuan Inggris.

Akhirnya, Cakraningrat bertindak sendiri dengan mengirimkan pasukannya ke Sumenep di bawah pimpinan Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Laskar Sumenep yang dipimpin oleh bupatinya, Pangeran Cakranegara IV (Raden Alza atau Adza) berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Itulah sebabnya, ia dikenal pula sebagai Pangeran Lolos. Sisa-sisa pasukan dan pemuka Sumenep menyerah pada Raden Tumenggung Sosrodiningrat. Setelah kejatuhan Sumenep ini, Bangkalan menempatkan Raden Buka selaku wakilnya. Namun tak lama kemudian, ia dibunuh dan salah seorang pemimpin pasukan di sana diangkat sebagai bupati dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Sebagian pasukan Bangkalan dikirimkan pula menduduki Gresik yang dikomandoi oleh Mas Jiworono. Mereka dapat menunaikan tugasnya dengan mudah karena bupati Gresik sedang menghadap ke Kartasura.

Tumenggung Tirtonegoro melaporkan segenap perkembangan yang terjadi dan meminta perlindungan VOC. Belanda mengirimkan pasukannya ke Madura dan memulangkan Pangeran Lolos ke negerinya. Kini Bangkalan dikeroyok oleh pasukan gabungan yang terdiri dari Belanda, Sumenep (dipimpin Pangeran Lolos), dan Pamekasan (pimpinan Adikoro IV). Kendati demikian, pasukan gabungan ini mengalami kekalahan telak. Setelah bala bantuan didatangkan dari Batavia barulah Bangkalan terdesak, dan Cakraningrat IV menarik mundur pasukannya. Beliau kemudian menyingkir ke Banjarmasin, karena menyadari tipisnya peluang kemenangan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1745.

Putra Cakraningrat bernama Raden Tumenggung Suriadiningrat yang sebelumnya menjabat sebagai bupati Sedayu diangkat sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Raden Adipati Setiadiningrat (1746–1770). Sebagai bupati Sedayu yang baru diangkatlah adiknya bernama Tumenggung Joyodirejo. Belanda mengirimkan kapal perangnya ke Banjarmasin guna menangkap Cakraningrat IV. Mantan penguasa

Bangkalan ini lalu diasingkan ke Tanjung Harapan (Kaap de Goede Hoop) hingga wafatnya di tahun 1753. Karenanya, beliau juga digelari Pangeran Sedingkap (Pangeran yang mangkat di Kaap).

Raden Adipati Setiadiningrat memindahkan istananya dari Sambilangan ke Bangkalan pada tahun 1747. Bersamaan dengan itu VOC berniat mendirikan benteng pertahanan di Bangkalan guna mencegah para penguasa Madura menerbitkan pemberontakan melawan mereka. Demi menarik simpati Setiadiningrat, Belanda menaikkan gelarnya menjadi pangeran. Pada tahun 1750, bupati Surabaya–Raden Tumenggung Setyonegoro (Setianegara) menerbitkan pemberontakan melawan Belanda. Pangeran Adipati Setiadiningrat bersedia membantu VOC memadamkan pemberontakan di Surabaya asalkan kelak putra beliau diangkat sebagai bupati Surabaya. Persyaratan ini disanggupi oleh VOC. Meskipun demikian, ketika kerusuhan berhasil dipadamkan, alih-alih diangkat sebagai bupati Surabaya, putranya justru dijadikan bupati Sedayu.

Setelah ayahnya mangkat pada tahun 1753, Setiadiningrat meminta izin agar jenazah beliau boleh dipulangkan ke Bangkalan. Permintaan ini dikabulkan oleh Belanda. Semenjak tahun 1762, gelar Cakraningrat diubah menjadi Cakraadiningrat (Cokroadiningrat). Oleh karena itu, Setiadiningrat lantas menyandang gelar Cakraadiningrat V. Semasa pemerintahannya, Bangkalan berada dalam kondisi aman dan makmur. Beliau wafat pada 1770. Disebabkan banyaknya kekayaan yang dimiliki, beliau digelari pula sebagai Panembahan Sidho Mukti. Beliau digantikan oleh cucunya, Raden Tumenggung Mangkuadiningrat yang kemudian bergelar Panembahan Cakraadiningrat VI (1770–1780). Gelar lain beliau adalah Panembahan Tengah. Beliau mangkat pada 1780 dan dimakamkan di Aermata.

Sebagai penggantinya diangkat pamannya, Raden Tumenggung Ario Suroadiningrat, yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai bupati Sedayu dengan gelar Cakraadiningrat VII (1780–1815). Pemerintah kolonial Belanda pernah meminta bantuannya menghadapi serbuan Inggris. Menanggapi hal ini, Cakradiningrat mengutus putranya bernama Raden Tumenggung Mangkuadiningrat atau Raden Abdulkadirun memimpin 500 orang pasukan Bangkalan ke Batavia. Sebulan kemudian tibalah angkatan perang Inggris dan pasukan Madura dengan gagah berani menghalaunya. Berkat jasanya itu, Mangkudiningrat dinaikkan gelarnya menjadi pangeran dan memperoleh penghargaan berupa talam emas dari pemerintah kolonial.

Sepulangnya dari menunaikan tugas di Betawi, Pangeran Adipati Mangkudiningrat singgah di Semarang dan setelah itu berubah gelarnya menjadi Pangeran Adipati Setiadiningrat III. Berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial, beliau ditunjuk mewakili ayahnya, Cakradiningrat VII yang telah lanjut usianya.

Belanda kembali meminta bantuan Pangeran Adipati Setiadiningrat ketika pecah pemberontakan Raden Bagus Idum di Cirebon pada tahun 1806. Karena berhasil menunaikan tugasnya dengan gilang gemilang, Setiadiningrat memperoleh penghargaan berupa sebilah keris bertatahkan emas serta intan. Cakradiningrat VII dinaikkan kedudukannya menjadi sultan pada tahun 1808, yakni semasa pemerintahan Daendels. Gelar beliau semenjak saat itu adalah Sultan Cakradiningrat I. Daendels menghadiahkan sultan Bangkalan pertama itu sebuah kereta kebesaran. Kepulauan Nusantara berpindah tangan pada Inggris dan Sultan Cakraadiningrat I berniat membalas dendam pada Belanda yang pernah mengasingkan kakeknya ke Tanjung Harapan. Oleh karena itu, segenap pegawai pemerintah kolonial Belanda ditangkap dan diserahkannya pada Inggris. Cakraadiningrat I mangkat pada tahun 1815 dan dimakamkan di Aermata.

Pengganti beliau adalah Pangeran Adipati Setiadiningrat III yang diangkat oleh Raffles sebagai Sultan Cakraadiningrat II (1815–1847). Kekuasaan Inggris atas Kepulauan Nusantara tidak berlangsung lama dan Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816. Sewaktu pecah peperangan dengan Bone dan pemberontakan Diponegoro, Cakradiningrat diminta pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan dua orang putranya yang masing-masing bernama Pangeran Adipati Setiadiningrat IV dan Pangeran Suryoadingrat (Suriadiningrat). Selain itu, turut pula menantunya bernama Pangeran Atmojoadiningrat. Karena kecakapannya dalam memimpin peperangan, Pangeran Adipati Setiadiningrat dianugerahi pangkat kolonel. Pasukan Madura dilibatkan lagi dalam perang di Jambi pada 1833. Atas jasa-jasanya membantu pemerintah kolonial, Cakradiningrat II dianugerahi bintang emas. Beliau wafat pada 1847 setelah 34 tahun memerintah negerinya.

Pangeran Suryanegara (Pangeran Cakraadiningrat)
Bupati Bangkalan pertama
Sumber: *Madoera en zijn Vorstenhuis*, halaman 58

Putra beliau, Pangeran Adipati Setiadiningrat IV dinobatkan sebagai pengganti beliau, tetapi kali ini tidak bergelar sultan lagi melainkan panembahan. Dengan demikian, gelar beliau adalah Panembahan Cakraadiningrat VII (1847–1862). Semenjak saat itu, urusan kepolisian di Bangkalan diserahkan pada seorang asisten residen dan dibantu oleh masing-masing seorang *rijkbestuurder* dan *hoofd* jaksa. Kewajiban-kewajiban beliau selaku panembahan dituangkan dalam sebuah kontrak politik. Pada zamannya, Belanda dua kali meminta bantuan pasukan Bangkalan memadamkan perlawanan rakyat Bali. Panembahan Cakradiningrat VII mangkat pada tahun 1862 dan dikebumikan di belakang masjid Bangkalan.

Putra Cakradiningrat VII bernama Raden Ismail atau Pangeran Suryadikusuma (Suryoadikusumo) naik takhta menggantikan ayahnya dengan gelar Panembahan Cakradiningrat VIII (1862–1882). Karena menderita sakit, beliau diwakili oleh saudara dan sekaligus calon penggantinya bernama Raden Abdul Jamali yang bergelar Pangeran Adipati Pakuningrat. Pemerintah kolonial Belanda tiga kali meminta bantuan Madura dalam memadamkan perlawanan rakyat Aceh. Ketika itu, Bangkalan mengirimkan pasukan Barisan Bangkalan di bawah pimpinan Raden Demang Mayangkoro, keturunan Cakraningrat II. Karena kecakapan mereka dalam medan

peperangan di Aceh, Belanda menganugerahkan pangkat kolonel pada Cakraadiningrat VIII (1874) serta bintang penghargaan *Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw*. Raden Demang Mayangkoro juga tak ketinggalan memperoleh anugerah pangkat letnan kolonel dan bintang *Militaire Willemsorde 4e klas*.

Pangeran Adipati Pakuningrat
Sumber: *Madoera en zijn Vorstenhuis*, halaman 54

Panembahan Cakraadiningrat VIII mangkat pada tahun 1882 tanpa meninggalkan keturunan. Sementara itu, saudara beliau–Pangeran Adipati Pakuningrat–telah mendahului wafat pada 1879. Karena itu, pemerintah kolonial Belanda menghapuskan Kerajaan Bangkalan dan selanjutnya kawasan tersebut diperintah oleh bupati biasa. Sebagai bupati pertama di Bangkalan, Belanda mengangkat Raden Kasim (Hasim) atau Pangeran Suryanegara. Beliau masih kerabat Cakradiningrat VIII. Berdasarkan keputusan pemerintah kolonial tertanggal 22 Agustus 1885 no. 2/c ditetapkan berbagai kebijaksanaan baru:

- Status swapraja (*zelfbestuur*) di Madura dihapuskan dan wilayahnya dipecah menjadi dua kabupaten: Bangkalan dan Sampang. Pemerintah di kabupaten-kabupaten tersebut dijalankan oleh asisten residen.
- Tanah yang disediakan bagi pensiunan anggota legion Barisan Bangkalan dicabut.

- Tanah lungguh milik para bangsawan diambil alih oleh pemerintah kolonial dan sebagai gantinya mereka menerima uang ganti rugi.
- Menteri-menteri yang dicabut tanah lungguhnya akan menerima uang tunjangan (*onderstand*).
- Perlengkapan kebesaran para penguasa Bangkalan diambil alih oleh pemerintah kolonial.
- Legiun Barisan Madura ditempatkan langsung di bawah pimpinan pemerintah kolonial Belanda.

Uang ganti kerugian atas pencabutan hak tanah bagi Bangkalan ditetapkan sebesar Rp. 264.030,- per tahunnya[118]. Meskipun demikian 50 tahun kemudian jumlahnya menyusut menjadi Rp. 66.000,- saja. Gedung istana Bangkalan diganti dengan rumah kabupaten biasa oleh pemerintah kolonial pada tahun 1891.

Raden Adipati Ario Suryonegoro (1905-1918)
Sumber: Museum Cakraningrat Bangkalan

Sesudah beberapa lama menduduki jabatannya, Pangeran Suryanegara diperkenankan menyandang gelar Pangeran Cakraadiningrat. Ia memperoleh penghargaan *Officier der Orde van Orange Nassau*. Pada tahun 1905, Pangeran Cakraadiningrat mengundurkan diri dari kedudukannya dan wafat pada tahun 1916.

118. Lihat *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, halaman 126.

Putranya bernama Raden Adipati Ario Suryanegara (Suryonegoro) menggantikan beliau selaku bupati Bangkalan. Setelah tiga belas tahun menjabat sebagai bupati, ia mengundurkan diri dengan memperoleh uang pensiun dari pemerintah kolonial pada tahun 1918. Adiknya–Raden Tumenggung Ario Suryawinata (Suryowinoto)–diangkat sebagai bupati Bangkalan berikutnya. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai bupati Sampang. Pada tahun 1920, beliau dianugerahi gelar adipati dan diperkenankan menyandang nama Cakraningrat. Karenanya, semenjak saat itu beliau dikenal sebagai Raden Adipati Ario Cakraningrat. Semasa penjajahan Jepang, ia ditunjuk sebagai wakil residen Madura disamping bupati Bangkalan. Setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan, Cakraningrat diangkat sebagai residen Madura. Belanda kemudian menjadikan Cakraningrat sebagai wali negara Madura. Negara bentukan Belanda ini tidak panjang usianya. Bersamaan dengan berakhirnya Negara Madura pada tahun 1950, Cakraningrat turut pula mengundurkan dirinya dari dunia politik.

Menapak-tilasi Sejarah Bangkalan (I)

Pemandangan bagian depan bekas keraton Bangkalan yang kini menjadi kantor bupati Bangkalan (foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Bangkalan (II)

Benda-benda peninggalan yang berada di depan
Museum Cakraningrat Bangkalan (foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Bangkalan (III)

Sejarah Singkat Kabupaten Bangkalan sebagaimana terpampang di depan Museum Cakraningrat Bangkalan (foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Tertera sebagai berikut: Keberadaan wilayah Bangkalan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah kerajaan Madura Barat. Kerajaan Madura Barat muncul pertama kali pada tahun 1531 dengan pusat pemerintahan di Keraton Arosbaya, Bangkalan. Raja pertama adalah Panembahan Lemahdoewoer yang memerintah hingga tahun 1592. Wilayah kerajaan ini mencakup Bangkalan dan Sampang. Pada tahun 1624 pusat pemerintahan berpindah ke Keraton Madeggan Sampang dengan Raja Pangeran Tjakraningrat I (1624-1648) dan selanjutnya digantikan oleh Panembahan Tjakraningrat II (1648-1707).

Pada masa pemerintahan Pangeran Tjakraningrat III (1707-1718) pusat pemerintahan berpindah ke Keraton Toendjoeng di Bangkalan. Pada masa pemerintahan Tjakraningrat IV (1718-1745) pusat pemerintahan dipindahkan ke Keraton Sembilangan di Bangkalan Baru. Pada masa pemerintahan Tjakraningrat V (1745-1770) pusat pemerintahan pindah untuk terakhir kalinya ke Keraton Bangkalan. Pasca pemerintahan Tjakraningrat V terjadi kekosongan pemerintahan karena putra mahkota meninggal dunia. Takhta kemudian digantikan oleh cucu Tjakraningrat V yang bernama Sultan Tjakradiningrat I (1780-1815).Pada masa ini kerajaan Madura Barat berubah menjadi kesultanan yang bercorak Islam. Takhta kemudian digantikan oleh Sultan Tjakradiningrat II (1815-1845) atau Raden Abdul Kadir (masyarakat menyebutnya dengan nama Sultan Kadirun). Takhta pemerintahan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Muhammad Yusuf atau Panembahan Tjakradiningrat VII (1847-1862). Ia kemudian digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Panembahan Tjakradiningrat VIII (1862-1882). Putra kedua Tjakradiningrat VII yang dipersiapkan menjadi raja tidak dapat naik takhta karena meninggal tiga tahun sebelum Panembahan Tjakradiningrat VII turun takhta.

Pada tahun 1885 Belanda kemudian melakukan intervensi terhadap kerajaan. Pemerintahan kerajaan Madura Barat kemudian dihapuskan berdasarkan Besluit Goeverneur Nederland Indie No. 2/c tanggal 22 Agustus 1885, semenjak itu kerajaan Madura Barat terbagi menjadi dua wilayah kabupaten, yaitu Bangkalan dan Sampang. Walaupun demikian, pada masa selanjutnya gari (sic) keturunan Tjakradiningrat masih tetap memimpin Bangkalan dengan menjadi bupati.

Narasumber:

Raden Abdul Hamid Mustari
Keturunan VI dari Sultan Tjakradiningrat II

Menapak-tilasi Sejarah Bangkalan (IV)

Raden Adipati Ario Soerjo Negoro
Bupati Ke-2 Bangkalan (1905-1918)

SILSILAH KELUARGA TJAKRA/ADI/NINGRAT

PRABU BRAWIDJOYO V (1468-1478)
Lemboepeteng
Ario Menger
Ario Pratikel
Nyai Ageng Boedo
Ario Damar
Menak Soenojo
Ario Timboel
Ario Kedut
Ario Podjok
Kjai Demong
Kjai Pragalbo Of Pangeran Palakaran
Panembahan Lemah Doewoer (1531-1592)
Pangeran Tengah (1592-1621)
Pangeran Mas (1621-1624)
Prasena Pangeran Tjakraningrat I (1624-1648)
Pangeran Tjakraningrat II (1648-1707)
Pangeran Tjakraningrat III (1707-1718)
Pangeran Tjakraningrat IV (1718-1745)
Panembahan Tjakraadiningrat V (1745-1770)
Pangeran Djamali
Sultan Tjakraadiningrat I (1780-1815)
Panembahan Tjakraadiningrat (1770-1780)
Sultan Tjakraadiningrat II (1815-1847)
Panembahan Tjakraadiningrat VII (1847-1862)
Pangeran Tjakraadiningrat 1e Regent (1882-1905)
Panembahan Tjakraadiningrat VIII (1862-1882)
Pangeran Adipati Pakoeningrat
R.A.A Tjakradiningrat 3e Regent (1918-1948)
R.A.A Soerjonegoro 2e Regent (1905-1918)

Silsilah Keluarga Para Penguasa Bangkalan sebagaimana terpampang di depan Museum Cakraningrat Bangkalan (foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Kereta di Madura

b. PAMEKASAN

Konon cikal-bakal raja-raja atau adipati di Pamekasan adalah Ario Mengo atau Kiai Wonorono yang merupakan putra Aria (Ario) Lembu Petteng. Tokoh yang baru saja disebutkan ini merupakan putra raja Majapahit dengan putri Campa. Aria Lembu Petteng sendiri telah menganut agama Islam dan menjadi murid Sunan Ampel. Namun Ario Mengo sendiri masih menjadi penganut agama lama[119], karena Lembu Petteng tidak kembali ke Madura; sehingga tak memiliki kesempatan mengajarkan agama Islam pada anak-anaknya. Kiai Wonorono mempunyai seorang putri yang belakangan menikah dengan Kiai Adipati Pramono–keturunan Ario Menger, yakni saudara Ario Mengo yang berkedudukan di Madekan, Sampang.

Ketika berlangsung perebutan kekuasaan di Majapahit oleh Girindrawardhana, Ario Mengo memanfaatkan kondisi ini guna memerdekakan negerinya. Setelah Ario Mengo mengkat, ia digantikan oleh putrinya. Keadaan negara saat itu aman dan damai. Lambat laut, agama Islam mulai tersiar ke Madura dan semakin banyak rakyat Pamekasan yang menganutnya. Namun tidak timbul perselisihan antara para penganut agama baru tersebut dengan agama lama. Pernikahan antara putri Ario Mengo dengan Kiai Adipati Pramono membuahkan seorang putra bernama Pangeran Nugroho atau Bonorogo.

Semasa pemerintahan Pangeran Nugroho (Panembahan Bonorogo), banyak anggota keluarga keluarga kerajaan yang menganut agama Islam. Pangeran Nugroho mangkat pada tahun 1530 dan putranya yang bernama Pangeran atau Panembahan Ronggo Sukowati (Rangga Sukawati) menggantikan kedudukannya di keraton Lawangdaya, Pamekasan Timur. Sedangkan saudaranya bernama Pangeran Adipati Pamadekan bertakhta di keraton Pamadekan, Sampang–yang merupakan bawahan Pamekasan.

Panembahan Ronggo Sukawati menikahi seorang selir dari desa Parombasan dan berputra Kiai Adipati Purboyo (Pangeran Purboyo). Selain itu, Panembahan Ronggo Sukawati menikahi pula Ratu Inten, putri Pangeran Ronggo di Nepa dan sekaligus saudara Ratu Ibi (istri Pangeran Cakraningrat I). Pernikahan ini membuahkan seorang anak bernama Pangeran Jimat. Ratu Inten merupakan permaisuri Panembahan Ronggo Sukawati, sehingga putra mereka yang berhak mewarisi singgasana ayahnya. Kendati demikian, tatkala Panembahan Ronggo Sukawati mengundurkan dirinya,

119. Lihat *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, halaman 61.

yang diangkat sebagai pengganti adalah Pangeran Purboyo, karena Pangeran Jimat belum dewasa.

Sebagai seorang penguasa, Panembahan Ronggo Sukawati terkenal gagah berani, tabah, tangkas, dan bijaksana. Semasa pemerintahannya, pasukan Bali menyerang Madura dan berhasil menewaskan Pangeran Lor I dari Sampang. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-16. Pasukan Bali meneruskan serangannya hingga Pamekasan. Namun disambut dengan perlawanan gigih oleh Panembahan Ronggo Sukawati berserta pengikut-pengikutnya. Akhirnya, para penyerbu dari Bali ini berhasil dipukul mundur.

Pangeran Purboyo menggantikan ayahnya yang telah mengundurkan diri sebagai penguasa Pamekasan. Kedamaian di Madura kembali terusik oleh kehadiran pasukan Mataram yang hendak menaklukkan pulau tersebut. Para penguasa dan bangsawan Pamekasan, seperti Pangeran Ronggo Sukawati, Pangeran Purboyo, Pangeran Jimat, beserta anggota keluarga kerajaan melalukan perang habis-habisan (puputan) hingga gugur seluruhnya. Kini Pamekasan takluk di bawah kekuasaan Mataram.

Sebagai ganti Pangeran Purboyo yang gugur dalam perang mempertahankan negeri nya diangkatlah Pangeran Magetsari (Megasari), putra Pangeran Jamburingin. Setelah Pangeran Magetsari meninggal yang menggantikannya adalah Raden Kanoman dengan gelarnya Tumenggung Wirosari. Namun tak lama kemudian ia dipindahkan ke Sumenep dan digelari Pangeran Sepuh. Pemindahan dilakukan karena Tumenggung Yudonegoro, bupati Sumenep yang sekaligus mertua Raden Kanoman meninggal dunia.

Putra almarhum Pangeran Purboyo, yakni Raden Gunungsari (yang disebut juga Raden Dakseno atau Pangeran Gatotkoco) naik ke tampuk pimpinan Pamekasan. Gelarnya adalah Raden Adikoro I. Ia menikah dengan putri yang berasal dari Sumenep dan masih keturunan Pangeran Sidhingpuri. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang putra; yakni Pangeran Romo atau Cokronegoro II (bupati Sumenep) dan Raden Tumenggung Joyonegoro. Selain itu, ia menikah pula dengan seorang selir asal desa Plakplak.

Karena begitu cinta pada selirnya ini, ketika masih mengandung, Adikoro I menyerahkan sebilah keris bernama Kyai Jimat padanya dengan pesan bahwa barangsiapa yang memilikinya berhak menjadi penguasa Pamekasan berikutnya. Dengan demikian, ia telah menetapkan Raden Asral, putranya yang masih dalam

kandungan itu, sebagai penerusnya. Ternyata setelah berusia tujuh tahun, wajah putra itu sangat mirip dengan wajah Raden Adikoro I. Oleh karenanya, apabila Raden Adikoro I juga dikenal sebagai Pangeran Gatotkoco I, maka Raden Asral disebut pula sebagai Pangeran Gatotkoco II.

Sewaktu Raden Adikoro I meninggal, Raden Asral masih di bawah umur, sehingga yang menggantikannya adalah Tumenggung Joyonegoro. Bupati Pamekasan yang baru ini sering timbul keinginan meminta keris pusaka warisan ayahnya pada adik tirinya. Tetapi niat ini diurungkannya, karena merasa bahwa amanat ayahnya tak boleh diingkari. Akhirnya pecah juga pertengkaran antara kedua seayah lain ibu ini memperebutkan keris Kyai Jimat. Tumenggung Joyonegoro dipersalahkan atas pertengkaran ini dan dibunuh oleh kerabatnya.

Raden Mas Asral dinobatkan oleh VOC sebagai bupati Pamekasan berikutnya dengan gelar Adikoro II. Bupati Sumenep saat itu, Pangeran Jimat (Cokronagoro III) ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan merasa berhak atas keris Kyai Jimat. Pangeran Jimat menuntut pusaka itu secara paksa dan Belanda turut campur dalam masalah tersebut; sehingga Adikoro II terpaksa merelakan kerisnya. Semenjak saat itu, Adikoro merasa susah karena dengan memegang Kyai Jimat, Cokronagoro III seolah-olah berhak atas Pamekasan. Karena terus-menerus didera kekalutan pikiran, Adikoro II memimpin pasukannya ke Sumenep guna merebut keris pusaka warisan ayahnya. Namun pasukannya dapat dipukul mundur oleh Sumenep. Semenjak saat itu, Adikoro II mengundurkan diri ke Surabaya dan berdiam di pesantren Ampel hingga wafatnya.

Pengganti Adikoro II adalah menantunya bernama Raden Sujono yang setelah menduduki jabatan bupati bergelar Adikoro III. Ayahnya adalah Tumenggung Wiromanggolo dari Sumenep. Ia meninggal di desa Sendang tatkala sedang beristirahat di sana. Karena itu, beliau dianugerahi gelar anumerta Sidhing Sendang. Penggantinya adalah Raden Ismail yang bergelar Adikoro IV. Beliau meninggal di desa Bulangan, sehingga digelari Sidhing Bulangan. Bupati Pamekasan berikutnya adalah putra Adikoro IV bernama Raden Tumenggung Ario Cokroadiningrat. Putra Adikoro III bernama Raden Alsari lalu tampil sebagai bupati Pamekasan. Gelarnya adalah Tumenggung Ario Cokroadiningrat I atau Tumenggung Sepuh (Ghung Seppo). Ia merupakan menantu Cokroadiningrat V dari Bangkalan. Salah seorang putri Tumenggung Ario Cokroadiningrat I ada yang menikah dengan Pakubuwono IV. Karena itu, terdapat jalinan kekerabatan antara bupati Pamekasan dengan Kasunanan.

Guna memantapkan kedudukannya, Tumenggung Sepuh pernah mengajukan keinginannya pada Belanda agar Raden Bilat yang disegani diangkat sebagai patihnya. Kendati demikian, terdapat desas-desus bahwa Raden Bilat hendak menerbitkan pemberontakan terhadap Belanda. Setelah Tumenggung Sepuh berani menjamin kesetiaan Raden Bilat barulah keinginan ini dikabulkan. Raden Bilat sendiri merupakan putra Pangeran Lolos dari Sumenep dan masih bersaudara dengan Adikoro III. Sesudah menduduki jabatan sebagai patih beliau bergelar Patih Wironagoro I.

Ghung Seppo meninggal karena sakit dan digantikan oleh adiknya, Raden Alsana (Raden Ario Jayingsari), yang bergelar Raden Tumenggung Ario Cokroadiningrat II. Beliau dikenal pula dengan julukan Tumenggung Tengah (Ghung Tenga). Ia menduduki jabatan atas kemauannya sendiri dan tak mendapatkan izin dari Belanda ataupun Sultan Cokroadiningrat I selaku wedana bupati atau koordinator bupati-bupati lainnya. Oleh sebab itu, Raden Alsana lantas dipecat oleh Belanda pada tahun 1804 dan kedudukannya digantikan oleh Mangkuadiningrat, putra kedua sultan Bangkalan.

Pemerintahan kolonial mengukuhkan kedudukan Mangkuadiningrat sebagai bupati Pamekasan berkuasa penuh (*zelfstandig*) dengan surat ketetapan tanggal 19 September 1804 yang diserah-terimakan tanggal 10 November 1804[120]. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan tertanggal 27 Juli 1829 no. 22, beliau ditetapkan sebagai panembahan Pamekasan. Panembahan Mangkuadiningrat mangkat pada tahun 1842. Karena putra mahkota bernama Pangeran Adipati Prawiroadiningrat telah wafat, maka yang diangkat sebagai pengganti Mangkuadiningrat adalah cucu beliau[121], Raden Banjir. Meskipun demikian, surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada tahun 1854. Selama mengemban jabatan sebagai panembahan Pamekasan, Raden Banjir bergelar Pangeran Adipati Suriokusumo. Ia mengajukan permohonan berhenti pada tahun 1854.

Sebagai penggantinya ditetapkan saudara ayahnya bernama Pangeran Mangkuadiningrat. Semenjak itu, hak mengatur pemerintahannya sendiri (*zelfstandig*) bagi penguasa Pamekasan dihapuskan oleh Belanda. Dengan demikian, kedudukan para penguasa Pamekasan diturunkan menjadi bupati biasa yang digaji pemerintah kolonial. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1891. Bupati-bupati

120. Lihat *Sejarah Permulaan Terjadinya Pulau Madura*, halaman 78.
121. Putra Pangeran Adipati Prawirodiningrat.

Pamekasan berikutnya adalah Raden Ario Condronagoro (1891–1922), Raden Adipati Ario Kartoamiprojo, Raden Ario Abdul Aziz, dan Raden Tumenggung Ario Notohadikusumo (pensiun tanggal 1 Oktober 1950). Raden Ario Kartoamiprojo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai bupati Sampang dan patih di Kraksaan merupakan keturunan Adikoro IV.

Berada di depan kantor pembantu bupati Pamekasan

Menapak-tilasi Sejarah Pamekasan

Pendopo Ronggo Sukawati Pamekasan

Bagian belakang Pendopo

Bekas kantor residen Pamekasan
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

c. SUMENEP

Cikal-bakal penguasa Sumenep adalah Aria Wiraraja (Banyak Wide, 1269 -1292)[122] yang pernah membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Ia digantikan oleh saudaranya bernama Ario Bangah (1292–1301) yang membangun istana di desa Banasareh, Sumenep. Pengganti Ario Bangah adalah putranya bernama Ario Danurwendo (Lembusuranggono, 1301–1311). Ia memindahkan keraton ke desa Tanjung. Penguasa-penguasa Sumenep berikutnya adalah Ario Asropati (1311–1319) dan Panembahan Joharsari (Jokarsari, 1319–1331). Kekuasaan atas Sumenep kemudian diwarisi oleh Panembahan Mandaraka (Mondoroko atau Raden Piturut, 1331–1339) yang beristana di desa Keles.

Sepeninggal Panembahan Mandaraka, singgasana Sumenep diwarisi oleh Raden Suseno atau Ario Lawe. Adipati Sumenep ini kemudian dipindah ke Majapahit dan kedudukannya di Sumenep digantikan oleh Ario Banyak Wide. Yang menggantikan Ario Banyak Wide adalah dua orang putra Raden Piturut: Pangeran Bukabu (1339–1348) dan Pangeran Baragung (Baragung Nataningrat, 1348–1358). Pangeran Baragung berputra seorang bernama Raden Anggung Rawit, yang kelak menjadi adipati Sumenep dengan gelar Pangeran Setiadiningrat I (1358–1366). Ia menikah dengan putri Pangeran Bukabu bernama Retno Sarini. Putra mereka bernama Tumenggung Gajah Pramudo (gelar Pangeran Setiadiningrat II, 1366–1386) meneruskan kepemimpinan Sumenep.

Setiadiningrat II memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Kuning (Koneng), yang gemar bertapa. Kurang lebih bersamaan dengan era mereka terdapat dua orang bersaudara yang masing-masing bernama Ario Bribin (Adipoday) dan Adiroso. Dua orang ini juga gemar bertapa. Suatu kali Adipoday bertapa di Gunung Geger; sedangkan Putri Kuning menjalani pertapaan di salah satu gua Gunung Geger. Konon melalui perkawinan batin antar keduanya lahirlah dua orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Joko Tole dan Joko Wedi.

Ibunya menaruh Joko Tole beserta saudaranya di hutan. Joko Tole kemudian ditemukan oleh seorang pandai besi bernama Empu Pekandangan. Sementara itu, Joko Wedi ditemukan juga oleh seorang pandai besi, yang bernama Empu Keleng. Tatkala berusia 6 tahun, ayah angkatnya–Empu Pekandangan–diundang dan ditugaskan oleh

122. Tahun-tahun pemerintahan para bupati dan penguasa Sumenep diambil dari *Sejarah Permulaan Terjadinya Pulau Madura* dan *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep Dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*.

raja Majapahit membuat pintu gerbang keraton yang amat besar serta indah. Tiga tahun lamanya, Empu Pekandangan berada di Majapahit tanpa ada kabar beritanya. Ternyata ia mengalami hambatan dalam menunaikan tugas yang diembankan raja Majapahit padanya. Joko Tole segera menyusul ayahnya dan membantu mendirikan pintu gerbang besar istana sebagaimana yang dipesan oleh raja. Joko Tole menurut legenda yang beredar di kalangan rakyat Madura banyak melakukan keajaiban lainnya, seperti mengalahkan Dampo Awang, menyembuhkan putri Majapahit yang buta, dan lain sebagainya.

Ketika Setiadiningrat II telah lanjut usianya, ia mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Joko Tole yang merupakan cucunya itu. Raja Sumenep yang baru ini bergelar Pangeran Setiadiningrat III (1415–1460)[123]. Ia memerintah dengan aman dan damai hingga kedatangan bala tentara Bali yang menghabisi nyawanya. Mendengar kemalangan yang dialami saudaranya, Joko Wedi segera datang ke Sumenep. Menurut penuturan ceritera rakyat, orang-orang Bali yang menyaksikan kedatangan Joko Wedi merasa sangat ketakutan dan menyangka bahwa Joko Tole telah bangkit kembali dari kematiannya karena wajah dua bersaudara itu memang sangat mirip satu sama lain. Mereka segera bergegas kembali ke kapalnya dan meninggalkan Sumenep.

Setelah gugurnya Joko Tole atau Pangeran Setiadiningrat III, putranya bernama Raden Begonondo (1460–1502) mengambil alih pucuk pimpinan di Sumenep (± 1460). Keraton Sumenep waktu itu berada di desa Gapura. Raden Begonondo meninggal dan digantikan menantunya–Raden Aria Wanabaya (Ario Wonoboyo atau Pangeran Sidhingpuri. 1502–1559). Semasa pemerintahannya, keraton Sumenep dipindahkan ke desa Parsanga. Wanabaya dikalahkan dan dibunuh oleh Pangeran Kanduruwan (1559–1562) yang kemudian menjadi penguasa Sumenep. Kanduruwan mewariskan kedudukannya pada dua orang anaknya yang masing-masing bernama Raden Wetan dan Raden Banten. Mereka dikenal pula sebagai Pangeran Lor I dan Pangeran Wetan I. Pemerintahan bersama dua bersaudara ini berlangsung dari 1562–1567.

Pangeran Lor I tidak menikah dan lebih memilih menjalani pertapaan. Saudaranya, Pangeran Wetan I menikah dengan Ratna Taluki–putri Pangeran

123. Menurut *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep Dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif* halaman 167, antara Setiadiningrat II dan Setiadiningrat III (Joko Tole) terdapat penguasa-penguasa Ario Pulang Jiwo (Panembahan Blingi, 1386–1399) dan Adipoday (Ario Bribin, 1399–1415).

Nugroho (Panembahan Bonorogo) dari Pamekasan–dan putri Pangeran Sidhingpuri. Pernikahan dengan istri pertamanya membuahkan seorang putra bernama Raden Rajasa; sedangkan dengan istri keduanya berputra Raden Gedok (Raden Keduk), yang diangkat anak oleh Pangeran Lor I. Penguasa Sumenep berikutnya adalah Pangeran Lor II (Raden Rajasa) dan Pangeran Wetan II (Raden Gedok). Pangeran Lor II menikah dengan Dewi Susilo dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Raden Abdullah serta Raden Gada.

Pada tahun 1580, Raden Abdullah mewarisi kekuasaan atas Sumenep dan bergelar Pangeran Cakranegara I (1580–1626). Istrinya adalah putri Panembahan Rangga Sukawati dari Pamekasan. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Raden Bugan. Semasa pemerintahannya, Mataram melancarkan serangannya terhadap Madura–termasuk Sumenep. Pangeran Cakranegara gugur, namun ia sempat menitipkan putranya agar diserahkan pada sultan Banten (sumber lain menyebutkan sultan Cirebon). Sebagai pengganti Cakranegara, Sultan Agung menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Tumenggung Anggadipa (1626–1644) dari Jepara. Guna memantapkan kekuasaannya, Anggadipa menikahi Raden Ayu Ireng, salah seorang keturunan Lemah Duwur. Anggadipa diberhentikan dari kedudukannya pada tahun 1644 karena fitnahan adipati Sampang. Sebagai penggantinya diangkatlah menantu adipati Sampang bernama Jayengpati (1644–1672).

Sementara itu, Raden Bugan belakangan dipulangkan ke Sumenep dan diserahi jabatan pemerintahan di bawah Jayengpati. Pada kurun waktu pemerintahan Jayengpati, meletuslah pemberontakan Trunajaya. Karena khawatir wilayahnya diserang oleh kaum pemberontak, Jayengpati menugaskan Raden Bugan memimpin 700 orang pasukan menghadapi Trunajaya. Ternyata ketika kedua pemimpin ini saling berhadapan satu sama lain, alih-alih terjadi pertempuran, mereka malah bercakap-cakap dalam suasana persahabatan hingga pagi hari. Jayengpati menyangka bahwa Raden Bugan telah ditangkap oleh Trunajaya, sehingga merasa ketakutan dan melarikan diri terlebih dahulu. Raden Bugan dan Trunajaya beserta pengikutnya masing-masing berbaris bersama memasuki Sumenep. Guna menggantikan Jayengpati yang telah meninggalkan kedudukannya, Trunajaya mengangkat Raden Bugan sebagai penguasa Sumenep. Peristiwa ini terjadi pada kurang lebih tahun 1672.

Semasa menduduki jabatan sebagai adipati Sumenep, Raden Bugan menyandang gelar Tumenggung Yudanegara (1672–1700). Beliau menikahi kemenakan Trunajaya

bernama Nyai Kani dan dianugerahi keturunan yang semuanya putri: Raden Ayu Batur, Raden Ayu Artak, Raden Ayu Otok, dan Raden Ayu Kacang. Mataram pernah menugaskan Tumenggung Yudanegara memadamkan pemberontakan di Blambangan. Atas jasanya itu, ia dianugerahi gelar Pangeran Macan Ulung. Raden Ayu Artak bersuamikan Raden Tumenggung Pulang Jiwo (Raden Kaskiyan); sedangkan Raden Ayu Kacang menikah dengan Raden Kanoman (Pangeran Sepuh). Tumenggung Pulang Jiwo dan Pangeran Sepuh sama-sama menjadi bupati Sumenep menggantikan Raden Bugan. Setelah era pemerintahan kedua orang bangsawan ini berakhir pada tahun 1702, Sumenep diperintah oleh seorang bupati saja, yakni Cakranegara II (Pangeran Romo, 1702–1705), yang merupakan putra Adikoro I, bupati Pamekasan. Pangeran Romo ini merupakan pendiri Asta Tinggi, yakni kompleks pemakaman raja-raja Sumenep[124].

Kekuasaan atas Sumenep beralih kembali ke tangan Tumenggung Wiromenggolo (Pangeran Purwonegoro, 1705–1707). Ia digantikan oleh putra Cakranegara bernama Pangeran Jimat atau Raden Ahmad yang memerintah dengan gelar Cakranegara III (1707–1737). Ketika adipati Sumenep ini mangkat, beliau tak memiliki seorang putra pun dan hanya meninggalkan putri-putri bernama Raden Ayu (Ratu) Wiromenggolo dan Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro. Oleh karenanya, yang diangkat sebagai bupati Sumenep berikutnya adalah kerabat Cakranegara III bernama Raden Alza. Gelar beliau adalah Cakranegara IV, tetapi dikenal pula sebagai Pangeran Lolos. Julukan diberikan karena ia dua kali lolos dari bahaya. Pertama-tama saat Sumenep diserang oleh Cakraningrat IV dari Bangkalan dan kedua kalinya saat meletus pemberontakan Ke Lesap (1750).

Setelah pemberontakan Ke Lesap dapat dipadamkan, VOC memecat Cakranegara IV (Raden Alza) dan digantikan oleh putri Cakranegara III bernama Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro (1750–1762). Karena itu, Sumenep kini diperintah oleh seorang wanita. Ia menikah dengan Bendara Saud (Bendoro Saut atau Bendoro Saud) yang kemudian bergelar Tumenggung Tirtonegoro (Tirtanegara). Konon pernikahan ini berawal dari sebuah mimpi, di mana bupati wanita Sumenep tersebut dianjurkan menikah dengan Bendara Saud.

Bendara Saud sebenarnya telah beristri dan memiliki dua orang anak. Kendati demikian, pernikahannya dengan Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro tidak

---

124. Lihat *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*, halaman 27.

membuahkan keturunan. Suatu ketika, Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro mengundang dua orang anak tirinya menghadap. Ternyata anak yang lebih tua menghaturkan sembah terlebih dahulu pada ayah dan setelah itu baru ibu tirinya. Anak kedua kebalikannya, menghormat ibu tirinya dahulu dan kemudian baru ayahnya. Oleh karena itu, Raden Ayu Tirtonegoro menetapkan bahwa putra tirinya yang lebih muda bernama Sumolo ditetapkan sebagai penggantinya.

Demikianlah, Sumolo menjadi bupati Sumenep berikutnya dengan gelar Panembahan Sumolo atau Natakusuma (Notokusumo) I (1762–1812). Ia menikah dengan Raden Ayu Maimunah–putri bupati Semarang–dan putri bupati Sedayu. VOC pernah meminta Panembahan Sumolo mengamankan daerah Blambangan. Tidak berapa sebelum bertakhtanya Panembahan Sumolo, datanglah enam orang Tionghua ke Sumenep. Mereka menetap di sana dan menikahi putri-putri Madura. Oleh bupati Sumenep para pendatang tersebut diperkerjakan sebagai pengurus pasar, pabean, dan penjualan candu. Selain itu, ada pula yang bekerja sebagai tukang dan pengrajin. Salah seorang di antara mereka bernama Lauw Koen Thing atau kerap pula dijuluki Leo Kate. Ia merupakan ahli bangunan. Cucunya adalah Lauw Pia Ngo yang membantu Panembahan Sumolo merancang serta membangun keraton Sumenep (1764) dan Mesjid Agung Sumenep (1781)[125].

Berkat jasanya, Lauw Pia Ngo dianugerahi tanah perdikan di Pejagalan, yakni sebelah utara alun-alun Sumenep. Ia diperbolehkan membangun rumah bagi diri dan keluarganya dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan bangunan proyek keraton. Rumah Lauw Pia Ngo dibuat menghadap ke timur, sebagai perlambang kesetiaannya pada bupati Sumenep. Panembahan Sumolo bahkan menamai jalan di bagian timur kompleks kediaman ahli bangunan Tionghua itu jalan Lauw Pia Ngo.

Sepeninggal Panembahan Sumolo yang menjadi bupati Sumenep adalah putranya, Abdurrahman (1812–1854). Mula-mula ia menyandang gelar Adipati Ario Tirtoadiningrat (Tirtaadiningrat), lalu Tumenggung Natanegara dan Panembahan Natakusuma II. Belakangan ia dianugerahi gelar Sultan Pakunataningrat. Sebagai penghormatan terhadap ayahnya, sultan membuat bangunan cukup di Asta Tinggi yang terletak di bagian timur kompleks pemakaman tersebut. Pendiriannya dimulai tahun 1808[126], yakni tatkala Panembahan Sumolo masih hidup dan memerintah.

125. Lihat *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*, halaman 34.
126. Lihat *Sejarah Sumenep*, halaman 132–133.

Sesungguhnya ketika Panembahan Sumolo meninggal, bangunan itu belum sempurna sepenuhnya. Oleh karenanya, Sultan Pakunataningrat berupaya menyelesaikannya selekas mungkin.

Masih pada zaman Sultan Pakunataningrat, pembuatan perahu digalakkan dan begitu pula dengan kapal-kapal perang[127]. Ukir-ukiran sebagai bagian kesenian Madura turut dikembangkan. Kesejahteraan rakyat Sumenep mengalami peningkatan, hingga mampu membangun rumah dari tembok beratap genteng atau seng. Pemetaan dilakukan terhadap wilayah kadipaten. Sebagai seorang yang cendekia, beliau fasih berbahasa Madura, Jawa, Kawi, Melayu, Arab, Sansekerta, dan Belanda.

Sultan Pakunataningrat pernah membantu Raffles menerjemahkan suatu prasasti asal Bali, yang saat itu belum diketahui artinya. Pakunataningrat menyanggupi penerjemahannya asalkan batu prasasti tersebut ditinggalkan di keraton Sumenep. Beliau lantas menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Sebagai pembanding hasil alih bahasanya, beliau memerintahkan jaksa keraton Sumenep bernama Mas Tumenggung Ronggo Nartoboso Pratalikromo menerjemahkannya. Begitu menerima perintah dari sultannya, ia lantas bertapa di dekat prasasti. Akhirnya, ia diberitahukan artinya melalui mimpi. Petunjuk yang diperoleh itu lalu dituliskan pada sehelai kertas dan diserahkan pada sultan. Apa yang tertulis pada secarik keras tersebut ternyata sama dengan terjemahan Pakunataningrat. Prasasti dan terjemahannya dikirimkan pada Raffles. Dua tahun kemudian, beliau menerima surat dari Raffles yang mengatakan bahwa terjemahan sultan telah dibandingkan dengan hasil terjemahan orang India dan artinya sungguh tepat. Itulah sebabnya, Sultan Pakunataningrat dianugerahi gelar *letterkundige* atau doktor kesusastraan. Beliau memperoleh penghargaan berupa kereta kencana serta beberapa lempengan emas. Kendati demikian, ia hanya mengambil satu saja, yakni yang berbentuk tapal kuda. Terlepas dari semua prestasinya di atas, Sultan Pakunataningrat tercatat membantu Raffles dalam menyusun buku *History of Java* yang tersohor itu. Sultan Sumenep yang menurut riwayat orang-orang tua memiliki banyak kepandaian ini mangkat pada 31 Maret 1854.

---

127. Lihat *Sejarah Sumenep*, halaman 135.

Sultan Pakunataningrat
(1812-1854)
Sumber: gambar di museum depan Keraton Sumenep

Pengganti beliau adalah putra tertuanya bernama Muh. Soleh yang bergelar Panembahan Natakusuma II (1854–1879). Penguasa Sumenep ini menderita lumpuh di sekujur tumbuhnya, sehingga demi menjalankan roda pemerintahan dibentuk suatu dewan yang beranggotakan Pangeran Suryiningrat (Pangeran Suring), Pangeran Suryaamijaya, Pangeran Ariaadiputra, Pangeran Mangkuadiningrat, dan dua orang Belanda. Panembahan Natakusuma II pernah mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal van Landsberge tertanggal 11 Mei 1876. Isinya meminta agar Pangeran Mangkudiningrat dianugerahi gelar Nataningrat, sehingga sederajat dengan sultan Bangkalan[128]. Sepeninggal Panembahan Natakusuma II, Sumenep dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial Belanda dan penguasanya disetarakan dengan bupati biasa. Bupati Sumenep pertama adalah Pangeran Mangkuadingrat (1879–1901) yang juga adik Natakusuma II[129]. Penghapusan status swapraja bagi Sumenep disahkan dengan surat keputusan (*besluit*) tertanggal 18 Oktober 1883. Sebagai gantinya, para penguasa Sumenep akan menerima uang ganti rugi sebesar f. 139.310,-.[130]

---

128. Lihat *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*, halaman 106.
129. Menurut *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* halaman 189 adalah adik Natakusuma.
130. Lihat *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, halaman 55.

Al Qur'an tulisan tangan di Keraton Sumenep
(Foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Para bupati Sumenep berikutnya setelah berakhirnya status *zelfbestuur* (swapraja) adalah Raden Tumenggung Ario Pratamingkusumo (1901–1925). Beliau melaksanakan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Kamal dan Kalianget Timur dengan panjang keseluruhan 191 km[131]. Pembangunan ini berlangsung dari tahun 1897–1901. Beliau digantikan secara berturut-turut oleh Raden Tumenggung Ario Prabuwinoto (1925–1929)[132], Raden Samadikun Parwotohadikusumo (1929–1947), dan Raden Tumenggung Ario Amijoyo (1947–1948). Sumenep kemudian menjadi salah satu kabupaten dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaum kerabat Sumenep ada pula yang menjadi bupati di Semarang. Surohadimenggolo VI yang menjadi bupati Semarang antara tahun 1841–1845 merupakan cucu sultan Sumenep[133]. Saat menduduki jabatan sebagai bupati, usianya baru 10 tahun. Karenanya, jalannya pemerintahan dipegang oleh dua orang patih. Namun tatkala menginjak usia dewasa, beliau meninggalkan jabatannya dan kembali ke Sumenep.

131. Lihat *Sejarah Sumenep*, halaman 153.
132. Merupakan bupati terakhir dari dinasti atau keturunan Bendara Saud.
133. Lihat *Sejarah Hari Jadi Kota Semarang: Edisi Revisi*, halaman 78.

Pangeran Natakusuma II
(1854-1879)
Sumber: gambar di museum depan Keraton Sumenep

Pangeran Mangkuadingrat
(1879–1901)
Sumber: gambar di museum depan Keraton Sumenep

Raden Tumenggung Pratamingkusumo
(1901-1925)
Sumber: gambar di museum depan Keraton Sumenep

Raden Tumenggung Ario Prabuwinoto
(1925-1929)
Sumber: gambar di museum depan Keraton Sumenep

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (I)

Benda-benda peninggalan lama di museum depan Keraton Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (II)

Benda-benda peninggalan lama di museum depan Keraton Sumenep

Tiruan cermin di depan pintu masuk keraton,
yang dipergunakan para pengunjung merapikan dirinya sebelum menghadap raja
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (III)

Barang-barang peninggalan dalam Keraton Sumenep.
Gambar-gambar di atas adalah perlengkapan berhias para putri keraton.
Sebagai contoh, tampak pada baris terakhir kiri adalah gelang kaki.
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (IV)

Benda-benda peninggalan lama di museum depan Keraton Sumenep

Piring-piring China, Belanda, dan guci dari Siam (baris kedua paling kiri), yang memperlihatkan telah adanya hubungan internasional pada Kerajaan Sumenep.
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (V)

Baju perang terbuat dari besi yang telah dimakan usia

Senjata peninggalan Keraton Sum
Benda-benda peninggalan lama di dalam Keraton Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (VI)

Benda-benda peninggalan seni budaya di dalam Keraton Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (VII)

Pada bagian kanan tampak gambar lingga

Benda-benda peninggalan bernuansa Hindu di dalam Keraton Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (VIII)

Pakaian-pakaian peninggalan Kerajaan Sumenep

Alas sembahyang dari kulit harimau
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (IX)

Tempat penyimpan air minum (kiri) dan sandal (kanan)

Cap Kerajaan Sumenep (kiri) dan tempat memandikan jenazah raja/ratu (kanan)

Peninggalan-peninggalan lain Kerajaan Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (X)

Bagian dalam Keraton Sumenep
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

Menapak-tilasi Sejarah Sumenep (XI)

Bagian dalam Keraton Sumenep
Tampak pada baris terakhir kiri adalah Pintu Gerbang Selalu Tersenyum, karena penjaganya yang selalu tersenyum ramah. Pada baris terakhir sebelah kanan terdapat pemandian di kompleks keraton.
(foto-foto koleksi pribadi, 5 Juni 2011)

KERAJAAN-KERAJAAN DI JAWA

Jawa Barat Pada Abad Ke-18–19

Serang
BATAVIA
BANTEN
Buitenzorg
(Bogor)
CIREBON
Cirebon
Bandung
PRIANGAN

Kerajaan-Kerajaan Jawa Tengah Pada Abad Ke-18–19

Semarang
Sela
Salatiga
SURAKARTA
Surakarta
Yogyakarta
PAKUALAMAN
YOGYAKARTA
MANGKUNEGARAN

Bab 3

KERAJAAN-KERAJAAN DI SUMATERA

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI ACEH, SUMATERA BARAT, DAN SUMATERA TIMUR

I. ACEH

a. Cikal-bakal Kesultanan Aceh

Menurut sumber-sumber sejarah yang lebih tua, di Aceh pernah berdiri beberapa kerajaan, seperti Lamri atau Lamuri, Tamiang, Perlak, Samudera, dan Kandang Aceh. Meskipun demikian, *Bustanus Salatin* karya Nuruddin Ar Raniri menyebutkan mengenai raja-raja Aceh yang diawali dari Ali Mughayat Syah (± 1514–1528). Oleh karena itu, sebagian ahli sejarah berpandangan bahwa ia adalah sultan Aceh yang pertama[134]. Tetapi ada pula sumber yang mencantumkan bahwa Aceh telah berdiri jauh sebelumnya. Konon, raja-raja Aceh pernah memerintah dari Kandang Aceh (dekat Banda Aceh sekarang). Dengan demikian, Kerajaan Aceh dianggap pernah berdiri bersamaan dengan Lamri. *Hikayat Aceh* menyebutkan bahwa salah seorang rajanya bernama Sultan Mahmud Syah memindahkan pusat kerajaannya dari Kandang Aceh ke Daruddunia setelah memerintah selama 43 tahun. Sumber yang dipelajari oleh Hoesein Djajadiningrat menyebutkan mengenai seorang raja bernama

134. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 34.

Sultan Johan Syah yang memerintah pada tahun 601 H. (1205 M.)[135]. Catatan lain menyatakan bahwa penguasa Aceh yang pertama kali menganut agama Islam adalah Gazi Djohansyah yang mulai bertakhta pada tahun 1215.

Masih ada lagi naskah hasil penelitian Hoesein Djajadiningrat yang menyebutkan mengenai raja Aceh bernama Indra Syah[136]. Raja ini diberitakan melakukan kunjungan ke China. Setelah itu kisahnya sekonyong-konyong beralih meriwayatkan dua putra Raja Munawar Syah yang masing-masing bernama Syah Muhammad dan Syah Mahmud. Putra yang disebut pertama tadi berjumpa dengan bidadari bernama Dewi Indera. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putra dan putri yang masing-masing bernama Raja Ibrahim serta Safiah. Syah Mahmud berjumpa dengan bidadari Madinai Cendera. Mereka menikah dan dikaruniai pula seorang putra (Raja Sulaiman) dan putri (Arkiah). Pasangan putra dan putri ini saling menikah satu sama lain. Raja Ibrahim menikah dengan Arkiah dan Raja Sulaiman menikahi Safiah.

Hikayat dilanjutkan dengan kelahiran Musaffar Syah dan Syamsu Syah, tetapi tak jelas dari pasangan yang mana. Konon, Raja Musaffar Syah ini memerintah di Lamri. Tampaknya Lamri ini merupakan cikal-bakal Kerajaan Aceh. Sementara itu, di sumber lain disebutkan bahwa Musaffar Syah memerintah Makota Alam dan Inayat Syah berkuasa di Darul Kamal. Kedua negeri ini tak henti-hentinya berperang. Kerajaan Makota Alam ini merupakan penerus Lamri. Setelah ibukotanya berpindah ke sana (Makota Alam), barulah kerajaan itu dinamakan demikian.

Setelah dipindahkan ke Daruddunia, ibukota Aceh berpindah kembali ke Darul Kamal. Penyebab pemindahan pusat pemerintahan ini tidaklah diketahui, hanya setelah itu Aceh dikenal namanya sebagai Kerajaan Darul Kamal atau Aceh Darul Kamal. Dengan demikian, setidaknya pada abad ke-14 di Aceh terdapat dua kerajaan, yakni Makota Alam (Lamri yang ibukotanya telah dipindahkan ke Makota Alam) dan Aceh Darul Kamal. Tapal batas keduanya adalah Krueng Aceh (Sungai Aceh). Kedua kerajaan itu tak pernah hidup rukun dan senantiasa berebut hagemoni. Peperangan sering pecah antara keduanya, tetapi tak satupun yang keluar sebagai pemenangnya; walaupun Kerajaan Lamri Makota Alam telah memperkuat angkatan perangnya dengan mendatangkan persenjataan dari luar.

135. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 34.
136. Lihat *Atjeh Sepandjang Abad*, halaman 79.

Kerajaan Makota Alam yang saat itu diperintah oleh Sultan Syamsu Syah, pengganti Sultan Munawar Syah, melakukan siasat licik. Ia menikahkan putranya bernama Ali Mughayat Syah dengan putri Sultan Muzaffar Syah (pengganti Inayat Syah) dari Darul Kamal. Di tengah-tengah rombongan pengantar mas kawin ke Darul Kamal disembunyikanlah berbagai persenjataan. Setibanya di Darul Kamal dilancarkanlah serangan mendadak terhadap kerajaan tersebut. Darul Kamal yang tidak siap dapat dikalahkan dengan mudah dan bahkan Sultan Muzaffar Syah berhasil ditewaskan. Semenjak saat itu, Sultan Syamsu Syah memerintah atas Darul Kamal dan Makota Alam. Putra almarhum Sultan Muzaffar Syah bernama Alauddin Riayat Syah saat berlangsungnya peristiwa naas di atas sedang berada di Daya. Ia tidak kembali lagi ke Darul Kamal untuk selama-lamanya dan mendirikan Kerajaan Daya. Ali Mughayat Syah kemudian menggantikan ayahnya dan pusat kerajaan dipindahkan kembali ke Daruddunia. Selanjutnya, kerajaan yang telah dipersatukan tersebut dinamakan Aceh Darussalam, sedangkan ibukotanya disebut Bandar Aceh Darussalam.

Pada zamannya, Aceh hanya meliputi ujung utara Sumatera, yakni di daerah yang kini menjadi Kabupatan Aceh Besar. Dalam bahasa Aceh kawasan ini disebut Aceh Rayeuh atau Aceh Raya, Aceh Lhee Sago atau Aceh Tiga Segi, dan Aceh Inti. Penyebutan ini disebabkan wilayah tersebut merupakan inti Kerajaan Aceh dan merupakan tempat di mana ibukotanya terletak. Semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah (Al Kahhar, memerintah 1531–1571), Aceh memperluas wilayahnya ke sebelah barat. Kota-kota pelabuhan di pantai barat Aceh, seperti Singkil, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang, berhasil dikuasai, sehingga Aceh sanggup memonopoli perdagangan lada di Sumatera Utara. Selain itu, Sultan Alauddin Riayat Syah berhasil pula menundukkan Kerajaan Aru Tua yang terletak di Kabupaten Langkat sekarang.

Sultan juga terlibat permusuhan dengan Portugis yang saat itu telah menguasai Malaka. Portugis juga berambisi memonopoli perdagangan di sana, sehingga tentu saja terjadi benturan dengan Aceh. Oleh karenanya, Sultan Al Kahhar menganggap Portugis sebagai penghalang yang harus dienyahkan. Serangan terhadap Portugis dilancarkan berkali-kali, yakni antara tahun 1537 hingga 1568. Pada serangan terakhir semasa pemerintahan Sultan Al Kahhar di tahun 1568, Aceh mengerahkan kekuatan sejumlah 15.000 orang prajurit Aceh dan 400 prajurit berkebangsaan Turki dengan

200 pucuk meriam baik besar maupun kecil. Meskipun demikian, serangan besar-besaran ini belum berhasil menghancurkan Portugis.

Berbeda dengan sumber-sumber sejarah di atas, Hikayat Aceh merunut sultan-sultan Aceh pada Johan Syah yang dikatakan memerintah 601–631 H. Urutan sultan-sultan selanjutnya setelah Johan Syah adalah:

Riayat Syah (Sultan Ahmad)–putra Johan Syah	631–665 H
Mahmud Syah–putra Riayat Syah	665–708 H
Firman Syah–putra Mahmud Syah	708–755 H
Mansur Syah	755–811 H
Alauddin Johan Syah (Raja Mahmud)	811–870 H
Husin Syah	870–901 H
Riayat Syah	901–917 H
Salahuddin	917–946 H
Alauddin (Alkahar)	946–975 H

Perbedaan utama dengan sumber sebelumnya adalah absennya raja-raja bernama Musaffar Syah, Inayat Syah, dan Syamsu Syah. Menurut Hikayat Aceh yang membangun kota Darud Dunia adalah Mahmud Syah. Berdasarkan makam Poteu Meureuhom Daya (Sultan Salatin Alauddin Riayat Syah) yang ditemukan di Kuala Daya, silsilah raja-raja Aceh awal dapat direkonstruksi sebagai berikut:[137]
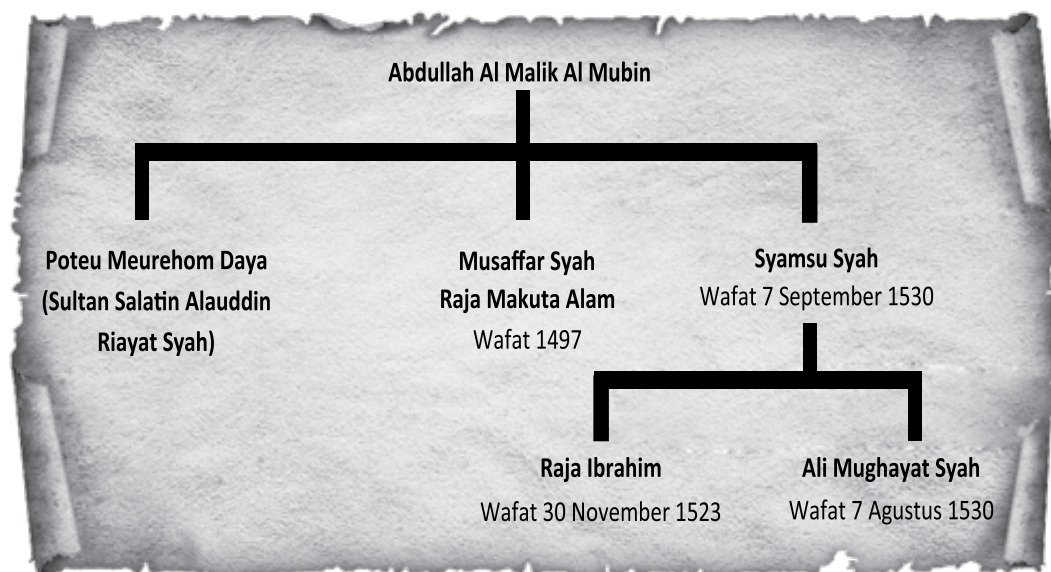
137. Lihat *Atjeh Sepandjang Abad*, halaman 84.

Pada zaman Sultan Ali Mughayat Syah, Aceh memukul mundur serangan Portugis di bawah pimpinan Gaspar da Costa pada tahun 1519. Dua tahun kemudian atau tepatnya bulan Mei 1521 armada Portugis yang dipimpin oleh Jorge de Brito muncul lagi di Aceh. Portugis mengalami kekalahan dan de Brito sendiri ditewaskan oleh laskar Aceh. Sultan Ali Mughayat Syah bahkan mengejar sisa-sisa pasukan Portugis hingga ke Pedir.

Angkatan perang sultan dipimpin oleh saudaranya sendiri bernama Ibrahim. Pertempuran melawan Portugis yang paling dashyat berlangsung di Pasai. Pasukan Portugis terdesak dan terpaksa melarikan diri dari kubu pertahanannya. Karena kondisi sudah semakin genting, mustahil bagi mereka membongkar dan menyelamatkan meriam-meriamnya. Orang-orang Portugis tak ingin senjata andalan mereka itu jatuh ke tangan Aceh. Diisinya meriam-meriam tersebut dengan mesiu dan kemudian dibakarlah benteng milik mereka sendiri. Harapan Portugis api yang membakar benteng akan meledakkan dan memusnahkan segenap meriam yang ada. Tetapi Ibrahim mengenali siasat Portugis di atas dan memadamkan apinya. Dengan demikian, meriam-meriam bekas milik Portugis terselamatkan. Ibrahim lantas mengarahkan senjata-senjata tersebut pada mantan tuannya yang tengah melarikan diri; sehingga menghancurkan mereka semua. Peristiwa penting lain semasa pemerintahan Ali Mughayat Syah adalah dihancurkannya Kerajaan Daya yang telah menjalin kerja sama dengan Portugis. Konon penyerangan itu dipicu oleh ditolaknya pinangan Ali Mughayat Syah terhadap adik raja Daya.

Sultan Ali Mughayat Syah mangkat pada 7 Agustus 1530 dan digantikan putranya bergelar Salahuddin. Sementara itu, adik Salahuddin bernama Alauddin Riayat Syah ditugaskan memerintah daerah Pasai. Sultan Salahuddin merupakan figur pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Segenap urusan pemerintahan diserahkan pada Raja Bungsu, perdana menterinya yang korup; sementara ia sendiri sibuk bersenang-senang. Alauddin dengan sabar menanti hingga kakaknya mengubah tabiat buruk yang membahayakan negerinya itu. Namun apa yang diharapkan Alauddin tak kunjung terpenuhi. Kesabaran Alauddin akhirnya habis. Ia menyingkirkan Salahuddin dari singgasananya dan membunuh Raja Bungsu. Selanjutnya, ia mengangkat dirinya sebagai sultan.

Sultan Alauddin Riayat Syah (1531–1571) yang setelah wafatnya dianugerahi gelar al Kahar menaklukkan Kerajaan Aru Tua. Permusuhan dengan Portugis masih

terjadi yang tak jarang berakhir pada pertarungan dashyat antara kedua belah pihak. Pada pertempuran tanggal 16 Februari 1568, sultan kehilangan putranya. Ketika itu, Portugis dibantu oleh Johor yang telah lama menjadi musuh bebuyutan Aceh. Karena kesal terhadap sikap Johor, Alauddin menyerang Johor pula. Penguasa Aceh yang banyak berperang melawan Portugis ini mangkat pada 28 September 1571. Beliau digantikan oleh putranya bernama Husin yang naik takhta dengan gelar Ali Riayat Syah (1571–1579).

Penguasa Aceh yang baru ini mewarisi kebencian terhadap Portugis dari ayahnya–terbukti dari enam tahun peperangan yang dilancarkannya melawan Portugis. Tetapi serangan-serangan kali ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Pada 8 Juni 1579, Sultan Ali Riayat Syah wafat dan digantikan oleh putranya, Sultan Muda (1579), yang masih berusia 4 bulan. Masa pemerintahannya hanya tujuh bulan saja dan setelah itu mangkatlah ia. Saudara Ali Riayat Syah yang sebelumnya menjabat sebagai raja Pariaman tampil ke depan dan menjadi sultan dengan gelar Sri Alam (1579). Ia merupakan penguasa yang kurang disukai, sehingga tidak lama memerintah dan dibunuh. Penggantinya adalah Zainal Abidin (1579). Nasibnya tidak jauh berbeda dengan sultan sebelumnya, karena ia dibunuh pada 5 Oktober 1579.

Pada tahun 1579, Aceh menyerang Perak dan berhasil menewaskan sultannya. Putra sultan Perak bernama Mansyur dibawa ke Aceh dan dinikahkan dengan seorang putri Aceh bernama Ghana. Ketika Sultan Zainal Abidin terbunuh pada tahun 1579, Mansyur diangkat sebagai sultan Aceh dengan gelar Alauddin Mansyur Syah (1579–1585). Peristiwa ini terjadi pada 30 Maret 1579. Sultan Manysur Syah terbunuh pada 12 Januari 1585/ 1586. Singgasana Aceh kini diduduki oleh Sultan Buyung atau Alauddin Riayat Syah (1585–1589), putra Munawar Syah, sultan Indrapura. Pemerintahan beliau hanya berlangsung 4 tahun saja dan hidupnya harus berakhir di tangan seorang pembunuh. Raja Asyim yang masih di bawah umur, putra sultan Johor, hendak diangkat jadi raja–namun ia dibunuh pula.

Karena berasal dari Perak, Mansyur atau Sultan Alauddin Mansyur Syah dianggap sebagai sultan asing. Dengan demikian terjadi pergantian dinasti di Aceh. Peristiwa ini sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam berita China semasa Dinasti Ming. Di dalam *Mingshi* bab 325 disebutkan bahwa semasa pemerintahan Kaisar Wanli terjadi dua kali pergantian dinasti; yang mengacu pada pemerintahan Alauddin Mansyur Syah dan Sultan Buyung. Kendati demikian, berita China meriwayatkan

mengenai seorang budak yang berhasil menjadi raja. Konon, tuan budak itu suatu kali menghadap raja dan bersikap dengan penuh hormat. Setelah meninggalkan istana, budak itu menyarankan agar tuannya mengangkat dirinya menjadi raja. Sang budak kemudian membunuh raja dan mengangkat tuannya sebagai penggantinya. Tetapi tak berapa lama berselang ia ganti menghabisi nyawa tuannya dan merebut takhta[138]. Setelah kudeta itu, nama kerajaan diubah menjadi *Yaqi* (啞齊)- yang merupakan transliterasi China bagi Aceh.

Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukammal (1589–1604) berhasil menjadi sultan di tengah situasi yang kacau dan sarat pembunuhan itu. Beliau merupakan keturunan Sultan Musaffar Syah. Pada zamannya, selain terlibat perselisihan dengan Johor, Aceh menyerang kedudukan Portugis di Malaka; namun gagal karena orang-orang Portugis masih sanggup mempertahankan benteng andalan mereka itu.

Kedatangan armada dagang Belanda pada 21 Juni 1599 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dianggap sebagai pertanda buruk oleh orang Portugis. Sesama bangsa Eropa saat itu memang saling bersaing dalam perdagangan inernasional. Pada mulanya orang-orang Belanda disambut baik oleh Aceh. Atas usul para pembesar Aceh, sultan menguji apakah orang-orang Belanda bersedia membantu mereka melawan Portugis. Caranya, sultan menyampaikan keinginannya meminjam kapal Belanda dalam rangka menyerang Malaka, tetapi Belanda tak mengizinkannya. Hal ini menimbulkan ketidak-sukaan dalam diri sultan. Apalagi perangai para pedagang Belanda itu kurang baik. Pihak Portugis dengan jeli memanfaatkan peluang ini. Dihasutnya orang-orang Belanda dengan mengatakan bahwa Aceh berencana merampas kapal mereka. Jurang kecurigaan semakin tajam. Cornelis de Houtman ditangkap dan dibunuh. Sedangkan saudaranya, Frederick de Houtman, beserta 8 pengikutnya ditawan di Aceh selama 2 tahun. Sebagai catatan, turut serta bersama rombongan Cornelis de Houtman, orang Inggris bernama John Davis. Sultan sempat mengadakan pembicaraan hangat dengannya. Berdasarkan catatan John Davis dapat diketahui kondisi Aceh masa itu.

Hal menarik lain adalah upaya Cornelis de Houtman mengelabui sultan Aceh. Ketika ditanya di mana letak negeri Belanda, de Houtman memperlihatkan sebuah peta dan mengatakan bahwa Belanda itu luas sekali wilayahnya; yakni membentang antara Rusia dan Venesia. Rupanya sultan tidak percaya pada keterangan de Houtman

138. Lihat *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, halaman 288.

dan menanyakan kebenarannya pada orang Portugis. Kesempatan ini dipergunakan oleh orang Portugis menjelaskan kondisi Belanda yang sesungguhnya. Mereka mengatakan Belanda itu kecil saja wilayahnya; selain itu tidak memiliki raja. Apa yang disampaikan orang-orang Portugis ini memang benar adanya, karena waktu itu Belanda merupakan republik yang masih muda bernama Bataafsche Republiek (Republik Batavia). Ditambahkan pula oleh mereka bahwa negeri-negeri besar di Eropa kala itu adalah Portugis dan Inggris. Kendati diperintah oleh seorang wanita (yang dimaksud adalah Ratu Elizabeth I), Inggris dapat menguasai Irlandia, Perancis, dan bahkan Belanda. Tentu saja, kebohongan Cornelis de Houtman makin mengurangi simpati sultan pada orang Belanda.

Setelah insiden dengan Cornelis de Houtman di atas kapal-kapal Belanda kerap merompak perahu-perahu Aceh. Kebencian rakyat Aceh terhadap tindak-tanduk orang Belanda makin memuncak. Oleh karenanya, ketika armada Jacob van Neck tiba di Aceh mereka mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik dari rakyat, sehingga terpaksa hengkang secepatnya dari sana. Lambat laut, Pangeran (Prins) Maurits, pemimpin Bataafsche Republiek, menyadari bahwa permusuhan dengan Aceh tak ada gunanya. Demi memperbaiki hubungannya dengan Aceh, Prins Maurits mengirim surat persahabatan pada sultan. Agar memperoleh sambutan yang baik, Belanda dengan cerdik meminta surat pengantar dari raja Pulau Amasyuan di pantai timur Afrika[139]. Mereka mengetahui bahwa sultan Aceh memiliki relasi yang baik dengan kawasan tersebut. Misi Prins Maurits yang tiba pada 23 Agustus 1601 ini berhasil dan hubungan baik antara kedua belah pihak terpulihkan.

Sultan berniat mengirimkan utusannya mengadakan kunjungan balasan ke Belanda. Setibanya di sana, delegasi Aceh ingin langsung menjumpai Prins Maurits yang sedang berada di Grave, markas pasukannya. Belanda masa itu sedang dan baru saja memerdekakan dirinya dari Spanyol. Utusan Aceh mempergunakan kesempatan ini meninjau kampung dan kota-kota di Belanda. Rombongan lalu kembali ke Aceh pada 18 Desember 1603. Dengan demikian, negara berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda adalah Aceh. Ironisnya, Belanda beberapa ratus tahun kemudian justru merampas kedaulatan Aceh.

Kurang lebih bersamaan dengan itu, pada bulan Juni 1602 datanglah armada dagang Inggris yang dipimpin oleh James Lancaster. Setelah melalui perundingan

---

139. Lihat *Atjeh Sepandjang Abad*, halaman 130.

dengan sultan, Inggris diberi kesempatan berniaga di Aceh. Lancaster memperoleh izin dari sultan membeli lada langsung ke Pariaman. Laporan yang ditulis Lancaster memberikan informasi berharga mengenai bagaimana tatacara penyambutan tamu di Aceh. Menurut laporannya, mereka disambut oleh pembesar Aceh yang membawa enam ekor gajah guna membawa mereka ke ibukota. Gajah-gajah itu ada yang tingginya mencapai 14 kaki dan tubuhnya dipenuhi beraneka perhiasan. Dalam arak-arakan menuju ke istana, mereka diiringi oleh bunyi-bunyian yang meriah.

Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukammal dijatuhkan oleh putranya pada bulan April 1604 yang naik takhta dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah (1604–1607). Penguasa Aceh ini tidak becus memerintah, sehingga Perkasa Alam (lahir 1590)–seorang keturunan Sultan Al Kahar–memperlihatkan rasa tidak puasnya. Itulah sebab, sultan menangkap dan memenjarakannya. Tetapi pada saat bersamaan, Aceh terancam oleh Portugis. Perkasa Alam yang terkenal keberaniannya mengajukan permohonan pada sultan bahwa bila dibebaskan dari penjara ia akan menghalau serangan Portugis. Sultan mengabulkan permintaannya, dan Perkasa Alam tampil sebagai penyelamat Aceh. Sultan Ali Riayat Syah mangkat mendadak pada 4 April 1607. Perkasa Alam merebut kekuasaan dan menjadi sultan Aceh berikutnya. Beliau lebih tersohor dengan gelarnya, Iskandar Muda (1607–1636).

b. Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda

Iskandar Muda selaku sultan Aceh terbesar berhasil menjadikan negerinya kekuatan yang patut diperhitungkan di belahan barat Kepulauan Nusantara. Pada saat itu, armada laut Aceh sangat kuat dan dilengkapi kapal-kapal yang sanggup mengangkut 600–800 prajurit. Sultan memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan berturut-turut Deli (1612) dan Aru (1613). Johor yang terletak di Semenanjung Melayu berhasil dikalahkannya pada tahun 1613 dan ia menawan sultannya bernama Alauddin Riayat Syah II (1597–1613) bersama dengan anggota keluarganya serta beberapa pejabat VOC. Johor ternyata tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berjuang keras menuntut kembali kemerdekaannya dan berhasil memukul mundur pasukan Aceh tidak lama setelah peristiwa penaklukkan itu. Sebagai langkah membentengi diri dari Aceh, Johor mengadakan perserikatan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Pahang, Palembang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak. Kendati demikian, Iskandar Muda masih tetap melancarkan serangan-serangannya. Bahkan, Portugis yang saat itu bercokol di Bintan dapat dikalahkannya pada tahun 1614.

Pahang berhasil ditaklukkan pada tahun 1617 dan sultannya bernama Ahmad Syah dijadikan tawanan. Kedah takluk pada tahun 1620 dan pada tahun 1623 Iskandar menyerbu lagi ibu kota Johor serta merebut Nias pada 1624/5.

Semenjak 1629, kekuatan militer Iskandar mulai mengalami kemunduran. Armada Aceh menderita kekalahan telak terhadap Portugis di Malaka. Pihak Portugis mencatat bahwa seluruh kapal dan 19.000 prajurit Aceh mengalami kemusnahannya. Sebenarnya, Aceh hampir mencapai kemenangan; tetapi karena datangnya bala bantuan, Aceh dapat dipukul mundur oleh Portugis[140]. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, Iskandar hanya mengirimkan dua ekspedisi militer lagi (masing-masing di tahun 1630/1 dan 1635) guna memadamkan pemberontakan di Pahang. Setelah kemunduran Aceh ini, Johor mulai menegakkan kembali hagemoninya di Semenanjung Melayu.

Aceh boleh dikatakan berada pada puncak kejayaannya semasa Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, semasa pemerintahannya Aceh tidak berhasil menegakkan hagemoninya atas Selat Malaka. Patut pula dicatat pada zaman keemasannya, angkatan laut Aceh memiliki kapal hingga 600 buah, yang terdiri dari 500 kapal layar dan 100 kapal jenis *galley*[141]. Kapal-kapal *galley* merupakan kapal berukuran besar yang sanggup menampung hingga 600–800 orang. Bahkan, Augustin de Beaulieu mencatat bahwa kapal-kapal milik Aceh itu ukurannya tiga kali lipat kapal-kapal yang dibuat di Eropa pada zamannya. Angkatan perang Aceh didukung pula oleh pasukan gajahnya yang jumlahnya mencapai 900 ekor. Binatang ini telah dilatih sehingga tidak takut terhadap api ataupun suara-suara tembakan. Penemuan belerang di Pulau Weh yang merupakan bahan baku mesiu sangat menguntungkan Aceh dan begitu pula halnya dengan sumber-sumber minyak di dekat Deli; di mana minyak tersebut dipergunakan pasukan Aceh membakar kapal-kapal musuhnya.

Setelah wafatnya Iskandar Muda hingga keruntuhannya pada awal abad ke-20, Aceh diperintah oleh para penguasa yang lemah. Salah satu faktor penyebab kemunduran itu adalah menguatnya kekuasaan kelompok bangsawan yang disebut *uleebalang* (hulubalang atau panglima perang). Mereka diserahi berbagai kawasan di Aceh yang boleh diperintah secara turun-temurun. Iskandar Muda masih sanggup mengendalikan para *uleebalang* tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan sultan-

140. Lihat *Sejarah Daerah Riau*, halaman 87.
141. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 64.

sultan Aceh berikutnya. Para panglima perang itu menjadi makin besar kekuasaannya, sehingga sultan akhirnya hanya berkuasa di ibukotanya saja. Mereka juga ikut andil dalam memilih sultan Aceh, yakni demi melindungi kepentingan masing-masing. Alasan lain bagi kemunduran ini adalah hubungan antara pusat dan daerah pedalaman. Pusat pemerintahan membutuhkan daerah pedalaman yang menghasilkan bahan pangan guna menopang kehidupan warganya. Pada kenyataannya, ibukota Aceh tidak memiliki hubungan yang erat dengan daerah pedalaman. Selain itu, kawasan pedalaman Aceh juga kurang mampu menyediakan surplus bahan pangan yang memadai demi menghidupi warga perkotaannya. Inilah beberapa faktor penentu bagi mundurnya kekuasaan Aceh.

c. Perkembangan Aceh berikutnya

Iskandar Muda memerintahkan agar putranya sendiri dibunuh dan mengangkat putra Sultan Ahmad dari Pahang yang ikut dibawanya sebagai tawanan. Ia menjadikan putra sultan Pahang itu sebagai menantunya. Saat Iskandar wafat, ia menaiki singgasana dengan gelar Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah (1636–1641). Semasa pemerintahannya, Aceh tidak lagi melakukan ekspansi militer dan lebih memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah keagamaan. Aceh dengan segera menjadi pusat pengajaran agama Islam.

Berbeda dengan pendahulunya yang bersikap tegas terhadap Belanda, Sultan Iskandar Thani menjalin hubungan kerja sama dengan Belanda guna menandingi pengaruh Portugis. Armada laut Aceh tidak lagi sekuat dulu, sehingga kurang sanggup melindungi kapal-kapal dagang Aceh dari serangan para perompak. Bahkan di daerah pantai yang lemah pertahanannya, kaum perompak tidak hanya merampas hasil bumi, melainkan menawan pula penduduknya yang kemudian dijual sebagai budak belian. Kebesaran Aceh di mata bangsa asing, baik Portugis, Belanda, maupun Inggris mulai pudar. Bahkan pada 1639, Sultan Iskandar Thani memberikan izin bagi Belanda memonopoli perdagangan timah di Perak dengan harga pembelian yang rendah. Sebagai imbalannya, Belanda berjanji memberikan bantuan apabila Aceh terlibat peperangan dengan Portugis. Pada tahun yang sama dengan mangkatnya Iskandar Thani, yakni 1641, Belanda berhasil mengusir Portugis dari Malaka dan mendudukinya. Dengan demikian, posisi Belanda di Selat Malaka bertambah kuat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang makin melemahkan Aceh.

Tatkala Iskandar Thani wafat, para *uleebalang* yang semakin besar pengaruhnya berusaha memilih penguasa yang lemah, sehingga tidak mengancam kekuasaan mereka. Sebagai penggantinya diangkat janda Iskandar Thani yang juga merupakan putri Iskandar Muda sebagai sultan. Penguasa baru yang bergelar Ratu Tajul Alam Safiatuddinsyah (1641–1675) ini adalah sultan wanita pertama Aceh. Diadakan pula kesepakatan dengan Johor bahwa semenjak saat itu kedua kerajaan tidak akan saling mengganggu satu sama lain dan menjalankan urusannya sendiri-sendiri.

Selama pemerintahan Tajul Alam, kekuasaan berada di tangan empat orang pejabat tinggi, di mana ratu tak berhak menerima seseorang atau mengeluarkan keputusan pemerintahan tanpa kesepakatan mereka. Salah satu alasan lain mengapa Aceh bersedia menerima seorang wanita sebagai pemimpin mereka disebabkan kekhawatiran mereka terhadap Johor yang saat itu makin meningkat pamornya. Para sultan Johor merasa berhak atas takhta Aceh karena ikatan kekerabatan melalui perkawinan pada masa-masa sebelumnya. Ancaman ini menjadikan para bangsawan Aceh bersedia dipimpin oleh kaum wanita. Mereka pernah bersumpah tak akan bersedia takluk pada sultan-sultan yang berada di luar Aceh.[142]

Belanda yang menjalin hubungan baik dengan Aceh dibiarkan tetap menguasai Malaka, di mana pada tahun 1643 mereka mengirimkan ucapan selamat atas penobatan Ratu Tajul Alam serta memanfaatkan kesempatan tersebut menagih pembayaran atas sejumlah perhiasan yang dulu pernah dipesan almarhum suaminya. Kendati demikian, ratu tak bersedia melunasinya. Hubungan dengan Belanda tidak selamanya berjalan tanpa gejolak. Sultan Aceh membantu Perak yang merupakan musuh Belanda. Karena itu, Belanda pada tahun 1664 mengirimkan kapal perangnya di bawah komando Pieter de Bitter dan menduduki beberapa kawasan di pantai Barat Sumatera yang menjadi jajahan Aceh. Karena melemahnya Aceh ini, Deli selaku salah satu negara bawahan Aceh melepaskan diri.

Setelah mangkatnya Tajul Alam, Aceh kembali dipimpin oleh seorang sultan wanita, yakni Nurul Alam (1675–1677). Selama masa pemerintahan singkatnya itu tidak terjadi peristiwa penting yang perlu dicatat. Penguasa selanjutnya juga seorang wanita yang bergelar Inayat Zakiatudin Syah (1677–1688). Sewaktu ia berkuasa atau tepatnya pada tahun 1684, datanglah utusan pemerintah Inggris dari Madras yang meminta izin pendirian benteng dari batu di kawasan Aceh. Ratu menolaknya karena

142. Lihat *Sejarah Sumatra*, halaman 400.

khawatir Inggris akan memanfaatkan benteng itu sebagai langkah awal menguasai negerinya. Meskipun demikian, Inggris diperbolehkan mendirikan benteng asalkan bahannya terbuat dari kayu. Beberapa tahun sebelum kedatangan utusan Inggris di atas, ratu pernah mencoba membangun aliansi dengan Siam dalam rangka menghadapi Belanda yang telah merugikan Aceh dan mencaplok berbagai wilayahnya. Namun aliansi ini tidak membuahkan hasil yang nyata. Latar belakang kedatangan Inggris itu disebabkan jatuhnya Banten ke dalam jeratan monopoli perdagangan VOC; sehingga mengharuskan Inggris hengkang dari sana.

Kamalat Syah (1688–1699), pengganti Inayat Syah, merupakan sultan wanita terakhir. Awalnya, penobatan sultan ini ditentang oleh sebagian kaum bangsawan yang menghendaki seorang pria sebagai penguasa mereka. Pecahlah perang saudara, tetapi tidak berlangsung lama. Perdamaian dapat dicapai dan mereka semua akhirnya sepakat mengangkat Kamalat Syah sebagai sultan baru. Dalam kurun waktu pemerintahannya, Inggris diizinkan membangun loji kecil berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan penguasa sebelumnya. Namun, belakangan pihak Inggris membatalkan rencananya itu. Peristiwa penting lainnya, adalah kedatangan 6 kapal perang Belanda yang mengejutkan rakyat Aceh. Tetapi mereka segera berlalu tanpa memperlihatkan tindakan permusuhan apapun. Sultan wanita terakhir ini diturunkan dari singgasananya pada tahun 1699 tanpa alasan yang jelas. Demikianlah, mulai dari Tajul Alam hingga Kamalat Syah, Aceh diperintah oleh empat sultan wanita secara berturut-turut.

Badrul Alam Sherif Hasham (1699–1702) dipilih sebagai penggantinya. Sultan ini menderita penyakit polio sehingga kesulitan melakukan aktivitasnya. Itulah sebabnya, tidak lama kemudian ia dipaksa turun takhta pada tahun 1702 dan meninggal sebulan kemudian. Perkasa Alam (1702–1704), seorang tokoh agama, merebut kekuasaan di Aceh. Ia mengenakan bea tertentu terhadap barang-barang yang diimpor oleh Inggris, padahal sebelumnya Inggris dibebaskan dari segala jenis pungutan, kecuali menyerahkan hadiah berupa cenderamata bagi sultan. Ketentuan baru ini ditolak oleh para kapten kapal Inggris. Oleh karenanya, mereka menembaki pemukiman-pemukiman yang berada dekat muara sungai, sehingga mengganggu arus perniagaan. Warga yang menderita karena aksi kekerasan ini memprotes pemerintah pusat, sehingga sultan terpaksa mengembalikan hak-hak istimewa Inggris tersebut. Rakyat banyak yang merasa tak puas terhadap Perkasa Alam, mereka menerbitkan

kerusuhan serta menuntut mundurnya sultan. Akhirnya, Perkasa Alam turun takhta pada tahun 1704 dan digantikan oleh Jamal Al Alam (1704–1723).

Jamal Al Alam memerintah dengan adil dan bijaksana. Golongan kaya yang terdiri dari kaum bangsawan dan pedagang hidup makmur. Semasa pemerintahannya, sultan tidak dapat berdagang bagi dirinya sendiri, karena dicegah oleh golongan kaya (disebut *orang kaya* atau *rangkaya*). Namun, sultan berhak memungut pajak sebesar 10 % yang menjadi sumber penghasilannya. Ibukota kerajaan berkembang menjadi suatu metropolis yang ramai. Banyak pula orang asing yang bermukim di sana, seperti India dan China. Semasa pemerintahannya, kekuasaan sultan Aceh dirongrong oleh beberapa pemberontakan. Sebuah kawasan yang bernama Batubara hendak melepaskan dirinya dari kekuasaan Aceh. Sultan mengirimkan ekspedisi militer menghukum para pembangkang, tetapi dapat dikalahkan mereka dengan tipu muslihat. Para raja di kawasan itu pura-pura menyerah dan mengirimkan kelapa muda yang telah dibubuhi racun pada sultan. Tanpa rasa curiga sultan meminumnya sehingga jatuh sakit. Dengan demikian, pasukan Aceh mengundurkan dirinya. Pemberontakan lainnya diterbitkan oleh seorang *uleebalang* bernama Muda Seti. Kali ini sultan terpaksa melarikan diri ke Pidie dari ibukotanya (November 1723). Saat sultan absen dari istananya itu diangkat seorang hulubalang bernama Maharaja Lela sebagai wakilnya. Kaum pemberontak meluluh lantakkan ibukota dan melakukan penjarahan besar-besaran. Kendati demikian, mereka tidak mengganggu istana sedikitpun. Setelah beberapa hari masa kacau itu, para panglima perang bermusyawarah perihal pengangkatan sultan baru. Mereka sepakat memilih salah seorang panglima perang yang paling berkuasa sebagai penguasa baru dengan gelar Jauhar al-Alam Amin al-Din (ada yang mengejanya sebagai Juhar Alam), tetapi ia meninggal tujuh hari kemudian. Kemenakan Jamal Al Alam yang bernama Undei Tebang dipilih sebagai penggantinya dengan gelar Syamsul Alam (1723; ada yang mengejanya Syams al-Alam). Tetapi tidak lama kemudian dipecat kembali oleh para pemimpin 4 Mukim (salah satu kawasan yang menjadi negara bagian Aceh), karena dianggap pengikut Muda Seti.

Para panglima perang selanjutnya sepakat memilih Maharaja Lela, yang pernah mewakili sultan saat melarikan diri, sebagai penerus takhta Aceh dengan gelar Alauddin Ahmad Syah Juhan (1724–1735; ada yang mengejanya Alauddin Akhmadsyah). Ketika sultan ini meninggal para bulan Juni 1735, para pengikut Jamal Al Alam,

yakni bekas sultan yang tersingkir dari singgasananya, menasihati agar ia segera menggunakan kesempatan tersebut merebut kembali kekuasaannya. Namun ia meremehkan saran itu dan menundanya hingga esok hari. Putra sulung almarhum sultan Alauddin Ahmad Syah Juhan yang bernama Po-chatan (Powak) mengumpulkan saudara-saudaranya dan menggalang dukungan dari Perbawang Syah, panglima perang yang menguasai kawasan 25 Mukim agar mereka bersedia memilih dirinya sebagai sultan baru. Perbawang Syah tanpa dukungan panglima perang lainnya mengangkat Po-chatan sebagai sultan dengan gelar Alauddin Juhan Syah (1735–1760). Pecah pertempuran antara pasukan sultan dengan Jamal al Alam. Meskipun demikian, Jamal al Alam merasa ketakutan dan memilih mundur ke Kampung Jawa, sedangkan para pengikutnya tetap bertahan di sana. Perang saudara ini berlangsung hingga 10 tahun. Akhirnya disepakati bahwa Po-chatan tetap menjadi sultan.

Sultan Alauddin Juhan Syah berupaya mencampuri dan memonopoli perdagangan, sehingga timbul gesekan dengan kaum bangsawan. Muda Seti yang besar kekuasaannya di kalangan bangsawan dan panglima perang menerbitkan pemberontakan lagi dengan dukungan 20.000 pengikutnya. Pecah peperangan selama dua tahun. Namun setelah itu Muda Seti mengundurkan diri kembali ke wilayah kekuasaannya, sehingga berakhirlah peperangan–mungkin karena kaum bangsawan merasa telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lima tahun setelah peristiwa ini, sultan meninggal dan putranya yang bernama Pochat-bangsa menjadi sultan baru dengan gelar Alauddin Muhammad atau Mahmud Syah (1760–1781).

Karena sultan baru ini diangkat tanpa persetujuan para *uleebalang*, pecah kericuhan lagi. Pemberontakan rakyat yang terjadi pada tahun 1763 dan 1764 memaksa sultan melarikan dari dari istananya. Takhta direbut oleh seorang panglima perang bernama Sinara yang menggelari dirinya Sultan Badaruddin Juhan Syah. Ia hanya sempat berkuasa selama kurang lebih setahun. Selanjutnya, pada tahun 1765 ia dibunuh oleh pengikut Alauddin Muhammad yang kembali menduduki takhtanya. Tidak lama kemudian, pemberontak lain bernama Raja Udah merebut kekuasaan dan menggelari dirinya Sultan Sulaeman Syah. Perebut takhta ini hanya sempat memerintah 3 bulan saja sebelum diusir oleh para pengikut Alauddin Muhammad. Alasan perebutan takhta ini tidak diketahui dengan jelas. Hingga meninggalnya Sultan Alauddin Muhammad di tahun 1781, Aceh tidak pernah tenang dan senantiasa diwarnai pergolakan.

Pada bulan September 1771 berlangsunglah kunjungan utusan Inggris bernama Giles Holloway ke Aceh. Tujuannya adalah mengajukan permohonan pembukaan kantor perwakilan dagang Inggris. Hal lain yang hendak disampaikan adalah permasalahan Panglima Laut, seorang asal Singkil yang bertindak sebagai wakil sultan[143]. Armada Panglima Laut kerap berselisih dengan kapal-kapal Inggris dan Belanda; sehingga Giles Holloway juga diminta membicarakan masalah tersebut dengan sultan Aceh. Pada mulanya, Sultan Mahmud Syah tidak bersedia menerima Halloway yang datang dengan menumpang kapal *Luconia*[144]. Salah satu alasannya, sultan menganggap Holloway hanya sebagai pedagang, sehingga menurut tradisi, ia seharusnya diterima lebih dahulu oleh syahbandar. Mungkin juga ada pihak-pihak yang menyarankan sultan agar jangan menerima Halloway karena merasa terancam dengan kehadiran kantor perwakilan dagang Inggris. Holloway harus menunggu hingga tiga minggu sebelum dapat berjumpa sultan. Saat ditanya mengenai kegiatan Panglima Laut, sultan menyangkal bahwa Panglima Laut bertindak atas perintahnya. Memang benar bahwa beliau pernah mengangkat Panglima Laut, namun tindakan-tindakan selanjutnya dilakukan tanpa persetujuan sultan. Bersamaan dengan itu, terdengar kabar bahwa Panglima Laut kembali ke Aceh dan ditangkap oleh para pengawal sultan. Apa yang terjadi pada Panglima Laut selanjutnya tidaklah diketahui, tetapi hal ini juga dicatat oleh sumber Belanda[145].

Holloway tidak jadi menyampaikan permohonan izin pendirian kantor perwakilan dagang Inggris di Aceh karena merasa bahwa sultan tampaknya kurang tertarik dengan gagasan tersebut. Di samping itu, ia khawatir para *uleebalang* akan menentangnya. Berdasarkan hasil pengamatannya, Holloway melaporkan bahwa Aceh kurang menguntungkan secara ekonomis dan kondisi keamanannya belum memungkinkan pendirian kantor perwakilan dagang.

Ketika anak sulung Sultan Mahmud Syah hendak diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Alauddin Mahmud Syah Juhan atau Alauddin Muhammad Syah (1781–1795) sebagian kaum bangsawan menentangnya sehingga hampir saja pecah perang saudara. Untunglah seorang tokoh yang disegani bernama Tuanku Agung yang sekaligus menjadi guru pangeran sulung berhasil membujuk mereka menerima anak didiknya sebagai sultan baru. Pada masanya, Inggris bermaksud menjalin hubungan

143. Lihat *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*, halaman 37.
144. Lihat *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*, halaman 39.
145. Lihat *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*, halaman 40-41.

dengan Aceh. Warren Hastings–wakil pemerintah Inggris di India–mengirimkan 300 pucuk meriam kecil pada sultan. Namun sultan Aceh menganggapnya tidak berguna dan mengirim surat balasan yang tajam. Akibatnya, Warren Hastings merasa tersinggung dan setelah itu tidak terdapat lagi komunikasi di antara mereka.

Sultan Alauddin Muhammad Syah mangkat pada tahun 1795 dengan meninggalkan seorang putra yang masih kecil bernama Husin. Sebulan kemudian barulah semua pihak sepakat mengangkatnya sebagai sultan Aceh dengan gelar Jauhar Alam Syah (1795–1823). Karena usianya yang masih belia, ia didampingi oleh ibunya bernama Pocut Meurah dan pamannya, Tuanku Raja Cut. Setelah menginjak usia dewasa pada tahun 1802 barulah ia diperkenankan memerintah sendiri. Tetapi Tuanku Raja Cut enggan melepaskan kekuasaannya, sehingga menolak penobatan Jauhar Alam Syah sebagai sultan sepenuhnya. Berkat bantuan Kali Malikul Adil, Jauhar Alam Syah berhasil mempertahankan takhtanya. Tuanku Raja Cut melarikan diri dan terbunuh di Neusoh.

Kekuasaan Sultan Jauhar Alam Syah diusik oleh seorang tokoh keturunan Arab bernama Sayid Husin. Sebenarnya Sayid Husin ini masih keturunan bangsawan Aceh juga. Karena kedudukannya yang tergolong bangsawan, Sayid Husin memperoleh berbagai keistimewaan dan fasilitas dalam perniagaan. Namun semuanya dihapuskan semasa pemerintahan Jauhar Alam Syah. Kebijakan sultan ini merupakan pukulan telak bagi bisnis Sayid Husin; sehingga tidak mengherankan apabila ia merasa sangat mendendam dan mengumpulkan segenap kekayaannya demi menumbangkan sultan.

Pergolakan yang terjadi di ibukota memaksa Sultan Jauhar Alam Syah melarikan diri dari ibukota dan meminta perlindungan Tuanku Karot, *uleebalang* Lhokseumawe. Sayid Husin berniat mengangkat putranya, Syaiful Alam, sebagai sultan Aceh. Dengan dukungan Inggris dan Tuanku Pakeh, *uleebalang* Sigli, pada tahun 1815 Syaiful Alam dinobatkan sebagai sultan. Karena itu, kini terdapat dua orang sultan di Aceh. Para pendukung Syaiful Alam melancarkan serangan terhadap Sultan Jauhar Alam Syah di ibukota. Akibatnya, Sultan Jauhar Alam Syah memprotes tindakan Inggris yang mengizinkan kapalnya dipergunakan mengangkut rombongan Syaiful Alam, tetapi dianggap angin lalu. Dengan terpaksa Sultan Jauhar Alam Syah menyingkir kembali ke Lhokseumawe.

Keadaan mulai berbalik ketika pecah perselisihan antara Tuanku Pakeh dengan Syaiful Alam di tahun 1817. Akibatnya, Syaiful Alam kehilangan pelindungnya

yang kini beralih memihak Jauhar Alam Syah. Bahkan Tuanku Pakeh berhasil merangkul Teuku Bintara Keumangan berpihak padanya. Sultan Jauhar Alam Syah merupakan seorang tokoh yang terpelajar. Beliau fasih berbahasa Inggris dan tertarik pula mempelajari karya-karya Shakespeare. Tak lama kemudian, Inggris mencoba mendekati beliau dan menawarkan bantuan memulihkan kekuasaannya asalkan bersedia menandatangani sebuah perjanjian. Demikianlah, pada 22 April 1819 sultan menandatangani perjanjian yang pada intinya berisikan persahabatan dan ikrar saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Syaiful Alam kehilangan kekuasaannya dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, Inggris menjanjikan tunjangan sebesar 6.000 Dollar setahun padanya.

d. Belanda menguasai vasal-vasal Aceh di Sumatera Timur

Sultan Jauhar Alam Syah digantikan oleh Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah (1823–1838) yang kerap disebut Sultan Muhammad Syah saja[146]. Sebenarnya yang lebih berhak menjadi sultan Aceh adalah putra permaisuri bernama Tuanku Ibrahim. Meskipun demikian, para panglima sagi menjatuhkan pilihannya pada Muhammad Syah, sehingga akhirnya ia yang dinobatkan sebagai sultan Aceh. Semasa pemerintahan sultan ini berlakulah penanda-tanganan Traktat London, yakni pada 17 Maret 1824. Isinya adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Sebagai realisasi perjanjian ini, Inggris menyerahkan Bengkulu pada Belanda dan Belanda menyerahkan Malaka pada Inggris. Berdasarkan Traktat London pula, Belanda dan Inggris sepakat menghormati kedaulatan Aceh yang saat itu secara *de facto* masih merupakan negara merdeka. Meskipun demikian, ini hanya taktik penjajah saja, karena mereka memang telah mengincar Aceh dan akan menganeksasi negeri tersebut manakala ada kesempatan.

Semasa abad ke-19, Aceh selaku salah satu imperium terkemuka di Sumatera berebut pengaruh dengan Siak dan Riau Lingga. Hingga abad ke-19, Kesultanan Aceh mencakup pula beberapa kerajaan di Sumatera Timur. Bersamaan dengan itu, Siak Sri Indrapura berniat melebarkan payung kekuasaannya hingga ke Sumatera Timur, yakni daerah-daerah yang menjadi vasal Kesultanan Aceh. Pada tahun 1761 dan 1780, Siak melancarkan serangan ke Asahan, Deli, Serdang, Senembah, Sunggal, Langkat, dan Tamiang. Kerajaan-kerajaan tersebut beralih mengakui kedaulatan Siak yang diwujudkan dengan penganugerahan gelar bagi para penguasanya; sebagai contoh

146. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 93.

raja Deli menerima gelar Sultan Amaluddin Mengedar Alam pada tahun 1814; dua serangkai penguasa Langkat yakni Nobatsyah dan Ahmad, masing-masing memperoleh gelar Raja Bendahara dan Kejeruan Muda; raja Denai mendapat gelar Raja Graha al Wasikubillah Kurnia Siak; raja Serbajadi dengan gelar Kejeruan Santun Serbajadi; dan lain sebagainya.[147]

Sultan Muhammad Daud Syah digantikan oleh putranya Sultan Sulaiman Ali Iskandar Syah (1838–1857). Meskipun demikian, yang memegang kekuasaan adalah pamannya, Tuanku Ibrahim. Belakangan Tuanku Ibrahim mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Aladdin Ibrahim Manysur Syah (1850–1870). Saat Tuanku Ibrahim menjadi sultan, kemenakannya tetap memerintah hingga ia meninggal di tahun 1857. Dengan demikian, saat itu kembali terdapat dua orang sultan di Aceh. Pasalnya, Tuanku Ibrahim semenjak tahun 1850 menganggap dirinya sebagai sultan dan enggan dianggap wali saja. Baru setelah Sulaiman Ali Iskandar Syah meninggal di tahun 1857, dapatlah ia memerintah dengan tenang. Tindakan Siak merebut daerah-daerah vasal Aceh sebagaimana yang baru saja diungkapkan di atas mengesalkan sultan Aceh. Karenanya, pada tahun 1854 mereka mengirimkan 200 kapal perangnya ke Sumatera Timur. Negeri-negeri yang sebelumnya direbut oleh Siak kini berbalik mengakui lagi payung pertuanan Aceh. Dengan demikian, para penguasanya kembali bertindak selaku wakil sultan Aceh di daerahnya; sebagai contoh sultan Deli saat itu, Osman Perkasa Alam, menerima pengukuhan dari Aceh berupa *bawar* (pusaka) dan "meterai sembilan." Bersamaan dengan itu, masih saja terjadi persaingan antara dua kekuatan utama di Eropa, yakni Belanda dan Inggris dalam memperebutkan pengaruh di Kepulauan Nusantara; walapun permasalahan ini sebelumnya telah diselesaikan dengan penanda-tanganan Traktat London (1824), yang menyepakati pembagian daerah pengaruh antara Inggris dan Belanda; di mana Inggris mengakui kedaulatan Belanda di Kepulauan Nusantara dan sebaliknya, Belanda mengakui Semenanjung Melayu adalah daerah pengaruh Inggris.

Belanda yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Jan van Swieten mengikat perjanjian perdamaian dengan Aceh pada 30 Maret 1857 (disahkan oleh gubernur jenderal dengan *besluit* no.7 tanggal 9 Mei 1857)[148]. Belanda dan Aceh berdasarkan kesepakatan bersama tidak akan lagi memancing permusuhan satu sama lain. Kendati

147. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur 1612–1950*, halaman 100–101.
148. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 95.

demikian, perjanjian ini hanya merupakan sarana Belanda mengalihkan perhatian Aceh, karena niat tersembunyi mereka adalah menguasai seluruh Sumatera Timur. Sebagai manuver selanjutnya, pemerintah kolonial memaksa Sultan Siak Sri Indrapura menandatangani perjanjian pada tahun 1858 yang mengakui pertuanan Belanda atas negeri Siak beserta daerah-daerah taklukannya, yang meliputi Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Padahal beberapa kawasan di atas sebenarnya adalah vasal-vasal Aceh. Perjanjian ini kemudian dimanfaatkan Belanda mencengkeram negeri-negeri taklukan Siak sebagaimana yang telah disebutkan di atas; karena secara tidak langsung kesepakatan tersebut mengandung penyerahan vasal-vasal Siak pada pemerintah kolonial Belanda.

Belanda memanfaatkan jasa seorang keturunan Pagarruyung bernama Raja Burhanuddin untuk mengenal lebih jauh kondisi Sumatera Timur sebelum mengirimkan ekspedisi ke sana. Raja Burhanuddin menyamar sebagai seorang pedagang besar berdarah bangsawan. Terkadang ia menyamar pula sebagai seorang haji. Sambutan yang baik diterimanya di Serdang dan kawasan-kawasan lainnya, terkecuali Asahan. Kepandaiannya memikat hati para raja memungkinkannya mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan Belanda. Bahkan, Raja Burhanuddin dinikahkan dengan seorang putri Serdang dan beberapa tahun kemudian dengan putri Deli. Salah seorang putrinya bernama Tengku Darwisyah menjadi permaisuri sultan Serdang ke-3, Sulaiman Syariful Alamsyah. Setelah berhasil menunaikan tugasnya di Sumatera Timur, Raja Burhanuddin–yang juga dikenal sebagai Tengku Komandan di Serdang–meneruskan misi rahasianya ke Batak, Barus, Singkel, Tapak Tuan, dan Aceh Besar.

Menyadari strategi licik Belanda yang memanfaatkan perjanjian dengan sultan Siak, Sultan Ibrahim Mansyursyah dari Aceh merasa kesal, karena belum lama berselang Belanda telah mengikat perjanjian perdamaian dengan Aceh. Selain itu, berdasarkan Traktat London, kedaulatan Aceh diakui dan dihormati. Tindakan Belanda ini dirasa Aceh sebagai pelanggaran terhadap hak dan kedaulatannya. Ketika utusan Belanda, Brutel de la Riviere, datang ke Aceh guna menyelesaikan masalah kapal-kapal dagang Belanda yang ditahan di Aceh karena dituduh melanggar kedaulatannya, sultan Aceh menegaskan kembali bahwa wilayah Aceh adalah juga mencakup negeri-negeri vasalnya di Sumatera Timur. Sultan mengungkapkan bahwa Aceh tak akan membiarkan begitu

saja segala bentuk pencaplokan terhadap daerah kekuasaannya dan mendesak agar masalah perbatasan ini diselesaikan selekas mungkin. Ternyata perundingan ini juga dijadikan alat pengulur waktu saja oleh Belanda.

Laporan-laporan Raja Burhanuddin mengenai kondisi Sumatera Timur dipergunakan Belanda merancang suatu ekspedisi militer pencaplok kawasan tersebut. Residen Elisa Netscher ditugaskan pemerintah pusat di Batavia agar berangkat dengan kapal perang *Reinier Claasen* ke Sumatera Timur dan mengikat perjanjian dengan raja-raja di sana. Rombongan Netscher singgah di Bengkalis pada 2 Agustus 1862 guna menjemput asisten residen Riau, kontrolir Siak, dan lima orang pembesar utusan sultan Siak; yakni mangkubumi, laksana, beserta tiga orang datuk orang besar Siak. Tiga hari kemudian atau tepatnya tanggal 5 Agustus 1862, rombongan tiba di Panai. Selama 10 hari diadakan pembicaraan mengenai masalah perbatasan dan setelah itu barulah perjanjian dapat ditanda-tangani oleh sultan Panai, Tengku Abdullah (gelar Sutan Mengedar Alamsyah) dan sultan Bilah, Tengku Abbas (gelar Sutan Bidar Alamsyah).

Karena Netscher mendengar kabar bahwa Kerajaan Asahan dan Batubara menentang kedatangan misi Belanda serta telah memasang ranjau beserta kubu pertahanan di sepanjang sungai, mereka tidak berani singgah di sana dan meneruskan perjalanannya ke Serdang. Rombongan tiba di Serdang pada 12 Agustus 1862. Keesokan harinya, asisten residen diutus mengundang sultan Serdang, Basyarudin, yang datang dengan sebuah kapal berbendera Aceh disertai beberapa pembesarnya. Sultan Serdang menaiki kapal perang *Reinier Claasen*. Di bawah tekanan, sultan Serdang terpaksa menandatangani perjanjian 7 pasal dengan pemerintah kolonial. Bila dicermati, pasal pertama perjanjian tersebut berisikan pengakuan bahwa sultan Siak Sri Indrapura adalah pemegang kedaulatan di negeri Serdang; sedangkan sultan Siak sendiri adalah bawahan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Serdang yang sebelumnya mengakui pertuanan Aceh kini secara tidak langsung berada di bawah payung kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Jadi, Belanda meminjam nama sultan Siak dan seolah-olah bertindak demi kepentingan Kesultanan Siak. Inilah strategi Belanda dalam memanfaatkan perjanjian yang ditanda-tanganinya dengan sultan Siak pada tahun 1858.

Sebagai imbalan atas kesediaannya menandatangani perjanjian, sultan Serdang dihadiahi daerah Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang, yang sebelumnya

berada di bawah kekuasaan Deli. Meskipun demikian, para penguasa setempat ataupun raja Deli tidak diberi tahu perihal tersebut, sehingga berpotensi memancing permasalahan di kemudian hari. Tentu saja Deli menentang hal ini. Karenanya diadakan pembaharuan perjanjian pada 6 Oktober 1865 yang mengembalikan daerah-daerah di atas pada Deli. Berdasarkan perjanjian yang ditanda-tanganinya, penguasa Serdang diakui sebagai sultan yang berdaulat di negerinya.

Selanjutnya misi Netscher bergerak ke Deli dan tiba di sana pada 21 Agustus 1862. Sultan Mahmud Perkasa Alam dari Deli dengan disertai para pembesarnya mengadakan perundingan dengan wakil-wakil pemerintah kolonial Belanda di atas kapal. Ia disodori perjanjian yang isinya pengakuan terhadap pertuanan Kesultanan Siak atas Deli. Namun, sultan mengungkapkan bahwa Siak tak pernah melindungi Deli dari serangan-serangan yang berasal dari luar. Selain itu, sultan Deli adalah wakil sultan Aceh di Sumatera Timur, sehingga tentunya ia tak dapat menerima perjanjian tersebut begitu saja. Perundingan hari pertama menemui jalan buntu dan sultan diizinkan kembali ke darat. Kendati demikian, sultan sadar bahwa Belanda pasti akan melakukan tekanan-tekanan militer padanya bila menolak menandatanganinya.

Saat berlangsungnya perundingan hari kedua, Netscher menyarankan rumusan bahwa Deli beserta taklukannya "terikat" dengan Siak dan bersama-sama dengannya "bernaung" pada Belanda. Sultan Deli menafsirkan bahwa kata "bernaung" itu hanya berarti Deli berada di bawah perlindungan atau menjadi daerah protektorat dan bukannya jajahan Belanda. Karenanya, ia bersedia menandatangani perjanjian pada 22 Agustus 1862. Sesudah menyelesaikan tugasnya di Deli, Netscher bertolak ke Langkat. Tetapi Aceh yang telah mengetahui niat licik Belanda ini mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Tengku Hasyim (Tengku Hitam) beserta Cut Latip guna menghadang rombongan Belanda tersebut. Selain itu, Inggris mengirimkan kapal perang *Scout* ke Labuhan Deli atas perintah Gubernur Cavenagh di Singapura guna meninjau atau memata-matai gerak-gerik Belanda di Sumatera Timur. Akibatnya, misi Netscher di Langkat boleh dikatakan gagal.

Pada tahun 1863, sultan Asahan menjumpai Gubernur Cavenagh selaku wakil pemerintah Inggris di Singapura dan sultan Aceh guna memohon bantuan menghadapi Belanda. Tetapi bantuan ini ternyata tidak kunjung diberikan. Sebelum sultan Asahan mengunjungi Singapura, seorang utusan gubernur Inggris telah membawa surat-surat dari Datuk Pulau Kampai, penguasa Langkat, sultan Deli, para datuk di Batubara,

dan sultan Asahan. Isinya juga berkaitan seputar permohonan bantuan aktif Inggris dalam menentang agresi Belanda. Pada kenyataannya, surat-surat ini justru makin memperkuat niat Belanda menanamkan kuku kekuasaannya di Sumatera Timur.

Demi menghindarkan persaingan yang berlarut-larut antara kedua kekuatan kolonialis, yakni Belanda dan Inggris; kedua belah pihak mengadakan perjanjian pada 2 November 1872 yang dikenal sebagai *Traktat Sumatera*. Belanda memberikan kesempatan pada Inggris memperoleh hak dan keuntungan yang sama dengan Belanda dalam perniagaan di Sumatera. Kapal-kapal dagang Inggris diizinkan mengadakan perniagaan di Sumatera secara bebas, tentunya sesuai dengan undang-udang yang berlaku. Sebagai kompensasinya, Inggris akan membiarkan Belanda meluaskan kekuasaannya ke segenap penjuru Sumatera manapun, termasuk Aceh. Bahkan, Inggris berjanji tidak akan menjual atau menyuplai Aceh dengan perlengkapan militer. Bagi Aceh, perjanjian *Traktat Sumatera* ini merupakan kemunduran dibandingkan perjanjian sebelumnya, yakni *Traktat London*; yang mengakui kedaulatan Aceh. *Traktat Sumatera* ini membuka peluang bagi Belanda melancarkan invasi militer ke Aceh. Dengan kata lain, *Traktat Sumatera* merupakan salah satu pemicu Perang Aceh, yang berlangsung hingga kurang lebih 30 tahun.

e. Perang Aceh–Akhir Kesultanan Aceh

Di tengah-tengah konflik ini Sultan Ibrahim Mansyur Syah meninggal dunia pada tahun 1870. Sebagai penggantinya diangkat Sultan Mahmud Syah II (1870–1874), putra Sultan Sulaiman Iskandar Syah. Saat itu, sultan masih di bawah umur, sehingga Habib Abdurrahman diangkat sebagai wali merangkap menteri luar negeri. Kesultanan Aceh menyadari bahwa serangan Belanda tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu, Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang, syahbandar pelabuhan Bandar Aceh, diutus melakukan diplomasi ke luar negeri. Pertahanan Aceh diperkuat kembali, seperti yang ada di Kuta Meugat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi, dan lain sebagainya. Selain itu, tempat-tempat yang strategis juga disiap-siagakan.

Belanda makin bernafsu menguasai Aceh setelah mengetahui bahwa negeri tersebut sedang menjalin hubungan dengan pihak asing demi memperoleh persenjataan. Aceh membangun hubungan diplomatik dengan konsul-konsul Amerika Serikat dan Italia. Oleh karena itu, Belanda segera menentukan sikapnya karena khawatir Aceh akan jatuh ke dalam pengaruh negara Barat lainnya. Pada 18 Februari 1873, Menteri Jajahan van de Putte memerintahkan agar gubernur jenderal di Batavia segera mempersiapkan

serangan ke Aceh. Begitu memperoleh instruksi ini, Dewan Hindia segera bersidang pada 2 Maret 1873 guna mengatur persiapan teknis serangan ke Aceh. Kemudian, hasil sidang ditetapkan menjadi *besluit* gubernur jenderal tertanggal 4 Maret 1873. Kapal-kapal perang *Citadel van Antwerpen*, *Siak, Coehorn*, dan *Marnix* diberangkatkan ke Aceh tanggal 7 Maret 1873.

Citadel van Antwerpen berlabuh di Bandar Aceh pada 22 Maret 1873. Komisaris Nieuwenhuijzeun membawa surat berisikan tuntutan agar sultan Aceh menyerah dan mengakui kedaulatan Belanda. Apabila sultan menolaknya, barulah Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Surat ini disampaikan melalui Sidi Tahil, juru bahasa Belanda, yang didalamnya memuat tuduhan bahwa Aceh telah melanggar perjanjian tertanggal 30 Maret 1857. Dalam surat balasannya, sultan menolak tuntutan Belanda ini. Karenanya, Nieuwenhuijzeun melayangkan suratnya yang kedua; tetapi kembali sultan tidak bersedia menyerah pada Belanda. Akibatnya, pada 1 April 1873 Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Dengan demikian, Perang Aceh yang kelak belangsung selama kurang lebih 40 tahun pun berawal.

Pasukan Belanda mendarat di pantai Ceureumen pada 5 April 1873. Belanda telah memperhitungkan bahwa peperangan kali ini akan berlangsung singkat. Namun dugaan kaum kolonialis ini ternyata meleset. Belanda maju menuju mesjid Baiturrahman dan terjadilah pertempuran sengit di sana pada 14 April 1873. Pejuang Aceh dengan gigih mempertahankan kedaulatan negerinya dan bahkan berhasil memukul mundur musuh serta menewaskan Jenderal Kohler. Belanda terpaksa mundur ke daerah pantai dan berlayar kembali ke Jawa pada 29 April 1873. Perincian korban yang jatuh di kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak Belanda : 8 perwira dan 37 bawahannya tewas, 405 orang luka-luka (mencakup pula 32 perwira, diantara yang luka-luka ini 30 orang menyusul meninggal).
- Pihak Aceh : 900 orang tewas.

Setelah menelan kekalahan di atas, Belanda mengirimkan kembali angkatan perangnya pada 9 Desember 1873. Pasukan yang dipimpin Letnan Jenderal van Zwieten ini berkekuatan 8.500 pasukan, termasuk 389 perwira; yang mendarat di Kulau Lheue.

Rakyat Aceh lebih bersemangat dalam menghadapi serangan Belanda yang kedua ini. Pasukan kesultanan mendapat dukungan para *uleebalang*nya. Peperangan dashyat

berkecamuk di Mesjid Raya Baiturrahman pada 6 Januari 1874. Namun kali ini Belanda berhasil menghancurkan dan menguasai mesjid. Target Belanda berikutnya adalah istana kesultanan Aceh, yang baru berhasil dikuasai pada 24 Januari 1874. Sultan beserta keluarganya meninggalkan istana dan mengungsi ke Pagar Ayee. Kemalangan yang menimpa Kesultanan Aceh masih ditambah lagi dengan mangkatnya Sultan Mahmud Syah II pada 28 Januari 1874 karena wabah kolera. Dengan direbutnya istana dan kemangkatan sultan, Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh telah dapat ditaklukkan. Pemerintah kolonial memaklumkan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaannya. Meskipun demikian, para pemuka Kesultanan Aceh mengangkat Muhammad Daud (1874–1903), cucu Sultan Ibrahim Mansyur Syah, sebagai sultan baru. Namun karena usianya yang belum dewasa, Tuanku Hasyim diangkat sebagai walinya antara tahun 1874 hingga 1884. Pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Indrapuri (25 km sebelah tenggara ibukota yang diduduki Belanda), yang termasuk dalam wilayah Sagi XXII Mukim dan masih dalam kawasan Aceh Besar. Karena itu, pernyataan Belanda yang mengklaim kepemilikan atas Aceh Besar dianggap sepi oleh rakyat Aceh.

Letnan Jenderal van Zwieten kembali ke Batavia pada 16 April 1874 dan digantikan oleh Jenderal J. L. J. H. Pel dengan tugas membendung serangan laskar-laskar Aceh. Ia kemudian membangun 36 pos pertahanan di sekeliling Kutaraja, Krueng Aceh, dan Meuraksa. Selain itu, Pel merebut pula Krueng Raba dan Krueng Raya. Kini Belanda berniat menguasai daerah-daerah yang dikuasai para *uleebalang*. Belanda menggerakkan pasukannya ke Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Beberapa di antara para *uleebalang* itu ada yang takluk pada Belanda dan menandatangani pernyataan singkat enam pasal. Setelah tahun 1876 diganti dengan *lange verklaring* yang terdiri dari 18 pasal. Selanjutnya, semenjak tahun 1898 diganti kembali dengan *korte verklaring*.

Perlawanan yang dilakukan rakyat Aceh masih belum berakhir dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat, yakni rakyat biasa, para *uleebalang* yang belum memihak Belanda, ulama, dan bangsawan. Karenanya, Belanda menyebut perlawanan rakyat ini sebagai *volks oorlog* atau perang rakyat semesta. Dalam hati rakyat Aceh bersemi semangat perang sabil demi mengusir penjajah yang melanggar kedaulatan negeri mereka. Rakyat Aceh membangun benteng-benteng pertahanan yang mereka pertahankan hingga titik darah penghabisan. Hingga tahun 1876, Belanda belum

mencapai kemajuan dalam ekspedisi militernya ke Aceh. Laskah-laskar Aceh kerap menembus benteng-benteng pertahanan Belanda di sekeliling Kutaraja Jenderal Pel meninggal pada 24 Februari 1876 dan digantikan oleh Mayor Jenderal G.B.T. van Kerchem.

Pada tahun 1876 dan 1877, Belanda melancarkan serangan ke daerah-daerah yang belum mengakui kekuasaan Belanda, seperti Simpang Ulim, Tanjong Seumantok, Samalanga, dan Meureudu. Karena tidak sanggup mempertahankan diri terhadap gempuran pasukan kolonial yang lebih modern persenjataannya, para *uleebalang* yang menguasai kawasan-kawasan tersebut menyerah dan berpura-pura mengakui kekusaan Belanda; padahal di antara mereka tidak sedikit yang tetap menjalin hubungan dengan pejuang-pejuang Aceh serta mendukung perjuangan mengusir penjajah. Kenyataan ini sangat merepotkan pemerintah kolonial, karena hingga tahun 1877 mereka telah menghabiskan dana sejumlah f. 69 juta. Guna mengamankan Aceh sesegera mungkin, Belanda menambah jumlah pasukannya menjadi 9.240 orang pada tahun 1877 dan ditingkatkan kembali menjadi 10.000 orang pada 1878–1879. Kondisi Aceh tidak kunjung aman; sementara itu, biaya perang menggelembung hingga mencapai 150 juta Gulden pada akhir tahun 1884.

Sultan Muhammad Daud (1874–1903)
Sumber: *The Achehnese*

Selama kurun waktu sebelas tahun ini Belanda semakin tidak berdaya menghadapi laskar-laskar Aceh yang menerapkan taktik perang gerilya, sehingga mengubah strateginya dengan membangun *stelsel concentratie* pada 17 Juni 1884. Wujud penerapannya dengan membangun 16 pos penjagaan pada tanah seluas 50 km persegi di sekeliling Kutaraja. Masing-masing pos ini dibatasi tanah sejauh 1000 meter dan dihubungkan dengan sambungan telepon ke Kutaraja. Pada tahun yang sama, Muhammad Daud telah dianggap dewasa, sehingga berakhirlah masa perwaliannya. Ia

kemudian diangkat sebagai sultan Aceh dengan gelar Sultan Aladdin Muhammad Daud Syah. Upacara penobatan sultan Aceh ini berlangsung di mesjid Indrapuri. Pada kesempatan tersebut para pemuka Kesultanan Aceh, seperti Tuanku Hasyim, Panglima Polim, Ibrahim Muda Kuala, Tengku Cik Di Tiro, dan lain sebagainya mengikrarkan Perang Sabil melawan Belanda dengan tujuan memperbaharui semangat juang mereka.

Berkat adanya ikrar ini, perlawanan semakin menghebat. Satu per satu pahlawan Aceh bermunculan dan mengorbankan dirinya demi membela kehormatan tanah air mereka; seperti Teuku Imeum Lueng Bata, Panglima Polem Mahmud Cut Banta, Tuanku Hasim, Panglima Polem Ibrahim Muda Kuala, Teuku Ibrahim Lam Nga, Tengku Cik Di Tiro Muhammad Saman, Teuku Cik Muhammad Amin Tiro, Teuku Panglima Nyak Makam, Teuku Umar, dan lain sebagainya. Kaum wanita yang diwakili Cut Nyak Din dan Cut Nyak Meutia tidak mau ketinggalan mempertahankan negerinya. Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang merengut nyawa 21.865 rakyat Aceh antara tahun 1899–1909 atau sekitar 4 % penduduk Aceh saat itu. Strategi *Stelsel Concentratie* yang diterapkan Belanda juga tidak membuahkan manfaat apa-apa, baik secara ekonomis maupun politis.
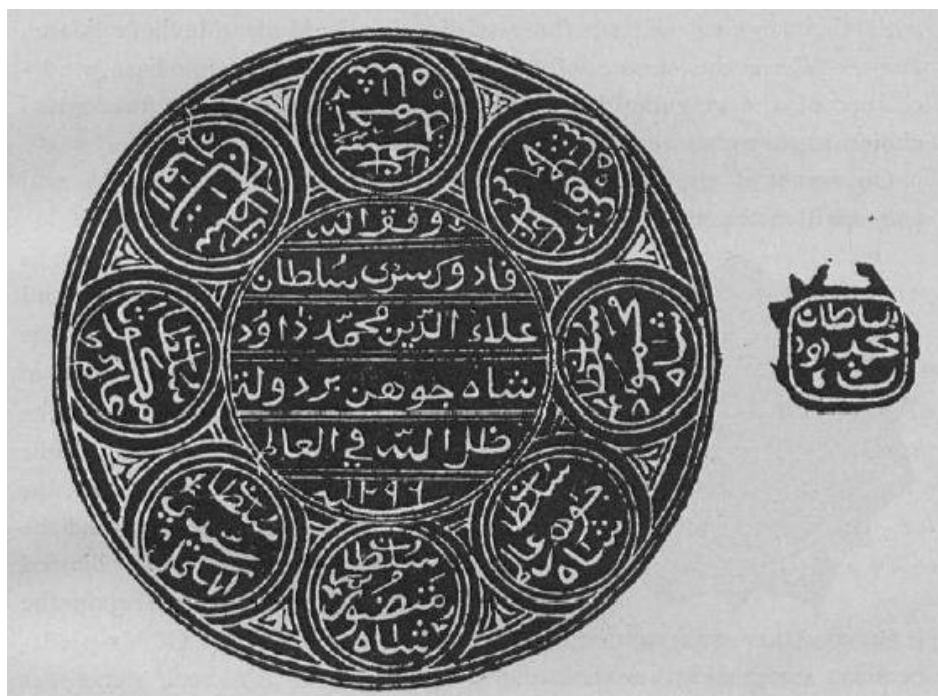
Cap milik Sultan Muhammad Daud
Sumber: *The Achehnese, halaman 129.*

Belanda memanfaatkan jasa seorang ahli masalah-masalah ketimuran (orientalis) bernama Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857–1936), yang pernah menjadi guru besar di Universitas Leiden, guna meneliti masyarakat Aceh. Hasil penelitian Snouck Hurgronje kelak dimanfaatkan pemerintah kolonial guna menundukkan kaum pejuang Aceh. Snouck Hugronje terjun ke Aceh dengan menyamar sebagai seorang Islam keturunan Turki. Ia berkeliling Aceh semenjak Juni 1891 hingga Februari 1892. Hasil penelitiannya ini kelak dibukukan dengan judul *De Atjehers* dan menjadi landasan strategi pihak kolonial mematahkan perlawanan rakyat Aceh.

Snouck mendapati bahwa gelora perang sabil merupakan motivasi terpenting rakyat Aceh terutama kaum ulamanya dalam melawan Belanda. Bagi mereka tidak ada kompromi terhadap Belanda yang dianggapnya kafir. Oleh sebab itu, Snouck menyarankan bahwa kaum ulama hanya dapat ditundukkan dengan jalan kekerasan[149]. Sebaliknya, kaum *uleebalang* harus dipikat memihak Belanda dan diajak bekerja sama. Dengan demikian, masyarakat Aceh menjadi terpecah belah, yakni antara *uleebalang* dan kaum ulama. Sejarah membuktikan bahwa perpecahan ini masih berlaku bahkan jauh setelah memasuki abad ke-20. Berdasarkan rekomendasi ini, Belanda menggalang kerja sama dengan para *uleebalang* dan pada sisi lain melakukan serangan ofensif besar-besaran ke berbagai daerah di Aceh. Semasa pemerintahan Gubernur van Heutz (1898–1904) gempuran makin diperhebat, terutama setelah kemiliteran Belanda diperkuat dengan satuan gerak cepat *marechausee*, yang bertujuan mengejar-ngejar laskar Aceh. Berkat pasukan gerak cepat ini, pada tahun 1898 Pidie dan Keumala berhasil diduduki oleh Belanda. Sultan menyingkir ke Tangse yang direbut Belanda tak lama kemudian. Ia lalu mengundurkan diri kembali ke Sawang dan setelah itu membangun pertahanan di Kuta Batee Illiek. Belanda merebut kubu pertahanan ini pada 1901, sehingga sultan terpaksa memindahkan pertahanannya ke Gayo. Istri sultan bernama Pocut Murong tertangkap pada 1902. Karena kejaran Belanda yang terus-menerus ini, sultan akhirnya menyerah pada tahun 1903; sehingga mengakhiri Kesultanan Aceh untuk selama-lamanya.

f. Sistem pemerintahan

Secara teoritis, kekuasaan tertinggi Kerajaan Aceh berada di tangan seorang sultan. Tetapi belakangan seiring dengan menguatnya kedudukan para *uleebalang* (hulubalang atau panglima perang), kekuasaan itu tinggal simbolis saja. Berdasarkan sejarah Aceh di

149. Lihat *Sejarah Indonesia Modern* (terjemahan Indonesia, edisi Maret 2005), halaman 221.

atas, nampak jelas bahwa para panglima perang dan golongan kaya mempunyai peran penting dalam mengangkat dan memberhentikan sultan. Para *uleebalang* ini menguasai suatu kawasan yang disebut *mukim*, di mana mereka masih memiliki tingkatan-tingkatan lagi. *Mukim* ini dapat disetarakan dengan negara bagian atau vasal. Menurut perkiraan terdapat kurang lebih 190 *mukim* di seantero kerajaan Aceh.[150] *Mukim-mukim* ini tercakup lagi menjadi suatu daerah yang lebih besar, contohnya adalah 4 Mukim, 23 Mukim, 25 Mukim, dan lain sebagainya. Angka itu menyatakan jumlah *mukim* yang tercakup di dalamnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang panglima *mukim* didampingi oleh seorang imam dan empat penghulu untuk melaksanakan urusan-urusan keagamaan. Belakangan daerah-daerah yang dipimpin *uleebalang* ini menjadi makin otonom, sehingga dapat dianggap sebagai kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri, walaupun secara teoretis masih merupakan bawahan Kesultanan Aceh. Para *uleebalang* kemudian menerima status sebagai penguasa daerah swapraja oleh Belanda.

Seperti di kerajaan-kerajaan lainnya, berdasarkan tradisi, seorang sultan digantikan oleh putranya. Namun, pada kenyataannya pengangkatan sultan Aceh baru harus disepakati oleh panglima perang yang paling berkuasa. Sejarah membuktikan bahwa kekacauan akan terjadi bila ketentuan ini tak dipenuhi.

Elit penting lainnya adalah kaum kaya yang disebut *orang kaya* atau *rangkaya*. Mereka adalah kaum yang menjadi makmur karena perdagangan dan juga berpengaruh terhadap suksesi sultan. Pada kenyataannya, tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang *uleebalang* juga merupakan *orang kaya*.

Senjata dari Aceh
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta

150. *Sejarah Sumatra*, halaman 371.

g. Mata uang

Kerajaan Pasai dan Aceh telah mengenal sistem mata uang, sehingga menandakan bahwa kerajaan tersebut telah memasuki sistem ekonomi moneter semenjak lama. Mata uang Aceh terbuat dari emas campuran yang dicetak berbentuk bulat tipis dengan tulisan Arab di atasnya. Marsden menyebutkan bahwa satuan terkecil uang Aceh disebut *mas* atau *massiah* (juga disebut *deureuham* atau dirham). Satuan yang lebih besar disebut *bangkal*, di mana nilainya setara dengan 80 *mas*. Selanjutnya 20 *bangkal* disetarakan dengan satu *kati*. Satu *tail* atau *tahil* adalah 1/5 *bangkal* atau 16 *mas*. Masih ada mata uang kecil yang terbuat dari timah hitam dan disebut *pitis*. Biasanya mata uang ini dipergunakan bagi kegiatan jual beli di pasar. Mata-mata uang tidak dapat dipakai berniaga dengan orang asing. Dalam perniagaan internasional, umumnya dipergunakan mata uang Dollar atau Rupee. Mata uang lainnya juga diterima asalkan disesuaikan dengan kurs yang berlaku.[151]

Aceh mulai mengeluarkan mata uang semenjak pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahhar (1531–1571). Menurut hikayat sejarah lokal yang berjudul *Kisah Lada Sicupak*, Sultan al-Kahhar pernah mengirim utusan ke sultan Turki, yang sebagai balasannya mengirimkan para ahli dalam berbagai bidang ke Aceh, seperti ahli pembuatan senjata (pengecoran meriam) dan mata uang. Sultan memerintahkan para ahli dari Turki itu untuk menuang mata uang emas yang disebut *deureuham* (*dirham*), sesuai dengan nama mata uang yang dipergunakan di dunia Arab masa itu. Berdasarkan logam untuk membuatnya, mata uang ini juga disebut *meuih* atau *mas* (emas). Sultan menetapkan ringgit Spanyol sebagai standar mata uang yang hendak diberlakukannya itu; di mana satu Ringgit Spanyol setara dengan 4 *deureuham*. Kadar emas yang dipergunakan untuk membuat mata uang ini harus *sikureung mutu* (sembilan *mutu*). Apa yang dimaksud *mutu* di sini adalah satuan kadar emas, di mana emas 10 *mutu* setara dengan 24 karat[152]. Sultan membeli pula mata uang tembaga dari orang-orang Inggris yang di atasnya dibubuhi gambar seekor ayam betina. Uang jenis ini disebut *duet manok* (mata uang ayam betina). Sultan menetapkan bahwa 1.000 *duet manok* nilainya setara dengan 1 Ringgit Spanyol. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 1 Ringgit Spanyol sama dengan 4 *mas*, sedangkan 1 mas setara dengan 250 *duet manok*.

---

151. Lihat *ibid*. halaman 369.
152. *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, catatan kaki nomor 12, halaman 105.

Selain *deureuham*, sultan mengeluarkan mata uang yang terbuat dari timah dan dinamakan *keuh*. John Davis yang menahkodai kapal Belanda pimpinan Cornelis de Houtman dan singgah di Aceh semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayatsyah al-Mukammil (1588–1604) melaporkan bahwa di Aceh terdapat dua jenis mata uang; yakni mata uang emas yang bentuknya seperti mata uang sen Inggris serta mata uang timah, yang disebut *casches* (barangkali inilah yang disebut *keuh* di atas, orang Portugis menyebutnya *caxa*–yang katanya terbuat dari campuran timah dan kuningan, orang Belanda menyebutnya *kasja* atau *kasje*).

Masih menurut John Davis, Aceh mengenal pula mata uang perak yang disebut *kupang* dan *pardu* (sama-sama terbuat dari perak, tetapi dibuat oleh orang Portugis di Goa), dan tahil. Adapun ketentuan nilainya adalah sebagai berikut: 1.600 *casches* setara dengan 1 *kupang*; 4 *kupang* sama dengan satu *deureuham*; 4 *deureuham* dapat disetarakan dengan empat schilling Inggris; 4 *deureuham* sama dengan satu *pardu*; dan 4 *pardu* setara dengan 1 *tahil*[153]. Dengan demikian, 16 *deureuham* setara 1 *tahil*; sehingga keterangan Marsden dan John Davis saling bersesuaian sehubungan dengan nilai konversi *deureuham* serta *tahil* ini.

Sistem moneter semacam ini tidak mengalami perubahan hingga masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Ia menetapkan perubahan terhadap mata uang *deureuham*, di mana satu *deureuham* dipecah menjadi lima *deureuham*, tanpa mengurangi kadar emasnya. Jadi meskipun mata uangnya telah dikurangi, tetapi nilai peredarannya masih tetap dapat dipertahankan seperti sebelumnya; di mana 4 *deureuham* tetap bernilai 1 Ringgit Spanyol. Ratu Tajul Alam (1641–1675); kembali dilakukan pemotongan terhadap *deureuham*; bahkan kadar emasnya juga turut dikurangi. Satu Ringgit Spanyol kini nilainya berubah menjadi enam *deureuham*; sedangkan kadarnya diturunkan dari 9 menjadi 8 *mutu* atau setara dengan emas 19,2 karat. Kendati demikian, *deureuham* tidak mengalami penurunan dari segi sirkulasinya. Sultan wanita ini memerintahkan pula agar *deureuham-deureuham* lama dikumpulkan guna dilebur kembali menjadi yang baru. Itulah sebabnya, mencari mata uang *deureuham* yang berasal dari masa sebelum pemerintahan Tajul Alam sangat sulit.

Deureuham yang berasal dari Pasai ataupun Aceh, bentuknya kecil, bulat, dan tipis. Garis tengahnya sekitar 1 sentimeter dan beratnya tidak melebihi 9 *grein*

153. Keterangan John Davis ini dimuat dalam karya Julius Jacobs berjudul *Het Familie en Kampongleven op Groot Atjeh* deel II (Leiden: E.J. Brill, 1894), halaman 187. Lihat *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra*., catatan kaki nomor 15, halaman 105.

Inggris (1 *grein* = 0,583 gram). Di permukaan mata uang itu tercetak huruf-huruf Arab. Pada satu sisi tertera nama sultan yang mengeluarkannya. Mereka umumnya menambahkan gelar Malik az-Zahir, di mana kebiasaan ini berlaku baik pada zaman Pasai maupun Aceh. Sultan-sultan Aceh sendiri tampaknya meniru kebiasaan ini dari Pasai. Kendati demikian, pembubuhan gelar tambahan ini tidak dilakukan lagi semenjak pemerintahan Sultan Ali Riayatsyah (1571–1579). Sementara itu, pada sisi lainnya tercetak tulisan *as-sultan al-adil*, yang telah berlangsung semenjak zaman Pasai. Kebiasaan ini berlaku hingga pemerintahan Sultan Alaiddin Riayatsyah al-Mukammil (1589–1604). Semenjak zaman Iskandar Muda, ungkapan ini tak dipergunakan lagi.

Sultan Iskandar Muda sendiri mengeluarkan *deureuham* yang pada salah satu sisi mukanya bertuliskan namanya, yakni Sultan Iskandar Muda; sedangkan pada sisi lainnya tertera *Johan berdaulat fil-Alam*. Pada salah satu sisi *deureuham* yang dikeluarkan Ratu Tajul Alam Safiatuddinsyah tertera namanya sendiri *Safiatuddinsyah*; sementara itu, pada sisi satunya lagi tertera *Paduka Sri Sultan Tajul Alam*. Seluruh *deureuham* yang dikeluarkan Kerajaan Aceh tidak mencantumkan tahun pembuatannya. Ini disebabkan agar mata uang tersebut tetap laku pada segala zaman atau tetap dapat dipergunakan pada masa pemerintahan sultan-sultan selanjutnya.

Sultan-sultan Aceh setelah Tajul Alam hingga Syamsul Alam (1723) tidak ada mengeluarkan mata uang baru. Sultan Syamsul Alam mengeluarkan mata uang terbuat dari seng yang disebut *keuh Cot Bada*. Mata uang ini hanya berlaku di daerah Cot Bada yang ramai perniagaannya. Satu Ringgit Spanyol disetarakan dengan 140 *keueh Cot Bada*. Sultan berikutnya, Alauddin Ahmad Syah (1724–1735) mengeluarkan mata uang timah yang juga disebut *keueh* dan menetapkan bahwa 800 *keueh* senilai dengan 1 Ringgit Spanyol. Pembuatan mata uang *keueh* terus berlangsung hingga pemerintahan sultan terakhir, Alauddin Mahmud Syah (1870–1874).

Bentuk mata uang *keueh* yang dikeluarkan setiap sultan berbeda-beda. Perbedaan itu antara lain terletak pada nilainya bagi setiap Ringgit Spanyol. Tulisan Arab yang tertera di atasnya juga tak begitu jelas. Terkadang pada salah satu sisinya tercantum tulisan Bandar Atjeh Dar-as-salam; sedangkan di sisi lainnya tergambar tiga buah bentuk seperti pedang dan di atasnya terdapat beberapa buah titik. Tangkai pedang ini ada yang mengarah ke kiri atau kanan. Sebagian besar *keueh* tidak menerakan tahun pembuatannya, walaupun ada juga yang mencantumkannya. Teknik pembuatan

mata uang *keueh* dengan menggunakan cetakan terbuat dari tembaga dan batu pasir berwarna abu-abu. Cetakan-cetakan ini berbentuk seperti dua balok kecil yang sama besar dengan saluran untuk menuangkan logam cair. Mata uang *keueh* ini tak berlaku di seluruh Aceh, sebagaimana halnya *deureuham*. Biasanya mata uang jenis ini hanya dipergunakan di Aceh Besar saja. Di kawasan Pidie *keueh* tidak diakui sebagai alat tukar. Para *uleebalang* di sana diizinkan mencetak mata uangnya sendiri yang disebut *gupang* (*kupang*) dan *busok* yang terbuat dari perak. Di mata uang *gupang* terdapat gambar, tetapi tidak demikian halnya dengan *busok*. Pada sisi-sisi gupang masing-masing tercantum tulisan *Paduka Sultan Alauddinsyah* dan *Peng* (enam) *azizul berkat*. Sistem nilai tukar bagi mata uang yang berlaku di kawasan Pidie ini adalah: Satu Ringgit Spanyol senilai 4 *deureuham*; 1 *deureuham* setara dengan 4 *gupang*; 1 *gupang* senilai 2 *busok*; dan 1 *busok* sama dengan 3 *peng*. Mata uang *peng* sendiri dibuat dari tembaga semasa pemerintahan Inggris dan Belanda, yang setara dengan 2 ½ *duet*.

h. Perekonomian

Aceh telah lama menjadi pusat perniagaan yang ramai. Pelabuhan Banda Aceh merupakan kota yang kaya (dalam *Hikayat Aceh* disebut *Bandar Makmur*) karena kegiatan perdagangan. Bagi tiap-tiap pelabuhan diangkat seorang *syahbandar*. Ia mempunyai kekuasaan yang besar, sehingga "hanya dengan mengangkat keris bergagang emasnya saja pada pedagang di atas kapal, pedagang itu takkan berani untuk turun dan berdagang."[154] Sumber utama penghasilan sultan berasal dari bea dan cukai. Orang Eropa dikenakan pajak 5–6%, sedangkan saudagar Keling 15 %. Semua sumber kekayaan sultan ditangani oleh seorang pejabat khusus yang bernama saudagar kerajaan. Lebih jauh lagi, undang-undang Aceh memerinci berbagai jenis pajak sebagai berikut:

1) *Adat cat* atau *adat lapik cap*, dibayar dalam bentuk barang atau dengan uang untuk memperoleh cap yaitu izin raja untuk berlayar.
2) *Adat kain*, kain segulung (sekayu) yang harus diberi oleh pedagang-pedagang dari India dan Eropa pada waktu mereka mendapat adat cap.
3) *Adat kain yang ke dalam*, yaitu kain yang diberikan untuk istana.
4) *Adat memohon kunci*, untuk dapat menurunkan barang-barang dari ruang kapal sesudah pajak-pajak lainnya dilunasi.

154. *Sejarah Sumatra*, halaman 372.

5) *Hadiah langgar*, untuk izin berlabuh (sebesar 120 *tahil* 10 *mas* bagi sebuah kapal bertiang tiga dari Gujarat).
6) *Hadiah mengawal*, untuk orang-orang tua bangsa Aceh yang naik ke kapal untuk menjaganya selama kapal berlabuh.
7) *Adat hak ul-kalam*, yakni semacam bea registrasi[155]

Selain itu, para pedagang masih dikenai pula pajak tambahan sebesar 10 % bagi sultan.

Aceh memiliki hasil bumi berupa beras, sayuran, buah-buahan, dan kapas. Pertanian juga dikatakan lebih maju dibandingkan dengan kawasan lain di Pulau Sumatera. Aktivitas peternakan juga banyak dilakukan oleh penduduk. Di samping itu, Aceh juga menghasilkan hasil kerajinan tangan dan kain sutera yang baik mutunya.

i. Kesusastraan

Aceh pernah memiliki seorang sastrawan besar bernama Hamzah Fansuri. Meskipun demikian, sangat jarang diketahui mengenai riwayat hidupnya. Bahkan saat yang tepat bagi tanggal dan kematiannya belum dapat ditetapkan secara pasti oleh para sejarawan. Ada tiga karya utama Hamzah, yakni *Asrâr al-'Ârifin* (*Rahasia Orang Arif*), *Sharâb al-Âshiqin* (Minuman Orang Berasmara), dan *al-Muntahi* (Si Penganut). Ketiga karya tentang tasawuf itu ditanda tangani oleh Hamzah sendiri. Sementara itu pada karya keduanya terdapat ungkapan:

> bahwa ditulis dalam bahasa Melayu "supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Parsi dapat memicarakan dia."[156]

Sastrawan terkemuka lainnya adalah Syamsuddin (meninggal 1630), Abdurrauf (± 1617–1690), dan Nurruddin ar Raniri (meninggal 1658). Hamzah dan Syamsuddin banyak menulis karya-karya sastra bernuansa tasawuf, yang dikecam oleh Nuruddin sebagai klenik[157]. Nuruddin sendiri berasal dari Gujarat, India. Ia datang ke Aceh pada tahun 1637 dan berhasil mendapat dukungan Sultan Iskandar Thani menghabisi para penganut tasawuf yang dahulu disokong oleh Sultan Iskandar Muda. Buku-buku karya Hamzah dan Syamsuddin diperintahkannya dibakar. Ia lalu menetapkan kriteria-kriteria bagaimana suatu karya sastra dapat dianggap ortodoks.

155. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, halaman 117-118.
156. *Inskripsi Islam Tertua di Indonesia*, halaman 79
157. *Sejarah Indonesia Modern*, halaman 77.

Karya besar Nuruddin adalah *Bustan as Salatin* (Taman Raja-raja). Bentuknya mirip ensiklopedi dan terdiri dari tujuh buku. Isinya membahas mengenai penciptaan, nabi-nabi, raja-raja di Timur Tengah beserta Melayu, para raja serta penasihat yang adil, dan lain sebagainya. Nuruddin sendiri meninggalkan Aceh pada tahun 1644 dan meninggal di India empat belas tahun kemudian. Abdurrauf (abad ke-17) banyak menghasilkan karya–karya mengenai ilmu hukum Syafii dan tasawuf. Warisan kesusastraan Aceh lainnya adalah *Tajas-Saltin* (Mahkota Raja-raja), *Hikayat Iskandar Dhulkarnain*, *Hikayat Amir Hamzah*, dan lain sebagainya.

Aceh Beserta Daerah *Uleebalang*-Nya
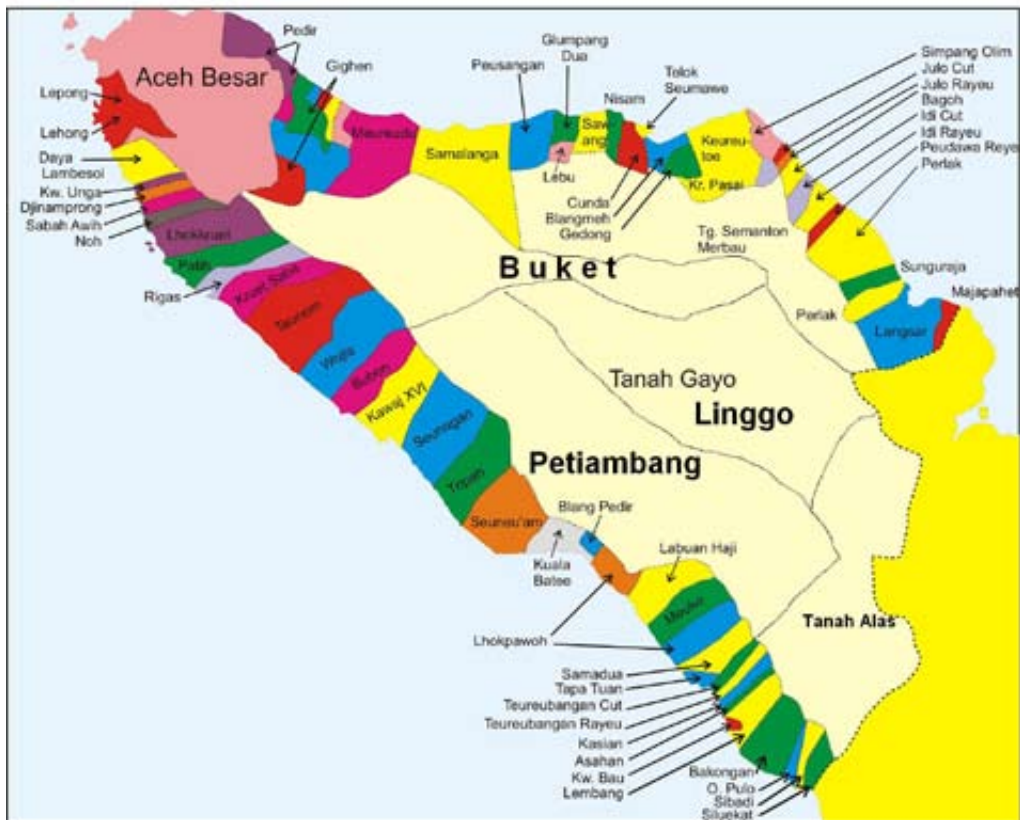
Tajas-Saltin atau *Taj us-Salatin* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Roorda van Eijisinga dan Perancis oleh A. Marre[158]. Pengarang karya itu menyebut dirinya sebagai Bokhari al Jauhari. Kata al Jauhari sendiri dapat diartikan sebagai "pandai emas" atau "yang berasal dari Johor." Karya ini terdiri dari 24 bab dan empat

158. Lihat *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, halaman 215–216.

bab pertama mengajarkan bagaimana manusia mengenal dirinya dengan baik, mengenal Tuhannya, dan tujuan hidupnya di dunia. Bab ke-5 hingga 9 mengenalkan perihal martabat raja yang berdaulat. Bab ke-10 hingga 13 mengulas bagaimanakah sikap yang harus dipunyai seorang abdi raja. Bab ke-14 membahas mengenai pendidikan anak. Bab ke-15 dam 16 mengajarkan mengenai keagungan sikap serta akal budi. Bab ke-17 mengajarkan sepuluh aturan yang tak boleh dilanggar oleh seorang raja. Selanjutnya, bab ke-18 dan 19 mengajarkan mengenai ilmu firasat. Sementara itu, bab-bab terakhir mengulas mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki seorang raja.[159]

j. Kerajaan para *uleebalang* di Aceh

Wilayah yang dikuasai para *uleebalang* boleh dikatakan sebagai kerajaan-kerajaan yang otonom di Aceh, sehingga perlu mendapatkan pembahasan tersendiri. Meskipun secara teoritis merupakan bawahan Aceh, kekuasaan sultan Aceh terhadap para *uleebalang* tidaklah terlalu besar. Pada bagian ini akan diulas berbagai perkembangan yang terjadi di beberapa kawasan yang diperintah para *uleebalang* tersebut. Dalam perkembangan sejarahnya, para *uleebalang* kerap terlibat pertikaian dan saling menaklukkan satu sama lain. Saat Sultan Jamal Al Alam (1704–1723) melarikan diri ke daerah Pidie (Pedir), ia membantu Bintara Keumangan (Pangulee Peunaroe) menyerang Bintara Seumasat Glumpang Payong guna merebut wilayah Jeurat Manyang. Sementara itu, negeri Bintara Cumbok (Tanjung Bungong) juga dirampas oleh Keumangan. Deretan saling menaklukkan antar berbagai negeri ke*uleebalang*an bawahan Aceh masih ditambah lagi dengan Negeri Mentroe Adan yang pernah menaklukkan Bintara Gapu dan Bintara Gampung Asan. Kedua negeri itu terletak tidak jauh dari negerinya. Mentroe Benggalang kemudian direbut oleh XII Mukim Pidie yang didominasi oleh negeri Raja Pakeh.

Karena perang saudara yang berlarut-larut itu, beberapa daerah bersatu membentuk federasi atau aliansi. Di daerah Pidie (Pedir) sendiri terbentuk dua aliansi, yakni Uleebalang Duabelas dan Uleebalang Nam. Anggota federasi Uleebalang Duabelas adalah:[160]

1. Raja Pakeh
2. Bintara Reubee
3. Mentroe Banggalang

159. Lihat *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, halaman 216–217.
160. *Bungai Rampai Tentang Aceh*, halaman 172.

4. Bintara Blang
5. Bintara Cumbok
6. Bintara Titeue
7. Mentroe Adan
8. Bintara Seumasat Glumpang Payong
9. Keujruen Aron
10. Keujruen Truseb
11. Bintara Ndjong
12. Bintara Putu
13. Bintara Gampong Asan

Sedangkan Uleebalang Nam beranggotakan[161]

1. Bintara Keumangan (Panghulee Peunaroe)
2. Bintara Samaindra (mukim VIII)
3. Bintara Pineueng
4. Bintara Keumala
5. Panglima Meugoe
6. Bintara Gigieng (Bintara Paleue)

Penguasa Mentroe Adan pertama yang mendapatkan gelar laksamana adalah Polem (1718); sehingga selanjutnya ia disebut Laksamana Polem. Semasa pemerintahan Laksamana Mahmud terjadi peperangan dengan Meureudu di pesisir timur Aceh. Pertikaian ini disebabkan oleh agresi militer Meureudu yang berniat meluaskan wilayahnya dengan merebut Pangwa dan Trieng Gading. Karena penguasa Keujruen Pangwa tak mempunyai anak laki-laki, Laksamana Mahmud mengangkat Panglima Siblok sebagai penggantinya. Adapun Panglima Siblok sendiri adalah menantu penguasa Pangwa. Dalam peperangan ini, Meureudu berhasil menangkap Panglima Siblok dan menyerahkannya pada Keumangan, karena kedekatan negeri tersebut dengan Federasi Uleebalang Nam. Setelah diserahkan pada Keumangan, Panglima Siblok dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini menggusarkan hati Laksamana Mahmud, sehingga mendorongnya menyerang Meureudu. Teuku Muda Cut Latif yang menjadi panglima besar Meureudu tertangkap dan dibawa ke hadapan sultan Aceh. Kendati demikian, sultan Aceh membebaskannya dan menyelesaikan masalah ini secara damai.

161. *Ibid*. halaman 173.

Pangwa dan Trieng Gading diserahkan pada Uleebalang Duabelas yang dipimpin oleh Teuku Laksamana Mahmud. Selain itu, Teuku Laksamana Mahmud dinikahkan pula dengan putri panglima besar negeri Meureudu.

Di Negeri Gigieng pada kurang lebih pertengahan abad ke-19 terdapat seorang bangsawan keturunan Deli atau Langkat yang telah lama menetap di sana. Ia menikah dengan salah seorang kerabat Muhammad Tahe, *bintara* (raja) Keumangan; dan belakangan diangkat sebagai *uleebalang* Gigieng (III Mukim) dengan gelar Teuku Bintara Paleue. Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 1855 Negeri Raja Pakeh di Pidie melancarkan serangan ke Gigieng. Rajanya saat itu, Teuku Ahmad, beserta keluarganya ditawan di Pidie dan wilayahnya disatukan dengan Pidie. Keumangan merampas kembali Gigieng dari Pidie dan membebaskan Teuku Ahmad. Kendati demikian, Teuku Ahmad tidak diangkat lagi sebagai *bintara* (raja) dan negerinya ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Keumangan. Ketika Pocut Oseuman, penguasa Keumangan, meninggal pada tahun 1885, Teuku Mohammad Dazen, cucu Teuku Ahmad dari Gigieng, menuntut kembali haknya atas Gigieng dan membebaskan negeri tersebut. Alasannya, almarhum Pocut Oseuman secara tertulis telah menyerahkan kembali kawasan itu padanya. Peristiwa ini memicu pertikaian dengan Keumangan yang baru berhasil didamaikan setelah masuknya Belanda pada tahun 1897.

Di Aceh bagian barat terdapat pula federasi yang disebut Kaway XVI dan diketuai oleh Keujreuen Cik Ujung Kala (Meulaboh) dan Kaway XII yang diketuai oleh Keujreuen Gumpang. Orang-orang Pidie (Pedir) ada yang bermigrasi ke Aceh Barat dan membentuk negeri bernama Blang Pidie (Blang Pedir) dan Teunom. Kaum bangsawan dari Aceh Besar ada yang pindah ke pantai barat Aceh dan membangun Negeri Lhokpawoh (Lho' Pauh). Ada pula di antara mereka yang menyerang Teluk Nibung dan mendirikan negeri baru bernama Simpang Olim (Simpang Ulim) di pantai timur Aceh.

Dengan dibukanya Pulau Pinang sebagai pusat perdagangan oleh Raffles di abad ke-19, kedudukan Idi menjadi makin penting; terutama sebagai penghubung lalu lintas perniagaan ke Pulau Pinang. Oleh karena itu, para pemuka masyarakat di Idi tidak bersedia lagi mengakui pertuanan Peurelak dan Julo atas negeri mereka. Itulah sebabnya, mereka menghadap Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1841–1870) dan berdasarkan hasil pertemuan ini, Teuku Cik Ben Guci diangkat sebagai uleebalang Idi yang pertama.

Di Lhokseumawe terdapat seorang tokoh bernama Teuku Mbah Raja, yang sebelumnya pernah ditugaskan oleh sultan Aceh untuk mengumpulkan pajak pelabuhan dan pendulangan emas oleh rakyat. Namun kemudian ia ditunjuk sebagai *uleebalang* Lhokseumawe. Penguasa negeri Cumbo dahulunya adalah juga pengumpul pajak bagi sultan di daerah Tangse dan Gumpang, tetapi akhirnya diangkat sebagai *uleebalang* Cumbo.

Semasa berkecamuknya Perang Aceh, Belanda banyak mendekati para *uleebalang* ini dan membujuk mereka agar memihak Belanda. Berdasarkan catatan tahun 1874, Belanda telah berhasil mengadakan perjanjian dengan para *uleebalang* antara lain sebagai berikut:

- Tuanku Raja Muda dari Trumon
- Datuk Raja Muda Amat dari Tapak Tuan
- Teuku Cik Tua Kaway XVI dari Meulaboh
- Teuku Cik dari Idi Rayeu
- Teuku Cik dari Peureulak
- Teuku Cik Meureudu
- Teuku Muda Angkasa dari Pasai
- Teuku Cik Poling dari Keureutoe
- Teuku Maharaja Mangkubumi dari Lhokseumawe
- Teuku Cik Peusangan
- Teuku Bintara Keuamangan Pocut Usman dari Gigieng
- Teuku Laksamana Ndjong
- Teuku Mohamad Hanafiah Lampasai, raja Kluang

Meskipun demikian, kenyataan membuktikan bahwa para *uleebalang* itu tidak sungguh-sungguh mendukung Belanda. Dalam hati mereka tetap berkecamuk semangat menentang kolonialisme. Dengan demikian, kendati di atas kertas mereka telah "berdamai" dengan Belanda, tetapi pasukan Belanda tetap mendapatkan perlawanan gigih dari para *uleebalang* beserta rakyatnya. Semangat mereka melawan Belanda tak pernah surut, walaupun tidak secara terang-terangan. Sebagai contoh adalah Pocut Osman, *uleebalang* atau raja Gigieng (Gighen). Meskipun Belanda telah memberikan hadiah padanya sebesar f. 25.000, perlawanan rakyat di Gigieng tidak kunjung padam. Belanda kerap dibingungkan pula oleh strategi Pocut Osman ini, dan demikian pula dengan putra serta penggantinya bernama Pocut Abdul Latif. Kendati

diangkat dan menerima pengakuan Belanda sebagai raja Gigieng, sumbangsihnya bagi perjuangan tidak boleh diremehkan. Teuku Cik Meureudu pernah menandatangani perjanjian dengan Belanda, tetapi nyatanya pasukan kolonial terus-menerus menghadapi penghadangan di mana-mana. Salah seorang bangsawan Meureudu, Teuku Ben Peukan, putra Teuku Muda Cut Latif–panglima besar Meureudu, terus-menerus melakukan perlawanan hingga ia tertangkap serta diasingkan ke Batavia.

Untuk menaklukkan para *uleebalang* ini, Belanda memainkan politik pecah belah (*devide et impera*); terutama setelah diterapkannya saran Dr. Snouck Hurgronje mengenai penyelesaian masalah Aceh; yakni dengan menarik para *uleebalang* dan bangsawan Aceh ke dalam korps pemerintahan atau pangreh praja Belanda. Setelah Perang Aceh berakhir, Belanda mulai menata kembali hubungannya dengan para *uleebalang* ini beserta kerajaan kecil-kecil mereka masing-masing. Berbagai daerah yang diperintah oleh para *uleebalang* yang telah menandatangani kontrak politik ini dijadikan sebagai daerah swapraja berpemerintahan sendiri (*zelfbesturen*). Tetapi Belanda tetap menempatkan seorang kontrolir bagi swapraja-swapraja tersebut sebagai pengawas. Selanjutnya dibentuk berbagai *onderafdeeling* yang membawahi berbagai swapraja. Berdasarkan peraturan Stbl 1922 no. 451, Belanda mengakui swapraja-swapraja sebagai berikut di Aceh:[162]

- *Onderafdeeling* Sigli, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Pidie (XII Mukim), kecuali Kale (V Mukim) dan Laweung.
  (2) Aree (II Mukim)
  (3) Iboih
  (4) Aron (III Mukim)
  (5) Ie Leubeue (VI Mukim)
  (6) Ndjong
  (7) Glumpang Payong (III Mukim)
  (8) Sama Indra
  (9) Bambi dan Oenoe (III Mukim)
  (10) Kroeeng Seumideuen
  (11) Pineung (III Mukim)
  (12) Gighen (Gigieng)
- *Onderafdeeling* Lam Meulo, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:

162. *Ibid*. halaman 192–195.

(1) Cumbok (V Mukim)
(2) Titeu (II Mukim)
(3) Troeseb (II Mukim)
(4) Keumala (II Mukim)
(5) Me Tareuem
(6) Andeue dan Lala
(7) Ilot
(8) Tangse
(9) Geumpang

- *Onderafdeeling* Padang Tiji, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Kale (V Mukim) dan Laweueng
  (2) Reubee (V Mukim)
- *Onderafdeeling* Meureudu, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Meureudu
  (2) Trieng Gading
  (3) Pante Raja
- *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe), dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Lhokseumawe
  (2) Sawang
  (3) Nisam
  (4) Cunda
  (5) Blang Me
  (6) Bayue
  (7) Blang Mangat
  (8) Sama Kuro
  (9) Bloe
  (10) Geudong
- *Onderafdeeling* Lhok Soekon (Lhoksukon), dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Kroeng Pase
  (2) Keureuto (dan daerah takluknya)
  (3) Matang Koeli

(4) Peuto

- *Onderafdeeling* Idi, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Idi Rayeu
  (2) Idi Cut
  (3) Tanjong Seumanto dan Meureubo (Tanjung Semantaon dan Merbau)
  (4) Simpang Olim (Simpang Ulim)
  (5) Bugeng dan Bago
  (6) Peudawa Rayeu
  (7) Julo Cut
  (8) Julo Rayeu
- *Onderafdeeling* Langsa (Langsar), dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Peureulak (Perlak)
  (2) Langsa (Langsar)
  (3) Soengoe Raya (Sunguraja)
- *Onderafdeeling* Tamiang, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Kejurun Karang
  (2) Raja Bendahara
  (3) Sungai Ijoe
  (4) Kejurun Muda
  (5) Sutan Muda
- *Onderafdeeling* Calang, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Kluang
  (2) Kuala Daya
  (3) Lambeusoe (dan daerah takluknya, yang meliputi Lam Me dan Lam No)
  (4) Unga (dan daerah takluknya, yang meliputi Pante Caureumen)
  (5) Lhok Kroeet
  (6) Pate
  (7) Lageuen (termasuk Lhok Gloempang dan Raneue)
  (8) Rigaih
  (9) Kroeng Sabe
  (10) Teunom
- *Onderafdeeling* Meulaboh, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:
  (1) Woyla

(2) Boebon

(3) Lhok Boebon

(4) Kaway XVI (Meulaboh)

(5) Seunagan

(6) Seuneuam

(7) Beutong

(8) Tungkop

(9) Pameue

- *Onderafdeeling* Tapak Tuan, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:

  (1) Kuala Batee

  (2) Susoh

  (3) Blang Pidie (Blang Pedir)

  (4) Manggeng

  (5) Lhokpawoh Utara

  (6) Labuan Haji (Labohan Adji)

  (7) Meuke

  (8) Sama Dua

  (9) Lhokpawoh Selatan

  (10) Tapa Tuan (Tapak Tuan)

  (11) Kluet

- *Onderafdeeling* Singkil, dengan swapraja:

  (1) Trumon

- *Onderafdeeling* Simalur, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:

  (1) Tapah (Teupah)

  (2) Simalur (Simuelue)

  (3) Salang

  (4) Lekom

  (5) Siguele (Sikhuele)

- *Onderafdeeling* Takengon, dengan swapraja-swapraja sebagai berikut:

  (1) Rojo Cek Bobasan

  (2) Kejuron Buket (Bukit)

  (3) Kejuron Siah Utama

  (4) Kejuron Linggo

- *Onderafdeeling* Serbojadi, dengan swapraja:
  (1) Kejuron Serbojadi Abok atau Abok (Abu)
- *Onderafdeeling* Gayo Luos, dengan swapraja:
  (1) Kejuron Petiambang
- *Onderafdeeling* Alas, dengan swapraja-swapraja:
  (1) Kejuron Bambel
  (2) Kejuron Pulo Nas (Batu Mbulen)

Sebagai catatan tambahan, Trieng Gading, Peudeu, dan Pangwa dahulunya dipersengketakan antara Glumpang Payong, Meureudu, dan Ndjong; meskipun demikian, ketiganya kemudian dijadikan swapraja-swapraja tersendiri oleh Belanda. Ini berlaku pula dengan Ilot, Me Tareuem, dan Andeue Lala yang diperebutkan oleh Pidie dan Keumangan. Ketiganya dijadikan pula tiga swapraja terpisah.

Sebelumnya, kerajaan-kerajaan kecil para *uleebalang* ini mempunyai hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya. Tetapi setelah penetapannya sebagai swapraja oleh Belanda ini, segenap kekuasaan mulai dibatasi. Menurut undang-undang swapraja *Zelfbestuursregelen* tahun 1919 berbagai urusan ke luar, seperti hubungan luar negeri, ketentaraan, percetakan uang, telekomunikasi, dan lain sebagainya, akan diurus oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, daerah swapraja hanya diperkenankan mengurus masalah pertanian, pendidikan dasar, penerangan, sosial, dan lain sebagainya. Berbagai peraturan seperti mengenai perkawinan dan perpajakan harus dimusyawarahkan bersama oleh kepala swapraja dalam satu *onderafdeeling*. Pertemuan yang diadakan di ibukota *onderafdeeling* ini biasanya dihadiri pula oleh kontrolir Belanda yang memberikan saran-saran beserta masukannya. Dengan kata lain, semua peraturan ini harus seragam dalam setiap swapraja yang tergabung dalam satu *onderafdeeling*. Khusus peraturan-peraturan mengenai urusan perpajakan harus disetujui terlebih dahulu oleh gubernur jenderal di Batavia.

Sehubungan dengan masalah keuangan, Belanda melakukan pula berbagai perombakan. Dahulu segenap penghasilan dalam suatu daerah, baik itu berupa pajak impor–ekspor, hasil bumi, dan lain sebagainya, masuk ke perbendaharaan para *uleebalang*. Tetapi semenjak tahun 1912, Belanda mengadakan kas negara, yang bertujuan menampung semua penerimaan keuangan berbagai swapraja dalam suatu *onderafdeeling*. Hasil-hasil konsesi dan pertambangan masuk pula ke kas negara, tetapi 40 persen darinya diserahkan pada *uleebalang* bersangkutan. Yang paling

banyak hasilnya adalah Peureulak, mengingat kawasan itu adalah penghasil minyak bumi. Karena derasnya arus uang yang masuk, pada tahun 1908 dibentuk kas negara khusus swapraja Peureulak saja. Pemasukan ke kas negara ini dipergunakan bagi pembangunan daerah yang bersangkutan. Dengan diadakannya kas negara tersebut keuangan suatu swapraja menjadi terpisah dengan kas pribadi *uleebalang*. Sejak saat itu, seorang raja atau *uleebalang* dapat dianggap sebagai pengabdi utama bagi swapraja yang dipimpinnya. Penggunaan uang kas juga tidak sembarangan dan diawasi oleh seorang administratur di Kutaraja; meskipun secara teknis dicatat serta dipegang oleh kontrolir. Setiap tahunnya, para kepala swapraja (*uleebalang*) membuat anggaran belanja bagi daerahnya sendiri dengan mempertimbangkan nasihat kontrolir atau asisten residen masing-masing. Setelah anggaran tersebut disetujui barulah uangnya dikeluarkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang *uleebalang* didampingi oleh seorang sekretaris atau juru tulis (*krani*). Pekerjaannya berkaitan dengan masalah surat menyurat. Selain itu, dalam urusan keagamaan, ada pula jabatan *kadi* (*kali*), dengan tugas memberikan pertimbangan pada kepala swapraja mengenai masalah-masalah keagamaan. Sebagai penjaga keamanan, diangkatlah beberapa orang polisi (*opas*). Tugasnya tentu saja adalah menangkap para pelanggar hukum, menyampaikan surat-surat ke alamat yang ditentukan, dan mengawasi para pekerja rodi. Mereka semua menerima gaji dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para kepala kampung tidak menerima gaji; hanya saja ia dibebaskan dari pajak. Demikianlah, perubahan sistem pemerintahan di daerah-daerah *uleebalang* setelah masuknya pengaruh Belanda di Aceh.

Setelah kekuasaan Belanda tertanam di Aceh, mereka makin tergantung pada para *uleebalang*. Pada tahun 1927, Gubernur Goedhart menyatakan bahwa di samping kekuatan senjata kekuasan pemerintah kolonial terutama ditopang oleh para *uleebalang*. Tanpa bantuan kaum *uleebalang* tersebut, Belanda mengakui tidak akan sanggup mewujudkan tujuan jangka panjangnya di Aceh. Dengan demikian, setelah Perang Aceh berakhir, *uleebalang* berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial. Semasa kekuasaan Belanda di Aceh terjadi perubahan signifikan dalam kekuasaan para *uleebalang*. Dahulu selama bernaung di bawah Kesultanan Aceh, ikatan mereka dengan sultan boleh dikatakan sanga longgar. Sebaliknya semasa penjajahan Belanda, ikatan *uleebalang* dengan pemerintah pusat

semakin diperketat. Kendati demikian, kesempatan memperkaya diri terbuka lebar bagi mereka.

Para *uleebalang* kini bebas menjadi pedagang atau pengusaha. Sebagai contoh, para *uleebalang* di pantai sebelah timur Aceh meminjamkan uang pada para petani yang berniat membuka perkebunan guna ditanami lada, salah satu komoditas utama saat itu. *Uleebalang* yang di daerahnya terdapat daerah pelabuhan berhak menarik cukai sebesar 5 % atas barang-barang yang keluar masuk negerinya. Lebih jauh lagi, di daerah-daerah yang dimasuki penanam modal Barat, para *uleebalang*nya berpeluang mendapatkan komisi dari pertambangan minyak dan perkebunan karet swasta asing yang beroperasi di wilayahnya. Dengan dibukanya lahan-lahan dan pabrik-pabrik baru, kekuatan ekonomi para *uleebalang* semakin meningkat.

Namun seiring dengan bertambah kayanya para *uleebalang* tersebut, keserakahan mereka makin menjadi-jadi pula. Keinginan menguasai areal pertanahan yang semakin luas kerap bertabrakan dengan kepentingan penduduknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Siegel, para *uleebalang* di Pidie menguasai sepertiga tanah persawahan di wilayah mereka. Di antara mereka yang tanahnya terluas adalah Teuku Umar, *uleebalang* Keumangan. Mereka menghalalkan segala cara demi memperkaya diri, umpamanya dengan menyita tanah milik rakyat yang kalah di pengadilan. Sebagai pemegang kekuasaan dalam hal keagamaan yang sebelumnya dipegang oleh para ulama, mereka kerap menggelapkan uang zakat masyarakat. Inilah yang menjadi alasan perpecahan antara *uleebalang* dan ulama. Demi menyuburkan sawahnya sendiri, para *uleebalang* tidak segan-segan menguasai saluran pengairan atau irigasi. Selain itu, rakyat juga dibebani kerja rodi demi kepentingan mereka.

Belanda mendirikan berbagai institusi pendidikan bagi anak-anak *uleebalang*, yakni HIS (*Holland Inlandse School*–setingkat Sekolah Dasar) dan MULO (setingkat SMP). Tujuannya agar menjauhkan mereka dari pendidikan bernuansa agama. Belanda meyakini bahwa pendidikan agama hanya memupuk kebencian terhadap pemerintah kolonial. Oleh karena itu, generasi baru *uleebalang* makin berkiblat pada tata cara, sikap hidup, dan pola pikir pemerintah kolonial. Akibatnya terjadi kesenjangan dalam bidang ekonomi dan pendidikan antara kaum bangsawan dengan rakyat kebanyakan. Kebencian rakyat semakin bertambah terhadap para *uleebalang*.

Pada era tahun 1920-an, terjadi kebangkitan di kalangan kaum agama. Menyadari bahwa sekolah-sekolah kolonial adalah saingan mereka, berbagai institusi pendidikan

tradisional keagamaan mulai memperbaharui dirinya. Beberapa orang ulama tergerak mendirikan sekolah-sekolah dengan mendatangkan guru-guru muda hasil pendidikan Islam modern dari Sumatera, Jawa, dan Mekkah. Dengan demikian mereka mengharapkan agar pendidikan agama dapat memenuhi tuntutan arus perubahan zaman. Para guru agama muda tidak segan-segan merombak tatanan kegamaan lama yang mereka anggap tak perlu atau bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Proses ini tentu saja pada awalnya tidak berjalan mulus karena memancing gesekan dengan golongan-golongan yang gigih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Kebangkitan kaum ulama ini ditandai pula oleh pendirian organisasi massa bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Tengku Daud Beureuh[163]
Sekretaris I : Nur El Ibrahimy
Bendahara : T.M. Amin

Teuku Cik Muhammad Johan Alamsyah, *uleebalang* Peusangan bersedia menjadi pelindung bagi PUSA[164] yang berpusat di Sigli ini. Walaupun organisasi ini berhasil menarik minat berbagai golongan, sehingga menjadi suatu gerakan yang melibatkan sebagian besar rakyat Aceh, para pemuda perkotaan beserta mereka yang mengenyam pendidikan Barat kurang menyukainya. PUSA memiliki organisasi kepemudaannya sendiri yang dipimpin Teungku Amir Husin dengan gelarnya *al Mujahid* (Pejuang). Anggotanya sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah keagamaan.

Selepas menuntut ilmu di luar daerahnya, para pemuda Aceh membawa serta gelora semangat nasionalisme, yang sedang tumbuh pesat laksana cendawan di musim hujan pada era tersebut. Timbulnya kekuatan-kekuatan baru seperti kebangkitan kaum ulama dan pemuda ini, berpotensi menggerus kekuasaan para *uleebalang*. Lama-kelamaan, Belanda merasa bahwa mereka tidak dapat lagi menyandarkan seluruh kekuasaannya pada para *uleebalang*. Itulah sebabnya, pada tahun 1938 Belanda memecat Teuku Umar dari Keumangan, bukan karena ia tidak setia pada pemerintah kolonial, melainkan disebabkan banyaknya keluhan rakyat terhadap penyalah-gunaan wewenang yang dilakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak dipecat, Belanda justru khawatir timbul kericuhan yang merongrong kekuasaannya. Hubungan para *uleebalang* dengan PUSA pada mulanya tidak terdapat permasalahan yang berarti.

163. Belakangan menjadi pemimpin bagi gerakan DI/ TII di Aceh.
164. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 144.

Namun perselisihan mulai timbul ketika PUSA menuntut agar kaum *uleebalang* melepaskan haknya atas pendidikan agama. Para *uleebalang* merasakan hal ini sebagai rongrongan terhadap kehormatan mereka, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menarik dukungannya terhadap PUSA.

Pada tahun 1942, Jepang melancarkan ekspansinya ke selatan dan bersiap menduduki Kepulauan Nusantara yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Jepang dengan propaganda 3 A-nya berhasil menarik simpati rakyat Aceh, sehingga mereka mulanya menganggap Jepang sebagai pembebas. Mereka yakin bahwa kedatangan Jepang bertujuan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Karena terpikat dengan propaganda Jepang ini, berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk PUSA, bersiap menunggu kedatangan balatentara Jepang. Bulan Desember 1942, Tengku Daud Beureuh selaku ketua PUSA mengadakan rapat dengan Tengku Abdul Wahab Seulimeum (anggota Pengurus Besar PUSA/ ketua cabang PUSA Aceh Besar), Teuku Nyak Arif (panglima Sagi XXXI Mukim), dan Teuku Ahmad (*uleebalang* Jeunib atau Samalanga) di tempat kediaman Teuku Nyak Arif[165]. Mereka mengangkat sumpah kesetiaan terhadap agama Islam dan sepakat berjuang bahu membahu bersama Jepang menumbangkan kekuasaan Belanda. Selanjutnya, disebarkan pula utusan ke berbagai cabang PUSA yang pada intinya mengajak para pemuda membantu balatentara Jepang bila mendarat kelak. PUSA mengadakan pertemuan dengan pihak Jepang yang saat itu telah bercokol di Pulau Pinang (Malaya). Tidak mengherankan bila Jepang menyambut gembira sambutan tokoh-tokoh PUSA ini. Mereka kemudian mempersiapkan pemuda-pemuda Aceh yang hendak dikirim kembali ke kampung halamannya guna menyambut kedatangan balatentara Jepang. Barisan yang beranggotakan para pemuda ini dikenal dengan sebutan Fujiwara Kikan atau Barisan F.

Balatentara Jepang benar-benar mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942, yang dilangsungkan di tiga tempat, yakni Peureulak (Aceh Timur), Kureng Raya (Aceh Besar), dan Sabang. Semasa awal kedatangannya, hubungan balatentara Jepang dan rakyat Aceh masih harmonis. Mereka berhasil menghalau Belanda dari Aceh. Peristiwa ini menandai runtuhnya hagemoni Belanda dan berawalnya zaman pendudukan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, tatanan pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, hanya namanya saja yang diganti. Sebagai contoh, di masa penjajahan Belanda, Aceh adalah sebuah karesidenan, kini Jepang mengganti istilahnya

165. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 148.

dengan *shu*; dengan demikian, namanya menjadi Aceh Syu. Istilah residen diganti dengan *shucokan*. *Afdeeling* diganti dengan *bunshu*, yang dikepalai oleh *bunshuco*. *Onderafdeeling* diganti namanya menjadi gun dengan seorang *gunco* sebagai kepalanya. Daerah-daerah kekuasaan *uleebalang* disebut dengan *son*. Gampong atau desa disebut *kumi* dengan kepalanya disebut *kumico*.

Lama-kelamaan Jepang mulai kelihatan belangnya. Rakyat dipaksa melakukan *romusha* atau kerja paksa demi kepentingan Jepang. Rakyat diwajibkan menjual hasil panennya pada Jepang dengan harga yang telah ditentukan mereka. Dengan demikian, dapat dipahami bila rakyat menderita kemerosotan kualitas kehidupan yang drastis. Perlawanan terhadap Jepang meletus di berbagai tempat, seperti Cot Plieng dan lain sebagainya. Dari segi pemerintahan, Jepang kurang memercayai para *uleebalang* yang dianggap oleh mereka masih pro Belanda. Karena itu, Jepang banyak memberikan angin pada PUSA yang pernah membantu mereka saat mendarat di Aceh. Jepang menggerogoti kekuasaan kaum *uleebalang* dengan membentuk lembaga peradilan agama yang terpisah bernama *Shukyo hoin*, di mana para pemukanya berasal dari kalangan PUSA, seperti Tengku Daud Beureuh. Pengadilan semacam ini sebelumnya merupakan wewenang para *uleebalang*. Dengan demikian, tugas yang tersisa bagi kaum *uleebalang* adalah semata-mata pengumpul hasil panen rakyat serta penyedia tenaga *romusha*. Inilah yang menjadi sumber kebencian rakyat terhadap *uleebalang* semasa zaman penjajahan Jepang.[166]

Penjajahan Jepang tidak berlangsung lama dan berakhir pada 14 Agustus 1945 dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu. Republik Indonesia kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kekuasaan Republik Indonesia hadir di Aceh dengan Nyak Arif sebagai residen. Sementara itu, yang menjadi wedana dan asisten wedana di Aceh semasa awal kemerdekaan ini adalah orang-orang yang pada zaman Jepang menjabat sebagai *guncho* beserta *soncho*. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, para *guncho* dan *soncho* ini berasal dari kalangan *uleebalang*. Karenanya, rakyat tidak mengerti mengapa sosok-sosok yang mereka benci dapat menjadi wakil atau aparat pemerintahan Republik di daerahnya. Selain itu, rakyat mengetahui bahwa para *uleebalang* justru menghendaki bercokol kembalinya Belanda yang akan mengembalikan kekuasaan mereka sebagaimana sebelum perang. Para *uleebalang* sesungguhnya enggan menerima kekuasaan Republik di negeri mereka. Inilah yang

166. Lihat *Yang Berlawanan*, halaman 140.

menjadi penyebab mengapa makna kemerdekaan bagi rakyat Aceh saat itu menjadi kabur.

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, para pemuda mengkonsolidasi dirinya. Mereka mendirikan organisasi pemuda bernama Badan Pemuda Indonesia (BPI), pada 6 Oktober 1945 yang anggotanya sebagian besar berasal dari kalangan PUSA. Organisasi pemuda yang pro Republik ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ali Hasjmy. Mengikuti perkembangan yang terjadi di Jawa, beberapa hari kemudian, nama organisasi ini diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan berganti lagi menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). PUSA menyerukan pada 15 Oktober 1945 agar rakyat Aceh berdiri di belakang Soekarno-Hatta. Para *uleebalang* merasa terancam dengan adanya mobilisasi kaum pemuda yang mendukung Republik tersebut.

Dapat diduga bahwa bentrokan antara *uleebalang* dan kaum pemuda tinggal menunggu waktu saja. Salah satu bentrokan yang paling dashyat terjadi di Pidie. *Uleebalang* terkuat di kawasan Pidie adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok. Pada masa penjajahan Belanda, ia adalah *uleebalang* Cumbok. Semasa penjajahan Jepang, ia dijadikan *guncho* Lammeulo. Belakangan, setelah proklamasi kemerdekaan ia diangkat sebagai wedana Lemmeulo. Tokoh ini adalah sosok yang sangat kontroversial. Ia merupakan *uleebalang* pertama yang mengunjungi pejabat-pejabat Belanda yang ditawan Jepang di Rantau Prapat dan menyampaikan harapan agar mereka dapat kembali dengan selamat ke Aceh. Saat para pemuda menaikkan bendera merah putih di depan kantornya, tokoh yang keras kepala ini menurunkannya lagi. Poster-poster dukungan bagi republik diperintahkan untuk dilepaskan kembali. Daud Cumbok menyatakan pula secara terang-terangan bahwa bangsa Indonesia belum saatnya merdeka. Sikap Daud Cumbok menimbulkan bentrokan dengan kaum pemuda pendukung republik, yang mencapai puncaknya pada 3 November dengan penangkapan dan penganiayaan terhadap 3 pimpinan PRI.

Pada masa awal kemerdekaan ini, para *uleebalang* memiliki pasukannya sendiri dan di antara mereka yang terkuat adalah Daud Cumbok. Ia memanfaatkan jasa bekas anggota KNIL dan orang Jepang sebagai pelatih bagi pasukannya. Daud Cumbok berhasil menguasai sejumlah persenjataan peninggalan Jepang di Lammeulo. Beberapa orang perwira TKR yang pernah mendapatkan pendidikan Jepang menyeberang ke pihak *uleebalang*. Pasukan *uleebalang* berniat merebut sisa-sisa senjata milik Jepang di

Sigli. Mereka memblokade jalan-jalan dengan tujuan menghalangi gerak maju pasukan PRI yang pro Republik. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pasukan *uleebalang* terhadap tokoh-tokoh yang dicurigai memihak Republik. PRI yang kalah dalam persenjataan segera mengundurkan dirinya ke luar kota. Tetapi rakyat yang membenci para *uleebalang* bersedia dikerahkan menghadang dan mengepung pasukan mereka di Sigli. Pertempuran dashyat antara dua kubu yang saling berlawanan ini pecah dan tidak sedikit korban yang berjatuhan. Kepala staf TKR berhasil mengadakan gencatan senjata dan masing-masing pihak mengundurkan dirinya. Kendati demikian, perang saudara masih tetap berkecamuk secara sporadis hingga akhir Desember 1945.

Menghadapi situasi yang tak menentu, Nyak Arif mengundurkan dirinya sebagai residen Aceh. Sementara itu, golongan yang anti *uleebalang* menuntut pada pemerintah karesidenan beserta pimpinan TKR agar segala bentuk kekuasaan di Pidie dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk suatu pemerintahan berlandaskan demokrasi. Meskipun ada desakan seperti ini dari kalangan rakyat, pemerintah karesiden tidak juga mengambil tindakan apapun. Akibatnya, para pemuda anggota Pesindo dan Mujahidin menyatukan dirinya dalam Korps Rakyat yang dikomandani Teungku Abdulwahab Seulimeum. Mereka lalu bergerak menyerang Pidie bagian Timur dan bersamaan dengan itu banyak pemuda pedesaan turut menggabungkan dirinya. Setelah menyaksikan adanya mobilisasi besar-besaran di kalangan rakyat, barulah pemerintah karesiden mengeluarkan pernyataan dan ultimatumnya. Pasukan *uleebalang* yang berpusat di Lammeulo dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kedua, pasukan Daud Cumbok agar segera menyerahkan dirinya pada siang hari tanggal 10 Januari 1946. Apabila mereka menolak akan ditundukkan dengan kekerasan.

Daud Cumbok malah menjawab ultimatum yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1946 ini dengan tantangan. Karena itu, pertempuran tak dapat dihindari lagi. Pada 12 Januari 1946, para pemuda dan pasukan pemerintah menggempur pasukan *uleebalang*. Ternyata pasukan Daud Cumbok dapat dikalahkan dan ia beserta 90 orang pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan harapan dapat menyeberang ke Sabang. Kendati demikian, ia tertangkap pada 16 Januari 1946 di lereng Gunung Seulawah. Pada kurun waktu yang sama, seluruh *uleebalang* di kawasan Pidie dapat ditangkap oleh rakyat. Pemerintah di Kutaraja berkeinginan agar tawanan itu diadili. Rakyat yang telah dilanda kebencian semenjak lama melakukan main hakim sendiri

dengan menghabisi nyawa para pemuka adat yang ditawannya tersebut. Setelah para *uleebalang* dihabisi kini mereka berpaling membantai keluarga yang ditinggalkannya. Seluruh harta kekayaan *uleebalang* disita oleh rakyat, bahkan rumah Teuku Umar, *uleebalang* Keumangan, dibakar habis. Kekayaannya yang diperkirakan sejumlah f. 12 juta disita oleh pemerintah daerah Aceh.

Penggulingan kekuasaan *uleebalang* ini dengan segera menjalar ke seluruh Aceh dan pemerintahan baru dibentuk. Karena ketakutan, 23 *uleebalang* di daerah Aceh Besar mengundurkan dirinya dan memberi kesempatan bagi wakil-wakil rakyat naik menduduki kursi kepemimpinan pada bulan Februari 1946. Peristiwa ini merupakan akhir kekuasaan *uleebalang* di Aceh. Dalam revolusi sosial ini, beberapa *uleebalang* menemui ajalnya, sementara itu yang lain ditangkap dan dipenjarakan di Lhokseumawe. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi pengganyangan *uleebalang* kemudian menduduki jabatan penting baik sipil maupun militer di Aceh. Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa ke*uleebalang*an di atas:

i. AREE (II MUKIM)

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Sigli. Pada mulanya mencakup 14 mukim di bawah pemerintahan Teuku Bintara Po Puteh. Meskipun demikian, belakangan 8 mukim berdiri sendiri dan membentuk Ke*uleebalang*an Sama Dua. Mukim Lhok Kayu juga memisahkan diri. Mukim Langga beserta Sriweue direbut oleh T. Bentara Cumbok. Mukim Lameue direbut oleh T. Bentara Keumangan. Oleh karenanya, tinggal tersisa dua mukim saja. T. Ben Turi Thi', salah seorang *uleebalang* Aree, mangkat dengan meninggalkan tiga orang putra, yakni T. Di Kroeëng, T. Gumpa, dan T. Gagab (juga disebut T. Ben Ali). Meskipun demikian, T. Ben Ali, yakni putra termudanya yang diangkat sebagai pengganti, karena ibunya merupakan wanita terpandang. T. Gumpa, lalu merebut kekuasaan, dan menunjuk putranya, T. Ma'en, sebagai calon *uleebalang* berikutnya. Tetapi tidak lama kemudian, ia meninggal, sehingga kini hak itu dialihkan pada adiknya, T. Leumie. Belakangan timbul perselisihan dengan T. Pakeh Muda Suleiman, pemimpin federasi 12 *uleebalang*, yang juga membawahi Aree. Ia lantas mengalihkan kedudukan *uleebalang* Aree pada T. Putih, putra T. Di Kroeeng. Sebuah pengakuan (sarakata) beserta gelar Bentara diberikan padanya sehingga beliau lantas dikenal sebagai Teuku Bentara Putih. Demi mengatasi perselisihan di antara keduanya, T. Putih lantas dinikahkan dengan saudari T. Leumie.

Pada 1898 timbul peperangan antara T. Leumie dengan pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, T. Bentara Putih yang juga dikenal sebagai *Uleebalang* Cut menyerah pada pemerintah Belanda tanggal 11 September 1898. T. Bentara Putih mangkat pada tahun 1908 dan meninggalkan seorang putra berusia empat tahun bernama T. Ma'usu. Karena usianya masih kanak-kanak itu, Teuku Amat diangkat sebagai walinya, yang dikukuhkan kedudukannya pada 3 Mei 1910.

ii. ARON (III MUKIM)

Aron (III Mukim) dimasukkan pemerintah kolonial ke dalam *Onderafdeeling* Sigli. *Uleebalang*nya semasa awal kedatangan Belanda adalah Teuku Kejuruan Aron Raman; yang menandatangani perjanjian pada 15 Juni 1900. *Uleebalang* Aron, Teuku Keujruen Gade turut menjadi korban Perang Cumbok.

iii. BAMBI & OENOE (UNU atau III MUKIM)

Terletak di *Onderafdeeling* Sigli. Sebelumnya juga membawahi kawasan Banta. *Uleebalang* Bambi, Teuku Panglima Meugöë Pocut Agam (Pocut Muhammad Panglima Meugoe), menyerahkan pemerintahan III Mukim Unu dan Banta pada Teuku Lamkota, adik ayahnya. Teuku Lamkota digantikan oleh putranya, T. Muda Raja. Setelah T. Muda Raja mangkat pada tahun 1906, tiada lagi penguasa Banta yang diangkat.

Teuku Panglima Meugoe Pocut Agam menikah dengan Pocut Patima, putri *uleebalang* Pidie, sehingga hubungan dengan Pidie boleh dikatakan baik. Ia kerap membantu Pidie dalam peperangan. Karena usia tua dan sering sakit-sakitan, ia menyerahkan jalannya roda pemerintahan pada putranya, Teuku Panglima Meugoe Muda Dalam. Barulah setelah ayahnya wafat, Teuku Panglima Meugoe Muda Dalam diangkat sebagai *uleebalang*. Penanda-tanganan *korte verklaring*nya dilangsungkan pada 21 Oktober 1909. Menurut *Regeerings Almanak,* beliau menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 3 Maret 1910. Beliau kemudian digantikan oleh Teuku Tahir, yang turut menjadi korban Perang Cumbok.

iv. BAYUE

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Semasa awal kekuasaan Belanda, Bayue dipimpin oleh T. Bentara Bayue, yang sudah berusia lanjut, sehingga urusan pemerintahan banyak dijalankan oleh putranya, T. Banta

Muda. T Bentara Bayue kemudian mengunjungi Kutaraja agar memperoleh pengakuan sebagai uleebalang Bayuw denga gelar T. Bentara Cut. Pada 18 Mei 1929, *Uleebalang* Teuku Raden dari Bayue memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial Belanda.

v. BEUTONG

Terletak di *Onderafdeeling* Meulaboh. Nama kawasan ini menurut legenda berasal dari kata "bambu betung" atau *beutong*. Pendiri Ke*uleebalang*an Beutong adalah T. Beutong Benggalang, yang berasal dari Pidie. Beliau digantikan oleh putranya, T. Beutong Bungsu, yang menerima pengukuhan (*sarakata*) dari Sultan Aceh. Kendati demikian, ia merasa kurang puas dengan wilayah kekuasaannya dan merebut Sangkadeuen dari T. Tandi Lango[167], yang merupakan anggota federasi Kaway XVI, yang diketuai oleh T. Cik Meulaboh. T. Beutong Bungsu sanggup memenangkan peperangan ini berkat panglimanya yang bernama Panglima Budusun. Sementara itu, T. Tandi Lango mengumpulkan kembali para pengikutnya yang tercerai berai dan meminta bala bantuan dari T. Cik Meulaboh, guna merebut kembali wilayah kekuasaannya.

Penguasa Beutong akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat mempertahankan wilayah yang direbutnya tersebut. Oleh karenanya, ia menempuh strategi melalui pernikahan. Putrinya, Cut Ngoh, dinikahkan dengan putra tertua T. Tandi Lango yang bernama T. Raja Cut, dan kemudian mengangkatnya sebagai *uleebalang* Sangkadeuen. Pernikahan ini membuahkan seorang putri bernama Cut Bungong, yang kelak menjadi *uleebalang* perempuan Sangkadeuen. Kawasan Sangkadeuen sendiri merupakan bagian Beutong bersama dengan Bungong Talu, Pulo Raga, dan Keutambang.

vi. BLANG MANGAT

Termasuk dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Blang Mangat memiliki daerah taklukan bernama Mbang. Uleebalang T. Bentara Nya' Aji pernah memerintah Blang Mangat, yang selanjutnya digantikan oleh putranya, T. Meungkuta. Beliau dibunuh oleh musuhnya saat sedang tidur di malam hari. Teuku Muhammad Napiah lalu menduduki jabatan sebagai *uleebalang* Blang Mangat. Beliau menandatangani kontrak pada 15 Juni 1900. *Uleebalang*

167. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 606.

berikutnya, Teuku Raja Keucik menerima pengukuhan (*bevestiging*) pada 12 April 1911.

vii. BLANG ME (BLANGMEH)

Oleh pemerintah kolonial dimasukkan dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Dalam sejarahnya, *Uleebalang* Teuku Muda Nyak Beung gugur dalam peperangan dengan Geudong. Karena putranya masih di bawah umur, ia lalu digantikan oleh kemenakannya T. Muda Angkasa. Pada 11 Desember 1876, ia dibunuh oleh musuhnya yang berasal dari Simpang Ulim. Putranya, T. Muda Lateh (Teuku Muda Nyak Latif) masih di bawah umur, sehingga sebagai wakilnya diangkat pamannya bernama T. Bentara Brahim. Sepeninggal pamannya pada tahun 1898, kini Teuku Muda Nyak Latif memegang pemerintahan. Beliau memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial Belanda tanggal 15 Juni 1900. Blang Me memiliki daerah taklukan bernama Baree yang dipimpin oleh Teuku Lak Samana.

vii. BLANG PIDIE (BLANG PEDIR)

Termasuk *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Leluhur penguasa Blang Pidie adalah seorang tokoh bernama T. Lampoëh Deuë. Nama Blang sendiri berasal dari padang rumput yang kini terletak dekat Kuta Bate. Sewaktu keturunan T. Lampoeh Deue yang bernama T. Bentara Mahmud masih kanak-kanak, Teuku Nyak Sawang diangkat sebagai walinya. Beliau menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1874. Selanjutnya Blang Pidie diperintah oleh Teuku Bentara Mahmud (Bemtara Blang Mahmud Setia Raja) yang menandatangani kontrak tanggal 12 Oktober 1880. Ia menerima pengukuhan dari sultan Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

> "Teukoe Bén Mahmoed telah di namakan Teukoe Béntara Blang Mahmoed Seutia Radja wakil Soeltan Atjèh berkoeasa meumégang hoekoem dengan adat dan wali dan lain lain."[168]

Penguasa selanjutnya, Teuku Banta Suleiman, menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 9 Oktober 1909. Karena yang berhak mewarisi singgasana Blang Pidie bernama Teuku Sabi masih kanak-kanak, yang menjadi walinya adalah Teuku Rayeu. Pengukuhan kedudukan diterimanya dari

168. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 67, nomor 1, halaman 376.

pemerintah kolonial pada 29 Agustus 1918. Setelah dewasa, Teuku Sabi diangkat sebagai *uleebalang* dan menandatangani kontrak pada 23 April 1935.

viii. BLOE

Pemerintah kolonial memasukkan Bloe ke dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Teuku Imam Bale Bloe pernah menjabat sebagai *uleebalang* Bloe, yang dikukuhkan kedudukannya pada 4 Oktober 1900. Menjelang akhir masa pendudukan Belanda, Bloe diperintah oleh suatu komisi (*bestuurcommissie*) yang terdiri dari Amin (*tuha* Penet dari Meunasah Mesjid), Teuku Panglima Muda (*tuha* Penet dari Meunasah Pulo), Nya Akub (*tuha* Penet dari Meunasah Rendeneb, dan Teuku Majid (*tuha* Penet dari Meunasah Rhieng).

ix. BOEBON (BUBON)

Terletak di *Onderafdeeling* Meulaboh. *Uleebalang*nya secara berturut-turut adalah Teuku Kejuruan Bubon dan Teuku Kejuruan Cut Amin. Beliau menerima pengukuhan kedudukan melalui penanda-tanganan perjanjian pada 15 Juni 1900. Uleebalang berikutnya yang memerintah Bubon adalah Teuku Kejuruan Rayeu Nyak Raja. Beliau dikukuhkan kedudukannya tanggal 18 Oktober 1912. Menjelang masa akhir kekuasaan Hindia Belanda, *uleebalang* Boebon dijabat oleh Teuku Ali Cot Seumeureueng.

xi. BUGENG & BAGO (BAGOH)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Idi. Yang pertama kali membuka kawasan ini adalah Panglima Prang Nja Sien. Beliau digantikan oleh putranya, T. Muda Lon, yang digantikan kembali oleh T. Bentara Muda. Ia menandatangani *korte verklaring* pada 26 Oktober 1899 dan dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial tanggal 10 September 1906. *Uleebalang* berikutnya adalah Teuku Cik Muhammad Daud Syah.

xi. CUMBOK (V MUKIM)

Termasuk *Onderafdeeling* Lam Meulo. *Uleebalang*nya adalah Teuku Sri Muda Pahlawan Setia Raja Bendahara Bentara Cumbok Lateh, yang dikukuhkan kedudukannya pada 15 Juni 1900. Penggantinya adalah Teuku Raja Abdullah. Pada 3 September 1920, *Uleebalang* Teuku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Raja Abdullah menandatangani kontrak dengan Belanda. Penggantinya, Teuku

Sri Muda Pahlawan Bintara Cumbok Muhammad Daud menerima pengesahan tanggal 4 April 1938.

xii. CUNDA

Ke*uleebalang*an Cunda termasuk dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe. *Uleebalang*nya adalah Teuku Cik Johan yang menandatangani kontrak pada 15 Juni 1900. Cunda pernah diperintah oleh Tengku Cik Muhammad Said yang disahkan kedudukannya pada 25 Januari 1919. Pada kurang lebih tahun 1919/1920, karena aktivitasnya dalam Sarekat Islam (SI), beliau diasingkan oleh Belanda ke Sumatera Barat dan belakangan dipindahkan lagi ke Jawa. Daerah-daerah taklukan Cunda adalah: Blang Lancang, di bawah Teuku Ben Nyak Juh; Paloh dipimpin Teuku Uleebalang Syeh; Buloh Beureugang dipimpin oleh Teuku Raja Itam; Buloh Blang Ara dipimpin oleh Teuku Ma Husin (Oesen); Buloh Gampong Teungoh oleh Teuku Kejuruan Nyak Bulang; dan Buloh Mancang di bawah Teuku Kejuruan Muda Nyak Gandran.

xiv. GEUDONG

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhokseumawe. Pada tahun 1271 H., T. Nya Keujruen menerima surat pengukuhan (sarakata) dari sultan Aceh. Beliau digantikan oleh putranya, T. Lotan. *Uleebalang*nya semasa awal pendudukan Belanda adalah Teuku Sultan Imeum Cik, yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 21 Juli 1907. Selanjutnya menurut *Regeerings Almanak* yang menjadi *uleebalang* Geudong selanjutnya adalah Teuku Raja Meungkuta. Beliau disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1917. Teuku Abdul Latif, *uleebalang* Geudong diasingkan oleh Belanda ke Timor pada tahun 1919/ 1920-an karena keterlibatannya dalam Sarekat Islam (SI).

xiv. GIGHEN (GIGIENG)

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Sigli. Teuku Bintara Keuamangan Pocut Osman mengadakan perjanjian dengan Belanda tanggal 15 Maret 1874. Pocut Osman pernah bermusuhan dengan Pidie. Dengan membombardir Pidie Belanda berharap dapat menarik Pocut Osman ke pihaknya. Pocut Osman bahkan memperoleh hadiah sebesar f. 25.000 dari Belanda. Tetapi Belanda salah menyangka dan tertipu oleh sikap Pocut Osman. Kendati bersikap baik terhadap Belanda, pada

sisi lain ia tetap mendukung para pejuang Aceh. Pandangan seperti ini diwarisi pula putra dan penggantinya, Pocut Abdul Latif (gelar lengkap: Teuku Bintara Orangkaya Setia Indra Pocut Abdul Latif). Meski diakui pemerintah kolonial sebagai raja Gighen, tetapi perannya bagi perjuangan tidak dapat dikatakan kecil. Beliau memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 2 Mei 1886. *Uleebalang* berikutnya, Teuku Bentara Paleueh Muhammad Den menandatangani perjanjian pada 4 Oktober 1900. *Uleebalang* Gighen terakhir, Teuku Abdul Hamid menjadi korban Perang Cumbok.

Uleebalang Gighen
Sumber: *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*

xvi. GLUMPANG DUA

Oleh pemerintah kolonial dimasukkan dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Glumpang Dua pernah dipimpin oleh T. Bentara Bata, yang digantikan oleh putranya, T. Bentara Mahmut. Namun semasa meletusnya Perang Aceh, kekuasaan dipegang oleh ibunya, yakni Cut Po Neu. Meskipun demikian, ia lantas diminta menyerahkan kekuasaan pada kemenakan almarhum suaminya, yakni T. Ben Pro. Kekuasaan lantas beralih pada Teuku Bentara Setia Muda, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 19 Oktober 1880 dan 26 Maret 1881. *Uleebalang* bernama Teuku Bentara Setia Muda Peureudan menandatangani kontrak pada 21 Januari 1903.

xvi. GLUMPANG PAYONG (III MUKIM)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Sigli dengan Teuku Sulaiman Bentara Seumasat sebagai *uleebalang*nya. Penguasa Glumpang Payong berikutnya adalah Teuku Gam yang menandatangani perjanjian pada 27 September 1906. *Uleebalang* selanjutnya, Teuku Muhammad Hasan, memperoleh pengukuhan kedudukan pada 4 April 1938. Pada tahun 1931, berkembanglah Muhamadiyah di bawah pimpinan Teuku Muhammad Hasan, yang kemudian digantikan oleh Teuku Cut Hasan

dari Meuraksa[169]. Pengganti Teuku Muhammad Hasan adalah Teuku Anwar, yang menjadi korban Perang Cumbok.

xvii. IBOIH

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Sigli. *Uleebalang*nya saat masuknya pengaruh Belanda adalah Teuku Bintara Blang Ra'na Wangsa Muhammad Azis. Beliau menandatangani kontrak pada 27 September 1906. Penggantinya, *Uleebalang* Teuku Bentara Blang Ra'na Wangsa Brahim masih kanak-kanak, sehingga diwakili oleh Teuku Muhammad Daud; yang menandatangani perjanjian tanggal 5 Desember 1916. Saat meletusnya Perang Cumbok, Teuku Muhammad Daud Ratnawangsa menjadi salah seorang korbannya.

xviii. IDI CUT

Termasuk *Onderafdeeling* Idi. Teuku Prang Nyak Bugam merupakan *uleebalang* Idi Cut semasa kedatangan Belanda yang menandatangani perjanjian pada 28 Desember 1876. *Uleebalang* selanjutnya adalah Teuku Raja Nago.

xix. IDI RAYEU

Termasuk *Onderafdeeling* Idi. Cikal-bakal negeri Idi adalah rombongan di bawah pimpinan Nyak Sim yang sebelumnya merupakan panglima besar *Uleebalang* Teuku Muda Nyak Beueng dari Blang Me[170]. Rombongan ini berangkat dari Pulau Kampai, Pangkalan Susu, Besitang, dan mulanya berniat mencari ikan. Meskipun demikian, kemudian disadari bahwa hanya dengan menjadi nelayan, mereka tak akan mencapai kemajuan. Itulah sebabnya, terpikir oleh mereka mendirikan negeri baru. Panglima Nyak Sim terkenal sakti dan kebal, sehingga disegani banyak orang. Beliau pernah disambar halilintar namun tak terluka sama sekali. Perkampungan yang didirikan oleh rombongan Panglima Nyak Sim semakin ramai, hingga suatu kali terbetiklah keinginan bercocok tanam lada. Benih lada segera dicari hingga ke Pidie dan Aceh Barat. Ternyata perkebunan lada mereka menuai kemajuan, sehingga terjalinlah perniagaan hingga Pulau Pinang.

Kemajuan ini menuai iri hati *uleebalang* Peureulak dan Julo, sehingga pecahlah peperangan dengan kedua negeri tetangga tersebut. Meskipun demikian, Idi tetap dapat bertahan. Kedua *uleebalang* di atas berupaya menghasut para

---

169. Lihat *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, halaman 17.
170. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, halaman 207.

pemuka masyarakat di Idi agar memihak mereka tetapi gagal. Panglima Nyak Sim mangkat dan digantikan oleh putranya, T. Ben Guci. Sementara itu, adiknya bernama T. Panglima Banta diangkat sebagai panglima perang. Para pemuka masyarakat Idi kemudian sepakat mengupayakan hubungan langsung dengan sultan Aceh. Oleh karena itu, berangkatlah T. Ben Guci menghadap sultan Aceh dan mendapatkan pengesahan sebagai *uleebalang* Idi yang diwujudkan dengan penyerahan cap sembilan atau cap *sikureueng*. Pengangkatan ini mengesalkan *uleebalang* Peureulak dan Julo, sehingga pecah beberapa kali pertempuran. Demi menghadapi Peureulak dan Julo, T. Ben Guci menjalin aliansi dengan T. Muda Angkasa dari Blang Me.

Pada tahun 1871, T. Muda Angkasa memimpin delegasi ke Riau guna memohon bantuan Belanda[171]. Sebagai tindak lanjut bagi permohonan bantuan ini, benteng Belanda dibangun di Kuala pada tahun 1875. Bersamaan dengan itu, perniagaan lada di Idi semakin bertambah ramai. Pada perkembangan selanjutnya, benteng Belanda di Kuala dipindahkan ke Arun. T. Ben Guci banyak mendapat bantuan Belanda dan beliau dianugerahi bintang penghargaan oleh pemerintah kolonial. Setelah beliau mangkat, penggantinya adalah Teuku Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci.

Semasa pemerintahan beliau meletuslah Perang Aceh. Terdapat dua laporan Belanda yang bertentangan mengenai raja Idi ini. Sumber resmi Belanda menyebutkan bahwa pada tahun 1869, Idi telah meminta perlindungan Belanda. Namun menurut laporan Nisper van Sevenaer, pada tahun 1871 Idi diblokade secara ketat oleh Belanda karena menolak tunduk pada pemerintah kolonial[172]. Terdapat pula laporan yang menyebutkan bahwa raja Idi merupakan pemboros dan banyak berhutang pada para saudagar di Aceh. Sudah lama, Idi tidak menyetorkan lagi pajak (*wase*) pada sultan Aceh. Teuku Cik (mungkin sama dengan T. Ben Guci) menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 15 April 1874. Lalu Teuku Cik Muda (mungkin sama dengan Teuku Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci) menandatangani kontrak pada 14 Agustus 1892. Pengganti Teuku Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci adalah Teuku Muhammad Hanafia. Menurut *Regeerings Almanak*, beliau mendapat pengesahan pada 21 Januari 1903. Penggantinya

171. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, halaman 209.
172. Lihat *Atjeh Sepandjang Abad*, halaman 362.

adalah Teuku Cik Muhammad Daud Syah (disahkan kedudukannya pada 21 Desember 1927).

xx. IE LEUBEUE (VI MUKIM)

Keuleebalangan ini merupakan bagian *Onderafdeeling* Sigli. *Uleebalang* Teuku Ismail Ibnu al Marhum Teuku Laksamana al Haji Muhammad Husin menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 8 Juni 1874. Selanjutnya, *Uleebalang* Teuku Muhammad Usman Kuta Baro menerima pengukuhan (*bevestiging*) kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 27 September 1906. Penguasa Ie Leubeue berikutnya bernama Teuku Ma' Ali disahkan kedudukannya pada 23 Mei 1935. Ia menjadi salah seorang korban Perang Cumbok.

xxi. JULO CUT

Julo Cut adalah bagian *Onderafdeeling* Idi dengan Panglima Perang Nyak Hakim sebagai *uleebalang*nya yang menerima pengukuhan (*bevestiging*) tanggal 20 Desember 1876. Pada 6 Juni 1877 diadakan lagi perjanjian dengan Belanda. Teuku Arifin merupakan *uleebalang* berikutnya. Pada 16 November 1907 diadakan perjanjian dengan *uleebalang* Julo Cut bernama Teuku Ali. Menurut *Regeerings Almanak*, *uleebalang* Julo Cut bernama Teuku Muhammad menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial pada 18 Juni 1931.

xxii. JULO RAYEU

Uleebalang Julo Rayeu yang menjadi bagian *Onderafdeeling* Idi adalah Teuku Bentara Peken ibnu Teuku Bentara Setia Muda yang menandatangani perjanjian pada 22 September 1884. Kemudian yang menjadi *uleebalang* berikutnya adalah Teuku Raja Amat. Kedudukan beliau dikukuhkan melalui penanda-tanganan perjanjian tertanggal 15 Juni 1900. Pada 18 Juni 1931, *Uleebalang* Teuku Ajuran menerima pengesahan dari Belanda.

xxiv. KAWAY XVI (MEULABOH)

Terletak di *Onderafdeeling* Meulaboh. *Uleebalang* Meulaboh bernama adalah Po Raman. Beliau digantikan oleh Teuku Ci' Muhammad Sa'et. *Uleebalang* Meulaboh berikutnya adalah Teuku Cik Tua (Teuku Kejuruan Cik Lela Perkasa), yang menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 24 Februari 1874. Meskipun telah diadakan perjanjian, tidak berarti Belanda dengan mudah dapat menanamkan kekuasaannya di sini. Kurang lebih dua bulan setelah penanda-tanganan perjanjian

(27 April 1874), Belanda datang hendak menaikkan benderanya. Namun putra Teuku Cik Tua, Teuku Kejuruan Muda, beserta segenap rakyat Meulaboh menentangnya. Pada 3 Maret 1877 diadakan lagi perjanjian dengan Teuku Cik Tua yang kali ini bertambah 18 Pasal dibandingkan perjanjian sebelumnya. Kendati *uleebalang*nya di atas kertas mengakui kekuasaan Belanda, tetapi perlawanan di Kaway XVI tak pernah surut.

Teuku Cik meninggal pada tahun 1879 dan karena seluruh anaknya merupakan penentang Belanda yang gigih, pemerintah kolonial mengangkat Teuku Itam Abaih sebagai penggantinya. Teuku Kejuruan Muda wafat pada tahun 1882 karena dibunuh oleh orang gila, tetapi anaknya bernama Teuku Musa meneruskan perjuangan ayahnya. Teuku Itam (Raja Itam) merupakan musuh besar *uleebalang* Teunom[173]. *Uleebalang* Teuku Cik Raja Nago dari Meulaboh tercatat menandatangani perjanjian pada 14 Juni 1902. Pada perkembangan selanjutnya, karena Teuku Raja Ne masih kanak-kanak, yang mewakilinya adalah Teuku Muhama Ali Akbar atau Teuku Rayeu. Ia memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial tanggal 19 Juni 1913.

xxiv. KEUMALA

Termasuk *Onderafdeeling* Lam Meulo. Keumala diperintah oleh Teuku Seuman selaku pejabat *uleebalang* semasa awal kekuasaan Belanda. Selanjutnya yang berkuasa di Keumala adalah Teuku Ben Asan yang menerima pengukuhan (*bevestiging*) dari pemerintah kolonial pada 24 November 1915.

xxv. KEUMANGAN

*Uleebalang*nya adalah Teuku Bentera Ureueng Kaya Setia Indra Po Cut Abdullateh. Setelah kematian beliau, karena putranya yang bernama T. Ma Usuih masih kanak-kanak, sebagai wakil *uleebalang* diangkatlah Teuku Uma, yang menandatangani kontrak pada 23 Desember 1908. Meskipun demikian, karena alasan kesehatan, T. Ma Usuih mengundurkan dirinya dari jabatan tersebut. *Uleebalang* Keumangan berikutnya adalah Teuku Muhammad, yang menerima pengukuhan (*bevestiging*) tanggal 17 September 1941.

173. Lihat *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, halaman 244.

xxvi. KEUREUTO

Keureuto merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhok Soekon (Lhoksukon). Wilayahnya mencakup kawasan Krueng Pase hingga Panton Labu Krueng Jambo Aye. Pusat pemerintahannya berada di Jiraat Mayang, sekitar 20 km dari Lhokseumawe. Keureuto merupakan ke*uleebalang*an yang makmur dan banyak penduduknya, sehingga pemimpinnya dijuluki Keujreun Lalat. Karena kedudukannya yang cukup penting, *uleebalang* Keureuto sering diundang dalam musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan sultan Aceh. Menurut catatan sejarah, *uleebalang* Keureuto yang pertama adalam Teuku Keujreun Pengamat.[174]

Selanjutnya, Keureuto pernah diperintah oleh Teuku Cik Muling yang mengakui kedaulatan Belanda di daerahnya pada 24 April 1874. Menjelang masa meletusnya Perang Aceh, yang menjabat sebagai *uleebalang* di Keureuto adalah Teuku Chi Ali Muda. Setelah beliau meninggal, istrinya bernama Cut Nyak Asiah (Cut Nyak Jiraat Manyak) tampil sebagai penggantinya. Sebagai seorang pemimpin Cut Nyak Asiah dicintai oleh bawahannya serta tangkas saat diharuskan berbicara di depan majelis. Dalam tiap-tiap pertemuan dengan para bawahannya, beliau sendiri yang memimpin tanpa dibantu orang lain.

Cut Nyak Asiah mempunyai dua orang anak, namun keduanya telah meninggal semenjak masih kecil. Oleh karenanya, dua orang putra Teuku Ben Berghang, saudaranya, yang masing-masing bernama Teuku Syamsarif dan Teuku Cut Muhammad diangkat sebagai anak. Setelah Cuk Nyak Asiah mengundurkan dirinya, Belanda mengangkat Teuku Syamsarif sebagai *uleebalang* Keureuto, padahal ia kurang disenangi rakyat karena sikapnya yang lemah terhadap Belanda. Teuku Cut Muhammad yang tak sudi bekerja sama dengan Belanda lantas mengundurkan diri ke pegunungan dan berjuang bahu-bahu membahu bersama rakyat.

Teuku Syamsarif diangkat sebagai *uleebalang* oleh van Heutz dan selanjutnya digelari Teuku Cik Bentara oleh van Heutz pada tahun 1899. Ia menikah dengan Cut Nyak Meutia, putri *uleebalang* Pirak, yang merupakan salah satu anggota federasi Keureuto. Namun karena Cut Nyak Meutia menentang kedekatan suaminya dengan Belanda, mereka kemudian bercerai dan Cut Nyak Meutia kembali pada ayahnya di Pirak. Belakangan Cut Nyak Meutia menikah lagi dengan Teuku Cut Muhammad, yang diangkat oleh sultan Aceh sebagai *uleebalang*

174. Lihat *Cut Nyak Meutia*, halaman 23.

Keureuto bergelar Teuku Cik Tunong. Dengan demikian, saat itu Keureuto terpecah menjadi dua karena adanya dua orang *uleebalang* tersebut.

Teuku Cik Tunong bersama dengan istrinya berupaya mengusir Belanda dari negerinya. Dalam rangka perlawanan ini mereka menebarkan jaringan mata-mata yang cukup merepotkan pihak Belanda. Pada bulan Juli 1902, Teuku Cik Tunong menerima laporan dari mata-matanya bahwa Belanda akan menggelar operasi militer berkekuatan 30 orang. Karena telah mengetahuinya terlebih dahulu, Teuku Cik Tunong segera bersiap siaga menghadapinya. Dalam pertempuran ini, van Steijn Parve yang menjadi komandan pasukan Belanda beserta 8 orang serdadu menemui ajalnya. Sedangkan di pihak Teuku Cik Tunong gugur 14 orang. Kemenangan ini menambah semangat pejuang Keureuto.

Guna mengelabui Belanda, Teuku Cik Tunong memerintahkan Pang Gadeng menyebarkan informasi palsu bahwa ia beserta pasukannya akan mengadakan kenduri besar pada 25 November 1902 di kampong Matang Rayeuk. Tempat ini dipilih karena Cik Tunong menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju tempat tersebut adalah melalui sungai. Belanda termakan siasat ini dan mengira bahwa Pang Gadeng telah berkhianat dengan membocorkan rencana tersebut. Belanda memerintahkan Letnan RDP. de Kok memimpin pasukannya ke Matang Rayeuk. Ia memerintahkan dua orang pendayung perahu menyeberangkan pasukannya, tanpa mengetahui bahwa kedua orang itu sesungguhnya adalah anak buah Teuku Cik Tunong. Begitu perahu telah ada di tengah sungai, dua pendayung dengan sengaja membuat perahu mereka terbalik dan berenang menyelamatkan diri ke tepian. Letnan de Kok beserta pasukannya dengan susah payah berenang di tengah sungai. Sementara itu, Teuku Cik Tunong dan anak buahnya telah siap menanti di tepi sungai dan melontarkan tembakan-tembakan pada mereka. Akibatnya Letnan de Kok beserta 28 bawahannya menemui ajalnya dan tenggelam ke dasar sungai; sedangkan Cik Tunong mendapatkan 42 pucuk senapan.

Peristiwa pembantaian terhadap serdadu Belanda ini menggusarkan van Heutz selaku gubernur sipil dan militer Aceh. Guna menyelesaikan masalah ini, ia mengundang Cut Nyak Asiah, ibu Cik Tunong dan *uleebalang* Keureuto sebelum terpecah menjadi dua. Gubernur van Heutz menyatakan Belanda tidak mengakui Teuku Cik Tunong sebagai *uleebalang* Keuretoe di bagian Tunong. Van Heutz hanya mengakui Teuku Syamsarif (Teuku Cik Bintara) sebagai satu-

satunya *uleebalang* di Keureuto[175]. Pemecatan ini tidak menggoyahkan Teuku Cik Tunong dan bahkan sebaliknya rakyat semakin menghormati beliau. Gangguan yang dilakukan pasukan Teuku Cik Tunong terhadap pasukan kolonial berupa sabotase dan bentuk perlawanan lainnya semakin menghebat sehingga van Heutz mengerahkan lebih banyak pasukan ke kawasan tersebut.

Van Heutz memerintahkan Kapten Swart mematahkan perlawanan Cik Tunong. Belanda bahkan tidak segan-segan bertindak kejam terhadap rakyat. Desa di dekat tempat terjadinya pertempuran antara Belanda dan Cik Tunong akan dibumi hanguskan oleh pasukan kolonial. Tujuannya agar rakyat membenci Cik Tunong, sehingga tidak lagi menyembunyikan atau memberikan bahan makanan padanya. Tetapi sebaliknya justru kepercayaan rakyat padanya semakin besar dan mereka bertambah benci terhadap Belanda. Karena kehabisan akal, Belanda mendekati Cut Nyak Asiah agar membujuk putranya menghentikan perlawanan. Tetapi upaya Belanda ini sia-sia belaka. Perlawanan terus berlanjut. Pada bulan September 1903, Belanda mengancam bahwa Cut Nyak Asiah akan diasingkan ke Subang apabila tak berhasil menghentikan perlawanan Cik Tunong.

Ancaman ini disampaikan pada Teuku Cik Tunong. Akhirnya, untuk sementara ia menghentikan perlawanannya. Namun alasan Cik Tunong mengakhiri perjuangannya bukanlah ancaman terhadap ibunya, melainkan menyerahnya Sultan Muhammad Daud Syah dan para petinggi Aceh lainnya. Pada 5 Oktober 1903, Cik Tunong melapor pada Kapten Swart di Lhokseumawe. Pejuang Aceh ini diterima dengan baik oleh perwira Belanda tersebut dan ia diperbolehkan menetap di Keureuto. Semenjak saat itu, Teuku Cik Tunong mengubah taktiknya dan tak lagi melakukan perlawanan frontal. Meskipun demikian, berhentinya perlawanan Cik Tunong itu dianggap sebagai keberhasilan oleh Belanda.

Cik Tunong kini mengatur perjuangan di belakang layar. Ia menutupi sedemikian rupa agar hubungannya dengan para pejuang Aceh tidak tercium oleh Belanda. Keadaan ini berlaku hingga berlangsungnya serbuan terhadap pasukan Belanda pada 26 Januari 1905 di Meurandeh Paya. Saat itu, 17 orang pasukan Belanda di bawah pimpinan Sersan Vollaers sedang berpatroli menjaga keamanan di wilayah yang telah dikuasainya. Ketika hari menjelang malam, komandan pasukan memutuskan agar mereka berhenti saja dan mendirikan kemah mengingat kemampuan tempur

175. Menurut catatan *Regeerings Almanak*, ia menandatangani kontrak pada 4 Oktober 1900.

pejuang Aceh justru lebih baik di kala malam hari, di mana mereka dapat dengan mudah mengarahkan senjatanya menuju ke sasaran. Tempat yang dipilih mereka untuk beristirahat, yakni di Meunasah Gampong Meurandeh Raya dirasa cukup aman, karena warga di sana tampaknya tidak lagi memusuhi Belanda.

Ternyata, dugaan Belanda ini meleset karena gerilyawan Aceh telah mengintai mereka. Dengan menyamar sebagai penjual buah dan telur ayam mereka memata-matai kekuatan pasukan Belanda. Setelah itu, mereka mempersiapkan senjatanya masing-masing dan menuju perkemahan pasukan patroli Belanda. Serangan ini sama sekali di luar dugaan para serdadu tersebut, sehingga hampir seluruhnya menjadi sasaran empuk kelewang beserta rencong orang Aceh. Hanya satu orang saja yang berhasil meloloskan diri dan memberikan laporan pada markasnya di Lhoksukon. Ketika Swart meninjau lokasi pembantaian tersebut, penduduk kampong telah menyingkir karena takut tempat kediaman mereka dibumi hanguskan oleh Belanda. Sementara itu, Petua Dulah dan Keujren Buah, selaku organisator lapangan serangan ini juga melarikan diri ke pegunungan.

Swart memerintahkan anak buahnya bernama Letnan van Vuuren melakukan penyelidikan yang berhasil mengungkapkan keterlibatan Teuku Cik Tunong dalam peristiwa ini. Ia ditangkap dan dihadapkan pada pengadilan militer di Lhokseumawe serta dijatuhi hukuman mati. Penangkapan Cik Tunong dijalankan dengan sangat berhati-hati. Sewaktu Cik Tunong berkunjung ke Lhokseumawe pada 5 Maret 1905 dalam rangka keperluan dinas biasa dan memasuki kubu pasukan Belanda tanpa diduga-duga ia langsung ditangkap. Pada mulanya, hukuman ini akan dijalankan dengan cara digantung, tetapi van Daalen selaku gubernur militer mengubahnya menjadi hukuman tembak. Cik Tunong menjalani hukuman matinya dengan penuh ketenangan pada 25 Maret 1905 dan sebelum menemui ajalnya, beliau berpesan pada Cut Nyak Meutia agar meneruskan perjuangannya.

Cut Nyak Meutia kemudian menikah dengan Pang Nanggro, bekas anak buah Cik Tunong dan meneruskan perjuangan bersamanya. Gempuran mendadak yang dilakukan para pejuang ini senantiasa menimbulkan kerepotan bagi Belanda. Mereka kerap membuntuti dan mengintai rombongan serdadu Belanda yang sedang berpatroli. Kemudian bila saatnya dirasa tepat barulah pasukan musuh itu dihabisi nyawanya. Sebagai contoh, pada 6 Mei 1909 dalam sebuah serangan

yang menggemparkan pemerintah kolonial, gerilyawan Aceh berhasil membunuh dua orang serdadu Belanda dan merampas 10 pucuk senapan beserta 750 peluru. Kurang lebih bersamaan dengan itu, demi menarik simpati rakyat Belanda sementara waktu memberhentikan Teuku Cik Bintara dari kedudukannya selaku *uleebalang*. Kendati demikian, karena siasat ini tidak membuahkan hasil, Teuku Cik Bintara dikembalikan pada kedudukannya di tahun 1907.

Pang Nanggro menobatkan Teuku Raja Sabi, putra Cik Tunong dengan Cut Nyak Meutia, sebagai *uleebalang* Keureuto. Serangan terhadap serdadu Belanda terus dilancarkan tanpa henti dengan berbagai siasat jitu. Suatu kali pasukan patroli Belanda menjumpai sebuah rumah besar yang lampu-lampunya menyala dengan tikar-tikar yang telah diatur rapi. Senjata-senjata tajam beserta baju-baju tua tergeletak di sekitar rumah. Belanda mengira bahwa rumah itu sedianya hendak dipergunakan pasukan Aceh berkenduri dan ditinggalkan dengan tergesa-gesa karena takut terhadap kedatangan pasukan Belanda. Mereka lebih yakin lagi saat mendekati rumah itu terdengar teriakan peringatan akan kemunculan para serdadu Belanda. Tanpa curiga Belanda memasuki rumah tersebut dan mendapati makanan-makanan lezat yang belum disantap. Karena kelaparan tanpa berpikir panjang lagi mereka menyantapnya. Ternyata, ini memang bagian siasat Pang Nanggro. Sebelumnya, dengan sangat teliti ia menggergaji tiang rumah itu tanpa meninggalkan bekas apapun. Agar rumah itu tidak roboh ia merentangkan rotan dari tiang-tiang tersebut dan mengikatkannya dengan pohon-pohon di sekitarnya. Apabila rotannya dipotong, tiang akan roboh dan menimbun orang yang berada di dalamnya. Benar saja, begitu pasukan Belanda memasuki jebakan, laskar Aceh yang telah mengintai dari luar memotong rotannya dan serentak melakukan serangan. Sebagian pasukan Belanda tewas terhimpit kayu-kayu rumah, sedangkan sisanya yang masih hidup menjadi makanan empuk kelewang beserta rencong pejuang Aceh.

Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa mereka tidak dapat membiarkan begitu saja perlawanan ini dan berniat sesegera mungkin melakukan pasifikasi. Letnan Christoffel diturunkan memimpin serdadu Belanda dalam rangka menghentikan serangan-serangan gerilyawan Aceh. Pasukan khusus yang disebut Kolone Macan dibentuk oleh Belanda. Serdadu semacam ini diizinkan bertindak lebih keras, kejam, dan tegas dibandingkan serdadu biasa. Tetapi pejuang Aceh yang mengetahui hal ini bertindak cepat demi mencegah meluasnya ruang

gerak Kolone Macan. Mereka memotong jalur kereta api yang dipergunakan mengangkut pasukan tersebut dan ketika kereta berbalik kembali karena tak dapat meneruskan perjalanannya, ternyata rel yang ada di belakang mereka juga telah dirusak oleh pejuang Aceh. Sekonyong-konyong dari segenap penjuru keluarlah pasukan Aceh yang membantai mereka. Akhirnya strategi pembentukan Kolone Macan ini menemui kegagalan dan popularitas Christoffel semakin merosot, hingga pada tahun 1908, van Daalen digantikan oleh Swart.

Berbeda dengan strategi-strategi sebelumnya yang menerapkan kekejaman terhadap rakyat, Swart kini berupaya menarik simpati rakyat. Ia bersedia memberikan imbalan pada siapa saja yang memberikan informasi mengenai pejuang Aceh. Selain itu ditanamkan kesan bahwa para gerilyawan itu hanyalah pengacau keamanan yang tidak menginginkan pulihnya ketertiban di Aceh. Belanda dengan cerdik memengaruhi masyarakat dengan menyatakan bahwa pembangunan demi kesejahteraan rakyat tidak akan dapat dilangsungkan di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif. Bujukan ini termakan oleh sebagian rakyat Aceh, sehingga akhirnya dukungan terhadap kaum pejuang semakin berkurang. Ruang gerak kaum pejuang bertambah sempit karenanya, sehingga kedudukan mereka makin terdesak.

Satu per satu pejuang Aceh berguguran, mulai dari Teuku Ben Pirak (kakak Cut Nyak Meutia) pada tahun 1909. Selanjutnya menyusul Pang Nanggro pada 1910. Hingga saat itu, ketika terjadi serbuan pasukan Belanda, Teuku Raja Sabi selalu berhasil diselamatkan. Oleh sebab itu, Belanda tak pernah dapat mengenali bagaimana wajahnya yang sesungguhnya. Kini giliran Cut Nyak Meutia yang menjadi target operasi serdadu Belanda. Pengejaran terus dilakukan di bawah pimpinan Mosselman. Baku tembak terjadi dengan sisa-sisa pengikut Cut Nyak Meutia, yang menewaskan pahlawan wanita Aceh tersebut pada 25 Oktober 1910.

Setelah Cut Nyak Meutia gugur, tinggal Teuku Raja Sabi mengembara bersama dua orang pengikutnya. Ketika mereka akhirnya tewas juga, Teuku Raja Sabi terpaksa berkelana sendirian dalam hutan. Belanda ingin menunjukkan bahwa Teuku Raja Sabi telah menyerah pada mereka. Oleh karenanya, mereka merancang suatu muslihat dengan mengakui seorang anak sebagai Raja Sabi palsu. Padahal anak yang bernama Abdullah itu hanya putra seorang rakyat biasa. Pemerintah

kolonial kemudian menyekolahkannya di Kuta Raja. Pada tahun 1913, beberapa pemuka masyarakat menyatakan bahwa mereka sanggup mengeluarkan Raja Sabi asli dari persembunyiannya, asalkan Belanda bersedia mengakui bahwa orang yang telah mereka maklumkan sebagai putra Teuku Cik Tunong dan Cut Nyak Meutia itu palsu. Meskipun demikian, Belanda menolaknya.

Teuku Raja Sabi tetap berpetualang dalam hutan hingga tahun 1919, dan karena tak tahan terhadap penderitaannya, turunlah ia kembali kampung. Waktu itu, tak seorangpun mengenalinya. Ia lalu berjalan hingga ke Simpang Ulim, Ulue Ie Puteh, dan Lhokseumawe. Begitu tiba di sana, salah seorang mantan pengawalnya bernama Dollah mengenalinya. Pamannya, Teuku Muhammad Syah, memberikan kesaksian yang lebih kuat lagi. Tentu saja Belanda merasa kehilangan muka dengan turunnya Raja Sabi yang asli. Pada 13 Maret 1919, Teuku Raja Sabi yang asli dikirim ke Kutaraja dan disekolahkan di sana. Ia baru diangkat sebagai *uleebalang* Keureutoe pada tahun 1937[176]. Teuku Raja Sabi kemudian menikah dengan Cut Nyak Meulu dan Cut Nyak Puteh. Ia merupakan *uleebalang* Keureuto yang terakhir.

Sebagai catatan Keureuto masih dibagi lagi menjadi daerah-daerah sebagai berikut: Matang Panjang di bawah Teuku Kejuruan Muda; Muling di bawah Teuku Panglima Perang Banta; Arun diperintah oleh Teuku Uleebalang Baro Muhammad Amin; Nibung di bawah pimpinan Teuku Dato Muhammad Napiah; Blang Glumpang dipimpin oleh Teuku Muda Angkasa; Buah di bawah Teuku di Buah Teuku Kejuruan Nyak Putih; Ara Bungku di bawah Teuku Ben Keumangan; Ara Keumudi di bawah Teuku Ben Nyak Uleebalang; Pirak; Seuleuma di bawah Teuku Ben Cut Asem; Minye di bawah Teuku Uleebalang Nyak Ali; dan Matang Ben di bawah Teuku Ben Cut Amat. Semua ini merupakan daerah taklukan Keureuto.

176. Lihat *Cut Nyak Meutia*, halaman 89.

Teuku Raja Sabi
Sumber: *Cut Nyak Meutia*, halaman 102.

xxvii. KLUANG

Terletak di *Onderafdeeling* Calang. Raja Kluang pertama bernama Raja Pahlawan Syah, yang bersaudara dengan Datu Pagu, raja Lam No[177]. Suatu kali datanglah angkatan perang Sultan Salatin Alauddin Riayat Syah ke kawasan tersebut. Datu Pagu bersedia menaklukkan dirinya dan menganut agama Islam, tetapi syaratnya hal itu jangan diberitahukan pada saudaranya, Raja Pahlawan Syah. Sultan Salatin lantas melanjutkan perjalanannya dan membangun kubu di Lam Kuta. Mendengar hal itu Pahlawan Syah mengumpulkan angkatan perangnya dan menyerang Sultan Salatin. Kendati demikian, ia terpukul mundur dan melarikan diri ke Aneu Panaih hingga wafatnya. Tetapi sebelum meninggal Raja Pahlawan Syah telah menganut agama Islam. Pada masa perang Aceh yang menjadi *uleebalang* Kluang adalah Teuku Mohamad Hanafiah Lampasai. Ia menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 3 September 1874. Menjelang masa berakhirnya kekuasaan Belanda yang menjabat sebagai *uleebalang* di Kluang adalah Teuku Raja Adean

177. Lihat *Atjeh Sepandjang Abad*, halaman 86.

xxviii. KLUET

Ke*uleebalang*an Kluet masuk dalam *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Legenda mengisahkan mengenai seorang musafir dari Pasai yang mengunjungi Kluet dengan berjalan kaki pada abad ke-13. Konon menurut penuturan cerita rakyat, namanya adalah Malim Meligei. Akhirnya tokoh ini menjumpai sebuah gua dan memutuskan bertapa di tempat tersebut. Suatu ketika, datanglah serombongan pedagang dari Arab atau Persia. Mereka turun ke darat dan secara kebetulan berjalan menuju gua tempat Malim Meligei bertapa. Melihat ada orang sedang bertapa, pemimpin rombongan pedagang memberi isyarat pada anak buahnya agar mereka tenang serta berkata, "Khalut," yang artinya "bertapa" atau "bersemadi." Inilah yang menjadi asal mula kata Keluwat atau Kluet. Malim Meligei terus mendiami daerah tersebut dan lama-kelamaan makin banyak pendatang yang berdiam di sekitar tempat itu. Perkampungan tersebut lalu dinamai Meligei, seturut nama Malim Meligei. Letaknya kini berada di tepi sungai, yakni dekat desa Krueng Kluet (Lawe Keluwat).

Belakangan, Malim Meligei menikah dengan Putri Mambang, yang berasal dari daerah hulu Sungai Meligei. Ia lalu diangkat sebagai pemimpin pemukiman itu. Di bawah pemerintahannya, Kluet menjadi makmur. Perniagaan dan pertanian makin berkembang; sehingga mengundang makin banyak orang datang ke sana. Apalagi di sebelah utara kawasan itu terdapat sungai yang mengandung emas bernama Alur Mas. Lama-kelamaan, pemukiman yang dipimpin Malim Meligei bertumbuh menjadi kerajaan. Malim Meligei memerintah rakyatnya dengan bijaksana; sehingga tidak mengherankan bila ia menjadi sosok yang sangat dihargai dan dihormati. Istilah Kluet bagi "dihormati" dan "dihargai" adalah *seli*. Oleh karena itu, Malim Meligei juga disebut Raja Seliyan. Nama Seliyan ini lalu berkembang sebagai nama marga. Dengan demikian, seluruh keturunan Malim Meligei menyandang marga ini.

Malim Meligei digantikan oleh adiknya bernama Malim Selimut. Raja Kluet berikutnya adalah Sir Alam, putra Malim Selimut. Ia memindahkan kerajaan ke Surou, yakni di kaki Gunung Sikorong.[178] Setelah pusat kerajaan dialihkan ke Surou, Sir Alam lebih dikenal sebagai Teuku Surou. Pada zaman pemerintahan Teuku Surou terjadi permusuhan dengan tokoh lain bernama Iman Gerdung.

178. Lihat *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, halaman 64.

Berkat bantuan Raja Enggang yang datang dari Tanah Batak, Imam Gerdung dapat dikalahkan. Sebagai hadiahnya, Raja Enggang dianugerahi wilayah di sebelah utara Kluet bernama Delong Timur. Karena itu, berdirilah Kerajaan Delong Timur yang berdiri berdampingan dengan Surou. Penguasa Kluet berikutnya adalah Imam Malei Beringin atau Raja Pekahar. Surou dilanda banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Kluet, sehingga pusat kerajaan terpaksa dipindahkan ke Payadapur.

Kurang lebih bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Payadapur, Raja Imam Malei Beringin mengutus salah seorang putranya bernama Alamsyah ke sebelah utara Surou guna mendirikan Kerajaan Menggamat. Para penguasa Payadapur berikutnya setelah Raja Pekahar secara turun-temurun seluruhnya menyandang gelar *imam malei*. Rangkaian *imam malei* hingga masa kedatangan balatentara Jepang adalah sebagai berikut: Imam Malei Beringin (1350), Imam Malei Pengampun, Imam Malei Pesangan, Imam Malei Peusampau, Imam Malei Pesunting, Imam Malei Pesantun, Imam Malei Pecompo, Imam Malei Perkalam (Takbin), Imam Malei Cik, Imam Malei Pukahak (Teuku Raja Emas), dan Imam Malei Wahida (Teuku Raja Yaman). Setelah terbentuknya Keujereuen Kluet, kedudukan *imam malei* hanyalah sebagai wakil raja saja. Teuku Raja Yaman selaku *imam malei* terakhir diangkat menjadi asisten wedana Kluet Selatan dan pensiun tahun 1958. Beliau wafat saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1980.

Melengkapi kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Kluet masa itu, pada kurang lebih abad ke-16 berdirilah Kerajaan Tungkawan (Durian Kawan). Pendirinya adalah seorang tokoh bernama Kilat Fajar. Ia digantikan oleh kemenakannya yang bergelar Keujreuen Panjalo. Aceh menanamkan pengaruhnya di Kluet dan keturunan Kilat Fajar dijadikan penguasa atau *keujreuen* atas seluruh Kluet. Para *keujeruen* selanjutnya yang pernah memerintah Kluet hingga masa awal kemerdekaan adalah: Teuku Keujreuen Tembun, Teuku Keujruen Bungkuk, Teuku Keujruen Abur, Teuku Keujreuen Sagub (Wan Serun), Teuku Keujreuen Ambun, Teuku Keujreuen Naib Amansyah (–1910), Teuku Keujreuen Raja Mukmin (1910–1926), Teuku Keujreuen Teuku Meurah Adam (1926–1942).

Pada tahun 1926 di Kluet pecah perang Keululum[179] yang bertujuan menghalau penjajah. Laskar Kluet dipimpin oleh Panglima Teuku Raja Lelo V, sedangkan

179. Lihat *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, halaman 249.

pasukan pemerintah kolonial dikomandoi oleh Kapten J. Paris. Dalam salah satu pertempuran Kapten J. Paris dapat ditewaskan oleh Teuku Raja Lelo V. Kendati demikian, tembakan membabi buta serdadu kolonial akhirnya merenggut nyawa panglima perang Kluet tersebut.

xxix. KROENG PASE (PASAI)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhok Soekon (Lhoksukon). Pada 2 April 1874, *Uleebalang* Teuku Muda Angkasa menandatangani perjanjian dengan Belanda. Menurut catatan *Regeerings Almanak, uleebalang* selanjutnya di Kroeng Pasai adalah Teuku Hakim Agam. Pada 4 Oktober 1900, *uleebalang* bernama Teuku Hakim Kroeeng tercatat menerima pengukuhan (*bevestiging*) dari pemerintah kolonial. *Uleebalang* berikutnya adalah Teuku Hitam selaku wali bagi Teuku Raja Mahmud, yang ketika itu masih di bawah umur. Teuku Hitam menandatangani kontrak pada 20 Juli 1911.

xxx. KROEENG SEUMIDEUEN

Kroeeng Seumideuen adalah bagian *Onderafdeeling* Sigli. *Uleebalang*nya adalah Teuku Ben Meuntroe Kroeeng Seumideuen. Penguasa berikutnya adalah Teuku Meuntroe Brahim yang menandatangani kontrak pada 4 Oktober 1900. Menurut *Regeerings Almanak*, *Uleebalang* Teuku Muhammad Banta Syam disahkan kedudukannya pada 17 Mei 1935. Saat meletusnya Perang Cumbok, beliau menjadi salah seorang korbannya.

xxxii. KROENG SABE (KRUENG SABE atau KRUET SABE)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Calang. Penguasa Kroeng Sabe terawal yang dapat dicatat adalah Keujruen Ob. Beliau secara berturut-turut digantikan oleh putra dan cucunya, yakni Teuku Sabe Cuwi serta Teuku Sabe Cit (Keujruen Laot). Pada tahun 1878, Teuku Sabe Cit mangkat dan digantikan oleh Keujruen Cut Amat, yang juga dikenal sebagai Raja Muda, tetapi ia meninggal tak lama kemudian. Sebagai penggantinya diangkat Keujruen Muda Ali (Teuku Cut Ali), putra bungsu Keujruen Cut Amat, karena putra Raja Muda bernama Teuku Ibrahim masih terlampau muda, sehingga belum mampu menjalankan roda pemerintahan. Keujruen Muda Ali menurut *Regeeringsalmanak* menerima pengukuhan (*bevestiging*) pada 25 maret 1877. Beliau terbunuh pada bulan Mei 1896 dan digantikan oleh Teuku Ibrahim, putra Raja Muda.

xxxii. KUALA BATEE

Terletak di *Onderafdeeling* Tapak Tuan dengan Raja Leman sebagai *uleebalang*nya. Penguasa Kuala Batee selanjutnya yang tercatat dalam *Regeerings Almanak* adalah Teuku Cut Husin (Usen). *Uleebalang* Teuku Cut Din disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial tanggal 31 Mei 1919.

xxxiii. KUALA DAYA

Kuala Daya digabungkan pemerintah kolonial ke dalam *Onderafdeeling* Calang. *Uleebalang*nya adalah Teuku Hakim, yang tercatat menandatangani kontrak pada 10 Februari 1901. Pemimpin Kuala Daya selanjutnya adalah Teuku Sarong, yang disahkan kedudukannya tanggal 30 Oktober 1926.

xxxiv. LABUHAN HAJI

Termasuk *Onderafdeeling* Tapak Tuan. *Uleebalang* Labuhan Haji, Datuk Ujung Batu, menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 6 Maret 1874. Selanjutnya, Datu Maharajalela dan Datuk Raja Muda menandatangani perjanjian pada 11 Januari 1882. *Uleebalan*g berikutnya secara berturut-turut adalah Datuk Muhammad Ali, Datuk Muhammad Nuh, Teuku Angkob, dan Teuku Maidin. Selanjutnya, Labuhan Haji diperintah oleh suatu dewan (bestuurscommissie) yang beranggotakan Teuku Muhammad Yunun sebagai pemimpinnya. Datuk Ma' Kisah, dan Datuk Abang. Daerah bawahan Labuhan Haji adalah Pawoh Baro, Pelokkan, Kemumu, dan Pelumat yang dipimpin oleh Teuku Nyak Abaih.

xxxv. LAGEUEN

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Calang. Cikal-bakal Ke*uleebalang*an Lageuen adalah seorang pedagang asal Blang Cut bernama Teuku Lam Pasèh Nya' Asan, yang ditetapkan oleh sultan Aceh sebagai syahbandar di Lhok Glumpang[180]. Belakangan, beliau ditetapkan oleh sultan Aceh sebagai *uleebalang* atas Lageuen, Pate, dan Lhok Glumpang. Setelah kematian beliau, putranya bernama Teuku Nja' Mahmut diangkat sebagai penggantinya. Ia lalu digantikan oleh saudaranya, Teukoe Nja' Sam. Meskipun demikian, ia mangkat pada 1878 tanpa meninggalkan keturunan, sedangkan putra ketiga Teuku Lam Paseh Nya' Asan yang bernama Teuku Nya' Meurah Samsu Lam Pasèh masih di bawah umur. Oleh karenanya

180. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 653.

diangkatlah para wakil yang mendampinginya memerintah, yakni Paté Teuku Nya' Akob, menantu Teuku Lam Paseh, dan Teuku Gunong Prio, putra Panglima Bo Pang, asal Lageuen -Lhok Glumpang. Teuku Gunong Prio dibunuh pada 1879 dan sebagai penggantinya diangkat Teuku Nya' Brahim, putra Teuku Raja Amat.

Pada 1880, Teuku Nya' Meurah Samsu Lam Paseh mangkat. Teuku Nyak Akob lalu mengangkat putranya, Teuku Nya' Dorahman sebagai *uleebalang* Lageuen yang baru. Karena ia masih di bawah umur, ayahnya sendiri, yakni Teuku Nya' Akob, dan Teuku Cut Areusjad. Belakangan, Teuku Nya' Akob diasingkan ke Batavia dan Teuku Brahim diangkat sebagai *uleebalang* Pate pada tahun 1883. Sementara itu, kawasan Lageuen dan Lhok Glumpang tetap berada di bawah Teuku Nya' Dorahman dengan walinya, Teuku Cut Areusyad. Pada tahun 1887, kawasan itu ditaklukkan oleh Teuku Uma, dan hingga tahun 1895, pemerintah kolonial tidak mengadakan hubungan dengan kawasan tersebut. Berikutnya, pada tahun 1888, *uleebalang* Lhok Kruet, melakukan serbuan ke Lageuen, namun terpukul mundur. Teuku Cut Areusyad sendiri lalu diangkat sebagai wakil Teuku Uma di Lageuen-Lhok Glumpang. Seiring dengan masuknya kekuasaan pemerintah kolonial, pada 1893, Teuku Cut Areusyad dan Teuku Uma melaporkan diri pada Belanda.

Teuku Nya' Dorahman mangkat pada 1897 sehingga kini yang berhak menggantikannya adalah Teuku Raja Itam, putra Teuku Brahim Pate, namun ia tak lagi dapat menuntut haknya tersebut. Roda pemerintahan di Lageuen lantas dikendalikan oleh Teuku Cut Areusyad. Di bawah kepemimpinannya, kondisi Lageuen menjadi makin aman dan tenang. Pada 9 Agustus 1904, ia tiba-tiba meninggal, dan putranya bernama Teuku Sabi diangkat sebagai pengganti beliau. Penguasa baru Lageuen tersebut diangkat pada 5 Maret 1906. Menurut catatan *Regeeringsalmanak*, pada 8 September 1906 diadakan penanda-tanganan kontrak dengan Teuku Sabi.

xxxvi. LAMBEUSOE

Terletak di *Onderafdeeling* Calang dan dipimpin oleh *Uleebalang* Teuku Muda Kuala. Beliau menandatangani *korte verklaring* pada 1 Oktober 1899, disahkan oleh gubernur Aceh pada 8 September 1900, dan menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 10 Februari 1901. Teuku Muda Kuala kemudian mangkat pada bulan Juni 1909. Teuku Muda Kuala digantikan oleh putranya, Teuku Abu Bakar, yang menandatangani *korte verklaring* pada 5 November 1909.

Pada perkembangan selanjutnya, karena *Uleebalang* Teuku Kejuruan masih kanak-kanak yang menjadi walinya adalah Teuku Dorahman. Perjanjian dengan Belanda lalu ditanda-tangani pada 1 Februari 1919. Yang menjabat sebagai *uleebalang* menjelang akhir masa penjajahan Belanda adalah Teuku Ali Basyah.

xxxvii. LAM NO

Terletak di *Onderafdeeling* Calang. Raja Lam No pertama adalah Datu Pagu yang bersaudara Raja Pahlawan Syah dari Kluang. Bersamaan dengan kedatangan angkatan perang Sultan Salatin Alauddin Riayat Syah, masuklah ia ke agama Islam. *Uleebalang* Lam No pada sekitar tahun 1917 adalah Teuku Durahman.

xxxviii. LANGSAR (LANGSA)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Langsa (Langsar). *Uleebalang*nya menjelang masuknya pengaruh pemerintah kolonial adalah Teuku Cik Langsar. Ia menandatangani kontrak pada 23 Agustus 1891. Penguasa selanjutnya adalah Teuku Cik Bentara Blang. Pada 17 Agustus 1908 dilangsungkan penanda-tanganan kontrak oleh Teuku Banta Peureudan, *uleebalang* berikutnya. *Uleebalang* Teuku Raja Muhammad Ali menerima pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada 8 Agustus 1934. Langsa memiliki beberapa daerah bawahan; yakni Majapahet yang dipimpin oleh Teuku Habib Rayeu; Bayan-kanan yang dipimpin Teuku Bantah, dan Birim yang dipimpin oleh Panglima Perang Birim.

xxxix. LEKOM

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Simalur. Pada 27 Mei 1874, Datuk Jawab menandatangani perjanjian dengan Belanda. Selanjutnya yang memerintah Lekom adalah Datuk Muhammad Jafar. Penanda-tanganan kontraknya disahkan tanggal 23 Maret 1901. Penggantinya, Datuk Nyak Beh, menerima pengesahan tanggal 2 Maret 1917. Beliau digantikan oleh Su'gam yang dikukuhkan kedudukannya pada 12 November 1934.

xl. LHOK BOEBON

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Meulaboh dengan Teuku Raja Mahmud sebagai *uleebalang*nya. Pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial diterimanya pada 15 Juni 1900. Belanda mengesahkan kedudukan Teuku Min selaku wali bagi Teuku Cut Muhammad Tayeb yang masih kanak-kanak pada 15 Oktober 1920.

xlii. LHOK KROEET (LHOKKRUET)

Bagian *Onderafdeeling* Calang. Leluhur penguasa Lhok Kroeet adalah To' Keuci Po Itam yang berasal dari XII Mukim. Beliau berpindah ke Lhok Kroeet guna membuka perkebunan lada. To' Keuci Po Itam meninggalkan dua orang putra, yakni T. Nyak Geh dan Keuci Ma' Ali. Di bawah kepemimpinan T. Nyak Geh kawasan tersebut makin berkembang sehingga beliau akhirnya menerima surat pengakuan (*sarakata*) dari sultan Aceh, yakni sebagai penguasa atas Lhok Kroeet dan Babah Nipah. Beliau digantikan oleh putranya, Teuku Abdo Asyib atau Teuku Muda Ba'et. Bersamaan dengan pemerintahannya, meletus Perang Aceh dan beliau pada 1877 melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Beliau mangkat pada 1881 dan digantikan oleh adiknya, Teuku Muda Abdul Majid Lamkuta. Beliau menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 31 Oktober 1881 dan 5 Februari 1882. Teuku Muda Abdul Majid Lamkuta meninggal karena tenggelam pada 15 Juli 1901. Sebagai penggantinya dalam menjalankan roda pemerintahan Lhok Kroeet adalah Teuku Ibrahim yang menandatatangani perjanjian tanggal 25 Januari 1903. Daerah-daerah bawahan Lhok Kruet adalah Babah Nipah dan Cras Mong. *Uleebalang* Teuku Mahmud yang kemudian menjadi penguasa Lhok Kroeet tercatat menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial tanggal 26 Januari 1915. Menjelang akhir masa penjajahan Belanda, *uleebalang* Lhok Kroeet adalah Teuku Cut Abdul Azis.

xlii.LHOKPAWOH UTARA

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Daerah-daerah bawahannya adalah Sua, Tangan-Tangan-Cut, dan Tangan-Tangan Rayeu .*Uleebalang*nya adalah Teuku Raja Mahmud (menerima pengukuhan tanggal 23 Maret 1901). Pada 8 Oktober 1917, *Uleebalang* Teuku Cut Banta Sultan menerima pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda. Pengganti beliau, Teuku Raja Nagur, menandatangani kontrak pada 19 Desember 1924.

xliii.LHOKPAWOH SELATAN

Terletak di *Onderafdeeling* Tapak Tuan dengan Teuku Nyak Cut sebagai *uleebalang*nya. Penguasa berikutnya adalah Teuku Dolah. Beliau dikukuhkan kedudukannya tanggal 11 November 1911. Pada perkembangan selanjutnya, karena Teuku Akbar masih kanak-kanak, Teuku Andah ditunjuk sebagai walinya. Pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial diterimanya pada 15 Oktober

1920. Belakangan Teuku Andah menandatangani kontrak selaku kepala swapraja pada 4 Juli 1935. Daerah taklukan Lhokpawoh Selatan meliputi Alue Paku, Dama Tutung, Sawang, Trieng Meuduroe dan Bate Tunggay.

xliv. LHOKSEUMAWE

Termasuk dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe. Cikal-bakal ke*uleebalang*an ini adalah seorang tokoh bernama Teuku Mbah Raja. Sebelum diangkat sebagai *uleebalang* Lhokseumawe, ia dipercaya oleh sultan Aceh sebagai pengumpul pajak pelabuhan dan pendulangan emas. Belakangan barulah ia diangkat sebagai *uleebalang* Lhokseumawe oleh sultan Aceh. Tuanku Karot adalah *uleebalang* Lhokseumawe pada kurang lebih 1815. Ketika itu, Sultan Jauhar Alam Syah terpaksa menyingkir ke Lhokseumawe karena menghadapi pergolakan di ibukota. *Uleebalang* Teuku Maharaja Mangkubumi menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 23 Juli 1874.

Pada tahun 1903, Lhokseumawe jatuh ke tangan Belanda dan selanjutnya dijadikan sebagai suatu daerah swapraja dengan Teuku Abdul Lhokseumawe sebagai *uleebalang* atau kepala swaprajanya (*zelfbestuurder*). Sebagai wujud antusiasme dalam menyambut pergerakan nasional, *Uleebalang* Tengku Abdulhamid Orang Kaya Sri Maharaja Mangkubumi beserta rakyatnya bersama-sama menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Beliau tercatat menandatangani *korte verklaring* pada tahun 14 November 1904.[181]

Menurut sumber lainnya, leluhur penguasa Lhokseumawe adalah seorang Melayu yang berasal dari Padang[182]. Putranya dinamai seturut nama daerah tempat kediamannya, yakni T. Oelèë Oe. Makam beliau masih ada di Oelee Oe dan dihormati orang, karena beliau pernah menjadi pemuka keagamaan sultan Aceh. Dua orang putra beliau, yakni T. Muhammad Sayet dan T. Mahmut Grot, memisahkan diri dari Aceh, dan berdiam di Peukan Tuha, yang terletak di Cunda. Mereka lalu memperoleh kawasan Lhokseumawe yang waktu itu merupakan tanah tandus dan saat itu belum berpenghuni.

Putra T. Muhammad Sayet, bernama T. Abdullah diakui oleh sultan Aceh sebagai penguasa Lhokseumawe yang berdaulat dan digelari Orang Kaya Sri

181. Lihat *Atjeh Als Land voor Handel en Bedrijf* , halaman 54. Menurut *Regeerings Almanak* pada 14 Novembera 1904.
182. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 596.

Maharaja Mangkubumi. T. Abdullah digantikan oleh putranya, T. Mahmut. Sewaktu T. Mahmut mangkat, ia hanya meninggalkan seorang putra yang masih di bawah umur bernama T. Abdullah. Oleh karenanya, T. Muhammad Sayet, adik T. Mahmut lantas menjadi wakil bagi anak masih di bawah umur tersebut. Ia merupakan penguasa berpengaruh besar di kawasan pantai timur, di mana beliau berbagi penghasilan yang diperoleh dari lada sebesar 10 persen dengan sultan Aceh. Pada tahun 1874, ia mengakui kekuasaan pemerintah kolonial, tampaknya beliau yang disebut dengan Teuku Maharaja Mangkubumi pada sumber lain di atas.

Sewaktu masih hidup, T. Muhammad Sayet hendak mengundurkan diri agar kemenakannya dapat menjadi penguasa, namun T. Abdullah menolaknya dan sudah puas dengan gelar Maharaja Muda. T. Abdullah kemudian menikah dengan putri T. Cik Bugis dari Samalanga dan mendapatkan kawasan Plimbang sebagai daerah kekuasaannya, yang dipergunakan sebagai tempat penanaman lada. Barulah setelah T. Muhammad Sayet meninggal pada tahun 1897, ia bersedia memangku jabatan *uleebalang* tersebut. Kendati demikian, ia merupakan penguasa yang lemah dan berada di bawah pengaruh saudara sepupunya, yakni T. Rayeu', putra kedua almarhum pamannya.

Putra pertama T. Muhammad Sayet, yakni T. Raja Lho' lebih dekat dengan keluarga pihak ibunya yang berasal dari keluarga penguasa Geudong. Ia memusuhi pemerintah kolonial dan meninggalkan Lhokseumawe serta bergabung dengan Panglima Polim pada tahun 1901. Ia kerap berdiam di Matang Kuli. Pada bulan Februari 1902, ia muncul beberapa kali di Lhokseumawe dan karenanya, penguasa Lhokseumawe didenda karena tidak cukup upayanya dalam menangkap T. Raja Lho'. Pada bulan September 1902, T. Abdullah, *uleebalang* Lhokseumawe mangkat. Penerus yang paling berhak adalah T. Raja Lho', namun dia masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda, sehingga pemerintahan sementara dipegang oleh adiknya, T. Rayeu'. T. Raja Lho' akhirnya melaporkan diri pada pemerintahan kolonial dan diangkat sebagai *uleebalang* Lhokseumawe dengan gelar Tengku Abdulhamid Orang Kaya Sri Maharaja Mangkubumi.

xlvi. MANGGENG

Terletak di *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Cikal-bakal penguasa Manggeng adalah seorang tokoh bernama Dato Besar. Beliau digantikan oleh putra keduanya bernama Teuku Cut Ajat, karena putra sulungnya menderita sakit dan tak sanggup

memangku jalanan pemerintahan. Setelah beliau mangkat, yang menggantikannya adalah Teuku Dollah, anak putra sulung Dato Besar. Meskipun demikian, yang sesungguhnya berkuasa adalah T. Nya Assan, putra Cut Ajat. *Uleebalang* selanjutnya adalah Teuku Geh, yang menerima pengesahan kedudukan dari pemerintah kolonial tanggal 23 Maret 1901. Yang menjadi *uleebalang* Manggeng berikutnya adalah Teuku Sandang. Karena suatu kesalahan, Teuku Sandang diasingkan ke Jakarta oleh pemerintah kolonial dan digantikan oleh Teuku Mamat. Teuku Kanda yang berhak menduduki jabatan sebagai *uleebalang* selanjutnya masih kanak-kanak, sehingga Teuku Nana diangkat sebagai walinya. Pengesahannya dikeluarkan tanggal 19 Januari 1921. Setelah habis masa pengasingannya, Teuku Sandang dikembalikan ke Manggeng dan memerintah lagi sebagai *uleebalang*. *Uleebalang* berikutnya, Teuku Raja Iskandar tercatat menandatangani kontrak pada 17 Juni 1937.

xlvi. MATANG KULI

Didirikan oleh orang-orang asal Aceh Besar yang dipimpin oleh dua orang bersaudara, yakni Po Bambi en T. Ci' Po Rhi. Po Bambi kemudian menerima pengukuhan (*sarakata*) dari sultan Aceh sebagai *uleebalang* Matang Kuli. Cucu lelaki Po Bambi, T. Keujruen Muda Nya' Mèn. Sewaktu meletusnya Perang Aceh, ia beserta banyak pengikutnya pergi ke Aceh Besar guna membantu melawan Belanda. Meskipun demikian, Beliau meninggal karena kolera. T. Keujruen Muda Nya' Men tidak berputra, ia lantas digantikan oleh T. Agam, putra adiknya. Beliau lalu digelari T. Cik Matang Kuli.

Pada tahun 1897, ia mengadakan kunjungan ke Lhokseumawe dan dibawa oleh *uleebalang* Lhokseumawe ke kantor kontrolir. Beliau meninggal pada tahun 1899 dan digantikan oleh Teuku Muda Lhon. *Uleebalang* Teuku Muda Lhon dari Matang Kuli menandatangani kontrak pada 9 Juni 1902. Sebenarnya yang berhak menggantikan adalah putra tertua T. Cik Matang Kuli bernama T, Majit. Tetapi di bawah kancah peperangan itu, ia dibawa oleh bibi dan sekaligus ibu tirinya melarikan diri, dan meninggal karena kolera. Putra kedua T. Cik Matang Kuli yang bernama Nyak Ben atau Nyak Ali masih berusia 5 tahun, sehingga roda pemerintahan lalu dijalankan oleh Teuku Muda Lhon. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, *Uleebalang* Teuku Meukuta disahkan kedudukannya pada 1 Agustus 1927.

xlvii. MEUKE

Ke*uleebalang*an ini terletak di *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Datuk Cut Amat, *uleebalang* Meuke, menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 9 Maret 1874. Ia digantikan oleh Teuku Raja Cut, yang disahkan kedudukannya sebagai penguasa Meuke pada 23 Maret 1901. Datuk Magi yang bergelar Teuku di Gunong tercatat menandatangani kontrak pada 30 Oktober 1913.

xlviii. MEUREUDU

Termasuk *Onderafdeeling* Meureudu. Tatkala Sultan Iskandar Muda menyerang Semenanjung Melayu, ia mengangkat Malem Dagang, seorang tokoh dari Meureudu sebagai panglima perangnya. Sultan lantas menobatkan Meurah Ali Husein sebagai wakil sultan di Meureudu. Putra Meurah Ali Husein bernama Meurah Johan Mahmud ditunjuk oleh Sultan Iskandar Thani–pengganti Iskandar Muda–sebagai penguasa berikutnya pada tahun 1640 dengan gelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu. Semasa awal penjajahan Belanda, Meureudu diperintah oleh Teuku Cik Hamba Pahlawan. Beliau dikukuhkan kedudukannya sebagai *uleebalang* oleh pemerintah kolonial tanggal 20 Desember 1880. *Uleebalang* Meureudu selanjutnya adalah Teuku Modin, yang menandatangani kontrak tanggal 3 September 1912. Ia digantikan oleh Teuku Cik Mahmud, yang disahkan kedudukannya tanggal 20 Februari 1929.

xlix. NDJONG

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Sigli dengan *uleebalang*nya bernama Teuku Laksamana yang menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 6 April 1874. Daerah-daerah bawahan Ndjong adalah Mukim Musa yang dipimpin oleh Teuku Kejuruan Musa; Mukim Langien di bawah Teuku Kejuruan Langien; Mukim Peudue yang berada di bawah pimpinan Teuku Cik Pedue; dan Mukim Trieng Gading di bawah pimpinan Teuku Panglima Trieng Gading. *Uleebalang* Teuku Haji Brahim dari Ndjong menandatangani kontrak tanggal 19 Juli 1916. Penguasa Ndjong berikutnya, Teuku Laksamana Umar memperoleh pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada 21 Januari 1938.

l. NISAM

Ke*uleebalang*an Nisam merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhokseumawe. Menjelang kedatangan Belanda, *uleebalang* yang memerintah Nisam adalah

Teuku Sri Mahmud yang menerima pengukuhan tanggal 15 Februari 1881. *Uleebalang* berikutnya bernama Teuku Raja Maali, yang digantikan oleh Teuku Rhi Bujang (disahkan kedudukannya tanggal 8 Desember 1914). Karena aktivitasnya dalam Sarekat Islam (SI), Teungku Rhi Bujang, *uleebalang* Nisam, diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Irian Barat pada tahun 1919/ 1920-an. Penggantinya, Teuku Muhammad Daud Rhi, memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda pada 15 Oktober 1941.

lii. NOH

Kawasan ini dibuka oleh Teungku Haji No. Kendati demikian, ia kerap mendapatkan gangguan dari orang-orang asal Daya. Oleh karenanya, ia lantas meminta bantuan Panglima Polon dari VII Mukim. Belakangan, Panglima Polon justru menghalau Teungku Haji No dari sana. Sepeninggal Panglima Polon, ia digantikan oleh putranya, Panglima Cut, yang menerima pengakuan dari sultan Aceh sebagai *uleebalang* kawasan tersebut. Beliau digantikan oleh putranya, Teuku Asan. Ia tak memiliki keturunan, sehingga akhirnya Teuku Ali, yang masih keturunan Panglima Polon, diangkat menggantikannya. *Uleebalang* Noh yang baru tersebut mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 10 Februari 1901.

liii. PANTE RAJA

Ke*uleebalang*an Pante Raja dimasukkan pemerintah kolonial dalam *Onderafdeeling* Meureudu. Kawasan Pante Raja sebelumnya merupakan daerah kekuasaan T. La' Seumana Haji Muhammad Usen dari Ndjong. Kawasan yang kelak bernama Pante Raja ini mulanya dihuni oleh 20 keluarga saja yang bertugas merawat kawanan kerbau *uleebalang* serta penangkapan ikan. T. La' Seumana Haji Muhammad Usen memiliki tiga orang putra, yakni T. Mahmud Adan, T. Rayeu Ma in, dan T. Syahbudén. T. Syahbuden menikah dengan Pocut Binti, putri T. Muda Tahe dari Arosan, dan memilih berdiam di Pante Raja serta menerima tugas mengembangkan daerah tersebut. Kesuburan tanahnya menarik warga dari berbagai kawasan di Lembah Pidie. Oleh karenanya, pada masa T. La' Seumana Mahmud, penerus T. La' Seumana Haji Muhammad Usen, pemukiman itu telah ramai dan banyak memiliki perkebunan lada. Belakangan, T Syahbuden berselisih dengan T. La' Seumana Mahmud mengenai kawasan Parue. Kendati demikian, T. Syahbuden kalah dalam peperangan itu dan tertangkap. Namun, ia dibebaskan lagi dan diangkat sebagai

pemimpin Pante Raja dengan perjanjian bahwa ia tak akan meluaskan wilayahnya melebihi kawasan Parue[183]. Semenjak saat itu, ia menjadi sekutu Keuleebalangan Ndjong yang setia.

Dalam kancah Perang Aceh, T. Syahbuden hanya sedikit sekali atau bahkan tak memiliki peran sama sekali. Kabar yang diterima pada tahun 1876 menyebutkan bahwa ia hendak melaporkan diri pada pemerintah kolonial dan menerima pengakuan sebagai *uleebalang* Pante Raja. T. Syahbuden memiliki sembilan orang istri. Salah seorang diantaranya adalah Pocut Ubet, di mana pernikahan mereka membuahkan seorang putra bernama Teuku Raja Suleiman, yang menjadi pengganti ayahnya. Meskipun demikian, Teuku Raja Suleiman hanya tiga bulan pemerintah dan mangkat pada tahun 1903. Saat itu, putra beliau yang kelak akan menjadi *uleebalang* berikutnya bernama Teuku Ubet masih berada di bawah timur, sehingga yang menjadi wakil *uleebalang* adalah T. Muhamad Useuman Kuta Baro. Pada 8 Mei 1915, setelah diangkat menjadi *uleebalang* Pante Raja, Teuku Ubet menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda. Saat meletusnya Perang Cumbok, ia turut menjadi korbannya.

liii. PATE (PATIH)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Calang dengan Teuku Mahmud sebagai *uleebalang*nya. Beliau menandatangani perjanjian tanggal 24 Agustu 1874. *Uleebalang* Pate berikutnya adalah Teuku Raja Itam, yang mengadakan kontrak tanggal 18 Februari 1909.

liv. PERLAK (PEUREULAK)

Termasuk dalam *Onderafdeeling* Langsa (Langsar). Cikal-bakal para penguasa Perlak berasal dari Indrapuri, Aceh Besar, yang meninggalkan kampung halamannya guna membangun perkampungan baru karena difitnah. Salah seorang di antara mereka yang bernama Kalam dituduh hendak meracun sultan. Pengungsian ini diperkirakan terjadi pada abad ke-18[184]. Rombongan pengungsi dari Aceh Besar ini menumpang dari 3 perahu. Rombongan pertama menetap di Kuala Ndjong. Rombongan kedua memutuskan berdiam di Samalanga/ Jeunieh. Sementara itu, rombongan ketiga meneruskan perjalanannya ke sebelah timur dan tiba di

183. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 665.
184. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, halaman 106.

Kuala Jambu Air. Meskipun demikian, mereka tidak jadi menetap di sana dan melanjutkan pelayarannya hingga tiba di sebuah kuala besar. Anggota rombongan mempertimbangkan apakah mereka akan membuka pemukiman di sana atau meneruskan perjalanannya lagi. Sewaktu mempertimbangkan hal itu, mereka melihat serabut jagung, daun pisang, dan ampas tebu dihanyutkan air. Mereka menduga bahwa di dekat kawasan tersebut pastilah ada hunian yang didiami manusia. Dengan demikian, pastilah kondisi tanah di hulu sungai itu subur. Karena itu, mereka memutuskan melayari sungai menuju ke daerah pedalaman.

Barulah mereka mengetahui bahwa kawasan itu bernama Peureulak atau Perlak. Penduduk negeri menerima mereka dengan ramah. Tidak berapa jauh dengan tempat pendaratan mereka di Tualang terdapat kampung bernama Kabu Beringin, tempat tinggal datuk atau penguasa yang memerintah Peureulak. Ketika itu, kondisi negeri sedang tidak aman karena terdapat seorang Bugis yang mengacau ketentraman dengan mendirikan banyak gelanggang mengadu ayam. Melihat bahwa para pendatang itu gagah perkasa penampilannya, datuk penguasa Peureulak sangat gembira dan menugaskan mereka membasmi orang Bugis pengacau ketenteraman tersebut. Jika tugas ini berhasil, Po Kalam akan dinikahkan dengan putrinya.

Ternyata tugas menyingkirkan orang Bugis dapat ditunaikan dengan baik dan datuk penguasa Peureulak memenuhi janjinya; apalagi ia tak mempunyai anak lelaki. Setelah ia meninggal dunia, Po Kalam diangkat sebagai penguasa Peureulak berikutnya sehingga beliau kemudian bergelar Tok Po Kalam. Pernikahan Tok Po Kalam dikaruniai tiga orang putra, yakni T. Muda Raja, T. Diblang, dan Pang ulee Penarue atau Teuku di Ranto Panjang. Setelah Tok Po Kalam meninggal yang diangkat sebagai penggantinya adalah T. Muda Raja. Beliau mempunyai tiga orang putra, yang masing-masing bernama T. Nyak Plang, T. Muda Djagang, dan T. Muda Hasan. Pengganti beliau adalah putranya bernama T. Nyak Plang, yang mempunyai lima orang anak lelaki, yaitu T. Muda Rakna, T. Ben Tam, T. Muda Cik, T. Nyak Raja, dan T. Nyak Cut.

T. Muda Djagang berputra T. Nyak Tam yang diangkat sebagai panglima besar.[185]

185. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, halaman 108.

T. Nyak Plang menyerahkan pemerintahan pada putranya, T. Muda Rakna. Kendati demikian, T. Muda Rakna meninggal setahun setelah memerintah, sehingga T. Nyak Plang terpaksa memegang kendali pemerintahan lagi. Setelah T. Nyak Plang mangkat, seharusnya yang menggantikannya adalah T. Ben Tam, namun T. Nyak Tam selaku panglima besar berupaya merebut kedudukan tersebut dan memperoleh surat pengesahan dari sultan Aceh yang diwakili Pangeran Anum pada tahun 1861. Ia selanjutnya menyandang gelar Kejruen Cik, *Uleebalang* Negeri Peureulak. T. Ben Tam tidak tinggal diam dan berupaya merebut haknya, sehingga pecah peperangan antara kedua belah pihak. Keberuntungan berpihak pada T. Ben Tam, karena T. Nyak Tam tewas dalam peperangan tersebut. T. Ben Tam selaku pemenang lalu menduduki singgasana Peureulak dengan gelar T. Cik Krueng Baro. Penanda-tanganan perjanjian dengan Belanda dilangsungkan tanggal 27 Juli 1874.

Beliau digantikan putranya bernama T. Abu Bakar yang bergelar T. Cik Muda Peusangan pada 1883. *Uleebalang* Teuku Cik Muda Peusangan mengundurkan diri pada tahun 1909, karena penghasilannya jauh berkurang akibat campur tangan Belanda dalam pembentukan *landschapskas* (kas swapraja). Saat itu, putranya yang bernama Teuku Muhammad Tayeb masih belum cukup umur dan sedang menuntut ilmu di Bandung. Selama menjabat sebagai *uleebalang* Peureulak, Teuku Chik Muhammad Tayeb menerima gaji dari pemerintah kolonial sebesar f. 1.100 per bulannya. Menurut sumber lainnya, Teuku Cik Muda Peusangan mengundurkan diri pada tahun 1914 dan digantikan putranya, Teuku Chik Muhammad Tayeb (Thajib, 1914-1935)[186]. T. Chik Muhammad Tayeb mengundurkan diri dan pindah ke Jakarta, sehingga tugasnya diwakilkan pamannya, Teuku Cut Ahmad (1935-1944), yang dibunuh oleh balatentara Jepang. Menurut *Regeerings Almanak*, Teuku Cut Ahmad dikukuhkan kedudukannya pada 9 November 1936.

Pada tahun 1929 di Peureulak berdirilah Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak (PUSAKA) yang bertujuan membangun sekolah rendah berbahasa Belanda. Teungku Chik M. Thayeb merupakan pelindung bagi organisasi ini. Susunan pengurus yang lain adalah sebagai berikut[187]:

186. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, halaman 108.
187. Lihat *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, halaman 139.

Penasehat: Tengku Tjut Ahmad
Ketua: T.M. Nurdin.
Penulis: H.M. Zainuddin
Bendaraha: M. Hasyim
Komisaris: T.M. Hasan, T. Itam Usman, T. Sabi, dan Muhammad Syam.

Tengku Chik M. Thayeb juga seorang lulusan OSVIA dan pernah duduk sebagai anggota Volksraad dari 23 Februari 1918 hingga 19 Mei 1920. *Uleebalang* Peurelak ini memperlihatkan kepedulian terhadap pergerakan nasional dengan menjadi anggota *Nationale Indische Partij* (NIP). Salah seorang pegawai pemerintahan Belanda melaporkan bahwa beliau hanya sedikit sekali mengacuhkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan memimpikan suatu Indonesia yang merdeka serta bersatu. Sebagai tambahan, Perlak memiliki daerah-daerah bawahan sebagai berikut: Jeunki yang dipimpin oleh Teuku Him; Alue Niri yang dipimpin Teuku Bin Cut, Simpang Anas yang dipimpin Teuku Nyak Ali, dan Bayan-kiri yang dipimpin oleh Teuku Muda Ali.

Yang berhak menjadi *uleebalang* berikutnya adalah T. Muh Thahir (Ir. T. M. Thahir Thajib), namun beliau masih menuntut ilmu di Belanda. Oleh karena itu, yang ditujuk sebagai *uleebalang* adalah T. Ismail yang saat itu sedang berada di Jakarta. Beliau dikenal pula sebagai Mr. T. Ismail Thajib.

lv. PEUDAWA RAYEU

Termasuk *Onderafdeeling* Idi. *Uleebalang*nya pada masa awal penjajahan Belanda adalah Teuku Habib Muhammad bin Said Usuih[188]. Nama ini tampaknya memperlihatkan bahwa beliau merupakan keturunan Arab. Teuku Habib Muhammad beberapa kali memperoleh bintang penghargaan dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1895 ia menerima *de kleine ster*. Selanjutnya pada tahun 1913 didapatnya bintang *de groote ster van trouw en verdienste*. Pada tahun 1899, ia menandatangani *korte verklaring* yang terdiri dari 3 pasal. Penghasilan beliau setiap bulannya adalah 155 Gulden. *Uleebalang* Peudawa Rayeu ini tercatat memiliki 14 istri dan 17 anak. Sekali lagi, pada 15 Juni 1900 Teuku Habib Muhammad menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda. Pengganti beliau,

188. Lihat *Atjeh Als Land voor Handel en Bedrijf*, halaman 39. Dalam buku itu dieja Teukoe habib Moehamat bin Sayet Oesoeih.

Uleebalang Teuku Habib Abdul Azis dikukuhkan kedudukannya pada 8 September 1936.

lvi. PEUSANGAN

Cikal-bakal Ke*uleebalang*an Peusangan adalah seorang tokoh bernama Teuku Cik Nyak Jat (Po Nyak Jat), kepala daerah Peusangan yang dianugerahi surat kekuasaan dan gelar Keujruen Cik Peusangan Setia Raja. Berdasarkan surat kekuasaan ini, batas wilayah kekuasaan Ke*uleebalang*an Peusangan di sebelah timur adalah Kuala Meuraksa, gampong Poenteuet, dan Gle Meunaleueng. Semasa kekuasaannya, Teuku Cik Nyak Jat kerap melakukan serangan ke Glumpang Dua, Sawang, Nisam, dan Cunda, dengan tujuan memasukkan kawasan-kawasan tersebut ke dalam daerah kekuasaannya.

Teuku Cik Nyak Jat kemudian digantikan oleh putra keduanya, Teuku Cik MeunasohT, karena putra sulungnya, yakni Teuku Monga Kasim, memiliki cacat fisik. Teuku Cik Meunasoh mangkat dan digantikan oleh salah seorang kerabatnya yang lain, yakni Teuku Cik Lampu Ue, karena adiknya, Teuku Cik Nyak Krueng masih belum dewasa. Oleh karena kepemimpinannya yang kurang cakap, sultan Aceh mencopotnya dari jabatan uleebalang. Ia kemudian melarikan diri dan menetap di Blang Panjong. Teuku Cik Nyak Krueng diangkat sebagai *uleebalang* Peusangan berikutnya. Kepemimpinan Teuku Cik Nyak Krueng diteruskan oleh putranya, Teuku Cik Muhammad Asan. Uleebalang Peusangan yang baru ini kerap berselisih paham dengan adiknya, Teuku Muda Cik. Terjadi peperangan antara keduanya, di mana Teuku Cik Muhammad Asan berhasil dikalahkan dan wafat pada kurang lebih tahun 1872.

Teuku Muda Cik lantas menduduki jabatan sebagai *uleebalang* Peusangan. Pada masanya meletuslah Perang Aceh. Putra tertua Teuku Cik Muhammad Asan, yakni Teuku Cik Seumaon, mencoba memperoleh dukungan Belanda agar diakui sebagai *uleebalang* Peusangan. Teuku Muda Cik menandatangani surat pernyataan takluk terhadap pemerintah Hindia Belanda pada 6 Agustus 1874. Meskipun demikian, Teuku Muda Cik meninggal dunia tak lama kemudian dan digantikan oleh Teuku Cik Seumaon. Penguasa Peusangan yang baru ini tercatat menandatangani akta pernyataan takluk pada 2 Maret 1875. Teuku Cik Seumaon merupakan seseorang yang berkepribadian keras dan pemarah; sehingga ditakuti orang-orang di sekitarnya. Ia berniat merebut kembali daerah-daerah di sebelah

timur, yang berdasarkan surat kekuasaan dari sultan Aceh pernah diberikan pada leluhurnya. Oleh karena itu, Teuku Cik Seumaon kerap terlibat permusuhan dengan Samalangan dan Peudada.

Meskipun telah menandatangani surat pernyataan takluk, Teuku Cik Seumaon tidak bersedia sepenuhnya mematuhi kehendak pemerintah kolonial Belanda; terutama jika perintah-perintah itu bertentangan dengan kepentingannya. Bahkan Teuku Cik Seumaon tidak jarang memperlihatkan sikap permusuhannya terhadap penjajah. Karena itu, pemerintah Belanda mengambil tindakan tegas dengan memaksa memberlakukan pungutan pajak terhadap barang yang keluar dan masuk Peusangan. Kendati demikian, tindakan Belanda ini tidak membuahkan hasil apa-apa, sehingga pemerintah kolonial memutuskan penurunan ekspedisi militer ke Peusangan. Tetapi, bersamaan dengan itu pecahlah perlawanan Habib Abdur Rahman di Aceh Besar, sehingga pasukan terpaksa ditarik ke sana. Karenanya, ekspedisi militer yang sejatinya hendak dilancarkan ke Peusangan menjadi gagal.

Dua kali Belanda memberikan ultimatum pada Teuku Cik Seumaon agar menyerah, tetapi yang bersangkutan memandangnya dengan sebelah mata. Oleh sebab itu, Belanda menghujani Keude Jangka dengan bom dan memblokade Peusangan. Belanda menurunkan Teuku Cik Seumaon dan menggantikannya dengan Teuku Maharaja Jeumpa pada 10 Agustus 1878. *Uleebalang* baru beserta aparat pemerintahannya berangkat ke Kutaraja sebagai tanda takluk dan sepuluh hari kemudian serangan terhadap Peusangan dihentikan. Meski Teuku Cik Seumaon telah diturunkan dari jabatannya, tetapi rakyat masih menganggapnya sebagai penguasa yang sah, sehingga praktis kekuasaan Teuku Maharaja Jeumpa menjadi lumpuh. Pada tahun 1880, Teuku Cik Seumaon menyerang Glumpang Dua dan menembaki benteng pertahanannya dari sebuah kapal perang. Bersamaan dengan itu, seorang keturunan Tionghua yang telah memeluk agama Islam bernama Osman dari Peusangan ditangkap oleh penguasa Glumpang Dua.

Teuku Cik Seumaon memohon bantuan pemerintah Belanda. Penguasa kolonial dengan senang hati menerimanya, karena menganggap sebagai kesempatan menjalin hubungan kembali dengan penguasa yang berpengaruh di daerahnya tesebut. Berdasarkan hasil perundingan dengan pemerintah kolonial, Teuku Cik

Seumaon diwajibkan tunduk lagi pada Belanda. Ia beserta Teuku Maharaja Jeumpa diharuskan menghadap ke Kutaraja. Pada 14 November, Teuku Cik Seumaon diakui kembali sebagai *uleebalang* Peusangan oleh Belanda, sedangkan Teuku Maharaja Jeumpa diturunkan kedudukannya dan diangkat sebagai raja muda yang berhak atas ¼ penghasilah kerajaan. Selain itu, ditentukan pula bila Teuku Cik Seumaon mangkat dan tak memiliki putra, maka Teuku Maharaja Jeumpa yang akan menggantikan. Tetapi apabila ia mempunyai putra, Teuku Maharaja Jeumpa akan memerintah sebagai wali hingga putra itu dewasa.

Setelah permasalahan dengan Belanda diselesaikan, pada bulan Januari 1881, Teuku Cik Seumaon meneruskan permusuhannya dengan Glumpang Dua dan berhasil mengalahkannya serta merebut pula Sawang (Blang Panjang), Nisam, beserta Cunda. Kendati demikian, di hadapan pemerintah kolonial Teuku Cik Seumaon bersikap mendua dan berupaya tampil sebagai seorang pecinta damai. Pertentangan dengan pemerintah kolonial timbul lagi pada tahun 1882. Ketika itu, rakyat Aceh di bawah pimpinan Habib Paloh membuat perbentengan di bukit Panggoj dan Paloh serta melancarkan serangan terhadap markas pasukan Belanda di sana. Semua ini hanya dimungkinkan karena restu Teuku Cik Seumaon. Belanda segera menuntutnya agar membongkar perbentengan itu.

Karena Teuku Cik Seumaon tidak bersedia memenuhi tuntutan Belanda, pemerintah kolonial mempersenjatai pimpinan-pimpinan Bayu, Cunda, Nisam, dan Sawang, yang bermusuhan dengan *uleebalang* Peusangan tersebut. Selain itu, dilakukan pula blokade terhadap Ke*uleebalang*an itu. Menghadapi ancaman ini, Teuku Cik Seumaon mengundurkan diri ke sebelah barat Glumpang Dua dan meninggalkan sama sekali kawasan itu pada bulan Maret 1883. Pasukan Belanda ditarik dari Lhokseumawe pada bulan Oktober 1884 dan hingga saat itu, Teuku Cik Seumaon tidak memperlihatkan sikap permusuhannya lagi. Tetapi ia turut terlibat dalam perseteruan antara Geudong pada satu pihak dengan Bayu dan Cunda di pihak lain. Teuku Cik Seumaon menguasai lagi daerah Sawang dan Nisam, sehingga para pemimpin daerah itu melarikan diri pantai timur atau pegunungan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di daerah-daerah yang baru ditaklukkannya, ia menempatkan para saudaranya di sana; yakni Teuku Muda Cik ditempatkan di Cunda dan Buloh, Teuku Haji Raja Muda ditempatkan di Blang Panjang, dan Tengku Muda Peusangan di Glumpang Dua.

Teuku Cik Seumaon tidak akur pula dengan tetangganya di sebelah barat. Salah satu biang keladi permusuhan ini adalah masalah perbatasan tanpa ada satupun yang bersedia mengalah. Pertikaian ini tampaknya mereda ketika Teuku Cik Seumaon menikahi adik perempuan Teuku Cik Samalanga, penguasa Samalanga, bernama Pocut Mirah Gambang. Kendati demikian, pernikahan ini justru memicu permasalahan baru, karena Pocut Mirah Gambang tidak bersedia mengikuti suaminya dan ingin membatalkan perkawinan. Ternyata, Teuku Cik Seumaon tak dapat menerima keputusan ini dan tetap berniat mengunjungi istrinya apapun yang terjadi. Hal ini memicu peperangan dengan Samalanga. Beserta dengan 300 pengikutnya, Teuku Cik Seumaon pada tahun 1888 berlayar ke negeri asal istrinya. Tiga kapal perang Samalanga berhasil mendesak mundur laskar Peusangan dan pertempuran dilanjutkan di pantai dengan kemenangan yang datang silih berganti antara kedua belah pihak.

Pada tahun 1892, Belanda dapat membujuk Teuku Cik Seumaon mengembalikan daerah-daerah yang direbutnya di sebelah timur dengan janji penghapusan blokade terhadap pelabuhan Peusangan. Pemerintah kolonial memberikan Teuku Cik Seumaon bagian pajak ekspor dan impor sebesar 1.000 Dollar per tahunnya. Kini sikap Teuku Cik Seumaon tampaknya melunak terhadap Belanda, bahkan ia bersedia menyerahkan pemimpin bajak laut yang melarikan diri ke Peusangan. Meskipun demikian, ia belum mau hidup berdampingan secara damai dengan negeri-negeri tetangganya sebagaimana yang dikehendaki pemerintah kolonial Belanda.

Demi menyelesaikan permasalahannya dengan Teuku Cik Samalanga serta perselisihan lain dengan tetangganya, Belanda mengusulkan pembentukan suatu badan pengadilan yang anggotanya terdiri dari tiga orang. Dua orang wakil masing-masing ditunjuk oleh Peusangan dan Samalanga. Selanjutnya, kedua wakil tersebut akan menunjuk seorang wakil lagi. Peusangan memilih Raja Itam dari Geudong, sedangkan Samalanga diwakili oleh Tengku Maharaja Mangku Bumi dari Lhokseumawe. Keduanya lantas menunjuk Teuku Muda Usuih dari Simpang Ulim. Belakangan, Teuku Cik Seumaon tampaknya khawatir keputusan pengadilan ini akan merugikan dirinya. Karenanya, ia pada 1897 lantas bersedia membatalkan segenap tuntutan yang berkaitan dengan pernikahannya, asalkan mas kawin yang dibayarkan dikembalikan padanya.

Pembentukan suatu badan pengadilan ditangguhkan. Tetapi berbagai persoalan mencuat ke permukaan, karena Samalanga kesulitan menentukan berapa jumlah uang yang hendak dikembalikan pada Teuku Cik Seumaon. Penyelesaian persoalan dengan para tetangganya tak pula membuahkan hasil yang diharapkan. Permusuhan dengan tetangganya baik di sebelah barat maupun timur terus berlanjut. Peusangan melancarkan serangan terhadap Glumpang Dua yang mendorong campur tangan pemerintah kolonial. Pasukan marsose memukul mundur Peusangan dari daerah-daerah yang didudukinya tanpa perlawanan berarti pada bulan Oktober 1898. Saudara-saudara Teuku Cik Seumaon, Teuku Maharaja Jeumpa dan Teuku Muda Cik menyerahkan dirinya. Sementara itu, Teuku Cik Seumaon mengundurkan diri ke daerah pegunungan.

Pasukan Belanda kemudian meninggalkan Peusangan dan Teuku Cik Seumaon dijatuhi hukuman denda 50.000 Dollar. Setelah peristiwa tersebut, Teuku Cik Seumaon tetap tinggal di daerah pegunungan, yakni di Cob Pi. Teuku Muda Cik mengambil alih kekuasaan Teuku Cik Seumaon di kawasan dataran rendah Peusangan sebelah timur. Menurut sumber Belanda, rakyat di daerah itu justru senang terbebas dari *uleebalang*nya yang gemar berperang. Teuku Cik Seumaon berupaya merebut kembali kedudukannya di dataran rendah, tetapi dapat digagalkan oleh Teuku Cik. Sekonyong-konyong pada 12 Juni 1899, Teuku Cik Seumaon dengan didampingi Maharaja Jeumpa menyatakan pada gubernur sipil dan militer Aceh bahwa ia bersedia menyerah pada pemerintah kolonial. Belanda mengharuskan mereka menyerahkan diri di Lhokseumawe. Teuku Cik Seumaon pada mulanya menolak ketentuan tersebut. Namun akhirnya menyanggupi, tetapi diam-diam kembali ke dataran tinggi sambil meninggalkan pesan bahwa beliau akan kembali tiga hari kemudian. Janji ini tidak pernah ditepati oleh Teuku Cik Seumaon, hingga akhir hayatnya. Karena itu, beliau tetap dianggap sebagai musuh Belanda.

Teuku Maharaja Jeumpa dan Teuku Muda Cik menyatakan penyerahan dirinya di Lhokseumawe dan mereka diserahi tugas memimpin kawasan barat dan timur Peusangan. Pasukan pemerintah kolonial berusaha menangkap Teuku Cik Seumaon. Namun tak kunjung berhasil hingga Teuku Cik Seumaon mangkat pada bulan Februari 1900. Pemerintah kolonial campur tangan dalam memilih *uleebalang* baru. Teuku Cik Seumaon meninggalkan dua orang putra lain ibu;

yakni Muhammad Ali Johor Alamsyah (ibunya bernama Pocut Unggah) dan Muhammad Ali Akbar (ibunya bernama Pocut Rayeu). Belanda lebih memilih Muhammad Ali Johor Alamsyah ketimbang adiknya. Namun kedua saudara Teuku Cik Seumaon (Teuku Maharaja Jeumpa dan Teuku Muda Cik) lebih memilih Muhammad Ali Akbar.

Selama *uleebalang* Peusangan yang baru belum ditentukan, belahan barat Peusangan tetap diperintah oleh Teuku Maharaja Jeumpa; sedangkan belahan timurnya oleh Teuku Muda Cik. Kedua putra almarhum Teuku Cik Seumaon masih belum dewasa dan sedang menuntut ilmu di Kuta Raja. Ketika ayahnya wafat, usia mereka masih berkisar antara 10–12 tahun. Akhirnya yang diangkat sebagai pengganti ayahnya adalah Muhammad Ali Johor Alamsyah.

Wilayah Peusangan dibagi menjadi daerah-daerah yang dikepalai oleh *tuha peuet* dan *uleebalang nam*. Adapun para *tuha peuet* itu terdiri dari:

- T. Hakem dari Matong
- T. Kejuruan Muda dari Pante Ara
- T. Hakem Cik dari Raya
- T. Kejuruan Kuala dari Bugah

Sedangkan anggota *uleebalang nam* adalah sebagai berikut:

- Pangulee Side dari Bayu
- T. Imeum Rayat dari Meunasah Meucat
- T. Bentara Peukan dari Jangka
- T. Keudjroeen Seurawa dari Langkuta
- T. Hakim dari Rusip
- Panglima Prang Pasu dari Utheuen Gathom

Para *tuha peuet* berfungsi sebagai hakim dan pendapat mereka sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Itulah sebabnya mereka dianggap lebih tinggi kedudukannya dibanding *uleebalang nam*. Lebih jauh lagi di wilayah Teuku Maharaja Jeumpa terdapat lagi pemuka-pemuka: T. Kejuruan dari Jeumpa, T. Kejuruan dari Jule Baroh, T. Kejuruan Tunong dari Pulo Miru, dan T. Imeum Rayat dari Bireuen

lvii.PEUTO

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Lhok Soekon (Lhoksukon). Cikal-bakal Ke*uleebalang*an Peuto adalah Teuku Bentara[189]. Putranya menerima pengukuhan (*sarakata*) dari sultan Aceh sebagai *uleebalang* Peuto pertama dan mendapatkan gelar T. Hakém Peudjaba. Beliau digantikan oleh putranya, T. Hakem Blang Mangat. *Uleebalang* berikutnya adalah T. Tji Meureubo', adik T. Hakem Blang Mangat. *Uleebalang* berikutnya adalah putra T. Hakem Blang Mangat bernama T. Hakém Babah

Geudoebang. Putra sulung beliau bernama T. Hakém Diwa lalu menggantikannya. Beliau digantikan kembali oleh adiknya, T. Di Pase. *Uleebalang* Peuto berikutnya adalah putra sulung beliau bernama T. Hakem Lotan.

Di Peuto ketika itu terjadi beberapa kali perselisihan memperebutkan kekuasaan. T. Hakem Diwa meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Kemudian terjadi perselisihan antara saudara-saudaranya yang masing-masing bernama T. Keudjroeën Muda melawan adiknya T. Di Pase. Akhirnya T. Di Pase ke luar sebagai pemenangnya dan berhasil mengalahkan T. Keudjroeen Muda. Setelah kematian T. Di Pase, kedua orang putra T. Keudjroeen Muda yang masing-masing bernama T. Béntara Muda dan T.Muhamad kembali menuntut singgasana dengan dukungan T. Dato' Peuto beserta Panglima Prang Ali. Peperangan berdarah berkecamuk selama kurang lebih setahun dan T. Hakem Lotan, putra T. Di Pase ke luar sebagai pemenangnya.

Menjelang masuknya kekuasaan Belanda, T. Hakem Lotan atas desakan pengikutnya bernama T. Bentara Jeubeuet pada tahun 1899 menyerah pada pemerintah kolonial. Namun, ia belakangan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, dengan perantaraan T. Cik Bintara dari Keureuto, ia memperbaiki hubungannya lagi dengan pemerintah kolonial di bulan Juli 1902. Tetapi ia kemudian ditahan di Lhokseumawe oleh Belanda dan berhasil melarikan diri pada malam hari tanggal 7 atau 8 Agustus 1902.

Sementara itu, pada tetua adat di Peuto mengangkat T. Bentara Muda sebagai *uleebalang* Peuto yang baru pada 14 September 1902. Meskipun demikian ia

189. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 590.

dibunuh oleh musuhnya pada 18 atau 19 September 1902. Adiknya, T. Muhamad sementara waktu memegang kendali pemerintahan atas Peuto. T. Hakem yang anak dan istrinya masih ditahan oleh Belanda menyerahkan diri kembali pada bulan Juli 1903. Tidak lama kemudian, yakni tepatnya tanggal 23 atau 24 Juli 1903, ia dibunuh oleh musuhnya. Putra sulungnya, Teuku Ali Basya, ketika itu masih berusia 13 tahun, sehingga belum sanggup memegang pemerintahan Peuto. Oleh karenanya, pemerintahan Peuto lalu dipegang oleh Cut Po'an Hakim Peuto, yang menerima pengukuhan (*bevestiging*) dari pemerintah kolonial tanggal 14 November 1904. Menurut *Regeerings Almanak*, *uleebalang* Peuto selanjutnya adalah Teuku Ali Basya, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 5 Desember 1911.

lviii. PIDIE (PEDIR atau XII MUKIM)

Pidie yang terletak di *Onderafdeeling* Sigli merupakan gabungan 12 *uleebalang* yang disebut XII Mukim. Para *uleebalang* yang pernah memerintah Pidie secara berturut-turut adalah Teuku Pakeh Din, Teuku Pakeh Batee Patah, Teuku Pakeh Po Kalam, Teuku Pakeh Daud, dan Teuku Raja Pakeh Hussain[190]. Beliau dibunuh oleh iparnya, Haji Ibrahim pada tahun 1815. Penggantinya adalah Teuku Raja Pakeh Dalem. Beliau digantikan kembali oleh Teuku Raja Pakeh (Pakih) Sulaiman Ibnu Teuku Raja Pakeh, selaku ketua XII Mukim, yang memperoleh pengukuhan (*bevestiging*) pada 28 Februari 1876 dan 16 Mei 1880. Teuku Raja Pakeh Sulaiman mangkat pada tahun 1895 dan singgasana Pidie beralih pada Teuku Raja Pakeh Muhammad Daud (1895-1897). Sewaktu beliau meninggal pada tahun 1897, putranya bernama Teuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto Baro baru berusia sekitar tujuh tahun. Oleh karenanya, sebagai wakilnya diangkat Teuku Muhammad Hussain Geudong, yang mangkat pada tahun 1905. Ketika itu, Teuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto Baro masih menuntut ilmu di Bandung, sehingga pemerintahan Pidie diwakilkan pada Teuku Raja Kuala Usman (1905-1915). Beliau menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 23 Desember 1908.

Teuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto Baro baru mulai memerintah pada tahun 1915, tetapi dipecat tahun 1917. Semasa pemerintahannya, Beliau tercatat menandatangani kontrak tanggal 16 Oktober 1915. *Uleebalang* berikutnya adalah Teuku Muda Pakeh Dalam (Teuku Raja Muda atau Teuku Dalam). Dalam

190. Lihat *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, halaman 90.

perkembangannya terjadi perselisihan dengan Gighen yang dipimpin Teuku Bentara Raja Keumangan. Perseteruan ini tampaknya makin dikipas oleh Belanda dengan politik adu dombanya. Teuku Raja Muda mangkat pada tahun 1920 dan digantikan oleh Teuku Mahmud Pakeh (1920-1940). *Uleebalang* selanjutnya adalah Teuku Raja Pakeh Sulaiman, yang terbunuh pada peristiwa Cumbok.

lx. PINEUNG (III MUKIM)

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Sigli. Pada 1879, Teuku Bentara Pineung Pocut Badaj, melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Kurang lebih empat tahun kemudian, beliau mangkat dan digantikan oleh putranya, Teuku Raja Muda. Ia dibunuh oleh adiknya, Teuku Maharaja, yang dengan dukungan Teuku Bentara Keumangan lalu diangkat sebagai penguasa Pineung. Teuku Maharaja menerima meterai dari sultan Aceh sebagai pengukuhannya pada 20 Jumadil Awal 1301 (18 Maart 1884). Beliau gugur pada 1889 di tengah-tengah kancah pertempuran antara Teuku Bentara Keumangan dan Teuku Bentara Paleueh, di mana beliau berpihak pada Keumangan. Karena putranya masih kanak-kanak, ia digantikan oleh adiknya, Teuku Bentara Pineung Brahim, yang menerima pengukuhan pada 4 Oktober 1900.

lx. PIRAK

Uleebalang Pirak merupakan bagian Ke*uleebalang*an Keureuto. Meskipun penguasanya setingkat lebih rendah dibandingkan Keureuto, tetapi secara berdiri sendiri atau bersifat otonom dalam hal pemerintahan maupun kekuasaan kehakiman. Para penguasanya boleh memutuskan sendiri perkara-perkara yang lebih ringan tingkatannya. Pendiri Negeri Pirak adalah Teuku Tok Bineh Blang[191]. Ia digantikan oleh putranya bernama Teuku Keujreun Blang. Selanjutnya secara berturut yang memerintah Pirak adalah Teuku Di Matang, Teuku Tok Pirak, Teuku La Seumana, dan Teuku Ben Daud. Semasa pemerintahan Teuku Ben Daud, Pirak berada dalam kondisi yang tenang dan damai, karena beliau memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Selain itu, Teuku Ben Daud merupakan tokoh yang ahli dalam masalah-masalah keagamaan sehingga dihormati oleh rakyatnya.

Teuku Ben Daud menikah dengan Cut Jah, putri *uleebalang* Ben Seuleumak. Oleh rakyat Pirak, Cut Jah ini juga disebut Cut Muling, karena ia berasal dari

191. Lihat *Cut Nyak Meutia*, halaman 90.

Kampung Muling di daerah Seuleh. Pernikahan ini membuahkan lima orang anak, yakni empat laki-laki dan seorang wanita. Anaknya yang laki-laki masing-masing bernama Teuku Cut Brahim, Teuku Muhammad Syah, Teuku Cut Hasan, dan Teuku Muhammad Ali. Sedangkan yang wanita adalah Cut Nyak Meutia. Ketika Perang Aceh meletus, Teuku Ben Daud turut membantu sultan berjuang melawan penjajah. Ketika Belanda merebut daerah kekuasaannya, Teuku Ben Daud tetap menolak menandatangani *korte verklaring* dan memindahkan pusat pemerintahan ke hulu Krueng Jambo Aye.

Cut Nyak Meutia mulanya menikah dengan Teuku Syamsarif dari Keureutoe, tetapi suaminya terlalu dekat dengan Belanda. Oleh karenanya, ia lalu bercerai dan menikah kembali dengan saudara Teuku Syamsarif yang bernama Teuku Cut Muhammad (Teuku Cik Tunong). Mereka berdua bersama-sama berjuang melawan Belanda. Meskipun demikian, pada 5 Oktober 1903, Teuku Cik Tunong melapor pada Belanda dan menghentikan perjuangannya. Ia lalu mengubah strategi perlawanannya dengan pertimbangan bahwa sultan, Panglima Polem, dan tokoh-tokol lainnya telah menyerah. Belanda menganggap menyerahnya Cik Tunong ini sebagai keberhasilan; walau mereka kemudian terus-menerus mengawasi gerak-geriknya. Setelah peristiwa penyerangan terhadap pasukan Belanda di Maurandeh Paya, Belanda menuduh Teuku Cik Tunong terlibat di belakang layar. Oleh karena itu, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Cut Nyak Meutia meneruskan perjuangan suaminya bersama Pang Nanggro, hingga ia gugur pada 22 Oktober 1910.

lxii. RIGAIH (RIGAS)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Calang. Pendiri Rigaih adalah Teuku Muda Li Ila dari XXII Mukim, yang berniat membuka perkebunan lada di kawasan tersebut. T. Muda Li Ila lantas digantikan oleh Keujreën Cut Tèh. Sultan Aceh mengirimkan wakilnya bernama Pocut Abdorahim dengan tugas memungut pajak penjualan lada. Ia dinikahkan dengan Nya' Paneu', saudara T. Muda Li Ila. Sebagai hadiah pernikahannya, Po Cut Abdorahim menerima kawasan di antara Koe-ala Lho' Peuët dan Alouë Bata. Po Cut Abdrohaim kembali ke Aceh dan kedudukannya digantikan oleh Po Cut Kuala. Timbul perselisihan antara Po Cut Kuala dan Keujreen Cut Teh karena masalah pemungutan hasil. Tetapi sultan Aceh berhasil mendamaikan mereka. Wilayah kekuasaan mereka lantas dibagi. Po Cut Kuala

berkuasa di kawasan pantai dan berkedudukan di Rigaih, sedangkan Keujreen Cut Teh berkuasa di bagian hulu dan berkedudukan di Gampong Rambut.

Po Cut Kuala mangkat dan meninggalkan dua orang putra yang masih di bawah umur, yakni Po Cut Tunong dan Po Cut Muhammad, sehingga Po Cut Teungoh, putra Po Cut Abdorahim, diangkat sebagai walinya. Seharusnya yang berhak menjadi raja adalah Po Cut Tunong, namun ia merupakan seorang penjudi, dan lantas menjual haknya tersebut pada saudaranya, Po Cut Muhammad. Beliau melaporkan diri pada Belanda tanggal 18 Maret 1877.

Po Cut Muhammad mangkat pada 13 April 1885, dan digantikan oleh putra bungsunya, Pocut Ismail. Menurut *Regeerings Almanak*, Pocut Ismail menerima pengukuhan pada 23 Juli 1885. Beliau menikah dengan salah seorang putri Po Cut Tunong. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Keujreen Cut Teh mangkat dan digantikan oleh Keujreen Lampoe. Namun ia meninggal 1 ½ tahun kemudian. Putra tertuanya, Teuku Pioh, kurang berminat dengan masalah pemerintahan, dan lebih memilih berdiam di Teunom bersama ibunya. Putra keduanya, Teuku Ce' juga kurang peduli terhadap masalah pemerintahan, sehingga lebih banyak menyerahkan urusan negerinya pada Pocut Ismail.

lxii.SABANG
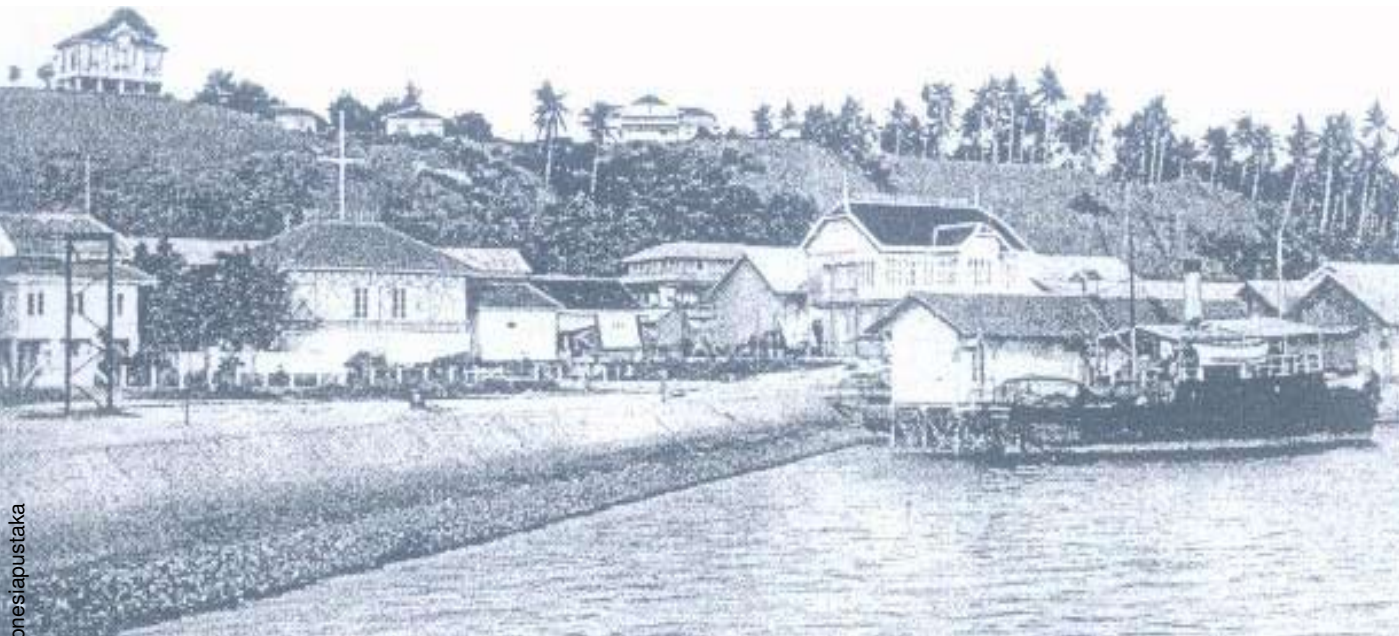
Sabang
Sumber: *Driemaal Dwars Door Sumatra En Zwerftochten Door Bali*, Bladz. A.

Uleebalang Sabang, Teuku Abbas, pernah mendukung pendirian sekolah Taman Siswa pada akhir Juli 1932. Sekolah ini diprakarsai oleh dr. Latumenten, kepala rumah sakit jiwa Sabang. Siswa-siswa sekolah ini dipupuk semangat kebangsaannya.

lxiii. SALANG

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Simalur. Sebelumnya, Salang, Siguele, dan Lakon diperintah oleh Datu Lebei Seman. Setelah beliau mangkat, putra tertuanya, Dato' Daud, memperoleh daerah Lakon; sedangkan putra satunya lagi, Dato' Maila, diserahi kawasan Salang beserta Siguele. Pada perkembangan selanjutnya Salang diperintah oleh Muhammad Hamzah yang menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 27 Mei 1874. Yang memerintah selanjutnya di Salang menurut *Regeerings Almanak* adalah Datuk Gambang. Ia digantikan oleh Muhammad Sawal, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 16 Maret 1911.

lxiv. SAMA DUA

Termasuk *Onderafdeeling* Tapak Tuan. Semasa berawalnya pendudukan Belanda, Sama Dua diperintah oleh Datu Nyak Abu dan Datu Nyak Husin. Mereka menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada 21 Oktober 1880 dan 26 Maret 1881. *Uleebalang* yang kemudian memerintah di Sama Dua adalah Teuku Paneu'. Ia digantikan oleh Teuku Itam.

lxv. SAMA KURO

Sama Kuro dimasukkan pemerntah kolonial ke dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). Semasa awal kedatangan Belanda, menurut catatan *Regeerings Almanak uleebalang*nya adalah Teuku Hakim Sama Kuro. *Uleebalang* selanjutnnya adalah Teuku Hakim Nyak Nanggroe. Beliau dikukuhkan kedudukannya pada 15 Juni 1900. Menjelang masa kedatangan Jepang, yang memerintah Sama Kuro adalah Teuku Abu.

lxvii. SAMALANGA

Termasuk dalam *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). *Uleebalang* Samalanga pertama adalah Tun Sri Lanang. Beliau sebelumnya menjabat sebagai bendahara Johor dan dibawa ke Aceh pada tahun 1613 oleh Sultan Iskandar Muda[192]. Nama asli beliau adalah Tun Muhammad bin Paduka Raja Tun Ahmad

192. Lihat *Tun Sri Lanang Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, halaman 29.

Temenggung Johor[193]. Tun Sri Lanang menjadi bendahara Johor sewaktu kerajaan tersebut diperintah oleh Sultan Ali Jalla Abdul Jalil II (1570/71-1597). Bersama dengan dua ribu warga Johor lainnya, beliau dimukimkan di Samalanga.

Warga baru yang berasal dari Johor tersebut membuka lahan pertanian baru dan Samalanga makin berkembang. Tun Sri Lanang ketika itu juga merintis pembuatan perahu-perahu guna mencari ikan dan keperluan angkutan di laut. Masyarakat Samalanga pada kurun waktu tersebut dipimpin oleh Hakim Peut Misei beserta sebelas pemuka rakyat lainnya. Mereka ingin mengangkat seorang *uleebalang* bagi Samalanga namun tidak mencapai kesepakatan siapakah yang hendak diangkat sebagai *uleebalang* tersebut. Oleh karenanya, mereka lantas meminta nasihat pada Sultan Iskandar Muda. Para pemuka Samalanga itu lantas menghadap Sultan Iskandar Muda dengan mengendarai perahu yang dikemudikan oleh Tun Sri Lanang.

Mereka berdua belas lantas menghadap Sultan Iskandar Muda, namun Tun Sri Lanang sebagai tukang perahu tidak diajak ikut serta ke istana. Sultan Iskandar Muda menyambut gembira keinginan mereka mengangkat seorang *uleebalang* bagi Samalanga. Sultan mengajukan persyaratan bahwa ia yang berhak menduduki jabatan sebagai *uleebalang* pertama Samalanga harus memiliki senjata bergagang emas seperti miliknya. Pada pemuka masyarakat tersebut menjadi kecewa karena merasa bahwa mustahil di antara mereka memiliki senjata semacam itu. Mereka lantas meminta saran Putri Phang, seorang tokoh yang terkenal bijaksana. Ia lantas menyarankan bahwa orang yang layak diangkat menjadi *uleebalang* Samalanga, hendaknya memiliki jari tangan sesuai ukurannya dengan cincin serta kepala sesuai dengan topi kerajaan yang akan dipersiapkannya.

Mendengar keputusan itu, para pemuka rakyat Samalanga, bersiap pulang ke daerahnya masih dengan mengendarai perahu Tun Sri Lanang. Di tengah jalan, berhembus angin kencang, sehingga kemeja yang dikenakan Tun Sri Lanang tersingkap. Mereka jadi mengetahui bahwa Tun Sri Lanang memiliki senjata seperti yang dimaksud Sultan Iskandar Muda. Serentak kedua belas orang pemuka rakyat Samalanga maju merebutnya. Masing-masing ingin menguasainya sehingga dapat menjadi *uleebalang* pertama Samalanga. Terjadilah pertarungan yang

193. Lihat *Tun Sri Lanang Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, halaman 42.

tidak seimbang. Karena tak bersedia menyerahkan senjata itu, Tun Sri Lanang diceburkan ke laut.

Selama tujuh hari Tun Sri Lanang terapung-apung di laut sebelum diselamatkan oleh Teuku Nek Meuraksa Panglima Nyak Doom dan Maharaja Lela Keujroen Tjoereh. Putri Phang lantas memerintahkan Tun Sri Lanang agar berlayar kembali ke Samalanga dengan menyamar sebagai seorang nelayan berpakaian lusuh. Dua belas orang pemuka masyarakat itu diundang kembali ke istana dengan tujuan mencoba cincin berserta topi yang telah dipersiapkan oleh Putri Phang. Ternyata tidak seorang pun yang cocok dengan ukuran cincin dan topi tersebut. Putri Phang lantas menanyakan apakah seluruh anggota rombongan telah mencobanya. Dengan berat hati mereka menjawab bahwa masih ada seorang tukang perahu lagi yang belum mencobanya.

Tukang perahu itu yang tak lain dan tak bukan adalah Tun Sri Lanang dipanggil ke istana. Ternyata cincin beserta topi kerajaan itu cocok dengan dirinya. Dengan demikian, Tun Sri Lanang diangkat sebagai *uleebalang* Samalanga pertama. Kedua belas orang pemuka masyarakat yang telah berbuat jahat pada Tun Sri Lanang dijatuhi hukuman mati.

Tun Sri Lanang lantas diarak ke Samalanga dengan menunggang gajah. Beliau menerima surat pengukuhan dari sultan Aceh (*sarakata*) pada tahun 1613 dan memerintah hingga 1659. Beliau lantas memajukan pertanian dan perkebunan yang ada di daerahnya. Sementara itu, kemajuan perkapalan juga tak luput dari perhatiannya. Selain seorang negarawan, Tun Sri Lanang dikenal pula sebagai sastrawan terkemuka yang mengarang karya berjudul *Sulalatus Salatin* mengenai sejarah Melayu[194]. Sepeninggal Tun Sri Lanang rangkaian *uleebalang* yang memerintah Samalanga berikutnya adalah sebagai berikut: T. Tji di Blang (putra Tun Sri Lanang), T. Tjik Idris Perkasa atau dalam sumber lain disebut T. Ci Sri (putra T. Tji di Blang), T, Tjik Nyak Gam atau dalam sumber lain disebut T. Ci Gam (putra T. Tjik Idris Perkasa), T. Muda Nyak Itam atau dalam sumber lain disebut T. Ci Itam (adik T. Tjik Nyak Gam), dan T. Nyak Gading yang dalam sumber lain disebut T. Ci Puteh (putra T. Tjik Nyak Gam). Sewaktu T. Nyak Gading mangkat, beliau tidak memiliki keturunan, sehingga yang berhak

194. Lihat *Tun Sri Lanang Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, halaman 67.

menggantikan adalah T. Tjik Muda Boegih (Teuku Cik Bugis), putra T. Tjik Muda Hasan (sumber lain: T. Muda Asan), adik T. Nyak Gading. Namun karena beliau masih kanak-kanak, T. Muda Gumba diangkat sebagai walinya.

Semasa Perang Aceh, Teuku Cik Bugis mengerahkan pejuang-pejuang dari daerahnya mempertahankan Aceh Besar dari serangan Belanda. Tidak jarang pula Teuku Cik Bugis terlibat dalam pertempuran di Aceh Besar. Sementara Teuku Cik Bugis pergi berperang, yang mewakili pemerintahan di Samalanga adalah saudarinya bernama Pocut Mahligai. Sebagai seorang pemimpin yang tangguh, Pocut Mahligai memerintahkan rakyatnya membangun kubu-kubu pertahanan. Pada 8 Agustus 1877, Belanda mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Kolonel K. van der Heijden. Teuku Nyak Hamzah dari Meuraksa yang berperan sebagai penasihat Belanda turut pula dalam ekspedisi ini.

Armada pemerintah kolonial tiba di perairan Samalanga tanggal 9 Agustus 1877. Teuku Cik Bugis dan Pocut Mahligai berupaya mempermainkan Belanda. Mereka menyampaikan ingin berunding terlebih dahulu dengan Belanda. Kendati demikian, pada malam harinya dilancarkan serangan mendadak ke perkemahan (bivak) pasukan Belanda di Penggilit Baroh. Para pejuang Aceh sanggup menewaskan dua orang komandan kompi Belanda, Kapten Jonker dan Lojenga. Dari pihak Aceh sendiri gugur seorang ulama bernama Haji Ahmad. Pada perkembangan selanjutnya, Belanda merebut Temulit; sehingga membahayakan kedudukan Samalanga.

Menyadari kondisinya yang terdesak Teuku Cik Bugis menawarkan perundingan kembali pada Belanda. Gencatan senjata diadakan tanggal 13 September 1877. Belanda mengira Samalanga telah takluk. Meskipun demikian, Teuku Cik Bugis tetap mendukung perjuangan laskar-laskar Aceh. Belanda sendiri tidak berdaya memecat Teuku Cik Bugis dari kedudukannya, sehingga ia tetap dipertahankan sebagai *uleebalang* Samalanga. Ke*uleebalang*an ini lalu diperintah oleh Tengku Kejuruan Chik Muhammad Alibasjah, yang memperoleh pengukuhan pada 14 Februari 1887 dan 4 Oktober 1900. Bersama dengan rakyatnya, beliau menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Hal ini memperlihatkan antusiasme rakyat Samalanga terhadap pergerakan nasional.

Regeerings Almanak mencatat bahwa *uleebalang* bernama Teuku Cik Muhammad menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 23

Februari 1928. Samalanga memiliki daerah-daerah bawahan sebagai berikut: II Mukim Tunong di bawah Teuku Sah Kubat; Plimbang dipimpin oleh Teuku Kejuruan Nalan; dan Peudada di bawah pimpinan Teuku Muda Peudada.

lxvii. SAMA INDRA

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Sigli. *Uleebalang*nya semasa awal kekuasaan Belanda adalah Teuku Meuntru Sri Paduka Maharaja. Beliau menandatangani kontrak pada 10 Februari 1902. Penguasa Sama Indra, *Uleebalang* Teuku Meuntru Sri Paduka Maharaja Ma' (Mak) Ali menerima pengukuhan (*bevestiging*) kedudukan dari pemerintah kolonial pada 26 Pebrari 1918. Ia merupakan salah seorang korban Perang Cumbok.

lxviii. SAWANG

Terletak di *Onderafdeeling* Lhokseumawe (Telok Seumawe). *Uleebalang*nya adalah Teuku Panglima Prang Muda Dalam Mahmud. Setelah itu, yang memegang roda pemerintahan di Sawang adalah Teuku Kejuruan Ali. Penggantinya, Teuku Lotan, disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada 19 Desember 1934.

lxx. SEUNAGAN

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Meulaboh dengan *uleebalang*nya secara berturut-turut adalah Teuku Meurah Fahat (Teuku Seman atau Teuku Seurang Maga), Keujruen Seunagan Tuha (mangkat 1865), Teuku Cut Banta (Teuku Ben), Teuku Cut Sabe, Teuku Meurah Puteh, Teuku Johan, dan Teuku Keumangan. Ia merupakan wali bagi Teuku Ben yang masih kanak-kanak. Penanda-tanganan kontraknya berlangsung pada 7 September 1916. Setelah dirasa cukup umur, Teuku Ben dinobatkan sebagai *uleebalang* Seunagan, yang diikuti oleh penanda-tanganan kontrak pada 27 April 1937.

lxx. SEUNEUAM

Ke*uleebalang*an Seuneuam tergabung dalam *Onderdafdeeling* Meulaboh. Dahulu merupakan bagian Keujroeen Nagan dan Tripa. Pendirinya adalah Tuanku Raja Bugeh. Kawasan pemukiman baru tersebut lalu didiami oleh orang yang berasal dari Pidie dan Pasai. Beliau digantikan oleh putranya, Tuanku Raja Keucik, yang merupakan penguasa lemah serta pecandu opium[195]. Saat Beliau mangkat pada

195. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 600.

tahun 1884, putra-putranya, yakni Tuanku Mahmut, Tuanku Raja Cut, dan Tuanku Johan masih kanak-kanak. Karenanya, pemerintahan Seuneuam lantas dipegang oleh Habib Abdolah (Teungoh). Semasa awal masuknya pengaruh pemerintah kolonial, yang menjabat sebagai *uleebalang* adalah Tuanku Raja Cut. Ia menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada 4 Oktober 1900. Yang berhak mewarisi kedudukan sebagai *uleebalang* Seuneuam berikutnya adalah Tuanku Dullah (Tuanku Abdullah). Tetapi karena masih kanak-kanak ia diwakili oleh Petuha Beungga, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 15 Juli 1916. Tuanku Dullah dinobatkan sebagai *uleebalang* Seuneuam setelah cukup umur. Penanda-tanganan kontraknya berlangsung pada 27 Desember 1929.

lxxi. SIGUELE (SIKHUELE)

Siguele terletak di *Onderafdeeling* Simalur. Datuk Muhammad Ali menandatangani perjanjian dengan Belanda tanggal 27 Mei 1874 dan 23 Maret 1901. Penggantinya adalah Datuk Muhammad Tunei (disahkan tanggal 16 Januari 1914).

lxxii. SIMALUR (SIMEULU)

Tergabung dalam *Onderafdeeling* Simalur. Datuk Pono dari Simalur mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 27 Mei 1874. Kemudian memerintahlah Datuk Nyak Noh. Ia menandatangani perjanjian tanggal 30 Juni 1892 dan 23 Maret 1901. *Uleebalang* berikutnya, Teuku Raja Mahmud disahkan kedudukannya pada 17 April 1936.

lxxiii. SIMPANG OLIM (SIMPANG ULIM)

Termasuk *Onderafdeeling* Idi. *Uleebalang* Simpang Olim yang bernama Teuku Muda Nyak Malim merupakan penentang Belanda yang gigih. Semasa Perang Aceh, Belanda berhasil merebut Simpang Olim dan mendirikan benteng di sana. Akibatnya, Teuku Muda Nyak Malim terpaksa menyingkir ke daerah pedalaman dan memimpin rakyatnya melancarkan perang gerilya. Sebagai penggantinya, Belanda mendudukkan Teuku Muda Angkasa. Kendati demikian, rakyat tak menyukainya sehingga *uleebalang* baru ini dibunuh oleh mereka. Belakangan Simpang Ulim diperintah oleh Teuku Muda Usuih yang menandatangani perjanjian tanggal 15 Juni 1900.

Uleebalang Teuku Husin menerima pengukuhan kedudukan dari pemerintah kolonial pada 19 Juli 1927. Menjelang masuknya balatentara Jepang, tujuh orang

barisan Fujiwara Kikan (barisan F) dikirim ke Simpang Olim pada 19 Februari 1942. Teuku Husin menahan mereka karena mencurigainya sebagai mata-mata Jepang. Kendati demikian, mereka dilepaskan lagi pada 25 Februari 1942 setelah ditahan di Idi. Adapun tujuan pembentukan barisan F ini adalah menyambut kedatangan balatentara Jepang. Pada mulanya, Jepang memang memperlihatkan sikap manis pada bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan apabila kedatangan mereka yang disangka sebagai "pembebas" disambut hangat.

lxxiv. SUNGURAJA

Menjadi bagian *Onderafdeeling* Langsa (Langsar). *Uleebalang* Teuku Said Achil menerima pengukuhan (*bevestiging*) dari pemerintah kolonial pada 25 Maret 1874. Teuku Said Achil mangkat pada 9 Maret 1876. Putra tertua beliau, Habib Malim, kurang berminat pada masalah pemerintahan, sehingga akhirnya kekuasaan diserahkan pada Teuku Said Jafat atau Habib Jafar. Beliau menandatangani kontrak pada 3 Februari 1900. Ia digantikan oleh Teuku Said Husin bin Jafar bin Achil Syahabuddin, yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 22 Juli 1912. Berdasarkan catatan *Regeerings Almanak*, *uleebalang* Sungu Raja berikutnya adalah Teuku Said Umar Abdul Azis.

lxxv. SUSOH

Terletak di *Onderafdeeling* Tapak Tuan dan dipimpin oleh Datuk Muhammad Yatim dan Datuk Beuginda (Baginda). Mereka menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 26 Maret 1881. *Uleebalang* berikutnya adalah Datuk Dindin. Karena yang berhak mewarisi singgasana Susoh bernama Datuk Syamsari masih kanak-kanak, ia diwakili oleh Datuk Baginda gelar Datuk Raja. Kedudukannya disahkan tanggal 27 Januari 1912.

lxxvi. TANJONG SEUMANTO & MEUREUBO (TANJUNG SEMANTON & MERBAU)

Uleebalang bagi kawasan yang tergolong dalam *Onderafdeeling* Idi ini adalah Teuku Muda Nyak Latif. Ia menandatangani kontrak pada 6 Juni 1877 dan 15 Juni 1900.

lxxvii. TAPAH (TEUPAH)

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Simalur. Pada 27 Mei 1874, Datuk Sitongga menanda-tangan perjanjian dengan Belanda. Selanjutnya Tapah diperintah oleh

Datuk Gadang, yang menerima pengesahan tanggal 23 Maret 1901. Penguasa Teupah berikutnya adalah Sutan Amin (dikukuhkan kedudukannya tanggal 24 April 1917.

lxxviii. TAPAK TUAN (TAPA TUAN)

Termasuk *Onderafdeeling* Tapak Tuan dengan *uleebalang*nya bernama Datuk Raja Muda Amat, yang menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 5 Mei 1874. *Uleebalang* berikutnya adalah Si Jintan gelar Datuk Raja Ahmad dan Datuk Titah yang menurut *Regeerings Almanak* menandatangani perjanjian tanggal 4 Juli 1894 dan 23 Maret 1901. Pada 4 Juni 1912, *uleebalang-uleebalang* bernama Si Jintan gelar Datuk Raja Amat dan Si Tuba gelar Datuk Bagindo, menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Penggantinya adalah Teuku Raja Pakeh yang disahkan kedudukannya pada 19 Agustus 1931.

lxxx. TEUNOM

Terletak di *Onderafdeeling* Calang. Hikayat asal-muasal Teunom diawali pada abad ke-17. Saat itu terdapat seorang ulama terkenal di Mampree (VII Mukim) bernama Tengku Pasi Keumiroe yang memiliki banyak murid. Salah seorang di antara mereka adalah putra Tengku di Weueng. Ia kemudian menikah dengan putri Tengku Pasi Keumiroe. Suatu kali, sultan meminta kerbau Tengku Pasi Keumiroe agar dipergunakan menarik kayu. Namun, Tengku Pasi Keumiroe menolaknya dengan alasan bahwa hewan tersebut sedang hamil. Menghadapi penolakan itu, sultan sangat marah dan memerintahkan agar Tengku Pasi Keumiroe ditangkap. Mereka kemudian melarikan diri ke Daya. Tetapi para pengikut sultan terus mengejar mereka, sehingga akhirnya terpaksa berpindah lagi ke Keutapang Pasi.

Putra Tengku di Weueng mengganti namanya menjadi Tengku Ci Babah Krueng. Suatu malam, ia mendapatkan petunjuk agar berpindah ke Teunom, yang saat itu belum didiami orang. Demikianlah, ia kemudian mulai membuka dan membangun kawasan yang subur tersebut.

Semasa berlangsungnya Perang Aceh, *uleebalang*nya yang bernama Teuku Imeum Muda telah menyatakan takluk pada Belanda (18 Maret 1877). Meskipun demikian, ia tidak sungguh-sungguh menaati perjanjian yang telah dibuatnya dengan penjajah. Pada bulan November 1883, Teuku Imeum Muda menahan kapal *Nisero* milik Inggris bersama awaknya. Akibatnya, terjadi konflik antara pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris. Ketika Inggris mengirimkan kapal

Pegasus ke Teunom guna menyelesaikan masalah ini dan berhubungan langsung dengan Teuku Imeum Muda, Belanda terpaksa membiarkannya saja. Kasus ini baru dapat diselesaikan pada bulan September 1884, yakni setelah Belanda membayar uang tebusan pada Teuku Imeum Muda.

Peristiwa sebelumnya yang cukup menggemparkan adalah pembunuhan dua orang penyelidik Perancis, L. Wallon dan Guilaumme, yang hendak mengadakan penelitian pada Maret 1880. Alasan pembunuhan ini bukanlah perampokan, karena harta benda mereka tidak diambil; melainkan anggapan bahwa kedua orang asing itu merupakan musuh yang hendak menjajah negeri mereka, sebagaima halnya Belanda. Uleebalang Teunom selanjutnya adalah Teuku Nyak Imam Setia Bakti Hajat yang menurut *Regeerings Almanak* menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 22 November 1884. *Uleebalang* Teuku Uma dari Teunom menandatangani kontrak pada 12 September 1907. Menjelang keruntuhan Hindia Belanda, yang menjabat sebagai *uleebalang* Teunom adalah Teuku Husin.

lxxx. TITEU (II MUKIM)

Oleh pemerintah kolonial digabungkan dengan *Onderafdeeling* Lam Meulo. *Uleebalang*-nya semasa awal kekuasaan Belanda adalah Teuku Bentara Titeu Brahim. Beliau menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada 15 Juni 1900. Yang berkuasa berikutnya di Titeu adalah Teuku Ma'ah. Penggantinya, Teuku Bintara Muhammad Ali, menandatangani kontrak tanggal 16 Januari 1929. Ia menjadi salah seorang korban Perang Cumbok.

lxxxi. TRIENG GADING

Uleebalang-nya adalah Teuku Panglima Lehman. Selanjutnya *uleebalang* Trieng Gading bernama Teuku Ma'e tercatat menandatangani kontrak pada 16 Oktober 1915. *Uleebalang* Trieng Gading berikutnya adalah Teuku Beureudan.

lxxxii. TROESEB (TRUSEB atau II MUKIM)

Terletak di *Onderafdeeling* Lam Meulo. Kawasan ini dibuka oleh orang-orang yang berasal dari Pidie beserta Keumangan, di bawah pimpinan kakek *uleebalang* Troeseb pertama. Penguasa Troeseb pertama, T. Ben Calang Rimba, menerima pengakuan (*sarakata*) dari sultan Aceh. Beliau selanjutnya secara berturut-turut digantikan oleh T. Keudjruën Po Mat, T. Keujruën Binéh Blang, T. Keujruën Geudöng, dan T. Keujruën Gadej. Seharusnya yang menjadi pengganti T. Keujroeen

Gadej adalah putra sulungnya bernama T. Ma' Ali. Namun ia dinilai tidak cakap memerintah serta merupakan pecandu opium, sehingga akhirnya yang diangkat sebagai *uleebalang* berikutnya adalah T. Kejuruan Lehman. Beliau dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 17 Mei 1911.

lxxxiii. TRUMON

Cikal-bakal Trumon adalah seorang tokoh bernama Datuk Si Ruyung[196], yang menjadi kaya berkat perdagangan ladanya dengan orang-orang Inggris di Tapanuli semenjak 1787. Saudara laki-lakinya bernama Leubé Dapa (–1814) memperoleh kemajuan saat berniaga di Singkil dan menjadi raja di pelabuhan tersebut. Ia lantas berpindah ke Trumon dan memajukan perniagaan lada di sana. Leubé Dapa menggeser kedudukan Datuk Si Ruyung dan diakui sebagai raja Singkil dan Trumon. Sepeninggal Leubé Dapa, putranya bernama Raja Bujang (1814–1832/ 1833) mewarisi kedudukan dan sekaligus kekayaannya pada tahun 1814. Perniagaan lada semakin maju dan bahkan Trumon memiliki armada dagangnya sendiri, sehingga tak perlu menunggu kedatangan kapal-kapal asing. Saat itu, jalur perdagangan Trumon mencapai India dan Selat Malaka. Trumon menjalin pula hubungan perniagaan dengan Minangkabau. Sesudah Raja Bujang mangkat pada tahun tahun 1832/ 1833, kedudukan Trumon semakin mundur, karena buruknya administrasi pemerintahan para penggantinya. Selanjutnya yang berkuasa di Trumon secara berturut-turut adalah Seri Muda Paduka Alam Sultan Mansur Buda Bujang (1833–1884), Sultan Iskandar (1884–1893), Tengku Jafar (1893–1903), Tengku Muda Nasiruddin (1904–1910), Tengku Leh (1910–1927), Tengku Husein (pemerintahan pertama, 1927–1942), Tengku Daud (1942–1945), dan Tengku Husein (pemerintahan kedua, 1945–1946).

lxxxiv. TUNGKOP

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Meulaboh. *Uleebalang* Tungkop pertama adalah T. Keudjroeën Doelö' Neuratja Tjeunkaj. Beliau lalu digantikan oleh putranya, T. Keudjroeën Doelo' Lam Baréh. Rangkaian *uleebalang* Tungkop berikutnya adalah T. Keudjroeën Doelo' Mohamad, T. Keudjroeën Balè, T. Keudjroeëu Doelo', dan Teuku Cut Amat[197]. Ke*uleebalang*an Tungkop pernah diperintah oleh

196. Lihat *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*, halaman 266.
197. Lihat *Mededeelingen Betreffende Eenige Atjehsche Onderhoorigheden*, dalam jurnal *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, volume 61, nomor 1, halaman 640.

seorang wanita bernama Pocut Baren, putri Teuku Cut Amat[198]. Ketika suaminya gugur semasa Perang Aceh, Pocut Baren menggantikannya sebagai *uleebalang* dan meneruskan perjuangan melawan Belanda. Saat bergerilya ia senantiasa didampingi oleh 30 orang pengawalnya. Pocut Baren biasanya berjalan di depan dengan membawa sebilah *peudaung tajam* (pedang tajam). Kepiawaiannya dalam mengatur strategi tidak kalah dibandingkan kaum pria. Pasukan pemerintah kolonial senantiasa mengejar-ngejarnya. Suatu kali, pecahlah pertempuran dengan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Hogers. *Uleebalang* wanita ini tertembak kakinya dan harus diamputasi. Belakangan Pocut Baren berdamai dengan Belanda dan bersedia menandatangani *korte verklaring* pada 26 Januari 1915. *Uleebalang* Tungkop selanjutnya adalah Teuku Beureudan, yang menerima pengesahan pada 16 Januari 1930.

lxxxvi. UNGA

Merupakan bagian *Onderafdeeling* Calang. Kawasan Unga dibuka oleh T. Sarong. Agar dapat menguasai kawasan tersebut, T. Sarong berhutang pada Teuku Nya Geh. Kendati demikian, ia lalu menyadari bahwa pendapatan yang diperoleh dari kawasan itu, tak dapat menutupi hutang-hutangnya. Oleh karenanya, ia lantas menunangkan putranya, Pocut Brahim, dan putri Teuku Nyak Geh bernama Nyak Patimah. Selain itu, ia juga berbagi hasil lada yang diperolehnya dengan Teuku Nya Geh. Sepeninggal T. Sarong, Pocut Brahim menggantikannya sebagai *uleebalang*. Pocut Brahim meninggal tak lama kemudian, dan digantikan oleh pamannya, Pocut Abaih. Ia menikahi Nyak Patimah, yang ketika itu belum dinikahkan dengan Pocut Brahim. Pada tahun 1883, Pocut Abaih melaporkan diri pada pemerintah kolonial. Beliau mangkat pada 1886.

Sebagai penggantinya, diangkat T. Ali, yakni putra sulung Teuku Nyak Geh dan sekaligus putra angkat Pocut Abaih. Pada 18 Februari 1909 dilangsungkan penanda-tanganan kontrak dengan *uleebalang* Unga bernama Teuku Muda Pahlawan. *Uleebalang* Unga berikutnya bernama Teuku Rayeu menerima pengukuhan kedudukan melalui penanda-tanganan kontrak pada 25 Oktober 1916 dan 25 Oktober 1919.

198. Lihat *Cut Nyak Meutia*, halaman 15.

lxxxvi. WOYLA (WOJLA)

Terletak di *Onderafdeeling* Meulaboh dengan Kejuruan Cut Teuku di Blang sebagai *uleebalang*nya yang menandatangani perjanjian tanggal 20 Desember 1880. Teuku Kejuruan Nyak Merah menerima pengukuhan pada 26 Maret 1881. Lalu Woyla diperintah oleh Teuku Ben Husin Muhammad Syah, yang mengadakan kontrak dengan pemerintah kolonial tanggal 15 Juni 1900 dan 30 Januari 1915. Menjelang keruntuhan pemerintah kolonial Belanda, *uleebalang* Woyla adalah Teuku Raja Bukit.

k. Kerajaan-kerajaan di Gayo dan Alas

Kerajaan-kerajaan kecil (*kejuron*) yang berada di Gayo dan Alas ini merupakan bawahan atau vasal Kesultanan Aceh. Secara umum, Tanah Gayo mencakup daerah pegunungan di sebelah utara Bukit Barisan serta merupakan dataran tinggi yang cukup luas. Wilayahnya banyak terdapat pegunungan dan sungai-sungai besar; seperti Sungai Peusangan, Meulaboh, Jambo Aye, Jambur Ayar, Tripa, Temiang, Peurelak, dan anak-anak sungainya masing-masing. Para raja atau *kejuron* berbagai negeri kecil di Tanah Gayo ini dahulunya menerima jabatan atau gelar (*nahma*) mereka dari sultan Aceh. Kedudukan mereka diwariskan turun-temurun dan biasanya digantikan oleh putranya, yang tidak harus putra sulung; melainkan anak yang dianggap paling membawa tuah. Siapa yang dianggap bertuah itu diputuskan oleh para *saudoro* (kerabat) dengan bantuan seorang *guru* (dalam artian peramal). Bila tidak ada putra atau keturunan laki-laki, maka seorang saudara laki-laki atau putranya (kemenakan *kejuron* yang hendak digantikan) dapat pula diangkat menduduki jabatan tersebut.

Apabila kesepakatan mengenai siapa yang menjadi *kejuron* berikutnya telah dicapai, orang yang terpilih itu ikut diusung bersama keranda jenazah *kejuron* sebelumnya. *Kejuron* baru ini diusung di depan atau ujung kaki almarhun, sesuai dengan hubungan kekerabatannya. Setelah upacara pemakaman, orang yang menggantikan *kejuron* lama ini diusung kembali pulang ke tempat kediamannya. Upacara ini bernama *mawen* (*ipawen*) yang melambangkan kesinambungan dalam mata rantai kekuasaan *kejuron*. Kasusnya menjadi berbeda apabila tidak dicapai kata sepakat mengenai siapa yang layak menjadi *kejuron* baru. Bila ini yang terjadi, jabatan *kejuron* dikatakan lowong dan selanjutnya dilakukan musyawarah yang memakan banyak biaya hingga seorang *kejuron* atau *rojo* baru terpilih. Upacara berkepanjangan diperlukan bila sebelum pemakaman, orang tidak mencapai kata sepakat mengenai siapa yang hendak diangkat

sebagai *kejuron* baru. Dalam hal ini, orang yang akhirnya terpilih tersebut dianggap sebagai *kejuron* dari awal lagi, karena tidak mencerminkan kesinambungan mata rantai pemerintahan sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Secara teoritis, seorang *kejuron* baru harus mendapatkan pengukuhan dari sultan Aceh. Namun para *kejuron* atau *rojo* dari Tanah Gayo tidak pernah memintanya, karena para *kejuron* baru ditunjuk berdasarkan tradisi dan tak seorangpun memikirkan hendak memberontak atau membatalkan kepatuhannya pada sultan. Mereka juga diwajibkan menyerahkan upeti pada sultan Aceh.

Penduduk daerah Alas memiliki adat istiadat tersendiri yang ada persamaannya dengan Gayo. Mereka mendiami hulu Sungai Simpang Kiri, yang dalam bahasa Alas disebut Lawe Alas. Suku Alas telah menjalin hubungan perniagaan yang ramai dengan Singkil. Orang-orang Melayu yang berada di Singkil biasanya berperan sebagai pedagang perantara. Sungai merupakan jalur perdagangan yang penting di Alas, sedangkan perjalanan ke pusat pemerintahan Kesultanan Aceh umumnya ditempuh melalui jalan darat. Warga Gayo dan Alas mempunyai hubungan yang erat, karena banyak suku Gayo yang bermukim di Alas dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan antara kedua suku juga kerap terjadi.

Hukum adat di Gayo dan Alas merupakan cerminan agama Islam. Warga di sini menganut prinsip *hukum ikanung edet, edet ikanung agama*, yang artinya "setiap hukum mengandung adat dan setiap adat mengandung agama." Dengan kata lain, hukum adat merupakan anak kandung hukum agama. Meskipun demikian, kadang terjadi pula perselisihan antara hukum agama dan adat. Apabila raja yang berkuasa tidak memahami hukum agama, maka adat yang dimenangkan. Raja atau penguasa di daerah Gayo dan Alas menurut tradisi kekuasaannya tidaklah tak terbatas. Secara umum, setiap elemen masyarakat memiliki kewajibannya masing-masing: *raje musuket sipet* (raja harus sanggup berlaku adil), *petue musidik sasat* (hakim wajib menyelidiki secara saksama siapa yang benar dan salah, *imem muperlu sunet* (imam wajib menetapkan mana yang dibenarkan dan tak dibenarkan oleh agama), dan *rayat mugenap mupakat* (rakyat wajib bermusyawarah dan bermufakat).

i. BAMBEL

Bambel merupakan salah satu *kejuron* yang berada di Tanah Alas. Pada saat diawalinya pendudukan Belanda di Aceh, yang menjadi *rojo* di sana adalah Uwen Atan. Bersama-sama dengan putranya yang bernama Atan, ia dengan gigih

menentang Belanda. Keduanya gugur saat mempertahankan benteng Lengat Baru dari serbuan pasukan pemerintah kolonial. Penduduk Bambel terbagi menjadi berbagai suku yang dikepalai oleh seorang *pengulu suku*. Suku yang besar dibagi lagi menjadi kesatuan sosial bernama *blah*. Nama-nama *blah* atau marga ini mencerminkan asal usul leluhur mereka. Jalannya pemerintahan di Bambel dipegang oleh empat orang pemuka yang disebut *pengulu*. Jumlah mereka ada orang dan disebut *si opat* atau "pengulu yang empat." Pada hakekatnya mereka merupakan pengatur jalannya roda pemerintahan di Bambel. *Si opat* pada *Kejuron* Bambel terdiri dari Pengulu Johar, Ngkeran, Biak Muli, dan Cik Batu Mbulen[199]. Sedangkan nama-nama *blah* yang ada di sana adalah: Sekedang, Pinem, Beru, Munte, Pining, Karo, Pagan, Selian, Terigam, Geski, Bencawan, Keling, Passe, Sepayang, Cebero, dan Gayo. Pemuka Kejuruan Bambel bernama Haji Muhammad Basir tercatat dalam *Regeerings Almanak* menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 20 Maret 1906.

ii. BATU MBULEN

Bersama-sama dengan Bambel, Batu Mbulen merupakan salah satu di antara dua *kejuron* yang berada di Tanah Alas. Pada tahun 1904, yakni bersamaan dengan masuknya kekuasaan Belanda ke Alas, yang menjabat sebagai *rojo* adalah Uwen Berakan. Raja yang telah lanjut usianya ini merupakan penentang Belanda. Meskipun demikian, anaknya yang bernama Berakan berhasil dibujuk memihak Belanda; sehingga belakangan menjadi mata-mata dan kaki tangan Belanda di Alas. Ia menandatangani kontrak pada 1 September 1905. Tidak berbeda dengan di *Kejuron* Bambel, masyarakat di Batu Mbulen juga terbagi atas suku-suku yang dikepalai *pengulu suku* dan masih dibagi lagi menjadi berbagai *blah*. Jabatan *si opat* atau "pengulu yang empat," seperti di Bambel juga dikenal di sini. *Si opat* di Batu Mbulen terdiri dari Pengulu Keretan, Pengulu Bacirem Batin, dan Imem Bale[200]. Sedangkan *blah-blah* yang terdapat di sana adalah: Selian, Geski, Sinage, Pinem, Beru, Aceh, Keling, Pelis, Bencawan, Karowan, Munte, Karo, Pase, Bangko, Cebero, Pining, Mahe, Sekedang, dan Rame.

199. Lihat *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, halaman 67.
200. Lihat *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, halaman 67.

iii. BUKET atau BUKIT

1. Perkembangan Buket di abad ke-19

Keturunan penguasa Buket telah terbagi menjadi dua cabang semenjak lama. Meskipun pada masa awal garis keturunan itu terbagi, mereka masih merupakan saudara atau saudara sepupu satu sama lain, tetapi setelah beberapa generasi menjadi saudara jauh. Pemimpin cabang utama yang juga dianggap sebagai raja tertinggi (*kejuron*) menyandang gelar Rojo Buket Mamat. Tokoh yang bernama pribadi Mamat tersebut telah memangku jabatan ini semenjak lama hingga tahun 1901. Snouck Hurgronje mencatat bahwa tokoh ini merupakan pemadat[201]. Karena rumahnya berada di tengah-tengah kampung ia juga dikenal sebagai Rojo Buket Lah (*lah* berarti "tengah" dalam bahasa setempat). Ketika ia wafat pada tahun 1901, ditinggalkannya seorang putra yang masih kecil bernama Ma'un. Karena faktor usianya yang masih terlalu muda itu, ia berada di bawah perwalian saudara sepupu ayahnya yang kini menikahi ibunya, Ama-n-Sri Kuala. Ibunya ini berdiam di Lindong Bulon. Masih ada lagi orang berpengaruh dalam keluarga ini, yakni Ama-n-Cayamani yang juga bernama Bar. Setelah berusia dewasa, Ma'un memerintah sebagai *rojo* Bukit sepenuhnya. Namun kemudian ia mati dibunuh dan digantikan oleh Raja Ilang[202]. Berikutnya, menjelang masa kejatuhan Belanda kekuasaan beralih kembali pada Zainuddin.

Cabang lainnya menyandang gelar Rojo Buket Jaran. Penguasa yang memiliki gelar ini gugur pada bulan November 1902. Nama pribadinya adalah Sagul dan ia terkenal sebagai seorang pria muda yang gemar menghisap candu. Oleh karena rumahnya terletak di tepi (*eweh*) kampung utama, ia juga disebut Rojo Buket Eweh. Sagul belakangan juga dikenal sebagai Ama-n-Usen. Lima tahun sebelumnya, Sagul menggantikan saudara sepupunya, Ama-n-Manyak Brahi yang tak mempunyai anak. Sagul mempunyai tiga saudara, yakni Malem, Dalu, dan Rokan. Ia memiliki seorang putra bernama Usen dan seorang putri. Saudara perempuan Ama-n-Manyak Brahi tercatat menikah dengan seorang Aceh. Ketika sultan Aceh sedang mengundurkan diri dan bermukim di Tanah Gayo pada tahun 1901[203], Ama-n-Usen bergabung dengan pasukannya ke Pameue dan setelah itu ke Pidie. Ia kemudian tewas tertembak saat terjadinya penggerebekan terhadap rombongan Tuanku Muhammad Daud di Peudue Hulu.

---

201. Lihat *Tanah Gayo dan Penduduknya* (terjemahan Indonesia), halaman 141.
202. Lihat *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, halaman 49.
203. Lihat *Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda*, halaman 48.

Antara dua cabang penguasa Buket tersebut terjadi juga persaingan dan perselisihan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh mereka. Pada masa Snouck Hurgronjue menulis karyanya (akhir abad ke-19–awal abad ke-20), jumlah anggota suku atau pengikut Raja Buket Eweh lebih banyak dibandingkan saingannya. Oleh karena itu, ia dianggap berwenang pula untuk menyandang tugas-tugas raja (*kejuron*). Pada masa itu, bila terjadi permasalahan masyarakat meminta bantuan pada salah seorang di antara dua keturunan cabang penguasa Buket tersebut; tetapi pada kesempatan lainnya kemungkinan mereka berpaling pada yang lainnya. Dengan kata lainnya, dua-duanya dianggap layak menyandang fungsi *kejuron*.

Konon bangkitnya cabang Buket Jaran atau Eweh itu terjadi karena timbul pertikaian antara penguasa Buket dengan Rojo Cek dari Bobasan. Rojo Buket Mamat saat itu terpaksa melarikan diri, sehingga posisinya yang lowong diisi oleh saudara sepupunya, datuk warga Jaran yang kelak menjadi Rojo Buket Jaran. Ketika Rojo Buket Mamat kembali dari pelariannya, ia mendapatkan kekuasaan dan gelarnya kembali; sementara itu, Rojo Buket Jaran juga tetap memangku jabatannya secara terpisah. Dengan demikian, setelah itu terdapat dua orang pemimpin yang otonom satu sama lain. Sementara itu, ada sumber lain yang mangatakan bahwa yang berhak atas gelar *kejuron* justru adalah nenek moyang Rojo Buket Eweh, tetapi telah direbut oleh Rojo Buket Mamat melalui tipu muslihat saat terjadi peperangan dengan musuh yang berasal dari Aceh. Dengan demikian, terdapat dua sumber yang bertentangan di sini.

Kejuron Bukit berpusat di Kebayakan, yang terletak di tepi Danau Laut Tawar. Negeri ini kurang lebih sama luasnya dengan Kejuron Cek (Bobasan). Bukit memiliki jumlah penduduk yang sedikit lebih banyak dibandingkan Cek. Sementara itu, wilayah kekuasaannya membentang dari timur ke utara Gayo Laut. Kampung Kebayakan yang menjadi pusat pemerintahan rojo Bukit pernah dibakar habis saat berlangsungnya operasi militer oleh van Daalen pada tahun 1901. Menurut catatan Kempees, salah seorang penulis Belanda, ketika van Daalen menyerbu Gayo pada tahun 1904, Ma'un (Raja Buket Lah) baru berusia tujuh tahun; sedangkan *rojo* Buket Eweh yang bernama Kader kala itu berumur tujuh belas tahun. Mereka berdua melaporkan diri pada Belanda dan dibawa ke Kutaraja guna disekolahkan. Namun menurut sumber Gayo, Kader justru disembunyikan oleh rakyat. Selanjutnya, orang lain yang diperkenalkan pada Belanda sebagai

rojo Buket Eweh. Kader lantas bergabung dengan rombongan sultan Aceh yang mengundurkan diri ke Takengon dan gugur di daerah Pidie.

2. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan

Kampung utama di Buket adalah Kebayakan, yang sangat luas menurut Snouck Hurgronje. Di sana terdapat makam Teungku Mpos Kolak, yang dianggap sebagai leluhur suku Buket. Selain itu, masih banyak terdapat makam keramat lainnya, seperti makam Teungku Goro Gantong, Teungku Mampak, dan Teungku Bontol Nangka, yang terletak di dekat kampung. Masih ada juga makam Teungku Ulyom yang dianggap sebagai cikal-bakal *blah* (suku, puak, atau keturunan) Lot. Makam keramat yang dikenal kalangan lebih luas adalah makam Datu Peseki, yang letaknya agak jauh dari kampung. Makam beratap ini menjadi tujuan ziarah banyak orang, yang sebelumnya telah mengucapkan kaul. Di Kebayakan terdapat berbagai *blah*, antara lain:

1. Buket Mamat (Lah), pengikut Rojo Buket Mamat.
2. Buket Jaran (Eweh), pengikut Rojo Buket Jaran yang lebih dominan di Kebayakan.
3. Gunong, merupakan kaum yang erat kekerabatannya dengan Buket. Beberapa tahun yang lalu mereka mempunyai seorang *rojo* yang kuat dan terhormat. Ketika ia meninggal, putranya bernama Ama-n-Moga menjadi penggantinya. Suku Gunong lebih kaya dibandingkan suku Buket dan mempunyai lebih banyak senapan dibandingkan suku atau puak manapun yang tinggal di kawasan tersebut.
4. Pengulu Beruksah.
5. Kala atau Kuala, yang namanya diambil dari lokasi tempat tinggal mereka yang dekat *kala* (muara) kampung tersebut. Puak ini dipimpin oleh Pengulu Cek Kuala atau disingkat Pengulu Kala saja.
6. Pengulu Mudo.
7. Pengulu Jalel.
8. Meluom, dengan kepalanya yang disebut Rojo Meluom.
9. Timbangan, dengan pemimpinnya yang disebut Pengulu Timbangan.
10. Baten, yang dipimpin Pengulu Baten.
11. Pengulu Cek Serulo.
12. Lot.

iv. CEK (BOBASAN atau CEK BOBASAN[204])

1. Cikal-bakal dan perkembangan *Kejuron* Cek

Berdirinya Kejuron Bobasan berkaitan dengan penyerangan kelompok suku Batak Karo, yang dikenal sebagai Batak 27 atau Batak Karo 27 terhadap Kejuron Buket yang saat itu berada di Bobasan[205]. Menurut legenda, peperangan dipicu oleh hilangnya salah seorang warga Karo yang berasal dari marga Cebero. Konon, ia telah ditawan dan dijadikan budak di Kejuron Buket. Karenanya, warga Karo mengutus beberapa orang mengadakan penyelidikan guna mencari jejak orang yang hilang itu. Pihak *Kejuron* Buket mengakui bahwa orang yang hilang itu memang berada di daerahnya dan mereka menuntut pembayaran uang tebusan sebagai syarat pembebasannya. Setelah tuntutan tersebut dipenuhi, ia dibebaskan bersama utusan yang berasal dari Karo. Sebelum orang-orang Karo pulang ke negerinya, *rojo* Buket mengajak mereka bermain judi terlebih dahulu di Simpang IV Bobasan. Ternyata orang-orang Karo dapat memenangkannya, sehingga menimbulkan ketidak-puasan dalam diri *rojo* Buket. Ia lantas berniat merebut kembali harta yang dimenangkan mereka dengan cara licik.

Orang-orang Karo yang sedang dalam perjalanan pulang ke tanah airnya dihadang oleh utusan *rojo* Buket dan perkelahian tak terelakkan lagi. Beberapa orang anggota rombongan Karo tewas terbunuh dan mayatnya digantung oleh pasukan *rojo* Buket. Sedangkan sisanya berhasil melarikan diri ke kampung halamannya. Peristiwa pembunuhan ini membangkitkan amarah rakyat Karo. Mereka berkeinginan menuntut balas penghinaan tersebut. Karena itu, dikirimlah pasukan berjumlah 27 orang ke Buket di bawah pimpinan Lebe Kader. Mengingat jumlah mereka yang sedikit, Lebe Kader terpaksa menggunakan siasat dengan menciptakan kesan bahwa seolah-olah mereka datang dengan pasukan berkekuatan besar. Ia juga mengumpulkan keterangan mengenai pusat pertahanan *rojo* Buket dari pada budak suku Karo atau Batak lainnya yang kebetulan berada di kawasan tersebut. Sementara itu, pada budak juga menggabungkan diri dengan mereka, sehingga kekuatan pasukan yang berasal dari Tanah Karo ini semakin besar saja.

Peperangan akhirnya dimenangkan oleh para penyerbu yang berasal dari suku Batak Karo. Sultan Aceh yang mendengar mengenai insiden ini lalu mengundang

204. Dalam buku *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda* disebut Cik Bebesen atau Bebesen.
205. Lihat *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda,* halaman 51.

kedua belah pihak ke meja perundingan. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang diadakan antara Batak 27 dan Buket setelah itu, *Kejuron* Buket sepakat membagi dua wilayahnya dan memindahkan pusat kekuasaannya ke Kebayakan; sedangkan Batak 27 menguasai pusat pemerintahan yang lama di Bobasan dan mengangkat Lebe Kader, pemimpin mereka sebagai raja. Adapun ketentuan pembagian wilayah itu adalah sebagai berikut: bagian barat Gayo Laut terus ke utara adalah bagian raja Cek Bobasan (Batak 27); sedangkan bagian Kejuron Buket adalah dari sebelah timur ke utara. Selanjutnya bagian selatan Danau Laut Tawar diperuntukkan bagi Kejuron Cek Bobasan; sedangkan utaranya milik Kejuron Buket. Oleh karenanya, raja Bobasan mempunyai tempat penangkapan ikan di sebelah selatan. Rojo Cek Bobasan tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari sultan Aceh dan tidak pula ia memperoleh anugerah berupa *bawar* (senjata pusaka) sebagai tanda kekuasaan. Kendati demikian, pengangkatannya sebagai raja tidak dihalangi oleh sultan Aceh[206]. Setelah Lebe Kader mangkat, yang berkuasa sebagai *rojo* Bobasan hingga masa Snouck Hugronje secara berturut-turut adalah Raja Empun Dorat, Empun Sabah, Tok Cekok, Sawah Renem, dan Empun Umur.

Menurut keterangan Snouck Hurgronje, penduduk Cek berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari 27 keluarga[207]. Mereka berupaya mempertahankan kemurnian kaumnya melalui penolakan terhadap pernikahan dengan orang asing. Unsur-unsur atau budaya asing yang jumlahnya tidak seberapa juga telah membaur sempurna dengan kebudayaan warga di kawasan ini. Masih menurut laporan Snouck Hurgronje, kepala negeri ini yang bergelar *Rojo* Cek meninggal pada tahun 1899 setelah memerintah lama sekali. Ia dikenal sebagai pribadi yang unggul dan menghindarkan diri dari menghisap candu. Selain itu, ia merupakan tokoh yang adil dalam memutuskan berbagai perkara. *Rojo* Cek ini menikah dengan seorang wanita Aceh di Samalanga, di mana ia juga dikenal sebagai Teuku Manya (Tengku Mayak menurut buku *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda,* halaman 52). Teuku Manya merupakan pengganti Empun Umur.

Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Teuku Manya akibat dimakan usia menjadi kurang lincah gerakannya. Karena itu, ia banyak didampingi oleh putranya bernama Rana (kemungkinan sama dengan Husin, sebagaimana yang tercatat

206. Baru setelah Belanda menguasai Tanah Gayo, *rojo* Cek Bobasan memperoleh kedudukan yang setara dengan *rojo* Buket.
207. Lihat *Tanah Gayo dan Penduduknya* (terjemahan Indonesia), halaman 124.

dalam buku *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda,* halaman 52), yang sehari-hari digelari Rojo Mudo. Tindak tanduknya, juga sama terpujinya seperti ayahnya. Ketika ayahnya mangkat, ia diangkat sebagai penggantinya. Namun baru sempat berkuasa setahun, ia wafat pula pada tahun 1900.

Orang yang paling berhak menggantikannya adalah Bedul yang juga disebut Rojo Ucak, ia adalah cucu tunggal Teuku Manya. Tetapi upacara pengangkatannya kelak tidak dilangsungkan menurut tradisi yang rumit sebagimana biasanya, karena saat itu sedang berkecamuk perang dengan Belanda. Bahkan sebelumnya sudah pernah terjadi peperangan antara rakyat Rojo Cek dan Rojo Buket. Tokoh lain yang ikut berperan dalam pemerintahan adalah Genap atau disebut juga Rojo Bujang, yang menjabat sebagai *tuo dolom* negeri Rojo Cek. Bedul dan Genap dua-duanya merupakan pemadat dan penjudi. Meskipun demikian, dibandingkan Genap, Bedul sendiri kurang luas wawasannya dan tak banyak pengalaman, mungkin karena usianya yang masih muda. Karena itu, kaum kerabatnya memutuskan bahwa Genap yang akan diutus sebagai wakil keluarga dalam menemui Belanda. Pada tahun 1901, Genap atau Rojo Bujang diperkenalkan sebagai pemangku atau wakil *rojo* Bobasan kepada Mayor van Daalen. Tindakan ini dilakukan demi menyembunyikan Rojo Ucak dari tangan Belanda.

Saat Belanda menyerang Gayo pada tahun 1904, Rojo Bujang ditangkap dan dibawa ke Gayo Luos hingga meninggal di sana. Setelah Gayo Luos jatuh ke tangan Belanda, Mayor van Daalen kembali lagi ke Bobasan dan mengangkat seorang tokoh bernama Raja Batak sebagai *rojo* Bobasan. Pada pertengahan tahun 1905, barulah Rojo Ucak diperkenalkan pada Belanda dan diangkat sebagai *rojo* Bobasan. Ia memegang kekuasaan hingga meninggal di tahun 1932. Sebagai penggantinya, diangkatlah Rojo Uyem yang memerintah hingga kedatangan Jepang di tahun 1942.

2. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan

Terdapat enam suku utama yang membentuk negeri ini; yakni:

1. Cebero yang merupakan asal pemimpin Rojo Cek. Suku ini paling banyak jumlahnya dan juga terdiri dari para pendatang dari daerah lain yang telah melepaskan latar belakang kesukuannya sendiri. Kaum pendatang seperti itu biasanya digabungkan dengan suku Cebero.
2. Celala dengan pemukanya, Rojo Gembera dan Pengulu Sagi

3. Tebo, yang terbagi menjadi tiga; yakni kaum keturunan Rojo Garang (Gegarang), Angen, dan Balohon. Menurut tradisi lisan, katanya kaum Balohon merupakan yang tertua dan menjadi asal-muasal kedua kaum lainnya.
4. Linggo, yang terbagi antara pengikut Pengulu Linggo, Rojo Kemala, dan Rojo Kaya. Dua tokoh yang disebutkan belakangan berlaku sebagai *mudo* atau wakil tokoh yang disebutkan pertama.
5. Munte, yang terbagi menjadi Munte Padang, Munte Gayo, dan Munte Kala. Munte Padang diperintah oleh Pengulu Padang. Meskipun demikian, orang yang berhak atas gelar ini telah jatuh miskin akibat ketagihan candu; sehingga ia terpaksa meninggalkan tempat tersebut menuju ke Isak. Saudara sepupunya bernama Jemali juga tidak layak memangku jabatan tersebut. Itulah sebabnya, *imom blah* Munte Padang bernama Rojo Imom yang menjalankan fungsi seorang *rojo*. Konon ia terkenal piawai dalam ilmu gaib dan strategi perang. Rojo Imom mengabdi pada seorang kepala daerah bernama Pang Sawang (Muda Dalam), yang merupakan tokoh terkuat di antara lima hulubalang musuh Cik Peusangan. Orang Gayo menganggap bahwa kesukesan Pang Sawang dalam menaklukkan Cik Peusangan dianggap berasal dari Rojo Imom. Ketika Rojo Imom mangkat, ia digantikan oleh putranya bernama Ilang, yang merupakan seorang pemadat. Sementara itu, Munte Gayo berada di bawah pimpinan Pengulu Gayo bernama Jaran. Sedangkan Munte Kala dipimpin oleh Pengulu Kala.
6. Kaemili yang menganggap Pengulu Cek Bobasan sebagai pemimpin tertinggi mereka.

Masih ada kesatuan-kesatuan lebih kecil yang disebut Pengulu Buket, Pengulu Gadeng (kebanyakan tinggal di Celala), Pengulu Golo, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, asal usul mereka dapat ditelusuri hingga keenam suku utama di atas.

Rakyat Cek hidup dari peternakan dan pertanian. Meskipun hidup di pegunungan, tetapi mereka tidak segan membawa kerbaunya hingga ke daerah pantai untuk dijual, karena mengharapkan keuntungan yang tinggi di sana. Hasil-hasil lainnya adalah kuda, cula badak dan gading; yang biasa dibawa ke pasar di Lhokseumawe. Kerbau, sapi, dan kuda umumnya hanya dibeli oleh orang-orang berada. Sementara itu, rakyat ada pula yang menjual tembakau ke Pase, Peusangan,

Samalanga, dan Peudada. Hasilnya sekedar mereka belanjakan pakaian dan garam guna dibawa pulang. Tempat berbelanja pakaian yang disukai adalah di Keudek Jangkalan. Candu adalah komoditas lain yang juga ikut diperdagangan di pasar-pasar tersebut.

Kampung induk *Rojo* Cek terletak di Bobasan atau Boboson, yang memiliki 50 hingga 100 rumah (enam puluh menurut taksiran penguasa Rojo Cek). Perkampungan itu agak padat dan pada keempat sisinya dikelilingi oleh ladang (*umo*). Peladangan ini terbentang hingga sejauh Takengon dan Kebayakan. Di tepi barat laut kampung terletak mesjid agak besar dengan atap bersusunnya yang terbuat dari serat aren (*jaut*). Mesjid itu mempunyai seorang *kateb* atau *ateb* (pembawa khotbah) dan seorang *bilol* (bilal) dengan tugas menyerukan azan serta memelihara masjid.

v. KARANG (TEMIANG)

Penguasa *kejuron* ini pernah mengklaim kekuasaan tertinggi atas Kejuron Serbojadi Abok pada kurang lebih tahun 1870-an[208], tetapi klaim ini ditolak. Penguasa Abok yang menjabat saat itu menyatakan bahwa relasi antara negerinya dan sultan Aceh bersifat langsung.

vi. LINGGO atau LINGE

Terletak di aliran Sungai Jemer dan berdasarkan tradisi warganya berasal dari suku Batak. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1025 dengan Tengku Kik Betul sebagai rajanya yang pertama. Selanjutnya, tidak jelas bagaimana perkembangan sejarahnya selama 500 tahun berikutnya. Hanya saja di tahun 1511, raja Linggo ke-13 dikenal pernah menjabat sebagai panglima besar angkatan perang Aceh dan anggota kabinet Kerajaan Johor. Linggo merupakan salah satu *kejuron* yang mendapatkan pengesahan berupa *bawar* (pusaka) dari sultan Aceh. Kendati demikian, karena raja Linggo ke-14 berbuat suatu kesalahan dengan membunuh adiknya bernama Bener Merie, *bawar* tersebut dicabut kembali oleh sultan. Berkat perjuangan gigih seorang wanita terkemuka di istana Linggo bernama Datu Beru, pusaka ini diganti dengan bawar lain yang lebih rendah nilainya berupa *damar leleh* oleh sultan Aceh. Malangnya, dalam perjalanan pulang mempersembahkan *damar*

208. Snouck Hurgronje menulis pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, bila dalam bukunya, ia menyebutkan 30 tahun yang lalu; peristiwa tersebut tentunya boleh diperkirakan terjadi pada sekitar 1870-an.

leleh tersebut pada raja Linggo, ia wafat di Timang Gajah[209]. Raja Linggo ke-14 digantikan oleh adiknya yang bernama Sengeda pada kurang lebih 1539–1571.

Menurut Snouck Hurgronje[210], penyandang gelar *rojo* Linggo adalah orang yang paling terpandang di antara para kepala suku Gayo. Leluhur penguasa yang sekarang memperoleh gelar kehormatan yang boleh diwariskan secara turun-temurun dari Aceh. *Rojo* yang sekarang semasa mudanya bernama Cut. Selanjutnya menurut adat, setelah mempunyai seorang putri, ia dinamai seturut putrinya tersebut. Karena putrinya bernama Cahyamani, maka ia disebut Ama-n-Cahyamani. Ia berumur setengah baya dan dua puluh tahun yang lalu menggantikan kakeknya, Ama-n-Nyak; sebab ayahnya yang bernama Nyak telah meninggal sebelum sempat menduduki jabatan sebagai *rojo* Linggo.

AMA-N-NYAK

Nyak ♂

CUT (AMA-N-CAHYAMANI)

Akem Dewa ♂ (bertunangan)
Sasa ♂
Cahyamani ♀
Bani ♀, menikah dengan lelaki dari Pasai.

Ino-n-Benta ♀
Menikah dengan seorang pria dari Pidie

Benta (Ama-n-Usen) ♂
& Nyerang ♂

Ino-n-Raman ♀
Menikah dengan seorang pria dari Pide

Raman ♂
& seorang putera lagi

Diu ♀
Menikah dengan seorang pria dari Jerneh

Seorang anak
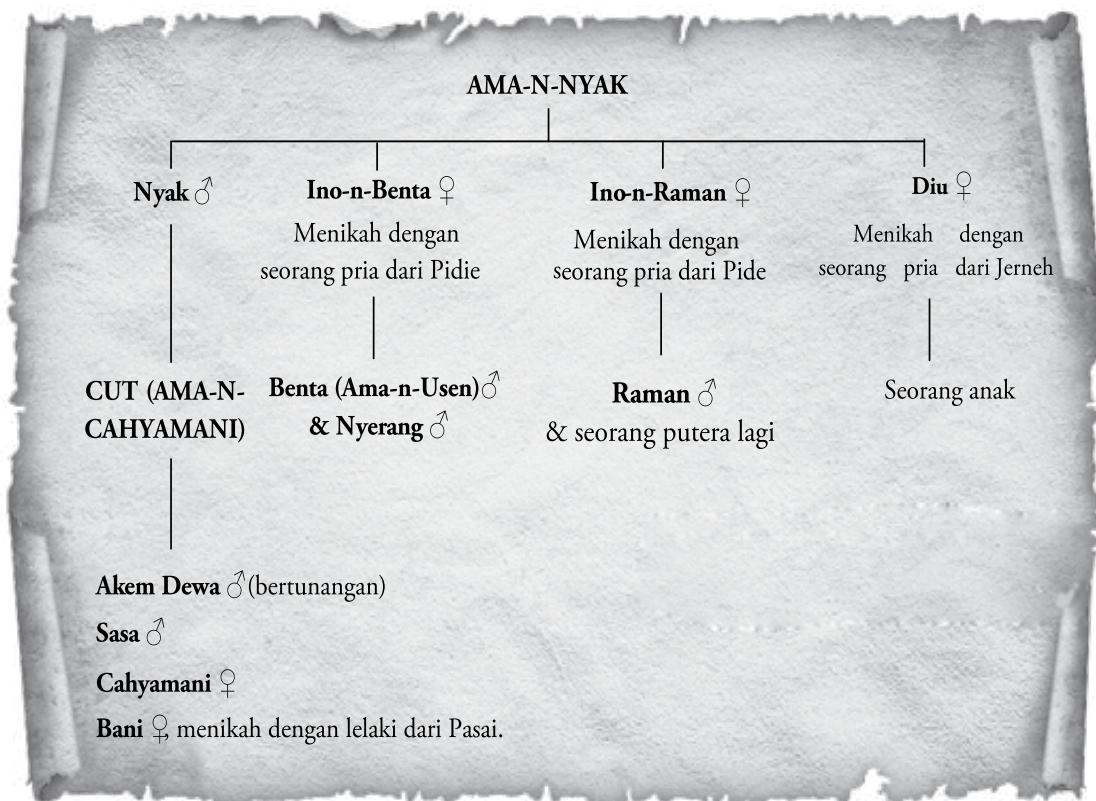
Silsilah keluarga rojo Linggo
(nama yang ditulis dalam huruf besar semua adalah para pemangku gelar Rojo Linggo)
Digambar ulang dari buku Tanah Gayo dan Penduduknya, halaman 162.

209. Lihat *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda,* halaman 60.
210. Lihat *Tanah Gayo dan Penduduknya* (terjemahan Indonesia), halaman 161.

Anggota keluarga *kejuron* di negeri ini, terbagi menjadi dua cabang, yakni cabang tua dan muda; yang masing-masing tinggal pada tepian Sungai Linggo. Cabang yang tua merupakan asal-muasal para *kejuron*; sedangkan kepala cabang yang muda disebut *mudo* atau *kejuron mudo*. Oleh karena kedua cabang itu dianggap sedarah, mereka tidak boleh menikah satu sama lain.

Kerabat jauh Cut, *kejuron* atau *rojo* Linggo yang sekarang (maksudnya pada zaman Snouck Hurgronje), bernama Ama-n-Nyak (bukan Ama-n-Nyak merupakan kakeknya–hanya namanya saja yang sama) pernah melanggar *odot* (adat) larangan perkawinan antar kedua cabang keluarga ini dengan melarikan gadis dari cabang keturunan yang lebih muda. Menurut tradisi, orang yang melakukan perkawinan ini harus meninggalkan Linggo jauh-jauh. Itulah sebabnya, Ama-n-Nyak juga dijuluki Ama-n-Lintang atau Bapak yang Menentang (Melintang) Adat. Meskipun demikian, setelah membayar denda yang berat ia diizinkan kembali ke kampung halamannya. *Kejuron* yang sekarang juga pernah melanggar adat tersebut dan membayar denda yang besar. Kendati demikian, warga suku tersebut jadi menyadari bahwa mereka telah saatnya menghapus adat istiadat semacam itu. Pemberian izin pernikahan semacam ini disebut *berperata* (*berpeurata*), yang mengandung makna "meratakan jalan"; yakni memperbolehkan apa yang sebelumnya tak diperbolehkan. Sewaktu pecah perang melawan kolonialis Belanda pada tahun 1904, yang menjadi *rojo* Linggo adalah Raja Item. Ia merupakan seorang tokoh yang anti-Belanda dan bergerilya bersama para pejuang lainnya di hutan-hutan. Namun nasib beliau selanjutnya tidaklah diketahui.

vii. PETIAMBANG (PETIAMANG)

Berdasarkan legenda, leluhur penguasa kawasan ini pernah mempersembahkan seekor kera yang dalam bahasa Melayu disebut *siamang* atau *siambang*. Inilah yang menjadi asal-muasal nama Petiambang. Nama ini juga sekaligus merupakan gelar turun-temurun bagi penguasa kawasan ini. Silsilah para penguasanya adalah sebagai berikut:

GARIS KETURUNAN TENGAH

N
Saudara laki -laki kakek
Ama-n-Klipah

O — X — **JAPAR** atau **AMA-N-SE-RE** atau **AMA-N NOH (IV)**

P — **AMA-N-LE SA (V)**

AMA-N-KLIPAH (II)

Ino-n Jemenun — **AMA-N-CANE (VIII)**

Ama-n Sri Beniah (putera angkat Ama -n-Klipah)

- **RADON** atau **AMA-N-SUASAH (III)**
- **NYAK SARA** atau **AMA-N-TANGLONG** atau **AMAN-N GUMPANG (IV)** — **BEDEN (XI)**

GARIS KETURUNAN TERMUDA

N

X — **Rojo Buah**

- **Ama-n-Kuncer** — **MAT ROJO** atau **AMA-N-NURSIAH (IX)**
- **Ama-n-Sri Kulah** — **ASAN** atau **AMA-N-GEROT (VII)**

Y — **Datuk Sawa Rendom** — **Tengku Aji Rojo** atau **Ama-n-Sahiri** — **Mahmut** atau **Ama-n-Ratus**

Silsilah kejuron Petiambang
Nama yang ditulis dengan huruf besar semuanya menunjukkan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai *kejuron*; sedangkan angka romawi menyatakan urutan dalam memerintah.
Digambar ulang dari buku *Tanah Gayo dan Penduduknya*, halaman 192.

Dibawah pemerintahan Ama-n-Klipah (pada silsilah di atas ditandai dengan II), sekitar 40 tahun yang lalu, terjadilah perang antara Buket dengan Petiambang. Pemicu peperangan itu adalah kecurigaan para kepala suku Gayo Luos bahwa

Ama-n-Klipah telah menggelapkan uang beberapa ratus Dollar yang sedianya akan dipersembahkan pada sultan Aceh. Dalam peperangan itu, hanya sedikit saja yang mendukung Ama-n-Klimah; bahkan anak angkatnya yang bernama Ama-n Sri Beniah gugur dalam peperangan tersebut. Itulah sebabnya, ia digantikan oleh cucunya angkatnya bernama Radon, yang dikenal juga sebagai Ama-n-Suasah (nomor III pada silsilah).

Namun karena Ama-n-Suasah banyak membantu mengadakan perkawinan secara rahasia, ia tidak disukai oleh rakyatnya dan dipecat dari jabatan *kejuron*. Sebagai penggantinya, diangkat saudara sepupu jauhnya yang bernama Japar (nomor IV). Dalam tahun-tahun pertama Perang Aceh, Japar pernah mengadakan perjalanan ke Aceh. Ia tinggal beberapa lama di tempat kediaman Panglima Polem dan wafat di sana. Ama-n Lesa (ditandai dengan angka Romawi V dalam silsilah di atas) diangkat sebagai penggantinya. Ia hanya memangku jabatannya dalam waktu singkat, karena dipecat warga tidak lama kemudian. Penyebabnya adalah merajalelanya tikus-tikus sawah, di mana warga menimpakan kesalahan pada Ama-n Lesa.

Nyak Sara (angka Romawi VI), adik Radon, yang saat Radon meninggal masih belum dewasa, kini memangku jabatan sebagai *kejuron*. Ia sering menghabiskan waktunya di Tampor. Karena kerap tidak berada di tempat, ia dilengserkan dan diganti oleh anggota cabang keluarga yang lebih muda; yakni Asan atau Ama-n Gerot (angka Romawi VII). Pada masa pemerintahannya terjadi peperangan kembali, yang dipicu oleh perebutan kekuasaan di Kuto Lintang. Dalam peperangan ini, Ama-n Gerot dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh Rojo Buket serta dijadikan sasaran latihan menembak. Ama-n Cane (nomor VIII) diangkat sebagai *kejuron* baru yang memerintah hanya selama beberapa bulan saja dan setelah itu meletakkan jabatannya saat berakhirnya peperangan ini (disebut Perang Buket II). Saudara sepupu Ama-n Gerat bernama Mat Rojo atau disebut juga Nyak Rojo (angka Romawi IX) tampil sebagai penggantinya dan memerintah selama beberapa tahun. Karena terjadinya perselisihan, ia dipecat dan digantikan oleh Bedan atau Bidin (nomor X). Sering bergantinya *kejuron* ini memperlihatkan bahwa kekuasaan mereka tidaklah besar, di mana mereka dapat diangkat dan diberhentikan dengan mudah. Setelah seseorang diberhentikan, ia tidak dapat dipilih kembali. Oleh karena itu, apabila suatu cabang keturunan sudah pernah

dipilih semua sebagai *kejuron*, maka pilihan kemungkinan jatuh pada cabang keluarga lainnya.

Oleh karena Bidin masih muda, sebagai walinya diangkatlah Aman Syafii atau menurut sumber Belanda, Aman Si Pi Ih. Aman Syafii ini merupakan saudara Ama-n Ratus. Ia merupakan tokoh yang memihak Belanda, sehingga dapat dimanfaatkan oleh van Daalen sebagai kaki tangannya.

viii. SERBOJADI ABOK

Serbojadi merupakan daerah aliran hulu Sungai Jerneh yang juga disebut Woih-n-Serbojadi. Sungai ini setelah melewati daerah Ujong Karang melanjutkan alirannya di bawah tanah dan kemudian keluar lagi di pegunungan dekat Jambur Arus Batu. Penduduk kawasan ini berasal dari berbagai bagian Tanah Gayo. Tiga cabang keluarga penguasanya berasal dari Linggo (Linge) dan demikian pula sebagian besar penduduknya. Konon Kejuron Linggo pernah menetapkan rajanya bernama Merah Abuk (Abok) sebagai penguasa Abok, yang belakangan menjadi nama bagi *kejuron* ini. Pusat pemerintahan Serbojadi Abok telah berpindah beberapa kali. Pada mulanya berada di Tualang, lalu dipindahkan ke Kute Kering. Oleh karena kawasan tersebut kerap dilanda banjir, mereka memindahkan kembali pusat kekuasaannya ke Lukup. Terdapat pula beberapa pendatang dari Nosar, Kebayakan, dan kawasan Danau Laut Tawar. Menurut ceritera tradisi yang banyak dianut masyarakat, warga Serbojadi dikatakan berasal dari Linggo, di mana hal ini diperkuat oleh nama kampung dan keturunan yang ada. Siah Utama, *kejuron* yang paling miskin dalam hal wilayah dan penduduk, harus menerima kenyataan bahwa sebagian penduduknya ada yang pindah ke Serbojadi. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah cerita yang mengklaim bahwa warga mereka asalnya dari Serbojadi (liat uraian tentang Siah Utama).

Menurut penuturan orang-orang yang telah lanjut usianya, kampung tertua di Serbojadi adalah Tualang. Pembuka lahan atau tanah pertama yang menjadi cikal-bakal mereka adalah Moyang Tualang. Ketika warga di sana bertambah banyak, penguasa Linggo mengangkat Merah Abok sebagai pemimpin mereka yang selanjutnya bergelar *kejuron* Abok. Dengan demikian, ini merupakan pembeda dengan *kejuron* lainnya, yang menerima kedudukan mereka dari sultan Aceh. Para kepala itu pada mulanya tinggal di Tualang, tetapi setelah itu meninggalkan

tempat tersebut dan pindah ke Kuto Tareng. Selanjutnya mereka pindah lagi ke Lokop, karena Kuto Tareng kerap dilanda banjir.

Berikut ini adalah silsilah para *kejuron* Abok:

SERBO (I)

X

Y (♀), menikah dengan orang Aceh

Z (♀), menikah dengan Ama -n- Nyak Ara dari Amperan Peraq

Nyak Ara dan seorang anak laki - laki serta perempuan

LOMOK (II)

Ama-n-Siti

AMA-N-UJOM atau **RIKEH** atau **MANA (V)**

Rojo Pase, adik laki-laki Serbo

AMA-N-KAMPONG atau **AMA-N-SEREJAH (III)**

Serejah (♀), menikah dengan Ama-n-Sapar dari Kampung Besar (Deli)

Rojo Betul

Gamta atau **Ama-n-Kemuneng**
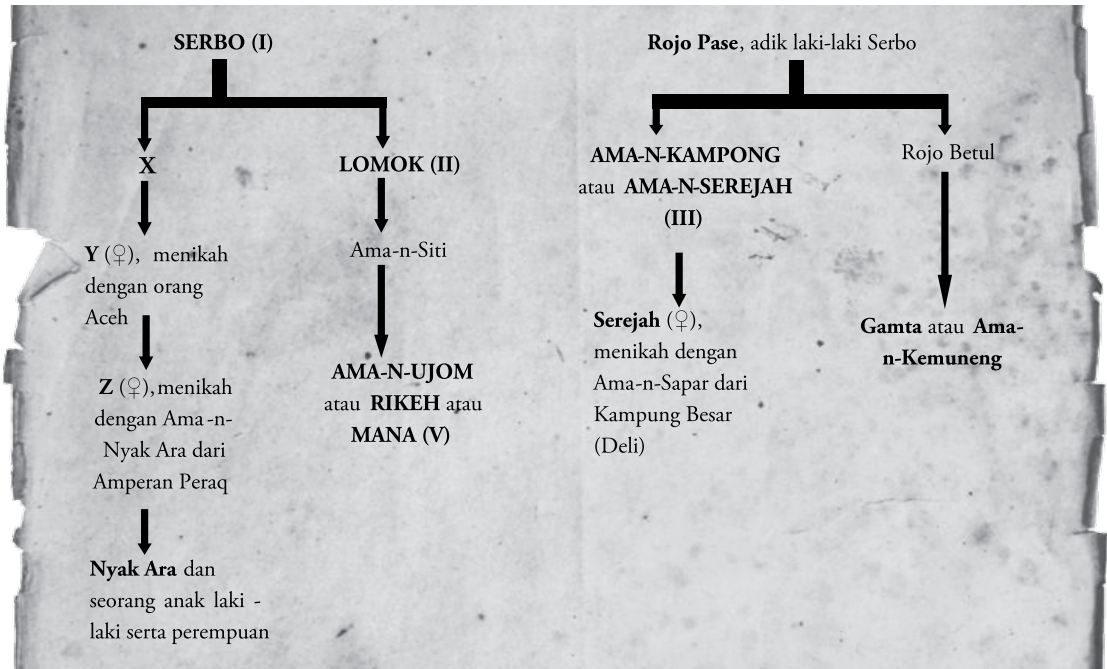
Silsilah para kejuron Serbojadi Abok
Nama yang ditulis dengan huruf besar semuanya menunjukkan tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai kejuron; sedangkan angka romawi menyatakan urutan dalam memerintah.
Digambar ulang dari buku *Tanah Gayo dan Penduduknya*, halaman 216, dengan beberapa perubahan

Nama Serbo (angka Romawi I pada silsilah di atas) didapat karena ia pindah ke Serba di Temiang dan setelah itu digantikan putranya yang bernama Lomok (angka Romawi II). Kemudian yang menggantikan adalah sepupunya yang bernama Ama-n-Kampong (ditunjukkan dengan angka Romawi III pada silsilah di atas). Sesudah Ama-n-Kampong wafat, kedudukan *rojo* direbut oleh Nyerang atau Rojo Mudo (namanya tidak ditampilkan pada silsilah di atas). Tetapi ia mendapat tentangan dari banyak orang, terutama di bawah pimpinan Ama-n-Sakom (Rojo Banta).

Ada dua orang asing yang membela hak Nyerang atas jabatan *kejuron*, yakni Muahmad dari Amperan Perak (Hamparan Perak) di Deli yang melarikan diri dari hukuman yang diterimanya dan Ama-n Sapar dari Deli. Mereka berdua karena perkawinan telah dimasukkan dalam keluarga tersebut. Setelah Nyerang

meninggal, kedua orang ini mempunyai pengaruh besar di Serbojadi, meskipun yang menjadi *kejuron* berikutnya adalah Ama-n-Ujom (angka Romawi V). Ama-n-Sapar kerap disebut sebagai wakilnya atau bahkan dianggap sebagai *kejuron* yang sebenarnya.

Pada sekitar tahun 1901, Abok dan daerah-daerah sekitarnya (Bone, Sembuang, dan Tampor) didatangi pasukan Belanda, di mana para pemukanya sepakat menaklukkan diri serta mengakui kekuasaan Belanda tanpa perlawanan sedikitpun. Karena masa lalunya di Deli, di mana ia pernah dijatuhi hukuman, Ama-n-Nyak Ara tidak menghadiri pertemuan dengan pasukan Balenda dan memutuskan melarikan diri. Saat pasukan Belanda yang dipimpin van Daalen tiba di sana, Ama-n-Sapar yang menyambutnya dengan disertai oleh Ama-n-Ujom selaku *kejuron*. Tetapi pamornya nampak kalah dengan Ama-n-Sapar. Menurut Ama-n-Sapar, Gamta atau Ama-n-Kemuneng sama-sama berhak dan lebih cakap dalam memerintah ketimbang Ama-n-Ujom; namun penilaian ini tampaknya disebabkan lebih dekatnya hubungan kekerabatan dengan Gamta.

ix. SIAH UTAMA

Merupakan *kejuron* yang terkecil di Tanah Gayo dan berkedudukan di Nosar, tepi Danau Laut Tawar. Para penguasanya mendapat pula *bawar* dari sultan Aceh. Menurut Snouck Hurgronje[211], Siah Utama pada awal abad ke-20 dipimpin seorang *kejuron* (raja) bernama Laham, yang melaporkan diri pada pasukan Colijn di tahun 1902. Konon, ia adalah yang termuda di antara tiga saudara laki-lakinya. Laham menikah dengan putri Datuk Kerkom, yang merupakan saudara sepupu mendiang Rojo Buket Mamat. Menurut tradisi, nenek moyangnya adalah kejuron daerah Serbojadi, yang kemudian terusir dari sana dan melarikan diri ke Buket. Rojo Buket memberikan kawasan Nosar pada mereka sebagai tempat pemukiman. Meskipun demikian, Snouck Hurgronje tampaknya meragukan hal itu, karena menurutnya tidak terdapat bukti-bukti yang membenarkan riwayat tersebut. Ada sekitar empat rumah di Serbojadi yang didiami oleh pengikut Siah Utama, tetapi mreka adalah imigran-imigran yang berasal dari Nosar serta telah melebur dengan suku Kejuron Abok. Nampaknysa kisah di atas dibuat dengan tujuan mengklaim hak Siah Utama atas Serbojadi.

---

211. Lihat *Tanah Gayo dan Penduduknya* (terjemahan Indonesia), halaman 158.

Versi lain kisah tersebut menyebutkan bahwa leluhur *kejuron* Siah Utama merupakan penguasa atas sebagian daerah Danau Laut Tawar. Saat terjadi perang dengan tetangganya, mereka mendapat bantuan dari seseorang bernama Rojo Perupi yang berasal dari Aceh atau luar Tanah Gayo. Sebagai balas jasa atas bantuannya itu, Siah Utama menganugerahi Rojo Perupi daerahnya sendiri yang terletak di sekitar Danau Laut Tawar; sedangkan mereka sendiri pindah dan membuka lahan baru di Serbojadi. Selanjutnya, wilayah yang diperintah oleh Rojo Perupi diberi nama Siah Utama; sedangkan wilayah baru di Serbojadi itu disebut Kejuron Abok (Serbojadi Abok). Kisah ini juga hendak membuktikan klaim Siah Utama atas Serbojadi, walaupun tidak ada fakta-fakta sejarah yang kuat sebagai pendukungnya.

II. ASAHAN

a. Cikal-bakal Kerajaan Asahan

Kesultanan Asahan dikatakan berdiri pada tahun 1630 dengan Abdul Jalil sebagai sultan pertamanya. Kerajaan ini mempunyai keterkaitan erat dengan Aceh, karena Abdul Jalil merupakan putra Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Wilayahnya kini terletak di Kabupatan Asahan, Sumatera Utara. Hingga awal abad ke-19, kerajaan ini merupakan vasal atau bawahan Aceh. Pendiriannya diawali dari perjalanan Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan Johor dan Malaka pada tahun 1612. Diriwayatkan bahwa pada saat itu, sultan tiba di hulu sebuah sungai yang kelak disebut Asahan dan beristirahat di sana. Perjalanan dilanjutkan dan sultan tiba di sebuah tempat berbentuk tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dan Silau. Di sana ia bertemu dengan seorang raja setempat bernama Simargolang. Sebagai tempat menghadap dibangunlah sebuah balai, sehingga selanjutnya kawasan itu dinamakan Tanjung Balai. Guna mengokohkan ikatan kekerabatan antara keduanya, Iskandar Muda menikahi putri Raja Simargolang yang bernama Putri Ungu. Dari perkawinan mereka lahirlah Abdul Jalil yang merupakan cikal-bakal sultan-sultan Asahan.

Sementara itu sumber lain[212], menyebutkan mengenai seorang tokoh bernama Batara Sinomba, yang merupakan putra raja Pagarruyung (Minangkabau). Karena melakukan hubungan terlarang dengan saudarinya bernama Putri Lenggagani,

212. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 210.

ia diusir oleh ayahnya dan kemudian menetap di Pinangawan (kawasan Sungai Barumun). Putri Lenggagani melahirkan seorang putra yang menjadi raja di Air Merah. Secara keseluruhan, dengan istri pertamanya raja Air Merah, ia dikaruniai dua orang putra dan seorang putri bernama Siti Onggu. Raja tersebut juga menikah dengan istri keduanya dan dikaruniai putra-putra pula. Karena menghendaki agar putranya yang menjadi raja, istri keduanya dengan licik mengusir dua orang putra dari istri pertama.

Kedua orang putra yang terusir itu lantas meminta bantuan sultan Aceh, yang mengirimkan pasukan di bawah pimpinan raja muda Pidie. Akhirnya kedudukan mereka dapat dipulihkan. Sebagai imbalannya mereka mempersembahkan Siti Onggu pada sultan Aceh. Kendati demikian, kedua orang bersaudara itu terus-menerus memikirkan adik perempuan mereka. Karenanya, mereka lantas mengajak warga Batak yang berada di Asahan bersama-sama menghadap sultan Aceh. Kala itu, sultan Aceh sedang kalah bertanding adu ayam jago dengan orang-orang Bugis. Ternyata warga Batak terkenal piawai dalam hal mengadu ayam jago, sehingga berkat nasihat mereka, sultan Aceh berhasil meraih kemenangan. Sultan Aceh kemudian mengembalikan Siti Onggu, yang saat itu sedang mengandung. Ia kemudian menitahkan agar putra yang berada dalam kandungan tersebut kelak diangkat sebagai raja Asahan. Setelah dilahirkan, putra itu diberi nama Abdul Jalil dan menjadi cikal-bakal raja-raja Asahan. Sementara itu, Siti Onggu menikah lagi dengan seorang Batak bernama Raja Bolon.

Raja Bolon menikah pula dengan putri Raja Simargolang dan dikaruniai dua orang putra yang masing-masing bernama Abdul Samad dan Abdul Kahar. Sepeninggal Raja Bolon, Raja Simargolang berniat merebut kekuasaan bagi kedua orang cucunya tersebut, sehingga Abdul Jalil terpaksa menyingkir ke kampung Raja di dekat Batubara. Namun, dengan dibantu pasukan Aceh, ia berhasil merebut kedudukannya kembali.

b. Perkembangan Kesultanan Asahan

Ketika Sultan Abdul Jalil wafat, para pemuka kerajaan sepakat untuk mengangkat putranya sebagai sultan Asahan kedua dengan gelar Sultan Saidisyah. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Simpang Toba dan wafat di sana. Karena itu, ia memperoleh gelar anumerta Marhum Simpang Toba. Sebagai penggantinya diangkat putranya yang bergelar Muhammad Rumsyah.

Sultan Abdul Jalil Syah II (1760–1765) yang merupakan pengganti Sultan Muhammad Rumsyah memindahkan pusat kekuasaan Asahan ke Kampung Baru (Sungai Raja). Ia merupakan seorang raja yang berani menentang kekuasaan Belanda. Raja Alam, sultan Siak saat itu, meminta bantuannya untuk melawan Belanda di Malaka. Karena menyaksikan bahwa Malaka kini telah berada di tangan Belanda, sultan membangkitkan semangat rakyat Malaka dalam melawan penjajah. Pada sultan Siak ia menyatakan kesediaannya membantu mengusir Belanda dari wilayah kekuasaan Siak dan siap memimpin pasukan di garis depan. Penyerangan dilakukan terhadap Pulau Gantung yang menjadi simbol kolonialisme Belanda. Dalam peperangan tersebut, Belanda dapat dipukul mundur dan Pulau Gantung kembali dalam kekuasaan Siak. Sultan Abdul Jalil Syah II meninggal pada tahun 1765, tak lama setelah ia kembali ke Asahan dan dimakamkan di Sungai Raja. Selama hidupnya, sultan menikah dengan Encik Salamah dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Raja Dewa, Raja Muda, dan Raja Sutan Muda.

Raja Dewa naik takhta menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Dewa Syah (1765–1805) dan memerintah dari kawasan Pasir Putih (Tanah Raja) yang kini terletak di kota Kisaran. Ia mempunyai lima orang istri, namun hanya mempunyai anak dengan istri keduanya, seorang gadis keturunan China. Dari pernikahan tersebut lahirlah beberapa orang anak. Salah seorang di antaranya bernama Raja Musa, yang kelak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Musa Syah (1805–1808). Sultan ini tercatat pernah memindahkan pusat pemerintahannya ke Rantau Panjang. Tatkala Musa Syah wafat, anaknya belum lahir atau masih berada dalam kandungan, sehingga adiknya yang diangkat sebagai penggantinya, dengan gelar Sultan Muhammad Ali Syah (1808–1813).

Namun beberapa bulan setelah dinobatkan sebagai raja, lahirlah kemenakannya yang diberi nama Muhammad Ishak. Hal ini menimbulkan perselisihan di kemudian hari, karena saat sultan mangkat, anaknya sendiri yang bernama Pangeran Husein berebut kekuasaan dengan Pangeran Muhammad Ishak. Berbagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak boleh dikatakan gagal; ditambah lagi suku Batak yang menghuni Kerajaan Asahan tidak bersedia menerima Muhammad Ishak sebagai sultan. Akibatnya perang saudara tidak dapat dihindari lagi. Di tengah pertempuran itu, Raja Muhammad Ishak berhasil menguasai kawasan Sungai Asahan hingga Bandar Pulau; sedangkan Husein menguasai Air Silau. Akhirnya pihak keluarga kesultanan

mengusulkan penyelesaian yang mengejutkan dengan menyerang dan menaklukkan Kerajaan Kualuh. Bila kerajaan itu dapat direbut, Muhammad Ishak akan didudukkan di sana sebagai sultan. Ternyata mereka berdua menyetujui usulan ini dan dibentuklah dua pasukan yang masing-masing dipimpin oleh Husein dan Muhammad Ishak. Husein menyerang Kualuh dari kuala Sungai Kualuh sedangkan Muhammad Ishak dari hulunya. Negeri Kualuh dapat ditundukkan dan Pangeran Muhammad Ishak ditakhtakan sebagai raja di Kualuh dengan gelar Yang Dipertuan Raja Muhammad Ishak Negeri Kualuh pada tahun 1829. Selama menjalankan roda pemerintahan Kualuh, ia dibantu oleh beberapa orang datuk yang berasal dari Asahan. Sementara itu, Pangeran Husein menjadi raja di Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Husein Syah (1813–1859). Ia wafat pada 10 Februari 1859 dan dimakamkan di Sirantau. Itulah sebabnya, ia menerima gelar anumerta sebagai Marhum Sirantau. Selama hidupnya, ia mempunyai dua orang istri, yakni Tengku Sulung, putri dari Kerajaan Bedagai dan Taleha, putri Raja Batak Buntu Pone. Semasa pemerintahannya, Siak melancarkan serangannya pada tahun 1835 di bawah pimpinan Tengku Panglima Besar Siak, tetapi gagal menguasai seluruh Asahan.

Sultan Ahmadsyah yang setelah meninggal digelari Marhum Maharaja Indrasakti (1859 -1865 dan 1886–1888) merupakan putra Sultan Muhammad Husein Syah. Semasa pemerintahannya, Belanda, Inggris, dan Aceh berupaya berebut pengaruh di kawasan Sumatera Timur. Pada 12 September 1865, Belanda menaklukkan Asahan dan menjadikan wilayah tersebut langsung berada di bawah pemerintahannya. Karena menentang kekuasaan Belanda, Sultan Ahmadsyah ditangkap dan diasingkan bersama dengan adiknya Pangeran Muhammad Adil ke Riau. Orang-orang Tionghua yang berdiam di Tanjung Balai juga tidak menyukai Belanda, karena toko mereka sering dirampok dan dijarah. Karena itu, mereka bersimpati pada perjuangan Sultan Ahmadsyah dan secara diam-diam membantu beliau[213]. Sementara itu, adiknya yang lain, Tengku Pangeran Besar Muda diasingkan ke Ambon. Dengan demikian, setelah peristiwa penaklukan ini, pemerintah Belanda menjadi penguasa tertinggi di sana; dan sebagai wakilnya, ditempatkanlah seorang kontrolir. Selanjutnya dikeluarkan ketetapan pemerintah Belanda berupa *Gouverments Besluit* tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan *Afdeeling* Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai. Atas petunjuk Netscher, residen Belanda di Riau, urusan pemerintahan Asahan diserahkan pada Tengku Naamatullah dari Kualuh

213. Lihat *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, bagian tentang sultan ke-9, yakni Sultan Ahmadsyah.

semenjak 1865 hingga 1868. Selanjutnya Asahan kembali diserahkan pada empat pembesar Melayu (1868–1886). Dalam kurun waktu ini, perlawanan terhadap Belanda masih saja terjadi. Sultan Ahmad Syah diizinkan kembali ke kampung halamannya pada tahun 1885 dan demikian pula dengan adik-adiknya, dengan syarat mereka tidak melibatkan diri lagi dalam politik. Untuk itulah, Belanda meminta sultan menandatangani suatu kontrak politik di Bengkalis yang disebut *Akte van Verband* pada 2 Maret 1886. Sultan Ahmad Syah didudukkan kembali di singgasananya pada 25 Maret 1886 dan memerintah hingga wafatnya pada 27 Juni 1888. Ia tak mempunyai seorang putra pun, namun sebelum meninggal pernah menunjuk Tengku Ngah Tanjung, anak saudaranya, sebagai raja Asahan berikutnya.

Tengku Ngah Tanjung naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Husein Syah II (1888–1915). Semasa pemerintahannya, Asahan mengalami kemajuan pesat dan dikenal oleh para pedagang-pedagang luar negeri, khususnya Belanda. Banyak perusahaan Belanda yang membuka kantor perwakilannya di Asahan. Oleh karenanya, Belanda membangun berbagai infrastruktur, seperti kantor pemerintahan dan jalan raya beserta rel kereta api di kawasan tersebut. Sultan sendiri pernah mengunjungi Negeri Belanda dan memperoleh bintang penghargaan *Ridder der Orde van den Nederlansche Leeuw* dari Ratu Wilhemina. Dengan makin banyaknya perusahaan asing yang dibuka di sana, Kesultanan Asahan menjadi makin makmur.

Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmatsyah (1915–1980) diangkat menjadi Tengku Besar atau putra mahkota pada tahun 1913 menggantikan kakaknya, Tengku Amir, yang wafat pada tahun yang sama. Ia secara resmi memangku jabatan sebagai sultan semenjak tanggal 7 Juli 1915 hingga tahun 1956. Sultan Saibun pernah mengenyam pendidikan di H.I.S Tanjung Balai dan setelah itu melanjutkan ke MULO di Batavia bersama dengan dua orang saudaranya, Tengku Khaidir serta Tengku Ishaq. Pada masanya, meletus pergolakan yang umum disebut sebagai revolusi sosial. Di tengah-tengah berkecamuknya kerusuhan pascaproklamasi kemerdekaan ini, banyak anggota keluarga kerajaan di Sumatera Timur yang dibunuh.

c. Struktur pemerintahan

Karena berada di bawah kekuasaan Aceh, tentu saja sultan Aceh merupakan penguasa tertinggi di sana. Meskipun demikian, rajanya tetap digelari sultan, yang dipertuan besar, atau sri paduka raja. Kerajaan ini juga mencakup kawasan bernama Batubara yang pemerintahannya berada di bawah para *datuk*.

III. BARUS

a. Cikal-bakal dan perkembangan Barus Hilir

Keluarga penguasa Barus Hilir memiliki hubungan kekerabatan dengan Indrapura[214]. Konon, saat itu sebagian keluarga penguasa Indrapura telah menyebar hingga ke Tarusan. Sutan Ibrahim, putra raja Tarusan meninggalkan negerinya karena berselisih dengan ayahnya, Sutan Muhammad Syah. Perselisihan ini disebabkan oleh serangan ikan-ikan *todak* yang mengganggu penduduk kerajaan. Hewan-hewan tersebut kerap menusuk warga yang mendekati tepi laut. Tak seorangpun mulai dari pejabat kerajaan hingga rakyat jelata yang sanggup mengatasinya. Akhirnya, sahabat Sutan Ibrahim bernama Si Bodak mengusulkan agar warga yang hendak pergi ke pantai membawa perisai terbuat dari pokok pohon pisang. Dengan demikian, moncong ikan-ikan todak akan tertancap pada tameng itu dan tak dapat dilepaskan lagi. Akal Si Bodak ini memang terbukti kejituannya, sehingga permasalahan terselesaikan.

Meskipun demikian, raja menjadi khawatir terhadap Si Bodak. Orang secerdik itu jangan-jangan kelak akan merebut kekuasaannya, begitu pikir Sutan Muhammad Syah. Itulah sebabnya raja memerintahkan agar Si Bodak dihabisi saja nyawanya. Sutan Ibrahim sangat menyesalkan pembunuhan kawannya dan memilih meninggalkan Terusan. Tetapi sebelum meninggalkan kampung halamannya, Sutan Ibrahim membawa segumpal tanah dan seguci air. Setiap tiba di suatu tempat, dicocokkannya kondisi air dan tanah kawasan itu dengan air beserta tanah yang dibawanya. Meskipun demikian, pengujian ini tak kunjung menemukan tempat yang memuaskan. Akhirnya setelah berkelana di Tanah Batak, mereka menemukan kawasan yang dirasa sesuai bagi tempat tinggal mereka. Sutan Ibrahim kemudian diangkat sebagai raja di sana. Kedatangannya ini tidak disukai oleh Sutan Marah Pangsu, raja Barus Hulu. Namun, Sutan Ibrahim bersumpah bahwa tanah yang diduduki dan air yang diminumnya itu merupakan miliknya. Sutan Marah Pangsu menerima sumpahnya itu.

Orang yang tak senang dengan Sutan Ibrahim mengadukannya pada sultan Aceh. Mereka mengatakan bahwa ia hendak menentang otoritas Aceh. Karena itu, Aceh lantas mengirimkan bala tentaranya menyerang Barus. Sutan Ibrahim gugur dengan kepala terpenggal. Ia digantikan oleh putranya bernama Raja Usuf. Diadakannya persahabatan dan pakta pertahanan bersama dengan raja Barus Hulu. Raja Aceh mengundang Usuf yang telah bertekad membalas dendam kematian ayahnya. Sepeninggal Usuf ke

214. Lihat *Sejarah Raja-raja Barus*, halaman 33.

Aceh, roda pemerintahan Barus Hilir dijalankan oleh putranya bernama Sutan Adil. Terdengar kabar bahwa Raja Usuf gugur di Aceh. Sutan Adil memperbaharui perjanjian dengan raja Barus Hulu dan memindahkan sebagian rakyatnya ke sana.

Sutan Adil mangkat dan digantikan oleh putranya Tuanku Sutan yang bersamaan kurun waktu pemerintahannya dengan Raja Bongsu dari Barus Hulu. Adiknya bernama Sutan Marah Laut (Tuanku Bagonjong) mengembara hingga ke Toba Limbong dan diangkat sebagai raja di sana. Lama-kelamaan, Sutan Marah Laut rindu pada kampung halamannya dan berniat kembali ke Barus. Sebelum meninggalkan tempat itu, Sutan Marah Laut mengangkat dua orang sebagai wakilnya. Ternyata Barus sedang diserang oleh orang-orang Aceh yang ingin merebut kekuasaan. Sutan Marah Laut turut serta berjuang mempertahankan negerinya dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu, didirikanlah pemukiman baru di Sawah Legundi yang menjadi besar dan makmur. Tuanku Sultan kemudian bergabung dengannya.

Tak berapa lama berselang, Raja Bongsu terbunuh dan rakyatnya tercerai berai. Meskipun demikian, tidak sedikit di antara mereka yang memilih berdiam di Sawah Legundi, sehingga makin ramailah kampung tersebut. Sutan Marah Pangkat, putra Raja Bongsu turut bergabung dengan mereka dan menikahi Putri Udam, putri Tuanku Bagonjong. Nama Sawah Legundi diganti dengan Barus. Sesudah wafatnya Tuanku Sutan, yang menggantikannya adalah Sutan Marah Laut. Ia pernah diminta VOC memerangi Padang, namun hal ini kurang disukainya sehingga diputuskannya kembali ke Barus. Selama Sutan Marah Laut pergi berperang urusan pemerintahan diserahkan pada Marah Pangkat. Dalam perjalanan kembali ke Barus, Sutan Marah Laut wafat dan Sutan Marah Pangkat menggantikannya.

Sutan Marah Pangkat digantikan oleh Tuanku Panjang Jirat (Baginda Sutan). Tuanku Sutan memiliki dua orang putra, yakni Tuanku Sutan Perhimpunan dan Tuanku Raja Kecil. Tuanku Sutan Perhimpunan menjadi raja Barus Hilir bersamaan dengan masa pemerintahan Tuanku Jirat Panjang. Saat Sutan Perhimpunan mangkat rakyat ingin menobatkan putranya, Sutan Larangan, sebagai raja. Tetapi raja Barus Hulu menghalanginya. Itulah sebabnya, Sutan Larangan pindah ke Sorkam. Tuanku Raja Kecil masih tinggal di Barus Hilir. Ia digantikan oleh putranya bernama Sutan Emas, meski raja Barus Hulu melarang mereka menggunakan gelar raja. Sutan Emas berputra dua orang, yakni Sultan Kesyari dan Sultan Pesisir. Sutan Kesyari dinobatkan sebagai raja di Kota Tengah oleh penduduk Pasaribu Dolok. Ia berputra dua orang,

yakni Putri Perhentian dan Sutan Main Alam. Meskipun demikian, raja Hulu melarang Sutan Main Alam menjadi raja di Hilir.

Karena pertikaian yang berkepanjangan dengan raja di Hulu, Sutan Main Alam berpindah ke Muara Gadang dan menjadi penguasa di sana. Sesuai dengan tradisi penduduk setempat, Sutan Main Alam mengangkat empat penghulu dan mengambil gelar Tuanku Bendahara. Raja di Hulu marah mendengarnya dan pecah pertempuran antara keturunan raja Hulu dan Hilir. Aceh muncul sebagai penengah dan pertikaian diakhiri. Sutan Main Alam digantikan oleh Sutan Perhimpunan yang bergelar Tuanku Sultan Ibrahim.

b. Cikal-bakal dan perkembangan Barus Hulu

Leluhur Barus Hulu berasal dari Toba. Konon seorang tokoh bernama Alang Pardoksi akibat suatu pertikaian meninggalkan ayahnya (Raja Kesaktian) dengan disertai istri dan para pengikutnya. Alang Pardoksi merupakan seorang petualang yang gagah berani. Akhirnya ia berhasil mengumpulkan daerah luas yang meliputi Barus sekarang. Meskipun demikian, tak lama kemudian ia terlibat perselisihan dengan tokoh lain asal Dolok Sanggul bernama Namora masalah upeti. Ketika itu, Alang Pardoksi telah menjadi penguasa di sana. Ia mewajibkan Namora membayar upeti berupa kepala setiap hewan buruan yang diperolehnya. Suatu kali, anak sulungnya bernama Si Purbah memprotes mengapa daging buruan yang dibawa pulang sang ayah selalu tak ada kepalanya. Namora menjelaskan perihal perjanjian pembayaran upeti pada Alang Pardoksi. Si Purbah bertanya bagaimana kelak kalau mereka harus mengadakan kenduri. Apabila daging yang disajikan tak ada kepalanya tentu akan dicela orang lain.

Si Purbah mencari akal bagaimana membebaskan keluarganya dari ketentuan semacam itu. Ia kembali ke kampung halaman ayahnya di Toba dan mengumpulkan kain-kain milik keluarganya. Dari benda-benda itu dibuatnya sebuah rusa-rusaan yang luar biasa bentuknya. Kepalanya dipersembahkan pada Alang Pardoksi, tetapi ia merasa ketakutan melihat benda tersebut dan menolaknya. Namora dibebaskan dari kewajibannya membayar upeti. Setelah keberhasilan ini, Namora bertindak lebih jauh lagi dengan menggulingkan Alang Pardoksi. Kudeta ini berhasil, tetapi kampung mereka dilanda bencana kelaparan, sehingga Alang Pardoksi selaku penguasa yang sah dipanggil kembali ke Barus. Namun Beliau baru bersedia memenuhinya setelah dibuatkan sebuah rumah.

Raja Alang Pardoksi berputra dua orang, yakni Pucara Duan dan Guru Marsakot. Sesudah ayahnya mangkat, mereka berdua berpisah menuju ke arah berlainan demi menghindari pertikaian. Pucara Duan pindah ke kawasan Tuka yang merupakan pusat perniagaan kapur barus dan kemenyan. Sedangkan Guru Marsakot bermukim di Lobo Tua (Panchur) yang banyak disinggahi pedagang India. Ia dijadikan raja oleh mereka. Ketika putra Pucara Duan, Raja Tutung, mengalami perselisihan dengan keturunan Si Purbah, anggota keluarga Guru Marsakot datang membantunya. Setelah Guru Marsakot wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Tuan Namura Raja dan kemudian oleh cucunya, Raja Kadir. Ia merupakan raja pertama yang menganut agama Islam. Raja Kadir digantikan lagi oleh putranya bernama Tuan (Raja) Mualif. Bersamaan dengan zamannya, datanglah Sultan Ibrahim, cikal-bakal raja Barus Hilir. Dengan demikian, kini terdapat dua garis keturunan penguasa di Barus.

Sultan Ibrahim menikahi putri Marah Pangsu–pengganti Tuan Mualif. Tetapi sepeninggal Marah Pangsu, ia membunuhi seluruh putra raja Barus Hulu itu, sehingga dapat menjadi satu-satunya penguasa di Barus. Saudara Marah Pangsu, bernama Marah Sifat marah dan mengadukan Sultan Ibrahim pada raja Aceh. Perang dimaklumkan kepada Barus dan tewaslah Sutan Ibrahim dengan kepala terpenggal. Marah Sifat digantikan oleh Raja Bongsu, sementara itu yang berkuasa di Barus Hilir adalah Raja Usuf, putra Sultan Ibrahim. Sementara waktu, keluarga penguasa Barus Hulu dan Hilir hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, Barus diserang oleh sekelompok orang Aceh dan Sutan Bagonjong yang pulang dari pengembaraannya membantu menghalau mereka. Terjadi persaingan antara Raja Bongsu dengan Sutan Bagonjong yang makin besar kekuasaannya.

Raja Bongsu merasa martabatnya tersaingi dan hubungan keduanya retak. Rakyat ikut terbelah dan pecahlah perang di antara mereka. Kedua belah pihak tidak ada yang menang maupun kalah, hingga kedatangan seorang Minangkabau bernama Daulat pada tahun 1644[215]. Dengan perantaraan Daulat dan VOC, diadakan perdamaian antara keluarga Barus Hulu dan Hilir. Raja Bongsu dinyatakan sebagai raja Barus, sedangkan penguasa Barus Hilir dinyatakan sebagai bendahara. Apabila penguasa Barus Hulu belum dewasa maka bendahara dari Barus Hilir akan menjadi walinya. Putra Raja Bongsu bernama Raja Kecil belum dewasa, sehingga sebagai wali diangkatlah Marah

215. Lihat *Sejarah Raja-raja Barus*, halaman 30.

Sutan, bendahara Barus Hilir. Sesudah Marah Sutan wafat yang menjadi penggantinya adalah anaknya bernama Marah Sihat. Ia memfitnah Raja Kecil di hadapan Daulat. Akibat termakan hasutan ini Daulat menghabisi nyawa Raja Kecil.

Sebagai pengganti Raja Kecil, diangkatlah putranya bernama Sutan Marah Tulang yang saat itu masih dibawah umur. Marah Sihat menjadi walinya dengan gelar Tuanku Bendahara. Sutan Marah Tulang berputra Sutan Menawar Syah yang menjadi pewaris singgasananya. Ia digantikan kembali oleh Sutan Marah Pangkat. Waktu itu Marah Sihat yang telah lanjut usianya masih hidup. Putrinya bernama Putri Sari Gema dinikahkan dengan Sutan Marah Pangkat.

Raja Adil, putra Sutan Marah Pangkat, menggantikan ayahnya pada tahun 1798 dan memperkukuh perjanjian antara Barus dengan negeri-negeri Batak lainnya. Kekuasaan beralih lagi pada Sutan Sailan, putra Raja Adil pada 1824. Perselisihan timbul dengan Sultan Main Alam dari garis keturunan Barus Hilir, karena Sutan Sailan tak memperkenankan Sultan Main Alam mempergunakan benda-benda pusaka kerajaan saat pernikahannya. Guna menghadapi hal ini, Sultan Main Alam meminta pertolongan orang Meulaboh yang berdiam di Kota Kuala Gadang. Mereka mengangkatnya sebagai raja dan menganugerahinya gelar Tuanku Bendahara. Pengangkatan ini menimbulkan ketidak-puasan Sutan Sailan, sehingga permusuhan merebak lagi.

Orang-orang Meulaboh lalu meminta bantuan seorang tokoh dari Aceh bernama Tok Ku Raja Uda yang mendamaikan kedua belah pihak. Akhirnya disepakati bahwa Sutan Sailan menyandang gelar Tuanku Barus dan Sutan Main Alam bergelar Bendahara. Perdamaian antara kedua keluarga penguasa Barus dapat diwujudkan dan kini mereka malah bersatu padu mengusir orang-orang Aceh dari negeri mereka. Keadaan semakin gawat, sehingga Tuanku Barus terpaksa meminta bantuan Belanda menghalau orang-orang Aceh. Seperginya orang-orang Aceh, justru Belanda yang berkuasa di Barus. Segenap urusan pemerintahan dikendalikan oleh Belanda dan raja-rajanya menerima gaji dari pemerintah kolonial. Sultan Sailan digantikan oleh putranya, Sultan Limba' Tua. Raja-raja Barus Hulu berikutnya hingga yang terakhir adalah Sutan Ma'in Intan, Sutan Agama (Sutan Subum), dan Sutan Marah Tulang (–1853).

IV. BATAK

a. Tatanan pemerintahan di tanah Batak sebelum kedatangan Belanda

Kerajaan yang bersifat kesatuan tidak dikenal oleh masyarakat Batak. Kawasan yang didiami oleh suku Batak terbagi menjadi daerah-daerah otonom yang disebut *bius* (republik desa), seperti di daerah Toba. Satuan kemasyarakatan yang disebut *bius* ini berdiri sendiri, baik secara hukum maupun pemerintahannya. Pemimpinnnya adalah orang yang memiliki kelebihan atau karisma dibandingkan orang lain (disebut *magi* atau *sahala*[216]). Di bawahnya masih terdapat satuan-satuan lain yang lebih kecil, yakni *huta* dan *horja*. Pemimpin *huta* dapat pula berupa orang yang dianggap berjasa, umpamanya pendiri desa itu sendiri atau tokoh yang berhasil memajukan perdagangan. Pemimpin semacam ini disebut *raja huta*. Ia membawahi unit politik yang meliputi daerah pertanian milik masyarakat anggota suatu *huta*. Beberapa *huta* membentuk satu *horja*, yang dipimpin oleh *raja punjungan* dan *bius raja parbaringin*. Kedua pemimpin ini hanya melaksanakan fungsi ritual saja, sedangkan urusan pemerintahan ditangani oleh *raja huta*. Beberapa *horja* barulah membentuk suatu *bius*.

Silsilah yang umum beredar di Toba pada hakekatnya adalah silsilah *bius* dan bukannya marga[217]. Menurut tradisi bius yang asli, orang Toba yang tidak dapat membuktikan kewargaannya dalam *bius* tertentu dianggap tak memiliki status kewargaaan. Pada abad ke-16, *bius-bius* yang ada di sekitar Toba disatukan oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai *Harajon* Sisingamangaraja (Kerajaan Sisingamangaraja)[218]. Kendati demikian, tatanan pemerintahan tradisional ini belakangan dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Di Tapanuli Selatan, dikenal satuan kemasyarakatan yang disebut *huria*, di mana kepalanya membawahi beberapa kampung. Sementara itu, di Tanah Karo satuan kemasyarakatan terkecil disebut *rumah siwaluh jabu* dengan *raja jabu* sebagai kepalanya. Beberapa rumah *siwaluh jabu* bergabung membentuk *kuta* dengan penghulu atau raja sebagai pemimpinnya. Berbagai *kuta* yang penduduknya masih satu keturunan bergabung dalam satu *urung*. Susunan pemerintahan tradisional yang berdasarkan hukum adat ini terus berlangsung hingga masuknya kekuasaaan pemerintah kolonial Belanda. Menariknya, masyarakat Karo ada yang menggunakan nama-nama seperti

216. Lihat *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, halaman 27.
217. Lihat *Toba Na Sae*, halaman 31–32.
218. Lihat *Toba Na Sae*, halaman 71.

Sembiring Brahmana, Pelawi, Colia, dan Pandia. Hal ini membuktikan adanya kaitan antara masyarakat daerah itu dengan India.

Masing-masing desa yang bersifat otonom ini kerap bertikai satu sama lain, umpamanya karena masalah tanah pertanian dan lain sebagainya. Kendati demikian, berbagai pemimpin setempat itu ada yang mengakui seorang raja; tetapi bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kesaktiannya. Dengan demikian, ia bukanlah raja dalam artian politis, melainkan lebih ke arah keagamaan. Salah satu contohnya adalah raja-raja bergelar Sisingamangaraja yang berkedudukan di Bakkara. Kepatuhan penduduk terhadap tokoh-tokoh semacam itu sungguh besar. Sebagai contoh, rakyat memercayai bahwa Sisingamangaraja sanggup mengerahkan berbagai kesaktiannya, seperti mendatangkan hujan. Apabila berkecamuk peperangan antara dua daerah dan kebetulan Sisingamangaraja sedang ada di sana, dihentikanlah pertempuran tersebut.
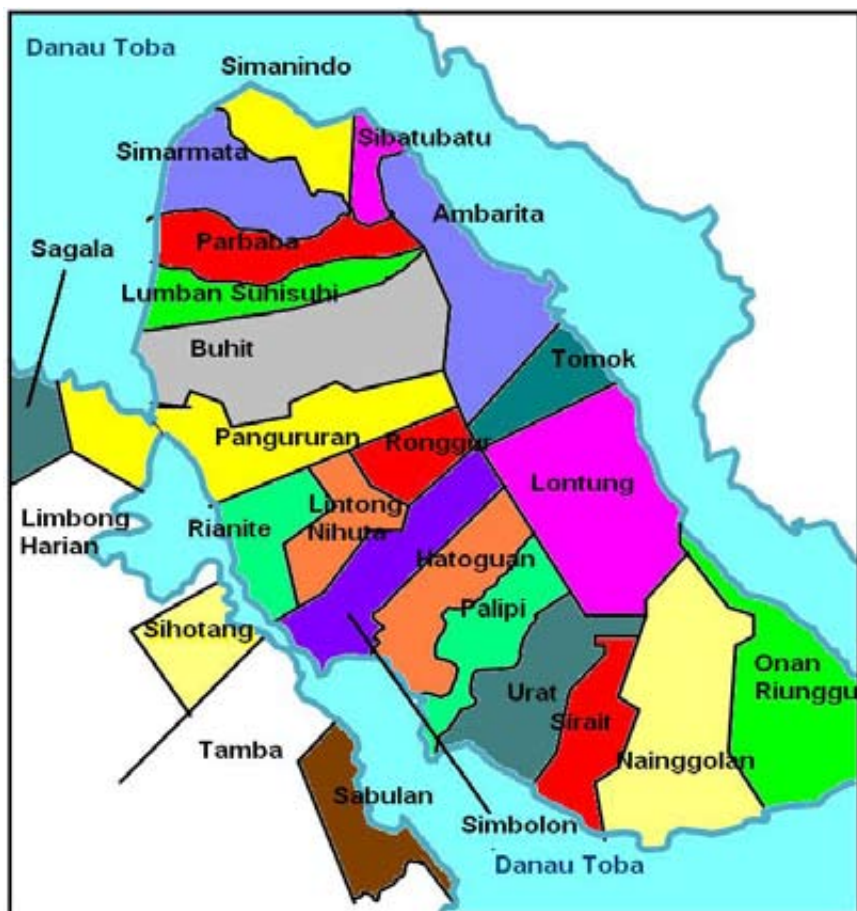
Peta *bius-bius* yang ada di Samosir
Digambar ulang dari *Toba Na Sae*, halaman 89.

Masyarakat Batak mengenal pula sistem pemerintahan yang disebut "raja berempat." Sistem yang tampaknya telah ada sebelum perioda Hindu ini[219] membagi ruang politik menjadi empat–dalam artian ada empat pemuka yang berkuasa. Namanya bermacam-macam:

- *Raja Maropat* di Simalungun
- *Datuk Empat Suku* di Deli
- *Raja Na Opat* di selatan Danau Toba
- *Tuha Peuet* di pesisir barat Aceh
- *Pojo si Opat* di Gayo
- *Raja si Empat* di Alas

Di Silindung, *Raja Na Opat* atau *Raja Parbaringin* terdiri dari raja-raja Hutatoruan, Sitompul, Hutabarat, dan Sipoholon. Mereka dianggap sebagai wakil Sisingamangaraja dan menerima tanda-tanda kekuasaan berupa pisau atau tombak. Para penguasa tersebut bukanlah pemimpin dalam artian biasa, melainkan lebih merupakan pemuka keagamaan yang mewakili sekelompok marga atau submarga tertentu[220]. Pengaruh sistem ini terasa pula hingga pesisir timur laut Deli, yang mengenal *Datuk Empat Suku* atau *Datuk Berempat*. Adapun anggotanya adalah Hamparan Perak, Sukapiring, Sunggal, dan Senembah.

b. Masuknya Pengaruh Eropa di Tanah Batak

Sebagai langkah awal menguasai Batak, Belanda mengirimkan kaum peneliti guna mengenali kondisi kawasan tersebut. Yang paling terkenal di antara mereka adalah seorang ahli bernama van der Tuuk. Dalam rangka penelitiannya, van der Tuuk tinggal di Barus dan bermata-pencaharian sebagai pedagang kopi. Oleh karena kegiatannya itulah, ia banyak bergaul dengan penduduk pedalaman Tanah Batak, sehingga berkesempatan mempelajari budaya mereka. Salah satu karya van der Tuuk adalah Kamus Batak dan Belanda, yang besar peranannya dalam keberhasilan Belanda menguasai Tanah Batak di kemudian hari.

Akibat pengalaman pahit mereka selama Perang Paderi, yakni dipaksa beralih agama dengan kekerasan, masyarakat Batak menjadi mudah curiga terhadap pengaruh asing. Kecurigaan ini menjadi hambatan utama terhadap penyiaran agama Kristen di masa-masa yang lebih kemudian. Lyman dan Muso dua orang penginjil dari Boston,

219. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 126.
220. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 139.

Amerika Serikat, dibunuh oleh rakyat di Lubu Pinang pada 1834, karena alasan yang baru saja disebutkan itu. Rakyat merasa kedatangan para misionaris mengganggu ketentraman hidup mereka. Kegiatan penyebaran agama Kristen yang dirintis oleh misionaris Amerika Serikat itu kemudian diambil alih oleh kegiatan misi Belanda (*zending*). *Nederlandsche Zendings Genotschap* (NZG) mengirimkan misi ke Tanah Batak pada 1856, tentunya dengan berpedoman pada hasil penelitian van der Tuuk.

Misi penyebaran Injil oleh NZG kali ini dipusatkan di Sipirok, daerah Angkola, dengan alasan budaya daerah itu lebih mendekati Batak Toba, yang menjadi sasaran penginjilan mereka. Penginjil pertama yang dikirim ke Sipirok adalah G. van Asselt dengan dibantu oleh Klammer, Heine, dan Bets. Mereka kemudian memulai kegiatan penginjilan mereka ke kawasan kediaman Batak Toba. Daerah yang mula-mula mereka lalui dalam upaya misionaris mereka adalah Sarulla dan Silindung. Kedua kawasan ini memiliki panorama yang indah sekali, sehingga menarik perhatian para anggota *zending* tersebut. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, usaha mereka dalam menyiarkan agama Kristen lebih sukses. Heine sanggup menarik beberapa penduduk menerima keyakinan yang mereka sebarkan itu. Kendati demikian, masih sulit bagi mereka meninggalkan kepercayaan dan tradisi lama yang telah dianut turun-temurun semenjak lama, akibat kuatnya ikatan *dalihan na tolu* dalam masyarakat Batak. Oleh karenanya, dari segi sasaran dan tujuan penginjilan, kegiatan misi yang mereka jalankan belum banyak membuahkan hasil.

Upaya penginjilan terhadap masyarakat Batak diteruskan oleh *Rheinische Mission Geschelschaft* (RMG) yang berasal dari Bremen, Jerman dan beraliran Lutheran. Karena kesanggupannya menyesuaikan diri dengan masyarakat Batak, upaya mereka boleh dikatakan jauh lebih berhasil ketimbang NZG. Pelopor RMG adalah seorang penginjil bernama Dr. L. Nomensen, yang mengawali kegiatan misinya di Barus. Sebelumnya, dengan mengikuti jejak van der Tuuk, ia menelaah dan mempelajari terlebih dahulu dengan saksama kebudayaan Batak. Begitu semua persiapan dirasa telah matang, Nomensen mulai bergerak menuju pedalaman. Ia berhasil mengkristenkan seorang pemuka adat bernama Raja Pontas Lumban Tobing dari Silindung. Karenanya, rakyat Silindung juga berbondong-bondong menerima agama Kristen. Kesuksesan Nomensen ini juga berlaku di daerah-daerah lainnya; di mana hal ini disebabkan ia terlebih dahulu mendekati para raja adat atau pemuka masyarakat setempat. Faktor penunjang keberhasilan lainnya adalah kesediaan Nomensen tidak memerintahkan

penghapusan sama sekali adat istiadat Batak, asalkan tradisi itu tak bertentangan dengan agama Kristen.

Perkampungan Batak di Dukun dekat Dolak Baros
(foto dibuat sekitar 1900)
courtesy of KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

c. Dinasti Sisingamangaraja

Berdasarkan *tarombo* atau silsilahnya, Sisingamangaraja dapat dirunut pada dua orang anak kembar yang diciptakan oleh Debata Mulajadi Nabolon[221]. Mereka kemudian menurunkan Si Raja Batak, yang pada gilirannya menurunkan Guru Tatea (Satia/Tatean) Bulan dan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon mempunyai putra bernama Tuan Sori Mangaraja. Selanjutnya, Tuan Sori Mangaraja memiliki tiga orang putra, yakni Tuan Sorba Dijulu, Tuan Sorba Dijae, dan Tuan Sorba Dibanua. Seterusnya, Tuan Sorba Dibanua secara berturut-turut menurunkan Siraja Oloan, Sitoga Sinambela, Ompu Raja Bonanionan, dan Raja Mangkuntal. Tokoh bernama Raja Mangkuntal ini lahir di Bakkara dan dikenal pula sebagai Sisingamangaraja I.

Konon Raja Sisingamangaraja I pernah menetap di Aceh dan diangkat sebagai panglima seluruh pasukan Aceh di bawah pemerintahan Raja Uti atau Uti Mutiraja. Tokoh ini merupakan paman Sisingamangaraja I. Dengan demikian, dinasti Sisingamangaraja dapat dianggap sebagai pewaris kerajaan pamannya[222]. Belakangan Sisingamangaraja diangkat sebagai wakil sultan Aceh di Tanah Batak dengan menerima dua bilah pedang yang masing-masing bernama *Jonang Pohan* dan *Gadjah Dampak*

221. Lihat *Sejarah Batak*, halaman 13.
222. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*, halaman 136 serta catatan kaki no 6 & 7 di halaman yang sama.

(*Gajah Dompak*), sebuah tikar bernama *Kaomasan*, dan seperangkat alat makan emas.

Raja Tinaruan menggantikan Raja Mangkuntal sebagai Sisingamangaraja II. Kemudian para raja bergelar Sisingamangaraja yang berkuasa di daerah Bakkara adalah sebagai berikut: Raja Itubungna (Sisingamangaraja III), Sori Mangaraja (Sisingamangaraja IV), Ampallongos atau Raja Pallongos (Sisingamangaraja V), Ampanggulbuk atau Raja Pangulbuk (Sisingamangaraja VI), Ompu Tuan Lombut (Sisingamangaraja VII), Ompu Sotaronggal (Sisingamangaraja VIII), Ompu Sohalompoan (Sisingamangaraja IX), Ompu Tuan Nabolon (Sisingamangaraja X), Ompu Sohahuaon (Sisingamangaraja XI), dan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu (Sisingamangaraja XII).

Menurut buku karya Adniel L. Tobing, Raja Sisingamangaraja I pernah mengunjungi Barus dan bertemu Raja Uti. Sesudah menyaksikan penampilan dan keajaiban yang diperlihatkan Sisingamangaraja I, yakinlah Raja Uti bahwa beliau bukanlah orang biasa saja. Apalagi Sisingamangaraja mengatakan kalau di tempat kediaman Raja Uti terdapat benda-benda pusaka yang bahkan pemiliknya sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Mulanya Raja Uti tidak percaya, karena ia merasa mengetahui seluruh harta pusaka miliknya. Bahkan Raja Uti sampai berjanji, bila benar apa yang dikatakan Sisingamangaraja itu, maka benda-benda pusaka itu boleh menjadi miliknya. Ternyata benarlah yang dikatakan Sisingamangaraja. Beliau berhasil menunjukkan benda-benda pusaka yang dimaksudnya. Sesuai dengan janjinya, Raja Uti menyerahkan benda-benda tersebut pada Sisingamangaraja, yang ternyata berupa sebilah keris dan sebatang tombak. Keduanya masing-masing kemudian dinamakan Gajah Dompak dan Hujur Siringis[223]. Dengan demikian, di sini terdapat perbedaan versi mengenai asal-muasal Gajah Dompak. Masih menurut sumber yang sama Sisingamangaraja I tidak meninggal seperti layaknya manusia biasa, melainkan lenyap secara gaib.

Sisingamangaraja II atau Raja Tinaruan konon pernah melakukan keajaiban sewaktu penduduk Laguboti dilanda kemarau panjang. Beliau menancapkan tongkatnya ke tanah dan memancar keluarlah air yang sanggup menyelamatkan warga Laguboti dari kekeringan. Kini kawasan itu dikenal sebagai Sumur Sisingamangaraja. Dari permaisurinya, Boru Situmorang, Sisingamangaraja II dikaruniai seorang anak

223. *Lihat Sedjarah Sisingamangaraja I-XII*, halaman 16.

bernama Raja Itubungna, yang dikandung selama 18 bulan. Bahkan kelahirannya juga disertai guruh, angin topan, dan gempa bumi[224]. Raja Itubungna dinobatkan sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Sisingamangaraja III. Beliau menikah dengan permaisuri Boru Situmorang dari negeri Urat di Samosir. Semasa pemerintahan beliau dikeluarkanlah peraturan-peraturan baru, antara lain suatu perkampungan hanya boleh didirikan atas izin *raja parbaringin*.

Sori Mangaraja, putra Sisingamangaraja III menggantikan ayahnya dengan gelar Sisingamangaraja IV. Masih menurut Adniel L. Tobing, sewaktu berkunjung ke kampung Tagahambing, beliau berpakaian layaknya pengemis dan meminta air pada warga di sana. Namun tak seorangpun bersedia memberikannya. Oleh karena itu, beliau lantas mengutuk kampung tersebut akan dilanda banjir. Benarlah apa yang dikatakan beliau, karena tiga hari kemudian keluarlah air dengan derasnya dari akar-akar pepohonan di kampung tersebut dan membanjirinya[225]. Berbeda dengan para pendahulunya, Sisingamangaraja IV tidaklah menghilang secara gaib. Jenazah beliau dimakamkan di suatu tempat yang tinggi.

Raja Pallongos menggantikan ayahnya sebagai Sisingamangaraja V. Sewaktu ayahnya wafat, beliau masih di bawah umur; kendati demikian, Raja Pallongos telah sanggup menghunus keris Gajah Dompak serta memenuhi syarat-syarat lainnya. Oleh karena itu, sesuai aturan adat beliau boleh dinobatkan sebagai Sisingamangaraja V. Beliau menikah dengan seorang wanita dari suku Lumban Toruan dan dikaruniai seorang putra bernama Raja Pangulbuk yang kelak menjadi Sisingamangaraja VI. Konon Raja Pangulbuk sanggup memanggil burung-burung dari hutan. Ketika hujan turun, curahan air dari langit itu sekonyong-konyong akan membuka jalan bagi Sisingamangaraja VI sehingga beliau tidak basah[226]. Terdapat pula kepercayaan yang menyatakan bahwa Sisingamangaraja VI memiliki lidah berbulu.

Seiring berjalannya waktu, Sisingamangaraja VI wafat dan digantikan oleh Ompu Tuan Lombut selaku Sisingamangaraja VII. Beliau sangat memerhatikan rakyatnya dan berkat kesaktiannya, beliau mengetahui siapa saja yang berbuat kejahatan, sehingga dapat langsung dijatuhi hukuman. Sewaktu permaisurinya, Boru Nainggolan, mengandung, ia meminta disediakan makanan berupa jantung kuda. Kendati demikian, sampai lewat waktunya, belum juga putranya itu dilahirkan, sehingga

224. *Lihat Sedjarah Sisingamangaraja I-XII*, halaman 19.
225. Lihat *Sedjarah Sisingamangaraja I-XII*, halaman 21.
226. Lihat *Sedjarah Sisingamangaraja I-XII*, halaman 24.

Sisingamangaraja VII memanjatkan doa pada Tuhan. Akhirnya lahirlah putra beliau yang diberi nama Ompu Sotaronggal.

Putra beliau ini sepeninggal ayahnya dinobatkan sebagai Sisingamangaraja VIII. Kendati usianya masih muda, ia telah sanggup memikul tanggung jawabnya dengan baik. Beliau pernah mengunjungi raja-raja di Sumatera Timur dan Simalungun. Saat itu, beliau memperlihatkan keajaibannya dengan memerintahkan buah durian berjatuhan dari pohonnya. Selain itu, beliau juga sanggup memanggil kerbau yang tengah berkeliaran di padang rumput. Kerbau itu lantas disembelih dan dagingnya dihidangkan pada Sisingamangaraja VIII. Kepada rakyatnya, beliau berpesan agar menggantung daun-daunan di atas pintu serta menyembelih kerbau, babi, dan ayam putih, guna menangkal wabah sambar yang tak lama akan mengganas di negeri itu[227]. Sisingamangaraja VIII dikaruniai dua orang putra, yang salah seorang di antaranya bernama Ompu Sohalompoan. Ia kemudian dinobatkan sebagai Sisingamangaraja IX.

Raja Sisingamangaraja IX mengadakan perjanjian dengan Sultan Alauddin Mahmud Syah Juhan (Alauddin Muhammad Syah) dari Aceh. Tujuannya adalah membendung pengaruh kolonialisme bangsa Barat di Sumatera. Berdasarkan kesepakatan di atas, Raja Sisingamangaraja IX menyerahkan Singkel dan Uti Kiri pada Aceh. Sebaliknya, Aceh menyerahkan pelabuhan Pansur dan Uti Kanan beserta ibukotanya, Lipatkajang, pada Raja Sisingamangaraja IX. Simalungun diakui sultan Aceh sebagai daerah pengaruh dinasti Sisingamangaraja dan Karo diakui sebagai daerah pengaruh Aceh. Pelabuhan Barus menjadi daerah netral yang tak akan dipertengkarkan kedua belah pihak.

Semasa pemerintahan Raja Sisingamangaraja X, pecah Perang Paderi, dan beliau menjadi salah satu korbannya karena dihabisi nyawanya oleh pasukan Paderi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1819 dan kurang lebih bersamaan dengannya lahirlah Ompu Sohahuaon, yang kelak menjadi Sisingamangaraja XI. Ompu Sohahuaon mengikuti pendidikan militer di Aceh antara tahun 1843–1845 dan bahkan menjadi sahabat karib Sultan Mahmud Syah II (1870–1874) dari Aceh. Raja Sisingamangaraja XI pernah menerima kunjungan van der Tuuk pada tahun 1853, yang menyamar sebagai "Raja Lambung" atau putra Sisingamangaraja IX dari ibu boru Nainggolan. Sebelum wafat, raja dinasti Sisingamangaraja ini berkunjung ke Tarutung dan singgah di rumah pendeta *zending* Dr. L. Nomensen di Huta Dame pada tahun 1861.

227. Lihat *Sedjarah Sisingamangaraja I-XII*, halaman 25.

Semasa pemerintahan Sisingamangaraja XII yang menggantikan Sisingamangaraja XI, pemerintah kolonial berniat memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak. Tentu saja hal ini ditentang keras oleh beliau. Dengan alasan melindungi para misionaris dari serangan pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung. Namun, penempatan ini juga dimaksudkan mempersempit ruang gerak Sisingamangaraja XII. Para pejuang Batak tidak tinggal diam dan melancarkan serangannya pada tahun 1877 terhadap Tarutung dengan tujuan mengusir Belanda dari sana. Pertempuran pecah di Bahalbatu, yang berlokasi di antara Tarutung dan Balige. Pasukan Sisingamangaraja saat itu dipimpin oleh Ompu Badia Porhas Tampubolon, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Kapten Schelter. Kendati demikian, karena jumlah pasukan dan persenjataan yang tidak seimbang, pihak Sisingamangaraja terpaksa mengundurkan dirinya dan melakukan perang gerilya. Peristiwa inilah yang merupakan awal Perang Batak atau disebut *Batak Oorlog* oleh Belanda.

Sisingamangaraja XII berhasil menarik raja-raja Tanah Batak lain, seperti di Simalungun dan Karo, bersatu padu mengusir Belanda dari tanah air mereka. Guna memadamkan perlawanan ini, Belanda menyerang Bakkara dengan kekuatan pasukan berjumlah 400 orang. Kedatangan pasukan Belanda disambut dengan tembakan oleh para pengikut Sisingamangaraja. Kendati demikian, mereka terpaksa mengundurkan diri karena jumlah pasukan yang tak seimbang dan membangun pertahanan di Meat, Balige, Tambunan, dan Lagugoti. Belanda melakukan pengejaran hingga Paranginan dan Gurgur. Sementara itu, di Balige sendiri telah bersiap 1.200 pejuang Batak. Namun, mereka mengundurkan dirinya karena Belanda menggunakan senjata berupa mortir. Demi menebarkan ketakutan dalam diri rakyat, pasukan kolonial membakari rumah-rumah dan memaksa penduduk mengakui kedaulatan Belanda.

Berbagai kawasan di Tanah Batak satu persatu jatuh ke tangan Belanda, tetapi Sisingamangaraja XII terus bergerilya dan melancarkan serangan-serangan baik besar ataupun kecil bila saatnya dirasa tepat. Pada tahun 1883, Belanda menempatkan kontrolirnya di Balige. Pasukan Batak menyerang Balige dari berbagai penjuru, tetapi tidak membuahkan hasil berarti. Belanda kemudian menduduki Laguboti, Tanggabatu, dan Peranginan. Tentu saja, setiap gerak maju Belanda menghadapi perlawanan gigih dari para pejuang Batak.

Perlawanan di Tanah Batak ini terus berlarut-larut dan berlangsung hingga abad ke-20. Sementara itu, timbul desakan agar keamanan di kawasan tersebut segera

dipulihkan. Karenanya, Belanda mendatangkan Kapten H. Christoffel yang telah berpengalaman memadamkan pemberontakan di Kalimantan dan Lombok. Operasi penangkapan terhadap Sisingamangaraja segera digelar. Saat itu, Sisingamangaraja XII berada dalam posisi yang sulit. Demi menghindari pengejaran oleh Belanda, beliau harus kerap berpindah-pindah tempat kediaman. Akhirnya, pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur karena tertembak oleh pasukan H. Christoffel.

Perjuangan Sisingamangaraja XII dilanjutkan dalam bentuk aliran-aliran kepercayaan, seperti Parmalim dengan Guru Somalaing Pardede sebagai tokohnya, Parsiakbagi atau Parugama di bawah pimpinan Jaga Siborutorop, dan Parhudamdam. Berbagai aliran keagamaan itu memusatkan kepercayaannya di seputar sosok Sisingamangaraja, yang mereka anggap sebagai orang suci. Belanda melakukan penindasan terhadap berbagai aliran ini.

Raja Barita, salah seorang putra Sisingamangaraja XII diberi kesempatan memegang jabatan sebagai asisten Demang[228]. Ia diizinkan menuntut ilmu di Jawa dan setelah menamatkan pendidikannya dalam bidang hukum, kembali ke Sumatera serta bekerja di kantor residen Sibolga. Selanjutnya, beliau pindah bekerja di kantor kontrolir Nias. Raja Barita menikah dengan putri kepala negeri Porsea, Raja Manurung. Pesta pernikahannya berlangsung selama tiga hari tiga malam (sehari untuk penduduk, sehari untuk pemerintah, dan satu hari untuk pesta adat) dengan dihadiri ribuan warga. Ternyata pemerintah kolonial bersedia membiayai pesta tersebut. Kedua putra Sisingamangaraja XII lainnya yang masih hidup, Raja Sabidan dan Raja Buntal masing-masing menikahi putri Raja Puitu Padang dari Sipirok (1939) serta putri *sibayak* Sarinembah di Karo (1940). Pada 14 Juni 1953, dilakukan penggalian kembali tulang belulang Sisingamangaraja XII guna dimakamkan di Soposurung, Balige. Pejuang yang gigih dari Tanah Batak ini kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada 9 November 1961, berdasarkan Keppres No. 590 Tahun 1961.

d. Kerajaan-kerajaan di Tanah Angkola

Belanda menaklukkan Sipirok pada tahun 1847. Salah seorang raja yang berpengaruh di *luhak* Sipirok adalah Sutan Doli yang berkedudukan di Bungabondar.[229] Pemerintah kolonial Belanda berniat memberikan jabatan kepala *kuria* padanya.

---

228. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 240.
229. Lihat *Perihal Bangsa Batak*, halaman 48.

Namun, beliau enggan menerimanya dan mengatakan tak bersedia diperbudak orang kulit putih. Baginya sudah cukup memerintah rakyat dan pengikutnya. Jabatan itu kemudian diserahkannya pada salah seorang kerabat dekatnya bernama Baringin.

e. Kerajaan-kerajaan di Tanah Mandailing

Di daerah Mandailing pernah ada beberapa kerajaan seperti Huta Godang, Huta Siantar, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya akan diuraikan di bawah ini. Raja yang memerintah di Tanah Mandailing dikenal dengan sebutan panusunan, yang berkedudukan di induk kampung. Sementara itu, di bawahnya terdapat raja pamusuk. Setelah Belanda menguasai Mandailing, berlangsung perombakan terhadap kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kuria, di mana hal ini bertentangan dengan adat yang lama. Akibatnya kerap terjadi perebutan jabatan kepala kuria, di mana hal ini memang dikehendaki pemerintah kolonial dengan politik pecah belahnya.[230] Empat belas orang kepala kuria, pada 16 Agustus 1922 menyatakan di Kayu Laut, bahwa Mandailing merupakan salah satu luhak (daerah kecil) di Tanah Batak. Maknanya, Mandailing merupakan bagian suku bangsa Batak.[231] Kendati demikan, pernyataan ini ditolak oleh perkumpulan bernama Syarikat Mandailing yang telah berdiri semenjak 31 Desember 1921. Akibatnya berlangsung persidangan di Batavia. Pengadilan kemudian mengundang seorang ahli bernama Mr. H. Wageningen. Hasilnya dinyatakan bahwa Mandailing bukanlah Batak. Pada tahun 1946, Dr. F. L. Tobing, residen Tapanuli, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Tapanuli menetapkan agar para raja (kepala kuria, kepala luhat, kepala negeri, dan kepala kampung) diberhentikan dari jabatannya, karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi (surat ketetangan tanggal 14 Maret 1946 no: 274 dan tanggal 11 Januari 1947 No: 1/ D.P.T). Demi memudahkan para pembaca berikut ini akan ditampilkan silsilah para raja di Mandailing yang disederhanakan.

230. Lihat *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, halaman 30-31.
231. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 118.

- Anak Alang Manualang
  - Daeng Suryya (Namora Pande Bosi I)
    - Sutan Bugis
      - Angin Bugis (Namora Pande Bosi II)
        - Daeng Malea
          - Daeng Malela (Namora Pande Bosi III)
            - Si Langkitang
              - Jambuek Nangge
                - Raja-raja SINGENGU
            - Si Baitang
              - Marangin
                - Jasatara
                  - Raja Naga Bosar
                    - Raja-raja HUTA NA GODANG
                  - Sutan Pangimpalan
                    - Jasatara
                      - Raja-raja MANAMBIN
                    - Namora Songal
                - Namora Sende Tua
                  - Jamantiko
                    - Sutan Mogal
                      - Gumanti Porang
                        - Raja-raja PAKANTAN DOLOK
                      - Sutan Borayun
                        - Raja-raja PAKANTAN LOMBANG
              - Alogo
                - Si Payaman
                  - Sutan Naparas
                    - Raja-raja TAMIANG

Silsilah raja-raja Mandailing yang disederhanakan
Disarikan dari: Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing

i. HUTA GODANG (HUTA NA GODANG)

Kerajaan Huta Godang berpusat di Ulu Pungkut, yakni 20 km dari Kotanopan. Konon leluhur kerajaan ini berasal dari Manambin, salah satu kerajaan tertua di Mandailing, yang letaknya tidak jauh dari Huta Godang. Raja-rajanya yang bermarga Lubis merupakan keturunan seorang tokoh bernama Namora Pande Bosi[232]. Menurut salah satu sumber, leluhur Namora Pande Bosi yang bernama Angin Bugis berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan[233]. Dengan perahunya, ia melayari sungai Barumun dan tiba di Hutapanopaan (Hutanopan)[234]. Di tempat tersebut, ia

232. Lihat http://www.mandailing.org/ind/asal-ren2.html (diunduh tanggal 27 Desember 2009).
233. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 29.
234. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 32.

memiliki seorang anak bernama Anak Alang Manualang yang kemudian bergelar Sutan Bugis I. Ia kemudian berputra Daeng Suryya yang bergelar Namora Pande Bosi I. Beliau merupakan tokoh yang disegani karena kepandaiannya dalam membuat ukir-ukirannya dari besi. Silsilah keturunan beliau selanjutnya adalah sebagai berikut: Daeng Suryya (Namora Pande Bosi I)➔Sutan Bugis➔Angin Bugis (Namora Pande Bosi II)➔Daeng Malea➔Daeng Malela (Namora Pande Bosi III)[235]. Daeng Malela mempunyai anak kembar yang masing-masing bernama Langkitang dan Baitang.

Selanjutnya, Baitang mempunyai dua orang anak, yakni Marangin (Jamuara) dan Alogo (Japartomuan). Marangin berputra dua orang, yakni Jasatara dan Namora Sende Tua. Ia memerintahkan Namora Sende tua menyusuri sungai Batang Gadis. Selanjutnya, putra beliau bernama Jasatara diperintahkan menyusuri sungai Ulu Pungkut. Jasatara memiliki dua orang putra, yang pertama bernama Raja Naga Bosar. Beliau membuka pemukiman di Huta Godang dan menjadi raja pertamanya[236]. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa sebelum berkedudukan di Huta Godang, para raja negeri ini memerintah dari sebuah tempat yang tak jauh letaknya bernama Huta Dolok. Tetapi setelah Islam masuk ke Mandailing barulah pusat pemerintahan dipindahkan ke Huta Godang (berarti Kampung Besar).

Pada abad ke-19 atau semasa berkecamuknya Perang Paderi yang berkuasa di sini adalah Raja Gadombang. Daerah Mandailing pernah mengalami penderitaan akibat serbuan pasukan Paderi yang berniat memaksakan prinsip-prinsip mereka dengan kekerasan. Oleh karenanya, salah seorang raja Mandailing bernama Raja Gadombang bangkit melawan kaum Paderi yang dianggapnya melanggar hak-hak azasi rakyat Mandailing. Kendati demikian, Raja Gadombang gugur dalam pertempuran yang terjadi di antara Rao dan Lubuk Sikaping pada tahun 1835. Raja Gadombang tidak memiliki anak, sehingga adik beliau bernama Sutan Mangkutur diangkat sebagai penggantinya. Karena teringat akan penderitaan akibat serangan kaum Paderi, Sutan Mangkutur senantiasa mencurigai pengaruh asing yang hendak menanamkan kekuasaannya di Mandailing. Sementara itu, menurut sumber lainnya, Raja Gadombang dikatakan mempunyai putra, yakni Sutan Mangkutur dan Raja Mangatas.[237]

235. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 34.
236. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 165.
237. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 144.

Setelah Tapanuli Selatan jatuh ke tangan Belanda, demi mengurangi kekuasaan penguasa-penguasa setempat, Belanda menghapuskan hak para raja menggelar pengadilan. Kini segala perkara harus diselesaikan di lembaga peradilan pemerintah kolonial. Hal ini berlaku pula bagi raja-raja Mandailing. Apabila terdapat perkara yang diajukan pada mereka, para raja wajib hadir sendiri pada kantor peradilan Belanda di Singengu, tanpa boleh diwakili orang lain. Peraturan baru ini mulai efektif semenjak tanggal 28 Juli 1837. Apabila para raja tidak mematuhinya, mereka akan didenda atau dikenai sanksi oleh Belanda. Pengalaman akibat penindasan kaum Paderi, mendorong Sutan Mangkutur membangkang kebijaksanaan Belanda yang bertujuan menginjak-injak adat istiadat setempat tersebut.

Pada mulanya perlawanan hanya diwujudkan dalam bentuk pembangkangan saja. Tetapi karena Belanda terus-menerus menggerogoti kekuasaan para raja, akhirnya Sutan Mangkutur merasa bahwa Belanda perlu dilawan dengan kekerasan. Sutan Mangkutur bersama raja-raja Mandailing lain menggelar pertemuan rahasia dan mengikat sumpah saling bahu membahu menghadapi penjajah. Sebelum melancarkan serangannya pada tahun 1839, Sutan Mangkutur telah mengadakan kesepakatan dengan raja Huta Siantar; yakni apabila Sutan Mangkutur menyerang dari Huta Godang ke Kota Nopan, maka Raja Huta Siantar akan menyerang dari arah Penyabungan. Sayangnya, raja Huta Siantar ternyata berbalik memihak Belanda; sehingga rencana ini bocor ke telinga pemerintah kolonial.

Belanda terlebih dahulu menyerbu kedudukan pasukan Sutan Mangkutur di Huta Godang. Pertempuran segera pecah dan beberapa perwira Belanda tewas dalam konflik senjata ini. Pasukan Sutan Mangkutur melakukan pengejaran terhadap pasukan Belanda yang telah mengundurkan dirinya hingga mendekati Kota Nopan. Meskipun demikian, karena telah memihak Belanda, raja Huta Siantar tidak mengirimkan bala bantuan yang dijanjikannya. Dengan dibantu oleh para hulubalangnya, seperti Ja Layang, Sampuran Tolang, Balang Garang, Langa Lalupak, dan Manimba Laut, Sutan Mangkutur terus bertahan. Kendati demikian, lama-kelamaan mereka mulai terdesak

Serangan dilancarkan pasukan Belanda dengan dibantu oleh raja Huta Siantar terhadap Huta Godang, yang menjadi pusat pemerintahan Sutan Mangkutur. Saat itu, Sutan Mangkutur sedang berada dalam persembunyiannya, sehingga pasukan musuh berniat membakar istana Bagas Godang. Istri Sutan Mangkutur menangis

dan memohon agar tempat kediamannya jangan dibakar. Raja Huta Godang bersedia mengurungkan niatnya, asalkan ditunjukkan tempat persembunyian suaminya. Semula, istri Sutan Mangkutur menolaknya. Kendati demikian, dengan licik Belanda menyatakan bahwa mereka ingin berdamai dengan beliau dan bersedia menjamin keselamatannya. Istri Sutan Mangkutur termakan oleh siasat ini dan berjanji mengirim utusan guna menemui suaminya. Tanpa dinyana oleh mereka, Belanda memerintahkan anggota pasukannya mengikuti utusan ini secara diam-diam. Sutan Mangkutur langsung ditangkap dan diasingkan ke Ambon pada 1839[238]. Selanjutnya yang berkuasa di Huta Godang adalah Raja Junjungan Lubis, selaku raja terakhir di kerajaan tersebut.

ii. HUTAIMBARU

Putra keempat Raja Dandani bernama Jamanindi berpindah ke Hutaimbaru[239]. Pada abad ke-20 yang menjadi raja Hutaimbaru adalah Daulat Raja Gorga Alamsyah Harahap. Beliau pernah menganugerahkan marga Harahap pada di tahun 1925 pada Prof. Mr. Hazairin yang berasal dari Bengkulu. Ketika itu, Prof. Mr. Hazairin menjabat sebagai ketua pengadilan negeri di Padang Sidempuan. Penganugerahan marga itu disebabkan jasa Prof. Mr. Hazairin dalam menggali adat istiadat Tapanuli Selatan.[240]

iii. HUTA SIANTAR

Negeri Huta Siantar dan Panyabungan mulanya sama-sama berada di bawah pemerintahan Patuan Moksa Nasution[241]. Sementara itu, menurut Mhd. Arbain Lubis, kerajaan ini terletak di kawasan yang sebelumnya bernama Banjar Sibaguri. Saat itu, orang-orang Melayu bserta Pagaruyung yang bermukim di sana menghadap Baginda Mangaraja Enda, yang merupakan raja di kerajaan marga Nasution[242], guna memohon agar salah seorang putranya diperkenankan menjadi raja di Banjar Sibaguri. Konon, kemudian diadakan semacam perlombaan menjangkau keris sakti yang diikuti oleh putra-putra Baginda Mangaraja Enda. Yang berhasil

238. Menurut *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 145 dan 146, Sutan Mangkutur diasingkan ke Ternate; sedangkan Raja Mangatas diasingkan ke Cimahi, tetapi belakangan diizinkan kembali Huta Godang.
239. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 126.
240. Lihat Adat Istiadat Tapanuli Selatan, halaman 160.
241. Lihat *Perihal Bangsa Batak*, halaman 47.
242. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 232-233. Pada halaman 232 tercantum tarombo atau silsilah Baginda Mangaraja Enda sebagai berikut: Si Baroar Nasakti gelar Sutan Diaru➔Tuan Moksa➔Tuan Natoras➔Baginda Mangaraja Enda.

memenangkannya adalah Sutan Kumala. Beliau kemudian menjadi raja pertama Huta Siantar dan bergelar Sutan Kumala Sang Hiang Sipertuan Raja Kerajaan Mandailing. Semasa pemerintahannya, berlangsung pemberontakan di Janji Lobi, namun berhasil dipadamkan. Belakangan kerajaan ini pecah menjadi dua. Sutan Yang Dipertuan memerintah di Huta Siantar; sementara itu saudaranya bernama Tuan Raja Sian memerintah di Panyabungan. Pada 1845, Yang Dipertuan di Huta Siantar beserta Batara Guru di Panyabungan masing-masing merupakan keturunan keenam serta ketujuh dari Sutan Yang Dipertuan dan Tuan Raja Sian.

iv. LUMBAN BALIAN (TAMIANG)

Cikal-bakal kerajaan Lumban Balian yang kemudian berganti nama menjadi Tamiang adalah Raja Bangun dengan gelarnya Jabangun Batari Namolas. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian mengenai Kerajaan Huta Godang. Jasatara memiliki dua orang, yang pertama Raja Naga Bosar merupakan pendiri Kerajaan Huta Godang; sedangkan putra keduanya bernama Sutan Pangimpalan. Beliau memiliki enam orang enam; yakni Jasatara (Sapala raja Manambin)-pindah ke Manambin dan menjadi raja di sana; Jamujang-pergi ke Batu Nanggar; Jasitombol-pergi ke Tolang Dolok; Sutan Porang-pergi ke Simpang Tolang; Japalaon-pergi ke Tolang Lombang; dan Raja Bangun[243].

Raja Bangun memiliki tiga orang anak, yakni Namora Songal, Jalelo, dan Jametar. Putra ketiganya, Jametar, gugur semasa mudanya dalam mempertahankan Kerajaan Lumban Balian. Belakangan kedudukan raja Lumban Balian beralih kepada Si Payaman yang merupakan keturunan Si Alogo (Japartomuan). Kemudian, Si Payaman mendudukkan putranya bernama Sutan Naparas menjadi raja. Semenjak saat itu, Lumban Balian berganti namanya menjadi Tamiang. Dengan demikian, Sutan Naparas merupakan raja Tamiang pertama. Selanjutnya sepeninggal Sutan Naparas, Tamiang secara silih berganti diperintah oleh Raja Dolok, Sutan Naparas II, Baginda Raja, Sutan Guru, Sutan Naparas III (1830-1849), Sutan Panusunan (1849-1875), Patuan Dolok (1875-1903), Sutan Guru Panusunan (1903-1915), Sutan Kumala Bulan (1915-1932), dan Patuan Dolok (1932-1946)[244]. Sutan Naparas III merupakan kepala *kuria* pertama di Tamiang.

243. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 165-166.
244. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 171.

Sutan Panusunan merupakan pemimpin yang senantiasa berpihak pada rakyatnya. Oleh karena itu, residen Padang Sidempuan mengeluarkan surat peringatan bertanggal 26 Juli 1872 pada Sutan Panusunan agar beliau jangan terlalu berpihak pada rakyatnya. Namun, beliau tidak tahan dengan penderitaan rakyatnya yang dipaksa kerja rodi oleh Belanda. Melalui surat bertanggal 23 Juni 1875, ia meminta berhenti dan digantikan putranya, Patuan Dolok[245]. Kendati demikian, putranya juga tidak sampai menyaksikan penindasan rakyatnya oleh Belanda dan mengundurkan diri pada tahun 1903. Sutan Kumala Bulan (lahir tanggal 8 Maret 1888[246]) juga merupakan raja yang gigih membela rakyatnya dari kekejaman Belanda. Beliau dengan berani mengecam pemerintah Belanda dalam tulisannya di surat kabar Pewarta Deli tahun 1912 (menggunakan nama samaran Flora). Dalam tulisan tersebut, ia menyindir penjajah dengan menyebutkan adanya dua sistem hukum diterapkan mereka[247]; yang satu adalah hukum berlaku bagi penjajah, di mana tentunya menguntungkan mereka sendiri. Sementara itu, hukum satunya lagi berlaku bagi bangsa terjajah, yang tentu saja bersifat memberatkan. Pada tahun 1946, para kepala *kuria* di Mandailing diminta melepaskan jabatannya; bersamaan dengan itu, berakhirlah ke*kuria*an Tamiang.

v. MANAMBIN

Kerajaan Manambin didirikan oleh Jasatara, putra Sutan Pangimpalan (saudara Raja Naga Bosar dari Huta Godang).

vi. PAKANTAN DOLOK

Di Tanah Mandailing terdapat pula kerajaan Pekantan Dolok[248] yang pernah diperintah oleh Raja Gumanti Porang Dibata. Raja Gumanti Porang ini merupakan putra kedua Jamalaon yang menetap di Silogun. Beliau diutus ayahnya menjadi raja di Pekantan Dolok[249]. Parlindoengan Loebis dalam karyanya menyebutkan bahwa raja sangat dicintai oleh rakyatnya dan disegani oleh pemerintah Belanda. Menurut buku karya Pendeta Thysen dari *Rheinische Missions Gesellschaft* (RMG),

245. Lihat *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin Rakyat, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912-1932*, halaman 18.
246. Lihat *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin Rakyat, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912-1932*, halaman 4.
247. Lihat *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin Rakyat, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912-1932*, halaman 1 dan 2.
248. Lihat *Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi NAZI*, halaman 10.
249. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandaliling*, halaman 159.

beliau disebut raja yang paling disegani di Mandailing. Raja Gumanti Porang Dibata mempunyai tiga orang istri: yang pertama bermarga Lintang dan berasal dari Pekantan; yang kedua berasal dari Gunungtua Penyambungan; yang ketiga adalah keturunan Belanda bernama Bagon. Penggantinya adalah Sutan Soripada Machodum, yakni putranya dengan istri pertama.

Raja Gumanti Porang Dibata
Sumber: http://www.mandailing.org/Eng/old%20pics/pages/
Fuerst%20Gumanti%20von%20Pekanten.html
(atas izin Bapak Abdur-Razzaq Lubis)

vii. PAKANTAN LOMBANG

Raja Pekantan Lombang merupakan putra ketiga Jamalaon dari Silogun yang bernama Sutan Borayun[250]. Dengan demikian, kerajaan ini masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Pekantan Dolok.

viii. SINGENGU

Raja-raja Singengu merupakan keturunan Langkitang atau Silangkitang. Garis silsilahnya adalah sebagai berikut: Silangkitang➔Jabuek Nangge➔ Namora Na

250. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, halaman 159.

Godang➔ Jabuek Nangge[251]. Jabuek Nangge berputra Namora Raya, yang diutus ayahnya ke Roburan Tua demi mengamankan kawasan tersebut. Pada masa itu, kawasan tersebut kerap dilanda pertikaan antar kelompok yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan, saudara Namora Raya bernama Sang Hiang Silembe menjadi raja di Singengu. Sang Hiang Silembe berputra Namora Na Godang, yang pada gilirannya mempunyai putra juga bernama Sang Hiang Silembe.

f. Kerajaan-kerajaan di Tanah Karo

Sebelum kedatangan Belanda, di Tanah Karo terhadap para *kesain*, selaku pemuka masyarakat yang mengepalai kelompok keluarga atau marga. Beberapa keluarga ini kemudian tergabung dalam satu *kuta* (desa atau kampung) yang dikepalai *raja kuta*. Di atasnya terdapat lagi satuan kemasyarakatan yang disebut *urung* dengan *raja urung* sebagai pemimpinnya. Setelah kedatangan bangsa Belanda *urung-urung* ini disatukan menjadi *sibayak*, yang dapat disetarakan dengan kerajaan. Saat itu terdapat lima *sibayak* di Tanah Karo, yakni Barus Jahe, Kuta Buluh, Lingga, Sarinembah, dan Suka

251. Lihat *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandaliling*, halaman 61.
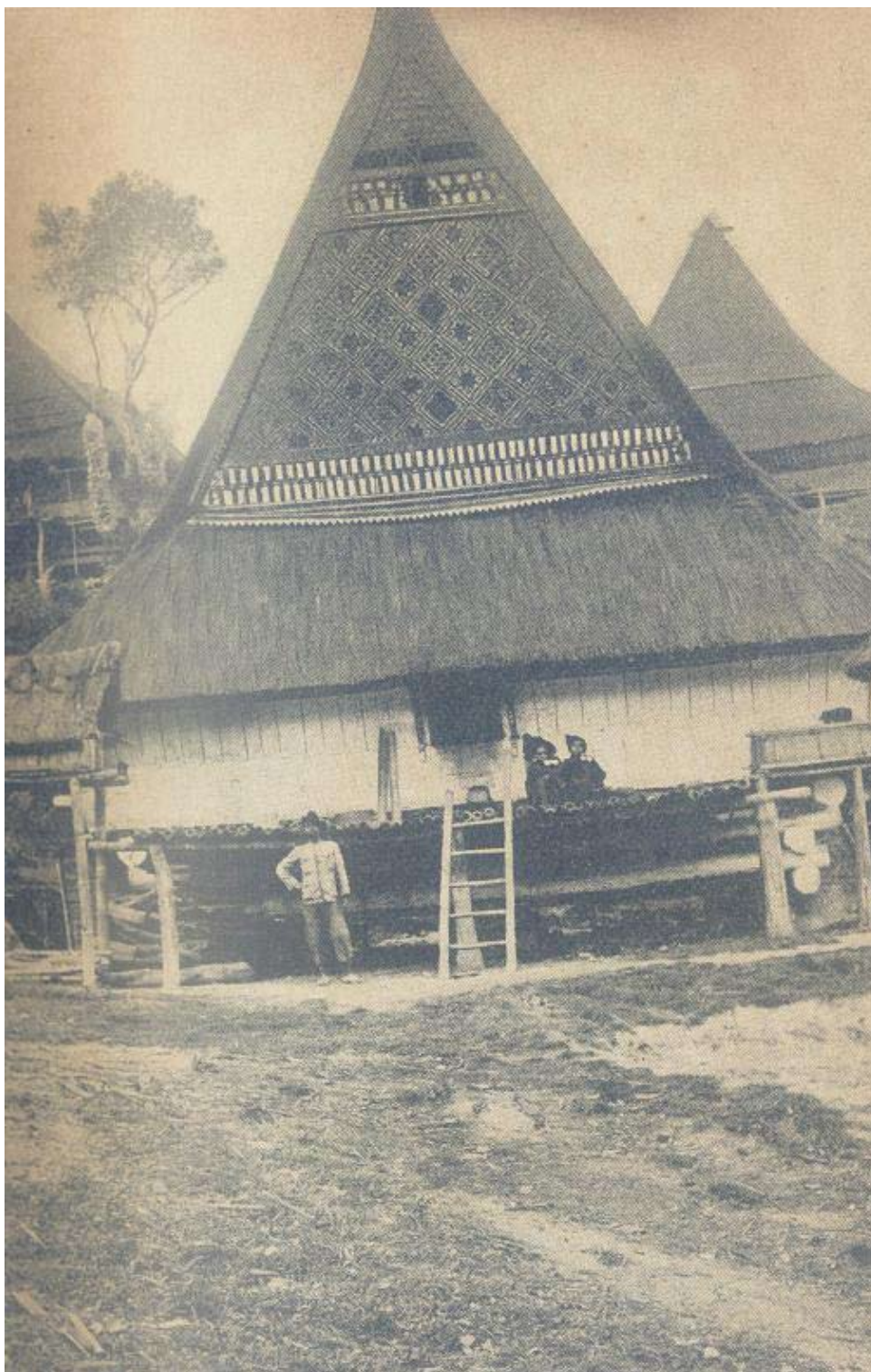
Rumah adat Batak Karo
Sumber: *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, halaman 633-634

i. BARUS JAHE

Marga raja-raja Barus Jahe adalah Karo Karo Barus. Membawahi *urung-urung*: VII Kuta Barusjahe dan VI Kuta Sukanalu. Leluhur raja-raja Barus Jahe adalah seorang tokoh bernama Ompung Barus[252]. Nama ini tampaknya bukan nama pribadi dan hanya sekedar julukan saja. Kemungkinan karena berasal dari Barus, ia dinamakan demikian. Menurut legenda, Ompung Barus telah melakukan perkawinan sumbang, tetapi tidak dijelaskan dengan saudaranya sendiri atau orang semarganya. Bersama dengan istrinya, ia mengembara ke Kuta Usang. Namun karena orang mengetahui bahwa ia telah menikah sumbang, menjadi malulah ia dan pindah ke Ajinembah. Konon, Ompung Barus beserta istrinya ini memiliki ilmu kesaktian yang unik dan mengherankan.

Ompung Barus beserta istrinya hanya berani bermalam di ladang-ladang penduduk dan segan memasuki Kuta Ajinembah karena khawatir dihina warga di sana apabila mereka mengetahui perihal pernikahannya itu. Saat itu, raja Ajinembah sedang dilanda kesulitan karena melanggar janjinya dengan Umang Deleng Sibuaten, yang telah selesai membangun istana raja bernama Sipitu Ruang. Akibatnya, tatkala raja Ajinembah mengadakan upacara menempati rumah barunya, para tamu yang berdatangan dari segenap penjuru mengalami kerasukan. Tamu-tamu itu tak mengetahui lagi jalan pulang ke kampungnya masing-masing dan segenap upaya menenangkan mereka berbuah kegagalan. Selama tujuh hari tujuh malam, mereka hanya mengelilingi istana baru raja sambil bersorak-sorak tanpa henti. Karena itu, raja menjadi tak tenang hidupnya; apalagi ia harus menyediakan makanan bagi mereka secara terus-menerus. Salah seorang warga Ajinembah menyampaikan pada raja bahwa di ladangnya terdapat sepasang suami istri yang tampaknya berilmu. Ia menyarankan agar raja mencoba mengundang mereka saja.

Ternyata sepasang suami istri yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Ompung Barus beserta istrinya. Ia menyanggupi permintaan raja menyembuhkan tamu-tamu yang kerasukan. Segera dimintanya menyediakan ramuan yang disebut *putar*. Isinya terdiri dari gambir, kapur, buah pinang, dan lain sebagainya. Setelah siap, ramuan itu ditaruh dalam sebuah cawan putih. Tiap-tiap orang yang kerasukan ditempeli cawan putih berisi ramuan dan mereka langsung sembuh.

252. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 32.

Semenjak saat itu, di Tanah Karo terdapat tradisi menyiapkan ramuan *putar* setiap hendak menempati rumah baru.

Raja Ajinembah merasa sangat berhutang budi pada Ompung Barus. Ia mengajak pasangan suami istri itu berdiam di istananya dan jangan lagi di ladang-ladang penduduk. Bahkan raja berniat mengangkat Ompung Barus sebagai kerabatnya (*kalimbubu*). Lama Ompung Barus mempertimbangkan hal itu, karena khawatir raja akan kecewa jika mengetahui pernikahan sumbangnya. Menyaksikan keraguan Ompung Barus, raja berkata bahwa apapun yang terjadi dirinya tak akan menyesal telah mengangkat saudara dengan Ompung Barus. Demikianlah, Ompung Barus lantas menetap di Ajinembah dan menjadi *kalibumbu* atau saudara raja yang dihormati.

Tidak berapa lama setelah itu, terjadilah musim kemarau panjang, sehingga penduduk mengalami gagal panen dan terancam bahaya kelaparan. Rumput yang menjadi makanan hewan ternak turut mengering, sehingga sapi dan kambing milik penduduk pun kekurangan makanan. Raja memanggil ahli nujum dan menanyakan perihal terjadinya bencana tersebut. Menurut juru ramal, kekeringan disebabkan oleh adanya pasangan suami istri yang melakukan pelanggaran adat berupa perkawinan sumbang. Raja akhirnya memahami bahwa yang dimaksud adalah Ompung Barus. Tetapi ia merasa berat mengusir Ompung Barus beserta istrinya; apalagi ia telah bersumpah tak akan menyesali keputusannya mengangkat saudara dengan Ompung Barus. Rakyat terus mendesak raja agar Ompung Barus diusir dari kampung mereka dan mengancam akan menerbitkan pemberontakan.

Raja dengan sedih menyampaikan tuntutan rakyat tersebut pada Ompung Barus, yang akhirnya bersedia pindah dari sana demi mencegah timbulnya huru hara dan pergolakan. Sebelum meninggalkan Ajinembah, Ompung Barus mengajarkan upacara memanggil hujan (*ndilo wari udan*). Sepeninggal Ompung Barus, raja menjalankan tata cara yang diajarkan Ompung Barus. Pada hari yang ditentukan rakyat menyanyikan *Erdogal-dogal* dan *Ngak Nge Si Ngarak Bayu Na*. Setelah tibanya puncak acara, awan hitam mulai muncul dan hujan turun dengan lebatnya. Semenjak saat itu, apabila terjadi musim kering, rakyat akan menyelenggarakan upacara tersebut.

Ompung Barus yang diusir dari Ajinembah terus mengembara selama berbulan-bulan demi mencari tempat kediaman baru. Ia khawatir kejadian-

kejadian menyedihkan terdahulu terulang kembali. Oleh karena itu, diputuskannya membuka tempat pemukiman baru. Ketika tiba di suatu tempat, sedihlah hati Ompung Barus karena selama itu dirinya dipandang sebagai *la tama bilagen* (tak dianggap sebagai manusia)[253]. Tanpa dirasa meneteslah air matanya, sehingga akhirnya tempat itu dinamainya Bilagen. Berniatlah Ompung Barus tinggal di sana dan menanti datangnya isyarat melalui mimpi. Lama mimpi yang dinanti tak kunjung tiba hingga suatu malam istrinya bermimpi didatangi seorang tua yang mengatakan bahwa tanah itu kurang baik. Ia menyarankan agar Ompung Barus beserta istrinya pindah agak ke hilir (*jaheen*). Pagi harinya, istri Ompung Barus menceritakan perihal mimpinya pada suaminya. Ompung Barus segera pergi sendirian mencari tanah tersebut. Beberapa waktu kemudian dijumpailah lokasi yang dimaksud. Ternyata memang benar bahwa kondisi tanahnya sungguh baik. Air tak sulit diperoleh, sehingga sesuai bagi kegiatan bercocok tanam. Ompung Barus sangat bergembira menemukan lokasi yang luar biasa ini.

Kini kisah beralih lagi pada raja Ajinembah yang jatuh sakit setelah ditinggal oleh Ompung Barus. Banyak tabib yang berupaya mengobatinya, tetapi penyakit raja tak kunjung sembuh. Raja mengundang murid-murid Guru Pakpak 7 Pertandang guna menanyakan musabab penyakitnya. Setelah menelaah *pustaha* yang mereka miliki, disampaikan bahwa penyebab penyakit raja adalah pelanggaran terhadap sumpahnya sendiri. Mereka menambahkan bahwa raja telah mengusir seseorang padahal sebelumnya telah bersumpah bahwa ia tak akan menyesal mengangkatnya sebagai saudara. Mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid Guru Pakpak 7 Pertandang, raja mengakui bahwa perkataan mereka sungguh benar adanya dan menyadari bahwa yang dimaksud adalah Ompung Barus. Murid-murid Guru Pakpak 7 Pertandang memberitahukan bahwa yang dapat menyembuhkan raja dan menghapuskan persumpahannya hanyalah orang yang diusir itu.

Raja segera memerintahkan saudaranya mencari Ompung Barus. Dalam misi pencarian tersebut, saudara raja menanyai setiap orang yang sempat dijumpainya mengenai perihal keberadaan Ompung Barus, namun mereka semua menggelengkan kepalanya. Beberapa minggu berlalu dan tibalah rombongan di Bilagen. Mereka menjumpai sebuah gubuk yang ternyata merupakan tempat

253. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 37.

kediaman sementara Ompung Barus dan istrinya. Demikianlah perjumpaan terjadi antara saudara raja dengan Ompung Barus. Saudara raja menceritakan mengenai jatuh sakitnya raja Ajinembah. Ompung Barus membuka *pustaha*nya dan meramalkan bahwa raja memang benar sedang sakit adanya. Ia segera menitipkan obat pada saudara raja dan berpesan bahwa persumpahan itu telah dihapusnya. Raja Ajinembah meminum obat yang diberikan Ompung Barus dan menjadi sembuh karenanya.

Ompung Barus pindah ke hilir sebagaimana yang dinasihatkan dalam mimpi istrinya. Karena ahli dalam ilmu perbintangan, Ompung Barus menghitung dengan cermat saat yang tepat bagi kepindahannya itu. Tempat kediaman baru tersebut dinamai Barus Jahe, yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Barus Jahe. Sementara itu, raja Ajinembah yang hendak memperlihatkan ketulusan hatinya memerintahkan agar kaum kerabatnya menjadi pengikut Ompung Barus, yakni sebagai *anak beru*nya. Di Barus Jahe, Ompung Barus dikaruniai dua orang anak bernama Pa Jambur Ligei dan Simbelang Pinggel.

Konon Simbelang Pinggel (arti: Telinga Besar) memiliki telinga yang besar. Sampai-sampai saat ia tidur, telinga kirinya dapat dipakai sebagai tikar, sedangkan telinga kanannya dipergunakan sebagai selimut. Tetapi tampaknya nama Simbelang Pinggel ini hanya julukan saja, sedangkan nama aslinya tak diketahui. Simbelang Pinggel tumbuh sebagai seorang pemuda yang sakti dan memiliki kemampuan melebihi manusia biasa. Suatu kali di Jahe-Jahe didengarnya ada seekor harimau putih ganas yang kerap memangsa manusia. Raja di kawasan itu sampai mengeluarkan sayembara, yakni barangsiapa yang sanggup membunuh hewan buas tersebut akan dinikahkan dengan putrinya. Ketika perihal sayembara itu terdengar oleh Simbelang Pinggel, ia meminta restu ayah beserta saudara-saudaranya membunuh harimau putih di atas. Akhirnya Simbelang Pinggel berhasil menewaskan hewan pemangsa manusia tersebut dan menikah dengan putri raja. Keturunannya adalah para penguasa (datuk) Kejuruan Sinembah Tanjung Muda dan Kejuruan Sinembah Deli. Selain itu, ia menikah pula dengan seorang wanita suku Karo dan menurunkan Sibayak Namo Surou, Sibayak Sumbul, Sibayak Namopinang, Sibayak Bandar Nembah, Sibayak Talun Kenas, dan lain-lain.

Pa Jambur Ligei, saudara Simbelang Pinggel, menikah dengan seorang wanita Karo, dan memiliki seorang anak yang juga diberi nama Si Jambur Ligei.

Belakangan, ia dikaruniai empat orang anak lagi, yang masing-masing dijuluki sesuai kegemarannya. Sebagai contoh, anaknya yang gemar makan (*erduhum*) beras diberinya nama Si Beras. Anak lainnya gemar berjalan di atas kayu-kayu panjang, sehingga diberi nama Si Gedang (dalam bahasa Karo, *gedang* berarti "panjang"). Yang gemar mendaki bukit dijuluki Si Pinto (*pinto-pinto* berarti "bukit" dalam bahasa Karo). Sementara itu, anak kelimanya gemar berjalan di atas pembatas ladang yang miring (disebut *iring-iring* dalam bahasa Karo); oleh karenanya ia dipanggil Si Iring. Setelah dewasa mereka mendirikan rumahnya sendiri-sendiri dan menjadi asal-muasal nama *kesain* di kawasan tersebut.

Si Jambur Ligei kemudian meneruskan pemerintahan di Barus Jahe dan ketika mangkat ia digantikan oleh anaknya bernama Pa Tarejudi. Konon, menurut para ahli nujum putra Pa Tarejudi dilahirkan pada hari yang kurang baik. Ibunya meninggal tak lama sesudah melahirkannya dan Pa Tarejudi menikah lagi dengan wanita lain. Karena dianggap membawa sial tak ada seorangpun kerabatnya yang bersedia memeliharanya; sehingga putranya ini hidup terlantar. Ia besar di tempat perjudian dan merupakan seorang anak yang rajin apabila diperintahkan apa saja. Karenanya, orang menjadi kasihan padanya dan kerap memberikan kue cimpa sebagai makanannya. Apabila mereka beroleh kemenangan dalam perjudian, tidak segan-segan diberikannya uang pada anak itu. Semenjak kecil, anak itu kerap melihat orang-orang bermain judi sambil memakan kue cimpa-nya. Oleh karena itu, ia diberi nama Si Tarejudi oleh para penjudi yang sering berada di tempat tersebut.

Si Tarejudi mengumpulkan uang yang diberikan orang padanya, sehingga jumlahnya terkumpul makin banyak. Menginjak usia dewasa, Si Tarejudi ingin turut serta dalam bermain judi. Ternyata ia selalu meraih kemenangan, hingga hartanya semakin banyak. Karena pribadinya yang menarik serta kehalusannya dalam bertutur kata, Si Tarejudi mempunyai banyak pengikut. Apalagi ia kerap bermurah hati dengan menebus orang-orang yang dijatuhi hukuman pasung, umpamanya karena tak sanggup membayar hutang dan lain sebagainya. Kondisi orang-orang yang dipasung itu sungguh menggenaskan dan sebagai tanda terima kasihnya mereka menjadi pengikut setia Si Tarejudi.

Lama-kelamaan Si Tarejudi mengetahui bahwa dirinya adalah putra terbuang raja Barus Jahe dan berniat menuntut kembali haknya. Sepeninggal ayahnya,

takhta Barus Jahe diduduki oleh orang lain. Awalnya secara baik-baik dimintanya apa yang telah menjadi haknya itu, tetapi orang yang berkuasa di Barusjahe tak bersedia menyerahkan kedudukannya. Akibatnya, Si Tarejudi meminta bantuan raja Dolok Silau yang masih merupakan *anak beru* Barus Jahe dan berhasil merebut kembali haknya. Sesudah Si Tarejudi menduduki takhtanya, memerintahlah ia dengan adil sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan sentosa. Sepeninggal Si Tarejudi yang berkuasa di Barus Jahe adalah Sibayak Ampang, Sibayak Gatar, dan Sibayak Tanda Senina.

Sibayak Tanda Senina beristri sembilan orang dan secara keseluruhan mempunyai 20 orang anak. Di antara mereka yang terkemuka adalah Sibayak Pa Unjuken dan Sibayak Pa Tempana. Selain sebagai raja, Sibayak Tanda Senina yang memiliki rumah khusus untuk memusatkan pikiran (bermeditasi) dikenal pula sebagai *guru mbelin* (tokoh spiritual). Konon, ia menguasai berbagai ilmu kesaktian yang menakjubkan sehingga masih dihormati orang hingga saat ini. Makam beliau yang berada Sapopayung dekat Barus Jahe kerap diziarahi orang demi memohon keberuntungan, berkah, atau keinginan lainnya. Orang-orang kemudian menggelari beliau sebagai Nininta Sibas Batu.

Peristiwa penting yang terjadi pada masa Sibayak Tanda Senina adalah perang saudara antara berbagai *urung* di Barus Jahe; yakni antara Urung III Kuru, Urung XII Kuta, dan Urung VII Kuta di satu pihak, melawan Urung VI Kuta (Sukanalu). Penyebabnya adalah pembunuhan Tuanku Syeh dari Aceh yang menyebarkan agama Islam di Karo oleh warga Sukanalu pada tahun 1886. Akibatnya, Sukanalu diserang oleh ketiga *urung* lainnya. Sukanalu berhasil dikalahkan dan dijatuhi denda Sikati Lima oleh Sibayak Tanda Senina.

Setelah Sibayak Tanda Senina meninggal, ia digantikan oleh dua orang anaknya, yakni Sibayak Pa Unjuken dan Sibayak Pa Tempana, yang memerintah Barus Jahe secara bersama-sama. Mereka menandatangani *korte verklaring* pada 12 September 1907, di mana peristiwa ini merupakan awal masuknya pengaruh Belanda ke Barus Jahe. Kontrak ini kemudian disahkan oleh gubernur jenderal Hindia Belanda pada 20 Desember 1907.

Di tahun yang sama, Sibayak Pa Unjuken meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Pa Rajamantas. Dengan demikian, saat itu yang berkuasa di Barus Jahe adalah Sibayak Pa Tempana dan Pa Rajamantas. Pada tahun 1916, Sibayak Pa

Tempana meninggal dunia dan tidak digantikan oleh anaknya, karena pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan bahwa suatu kerajaan atau daerah swapraja tak boleh lagi dipimpin dua orang. Oleh sebab itu, Pa Rajamantas menjadi satu-satunya penguasa atas Barus Jahe. Ia menandatangani *korte verklaring* pada 13 Mei 1916 di Kabanjahe.

Belanda memecat Pa Rajamantas dari jabatannya karena dianggap melakukan sesuatu yang kurang baik pada tahun 1929 berdasarkan surat ketetapan gubernur jenderal no.8 tertanggal 10 September 1929. Sebelumnya, Belanda pernah mengangkat putra Pa Tempana bernama Sibayak Garang Barus sebagai kepala Urung VII Kuta. Kini setelah Pa Rajamantas diberhentikan, Sibayak Garang Barus diangkat sebagai pejabat sementara raja Barus Jahe, oleh karena putra Pa Rajamantas bernama Sibayak Mandur Barus belum dewasa. Sebagai pengganti kepala Urung VII Kuta yang menduduki jabatan barunya selaku wakil raja Barus Jahe, berdasarkan surat ketetapan Kerajaan Barus Jahe tanggal 1 April 1930 no. 1/ 1930, ditunjuklah Sibayak Nampati, putra Pa Unjuken.

Baru pada 21 September 1937, Sibayak Garang Barus dipensiunkan dan Sibayak Mandur Barus yang telah dewasa dinobatkan sebagai raja Barus Jahe yang baru. Sebagaimana penguasa-penguasa swapraja lainnya di Kepulauan Nusantara, Sibayak Mandur Barus diwajibkan menandatangani *korte verklaring* yang berlangsung pada 16 Desember 1937. Upacara penobatan Sibayak Mandur Barus dirayakan selama 5 hari 5 malam dengan penuh kemeriahan. Raja Barus Jahe terakhir ini memerintah hingga bulan Maret 1946, yakni tatkala berlangsungnya Revolusi Sosial yang menghantam seluruh kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatera Timur.

ii. KUTA BULUH

Merupakan kerajaan bermarga Perangin-angin. Membawahi *urung-urung* Namohaji dan Liangmelas. Leluhur raja-raja Kuta Buluh adalah seseorang bernama Sibayak Kuta Male. Konon ia ditemukan dalam serumpun bambu oleh seorang bermarga Perangin-angin Namo Aji. Sibayak Kuta Male dibawa pulang dan diangkat sebagai anaknya, karena hingga saat itu ia belum dikaruniai keturunan. Setelah dewasa menikahlah ia dengan seorang wanita Bru Tarigan dan memperoleh tiga orang putra. Saat itu, harta kekayaan Sibayak Kuta Male sudah banyak dan pindahlah ia ke Kuta Buluh serta menjadi raja di sana.

Menurut sumber karya Brahma Putro[254], putra sulungnya (tidak disebutkan namanya) menikah dengan dua orang wanita; yang seorang Bru Tarigan dan seorang lagi Bru Brahmana. Dua generasi berlalu tanpa disebutkan namanya (dalam berbagai sumber disebut Sibayak Kuta Buluh III dan Sibayak Kuta Buluh IV) dan kekuasaan atas Kuta Buluh beralih pada Sibayak Ajar Taki selaku generasi kelima setelah Sibayak Kuta Male. Ia memerintah pada kurang lebih tahun 1760. Sibayak Ajar Taki memiliki seorang putra yang tak disebutkan namanya. Putranya ini menikah dan memperoleh anak laki-laki bernama Sibayak Dalam. Semasa pemerintahannya berkecamuk peperangan di Jinabun dan Sibayak Dalam gugur dalam pertempuran tersebut.

Menurut sumber lainnya (Darwan Prinst dan Darwin Prinst), semasa pemerintahan Sibayak Kuta Buluh IV terjadi peperangan dengan saudara tirinya bernama Rumah Gendan[255]. Pemicu peperangan adalah pernikahan antara Sibayak Kuta Buluh IV dengan seorang wanita Bru Brahmana yang sebelunnya telah ditunangkan dengan Rumah Gendan. Namun karena ada pertanda pusaran di betisnya yang dianggap sebagai pembawa keburukan, Sibayak Kuta Buluh IV melarang saudara tirinya menikahi wanita tersebut. Ruman Gendan mematuhinya dan memutuskan pertunangan. Ternyata ini hanya tipu daya Sibayak Kuta Buluh IV saja, karena ia kemudian melamar dan menikahi wanita Bru Brahmana tersebut. Menyadari bahwa dirinya telah diperdaya, bangkitlah amarah dalam diri Rumah Gendan dan melancarkan peperangan melawan Sibayak Kuta Buluh IV. Pada mulanya Sibayak Kuta Buluh IV beserta pengikutnya mengalami kekalahan, namun akhirnya Rumah Gendan terdesak dan melarikan diri ke Kuala. Belakangan perdamaian antara kedua belah pihak dapat dicapai dan Rumah Gendan kembali ke Kuta Buluh.

Masih menurut sumber yang sama, dari istri pertamanya (Bru Tarigan) beliau mempunyai putra bernama Bujor Ukum[256]; sedangkan dari istrinya bernama Bru Brahmana, beliau berputra Pa Rolak. Karena melakukan pernikahan sumbang, Bujor Ukum tidak diperkenankan menjadi raja, sehingga Pa Rolak yang diangkat sebagai Sibayak Kuta Buluh V. Sementara itu, Ajar Taki bukanlah asli marga Perangin-angin Kuta Buluh. Ayahnya dikatakan berasal dari Urung

254. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 62.
255. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 141-142.
256. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 143.

Julu dan kemudian diterima sebagai anggota marga Perangin-angin[257]. Namun belakangan, ia ingin merebut kekuasaan dan membunuh adik bungsu ayahnya bernama Gancih Raja yang ketika itu sedang berkuasa. Kendati demikian, Ajar Taki akhirnya terbunuh secara tragis di dekat Bintang Meriah. Dengan demikian, menurut sumber ini, Ajar Taki tidak diakui sebagai raja Kuta Buluh; sehingga terjadi perbedaan dengan sumber karya Brahma Putro. Selanjutnya yang menjadi Sibayak Kuta Buluh VI adalah putra Pa Rolak bernama Pa Nunggayang atau juga disebut Rolak.

Kembali pada sumber karya Brahma Putro, oleh karena putra Sibayak Dalam bernama Sibayak Tapa masih kecil[258], roda pemerintahan Kuta Buluh sementara waktu dijalankan oleh Pa Nunggayang. Sibayak Tapa sendiri tidak sempat menjadi raja, karena telanjur meninggal dunia. Putranya, Sibayak Nabung, belum dewasa sehingga singgasana kerajaan jatuh ke tangan putra-putra Pa Nunggayang; yakni Sibayak Batir (Sibayak Pa Tolong) dan Sibayak Kumala (Sibayak Muda). Belakangan, Sibayak Kumala terbunuh oleh musuhnya dan Sibayak Pa Tolong memerintah sendirian. Belanda memaksa Sibayak Pa Tolong menandatangani *korte verklaring* dan semenjak saat itu rakyat Kuta Buluh diwajibkan bekerja paksa (rodi).

Sementara itu, menurut karya Darwan Prinst dan Darwin Prinst, Pa Nunggayang menikah dengan seorang wanita Bru Brahmana dari Limang dan berputra Ngalasi atau Pa Jua. Selanjutnya dari istri keduanya, Bru Brahmana dari Bekawar, beliau mempunyai dua orang putra, yakni Batiren (Pa Tolong) dan Kumala (Sebayak Ngada)[259]. Ngalasi (Pa Jua) kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sibayak Kuta Buluh VII. Pada zamannya berlangsung perundingan dengan raja Alas mengenai perampasan kerbau-kerbau rakyat Alas oleh rakyat Karo. Pada kesempatan itu, raja Alas menuntut pembayaran ganti rugi atas kerbau-kerbau yang dirampas. Sebaliknya, Pa Jua juga menuntut agar raja Alas membayar ganti rugi atas hilangnya orang-orang Karo yang diduga telah ditawan oleh orang-orang Alas. Beliau lalu mendaftar orang-orang yang hilang. Oleh karena harga manusia lebih tinggi ketimbang kerbau, akhirnya raja Alas yang harus membayar ganti rugi

257. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 145.
258. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 63
259. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 146.

pada sibayak Kuta Buluh[260]. Beliau kemudian digantikan oleh Sebayak Kumala selaku Sibayak Kuta Buluh VIII. Ia digantikan oleh Batiren (Pa Tolong) selaku Sibayak Kuta Buluh IX.

Kini kita beralih lagi pada sumber karya Brahma Putro,[261] Sibayak Pa Tolong menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial yang menyengsarakan tersebut dan menuntut agar segenap perkakas bagi keperluan kerja paksa disediakan pemerintah kolonial, gaji mereka dibayarkan 2 x lipat dibandingkan upah kerja biasa, serta makanan mereka harus ditanggung oleh Belanda. Karena sikapnya yang menentang Belanda itu, Sibayak Pa Tolong diasingkan ke Jawa dan sampai kini tak diketahui di mana makamnya. Takhta Kerajaan Kuta Buluh beralih pada Sibayak Nabung, putra Sibayak Tapa. Sibayak Nabung sendiri mempunyai lima orang putra, yang antara lain bernama Sibayak Landas, Sibayak Lit Malem, dan Sibayak Ri Manang Peranginangin.

Sibayak Landas anti pemerintah Belanda, sehingga ia tak diperhitungkan sebagai calon pengganti Sibayak Nabung. Akhirnya, sebagai pengganti Sibayak Nabung yang telah lanjut usianya, Belanda mengangkat Sibayak Lit Malem. Pada saat itu, putra Sibayak Landas yang bernama Sibayak Rejin masih belum dewasa. Pada tahun 1940, Sibayak Rejin menggantikan Sibayak Lit Malem dan memerintah hingga meletusnya revolusi sosial (Maret 1946). Setelah berlangsungnya era kemerdekaan, pemerintah RI mengangkat Sibayak Rejin sebagai kepala jaksa pada Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ia pernah pula menjabat sebagai pegawai tinggi di kantor gubernur Sumatera Utara hingga masa pensiun beliau.

Darwan Prinst dan Darwin Prinst mencantumkan nama-nama yang sama bagi ketiga sibayak Kuta Buluh terakhir, yakni Nabong (Sibayak Kuta Buluh X), Lit Malem (Sibayak Kuta Buluh XI), dan A. Rejin (Sibayak Kuta Buluh XII).[262]

iii. LINGGA

Raja-raja Sibayak Lingga bermarga Karo-Karo Sinulingga. Membawahi *urung-urung*: XII Kuta Kabanjahe, si III Kuru ringan i Lingga, Naman, Tiga Pancur, Teran, dan Tiganderket. Menurut legenda leluhur raja-raja Lingga berasal dari

260. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 147-148.
261. Lihat Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman, jilid III, halaman 63.
262. Lihat *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, halaman 147.

Pakpak–Dairi[263]. Konon, di kampung Linggaraja yang terletak di daerah Pakpak, terdapat seorang raja dengan permaisurinya. Suatu kali raja sakit dan tak kunjung sembuh. Beberapa orang tabib terkemuka telah diminta mengobatinya, tetapi belum membuahkan hasil dan bahkan penyakit raja bertambah parah. Suatu ketika singgahlah tujuh orang dukun ke kerajaan tersebut dan dimintalah pertolongan mereka. Mereka segera meneliti *pustaha*nya dan berdasarkan hasil peramalan, raja hanya dapat sembuh apabila membuang apa yang paling disayanginya. Raja dan permaisuri memperlihatkan berbagai harta mereka yang paling berharga pada para dukun. Satu per satu benda-benda berharga dikeluarkan, tetapi hingga yang terakhir, dukun-dukun tersebut tetap menggelengkan kepalanya.

Akhirnya, raja dan ratu sadar bahwa yang dimaksud tentunya adalah salah seorang di antara anak-anaknya. Karena anak bungsu paling dikasihi oleh mereka, pada saat yang telah ditentukan diadakanlah upacara adat dan setelah itu diperintahkanlah ia meninggalkan kampung halamannya demi kesembuhan ayahnya. Sebelum berangkat, raja memberikan petuah agar anak bungsu membawa segenggam tanah dan air sebagai pengingat akan negerinya. Setelah itu, pergilah sang anak bungsu dan penyakit ayahnya berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian, putri raja mengingatkan saudaranya yang sulung agar menyusul adiknya. Ketika keduanya bertemu, kakaknya menyampaikan keinginan agar mereka mengembara bersama-sama; tetapi adik bungsunya menolak dengan alasan bahwa ia lebih memilih berkelana seorang diri agar ayahnya tetap sembuh.

Ternyata, saudaranya yang sulung juga bertekad tak akan kembali lagi ke kampung halamannya; sehingga mereka kemudian berpencar dan mengembara sendiri-sendiri dalam mencari tempat kediaman baru. Kakaknya lalu pergi ke arah barat, sedangkan adik bungsunya menuju ke utara. Adiknya tiba di sebuah tempat yang disebut Kuta Suah di lembah Uruk Gungmbelin, tak jauh dari kampung Lingga sekarang. Ia menikah dan menetap di tempat itu serta mempunyai tiga orang anak lelaki, yakni Tembe, Cibu, dan Serukati; serta seorang anak perempuan bernama Tambar Malem. Belakangan, mereka menemukan tempat lain yang lebih bagus kondisi air dan tanahnya; yakni di kampung Lingga sekarang, sehingga memutuskan pindah ke sana. Kendati demikian, Cibu dan Serukati, mengatakan

263. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid II, halaman 61 dan http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah1.htm (diunduh tanggal 29 Januari 2010).

bahwa mereka ingin merantau dan menentukan sendiri tempat kediaman mereka. Oleh karenanya, yang pindah ke tempat baru hanyalah orang tuanya beserta Tembe dan Tambar Malem. Kediaman baru itu lantas dinamai Lingga, sesuai dengan kampung halaman mereka, yakni Linggaraja.

Cibu yang pergi merantau mendirikan kampung Kacaribu, sedangkan Serukati menjadi cikal-bakal kampung Surbakti. Sementara itu, kakaknya yang sulung tiba dan berdiam di Nodi, yang terletak di perbatasan antara Tanah Karo dan Alas. Ia berdiam di sana, menikah, serta dikaruniai tiga orang putra. Suatu ketika, kampung kediaman mereka dilanda banjir. Konon banjir itu disebabkan oleh adanya orang yang menyembelih hewan suci. Ketiga orang anaknya pergi mengungsi, sementara itu ia beserta istrinya tetap tinggal di sana karena merasa sudah tua. Tiga orang anaknya tiba di Tanah Gayo yang penduduknya telah menganut agama Islam. Saudaranya yang sulung menganut agama Islam dan tinggal di sana. Adiknya yang bungsu meneruskan pengembaraannya dan sampai di kampung Perbesi. Di sana didengarnya kabar dari penduduk setempat bahwa tak jauh dari tempat tersebut terdapat kampung bernama Lingga yang warganya juga keturunan Linggaraja.

Segera bertolaklah ia ke sana dan ternyata kampung itu tak lain dan tak bukan adalah kampung yang didirikan oleh pamannya (saudara bungsu ayahnya). Ia menarik perhatian warga karena kepandaiannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan serta pertikaian di kampung tersebut. Akhirnya, diangkatlah ia sebagai pemuka (per*bapa*an) kampung Lingga dan sebagai penghormatan dinikahkan dengan Beru Ginting Suka Rumah Page dari kampung Surbakti, Beru Sebayang dari Perbesi, dan Beru Tarigan Girsang dari Simalungun. Namanya kemudian diubah menjadi Raja.

Beberapa waktu kemudian, datanglah raja Aceh beserta beberapa orang pengiringnya ke Lau Bahun, yang terletak di antara kampung Lingga dan Surbakti. Sultan Aceh mengundang para pemuka di Tanah Karo guna menentukan siapa di antara mereka yang dianggap layak sebagai pemimpin. Ujiannya yakni mereka diminta menunggangi seekor kerbau dan barangsiapa yang sanggup membuat hewan itu merendahkan badannya karena berat, dialah yang diangkat sebagai penguasa. Para pemuka kampung Lingga, Surbakti, Kacaribu, dan lain sebagainya mengikuti ujian tersebut. Akhirnya, yang keluar sebagai pemenang adalah Raja,

sehingga ia dianggap sebagai penguasa tertinggi di kawasan tersebut dan menerima *bawar* atau pusaka dari sultan Aceh.

Raja mangkat dan dimakamkan di bukit Uruk Gungmbelin, dan ia digantikan oleh tiga orang anaknya yang memerintah bersama-sama; yakni Ganci Raja (putranya dengan Beru Ginting Rumah Page), Katasenina (putranya dengan Beru Sebayang), dan Pa Timbang Raja (putranya dengan Beru Tarigan Girsang). Selanjutnya, raja-raja Lingga berikutnya dijabat bersama-sama oleh keturunan ataupun kerabat ketiga putra di atas. Ganci Raja menurunkan Mariam yang memerintah bersama dengan Rajakin (keturunan Katasenina), dan Timbangraja. Selanjutnya, Tempasraja menggantikan Mariam dan memerintah bersama Gunung, putra saudara Rajakin. Paras (putra Betul, kakak Tempasraja) menggantikan Tempasraja dan memerintah bersama Laksa (pengganti Gunung) serta Aluk. Rasingal (Pa Sendi), putra Tempasraja mengantikan Paras. Sementara itu, Pa Terang menggantikan Laksa dan Lambas menggantikan Aluk. Lambas berhenti pada tahun 1904, sehingga tinggal Rasingal dan Pa Terang yang memerintah Lingga.

Pada tahun 1905, Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Tanah Karo, dan Lingga dijadikan kerajaan (swapraja) dengan Rasingal beserta Pa Terang diakui sebagai rajanya. Mereka berdua lantas menandatangani *korte verklaring* pada bulan Desember 1907. Pa Terang mangkat pada tahun 1921, sehingga Rasingal menjadi satu-satunya raja di Lingga. Rajanta, putra Pa Terang diangkat sebagai pemuka (per*bapa*an) Urung Telu Kuru. Rasingal mangkat pada 28 Juli 1934 dan digantikan oleh putranya, Raja Kalelong, yang menandatangani *korte verklaring* pada 25 Juli 1935. Sesudah berlangsungnya masa kemerdekaan, Raja Kalelong diangkat sebagai bupati Tanah Karo dan bersamaan dengan itu berakhirlah era swapraja.

Raja Nangkih Sinulingga adalah putra tertua Raja Kalelong yang lahir pada 10 November 1931 di Kabanjahe. Semenjak masa mudanya, beliau telah turut mengungsi ke berbagai tempat, yakni semasa berkecamuknya Agresi Belanda II. Beliau pernah berkuliah di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan setelah itu pindah ke Universitas Indonesia, Jakarta. Setelah lulus sebagai notaris, beliau bertugas di Madiun antara tahun 1969 hingga 1989 dan pindah ke Jakarta sebelum pensiun pada tahun 1996. Putra raja terakhir Lingga ini wafat pada 23 Januari 2000 di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Putra-putri Raja Nangkih Sinulingga, masing-masing adalah Isfridus Josef Radja

Nemani Sinulingga, Chrysologus Radja Nampeken Sinulingga, Fransisca Carolyne Sinulingga, dan Michael Raja Nehken Sinulingga.

iv. SARINEMBAH

Marga raja-raja Sarinembah adalah Sembiring Meliala. Membawahi *urung-urung*: XVII Kuta Sarinembah, Perbesi, Juhar, dan Kutabangun. Leluhur raja-raja Sarinembah adalah seorang tokoh bernama Si Pagit yang berasal dari Berastepu[264]. Ia mengembara hingga ke Guru Benua. Di tanah perantauan ini ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang tidak sedikit melalui kegiatan pertanian maupun perjudiannya. Si Pagit gemar tinggal berpindah-pindah dan kendati telah mengumpulkan banyak kekayaan di Guru Benua, ia merantau lagi ke Biaknampe. Kekayaannya terus bertambah di tempat barunya, tetapi Si Pagit pindah lagi ke kampung Buluh Naman. Tatkala sedang membajak ladangnya, ditemukanlah emas sebesar bajak, yang dibawanya pulang dan dibagi-bagikan pada anggota keluarganya.

Si Pagit pindah lagi ke Barung Namo Raja dan belakangan ke lokasi yang menjadi kampung Sarinembah sekarang. Harta kekayaan Si Pagit yang hidupnya diliputi keberuntungan ini tetap semakin melimpah sebagaimana biasanya. Suatu ketika, datanglah orang Alas membawa kerbau-kerbaunya ke Sarinembah. Malangnya, orang-orang Alas terkena wabah penyakit dan mati semuanya. Dengan demikian, kerbau-kerbau mereka menjadi milik Si Pagit. Penduduk kampung XVII Kuta banyak terlilit hutang pada Si Pagit, sehingga mereka berniat menyerang Sarinembah dan membunuh Si Pagit. Namun, serangan mereka dapat dipatahkan oleh Si Pagit dan warga kampung XVII Kuta menawarkan perdamaian padanya. Ternyata, Si Pagit menyetujui permohonan tersebut, asalkan mereka bersedia takluk pada Sarinembah. Dengan demikian Urung XVII Kuta menjadi bagian Sarinembah.

Tidak berapa lama kemudian datanglah Tengku Palembang (Tuan Kita), utusan sultan Aceh, yang menobatkan Si Pagit sebagai raja Sarinembah dan mengukuhkannya dengan penyerahan pusaka (*bawar*). Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1907 lantas mengangkat Si Ngobah dan Si Napa, dua orang keturunan Si Pagit, menjadi raja Sarinembah. Setelah Si Napa meninggal, Si

---

264. Lihat *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 58. Riwayat ini dikutip dari Adat Istadat Batak Karo karya P. Tambun.

Ngobah menjadi satu-satunya raja Sarinembah. Si Ngobah mangkat pada tahun 1923 dan digantikan oleh putra sulungnya, Sibayak Elok, yang memegang kekuasaan hingga Maret 1946; yakni semasa revolusi sosial menggulung seluruh kerajaan di Sumatera Timur.

v. SUKA

Raja-raja Sibayak (Kerajaan) Suka menyandang marga Ginting Suka dan membawahi *urung-urung*: Suka, Sukapiring, Ajinembah, dan Tengging. Berdasarkan silsilahnya, leluhur para raja Suka dirunut hingga seorang tokoh bernama Si Mantangken. Ia memiliki putra bernama Si Tindang. Putranya ini kemudian menikah dan pindah ke kampung Guru Benua. Di sana istrinya melahirkan anak kembar sepuluh yang konon saat dilahirkan terbungkus selaput seperti sebuah mentimun. Seorang dukun adat yang merupakan murid Guru Mbelin Pakpak 7 Pertandang menyelamatkan kesepuluh anak tersebut, sehingga seluruhnya lahir dengan selamat. Di antara sepuluh anak itu, sembilan di antaranya laki-laki; di mana nama mereka masing-masing adalah Si Babo, Si Guru Patih, Si Suka, Si Jadibata, Si Sugihen, Si Bukit, Si Garamata, dan Si Ajar Tambun. Sedangkan yang seorang lagi, anak wanita bernama Si Bembem. Si Tindang selanjutnya pergi ke Pengkih dan menikah dengan seorang gadis Beru Karo-Karo Samura. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang anak, yakni Si Pengulun, Si Mbayak, dan Si Pilihan.

Kesepuluh orang anak kembar kembar di atas tetap tinggal di kampung Guru Benua. Suatu ketika, Si Bemben hendak menikah. Tetapi kesembilan saudaranya yang laki-laki berselisih memperebutkan uang maharnya. Masing-masing ingin mendapatkan keseluruhan uang tersebut dengan mengakui sebagai saudara tertua. Perselisihan itu tak berhasil diselesaikan oleh siapapun juga. Bru Bembem berupaya mendamaikan dan menyadarkan mereka. Berkatalah ia pada saudara-saudaranya agar tak usah bertengkar seperti itu karena masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Dimintanya mereka menyiapkan beras yang telah disucikan (*beras meciho*) dalam pinggan; lalu membangun tempat berteduh para hadirin serta menabuh gendang serta memainkan serunai seperti saat hendak mengadakan perhelatan.

Bru Bembem berkata pula bahwa pada kesempatan itu ia akan menari demi melembutkan hari saudara-saudaranya. Mereka memenuhi apa yang diminta

saudara perempuannya tersebut. Gendang beserta serunai dimainkan dan menarilah Bru Bembem sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Tanpa diduga-duga, Bru Bembem menghempaskan dirinya kuat-kuat ke tanah hingga tewas. Menyaksikan peristiwa tersebut saudara-saudara kembarnya merasa menyesal dan menyadari kesalahan masing-masing.

Setelah kematian adik perempuannya, si Suka pergi menyusul Si Tindang, ayahnya, ke Pengkih. Ia merupakan pendiri kampung Suka. Sementara itu, saudara-saudaranya yang lain menyebar pula ke berbagai tempat:

Si Bukit pindah dan menetap di Rajamerahe
Si Guru Patih pindah dan menetap di Sarimunte
Si Garamata pindah dan menetap di Toba
Si Sugihen pindah dan menetap di Sugihen
Si Ajibata pindah dan menetap di Kesain Ajibata, Juhar
Si Ajar Tambun pindah dan menetap di Lau Lingga
Si Babo pindah dan menetap di Kuta Guru Benun

Si Tindang, ayah mereka, menikah lagi dengan seorang wanita dari Toba Silaki dan memperoleh keturunan bernama Si Lige. Ia beserta istri dan anaknya itu lantas pindah ke kampung Suka.

Pada perkembangan selanjutnya, Si Lige diangkat sebagai raja Suka. Setelah ia meninggal dunia, Kerajaan Suka secara berturut-turut diwarisi oleh Si Raja Negeri dan Si Renduh. Tidak terdapat penjelasan perihal hubungan kekerabatan antara Si Lige dengan Si Raja Negeri, yakni apakah keduanya bersaudara ataukah merupakan ayah dan anak. Demikian pula halnya dengan Si Renduh yang tak diketahui hubungan kekeluargaannya dengan raja sebelumnya. Yang pasti, Si Renduh mempunyai 6 orang putra. Di antara mereka ada yang bernama Sibayak Biaknampe dan Sibayak Salangulah. Bersamaan dengan itu datanglah utusan sultan Aceh yang hendak mengangkat raja-raja di Tanah Karo (raja berempat). Pada kesempatan tersebut berkumpullah raja-raja Sukapiring, Tengging, Ajinembah, dan Kuta Suka. Sibayak Biaknampe dicalonkan sebagai raja mereka.

Sebagai ujian terhadap kelayakan masing-masing calon, utusan sultan Aceh membawa seekor kerbau besar. Setiap calon diminta menunggangi hewan tersebut. Barangsiapa yang sanggup membungkukkan kerbau itu, dialah yang dianggap

sakti dan pantas menduduki jabatan raja. Ternyata pemenangnya adalah Sibayak Biaknampe dan semenjak saat itu, raja Sukapiring, Tengging, dan Ajinembah ditetapkan oleh utusan sultan Aceh sebagai pembantu bagi raja Suka. Kemudian Sibayak Biaknampe mendapatkan tanda kekuasaan dari Aceh berupa arca burung dan lain sebagainya. Setelah memerintah selama 12 tahun Sibayak Biaknampe pergi ke Ujung Labuhan Delitua, karena istrinya meninggal dunia.

Raja Suka berikutnya adalah saudara Sibayak Biaknampe bernama Sibayak Salangulah. Penggantinya adalah Si Tumpah (Sibayak Tumpah atau Sibayak Pa Nungsang) yang memperoleh pengesahannya dari sultan Aceh. Pada tahun 1907, ia menandatangani *korte verklaring* di Seribudolok yang menandai masuknya kekuasaan Belanda ke Suka. Ia meninggal dunia pada tahun 1924 dan digantikan oleh putra sulungnya bernama Pa Nimbak (1924–1926). Baru sempat memerintah selama dua tahun, pemerintah kolonial Belanda memecat Pa Nimbak. Oleh karena putranya masih bersekolah, untuk sementara waktu berdasarkan ketetapan gubernur Sumatera Timur no. 1241 tertanggal 23 Juli 1926 roda pemerintahan Suka dipegang oleh saudara termudanya bernama Sibayak Ningguri.

Setelah Sibayak Raja Sungkunen, putra Pa Nimbak, dewasa dan lulus sekolah, barulah ia diangkat sebagai raja Suka. Ia menduduki jabatan ini hingga meletusnya revolusi sosial pada tahun 1946. Menurut perhitungan Brahma Putro dalam karyanya, Kerajaan Suka diperkirakan berdiri pada kurang lebih tahun 1754[265]. Apabila dianggap bahwa satu generasi adalah 30 tahun dan antara Si Suka dan Sibayak Raja Sungkunen selaku raja Suka terakhir terdapat jarak enam generasi, maka selang waktu yang memisahkan mereka adalah kurang lebih 180 tahun. Dengan demikian tibalah pada tahun perkiraan di atas.

g. Kerajaan-kerajaan di Tanah Simalungun

Di kawasan Simalungun terdapat empat kerajaan yang para penguasanya dikenal sebagai *raja maropat*; yakni Kerajaan Tanah Jawa, Siantar, Panei, dan Dolok Silau. Konon dahulu terdapat dua kerajaan saja, yakni Nagur dan Si Tanggang[266]. Akibat campur tangan Aceh, dua kerajaan itu terbagi menjadi empat kerajaan. Terdapat berbagai alasan pembagian tersebut. Salah satu sumber mengatakan bahwa raja Nagur tak sanggup memerintah wilayahnya yang luas itu dan meminta bantuan sultan Aceh

265. Lihat *Sejarah Tanah Karo dari Zaman ke Zaman*, jilid III, halaman 28.
266. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 138.

memberlakukan tatanan pemerintahan baru. Nagur dipecah menjadi Panei dan Silau (terpecah lagi menjadi Dolok, Purba, dan Raya). Si Tanggang dibagi menjadi Tanah Jawa beserta Siantar. Belakangan, kerajaan-kerajaan di Simalungun ditambah lagi oleh Belanda dengan Purba, Raya, dan Silimakuta. Di bawah kekuasaan para raja ini, Belanda membentuk daerah-daerah bawahan raja yang disebut *pertuanan*; yakni Bandar, Dolok Batunagar, Tiga Dolok, dan Negeri Dolok. Di bawah mereka terdapat *perbapaan* yang tak memiliki wilayah, tetapi bertugas menyampaikan segenap perintah atau pesan pada penghulu atau kepala desa.

Kerajaan-kerajaan di Simalungun beserta distriknya masing-masing

i. DOLOK (DOLOG) SILAU (SILO atau SILOU)

Nagur dan Batak Timur Raja

Awalnya di kawasan ini berdiri Kerajaan Nagur yang digantikan oleh Kerajaan [Batak] Timur Raja. Selanjutnya timbul Kerajaan Silo yang berpusat di Pane dengan bandarnya bernama Sorotilau (muara Sungai Silo). Pane (disebut Panaju dalam laporan Pinto) sendiri sebagai pusat kerajaan kerap berpindah-pindah karena peperangan. Kerajaan ini kemudian pecah menjadi empat kerajaan (*raja maropat*) yang ada di Simalungun. Pustaha Silou dan ceritera yang diwariskan turun-temurun menyebutkan bahwa leluhur Kerajaan Silou berasal dari Tambak

Bawang[267]. Sementara itu, ada pula sumber menyebutkan bahwa leluhur Silou berasal dari Hindia Belakang, yang kemudian bermigrasi ke Aceh. Tempat pertama mereka memijakkan kakinya di kawasan tersebut adalah Banua, sebuah kawasan di Teluk Kampai (dalam bahasa Aceh disebut "sampee" yang artinya "tiba"). Ketika Majapahit melancarkan serangannya, masing-masing pada tahun 1337 dan 1347, mereka melakukan migrasi besar-besaran ke pedalaman Gayo, Lingga, dan Nagur di selatan.

Keturunan mereka membuka perkampungan di Tambak Bawang. Putra penghulu Tambak Bawang bernama Tuan Horsik yang pandai berburu menggunakan sumpit merantau ke sebelah timur. Suatu ketika, ia melihat seekor burung dan menyumpitnya. Anehnya ketika hampir mati dan hendak ditangkap, burung itu berhasil terbang lagi sambil mendendangkan suara, "Tintin ni ise on?" (cincin siapakah ini?)[268]. Demikianlah terjadi berulang-ulang, hingga tibalah ia di Nagur Bolag, ibukota Kerajaan Nagur. Raja Nagur menyambutnya dengan baik dan karena kepandaiannya itu, ia diangkat sebagai pemburu pribadi raja, sehingga memperoleh gelar Pangultop-ultop. Raja Nagur kemudian menikahkan Tuan Horsik dengan putrinya serta menghadiahkan sebuah perkampungan baru dekat sungai Bah Polung yang dinamainya Silou.

Bersamaan dengan itu, Aceh yang dipimpin Sultan Alauddin Riayat Syah sedang berambisi meluaskan daerah kekuasaannya. Oleh karenanya, kerajaan-kerajaan seperti Aru dan Nagur turut terancam. Pada tahun 1539, Aceh mulai melancarkan serangannya yang juga dicatat oleh Fernão Mendes Pinto (1510?-1583)[269], sejarawan Portugis. Ketika itu, demi mengurung Aru Tua, Aceh terlebih dahulu menyerang ke selatan. Pinto melaporkan bahwa pemicu peperangan adalah anjuran sultan Aceh agar Raja Batak[270] berpindah agama. Sultan Aceh menyarankan pula agar Raja Batak menceraikan istrinya yang telah dinikahi selama 26 tahun. Sebagai gantinya, sultan bersedia menyerahkan salah seorang saudara perempuannya agar dinikahi Raja Batak. Kendati demikian, Raja Batak menolak seruan tersebut, sehingga meletuslah peperangan. Pada mulanya, Aceh

267. Lihat *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, halaman 2.
268. Lihat *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, halaman 4.
269. Lihat *Sumatera Tempo Doeloe dari Marco Polo sampai Tan Malaka*, halaman 38.
270. Dalam *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman* karya Brahma Putro, halaman 11, disebutkan bahwa kerajaan yang dimaksud adalah Batak Timur Raja dengan rajanya, Maharaja Agi Sry Timur Raja.

menuai kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke pegunungan Cagerrendão[271]. Tentara Batak mengepung Aceh di kawasan itu selama 23 hari. Wabah mengamuk di perkemahan pasukan Aceh yang terkepung; sementara itu, pihak Batak sendiri mulai kekurangan bahan makanan, sehingga akhirnya disepakati perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak.

Ternyata perjanjian perdamaian ini hanya berusia dua setengah bulan. Bersamaan itu tibalah bala bantuan dari Turki. Pasukan Aceh lantas menyerang dua desa Batak, yakni Jacur serta Lingau, dan berhasil mengalahkannya dengan mudah karena Raja Batak terlena oleh perjanjian perdamaian di atas. Bahkan, pasukan Aceh berhasil membunuh tiga orang putra raja dan 700 pengikut utama Raja Batak. Tentu saja Raja Batak merasa murka dengan serangan ini. Beliau bersumpah atas nama Quiay Hocombinor, dewa tersuci dalam agamanya, tidak akan menyantap makanan lezat sebelum sanggup membalaskan kematian putra-putranya beserta segenap penghinaan tersebut. Pasukan sejumlah 15.000 orang berhasil dimobilisasi dan ia mengutus iparnya, Aquarem Dabolay, menemui Kapten Pedro da Faria[272] di Malaka guna memohon bala bantuan Portugis sambil membawa berbagai hadiah berharga. Portugis segera mengirimkan serombongan pasukan yang dipimpin oleh Pinto sambil membawa persenjataan. Mereka kemudian singgah di Bandar Soritilau dan meneruskan perjalanannya ke Panaju, pusat kedudukan Raja Batak. Kendati telah dibantu oleh Portugis, pihak Batak menuai kekalahan dalam peperangan itu.

Tuan Horsik menjadi raja dan awal berkuasanya dinasti Silou

Telah diriwayatkan bahwa Tuan Horsik diangkat sebagai menantu oleh raja Nagur, yang disebut Raja Batak dalam laporan Pinto. Karena ketiga putra raja gugur dalam pertempuran, Tuan Horsik ditugasi menjalankan pemerintahan. Saat dilantik menjadi raja, beliau digelari Jigou. Ini menandai awal pemerintahan dinasti Silou, sehingga kerajaannya kemudian disebut Nagur Bolag Silou.

Raja Jigou mempunyai dua orang istri, yakni Puang Boru Karo dan Boru Banua selaku puang bolon (permaisuri). Masing-masing kemudian melahirkan seorang putra. Tak berapa lama kemudian, mangkatlah Raja Jigou. Tatkala putra-

271. Menurut Brahma Putro dalam *Sejarah Karo dan Zaman ke Zaman*, halaman 45, disamakan dengan Cagar Ardan.
272. Disebut Pero de Faria dalam Sumatera Tempo Doeloe dari Marco Polo sampai Tan Malaka, halaman 39.

putra mereka menginjak usia enam tahun, terjadi perselisihan antara Puang Boru Karo dan Boru Banua. Puang bolon lantas mengusir Puang Boru Karo beserta putranya. Karena pengusiran ini, putra tersebut lantas dijuluki Sibuangbuang. Setelah Sibuangbuang dewasa dibangunlah negeri baru baginya, yang dinamai Silou Buttu.

Lima tahun berselang, jenazah Raja Jigou hendak dikremasi dan bersamaan dengan itu akan dilangsungkan penobatan raja baru. Sibuangbuang turut hadir dengan membawa hadiah berupa emas dan uang, namun ditolak oleh puang bolon. Tujuan penolakan ini adalah agar putranya, Hotang Momo dianggap sebagai satu-satunya pewaris yang sah. Tuan Bandar Hanopan, yang menampung Sibuangbuang atau kelak dikenal pula sebagai Sindarlela, mengusulkan agar meminta bantuan Aceh demi menghukum ketidak-adilan itu.

Konon dalam perjalanannya, Tuan Sindarlela berjumpa dengan Putri Hijau[273] yang membantunya menjadi raja Silau Bolak. Pertemuan ini dilatar belakangi peperangan antara Aru Tua (Haru) dan Aceh. Karena Aru Tua senantiasa merasa terancam oleh Aceh, dibinalah kerja sama dengan Portugis, yang mengirimkan sepucuk meriam. Pada tahun 1564, Aceh kembali menyerang Aru Tua, tetapi mengalami kekalahan. Akibatnya Aceh terpaksa meminta bantuan Rum (Turki). Bersamaan dengan itu, Tuan Sindarlela sedang dalam perjalanan menuju Aru Tua dengan mengikuti jejak pedagang garam. Di tengah jalan, beliau beristirahat di tepi Sungai Lau Patani (Sungai Deli sekarang) dan mendengar teriakan memohon pertolongan. Ternyata itu adalah seorang pria yang hanyut. Tuan Sindarlela segera

---

273. Dalam buku *Sedjarah Keturunan Silou Bolak, Dunia, Buttu*, halaman 7, dikisahkan bahwa Tuan Sindarlela berjumpa putri Hijau di tepi Sungai Potani sewaktu hendak berburu. Dalam sumber itu dikatakan bahwa Tuan Sindarlela juga disebut Pangultobultob. Kala itu, ia mendengar suara yang menyuruhnya terjun ke sungai. Tetapi Sindarlela menjawab bahwa ia takut. Kendati demikian, suara itu terus memaksanya terjun. Akhirnya terjunlah ia ke sungai dan menjumpai seekor ular dan sepucuk meriam, yang disebut sebagai "saudara laki-laki" Putri Hijau. Sindarlela diperintahkan mencabut ilalang yang tumbuh di sana dan nampaklah seorang wanita cantik, yang tak lain dan tak bukan adalah Putri Hijau. Berita ini terdengar oleh sultan Deli (yang dimaksud adalah Deli Tua atau Aru Tua) yang lantas berniat menikahi Putri Hijau. Meskipun demikian, sultan Aceh mendengarnya pula dan mengutus pembesar-pembesarnya bernama Bajur dan Motung yang memerintahkan agar Putri Hijau dibawa ke Aceh. Sultan Deli menolaknya sehingga terjadilah peperangan antara Deli dan Aceh. Ternyata pasukan Aceh menuai kekalahan telak.
Pihak Aceh lantas meminta bantuan Rum (mungkin yang dimaksud adalah Turki). Raja Rum menitahkan panglimanya yang memiliki dada selebar tujuh jengkal membawa emas sebesar kepala kerbau. Emas inilah yang kemudian dijadikan peluru meriam. Ketika peluru emas itu ditembakkan berebutlah pasukan Deli mendapatkannya, sehingga kalahlah sultan Deli yang dibunuh oleh panglima Rum. Sultan Aceh menemui Putri Hijau dan menyatakan niat hendak menjadikannya permaisuri. Putri Hijau sepakat asalkan Tuan Sindarlela diangkat sebagai raja. Demikianlah Tuan Sindarlela atau Sibuangbuang menjadi raja Silau Bolak.

menyelamatkannya dan menemukan pula sepucuk meriam. Seorang wanita mendekatinya, yang ternyata adalah Putri Hijau. Mereka lantas berjalan ke pusat Kerajaan Aru Tua dan disambut dengan gembira. Berkat jasanya itu, Tuan Sindarlela dianugerahi banyak hadiah berupa emas dan benda-benda berharga lainnya. Ketika itu, Tuan Sindarlela tidak jadi memohon bantuan ke Aceh dan justru kembali ke Silou Buttu.

Bala bantuan dari Turki tiba. Karena sama-sama memusuhi Portugis, sultan Turki tidak keberatan mengirimkan pasukan dan ahli strategi perangnya. Dengan dibantu pasukan Turki, Kerajaan Aru Tua kembali diserbu. Kendati demikian, serangan itu belum berhasil menundukkan Aru Tua, sehingga panglima pasukan Turki merencanakan siasat jitu. Mereka menembakkan peluru-peluru emas. Dengan demikian, pasukan Aru saling berebut mendapatkannya. Akhirnya kalahlah Aru dan rajanya dibunuh. Sultan Aceh berniat menjadikan Putri Hijau permaisurinya. Awalnya Putri Hijau menampik keinginan sultan Aceh ini, tetapi akhirnya bersedia asalkan Tuan Sindarlela dijadikan raja. Sultan Aceh tidak keberatan memenuhi persyaratan ini dan Tuan Sindarlela dinobatkan sebagai raja pada tahun 1567[274]. Beliau kemudian menikah dengan Runtingan Omas, putri raja Nagur, dan menurunkan tiga orang putra, yang masing-masing bernama Tuan Hapoltakan (Raja Toriti), Tuan Rattip, serta Tuan Kiti, dan dua orang putri. Salah seorang putri mereka menikah dengan Raja Saragih Dasalak dari Kerajaan Padang. Sementara itu, dari istrinya yang lain, beliau berputra Tuan Timbangraja, yang menjadi penguasa di Silou Dunia. Dengan demikian, garis keturunan dinasti Silou telah terbagi menjadi dua, yakni Silou Buttu (Silou Bolak) yang diwakili Tuan Hapoltakan dan Silou Dunia yang diawali oleh Tuan Timbangraja.

Perkembangan Silou selanjutnya

Tuan Hapoltakan konon lahir dengan satu gigi di atas dan satu gigi di bawah, di mana hal ini dipandang sebagai pembawa kemalangan. Itulah sebabnya, Tuan Sindarlela bermaksud menyerahkan jabatan putra mahkota pada Tuan Timbangraja. Tentunya hal ini kurang disukai oleh Tuan Hapoltakan. Sebenarnya, posisi Tuan Timbangraja tidak terlalu kuat karena istrinya bukan putri raja, sehingga tidak dapat diangkat sebagai permaisuri. Oleh karena itu, ia bermaksud

274. Lihat *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, halaman 13.

mengangkat kedudukan mertuanya, Tuan Jambur Ligei dari Tanah Karo sebagai raja dengan dukungan Aceh. Tetapi ketika utusan Aceh datang guna menyelidiki duduk perkaranya, *sibayak* (raja) Barusjahe yang merupakan kakak Tuan Jambur Ligei menentangnya. Ia mempertanyakan apabila Tuan Jambur Ligei (yang sesungguhnya memang bukan raja) hendak diangkat sebagai raja di manakah rakyatnya. Utusan sultan Aceh marah karena merasa telah dipermainkan oleh Tuan Timbangraja. Silou Dunia digempur oleh Aceh. Sementara itu, Tuan Hapoltakan mengizinkan pasukan Aceh bermarkas di wilayahnya, yakni di Nagori Asih.

Tuan Timbangraja tentu saja merasa kesal dengan saudara lain ibunya, Tuan Hapoltakan, karena telah mengizinkan musuhnya berkubu di Nagori Asih. Setelah pasukan Aceh mengundurkan diri, Tuan Timbangraja bersekutu dengan Serbajadi dan Rambe Nabolak, guna menghadapi Tuan Hapoltakan. Tetapi pasukannya berhasil dicerai-beraikan oleh Tuan Hapoltakan, dan ia menemui ajalnya dalam pertempuran tersebut. Tuan Sindarlela yang saat itu masih menjabat sebagai raja Silou meneruskan perlawanan, tetapi menderita cedera dan lumpuh. Dengan demikian, kini Tuan Hapoltakan berhasil merebut kekuasaan. Ia dinobatkan sebagai penguasa Silou dengan disaksikan oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Ketika upacara berlangsung, ia menunggang gajah putih bernama Biramsattani yang dihadiahkan oleh Aceh. Gelar beliau adalah Raja Toriti.

Putra Tuan Timbangraja ditawan, tetapi kemudian dibebaskan dan dianugerahi daerah Rubun. Itulah sebabnya, ia lantas dikenal sebagai Tuan Rubun. Raja Toriti mangkat dan digantikan putranya, Tuan Morahkalam. Pada masanya, terjalin hubungan baik dengan Siak, yang kurang disenangi Aceh. Itulah sebabnya, Aceh mencari dalih menyerang Silou. Alasan yang dipakai adalah masalah gajah putih. Apa yang dimaksud gajah putih ini sesungguhnya adalah pahatan batu kapur berbentuk gajah. Banyak orang mengaguminya, sehingga perihal pahatan ini terdengar sampai ke telinga sultan Aceh. Tetapi sultan Aceh salah menyangka bahwa itu adalah gajah sungguhan, dan berniat membelinya dengan harga sebungkah emas. Tuan Morahkalam tidak dapat memberikannya, karena "gajah" itu memang tak dapat berjalan. Sultan Aceh yang dua kali memintanya tetapi tetap tak dikabulkan menjadi tersinggung. Angkatan perang Aceh dikerahkan menyerang Silou. Namun serbuan ini tidak membuahkan hasil apa-apa dan pasukan Aceh ditarik mundur ke negerinya.

Tuan Morahkalam digantikan oleh putranya, Tuan Moraijou (Morawijaya). Sementara itu, dari garis keturunan Silou Dunia memerintahlah Tuan Bedarmaralam, putra Tuan Rubun. Beliau menjalin hubungan baik dengan Deli karena kekuasaan Aceh pada masa itu telah melemah. Oleh Deli, Tuan Bedarmaralam dikukuhkan sebagai *raja goraha*, yakni selaku panglima perang atau wakil raja Silou. Beliau kemudian membuka perkampungan baru di Dolog Silou dan belakangan dikenal sebagai raja Dolog. Kendati menjabat sebagai *raja goraha* Silou, beliau berdaulat di wilayah kekuasaannya sendiri. Dari buah pernikahannya dengan putri Kerajaan Raya bermarga Garingging, beliau dikaruniai putra bernama Tuan Rajomin, yang menggantikannya sebagai *raja goraha* Silou.

Tuan Moraijou yang menjabat sebagai raja Silou meninggal dunia dan digantikan oleh Tuan Saksaknijou. Bersamaan dengan itu, Tuan Rajomin berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Hutabayu, Sibaubibir, Sisulung, dan Surbakti. Tuan Rajomin kemudian digantikan oleh putranya, Tuan Moraijou (namanya sama dengan raja Silou).

Pada 10 Januari 1823, utusan Inggris bernama Anderson berkunjung ke Serdang. Ia tercatat memberikan hadiah kepada para pembesar Serdang, antara lain, raja Dolog, Orang Kaya Lela, raja Tanjung Morawa, Tuan Salambian, dan hulubalang raja Siantar. Tidak disebutkan siapa nama Raja Dolog ini, tetapi diperkirakan adalah Tuan Moraijou atau Tuan Taring yang menggantikan Tuan Moraijou.[275]

Raja Silou mangkat dan digantikan oleh putra mahkotanya, Raja Jamera. Tuan Moraijou juga wafat dan tampuk kepemimpinannya diwarisi oleh Tuan Taring. Bersamaan dengan ini, Kerajaan Silou terancam perpecahan. Pertuanan Raya, Purba, dan Silimakuta mulai memisahkan dirinya dari kekuasaan Silou. Raja goraha Silou sendiri yang berasal dari garis keturunan Silou Dunia bersekutu dengan pihak-pihak yang hendak memisahkan diri tersebut. Peristiwa ini berujung pada perang saudara di tahun 1855. *Raja goraha* Silou bersama dengan Raya, Purba, dan Silimakuta bangkit melawan raja Silou (Silou Bolak). Kerajaan Silou mengalami kekalahan setelah raja dan para pemukanya terbunuh. Di tengah-tengah situasi yang genting, Deli turun tangan menyelesaikan pertikaian itu.

275. Lihat *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, halaman 25. Menurut Anderson, raja Dolog berumur sekitar 33 tahun. Beliau berperawakan tegap dan berkulit cerah. Jumlah rakyatnya ada 800 orang dan mempunyai banyak kuda.

Perundingan damai digelar di Pagar Bayu dengan disaksikan oleh Daud (kelak Kejuran Muda Sri Diraja Serdang) dan adik sultan Deli bernama Raja Muda Sulaiman selaku wakil Deli.

Akhirnya disepakati bahwa Kerajaan Silou (Silou Bolak) mengakui kedaulatan Silou Dunia (Dolog Silou), Raya, Purba, dan Silimakuta. Wilayah Pagar Tongah diserahkan pada Dolog Silou, Rindung pada Purba, dan Pagar Bayu pada Raya. Sementara itu, wilayah yang tersisa milik Kerajaan Silou, yakni Silou Buttu dan Kariahan tetap dianggap berdaulat. Tuan Naposo, putra mahkota Silou dibawa dan dibesarkan di Deli. Ia kemudian diangkat sebagai kepala daerah Malasori. Belakangan Silou Buttu dan Malasori sepakat bergabung dengan Raya, sehingga turun kedudukannya menjadi *perbapaan* saja. Guna memperkokoh penggabungan ini, seorang bangsawan Silou dinikahkan dengan putri Raya.

Era Kerajaan Dolog Silou

Berkat kemenangannya itu, Tuan Taring dinobatkan sebagai raja Dolog Silou pertama. Tanah Simalungun kini memasuki masa Raja Bertujuh. Sebelumnya hanya ada empat kerajaan, yakni Silou, Tanah Jawa, Siantar, dan Panei. Namun dengan terpecahnya Silou menjadi empat, yakni Dolog Silou, Purba, Raya, dan Silimakuta, kini ada tujuh kerajaan di Simalungun. Garis keturunan Silou Dunia yang sebelumnya hanya menjabat sebagai *raja goraha* (wakil raja) kini naik kedudukannya menjadi raja. Dinasti atau garis keturunan Silou Buttu atau Silou Bolak yang sebelumnya berkedudukan sebagai raja Silou berakhir sudah.

Tuan Taring digantikan oleh Tuan Lurni. Semasa pemerintahan beliau atau tepatnya tanggal 14 April 1887 pecah perselisihan antar pemuka masyarakat di Dolog Silou. Sepeninggal Tuan Lurni, singgasana Dolog Silou beralih pada Tuan Tanjarmahei (1850-1912). Belanda mulai berupaya menanamkan pengaruhnya di Simalungun. Itulah sebabnya, para raja membangun aliansi Empat Serangkai yang beranggotakan Dolog Silou, Panei, Siantar, dan Tanjung Kasau. Satu per satu kerajaan-kerajaan di Simalungun tunduk ke bawah kekuasaan Belanda. Tatkala ekspedisi militer Belanda keempat (1889-1892) dilancarkan, Tuan Tanjarmahei tetap mengupayakan agar wilayahnya jangan jatuh ke tangan Belanda. Kendati demikian, pada 10 September 1907, Tuan Tanjarmahei terpaksa menandatangani *korte verklaring*. Oleh karenanya, masuklah Dolog Silou ke dalam payung pengaruh pemerintah kolonial. Belanda mendirikan markas tentaranya di Saribudolok tahun

1910, tetapi dipindahkan ke Sidikalang pada pertengahan tahun 1911. Ketika itu, daerah Simalungun telah menjadi salah satu tujuan penanaman modal asing.

Pada 1912 Tuan Tanjarmahei terjatuh dari kuda tunggangannya sewaktu bertugas ke Saribudolok. Akibatnya, beliau tak lagi sanggup memangku tugas-tugas kerajaannya sehingga pemerintahan dialihkan pada putranya, Tuan Ragaim (1913-1942). Tuan Tanjarmahei akhirnya mangkat pada 3 Juni 1923.[276] Ketika itu, kedudukan Belanda telah semakin mantap. Semasa pemerintahan beliau, kantor kerajaan dipindahkan ke Barubei, sekitar 12 km dari Pematang Dolok; namun belum dibangun jalan yang baik antara kedua tempat tersebut. Akibatnya beliau terpaksa berjalan sejauh 12 km demi mengunjungi kantornya di Barubei. Pada saat-saat tertentu, beliau harus pula naik kuda atau delman ke Saribudolok sejauh 20 km dari Barubei guna mengunjungi Kontrolir Westenberg. Salah satu kegemaran Tuan Ragaim adalah berburu. Setelah menderita sakit selama dua tahun, mangkatlah beliau pada 1947.

Tuan Ragaim digantikan oleh Tuan Bandaralam (1942-1947). Pemerintahan beliau bertepatan dengan masa penjajahan Jepang yang diakhiri dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang akhir masa pemerintahan beliau meletuslah prahara yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Tujuannya adalah mengganyang seluruh raja dan sultan yang ada di Sumatera Timur. Tuan Bandaralam termasuk salah seorang raja yang hendak dibunuh, tetapi untungnya beliau berhasil diselamatkan oleh rakyat. Episoda ini menutup lembaran sejarah Kerajaan Dolog Silou.

---

276. *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 89.

Tuan Horsik (Jigou)

Sibuangbuang (Tuan Silou Butu, Tuan Sindarlela, -1567

Hotang Momo (ke Silou Hatinggian)

Tuan Hapoltakan (RajaToriti)

Tuan Rattip

TuanKitti

Seorang putri

Tuan Timbangraja (Silou Dunia)

Tuan Morahkalam

Tuan Moraijou (Morawijaya)

Tuan Saksaknijou

Raja Jamera

Tuan Naposo

Tuan Rubun (m. Tambak Lombang)

Tuan Bedarmaralam

Tuan Rajomin

Tuan Moraijou

Raja Taring

Tuan Lurni

Tuan Tanjarmahei (1850-1912)

Tuan Ragaim (1913-1942)

Tuan Bandaralam (1942-1947)

Silsilah Kerajaan Dolog Silou
(dibuat berdasarkan data yang diambil dari Kerajaan Silou: Historiae Politia, karya Drs. Herman Purba Tambak)

ii. PANAI (PANE atau PANEI)

Menurut salah satu sumber, leluhur raja-raja Panai berasal dari kampung Suba Nabolak, yang didirikan oleh raja Silau di dekat Tiga Runggu. Salah seorang tokoh yang berdiam di Suba Nabolak memiliki dua orang putra. Yang sulung bekerja sebagai petani, sedangkan yang bungsu merupakan seorang pemburu. Karena kerap pulang terlambat, makanan dan minum biasanya sudah dihabiskan oleh kakaknya. Saat memprotes tindakan tersebut, ia malah dipukul oleh kakaknya, sehingga memutuskan pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Dengan membawa *parpanean* atau almanak milik ayahnya, berjalanlah ia ke arah timur dan tiba di kampung atau dusun raja Nagur dekat Pematang Pane sekarang.

Ia lantas menikah dengan putri kepala kampung dan selanjutnya keturunannya menyandang marga Purba Suhu Nabolak atau Purba Sida Suhu. Ketika mertuanya, meninggal, ia menggantikannya sebagai kepala kampung dan mulai meluaskan daerah kekuasaannya. Lama-kelamaan, kampungnya menjelma menjadi sebuah kerajaan dan dinamainya Pematang Pane. Diangkatnya tiga orang pemuka kerajaan, yaitu: Orang Kaya Marga Purba Girsang, Jaguraha (panglima perang), dan Tuhan Suhi[277].

Menurut sumber lainnya, raja Silou Dunia bernama Tuan Timbangraja memiliki dua orang putra. Suatu ketika terjadi perkelahian antara keduanya, karena kakaknya tidak mengajak adiknya makan bersama, serta hanya meninggalkan sisa minuman tuak saja. Hal ini sebenarnya merupakan siasat jahat hulubalang. Akibat perkelahian ini, kakaknya berpindah ke jurang (lombang) serta berdiam di tempat tersebut. Semenjak saat itu, ia menyandang marga Purba Tambak Lombang. Sedangkan adiknya pergi merantau serta mendirikan perkampungan bernama Suha Bolak, dekat Tigarunggu. Ia kemudian menyandang marga Purba Tambak Sidasuha.

Sewaktu terjadi peperangan antara Silou Dunia dan Silou Bolak, raja Silou Dunia meminta bantuan Suha Bolak. Kendati demikian, ia terbunuh di sana. Raja Silou Bolak lantas memerintahkan agar keluarga Silou Dunia ditawan di Suha Bolak. Adik bungsu yang kini berkuasa di Suha Bolak dengan gelar Tuan Suha Bolak belakangan menikah dengan putri raja Siantar. Tuan Suha Bolak mengatakan bahwa ia memiliki buku pusaka (*parpanean* atau *laklak pustaha*) yang diwarisi dari

277. Lihat *Sejarah Batak*, halaman 172.

orang tuanya. *Pustaha* tersebut memuat bagaimana cara-cara menentukan hari baik atau buruk, mantra-mantra, dan nasihat-nasihat kebijaksanaan. Mertuanya tertarik melihatnya dan mengundang Tuan Suha Bolak ke istananya sambil membawa *pustaha* tersebut.

Sebelum membacakan *pustaha*-nya itu, Tuan Suha Bolak melafalkan mantra, sehingga ruangan menjadi gelap. Tujuannya agar tulisan yang bersinar dalam kegelapan nampak. Setelah mantra dilantunkan, muncul gambar naga yang dikenal sebagai *panei bolon*. Gambar ini konon sanggup meramalkan peristiwa baik dan buruk yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pustaha itu. Oleh sebab keajaiban-keajaiban yang ditampilkannya itu, Tuan Suha Bolak diangkat sebagai raja Panei pertama. Adapun nama kerajaannya, yaitu Panei diambil dari kata *parpanean*[278].

Kerajaan Panei memiliki panglima perang bergelar Tuan Simarimbun. Menurut legenda, Tuan Simarimbun mempunyai ilmu gaib yang disebut *timah siborong-borong*. Konon ilmu ini sanggup menerbangkan musuh-musuh yang hendak menyerang Panei. Adik Tuan Simarimbun yang bergelar Tuan Anggi Simarimbun juga menguasai ilmu gaib yang disebut *hurjabni huda sianjur*. Ia sanggup menjadikan dirinya tak terlihat ketika menunggang kuda sambil menghunus pedang, guna memerangi musuh-musuh Panei.

Raja Panai kedua bergelar Marsita-Juri atau Parhuda Sitanjur[279]. Ia berhasil menaklukkan Dusun Siantar, Urung Sida Dolok, Kerajaan Sapala Tuhan (Hulu Pane), dan lain sebagainya. Oleh karena kesaktiannya, ia dikenal dengan julukan "Hantu Pane." Raja-raja Panei yang ketiga hingga ke-8 tidak diketahui namanya, dan biasanya hanya disebut Raja Panei Ketiga, Raja Panei Keempat, dan seterusnya. Raja-raja yang memerintah Pane selanjutnya adalah Tuan Sarmalam, Tuan Sarhalapa, Tuan Jintama, Tuan Jontama (±1870–1899), Tuan Jadiamat (1907-1920), Tuan Bosar Sumalam (1920-1946), dan Tuan Marga Bulan (1946)[280]. Raja ke-15 dan sekaligus terakhir Kerajaan Panei ini tewas saat pecahnya Revolusi Sosial tahun 1946.

Setiap kali dinobatkan, raja Pane didudukkan di atas tumpukan buku kulit kayu (*pustaha*) setinggi 1 meter, yang diwarisi dari Kerajaan Silau (Silo) lama.

278. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 97.
279. Menurut salah satu sumber, disebutkan bahwa beliau memerintah (± 1850–± 1870). Tetapi, tampaknya Panei telah berdiri jauh sebelum itu, karena telah ada 15 raja yang memerintah Panei.
280. Lihat *Pustaha Panei Bolon*, halaman 11-12.

Raja-raja Kerajaan Dolok Silo juga mewarisi *pustaha-pustaha* semacam itu. Oleh karenanya, kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat penyimpanan berbagai *pustaha* yang diwarisinya dari kerajaan-kerajaan pendahulunya.Raja Panai menerima tanda kebesaran dari sultan Aceh berupa keris (*terapang*), sekeping bulatan dari emas (*semiga*), dan sebuah gambar ikan.[281]

iii. PURBA

Kerajaan ini para penguasanya bermarga Purba dan dianggap sebagai wakil sultan Aceh. Buktinya adalah cap Aceh yang dimiliki oleh raja-raja Purba[282]. Rajanya yang pertama adalah Tuan Pangultop Ultop. Ia mengembara dari Tuntung Batu di Pakpak Dairi ke Simalungun. Ada kisah yang meriwayatkan bahwa leluhur kerajaan Purba ini suatu ketika berburu burung Tuntung Batu. Hewan yang dikejarnya itu hampir tertangkap, tetapi berhasil meloloskan diri. Diburunya lagi dan kembali hampir terperangkap. Demikian terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya tibalah ia di kampung Nagur Raja. Anehnya, burung itu tak dijumpainya lagi. Oleh pemuka di kampung itu, ia diperintahkan berburu burung dan namanya kemudian dikenal sebagai Pangultop Ultop. Bahkan karena perangainya yang baik, pemuka kampung Nagur Raja mengangkatnya sebagai menantu.

Suatu hari, saat sedang pergi berburu ia menjumpai burung Tuntung Batu yang pernah dikejarnya dahulu. Burung ini tentunya merupakan hewan yang istimewa, karena Pangultop Ultop mengejarnya sampai sebegitu jauh. Peristiwa yang sebelumnya terjadi berulang kembali dan Pangultop Ultop terus mengejar hewan itu hingga ke Pematang Purba sekarang. Di sana burung itu menghilang dan Pangultop Ultop mendirikan sebuah pondok di sana. Ia menduduki kawasan tersebut yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Purba dengan dirinya sebagai raja pertama.

Menurut sumber lain[283], Dalam perjalanan pulangnya ke Nagur Raja, Pangultop Ultop tersesat hingga ke kampung Simalobong, yang merupakan wilayah Panei. Penguasa daerah itu, bergelar Tuan Simalobong dan bermarga Damanik. Salah seorang adik perempuan Tuan Simalobong terpesona oleh ketampanan Pangultop Ultop. Mereka akhirnya semangat hendak menikah. Namun setelah itu, wanita tersebut kembali ke kampung halamannya. Kendati demikian, wajah Pangultop

281. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 139.
282. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, halaman 138.
283. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 110-111.

Ultop selalu terbayang di benaknya. Beberapa waktu kemudian, ia meminta izin ayahnya berkunjung ke Simalobong dengan harapan berjumpa dengan Pangultop Ultop, tetapi tak diizinkan. Alasannya, kondisi perjalanan saat itu masih belum aman. Setelah jalan ke Sipolha mulai ramai, pergilah adik perempuan Tuan Simalobong dengan disertai kawannya. Akhirnya ia berjumpa pujaan hatinya di Tiga Langgiung, dekat Pekan Haranggaol. Waktu itu, kebetulan Pangultop Ultop sedang berdagang sayur beserta buah-buahan. Kasih mereka kembali bersemi dan pasangan itu menikah. Mereka kemudian membuka perkampungan baru, yang mengundang penduduk bermarga Purba dari daerah Pakpak dan kampung Siboro pindah berdiam bersama mereka.

Tuan Simalobong tidak menyetujui perkawinan itu dan berniat mengusir Pangultop Ultop dari daerah kekuasaannya. Namun, beliau bersedia membuktikan melalui sumpah bahwa kawasan yang didudukinya itu memang kepunyaannya. Adapun sumpah itu berbunyi:

Anggo lang tanohku na huhunduli on, janah bahku na hu inum on, matei ma ahu, tapi anggo tanohku do na hunduli on janah bahku do na huinum on, ahu ma hot jadi tuan ijon.

(Jika tempat yang kududuki ini bukanlah tanahku dan air yang kuminum ini bukan airku, maka akupun akan mati, tetapi bila semua ini adalah milikku, maka akulah yang dipertuan di tempat ini).[284]

Ternyata Pangultop Ultop tetap hidup dengan selamat, sehingga membuktikan kebenaran sumpahnya. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Purba pada tahun 1515[285]. Raja Purba terkenal sebagai raja terkaya di Simalungun. Konon, kekayaannya berasal dari peperangan antara Batak dengan Aceh. Raja-raja Purba setelah Pangultop Ultop hingga rajanya rajanya yang terakhir secara berturut-turut adalah sebagai berikut: Tuan Ranjiman, Tuan Nanggaraja, Tuan Batiran, Tuan Bakkaraja, Tuan Baringin, Tuan Bona Batu, Tuan Raja Ulan, Tuan Atian, Tuan Horma Bulan, Tuan Raondop, Tuan Rahalim, Tuan Karel Tanjung dan Tuan Mogang.

Tuan Rahalim tercatat menandatangani *korte verklaring* pada 5 September 1905. Beliau meninggal pada 1921. Sewaktu beliau mangkat, putranya bernama

284. *Sejarah Simalungun* (karya D. Kenan Purba dan Drs. J.D. Poerba), halaman 31.
285. Ibid. Halaman 31.

Tuan Mogang belum dewasa, sehingga pemerintahan kerajaan sementara waktu dipangku oleh Tuan Karel Tanjung (Parajabayak), menantu Sang Naualuh Damanik, raja Siantar. Baru pada 1934 Tuan Mogang dinobatkan sebagai raja Purba. Beliau meninggal tahun 1947 di tengah-tengah kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuan Karel Tanjung juga mangkat pada tahun yang sama di Haranggaol. Salah seorang keturunan Kerajaan Purba, yakni Tuan Maja Purba, menjabat sebagai bupati pada tahun 1945. Menurut buku *Sejarah Batak*, telah ada 12 generasi yang menguasai Purba. Dengan demikian bila diperhitungkan satu generasi adalah 30 tahun, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada sekitar tahun 1586; yakni 360 tahun sebelum 1946 (tahun berakhirnya Kerajaan Purba karena revolusi sosial).

Sebagai penutup pembahasan mengenai Kerajaan Purba perlu dikemukakan bahwa terdapat lima *perbapaan* dalam struktur pemerintahannya: Tuan Nagori, Tuan Hinalang, Tuan Hutaraja, Tuan Seribujadi, dan Tuan Siboro. Sementara itu *harajaan-harajaan* yang terdapat di Pematang Purba adalah Nagodang, Rumah Tongah, Anak Boru, dan Gamot[286].

iv. RAYA

Raja Raya pertama adalah Tuan Si Pinang Sori, yang digantikan secara berturut-turut oleh Raja Raya Tuan Lajang Raya, Raja Raya Simbolon, Raja Gukguk, Raja Unduk, Raja Denggat, Raja Minggol, Raja Poso, Raja Nengel, Raja Bolon, Raja Martuah, Tuan Morahkalim, Tuan Jimmahadim Tuan Huta Dolog, dan Tuan Rondahaim (Tuanku Namabayan). Meskipun demikian, buku *Sejarah Batak* halaman 174, menyebutkan hanya 5 raja saja, yakni Si Pinang Sori, Tuan Nababajan, Tuan Rondahaim, Tuan Kapultakan, dan Tuan Gomuk. Oleh karenanya, Batara Sangti, penulis buku tersebut, memperkirakan bahwa Kerajaan Raya berdiri sekitar tahun 1796.

Leluhur raja-raja Raya berasal dari Gurgur Simindo, yakni sebuah kampung di Samosir. Di sana tinggal seseorang bernama Ompu Sohajoloan Saragih. Kampung itu mengalami serangan musuh dan Ompu Sohajoloan Saragih melarikan diri bersama putranya Si Pinang Sori dan kemenakannya (putra kakaknya) bernama Saragih Sumbayak. Dalam pelariannya itu, ia membawa serta pula kerbaunya Si Nanggalutu dan anjingnya Si Huring Parburu. Saragih Sumbayak berenang

286. *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 113.

sambil memegang ekor anjingnya di Danau Toba dan tiba di Liang Deak dekat Langgiung Purba. Berdiamlah ia di sana dan sehari-harinya hidup dari memancing serta berburu burung. Suatu malam, sewaktu sedang duduk-duduk anjingnya menggonggong ke arah sebuah gua di Liang Deak. Saragih Sumbayak bersama anjingnya memasuki gua tersebut dan tersesat di dalamnya. Setelah berjalan sepanjang malam, anjingnya menggonggong ke atas dan tampak olehnya sebuah lubang.

Saragih Sumbayak mendaki ke atas dan ternyata di dekat tempat itu terdapat sebuah kampung bernama Raya Tonga. Penduduk kampung tersebut yang merupakan sisa-sisa Kerajaan Nagur menyangkanya sebagai makhluk gaib atau dewa yang keluar dari bawah tanah. Tetapi Saragih Sumbayak menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa. Oleh pemuka kampung itu, ia diberi sebuah rumah dan menjadi makin kaya sehingga dihormati oleh warga sekitarnya. Pemuka kampung yang tak memiliki putra, menikahkan putrinya dengan Saragih Sumbayak. Belakangan, Saragih Sumbayak menggantikannya sebagai penguasa di kawasan tersebut. Setelah diangkat sebagai pemuka kampung Raya Tonga, diperintahkannya menutup lubang gua tempatnya keluar itu.

Kini kisah beralih pada Ompu Sohajoloan yang menyeberangi Danau Toba dengan disertai Si Pinang Sori sambil menunggangi Si Nangga Lutu. Mereka tiba di Si Garingging dan menetap di sana. Ketika dewasa, Si Pinang Sori menghidupi dirinya dengan berburu burung. Konon, pada suatu hari, kerbaunya melarikan diri ke arah timur dan tiba di dekat Raya Tonga. Dengan kerbau itu dibukanya sebuah ladang di Raya Tonga dan dimulainya kegiatan bercocok tanam. Tidak berapa lama setelah itu, terjadilah bencana kelaparan akibat musim kering berkepanjangan. Si Pinang Sori yang telah memperoleh banyak hasil berkat kesuburan ladangnya membantu penduduk sekitar dengan imbalan barang-barang keperluan sehari-harinya. Hal ini terdengar juga oleh Saragih Sumbayak yang telah menjadi pemuka di kampung Raya Tonga dan ia merasa tak senang dengan hal itu, karena banyak rakyatnya yang pindah ke dekat ladang Si Pinang Sori.

Ia lantas memanggil Si Pinang Sori dan menanyakan asal usulnya. Si Pinang Sori menceritakan seluruh riwayat hidupnya, sehingga Saragih Sumbayak mengenali bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Bahkan Saragih Sumbayak tidak keberatan apabila rakyat mengikuti Si Pinang Sori. Rakyat lalu menobatkan

Si Pinang Sori sebagai raja mereka dengan gelar Raja Raya Simbolon. Setelah menjadi raja, Si Pinang Sori tetap meminta nasihat pada Saragih Sumbayak (Tuan Raya Tonga). Oleh sebab itu, Saragih Sumbayak dan keturunannya kemudian dikenal sebagai raja adat. Hingga kini, rakyat Raya Tonga, Raya Bayur, dan Raya Usang mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Saragih Sumbayak; sementara itu, penduduk Buluh Raya menganggap dirinya keturunan Si Pinang Sori dan bermarga Saragih Garingging.

Pada 1883, Dr. B. Hagen melakukan peninjauan ke daerah Raya. Kendati demikian, Tuan Rondahaim kurang menyukai kehadiran Belanda sehingga beliau berupaya menghalau mereka hingga Padang dan Bedagai. Ketidaksukaan Tuan Rondahaim dipicu pemberian konsesi oleh pemerintah kolonial secara sewenang-wenang pada perkebunan-perkebunan asing di daerah Raya Kahean. Raja Raya ini mengutus panglimanya bernama Tobayas ke Pagurawan, guna meminta pada pemerintah kolonial agar jangan meneruskan pemberian konsesi sepihak tersebut. Namun, Tobayas justru ditangkap oleh Belanda. Semasa berkecamuknya Perang Batak, raja-raja Simalungun menjalin kerja sama dengan Sisingamangaraja XII. Mereka membangun pakta pertahanan bersama dengan Tuanku Namabayan atau Tuan Rondahaim (Rondahein) sebagai panglima perangnya[287]. Ia kemudian berprakarsa menyusun kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi Belanda. Bersamaan dengan itu, kurang lebih pada 1887, Belanda menyingkirkan Raja Tengku Haji Muhammad Nurdin (Tuanku Maharaja Muda) dari Padang, Tebingtinggi, karena yang bersangkutan selalu menentang kebijaksanaan Belanda. Oleh sebab itu, ia menggerakkan dan menggalang tetangganya–raja-raja Simalungun–bekerja sama menghalau penjajah yang telah menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan. Menanggapi permintaan bantuan ini, Rondahein lantas memimpin pasukan Simalungun menyerang kawasan Tebingtinggi.

Akibatnya, pasukan Belanda yang bertahan di Tebingtinggi terpaksa meminta bala bantuan dari Medan. Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan 60 orang yang dipimpin Kapten J.C.R. Schenk. Pertempuran pecah di kawasan sekitar Tebingtinggi, seperti Solok Marlawan dan Dolok Sagala. Ketika itu, pasukan Silou juga turut memberikan bantuannya. Namun, mengalami kekalahan karena pasukan kolonial lebih unggul persenjataannya. Belanda menakut-nakuti rakyat

287. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, halaman 52.

agar tidak membantu para pejuang dengan membakar kampung Dolok Kahean. Guna menghadapi Belanda, Rondahein menerapkan strategi perang gerilya. Serangan yang dilancarkannya pada Februari 1888 terhadap pasukan Belanda di Baja Lingge boleh dikatakan berhasil. Perlawanan Rondahein ini sungguh merepotkan Belanda, yang senantiasa gagal menangkapnya. Akhirnya, seperti biasa Belanda menerapkan siasat licik dengan mengundang Rondahein berunding. Namun, Rondahein menyadari bahwa undangan ini hanya ditujukan untuk menangkapnya. Yang diperintahkan menghadiri perundingan hanyalah wakilnya saja dan benarlah dugaan Rondahein bahwa wakilnya itu kemudian ditangkap oleh Belanda. Rondahein meneruskan perlawanannya hingga ia wafat pada tahun 1891 dan digantikan oleh Tuan Sumayan (Kapoltakan).

Menurut sumber lain, dalam peperangan pada 1888, Tuan Rondahein terkena peluru Belanda, sehingga terpaksa kembali ke kampung halamannya di Sinondang. Saat lukanya dirawat timbul komplikasi dengan penyakit lainnya, sehingga beliau wafat pada 1889. Jenazah beliau disemayamkan sementara waktu di istana dan baru dapat dimakamkan dengan upacara kebesaran sesuai adat Simalungun pada 1892 di Pematang Raya. Bahkan, dalam upacara itu hadir utusan Belanda, yang memperlihatkan keseganan pemerintah kolonial terhadap beliau. Dalam kata sambutannya, utusan Belanda itu menyebut Tuan Rondahein sebagai "Napoleon van Batak."[288] Ini membuktikan kepiawaian Tuan Rondahein yang dapat disejajarkan dengan Napoleon.

Tuan Rondahein merupakan tokoh yang tak sudi berkompromi dengan Belanda. Tengku Haji Muhammad Nurdin, raja Padang, yang pernah dijatuhkan dari singgasananya, namun kemudian dipulihkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial, menyampaikan melalui Tuan Hapoltakan bahwa beliau akan datang ke Pematang Raya sambil membawa sedikit buah tangan sebagai tanda terima kasih. Namun, hal ini beliau tolak dengan tegas karena menyadari bahwa Tengku Haji Muhammad Nurdin telah bekerja sama dengan penjajah. Sewaktu raja Padang itu datang menjumpainya dengan membawa gramafon, candu, dan hadiah-hadiah lainnya, beliau memerintahkan anak buahnya agar membuang semuanya ke Bah Bakuo. Hal ini membuktikan sikap Tuan Rondahein yang anti penjajah. Beliau

288. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya D. Kenan Purba & Drs. J.D. Poerba), halaman 45.

beranggapan bahwa siapa saja termasuk kerabatnya sendiri apabila bekerja sama dengan penjajah adalah musuh perjuangannya[289].

Kerajaan Raya mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda pada 1904 yang diwujudkan dengan penandatanganan *korte verklaring* dan statusnya diubah menjadi daerah swapraja. Kontrak politik dengan pemerintah kolonial ini lalu diperbarui lagi pada 4 September 1907. Ketika itu, secara serentak Kerajaan Panei dan Silimakuta menandatanganinya pula. Semenjak tahun 1904 di Raya telah berdiri sekolah-sekolah rakyat tiga tahunan (Volk-school), yakni di Raya Tongah, Raya Usang, dan Bulu Raya[290]. Pada tahun 1926 dan 1927 secara berturut-turut dibuka poliklinik di Raya Kahean serta Pematang Raya. Tuan Sumayan memperoleh penghargaan berupa bintang *Trouw van Dienst* dari pemerintah kolonial di tahun 1926. Demi memperlancar jalannya pemerintahan, dibentuk perwakilan Kerajaan Raya di Raya Kahean tahun 1932. Sebagai kepalanya diangkat putra Tuan Sumayan bernama Tuan Yan Kaduk Saragih Garingging, yang selanjutnya bergelar Tuan Raya Kahean. Tuan Sumayan mangkat pada 1 Januari 1933 dan digantikan oleh putranya, Tuan Gomok (Bajaraya). Perkembangan agama Kristen mengalami kemajuan di bawah bimbingan Pendeta Y. Bismar Saragih. Dalam bidang pendidikan dikenal pula tokoh bernama Yason Sinaga.

Beliau mangkat pada tahun 1940, dan karena putranya bernama Tuan Jahali belum dewasa, singgasana Raya sementara waktu dipangku oleh Tuan Yan Kaduk, yang sebelumnya menjabat sebagai Tuan Raya Kahean. Jabatan sebagai penguasa distrik Raya Kahean lantas diserah-terimakan pada putra Tuan Yan Kaduk bernama Tuan Yansen Saragih. Tuan Yan Kaduk Saragih Garingging merupakan tokoh yang memajukan seni tari Simalungun. Beliau terkenal pula sebagai ahli kelistrikan dan pompa air, yang pengetahuannya bermanfaat bagi penduduk Sindar Raya. Semasa pemerintahan Tuan Yan Kaduk pecah revolusi sosial pada 3 Maret 1946 yang menumbangkan Kerajaan Raya.

v. SIANTAR

Para penguasa kerajaan ini bermarga Damanik. Leluhur raja-raja Siantar adalah seorang tokoh bernama Namartuah Damanik, yang juga dikenal sebagai Puang Lima Parmata Tunggal, Raja Manualang, Datu Parmata Manunjung, Datu Parmata

289. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya D. Kenan Purba & Drs. J.D. Poerba), halaman 44.
290. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 144.

Manunggal, atau Datu Partiga-tiga-Sihapunjung[291]. Menurut tradisi, beliau adalah putra raja Nagur terakhir. Konon beliau pernah pula menjabat sebagai panglima perang Kerajaan Nagur. Ketika itu, Panglima Indrawarman melancarkan serangan terhadap Nagur. Puang Lima Parmata Manunggal terlibat dalam pertempuran di Pagurawan dan sekitar wilayah Asahan-Indrapura-Perdagangan. Menurut legenda, beliau raib tak tentu rimbanya di Bukit Kubah, Bandar Meriah.

Namun, Puang Lima Parmata Manunggal belakangan muncul lagi dengan nama samaran Raja Manualang. Beliau berdiam bersama sahabat karibnya, Raja Mangatur, penguasa Negeri Sionggang Sibisa. Raja Manualang kemudian mengembara dan tiba di Sipolha. Tidak berapa lama kemudian, beliau berhasil menjadi raja Sipolha dan menikah dengan putri Raja Mangatur Manurung. Pernikahan ini menurunkan raja-raja Sipolha[292]. Belakangan, beliau mengembara lagi memasuki wilayah yang dahulu pernah diperintahnya tatkala menjadi panglima perang Kerajaan Nagur. Ternyata di kawasan itu telah berkuasa Raja Jumorlang, yang sesungguhnya masih kerabat Kerajaan Nagur juga. Ketika itu, beliau menyamar sebagai pandai besi dengan julukan Datu Parmata Manunggal. Terjadi perang tanding memperebutkan kekuasaan antara beliau dan Raja Jumorlang. Sebelum bertarung, mereka telah menyepakati bahwa yang menang berhak menjadi raja. Ternyata, nasib mujur berpihak pada Datu Parmata Manunggal. Raja Jumorlang mati di ujung tombaknya sendiri sehingga belakangan ada kalimat ejekan *partodos ni Raja Jumorlang*. Kini terbukalah peluang Datu Parmata Manunggal menjadi penguasa kawasan tersebut dan berdirilah Kerajaan Siantar dengan beliau sebagai raja pertamanya.

Datu Parmata Manunggal menikahi janda Raja Jumorlang. Dari pernikahan dengan suaminya terdahulu, ia dikarunia seorang anak bernama Ari Urung (gelar Oppu Barita). Selanjutnya, Ari Urung diangkat sebagai anggota dewan Kerajaan Siantar dengan jabatan bendahara bergelar Tuan Bah Bolak. Kedudukan ini dipangku secara turun-temurun hingga tahun 1945. Sementara itu, pernikahan janda Raja Jumorlang dengan Datu Parmata Manunggal membuahkan anak kembar lelaki dan perempuan. Yang lelaki bernama Raja Namaringis. Ia kelak

291. Lihat *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa*, halaman 37.

292. Silsilah raja-raja Sipolha adalah sebagai berikut: Raja Manualang-Raja Uluan Damanik-Raja Naibingbingan-Raja Panunggal-Raja Hobbun-Raja Nai Horsik-Tuan Sakkuda-Tuan Jarani-Raja Mangambat-Raja Mangambei-Tuan Tahan Batu-Tuan Jukkar-Tuan Humala Sakkuda.

menjadi raja Siantar kedua. Sedangkan yang perempuan bernama Bou Sormainim (Anggarainim atau Rutting Omas)-terkenal karena kecantikannya. Menurut penuturan legenda, Datu Parmata Manunggal raib di Gunung Sijambak Bahir, yang terletak di kawasan Sipolha. Konon, beliau sedang dalam perjalanan menjenguk kaum keturunannya di Sipolha. Saat tiba di puncak gunung itu, beliau memandang Negeri Sipolha yang berada di bawahnya dan kemudian hilang tak tentu rimbanya.

Versi lain mengisahkan mengenai Kerajaan Raja Sitanggang[293]. Bersamaan dengan itu terdapat kawasan bernama Kampung Silampuyang yang tak termasuk daerah kekuasaan Raja Sitanggang. Datu Partiga-tiga-Sihapunjung ketika itu sedang mengembara dan tiba di Kampung Silampuyang. Ia berdiam di sana dan menikahi putri keturunan Tuan Silampuyang, yakni penguasa daerah itu. Berkat kecerdikannya, beliau berhasil menaklukkan Raja Sitanggang, yang kemudian menyingkir ke Tanah Jawa[294]. Datu Partiga-tiga-Sihapunjung lalu mengangkat dirinya menjadi raja Siantar.

Raja-raja yang memerintah Siantar selanjutnya adalah Raja Namaringis, Raja Ramajim (Bacod Dihitam), Raja Pagarujung, Raja Nalongah, Raja Nai Rih, Raja Nai Horsik, Raja Na Pitung, Raja Namartuah, Raja Saduraja, Raja Namartuah, Raja Sadurupa, Raja Mapir (Raja Namatuah atau Nai Parsoburan), Raja Sang Naualuh Damanik, dan Raja Riahkadim.[295].

Raja Sang Naualuh Damanik (1882–1904), putra Raja Mapir (±1850- ±1880), adalah pejuang yang gigih menentang kolonialisme Belanda. Beliau menduduki singgasana Siantar setelah ayahnya yang lanjut usia mangkat pada 1880. Ketika itu, beliau berusia sekitar 17 tahun dan belum menikah[296]. Saat mulai memerintah, ia didampingi oleh pamannya, Tuan Itam Damanik (Tuan Anggi Raja Hitam), selaku perdana menteri Siantar, dan Tuan Bah Bolak. Pada 1882, barulah Sang Naualuh Damanik dinobatkan secara resmi sebagai raja Siantar dan kurang lebih

---

293. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 28.
294. Belakangan, Raja Sitanggang kembali terusir dari Tanah Jawa oleh Muharaja.
295. Urutan raja-raja ini berdasarkan silsilah dalam buku *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa*, halaman 36. Menurut http://forum.detik.com/showthread.php?p=2529504, diunduh tanggal 27 Juli 2010, disebutkan bahwa urutan raja-raja yang memerintah di Siantar adalah Raja Naihorsik, Raja Hitam, Raja Nai Halang, Raja Namaringis, Raja Namartuah, dan Raja Mopir. Sumber lain menyebutkan bahwa raja-raja Siantar adalah Si Partiga-tiga (± 1860–± 1870), dan Si Ali Urung (± 1870–± 1882).
296. Menurut buku *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, beliau berusia 28 tahun; tetapi menurut buku *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 25, beliau disebutkan berusia 17 tahun.

bersamaan dengan itu dilangsungkanlah upacara pernikahan beliau. Sesudahnya, jenazah ayahnya dapat dimakamkan, karena menurut adat, jenazah raja belum boleh dikebumikan sebelum penggantinya resmi dilantik. Dalam kurun waktu itu, almarhum dianggap masih memerintah melalui perdana menterinya.

Sekitar tahun 1880-1890, terjadi perang saudara di daerah Simalungun, yang dipicu tidak bersedianya para kepala bandar atau daerah tunduk lagi pada rajanya. Dampaknya paling terasa di Pamatang Sidamanik, yang merupakan wilayah Kerajaan Siantar, sehingga mengakibatkan terbakarnya *rumah bolon* (istana) Sidamanik. Jenazah penguasa Sidamanik, Tuan Nai Langit, yang sedang disemayamkan sebelum dikebumikan turut terbakar[297]. Demi mengatasi situasi kacau ini, para raja Simalungun bertekad meminta bantuan Belanda yang telah bercokol di daerah pesisir Sumatera. Perjanjian persahabatan antara pemerintah kolonial Belanda dan raja-raja Simalungun dituangkan dalam Surat Pernyataan no.15 tahun 1889. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua belah pihak akan menghormati wilayah kedaulatan masing-masing. Dengan kata lain, perjanjian persahabatan ini dibuat atas dasar azas kesetaraan.

Kendati demikian, Belanda sesungguhnya mengincar kawasan Simalungun. Setelah melemahnya perjuangan Rondahein, terbukalah peluang bagi Belanda menguasai keseluruhan kawasan Simalungun. Pertama-tama Belanda berniat menanamkan pengaruhnya di Kerajaan Siantar, yang saat itu diperintah oleh Raja Sang Naualuh Damanik–penguasa Siantar ke-14. Semenjak tahun 1883, pemerintah kolonial meningkatkan ekspedisi ke daerah pedalaman Simalungun guna menjajaki sikap para raja di sana, tak terkecuali Raja Sang Naualuh Damanik yang baru dinobatkan. Namun, sikap Belanda yang gemar mencampuri urusan kerajaan dan tak mengindahkan adat-istiadat serta hak rakyat setempat menimbulkan antipati dalam diri raja Siantar ini. Bahkan, tanpa seizin raja, Belanda membuka perkebunan-perkebunan baru. Akibatnya, instruksi-instruksi Belanda kerap ditentang oleh Sang Naualuh Damanik.

Pada 1885, Sang Naualuh Damanik mengadakan perjanjian rahasia dengan pengusaha perkebunan Jerman di Medan bernama Baron von Hom[298]; di mana mereka sepakat bekerja sama mengusir Belanda dari Siantar. Rencana ini bocor ke

297. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, halaman 13.

298. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, halaman 79. Menurut buku *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, halaman 53, disebut von Horn.

telinga Belanda sehingga Baron von Hom diusir dari Medan. Ketidak-senangan beliau lainnya terhadap penjajah diwujudkan dengan mengutus Tuan Torialam Damanik membantu perjuangan Tuan Jontama Purba, raja Panei, dan Tuan Rondahaim, raja Raya, melawan Belanda di Padang Bedagai, Tebing Tinggi, tahun 1887. Dalam upaya menegakkan kekuasaannya, pemerintah kolonial menerbitkan surat pengakuan bagi raja-raja Simalungun. Dengan demikian, seolah-olah para raja menjadi taklukan pemerintah kolonial. Surat pengakuan ini juga dikeluarkan bagi Raja Sang Nauluh Damanik berupa *besluit* gubernur jenderal Hindia Belanda no. 25 tanggal 23 Oktober 1889. Dengan tegas beliau menolak *besluit* tersebut, karena tanpa pengakuan dari pemerintah kolonial pun beliau tetap raja Siantar yang sah menurut hukum adat.

Tidak lama berselang, timbul perselisihan dalam tubuh pemerintahan Kerajaan Siantar dengan disingkirkannya Tuan Marihat, karena disangka mengganggu pemerintahan kerajaan serta hendak menerbitkan permusuhan dengan Tanah Jawa. Berkat perantaraan Kontrolir Kroesen, pada bulan Maret 1891 perselisihan antara Siantar dan Tanah Jawa dapat diselesaikan secara damai[299].

Perjanjian persahabatan tahun 1889 di atas, yang menyatakan kesetaraan antara pemerintah kolonial dengan kerajaan-kerajaan di Simalungun hendak diubah menjadi *korte verklaring*, sebagai wujud pernyataan takluk pada Belanda. Oleh karenanya, kontrolir Batubara mengundang para raja Simalungun guna merundingan hal tersebut. Namun di tengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahun 1904 itu, Raja Sang Naualuh Damanik yang menyadari niat Belanda tiba-tiba bangkit dan meninggalkan pertemuan. Dengan demikian, gagal sudah upaya Belanda membujuk beliau menandatangani *korte verklaring*.

Pemerintah kolonial merasa kurang nyaman dengan pembangkangan-pembangkangan Sang Naualuh Damanik sehingga mereka merencanakan menangkap beliau. Kontrolir Batubara yang dendam karena tindakan Sang Nauluh Damanik lantas mengusulkan pada residen Sumatera Timur agar mencari siasat menjatuhkan raja Siantar tersebut. Usulan itu lalu diteruskan pada pada gubernur jenderal Hindia Belanda selaku pemerintah pusat di Batavia. Sebagai balasannya dikeluarkan surat keputusan Dewan Hindia (*Raad van Nederlandsche Indie*) no: 2478/3775/4, tertanggal 6 April 1906, yang intinya berisikan empat hal:

299. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 25.

- Apabila disebabkan alasan politik, raja yang bersangkutan tidak jadi dijatuhkan, ia hendaknya dipulihkan kedudukannya (direhabilitasi).
- Jikalau raja itu hendak dijatuhkan dari kedudukannya, hendaknya ada persiapan bagi pembentukan pemerintahan sementara.
- Menanggapi usulan residen agar raja ditahan di Medan hingga kondisi Kerajaan Siantar menjadi lebih kondusif, hal ini hanya dimungkinkan apabila pasal 47 *Regerings Regelement* (R.R) dikenakan padanya.
- Residen Sumatera Timur diperintahkan memberikan pendapatnya mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kolonial.[300]

Sebagai langkah awal menjatuhkan Sang Naualuh Damanik berbagai tuduhan dijatuhkan padanya oleh residen Sumatera Timur yang menangani kasus ini, antara lain memaksa rakyatnya memasuki agama Islam[301]. Kendati tuduhan ini tak beralasan, residen menyatakan dalam suratnya tertanggal 25 Agustus 1905, nomor 3775/4 pada gubernur janderal bahwa Sang Naualuh Damanik telah mengakui kesalahannya. Setelah semua persiapan dimatangkan, dilangsungkan penangkapan terhadap Raja Sang Naualuh Damanik berdasarkan surat keputusan gubernur jenderal no.1/1906, tertanggal 24 April 1906. Sang Naualuh Damanik baru saja pulang dari kunjungannya ke desa-desa, termasuk Kampung Tambun Nabolon yang terakhir kali dikunjunginya, ketika penangkapan dirinya dilakukan. Begitu tiba kembali di istananya, sepasukan tentara Belanda telah bersiap menantinya.

Raja Siantar yang gigih menentang penjajah ini kemudian dibawa ke Batubara dan ditahan di sana. Kendati demikian, rakyat Simalungun bergerak menentang penangkapan raja mereka. Guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan, Sang Naualuh Damanik dipindahkan ke Medan. Pada 1908, berdasarkan surat keputusan gubernur jenderal no. 57/ 1908, tertanggal 22 Januari 1908, ditetapkan bahwa Raja Sang Naualuh Damanik beserta keluarga dan para menterinya akan diasingkan ke Bengkalis. Beliau mangkat di tanah pengasingannya tahun 1914 dalam usia 58 tahun. Semasa hidupnya, beliau berjuang pula memajukan daerahnya, antara lain dengan membangun pasar di kawasan Tiga, Siantar.

300. Lihat buku *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia,* halaman 21-22. Isi pasal 47 R.R itu pada hakekatnya memberikan kesempatan pada gubernur jenderal dengan kesepakatan Dewan Hindia menahan orang-orang yang lahir di Hindia Belanda demi ketertiban umum, termasuk mengasingkannya serta melarangnya tinggal di tempat-tempat tertentu.

301. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, halaman 80.

Tujuannya adalah meningkatkan penjualan hasil bumi dari kawasan Simalungun. Beliau memberikan pula kesempatan bagi mereka yang ingin tinggal di Tiga Siantar secara cuma-cuma tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Karenanya, jumlah penduduk yang tinggal di sekitar Pematang Siantar meningkat pesat.

Sepeninggal beliau, kekuasaan di Kerajaan Siantar jatuh ke tangan residen Belanda. Sebagai pelaksana pemerintahan di sana dibentuklah dewan kerajaan yang diketuai kontrolir Belanda di Simalungun pada 1907. Anggota-anggotanya terdiri dari Tuan Sidamanik, Tuan Marihat, dan masih ditambah lagi dengan dua orang pembesar kerajaan, yaitu Tuan Si Tori Alam dan Tuan si Riahata. Mereka lantas menandatangani *korte verklaring* pada 16 Oktober 1907. Demi mengokohkan kontrak politik ini, Belanda mengumpulkan para pemuka masyarakat dari seluruh penjuru Siantar (berjumlah 38 orang) dan meminta mereka membuat pernyataan berisikan persetujuan terhadap penanda-tanganan *korte verklaring*, yang baru saja dilangsungkan oleh para pembesar kerajaan di atas.

Putra Sang Naualuh Damanik yang bernama Tuan Kadim masih belum dewasa, sehingga pemerintahan dipegang oleh Tuan Marihat dan Tuan Sidamanik selaku walinya. Sementara itu, raja Siantar yang diasingkan Belanda ke Bengkalis mangkat pada 1914. Tuan Kadim kemudian diserahkan pengasuhannya pada seorang pendeta *zending* bernama Guillaume yang berdomisili di Kerajaan Purba guna menjauhkannya dari pengaruh agama Islam. Belakangan, ia beralih menganut agama Kristen dan mengganti namanya menjadi Tuan Waldemar Tuhan Naga Huta. Setelah menginjak usia dewasa, ia diangkat sebagai raja Siantar dan menandatangani *korte verklaring* pada 18 Mei 1916. Dengan demikian, Kerajaan Siantar telah jatuh ke tangan Belanda.

Pada 18 Desember 1923, pemerintah kolonial memaksa Tuan Waldemar menyerahkan wilayah Pematang Siantar secara cuma-cuma dan tak dapat digugat lagi. Dalam penyerahan ini pemerintah kolonial diwakili oleh Hermanus Evert Karel Ezerman, ketua dewan kotapraja Pematang Siantar, dan Louis Contant Wester Nerk, gubernur Sumatera Timur. Sehubungan dengan penyerobotan tanah Kerajaan Siantar tersebut, Belanda kerap bertindak sewenang-wenang dan tak menghormati hak rakyat. Karena itu, Tuan Waldemar sendiri turun tangan membela hak-hak rakyatnya sehingga proses penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial dan perkebunan asing menjadi terhambat. Akibatnya, Tuan Waldemar

dianggap keras kepala oleh penjajah dan dijatuhkan dari kedudukannya pada 1930 serta digantikan oleh Tuan Sawadin Tuhan Bandar selaku pejabat raja Siantar. Ia memangku jabatan itu hingga meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur pada 1946 yang menumbangkan raja-raja di kawasan Sumatera Timur. Bersamaan dengan itu berakhirlah Kerajaan Siantar.

Kerajaan Siantar memiliki dua distrik, yakni Bandar dan Sidamanik. Penguasa Bandar digelari Tuan Bandar dan merupakan keturunan Tuan Bonas Mahata Damanik, putra Raja Namartuah, raja Siantar ke-9. Silsilah para penguasa Bandar adalah sebagai berikut: Tuan Bonas Mahata Damanik-Tuan Nai Dalam-Tuan Nai Horsik-Tuan Naibuttu-Tuan Nai Parsoruan-Tuan Sawadin (pemangku raja Siantar)-Tuan Destabulan Damanik. Sementara itu, para penguasa distrik Sidamanik digelari Tuan Sidamanik. Silsilah mereka adalah sebagai berikut: Raja Saduraja (raja Siantar ke-10)-Tuan Torkis-Tuan Nai Pagarbatu-Tuan Na Hu Langit-Tuan Riahata Damanik-Tuan Ramahadim. Tuan Destabulan Damanik terakhir kali menjabat sebagai kepala Djawatan Sosial Kabupaten Ambon. Sedangkan Tuan Ramahadim mangkat tahun 1956[302]. *Perbapaan-perbapaan* yang terdapat dalam Kerajaan Siantar selaku pembantu pelaksanaan tugas kepala distrik adalah Tuan Sipolha, Tuan Dolok Malela, Tuan Lingga, Tuan Jorlang Huluan, Tuan Silau Bayu, Tuan Bangun, dan Tuan Silampuyang. Selanjutnya, masih ada lagi dua orang pejabat tinggi yang membantu raja dalam urusan adat; yakni Tuan Bah Bolak dan Tuan Anggi.

302. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 33.
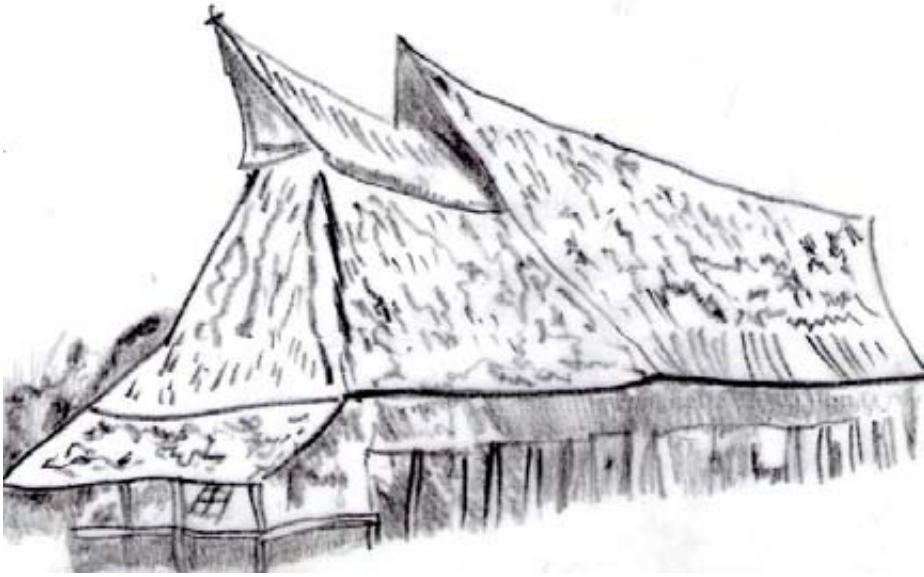
Rumah Bolon (Istana) Siantar yang terbakar tahun 1919
(Digambar ulang dari *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, halaman 54)

vi. SILIMAKUTA

Cikal-bakal kerajaan ini adalah seorang tokoh dari Lehu (Sidikalang, Pakpak) bernama Si Girsang[303]. Konon, saat berburu rusa tibalah ia ke sebuah tempat bernama Tanduk Banua (Si Piso-Piso). Ia kemudian memanjat sebuah pohon yang tinggi dan mendapati adanya sebuah kampung bernama Naga Mariah dengan penghuninya bermarga Sinaga. Si Girsang selanjutnya tinggal di kampung tersebut. Suatu ketika, kampung ini terancam oleh musuh yang berasal dari Siantar. Kepala kampung Naga Mariah yang disebut sebagai Tuhan Naga Mariah meminta bantuan Si Girsang melawan musuh. Si Girsang segera memerintahkan penduduk kampung mengumpulkan duri-durian. Lalu diperasnya cendawan merah yang beracun dalam air dan dioleskan pada duri-duri tersebut. Kemudian diletakkannya duri-duri beracun tersebut di jalan yang sekiranya hendak dilalui musuh. Air perasan cendawan merah dituangkan pula pada paya Siantar. Akhirnya, karena terkena racun yang disediakan si Girsang, banyak pasukan musuh yang tewas dan kampung itu terselamatkan.

Si Girsang melapor pada Tuhan Naga Mariah dengan ucapan: *Nunga mate marsinggalang saribu di dolok i* (beribu-ribu musuh terbunuh teronggok dekat

303. Lihat *Sejarah Batak*, halaman 177.

gunung itu)[304]. Oleh karenanya, gunung ini lalu disebut Dolong Singgalang dan kawasan sekitarnya disebut negeri Seribudolok. Berkat keahliannya mencampur racun ini, Si Girsang digelari pula Datu Parulas. Tuhan Naga Mariah menikahkan putrinya dengan Si Girsang. Ia kemudian naik takhta dan mendirikan kampung Naga Saribu. Kerajaannya disebut Silimakuta karena terdiri dari lima kampung: Rakut Besi, Dolok Paribuan, Seribu Janji, Mardinding, dan Naga Mariah.

Pernikahan Si Girsang dengan putri Tuhan Naga Mariah membuahkan dua orang putra. Yang sulung mendirikan kampung Janji Malasang dan kerajaan kecil bernama Bage. Sedangkan yang bungsu menjadi pengganti Datu Parulas. Baru pada 1903, Bage digabungkan dengan Silimakuta. Sementara itu, penguasa Seribudolok kerap pula membangkang pada raja Silimakuta hingga tahun 1930-an karena merasa lebih berhak menjadi raja kerajaan tersebut. Menurut informasi yang berasal dari Bapak Masrul Purba Dasuha, raja-raja yang memerintah di Silimakuta setelah Si Girsang adalah Raja Dungdung, Raja Dingding, Raja Guttar (gelar Parjolma Sappulu Onom), Pa Moreidup (Tuan Pamoraidup, gelar Tuan Nagasaribu) dan Pa Ngasami (Tuan Pangasami atau Tuan Situriturі) (–1932) serta Tuan Padi Raja (1934–1946). Kerajaan Silimakuta pernah diperintah oleh dua orang, yakni Pa Moreidup dan Pa Ngasami. Meskipun demikian, setelah Tuan Pangasami meninggal di tahun 1921, Silimakuta hanya diperintah oleh Tuan Pamoraidup saja. Sementara itu, kedudukan Tuan Pangasami di tingkat *perbapaan* digantikan anaknya yang merangkap anggota kerapatan (peradilan) Urung di Silimakuta.

Karena usianya yang telah lanjut, Tuan Pamoraidup digantikan oleh putranya, Tuan Padi Raja, di tahun 1934. Beliau mangkat dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1947 di daerah Barusjahe. Dalam struktur pemerintahannya, Kerajaan Silimakuta terdiri dari enam *perbapaan*: Tuan Situriturі, Tuan Rakutbesi, Tuan Saribujandi, Tuan Dolok Paribuan, Tuan Mardinding, dan Tuan Paribuan. Sementara itu, *harajaan-harajaan* yang berada di Pematang Nagasaribu adalah Nagodang, Tuan Rahe, dan Anak Boru Huta[305].

304. Lihat *Sejarah Batak*, halaman 177.
305. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 119.

vii. TANAH JAWA

Kini terletak di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tanah Jawa. Pada mulanya merupakan kerajaan marga Sitanggang. Dahulu wilayahnya meliputi seluruh Simalungun kuno. Belakangan Raja Sitanggang dikalahkan oleh Datu Partiga-tiga-Sihapunjung, seorang tokoh bermarga Manurung yang berasimilasi kepada marga Damanik. Akibat kekalahan ini, Raja Sitanggang mengungsi ke Tanah Jawa. Namun, ia mengalami kekalahan lagi terhadap marga Sinaga. Konon Raja Sitanggang kehilangan kedudukannya terhadap Datu Partiga-tiga-Sihapunjung dalam suatu pertandingan antara hulubalang Raja Sitanggang dengan ayam milik Partiga-tiga Sihapunjung. Hulubalang (*parsaholat*) Raja Sitanggang yang bersenjatakan sebilah pedang tajam berkali-berkali menyerang ayam Datu Partiga-tiga-Sihapunjung. Tetapi, ayam tersebut dengan tangkas dapat mengelakkan dirinya. Suatu ketika, ayam itu melompat ke atas dan hinggap pada kepala *parsaholat* raja. Sang hulubalang melihat ke atas dan ayam milik Datu Partiga-tiga-Sihapunjung mengepak-ngepakkan sayapnya sehingga berjatuhanlah pasir ke mata *parsaholat*. Saat hulubalang menggosok-gosok matanya guna menghilangkan pasir, ayam yang tangkas itu merobek lehernya dengan taji. Jatuhlah sang hulubalang ke tanah dan tewas. Raja yang kalah bertaruh harus kehilangan kerajaannya dan menyingkir ke Tanah Jawa, sedangkan Datu Partiga-tiga-Sihapunjung menobatkan dirinya menjadi raja Siantar pertama.

Kisah beralihnya takhta dari marga Sitanggang pada Sinaga adalah sebagai berikut. Konon leluhur Kerajaan Tanah Jawa berasal dari Kampung Urat, Samosir, yang dikenal dengan sebutan Dadihoyong[306]. Ketika itu terdapat tiga orang bersaudara. Yang sulung di antara mereka mengembara ke kawasan Simalungun dan mendirikan perkampungan bernama Limbong. Belakangan pemukiman ini diubah lagi namanya menjadi Dolok Panribuan. Dua orang bersaudara yang ditinggalkan, masing-masing bernama Muharaja, sedangkan yang satu lagi tak dikenal namanya. Mereka kemudian turut merantau ke Simalungun guna menyusul kakak sulungnya. Dalam perjalanannya, berjumpalah mereka dengan seorang Minangkabau yang sedang mengumpulkan *jorlang* guna diperdagangkannya. Karenanya, tempat ini lalu dinamakan Jorlang Hataran, dan saudara bungsu menjadi penguasanya serta digelari Tuan Jorlang Hataran secara turun-temurun.

306. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 40.

Muharaja kerap diminta saudaranya melakukan berbagai pekerjaan berat, seperti mengumpulkan rotan di hutan, mencari rumput, dan lain sebagainya. Ia merasa tidak puas dan bergabung dengan pedagang Minangkabau di atas. Kegiatan perdagangannya itu membawanya hingga ke pulau Jawa. Sekembalinya ke Simalungun, Muharaja berpisah dengan sahabatnya dan tiba di wilayah kekuasaan Raja Sitanggang. Karena keahliannya dalam menyadap aren dan membuat tuak, diangkatlah ia sebagai juru minuman raja dengan gelar *paragat ni raja*. Rupanya, Muharaja memiliki cita-cita tinggi dan berangan-angan menjadi raja, tetapi ia tak melakukan upaya perebutan kekuasaan. Justru sebaliknya, ia sangat setia pada tuannya. Tatkala sedang menyadap aren, *paragat ni raja* menjumpai seekor tupai yang bersuara aneh, "Irr, gotok-gotok! Irr, gotok-gotok," sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Paragat merasa terganggu dan melempari tupai tersebut. Namun, hewan itu tetap tidak mau pergi dan melompat ke sana-kemari dengan mengeluarkan suaranya yang aneh. Akhirnya, Paragat membiarkan saja tupai itu.

Lambat laun, Muharaja merasa aneh dengan tingkah laku sang tupai. Timbul angan-angan dalam benaknya dan mungkin karena iseng, setiap kali tupai bersuara dibalasnya dengan ucapan: "Ke atas melentik, ke bawah menekan. *Paragat* menjadi Raja dan Raja menjadi rakyat."[307] Demikianlah terjadi dialog yang aneh di antara mereka. Kendati keduanya tak saling memahami ucapan masing-masing, tetap saja "percakapan" itu terjadi di antara mereka. Teman-teman Muharaja menertawakannya dan menganggap bahwa ia terlalu terbuai oleh angan-angannya saja. Cerita ini terdengar oleh raja yang memanggil dan menanyainya. Muharaja menjawab bahwa memang demikian halnya. Raja yang kurang percaya mengancamnya dengan hukuman pasung seumur hidup bila berbohong. Muharaja tetap tidak gentar sehingga raja semakin penasaran dan ingin menyaksikan sendiri.

Raja beserta rombongannya bertolak ke tempat Muharaja biasa menyadap enau. Benarlah terdapat tupai yang mengibas-ngibaskan ekornya sambil bersuara, "Irr, gotok-gotok! Irr, gotok-gotok!" Lalu disambung suara dari arah lain: "*Paragat* menjadi raja dan raja menjadi rakyat." Seluruh hadirin terpaku ketakutan karena Muharaja menyatakan bahwa itu adalah suara Debata Mulajadi Nabolon (sebutan

---

307. *Sejarah Batak*, halaman 169.

bagi Tuhan di kalangan orang Batak). Suatu keberuntungan bagi Muharaja karena orang-orang yang berada di tempat itu meyakini bahwa itu memang suara Debata Mulajadi Nabolon. Raja Tanah Jawa merasa lemas dan berkata bahwa sudah menjadi takdir apabila Muharaja akan menjadi raja. Demikianlah, Muharaja menjadi raja tanpa kesulitan[308].

Pengangkatan ini terdengar kabar beritanya hingga ke Dolok Panribuan, tempat saudaranya yang sulung menjadi raja. Ia mengutus seseorang menyampaikan pada saudaranya itu bahwa dirinya kini telah menjadi raja Tanah Jawa, dan Dolok Panribuan termasuk dalam daerah kekuasaannya. Bersama dengan saudara yang satunya lagi, Tuan Jorlang Hataran, mereka mempersembahkan kerbau sebagai tanda pengakuan mereka terhadap Muharaja, di mana upacara ini kemudian menjadi tradisi.

Di balik kisah ini, tampaknya Aceh juga turut berperanan dalam menggulingkan Raja Sitanggang di abad ke-16[309]. Menurut sumber lainnya, urutan raja-raja yang memerintah Kerajaan Tanah Jawa adalah sebagai berikut: Sorgalawan, Djontaboelan, Sorgahari, Oesoel, Djintanari, Timboel, Podang Rani, dan Horpanaloean yang bergelar Raja Maligas[310]. Terdapat keterangan bahwa Sorgalawan merupakan raja pertama yang namanya dapat diketahui.

Pemerintah kolonial Belanda kali pertama menjelajahi Tanah Jawa masing-masing tahun 1865 dan 1866. Pada 20 Juli 1889, Raja Maligas diakui kedudukannya sebagai raja oleh pemerintah kolonial. Kerajaan Tanah Jawa dengan demikian tunduk pada pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, perlawanan masih berlangsung di berbagai kawasan, seperti yang dipimpin oleh Tuan Raimbang dari Dolok Paribuan[311]. Tokoh yang anti-Belanda ini menyatakan tak bersedia takluk lagi pada Kerajaan Tanah Jawa, karena rajanya telah tunduk pada pemerintah kolonial. Ia berkata, “Raja Maligas mengerti bahasa Kompeni sedang saya tidak mengerti bahasa itu.”[312] Oleh karenanya, ia memerintahkan laskarnya menyerang rombongan Kontrolir Kroessen dan Kontrolir van Diyk

308. *Sejarah Batak* tidak menyebutkan nama Muharaja dan menyebutkan nama tokoh di atas sebagai Paragat saja. Sementara itu, dalam *Sejarah Simalungun*, halaman 41, disebutkan bahwa ketika ditagih janjinya Raja Sitanggang merasa tersinggung dan terjadilah perang tanding di antara keduanya. Ternyata Raja Sitanggang dapat dibunuh oleh Muharaja.
309. *Sejarah Batak*, dengan demikian menempatkan pendirian Kerajaan Tanah Jawa berlangsung di abad ke-16.
310. Lihat sinagaeone.blogspot.com, diunduh pada 27 Juli 2010.
311. Karena itu, ia digelari juga Tuan Dolok Panribuan.
312. *Sejarah Batak*, halaman 171.

pada tahun 1892 di Aek Buluh dalam perjalanan ekspedisi mereka memasuki Simalungun. Karena tak menduga datangnya serangan yang tiba-tiba, kedua orang kontrolir Belanda itu melarikan diri ke Simpanganbolon Prapat dengan meninggalkan segenap perlengkapannya.

Akibat serangan ini, tidak mengherankan apabila Tuan Raimbang akhirnya menjadi target penangkapan Belanda. Karena penghianatan Oppu Galega Saragih, pasukan kolonial berhasil mengalahkan Tuan Raimbang dan ia ditangkap serta diasingkan ke Jawa[313]. Tuan Naposo juga menentang Belanda dan setelah menyerahkan dirinya diangkat sebagai raja muda serta menerima 1/3 bagian pendapatan kerajaan. Tokoh lain yang turut mengangkat senjata melawan pendudukan Belanda adalah Tuan Marjanji Asih. Ia turut bergerilya bersama Tuan Raimbang, tetapi akhirnya terpaksa takluk pada pemerintahan kolonial di tahun 1890[314]. Pada 1905, Belanda kembali dipusingkan oleh bangkitnya 400 pasukan rakyat Girsang yang membangkitkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kendati demikian, seluruh perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Belanda.

Raja Maligas mangkat pada 1905 akibat sakit. Kedua orang putranya, masing-masing bernama Tuan Jintar dan Tuan Sangmajadi masih kanak-kanak[315] sehingga sebagai wakilnya diangkatlah Tuan Sanggah Goraha yang memegang jabatan tersebut dari tahun 1907 hingga 1912. Karena memimpin perlawanan rakyat, Tuan Sanggah Goraha diturunkan dari jabatannya dan dibuang ke Batubara. Itulah sebabnya, beliau tak pernah diakui oleh Belanda sebagai raja Tanah Jawa. Tuan Jintar yang telah dewasa kini mewarisi singgasana leluhurnya (1912–1917). Tetapi, beliau terlibat perselisihan dengan pemerintah kolonial dan diasingkan ke Medan. Duduk permasalahannya adalah ketidaksediaan Tuan Jintar membantu Belanda menangkap para pemberontak. Pada 1920, beliau wafat setelah menderita sakit parah[316]. Semasa Tuan Jintar diasingkan ke Medan, pemerintahan Tanah Jawa sementara waktu dijalankan oleh permaisurinya, Puang Bolon Boru Damanik.

Pemerintah kolonial terus-menerus menanyakan dan mendesak Puang Bolon agar segera menetapkan raja Tanah Jawa yang baru. Akhirnya diputuskan bahwa Tuan Sangmajadi (1919–1940), adik Tuan Jintar, dinobatkan sebagai penguasa

313. Menurut *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, halaman 15, disebutkan bahwa Tuan Raimbang dibunuh.
314. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 25.
315. Lihat sinagaeone.blogspot.com, diunduh tanggal 27 Juli 2010.
316. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 42.

berikutnya. Beliau menandatangani *korte verklaring* pada 27 Juli 1921. Selanjutnya, pemerintah kolonial memberikan persetujuannya yang dituangkan dalam *Besluit* no 23 tahun 1922[317]. Tuan Sangmajadi mendapatkan bintang jasa Trouw van Dienst dari pemerintah kolonial Belanda. Penghargaan lainnya berupa tongkat pusaka kerajaan yang dilapis emas dan payung kebesaran berwarna kuning keemasan berkat prestasi beliau memajukan Kerajaan Tanah Jawa[318].

Tuan Sangmajadi menganut Agama Islam. Beliau tidak mempunyai Puang Bolon dan beristri lima orang, namun salah seorang di antaranya meninggal dunia. Adapun nama-nama kelima istri beliau adalah

1. Puang Salak/Puang Tarmain Saragih Dasalak,
2. Puang Nakut/Puang Ramaihot Damanik (ibu Raja Kaliamsyah Sinaga),
3. Puang (ibu Tuan Kalam Sinaga),
4. Puang ... (ibu Sumairim Sinaga), dan
5. Puang Poso (ibu Tuan Omsyah Sinaga).[319]

Dari pernikahannya tersebut beliau mempunyai tiga orang anak, yang masing-masing bernama Tuan Kaliamsyah Sinaga, Tuan Omsyah Sinaga, dan Tuan Kalam Sinaga.

Tuan Sangmajadi mangkat pada 1940, tidak lama setelah menerima tanda penghargaan dari pemerintah kolonial. Meskipun demikian, jenazah beliau belum dapat dimakamkan, karena berdasarkan keputusan seluruh pembesar kerajaan beserta pemangku adat kerajaan dari Hutabayu Marubun dan tradisi yang berlaku di Tanah Jawa, jenazah seorang raja tidak dapat dimakamkan sebelum dinobatkan penggantinya. Calon pengganti itu pun harus telah menikah. Itulah sebabnya, Tuan Sangmajadi lantas disebut sebagai Raja Nomodom atau "Raja yang Sedang Tidur" dan dianggap belum wafat. Para pembesar kerajaan dan pemangku adat lantas sepakat menetapkan Tuan Kaliamsyah Sinaga sebagai penerus singgasana Tanah Jawa, yang ketika itu masih duduk di tingkat IV Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta. Beliau memangku jabatan sebagai raja Tanah Jawa hingga meletusnya Revolusi Sosial pada 1946.

317. Data yang diberikan oleh Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung (tanggal 6 Agustus 2012).
318. Data yang diberikan oleh Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung (tanggal 6 Agustus 2012).
319. Data yang diberikan oleh Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung (tanggal 6 Agustus 2012).

Tuan Kaliamsyah Sinaga menikah dengan Puang Bolon Salimah Damanik yang merupakan putri raja Siantar. Sewaktu hendak meletus Revolusi Sosial, Tuan Sawadin Damanik mengundang beliau ke Siantar karena mendengar desas-desus akan terjadinya pergolakan. Sementara itu, dua orang saudara beliau yang tetap tinggal di Tanah Jawa, yakni Tuan Omsyah Sinaga dan Tuan Kalam Sinaga, ditangkap oleh Barisan Harimau Liar (BHL). Namun saat hendak dibunuh, dua orang eksekutor yang mengenakan penutup kepala, mengendurkan ikatan mereka dan mendorongnya ke sungai. Dengan demikian, Tuan Omsyah Sinaga dan Tuan Kalam Sinaga berhasil menyelamatkan diri serta melarikan diri kembali ke Tanah Jawa. Mereka berdua kemudian disembunyikan oleh rakyat hingga keadaan aman. Pada perkembangan selanjutnya, Tuan Kaliamsyah Sinaga yang berada di Siantar ditangkap oleh BHL bersama mertuanya, Tuan Sawadin Damanik. Mereka kemudian dibawa ke Brastagi dan dijadikan tenaga pekerja paksa.

Saat jenazah Tuan Sangmajadi hendak dimakamkan, Tuan Kaliamsyah Sinaga masih ditahan di Brastagi. Beberapa orang anggota BHL yang mengenakan penutup wajah lantas membawa beliau menyaksikan pemakaman tersebut. Setelah upacara pemakaman selesai, anggota BHL berkata di hadapan rakyat bahwa mereka akan membunuh Tuan Kaliamsyah Sinaga dan "membebaskan rakyat Tanah Jawa dari rajanya yang lalim." Di tengah-tengah situasi yang kritis itu, Tuan Kaliamsyah Sinaga mendengar bisikan, yakni agar beliau memberanikan diri berbicara di hadapan rakyat. Beliau lalu bertanya apakah selama menjadi raja beliau pernah bertindak sewenang-wenang, menyakiti, dan menindas mereka. Ternyata rakyat menjawab bahwa raja mereka adalah sosok yang jujur dan adil. Akibatnya, para anggota BHL menjadi malu dan pergi meninggalkan Tuan Kaliamsyah Sinaga[320]. Ketika itu, rumah bolon atau istana Kerajaan Tanah Jawa telah dihancurkan oleh BHL, sehingga kegiatan beliau sementara dipusatkan di tempat kediaman pribadi mertua beliau, yakni Tuan Sawadin Damanik.

Pada awal tahun 1947, Drs. Moh. Hatta (Bung Hatta) yang telah dikenal beliau semasa kuliah hukum di Jakarta, menghubungi beliau dan mengabarkan bahwa Belanda tak lama lagi akan membentuk Negara Sumatera Timur (NST), selaku upaya memecah belah persatuan bangsa. Drs. Moh Hatta berharap agar Tuan Kaliamsyah Sinaga bersedia bergabung dengan NST. Tuan Kaliamsyah Sinaga

320. Data yang diberikan oleh Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung (tanggal 6 Agustus 2012).

kemudian bersedia dicalonkan sebagai wakil wali Negara Sumatera Timur dengan pertimbangan bahwa bila saatnya telah tiba, maka NST akan menjadi negara bagian pertama yang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, penerimaan tersebut merupakan strategi perjuangan. Selain itu masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, yakni:

(1) Kerajaan Tanah Jawa berserta kerajaan-kerajaan lain di Simalungun telah hancur akibat Revolusi Sosial yang dicetuskan oleh BHL, sehingga mustahil dapat berdiri kembali serta berdaulat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin ada negara di dalam negara.
(2) Mencegah agar tidak timbul perang saudara, karena jika wakil wali negara NST tidak dijabat oleh putra daerah, orang-orang yang berasal dari Toba, Karo, dan Tapanuli Selatan akan menyerang Medan.
(3) Memberikan kesempatan terhadap bekas kerajaan-kerajaan di Simalungun yang telah hancur dalam mengatur kembali kehidupan masyarakatnya.

Pada tahun 1947, NST berdiri. Dr Tengku Mansoer diangkat sebagai wali negara dan Tuan Kaliamsyah Sinaga diangkat sebagai wakilnya. Bersamaan dengan itu, Tuan Kaliamsyah Sinaga menyatakan bahwa dirinya adalah raja terakhir Kerajaan Tanah Jawa, di mana setelah beliau tidak ada lagi raja di Kerajaan Tanah Jawa.

Tuan Kaliamsyah Sinaga memimpin delegasi NST dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949. Beliau juga merupakan salah seorang penanda-tangan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) selaku wakil NST. Sesuai kesepakatan dengan Drs. Moh Hatta, pada tahun 1950 NST menyatakan keluar dari RIS dan bergabung dengan NKRI. Dengan demikian, NST bubar sudah. Pada 18 Februari 1951, Tuan Kaliamsyah Sinaga diundang ke Jakarta dan beberapa bulan berselang diangkat sebagai anggota BPK di Bogor yang setingkat menteri. Sebagai wujud lain pengabdian beliau pada bangsa dan negara adalah kesediaan beliau mengajar di STIKEN (Sekolah Tinggi Keuangan Negara) yang bernaung di bawah departemen keuangan. Raja yang disegani dan dicintai rakyanya ini wafat pada 1981 saat menunaikan ibadah haji di Mekkah.

Kerajaan Tanah Jawa terbagi menjadi tiga *partuanan* seperti tabel di bawah ini:

Partuanan-partuanan di Kerajaan Tanah Jawa			
No.	**Nama *partuanan***	**Ibu kota**	**Kepala distrik**
1	Dolok Panribuan	Tiga Dolok	Mintahain Sinaga (meninggal saat Revolusi Sosial 1946), dibantu anaknya bernama Tuan Hormajawa Sinaga
2	Jorlang Hataran	Tiga Balata	Tuan Rottahalam Sinaga, Tuan Janaihut Sinaga, Tuan Binsara Sinaga
3	Bosar Maligas	Bosar Maligas (Pasar Baru)	Tuan Johan Sinaga, lalu digantikan Tuan Kaliasan Sinaga

Belakangan pada 1940 dibentuk satu *partunanan* baru bernama Girsang-Sipangan Bolon, yang beribu kota di Parapat. Sebelumnya *partuanan* ini adalah sebuah *perbapaan*. Sebagai kepala *partuanan*-nya diangkat Tuan Sarmahata Damanik. Selanjutnya daerah-daerah perbapaan di Tanah Jawa adalah Tuan Marjandi Asih, Tuan Hatonduhan, Tuan Batangio, Tuan Porti Girsang, Tuan Sipangan Bolon, Tuan Sibaganding, dan Tuan Panahatan[321]. Sementara itu, berdasarkan informasi yang berasal dari Bapak Ridwan Helmi Ratu Agung diperoleh keterangan sebagai berikut. *Partuanan* Tiga Dolok yang terakhir dijabat oleh Tuan Djintarain Sinaga atau ipar Radja Kaliamsjah. Tuan Sarmahata Damanik tidak pernah menjabat di *partuanan* dalam lingkungan Keradjaan Tanah Jawa, karena seluruh kepala *partuanan* di Kerajaan Tanah Jawa harus bermarga Sinaga Sidahoyong; walaupun Sarmahata Damanik (putra Sang Naualuh) adalah adik ipar Radja Kaliamsjah sendiri. *Partuanan* di Kerajaan Tanah Jawa kurang lebih berjumlah 30, antara lain *Partuanan* Hutabayu Maroeboen, dan lain sebagainya.[322]

h. Kesusastraan

Kebanyakan sastra Batak tidak pernah dituliskan dan umumnya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Biasanya kisah-kisah itu berupa legenda, mitos, perumpamaan, dan lain sebagainya. Kendati memiliki aksara sendiri, mereka jarang menggunakannya untuk kegiatan pencatatan sehari-hari. Bangsa Batak hanya menggunakan tulisannya untuk menulis naskah yang berkaitan dengan tiga hal saja; yakni ilmu tradisional (*hadatuon*), surat menyurat, dan mencurahkan kesedihan atau

321. Lihat *Sejarah Simalungun* (karya T.B.A. Purba Tambak), halaman 43.
322. Surat elektronik kepada penulis, tertanggal 2 September 2012.

penderitaannya (hanya di Karo, Simalungun, dan Angkola Mandailing saja). Naskah-naskah tertulis Batak itu sebagian besar berisikan ilmu-ilmu tradisional. Media untuk menuliskannya juga beraneka ragam, seperti kulit kayu, bambu, tulang, atau kertas. Naskah yang ditulis di atas kulit kayu mempunyai sebutan khusus yakni *pustaha*.

Ilmu-ilmu tradisional yang dicatat secara tertulis ada bermacam-macam jenisnya, seperti ilmu hitam untuk membunuh atau mencelakai musuh; ilmu putih untuk menolak bala atau mengobati seseorang; ilmu-ilmu lain, seperti untuk memikat lawan jenis (*dorma*; Sansekerta: *dherma*), mendatangkan keberuntungan, atau memperoleh keturunan, ilmu pengobatan, astrologi, dan peramalan.

Pengaruh India dapat pula disaksikan pada astrologi Batak. Nama-nama rasi bintang yang membentuk zodiak dalam bahasa Batak dapat ditelusuri pada sumbernya di India.

	Nama Latin	**Nama Sansekerta**	**Nama Batak Toba**	**Nama Batak Karo**
1	Aries	Mesa	Mesa	Mesa
2	Taurus	Vrisabha	Morsoba	Merseeba
3	Gemini	Mithuna	Nituna	Metuna
4	Cancer	Karkata	Harahata	Merkata
5	Leo	Singha	Singa	Singa
6	Virgo	Kanya	Hania	Kania
7	Libra	Tula	Tula	Tula
8	Scorpio	Vrschika	Mortiha	Mertika
9	Sagittarius	Dhanu	Dano	Dahanu
10	Capricornus	Makara	Mahara	Makara
11	Aquarius	Kumba	Morhumba	Kumba
12	Pisces	Mina	Mena	Mena

Selain itu, pengaruh India nampak pada nama-nama hari dan aspek budaya Batak lainnya. Nama hari-hari dalam tradisi Batak adalah: Artia (Adittia), Suma, Anggara, Muda, Boraspati, Singkora, dan Samisara[323]. Penujuman antara lain dipergunakan memilih hari baik dan lain sebagainya. Berikut ini adalah kutipannya:

323. Lihat *Perihal Bangsa Batak*, halaman 29.

Ianggo di bulan si pahasada ro di bulan si pahadua di purba ma ulu ni ompunta Pane na Bolon, di pastima ma ia ihurna. Jaha hita laho porang masibodilan, tumundalhon agoni ma hita dohot nariti ia porang masibodilan. Ia porhehe ni ompunta Pane na Bolon di boras si pati ni tangkup; ia ari portolo: di muda ni poltak, di boras si pati ni poltak, di suma ni mangadop, di mula ni holon, di anggara na begu, di samisara bulan mate, di hurung...

Mulai bulan pertama hingga bulan ketiga kepala sang Pane na Bolon berada di timur, dan ekornya di barat. Kalau kita mengadakan perang bedil, pastikan agar selalu membelakangi tenggara dan barat daya. Adapun hari bangkitnya Pane na Bolon hari ke-12. Hari-hari berikut ini cocok untuk memerangi musuh kita: hari ke empat, kelima, ke-18, ke-24, ke-28 dan ke-29...[324]

Sementara itu, masih ada metoda peramalan lainnya seperti menggunakan binatang atau membaca tanda-tanda alam. Mengenai ramalan dengan menggunakan binatang, kita mendapatkan informasi sebagai berikut dari Marsden[325]. Ketika orang Batak hendak pergi berperang, mereka akan menyembelih kerbau atau ayam. Kemudian, berdasarkan gerakan usus binatang itu, seorang juru ramal akan menafsirkannya guna menentukan apakah mereka akan mengalami kemenangan atau kekalahan dalam perang. Namun bila ramalannya salah, juru ramal itu akan dijatuhi hukuman mati.

Kendati terdapat pengaruh Hindu, menurut Sitor Situmorang masyarakat Batak tak menjadi penganut Hindu[326]. Mereka hanya mengambil beberapa unsur kebudayaan Hindu sejauh yang diperlukan saja. Selain pengaruh Hindu, agama Islam mulai masuk di Batak sekitar abad ke-11 dan 14. Kurun waktu ini dapat disebut sebagai zaman pascaHindu. Meskipun demikian, Islam belum terasa dampaknya bagi masyarakat Batak di daerah pedalaman. Benih-benih Hindu dan Islam ini kemudian berkembang menjadi aliran kepercayaan *Parmalim*.

V. BEDAGAI

Kawasan Bedagai kerap menjadi rebutan antara Deli dan Serdang. Mulanya, Bedagai menjadi satu dengan Padang. Yang menjadi wakil raja Padang di Bedagai

324. *Surat Batak*, halaman 51.
325. Lihat *Sejarah Sumatra* (terjemahan Indonesia), halaman 349.
326. Lihat *Toba Na Sae*, halaman 404.

semasa pemerintahan Syafdanah (raja Padang dan Bedagai) adalah Nakhoda Gundak dengan gelar raja muda Bedagai. Nakhoda Gundak kemudian berkomplot dengan dengan Raja Muda Mustafa dari Bandar Khalipah untuk menggulingkan Syafdanah dan menggantinya dengan Raja Graha Marahkun. Syafdanah mendengar mengenai rencana ini dan menemui Raja Graha Marahkun. Dengan terus terang Syafdanah menyatakan bahwa ia tak keberatan menyerahkan takhta pada Raja Graha Marahkun, asalkan singgasana mereka tak jatuh pada orang lain. Raja Graha Marahkun yang sesungguhnya tak mengetahui persekongkolan ini merasa terharu dan akhirnya mereka berdua setuju melawan Nakhoda Gundak beserta Raja Muda Mustafa. Karena merasa bahwa kekuatan mereka berdua masih belum cukup, dilayangkanlah permohonan bala bantuan kepada Serdang.

Itulah sebabnya, Serdang mengirimkan pasukannya dan menawan Nakhoda Gundak (raja muda Bedagai). Putranya yang bernama Panglima Hitam melarikan diri dan meminta bantuan pada sultan Deli. Oleh karena itu, sultan Deli, Amaluddin Mangedar Alam (1761–1824), mengirimkan pasukannya dan dapat menghalau Serdang. Nakhoda Rahmat yang memimpin pasukan Deli berhasil menduduki Tanjung Beringin dan dianugerahi kekuasaan atas kawasan tersebut serta digelari Syahbandar Putra Raja Negeri Deli[327]. Setelah mangkat pada tahun 1851, ia digantikan oleh putranya bernama Mohammad Basir selaku raja negeri Bedagai.

Pada tahun 1852, Sultan Osman Perkasa Alam dari Deli menikah dengan seorang putri Asahan bernama Tengku Raja Siti. Tetapi kemudian, Asahan meminta agar daerah Bedagai dihadiahkan pada Tengku Sulung Laut, putra Raja Siti. Namun, permintaan ini sulit direalisasikan karena kekuasaan Deli hanya meliputi Tanjung Beringin saja dan bukannya seluruh Bedagai. Mohammad Basir tidak merasa senang mendengar hal ini dan meminta bantuan Serdang. Sultan Deli mendengar rencana pembelotan ini dan sebelum sempat bala bantuan Serdang tiba, ia terlebih dahulu mengirimkan pasukannya ke Bedagai. Mohammad Basir terusir dari negerinya dan sultan Deli kemudian menetapkan Panglima Daud sebagai wakil Deli di sana dengan gelar Wazir Deli di Bedagai yang meliputi Tanjung Beringin. Ia kemudian digantikan oleh Raja Sulaiman.

Kendati demikian, armada Deli yang meneruskan serangannya hingga ke Pagurawan berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan Serdang dan Bedagai

327. Lihat *Sari Sejarah Sserdang I*, halaman 166.

yang dipimpin oleh Datuk Setia Raja beserta Orang Kaya Setia Maharaja. Ketika Aceh mengirimkan 200 kapal perangnya menyerang Deli pada tahun 1854, Serdang menggunakan kesempatan ini merebut Bedagai beserta Padang. Mohammad Basir yang pernah terusir dari Bedagai mengusulkan pada sultan Serdang, Basyaruddin, agar adiknya bernama Datuk Ahmad Yuda didudukkan sebagai wakil Serdang di sana dengan gelar Datuk Putra Raja Negeri Serdang Wazir Bedagai.

Datuk Ahmad Yuda gugur saat berlangsungnya ekspedisi militer Belanda di bawah pimpinan Netscher pada tahun 1863. Belanda menganggap Serdang memusuhi Belanda sehingga merampas Bedagai dan memberikannya pada Deli pada tahun 1865. Datuk Setia Maharaja Mohammad Akip diangkat sebagai wakil Deli di Bedagai dengan gelar Wazir Bedagai pada tahun 1866. Ia digantikan oleh Tengku Sulung Laut yang digelari Pangeran Kelana (1873–1894).

VI. BILAH

Cikal-bakal Kerajaan Bilah adalah Raja Indra (Indra Alam atau Marhum Mangkat di Kumbul, ±1630–1650), salah seorang putra Marhum Mangkat di Jambu. Ia merupakan leluhur raja-raja Bilah dan Panai. Sama seperti Panai, Bilah mengakui pertuanan Siak Sri Indrapura atas negerinya dan harus membayar upeti pada kerajaan tersebut. Raja-raja Bilah yang menggantikan Raja Indra adalah Raja Unus (Marhum Mangkat di Gunung Suasa, ± 1650–1670), Raja Sulung (Marhum Mangkat di Simpang, ± 1670–1700), Raja Sulung Riau (±1700–1720), Sutan Bidar Alam Syah I (Marhum Mangkat di Maban, ± 1720–1760), Sutan Indra Alam Marhum Sakti (1760–1785), Sutan Rahmad Syah (1785–1800), dan Sutan Indra Alam (Marhum Sungai Abal, 1800–1835). Bersama-sama dengan pasukan Siak, Bilah pernah menyerang Asahan pada tahun 1835[328]. Semasa berlangsungnya ekspedisi Netscher yang bertujuan menguasai kerajaan-kerajaan Sumatera Timur, di Bilah memerintah Sutan Bidar Alamsyah II (Marhum Mangkat di Kota Lama, 1835–1865). Saat itu, usianya telah lanjut; sehingga pemerintahan atas Bilah diserahkan pada Raja Muda Tengku Daud. Raja Bilah berikutnya adalah putra Sutan Bidar Alamsyah II bernama Tengku Abas, yang menyandang gelar Sutan Bidar Alamsyah III (Marhum Mangkat di Negeri Lama, 1865–1903). Ia digantikan kembali oleh Tengku Adil atau Sutan Bidar Alam Syah IV (1904–1946). Pada tahun 1946 meletus revolusi sosial yang menumbangkan Kerajaan Bilah.

---

328. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 214.

Menurut sumber lainnya, raja-raja yang pernah berkuasa di Bilah adalah sebagai berikut: Raja Tohir gelar Raja Indra Alam, Raja Gunung Suasa, Raja Nulung, Raja Jumahat gelar Sutan Bidar Alam, Sutan Indar Alam, Sutan Rahmad Syah, Tengku Daring gelar Sutan Indar Alam, Tengku Musa gelar Sutan Bidar Alam, Tengku Abas gelar Sutan Bidar Alam, dan Tengku Adil gelar Sutan Bidar Alam Syah[329]. Berdasarkan sumber tersebut, Raja Tohir mulanya memerintah Bilah bagian selatan, sedangkan kawasan utaranya merupakan daerah kekuasaan Raja Namur yang bermarga Dalimunte. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Tohir menaklukkan wilayah kekuasaan Raja Namur.

VII. DELI

Istana Sultan Deli
Sumber: *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, halaman 823-824

a. Cikal-bakal Kerajaan Deli

Riwayat pendirian kerajaan yang kini terletak di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara) ini diperoleh dari *Hikayat Deli*. Menurut sumber tersebut, cikal-bakal penguasa Deli adalah laksamana Kesultanan Aceh yang bernama Muhammad

329. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 84.

Dalik (juga dikenal sebagai Tuanku Gocah (Gojah[330]) Pahlawan, Laksamana Khuja Bintan, atau Laksamana Kuda Bintan). Ia adalah keturunan Amir Muhammad Badar ud-din Khan, bangsawan dari Delhi, India, yang menikahi Chandra Dewi, putri sultan Samudera Pasai. Ayahnya adalah Muhammad Derikan (Muhammad Deli) seorang keturunan raja dari India. Konon, kapalnya karam di perairan Pasai, Aceh, pada tahun 1580. Karena mengaku bahwa dirinya keturunan raja dari seberang lautan, Derikan dibawa menghadap sultan Aceh saat itu, Alauddin Mansyursyah (1579–1586). Sultan Aceh menguji Derikan dengan berbagai pertanyaan mengenai tata cara pemerintahan, strategi militer, dan keagamaan. Kebetulan saat itu di ibukota Aceh terdapat orang gila berbahaya yang mengamuk dan telah banyak membunuhi orang-orang di jalan. Hal ini merupakan kesempatan bagi Derikan membuktikan kemampuannya di hadapan sultan.

Sultan menitahkan Derikan menangkap orang gila tersebut, yang dapat dilaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, tugas yang lebih berat dari sultan menanti Derikan. Ia diperintahkan membasmi tujuh perampok yang telah menyengsarakan rakyat. Semula ketujuh orang itu adalah hulubalang berkebangsaan Rum dan Turki, yang diundang ke Aceh guna dijadikan perwira dalam angkatan perang kesultanan, karena kepandaian mereka dalam kemiliteran dan strategi perang. Namun, karena suatu hal mereka kemudian melarikan diri dan menjadi perampok. Para perwira Aceh sendiri yang ditugaskan memusnahkan mereka selalu mengalami kegagalan. Ternyata Derikan berhasil menunaikan tugas berat ini, sehingga kepercayaan sultan padanya semakin besar. Muhammad Derikan akhirnya diangkat sebagai panglima dan digelari Panglima Lebai Hitam, karena kulitnya yang hitam.

Muhammad Derikan yang kini disebut Tuanku Lebai Hitam dinikahkan dengan salah seorang kerabat sultan. Pernikahan ini dikaruniai dua orang anak, yakni Gocah Pahlawan dan seorang putri bernama Putri Su'ai, yang kelak menikah dengan kerabat sultan Aceh. Selanjutnya, Tuanku Lebai Hitam senantiasa ikut serta dalam ekspedisi militer Kesultanan Aceh. Pada tahun 1586 berlangsung perebutan kekuasaan oleh Raja Buyung, yang naik takhta dengan gelar Sultan Ali Riayatsyah. Sultan Alauddin Mansyursyah yang digulingkan dari kedudukannya menyingkir ke Pasai Aru dengan disertai oleh Tuanku Lebai Hitam. Sultan yang tersingkir tersebut memiliki seorang

330. Dieja Gojah dalam buku *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 61.

putra bernama Iskandar Muda yang usianya sebaya dengan Gocah Pahlawan, putra Lebai Hitam. Johor menyerang Pasai Aru di tahun 1591, sehingga mengakibatkan gugurnya Lebai Hitam dan bekas sultan Aceh, Alauddin Mansyursyah.

Masih terdapat legenda-legenda lain mengenai tokoh pendiri Kerajaan Deli ini. Berdasarkan riwayat yang dimiliki Kesultanan Serdang, disebutkan bahwa nama asli Gocah Pahlawan adalah Yazid; selain itu ada pula yang menamakannya Abdullah Rhaini[331]. Riwayat yang berasal dari Denai menyebutkannya bahwa namanya adalah Mohammad Dalik; sedangkan riwayat Deli menyebutnya sebagai Muhammad Delikhan, cucu Raja Akbar dari Delhi. Berbeda lagi penuturan yang berasal dari Serdang. Menurut sumber tersebut, ia masih keturunan raja-raja Pagarruyung; yang meninggalkan negerinya karena kecewa pada ayahnya.

Setelah menginjak dewasa, Iskandar Muda dan Gocah Pahlawan sama-sama menuntut ilmu. Belakangan, setelah Iskandar Muda menjadi sultan Aceh, Gocah Pahlawan diangkat sebagai salah seorang panglima terkemukanya. Ia kerap mendapat tugas memerangi dan menaklukkan negeri-negeri kecil di sekitar Aceh. Pada tahun 1612 bersama dengan pengikutnya, Gocah Pahlawan dititahkan memerangi Kerajaan Aru yang terletak di Sumatera Timur. Kerajaan ini merupakan kelanjutan Kerajaan Aru Tua atau Aru Asli yang sebelumnya pernah ditaklukkan pada 1564 oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar (1531–1572) dari Aceh. Saat itu, yang menjadi raja di Aru adalah Dewa Sakti (kelak menurunkan raja-raja Langkat–lihat pembahasan tersendiri mengenai kerajaan tersebut), yang mendapat bantuan persenjataan dari Portugis. Dengan demikian, Aru dapat mempertahankan dirinya dari Aceh. Setelah Dewa Sakti mangkat, ia digantikan oleh Dewa Syahdan. Portugis yang menjadi saingan Aceh masih membantu Aru dengan mengirimkan aneka persenjataan yang tergolong modern saat itu.

Akhirnya, demi menundukkan Aru, Gocah Pahlawan menggunakan suatu strategi jitu. Ia mengganti peluru meriam dengan kepingan mata uang emas. Akibatnya saat kepingan-kepingan tersebut ditembakkan dan berhamburan di tengah pasukan Aru, mereka beramai-ramai memperebutkannya. Dengan demikian, pertahanan Aru menjadi lemah dan Gocah Pahlawan menggunakan kesempatan ini guna mengalahkan mereka. Setelah seluruh Kerajaan Aru yang berpusat di kawasan Deli berhasil ditaklukkan, panglima perang terkemuka ini menjadi penguasa di daerah

331. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 33.

taklukan tersebut sebagai wakil sultan Aceh; dengan wilayah yang membentang dari Tamiang hingga Rokan. Selanjutnya berkat dukungan Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperkuat kedudukannya di kawasan Sumatera Timur melalui penaklukan negeri-negeri lain yang lebih kecil. Dengan demikian, Gocah Pahlawan menjadi penguasa pertama Kerajaan Deli yang merupakan vasal atau bawahan Aceh dan berkuasa dari 1630 hingga 1653. Ibukotanya terletak di Labuhan yang berada 20 km dari Medan. Ia menikah dengan putri raja Sunggal–salah satu kawasan di Batak Karo yang telah menganut agama Islam–bernama Putri Nang Baluan Beru Surbekti (juga disebut Nang Buluan atau Inang Buluhan[332]). Saat itu, di kawasan tersebut ada empat orang raja yang telah masuk Islam, mereka sepakat mengakui Gocah Pahlawan sebagai raja mereka pada tahun 1630. Tatkala Gocah Pahlawan dinobatkan sebagai penguasa, raja Sunggal membacakan janji kesetiaan para pemuka masyarakat dan rakyat. Selanjutnya keempat orang raja itu menjadi asal-muasal terbentuknya Lembaga Datuk Berempat yang bertugas membantu raja, dengan raja Sunggal merupakan salah seorang di antaranya.

Gocah Pahlawan pernah membantu Aceh menaklukkan Johor pada tahun 1613. Dua orang putri Johor yang masing-masing bernama Putri Kamaliah dan Putri Khairiah turut dibawa serta sebagai tawanan. Putri Kamaliah menikah dengan sultan Aceh, sedangkan Putri Khairiah dinikahkan dengan Gocah Pahlawan. Atas keberhasilannya ini, Gocah Pahlawan memperoleh gelar kehormatan Laksamana Khuja atau Kuda Bintan. Pada tahun 1618, Sultan Iskandar Muda dari Aceh mengirimkan kembali angkatan perangnya ke Johor, Pahang, Kedah, Pattani, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan pula Gocah Pahlawan menyertai mereka sebagai panglimanya. Ketika Gocah Pahlawan sedang menunaikan tugasnya ini, terjadi peristiwa memalukan. Meurah Puopo, putra sultan Aceh, berselingkuh dengan istri Gocah Pahlawan. Setelah istrinya mengakui perbuatannya, Gocah Pahlawan membunuhnya. Kini ia menghadap sultan Aceh dan menuntut agar sultan melakukan hal yang sama pada putranya. Sebelum tuntutannya dipenuhi, Gocah Pahlawan akan menetap di Deli dan berdiri sendiri. Ia tak akan menghadap lagi ke Aceh, walau berjanji tetap setia pada sultan Aceh. Diingatkannya pula pada sultan agar senantiasa menegakkan keadilan.

332. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 89.

Sultan Iskandar Muda akhirnya bersedia menghukum mati putranya dan selanjutnya mengirimkan pasukan guna mengabarkan hal itu pada Gocah Pahlawan. Apabila setelah menerima berita bahwa Meurah Puopo telah dijatuhi hukuman mati, Gocah Pahlawan masih berkukuh pada pendiriannya dan tak mau lagi menjadi bawahan Aceh, barulah angkatan perang Aceh diperintahkan menggempur Deli. Ternyata, Gocah Pahlawan menyambut baik kabar tersebut dan kembali mengungkapkan kesetiaannya pada Aceh.

Pada tahun 1636, Sultan Iskandar Muda mangkat dan digantikan oleh menantunya yang bergelar Iskandar Thani (1636–1641). Sultan Aceh yang baru ini menetapkan Gocah Pahlawan sebagai wakil sultan yang berkuasa penuh di daerah Deli. Dengan giat Gocah Pahlawan membangun daerah yang berada di bawah wewenangnya tersebut. Karenanya, tak mengherankan apabila hasil pertanian dan perkebunan Deli mengalami peningkatan pesat. Di bawah pemerintahan Iskandar Thani, angkatan perang Aceh mengalami kemunduran. Bangsa Barat, baik Belanda dan Portugis makin leluasa menguasai perairan Selat Malaka dan memaksakan monopoli dagangnya. Sultan Iskandar Thani wafat dan seorang wanita diangkat sebagai sultana Aceh baru dengan gelar Tajul Alam Safiatuddinsyah (1641–1675). Tersiar kabar tidak menyenangkan bahwa Gocah Pahlawan hendak memisahkan diri dari Kesultanan Aceh. Oleh karenanya, dikirim seorang utusan dengan disertai sejumlah pasukan guna menanyakan pada Gocah Pahlawan mengenai kebenaran desas desus itu. Ternyata, Gocah Pahlawan tetap mengakui kedaulatan Aceh dan menyatakan bahwa ia senantiasa mengingat sumpah setianya pada almarhum Sultan Iskandar Muda dahulu. Pihak Aceh lega mendengar jawaban tersebut, apalagi saat itu kedudukan Aceh makin terdesak oleh kekuatan-kekuatan asing; sehingga konflik bersenjata antara Aceh dan Deli hanya merugikan kedua belah pihak saja. Gocah Pahlawan kemudian dianugerahi gelar Panglima Perkasa Alam dan ditetapkan bahwa keturunan-keturunannya akan tetap memegang kekuasaan sebagai penguasa Deli.

Dari pernikahannya dengan Nang Buluan, putri Sunggal, Gocah Pahlawan memperoleh putra bernama Tuanku Panglima Perunggit. Setelah dewasa ia banyak membantu ayahnya dalam urusan pemerintahan Deli dan berkedudukan di kampung Medan Deli yang didirikannya sendiri. Kawasan ini memang sangat strategis untuk mengawasi lalu lintas perdagangan yang keluar masuk Deli. Tuanku Panglima

Perunggit menikah dengan seorang putri Sunggal bernama Puang Upih dan dikaruniai seorang putra bernama Tuanku Paderap (lahir kurang lebih 1658).

b. Perkembangan Kerajaan Deli

Tidak lama setelah kelahiran Tuanku Paderap, Gocah Pahlawan mangkat dan digantikan oleh Tuanku Panglima Perunggit, yang memerintah dari 1653–1698. Pada masanya, Aceh makin melemah dan diperintah oleh para sultan wanita. Tuanku Panglima Perunggit sendiri kurang menyukai Aceh dipimpin kaum wanita, karena menurutnya hal itu bertentangan dengan adat dan hukum agama (*syarak*). Oleh sebab itu, setelah mengadakan rapat dengan kepala-kepala suku di Deli, ia mengumumkan pemisahan negerinya dari Aceh pada tahun 1669. Tuanku Panglima Perunggit segera memperbaharui dan memperkuat angkatan perangnya. Ia mendatangkan kuda-kuda dari Karo dan membentuk pasukan berkuda (kavaleri) sebagai ganti pasukan gajah yang tak sesuai dengan zamannya lagi karena terlalu lambat geraknya. Gagasan membangun pasukan kavaleri ini diperoleh Tuanku Panglima Perunggit selama kunjungannya ke Jawa, di mana ia kerap menyaksikan pasukan berkuda Belanda yang berlalu lalang di Batavia.

Mendengar bahwa Deli hendak memisahkan diri darinya, Kesultanan Aceh menawarkan kompromi yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut[333]:

- Deli diakui sebagai kerajaan berotonomi penuh dengan Sungai Mencirim di utara dan Sungai Padang di Selatan sebagai batasnya.
- Deli mengakui kedaulatan dan perlindungan Aceh atas negerinya.
- Tuanku Panglima Perunggit menjadi wakil berkuasa penuh Kesultanan Aceh atas Sumatera Timur dan memperoleh gelar Kejuruan Padang.
- Kerajaan Deli mempersembahkan upeti berupa "bunga mas" setiap tahunnya.
- Jika Deli diserang oleh musuh, Aceh akan memberikan bantuannya.

Tidak berapa setelah itu, Tuanku Panglima Perunggit memindahkan pusat pemerintahannya dari Deli Tua ke Medan Deli. Tuanku Panglima Panderap kini banyak membantu orang tuanya dalam memajukan Deli. Ia membangun tempat pemukiman di Pulau Berayan, yang terletak 5 km di hilir Medan Deli, dan berkedudukan di sana sebagai wakil ayahnya. Panglima Perunggit mangkat pada tahun

333. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 94.

1698 dan dimakamkan di Medan Deli. Tempat pemakamannya dianggap keramat oleh penduduk dan dikenal dengan sebutan "Keramat Kepala Gajah," "Marhum Kesawan, " atau "Keramat Bukit." Kurang lebih pada tahun 1973, makam ini diratakan dengan tanah dan di atasnya dibangun kompleks pertokoan. Kendati demikian, tulang belulang Panglima Perunggit belum dipindahkan sama sekali dan masih berada di bawah kompleks pertokoan tersebut.

Tuanku Panglima Pederap (1698–1723) menjadi penguasa Deli yang ketiga. Ia menikah dengan putri Sunggal dan tercatat memiliki empat orang putra; yakni: Tuanku Jalaluddin (lahir tahun 1690, belakangan menurunkan raja-raja Percut), bergelar Kejuruan Metar; Tuanku Panglima Pasutan (lahir kurang lebih tahun 1692), bergelar Kejuruan Padang; Tuanku Tawar (lahir kurang lebih tahun 1694) yang menjadi raja di Pulau Berayan, bergelar Kejeruan Santun; dan Tuanku Umar (lahir kurang lebih 1696), bergelar Kejuruan Ujung. Dengan dibantu oleh anak-anaknya, Tuanku Panglima Paderap memerintah keseluruhan daerah Deli hingga Pulau Berayan. Pada masa kekuasaan Tuanku Panglima Paderap, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kampong Mabar Bejuntai.

Intrik kekuasaan yang terjadi pada tahun 1723, memecah kesultanan menjadi Deli dan Serdang. Kemelut ini dipicu oleh mangkatnya Tuanku Panglima Panderap. Tuanku Umar, putra raja dengan permaisuri yang seharusnya menjadi raja menurut adat mempunyai cacat di matanya, sehingga tidak dapat menjadi raja. Tuanku Pasutan atau Panglima Gandar Wahid (1723- 1761), putra raja dengan seorang selir, merebut takhta dan mengusir kakak tiri beserta ibunya, Permaisuri Tuanku Puan Sambali. Seharusnya Tuanku Pasutan tidak berhak menjadi penguasa Deli, karena ia putra seorang selir dan bukannya anak almarhum raja dengan permaisurinya. Tuanku Umar beserta ibunya terusir hingga ke daerah Serdang. Demi menghindarkan diri dari perang saudara, para pemuka kerajaan, seperti raja Sunggal, Senembah, Tanjong Merawa, dan seorang pembesar dari Aceh menobatkan Tuanku Umar sebagai raja Serdang yang pertama. Dengan demikian, kerajaan Deli terpecah menjadi dua semenjak saat itu.

Kondisi perpolitikan pada kurun waktu ini kurang stabil, karena terjadi perebutan pengaruh di Sumatera Timur antara Aceh, Johor Riau Lingga, dan Siak Sri Indrapura. Masing-masing kerajaan kecil yang berada di kawasan tersebut harus pandai-pandai membaca situasi dan mengembangkan politik diplomasi yang handal. Pada tahun 1761 dan 1780, Deli dierang oleh Siak; yakni semasa kekuasaan Tuanku

Panglima Amaluddin (1761–1824), raja Deli ke-5. Semenjak tahun 1814, Siak makin mengokohkan kekuasaannya di Sumatera Timur dan menganugerahkan gelar-gelar pada pada raja yang berkuasa di sana.[334]

- Tuanku Panglima Amaluddin dari Deli memperoleh gelar Sultan Amaluddin Mangedar Alam (1814).
- Dua orang penguasa Langkat, yakni Nobatsyah mendapatkan gelar Raja Bendahara dan Ahmad memperoleh gelar Kejeruan Muda (1815)
- Raja Denai memperoleh gelar Raja Graha Al Wasikubillah Kurnia Siak (1829).

Penganugerahan gelar ini tentunya ditujukan untuk menegaskan supremasi Siak atas kerajaan-kerajaan tersebut.

Pada zaman Sultan Osman Perkasa Alam (1824–1857), Deli kembali berada di bawah payung kedaulatan Aceh (1854). Saat itu, Aceh merasa kesal dengan aktivitas dan upaya Siak mendominasi kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur termasuk Deli. Oleh karenanya, Aceh mengirimkan angkatan lautnya yang terdiri dari 200 kapal perang di bawah pimpinan Panglima Pangeran Husin. Deli mengakui lagi kedaulatan Aceh dan Sultan Osman Perkasa Alam diangkat sebagai wakil sultan Aceh di Deli dengan menerima tanda kekuasaan berupa *bawar* (pusaka) dan "meterai sembilan."

Di tengah-tengah kancah perebutan pengaruh antara Aceh dan Siak ini, Belanda yang berambisi menguasai Sumatera Timur dan melemahkan pengaruh Aceh ikut memancing di air keruh. Hal ini masih diperparah pula oleh persaingan antar negara kolonialis sendiri, yakni Belanda dan Inggris, yang makin menambah keruhnya suasana. Inggris mengirimkan misinya ke Sumatera Timur di bawah pimpinan Anderson pada tahun 1823 dengan tujuan mengikat para raja di sana agar menjalin hubungan dengan Inggris. Meskipun demikian berdasarkan *Traktat London* (1824) yang ditanda-tangani oleh Inggris dan Belanda; kedua belah pihak akhirnya sepakat membagi daerah kekuasaannya masing-masing. Inggris tidak akan lagi mencampuri urusan di Kepulauan Nusantara dan mengakuinya sebagai daerah pengaruh Belanda. Sedangkan Belanda mengakui kedaulatan Inggris di Semenanjung Melayu. Kendati demikian, pelanggaran secara sembunyi-sembunyi bagi ketentuan ini masih berlaku. Pada tahun 1841, sultan Deli meminta bantuan kepada gubernur Inggris di Penang karena ekspor Deli ke sana selalu dihalang-halangi Belanda. Bahkan pada bulan

334. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 100.

November 1841, sultan Deli berangkat sendiri ke Penang tanpa dapat dicegah oleh pemerintah Inggris.

Belanda yang diwakili Gubernur Jan van Swieten mengadakan perjanjian dengan Aceh pada tahun 1857. Kendati disepakati bahwa kedua pihak tak akan membangkitkan permusuhan lagi dan mengembangkan relasi perniagaan secara damai, perjanjian ini sebenarnya hanya alat atau tipuan Belanda demi mengalihkan perhatian Aceh serta mengukuhkan cengkeramannya di Sumatera Timur. Dengan dikuasainya Sumatera Timur oleh Belanda, kekuasaan Aceh diharapkan akan semakin melemah. Belanda dengan licik lantas berpaling pada saingan Aceh, yakni Siak. Sultan Syarif Ismail dari Siak dipaksa menandatangani perjanjian terdiri dari 36 pasal pada tahun 1858, yang isinya antara lain pengakuan terhadap kedaulatan pemerintah kolonial Belanda atas Siak dan daerah-daerah taklukannya, seperti Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asalah, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Dengan tunduknya Siak pada Belanda, daerah-daerah taklukan tersebut di atas secara otomatis masuk pula dalam payung kekuasaan Hindia Belanda. Itulah sebabnya, Belanda merasa mendapat angin untuk menegakkan kedaulatannya di kerajaan-kerajaan vasal Siak tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya pada tahun 1837, sultan Siak pernah menyatakan bahwa daerah vasal Siak hanya meliputi Tanah Putih, Bangko, Kubu, Bilah, Panai, dan Kota Pinang. Selain itu, beberapa di antara kerajaan-kerajaan tersebut masih menjadi vasal Aceh. Belakangan, Belanda memanfaatkan perjanjian di atas guna menguasai Sumatera Timur, termasuk Deli.

Sultan Osman Perkasa Alam mangkat dan digantikan oleh Mahmud Perkasa Alam (1857–1873). Pada tahun 1862, Belanda menerjunkan misi pimpinan Elisha Netscher dalam rangka memasukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur yang sebelumnya mengakui payung kekuasaan Aceh ke dalam daerah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda (uraian selengkapnya lihat bagian mengenai Aceh). Misi Netscher yang menumpang kapal perang *Reinier Claasen* tiba di Deli pada 21 Agustus 1862. Sultan Deli diminta menandatangani perjanjian yang isinya mengakui kekuasaan Siak (dan Belanda secara tidak langsung) atas negerinya. Tetapi sultan menolaknya dengan mengatakan bahwa hingga saat itu, Siak belum pernah melindungi Deli tatkala diserang negeri lain. Bahkan Siak tidak membantu Deli sebagaimana yang pernah dijanjikan, ketika pada tahun 1854 Aceh mengirimkan 200 kapal perangnya

menyerang Deli; sehingga ayah Sultan Mahmud Perkasa Alam terpaksa mengakui kembali kedaulatan Aceh. Lebih jauh lagi, sultan menyatakan keberatannya karena ia telah diangkat sebagai wakil sultan Aceh di Sumatera Timur, sehingga tentunya tidak diperkenankan menandatangani perjanjian seperti itu. Dengan demikian, perundingan hari pertama menjumpai kegagalan. Kendati sultan diizinkan kembali ke darat, tetapi ia sadar bahwa Belanda pasti akan menghalalkan segala cara agar Deli bersedia mengakui kedaulatan Belanda.

Keesokan harinya, perundingan dilanjutkan dan Netscher mengusulkan rumusan baru yang menyatakan bahwa Deli "terikat" dengan Siak dan selanjutnya bersama-sama "bernaung" pada pemerintah Hindia Belanda. Sultan menganggap bahwa "bernaung" maknanya berada di bawah perlindungan atau protektorat Belanda dan bukannya sebagai bawahan apalagi jajahan. Karena itu, sultan bersedia menandatangani *Akte van Erkenning* pada 22 Agustus 1862. Meskipun demikian, pada kenyataannya sultan Deli di masa-masa selanjutnya harus mematuhi sebagian besar perintah-perintah Belanda layaknya suatu negara jajahan. Perjanjian yang ditanda tangani oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam itu terdiri dari 7 pasal:[335]

- Pasal 1: Deli beserta wilayah rantau dan taklukannya "terikat" dengan Siak Sri Indrapura, sehingga dengan demikian "berlindung" pada pemerintah Hindia Belanda, selaku pemegang kedaulatan atas Kerajaan Siak Sri Indrapura.
- Pasal 2 : Sultan berjanji menjaga ketentraman serta perdamaian di dalam negerinya sendiri serta dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya.
- Pasal 3: Sultan berjanji memajukan perdagangan dan pertanian.
- Pasal 4: Sultan berjanji mencegah perdagangan budak.
- Pasal 5 : Sultan berjanji tak akan menyembunyikan rakyat pemerintah Hindia Belanda yang melakukan kejahatan.
- Pasal 6 : Sultan berjanji tak akan mengadakan hubungan dalam bentuk apapun dengan negara asing tanpa seizin pemerintah Hindia Belanda (diwakili oleh residen Riau).
- Pasal 7: Sultan tak akan mengizinkan orang-orang Eropa selain Belanda berdiam di negerinya tanpa seizin pemerintah kolonial Belanda.

335. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 116–117.

Pasal-pasal di atas sesungguhnya dengan jelas menyatakan bahwa Deli kini jatuh dalam kekuasaan Belanda, di mana negeri itu tak diizinkan lagi menjalin hubungan diplomatik secara bebas dengan pihak asing. Hal ini menimbulkan reaksi keras paman sultan Deli bernama Zainal Abidin. Ia bersekutu dengan Aceh, membangun markas di daerah pegunungan, dan melancarkan perang gerilya terhadap Belanda. Meskipun demikian, dua tahun kemudian perlawanannya dapat dipatahkan. Sebagai tambahan, setelah perjanjian itu ditanda-tangani, di naskahnya masih tertera tulisan "wakil sultan Aceh," yakni pada cap Kerajaan Deli. Namun tulisan ini berhasil dihapus oleh seorang masinis kapal perang Reinier Classen[336].

Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Sultan Mahmud Perkasa Alam adalah dirampasnya beberapa benda pusaka Kesultanan Deli pada tahun 1867; antara lain berupa meriam kecil dari tembaga serta keris emas panjang dan pendek. Turut pula dirampas gong besar peninggalan Gocah Pahlawan, yang diberikan oleh sultan Aceh sebagai tanda kekuasaan. Benda-benda ini kini diperkirakan berada di Negeri Belanda[337].

Belanda membuka perkebunan tembakau di Deli, di mana sultan memberikan hak pengolahan lahan pada penguasa Belanda atau perusahaan asing lainnya. Pengelolaan perkebunan dilakukan melalui kerja sama dengan sultan Deli. Inilah yang memicu perkembangan perekonomian di Deli, sehingga sultan semakin kaya berkat usaha perkebunan tersebut. Pembangunan Istana Maimum dan Masjid Raya al Mashun di Medan merupakan sebagian bukti kemajuan tersebut. Nienhuys adalah salah seorang yang mendapat izin penanaman tembakau di Deli pada tahun 1863 dengan tanah seluas 100 hektar. Keberhasilannya mengundang perusahaan-perusahaan lainnya (seperti *Deli Maatshappij* dan *Arendsburg*), ikut serta membuka berbagai perkebunan di sekitar Medan. Ada kisah menarik sehubungan dengan Nienhuys dan pembukaan perkebunan tembakau ini. Pada bulan Juli 1863 seorang bernama Said Abdullah Basagih bin Umar yang mengaku-ngaku sebagai raja Deli datang menemui Nienhuys di Surabaya. Setelah menggelapkan uang sebesar 1.000 Dollar terbongkarlah kedok penipuan Said Abdullah dan ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda.

Nienhuys pernah mengunjungi Labuan dan meriwayatkan mengenai kondisi istana Kesultanan Deli di abad ke-19. Berdasarkan laporannya, kampung tersebut terdiri dari

336. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 92-93.
337. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 177.

dua jalan berliku-liku dengan rumah-rumah sangat sederhana yang terletak tak beraturan. Bangunan-bangunan tersebut rata-rata terbuat dari bambu, kayu pohon nibung, dan bahan-bahan lainnya yang dapat diperoleh. Masing-masing rumah di sana terletak berdekatan satu sama lain dan tak jarang saling menyentuh. Secara umum, Nienhuys melaporkan bahwa kondisi kota tersebut kurang terawat. Istana sultan Deli menurut laporan Nienhuys adalah rumah papan berukuran lebih besar di ujung jalan yang sejajar dengan sungai. Tidak berbeda dengan rumah lain di kawasan tersebut, atapnya juga terbuat dari nipah. Di bagian depan maupun belakangnya terdapat serambi. Ukuran serambi depan adalah 27 x 9 meter dan Netscher mengatakan ia pernah menyaksikan ratusan orang berbusana Aceh sedang berada di sana sambil membawa rencong[338].

Pada praktiknya, usaha perkebunan ini belakangan menimbulkan berbagai penyimpangan. Oleh karenanya, Sultan Makmun al Rasyid Perkasa Alam (1873–1924)–pengganti Sultan Mahmud Perkasa Alam, melayangkan protes terhadap gubernur jenderal Belanda pada tahun 1880 dan 1893[339]. Sultan mengungkapkan bahwa pihak perkebunan Belanda kerap melanggar akta-akta perjanjian yang telah disepakati bersama tanpa mengindahkan hak-hak rakyat. Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, gubernur jenderal mengadakan peninjauan ke Deli pada tahun 1884 dan melakukan berbagai perombakan demi memperbaiki keadaan.

Pada tahun 1907, Belanda mengambil alih hak-hak sultan dalam memungut bea cukai di pelabuhan, melakukan monopoli perdagangan garam beserta candu, memungut berbagai jenis pajak, dan lain sebagainya. Sebagai kompensasinya, Belanda memberikan ganti rugi pada sultan beserta pembesarnya, yang terdiri dari ganti rugi tetap dan tidak tetap. Perincian ganti rugi tetap adalah sebagai berikut[340]:

Sultan Deli menerima f. 100.295,- per tahunnya.

Datuk Hamparan Perak menerima f. 26.875,- per tahunnya.

Datuk Sunggal menerima f. 7.000,- per tahunnya.

Datuk Sukapiring menerima f. 4.300,- per tahunnya.

Kejeruan Percut menerima f. 3.750,- per tahunnya.

Raja Padang menerima f. 15.000,- per tahunnya.

Raja Bedagai menerima f. 30.000,- per tahunnya.

---

338. Lihat *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, halaman 52-53.
339. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 129.
340. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 129.

Ganti rugi tak tetap berupa pembagian hasil yang diterima kas keuangan Swapraja Deli setiap tahunnya; di mana tidak hanya sultan saja yang menerimanya, melainkan juga para penguasa setempat.

Sultan Makmun al Rasyid Perkasa Alam terkenal sebagai pendiri Istana Maimun (1888) dan Mesjid Raya (1907) di Medan. Beliau banyak menghibahkan tanah sebagai areal pemakaman dan membangun berbagai mesjid di Labuhan Deli, Kampung Bahri, dan Tanjung Mulia. Rumah yatim piatu Jamiatul Washliyah di Kampung Besar, Labuhan Deli, merupakan salah satu buah karya sultan lainnya. Sultan berupaya keras memperindah dan memajukan kota Medan. Oleh karena jasa-jasanya ini, *Gemeente Raad* kota Medan dalam sidangnya pada tahun 1924 sepakat menamai salah satu jalan di Medan dengan nama beliau, yakni Sultan Makmun al Rasyid Weg. Kini nama jalan ini tak terdapat lagi di Medan. Sultan pernah menghibahkan tanah-tanah di luar Medan, yang di atasnya kemudian didirikan berbagai perkampungan, seperti Kampung Silalas dan Sei Mati.

Ketika Indonesia merdeka, kesultanan Deli bergabung dengan Republik Indonesia. Menurut buku *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 180, pada bulan Oktober 1945, para pembesar Kerajaan Deli menyatakan dukungannya secara resmi pada pemerintah Republik Indonesia serta menyatakan bahwa Deli merupakan bagian RI. Saat itu, sultan Deli sedang sakit dan menyerahkan pimpinan kerajaan pada para pembesarnya. Sultan Deli ke-13, Tuanku Otman Mahmud Perkasa Alam, berdinas aktif dalam kemiliteran. Beliau gugur dalam kecelakaan pesawat CN-235 Alfa 2301 milik TNI AU di Bandara Sultan Malikussaleh, Lhok Seumawe pada tahun 2005[341]. Ahli waris beliau adalah putranya yang naik takhta dengan gelar Sultan Mahmud Arfa Lamanjiji Perkasa Alam Syah, yang naik takhta semenjak tahun 2005. Waktu itu usianya baru delapan tahun, sehingga didampingi oleh pemangku sultan, Raja Muda Deli Tuanku Hamdi Osman Deli Khan. Dengan demikian, Mahmud Arfa Lamanjiji Perkasa Alam Syah merupakan sultan Deli termuda.

c. Struktur pemerintahan

Gelar bagi penguasa Deli adalah Sri Paduka Tuanku Sultan. Berdasarkan tradisi, bila meninggal ia akan digantikan oleh putra tertuanya yang beribukan permaisuri. Permaisuri sultan diberi gelar Tengku Maha Suri Raja atau Tengku Permaisuri.

---

341. Lihat *Penobatan, Sultan Deli XIV Isap Permen*, Jawa Pos 23 Juli 2005, halaman 1.

Sementara itu, putra mahkota atau calon pengganti raja, digelari Tengku Mahkota. Putra-putri raja lainnya hanya bergelar *tengku* hingga generasi kelima menurut garis ayah. Sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sultan berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan juga mengurusi masalah-masalah keagamaan serta menjadi kepala adat Melayu di kawasan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, sultan dibantu oleh perdana menteri (*bendahara*), *syahbandar* (mengurusi masalah pelabuhan dan bea-cukai), serta kelengkapan pemerintahan lainnya.

Di daerah-daerah yang didiami suku Batak terdapat para datuk sebagai penguasa di kawasan tersebut. Di Deli terdapat empat datuk (Lembaga Datuk Berempat) yang juga bertugas membantu sultan, yakni: datuk Sunggal, Hamparan Perak, Sukapiring, dan Senembah. Jika datuk-datuk itu berhalangan, mereka dapat menunjuk seorang *sibayak* atau *hoofd penghulu* sebagai wakilnya dalam mengurus permasalahan Batak Karo. Agar lebih mudah dipahami sistem pemerintahan di Deli akan digambarkan dalam skema di bawah ini:

Sultan
Lembaga Datuk Berempat
(Sunggal, Hamparan Perak, Sukapiring, dan Senembah)

Kawasan Melayu Pesisir
Wakil sultan, datuk atau Kejeruan
|
Kepala kampung (penghulu)
|
Rakyat

Kawasan Batak Karo
Datuk
|
Sibayak
|
Penghulu
|
Rakyat
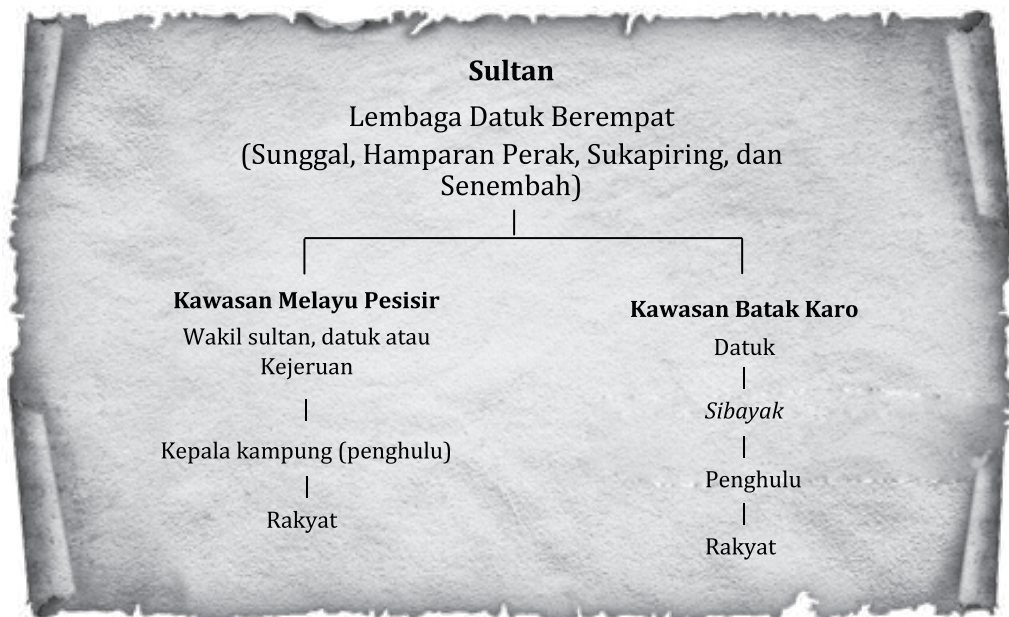
d. Ekonomi dan kemasyarakatan

Hasil bumi utama Deli adalah tembakau. Saat Belanda menguasai Sumatera Timur, perkebunan tembakau dibuka secara meluas. Ternyata tembakau Deli banyak disukai orang, terutama di Eropa. Sultan yang bekerja sama dengan Belanda dalam pengelolaan perkebunan itu menjadi kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Mereka

membangun istana-istana yang megah. Meskipun demikian, kemakmuran ini tidak begitu berpengaruh terhadap rakyat kebanyakan. Mereka tetap menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertanian sederhana. Tetapi, ketika komoditas tembakau semakin menjanjikan banyak petani yang semula menanam padi beralih pada tembakau. Karenanya, padi menjadi berkurang. Hasil bumi Deli lainnya adalah karet, kopi, cengkih, dan nenas. Rakyat Deli ada juga yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh-buruh di perkebunan tembakau, bersama dengan orang-orang Jawa dan China.

VIII. DENAI

Negeri ini merupakan vasal Kerajaan Serdang dan kerap menjadi rebutan antara Deli dan Serdang. Pendiri Kerajaan Denai adalah Tuanku Tawar, saudara Tuanku Umar, raja Serdang pertama. Tuanku Tawar juga dikenal sebagai Arifin atau Kamar dan bergelar Kejeruan Santun. Ia berputra empat orang, yakni Tuanku Jabar, Tuanku Matsyekh, Tuanku Maja Gerang (menjadi penguasa Kampung Sei Nibung), dan Wan Akhan. Pendirian Kerajaan Denai diperkirakan bersamaan waktunya dengan perang perebutan takhta di Deli pada tahun 1723 antara Tuanku Umar dengan Tuanku Pasutan, yang berujung pada pecahnya Deli menjadi dua, yakni Deli dan Serdang. Tuanku Jabar kemudian menjadi raja Denai kedua menggantikan Tuanku Tawar. Sementara itu, Tuanku Wan Akhan belakangan pindah ke Kedah karena menikah.

Tuanku Jabar berputra Manja Kaya yang memperoleh gelar *raja graha* (panglima perang) dari Kerajaan Siak Sri Indrapura pada tahun 1829. Sedangkan putra-putra lainnya antara lain: Tuanku Darat dan Tuanku Wan Bagus. Manja Kaya digantikan oleh Sutan Megah. Semasa kekuasaannya, Serdang mengirimkan pasukannya merebut Denai pada bulan Maret 1865, karena kedekatan Sutan Megah pada Deli. Tetapi tak lama kemudian, yakni tepatnya pada bulan Oktober 1865 Belanda merebut Denai dari tangan Serdang dan diserahkan pada Deli. Selanjutnya, kekuasaan atas Denai dipegang oleh Rada Yaudin (Raja Muda Graha), putra Manja Kaya. Yang menggantikannya adalah Sutan Berahim, putra Rada Yaudin. Pada tahun 1882, Denai dikembalikan pada Serdang. Sutan Berahim dibujuk agar membelot pada Deli. Sementara itu, Raja Mahmud, putra Tuanku Wan Bagus pergi membantu sultan Selangor dalam peperangan di Kelang pada tahun 1878 dan kembali ke Serdang di tahun 1883. Putri Raja Mahmud bernama Tengku Long kemudian menikah dengan Pangeran Tan Idris. Karena putrinya meninggal pada tahun 1884, Raja Mahmud kembali ke Selangor.

Sutan Berahim setelah dibujuk oleh Deli lantas meninggalkan negerinya dan pindah ke Deli. Oleh karena itu, Denai tidak lagi memiliki pemimpin; sehingga Raja Mahmud diangkat oleh Serdang sebagai raja Denai pada tahun 1887. Jabatan ini dipegangnya hingga meninggal di tahun 1907. Putranya bernama Raja Sulaiman menjadi raja Denai berikutnya. Tetapi ia mengundurkan diri pada tahun 1919. Semenjak saat itu, kondisi Denai kurang makmur karena kerap tergenang banjir. Setelah berhentinya Raja Sulaiman sebagai penguasa Denai, kawasan tersebut disatukan pemerintahannya dengan distrik Ramunia pada tahun 1925 di bawah Tengku Mohammad Dewa.

IX. HAMPARAN PERAK (XII KOTA)

Cikal-bakal negeri ini adalah seorang tokoh bernama Tuan Si Raja Hita[342] yang masih keturunan dinasti Sisingamangaraja dari Bakkara. Ia merantau ke Tanah Karo dan mempunyai seorang putra bernama Guru Patimpus, yang mendirikan sebuah kerajaan di Kampung Durian. Karena pengaruh penyebaran Islam yang berasal dari Deli, Guru Patimpus kemudian menganut agama Islam, di mana peristiwa ini terjadi pada sekitar abad ke-17. Guru Patimpus menikah di Tanah Karo dan memiliki seorang putra bernama Bagelit, yang kelak menjadi raja di Sukapiring.

Guru Patimpus menikah lagi dengan putri raja Pulau Berayan yang bermarga Tarigan. Pernikahan ini dikaruniai dua orang putra, yang masing-masing bernama Kolok dan Kecik (Kilit). Karena keduanya merupakan seorang penghafal Alqur'an, maka yang sulung juga dikenal sebagai Hafidz Tua, sedangkan adiknya dikenal sebagai Hafidz Muda. Kecik kemudian menggantikan Guru Patimpus sebagai raja yang berkedudukan di Medan. Setelah beliau mangkat, putranya yang bernama Muhammad Syah menggantikannya.

Muhammad Syah memiliki tiga orang putra; yakni Masannah (pendiri kampung di Pulau Bening), Ahmad (bermukim di Medan), dan Mahmud. Pengganti Muhammad Syah selaku raja XII Kota adalah putranya yang bernama Mahmud tersebut. Ada kisah menarik seputar Muhammad Syah. Konon, ia pernah berpesan agar jangan dimakamkan di dekat Massanah. Tetapi kerabatnya kemudian melupakan amanat Muhammad Syah ini, sehingga ia dimakamkan di dekat kuburan Massanah. Akibatnya, keesokan harinya kuburan Massanah menjadi melintang.

342. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 185.

Mahmud berputra dua orang, yakni Ali (pendiri kampung Buluh Cina) dan Zainal (pendiri kampung Kelambir Tunggal). Pengganti Mahmud adalah putranya yang bernama Ali. Ia memerintah dari Buluh Cina dan semenjak saat itu Negeri XII Kota menjadi makmur karena perniagaan ladanya. Ali digantikan oleh Banuasim, putranya, yang memerintah dari Pangkalan Buluh. Sedangkan putrinya yang bernama Bujang Semba dinikahi oleh Sultan Amaluddin Mangedar Alam dari Deli. Zainal memiliki tiga orang putri, yakni Sri Intan (menikah dengan Indra Bongsu Langkat), Mastika, dan Durak. Selain itu, ia masih mempunyai seorang putra lagi bernama Bagus.

Banuasim digantikan oleh putranya yang bernama Sutan Sri Ahmat. Ia merupakan penguasa yang mengganti nama negerinya dengan Hamparan Perak. Pada masanya, Deli berupaya menanamkan kekuasaannya di Hamparan Perak yang makmur itu. Hal ini diwujudkan dalam pemberian gelar Panglima Setia Wazir XII Kota pada Sutan Sri Ahmad. Pemerintahannya boleh dikatakan cukup panjang, karena ia baru meninggal pada sekitar tahun 1920.

Tuan Si Raja Hita
Guru Patimpus
Bagelit
Kolok
Kecik
Muhammad Syah
Masannah
Ahmad
Mahmud
Ali
Zainal
Banuasim
Bujang Semba X Sultan A. Mangedar Alam (Sultan Deli)
Sutan Sri Ahmat
Sri Kemala **X** Sultan Osman Perkasa Alam (Deli)
Sri Banun **X** Pangeran Langkat Musa
Sri Intan **X** Indra Bongsu Langkat
Mastika
Durak **X** O.K. Intan
Bagus
Cendra Dewi **X** Kejeruan M. Ahmad
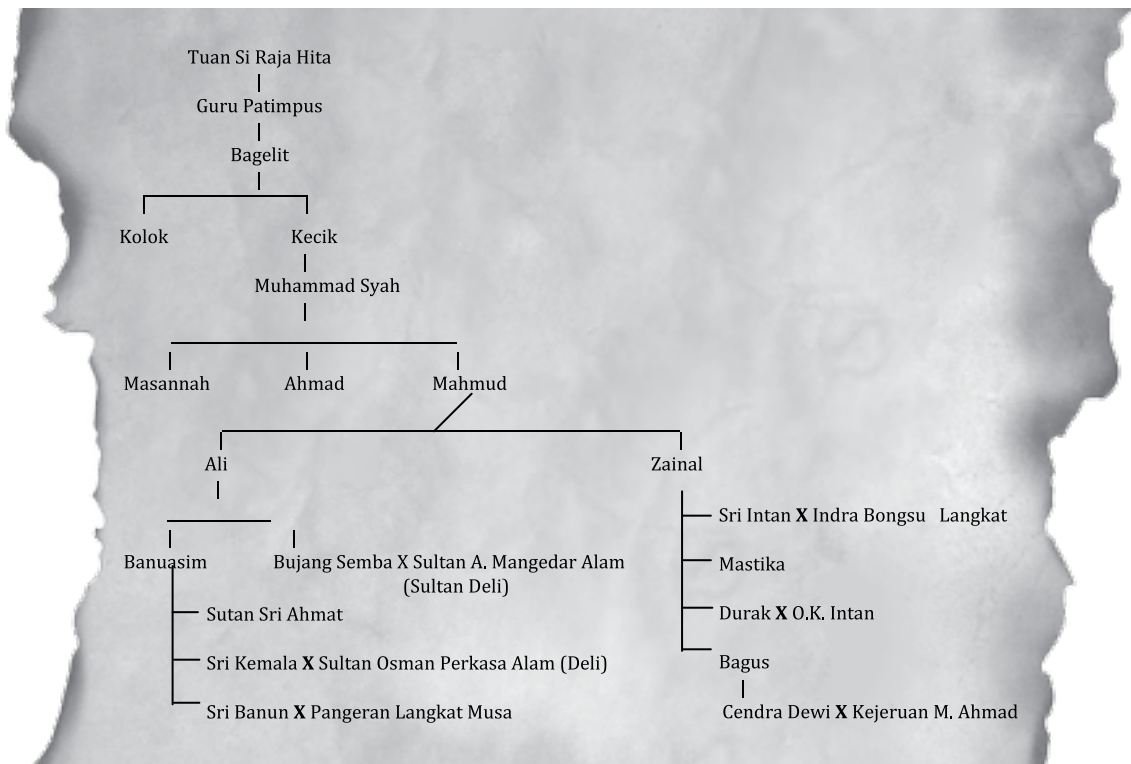
Silsilah para penguasa Hamparan Perak (XII Kota)
Sumber: buku Sari Sejarah Serdang I, halaman 185–186

X. INDRAPURA

Menurut informasi yang diberikan Marsden[343], Indrapura adalah pecahan Minangkabau. Pada zaman Marsden kerajaan itu dikatakan telah mengalami kemundurannya, walaupun dulu pernah menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Masih berdasarkan buku karya Marsden, disebutkan bahwa wilayahnya mencakup Anak Sungai hingga Ketaun. Lada merupakan hasil utama Indrapura. Sebelum kedatangan agama Islam, yang berkuasa di Indrapura secara berturut-turut adalah Putih I (sekitar abad ke-14), Itam I (± 1380–± 1400), Bandara (± 1400–± 1430), Putih Muda (± 1430–± 1450), Sangam Diraja (± 1450–± 1480), dan Pahlawan (± 1480–± 1530).

Sesudah masuknya agama Islam, Indrapura diperintah oleh Munawar Syah (± 1530–± 1550), Itam II (± 1616–± 1624), Besar (± 1624–± 1630), Putih II (± 1630–± 1636), Muzaffar Syah (± 1636–1660), dan Muhammad Syah (1660–1691). Oleh sumber-sumber Inggris, Muzaffar Syah ini kerap disebut pula sebagai Malfarsyah). Karena usia anaknya yang belum dewasa, Muzaffar Syah memegang jabatan sebagai wali hingga 1674. Kerajaan Anak Sungai merupakan bawahan Indrapura, yang menempatkan wakilnya di sana dengan gelar raja adil. Semasa pemerintahan Muhammad Syah, yang menjadi raja adil di Anak Sungai adalah saudara sepupunya bernama Tuanku Sungut. Ia berkeinginan melepaskan diri dari Indrapura, sehingga memantik kericuhan. Rakyat Anak Sungai sendiri kurang menyukai raja Indrapura. Karena itu, tak sulit bagi Tuanku Sungut mengumpulkan banyak pengikut.

Muzaffar Syah merasa tak sanggup memadamkan pembangkangan itu seorang diri dan meminta bantuan Belanda. Sebaliknya Tuanku Sungut meminta bantuan Aceh. Permohonan bantuan ini bagaikan pucuk dicinta ulam bagi Belanda, yang memang semenjak lama mengincar daerah itu dan mematahkan pengaruh Aceh di sana. Bersamaan dengan itu, Belanda gencar menjalin kesepakatan dengan para penguasa pesisir barat Sumatera; yang dikenal sebagai Perjanjian Painan (1663). Groenewegen selaku wakil VOC mengikut-sertakan pula Indrapura dalam perjanjian di atas. Setelah itu barulah bala bantuan Belanda diturunkan. Tuanku Sungut terusir dari negerinya dan melarikan diri ke selatan serta meminta bantuan Banten. Ia berjanji akan menjual hasil ladanya ke Banten dan tidak pada VOC.

Belanda menghalau Tuanku Sungut dari tempat kedudukannya yang baru, tetapi ia tetap menentang Indrapura. Setelah Belanda meninggalkan Indrapura, Tuanku

343. Lihat *Sejarah Sumatra* (terjemahan Indonesia), halaman 325.

Sungut melancarkan lagi serangannya terhadap Indrapura, sehingga menggoyahkan kedudukan Sultan Muhammad Syah. VOC kali ini menelan kekalahan telak dan bahkan raja Indrapura beserta keluarganya harus meminta perlindungan Belanda. Akhirnya, Belanda sepakat mendamaikan mereka. Niat Belanda ini didasari pertimbangan bahwa tidak ada gunanya memusuhi Tuanku Sungut. Lebih menguntungkan bagi Belanda memegang kedua-duanya.

Sebagai solusinya, Muhammad Syah ditakhtakan kembali di Indrapura; sedangkan ayahnya–Muzaffar Syah–dilarang ikut campur lagi dalam pemerintahan. Tuanku Sungut diakui sebagai raja Anak Sungai dengan daerah kekuasaan yang cukup luas. Ia diwajibkan menjual ladanya pada VOC. Boleh disimpulkan, kini Tuanku Sungut telah beralih menjadi bawahan Belanda. Meskipun demikian, persoalannya tidak sesederhana itu. Muzaffar Syah tidak bersedia menghapus dendamnya pada Tuanku Sungut, sehingga keadaan berpotensi memanas lagi. Di lain pihak, Tuanku Sungut juga bukan pribadi yang mudah diatur seenaknya oleh VOC. Kendati telah berjanji menjual ladanya hanya pada VOC, ia tetap mengapalkannya ke Banten.

VOC mengadakan lagi perjanjian dengan para penguasa pantai barat Sumatera pada tahun 1680[344]. Berdasarkan perjanjian ini, Indrapura dan Anak Sungai mengakui kedaulatan VOC. Inggris dengan EIC-nya terdepak dari Banten dan kini berupaya mencari pijakan baru di Kepulauan Nusantara. Bagi mereka tempat yang diincar adalah pantai barat Sumatera. Agar memperoleh apa yang diinginkannya, Inggris turut mengipas bara dendam antara Indrapura dan Anak Sungai. EIC kali ini memihak Muhammad Syah dan membantunya memerangi Tuanku Sungut. Sebagai imbalannya, raja Indrapura itu diwajibkan menandatangani perjanjian yang berisikan penyerahan kerajaannya pada Inggris serta mengizinkan monopoli perdagangan lada. Wakil pemerintah Belanda yang berada di Padang memprotes tindakan Inggris yang dianggap melanggar kedaulatannya ini, karena Belanda telah terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan para penguasa setempat. Meskipun demikian, pemerintah pusat di Batavia memerintahkan agar mereka membiarkan saja tindakan Inggris tersebut dan jangan terlibat peperangan secara langsung.

344. Lihat *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, halaman 232.

Makam raja-raja Indrapura
Sumber: Jon Kenedi Kasdun

Belanda lantas menghasut Sutan Larangan agar menerbitkan pemberontakan melawan sultan Indrapura. Muhammad Syah yang merupakan sahabat Inggris terpaksa melarikan diri dan pemerintahan sementara waktu dipegang oleh seorang wanita, saudara sepupunya. Tentu saja, saudara sepupunya ini merupakan tokoh yang memihak Belanda. Demikianlah siasat Belanda mendongkel Sultan Muhammad Syah. Setelah sultan menyerah, Belanda mengangkat saudaranya bernama Mansur Syah (1691–1696) sebagai raja Indrapura. Ia meninggal pada tahun 1696 dan digantikan oleh Sultan Pesisir (1696–1747) yang masih kecil. Pemerintahan karenanya dipegang oleh Muhammad Syah selaku walinya. Namun setelah itu beralih pada Raja Ibrahim dan Akhmad Syah.

Pada 6 Juni 1701 terbit pemberontakan rakyat melawan VOC. Kantor dagang VOC diserbu dan para pegawainya dihabisi nyawanya, terkecuali satu orang yang selamat dan mengadukannya pada perwakilan Belanda di Padang. Belanda membalas pembantaian ini dengan menghancurkan segenap tanaman lada yang ada di Indrapura dan melakukan perusakan beserta penjarahan. Bahkan raja beserta keluarganya melarikan diri ke pedalaman. VOC kemudian memaksa Sultan Pesisir menandatangani kontrak politik.

Inggris menginjakkan kakinya kembali pada tahun 1715 dan berniat mengadakan hubungan dagang dengan Indrapura. Karena khawatir terhadap Inggris, sultan meminta bantuan Belanda, tetapi ditolak. Dengan runtuhnya perniagaan lada di Indrapura, kawasan itu tak memiliki arti penting lagi di mata Belanda. Akhirnya, Belanda hanya setuju menempatkan beberapa orang pasukan saja. Sultan hanya diperkenankan memiliki satu pengawal sebagai penghormatan. Rangkaian sultan-sultan Indrapura setelah Sultan Pesisir adalah Mahmud Syah (1747–1766), Datuk Muda (1766–), dan Muhammad Syah II (–1792). Pada tahun 1792, pengawal kehormatan yang tinggal satu-satunya ini ditarik ke kantor VOC di Airhaji. Sultan menolaknya, karena pasukan tersebut merupakan simbol kehormatan yang berarti penting baginya. Timbul perselisihan dengan sersan di Airhaji yang disertai beberapa anak buahnya menyerang Indrapura. Mereka menembak membabi buta, sehingga sultan terpaksa melarikan diri ke Bengkulu serta meminta perlindungan Inggris. Kejadian ini boleh dipandang sebagai akhir Kerajaan Indrapura. Sultan Muhammad Syah II, penguasa Indrapura terakhir menetap di Bengkulu hingga akhir hayatnya pada tahun 1824.

Salah seorang saudara perempuan sultan meninggalkan Bengkulu pada tahun 1825 dan membawa putra Muhammad Syah II bernama Marah Yahya menjumpai residen Belanda di Padang. Marah Yahya merupakan pengganti sultan yang paling berhak. Tujuan kunjungan itu adalah menanyakan apakah ada kemungkinan Marah Yahya dinobatkan lagi sebagai raja. Residen Ridder de Steurs setuju mengangkat Marah Yahya sebagai *regen* (bupati) tetapi bukan sebagai raja. Demikianlah, pada 6 Desember 1825 Marah Yahya diangkat sebagai bupati Indrapura dengan gelar Akhmadsyah. Wilayahnya telah semakin menciut. Beliau digantikan oleh Marah Ripin atau Arifin, yakni saudara sepupunya. Marah Arifin mengundurkan diri karena menuaikan ibadah haji ke Mekah[345]. Pengganti beliau adalah Marah Baki St. Firmansyah, yang diangkat sebagai *regen* pada tahun 1858. Sebenarnya masih ada calon lain, yakni St. Bayang, putra *Regen* St. Indra Alam, yang meninggal tahun 1852. Kendati demikian, pemerintah kolonial lebih mendukung Marah Baki baik karena usianya lebih tua. Beliau mangkat pada malam hari tanggal 11 April 1891 atau sudah terhitung tanggal 12 April. Upacara pemakaman beliau berlangsung megah dengan disertai tembakan meriam.

Terdapat empat calon pengganti beliau, yakni Marah Marullah St. Ibrahim, Marah Dobo St. Mudo, Marah Salim St. Sabirullah, dan Marah Rusli St. Abdullah. Akhirnya yang disetujui pemerintah kolonial adalah Marah Rusli St. Abdullah karena beliau pernah menuntut ilmu di Sekolah Rajo Bukittinggi dan sebelumnya telah ditunjuk oleh Marah Baki. *Regen* Indrapura terakhir ini dipensiunkan pada 1911 dan setelah itu tak diangkat lagi penggantinya.

Sementara itu menurut *Ranji Melayu Tinggi, Ranji Tinggi Indrapura*, raja-raja yang pernah memerintah Indrapura adalah sebagai berikut[346]: [1] Sultan Jamalul Alam Yang Dipertuan Khalifatullah Alam Iskandar Alam Ibnu Adam Alaihis Sallam; [2] Sultan Jamalul Alam Sultan Daulat Sri Maharajo Dirajo Usli Kerajaan di Lingga Puri; [3] Khalifatul Alam Sultan Mahyidinsyah Daulat Jamalul Alam, Sultan Sri Maharajo Dirajo Muhammad Syah (akhir abad ke-9); [4] Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Srimaharajo Dirajo Alamsyah; [5] Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Firmansyah; [6] Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Gegar Alamsyah; [7] Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Usmansyah, Berdarah Putih; [8] Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan

345. Lihat Padang Riwayatmu Dulu, halaman 176.
346. Lihat http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=10150337212486942#!/note.php?note_id=110539502372094 (diunduh tanggal 13 Agustus 2011).

Firmansyah; [9] Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Muhammadsyah; [10] Sultan Jamalul Alam Sultan Firmansyah; [11] Sultan Jamalul Alam Sultan Maradhu Alam Syah; [12] Sultan Jamalul Alam Sultan Madlafarsyah; [13] Sultan Jamalul Alam Sultan Usmansyah (1526-1565); [14] Sultan Jamalul Alam Yang Dipertuan Daulat Sultan Gegar Alamsyah Muhammadsyah, Tuanku Berdarah Putih (1565-1600); [15] Putri Syiah Bintang Purnama Raja Perempuan Inderapura; [16] Daulat Alam Sultan Ali Akbar Syah Sultan Muhammadsyah (1600-1635); [17] Putri Bangun Rekna Cahaya Alam Raja Perempuan Inderapura; [18] Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Inayatsyah Muhammadsyah (1635-1660); [19] Sultan Malafarsyah (1660-1687); [20] Sultan Syahirullah Daulat Alam (1687-1707); [21] Putri Linggo Geni Dewi Alam Raja Perempuan Inderapura; [22] Sultan Zam-zamsyah Gelar Sultan Firmansyah (1707-1737); [23] Putri Mayang Sari. Ratu Kerajaan Inderapura; [24] Sultan Muhammad Syah (1737-1774); [25] Putri Zahara Alam Bintang Cahaya Ratu Kerajaan Inderapura; [26] Sultan Inderahimsyah Gelar Sultan Muhammadsyah (1774-1804); [27] Putri Sri Gading Bintang Purnama Putri Bangsawan; [28] Sultan Aiyatullahsyah Gelar Sultan Inayatsyah (1804-1840); [29] Putri Jusma Alam Cahaya Ratu Kerajaan Inderapura; [30] Daulat Alam Tuanku Sembah Tuanku Balindung Sultan Muhammad Arifinsyah Gelar Sultan Muhammadsyah (1840-1860); [31] Putri Srihati Bintang Alam Raja Perempuan Inderapura/ Tuanku Dusi; [32] Putri Bangun Cahaya Inderapura; [33] Daulat Alam Tuanku Sembah Tuanku Balindung Sultan Muhammad Baqi Gelar Sultan Firmansyah (1860-1891); [34] Putri Zaenab Cakra Alam Inderapura; [35] Putri Nurmidah Gumala Cahaya; [36] Sultan Setiawansyah Gelar Sultan Muhammadsyah (1911-1966); [37] Putri Gindan Dewi Alam Inderapura; [38] Sultan Zainal Rizalsyah Mustapura Gelar Sultan Inayatsyah (1966-1985); [39] Sultan Burhanuddin Gelar Sultan Firmansyah Alamsyah (1985-2011). Pewaris Kesultanan Indrapura dewasa ini adalah Yang Mulia Sultan Indera Rahimsyah**.**

XI. KOTA PINANG

Leluhur raja-raja Kota Pinang adalah Raja Awan, putra termuda Marhum Mangkat di Jambu. Ia kemudian membangun kerajaan di Sungai Tasik, yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Kota Pinang. Sementara itu, Batara Sangti dalam karyanya mengutip bahwa raja pertama Kota Pinang adalah Sultan Batara Guru Pinayungan (Batara Sinomba), putra Sultan Alamsyah Syaifuddin dari Pagarruyung[347]. Bersama dengan

347. Lihat *Sejarah Batak*, halaman 47.

saudara-saudaranya, ia meninggalkan Pagarruyung dan mendirikan Kampung Pinang Awan, cikal-bakal Kota Pinang, pada kurang lebih abad ke-17. Raja-raja Kota Pinang berikutnya secara berturut-turut adalah: Sultan Mangkuto Alam atau Sultan Musa, Sultan Maharaja Awan, Yang Dipertuan Besar atau Sultan Kahar, Yang Dipertuan Muda, Yang Dipertuan Hadndung, Yang Dipertuan Mangkat di Simarkaluang, Sultan Kumala atau Sultan Tua, Sultan Muda, dan Sultan Bungsu (Busu), Sultan Mustafa, Sultan Ismail, dan Yang Dipertuan Ma'mur Perkasa Alamsyah[348].

Pada abad ke-19, yang menjadi raja di Kota Pinang adalah Sutan Busu. Ketika negerinya dimasuki pasukan Siak pada tahun 1835, Sutan Mangedar Alam, raja Panai, pernah meminta bantuan pada Sutan Busu. Raja Panai tersebut mengajak Sutan Busu bersama-sama menghalau pasukan Siak, tetapi ditolak oleh yang bersangkutan. Akibatnya, Sutan Mangedar Alam terpaksa berdamai dengan Siak dan membayar sejumlah ganti rugi.

Kurang lebih bersamaan dengan itu, berkecamuklah Perang Padri. Tuanku Tambusai, salah seorang panglima Padri menguasai Padang Lawas dan menyerbu Kota Pinang. Karena itu, Sutan Busu terpaksa melarikan diri ke Pulau Biramata. Namun setibanya di sana, ia diserang dan dibunuh oleh Sutan Mangedar Alam. Setelah Tuanku Tambusai berhasil dihalau dari Padang Lawas pada tahun 1839 oleh Belanda, pasukan pemerintah kolonial kemudian mengalihkan serangannya ke Panai. Selimbang, ibukota Panai, bahkan berhasil diduduki oleh Belanda, sehingga Sutan Mangedar Alam terpaksa melarikan diri ke Asahan.

Sutan Mustafa yang menggantikan Sutan Busu, mempergunakan kesempatan ini memperluas wilayah kota Pinang dengan menduduki daerah Sungai Barumun dan Sungai Kanan. Ia kemudian menggunakan gelar Yang Dipertuan Besar Kota Pinang. Permusuhan antara Kota Pinang dan Panai belum juga mereda. Ketika Sutan Mangedar Alam kembali ke Kota Pinang, Sutan Mustafa menyerangnya di dekat Sungai Sontang, sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Asahan pada tahun 1848.

Asahan berupaya memanfaatkan perselisihan antara Kota Pinang dan Panai ini dengan menawarkan jasa baiknya sebagai penengah. Sultan Asahan menyarankan Panai memberikan sebagian daerahnya pada Kota Pinang dan juga Asahan, sebagai imbalan menengahi perseteruan ini. Akhirnya, Sutan Mangedar Alam kembali ke Panai pada tahun 1855. Ia menikah dengan adik raja Bilah dan menjalin aliansi dengannya. Kini

348. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 81-82.

giliran Sutan Mustafa yang merasa khawatir. Ia merasa terancam oleh persekutuan antara Panai, Bilah, dan Asahan. Oleh karenanya, ia lantas meminta meminta perlindungan pada Siak. Pada tahun 1864, Sultan Mustafa mengakui kedaulatan pemerintah kolonial. Pengganti beliau, Sultan Ismail menandatangani kontrak politik pada 24 Februari 1879. Ketika Revolusi Sosial pecah pada tahun 1946, sultan Kota Pinang terakhir turut menjadi korbannya.

XII. KUALUH

Karena terlibat perselisihan dengan saudaranya, Pangeran Muhammad Ishak dari Asahan ditakhtakan sebagai raja Kualuh dengan gelar Yang Dipertuan Raja Muhammad Ishak Negeri Kualuh (1829–1882) pada 1829. Beliau digantikan oleh putranya, Tengku Naamatullah, yang naik takhta dengan gelar Yang Dipertuan Tengku Naamatullah Alhaji Abdullah Syah (1882–1886). Gelar anumerta beliau adalah Marhum Kampong Mesjid. Raja Kualuh berikutnya adalah putra Tengku Naamatullah bernama Tengku Biung. Gelarnya adalah Yang Dipertuan Alhaji Muhammad Syah (1886–1946). Kerajaan Kualuh turut menjadi korban Revolusi Sosial yang berkecamuk pada tahun 1946.

XIII. LANGKAT

a. Cikal-bakal Kerajaan Langkat

Kini terletak di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Cikal-bakal kerajaan ini adalah Kerajaan Aru Tua (Aru Asli) yang terletak di kawasan Sungai Harau (Sungai Padang) dan berpusat di Tanjung Beringin. Kerajaan ini digempur dan dihancurkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah atau Al Kahhar (1531–1571) dari Aceh pada tahun 1564. Dalam serangan ini, raja Aru Asli gugur dan permaisurinya yang sedang mengandung melarikan diri ke pedalaman. Oleh karena suatu sebab, setelah melahirkan permaisuri meninggalkan bayinya di kawasan salah satu negeri yang menjadi sahabat Aru Asli[349]. Bayi itu kemudian ditemukan oleh raja Kuta Buluh. Ia langsung mengenalinya sebagai keturunan Kerajaan Aru berdasarkan benda-benda pusaka kerajaan yang ditinggalkan bersamanya. Pada zaman itu, seorang keturunan raja besar dipercaya sebagai penjelmaan dewa, sehingga anak itu lalu dinamakan Dewa Sakti. Setelah dewasa, Dewa Sakti dinikahkan dengan kerabat dekatnya, yakni

349. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu–Pesisir Deli Sumatra Timur, 1612–1690*, halaman 64–65.

seorang putri *beru* Tarigan. Sesuai dengan adat Karo, Dewa Sakti dianugerahi marga Perangin-angin. Hal ini menunjukkan bahwa para penguasa Aru sebelumnya tidak mempunyai marga, sehingga boleh dikatakan berbeda dengan suku-suku Batak yang berdiam di Tanah Karo dan Toba.

Dewa Sakti kemudian ditakhtakan di bekas kerajaan leluhurnya dan membangun ibukota baru di Kota Tua. Ibukota Kerajaan Aru Baru (terkadang disebut Aru saja) ini dikelilingi oleh perbentengan dan pohon-pohon bambu aur yang rapat. Sebagai penguasa kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Aceh, Dewa Sakti melengkapi pertahanannya dengan meriam beserta perlengkapan-perlengkapan kemiliteran lainnya. Sebagian persenjataan ini diperolehnya dari Portugis yang saat itu terlibat persaingan dengan Aceh. Dewa Sakti mangkat pada kurang lebih awal abad ke-17 dan niatnya membalas dendam pada Aceh diteruskan oleh putranya, Dewa Syahdan (1500–1580). Ketika itu, kekuatan Aru telah semakin bertumbuh, walaupun masih belum sanggup menguasai daerah pantai karena tidak memiliki angkatan laut yang kuat. Dengan demikian, Aceh tetap berkuasa di daerah pantai, sedangkan Dewa Syahdan memusatkan perhatian pada pusat kerajaannya di pedalaman. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dewa Syahdan dibantu oleh tiga orang saudaranya; yakni Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Indra Bungsu (Indra Sakti). Tetapi dalam buku *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 189, disebutkan bahwa Indra Sakti atau Dewa Sakti beserta Putri Hijau adalah putra Dewa Syahdan. Menurut sumber yang baru saja disebutkan itu, Dewa Syahdan digantikan oleh Indra Sakti (1580–1612). Karena memperoleh anugerah marga Perangin-angin, keturunan Dewa Sakti boleh menyandang marga tersebut. Kendati demikian, sultan-sultan Langkat yang merupakan keturunan Dewa Sakti sehari-hari tidak menggunakan marga ini. Hanya saat berlangsungnya upacara adat di Kuta Buluh barulah mereka diundang sebagai anggota marga Perangin-angin.

Pada tahun 1612, Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan untuk menaklukkan Aru. Tipu muslihat digunakan Gocah Pahlawan dalam misi penaklukan Aru ini. Ia mengganti peluru meriam dengan mata uang Ringgit emas dan menembakkannya ke kubu pertahanan musuh. Akibatnya, pasukan Aru berebut uang yang berhamburan tersebut dan menjadi lengah. Selanjutnya, dengan mudah mereka dikalahkan oleh Aceh. Konon menurut penuturan ceritera rakyat, Mambang Yazid berubah menjadi naga. Sementara itu, Putri Hijau ditawan dan dibawa ke Aceh. Ia

kemudian hendak dinikahkan dengan sultan Aceh. Sultan Iskandar Muda dari Aceh bersiap menyambut rombongan Putri Hijau di pantai Tanjung Jambu Air Aceh. Sesuai dengan permintaan Putri Hijau, sultan telah menyiapkan tumpukan bertih dan telur ayam di tepi pantai. Ternyata ini adalah siasat Putri Hijau semata guna memberikan tanda pada saudaranya, Mambang Yazid. Begitu Putri Hijau menginjakkan kakinya di darat muncul seekor naga penjelmaan Mambang Yazid yang menyambarnya dan mereka berdua lalu menghilang ke dalam lautan. Demikianlah, rakyat di Sumatera Timur banyak yang meyakini bahwa Mambang Yazid dan Putri Hijau tidak meninggal, melainkan menjadi makhluk keramat.

Berdasarkan legenda di atas, Dewa Sakti kemudian dikatakan raib entah kemana, tetapi boleh jadi ia gugur dalam pertempuran di atas. Ia digantikan oleh putranya, yang hanya dikenal gelar anumertanya[350] saja, yakni Marhom Guri, yang dimakamkan di Buluh Cina (sekarang masuk wilayah Hamparan Perak). Pengganti Marhom Guri adalah putranya yang bernama Raja Kahar (sekitar tahun 1673). Ia mempunyai dua orang anak, yakni Sutan Husin dan seorang putri bernama Dewi Tahrul.

b. Perkembangan Kerajaan Langkat

Raja Kahar merupakan perintis Kerajaan Langkat dan membangun ibukotanya di Kota Dalam. Ia memiliki empat orang putra, yang masing-masing bernama: Badiulzaman (bergelar Sutan Bendahara), Raja Wan Jabar (pendiri kampung Selesai), Syahban, dan Indra Bongsu. Badiulzaman kemudian diangkat sebagai pengganti ayahnya. Ia tercatat memperluas kekuasaan Langkat dengan cara-cara damai Badiulzaman mangkat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Raja Hitam. Pada kurang lebih tahun 1815, Siak menyerang Langkat yang sebelumnya menjadi vasal Kesultanan Aceh. Raja Hitam melarikan diri ke Deli guna meminta bala bantuan, baik berupa pasukan, amunisi, atau persenjataan. Setelah memperoleh segala sesuatu yang diperlukannya, Raja Hitam berlayar pulang dengan menghiliri Sungai Deli. Saat itu, Raja Hitam beserta kawannya yang bernama Banding sedang asyik menembaki buaya. Kendati demikian, mereka melupakan bubuk mesiu yang tergeletak di dekat mereka. Karena kelalaian, mesiu itu meledak dan menewaskan keduanya[351].

Siak lantas menawan putra Raja Hitam bernama Nobatsyah dan putra Indra Bongsu bernama Raja Ahmad. Melalui mereka pengaruh Siak hendak ditanamkan.

350. Gelar yang dianugerahkan setelah seseorang mangkat.
351. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 190.

Oleh karenanya, keduanya lantas dinikahkan dengan putri-putri Siak. Nobatsyah menikah dengan Tengku Fatimah dan Raja Ahmad dengan Tengku Kanah. Keduanya lantas dikembalikan ke Langkat guna memerintah negeri tersebut secara bersama-sama. Nobatsyah digelari Raja Bendahara Kejeruan Jepura Bilad Jentera Malai; sedangkan Raja Ahmad digelari Kejeruan Muda Wallah Jepura Bilad Langkat. Meskipun demikian, Nobatsyah kemudian mati diracun, sehingga Raja Ahmad menjadi satu-satunya penguasa Langkat.

Setelah Raja Ahmad mangkat di tahun 1840, putranya yang bernama Tengku Musa atau Raja Musa (1840–1893) naik takhta menggantikannya. Sebelumnya, Siak menetapkan bahwa putra Nobatsyah yang akan menjadi raja Langkat berikutnya; namun ketika Raja Ahmad wafat, putra ini telah berpulang pula ke alam baka. Semasa pemerintahan Raja Musa, kerap terjadi perselisihan dengan raja-raja kecil yang berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1855, Aceh mengirimkan pasukannya ke Langkat yang hingga saat itu mengakui pertuanan Siak agar negeri itu kembali berlindung pada Aceh. Raja Musa terpaksa tunduk pada Aceh dan menerima gelar Pangeran Indra Diraja Amir Pahlawan Sultan Aceh.

Bersamaan dengan itu, Belanda ingin menanamkan pengaruhnya di Sumatera Timur demi melemahkan kekuatan Aceh. Karenanya, Belanda mengadakan perjanjian dengan Siak pada tahun 1858 dan memanfaatkannya demi melancarkan rencananya. Sebagai tindak lanjut, Belanda mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Netscher pada tahun 1863 guna menundukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Setelah berhasil menuntaskan misinya di Deli, Netscher bertolak ke Langkat, tetapi kali ini upayanya gagal karena Aceh telah mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Tengku Hasyim (Tengku Hitam) dengan dibantu oleh Cut Latip. Meskipun demikian, pada tahun 1869, Langkat mengadakan perjanjian dengan Belanda dan mengakui pertuanan Siak.

Pada tahun 1878, Raja Musa menyerahkan wilayahnya yang terletak di sebelah kanan Sei Tamiang pada Belanda. Bagi daerah yang diambilnya dari Kejeruan Selesai, Raja Musa menamainya Sungai Bingai dan mengangkat seorang dari Sunggal sebagai pemimpinnya dengan gelar Bendahara. Namun, tak berapa lama kemudian pemimpin distrik Sungai Bingai tersebut berselisih dengan Raja Musa. Akibatnya, Langkat mengirimkan pasukannya guna menangkap Bendahara dan menempatkan Tengku Maharaja sebagai penggantinya. Langkat dibagi menjadi 2 daerah yang disebut *luhak*

pada tahun 1881 dan Raja Musa mengangkat putra sulungnya, Tengku Sulung, sebagai wakilnya di Langkat Hulu.

Belakangan, Raja Musa dinaikkan kedudukannya sebagai sultan pada tahun 1887 dengan gelar Sultan Al Haji Musa Naksabandil Muazzamsyah (Sultan Musa); sehingga semenjak saat itu, para penguasa Langkat menyandang gelar sultan. Ia menetapkan putra bungsunya, Tengku Abdul Azis (Tengku Montel) sebagai putra mahkota. Tengku Hamzah, putranya yang lain diangkat sebagai Pangeran Langkat Hilir.

Sultan Musa tercatat pula memajukan bidang kerohanian dengan mendirikan 5 buah mesjid megah; yakni di Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, Stabat, Binjai, dan Selesai. Lebih jauh lagi, di Tanjung Pura didirikan sebuah perguruan Islam yang tersohor hingga ke luar negeri. Para siswa yang berasal dari perguruan ini dapat meneruskan studinya di Al-Azhar, Kairo. Sultan me*wakaf*kan sebidang tanah pada Syekh Abdul Wahab, seorang guru dari Tarikat Naksabadiah. Tanah ini kini terletak tujuh kilometer dari Tanjung Pura dan disebut Kampung Wakap Babussalam (Besilam).

Karena usianya telah lanjut, Sultan Musa mengundurkan diri pada tahun 1892 dan putra mahkota, Tengku Abdul Azis diangkat sebagai sultan Langkat berikutnya dengan gelar Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah (1893–1927). Namun, karena usianya yang masih tergolong muda, ia harus didampingi oleh kakak-kakaknya; yakni Tengku Sulung dan Tengku Hamzah. Baru pada tahun 1896, ia resmi dilantik oleh residen Belanda dan boleh memerintah sendiri. Langkat menjadi semakin penting artinya berkat penambangan minyak di Pangkalan Berandan. Oleh sebab itu, Sultan Abdul Azis berniat memekarkan wilayahnya menjadi tiga distrik (*luhak*). Wilayah distrik baru itu diambil dari *Luhak* Langkat Hilir dan selanjutnya diberi nama *Luhak* Teluk Haru dengan Pangkalan Berandan sebagai ibukotanya. Sebagai kepala *luhak*, diangkat putra Tengku Sulung.

Sultan Abdul Azis digantikan oleh Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah (1927–1948). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 180, setelah diproklamasikannya kemerdekaan RI, sultan Langkat menyerahkan sumbangan sebesar f. 100.000,- dan menyatakan melalui gubernur Sumatera T.M. Hasan bahwa beliau menghargai kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Langkat diterpa badai pada 1946, yakni seiring dengan meletusnya revolusi sosial di

kawasan tersebut. Banyak anggota bangsawan Langkat yang menemui ajalnya. Korban-korbannya antara lain adalah sastrawan terkemuka Indonesia, Amir Hamzah, yang juga pangeran Langkat, dan Tengku Musa, putra sulung Sultan Mahmud.

Sultan Abdul Aziz Abduljalil Rachmat Sjah
(foto tahun 1895)
Sumber: Institut KITLV, Leiden (kitlv.nl)

XIV. MINANGKABAU (PAGARRUYUNG)

a. Sejarah awal Minangkabau

Kerajaan Minangkabau kini sebagian besar mencakup wilayah Propinsi Sumatera Barat. Marsden memberikan batasan-batasannya sebagai berikut:

> Secara *de facto*, batas-batas kerajaan Minangkabau diakui sebagai berikut: sebelah timur adalah Sungai Palembang dan Sungai Siak, sedangkan di sebelah barat adalah sungai Manjuta, dekat Indrapura dan Sungai Singkil. Di tempat ini, Minangkabau berbatasan dengan Batak.[352]

352. *Sejarah Sumatra*, halaman 306.

Tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah awal Minangkabau. Kebanyakan catatan sejarah awal hanya berupa legenda, sehingga diragukan keakuratannya. Menurut Marsden, sumber-sumber sejarah yang tertulis boleh dikatakan tidak ada.[353] Hal ini bersesuaian pula dengan pandangan Dobbin yang menarik sejarah Minangkabau hingga ke zaman Adityawarman, raja kerajaan Melayu di kawasan tersebut[354]. Masih menurut Dobbin, setelah Adityawarman (kurang lebih abad ke-14) wafat, tidak ada lagi pemimpin handal yang sepadan dengan sosok tersebut, sehingga keluarga raja perannya makin terdesak ke belakang oleh tokoh-tokoh yang lebih kuat. Sepeninggal Adityawarman ini, Minangkabau memasuki zaman sejarah lisannya, yang berarti tidak ada lagi sumber tertulis atau dengan kata lain hanya didasari oleh ceritera rakyat saja.

Menurut legenda, sejarah Minangkabau diawali oleh dua orang bernama Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketamanggungan.[355] Marsden menjelaskan bahwa mereka berdua merupakan salah seorang di antara 40 orang yang selamat dalam perahu Nabi Nuh. Konon, mereka mendarat di Palembang atau pulau kecil di dekatnya yang bernama Langkapura. Selanjutnya, mereka bertolak ke Bukit Siguntang-guntang, lalu memutuskan tinggal di Priangan yang terletak dekat gunung berapi. Priangan memang dianggap sebagai ibukota Minangkabau pada zaman purba.

Dobbin memberikan keterangan bahwa kedua orang tokoh ini merupakan petugas hukum. Mereka bertengkar dan menetapkan dua sistem hukum adat yang berbeda bagi Minangkabau. Setiap desa yang ada di kawasan Minangkabau selanjutnya diwajibkan mengikuti salah satu di antara kedua hukum tersebut. Dobbin menghubungkan legenda ini dengan prasasti Adityawarman berangka tahun 1347 dan menganggap bahwa kedua sumber itu konsisten satu sama lain. Adapun prasasti tersebut menyebutkan mengenai seorang patih atau menteri utama, yang begitu besar peranannya dalam menguasai kawasan Tanah Datar. Patih ini dikatakan telah "memperoleh kekayaan dan emas." Hal ini membuktikan bahwa salah satu sumber daya utama kerajaan berasal dari penambangan emas. Selain itu, prasasti juga menyebutkan mengenai seorang tumenggung dan seorang panglima pasukan yang bergelar *mahasenapati pamanan*. Patih dan tumenggung ini masing-masing dikaitkan Dobbin dengan Perpatih nan Sabatang

353. Lihat *Sejarah Sumatra*, halaman 306.
354. Lihat *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*, halaman 100.
355. Menurut Dobbin demikianlah ejaan kedua tokoh tersebut, sementara itu, Marsden mengejanya masing-masing sebagai Perapati-si batang dan Kei Tamanggungan.

serta Datuk Ketamanggungan. Ia menyimpulkan bahwa sepeninggal Adityawarman, terjadi perselisihan antara para pejabat tinggi negara. Masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri. Kaum *Perpatih* merupakan pengikut patih, sedangkan kaum *ketamanggungan* memihak pada tumenggung. Pengikut tumenggung berada di pihak yang sama dengan keluarga raja yang berasal dari luar Sumatera (dalam hal ini adalah keturunan Adityawarman yang pernah hidup di istana Majapahit). Sebaliknya, kaum *perpatih* mengidentikkan diri mereka dengan Minangkabau asli sebelum masuknya pengaruh Jawa, yakni dengan tradisi matrilineal serta unsur-unsur budaya India dalam peradaban mereka. Terjadilah perselisihan atau gesekan antara kedua kaum ini. Setelah persoalan di antara mereka dapat diselesaikan, ditetapkanlah dua sistem hukum adat bagi Minangkabau. Desa-desa yang tergabung dalam Lima Kaum mengikuti aturan perpatih (juga dikenal sebagai tradisi Bodi Caniago). Sementara itu, kawasan Sungai Tarab menjadi pusat bagi tradisi saingannya yang disebut Koto Piliang. Kedua pusat tradisi ini saling bersaing satu sama lain dan para pemukanya mengangkat diri sebagai bendahara. Dengan demikian, bendahara putih berkuasa di kawasan Sungai Tarab, sedangkan bendahara kuning di Koto Piliang.

Hingga abad ke-19 para bendahara itu masih dianggap orang-orang penting setelah raja di daerahnya. Pada masa itu, Lima Kaum yang mengikuti tradisi Bodi Caniago menguasai pertambangan emas di Bukit Gombak, Suruaso; sedangkan saingannya lebih memusatkan diri pada perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perpindahan antar warga desa yang menganut masing-masing tradisi; akibatnya percampuran antara kedua budaya itu tak terelakkan lagi. Muncul desa-desa yang menganut tradisi campuran. Meskipun demikian, desa yang menganut Koto Piliang lebih banyak berada di kawasan Tanah Datar. Sementara itu, saingannya lebih dominan di daerah Agam. Desa-desa campuran banyak berada di kawasan Lima Puluh Kota.

Kekuasaan para bendahara itu tentu saja makin menenggelamkan peranan raja. Kesultanan Malaka bangkit di abad ke-15 dan menjadi pemegang hagemoni di perairan Selat Malaka. Minangkabau dengan segera menjadi mitra dagang Malaka yang penting, terutama berkat pertambangan emasnya. Daerah Buo dan Sumpur Kudus merupakan penghasil emas utama Minangkabau. Setelah pecahnya perang saudara antara pengikut patih dan tumenggung, tampaknya keluarga raja pindah mendiami kawasan-kawasan ini. Mereka menetap di berbagai tempat di lembah-lembah Sinamar dan Sumpur,

termasuk Buo di tepi Sinamar, Sumpur Kudus di tepi Sumpur, dan Pagarruyung, dekat Kumanis. Saat menetap di Pagarruyung, keluarga raja banyak berhubungan dengan kaum pedagang dan penyiar agama Islam. Oleh karena itu, secara bertahap semenjak abad ke-16, mereka mulai menganut agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan raja dibagi tiga di antara kaum kerabatnya. Dengan demikian, mulai saat itu terdapat tiga orang raja di Minangkabau; yakni Raja Ibadat yang paling dekat dengan perdagangan, berkedudukan di Sumpur Kudus; Raja Alam di Pagarruyung; dan Raja Adat di Buo. Kendati demikian, Raja Alam tampaknya dianggap sebagai yang tertinggi di antara mereka; walaupun kekuasaan seluruh raja itu hanya simbolis saja, karena yang memegang kekuasaan secara nyata adalah para bendahara.

Ketika Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, perdagangan emas Minangkabau masih terus berlanjut di bawah pengawasan bendahara Sungai Tarab. Minangkabau tetap menjadi pelabuhan yang penting. Sesudah kejatuhan Malaka, Kesultanan Aceh mulai menanjak pamornya. Para sultan Aceh kini berkeinginan menguasai perdagangan emas Minangkabau. Aceh merebut Pariaman, salah satu pelabuhan emas Minangkabau, dan menempatkan salah seorang putra sultannya sebagai panglima di sana pada sekitar tahun 1575. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan peraturan bahwa orang asing dilarang mendekati pelabuhan tersebut. Ia juga menerapkan bea 15 % bagi setiap emas yang diekspor dan menetapkan harga bagi sisanya. Kejayaan Aceh juga tidak berlangsung selamanya. Ketika kesultanan itu telah surut kekuasaannya sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Minangkabau menjumpai mitra dagang baru yang kelak memainkan peran penting dalam percaturan politik Minangkabau, yakni Belanda.

Di tahun 1668, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis van der Lijn menjalin hubungan dagang dengan Raja Alam Minangkabau, Sultan Ahmad Syah (1650–1680). Perjanjian yang dijalin antara kedua belah pihak tersebut memperkuat monopoli VOC atas perniagaan lada di pesisir barat Sumatera, mulai dari Barus hingga Indrapura. Sebuah laporan Belanda dari tahun 1667 memberikan keterangan yang dilebih-lebihkan mengenai Sultan Ahmad Syah. Menurut dokumen tersebut Paduco Seiery Sulthan Agha Metcha (maksudnya Ahmad Syah), yakni *de Coning van de Manicabo* [356](raja Minangkabau) memiliki "sungai-sungai dari emas" dan "tambang emas" yang ribuan jumlahnya.

---

356. Lihat *Sedjarah Minangkabau*, halaman 19.

Pada tahun 1674, *raja alam* meninggal dunia dan ada dua orang yang menuntut takhtanya. Keluarga kerajaan berupaya menyelesaikan perselisihan ini dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing tetap dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari perdagangan. Salah seorang penuntut takhta akan diberikan daerah Tanah Datar, di mana hal ini sesungguhnya dapat menggeser peranan bendahara Sungai Tarab. Penguasa baru ini berkesempatan mengambil alih hubungan dagang yang telah dijalin bendahara dengan Belanda. Penuntut takhta yang satunya lagi akan mewarisi kawasan sebelah timur. Nama ibukota kawasan timur lama, Pagarruyung, dipergunakan menamai suatu daerah di Suruaso yang dahulunya bernama Tiga Balai. Marsden memberikan keterangan sebagai berikut berhubungan dengan perpecahan itu:

> Setelah Sultan Alif meninggal pada tahun 1680, timbullah kerusuhan. Kerusuhan terjadi karena sultan tidak mempunyai pewaris takhta. Akibatnya, kerajaan Minangkabau terbagi tiga wilayah. Para pemimpin berkedudukan di Suruwasa, Pagarruyung, dan Sungaitrap. Tidak diperoleh keterangan apakah ketiga sultan itu terus merebut kekuasaan atau memerintah secara *triumvirat.*[357]

Tampaknya yang disebut sebagai *raja alam* adalah Sultan Alif; namun angka tahun wafatnya berbeda. Marsden mencantumkan 1680 sebagai tahun wafatnya Sultan Alif; sedangkan Dobbin 1674. Suruwasa pada kutipan di atas tentu saja adalah Suruaso

Meskipun demikian daftar raja-raja alam Minangkabau yang terdapat dalam karya M. Rasjid Manggis menyebutkan bahwa Sultan Alif memerintah antara tahun 1560–1580[358]. Tetapi, pada halaman sebelumnya, ia juga mencantumkan bahwa Sultan Alif mangkat di tahun 1680. Tampaknya tahun 1580 lebih masuk akal, karena Sultan Alif menurut *Tambo Pagaruyuang* memerintah sebelum Sultan Ahmad Syah. Menurut keterangan M. Rasjid Manggis, setelah Sultan Alif mangkat *raja adat* dan *raja ibadah* sama-sama ingin naik takhta menjadi *raja alam*. Putra mahkota saat itu masih kecil sehingga belum dapat dinobatkan menjadi sultan. Oleh karenanya, para pemuka kerajaan sepakat bahwa Kerajaan Minangkabau akan dibagi tiga dan diperintah masing-masing oleh Bandaharo di Sungai Tarab, Indomo di Suruaso, dan Tuan Kali di Padang Gantiang. Setelah ketiga penguasa di atas meninggal yang menjadi *raja alam* di Minangkabau adalah Sultan Pamandangan (1600–1650). Barulah setelah

357. *Sejarah Sumatra*, halaman 309.
358. Lihat *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, halaman 89.

itu berkuasa Sultan Ahmad Syah (1650–1680), Sultan Muning Syah I (1680–1720), Sultan Muning Syah II (1720–1770), Sultan Muning Syah III (1770–1819), dan Sultan Alam Bagagar Syah (1819–1833).

Menjelang akhir abad ke-17, beberapa keluarga raja di kawasan sebelah timur mulai pindah ke barat. Hal ini mungkin dipicu oleh melemahnya perdagangan di sana akibat kemunduran Kesultanan Johor selaku mitra dagang bagi kawasan tersebut. Namun, kawasan timur Minangkabau ini tidak ditinggalkan sama sekali, karena masih ada penguasanya yang bergelar Raja di Buo. Di kerajaan sebelah barat yang berpusatkan Pagarruyung, tiga serangkai penguasa ditetapkan kembali. Raja Pagarruyung diangkat sebagai *raja alam*. Gelar *raja ibadat* diserahkan pada penguasa Suruaso; sedangkan permaisuri kedua raja itu secara bergantian memangku jabatan *raja adat*. Reorganisasi kembali Kerajaan Minangkabau ini bertahan hingga meletusnya Perang Padri. Bersamaan dengan itu, Yang Dipatuan Sultan Sembahyang I diangkat sebagai *raja ibadat*. Sedangkan Yang Di Patuan Basusu Tigo diangkat sebagai *raja adat*.

Lima puluh tahun setelah berpindahnya keluarga raja ke kawasan tersebut, mereka mengalami masa kejayaannya karena majunya pertambangan dan perdagangan emas. Kendati Belanda memonopoli perdagangan emas, tetap saja ada kemungkinan emas tersebut lolos ke pihak lain. Masa kemakmuran ini akhirnya harus berakhir juga dengan menipisnya cadangan emas di Tanah Datar. Catatan nilai ekspor emas semakin menunjukkan penurunan pada perioda ini. Kenyataan tersebut merupakan musibah ekonomi bagi keluarga raja. Sebenarnya, kerajaan tidak pernah terlibat langsung dalam pertambangan dan pendulangan emas, tetapi mereka yang menyediakan sarana transportasinya ke pantai dan juga jaminan keamanan bagi para pedagang emas. Selain itu, menurut laporan Tome Pires, penjelajah Portugis di abad ke-16, para raja Minangkabau diperkenankan mengambil emas dari tiap tambang itu dan memperoleh pembagian hasil. Dengan demikian, habisnya cadangan emas pasti melemahkan kerajaan Minangkabau.

b. Gerakan Padri

Sejarah kebangkitan kaum Padri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Islam di Arab Saudi. Pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 timbul gerakan pemurnian Islam yang dicanangkan oleh Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab (1703–1792) dari Nejd, Arab Timur. Ia terkejut melihat kehidupan yang dianggapnya lalim dan tak beriman di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pandangannya

ternyata sesuai dengan pandangan pemimpin kebangkitan Islam sebelumnya, Ahmad Ibn Taimiyyah (1263–1328), yang mendesak umat Islam agar kembali pada Qur'an dan tata cara hidup Nabi Muhammad. Baik Abd al-Wahhab dan Ibn Taimiyyah merupakan penganut mazhab Hanbali, yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap setiap ayat Qur'an dan hadis[359]. Berbeda dengan Ibn Taimiyyah, Abd al-Wahhab berhasil membawa dimensi politis dalam gerakannya, yang kelak disebut gerakan Wahhabi. Ia merangkul salah seorang anggota keluarga terkemuka di Nejd bernama Muhammad Ibn' Saud untuk bersama-sama membersihkan negeri Arab dari apa yang dianggapnya sebagai kemurtadan, bahkan dengan jalan kekerasan sekalipun. Mereka memaklumkan jihad atau perang suci selama 60 tahun demi menegakkan syariat pada setiap sendi kehidupan. Ajaran mereka semata-mata didasari oleh Qur'an dan Hadis sebagai satu-satunya pedoman dalam berkehidupan serta menolak praktik apapun yang dikembangkan kemudian. Bagi mereka segenap inovasi belakangan dalam Islam dianggap bid'ah. Kaum Wahhabi berhasil menduduki Mekkah pada tahun 1803 dan seluruh Hijaz pada tahun 1804. Setelah menguasai kedua kota suci umat Muslim, Kaum Wahhabi bahkan merusak makam-makam keramat para ulama di zaman dahulu, karena menganggap penghormatan terhadap makam bertentangan dengan syariat Islam. Mereka memberlakukan syariat Islam dengan sangat ketat sebagaimana yang dinyatakan oleh Dobbin berikut ini:

> Mereka tidak saja menghancurkan kota-kota dan merampok sebagian hak mereka, mereka juga membantai penduduk di beberapa tempat di sepanjang jalan ke Mekkah. Di Mekkah sendiri mereka memberlakukan secara ketat keharusan bersembahyang, melarang mengisap tembakau, pemakaian pakaian sutra, dan penggunaan tasbih. Apabila waktu sembahyang tiba, tentara Wahhabi berkeliling kota dengan membawa alat pemukul besar dan menggiring penduduk secara paksa ke masjid-masjid.[360]

Daerah pengaruh mereka semakin meluas sebelum akhirnya harus berhadapan dengan bala tentara Turki Ottoman dan didesak mundur lagi ke Nejd.

Sebelumnya, agama Islam sudah lama masuk ke Minangkabau, terutama melalui daerah pantai Barat yang kemudian merembes secara bertahap ke daerah pedalaman. Para raja dan bangsawan pada akhirnya juga menganut agama Islam. Secara umum sufisme banyak dianut oleh penduduk Minangkabau saat itu, di mana berkembang

359. Lihat *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*, halaman 204.
360. Lihat *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*, halaman 206.

tiga tarekat utama, yakni Naksyabandiyah, Syattariah, dan Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah hanya sedikit saja diketahui dan tampaknya banyak dianut di daerah pesisir dan Agam. Sementara itu, Tarekat Nasyabandiyah umum terdapat di Lima Puluh Kota dan Tanah Datar. Diperkirakan pada abad ke-17 tarekat tersebut masuk ke Minangkabau oleh seorang guru dari Pasai. Tarekat Syattariah diperkenalkan di Sumatera oleh seorang ulama bernama Abdurrauf dari Singkel (± 1615–± 1693). Salah seorang siswa Abdurrauf asal Minangkabau yang bernama Burhanuddin membawa ajaran tersebut ke Ulakan pada akhir abad ke-17 dan selanjutnya tersebar ke berbagai kawasan Minangkabau. Kendati Islam telah tersebar di Minangkabau, namun pada praktiknya penduduk tetap mempertahankan beberapa kebiasaan pra-Islam, yang belakangan diberi corak atau warna Islam. Selain itu, tradisi-tradisi seperti menyabung ayam, minum minuman keras, dan madat yang bertentangan dengan syariat Islam masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Kondisi saat itu, juga kacau dengan maraknya perampokan. Hukum tidak lagi ditegakkan karena melemahnya kondisi kerajaan saat itu, yakni setelah menipisnya cadangan emas sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Pada tahun 1803, tiga orang haji kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dan mereka terilhami oleh Gerakan Wahhabi yang sedang marak di Arab saat itu. Mereka tergerak menerapkan pula pembaharuan seperti itu di kampung halamannya. Inilah yang menjadi cikal-bakal Gerakan Padri[361] di Minangkabau. Salah seorang di antara ketiga haji itu bernama Haji Miskin. Ia berasal dari desa Batutebal, di dataran Agam, dekat Kota Tua; namun selanjutnya menetap di desa pegunungan bernama Pandai Sikat. Di sana Haji Miskin mengerahkan segenap kemampuan berkhotbahnya dalam memperbaiki kondisi masyarakat, tetapi hal ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Haji Miskin membakar gelanggang tempat mengadu ayam di desa tersebut dan melarikan diri.

Haji Miskin lalu meminta dukungan seorang ulama Syattariyah terkemuka di kawasan Agam bernama Tuanku Mensiangan, yang pada akhirnya berhasil diyakinkan untuk menerima pandangan Wahhabi:

361. Terdapat banyak pendapat mengenai asal usul kata «Padri.» Ada yang menganggap bawa kata itu berasal dari kata «Pidari» atau orang-orang dari Pedir, yakni nama pelabuhan di Aceh tempat orang berangkat berhaji (lihat *Sejarah Indonesia Modern*, halaman 213–214).

kalau semuanya gagal, kekerasan harus dipakai untuk mengubah negara menjadi Islam dan setiap desa harus menjadi masyarakat Islam yang murni.[362]

Tuanku Mensiangan bersedia melindungi Haji Miskin dan dari sana lambat laun ia memperoleh banyak pengikut. Kendati demikian, hal ini memecah desa menjadi dua kubu (yakni yang mempertahankan tradisi serta adat kebiasaan lama di satu pihak dan pengikut Haji Miskin), sehingga menimbulkan bentrokan antara keduanya. Pengikut Haji Miskin berhasil dikalahkan, sehingga ia harus mencari pelindung baru. Sementara itu, berkat karismanya, Tuanku Mensiangan dibiarkan tetap aman di desa itu, namun didesak agar tidak mencampuri masalah kehidupan masyarakat lagi.

Haji Miskin memperoleh pelindung baru bernama Tuanku Nan Rinceh di daerah Pegunungan Bukit Kamang. Ia adalah seorang guru agama terkemuka mantan murid Tuanku Nan Tua, yang juga tersohor di Minangkabau. Ia semenjak lama ingin mengubah kondisi masyarakatnya. Dibentuknya suatu dewan, di mana para pedagang yang dirampok dapat menuntut kembali haknya. Berkat bantuan gurunya, ia dapat memperoleh dukungan berupa persenjataan dari sejumlah pengikutnya. Desa-desa yang menjadi markas perampok diserangnya. Bergabungnya Haji Miskin pada sekitar tahun 1805 menjadikan gerakannya semakin militan. Mereka lalu memutuskan tidak hanya menyerang desa-desa sarang perampok, melainkan juga desa-desa yang pasarnya dikotori oleh gelanggang adu jago dan tempat pengisapan candu.

Salah satu sasaran mereka adalah Desa Bukit Betabuah yang telah menjadi makmur karena tanaman perdagangannya. Warga desa mengumpulkan banyak uang guna membangun gelanggang adu jagonya sendiri. Para pengikut Padri membujuk warga agar menutup gelanggang itu, namun mereka mendapatkan perlawanan dan pecahlah pertempuran antara kedua pihak. Kaum Padri melarikan diri, tetapi terus mengadakan serangan sporadis hingga gelanggang itu berhasil dihancurkan sepenuhnya empat bulan kemudian. Setelah penghancuran gelanggang tersebut, arena adu jago lainnya dibangun di Desa Banuhampu yang tak jauh dari sana. Kali ini, pembangunannya mendapat perlindungan seorang tokoh kuat bernama Tuanku di Padang Luar, sehingga kaum Padri tak dapat menghancurkannya.

Kenyataan ini mengesalkan Tuanku Nan Rinceh, sehingga ia berketetapan menggandalkan jihad sebagai tujuan akhir perjuangannya, karena menganggap bahwa bujukan tanpa kekerasan gagal total. Tuanku Nan Rinceh telah membawa

362. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri*, halaman 207.

jihad hingga ke titiknya yang paling ekstrim; bahkan ia tidak segan-segan membunuh kakak perempuan ibunya karena kedapatan mengkonsumsi tembakau. Ia lalu mengumumkan larangan menyelenggarakan adu jago, berjudi, minum minuman keras, dan mengisap candu. Para pengikutnya diharuskan mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian dan memelihara janggut. Sementara itu, kaum wanitanya diwajibkan mengenakan cadar yang menutupi wajahnya. Secara bertahap beberapa desa menerima azas-azas Padri. Warganya lalu dikerahkan menyerang desa lainnya yang tidak sehaluan dengan mereka. Gerakan Padri juga menggunakan strategi adu domba antar desa saat itu, umpamanya dengan memanfaatkan perseteruan lama antara penganut tradisi Koto Piliang dan Bodi Caniago. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar desa Padri merupakan penganut Bodi Caniago.

Tuanku Nan Rinceh bersekutu dengan tujuh murid Tuanku Nan Tua lainnya, yang masing-masing menjadi pemuka di kawasan Candung, Sungai Piar, dan Banu. Karena keganasannya kedelapan orang itu dikenal sebagai "harimau yang delapan."Tuanku Nan Tua lama-kelamaan tidak setuju dengan kekerasan yang terjadi antar desa itu. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan itu diadakanlah perundingan antara mereka dengan Tuanku Nan Tua. Selama pertemuan itu, Tuanku Nan Rinceh mengatakan bahwa semua kebiasaan yang tidak dihalalkan harus dihapus dan yang tak setuju dengannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Sebaliknya, Tuanku Nan Tua yang memiliki wawasan lebih luas berpandangan bahwa agama hendaknya disebarkan dengan cara damai. Ia mengemukakan bahwa Nabi Muhammad sendiri merupakan pribadi yang cinta damai dan gemar mengampuni musuh-musuhnya. Dengan demikian, Tuanku Nan Tua tidak bersedia menempuh jalan kekerasan lagi. Malah dalam pertemuan tersebut, beberapa orang bersumpah setia mengikuti gurunya. Namun, tak berapa lama setelah itu, mereka kembali ke cara-cara lama. Karena tidak dicapai kata sepakat dengan Tuanku Nan Tua, mereka mencari guru agama lain yang pamornya setara dengannya. Pilihan jatuh pada Tuanku Mensiangan, yang merupakan keturunan penyebar aliran Syattariyah pertama di Minangkabau. Ulama itu berhasil dibujuk mendukung gerakan Padri. Kedelapan pemimpin Padri itu lalu memberi gelar Imam Besar pada Tuanku Mensiangan; sebaliknya Tuanku Nan Tua diberi julukan yang merendahkannya sebagai Rahib Tua.

Kaum Wahhabi sendiri yang menjadi inspirasi bagi Gerakan Padri, kendati merupakan penganut mazhab Hanbali, tetap menghormati seluruh mazhab dalam

agama Islam. Oleh karena itu, pada mulanya kaum Padri tidak berniat mengganti mazhab Syafi'i yang umum di Minangkabau dengan Hanbali. Selain itu, kaum Wahhabi juga tidak memusuhi sufisme; asalkan paham tersebut tidak membelokkan umatnya dari jalur hukum Islam. Meskipun demikian, para penganut Padri lalu menganggap tarekat Syattariyah sebagai halangan dalam menyebarkan azas-azas mereka. Mereka membakar Desa Paninjauan yang merupakan pusat Syattariyah tertua di dataran tinggi Minangkabau, padahal sebagian besar warganya adalah siswa-siswa yang tekun mempelajari agama. Perpecahan yang terjadi dengan mantan guru mereka, Tuanku Nan Tua, makin menjadi-jadi. Mereka lalu memaklumkan perang dengan Kota Tua, tempat kedudukan Tuanku Nan Tua, dan desa-desa sekitarnya selama enam tahun. Tindakan mereka terkadang sangat ganas:

> Mereka mencuri dan merampok milik penduduk dan menghina orang kaya. Mereka membunuh ulama dan semua orang cerdik. Mereka menangkap wanita-wanita yang telah menikah dan menikahkan mereka dengan laki-laki lain, sedangkan wanita lain yang ditangkap dijadikan gundik mereka. Meskipun demikian, mereka masih menyebut semua tindakan mereka sebagai 'tindakan untuk menyempurnakan agama.'[363]

Mereka bahkan berupaya memermalukan Tuanku Nan Tua dengan berpura-pura mengadakan gencatan senjata serta menantangnya berdebat melawan seorang cendekiawan Naksyabandiyah dari Talawi. Upaya ini ternyata gagal karena cendekiawan tersebut menyatakan bahwa dalam seluruh hal-hal utama, ia sepakat sepenuhnya dengan Tuanku Nan Tua. Peperangan berkecamuk kembali dan Tuanku Nan Tua harus kehilangan putra-putrinya. Banyak desa di sekitarnya diratakan dengan tanah, tetapi Kota Tua sendiri dapat bertahan hingga 1821, yakni ketika Belanda turun ke arena perang saudara ini.

Yang menarik, berbeda dengan kawasan lainnya, penerapan azas Padri di Limapuluh Kota tidak banyak diwarnai kekerasan. Penduduknya sepakat menerapkan ajaran Padri secara suka rela. Pengunjung asing yang melawat ke daerah tersebut mencatat bahwa infrastruktur di sana terpelihara dengan baik, termasuk jalan dan jembatan. Kemakmuran daerah itu tetap terjaga. Pasar-pasarnya juga aman dan tertib. Jarang terdengar pertengkaran di sana dan orang membayar barang sesuai harga yang diminta tanpa menawarnya lagi.

---

363. *Ibid*, halaman 214.

Gerakan Padri di Tanah Datar juga diwarnai kekerasan. Tokoh yang mempunyai peranan penting di sini adalah Tuanku Lintau. Ia adalah penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar. Ia terkesan dengan gerakan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Rinceh di Agam dan terdorong memelopori pembaharuan di daerahnya sendiri. Sebagai langkah awal, ia mendekati keluarga kerajaan guna menyadarkan mereka akan cara hidup yang tak sesuai dengan ajaran agama. *Raja alam* yang saat itu dijabat oleh Sultan Muning Syah (III) ternyata setuju dengan ajaran Tuanku Lintau. Dengan dukungan *raja alam*, Tuanku Lintau menyerukan pembaharuan di desa-desa Tanah Datar. Kendati demikian, ia mendapatkan perlawanan dari warga di sana, sehingga kekacauan pecah di mana-mana. Tuanku Nan Rinceh menganggap hal ini sebagai kelemahan kerajaan yang dianggapnya tidak serius menerapkan azas Padri. Ia lantas bertekad meruntuhkan kerajaan terlebih dahulu. Sebagai langkah awal diserangnya desa-desa yang loyal terhadap kerajaan, seperti Tanjung Berulak di sebelah timur Suruaso. *Raja alam* berusaha merebut kembali desa-desa itu, sehingga pecah pertempuran antara pengikut Tuanku Lintau dengan kerajaan. Meskipun demikian, kaum Padri dapat mengalahkan pasukan kerajaan. Tuanku Lintau kemudian menggunakan siasat dengan mengundang *raja alam* beserta pejabat penting kerajaan lainnya berunding di Kota Tengah. Tidak berapa lama setelah perundingan dimulai, Tuanku Lintau tiba-tiba berseru pada *raja alam* beserta pejabat yang menyertainya dan menuduh mereka sebagai kafir. Ia lalu memerintahkan pengikutnya agar membantai mereka. Banyak yang tewas dalam serangan mendadak tersebut, termasuk dua putra *raja alam*. Tetapi raja beserta cucunya berhasil meluputkan dirinya dan melarikan diri ke Lubuk Jambi di Inderagiri.

Tuanku Lintau berniat mengukuhkan dirinya sebagai *raja alam* dan *raja ibadat* yang baru. Ia menikahi putri *raja ibadat* terakhir yang mangkat pada tahun 1817. Selain itu, ia membakar istana Pagarruyung dan bangunan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan. Saat Raffles mengunjungi Pagarruyung pada tahun 1818, ia mendapati bahwa istana tersebut telah dibakar sebanyak tiga kali. Tuanku Lintau kemudian meluaskan gerakannya hingga ke seluruh Tanah Datar. Sebagian penduduk desa yang mereka serang dijadikan budak mereka sendiri atau dijual.

c. Turun tangannya bangsa Barat dan berakhirnya Perang Padri

Pada abad ke-19 kekuasaan Belanda semakin meluas di Indonesia. Pihak Inggris, yang menganggap Belanda sebagai saingannya, merasa perlu mencari tempat berpijak

demi mencegah Belanda menguasai seluruh Kepulauan Nusantara. Raffles merasa bahwa Sumatera merupakan tempat yang ideal guna dijadikan daerah pengaruh Inggris. Kesempatan yang baik tiba, saat keluarga raja Pagarruyung yang lolos dari pembantaian menjumpainya. Inggris bersedia membantu mereka memulihkan kewibawaannya, asalkan diberi hak menguasai pantai barat Sumatera. Permintaan Inggris ini disepakati oleh keluarga *raja alam* dan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Peristiwa ini merupakan awal campur tangan bangsa Barat dalam Perang Paderi.

Raffles kemudian meninggalkan satu detasemen pasukan Inggris asal Benggali di Simawang guna melindungi penduduk desa dari serangan kaum Padri. Meskipun demikian, bantuan Inggris ini belum sempat terealisasikan karena EIC mengembalikan Minangkabau pada Belanda di bulan Mei 1819. Pasukan Inggris yang ditempatkan di Simawang turut ditarik. Dua orang kerabat Pagarruyung yang bergelar Tuanku Suruaso kini melaporkan keganasan kaum Padri kepada residen Belanda di Padang, yang kini dijabat oleh Du Puy. Residen berulang kali mendesak pemerintah pusat di Batavia agar menempatkan lagi pasukan di Simawang sebagai perisai pelindung bagi kota Padang. Ia berargumen apabila situasi di Minangkabau tetap dibiarkan tidak kondusif, perdagangan di Padang akan dilanda kelesuan. Awalnya, pemerintah kolonial masih tenang-tenang saja hingga Du Puy memperjuangkan pandangannya ke Batavia. Hasilnya, pemerintah kolonial menyetujui tindakan militer guna mengamankan kawasan tersebut.

Du Puy mengadakan perjanjian pada 10 Februari 1821 dengan para pemuka Kerajaan Pagarruyung, yakni kemenakan Sultan Muning Syah (III) bernama Sultan Alam Bagagar Syah; kedua Tuanku Suruaso, serta calon penghulu desa-desa utama antara Suruaso dan Padang. Isinya pemerintah kolonial akan menempatkan pasukannya guna memulihkan wibawa kerajaan, tetapi sebagai imbalannya wilayah inti Kerajaan Pagarruyung harus diserahkan pada Belanda. Seratus orang pasukan pemerintah kolonial diterjunkan di Simawang dan bermulalah konflik antara Belanda dengan kaum Padri.

Serangan pertama terhadap kaum Padri dilancarkan pada 28 April 1821 terhadap desa Sulit Air, yang sangat mendukung gerakan tersebut. Tujuannya adalah menghalau kaum Padri sedikit demi sedikit ke arah pedalaman. Pasukan Belanda yang lebih besar jumlahnya berkekuatan 400 orang menyusul tiba pada bulan Februari 1822. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial bersungguh-sungguh dalam upayanya

menguasai Minangkabau. Pimpinan operasi militer pemadaman gerakan Padri diserahkan pada seorang perwira muda bernama Kolonel A.T. Raaff. Angkatan perang Belanda ini masih didukung pula oleh orang-orang Minangkabau yang menentang Padri sebagai pasukan cadangan. Jumlah mereka berkisar antara 12.000–15.000 orang.

Satu per satu desa-desa Padri berhasil direbut oleh Belanda. Tuanku Lintau mengumpulkan pengikutnya guna menghalau para penyerbu, tetapi mengalami kekalahan pada Maret 1822. Ia kemudian bertahan di daerah pedalaman yang bergunung-gunung. Ruang gerak kaum Padri semakin sempit, karena banyak desa mereka terpaksa menyerah pada Belanda. Salah seorang lawan gigih Belanda adalah Tuanku Nan Rinceh, yang belum berhasil dikalahkan oleh pasukan pemerintah kolonial. Serangan yang dilancarkan terhadap markas Tuanku Nan Rinceh pada Agustus 1822 berujung pada kegagalan, sehingga Belanda terpaksa mengundurkan diri ke Tanah Datar. Bala bantuan tiba dari Jawa awal tahun 1823. Raaff merencanakan serangan besar-besaran merebut Lintau, namun gagal. Tahun berikutnya, Raaff meninggal di Padang dan hingga tahun 1830 Belanda belum berhasil memperoleh kemajuan berarti. Bersamaan dengan turun tangannya Belanda membendung gerakan Padri, Tuanku Nan Tua yang kerap diperangi oleh kaum Padri menjalin persekutuan dengan Belanda.

Kedudukan Raaff digantikan oleh Kolonel H.J.J.L. de Stuers. Berbeda dengan Raaff yang menerapkan strategi konfrontrasi, de Stuers lebih memilih jalan diplomatik. Oleh karena itu, ia mengupayakan perundingan dengan kaum Padri guna memantapkan daerah kekuasaan masing-masing. Menurut hematnya, Belanda telah menguasai sejumlah besar wilayah yang perlu dikonsolidasikan. Ternyata, kaum Padri juga berpendapat sama. Mereka merasa bahwa daerah kaum Padri sudah cukup luas dan sanggup menghidupi dirinya dengan melakukan kegiatan perdagangan ke arah timur. Dengan demikian, pembagian wilayah seperti yang dicanangkan de Stuers bukanlah masalah. Kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Nan Rinceh, Tuanku Lintau, Tuanku Nan Saleh dari Talawi, dan lain sebagainya menandatangani perjanjian pada 15 November 1825. Saat berlangsungnya perundingan, kaum Padri meminta agar Belanda membantu menyebarkan keyakinan mereka di Tanah Datar. Kendati demikian, pihak Belanda menjawab bahwa penyebaran keyakinan hendaknya tak dilakukan dengan jalan kekerasan, tapi melalui pemberian teladan yang baik. Akhirnya,

wakil-wakil Padri hanya meminta agar Belanda secara bertahap melarang pengisapan candu, perjudian, serta penyabungan ayam. Belanda menyepakati hal ini walau tidak secara eksplisit dan mengakui wilayah kekuasaan kaum Padri. Sebaliknya, kaum Padri juga mengakui wilayah kekuasaan Belanda sebagaimana adanya saat itu.

Dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut, perselisihan antara Belanda dan Padri mereda. Kesempatan ini dipergunakan Belanda memusatkan perhatiannya memadamkan pemberontakan Diponegoro yang sedang berkecamuk di Jawa Tengah. Seiring dengan berlalunya waktu, kaum Padri secara bertahap mengendurkan aturannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah lepasnya Mekkah dari tangan kaum Wahhabi. Beberapa aturan yang terlampau ketat telah ditinggalkan di sana. Perpecahan terjadi juga di antara kaum Padri, karena sesama desa yang menganut azas Padri dapat juga bertengkar satu sama lain. Meskipun demikian, tiadanya tindakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pascaperjanjian di atas dianggap sebagai kelemahan oleh sebagian kaum Padri. Mereka menganggap bahwa sudah waktunya menghalau Belanda dari Minangkabau.

Kaum Padri mulai berani melancarkan serangannya lagi pada 1830. Ketika itu, laskar Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Residen Belanda di Padang yang saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel C. P. J. Elout merupakan pendukung strategi konfrontasi. Baginya, kedudukan Belanda di Sumatera Barat tidak akan aman tanpa dilancarkannya serbuan besar-besaran ke daerah pedalaman yang dikuasai Padri. Argumen Elout ini disetujui pula oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Pertempuran sengit antara Belanda dan kaum Padri kini berkecamuk lagi–apalagi dengan berakhirnya Perang Diponegoro, pasukan Belanda dapat dikerahkan sepenuhnya menggempur mereka.

Pada tahun 1832, Lintau direbut oleh Belanda dan satu persatu daerah Padri jatuh ke tangan pasukan kolonial. Seluruh kawasan Limapuluh Kota menyerah bulan Oktober 1832. Daerah pedalaman kini boleh dikatakan berada di bawah kendali Belanda. Desa-desa yang telah lama menderita akibat penindasan kaum Padri melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar dan merusak desa-desa pendukung Padri, sehingga keadaan semakin kacau. Tuanku Lintau terbunuh dekat Palalawan dan Tuanku Nan Rinceh meninggal tak lama kemudian. Hilangnya dua pemimpin utama mereka ini makin melemahkan kondisi kaum Padri.

Tibalah kesempatan bagi Belanda mengatur administrasi pemerintahan daerah-daerah yang berhasil dikuasainya. Mereka membentuk dua karesiden (*hoofafdeeling*) Sumatera Barat; yakni Padang dan Minangkabau. Hoofafdeeling Padang dibagi menjadi 4 kabupaten (regentschappen); yakni Padang, Pariaman, Pulau Cingkuk, dan Airhaji. Minangkabau terbagi atas empat kabupaten: Tanah Datar, Tanah Datar di Bawah, Agam, dan Limapuluh Kota[364].. Sultan Alam Bagagar Syah diangkat sebagai kepala *hoofdeling* (*hoofregent*) Minangkabau merangkap *regen* (bupati) Tanah Datar. Gajinya berkisar 300–400 Gulden sebulan. Sultan Muning Syah (III) sendiri puas dengan pengangkatan kemenakannya sebagai bupati. Ia kemudian mengundurkan diri dan menerima uang pensiun dari pemerintah Belanda. Ketika ia meninggal pada Agustus 1825 dalam usia 80 tahun, Belanda memutuskan menghapus Kerajaan Minangkabau. Gelar Yang Dipertuan atau raja Minangkau tidak boleh dipakai lagi. Kekuasaan Sultan Alam Bagagar Syah mulai dibatasi oleh Belanda. Ia selalu diingatkan bahwa kedudukannya hanyalah sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial dan bukannya raja yang berdaulat atas negerinya. Sementara itu, Tuanku Samit, kemenakan Tuanku Nan Tua, yang mendukung Belanda, diangkat sebagai bupati (*regen*) Agam.

Ternyata keamanan belum sepenuhnya pulih. Kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Peto Syarif (Tuanku Imam Bonjol) masih mengangkat senjata terhadap Belanda. Pada bulan Maret 1831 mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Natal, tetapi dipukul mundur oleh pasukan pemerintah kolonial. Tuanku Nan Cerdik yang terdesak oleh gerak maju Belanda terpaksa mengundurkan diri dan bekerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol. Pasukan gabungan keduanya berhasil menduduki Mengopo. Pada saat itu, kelompok Padri lainnya terus menyusahkan Belanda. Kemenangan datang silih berganti antara kedua belah pihak.

Belanda mengirimkan bala bantuan dari Jawa pada tahun 1832. Di antara mereka terdapat pula legiun yang dipimpin oleh Sentot Alibasyah Prawirodirjo, mantan panglima perang Diponegoro. Pada 22 Juli 1833 mereka menyerang kubu pertahanan kaum Padri yang terletak di utara Tanjong Alam. Beberapa kawasan yang dikuasai Padri sanggup direbut oleh Belanda. Meskipun demikian, sisa-sisa pasukan Padri terus-menerus melakukan serangan sporadis terhadap pertahanan Belanda. Pasukan pemerintah kolonial mulai sanggup memusatkan kekuatannya menyerang

364. Lihat *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, halaman 422–423.

Bonjol setelah akhir tahun 1834 dengan dikuasainya jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dan daerah pantai.

Penaklukan Bonjol tidak berjalan mudah. Berulangkali pasukan kolonial disambut oleh serangan gigih Padri, seperti pada pertempuran di Semawang Gedang (21 April 1835)[365]. Dalam rangka mempersempit ruang gerak kaum Padri di Bonjol, Belanda memblokade jalan-jalan penghubung ke daerah lain, akibatnya pengikut Tuanku Imam Bonjol mulai menderita kesulitan. Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya berunding dengan Belanda pada 8 Februari 1835. Dengan adanya pernyataan ini, sementara waktu gencatan senjata dapat dicapai. Tetapi, Belanda menuntut agar Tuanku Imam Bonjol segera menyerah. Sebagai jawabannya, Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa ia baru mau menyerah apabila pasukan pemerintah kolonial ditarik dari Alahan Panjang. Tentu saja permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Belanda sehingga ketegangan mencuat kembali.

Peperangan berkecamuk lagi tanggal 2 Juni 1835 dan Belanda tak kunjung berhasil merebut benteng Bonjol. Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyampaikan kesediaannya berunding dengan Belanda. Meskipun demikian, perundingan perdamaian itu tidak berarti bahwa Tuanku Imam Bonjol bersedia menyerah pada Belanda sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya perundingan boleh dikatakan gagal. Pertarungan antara kedua belah pihak pecah lagi pada 12 Agustus 1837. Belanda mendatangkan bala bantuan dalam jumlah besar dan akhirnya berhasil menduduki benteng Bonjol pada bulan Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada 25 Oktober 1837 dan setelah itu diasingkan ke Cianjur. Ia kemudian dipindahkan ke Ambon dan Menado hingga wafat pada 6 November 1864. Perlawanan Sisa-sisa pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao dapat dipatahkan pada akhir tahun 1837. Meskipun pertempuran kecil-kecilan masih berlangsung hingga 1841, tetapi pergolakan kaum Padri secara umum dapat dikatakan berakhir pada tahun 1838.

d. Runtuhnya Kerajaan Minangkabau

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Sultan Alam Bagagar Syah diangkat sebagai *hoofregent* Minangkabau dan *regen* Tanah Datar. Peristiwa ini sesungguhnya merupakan akhir Kerajaan Minangkabau, karena kedudukannya bukan sebagai raja lagi, melainkan boneka dan sekaligus pegawai pemerintah kolonial. Segenap penghasilannya

365. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 181.

diawasi dengan ketat oleh Belanda. Sultan Alam Bagagar Syah belakangan merasa terhina dengan kedudukan yang diberikan padanya oleh pemerintah kolonial. Demi membalas sakit hatinya pada Belanda, ia berniat melancarkan pemberontakan. Hal ini didukung pula oleh sebagian kaum bangsawan dan penghulu yang merasa tertipu oleh Belanda. Mereka meyakinkan Bagagar Syah bahwa dengan terusirnya Belanda, Kerajaan Minangkabau dapat dibangun kembali dan diperluas seperti sedia kala.

Dalam rangka mewujudkan rencananya, Sultan Alam Bagagar Syah mengirim surat rahasia pada wakil pemerintah Inggris di Singapura semenjak 1832 dan meminta bantuan mereka dalam melawan Belanda. Dijalinnya pula hubungan dengan kaum Padri di Agam Utara yang berada di bawah pimpinan Tuanku Nan Gapau. Dengan demikian, kini kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Sultan Bagagar Syah secara diam-diam menjalin relasi pula dengan Sentot Alibasyah Prawirodirjo, mantan panglima perang Diponegoro, yang kemudian memihak Belanda dan diterjunkan memadamkan Perang Padri. Tampaknya Sentot kurang puas dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial.

Surat-surat edaran atas nama Sultan Alam Bagagar Syah dikirimkan kepada tokoh-tokoh penting Minangkabau guna menggalang dukungan. Ia menghimbau mereka agar bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana seluruh Minangkabau akan bangkit melawan penjajah. Malangnya, salah satu surat ini jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Alam Bagagar Syah ditangkap karenanya. Ia diasingkan ke Batavia, tetapi dibebaskan tak lama kemudian. Kendati demikian, Belanda yang khawatir terhadap pengaruhnya tidak mengizinkan Bagagar Syah kembali ke kampung halamannya hingga beliau mangkat pada 1849 di Batavia. Seharusnya sehari atau dua hari sebelum tertangkap, Bagagar Syah hendak menghadiri pertemuan besar di Sumpur, Danau Singkarak, guna mematangkan rencana pemberontakan. Setelah tertangkapnya Sultan Alam Bagagar Syah rencana perlawanan menjadi berantakan.

Menariknya, Sentot sendiri sebenarnya berambisi menjadi raja atas Minangkabau. Sebelumnya, Belanda berniat memberikan Sentot sebuah kerajaan kecil di sana; tetapi kebijaksanaan ini mengecewakannya. Sentot kemudian menjalin persekutuan dengan kaum Padri di Agam Utara dan Lintau pada tahun 1833. Mereka sepakat menyatukan kekuatannya melawan Belanda. Pada mulanya, Belanda belum mencium pengkhianatan Sentot ini dan menganggapnya masih setia pada mereka. Dalam rangka memperkuat posisinya, Sentot mengundang para penghulu di Tanah Datar pada 22

Februari 1833 dan mengajak mereka bersantap bersama. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Sentot meminta mereka bersumpah setia dan mengakui dirinya sebagai raja mereka dengan gelar Raja Jawa, Sultan Alam.. Saat berada di Pagarruyung, Sentot berbicara terang-terangan bahwa ia berniat mengusir Belanda dari dataran tinggi Minangkabau apabila menolak mengakui gelarnya itu.

Belanda yang belakangan mengetahui pemberontakan Sentot, memancingnya turun ke Padang. Dengan cerdik Belanda menyatakan bahwa Sentot diperintahkan pergi ke Jawa guna merekrut lebih banyak pasukan lagi bagi dirinya. Sentot merasa senang mendengarnya dan termakan oleh siasat Belanda itu. Pikirnya, semakin banyak pasukan tentu semakin baik. Begitu memasuki perangkap, Sentot segera dinaikkan ke kapal dan dikirim ke Batavia. Sesampainya di Batavia, barulah Sentot mengetahui tuduhan-tuduhan atas dirinya. Ia berjuang keras membersihkan namanya, tetapi Belanda telanjur mencurigainya. Kendati demikian, Belanda mengirim Sentot kembali ke Sumatera dengan tambahan 200 pasukan baru. Tanpa diduga sebelumnya, Sentot yang merasa kesal menurunkan dirinya beserta 100 pasukannya di Bengkulu dan berdiam di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 1854–tentu saja di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda.

Yang Dipatuan Sembahyang II, pengganti Yang Dipatuan Sembahyang I, mengundurkan diri ke Lumbuk Jambi dan belakangan pindah ke Muaro Lambu[366]. Tuanku Laras Nan 13 Lareh, penguasa Batu Sangkar mengajukan permintaan pada Belanda agar Yang Dipatuan Sembahyang II diangkat sebagai Raja Alam. Pemerintah kolonial menyetujui hal ini. Oleh karenanya, beliau lantas bertolak ke Pagarruyung atau Buo. Meskipun demikian, kontrolir Belanda yang ada di Sijunjuang mencegahnya melanjutkan perjalanan dan mengatakan bahwa izin belum diberikan sebelum beliau menghadap wakil pemerintah Belanda di Padang. Yang Dipatuan Sembahyang kemudian menuju Buo, tetapi pejabat pemerintah kolonial di sana memberikan pula jawaban senada. Oleh karena sikap pemerintah Belanda ini, beliau akhirnya pulang ke Muaro Lambu hingga wafatnya.

Tuanku Laras Nan 13 Lareh kembali meminta pada pemerintah kolonial agar Tuan Gadih Reno Sumpu didudukkan di Pagarruyung sebagai *regen* (bupati). Dengan demikian, kedudukannya tidak sebagai sultan. Tuan Gadih Reno Sumpu sendiri adalah anak raja ibadat, sementara ibunya merupakan raja adat. Pada tahun 1904, ia

366. Lihat *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, halaman 89.

menerima bingkisan kehormatan dari raja Gunung Sahilan yang mengukuhkan tali kekerabatan antara kedua kerajaan. Beliau wafat pada 1912 dalam usia 96 tahun.

Menurut sumber lainnya, setelah Sultan Alam Bagagar Syah diasingkan oleh Belanda, perlawanan dilanjutkan oleh adik sepupunya, Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Sembahyang (1833-1899). Beliau memangku jabatan sebagai Daulat Yang Dipertuan Alam Pagaruyung, Rajo Adat Buo, dan Raja Ibadat Sumpur Kudus secara bersamaan. Belanda mengajak beliau berunding dan menawarinya tunjangan bulanan sebesar empat ribu hingga lima ribu Gulden. Kendati demikian, beliau menolaknya dan meneruskan perlawanan gerilya dengan berpindah-pindah pangkalan; yakni dari Buo, Sumpur Kudus, Ampalu, Pangkalan Koto Baru, Tanjung Gadang, hingga Muara Lembu Singingi, tempat beliau mangkat pada tahun 1899[367].

Sultan Abdul Jalil digantikan oleh anak perempuannya Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu (1899-1912). Pemerintah kolonial mengangkatnya sebagai Daulat Yang Dipertuan di Pagaruyung, tetapi hanya menangani masalah adat saja dan tak punya kekuasaan pemerintahan. Beliau dibangunkan istana baru di Tapak Silinduang Bulan, yang sebelumnya sempat dibakar oleh kaum padri pada tahun 1808. Para pewaris raja alam Pagaruyung berikutnya yang merupakan keturunan Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu secara berturut-turut adalah: Daulat Yang Dipertuan Gadih Hitam Puti Reno Aminah (1912-1926), Daulat Yang Dipertuan Sultan Ibrahim Tuanku Ketek (1926-1944), Daulat Yang Dipertuan Gadih Hitam Puti Reno Aminah (1944-1962), Daulat Yang Dipertuan Sultan Oesman Tuanku Tuo Drs (1962-1991), Daulat Yang Dipertuan Sultan Ismail Tuanku Mudo (1991-2002), dan Daulat Yang Dipertuan Sultan Mohammad Taufiq SH Tuanku Muda Mahkota Alam (2002-sekarang).[368]

e. Keadaan raja Minangkabau di abad ke-19

Bagaimana kondisi kehidupan raja Minangkabau dapat diketahui dari laporan Nahuys van Burgst, seorang doktor ilmu hukum yang pernah mengunjungi Sumatera Barat. Laporan itu menjelaskan bahwa penghormatan pada raja Minangkabau menjelang berakhirnya Perang Padri sungguh merosot drastis. Padahal pada zaman dahulu ia sangat dihormati orang. Nahuys melaporkan bahwa rasa hormat yang diberikan terhadap raja Minangkabau lebih kecil ketimbang orang-orang Jawa

---

367. Lihat *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Sejarah dan Tambo Adatnya*, halaman 191.
368. Lihat Kesultha*nan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Sejarah dan Tambo Adatnya*, halaman 187.

menghormati wedana mereka. Bahkan orang Jawa masih lebih segan atau takut pada kepala desa mereka dibandingkan orang Minangkabau terhadap raja mereka[369]. Penghasilan raja hanya 100 Gulden per bulannya dan itu tak cukup untuk hidup mewah.

Tanahnya hanya yang diperoleh dari pernikahan. Van Burgst pernah berkunjung ke tempat kediaman raja Minangkabau bersama asisten residen dan terkejut karena melihat rakyat berlalu lalang sangat dekat sekali dengan raja mereka tanpa memperlihatkan rasa hormat mereka sama sekali. Kekuasaannya nampak kontras dengan raja-raja Jawa yang memiliki banyak pengiring pembawa barang-barang perlengkapannya. Sebaliknya, raja Minangkabau hanya memiliki satu pengiring saja yang membawa payung China berwarna coklat–suatu benda yang di Jawa dapat dipergunakan oleh semua orang. Perlengkapan lainnya hanya sebuah kantong berisi tembakau, tempat sirih, dan pipa penghisap candu yang disusun secara sembarangan.

Ketika mengunjungi sebuah kota di tepi danau bersama asisten residen dan raja, warga di sana bersikap acuh tak acuh saja; seolah-olah mereka tak mengenali rajanya. Mendapatkan makanan sangat sulit di tempat itu. Istana raja Minangkabau di Pagarruyung disebutnya tidak lebih dari "gudang kayu yang jelek" (*onaanzienlijke houten schuur*)[370] Jatuhnya wibawa raja Minangkabau ini erat hubungannya dengan Perang Padri, di mana kaum Padri beberapa kali membakar istananya di Pagarruyung. Selain itu, masyarakat Minangkabau memang memiliki jiwa demokratis, sehingga tak begitu takut atau segan terhadap para pemimpin mereka. Betapa kecilnya kekuasaan raja Minangkabau ini merupakan salah satu faktor mengapa Belanda menghapuskan kerajaan tersebut.

f. Sistem pemerintahan

Wilayah Minangkabau dibagi atas berbagai *nagari*, yang merupakan federasi genealogis[371] (berdasarkan keturunan). Satuan kemasyarakatan ini mempunyai batas-batasnya sendiri dengan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh seluruh penduduknya. Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Kerapatan Adat yang beranggotakan wakil kaum ataupun suku. Nagari ini boleh dianggap sebagai suatu republik otonom. Berbagai *nagari* membentuk federasi longgar yang disebut *luhak*. Kepala seluruh luhak adalah raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagarruyung.

---

369. Lihat *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, halaman 426.
370. Lihat *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, halaman 428.
371. Lihat *Sedjarah Minangkabau*, halaman 15.

Dibandingkan dengan raja-raja Jawa, raja Minangkabau kekuasaannya jauh lebih kecil karena segenap kekuasaan berada pada pemimpin *luhak* maupun *nagari* yang otonom.

g. Kerajaan atau *Nagari* Talu

Nagari ini merupakan bagian Kesultanan Pagarruyung. Pendirinya adalah Sri Maharajadiraja yang beserta rombongannya datang dari Pagarruyung melalui Payakumbuh. Beliau membuat taratak di pertemuan antara sungai Tolu dan sungai Poman. Selanjutnya Sri Maharajadiraja mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Tuanku Bosa I[372]. Setelah beliau mangkat dikebumikan di Pangka Sapek. Penggantinya selaku Tuanku Bosa II adalah Panjang Pulu Mato. Semasa pemerintahannya, sudah ada tujuh *andiko* sehingga makam beliau di Godang dibangun tujuh tingkat. Berikut ini adalah rangkaian Tuanku Bosa yang pernah memerintah Talu. Tuanku Bosa III adalah Tuanku Sundatar, yang dimakamkan di Sundatar, Lubuk Sikaping. Tuanku Bosa IV, Godang Hiduang, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa V, Kociak Bunyi, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa VI, Durian Tanjung, dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa VII, Orang Tuo Jarung, dimakamkan di Godang.

Sutan Jamin, yang kelak menjadi Tuanku Bosa VIII, sebelumnya menjabat sebagai Tuanku Lareh antara tahun 1840 hingga 1845. Beliau kemudian memangku pula jabatan sebagai Tuanku Bosa VIII dari tahun 1845-1854. Karena menderita sakit, beliau menyerahkan tugas dan wewenang Tuanku Lareh beserta Tuanku Bosa pada kemenakannya, Sutan Soru Alam. Dengan demikian, Sutan Soru Alam menjadi pejabat Tuanku Lareh dan Tuanku Bosa dalam kurun waktu 1845-1854. Sementara itu, kedua jabatan tersebut masih dipegang oleh Sutan Jamin, kendati sedang menderita sakit. Sutan Jamin mangkat pada tahun 1854, sehingga kini Sutan Soru Alam diangkat sebagai Tuanku Bosa IX (1854-1871). Beliau mangkat pada tahun 1871 dan dimakamkan di Aie Tobik.

Pengganti beliau adalah Sigigi selaku Tuanku Bosa X (1871-1874). Menurut riwayatnya, beliau telah tumbuh gigi semenjak dilahirkan. Mandak, Tuanku Bosa XI (1874-1931), sebelumnya menjabat pula sebagai Tuanku Lareh. Meskipun demikian, beliau dipensiunkan dari jabatannya selaku Tuanku Lareh oleh pemerintah kolonial pada tahun 1907 dan digantikan oleh Tangiang. Kendati Tuanku Bosa XI masih hidup, kontrolir Talu meminta izin pada Tuanku Bosa XI agar Tangiang diperbolehkan

372. Lihat *Adaik Salingka Nagari Talu*, halaman 21.

memangku jabatan sebagai Tuanku Bosa XII pada tahun 1927. Tuanku Bosa XI dengan berat hati terpaksa menyetujui keinginan pemerintah kolonial ini. Sebagai tanda ketidak-setujuannya, saat berlangsungnya penobatan Tuanku Bosa XII, rumah *induak ilia* ditutup pintu beserta jendelanya. Dengan demikian, antara 1927-1931, Talo memiliki dua orang raja. Tuanku Bosa XI mangkat pada tahun 1931 dan dimakamkan di Kapunduang.

Yang Mulia Tuanku Bosa XIV Dr. H. Fadlan Maalip SKM

Hingga mangkatnya pada 1959, Tuanku Bosa XII tidak pernah mengenakan mahkota, pakaian kebesaran, beserta perlengkapan Tuanku Bosa; mungkin karena beliau merasa itu bukan haknya. Tangiang atau Tuanku Bosa XII wafat pada 1959,

tetapi beliau tidak menunjuk siapa penggantinya. Oleh sebab itu, jabatan Tuanku Bosa mengalami kekosongan hingga tahun 1984 atau selama 25 tahun[373]. Baru pada bulan September 1984, Iskandar Zulkarnaini dinobatkan sebagai Tuanku Bosa XIII. Beliau memangku jabatan ini hingga wafat pada 2007. Tuanku Bosa XIII digantikan oleh Dr. H. Fadlan Maalip SKM selaku Tuanku Bosa XIV. Beliau merupakan seorang dokter berdedikasi tinggi yang pernah ditugaskan sebagai direktur di RSO Prof DR R Soeharso, Surakarta.

XV. PADANG

Awalnya, pemerintahan kerajaan ini menjadi satu dengan Bedagai. Cikal-bakal Kerajaan Padang adalah sebuah kampung bernama Tongkah yang disebut juga Nagaraja. Pada kurang lebih abad ke-17 bertakhtalah seorang raja di sana bernama Raja Saragih Dasalak[374]. Ia pernah membantu kawannya bernama Peresah merebut takhta Kerajaan Nagur (kini terletak di daerah Raya). Raja Saragih Dasalak masuk Islam pada 1630 dan seterusnya memakai gelar Raja Umar Baginda Saleh.

Sumber lain menyebutkan mengenai seorang raja dari Kerajaan Batak Raya bernama Raja Gukguk yang berburu pelanduk, karena istrinya sedang hamil dan mengidam daging hewan tersebut[375]. Dengan disertai para pengiringnya raja memasuki hutan namun tidak menjumpai seekor hewanpun. Beliau terheran-heran karena di hari-hari sebelumnya mereka selalu mendapatkan hasil. Akhirnya, saat hendak pulang ke tempat kediamannya, anjing pemburu raja menyalak di hadapan sebatang pohon bambu. Hal ini merupakan kejadian yang aneh, karena di sekitar tempat itu tidak ada hewan apapun. Raja kemudian memerintahkan pengikutnya membawa pulang tumbuhan bambu tersebut.

Sesampainya di tempat kediamannya, istri raja menanyakan perihal perburuan yang baru saja dilakukan raja. Tetapi raja menjawab bahwa ia tak berhasil mendapatkan pelanduk dan malah menjumpai buluh bambu yang aneh itu. Istri raja merasa senang menyaksikan tumbuhan yang dibawa pulang suaminya dan tidak lagi mengidam daging pelanduk. Malam harinya, istri raja melahirkan seorang putra. Sementara itu, dari buluh bambu itu juga keluar seorang anak laki-laki. Karena suka cita, Raja Gukguk meyakini bahwa anak laki-laki yang keluar dari bambu itu adalah putra dewata. Raja Gukguk lantas menamai anaknya sendiri Batuah Pinang Sori; sedangkan anak yang

373. Lihat *Adaik Salingka Nagari Talu*, halaman 28.
374. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 168.
375. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 2.

keluar dari bumi diberinya nama Umar Baginda Saleh. Kedua orang anak itu sama-sama dikasihi oleh Raja Gukguk.

Setelah dewasa, Umar Baginda Saleh menyampaikan keinginan merantau pada ayah angkatnya, yang disetujui dengan berat hati. Dengan diiringi oleh tujuh orang, Umar Baginda Saleh tiba di tepi laut dan berniat mendirikan kampung di sana. Ia mencari tanah yang baik dan memerintahkan pengiringnya membuka lahan serta menanam berbagai benih buah-buahan. Itulah sebabnya kampung baru itu disebut "Bajanis." Selain itu, karena tanahnya "berladang-ladang" atau "berpadang-padang" dinamailah tempat itu "Negeri Padang." Demikianlah asal mula nama "Padang."[376]

Menurut silsilah yang dibuat Ibnu Hibban Saragih, Raja Umar Baginda Saleh mempunyai empat orang putra, yakni Marah Muh. Udin (meninggal saat remaja), Marah Sudin, Marah Ali Maludin, dan Marah Adam; serta seorang putri bernama Puang Zainab. Menurut silsilah tersebut, Raja Umar Baginda Saleh digantikan oleh Marah Sudin selaku raja Padang kedua. Marah Sudin berputra tiga orang, yakni Raja Saladin, yang menjabat sebagai raja Padang ketiga, Marah Saleh Safat, dan Sutan Ali. Marah Adam kemudian menjadi raja Padang keempat. Putranya bernama Syahdewa menjadi raja kelima. Syahdewa digantikan oleh putranya, Raja Sidin selaku raja keenam. Ia digantikan lagi oleh putranya, Raja Tebing Pangeran selaku raja ketujuh. Selanjutnya, yang menjadi raja kedelapan adalah Marah Hakun (Marahkun, 1823-1870), yakni Raja Goraha Negeri Padang-keturunan Puang Zainab. Raja selanjutnya Tengku H. M. Nurdin atau Tuanku Maharaja Muda, yang merupakan penguasa Padang kesembilan.

Menurut Tengku Luckman Sinar, sesudah Umar Baginda Saleh mangkat pada 1640, beliau digantikan oleh anak-anaknya, Raja Bajanis dan Raja Geraha, yang berkedudukan di Pertibi[377]. Sementara itu dalam buku karya Putra Praja, semasa pemerintahan Marah Adam, Kerajaan Padang semakin ramai. Warga kerajaan Batak lainnya banyak berpindah ke Padang. Mereka berbondong-bondong membuka ladang di tepi Sungai Padang, yakni di Sipis-pis, Samanan, Naga Kesiangan, Tanjung Bunga, Tanjung Bunga, Tanjung Marulak, dan lain sebagainya[378]. Raja Padang ketujuh, yakni Raja Tebing Pangeran (1806-1823) merupakan sosok yang bijaksana. Beliau memajukan perdagangan hingga ke luar negeri, seperti Singapura dan Siam.

376. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 3.
377. Lihat *Sari Sejarah Serdang I,* halaman 168.
378. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 9.

Pelabuhan Bandar Khalipah ketika itu merupakan pusat perniagaan yang ramai. Beliau terkenal sebagai pendiri kota Tebing Tinggi, yang sebelumnya telah menjadi pusat pengumpulan barang dagangan. Pada 1823, Deli menyerang Padang. Raja Padang diundang ke Bedagai untuk diajak berunding, tetapi di tengah jalan beliau dibunuh oleh seorang pengkhianat dan dimakamkan di Kampung Gelam Bandar Khalipah[379].

Kemelut melanda Kerajaan Padang karena yang berhak menggantikan adalah Marah Ja'far, putra Marah Saleh Safar; namun ia menderita sakit sehingga tak dapat dinobatkan sebagai raja. Adapun Marah Saleh Safat adalah putra Marah Sudin, salah seorang putra Raja Umar Baginda Saleh. Sementara itu, putra Raja Tebing Pangeran, yakni Raja Syah Bokar masih kanak-kanak. Oleh karena itu, yang diangkat sebagai raja adalah keturunan Puang Zainab bernama Raja Goraha Marah Hakun (Marahkun, 1823-1870) yang saat itu berkedudukan di Kuta Usang[380].

Kembali menurut Tengku Luckman Sinar, cicit-cicit Raja Saragih Dasalak, yakni Raja Syahdewa dan Raja Lamkanuddin, masing-masing menjadi raja di Bajanis dan Bandar Khalipah[381].Kurang lebih bersamaan dengan zaman mereka, datanglah dua orang Siak yang hendak merebut takhta Siak Sri Indrapura; yakni Said Ali dan Said Ahmad. Mereka berhasil mengembangkan kekuasaan yang besar di Padang, sehingga menimbulkan rasa tidak senang dalam diri Raja Lamkanuddin. Oleh karenanya, Raja Lamkanuddin menyiapkan pasukan melawan mereka. Namun, pasukan Raja Lamkanuddin bukanlah tandingan kedua orang Siak itu, sehingga menderita kekalahan telak. Menyadari kenyataan ini, Raja Lamkanuddin berbalik haluan dan tidak memusuhi mereka lagi. Bahkan, ia bersedia memberikan bantuan pada mereka dengah harapan bila Said Ali berhasil dalam upayanya merebut takhta, tentunya ia akan turut menikmati keuntungan.

Ternyata bintang keberuntungan berpihak pada Said Ali. Ia sanggup merebut takhta Siak dan menjadi sultan dengan gelar Assaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784–1810/ 1811). Sebagai balas jasa atas kebaikan Raja Lamkanuddin, ia dijadikan raja seluruh Padang dan Bedagai bergelar Sutan Mangedar Alam. Guna mengokohkan kekuasaannya atas seluruh Padang dan Bedagai, Sutan Mangedar Alam

---

379. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 8.
380. Silsilahnya adalah sebagai berikut: Puang Zainab menikah dengan seseorang yang berasal dari Barus. Beliau menurunkan Marah Jalidin➔Marah Hidin➔Marah Halidin➔Marah Ludin➔Marah Hakun. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 9.
381. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 168.

mengusir saudaranya, Raja Syahdewa dari Bajanis. Meskipun demikian, ketika merasa bahwa dirinya telah tua, Sutan Mangedar Alam mengizinkan saudaranya kembali, karena memerlukan bantuan dalam menghadapi ancaman yang berasal dari Siak dan Deli. Merasa masih belum sanggup menandingi kekuatan kedua kerajaan tersebut, Sutan Mangedar Alam meminta bantuan pada Serdang.

Sultan Serdang, Thaf Sinar Basyarsyah, menyambut baik permohonan bantuan ini dan dua orang anak Sutan Mangedar Alam dibawa ke Serdang guna menuntut ilmu di sana. Namun tak lama setelah Sutan Mangedar Alam meninggal, kedua orang anaknya itu turut menyusul ayahnya ke alam baka akibat terserang wabah cacar. Karenanya, pemerintahan di Padang lalu dipegang oleh Syahdewa. Ia digantikan lagi oleh putranya yang bernama Raja Syafdanah pada kurang lebih tahun 1830 selaku raja Padang dan Bedagai. Sebagai wakilnya di Bandar Khalifah diangkatlah saudara iparnya bernama Raja Muda Mustafa; sedangkan seorang tokoh asal Deli bernama Nakhota Gundak diangkat sebagai wakilnya di Bedagai.

Nakhoda Gundak dan Raja Muda Mustafa bersekongkol mendongkel kekuasaan Raja Syafdanah serta mengangkat Raja Goraha Marah Hakun (Marahkun) dari Bajanis sebagai penggantinya. Niat ini terdengar juga ke telinga Syafdanah. Ia lalu menemui Raja Goraha Marahkun dan menyatakan bahwa ia tak keberatan menyerahkan kekuasaannya pada penguasa Bajanis tersebut, asalkan takhta Padang Bedagai tak jatuh ke tangan orang lain. Raja Goraha Marahkun yang sesungguhnya tak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai persekongkolan tersebut merasa terharu; sehingga bersedia membantu Raja Syafdanah melawan Nakhoda Gundak dan Raja Muda Mustafa. Tetapi karena merasa bahwa angkatan perang mereka belum cukup kuat, menghadaplah Syafdanah dan Raja Goraha Marahkun pada sultan Serdang. Setelah mendengar perihal yang berlaku di Padang Bedagai, sultan Serdang setuju mengirimkan angkatan perangnya melawan kedua pesekongkol itu.

Dengan bantuan Serdang, Nakhoda Gundak beserta Raja Muda Mustafa berhasil dikalahkan dan mereka ditangkap serta ditawan di Serdang. Pada tahun 1865, sultan Serdang dianggap hendak melawan Belanda. Karena itu, Padang Bedagai dirampas darinya dan diserahkan pengelolaannya kepada Deli dengan otonomi luas semenjak tahun 1871. Raja Goraha Marahkun tak setuju dengan keputusan Belanda ini, sehingga ia mengajukan permohonan pengunduran diri dan digantikan oleh Marahuddin (Marah Hudin), putranya. Ia digelari Tuanku Maharaja Muda Wazir Bulian. Setelah

menuaikan ibadah haji, beliau dikenal sebagai Tengku Haji Muhammad Nurdin. Selanjutnya, sebagai penguasa Bandar Khalipah diangkat Orang Kaya Majin dengan gelar Indra Muda Wazir Bandar Khalipah. Indra Muda meninggal tujuh tahun kemudian dan digantikan oleh putranya bergelar Muda Indra.

Tuanku Maharaja Muda ingin agar putranya, Tuanku Berahman, kelak menikah dengan putri Raja Syahbokar, yang kala itu masih dibawah umur. Putri itu kemudian dibawa ke Bulian. Namun baru dua tahun berada di sana, datang utusan dari Deli bernama Tengku Ahmad yang memerintahkan agar putri itu diserahkan pada Deli karena hendak dinikahkan dengan salah seorang putranya. Tujuan sultan Deli melakukan tindakan ini adalah demi mengokohkan klaimnya atas takhta Padang. Tuanku Maharaja Muda menolaknya, tetapi tak lama kemudian ia dipanggil ke Deli. Setibanya di sana, ternyata sultan Deli malah menolak menjumpainya. Melalui salah seorang pembesar kerajaan bernama Tengku Usup, Tuanku Maharaja Muda dipaksa mengaku "bersalah." Kendati telah menyampaikan secara tertulis bahwa dirinya "bersalah," Tuanku Maharaja Muda dipecat dari jabatannya oleh sultan Deli pada tahun 1885. Residen Michielsen selaku wakil Belanda, menasihatkan bahwa bila menghadapi masalah dengan sultan Deli, ia hendaknya menyampaikan hal itu pada pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Kendati demikian, Tuanku Maharaja Muda telah merasa muak dengan urusan ini.

Setelah dipecat dari kedudukannya, Tuanku Maharaja Muda digantikan oleh putranya, Tengku Berahman[382]. Namun menurut Putra Praja, selama beliau diasingkan yang memerintah selaku wakil raja adalah Tengku Sulaiman (1885-1888)[383]. Beberapa waktu kemudian meletuslah pemberontakan di daerah hulu Padang yang hanya dapat dipadamkan oleh Tuanku Maharaja Muda berkat pengaruhnya di kawasan tersebut. Sebagai penghargaan atas jasanya, pemerintah kolonial Belanda menempatkannya kembali sebagai raja Padang di tahun 1888, kendati Deli tak menyukai hal ini; karena menghendaki agar kerabatnya yang lain diangkat sebagai penguasa di sana. Tuanku Maharaja Muda mengajukan permohonan berhenti pada tahun 1914 karena usianya yang telah lanjut. Menurut Putra Praja, beliau mangkat di tahun 1914[384]. Saat itu, putranya yang lain bernama Tengku Alamsyah masih di bawah umur dan sedang menuntut ilmu di Batavia. Oleh sebab itu, Tengku Ibrahim dan kemudian Tengku

382. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 170.
383. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebingtinggi*, halaman 15.
384. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 19.

Temenggung diangkat sebagai walinya. Pada tahun 1925, barulah Tengku Alamsyah (1928-1931) diangkat sebagai raja Padang dengan gelar Maharaja Bungsu, meski Deli memprotes hal ini dan mengajukan calon lain yang menurut mereka lebih berhak. Beliau kemudian digantikan secara berturut-turut oleh Tengku Ismail (1931-1933) dan Tengku Hasyim (1933-1946).

Raja Tengku Alamsyah merupakan putra sulung Tuanku Maharaja Muda (Tengku Haji Muhammad Nurdin). Hobi beliau adalah olah raga dan kesenian sehingga mendirikan perkumpulan sepak bola Padang serta beberapa organisasi kesenian daerah. Perkumpulan sepak bola tersebut disegani di Sumatera Utara. Tampaknya kegemaran beliau akan sepak bola mengakibatkan tersedotnya kas keuangan daerah sehingga beliau diberhentikan dan diasingkan ke Bengkalis oleh pemerintah kolonial[385]. Sebagai penggantinya, diangkatlah putra Tuanku Maharaja Muda dari istrinya keempat, yakni Tengku Ismail, selaku wakil raja. Beliau digantikan oleh Tengku Hasyim, yang merupakan raja terakhir Kerajaan Padang. Tengku Hasyim merangkap pula sebagai ketua Kerapatan Kerajaan Padang di Tebing Tinggi yang berhak mengadili perkara perselisihan harta benda hingga senilai f.625,- serta menjatuhkan hukuman tahanan sampai sebatas 3 bulan. Sewaktu revolusi sosial meletus, Tengku Hasyim sempat melarikan diri ke Medan. Kendati demikian, istana kerajaan dihancurkan dan tinggal tersisa bagian belakangnya saja.

XVI. PANAI

Leluhur raja-raja Panai dan Bilah adalah Raja Indra, putra tertua Marhum Mangkat di Jambu. Ia kemudian membangun kerajaan di Kambul (Bilah Hulu). Kerajaan Panai dan Bilah diwajibkan membayar upeti pada Siak. Menurut salah satu sumber, Panai secara silih berganti diperintah oleh raja-raja sebagai berikut: Tengku Sulung Riau, Tengku Raja Murai, Tengku Besar atau Yang Tuan Besar, Tengku Sulung, Tengku Sutan Mengedar Alam, Tengku Abdullah atau Sutan Gegar Alam, Tengku Tengah Mohammad Tahir gelar Sutan Mengedar Alam Syah, Tengku Sulung Syahnara, dan Tengku Kelana Putra gelar Sutan Gagar Alam Rahmat[386].

Semasa pemerintahan Sutan Mangedar Alam (1813–1856), pada tahun 1835, Bilah dan Panai diwajibkan ikut serta oleh Siak menyerang Asahan. Namun karena Siak tidak memperoleh kemenangan, angkatan perang mereka kemudian memasuki

385. Lihat *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, halaman 20. Wali bagi putra raja yang belum dewasa adalah Tengku Jalaluddin (1914-1928).
386. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 86.

Panai. Sutan Mangedar Alam lantas melarikan diri ke Kota Pinang dan mengajak Sutan Busu, raja Kota Pinang, bersama-sama mengusir Siak. Tetapi Sutan Busu tidak bersedia memenuhi ajakannya, sehingga Sutan Mangedar Alam terpaksa berdamai dengan Siak dan membayar ganti rugi sebesar $ 2.000[387].

Sutan Mangedar Alam membunuh Sutan Busu, ketika melarikan diri ke Pulau Biramata akibat kerajaannya diserang oleh Tuanku Tambusai, salah seorang panglima perang dalam Perang Padri.Belanda kemudian berhasil menghalau Tuanku Tambusai dari Padang Lawas dan setelah itu melancarkan serangannya ke Panai. Benteng Sutan Mangedar Alam di Pintasan diduduki oleh Belanda dan setelah itu serangan dialihkan ke ibukota Panai, Selimbang. Akibatnya, Sutan Mangedar Alam terpaksa melarikan diri ke Asahan. Ketika Sutan Mangedar Alam berkesempatan pulang dari Asahan, Sutan Mustafa, pengganti Sutan Busu, raja Kota Pinang, menyerangnya dekat Sungai Sontang pada tahun 1848. Oleh karenanya, ia terpaksa melarikan diri kembali ke Asahan.

Sultan Asahan berupaya menjadi penengah dan menyarankan agar Panai menyerahkan sebagian daerahnya hingga ke Sungai Gontang pada Kota Pinang. Sementara itu, daerah Gala Kuala diserahkan pada Asahan, sebagai imbalan atas jasanya sebagai juru damai antara Panai dan Kota Pinang. Sutan Mangedar Alam kembali ke Panai pada tahun 1855 dan menikah dengan saudari raja Bilah serta menjalin aliansi dengannya. Sutan Mangedar Alam digantikan secara berturut-turut oleh Sutan Gagar Alam (1856–1880) dan Sutan Mangedar Alamsyah (1880–1907). Pengganti Sutan Mangedar Alamsyah adalah Sutan Gagar Alam Rahmatullah, yang tercatat menandatangani *korte verklaring* pada 9 Oktober 1907.

XVII. PERBAUNGAN (BONGAN)

Perbaungan didirikan oleh Yang Dipertuan Panjang[388] dengan gelar anumerta Marhum Air Hitam. Tokoh ini berasal dari Minangkabau dan merupakan panglima perang Raja Kecil (Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah) dari Kerajaan Johor Riau Lingga. Pada kurang lebih tahun 1724, ia mendirikan Kerajaan Perbaungan yang berpusat di Kuala Air Hitam. Yang Dipertuan Panjang mempunyai dua orang anak, yakni Tengku Puan Sri Alam dan Tuanku Sutan Ussali. Tengku Puan Sri Alam menikah dengan Sultan Johan Alamsyah dari Serdang. Setelah Yang Dipertuan Panjang mangkat, ia digantikan oleh Tuanku Sutan Ussali, selaku raja Perbaungan kedua.

387. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 213.
388. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 161.

Raja Perbaungan ketiga adalah Tuanku Ibrahim. Takhta Perbaungan kemudian beralih lagi pada Sutan Rahmadsyah, yang saudarinya menjadi permaisuri Sultan Thaf Sinar Basarsyah dari Serdang. Putra mereka, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah, kemudian merangkap sebagai sultan Serdang dan juga raja Perbaungan. Putri Sutan Rahmadsyah bernama Tengku Puan Zahrah menikah dengan Sultan Basyaruddin. Sebagai wakil sultan Serdang di Perbaungan diangkatlah Raja Muda Tan Aman, yang digantikan kembali oleh Tengku Pangeran Mangkunegara Perbaungan H. Mat Jasin. Setelah H. Mat Jasin meninggal pada kurang lebih tahun 1887, jabatan sebagai wakil sultan Serdang di Perbaungan ini kemudian dipegang oleh Tengku Tan Idris yang wafat pada tahun 1901. Kerajaan Perbaungan mencakup Perbaungan sendiri dan Pantai Cermin. Di kawasan Perbaungan banyak pula dijumpai perkebunan tembakau milik konsesi atau perusahaan asing.

XVIII. PERCUT

Silsilah para penguasa Percut berawal dari salah seorang putra raja Deli, Tuanku Panglima Paderap, yang bernama Tuanku Jalaluddin dengan gelar Kejeruan Metar. Ia mempunyai dua orang putra, yakni masing-masing bernama Tuanku Puji (Pujar) bergelar Kejeruan Metar dan Tuanku Tarim (Tarikh), yang diangkat sebagai Raja Muda Percut Sei Lalang. Tuanku Tarim digantikan oleh putranya, Tuanku Malik. Pada zamannya, Percut diserang oleh Deli pada tahun 1794. Oleh pihak Deli, ia digelari Kejeruan Indra Muda Wazir Percut. Menurut laporan Anderson dari Inggris yang mengunjungi Percut pada tahun 1823, Tuanku Malik telah memegang kekuasaan di Percut semenjak tahun 1793. Saat kunjungan Anderson itu, Tuanku Malik telah berusia 45 tahun. Selain itu, Anderson menyebutkan pula bahwa Tuanku Malik berkulit putih dan baik tabiatnya.

Raja Percut berikutnya adalah Tuanku Sutan Syarif dengan gelarnya Kejeruan Sri Diraja Serdang. Ibunya adalah Tuanku Embab (bergelar Tuanku Puan Percut), putri Sutan Usalli, Raja Perbaungan ke-2. Berdasarkan gelar yang disandangnya, dapat disimpulkan bahwa Percut telah bebas dari Deli dan beralih haluan pada Serdang. Itulah sebabnya, Deli tak henti-hentinya berupaya menanamkan pengaruhnya kembali di Percut. Tentu saja, Serdang merasa kesal dengan hal ini, sehingga Sultan Basyaruddin dari Serdang menurunkan bantuannya pada Percut guna mengusir Deli. Sutan Syarif mengkat tanpa meninggalkan keturunan, sehingga adiknya yang bernama Tengku Muhammad Daud diangkat sebagai penggantinya. Semasa pemerintahannya, Percut dirampas dari tangan Serdang dan diserahkan pada Deli.

Kontrolir Belanda, Caets de Raet, banyak mengupayakan terciptanya hubungan baik antara Deli dan Percut, antara lain melalui pernikahan Tengku Matsyekh dengan Tengku Zahara, seorang putri kerabat Kesultanan Deli[389]. Tengku Muhammad Daud digantikan oleh Tengku Matsyekh, namun ia tak bersedia menerima gelar dari Deli. Setelah Tengku Matsyekh mangkat, ia digantikan oleh putranya, Tengku Bahri, dengan dibantu saudaranya bernama Tengku Abdul Rahman dengan jabatan Tungkat Kejeruan Percut. Tengku Bahri sendiri kemudian digelari Kejeruan Akar Seri Diraja. Selanjutnya, ketika ia mangkat, singgasana Percut beralih pada putranya, Tengku Muhammad Saleh, yang bergelar Kejeruan Sinar Diraja.

XIX. SENEMBAH

Kerajaan ini merupakan vasal atau bawahan Kerajaan Serdang dan para penguasanya yang bergelar *kejeruan* kerap menerima gelarnya dari sultan Serdang. Senembah masih terbagi lagi menjadi beberapa wilayah *kejeruan*, di mana penguasa tertinggi mereka bergelar Kejeruan Seluruh Senembah. Cikal-bakal Senembah adalah seorang tokoh bernama Si Emblang Pinggol dari Barus (Tapanuli)[390], putra Tuanku Si Gambo-Gambo. Ia pergi ke Aceh dan menikah dengan adik Panglima Polim. Si Emblang Pinggol lalu mengunjungi Tanah Karo dan mendirikan Barus Jahe. Selain itu, didirikannya pula Kampung Petumbukan. Karena di daerah Senembah mengalami gangguan seekor harimau putih, Si Emblang Pinggol lantas pergi ke sana guna membinasakan hewan buas tersebut. Putranya yang bernama Raja Poltak menikah dengan putri Raja Piraus dan memperoleh gelar Sutan Mangedar Alam dari sultan Aceh.

Atas seizin sultan Aceh, Sutan Mangedar Alam mendirikan negeri Senembah dan memperoleh gelar Kejeruan Senembah. Kemudian, didirikannya Kampung Senembah yang letaknya 1 jam berjalan kaki ke hulu Tadukan Raga (Teluk Raga). Sutan Mangedar Alam dikaruniai seorang putra bernama Taharim, yang menikah dengan Saleha, putri raja Ujung Karang (Tamiang). Pernikahan ini membuahkan keturunan sebagai berikut: Sawid Deli dan Memah (pendiri Kampung Si Merseh di hulu Teluk Raga). Sawid Deli memperoleh putra-putra, yang masing-masing bernama Renjuna dan Pinto Sari. Putranya yang disebut terakhir ini dianugerahi gelar Kejeruan

389. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 175.
390. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 145–146.

Ketaren oleh sultan Aceh dan mendirikan Kampung Teluk Raga/ Tadukan Raga). Secara bersama-sama mereka memerintah Kampung Senembah.

Sementara itu, keturunan-keturunan Memah adalah: Ombak (pendiri Patumbak), Batar (pendiri si Gara-Gara), dan Mersah. Pintu Sari memiliki putra bernama Megat, yang memperoleh gelar Kejeruan Ketaren dari Serdang. Megat digantikan putranya Johansyah sebagai Kejeruan Ketaren. Ia dikenal pula sebagai pendiri Medan Senembah. Putra Johansyah yang bernama Wan Kolok (Si Ledong) diangkat sebagai wakil Kejeruan Senembah di Tanjung Muda (Medan Senembah) setelah ayahnya menyingkir ke Deli. Ombak memiliki putra bernama Ganjeras. Marah Deli, putra Ganjeras, pernah menerima cap kekuasaan dari Deli pada tahun 1814. Mersah mempunyai putra bernama Meraksa. Sulong Mamat, putra Meraksa, belakangan menjadi wakil *kejeruan* Patumbak di Si Gara-Gara.

Renjuna berputra dua orang, yakni Kamaluddin dan Sutan Saidi. Kamaluddin memperoleh gelar Kejeruan Senembah dari Serdang. Sedangkan Sutan Saidi menerima gelar Kejeruan Seri Diraja. Putra Kamaluddin bernama Syahdewa (Dewasyah) sebelumnya menggantikan Marah Deli sebagai kejeruan Petumbak dianugerahi gelar Kejeruan Senembah oleh Serdang pada tahun 1812. Syahdewa menikah dengan saudari *kejeruan* Matsyeh dari Percut dan wafat pada tahun 1872. Adapun putra-putra Sutan Saidi adalah sebagai berikut: Ali Akbar, Wan Zainal, dan Akhir Ali. Sementara itu, Syahdewa mempunyai putra bernama Abdul Rahman.

Pada zaman Kamaluddin dan Sutan Saidi, Siak melancarkan serangannya ke Senembah. Namun dalam pertempuran di Lengau Seperang, mereka dapat dipukul mundur. Kamaluddin kemudian digantikan oleh Syadewa (Dewasyah). Selanjutnya, Senembah dibagi menjadi 4. Pada tahun 1814, Deli melancarkan serangannya ke Senembah dan mengangkat Marah Deli sebagai *kejeruan* atau penguasa seluruh Senembah dengan gelarnya Seri Pakarama Raja. Dengan demikian, peristiwa ini menandai masuknya Senembah ke dalam pengaruh Deli. Kendati demikian, pada tahun 1854, Serdang merebut Senembah kembali dan memulihkan kedudukan penguasa seluruh Senembah pada pihak Kampung Tadukan Raga. Syahdewa lalu dijadikan raja di Patumbak.

Tuanku si Gambo-Gambo
Si Emblang Pinggol
Raja Poltak (Sutan Mangedar Alam)
Taharim
Sawid Deli
Memah
Renjuna
Pinto Sari
Ombak
Batar
Mersah
Megat
Ganjeras
Meraksa
Kamaluddin Saidi
St.
Johansyah
Marah Deli
Sulong Mamat
Syahdewa (Dewasyah)
Ali Akbar
Wan Zainal
Akhir Ali
Wan Kolok
Wan Gontar Alam
Abd. Rahman
Sulung Piatu
Wan Bahauddin
Wan H. Umarrudin Baros
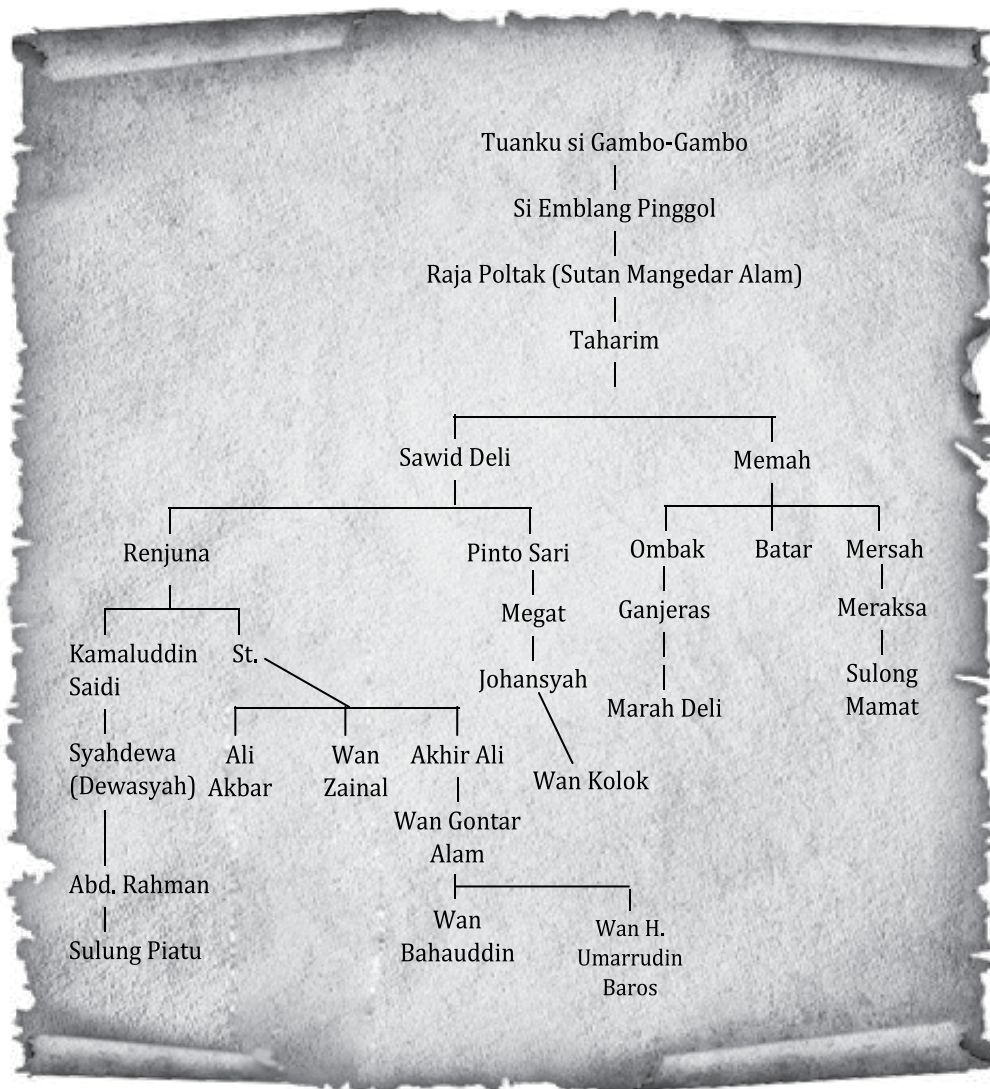
Silsilah para penguasa Senembah
(dibuat berdasarkan keterangan dalam buku *Sari Sejarah Serdang* I, halaman 145–150)

Marah Deli meninggal tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 1857. Johansyah, putra Megat, yang merupakan penguasa Medan Senembah menikahi janda Marah Deli. Ia berkeinginan menjadi *kejeruan* seluruh Senembah, selaku penguasa tertinggi di Senembah. Namun niatnya tak disetujui para penguasa Senembah lainnya, sehingga mereka mengutus Syahdewa melaporkan hal ini pada sultan Serdang. Karena itu, Johansyah yang merasa ketakutan segera meminta bantuan pada sultan Deli. Dengan demikian, Serdang dan Deli mengirimkan pasukan mereka, sehingga peperangan antara kedua kerajaan tak terelakkan lagi. Ternyata pasukan Serdang yang

dipimpin oleh Tengku Panglima Besar dan Tan Hasan berhasil memukul mundur Deli di Tanjung Morawa. Akibat kekalahan itu, Johansyah lantas menyingkir ke Deli.

Syahdewa diangkat kembali sebagai penguasa tertinggi di seluruh Senembah pada tahun 1862 dan menerima gelar Kejeruan Seri Diraja Wazir Senembah. Johansyah memohon ampunan pada sultan Serdang dan diizinkan tinggal di Medan Senembah. Setelah Syahdewa mangkat, timbul kericuhan kembali, karena Deli ingin memulihkan kedudukan *kejeruan* seluruh Senembah pada Johansyah. Belanda buru-buru turun tangan menyelesaikan perselisihan ini, yang ternyata didesak oleh perusahaan-perusahaan perkebunan asing. Mereka menghendaki agar kondisi di Senembah tetap aman, karena mengetahui bahwa tanah di kawasan tersebut sangat subur bagi penanaman tembakau. Untuk sementara waktu, Belanda mengambil alih pemerintahan di Senembah.

Sebagai penyelesaiannya, pada tahun 1882, Belanda membagi Senembah menjadi empat, yakni:[391]

- Medan Senembah di bawah Wan Kolok, putra Johansyah.
- Petumbak di bawah Wan Sulong Bahar.
- Si Gara-Gara di bawah Wan Sulong Mamat (Wan Abdul Rahman), putra Syahdewa.
- Namu Surau di bawah Sibajak Amat.

Tetapi kebijaksanaan ini masih belum berhasil memulihkan keamanan. Terlebih lagi timbul protes yang berasal dari pihak Serdang. Oleh karena itu, Belanda akhirnya membagi Senembah menjadi dua saja; yakni Senembah Serdang dan Senembah Deli. Senembah Serdang berkedudukan di Sei Bahasa dan meliputi Tadukan Raga (Sei Bahasa) besrta Medan Senembah. Sedangkan Senembah Deli berkedudukan di Patumbak dan meliputi Patumbak, Si Gara-Gara, serta Namu Surau. Raja-raja di Senembah Serdang hingga masa awal kemerdekaan masing-masing secara berturut-turut adalah: Zainal Abidin (tidak memliki keturunan laki-laki), Wan Gontar Alam (putra Akbar Ali, saudara Zainal Abidin), Wan Bahauddin, dan Wan Bahsyan (ketika masih kecil, Wan Umaruddin Baros diangkat sebagai walinya). Raja-raja di Senembah Deli yang memerintah secara bergantian hingga era kemerdekaan adalah: Abdul Rahman (putra Syadewa, ketika belum cukup umur memerintah Wan Yusuf diangkat sebagai walinya), Sulung Piatu (ketika masih kanak-kanak, Wan Haji Abdul Kadir

391. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 149.

menjadi walinya), dan Wan Salim. Karena Wan Salim masih belum dewasa, Wan Haji Abdul Kadir memegang jabatannya kembali sebagai wali dan setelah ia mangkat perwalian kemudian dilanjutkan oleh Wan Umar Basyah.

XX. SERBAJADI

Pendiri Serbajadi adalah Tuanku Matsyekh, putra Tuanku Tawar, yang menjadi raja Denai pertama. Oleh sebab itu, berdasarkan silsilahnya, para penguasa Serbajadi masih berkerabat dengan Deli, Serdang, dan Denai. Tuanku Matsyekh memiliki empat orang putra; yakni: Tan Baik, Radin Inu (pernah menjadi raja Pulau Berayan), Tan Lela, dan Raja Ali. Tan Baik tak dikaruniai keturunan laki-laki. Radin Inu berputra Tan Timbang Lawan dan Tan Deraman. Sementara itu, Sutan Lela memiliki putra Tan Hitam dan Raja Ali berputra Raja Ambang.

Pada tahun 1823, semasa kedatangan misi Inggris di bawah pimpinan Anderson, yang menjadi raja di Serbajadi adalah Sutan Baik. Kemudian ia digantikan oleh Raden Inu, yang pernah dikalahkan oleh sultan Deli dalam pertempuran di Pulau Berayan. Sebagaimana yang telah dituturkan di atas, Raden Inu memang pernah memegang kedudukan sebagai raja di Pulau Berayan. Setelah peristiwa kekalahan itu, Raden Inu pindah ke Serbajadi dan mendirikan kampung di sana. Beliau diberi gelar Kejeruan Santun Serbajadi oleh Sultan Thaf Sinar Basyarsyah dari Serdang dan meninggal pada sekitar tahun 1860.
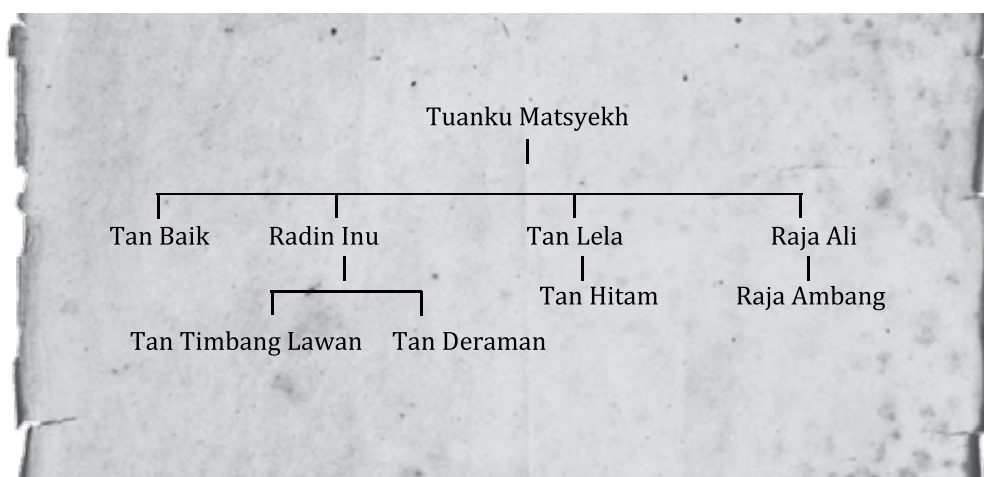
Silsilah para penguasa Serbajadi
Dibuat berdasarkan informasi dari buku Sari Sejarah Serdang I, halaman 158–159

Ia kemudian digantikan oleh Tan Timbang Lawan dan setelah itu Tan Deraman yang memegang jabatan sebagai penguasa Serbajadi. Sesudah tujuh tahun memerintah, Tan Deraman dibujuk oleh Deli agar jangan lagi tunduk atau berlindung pada Serdang. Mereka menjanjikan akan melindungi Serbajadi apabila diserang oleh Serdang. Selain itu, apabila ada kerugian yang ditimbulkan Serdang terhadap Serbajadi, Deli bersedia menggantinya berkali-kali lipat. Tan Deraman termakan bujukan ini dan beralih memihak Deli. Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah dari Serdang mendengar pembelotan Serbajadi ini dan mengundang Tan Deraman. Namun, Tan Deraman yang telah berganti haluan menolak undangan sultan Serdang.

Oleh karena itu, sultan Serdang mengirim pasukannya memerangi Serbajadi. Sesuai dengan janjinya, Deli turun tangan membantu Serbajadi. Kendati demikian, angkatan perang mereka dapat dipukul mundur oleh Serdang. Akibat kekalahan ini, Tan Deraman beserta keluarganya terpaksa melarikan diri ke Deli. Dengan demikian, terjadi kekosongan kekuasaan di Serbajadi. Sultan Serdang memutuskan mencari orang yang tepat guna didudukkan sebagai penguasa Serbajadi. Akhirnya, Raja Ambang, putra Raja Ali, yang saat itu tinggal di Titian Urat terpilih sebagai *kejeruan* Santun Serbajadi berikutnya. Semasa pemerintahannya, Tengku Bandar Agong–keturunan Tan Lela–melancarkan serangannya, karena merasa lebih berhak menjadi raja Serbajadi. Kendati demikian, serangan ini dapat dipatahkan dengan bantuan Serdang. Raja Ambang minta berhenti sebagai *kejeruan* pada tahun 1909 dan wafat pada 1925. Semenjak saat itu, jabatan sebagai penguasa Serbajadi dipegang oleh Tengku Mohammad Jamil.

XXI. SERDANG

a. Cikal-bakal dan perkembangan Kerajaan Serdang

Kerajaan Serdang merupakan pecahan Deli dan diawali oleh perebutan takhta antara Tuanku Umar (gelar: Kejeruan Junjungan; memerintah Serdang: 1723–1767) dengan saudaranya, Tuanku Pasutan. Saudaranya yang sebenarnya tidak berhak menjadi raja Deli merebut singgasana, sehingga Tuanku Umar beserta ibunya, Tuanku Puan Sampali terpaksa menyingkir ke Serdang pada tahun 1723. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Serdang. Sementara itu, saudaranya yang lain, Tuanku Tawar (Arifin) mendirikan negeri Denai yang kemudian meluas hingga ke Serbajadi. Tuanku Umar mempunyai 3 orang putra, yakni Tuanku Malim, yang menolak menjadi raja

dan tidak menikah; Tuanku Ainun Johan Alamsyah; Tuanku Sabjana (gelar: Pangeran Kampung Klambir).

Ketika Tuanku Umar mangkat pada tahun 1767, ia digantikan oleh Tuanku Ainun Johan Alamsyah (1767–1817), selaku raja Serdang kedua. Sementara itu, saudaranya, Tuaku Sabjana menjadi raja muda. Semasa pemerintahan raja Serdang kedua ini, diterima cap kerajaan dari Siak; yang menandai masuknya Serdang dalam lingkungan pengaruh Siak. Namun, karena Serdang ingin berdiri sendiri, Siak menyerangnya pada tahun 1815. Tuanku Ainun Johan Alamsyah berhasil meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke Sungai Tuan, Batang Kuwis, Perbaungan, dan Tanjung Merawa. Ia juga mengirimkan pasukan ke Langkat guna menaklukkan Punggei pada tahun 1814, di mana putranya bernama Tuanku Zainal Abidin gugur dalam pertempuran tersebut. Raja Tuanku Johan Alamsyah mengikat hubungan perkawinan dengan Perbaungan, yakni dengan menikahi Tuanku Puan Seri Alam, putri Sutan Usalli, raja Perbaungan kedua.

Tuanku Ainun Johan Alamsyah digantikan oleh putra keduanya, Tuanku Thaf Sinar, yang memperoleh gelarnya dari Siak. Ia juga dikenal sebagai Sultan Thaf Sinar Basarsyah (1817–1850) atau Sultan Besar. Pada saat berlangsung upacara penobatannya, penguasa Sunggal membacakan apa yang dinamakan *ulun janji*, sesuai dengan tradisi saat itu. Di bawah pemerintahannya, Serdang menjadi makmur dan perniagaan yang ramai terselenggara antara Penang serta Malaka. Wilayah kekuasaan Serdang meluas hingga ke Serbajadi, Percut, Dolok, Padang, Bedagai, dan Senembah. Ketika Inggris mengirimkan misinya di bawah pimpinan Anderson pada tahun 1823, ia menjumpai sultan ini. Menurut laporannya, sultan berbadan gemuk, berkulit putih, dan bertubuh agak pendek. Ia merupakan seorang penguasa yang berkepribadian baik, lembut, dan bijaksana dalam memerintah. Raja berhasil meraup banyak keuntungan dalam perniagaan karena memiliki banyak perahu dagang sendiri. Selain itu, sultan juga dikatakan gemar dan rajin belajar. Ada pula laporan yang mencatat bahwa Sultan Thaf Sinar Basarsyah pernah mengirimkan sejumlah prajurit membantu Tajuddin Halimsyah II, sultan Kedah, yang saat itu meminta bantuan membebaskan negerinya dari Siam pada 1838. Sultan bahkan mengutus putranya, Tengku Abdullah, dan kemenakannya, Tengku Muhammad Said, menyertai pasukan itu.

Peristiwa penting lain yang patut dicatat adalah perjanjian antara Serdang dengan Sultan Amaluddin Mangedar Alam dari Deli:[392]

392. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 113.

- Kedua kerajaan saling berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri-sendiri.
- Cukai yang diperoleh dari Labuhan Deli akan dibagi dua antara dua kerajaan.

Sultan Thaf Sinar Basarsyah mangkat dan digantikan oleh Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (1850–1880). Ibunya adalah Tuanku Puan Sri Indra Kuala, saudari Sutan Enen Mahmudsyah, raja Perbaungan ke-3. Raja Serdang ke-4 ini menikah dengan Tuanku Puan Zahrah, putri Sutan Rakhmadsyah, raja Perbaungan ke-4.

Sultan Basyaruddin memperoleh pengakuan dari Aceh berupa cap sembilan serta gelar wazir sultan Aceh. Ini menunjukkan bahwa Serdang mengakui pertuanan Aceh. Sultan dikenal pula sebagai penganut agama Islam yang taat. Ia setiap hari banyak menghabiskan waktunya bersembahyang dan mengkaji kitab suci Al-qur'an. Karena terlalu percaya pada orang lain, ia kerap menyerahkan urusan pemerintahan pada para pembesar kerajaan; sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh mereka. Ketika sultan Aceh mengirimkan 200 kapal perangnya guna memaksa kembali negeri-negeri di Sumatera Timur berlindung di bawah kekuasaan Aceh pada tahun 1854, sultan Serdang turut berdiri di belakang Kesultanan Aceh. Semasa pemerintahannya kelak terjadi perselisihan dengan Deli masalah perebutan daerah Percut, Denai, Senembah, Padang, dan Bedagai; yang makin dipicu oleh perjanjiannya dengan Belanda.

Belanda mengincar daerah Sumatera Timur yang menjadi ajang perebutan pengaruh antara Aceh dan Siak. Belanda secara licik memperalat perjanjian yang diadakannya dengan sultan Siak pada tahun 1858. Berdasarkan perjanjian tersebut Siak beserta daerah vasalnya di Sumatera Timur, termasuk Serdang, mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Belanda merasa berhak menegakkan kekuasaannya di Serdang. Dengan berbekalkan perjanjian ini, Belanda menerjunkan misi penguasaan kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut di bawah pimpinan Elisha Netscher pada tahun 1862. Padahal sesungguhnya beberapa kerajaan di Sumatera Timur masih menjadi vasal Kesultanan Aceh. Misi yang dipimpin Netscher tiba di Serdang pada 12 Agustus 1862. Keesokan harinya, asisten residen Belanda yang ikut serta dalam rombongan Netscher diutus mengundang sultan Serdang mengadakan perundingan. Memenuhi undangan tersebut, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah hadir bersama para pembesarnya dengan menggunakan kapal berbendera Aceh, yang menunjukkan bahwa Serdang saat itu masih merupakan vasal Kesultanan Aceh. Perundingan lalu diadakan di atas kapal perang *Reinier Classen*.

Sultan disodori perjanjian terdiri dari tujuh pasal yang terpaksa ditanda-tanganinya di bawah tekanan Belanda pada 16 Agustus 1862. Isinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1: Pengakuan terhadap kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura atas Kerajaan Serdang dan pemerintah kolonial Belanda selalu pemegang kedaulatan di Siak.
- Pasal 2: Sultan berjanji menjaga ketentraman baik di negerinya sendiri maupun dengan negeri-negeri di sekitarnya.
- Pasal 3: Sultan berjanji memajukan perdagangan dan pertanian.
- Pasal 4: Sultan berjanji mencegah dan menghentikan perdagangan budak.
- Pasal 5: Sultan berjanji tak akan menyembunyikan rakyat Hindia Belanda yang melanggar hukum.
- Pasal 6: Sultan berjanji tak akan menjalin hubungan diplomatik dalam bentuk apapun dengan negara asing tanpa izin pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh residen Riau.
- Pasal 7: Sultan berjanji tak akan memberikan izin bagi orang Eropa selain Belanda berdiam di wilayah kerajaannya tanpa izin pemerintah kolonial Belanda.

Dengan ditanda-tanganinya perjanjian di atas, Serdang secara otomatis berada di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai imbalan atas perjanjian tersebut, sultan Serdang dihadiahi wilayah-wilayah Denai, Perbaungan, Bedagai, Padang, dan lain sebagainya. Kendati demikian, beberapa di antaranya merupakan vasal Deli dan bukannya Serdang, sehingga menimbulkan protes kerajaan tersebut. Selain itu, pemberian daerah di atas dilakukan secara sepihak, dalam artian tidak melibatkan penguasa-penguasanya atau memberi-tahukan pada mereka sebelumnya. Hal-hal inilah yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari; sehingga pada 6 Oktober 1865, Belanda merampas lagi wilayah Percut, Denai, Bedagai, dan Padang serta menyerahkannya pada Deli. Kendati demikian, perselisihan wilayah antara Deli dan Serdang ini terus berlangsung berlarut-larut hingga 1907; di mana Belanda menegaskan bahwa:[393]

- Wilayah Serdang meliputi Perbaungan, Senembah, Serdang, Denai, Sena/Serbajadi, dan Dusun Batak Timur.
- Wilayah Deli meliputi: Hamparan Perak, Sunggal, Sukapiring, Senembah, Deli, Percut, dan Sungai Tuan.

393. Lihat *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 114.

- Wilayah Langkat meliputi: Langkat, Stabat, Bingai, Selesai, Bohorok, Lepan, dan Besitang.

Dengan demikian, barulah persengketaan wilayah antar kerajaan di Sumatera Timur dapat diakhiri.

Masih dalam masa pemerintahan Sultan Basyaruddin terjadi peristiwa yang menghebohkan dunia perdagangan. Waktu itu sebuah kapal dagang Inggris milik James Carnegy disita oleh Serdang, karena tidak bersedia membayar hutang-hutangnya pada para pedagang di kerajaan tersebut. Peristiwa ini mengakibatkan gubernur Inggris di Penang melayangkan nota protes pada pemerintah Belanda, tetapi mereka juga tak dapat berbuat apa-apa. Pemerintah kolonial Inggris lantas mengirimkan kapal perang *Hoogly* ke Serdang sebagai balasan atas tindakan penyitaan tersebut. Namun masalah ini pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai dan setelah membayar ganti rugi, kapal perang itu dilepaskan[394]. Sultan Basyaruddin mangkat pada tahun 1880 dan dimakamkan tidak jauh dari stasiun Serdang sekarang. Gelar anumerta beliau adalah Marhom Kota Baru.

Pergolakan melawan Belanda pecah di Serdang antara tahun 1887–1895, yang dikenal sebagai Perang Liang. Belanda memaksa pasukan kesultanan ikut serta menumpas pemberontakan ini. Pergolakan dapat diakhiri pada tahun 1895, ketika pemimpinnya bernama Datuk Setia Maharaja ditangkap dan diasingkan ke Bengkalis.

Semasa pemerintahan penguasa Serdang berikutnya, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, Belanda mengambil alih hak sultan Serdang dalam memungut bea cukai di pelabuhan, monopoli candu, memungut berbagai jenis pajak, dan mengeluarkan surat-surat izin tertentu, pada tahun 1907. Sebagai kompensansinya sultan menerima ganti rugi tahunan dari Belanda, baik tetap ataupun tidak tetap. Ganti rugi tetap yang diterima sultan Serdang per tahunnya adalah f. 50.850,-. Sementara itu, ganti rugi tak tetapnya bergantung dari pendapatan yang diterima kas *landschap* atau pemerintahan Serdang.

Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah memelopori kemajuan dalam bidang seni melalui peran sertanya dalam pendirian opera Melayu *Indra Ratu*. Perkumpulan kesenian ini berhasil menggelar pertunjukan di Sumatera, Singapura, Jawa, dan Malaya. Atas biayanya sendiri, sultan membangun prasarana irigasi di dekat Perbaungan serta

---

394. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 116–117.

mendatangkan kaum transmigran dari Banjar. Sultan membuka perkebunan kelapa dan karet yang dikelola menurut tata cara Barat, sehingga hasilnya tidak kalah dengan perkebunan milik asing.

Menurut buku *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*, halaman 180, setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan RI, sultan Serdang mengirim telegram pada gubernur Sumatera, T. M. Hasan, agar disampaikan pada presiden RI bahwa Serdang hanya mengakui kekuasaan RI. Telegram yang dikirim pada awal Desember 1945 ini menyatakan bahwa sultan Serdang beserta rakyatnya akan berupaya sedapat mungkin membantu perjuangan RI.

b. Sistem pemerintahan

Sultan adalah pucuk pimpinan tertinggi di Serdang dan dibantu oleh para *wazir* dan orang-orang besar. Para wazir yang tercatat menjabat semasa pemerintahan Sultan Basyaruddin adalah: Raja Muda Pangeran Muda Sri Diraja Mohammad Thakir, yang mangkat pada tahun 1865 dan digantikan oleh Sutan Aman; Tengku Sri Maharaja Twk. Agong, yang berkedudukan di Kampung Durian; Tengku Panglima Besar Muhammad Ali, yang berkedudukan di Sungai Tuan; Tengku Temenggong Tan Siddik; dan Datuk Pekerma Raja Zainuddin, yang berkedudukan di Tanjung Morawa[395]. Orang-orang besar merupakan pemuka daerah-daerah jajahan, yang pada masa Sultan Basyaruddin susunannya adalah sebagai berikut: Datuk Laksamana Putra Raja dari Lima Laras Batubara, Maraja Graha Marahkun dari Padang, Datuk Putra Raja Negeri Serdang Ahmad Yuda dari Bedagai (tewas ditembak polisi Belanda pada tahun 1865 dan Bedagai diserahkan kembali pada Deli), Kejeruan Seri Diraja Sutan Syarif dari Percut, Kejeruan Seri Diraja Sutan Saidi dari Senembah, Kejeruan Syadewa dari Patumbak, Kejeruan Santun Setia Raja Tan Deraman dari Serbajadi, Raja Graha dari Denai, dan Tuanku Rahmadsyah dari Perbaungan. Selain dewan kerajaan di atas, masih ada lagi Lembaga Orang Besar Berdelapan; yang terdiri dari Pangeran Mangku Negara Haji Mat Yasin dari Batak Timur Dusun, Datuk Lela Setia Diraja bin Tandil burik dari Rantau Panjang, Tengku Panglima Sutan Hassan dari Bandar Labuhan, Datuk Hitam dari Kampung Besar, Datuk Bentara Sseri Diraja Nakhoda Baung, dan para penguasa-penguasa Lengo Seperang, Pantai Cermin Kanan, serta Pantai Cermin Kiri.

395. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 114.

Dikenal pula pejabat yang disebut *bentara kanan* dan *bentara kiri*. Tugas bentara kanan adalah memegang benda-benda pusaka kerajaan, seperti keris pusaka, gong kebesaran, dan lain sebagainya. Pejabat yang berkaitan dengan urusan keagamaan adalah Kandi Cut dengan gelarnya Imam Paduka Tuan. Jabatan lain yang tak kalah pentingnya adalah bendahara kerajaan dan demikian pula halnya dengan syahbandar beserta Tengku Panglima Perang. Sesuai dengan namanya, Tengku Panglima Perang membawahi bidang kemiliteran. Ia berada di bawah koordinasi Tengku Panglima Besar yang membawahi seluruh panglima dalam peperangan.

XXII. SUKAPIRING

Pendiri Sukapiring adalah Bagelit, putra Guru Patimpus, raja XII Kota (Hamparan Perak). Setelah menganut agama Islam, ia mengganti namanya dengan Marah Sewah. Selanjutnya, yang berkuasa di Sukapiring secara berturut turut adalah Marah Umar dan Syahnabab. Mereka semua memperoleh meterai pengangkatannya dari sultan Aceh, tetapi belakangan Sukapiring kerap berada di bawah kekuasaan Deli; yakni setelah melemahnya Kesultanan Aceh. Syahnabab digantikan oleh putranya yang bernama Datuk Tajib. Semasa pemerintahannya, Sukapiring boleh dikatakan aman dan damai. Setelah Datuk Tajib mangkat, tampuk kekuasaan atas Sukapiring diwariskan pada putranya, Datuk Malat.

Penguasa Sukapiring yang baru ini berniat melepaskan negerinya dari kekuasaan Deli. Oleh karenanya, ia menggalang kerjasama dengan Sunggal dan Senembah. Akibatnya, Deli di bawah pimpinan Sultan Osman Perkasa Alam mengirimkan pasukannya menyerang Sukapiring, tetapi gagal. Datuk Malat mempunyai dua orang putra, yakni Datuk Bagus dan Datuk Kahar. Sepeninggal Datuk Malat, Sukapiring terpecah menjadi dua. Datuk Bagus menjadi raja di Kesawan dan memperluas wilayah Sukapiring; sedangkan saudaranya, Datuk Kahar menjadi raja di Kampung Baru.

Deli memanfaatkan perpecahan ini guna menanamkan kekuasaannya kembali di Sukapiring. Mereka berhasil membujuk Datuk Kahar agar memihak Deli. Sebagai imbalannya, Datuk Kahar diakui sebagai penguasa seluruh Sukapiring dan memperoleh gelar Datuk Jaya Pahlawan Wazir Deli di Sukapiring. Tetapi Datuk Bagus tidak mengindahkannya. Selaku penguasa kawasan yang meliputi Sungai Petisah dan Sungai Deli, ia mengancam akan menghalang-halangi pelayaran di sungai-sungai tersebut apabila Deli berani mengusik kedaulatannya. Pihak Deli ciut nyalinya

mendengar ancaman ini, sehingga membiarkan Datuk Bagus beserta keturunannya berkuasa di Kesawan.

Keturunan Datuk Bagus baru dapat ditaklukkan semasa pemerintahan Sultan Mahmud dari Deli. Sementara keturunan Datuk Kahar terakhir yang menerima gelarnya dari Deli adalah Datuk Sri Bijaya. Selanjutnya, yang memerintah di Kesawan adalah keturunan Datuk Bagus, yang bernama Datuk Rustam. Sultan Sultan Makmun al Rasyid Perkasa Alam dari Deli pernah membeli tanah dari Datuk Rustam guna membangun istana Maimun yang tersohor itu. Datuk Sri Bijaya digantikan oleh Datuk Sri Pekerja Indra yang merupakan keturunan Datuk Bagus. Selanjutnya, ia digantikan oleh Datuk Ahmad Kamil Sri Andra Asmara pada tahun 1923.

XXIII. SUNGGAL (SERBANYAMAN)

a. Cikal-bakal dan perkembangan Sunggal

Cikal-bakal Kerajaan Sunggal adalah seorang Batak Karo bernama Sesser[396]. Ia memiliki seorang putra bernama Gajah, yang mendirikan dusun Sumbuwaiken di kaki Gunung Sibayak. Putra Gajah yang bernama Adir menganut agama Islam atas usaha Gocah Pahlawan, raja Deli yang pertama. Adir digantikan lagi oleh putranya bernama Datuk Hitam. Saudari Datuk Hitam, yakni Nang Baluan, menikah dengan Gocah Pahlawan pada tahun 1632. Keturunan mereka adalah raja-raja Deli, Serdang, beserta daerah-daerah vasalnya. Pada masa itu, Sunggal merupakan yang terkuat di antara negeri-negeri Karo lainnya. Datuk Sunggal merupakan pemimpin Lembaga Datuk Berempat yang besar peranannya dalam pemerintahan Deli. Selain itu, Sunggal menjadi jembatan penghubung antara Deli dengan para penguasa suku Batak Karo di pedalaman.

Hubungan Deli dengan Sunggal tidak selamanya mesra. Semasa pemerintahan Sultan Amaluddin Mangedar Alam (1761–1824) dari Deli, timbul niat menaklukkan Sunggal sepenuhnya. Mula-mula sultan Deli tersebut menikahi Dayan Sermaidi, adik almarhum datuk Sunggal bernama Datuk Udan. Namun strategi melalui pernikahan ini tetap belum berhasil menjadikan Deli sebagai penguasa Sunggal seutuhnya. Oleh karena itu, dilancarkan peperangan terhadap Sunggal pada tahun 1822. Kendati demikian, Deli gagal mengalahkan Sunggal dan bahkan negeri tersebut berbalik menjadi lawan Deli yang tangguh.

396. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 183.

Datuk Udan digantikan oleh putranya yang bernama Datuk Amar Laut. Pada tahun 1824, ia melepaskan segenap ikatan dengan Deli dan menyatakan bahwa Sunggal adalah kerajaan merdeka yang tak terikat dengan siapapun. Bahkan, ia mengeluarkan cap kerajaan dan benderanya sendiri. Dengan merapatnya Deli ke Siak, Datuk Amar Laut menganggap bahwa segenap hubungan tradisional antara keduanya semasa Deli masih berlindung pada Aceh tak berlaku lagi. Pengganti Datuk Udan adalah putranya bernama Datuk Ahmad (menurut Anderson bernama Abdul Hamid[397]), yang memerintah sezaman dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam dari Deli. Datuk Ahmad kemudian mengubah nama Sunggal menjadi Serbanyaman. Seiring dengan menanjaknya pengaruh Belanda, Datuk Ahmad pada akhirnya berhasil dibujuk menerima gelar dari Deli; yakni Datuk Indra Pahlawan Wazir Serbanyaman Ulun Janji. Saat Datuk Ahmad meninggal dunia pada tahun 1857[398], putranya yang bernama Datuk Badiuzzaman masih kecil, sehingga Datuk Kecil selaku pamannya menjadi wali. Datuk Kecil merupakan tokoh yang anti-Belanda. Ia merupakan pencetus perlawanan yang dikenal sebagai Perang Sunggal.

b. Perang Sunggal

Pembukaan lahan perkebunan oleh pengusaha-pengusaha asing kerap dijalankan tanpa berkonsultasi atau berembug terlebih dahulu dengan pemuka setempat, yakni para *urung* empat suku. Tanah-tanah mereka yang berada di sekitar Medan banyak diubah menjadi perkebunan tembakau. Lahan-lahan subur diberikan pada pengusaha asing, sementara itu rakyat tidak menuai hasilnya. Pelanggaran terhadap hak-hak rakyat ini menggusarkan hati penguasa Urung Sunggal, yang lebih dikenal sebagai datuk Sunggal. Datuk Kecil, datuk Sunggal saat itu yang menjadi wali bagi Datuk Badiuzzaman, berniat melakukan perlawanan bersenjata guna mengakhiri kekuasaan Belanda di daerahnya. Upaya Datuk Kecil ini mendapat dukungan pula dari saudaranya, seperti Datuk Jalil dan Sulung Barat, serta suku-suku Batak Karo yang berada di pegunungan, karena walaupun berbeda agama mereka tetaplah berkerabat.

Ketika Belanda mengendus niat Datuk Kecil ini, mereka segera menurunkan pasukan di bawah pimpinan Kapten W. Koops pada 15 Mei 1872. Kedatangan pasukan Belanda ini dengan memanfaatkan bantuan pasukan Deli sebagai penunjuk

397. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 184; catatan kaki ke-2.
398. Lihat *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut*, halaman 184.

jalan. Serangan segera dilancarkan terhadap pusat pertahanan Sunggal, sehingga meletuslah apa yang dinamakan Perang Sunggal. Para pejuang Sunggal tidak hanya bertahan, mereka juga melancarkan serangan dengan merusak bangsal-bangsal tembakau serta mengganggu kegiatan buruh perkebunan. Bahan makanan yang biasa didatangkan dari pedesaan tidak dapat masuk lagi ke kota, sehingga memusingkan Belanda. Mereka terpaksa mengimpor beras dari Penang, yang tentu saja menghabiskan biaya tidak sedikit. Ekspedisi militer Belanda pertama ini belum berhasil menguasai keadaan, sehingga boleh dikatakan gagal.

Itulah sebabnya, Belanda lantas mengirimkan ekspedisi keduanya, yakni di bawah pimpinan Letnan Kolonel von Homracht dengan peralatan perang yang lebih lengkap. Tetapi upaya ini juga menemui jalan buntu, karena pasukan Datuk Sunggal mendapatkan bantuan dari rakyat pedalaman, sehingga sulit ditaklukkan. Seperti biasa, Belanda menerapkan siasat liciknya dengan mengajak berunding. Datuk Kecil termakan oleh siasat ini dan memasuki perangkap Belanda pada 25 Oktober 1872. Ia ternyata tidak diajak berunding sebagaimana yang telah dijanjikan dan langsung dijadikan tawanan pemerintah kolonial Belanda. Datuk Kecil beserta putra-putranya kemudian diasingkan ke Cilacap, sehingga secara resmi mengakhiri Perang Sunggal.

Belakangan, Datuk Badiuzzaman diasingkan Belanda ke Banyumas dan wafat di sana. Saat itu, putranya yang bernama Datuk Munai masih kecil, sehingga Datuk Mohammad Alip diangkat sebagai walinya. Kendati demikian, tokoh ini juga anti-Belanda, sehingga disingkirkan dan diganti dengan Datuk Jalip Johan Seri Indra. Dengan demikian, hal ini menandakan betapa berkuasanya Belanda atas roda pemerintahan di Sunggal.

XXIV. KERAJAAN-KERAJAAN DI KAWASAN BATU BARA

Kawasan Batubara pernah ditaklukkan oleh Raja Kecil dari Siak. Ia lantas memasukkan adat istiadat Minangkabau yang didasari oleh sistem kesukuan (*suku stelsel*)[399]. Kendati demikian, sistem semacam ini tidak dapat bertahan di Batubara, sehingga akhirnya pemisahan atas dasar kesukuan tersebut hanya diartikan sebagai pembagian teritorial saja. Awalnya hanya ada empat suku, tetapi kemudian bertambah satu hingga jumlah keseluruhannya menjadi lima; yakni Tanah Datar, Lima Laras, Pesisir, Limapuluh, dan Boga. Menurut sumber lainnya, terdapat sembilan negeri kesukuan di Batu Bara, yakni Tanah Datar, Limapuluh, Lima Laras, Pesisir, Boga,

399. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 209.

Tanjung, Tanjung Kasau, Pagurawan, dan Sipare-pare. Boga belakangan disatukan dengan Lima Laras membentuk Swapraja Suku Dua. Tanjung, Tanjung Kasau, Sipare-pare, dan Pagurawan belakangan disatukan menjadi Swapraja Indrapura[400]. Masing-masing suku tersebut dipimpin seorang datuk dan diawasi seorang bendahara dari Siak. Bendahara ini berlaku pula sebagai wakil sultan Siak di Batu Bara. Semasa kedatangan misi Anderson ke Sumatera Timur, yang menduduki jabatan sebagai bendahara adalah Ahmad dari Deli.

Sebagai pelaksana pemerintahan di Batu Bara terdapat suatu dewan yang anggotanya dipilih oleh para datuk penguasa kelima suku. Anggota dewan tersebut adalah:[401]

- Syahbandar yang dipilih dari suku Tanah Datar.
- Juru tulis yang dipilih dari suku Lima Puluh.
- Mata-mata yang dipilih dari suku Lima Laras.
- Penghulu Batangan yang dpilih dari suku Pesisir.

Dengan adanya sistem seperti itu, diharapkan akan terjadi proses saling mengawasi di antara mereka. Para datuk sendiri dipilih oleh para kepala kampung (*tungkat*). Kondisi pemerintahan di Batu Bara abad ke-19 agak kacau. Di Boga, terjadi perebutan kekuasaan antara Datuk Temenggung yang didukung Siak dan Datuk Indra Muda yang didukung oleh Pelelawan. Masalah bertambah runyam, setelah Asalah ikut campur dengan mengusir keduanya. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa kekacauan di daerah Batu Bara terjadi karena turut campurnya kerajaan-kerajaan besar di sekelilingnya dalam percaturan politik wilayah itu. Serdang juga ikut andil di kawasan ini dengan mengakui datuk Lima Laras bernama Datuk Laksamana Putra Raja. Ia memperoleh gelarnya dari sultan Serdang yang juga merupakan bawahan Aceh. Pada perkembangan selanjutnya, kelima suku di Batu Bara ini merupakan cikal-bakal bagi kerajaan atau swapraja yang berkembang belakangan. Selanjutnya, Kerajaan Tanjung Kasau dimasukkan dalam *Onderafdeeling* Batubara dan digabungkan dengan Indrapura. Pagurawan dan Si Pare-Pare belakangan disatukan pula dengan Batu Bara. Berikut ini adalah uraian mengenai swapraja-swapraja tersebut.

400. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 72.
401. Lihat *Sari Sejarah Serdang I*, halaman 209.

a. BOGA, LIMA LARAS, & SUKU DUA

Pengaruh Aceh dan Serdang tampak dari pengangkatan Datuk Laksemana Putra Raja oleh sultan Serdang. Sementara itu, sultan Serdang sendiri merupakan bawahan sultan Aceh[402]. Boga merupakan kawasan perniagaan yang ramai. Penguasa Boga Tok Muda Husin berkerabat dengan para Datuk di Tanah Datar. Beliau merupakan wakil kesultanan Siak di sana, termasuk dalam hal memungut bea cukai. Tok Muda Husin yang mendapat gelar Bendahara dari Siak, selain mengurusi jalannya pemerintahan juga merangkap sebagai syahbandar. Sepeninggal beliau, maka urusan pemerintahan diserahkan pada putranya bernama Datuk Indra Pahlawan, sedangkan jabatan syahbandar pada menantunya bernama Datuk Muhammad Baqi. Semasa pemerintahannya, terjadi perselisihan dan peperangan dengan Lima Laras. Pertikaian itu dipicu karena kedatukan Lima Laras menjadikan Bagan Luar sebagai bandar perdagangan bebas. Boga kemudian meminta bantuan Belanda guna mengalahkan Lima Laras[403]. Beliau kemudian digantikan oleh kemenakannya bernama Datuk Abdul Majid Datu Raja Indra Muda (1898–1918), yang menerima pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada 15 Februari 1908. Datuk Abdul Majid digantikan oleh putranya, Wan Achmad Chalil. Semasa pemerintahan beliau, atau tepatnya pada 1920, Boga dan Lima Laras disatukan menjadi Swapraja Suku Dua.

Cikal-bakal para penguasa Lima Laras adalah Datuk Urban yang berasal dari Bangkinang, Pagarruyung[404]. Beliau bersama dengan lima orang sahabatnya berlayar dan akhirnya mendarat di sebuah pantai yang banyak ditumbuhi pohon nibung. Mereka kemudian sepakat membangun pemukiman di sana. Namun, sebelumnya mereka perlu membakar terlebih dahulu pohon-pohon nibung di kawasan tersebut. Itulah sebabnya, kawasan itu lantas dinamai Nibung Hangus. Para datuk yang pernah memerintah di Lima Laras secara berturut-turut adalah Datuk Urban, Raja Nibung Hangus, Datuk Imam, Datuk Merah Mata, Datuk Dagang, Datuk Pagak, Datuk Bendahara Berjasa Sakit, Datuk Masidin, Datuk Embun, Datuk Haji Aminiddin, Datuk Haji Ja'far, dan Datuk Muhammad Yuda (Mat Yuda Datuk Sri Di Raja)[405]. Nama Lima Laras sendiri baru digunakan semasa pemerintahan Datuk Bendahara. Mat Yuda Datuk Sri Di Raja menurut Regeerings Almanak juga disahkan kedudukannya

402. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 2.
403. Lihat *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya*, halaman 43-45
404. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 75.
405. Lihat *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 76.

pada 15 Februari 1908. Boga belakangan disatukan dengan Lima Laras membentuk Swapraja Suku Dua pada tahun 1920. Wan Achmad Chalil (1918–1939) dikukuhkan sebagai kepala Swapraja Suku Dua pada 25 Juli 1924. Ia digantikan oleh Wan Asmayuddin gelar Raja Indra Muda (1939–1942) yang menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 8 Juni 1940. *Regeerings Almanak* mencatat bahwa Datu Sri Maharaja merupakan penguasa Lima Laras pada akhir abad ke-19.

Tempat kediaman Wan Asmayuddin pernah dirampok dan dikuras habis harta bendanya oleh para perompak, sehingga warga Boga mengalami ketakutan serta berpindah ke tempat lain. Wan Asmayuddin mangkat pada 16 April 1981 dan dimakamkan di Medan[406].

b. LIMAPULUH

Datuk Sa'omo yang bergelar Datuk Indra Setia tercatat pernam memerintah Batubara antara tahun 1820 hingga 1876. Beliau berjasa membangun jaringan dagang hingga Semenanjung Malaya. Karena tidak berputra, beliau digantikan anak angkatnya bernama Wan Bagus yang menggantikan beliau dengan gelar Datuk Ongku[407]. Menurut sumber lain, Datuk Sri Maharaja pernah memerintah Lima Puluh antara 1898 hingga 1901. Tampaknya, Datuk Sri Maharaja ini merupakan gelar lain bagi Datuk Ongku. Penggantinya, Wan Alang atau Datuk Alang bergelar Datuk Maharaja Sri Indra Muda (1901–1938)[408] dikukuhkan sebagai datuk Lima Puluh pada 15 Februari 1908. Selanjutnya, pada 30 Juni 1939, Wan Ingah Mansyur (1938–1942)–pengganti Wan Alang–menerima pengukuhan sebagai kepala Swapraja Lima Puluh.

c. PAGURAWAN

Pendiri Pagurawan adalah Idris yang bergelar Datuk Muncak. Beliau merupakan putra Panglima Muda yang tinggal di Pesisir. Datuk Muncak berlayar bersama pengikutnya dan setibanya di sebuah kuala sungai, mereka membangun perkampungan. Tak lama kemudian, perkampungan itu menjadi ramai, karena kedatangan orang-orang yang berasal dari Simalungun[409]. Perkampungan yang didirikan Datuk Muncak tersebut lantas disebut Kampung Besar. Oleh karena itu, Datuk Muncak kemudian menjalin persahabatan dengan raja-raja di kawasan Simalungun, terutama raja Siantar.

406. Lihat *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya*, halaman 45.
407. Lihat *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya,* halaman 34.
408. Menurut *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya,* Datuk Alang meninggal pada tahun 1937.
409. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 6.

Suatu ketika, raja Siantar diundang ke Kampung Besar dan mereka bersenda-gurau dengan penuh suka cita. Itulah sebabnya, nama kampung tersebut diubah menjadi Pagurowan, yang lambat laun berubah lagi menjadi Pagurawan.

Sepeninggal Datuk Muncak, Pagurawan diperintah oleh putranya bernama Datuk Muda Sri Betara. Beliau menikah dengan saudari raja Siantar, sehingga hubungan kedua kerajaan semakin erat. Datuk Muda Sri Betara digantikan oleh Datuk Setia Wangsa. Pada masa pemerintahannya, Pagurawan kerap diserang oleh negeri-negeri tetangganya. Karenanya, Datuk Setia Wangsa lantas memohon bala bantuan pada Siak. Ketika itu, Siak telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, secara tidak langsung Pagurawan berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Hal ini membuka kesempatan bagi pemerintah kolonial mencampuri urusan dalam negeri Pagurawan; sebagai contoh, Belanda membagi cukai pelabuhan antara Siak dan Pagurawan.

Belakangan, Siak menyerahkan negeri-negeri di Sumatera Timur pada pemerintah kolonial, sehingga Pagurawan kini diperintah secara langsung oleh Belanda. Datuk Setia Wangsa diasingkan oleh pemerintah kolonial selama lima tahun ke Bengkalis pada tahun 1894[410]. Beliau lalu digantikan oleh putra sulungnya Datuk Setia Maharaja Lela (1898–1906). Setelah ia meninggal dunia, putranya masih kanak-kanak, sehingga pemerintahan dipegang oleh pemangku bernama Datuk Setia Putra Raja. Sementara itu para tungkatnya adalah Orang Kaya Besar, Orang Kaya Sanding, dan Orang Kaya Taib. Mereka masing-masing mendapatkan 1/3 hasil tanah. Pemerintah kolonial kemudian menghapusnya dan diganti dengan gaji tetap.

d. PESISIR

Negeri Pesisir telah berdiri semenjak tahun 1708. Datuk pertamanya Panglima Muda yang menikah dengan salah seorang putri penguasa Batu Bara. Beliau mempunyai tiga orang putra, yang masing-masuk bernama Datuk Muda Jalil (gelar Datuk Semungsa I), Datuk Muhammad Idris (gelar Datuk Pamucak), Datuk Muda Husin (gelar Datuk Semuangsa). Datuk Muhammad Idris terkenal gembar mengembara dan mendirikan negeri-negeri baru. Karena usia lanjut, beliau menyerahkan pemerintahan pada putranya, yakni Datuk Muda Jalil dan Datuk Muda Husin[411].

410. Lihat *Sari Sejarah Serdang 2*, halaman 57.
411. Lihat *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya*, halaman 25-26.

Abdullah Datuk Lela Wangsa (1902–1925) disahkan sebagai datuk Pesisir oleh Belanda pada 15 Februari 1908. Selanjutnya, Achmad Chalil (1925–1933) diangkat sebagai penguasa sementara Pesisir pada 5 Februari 1926. Kepemimpinan Pesisir lalu beralih pada Datuk Abdul Jalil (Abdul Rani, 1933–1942) gelar Datuk Samuangsa (Semuangsa) yang memperoleh pengokohan sebagai datuk Pesisir dari pemerintah kolonial tanggal 12 Juni 1934.

e. SI PARE-PARE

Sebutan bagi negeri ini berasal dari kata "Sipari-pari," yakni nama ikan yang banyak terdapat di sana[412]. Menurut laporan John Anderson yang mengunjungi kawasan pantai timur Sumatera pada tahun 1823, negeri di Sungai Si Pare-Pare dipimpin oleh Orang Kaya Manali dan jumlah penduduk di kampung itu hanya 100 orang. Cikal-bakal negeri Si Pare-Pare adalah seorang tokoh bernama Sutan Palaminan, yang menghiliri Sungai Asahan guna membuka kawasan pemukiman baru. Beliau tiba di Langkat dan menikahi seorang wanita bernama Wan Nosari[413]. Ia kemudian melanjutkan pelayarannya, dan setelah melewati Sungai Pagurawan tibalah beliau di sebuah kawasan kosong yang belum berpenghuni. Karenanya, mereka membuka tempat pemukiman di tempat itu. Sutan Palaminan memiliki dua orang putra yang masing-masing bernama Podin dan Gani, serta seorang putri bernama Dagang. Putrinya itu lalu dinikahkan dengan Tum yang berasal dari Sunggal. Kendati demikian, hingga Tum meninggal mereka belum dikaruniai anak.

Tum menikah lagi dengan Mogek Gunung yang berasal dari Kuantan. Sepeninggal Sutan Palaminan, putra-putranya sepakat mengangkat Mogek Gunung sebagai pemimpin mereka karena kegagahan dan kebijaksanaannya. Sepeninggal Mogek Gunung, Si Pare-Pare diperintah oleh putranya bernama Datuk Sutan beserta saudara sewalinya bernama Datuk Gundah. Semasa pemerintahan mereka, Pagurawan melancarkan serangannya, sehingga Datuk Sutan dan Datuk Gundah memohon bala bantuan pada raja Pesisir, Datuk Semuangsa. Raja Pesisir tersebut lalu menempatkan wakilnya bernama Datuk Badul. Dengan demikian, Si Pare-Pare kini diperintah tiga orang. Datuk Badul berputra Orang Kaya Abdullah, yang kelak menjadi raja di Pesisir.

412. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 4.
413. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 7.

Sepeninggal Datuk Sutan, agar pimpinan negeri itu tetap tiga orang, diangkatlah putranya bernama Orang Kaya Johan Pahlawan. Meskipun demikian, pemerintahan bertiga ini memicu konflik di antara mereka, karena masing-masing pihak ingin lebih berkuasa dibandingkan lainnya. Mereka lantas mencari dukungan negeri yang lebih kuat. Orang Kaya Johan Pahlawan dan Datuk Gundah menghadap sultan Siak; sedangkan saingan mereka, Orang Kaya Leman beserta putranya, Orang Kaya Soman tidak ketinggalan pula memohon dukungan Siak. Ternyata sultan Siak mengangkat Orang Kaya Johan sebagai wakilnya di Si Pare-Pare dengan gelar Datuk Johan Pahlawan; namun Orang Kaya Soman juga diangkat sebagai wakil sultan Siak dengan gelar Datuk Sutan Pahlawan. Tidak mengherankan, hal ini berpeluang menimbulkan peperangan di antara mereka.

Datuk Johan Pahlawan meninggal mendadak sehingga Datuk Sutan Pahlawan tampil sebagai penguasa tunggal. Sepeninggal Datuk Sutan Pahlawan, pemerintahan Si Pare-Pare dipegang oleh wakilnya bernama Orang Kaya Anjang atau Aminullah. Beliau merupakan saudara Datuk Sutan Pahlawan. Pada masanya, pemerintahan Si Pare-Pare dijalankan pula oleh Orang Kaya Kendeh, selaku *tungkat* di Kampung Modang, Orang Kaya Lano selaku *tungkat* di Kampung Lasak, dan Orang Kaya Lambak selaku *tungkat* di Kampung Lalang. Mereka berhak menjatuhkan hukuman denda hingga maksimal 5 thail (USD 16). Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut. Sebanyak 2/3 pendapatan negeri diperuntukkan bagi datuk Si Pare-Pare, sedangkan 1/3-nya dibagi rata di antara para *tungkat.*[414]

f. TANAH DATAR

Pendiri Tanah Datar adalah rombongan dari Pagarruyung pada 1707 yang mengendarai kapal bernama Gajah Ruku. Di dalamnya ikut dan Datuk Jenan, putra Raja Labu bin Raja Gandam. Beliau menikah dengan Puang Gadih (Cik Gadih), putri penguasa Batu Bara. Dari mertuanya beliau menerima sebuah kawasan yang dinamai Tanah Datar. Pada perkembangan selanjutnya, beliau digantikan oleh putranya bernama Tok Ongah Beramban (Datuk Pembesar). Datuk Pembesar digantikan oleh kemenakannya bernama Akas yang bergelar Datuk Panglima. Kepemimpinan beliau mendapatkan pengesahan dari Siak pada tahun 1776–1779.

Kepemimpinan Tanah Datar diteruskan oleh putra Datuk Panglima bernama Abdul Wahab (Datuk Tok Tuo), yang memperistri putri Wan Alang, datuk Lima

414. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 8.

Puluh, bernama Wan Gading. Dari pernikahan ini lahir tiga orang putra yang antara lain bernama Tok Muda Syakroni. Menurut sumber Belanda, Wan Sakrani gelar Datuk Indra Sri Diraja (1902–1942) memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 15 Februari 1908 selaku kepala Tanah Datar. Oleh karenanya, kemungkinan besar Tok Muda Syakroni ini sama dengan Wan Sakrani pada sumber Belanda. Beliau memerintah hingga masa kemerdekaan dan wafat pada 1962.[415]

g. TANJUNG atau KUALA TANJUNG

Cikal-bakal para datuk Tanjung adalah Datuk Mat Janggut yang berasal dari Kuantan. Beliau disertai oleh istrinya bernama Kulo dan enam orang sahabatnya berlayar hingga tiga di sebuah kuala sungai yang tanahnya menjorok ke tengah laut, sehingga menyerupai sebuah semenanjung. Itulah sebabnya, kawasan tersebut lalu dinamai Kuala Tanjung[416]. Beliau membuka pemukiman di sana dan kemudian berdatanganlah orang-orang yang berasal dari Kuantan serta Kampar. Mereka kemudian membuka perkebunan limau purut sehingga pemukiman baru tersebut dinamai Kampung Pematang Limau Purut. Sepeninggal Datuk Mat Janggut, putranya bernama Datuk Panglima Mat Soman tidak bersedia menjadi penggantinya, karena lebih memilih menjadi panglima perang. Putra lainnya, Chatib Manan, juga tak bersedia diangkat sebagai pengganti, karena lebih suka menekuni bidang keagamaan.

Akhirnya yang diangkat sebagai penggantinya adalah Orang Kaya Mamat. Dari istri pertamanya, beliau mempunyai seorang putra bernama Orang Kaya Ulong; sedangkan dari istri keduanya, beliau berputra dua orang, yakni Orang Kaya Lawan dan Orang Kaya Mat Bandar. Semasa pemerintahan Orang Kaya Mamat, datanglah seorang tokoh bernama Panglima Bakar dengan disertai istrinya, Cik Wan. Ia meminta izin mendirikan perkampungan bernama Tongah, yang terletak di seberang Limau Purut. Orang Kaya Mamat memberikan izinnya. Kendati demikian, tidak berapa lama kemudian Panglima Bakar mulai memungut cukai secara paksa dari orang-orang Simalungun. Tindakan ini rupanya kurang disukai oleh Orang Kaya Mamat, sehingga pecahlah peperangan di antara kedua belah pihak. Panglima Bakar berhasil ditewaskan, namun istrinya hendak menuntut balas dan meminta bantuan datuk Boga, yang kembali memohon bala bantuan Asahan. Orang Kaya Mamat tewas dalam serangan pasukan Asahan.

415. Lihat *Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya*, halaman 30-33.
416. Lihat *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, halaman 8.

Orang Kaya Ulong tampil menggantikan ayahnya. Ia kemudian menghadap sultan Siak dan memperoleh gelar Datuk Paduka Setia Raja. Beliau digantikan oleh Orang Kaya Sendeh yang bergelar Datuk Indera Setia. Penguasa berikutnya adalah Orang Kaya Darus yang bergelar Datuk Indera Setia. Beliau berhenti setelah empat tahun memerintah. Pemerintah kolonial menetapkan putranya bernama Orang Kaya Mat Bidin; namun karena masih kanak-kanak ia diwakili oleh Orang Kaya Tobo, dan kemudian digantikan oleh Abdul Somad Gelar Tengku Busu.

h. TANJUNG KASAU

Menurut informasi dari Bapak M. Muhar Omtatok, sejarah Tanjung Kasau diawali dari kedatangan Datuk Paduka Tuan beserta dua orang putranya, Raja Mansur Shah beserta Raja Ali Kadir di kawasan tersebut yang membuka pemukiman di sana. Ketiga tokoh tersebut berasal dari Bukit Gombak. Selanjutnya, pemukiman yang mereka dirikan semakin maju dan menarik masyarakat dari pedalaman berdatangan ke sana. Meskipun demikian, mereka kemudian terusik oleh kedatangan Portugis yang ingin menguasai kawasan itu. Guna mengusir Portugis dibuatlah tangga-tangga besi yang dibakar, sehingga kampung itu lantas dikenal sebagai Tangga Bosi. Raja Mansur Shah meminta bantuan Aceh, yang mengirimkan empat orang panglima, yakni Puanglima Gugup, Puanglima Si Payung, Puanglima Mukin, dan Puanglima Maher. Mereka membantu pembangunan perkubuan di Tangga Bosi, sehingga Portugis menyingkir dari sana. Raja Mansur Shah kemudian diangkat sebagai raja Tangga Bosi. Ia berputra Raja Adim yang mendirikan kampung Tanjung Matoguk.

Pada perkembangan selanjutnya, Raja Adim, putra raja Ahmad membuka perkampungan di Tanjung Bolon. Beliau menghadap sultan Aceh, yang menganugerahkannya gelar Raja Alam Perkasa (dalam dialek setempat Rajo Alam Perkaso). Negerinya kemudian disebut Tanjung Perkaso atau Tanjung Kaso, yang selanjutnya berubah menjadi Tanjung Kasau. Demikianlah asal mula nama Tanjung Kasau. Para penguasa Tanjung Kasau berikutnya secara berturut-turut adalah Raja Bolon, Raja Sabda, Raja Said, dan Raja Matsyah (Muhammadsyah). Semasa pemerintahan Raja Matsyah, pemerintah kolonial mulai berkuasa di Tanjung Kasau, dan mengeluarkan *besluit* tertanggal 16 Oktober 1882. Berdasarkan laporannya, kontrolir Asahan bernama van Assen melaporkan bahwa Raja Matsyah mempunyai

saudara bernama Raja Djintanali. Raja Matsyah memiliki ibu orang kebanyakan, sedangkan ibu Raja Djintanali berasal dari kalangan bangsawan[417].

Raja Matsyah kemudian tergeser oleh Raja Djintanali, yang mendirikan kampung Huta Limau Kayu. Ia mengangkat sumpah di hadapan kontrolir Batubara pada tahun 1888. Penguasa Tanjung Kasau berikutnya adalah Raja Morah (Murah, 1894–1900), putra Raja Djintanali. Beliau mendirikan perkampungan baru bernama Mabar. Pada tahun 1900, Raja Morah diturunkan kedudukannya oleh Belanda dan digantikan oleh adiknya, Raja Marahudin. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putra Raja Morah yang telah dewasa, yakni Raja Pemangku Rah Etal (Raetal, 1903–1907). Raja Rah Etal meninggal mendadak, sehingga Muhammad Jasim (Mat Yassin) diangkat sebagai raja pemangku. Beliau memerintah selama 11 tahun. Pada 1916, Belanda ikut campur dalam suksesi pemerintahan di Tanjung Kasau dengan mencalonkan mantan jaksa asal Bilah bernama Abdul Somad atau Tengku Busu. Sementara itu, dari pihak Tanjung Kasau sendiri mencalonkan Raja Poso (keturunan Raja Morah) dan Raja Injar (keturunan Puanglima Si Payung dari Aceh)[418].

Tanjung Kasau pernah terlibat perselisihan dengan Tuan Bandar, salah seorang penguasa distrik Kerajaan Siantar, Simalungun, mengenai kenaikan pembayaran uang pancang hasil penanaman karet dan lada di Bah Hapal. Residen Sumatera Timur sebelumnya telah menetapkan bahwa Tuan Bandar membayar ganti rugi kepada Tanjung Kasau sebesar 200 Dollar[419]. Pada tahun 1920, Tanjung Kasau disatukan dengan negeri-negeri di kawasan Batubara lainnya membentuk Swapraja Indrapura di bawah pimpinan Tengku Busu, yang menandatangani *korte verklaring* pada 21 Oktober 1920.

B. KERAJAAN-KERAJAAN DI RIAU

I. GUNUNG SAHILAN

Kini terletak di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Konon kerajaan ini dahulunya bernama Gunung Ibul[420]. Cikal-bakal Gunung Sahilan berasal dari Kerajaan

417. Lihat http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU. Diunduh tanggal 25 November 2011.
418. Lihat http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU Diunduh tanggal 25 November 2011.
419. Lihat *Sejarah Simalungun*, halaman 25.
420. Lihat http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16# (diunduh tanggal 14 Februari 2010).

Pagarruyung atau Minangkabau. Saat itu, karena terjadi keributan para pemuka adat sepakat mencari sosok yang hendak dijadikan raja atas mereka. Pilihan jatuh pada Pagarruyung dan mereka mengirim utusan ke sana guna memohon agar salah seorang pangeran Pagarruyung dikirimkan serta dijadikan raja. Dengan demikian, terbentuklah Kerajaan Gunung Sahilan pada kurang lebih tahun 1700.

Sketsa Istana Gunung Sahilan
(Digambar ulang dari http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16#, tanggal 30 Juni 2011)

Rajanya yang pertama adalah Tengku Yang Dipertuan (Tengku) Bujang Sakti (1700–1740). Selanjutnya secara keseluruhan delapan orang raja pernah memerintah kerajaan ini. Raja Bujang Sakti digantikan secara berturut-turut oleh Tengku Elok (1740–1780), Tengku Muda (1780–1810), Tengku Hitam (1810–1850), Tengku Abdul Jalil (1850–1880), Tengku Daulat (1880–1905), Tengku Abdurrahman (1905–1930), dan Tengku Sulung (1930–1941)[421]. Raja-raja Gunung Sahilan yang bergelar Tengku atau Tengku Yang Dipertuan menurut adat tidak digantikan oleh putranya, melainkan oleh kemenakannya; terkecuali Raja Tengku Hitam yang merupakan

421. Lihat http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16#

putra Tengku Muda. Pada masa penjajahan Jepang, Gunung Sahilan dihapuskan dan dijadikan sebuah distrik saja.

II. INDERAGIRI & KERITANG

a. Kerajaan Keritang selaku cikal-bakal Kerajaan Inderagiri

Kerajaan Keritang merupakan pendahulu Inderagiri, yang berkembang kurang lebih semasa dengan Kandis. Pusat kerajaan saat itu berada di sekitar desa Keritang sekarang, yakni di tepi Sungai Gangsal, Kecamatan Reteh, Kabupaten Inderagiri Hilir. Asal usul nama Keritang ini adalah nama sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di tepi anak Sungai Gangsal. Rajanya yang pertama bernama Merlang I (Kecik Mambang), yang digantikan oleh Narasinga I dan kemudian Merlang II. Kerajaan Keritang ini runtuh karena Merlang II ditawan oleh raja Malaka. Saat berada dalam tawanan itu, Raja Merlang II dinikahkan dengan salah seorang putri Sultan Mansyur Syah (1459–1477) dari Malaka dan mempunyai seorang putra bernama Narasinga II. Karena rakyat Inderagiri tidak mempunyai raja, Datuk Patih meminta agar Narasinga II dijadikan raja Inderagiri pertama yang berkedudukan di Pekantua pada tahun 1508. Letaknya berada di tepi Sungai Inderagiri atau hilir Kuala Cenaku (kini Kabupaten Inderagiri Hilir). Oleh karena itu, lama-kelamaan kerajaan berubah namanya menjadi Inderagiri.

b. Perkembangan Kerajaan Inderagiri

Narasinga II merupakan penguasa Inderagiri pertama yang menyandang gelar sultan; yakni Iskandar Alauddin Syah (1508–1532). Sementara itu, menurut *Sulalatus Salatin*, Sutan Nara Singa memohon pada Sultan Mahmud Syah agar diizinkan mengunjungi Inderagiri, tetapi pada mulanya tak diperkenankan. Baru setelah permohonan kedua kalinya, beliau diizinkan kembali ke Inderagiri[422]. Ternyata, singgasana Inderagiri telah diduduki oleh Maharaja Isap, saudaranya. Maharaja Isap kemudian melarikan di ke Lingga dan dijadikan menantu oleh raja Lingga bernama Maharaja Megat. Setelah mertuanya meninggal, Maharaja Isap dinobatkan sebagai raja Lingga menggantikannya. Maharaja Isap kemudian menghadap ke Malaka dan memperoleh beberapa hadiah dari Sultan Mahmud Syah. Mendengar bahwa Maharaja Isap menghadap ke Malaka, murkalah Sutan Nara Singa dan mengirimkan angkatan perangnya menggempur Lingga. Istri dan anak-anak Maharaja Isap ditawan oleh

---

422. Lihat *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*, halaman 216.

Sutan Nara Singa. Beberapa waktu kemudian, giliran Sutan Nara Singa menghadap ke Malaka. Kesempatan ini dipergunakan Maharaja Isap membalaskan dendamnya dengan menyerbu Inderagiri. Kini giliran istri dan anak Sutan Nara Singa yang ditawan oleh Maharaja Isap. Perselisihan ini kemudian dapat didamaikan oleh Malaka dan kedua kerajaan hidup rukun.

Selanjutnya Inderagiri diperintah oleh sultan-sultan sebagai berikut: Usuluddin Hasan (1532–1557), Muhammad Syah atau Raja Ahmad (1557–1599) dan Jamaluddin Kramat Syah (1599–1668). Inderagiri membuka hubungan perniagaan dengan VOC pada tahun 1615, yang dilanjutkan dengan pendirian sebuah kantor perwakilan dagang. Meskipun demikian, kantor tersebut ditutup pada tahun 1622 karena kalah saingan dengan Portugis. Pada tahun 1664, Sultan Jamaluddin Kramat Syah mengirim surat ke Batavia yang menyarankan agar kantor perwakilan dagang itu dibuka kembali. Belanda menanggapi surat tersebut dengan mengutus Yoan van Wesanhage ke Inderagiri. Pada intinya, Belanda sepakat membuka kembali kantor perwakilan dagangnya, asalkan diberi hak dalam berdagang lada dan juga bea cukainya dimurahkan. Sultan Inderagiri menyetujui hal itu dan pada 28 Oktober 1664, kantor perwakilan dagang Belanda dibuka kembali di Kota Lama, ibukota Kerajaan Inderagiri. Jalaluddin Kramat Syah digantikan oleh Jamaluddin Sulaiman Syah (1664–1669), Jamaluddin Mudayat Syah (1669–1676), Usuluddin Ahmad Syah (1676–1687), Abdul Jalil Syah (1687–1700), Mansyur Syah (1700–1704), Muhammad Syah (1704–1707), Muzaffar Syah (1707–1715), dan Zainal Abidin (Raja Ali, 1715–1735).

Penyerangan terhadap loji VOC di Kuala Cenako berlangsung semasa pemerintahan Sultan Usuluddin Ahmad Syah (1676-1687). VOC menuntut agar sultan membawa ganti rugi atas rusaknya barang-barang mereka. Sebenarnya, sebagian barang-barang diselamatkan oleh sultan. Kendati demikian, VOC menuntut agar Sultan Usuluddin Ahmad Syah mengirim utusan ke Malaka guna mengajukan permintaan maaf.[423]

Intrik kerajaan terjadi bersamaan dengan pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1707-1715). Pemicunya adalah sengketa antar pribadi karena masalah wanita, tetapi akhirnya mengarah pada perebutan kekuasaan. Mangkubumi berhasil membunuh Sultan Muzaffar Syah dan mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Zainal Abidin (1715-1735). Karena khawatir putra-putra sultan Muzaffar Syah yang

423. Lihat *Tiga Tungku Sejarangan*, halaman 150-151.

dibesarkan di Pranap akan membalas dendam, Zainal Abidin berniat menghabisi nyawa mereka semua. Tetapi putra Sultan Muzaffar Syah sempat melarikan diri ke Pelelawan dan setelah itu mengungsi ke Johor, sehingga selamatlah nyawa mereka.[424]

Semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Minangkabau menyerang dari arah Barat. Awalnya serangan ini merupakan gangguan keamanan biasa, namun intensitasnya semakin menghebat, sehingga mereka berhasil menguasai deerah Kuantan, dengan Datuk Dubalang selaku pemimpinannya. Namun, angkatan perang Inderagiri di bawah pimpinan Datuk Demang Lelo, Datuk Jomangkarto, dan Datuk Lelo Diraja berhasil menghalau mereka. Sebagai penghargaan atas jasa mereka, masing-masing diangkat sebagai penguasa di Pranap, Baturijal Hulu, dan Baturijal Hilir[425].

Kerajaan Riau Lingga Johor memberi kesempatan Inderagiri–selaku salah satu daerah pengaruhnya–menjalin perniagaan dengan Belanda. Semasa pemerintahan Sultan Hasan Salahuddin (1735–1765), penguasa Inderagiri ke-16, dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang Inderagiri yang telah diletakkan dasarnya oleh Narasinga, raja Inderagiri pertama. Semasa pemerintahannya terjadi pula persengketaan dengan Kerajaan Minangkabau (Pagarruyung). Guna menghadapi orang-orang Minangkabau tersebut, Sultan Hasan Salahuddin meminta bantuan Sultan Mahmud Syah III dari Johor Riau Lingga. Oleh karena itu, diutuslah Raja Haji ke Inderagiri untuk membantu kerajaan tersebut, sehingga akhirnya pasukan Minangkabau dapat dipukul mundur. Sebagai imbalan atas bantuan itu, Inderagiri menyerahkan daerah-daerah Mandah, Igal, Pelanduku, Bantaian, Balaras, Kateman, Gaun Anak Serka, dan Reteh. Sementara itu, daerah empat suku, yakni Sungai Keritang, Sungai Akar, Sungai Belimbing, dan Rantau Sungai Deras hanya diminta menyerahkan saja hasil buminya pada Johor Riau Lingga. Sultan Hasan Salahuddin pernah pula memindahkan ibukotanya ke Japura pada tahun 1765. Sepeninggal Sultan Hasan Salahuddin yang menggantikannya adalah Sultan Sunan (Raja Kecil Besar, memerintah 1765–1784). Perpindahan terjadi lagi pada 5 Januari 1815 di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim (1784–1815), raja Inderagiri ke-18–sultan Indragiri ke-15. Sultan Ibrahim ini juga pernah berperang dengan Raja Haji di Teluk Ketapang pada tahun 1784.

424. Lihat *Tiga Tungku Sejarangan*, halaman 151.
425. Lihat *Tiga Tungku Sejarangan*, halaman 152.

Singgasana Indragiri kemudian diduduki secara berturut-turut oleh Raja Mun (1815–1827) dan Raja Umar (1827–1838; gelar Sultan Berjanggut Kramat). Dalam kurun waktu ini kerap terjadi perseteruan antar kerabat Kerajaan Inderagiri. Raja Mun berselisih dengan Sultan Said (1838–1876)–raja Inderagiri ke-21, yang dapat diselesaikan berkat mediasi Raja Abdurrahman–paman Raja Said. Selain itu, timbul pula perselisihan antara Sultan Said dengan Raja Muda Jumahat. Sultan Said meminta bantuan Belanda menengahi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, Belanda lalu mengadakan perundingan dengan mengundang pihak-pihak yang bertikai. Belanda menurunkan delegasinya yang beranggotakan Coleman (residen Belanda di Tanjung Pinang), Walberhn (kepala bea cukai di Tanjung Pinang), dan De Perez (asisten residen di Bengkulu). Sementara itu dari pihak Inderagiri hadir Raja Muda Jumahat yang didampingi Raja Muda Abdurrahman. Dengan penanda-tanganan Traktat Perdamaian dan Persahabatan (*Traktaat van Vreede en Vriendschap*) pada 27 September 1838, permusuhan ini secara resmi diakhiri. Meskipun demikian, peristiwa ini merupakan awal campur tangan Belanda dalam mencampuri roda pemerintahan Inderagiri. Sepeninggal Sultan Said, singgasana Indragiri diwarisi oleh Raja Ismail (1876–1877), yang hanya berkuasa kurang lebih setahun. Gelarnya adalah Sultan Ismail Syah.

Raja Hussein (1877–1887), putra Sultan Said, kini dinobatkan sebagai raja Inderagiri ke-23. Tidak berbeda dengan ayahnya, Sultan Hussein diwajibkan pula menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tahun 1877. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Japura ke Rengat. Sultan Hussein memberikan sebidang tanah sebagai daerah ekstratorial tempat kedudukan wakil pemerintah Belanda dan semenjak tahun 1879 ditempatkan seorang kontrolir pemerintah kolonial di Rengat.

Sultan Hussein digantikan oleh Sultan Isa (1887–1903) selaku penguasa Inderagiri ke-24. Pada zamannya, orang-orang Banjar mulai pindah ke Inderagiri Hilir karena Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar; sehingga mengakibatkan kondisi yang kacau di sana. Sultan memberikan daerah Sapat sebagai tempat kediaman bagi orang-orang Banjar, yang kini terletak di Inderagiri Hilir dan Penyemahan (Tembilahan). Mereka membuka perkampungan dan perladangan di kawasan ini. Karena tanahnya yang subur dan sangat cocok dipergunakan sebagai areal persawahan, orang-orang Banjar lainnya berdatangan menyusul rekan sekampungnya yang telah terlebih dahulu tiba serta berdiam di sana. Perkebunan besar pertama milik orang Eropa di Inderagiri

dibuka pada tahun 1893, yang diberi nama Perkebunan Gading (Gading Estate). Perkebunan ini baru menghasilkan pada tahun 1895. Perkebunan tembakau dibuka pada tahun 1894 di Air Molek. Tetapi karena tembakau yang dihasilkan jumlahnya sedikit dan kualitasnya kurang baik, perkebunan itu ditutup dan tanamannya diganti dengan kopi Liberia serta gambir.

Semasa pemerintahan Sultan Isa, Inderagiri dijadikan suatu distrik (*afdeeling*) tersendiri yang termasuk dalam Karesiden Riau. Dengan demikian, semenjak tahun 1892 ditempatkan seorang asisten residen untuk mendampingi sultan. Kebijaksanaan ini berdampak pada makin dalamnya pengaruh Belanda terhadap roda pemerintahan kerajaan. Bahkan asisten residen pernah menjadi wali bagi Sultan Mahmud yang belum dewasa. Perwalian ini berakhir pada tahun 1912 dengan dinobatkannya Sultan Mahmud (1912–1963) menjadi raja dan seperti para penguasa lainnya, ia diminta menandatangani kontrak politik berupa *korte verklaring*. Kali ini, para pembesar kerajaan lainnya tidak diikut sertakan dalam penanda-tangananannya dan selanjutnya mereka seolah-olah hanya dipandang sebagai pegawai sultan saja. Sultan Mahmud merupakan raja Indragiri terakhir sebelum berakhirnya era swapraja. Sebagian anggota masyarakat yang tergabung dalam Partai Masyumi cabang Inderagiri setelah melakukan sidang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengirim surat pada Pejabat Presiden RI di Yogyakarta tanggal 29 Mei 1950 yang isinya mengungkapkan ketidak-setujuan mereka terhadap adanya pemerintahan swapraja di Inderagiri serta menuntut pembubarannya[426].

c. Sistem pemerintahan

Pucuk pimpinan Kerajaan Inderagiri berada di tangan sultan yang juga digelari Yang Dipertuan Besar. Sultan dibantu pula oleh seorang Yang Dipertuan Muda. Demi melancarkan jalannya roda pemerintahan, baik sultan maupun Yang Dipertuan Muda dibantu oleh suatu dewan kerajaan; yang beranggotakan *datuk tumenggung*, *datuk bendahara*, panglima besar, dan laksamana. Sementara itu, pejabat-pejabat tinggi lainnya adalah *bentara luar*, *bentara dalam*, *majalela*, *panglima muda*, dan lain sebagainya. Wilayah Kerajaan Inderagiri masih dibagi lagi menjadi berbagai daerah, seperti Tiga Lorong, Pucuk Rantau, Genaku, Gangsal, Tiga Balau, dan Batin Nan Enam Suku. Kepala daerah masing-masing kawasan tersebut tunduk pada sultan Inderagiri.

426. Lihat *Tiga Tungku Sejarangan*, halaman 412.

d. Inderagiri menurut berita China

Informasi mengenai Inderagiri (disebut dīng jīyí, 丁　機宜) dapat diperoleh dari kitab Sejarah Dinasti Ming, buku 325[427]; yang menyebutkan bahwa Inderagiri adalah negeri bawahan Jawa[428] dan wilayahnya hanya dihuni sekitar 1.000 keluarga. Kerajaan ini kerap diserang oleh Johor yang terletak tak jauh darinya. Inderagiri kemudian berupaya membentuk aliansi berupa pernikahan dengan Johor. Tampaknya, peristiwa ini mengacu pada perkawinan antara Raja Merlang dengan putri sultan Malaka. Sedangkan yang dimaksud dengan Johor itu adalah Kerajaan Malaka, selaku pendahulu bagi Kerajaan Johor Riau Lingga. Selanjutnya, diriwayatkan bahwa setelah dilangsungkan ikatan pernikahan ini kondisi di Inderagiri menjadi lebih damai. Adat istiadat Inderagiri dikatakan mirip dengan Jawa; sedangkan hasil buminya mirip Johor. Saat raja keluar dari istananya, ia akan mengendarai gajah. Penduduk Inderagiri sangat menghargai kebersihan dan pemimpin mereka hanya bersedia mengonsumsi makanan yang dipersiapkannya sendiri. Minuman keras kurang disukai oleh rakyat Inderagiri dan mereka memungut pajak bagi minuman beralkohol. Para pemuka masyarakat akan menghindari alkohol dan orang yang gemar bermabuk-mabukan akan dicela oleh masyarakatnya. Mengenai tradisi perkawinan, setelah seorang pria menikah, ia akan pindah ke rumah istrinya. Dengan demikian, anak perempuan lebih disukai. Masih menurut berita di atas, rakyat Inderagiri akan membakar jenazah orang yang meninggal. Sehubungan dengan perdagangan, disebutkan bahwa rakyat Inderagiri sangat jujur dalam berdagang.

Sumber China lainnya adalah *Dongxi Yangkao* dari Dinasti Ming yang berangka tahun 1618. Di dalamnya disebutkan bahwa kegiatan perdagangan dengan orang-orang Tionghua hanya dilakukan dari atas kapal. Dengan kata lain, penduduk negeri itu akan naik ke atas kapal untuk melakukan transaksi. Kebiasaan penduduk di sini dikatakan lebih baik dibanding Johor dan harga barang juga lebih murah. Tetapi, sejak negeri ini diinvasi oleh Johor, kondisi pedagang asing tidak lagi aman; sehingga sebagian besar dari mereka tidak lagi singgah di sana.

III. KAMPAR

Menurut legenda, cikal-bakal kerajaan ini adalah dua orang utusan Adityawarman bernama Datuk Patih dan Datuk Ketemenggungan yang ditugaskan memerintah

427. lihat buku *Nusantara dalam Catatan Tionghua*, halaman 108–109.
428. Barangkali yang dimaksud adalah Majapahit.

daerah Kampar. Dengan demikian, terbentuklah pemerintahan di sana yang disebut Andiko Nan 44. Angka 44 ini berdasarkan jumlah negeri yang tergabung ke dalamnya. Ibu kotanya adalah Muaratakus yang diberi nama baru "Kota Indah Dunia." Pemerintah pusat di Muaratakus diserahkan pada Datuk Simarajo dari suku Domo. Konon berdirinya pemerintahan ini bersamaan dengan awal masa pemerintahan Adityawarman atau kurang lebih tahun 1347.

Kerajaan yang terdiri dari federasi 44 negeri ini mempunyai empat pelabuhan dagang yang penting, yakni Pangkalan Indarung di hulu Sungai Singingi, Pangkalan Sarai (Laras Kiri) di Batang Sebayang, Pangkalan Kapas (Laras Kanan) di anak Sungai Batang Sebatang, dan Pangkalan Kota Baru di sebelah hulu Batang Mahat (kini termasuk Propinsi Sumatera Barat).

Pimpinan tertinggi di Kampar dibantu oleh suatu dewan yang terdiri dari empat orang tusan berbagai suku yang ada; yakni:

- Datuk Rajo Ampuni mewakili suku Peliangtahan.
- Datuk Majolelo mewakili suku Domo.
- Datuk Malintang mewakili suku Caniago.
- Datuk Paduko Rajo mewakili suku Melayu.

Sebagaimana yang diungkapkan di atas, Kampar merupakan federasi beberapa negeri. Di setiap negeri itu masih terdapat berbagai suku. Suku-suku itu mempunyai pimpinannya sendiri-sendiri yang disebut *penghulu*. Sementara itu, pimpinan tertinggi bagi masing-masing negeri adalah seorang *penghulu pucuk* yang dipilih dari berbagai pemimpin suku (penghulu) yang ada di negeri itu berdasarkan banyaknya jumlah anggota sukunya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *penghulu* dibantu oleh seorang hulubalang, *monti* (menteri), dan *pendito* (yang mengurusi masalah keagamaan).

IV. KEPENUHAN

Kini terletak di Kecamatan Kepenuhan, Propinsi Riau. Berdirinya Kerajaan Kepenuhan diawali oleh perang saudara berlarut-larut di Kerajaan Johor sehingga rajanya bernama Raja Purba mengungsi dari kampung halamannya dengan membawa serta sebelas orang anaknya[429]. Dalam pengungsiannya itu, mereka akhirnya tiba di Perca yang masuk kawasan Rokan. Mereka lantas berniat menetap di sana dengan

429. Lihat *Sejarah dan Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, halaman 12.

sebelumnya meminta izin terlebih dahulu pada raja yang menguasai tanah tersebut. Oleh karenanya, mereka kemudian menghadap raja Tambusai, yakni Sultan Abdullah. Raja Tambusai ternyata mengizinkan mereka menetap dan membuka negeri baru di wilayah kekuasannya. Pada kesempatan itu, raja Tambusai berniat membagi mereka menjadi tujuh suku. Meskipun demikian, karena anaknya ada sebelas orang Raja Purba merasa keberatan. Ia menyatakan bahwa kesebelas orang anak itu dikasihinya tanpa terkecuali dan memohon pada Raja Tambusai agar kaumnya itu dibagi menjadi sebelas suku saja Memahami alasan Raja Purba, Sultan Abdullah lantas menyetujuinya. Setelah tiada lagi ketidaksepakatan di antara mereka, diadakanlah suatu perjanjian agar mereka beserta keturunan mereka hidup rukun.

Raja Purba beserta kaumnya meninggalkan tempat kediaman raja Tambusai dan tiba di Kualo Batang Sosah. Ia berniat mendirikan negerinya di sana, tetapi ada empat orang anak yang tak setuju. Itulah sebabnya demi menengahi perselisihan tersebut mereka kembali menghadap Raja Tambusai. Sebagai penyelesaiannya, Raja Tambusai membagi para pengikut Raja Purba menjadi dua. Tujuh suku yang sepakat dengan Raja Purba mendirikan perkampungan mereka di Kualo Batang Sosah; sedangkan empat sisanya membangun pemukiman di Pulau Antar[430].

Para pengikut Raja Purba membangun istana, rumah-rumah penduduk, dan perlengkapan lainnya di Kualo Batang Sosah. Tetapi, setelah istana selesai Raja Purba tidak bersedia menempatinya dan malahan meminta dibuatkan rakit besar yang indah serta lebih memilih berdiam di sana. Pada perkembangan selanjutnya, Raja Purba berubah sikap dan gemar memaksa siapapun wanita yang dikehendakinya agar memuaskan nafsunya. Pemuka Suku nan Tujuh merasa bahwa perbuatan Raja Purba itu sudah melampaui batas dan tak sepantasnya dilakukan oleh seorang raja. Kendati demikian, karena tak mengetahui hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada Raja Purba, mereka lantas mengundang Suku nan Empat bermusyawarah. Kedua kaum itu belum juga menyepakati hukuman yang hendak dijatuhkan sehingga mereka akhirnya menghadap Raja Tambusai.

Pertemuan ini sia-sia, karena Raja Tambusai juga tak sanggup mengusulkan apa-apa sehingga kesebelas suku ini terpaksa pulang tanpa membuahkan hasil. Di tengah perjalanan, mereka sepakat menghadap Raja Kunto, yang menyatakan bahwa perbuatan semacam itu memang tak pantas dilakukan oleh seorang raja. Ia bersedia

430. Lihat *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, halaman 17.

membantu mereka membunuh Raja Purba dengan perjanjian bahwa seisi kapal kelak akan menjadi miliknya. Setelah Raja Purba berhasil dibinasakan, mereka menghadap Raja Tambusai guna memohon seorang raja baru. Raja Tambusai ketika itu, Yang Dipertuan Tua hanya memiliki seorang saudara perempuan bernama To' Permaisuri. Beliau lantas menitahkan saudarinya itu menjadi penguasa di Kepenuhan selaku pengganti Raja Purba.

To' Permaisuri menikah dengan Raja Aru. Pernikahan ini membuahkan dua orang putra, tetapi hanya satu saja yang disebutkan namanya sebagai pengganti Raja Aru, yakni Datuk Negeri Tingga.

Rangkaian raja yang memerintah Kepenuhan berikutnya adalah: Maruhum Sultan Sulaiman, To' Maruhum Kayo, To' Maruhum Sultan Makulah Yang Dahulu, To' Sultan Makula Yang Dahulu, To' Maruhum Sultan Sulaiman, Sultan Makula, Sultan Sulaiman Yang Dipertuan Muda. Sepeninggal Sultan Sulaiman Yang Dipertuan Muda, kondisi Kepenuhan mengalami kekacauan, sehingga pemuka masyarakat bernama Datuk Bondo-Auo Sakti berniat meminta salah seorang kerabat Kerajaan Pagarruyung agar dijadikan raja di Kepenuhan[431]. Mula-mula yang diutus ke Pagaruyung adalah Suku Ampu (salah satu di antara tujuh suku di Kepenuhan)[432]. Raja Pagarruyung ketika itu memberikan salah seorang anak masih berusia belia (kurang lebih sebelas tahun) sebagai raja baru Kepenuhan. Meskipun demikian, ia merupakan seorang anak manja yang segenap keinginannya harus dipenuhi. Akibatnya Suku Ampu merasa kesal dengan ulah raja itu dan membunuhnya sewaktu mereka sedang duduk beristirahat melepas lelah. Tatkala raja meminta minum, mereka memberinya air dalam sebatang buluh bambu yang telah diruncingkan. Begitu ia meneguk airnya, pimpinan rombongan lantas mendorong buluh bambu itu ke dalam mulut raja hingga tewas. Peristiwa pembunuhan itu tak mereka sampaikan pada Datuk Bondo-Auo Sakti karena takut menerima hukuman berat. Mereka hanya melaporkan bahwa raja Pagarruyung tak mengabulkan permohonan mereka.

Beberapa waktu kemudian dikirimlah utusan kedua yang dipimpin oleh Suku Mais. Begitu menghadap raja Pagarruyung terkejutlah mereka sewaktu diberitahu bahwa permohonan mereka telah dikabulkan. Namun raja Pagarruyung tetap berbaik hati memberikan seorang raja bernama Yang Dipertuan Besar (Yang Dipertuan Muda

431. Lihat *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, halaman 26.
432. Daftar ketujuh suku itu adalah sebagai berikut: Melayu, Moniliang, Pungkut, Kandang, Kuti, Ampu, dan Mais.

dari Pagaruyung) bagi masyarakat Kepenuhan. Agar dapat melacak jejak rombongan tersebut, raja Pagarruyung menitahkan mereka menyobek kain sepanjang tujuh hasta dan menjatuhkan sobekannya setiap mereka berhenti beristirahat. Dengan demikian, akhirnya terbongkarlah perbuatan Suku Ampu[433].

Raja-raja Kepenuhan setelah Yang Dipertuan Besar (Yang Dipertuan Muda dari Pagaruyung) secara berturut-turut adalah: Datuk Maruhum Merah Dada, Tengku Muda Sahak, Montuo Muda (Mencong), dan Tengku Sultan Sulaiman[434]. Raja Tengku Sulaiman sendiri disekolahkan oleh ayahnya di luar Kepenuhan agar kelak sanggup menggantikan beliau sebagai raja[435]. Pada zaman pendudukan Jepang, raja Kepenuhan, Tengku Sutan Sulaiman, menjadi korban keganasan Jepang.

V. KUANTAN & KANDIS

Nama kerajaan ini telah disebutkan dalam *Negarakertagama*. Namun menurut cerita rakyat atau sumber lisan, ibukota kerajaan yang merupakan cikal-bakal Kerajaan Kuantan ini berada di Padang Candi, yakni suatu tempat di bagian hulu Sungai Inderagiri. Penamaan Padang Candi itu disebabkan adanya bekas-bekas candi di lokasi tersebut. Daerah kekuasaan Kerajaan Kandis ini meliputi daerah Kuantan sekarang, yakni mulai hulu Sungai Batang Kuantan, kawasan Lubuk Ambacang, sampai ke daerah Cerenti. Setelah Kandis runtuh berkembanglah Kerajaan Kuantan. Konon, pada saat itu mereka belum mempunyai raja, hingga datanglah seorang tokoh bernama Sang Sapurba yang dielu-elukan oleh rakyat di sana dan diangkat sebagai raja Kuantan pertama dengan gelar Tri Murti Tri Buana.

Negeri Kuantan terbagi atas satuan pemerintahan yang disebut negeri. Masing-masing negeri terdiri dari empat suku. Bagi masing-masing suku tersebut ada empat orang pemuka, yakni *penghulu* selaku kepala suku, *monti* (menteri), *dubalang* (hulubalang), dan pengawal agama. Dengan demikian, karena ada empat suku, maka secara keseluruhan ada 16 pemuka masyarakat atau pemimpin yang disebut *Orang Nan Enam Belas*. Setelah masuknya agama Islam, sistem pemerintahan seperti itu masih diteruskan. Selanjutnya, masih dikenal pula adanya tanah *koto*; yakni tanah yang dimiliki bersama oleh setiap suku. Karena jumlah suku ada empat, tanah tersebut juga dibagi empat.

433. Lihat *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, halaman 30-32.
434. Lihat http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja (diunduh tanggal 25 Maret 2010).
435. Lihat *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, halaman 35.

Kuantan sendiri sebenarnya merupakan konfederasi atas federasi berbagai negeri kecil; yakni:

- Federasi Empat Koto (IV Koto) di Atas; anggotanya adalah negeri-negeri Sampurago, Lubuk Ambacang, Koto Tuo, dan Sungai Pinang.
- Federasi Empat Koto (IV Koto) di Tengah, anggotanya adalah Kari, Taluk, Simandolak, Siberakun, dan Sibuaya.
- Federasi Empat Koto (IV Koto) di Hilir, beranggotakan Pangean, Baserah, Inuman, dan Cerenti.

Pada mulanya hanya terdapat tiga federasi di atas; yang belakangan bertambah lagi dengan:

- Federasi Empat Koto (IV Koto) Gunung atau Empat Koto di Mudik, beranggotakan Teluk Ingin, Toar, Gunung, dan Lubuk Tarotang
- Lubuk Jambi (Gajah Tunggal) dan Padang Tarab, yang masing-masing tidak tergabung dalam federasi manapun, tetapi tetap bergabung dengan konfederasi.

Konfederasi di Negeri Kuantan

Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 19 negeri yang bergabung dalam negeri Kuantan. Itulah sebabnya negeri Kuantan juga disebut "Rantau Nan Kurang Esa Dua Puluh." Pengertian "Kurang Esa Dua Puluh" adalah "kurang satu (esa) lagi menjadi dua puluh," yang mengacu pada jumlah 19 negeri tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat 30 negeri yang bergabung dengan Kuantan, seperti Cengar, Jake, dan lain sebagainya; tetapi sebutan lama tersebut tetap dipertahankan.

Skema
KONFEDERASI NEGERI KUANTAN KURANG ESA DUA PULUH

Federasi Empat Koto di Atas

1.Sampurago
2.Lubuk Ambacang
3.Koto Tuo

Federasi Empat Koto di Tengah

5.Kari
6.Taluk
7.Simandolak
8.Siberakun
9.Sibuaya

Federasi Empat Koto di Hilir

10.Pangean
11.Baserah
12.Inuman
13.Cerenti

Federasi Empat Koto di Gunung

14.Teluk Ingin
15.Toar
16.Gunung
17.Lubuk Tarotang

Tidak bergabung dengan federasi

18.Lubuk Jambi
19.Padang Tarab
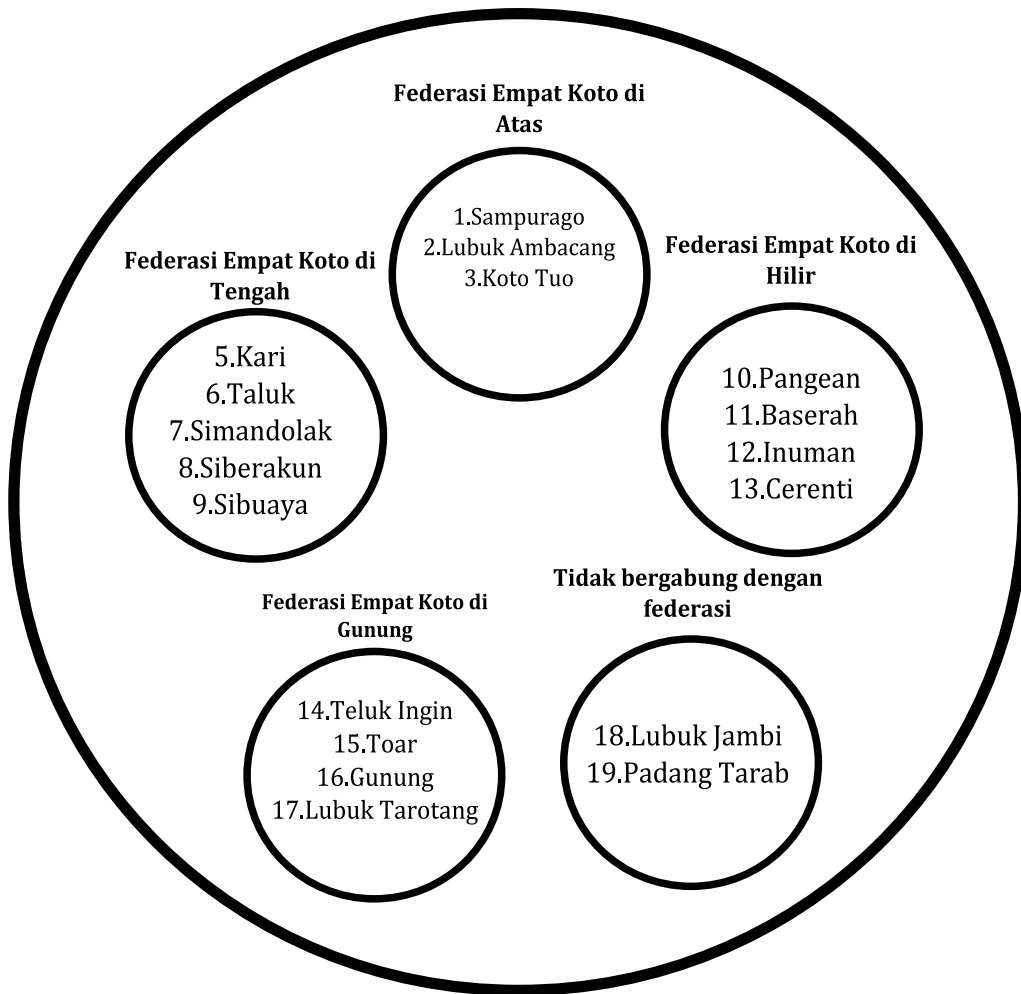
Gelar-gelar para pemuka di Kuantan adalah:

- Federasi IV Koto di Atas dipimpin oleh Orang Godang bergelar Datuk Patih; yang berkedudukan di Lubuk Ambacang.
- Federasi V Koto di Tengah dipimpin Datuk Bandaro Lelo Budi; yang berkedudukan di Kari.
- Federasi IV Koto di Hilir dipimpin oleh Datuk Ketemanggungan; yang berkedudukan di Cenrenti.
- Federasi IV Koto di Gunung dipimpin oleh Datuk Bandaro (wakil Datuk Bandaro Lelo Budi).

- Gajah Tunggal atau Lubuk Jambi dipimpin oleh Datuk Habib; yang beribu kota di Lubuk Jambi.
- Tiga Nagori di Pantai Lubuk Ramo dipimpin oleh Datuk Timbang Tail.
- Tanah Darat (Pangean) dipimpin oleh Datuk Raja Ruhum[436].

Pada perkembangan selanjutnya, Adityawarman di abad ke-13 mengirimkan lima *datuk* ke Kuantan, yakni: Datuk Paduko Rajo di Lubuk Ambacang, Datuk Habib di Lubuk Jambi, Datuk Bisai di Teluk Kuantan, Datuk Dano Sikaro di Inuman, Datuk Tano Puto di Cenrenti. Para penghulu di Kuantan memprotes, karena sistem pemerintahan di Kuantan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana diungkapkan dalam kalimat "*Bilangan sudah cukup, langgaian sudah datar.*" Akhirnya disepakati bahwa para *datuk* di atas tidak akan mengubah adat dan hanya dimaksudkan sebagai duta Minangkabau.[437]

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang berkuasa di Kuantan adalah sebagai berikut:[438]

- Datuk Dano Puto di Empat Koto di Hilir (Cenrenti).
- Datuk Dano Sukaro di Empat (IV) Koto di Hilir (Inuman)
- Datuk Muda Bisai di Empat (IV) Koto di Tengah
- Datuk Bendaharo di Empat (IV) Koto di Gunung
- Datuk Paduka Rajo di Empat (IV) Koto di Mudik (Lubuk Ambacang)
- Datuk Habib di Lima (V) Koto di Lubuk Jambi
- Datuk Rangkayo Mathair di Tiga (III) Kota di Lubuk Ramo
- Ongku Sutan Raja di Empat (IV) Koto di Hilir.

Para penguasa Kuantan di atas bergelar *orang gedang*. Mereka turut pula berpartisasi mengokohkan pengangkatan guru-guru sekolah desa. Kemajuan pendidikan mencapai Kuantan pada tahun 1918 dengan dibukanya sekolah desa di Gunung, Lubuk Ambacang, Sentajo, Ibul, Pantai Lubuk Ramo, dan Bensi. Dua tahun kemudian (1920) sekolah-sekolah desa berdiri di Pangean, Kotorajo, Cenrenti, dan Inuman.

Menurut Rusli Amran, raja seluruh Kuantan mula-mula berkedudukan di Baserah dan setelah itu dipindahkan ke Cenrenti. Ketika itu, yang berkuasa di Kuantan pada kurang lebih abad ke-19 adalah Yang Dipertuan Pandak dengan gelar Yang

---

436. Lihat *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, halaman 15-16.
437. Lihat *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, halaman 18.
438. Lihat *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, halaman 53.

Dipertuan Sakti[439]. Menjelang akhir Perang Padri yang berkuasa di Kuantan adalah Yang Dipertuan Putih[440] atau Raja Abdullah, yakni pengganti Yang Dipertuan Sakti. Pada bulan April 1838, ia mengirim surat pada pemerintah kolonial yang diwakili oleh residen Padang, Steinmetz. Dalam surat itu, Yang Dipertuan Putih bermaksud menggalang hubungan yang lebih baik dengan Belanda. Raja atas seluruh Kuantan ini meninggal pada tahun 1847 dan digantikan oleh menantunya, Yang Dipertuan Sati Muhammad Isa Sutan Mejali. Ia dikenal pula sebagai Yang Dipertuan Pendek.

Meskipun demikian, menurut sumber lainnya, Raja Abdullah mangkat pada tahun 1901 dan digantikan oleh Raja Hasan dengan gelar Yang Dipertuan Putih[441]. Sebelum kedatangan Belanda, pemerintahan dipegang oleh tiga *Orang Gedang*, yakni:

- Datuk Patih berkedudukan di Lubuk Ambacang.
- Datuk Bandaro Lelo Budi berkedudukan di Kari.
- Datuk Ketemenggungan berkedudukan di Inuman[442].

Pada tahun 1904 terjadi perubahan susunan ketata-negaraan, di mana sistem tiga *Orang Gedang* diganti menjadi *Orang Gedang berlima*:

- Datuk Paduko Raja berkedudukan di Lubuk Ambacang.
- Datuk Habib berkedudukan di Lubuk Jambi.
- Datuk Bisei berkedudukan di Teluk.
- Datuk Dano Sikaro berkedudukan di Inuman.
- Datuk Dano Puto berkedudukan di Cenrenti[443].

Kuantan ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1905 dan ditempatkan di bawah karesidenan Riouw (Riauw) en onderhoorigheden. Raja Hasan terpaksa menandatangani *korte verklaring* pada 21 Oktober 1905. Beliau mangkat pada 1907 dan digantikan oleh saudaranya, Raja Begab dengan gelar Tuanku Sutan. Para penguasa Kuantan diwajibkan menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada kurun waktu tersebut adalah Angku Sutan dari IV Koto di Hilir pada 6 Juli 1907; Badu Wahid gelar Orang Kaya Matahir dari III Koto di Lubuk Ramo pada 3 September 1908; Datuk Mudo Bisei dari V Koto di Tengah pada 13 Maret 1906; Datuk Habib

439. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 358.
440. Lihat *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, halaman 593.
441. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 358.
442. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 358.
443. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 358.

dari V Koto di Mudik (Lubuk Jambi) pada 13 Maret 1906; dan Datuk Paduko Rajo dari Lubuk Ambacang (IV Koto di Mudik) pada 13 Maret 1906. Raja Begab sendiri menandatangani *korte verklaring* pada 14 Februari 1907[444].

W.A. de Kanter yang menjabat sebagai residen Riau antara bulan Agustus 1903-1908 melaporkan dalam *Memorie van Overgave*-nya bahwa para kepala dan warga Kuantan tunduk dan patuh pada pemerintah kolonial, sehingga kontrolir tidak mengalami kesulitan menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, pemungutan pajak kepala masih mengalami perlawanan yang dilancarkan oleh persekutuan Lubuk Ambacang dan Teluk Kari. Hal ini menurut de Kanter terjadi karena pengaruh pantai barat Sumatera, yang belum mengenal pajak sebagaimana diberlakukan di Kuantan. Berdasarkan keputusan residen bulan November 1907 nomor 319 ditetapkanlah aturan mengenai pajak kepala dan pengelolaan kas daerah. Di samping itu, akan diatur pula mengenai kerja wajib. Pada masa W.J. Rahder yang menggantikan de Kanter pada 10 Juli 1908 permasalahan pajak tampaknya telah berhasil diatasi. Dalam *Memorie van Overgave*-nya, W.J. Rahder menulis bahwa situasi di Kuantan tidaklah menimbulkan kesulitan. Pemungutan pajak berjalan lancar karena penduduk menyadari arti pentingnya bagi mereka. Di samping itu, kelancaran tersebut juga didukung penempatan 60 serdadu kolonial di Taluk yang dipimpin oleh dua orang perwira. Peraturan peradilan di distrik Kuantan belum berhasil disusun saat itu, di mana hal ini dinyatakan dalam Surat Sekretaris 1 Pemerintah tertanggal 10 Februari 1908. Pemerintah kolonial akan mengambil alih tugas penyusunan itu. Rahder menyarankan pula agar peraturan peradilan di Kuantan mencontoh peraturan di *Onderafdeeling* Kampar Hulu.

Raja Begab mengkat pada 31 November 1932[445] dan digantikan oleh Raja Ismail dari IV Koto di Hilir yang menandatangani *korte verklaring* pada 11 Oktober 1938 dan dikukuhkan kedudukannya 22 Maret 1939; Paham gelar Datuk Habib Tua dari V Koto di Mudik yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 23 Januari 1932; Rasu gelar Datuk Paduko Rajo dari IV Koto di Mudik; dan Jusit gelar Datuk Raja Ruhum yang dikukuhkan kedudukannya tanggal 23 Januari 1932. Sementara itu Badu Wahid dan Datuk Mudo Bisei masih memerintah di daerahnya masing-masing.

444. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 358.
445. Lihat *Sejarah Riau*, halaman 360.

VI. KUNTO DARESSALAM

Kerajaan yang beribukota di Koto Lamo ini, kini terletak di Kecamatan Kunto Daressalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Tokoh agama Islam terkemuka di kerajaan ini adalah Syeh Burhanuddin, yang wafat pada tahun 1601. Kendati demikian, tidak ada keterangan yang dapat dipercaya tentang Syeh Burhanuddin yang bermakam di Kunto, karena makam itu baru ditemukan sekitar tahun 50-an, ketika harimau mengganas di Kunto. Sewaktu ditemukan oleh Tuan Syeh Ismail Suraugading dalam sebuah upacara tolak bala harimau di Kunto ketika itu, tidak pernah disebutkan bahwa makam itu adalah makam Syeh Burhanuddin. Menurut diagram silsilah raja-raja Kunto Daressalam yang digambar ulang oleh Bapak Junaidi Syam, semasa pemerintahan sutan Syaifuddin, raja Tambusai ke-5 datanglah raja dari Johor. Ia memiliki dua orang putra, yakni Sutan Ganjuik (Ganjut) dan Sutan Rimao (Harimau)[446]. Sutan Ganjuik berdiam di Tambusai, sedangkan saudaranya Sutan Rimao menjadi raja Kunto pertama. Raja-raja selanjutnya yang memerintah Kunto Daressalam adalah sebagai berikut: Tengku Panglima Besar Kahar Yang Dipertuan Besar I (1878–1885), Tengku Syarif Yang Dipertuan Besar II (1885–1895), Tengku Ali Kasim Yang Dipertuan Besar III (1895–1905), Tengku Ali Tandun Yang Dipertuan Besar IV (1905–1910), Tengku Ishak Yang Dipertuan Muda V (1910–1921), Tengku Ali Muhammad Tengku Panglima Besar VI (1921–1925), Tengku Kamaruddin Tengku Sultan Machdum VII (1925–1935), dan Tengku Maali Tengku Pangeran VIII (1935–1942)[447]. Raja Tengku Maali Tengku Pangeran menurut *Regeerings Almanak* menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 22 Februari 1933. Semasa penjajahan Jepang, ia ditawan dan dibunuh oleh Jepang.

VII. PELELAWAN

a. Cikal-bakal Kerajaan Pelelawan

Cikal-bakal Kerajaan Pelelawan adalah Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indra (sekitar tahun 1380–1420)[448]. Ia digantikan oleh Maharaja Pura (1420–1445), Maharaja Laka (1445–1460), Maharaja Sisya (1460–1480), Maharaja

446. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, halaman 49.
447. Lihat http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja (diunduh tanggal 25 Maret 2010). Pada website ini dicantumkan Tengku Maali Tengku Pangeran, tetapi dalam *Regeerings Almanak* disebutkan Tengku Maali Tengku Pahlawan.
448. Lihat http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=news.detail&id_news=22 (diunduh tanggal 26 Februari 2010).

Jaya (1480–1505), dan Munawar Syah (1505–1511). Kerajaan Pekantua pernah dikalahkan serta dijadikan vasal Kerajaan Malaka. Semenjak itu, nama kerajaan diganti menjadi Pekantua Kampar. Saat Raja Abdullah (1511–1515) yang menggantikan Sultan Munawar Syah naik takhta, ia juga menghadap Sultan Mahmud Syah I dari Malaka dan dinikahkan dengan saudari Sultan Mahmud Syah I. Tetapi ketika Malaka diduduki oleh Portugis pada tahun 1511 dan Sultan Mahmud Syah melarikan diri serta mendirikan Kerajaan Johor Riau Lingga, Sultan Abdullah tidak bersedia lagi menghadap. Karena itu, Sultan Mahmud Syah bangkit amarahnya dan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Panglima Seri Amara Bangsa guna menghukum Raja Abdullah. Sultan Abdullah meminta bantuan Portugis dan dapat memukul mundur pasukan Sultan Mahmud Syah. Setelah itu, Portugis mengirim utusan mengundang Sultan Abdullah ke Malaka. Sultan Mahmud Syah melayangkan tuduhan bahwa Portugis hendak menyerahkan Malaka pada Abdullah. Tuduhan ini barangkali merupakan salah satu penyebab dibunuhnya Sultan Abdullah di depan umum; kendati disangkal oleh Sultan Mahmud Syah sendiri.

Sepeninggal Sultan Abdullah terjadi kekosongan kekuasaan di Pekantua Kampar, sehingga sewaktu Sultan Mahmud Syah tiba di sana, ia langsung dinobatkan sebagai raja negeri tersebut (1526–1528). Ia digantikan oleh putranya, buah pernikahan dengan Tun Fatimah, bernama Raja Ali. Setelah dinobatkan sebagai raja Pekantua Kampar, ia bergelar Sultan Alauddin Riayat Syah II (1528–1530). Baru dua tahun memerintah, Raja Ali meninggalkan Pekantua Kampar menuju ke Semenanjung Melayu dan mendirikan Kerajaan Kuala Johor. Sebelum meninggalkan Pekanbatu, ibukota Kerajaan Pekantua Kampar, Raja Ali menyerahkan pemerintahan pada para mangkubumi. Dengan demikian, para mangkubumi yang memerintah Pekantua Kampar secara berturut-turut setelah itu adalah Mangkubumi Tun Perkasa (1530–1551), Tun Hitam (1551–1575), dan Tun Megat (1575–1590). Semasa pemerintahan Tun Megat para pemuka masyarakat seperti Batin Muncak Rantau dari Nilo dan Patuh, Patih Jambuano dari Delik dan Dayun, serta Rajo Bilang Bungsu dari Tambak Segati menghendaki agar Kampar memiliki raja lagi. Karenanya, tiga orang pembesar itu lantas dikirim untuk menghadap Sultan Johor Riau Lingga dan menyampaikan aspirasi mereka. Sultan Johor Riau Lingga mengirim seorang pembesarnya bernama Abdurrahman untuk menjadi raja di sana. Setelah diangkat sebagai raja Kampar, Abdurrahman digelari Maharaja Dinda I (1590–1630) dan berkedudukan di Pekantua.

b. Perkembangan Kerajaan Pelelawan

Maharaja Lela I atau Maharaja Lela Utama (1675–1686) memindahkan ibukota Kampar ke Tanjung Negeri dan berupaya memajukan perekonomian rakyat. Oleh karenanya, kerajaan ini lantas diganti namanya menjadi Tanjung Negeri. Ia membina pula hubungan diplomatik dengan Kuantan dan Siak. Maharaja Lela Utama digantikan secara berturut-turut oleh Maharaja Wangsa Jaya (1686–1691) dan Maharaja Muda Lela (1691–1725). Pada masa pemerintahan Maharaja Wangsa Jaya berjangkit wabah penyakit, sehingga timbul gagasan lagi memindahkan ibukota Kerajaan Tanjung Negeri. Tetapi hingga Maharaja Muda Lela berkuasa, rencana ini belum juga dilaksanakan

Baru semasa pemerintahan raja berikutnya, Maharaja Dinda II (1725-1750)[449], ibukota dipindahkan ke Pelelawan dan selanjutnya kerajaan ikut berganti namanya menjadi Pelelawan. Semasa pemerintahan Maharaja Lela Bungsu (1750–1775)[450] perdagangan dipusatkan di daerah Kuantan dan XIII Koto Kampar, hingga kondisi Selat Malaka menjadi aman kembali. Perdagangan dengan Kerajaan Johor Riau Lingga menjadi bertambah pesat.

Karena terjadi kekacauan dan pergantian dinasti penguasa di Johor Riau Lingga, Pelelawan tidak bersedia mengakui lagi kerajaan tersebut sebagai tuannya. Siak yang dipimpin oleh sultan-sultan keturunan Johor Riau Lingga memanfaatkan kesempatan ini dan memaksa Pelelawan mengakui kekuasaan Siak. Tetapi Maharaja Lela II (1775–1798) yang menggantikan Maharaja Lela Bungsu dengan tegas menolaknya. Akibatnya, pecah peperangan dengan Siak yang saat itu dipimpin oleh Raja Said; di mana Siak di bawah kepemimpinannya sedang berambisi melakukan perluasan wilayah besar-besaran. Serangan pertama berhasil dipatahkan oleh Pelelawan. Kendati demikian, serangan kedua di bawah pimpinan Sayid Abdurrahman dan Sayid Ahmad berhasil mengalahkan angkatan perang Maharaja Lela II. Sejak saat itu, pemerintahan Pelelawan dipegang oleh Sayid Abdurrahman (1798–1822) dan keturunannya. Meskipun demikian, kedudukan mereka tetaplah sebagai wakil raja Siak.

Raja-raja Pelelawan berikutnya hingga yang terakhir adalah: Syarif Hasyim (1822–1828), Syarif Ismail (1828–1844), Syarif Hamid (1844–1846), Syarif Jaafar (1866–1872), Syarif Abubakar (1872–1886), Tengku Sontol Said Ali (1886–1892),

449. Menurut sumber **melayuonline.com**.

450. Menurut **melayuonline.com** memerintah dari 1750–1775; sedangkan menurut buku *Sejarah Daerah Riau*, halaman 106 memerintah dari 1750–1780.

Syarif Hasyim II (1892–1930), Tengku Said Osman (pemangku sultan, memerintah 1930–1941), dan Syarif Harun (1941–1946). Pada 4 Februari 1879, Syarif Abubakar menandatangani kontrak politik dengan Belanda, yang menandai masuknya negeri tersebut ke dalam payung kekuasaan Hindia Belanda. Sultan Tengku Sontol Said Ali pernah membangun Istana Sayap yang baru selesai pada masa pemerintahan penggantinya, Syarif Hasyim II.

VIII. RAMBAH

Kerajaan Rambah merupakan salah satu kerajaan yang berada di Rokan Hulu dan beribukota di Pasir Pengarayan. Kini terletak di Kecamatan Rambah, Propinsi Riau. Cikal-bakal raja Rambah adalah Muhammad Zainal (Sultan Jenal) dari Tambusai[451]. Beliau menikah dengan Intan Raja Dalam yang berasal dari Kepenuhan. Putra beliau adalah Abdul Kayo Yang Dipertuan Jumadil Alam beserta Gapar Alam Yang Dipertuan Jumadil Alam (raja Rambah pertama). Mereka masing-masing menjadi raja di Tambusai dan Rambah. Gapar Alam menikah dengan Kasum Putri dan berputra Mangku Alam Yang Dipertuan Jumadil Alam selaku raja Rambah kedua. Mangku Alam menikah dengan Bulan Siti Godang, di mana pernikahan mereka dikaruniai seorang putra bernama Tunggal Kuning Yang Dipotuan Bosa. Beliau kemudian menjadi raja Rambah ketiga.

Tunggul Kuning menikah dengan Godang, Maimunah Rajo Porompuan, dan Siti Jairji (?) Rajo Siti (asal Rokan IV Koto). Pernikahan dengan Godang dikaruniai putra bernama Tongku Sutan Zainal Yang Dipotuan Bosa IV. Ia kelak diangkat sebagai raja keempat. Setelah meninggal, beliau dianugerahi gelar anumerta Muruhum Bosa Boatok Papan. Putranya dengan Majonun Siti Dualam bernama Sulong Bahar Sutan Zainal Yang Dipotuan Bosa V menjadi raja berikutnya. Sulong Bahar menikahi Lungguk Paduko Syah Alam dan berputra Abdul Wahab beserta Ali Damhur. Abdul Wahab diangkat sebagai Yang Dipotuan Bosa VI dan setelah mangkat dianugerahi gelar anumerta Muruhum Kayo. Ia digantikan oleh saudaranya Ali Damhur yang bergelar Yang Dipotuan Bosa VII. Gelar anumerta beliau adalah Muruhum Saleh. Dari istrinya yang lain, Sulong Bahar memperoleh putra bernama Sat Lawi yang kelak menjadi Yang Dipotuan Bosa VIII. Gelar anumertanya adalah Muruhum Panjang Ganjuik.

Sat Lawi menikah dengan Sende Rajo Dalam dari Kepenuhan dan memiliki seorang putri bernama Zainab Siti Dualam. Ia menikah dengan Umar Sutan Jalil dari

451. Sumber urutan raja-raja Rambah berasal dari diagram yang disusun oleh Bapak Junaidi Syam.

Kuno. Putra mereka adalah Ahmad Kosaksi yang menjadi Yang Dipotuan Jumadil alam IX. Sementara itu, Ali Damhur menikah dengan Katung Rojo Porompuan dan menurunkan seorang putri bernama Dondom Poromai yang menikah dengan Yahya Yang Dipotuan Muda. Putra mereka adalah Mahmud Syarif Yang Dipotuan Bosa X. Menurut catatan yang tertera pada *Regeerings Almanak*, di awal abad ke-20 Rambah diperintah oleh para penghulu (*hoofden*) yang terdiri dari:

- Yang Dipertuan Besar Muhammad Syarif
- Yang Dipertuan Sakti Adam
- Yang Dipertuan Jumadilalam Muhammad Kasasi
- Yang Dipertuan Muda Jaya

Sementara itu, kepala kerapatan Rambah dijabat oleh Muhammad Nur (Sutan Mahmud). Oleh karena itu, Yang Dipertuan Besar Muhammad Syarif dapat disamakan dengan Mahmud Syarif. Sedangkan Ahmad Kosaksi sama dengan Muhammad Kasasi. Yang Dipertuan Besar Muhammad Syarif merupakan raja Rambah yang memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial tanggal 22 Januari 1906. Ahmad Kosaksi menikah dengan Maliyah, Jenggun, Jaharo (?), dan Agun. Pernikahannya dengan Maliyah membuahkan seorang putri bernama Mariam Siti Omeh. Putri mereka ini menikah dengan Mayang Tengku Sutan Mahmud Narasyid Perkasa Alam Syah. Putra mareka adalah T.H.M Saleh yang menjadi raja Rambah berikutnya dengan gelar Yang Dipotuan Bosa XI (Yang Dipertuan Besar Saleh). Beliau menerima pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda pada 26 November 1929.

IX. RIAU LINGGA

a. Cikal-bakal Kerajaan Riau Lingga

Kerajaan Riau Lingga sebenarnya adalah pecahan Kerajaan Johor Riau Lingga. Negeri ini boleh pula dianggap penerus Kesultanan Malaka, yang jatuh ke tangan Portugis pada 24 Agustus 1511. Ketika sultan Malaka yang bernama Mahmud Syah I dikalahkan Portugis, ia melarikan diri ke Bintan. Dua tahun setelah Malaka jatuh, sultan berhasil menghimpun pasukannya kembali, sehingga menjadi suatu kekuatan yang patut diperhitungkan di Selat Malaka. Negeri-negeri yang dahulunya tunduk pada Malaka, seperti Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Singapura, Bintan, Lingga, Inderagiri, Kampar, Siak, dan Rokan, mengirimkan pernyataan takluk pada Sultan Mahmud Syah I yang kini berkedudukan di Bintan. Demi melindungi negerinya dari

ancaman Portugis, Mahmud Syah I memperkuat armada lautnya dan menyerahkannya di bawah pimpinan Laksamana Hang Nadin. Setelah merasa kedudukannya cukup kuat, sultan beberapa kali melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka, yakni pada tahun 1515, 1516, 1519, dan 1523. Pada tahun 1515 dilakukan blokade ekonomi terhadap Portugis yang bercokol di Malaka. Kapal-kapal perang Mahmud Syah I menghalang-halangi kapal dagang yang hendak membawa barang dagangan ke Malaka. Sedangkan serangan-serangan berikutnya langsung ditujukan ke Malaka di bawah pimpinan Laksamana Hang Nadin, Sang Naya, Paduka Tuan, dan Sultan Abdul Jalil dari Inderagiri. Meskipun demikian, mereka gagal menaklukkan Malaka.

Pada tahun 1526, giliran Portugis melancarkan serangan balasan ke Bintan yang berada di bawah kekuasaan Riau Lingga. Sultan telah memperhitungkan hal ini dan meninggalkan Bintan, sehingga dengan mudah Bintan dikuasai oleh Portugis. Setelah kejatuhan Bintan, sultan memindahkan kedudukannya ke Pekantua. Pada saat itu, datanglah raja dari Haru guna menyatakan kesetiaannya pada sultan. Selanjutnya, Mahmud Syah I mengajak raja-raja negeri taklukannya bersatu padu melawan Portugis. Selama kepindahannya ke Pekantua itu, salah seorang tokoh utama Kerajaan Riau Lingga, Bendahara Paduka Tua mangkat dan demikian pula dengan istri sultan. Sepanjang pemerintahannya, sultan terkenal sebagai penguasa yang dengan gigih memusuhi Portugis.

b. Perkembangan Kerajaan Johor Riau Lingga

Pada tahun 1528, Sultan Mahmud Syah I mangkat. Ia mempunyai dua orang putra, yang masing-masing bernama Muzaffar Syah (kelak menjadi sultan Perak) dan Tengku Alauddin Riayat Syah. Putranya yang bernama Alauddin Riayat Syah ini menjadi sultan di Johor dan dikenal dengan gelarnya Alauddin Riayat Syah II (1528–1564). Dengan demikian, Kerajaan Johor Riau Lingga dapat dikatakan berawal darinya. Seperti ayahnya, ia juga berniat mengusir Portugis dari Malaka dan banyak pula peperangan yang telah dilancarkannya. Pada tahun 1533, orang-orang Melayu di Malaka berniat melakukan pemberontakan terhadap Portugis, tetapi rencana ini bocor dan gagal. Sang Naya, salah seorang panglima Riau Lingga, yang menjadi dalang bagi pemberontakan ini ditawan dan dihabisi nyawanya secara tragis, yakni dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Sultan berniat membalas dendam kematian tersebut dengan pura-pura mengajak berdamai pihak Portugis. Gubenur Portugis di Malaka, Estavo da Gama yang baru menduduki jabatannya, termakan oleh tipuan ini

dan mengirimkan utusannya kepada sultan. Utusan itu ditangkap dan dijatuhkan dari atas pohon yang tinggi, sehingga tewas seperti Sang Naya. Akibatnya, pada tahun 1535 berkobar kembali peperangan antara Riau Lingga dengan Portugis. Namun setahun kemudian diadakan perjanjian perdamaian yang dapat bertahan selama beberapa tahun antara keduanya agar tidak jatuh lebih banyak korban jiwa.

Perdamaian berakhir pada tahun 1551, ketika dilancarkan serangan gabungan oleh Riau Lingga, Perak, Pahang, beserta Jepara terhadap Malaka dengan kekuatan 5.000 pasukan dan 200 kapal. Mereka berhasil membakar kapal-kapal Portugis, merampas perbekalan, dan melakukan blokade selama tiga bulan; sehingga tak satupun barang dapat keluar ataupun masuk Malaka. Penyerangan ini baru diakhiri setelah terdengar berita bahwa Portugis akan menyerang Perak, Pahang, dan Johor. Pasukan gabungan kemudian meninggalkan tempat itu. Korban jiwa di pihak pasukan gabungan ini berjumlah 800 orang, yang sebagian besar tewas karena dihujani tembakan dari atas benteng Portugis.

Di tengah-tengah ketegangan hubungannya dengan Portugis, Aceh menyerang kedudukan Kerajaan Melayu Riau Lingga di Johor pada tahun 1564, karena Johor pernah membantu Kerajaan Aru mengusir Aceh. Sebelumnya, selama kurang lebih 24 tahun, Aru pernah tunduk pada kekuasaan Riau Lingga. Pada tahun 1568, Aceh menyerang Malaka. Karena itu, kini Portugis meminta bantuan Riau Lingga untuk menghadapi Aceh. Ternyata bantuan itu datang terlambat dan bocor ke telinga pihak Aceh. Akibatnya, Aceh kembali menyerang Johor pada tahun 1570.

Riau Lingga mulai menjalin hubungan persahabatan dengan Aceh pada tahun 1574 dan bersatu padu mengusir Portugis. Persahabatan itu diperkuat dengan pernikahan antara Sultan Ali Jalla Abdul Jalil II (1570/71–1597) dengan putri Sultan Mansyur Syah dari Aceh pada 1579. Namun Aceh berambisi menjadikan Riau Lingga sebagai wilayah taklukannya, sehingga hubungan antara keduanya menjadi renggang kembali. Perang pecah antara kedua kerajaan pada tahun 1582, di mana Riau Lingga meminta bantuan Portugis. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa tiada musuh ataupun sahabat yang permanen. Portugis dan Johor Riau Ringga yang sebelumnya bermusuhan dapat saja menjalin persahabatan; sementara itu, Aceh dan Johor Riau Lingga yang sebelumya bersahabat dapat berbalik menjadi musuh satu sama lain.Ini merupakan sesuatu yang wajar dalam peperangan.

Tidak beberapa lama setelah itu, muncul pihak ketiga yang kelak menjadi pemain utama di Kepulauan Nusantara, yakni Belanda. Mereka tiba di Kepulauan

Riau pada tahun 1602. Karena mendapati bahwa Belanda adalah saingan Portugis, Sultan menjalin persekutuan dengan Belanda dan menandatangani perjanjian pada 17 Mei 1606, yang isinya berupa kesepakatan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan rencana penaklukan Malaka.

Karena serangan Aceh pada tahun 1613, sultan memindahkan kedudukannya ke Bintan. Aceh yang saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda sedang menanjak pamornya dan berambisi menaklukkan kawasan sekitarnya. Berkali-kali Aceh melakukan berbagai ekspedisi militer; seperti ke Pahang (1617), Kedah (1618), dan Bintan (1623). Sesudah serangan Aceh terhadap Bintan ini, sultan pindah ke Lingga. Pada tahun 1629, Aceh melancarkan serangan besar-besaran terhadap Malaka. Hampir saja mereka mencapai kemenangan, bila Portugis tidak mendapatkan bala bantuan. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, Aceh mengalami kemunduran dam surut pamornya; sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi. Oleh karena itu, sultan kini dapat memusatkan perhatiannya pada Portugis.

Perjanjian persahabatan dengan Belanda yang telah disepakati pada tahun 1606 diperbaharui kembali pada tahun 1639. Setahun kemudian, armada gabungan Belanda dan Johor Riau Lingga mengepung Malaka dengan tujuan menghalau Portugis dari sana. Kerajaan sendiri menurunkan 40 kapal dengan 1.500 serdadu yang dipimpin oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Setelah bertempur selama setahun lebih, pada 1641, Portugis berhasil diusir dari Malaka. Kini Kerajaan Riau Linga dapat menjadi pemegang hagemoni di Selat Malaka.

Sebelumnya, setelah kekalahan Aceh, ibu kota Johor Riau Lingga pernah dipindahkan ke Johor, namun kini Sultan Ibrahim (1677–1685) memindahkannya lagi ke Bintan pada tahun 1678. Peristiwa penting lain yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim adalah serangan terhadap Jambi, yang telah bermusuhan dengan Johor Riau Lingga selama 20 tahun. Penyebab pertikaian dengan Jambi adalah batalnya pernikahan calon raja Johor Riau Lingga dengan putri Jambi[452]. Laksamana Tun Abdul Jamil memimpin 300 kapal perang menyerang dan mengalahkan Jambi pada tahun 1679. Berkat keberhasilannya ini, Tun Abdul Jamil dianugerahi gelar Paduka Raja. Meskipun demikian, pada tahun 1681 Laksamana Tun Abdul Jamil kembali memimpin 100 kapal perang yang mengangkut 2.000 prajurit membantu Jambi mengalahkan

452. Lihat *Tanjung pinang: Land of Malay History*, halaman 56.

Palembang. Karenanya, boleh disimpulkan bahwa permusuhan antara Johor Riau Lingga dan Jambi telah berakhir. Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1685 yang kemungkinan karena diracun. Gelar anumerta beliau adalah Marhum Bongsu.

Sultan Mahmud Syah II (1685–1699) yang menggantikan Sultan Ibrahim ketika itu usianya baru 10 tahun. Karena itu, ibunya yang merupakan putri Laksamana Tun Abdul Jamil menjadi walinya. Dengan demikian, kekuasaan Tun Abdul Jamil semakin besar saja. Dirinya menjadi laksamana, putrinya menjadi wali sultan, sedangkan cucunya sendiri adalah sultan. Semasa awal pemerintahan Mahumud Syah II diadakan perjanjian persahabatan yang mengandung 8 pasal dengan Belanda pada 6 April 1685. Tujuan utamanya adalah menjadikan VOC sebagai mitra dagang mereka. Berdasarkan pemikiran Tun Abdul Jamil, VOC selaku saingan dagang Johor Riau Lingga yang kuat hendaknya tidak dilawan dengan kekerasan, melainkan dijadikan sahabat. Isi perjanjian di atas memang agak merugikan Johor Riau Lingga. Hal-hal diatur di dalamnya antara lain: monopoli beberapa komdoitas di sepanjang Sungai Siak, seperti timah, emas, pakaian, dan lain sebagainya; Johor Riau Lingga tidak diperkenankan memperdagangkan garam; bangsa asing selain Belanda tidak boleh menjual bahan pakaian; serta kesepakatan tidak saling menganggu antara kedua belah pihak dalam hal pelayaran[453].

Laksamana Tun Abdul Jamil berhasil ditumbangkan dari kedudukannya pada tahun 1688 dan kekuasaan atas pemerintahan diambil alih oleh Bendara Seri Maharaja Tun Abdul Majid yang didukung oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Bersamaan dengan itu, Mahmud Syah II dibawa ke Johor dan selanjutnya berdiam di Kota Tinggi. Perjanjian dengan Belanda diperbaharui lagi pada 9 April 1689, yang kali ini memuat 10 pasal. Salah satu isinya adalah member kebebasan pada Belanda berdagang di seantero wilayah Kesultanan Johor Riau Lingga. Sultan Mahmud Syah mangkat pada tahun 1699 dan tidak mempunyai keturunan. Karena itu, *bendahara* kerajaan bernama Datuk Bendahara Tan Habib mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelar Abdul Jalil IV (1699–1720). Dengan demikian, singgasana kesultanan beralih dari keluarga raja-raja Melayu pada keturunan *bendahara*. Terjadinya pergantian dinasti ini memicu ketidak-puasan berbagai pihak, termasuk daerah-daerah taklukan Riau Lingga. Banyak yang menganggap bahwa pengangkatan bendahara sebagai sultan tersebut tidak sah. Negeri-negeri vasal, seperti Siak, Kampar, Inderagiri, Kedah, Kelantan, Trengganu, dan

453. Lihat *Tanjungpinang: Land of Malay History*, halaman 56.

Pattani memisahkan diri. Salah seorang putra Sultan Mahmud Syah II yang bernama Raja Kecil sempat melarikan diri ke Minangkabau. Setelah dewasa, ia menyerang Johor pada tahun 1711 dan berhasil merebut kekuasaan di sana. Ia naik takhta dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah (1718–1722). Sultan Abdul Jalil IV melarikan diri ke Pahang, tetapi dibunuh oleh orang suruhan Raja Kecil.

Sulaiman, putra Abdul Jalil IV yang kehilangan takhtanya meminta bantuan pada lima bersaudara putra Opu Daeng Rilekke dari Luwu; yakni Opu Daeng Menambun (kelak menjadi raja pertama Kerajaan Mempawah–lihat bagian mengenai Kerajaan Mempawah), Opu Daeng Perani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kemasi. Mereka sepakat membantu merebut kembali singgasana dari kekuasaan Raja Kecil. Sulaiman dengan dibantu pasukan Bugis pimpinan lima bersaudara dari Kerajaan Luwu berperang melawan Raja Kecil di Pengujan, Pulau Bayan, Pulau Penyengat, dan Tanjung Bemban. Kemenangan terjadi silih berganti antara kedua pihak. Demi menghindarkan lebih banyak korban jiwa, Raja Kecil melarikan diri ke Bengkalis. Sulaiman naik takhta Kerajaan Johor Riau Lingga dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah (1722–1760). Atas jasanya membantu sultan merebut takhtanya, Opu Daeng Marewa diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau I. Sejak itu, orang-orang Bugis memegang peranan penting dalam percaturan politik Kerajaan Johor Riau Lingga.

Tatkala Sultan Sulaiman mangkat pada bulan Agustus 1760, putra mahkotanya Abdul Jalil (Raja Dibaruh) sedang berada di Selangor guna menjemput Yang Dipertuan Muda Riau Daeng Kamboja. Tetapi beliau jatuh sakit dan tak dapat pulang ke kampung halamannya, padahal menurut tradisi saat ayahnya mangkat ia seharusnya berada di ibukota agar dapat segera dinobatkan sebagai sultan baru. Akhirnya, Abdul Jalil mangkat pada tahun 1761 dan jenazahnya dibawa ke Riau dengan upacara kebesaran. Terdapat desas-desus bahwa beliau diracun, namun tak ada bukti tentang itu. Sebagai wujud penghormatan terhadap dirinya, Abdul Jalil tetap dianggap sebagai sultan kendati belum dinobatkan secara resmi. Gelarnya adalah Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah (1760–1761). Putra Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah bernama Raja Ahmad diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Ahmad Riayat Syah (1761). Usianya baru 9 tahun sehingga Daeng Kamboja diangkat sebagai walinya. Tidak lama kemudian, sultan yang masih muda belia itu mangkat. Timbul kembali kecurigaan bahwa kematian beliau tidak wajar.

Raja Johor Riau Lingga berikutnya adalah Sultan Mahmud atau Mahmud Syah III (1761–1812), yang sekelumit riwayat pemerintahannya diabadikan dalam *Syair Sultan Mahmud*. Beliau merupakan saudara Sultan Ahmad Riayat Syah. Pada zamannya mulai terjadi perselisihan dengan Belanda. Raja Haji, Yang Dipertuan Muda Riau ke-4, menggempur pertahanan Belanda di Malaka pada bulan Februari 1784 karena Belanda melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Ia gugur di Teluk Ketapang setelah berperang dengan gigih melawan Belanda. Sementara itu, armada Bugis (yang disebut bajak laut oleh Belanda) juga kerap menganggu pelayaran kapal-kapal Belanda. Pihak Belanda menganggap bahwa Kerajaan Johor Riau Lingga menjadi ancaman baginya dan melancarkan serangan pada 30 Oktober 1784 di bawah pimpinan Laksamana Yacob Pieter van Bram. Belanda memperoleh kemenangan dan Kerajaan Johor Riau Lingga terpaksa menandatangani perjanjian pada 10 November 1784 yang isinya berupa pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas Kesultanan Johor Riau Lingga. Belanda juga diberi hak melakukan monopoli perdagangan di sana. Semenjak saat itu, Belanda mulai ikut campur dalam pemerintahan kesultanan tersebut. Orang-orang Bugis banyak yang bersikap anti-Belanda, sehingga mereka terpaksa menyingkir ke luar daerahnya, termasuk Raja Ali, Yang Dipertuan Muda Riau ke-5, yang menyingkir ke Sukadana, Kalimantan.

c. Pecahnya kerajaan menjadi Riau Lingga dan Johor

Setelah berlangsungnya perjanjian antara Johor Riau Lingga dengan VOC pada 10 November 1784, wilayah kerajaan menjadi milik Belanda; yang selanjutnya dikembalikan lagi pada sultan sebagai daerah pinjaman. Jadi sultan hanya menjadi penyewa suatu kerajaan yang sebelumnya adalah miliknya. Sebagai pengganti Raja Ali yang menyingkir ke Sukadana, Sultan Mahmud Syah III (Sultan Mahmud) mengangkat Tengku Muda selaku Yang Dipertuan Muda Riau yang baru. Berbeda dengan Raja Ali yang keturunan Bugis, Tengku Muda berasal dari kalangan Melayu. Raja Ali kembali ke Riau Lingga Johor menjelang akhir masa pemerintahan Sultan Mahmud. Tetapi sultan kurang menyukai hal ini, sehingga ia pindah ke Lingga sampai wafatnya.

Saat Sultan Mahmud Syah III mangkat, terjadi perpecahan mengenai siapa yang layak jadi penggantinya. Para pembesar istana mendukung agar putra tertua sultan bernama Tengku Hussein (Tengku Long) yang menjadi penggantinya sesuai dengan adat Melayu. Faksi ini didukung oleh Hamidah (janda Sultan Mahmud) dan Bendahara Tun Ali Pahang. Sementara itu, faksi lainnya menginginkan Tengku

Abdul Rahman sebagai sultan, yang didukung oleh Yang Dipertuan Muda Riau VI (Raja Ja'far). Alasannya, Tengku Abdul Rahman adalah satu-satunya putra sultan yang ada bersama sultan saat ia mangkat; sedangkan Tengku Hussein sedang berada di Pahang. Karena kekuasaan Raja Ja'far lebih besar akhirnya yang diangkat sebagai raja baru adalah Tengku Abdul Rahman. Penobatan ini makin memperkuat kedudukan para keturunan Bugis, apalagi Tengku Abdul Rahman adalah penguasa yang lemah. Sebenarnya, Tengku Abdul Rahman kurang tertarik menjadi raja. Ia lebih suka menjadi alim ulama seperti pesan ayahnya. Selama menjadi raja, Tengku Abdul Rahman berada di bawah pengawasan orang-orang kepercayaan Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far, seperti Engku Sayid Muhammad Zain al Kudsi, Suliwatang Ibrahim, Syahbandar Muhammad, Encik Abdul Manan, serta para pemuka keturunan Bugis lainnya.

Tengku Hussein kurang menyukai sikap kalangan Bugis yang kerap mencampuri urusan pemerintahan. Ia berupaya menggalang dukungan Ratu Hamidah, yang disegani pula oleh kalangan Bugis. Dengan bantuan Tun Ali Pahang, dikirimlah pasukan menyerang Lingga demi mendudukkan Tengku Hussein di atas takhta kerajaan. Namun, Inggris menegur Bendahara Tun Ali Pahang dengan menyatakan bahwa tindakannya yang ikut campur dalam urusan perebutan takhta tersebut tak dapat dibenarkan. Akibatnya, Tun Ali Pahang menarik kembali pasukannya dan tidak jadi menyerang Lingga.

Akhirnya, Inggris melibatkan diri juga dalam perselisihan ini, karena ingin mendirikan koloni di Singapura. Padahal Singapura merupakan wilayah Kerajaan Johor Riau Lingga yang secara hukum berada di bawah kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, Inggris berniat mengangkat Tengku Hussein sebagai sultan Kerajan Johor Riau Lingga; dengan harapan agar ia bersedia memberikan izin pendirian koloni di Singapura kepada Inggris. Niat Inggris mengangkat Tengku Hussein sebagai sultan ini lalu dirundingkan dengan Tumenggung Abdul Rahman, penguasa Singapura. Kemudian, dikirimlah Raja Embong menjemput Tengku Hussein ke Singapura. Untungnya rencana ini tidak bocor ke telinga Belanda, karena bila itu yang terjadi tentu saja Belanda akan menangkap Tengku Hussein terlebih dahulu. Akhirnya, begitu tiba di Singapura, Tengku Hussein dinobatkan sebagai raja dengan gelar Hussein Syah. Dengan demikian, kini di Kesultanan Johor Riau Lingga terdapat dua orang sultan; yakni Sultan Abdul Rahman yang berkedudukan di Lingga dan didukung oleh Belanda dan Sultan Hussein Syah yang berkedudukan di Singapura atas dukungan Ingris.

Dukungan Inggris bagi Tengku Hussein tidaklah cuma-cuma, karena kelak ia harus menandatangani perjanjian dengan pihak Inggris yang diwakili Raffles pada 6 Februari 1819, di mana sultan mengizinkan Inggris membuka koloni perdagangan di Singapura. Sebagai gantinya sultan beserta tumenggung masing-masing menerima uang sejumlah $ 5.000 dan $ 3.000 per tahun. Belanda memprotes tindakan pembangunan koloni di Singapura oleh Inggris itu, yang oleh Belanda dianggap sebagai pelanggaran terhadap daerah kekuasaannya. Tetapi Raffles menganggap angin lalu keberatan Belanda itu, bahkan Singapura makin berkembang menjadi bandar perdagangan yang makmur di bawah kekuasaan Inggris. Guna menyelesaikan pertikaian tersebut, diadakan perjanjian yang disebut Traktat London pada 17 Maret 1824. Berdasarkan traktat itu, Belanda dan Inggris membagi daerah kekuasaannya. Singapura dan Semenanjung Melayu menjadi wilayah Inggris; sedangkan Sumatera dan Kepulauan Nusantara merupakan daerah pengaruh Belanda. Dengan demikian, traktat ini secara otomatis juga membagi dua wilayah Kerajaan Johor Riau Lingga; sehingga kerajaan tersebut boleh dikatakan berakhir dan untuk selanjutnya terpecah menjadi dua. Tengku Hussein dan keturunannya menjadi raja Kerajaan Johor yang berada di Semenanjung Melayu; sedangkan Tengku Abdul Rahman menjadi raja di Kesultanan Riau Lingga.

Sebagai wujud perealisasian Traktat London, pada 23 Oktober 1824, Sultan Abdul Rahman menandatangani kontrak politik dengan Belanda, yang berisi pengakuan Belanda sebagai penguasa tertinggi di kerajaan tersebut. Sebaliknya, Belanda mengakui bahwa Sultan Abdul Rahman dan keturunannya sebagai pemegang hak atas Kesultanan Riau Lingga. Belanda juga menyepakati bahwa Yang Dipertuan Muda Riau selaku jabatan tertinggi kedua setelah sultan berasal dari keturunan Bugis. Selanjutnya, seluruh keputusan yang diambil sultan dan Yang Dipertuan Muda Riau harus mendapat persetujuan residen Belanda. Semua pengganti mereka wajib bersumpah setia pada pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Belanda makin kuat cengkeramannya terhadap Kesultanan Riau Lingga.

Sultan Abdul Rahman wafat pada 2 Agustus 1832[454] dan digantikan oleh putranya, Sultan Muhammad Syah (1832–1834). Demi menghindari perselisihan di antara putra-putranya, dua tahun setelah naik takhta beliau menunjuk putra sulungnya bernama

454. Beliau dianugerahi gelar anumerta Marhum Bukit Cengkih, lihat *Tanjungpinag: Land of Malay History*, halaman 84.

Tengku Mahmud sebagai pengganti. Sultan tertarik pada seni bangunan keraton Yogyakarta dan berencana mendirikan istana yang mirip dengannya. Namun ia lebih banyak tinggal di Pahang dibandingkan istananya sendiri. Oleh karena itu, Belanda menurunkannya dari takhta dan digantikan oleh putranya Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Muzaffar Syah (1834–1857). Pengaruhnya tersebar luas hingga ke Pahang, Johor, dan Trengganu. Saat itu, para bajak laut mengganas di perairan Selat Malaka. Inilah yang menyebabkan Belanda memaksa sultan untuk memberantas kaum perompak tersebut pada tahun 1836. Tetapi sultan tidak begitu tegas menindak-lanjuti keinginan Belanda ini; sehingga jumlah bajak laut malah makin meningkat. Karenanya, Belanda mengadakan perjanjian kembali pada 26 Juni 1836[455]. Isi kontrak politik itu pada hakekatnya berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga keamanan pelayaran di lautan. Demi meningkatkan keamanan di laut itu, semua kapal yang berlayar di perairan Riau harus mempunyai surat izin dari Belanda, yang wajib diperlihatkan jika ada pemerikasaan oleh patroli Belanda. Sultan harus menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu kepentingan Belanda dengan menempatkan petugas kerajaan di Pulau Galang, Temiang, Moro, Sugi, Bulang, Bekaka, Sekana, dan Mampar. Belanda dan Inggris sendiri sepakat mengadakan perjanjian bersama untuk menjaga keamanan pelayaran mereka pada 10 Juni 1837.

Belanda memecat Sultan Mahmud Muzaffar Syah pada 7 Oktober 1857, saat ia sedang berada di Singapura dan mengangkat pamannya sebagai sultan dengan gelar Sulaiman Badrul Alam Syah (1857–1883). Ketika itu, Residen Niewenhuyz datang sendiri ke Lingga guna mencari tokoh yang tepat sebagai sultan baru. Pemberhentian ini terkait dengan sikap Sultan Mahmud Muzaffar Syah yang dianggap kurang tegas dalam menghadapi para perompak pengganggu kapal-kapal Belanda. Selain itu, sultan kerap bertolak ke Pahang dan Singapura tanpa seizin Belanda. Hal ini tak disukai Belanda, karena Pahang dan Singapura berada di bawah wewenang Inggris. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kesempatan ini mengadakan kontrak politik dengan penguasa baru tersebut pada 1 Desember 1857; yakni antara Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan Niewenhuyz selaku wakil pemerintah kolonial, yang isinya menetapkan wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda dengan daerah Kerajaan Riau

455. Menurut Tanjungpinang: *Land of Malay History*, halaman 84, perjanjian diadakan pada 22 Juni 1836. Adapun isinya adalah: (1) Seluruh kapal yang berlayar di perairan Riau harus memiliki surat izin berlayar; (2) Sultan wajib turut serta memberantas orang-orang yang bersikap anti-Belanda; (3) Sultan menempatkan pejabat kerajaan di Pulau Galang, Temian, Moro, Sugi, Bulung, Bekaka, Sekana, dan Mampar sebagai penjaga keamanan dalam pelayaran.

Lingga. Berdasarkan perjanjian itu pula, sultan tidak diizinkan menjalin hubungan dengan bangsa Eropa lainnya. Pascapengalihan kekuasaan di atas, Sultan Mahmud Muzaffar Syah berupaya merebut kembali kedudukannya, antara lain dengan meminta bantuan Inggris, tetapi gagal.

Pada tahun 1858, meletus pemberontakan melawan Belanda yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Panglima Besar Sulung. Ia merupakan pendukung setia bekas Sultan Mahmud Muzaffar Syah (Tengku Mahmud) dan sangat membenci Belanda yang dengan sewenang-wenang mencampuri urusan pemerintahan negerinya. Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah beserta Yang Dipertuan Muda Riau IX, Raja Abdullah, membujuknya menghentikan perlawanan, tetapi sia-sia. Panglima Besar Sulung bertekad membebaskan negerinya dari cengkeraman penjajah. Kerajaan Riau Lingga telah terikat perjanjian dengan Belanda, sehingga mereka harus mengirimkan pasukannya memadamkan pergolakan yang dipimpin Panglima Besar Sulung. Pada 9 Oktober 1858, angkatan perang Riau Lingga beserta pasukan kolonial berkekuatan 200 laskar Melayu, 70 laskar Bugis, dan 30 serdadu Belanda bertolak ke Retih–kubu pertahanan Panglima Besar Sulung. Kedudukan Panglima Besar Sulung yang dibantu rakyat Retih mulai terkepung pada 13 Oktober 1858. Belanda melakukan blokade yang sangat ketat. Serangan besar-besaran dilancarkan tanggal 7 November 1858 dan di tengah-tengah pertempuran sengit Panglima Sulung terkena tembakan di dadanya, sehingga gugur sebagai kesuma bangsa.

Sumber penghasilan Kerajaan Riau Lingga makin diperkecil oleh Belanda melalui perjanjian tertanggal 26 Januari 1888, di mana beberapa pungutan pajak seperti cukai sagu dan barang hasil hutan, kini diserahkan pada Belanda. Besarnya cukai sagu adalah 75 sen Ringgit setiap 100 tampin atau 5 pikul. Sedangkan cukai hasil hutan adalah 10 % dari harga barang-barang tersebut. Sebagai gantinya, sultan akan menerima gaji sebesar f. 36.000 setahun yang dibayarkan setiap bulannya sebesar f. 3.000. Belanda menghapuskan Kerajaan Riau Lingga pada 3 Februari 1911. Saat itu, sultan terakhirnya, Abdurrahman Muazam Syah (1883–1911) diturunkan oleh Belanda di kantor Rusydiah Club, karena merupakan penguasa yang kurang disukai Belanda. Ia kemudian menyingkir ke Singapura yang dikuasai Inggris; karena tempat tersebut memberinya lebih banyak ruang untuk melanjutkan kegiatan politiknya. Kesultan Riau Lingga dengan demikian berakhir sudah. Sementara itu, kerajaan

pecahannya, Johor, hingga hari ini masih eksis sebagai salah satu negara bagian di Malaysia modern.

Sultan Abdurrahman Muazam Syah memprotes tindakan Belanda itu melalui surat kabar *Strait Times*[456]. Beliau menyatakan telah berusaha bekerja sama dengan pemerintah kolonial secara jujur. Meskipun demikian, Belanda kerap membuat perjanjian yang mengurangi kekuasaan dan hak istimewa. Wewenang dalam pemerintahan diambil alih dari dirinya dan diserahkan pada pejabat-pejabat kolonial. Sultan mematuhi segenap perjanjian yang diadakannya dengan Belanda walau itu merugikan dirinya karena menyadari bahwa pihak yang lemah harus mengalah. Kini beliau mengeluhkan diambilnya seluruh kekuasaan pemerintahan dari dirinya sehingga tersingkir dari negeri leluhurnya. Sultan mengeluhkan pula mengenai dikuranginya tunjangan bulanan yang dahulu dibayarkan kepada dirinya sebagai ganti hilangnya penghasilan karena terpaksa diserahkan pengelolaannya pada pemerintah kolonial. Tetapi protes ini tidak memengaruhi keputusan Belanda sedikitpun.

Meskipun Kerajaan Riau Lingga telah dilikuidasi oleh Belanda, upaya menentang penjajahan tidak kunjung padam. Pada tahun 1912, Raja Hitam, salah seorang tokoh organisasi bernama Rusydiah Club yang anti penjajahan mengadakan pertemuan dengan kaisar Jepang guna meminta bantuan dalam membebaskan Riau Lingga dari cengkeraman Belanda. Jepang saat itu memang baru saja meraih kemenangan terhadap Rusia yang merupakan bangsa kulit putih. Kekalahan Rusia tersebut mematahkan mitos keunggulan bangsa kulit putih. Sehingga pada kurun waktu tersebut banyak tokoh pergerakan dari seantero Asia yang berpaling ke Jepang.

d. Perlawanan Raja Ahmad Haji Fisabilillah

Raja Ahmad Haji Fisabilillah Marhum Teluk Ketapang (Raja Haji) yang berasal dari keturunan Bugis merupakan Yang Dipertuan Muda Riau ke-4. Ia mempunyai pengaruh yang besar di Kerajaan Johor Riau Lingga, baik dari kalangan Melayu maupun Bugis. Oleh karena itu, Belanda khawatir bahwa Raja Ahmad Haji Fisabilillah akan menjadi ancaman bagi Belanda. Yacob Pieter van Braam lalu diutus untuk mendekati Raja Ahmad Haji Fisabilillah dan menawarkan persahabatan padanya. Delegasi Belanda ini diterima oleh Sultan Mahmud beserta Raja Ahmad Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat pada tahun 1780. Suatu perjanjian persahabatan berhasil ditandatangani, yang menyatakan bahwa musuh Belanda menjadi musuh Johor Riau Lingga

456. Lihat *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, halaman 26.

dan begitu pula sebaliknya. Bila ada kapal musuh yang tertawan, maka barang-barang yang disita akan dibagi dua secara adil antara kedua belah pihak. Ternyata Belanda tidak menepati perjanjian tersebut. Pada tahun 1782, berlabuh kapal dagang bernama *Betsy* milik EIC (Inggris) yang memuat 1.154 peti candu. Kapal itu dirampas oleh VOC tanpa melibatkan Raja Ahmad Haji Fisabilillah, walaupun ia telah mengetahui perihal tersebut sebelumnya. Muatan kapal yang dirampas juga tidak dibagi dua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Raja Ahmad Haji Fisabilillah berniat memprotes tindakan sepihak Belanda itu dan menuntut haknya ke Malaka. Sebelum tiba di Malaka, Raja Ahmad Haji Fisabilillah telah berjumpa dengan utusan VOC Belanda yang memberikan keterangan berbeda dengan isi perjanjian sebelumnya. Akibatnya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah merasa kesal dan merobek-robek perjanjian itu serta menyerahkan sobekannya pada mereka guna disampaikan ke Malaka. Ia menyadari bahwa peperangan dengan Belanda kemungkinan besar akan segera pecah. Karenanya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah menyiapkan kubu-kubu pertahanan di Penyengat. Dugaan Yang Dipertuan Muda Riau ke-4 ini benar adanya, karena Belanda mengirimkan armadanya menggempur Pulau Penyengat. Kedatangan Belanda ini disambut dengan tembakan gencar meriam Johor Riau Lingga. Namun karena persenjataan Belanda lebih unggul, akhirnya Penyengat dapat direbut oleh musuh. Kabar jatuhnya Penyengat ini terdengar oleh Raja Ahmad yang saat itu sedang berkubu di Pulau Bayan. Ia segera bertolak ke Penyengat dan berhasil membebaskan pulau tersebut dari tangan Belanda. Semua orang Belanda yang berada di sana dihabisi nyawanya dan bahkan bala bantuan dari Malaka juga tak sanggup mengalahkan pasukan Raja Haji.

Sultan Mahmud bersama Raja Ahmad Haji dan sultan Selangor kini bersama-sama menyerang kedudukan pasukan Belanda di Malaka. Sebagai persiapan, mereka membangun kubu pertahanan di Teluk Ketapang. Pasukan Johor Riau Lingga yang hendak menyerbu Malaka dibagi menjadi dua. Pasukan yang menyerang dari arah timur dipimpin oleh sultan Selangor; sedangkan yang dari arah barat dipimpin oleh Raja Ahmad Haji sendiri. Pertempuran berkobar dengan dashyatnya dan pasukan Belanda yang terdesak terpaksa memohon bala bantuan dari Batavia. Armada bala bantuan yang datang dari Batavia mengarahkan meriamnya ke Teluk Ketapang, Tanjung Palas, dan kubu pertahanan Raja Ali Ahmad Haji Fisabilillah. Dengan didukung oleh tembakan dari kapal Princess Louisa, Belanda mengepung benteng

pertahanan Raja Ahmad Haji. Pada 18 Juni 1784, Raja Ahmad Haji gugur dan perlawanan dilanjutkan oleh para panglima perang lainnya. Namun akhirnya pasukan Johor Riau Lingga berhasil dikalahkan. Kini Belanda mengalihkan serangannya ke pusat pemerintahan Johor Riau Lingga; sehingga pada 10 November 1784, Sultan Mahmud dapat dipaksa menandatangani perjanjian yang mengakui kekuasaan Belanda atas kerajaannya.

e. Yang Dipertuan Muda Riau

Merupakan orang kedua setelah sultan di Kerajaan Riau Lingga. Yang Dipertuan Muda Riau I adalah Opu Daeng Marewa. Sepeninggal beliau, Opu Daeng Celak dilantik menjadi Yang Dipertuan Muda Riau II. Pada tahun 1740, orang-orang Minangkabau dari Lingga menyerang kedudukan orang Bugis di Kelang, Selangor[457]. Mendengar hal ini, Opu Daeng Celak beserta Sultan Sulaiman memimpin pasukan membantu orang-orang Bugis dan mengalahkan laskar Minangkabau. Opu Daeng Celak mangkat pada tahun 1745 dan digantikan oleh Daeng Kamboja, putra saudaranya–Opu Daeng Perani.

Daeng Kamboja, selaku Yang Dipertuan Muda Riau III menyerang kedudukan Belanda di Malaka, tetapi mengalami kekalahan. Akibatnya, ia terpaksa berjanji menjual timahnya hanya pada Belanda. Pada tahun 1777 Daeng Kamboja wafat dan digantikan oleh putranya, Raja Ahmad Haji Fisabilillah Marhum Teluk Ketapang (Raja Haji). Yang Dipertuan Riau IV ini terkenal kegigihannya dalam melawan Belanda. Riwayat perlawanannya telah diulas pada bagian sebelumnya. Pengganti Raja Ahmad Haji Fisabilillah sebagai Yang Dipertuan Muda Riau V adalah Raja Ali, yang digelari pula Marhum Pulau Bayan. Perebutan supremasi antara Belanda dan Inggris terjadi semasa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau VI (Raja Ja'far, 1805–1832). Ia merupakan pengembang pertambangan timah di Singkep[458].

Yang Dipertuan Muda Riau VII, Raja Abdul Rahman (1832–1844) membangun mesjid di Pulau Penyengat. Setelah mangkat beliau memperoleh gelar Marhum Kampung Bulang. Penggantinya selaku Yang Dipertuan Muda Riau VIII adalah Raja Ali (1844–1857). Ia pernah mengirimkan surat pada Gubernur Jenderal Jan Jacob van Rochussen tertanggal 6 Juli 1849 yang berisikan ucapan turut berbela sungkawa atas mangkatnya Raja Willem II serta ucapan selamat atas diangkatnya Willem

457. Lihat *Migrasi dan Orang Bugis*, halaman 119.
458. Lihat *Tanjungpinang: Land of Malay History*, halaman 142.

III.[459] Penggantinya selaku Yang Dipertuan Muda Riau IX adalah Raja Abdullah (1844–1858). Yang Dipertuan Muda Riau X, Raja Muhammad Yusuf al Ahmadi (1858–1899) membangun sebuah perpustakaan yang berisikan buku-buku mengenai agama Islam. Tidak sedikit koleksi perpustakaan tersebut yang merupakan sumbangan negara-negara Muslim lainnya.

f. Pemberontakan rakyat di Retih

Retih adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Riau Lingga yang terletak di Sungai Gangsal, yakni di antara Sungai Inderagiri dan Sungai Tungkal. Semenjak tahun 1830-an, kerajaan tersebut telah mengakui kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Belanda mempunyai kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan sultannya. Pemicu pemberontakan rakyat Retih adalah tindakan Belanda yang memecat Sultan Mahmud Muzaffar Syah karena menganggapnya kurang tegas dalam menindak para bajak laut. Padahal sultan merupakan pemimpin yang disenangi rakyat. Pemberontakan yang dipimpin ini oleh Panglima Besar Sulung ini mulai pecah pada 9 Oktober 1857. Namun karena pasukan gabungan Belanda bersama Sultan Sulaiman Badrul Alam (pengganti Mahmud Muzaffar Syah) lebih unggul dalam persenjataan, kaum pemberontak terdesak dan terpaksa menyingkir ke hulu Sungai Sampi. Pada 27 Oktober 1857, kaum pemberontak berhasil memasuki kubu pertahanan Belanda di tepi Sungai Sempi dan membunuh para pengikut Belanda yang ada di sana (termasuk 4 orang Bugis yang memihak Belanda) dan melukai yang lainnya. Setelah itu, rakyat mengundurkan diri lagi dari sana.

Sebagai upaya memadamkan pemberontakan ini, Belanda mengerahkan angkatan perangnya pada 7 November 1857 dan menyerang pertahanan rakyat yang berada di Sungai Batang (salah satu anak Sungai Sampi). Penyerangan yang berlangsung saat hujan lebat tersebut tak diduga-duga oleh Panglima Besar Sulung, sehingga dengan mudah mereka dapat dikalahkan. Dalam pertempuran itu, jatuh 52 orang korban jiwa dari kalangan rakyat Retih; sedangkan korban pada pihak Belanda sebanyak 16 orang luka-luka dan seorang tewas.

g. Kesusastraan

Karya sastra penting yang juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Johor Riau Lingga adalah *Syair Sultan Mahmud* yang terdiri dari 1.097 bait. Pengarangnya tidak

---

459. Lihat *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* halaman 39.

menyebutkan namanya. Kendati demikian, ia menyatakan bahwa karya sastra ini hanya dikarangnya dalam waktu 10 hari:

Tiada lagi dipanjangkan madah
Dalam sepuluh hari lengkaplah sudah
Kepada delapan hari bulan Zulkaedah
Memulai pekerjaan terlalu indah[460]

Tidak dicantumkannya nama penulis ini sesuai dengan tradisi kesusastraan Melayu saat itu, dengan tujuan agar pembaca terpusat perhatiannya pada isi karya sastra dan bukannya terhadap siapa yang menulis. Isi syair itu memuji-muji pemerintahan Sultan Mahmud dan kebesaran Kerajaan Riau Lingga saat itu. Karenanya, kemungkinan syair ini pesanan Sultan Mahmud sendiri. Dengan demikian, obyektifitas karya sastra ini tetap patut dipertanyakan dan perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian bila hendak diambil sebagai sumber sejarah. Konsep waktu (temporal) dan tempat (spatial) juga tidak jelas, karena terkadang melompat-lompat dari satu tema ke tema lainnya. Terlepas dari semua itu, karya sastra tetap dapat menjadi informasi berharga mengenai kondisi dan budaya Kerajaan Riau Lingga saat itu.

Syair Sultan Mahmud ditulis dalam bahasa Melayu dengan huruf Jawi. Manuskripnya yang tersimpan dengan baik di Museum Pusat Jakarta terdiri dari 117 halaman, dengan masing-masing halaman rata-rata terdiri dari 19 baris. Secara umum, bait-bait di dalamnya tidak dapat dikutip sepotong-potong saja, melainkan harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh. Garis besar isi Syair Sultan Mahmud adalah sebagai berikut:

- Bait 1–12 : Meriwayatkan pemerintahan Sultan Mahmud di Riau Lingga, di mana ia menggantikan ayahnya dalam usia muda. Pemerintahannya dikatakan adil dan bijaksana, sehingga kerajaan menjadi aman dan makmur.
- Bait 13–27 : Menggambarkan kecantikan permaisuri raja.
- Bait 28–30 : Pendidikan dan pengajaran keagamaan pada calon permaisuri.
- Bait 31–50 : Menyebutkan susunan keluarga sultan.
- Bait 51–121 : Perencanaan dan permufakatan mengenai pendirian istana.
- Bait 122–131 : Meriwayatkan mengenai Engku Raja Ali, yakni Yang Dipertuan Muda Negeri Riau.

460. Syair *Sultan Mahmud*, halaman 20.

- Bait 132–142 : Perjalanan ke Lingga untuk menjenguknya permaisuri yang sakit. Dikisahkan pula mengenai Raja Mahmud Yusuf yang melamar putri Kerajaan Indragiri.
- Bait 143–148 : Tibanya rombongan di Lingga dan mengisahkan mengenai sakitnya permaisuri dan pengobatannya oleh tabib dari Siam dan China. Tetapi akhirnya permaisuri meninggal juga.
- Bait 149–154 : Pemakaman permaisuri. Sultan menikah lagi dengan saudari permaisuri bernama Laila Bestari.
- Bait 155–182 : Perintah bagi rakyat untuk menjalankan ajaran agama.
- Bait 183–222 :
- Bait 223–291 : Persiapan acara pernikahan Raja Mahmud Jusuf yang mengundang semua pembesar.
- Bait 292–313 : Sultan merajuk dan meninggalkan istananya, yang kemudian dicari bersama-sama oleh pengikutnya.
- Bait 314–338 : Tengku Ambung menanyakan mengapa sultan pergi begitu saja dan membawanya kembali ke istana.
- Bait 339–363 : Hiburan bagi putri raja, seperti wayang China, tarian, dan lain sebagainya.
- Bait 364–400 : Pernikahan Raja Mahmud Yusuf dengan Raja Isa (Aisyah).
- Bait 401–415 : Perjalanan pengantin ke istana.
- Bait 416–535 : Peristiwa persiapan upacara pernikahan, dikisahkan pula mengenai upacara *berinai* yang menjadi bagian pernikahan adat Melayu.
- Bait 536–546 : Keadaan cuaca saat berlangsungnya perhelatan, seperti turunnya hujan dan lain sebagainya.
- Bait 547–581 : Pawai atau arak-arakan pengantin.
- Bait 582–590 : Usainya pesta pernikahan.
- Bait 591–654 : Persiapan upacara bersiram.
- Bait 655–665 : Arak-arakan penganti memasuki istana, acara bersantap, dan pembacaan doa oleh Kadi Maulana.
- Bait 666–676 : Selesainya upacara pernikahan dan para raja yang diundang pulang kembali ke negerinya masing-masing. Kedua mempelai dikatakan hidup rukun dan damai.
- Bait 677–685 : Ziarah ke makam ayah di Kerajaan Trengganu.

- Bait 686–689 : Pembangunan istana Kota Batu.
- Bait 690–720 : Keberangkatan sultan ke Trengganu dan situasi pembangunan istana.
- Bait 721–725 : Administrasi pekerjaan pembangunan istana.
- Bait 726–744 : Kelahiran cucu sultan yang bernama Tengku Abdul Rahman Perdana Syihada (Tengku Sulung).
- Bait 745–746 : Jamuan di balairung istana sebagai ucapan syukur atas kelahiran cucu sultan.
- Bait 747–754 : Perjalanan Sultan Mahmud ke Trengganu.
- Bait 755 : Sampainya sultan di Trengganu.
- Bait 764 : Pakaian kaum wanita bangsawan dan kendaraan kaum bangsawan.
- Bait 758–762 : Kembalinya sultan ke Lingga.
- Bait 760, 762, 765, 789, 810–825 : Pembuatan batu bata untuk istana.
- Bait 826–828 : Pembuatan gedung istana.
- Bait 829–832 : Keberangkatan sultan ke Pahang dan Singapura.
- Bait 833–845 : Lanjutan tetnang pembangunan istana.
- Bait 846–853 : Jamuan peresmian istana.
- Bait 854–902 : Mengenai ber*nazam*
- Bait 903–909 : Pertemuan sultan dengan seorang saudagar kaya bernama Gusyi.
- Bait 910–926 : Sultan jatuh sakit tetapi setelah itu sehat kembali.
- Bait 927–939 : Pelaksanaan puasa dan ibadah tarawih.
- Bait 939–957 : Perjalanan sultan ke Singapura dengan sampan yang dilengkapi air, kayu, dan senjata.
- Bait 958–1001 : Singgahnya sultan di Penyengat dan Ulu Riau.
- Bait 1002–1011 : Perjalanan sultan ke Trengganu.
- Bait 1013–1097 : Penggambaran mengenai istana Trengganu dan laporan seputar kunjungan sultan ke sana.

Dengan demikian, berdasarkan karya sastra *Syair Sultan Mahmud* ini dapat diketahui pula adat istiadat yang berlaku di istana-istana kerajaan Melayu pada saat itu. Adanya administrasi yang baik dan penghargaan pada para pekerja nampak pada pembangunan istana, karena orang yang bekerja keras membangun istana itu diperbolehkan pulang pada pukul lima sore dan memperoleh gaji yang layak. Karya

sastra yang sama pula memperlihatkan bahwa agama Islam telah berakar kuat di istana Kerajaan Riau Lingga.

Sastrawan terkemuka lainnya adalah Raja Ali Haji, Raja Ali Tengku Kelana, Raja Hitam, Raja Aisyah, Raja H. Abdullah bin Raja Hasan, Raja Zuleha, dan Haji Ibrahim. Pendirian organisasi bernama Rusydiah Club makin memicu perkembangan kesusastraan Riau Lingga. Pada kurang lebih tahun 1892–1894, organisasi ini telah mempunyai percetakannya sendiri yang dinamakan Matba'atul Riauiyah. Tujuan pendirian percetakan ini adalah memperbanyak karya kaum cerdik pandai dan disebarluaskan untuk mencerdaskan masyarakat. Hasil karya mereka adalah terjemahan *Risalah Al-Fawaid al-wafiat fisyarh ma'natahiyat* oleh Said Syarif Abdullah Ibni Muhammad Saleh al Zawawi. Karya-karya lainnya adalah *Al-Zikri alatariqah al naqsabandia*, yang diterbitkan pada tahun 1896, *Kanun Riau Lingga*, dan lain sebagainya. Raja Ali Tengku Kelana sendiri pernah menulis *Pohon Perhimpunan, Bukhiatul Aini fi Hurufil Ma'ani, Pohon Ingatan*, dan *Percakapan si Bakhil*[461].

Pada tahun 1907, Raja Hitam dan beberapa tokoh Rusydiah Club lainnya menerbitkan majalah *Al Iman* di Singapura. Penerbitan ini dapat terealisasi berkat kerja sama dengan tokoh-tokoh dari Singapura, seperti Syeh Muhammad Thahir dan Haji Abbas bin Muhammad Thaha. Hasil karya Raja Hitam lainnya adalah *Perjalanan Sultan Mahmud Lingga Riau*. Istri Raja Hitam yang bernama Raja Aisyah juga merupakan seorang sastrawan wanita. Hasil karyanya adalah *Khadamuddin, Seligi Tajam Bertimbal, Syamsul Anwar,* dan *Mulkatul Badrul Mukmin*. Raja Haji Abdullah bin Raja Hasan menulis *Pembuka Lidah dengan Teladan Umpama yang Mudah, Penolong Bagi yang Menuntut Akan Pengetahuan yang Patut*, *Kutipan Mutiara*, *Kisah 1001 Malam*, dan *Kisah 1001 Hari*. Haji Ibrahim menulis karya berjudul *Cakap-cakap Rampai Bahasa Melayu Johor*, yang berisikan kumpulan berbagai karangan. Di antara para penyair adalah Raja Zuleha dengan buah karyanya berjudul *Syair Abdul Muluk*. Rangkaian sastrawan Riau Lingga masih ditambah pula oleh Tuan Bilik dengan puisi-puisi berjudul *Syair Dandan Setia*, *Syair Siti Zubaidah*[462], dan *Syair Muhibatuzzaman*.

461. Lihat *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, halaman 31.
462. Menurut buku *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, halaman 31, syair ini masih diperdebatkan kebenarannya.

h. Sistem pemerintahan

Tatacara pemerintahan Johor Riau Lingga tidak berbeda dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. *Syair Sultan Mahmud* memaparkan mengenai pranata pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Sultan. Ia dibantu oleh empat orang menteri utamanya, sebagaimana yang tampak pada bait 591: "Diperintah oleh keempat Menteri."[463] Terdapat pula jabatan sebagai penghulu istana, yang bertugas mengurus segenap kebutuhan istana, termasuk upacara-upacaranya. Syair Sultan Mahmud memperlihatkan pula adanya berbagai jabatan lain, seperti *temanggung*, hulubalang, bendahara, dan lain sebagainya. Kerajaan Riau Lingga membina hubungan diplomatik yang baik dengan Kerajaan Trengganu dan Pahang di Semenanjung Melayu. Sultan Mahmud sendiri kerap pula mengadakan kunjungan ke negeri-negeri tersebut.

Karena Johor Riau Lingga bertumpu pada armada lautnya, jabatan yang sangat penting bagi kerajaan tersebut tentunya adalah panglima angkatan laut, yang dipegang oleh seorang *laksamana*. Ia merangkap sebagai pembantu sultan dalam bidang kemiliteran. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Kerajaan Johor Riau Lingga merupakan negara maritim, sehingga keamanan dan kejayaan di laut harus menjadi prioritas utama. Seorang *laksamana* diangkat sultan berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan tugas. Sejak tahun 1723, yakni setelah sultan dibantu oleh lima bersaudara Bugis merebut kembali takhtanya, muncul lagi jabatan baru, yakni Yang Dipertuan Muda Riau. Seperti yang telah diriwayatkan di atas, orang pertama yang memangku jabatan ini adalah Opu Daeng Marewa. Ia adalah orang kedua setelah sultan. Dengan demikian, susunan pemerintahan Kerajaan Riau Lingga menjadi:

- Sultan yang juga digelari Yang Dipertuan Besar
- Yang Dipertuan Muda Riau
- Laksamana
- Datuk Bendahara
- Mahkamah yang bertugas mengurusi masalah hukum dan perkara agama

Pada tahun 1784, setelah Kesultanan Riau Lingga jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, ditempatkanlah seorang residen selaku wakil Belanda yang bertugas mengawasi sultan beserta Yang Dipertuan Muda Riau. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1911, saat Kerajaan Riau Lingga dihapuskan oleh Belanda.

463. Syair *Sultan Mahmud*, halaman 22.

Kipas upacara dari Kerajaan Riau Lingga
(Foto koleksi pribadi, diambil di Museum Nasional Indonesia–Jakarta, pada 24 Juli 2010)

i. Ekonomi dan sosial kemasyarakatan

Penduduk Kerajaan Johor Riau Lingga dibagi menjadi rakyat biasa dan rakyat keturunan bangsawan. Rakyat yang bukan keturunan bangsawan tidak mempunyai gelar. Sebaliknya kaum keturunan bangsawan berhak menyandang gelar raja atau tengku. Sedangkan keturunan tumenggung akan menyandang gelar *encik* atau *wan*. Kaum keturunan Arab akan bergelar *said (*kadang juga dieja *sayid)*, *syarif* dan *syarifah* (bagi kaum wanitanya).

Banyak pedagang dari luar yang mengunjungi kerajaan ini, seperti China, Bugis, Jawa, dan lain sebagainya; sehingga memajukan perekonomian di sana. Hasil Riau Lingga terutama yang berasal dari kekayaan lautnya banyak diekspor ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Karena sultan tidak memberlakukan diskriminasi dalam bidang perekonomian, terjalin kerja sama yang baik dan menguntungkan antara penduduk asli Riau Lingga dengan para pendatang, seperti orang India, Keling, Benggali, China, Bugis, dan lain sebagainya.

Relasi antara etnis terjalin pula dengan baik. Sebagai contoh, Sultan Mahmud pernah mengundang para pekerja keturunan China dari daerah Semenanjung Melayu untuk membangun istananya, karena menganggap mereka mahir dan terampil dalam seni pertukangan. Di antara para tukang keturunan China tersebut ada yang memutuskan untuk menjadi penduduk Riau Lingga dan mencadi cikal-bakal bagi sebagian masyarakat Tionghua yang ada di sana.

Di Riau Lingga telah ada suatu organisasi kaum cerdik pandai yang bergerak di bidang agama, pengetahuan, politik, dan ekonomi, dengan nama *Rusydiah Club*. Organisasi lainnya adalah Serikat Dagang Ahmadi yang berdiri pada tahun 1906. Perkumpulan ini bergerak dalam bidang perdagangan, dan selanjutkan perkebunan kelapa. Rusydiah Club bersikap anti penjajahan, walau tidak terang-terangan dan dilakukan secara diam-diam. Sebagai sumber keuangan bagi perkumpulan ini didirikanlah Serikat Dagang Ahmadi, yang memusatkan perhatian pada bidang perdagangan; sehingga dapat membiayai berbagai kegiatan yang diselenggarakan *Rusydiah Club*.

X. ROKAN dan ROKAN IV KOTO

a. Kerajaan Rokan

Kerajaan ini telah berdiri semenjak abad ke-14 dengan ibukotanya yang berada di Kota Lama dan diambil namanya dari nama sungai di dekat lokasi kerajaan ini. Nama Rokan juga berasal dari bahasa Arab *rokana*, yang berarti "rukun dan damai." Dengan menilik hal itu, dapat disimpulkan bahwa warga kerajaan ini telah menganut agama Islam. Para penguasa Rokan menarik garis silsilahnya dari seorang tokoh bernama Sultan Sidi. Kerajaan ini mengalami perkembangan yang pesat karena didukung oleh berlimpahnya hasil alam. Dengan negeri-negeri sekitarnya, Rokan menerapkan politik hidup berdampingan secara damai.

Rokan menjalin hubungan persahabatan dengan Malaka dan bahkan raja Malaka bernama Muhammad Syah menikahi putri raja Rokan. Putra mereka, Ibrahim, diangkat sebagai raja di Malaka menggantikan ayahnya. Namun, ia hanya sempat berkuasa selama setahun lima bulan dan setelah itu dibunuh oleh Kasim Muhammad Syah[464]. Setelah Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, Rokan mengalami kemunduran dan kerap terancam oleh Kerajaan Aru dan Aceh.

464. Raja Rokan yang dimaksud di sini bukan Rokan IV Koto, karena Kasim Muhammad Syah (adalah Raja Rokan, saudara kandung ibu Sultan Ibrahim) yang membunuh Sultan Ibrahim bukan dari Rokan IV Koto,

b. Kerajaan Rokan IV Koto

Leluhur raja-raja Rokan IV Koto adalah T. Julat Joronsan I yang datang dari Koto Bonio ke Koto Sembahyang Tinggi serta menjadi raja Rokan pertama dengan gelar Sutan Seri Alam (1340–1381). Beliau mempunyai dua orang putra bernama T. Dullah dan T. Bidin; serta seorang putri bernama T. Siti Khadijah. T.Dullah menikah dengan Siti Onit dan berputra Nadani yang menjadi raja Rokan kedua dengan gelar Tengku Raja Rokan (1381–1454). Putranya bernama T. Nak Dahlan lantas menjadi raja Rokan ke-3 yang bergelar Tengku Sutan Panglima Dalam (1454–1519). T. Siti Khadijah menikah dengan T. Dalu. Pernikahan ini dikaruniai putri bernama T. Siti Siamah, yang berputra T. Maali. Pada gilirannya, T. Maali berputra T. Podi yang menjadi raja Rokan ke-4. Gelar beliau adalah Tengku Sutan Sepedas Padi (1519–1572). T. Maali masih mempunyai putri bernama T. Siti Inap, yang berputra T. Alansian. Beliau menjadi raja Rokan ke-5 dengan gelar T. Sutan Gemetar Alam (1572–1603).

Raja Rokan berikutnya berasal dari Pagarruyung bernama Tengku Mahyuddin atau Yang Dipertuan Sakti Mahyuddin (1603–1645). Garis silsilah yang menurunkan raja Rokan berikutnya adalah sebagai berikut: T. Siti Nunan (putri T. Siti Inap)–T. Siti Sawiyah–T. Lahid. Ia adalah raja Rokan ke-7 dengan gelar Yang Dipertuan Sakti Lahid (1645–1704). Selanjutnya, Rokan diperintah oleh seorang wali atau pemangku raja bergelar Tengku Sutan Rokan (1704–1739). Yang menjadi raja Rokan ke-8 adalah saudara T. Lahid bernama T. Selo. Gelarnya adalah Yang Dipertuan Sakti Selo (1739–1805). Roda pemerintahan Rokan kemudian dipegang oleh Andiko Yang Berempat selaku wakil raja Rokan dari 1805 hingga 1817). Perwakilan ini lalu dipegang oleh Dayung Datuk Muhudun Sakti (1817–1837).

Silsilah raja Rokan berikutnya adalah T. Siti Sawiyah–T. Siti Suadi–T. Siti Laharo–T. Ahmad. Ia dinobatkan sebagai raja Rokan ke-9 dengan gelar Yang Dipertuan Sakti Ahmad (1837–1859). Saudaranya, T. Husin menjadi raja Rokan ke-10 bergelar Yang Dipertuan Sakti Husin (1859–1880). Rokan dipegang lagi oleh seorang pemangku atau wakil raja bernama Tengku Sutan Zainal (1880–1903). Garis keturunan raja Rokan berikutnya dan sekaligus terakhir berawal dari T. Siti Dalillah yang menikah dengan T. Ngadimat, putra T. Siti Sawiyah. Silsilahnya adalah sebagai berikut: T. Siti Dalillah–T. Siti Suro–T. Abbas–T. Ibrahim. Beliau adalah raja Rokan

tidak ada gelar Kasim Muhammad Syah di Rokan IV Koto dan gelar raja 'Syah' dekat pada kerajaan Aru, sedangkan raja-raja Kunto dekat hubungannya dengan Aru, berkemungkinan kerajaan Rokan yang dimaksud dalam Sejarah Melayu adalah Kunto–keterangan dari Bapak Junaidi Syam.

ke-11 dan terakhir. Gelar yang disandang beliau adalah Yang Dipertuan Sakti Ibrahim (1903–1942).

Berdasarkan *Regeerings Almanak*, Yang Dipertuan Sakti Ahmad tercatat mendapatkan pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda pada 16 September 1888. Masih menurut *Regeerings Almanak*, Yang Dipertuan Sakti Ibrahim memperoleh pengukuhan dari pemerintah kolonial Belanda pada 22 Januari 1906. Pada zaman penjajahan Jepang, beliau ditawan dan dibunuh Jepang. Namun Tengku Muhammad, putra mahkota Rokan dibebaskan kembali setelah Jepang menyerah kalah.

XI. SEGATI

a. Cikal-bakal Kerajaan Segati

Terletak di hulu Sungai Segati, yakni sekitar 15 km dari Langgam sekarang. Pendirinya bernama Tuk Jayo Sati, yang merupakan cucu Maharaja Olang dari Kuantan. Pada awalnya kerajaan ini berpusat di Ranah Tanjung Bungo, tetapi oleh putranya yang bernama Tuk Jayo Tunggal, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Ranah Gunung Setawar. Kerajaan Segati mengalami perkembangan semasa pemerintahan putri Tuk Jayo Tunggal yang bernama Tuk Jayo Alam. Ibukota Segati menjadi maju karena perdagangan lada. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengalahkan hulubalang negeri Gasib bernama Panglima Puto dan merebut negeri Ranah Jayo Laut. Segati selanjutnya diperintah secara berturut-turut oleh Tuk Jayo Laut, Tuk Jayo Tinggi, Tuk Jayo Gagah, Tuk Jayo Kelombai, dan Tuk Jayo Bedil. Ia dinamakan demikian, karena merupakan raja Segati pertama yang menggunakan senapan (bedil).

b. Perkembangan Kerajaan Segati

Semasa pemerintahan Tuk Jayo Bedil, Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Raja Segati ini juga mengirimkan angkatan perangnya membantu Malaka yang dipimpin oleh Panglima Kuntu bersama dengan Tuk Sanggar di Laut. Mereka tersohor sebagai panglima perang di laut yang tangguh dan sanggup menguasai Kuala Kampar. Karena usianya telah lanjut, Tuk Sanggar Raja di Laut digantikan oleh Tuk Sanggar di Laut Muda. Sementara itu, Panglima Kuntu ditarik kembali ke Segati dan pimpinan pasukan diserahkan pada Sutan Peringgih bergelar Orang Besar Segati yang berasal dari Gunung Hijau (Pagarruyung).

Penduduk Segati pada masa itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Kurang lebih pada abad ke-16, datanglah utusan Aceh yang menuntut agar Segati memeluk

agama Islam. Aceh merasa perlu menaklukkan Segati karena kawasan tersebut merupakan penghasil lada yang penting. Dengan alasan menyebarkan agama Islam, Aceh kemudian menyerbu dan menaklukkan Segati.

XII. SIAK (SIAK SRI INDRAPURA)

a. Cikal-bakal Kerajaan Siak

Pada kurang lebih abad ke-14 di tepi Sungai Siak sudah terdapat sebuah kerajaan yang beribukota di Gasib. Oleh karenanya, kerajaan ini juga disebut Gasib. Lokasinya berada di hulu Kualau Mandau sekarang. Kini keagungan kerajaan kuno ini tinggal menjadi penuturan ceritera rakyat saja. Mereka mengisahkan adanya istana kerajaan yang terletak dalam hutan belantara dan tidak mungkin dijumpai lagi. Ada pula yang konon kerap melihat hanyutnya berbagai perkakas bekas kerajaan Gasib di sungai. Kerajaan ini dahulunya menguasai daerah di sepanjang aliran Sungai Siak, mulai dari bagian yang hulu, yakni Bukit Seliti Tampung dan Bukit Langa (Tapung Kanan). Rakyat di Tapung Kanan menuturkan bahwa dahulunya wilayah mereka pernah menjadi bagian Kerajaan Gasib. Bukti lain keberadaan kerajaan ini adalah sebilah gagang keris yang dimiliki seorang tokoh bendahara[465] dari Batu Gajah dan perisai kepunyaan bendahara dari Tandun; di mana kedua benda tersebut merupakan hadiah raja Gasib.

Kerajaan Gasib sendiri terbagi menjadi dua perioda, yakni zaman Hindu-Buddha dan Islam. Mengenai perioda Hindu-Buddha sedikit yang diketahui. Salah seorang raja Gasib Hindu-Buddha ini bernama Badagai[466]. Pada tahun 1433, Gasib, Inderagiri, dan Siantan meminta perlindungan ke China, karena adanya ekspansi Malaka yang telah memeluk agama Islam; sementara itu Majapahit yang biasa menjadi pelindung mereka telah mengalami kemunduran. Sultan Mansyur Syah (1444–1477) mengirimkan pasukan guna menaklukkan Gasib yang dipimpin oleh Sri Awadani. Raja Permaisura dari Gasib dan perdana menterinya, Tun Jaya Pakibul gagal menahan serangan Malaka ini; sehingga mereka ditawan dan dibawa ke Malaka. Permaisura diperintahkan menganut agama Islam dan kemudian dinikahkan dengan Maha Dewi, putri Sultan Mansyur Syah. Pernikahan ini dikaruniai seorang anak bernama Megat Kudu. Sebagai pengganti Permaisura, Megat Kudu diangkat sebagai raja Gasib dengan gelar Sultan Ibrahim, yang kemudian digantikan oleh putranya bergelar Sultan Abdullah.

465. Bendahara ini adalah orang dipercaya untuk mewakili raja di suatu daerah tertentu.
466. Lihat *Sejarah Daerah Riau*, halaman 45.

b. Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan

Setelah Abdullah mangkat dan Raja Husin menaiki singgasana Siak. Pada tahun 1511, Malaka dikalahkan oleh Portugis dan rajanya melarikan diri ke Johor serta mendirikan Kerajaan Johor Riau Lingga. Dengan demikian, dominasi Malaka atas Siak kini beralih pada kerajaan tersebut. Pada tahun 1596 yang berkuasa di Siak adalah adalah Raja Hasan, putra Sultan Ali Jalla Abdul Jalil dari Kesultanan Johor Riau Lingga. Sementara itu, saudara-saudara Hasan menjadi penguasa di kerajaan lainnya; seperti Raja Husein yang menjadi raja di Kelantan dan Raja Muhammad yang menjadi penguasa di Kampar. Hingga tahun 1622, Siak masih mempunyai raja-raja yang berasal dari keturunan Johor Riau Lingga. Karena pertimbangan ekonomi, Siak tidak lagi diperintah seorang raja, melainkan oleh seorang syahbandar yang bertugas memungut bea dan cukai atas perniagaan di sana.

Sebuah tambang timah ditemukan di Tapung, Siak, pada tahun 1674. Atas penemuan tersebut, kepala suku kawasan Koto Ranah, Kebon, dan Giti mengirim utusan pada Belanda di Malaka untuk membicarakan masalah perdagangan timah. Belanda menyambut peluang ini dengan mengadakan perjanjian pada 14 Januari 1676 dengan kepala suku tersebut, yang isinya menyatakan bahwa Belanda adalah satu-satunya pemegang hak monopoli perdagangan timah di sana. Dengan kata lain, timah yang dihasilkan hanya boleh dijual pada Belanda. Setahun kemudian, atau tepatnya pada 1677, Letnan Henry Thimer diutus melakukan pembelian timah di kawasan tersebut. Ternyata, pada tahun 1683 kembali ditemukan tambang emas di Petapahan; sehingga menarik perhatian khalayak ramai. Itulah sebabnya, Siak makin banyak dikunjungi orang. Sementara itu, syahbandar yang ditunjuk oleh Kesultanan Johor Riau Lingga masih tetap memegang jabatannya, hingga tahun 1723.

Di bagian tentang Kerajaan Riau Lingga telah dikisahkan mengenai Raja Kecil yang merebut kekuasaan, tetapi berhasil dihalau oleh Sulaiman, pewaris Kerajaan Johor Riau Lingga dengan bantuan lima bersaudara dari kerajaan Luwu; yakni Opu Daeng Manambun, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Perani, Opu Daeng Celak, dan Opu Daeng Kemasi. Raja Kecil berhasil disingkirkan dan mengundurkan diri ke Bengkalis. Di Pulau tersebut Raja Kecil mendapat dukungan dari para *batin* (kepala suku) dan diminta menjadi raja mereka. Kendati demikian, Raja Kecil menolak dan ingin mendirikan kerajaan sendiri di Buantan, dekat Sabak Auh, Siak. Waktu itu, kawasan tersebut masih berada di bawah syahbandar Johor Riau Lingga. Alasan

Raja Kecil memilih Buantan didasari kenyataan makin kuatnya kekuasaan VOC Belanda di Malaka dan nilai strategis daerah tersebut sebagai bagian jalur perdagangan internasional. Dengan demikian, pada tahun 1723, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan dan mengakhiri kekuasaan para syahbandar. Gelarnya adalah Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah (1723–1748)–sama dengan saat masih menduduki singgasana Riau Lingga Johor. Daerah yang dikuasai Raja Kecil meliputi Gasib, Senapelan, Sejaleh, Perawang, Sakai, Petalang, Tebing Tinggi, Senggoro, Siak Besar, Rempah, dan Betung. Ia berupaya mengatur pemerintahan negerinya dengan sebaik mungkin, agar dapat bertahan menghadapi ancaman Belanda. Angkatan perang diperkuatnya dengan mengangkat Datuk Laksamana Raja di Laut sebagai panglima. Setelah armada perangnya dirasa cukup kuat, Raja Kecil meluaskan wilayahnya hingga ke Rokan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko. Bahkan, ia dua kali mengirimkan pasukannya berperang melawan orang-orang Bugis, yakni pada tahun 1724 dan 1726; di mana pada kesempatan itu, Raja Kecil berhasil membunuh Daeng Perani salah seorang di antara lima bersaudara Bugis yang pernah memusuhinya. Angkatan laut Raja Kecil kerap muncul di perairan Malaka guna menyokong siapa saja yang memusuhi baik Belanda maupun orang-orang Bugis. Ketika Raja Kecil mangkat, yang seharusnya menggantikannya adalah putranya bernama Tengku Alam, tetapi ia gugur dalam peperangan melawan Portugis. Sebagai gantinya, yang diangkat sebagai raja adalah adik Tengku Alam bernama Tengku Buang Asmara.

c. Berdiri dan berkembangnya Kerajaan Siak Sri Inderapura

Babak baru perkembangan kerajaan ini berlangsung pada tahun 1750, ketika Sultan Abdul Jalil Muzafar Syah memindahkan ibukotanya dari Buantan ke Mempura. Sungai Jantan diubah namanya menjadi Sungai Siak dan semenjak itu nama kerajaan diganti menjadi Siak Sri Inderapura. Berkat keahliannya berdiplomasi, Belanda berhasil mendapatkan izin mendirikan kantor perwakilan dagangnya di Guntung, yakni sebuah pulau di muara Sungai Siak. Kantor perwakilan dagang itu siap dibangun pada tahun 1756. Meskipun demikian, Belanda dengan diam-diam menaruh persenjataan dan perlengkapan perangnya di sana. Setelah berhasil menghimpun kekuatan di Guntung, Belanda mulai mengganggu pelayaran kawasan tersebut. Bahkan para pedagang yang hendak berniaga di Siak diharuskan membayar cukai pada Belanda. Nelayan-nelayan hanya diperbolehkan menjual ikan pada Belanda yang bercokol di Guntung, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Tindakan Belanda

ini terdengar sampai ke telinga sultan, sehingga beliau terdorong mengusir Belanda dari wilayah kekuasaannya.

Dengan menggunakan tipu muslihat, sultan berhasil memasuki benteng VOC pada tahun 1760 dan membunuh semua orang yang berada di dalamnya. Guntung berhasil dikuasai kembali oleh Siak. Tentu saja, sultan telah memperhitungkan bahwa Belanda pasti akan melakukan pembalasan. Karena itu, ia membangun berbagai kubu pertahanan di Siak dan menyiagakan kapal perangnya di sungai. Kubu-kubu pertahanan tersebut dipimpin oleh Panglima Besar Tengku Muhammad Ali dan dibantu oleh Raja Indra Pahlawan. Belanda berusaha membangun kekuatannya kembali di Siak dengan cara mengadu domba antara Sultan Tengku Ismail (Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, memerintah 1765–1766 atau 1760–1761)[467] dengan saudaranya bernama Tengku Alamuddin. Belanda menjanjikan akan mengangkat Tengku Alamuddin sebagai sultan Siak. Pertempuran antara Siak dan Belanda berkecamuk lagi pada tahun 1766[468]. Saat itu, pasukan VOC hampir terpukul

---

467. lihat catatan kaki di bawah ini. Berbagai sumber yang ada mencantumkan urutan raja dan tahun pemerintahan yang agak berbeda.

468. Antara kronologi raja-raja Siak yang terdapat pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak_Sri_**Inderapura** (selanjurnya kita sebut dengan wikipedia saja dan http://history.melayuonline.com/?a=c1BWL29QTS9VenVwRnRCb20%3D=&l=kerajaan-siak (selanjutnya kita sebut dengan melayuonline saja)–kedua *website* diakses pada 10 Juli 2009, terdapat perbedaan kronologi kerajaan Siak; yang akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Wikipedia			**Melayuonline**		
	Nama raja	Tahun pemerintahan		Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Abdul Jalil Rahmad Syah	1725–1746	1	Abdul Jalil Rakhmad Syah Almarhum Buantan	1723–1744
2	Abdul Jalil Rahmad Syah II	1746–1745	2	Mohammad Abdul Jalil Jalaladdin Syah	1744–1760
3	Abdul Jalil Jalaluddin Syah	1765–1766	3	Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah	1760–1761
4	Abdul Jalil Alamuddin Syah	1766–1780	4	Abdul Jalil Alamuddin Syah	1761–1766
5	Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah	1780–1782	5	Mohammad Ali Abdul Jalil Mu'azam Syah	1766–1779
			6	Ismail Abdul Jalil Rakhmat Syah	1778–1781
6	Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah	1782–1784	7	Yahya Abdul Jalil Muzafar Syah	1782–1784
7	Assaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi	1784–1810	8	Assyaidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin	1784–1811
8	Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin	1810–1815	9	Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Kholiluddin	1811–1827
9	Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (Ismail)	1815–1854	10	Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin	1827–1864

mundur, namun pada saat kritis datang surat dari ayah sultan yang isinya meminta agar pertempuran dihentikan. Ternyata, Belanda sebelumnya telah membujuk ayah sultan agar mengirimkan pesan tersebut. Karena taat pada perintah ayahnya, sultan menghentikan pertempuran. Selanjutnya, Tengku Alamuddin diangkat sebagai sultan Siak dengan gelar Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766–1780 atau 1761–1766). Ibukota Siak kemudian dipindahkan ke Senapelan agar lebih dekat dengan lokasi penghasil hasil bumi.

Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1780–1782), atau tepatnya pada tahun 1782[469], dibuka sebuah pasar yang sangat luas, yakni di sekitar Kampung Dalam, Kampung Bukit, dan Kampung Baru. Pasar itu kawasannya meliputi daerah Sungai Senapelan hingga Sungai Air Gemuruh atau Tanjung Riau sekarang. Kelak pasar ini diberi nama Bandar Pekan dan akhirnya diubah menjadi Pekanbaru. Semasa pemerintahannya juga dibuat jalan antara Senapelan ke Taratak Buluh di tepi Sungai Kampar. Perdagangan juga semakin ramai, terutama dengan kedatangan orang-orang dari Minangkabau yang lebih senang melalui jalan Teratak Buluh–Senapelan ketimbang melewati muara Sungai Kampar yang bergelombang besar, sehingga membahayakan kapal yang lalu lalang di sana.

10	Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin I (Syarif Kasim I)	1864–1889	11	Assyaidis Syarif Kasim I Abdul Jalil Syaifuddin	1864–1889
11	Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin	1889–1908	12	Assyadis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin	1889–1908
12	Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin II (Syarif Kasim II)	1915–1949	13	Assyaidis Syarif Kasim II Abdul Jalil Syaifuddin	1908–1946

Terdapat ketidak-sesuaian antara daftar penguasa Siak dan tahun-tahunnya juga berbeda. Di sini akan dicermati tahun 1766 yang menjadi saat pecahnya perang antara Belanda dan Siak. Buku *Sejarah Daerah Riau* halaman 92 mencantumkan tahun 1766. Ini bersesuaian dengan wikipedia, karena menempatkan akhir pemerintahan Tengku Ismail (dalam daftar wikipedia disebut Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah) dan bertentangan dengan melayuonline, karena menuruf daftar tersebut Sultan Ismail sudah tidak memerintah lagi semenjak tahun 1761. Oleh karenanya, bila daftar wikipedia dan keterangan dalam buku S*ejarah Daerah Riau* benar, maka tahun pemerintahan pada melayuonline dapat dianggap kurang tepat. Sebaliknya, jika daftar melayuonline yang benar, maka tahun peperangan itu perlu dikoreksi menjadi 1761. Sumber internet lainnya: **http://www.uq.net.au/~zzhsoszy/states/indonesia/siak.html** (diakses tanggal 12 Juli 2009) memberikan keterangan bahwa Sultan Ismail memerintah antara 1760–1781 dan Sultan Alamuddin memerintah dari 1761–1765. Bila pencantuman ini benar, maka Sultan Ismail dan Sultan Alamuddin telah memerintah bersama semenjak tahun 1761, yang mungkin disebabkan oleh politik *devide et impera* Belanda; sehingga terdapat dua orang sultan atau boleh dikatakan Siak telah terpecah menjadi dua. Jadi menurut sumber ketiga di atas, peperangan itu tampaknya terjadi pada tahun 1761 atau bersesuaian dengan daftar melayuonline. Masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

469. Tahun ini lebih bersesuaian dengan daftar wikipedia; karena menurut melayuonline, sultan tersebut hanya memerintah sampai 1779.

Sultan Abdul Jalil Musafar Syah (menurut buku *Sejarah Daerah Riau*. wikipedia dan melayuonline mengejanya: Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah, memerintah 1782–1784) memindahkan ibukota dari Senapelan ke Mempura demi menghindari perseteruan dengan Sultan Alamuddin. Sultan Yahya tidak lama memerintah dan disingkirkan oleh Said Ali dengan bantuan Muhammad Ali. Said Ali kemudian naik takhta dengan gelar Assaidis Asyarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi (1784–1810/ 1811). Pada zamannya, Kesultanan Siak diperluas hingga ke Temiang. Sultan Said Ali merupakan penguasa yang berpandangan maju, jujur, dan adil. Ia juga meningkatkan kekuatan militer Siak. Panglima-panglima perang terkemuka pada masanya adalah Panglima Besar Said Abdurrachman, Tengku Besar Said Achmad, dan Datuk Laksamana Raja di Laut. Mereka merupakan tokoh kunci dalam perluasan wilayah Siak. Kerajaan Siak kini meliputi Kota Pinang, Pagurauan, Batu Baru, Bedagai, Kualuh, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Langkat, Temiang, dan Deli. Daerah Kubu, Bangko, dan Tanah Putih yang dulu pernah melepaskan diri dari kekuasaan Siak pada kurang lebih tahun 1778 semasa pemerintahan Raja Kecil, kini ditaklukkan kembali. Sultan Said Ali juga pernah menyerang Kerajaan Sambas di Kalimantan Barat pada tahun 1801 (lihat uraian mengenai Kerajaan Sambas). Kerajaan Pelelawan juga tak luput dari serangan Said Ali. Pada tahun 1798, Pelelawan telah menjadi daerah taklukan Siak. Sebagai raja di daerah itu, sultan mengangkat kemenakannya bernama Tengku Hasyim, yang sekaligus juga diberi gelar Raja Muda Siak, menggantikan Sayid Abdurrahman.

Said Ali mengundurkan diri dari singgasana Siak pada tahun 1811 dan digantikan oleh putranya bernama Tengku Ibrahim (gelar Assyaidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin–oleh melayuonline dieja Kholiluddin). Kerajaan Siak mengalami kemunduran pada zamannya. Pada tahun 1822, ditanda-tangani kontrak politik dengan Belanda yang menyatakan bahwa Siak tidak akan menjalin hubungan dengan negara-negara lain selain Belanda. Dengan demikian, pengaruh Belanda terhadap roda pemerintahan Siak semakin besar.

Kendati Siak telah mengadakan perjanjian pada tahun 1822 yang melarangnya mengadakan hubungan diplomatik dengan negara asing lain, tetapi pihak kerajaan sendiri tidak merasa perlu mematuhinya. Sebagai contoh, pada tahun 1823, Inggris masih mengirim misi ke Siak yang dipimpin oleh Anderson. Tujuannya adalah mengokohkan kembali perjanjian yang telah dibina dengan Inggris pada tahun 1818.

Begitu mendengar bahwa Siak mengadakan perjanjian dengan Inggris, Belanda datang ke sana pada bulan Oktober 1823 dengan tujuan mengubah atau memperbaharui perjanjian yang dibuat pada tahun 1822. Sultan Siak bersedia mengadakan perubahan terhadap perjanjian tersebut. Pada saat bersamaan terjadi pertikaian antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian daerah pengaruh mereka, yang dipicu oleh kehendak Inggris untuk menjadikan Singapura sebagai koloni perdagangan mereka. Oleh karena itu, Inggris lalu mendekati Tengku Hussein, putra tertua Sultan Mahmud Syah III dari Johor Riau Lingga, dan menjadikannya sebagai raja. Padahal saudaranya bernama Tengku Abdur Rahman telah menjadi raja menggantikan ayahnya. Dengan demikian, terdapat dua sultan di Kerajaan Johor Riau Lingga yang dilatar belakangi oleh persaingan antara kedua bangsa Eropa tersebut. Perselisihan antara Belanda dan Inggris baru diselesaikan dengan penanda-tanganan *Traktat London* pada tahun 1824, yang membelah Kerajaan Johor Riau Lingga menjadi dua, yakni Johor dan Riau Lingga.

Pada 1 Februari 1858, Kerajaan Siak yang diwakili Sultan Syarif Ismail mengadakan perjanjian kembali dengan Belanda (diwakli Nieuwenhuyz dan Tabias). Perjanjian yang terdiri dari 36 pasal ini antara lain berisikan:

- Kesultanan Siak Sri Indrapura beserta daerah taklukannya mengakui kedaulatan Belanda.
- Adapun daerah-daerah taklukan Siak adalah: Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang.

Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui otonomi kerajaan di daerah Siak asli. Sementara itu, karena Siak telah mengakui payung kedaulatan pemerintah Hindia Belanda; daerah-daerah taklukannya juga secara otomatis berlaku hal yang sama. Dengan berbekalkan surat perjanjian ini, Belanda merasa berhak menegakkan kekuasaannya di vasal-vasal Siak yang terletak di Sumatera Timur sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, padahal beberapa di antaranya masih merupakan bawahan Kesultanan Aceh. Sebagai pendamping dan pengawas bagi sultan Siak akan ditempatkan seorang asisten residen dan kontrolir. Sultan Syarif Kasim I (1864–1889) yang menggantikan Sultan Syarif Ismail memahami betapa kuatnya Belanda saat itu, sehingga perlawanan frontal dengan jalan kekerasan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, sultan lebih memusatkan perhatian pada peningkatan kesejahteraan

rakyat dan kemajuan negaranya. Perdagangan dan perkebunan digalakkan, sehingga Siak bertambah makmur.

Kemajuan di daerah Siak itu mendorong Belanda mendirikan karesiden baru dalam wilayah Kerajaan Siak, yang sebelumnya tergabung dalam Karesidenan Riau. Karena pertumbuhannya yang pesat, residen Riau yang telah disibukkan dengan daerahnya sendiri, dirasa tak sanggup menanganinya lagi. Dengan demikian, terbentuklah Karesiden Sumatera Timur berpusat di Bengkalis (berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 15 Mei 1873 no. 13 dan Lembaran Negara 1873 no.81), yang wilayahnya mencakup pula Kerajaan Siak beserta bekas daerah taklukannya. Menyadari bahwa Belanda sulit ditaklukkan dengan kekuatan militer, sultan tidak berniat membangkitkan permusuhan dengan mereka dan memilih menyibukkan diri dengan kegiatan sosial dan keagamaan. Sultan mendirikan mesjid Syahbuddin, Qubbah Kasyimiah, dan menciptakan mahkota kerajaan. Belanda berupaya memperkecil penghasilan kerajaan Siak dengan mengambil alih beberapa pajak dan pungutan, seperti bea masuk dan keluar sepanjang Sungai Siak, pajak candu, dan lain sebagainya, melalui kontrak politik tertangal 4 November 1875. Beberapa bidang usaha yang menjadi sumber pemasukan bagi sultan di Pulau Rupat diambil-alih pula oleh Belanda, tetapi sebagai kompensasinya sultan menerima pembayaran sebesar f. 28.350 per tahunnya.

Sultan Syarif Kasim I mangkat pada 21 Oktober 1889 dan digantikan oleh Sultan Syarif Hasyim (1889–1908). Sultan baru ini juga diharuskan membuktikan kesetiaannya pada Belanda melalui penanda-tanganan sebuah kontrak politik, yang isinya menghapuskan jabatan mangkubumi dan wakil raja. Sultan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh pendahulunya dan melakukan reorganisasi dalam pemerintahan Siak. Wilayah kesultanan dibagi menjadi 10 propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang hakim polisi; yakni Propinsi Negeri Merbau, Negeri Tebing, Negeri Siak Sri Inderapura, Negeri Bangko, Negeri Tanah Putih, Negeri Kubu, Negeri Pekanbaru, Negeri Tapung Kiri, Negeri Tapung Kanan, dan Negeri Bukit Batu. Sultan juga membangun istana Assirayatul Hasyimiah dan menciptakan buku tata pemerintahan berjudul *Babul Kawait*. Ia mendirikan pula sebuah balairung sebagai ruang kerjanya serta tempat rapat dan penobatan raja baru. Atas buah karyanya dalam memajukan negeri, sultan menerima bintang penghormatan *Ridder in deerde van den Nederlandse* dari pemerintah kolonial Belanda. Pengganti Sultan Syarif Hasyim adalah Sultan

Syarif Kasim II (1908–1949). Untuk memajukan pendidikan di negerinya, sultan mendirikan sekolah HIS pada 15 September 1915.

d. Siak pada zaman Jepang dan awal kemerdekaan

Balatentara Jepang masuk ke Siak melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Begitu tiba di Pekanbaru mereka menemui sultan Siak dengan disertai oleh Datuk Wan Abdurrachman. Untuk memenangkan hati rakyat, Jepang pada mulanya bersikap ramah. Mereka memerintahkan para pejabat kolonial Belanda agar segera menyerahkan diri pada Jepang di istana Siak. Para pemimpin pasukan Jepang berupaya memperlihatkan kekuasaan mereka dengan memerintahkan para pejabat dan kaki tangan Belanda berdiri berjajar di depan istana Siak. Mereka kemudian membentak-bentak para tawanan dan menjemurnya hingga sore hari. Tindakan ini dapat memikat hati rakyat, apalagi Jepang mengizinkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Meskipun demikian, ini hanya awalnya saja. Tidak lama setelah itu, Jepang mulai mengeksploitasi rakyat Riau dan mempreteli kekuasaan sultan. Jepang ingin menangkap sultan Siak, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena khawatir terhadap pergolakan di kalangan rakyat.

e. Sistem pemerintahan

Pemimpin tertinggi kerajaan berada di tangan sultan, yang dibantu oleh suatu dewan kerajaan. Dewan ini berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan sekaligus menjadi penasihat sultan. Anggota dewa itu adalah para datuk, seperti Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar, dan Datuk Laksamana Raja di Laut. Mereka juga berfungsi sebagai kepala suku. Di wilayah kerajaan Siak masih terbagi pula atas daerah kesukuan, yang disebut keperbatinan (dikepalai para *batin*) dan kepenghuluan (dikepalai para penghulu). Tugas para *batin* dan penghulu itu adalah sebagai kepala suku yang tunduk pada sultan. Pembesar-pembesar penting lainnya adalah panglima perang, datuk hamba raja, datuk bintara kiri, datuk bintara kanan, dan datuk bendahara.

f. Sosial kemasyarakatan

Semenjak masa pemerintahan Sultan Said Ali, masyarakat Siak dibagi menjadi lima golongan. Yang pertama adalah mereka yang menyandang gelar *tengku*; yakni keturunan raja. Apabila mereka menikah dengan orang Arab, maka gelar itu bertambah menjadi *tengku said*. Golongan kedua adalah penyandang gelar *wan*; yakni bila seorang

keturunan Arab menikah dengan siapa saja, keturunannya akan menyandang gelar ini. Golongan ketiga adalah mereka yang menyandang gelar *datuk*. Gelar ini tidak diwariskan, karena didasari oleh penunjukan sultan bagi mereka yang memangku jabatan tertentu. Golongan keempat adalah mereka yang menyandang gelar *encik*, yakni keturunan suku Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar, dan Pesisir. Golongan terakhir adalah rakyat kebanyakan.

Komplek Makam Marhum Pekan
Sumber: Juliya

Komplek Makam Marhum Pekan
Sumber: Juliya

Makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1780-1782)
Sumber: Juliya

XIII. SINGINGI

Terletak di Propinsi Riau dan beribukota di Muaralembu. Wilayah Singingi terdiri dari tujuh *nagori* atau *koto* yang dipimpin sembilan *datuk* yang terdiri dari tujuh penghulu (*Datuk nan Batujuah*) dan dua orang raja (*Datuk nan Baduo*). Susunan *Datuk nan Batujuah* adalah sebagai berikut:

- Datuk Bandaro
- Datuk Jelo Sutan
- Datuk Bandaro Kali
- Datuk Mangkuto Sinaro
- Datuk Besar
- Datuk Sinyato
- Datuk Maharajo Garang
- Datuk Sinaro nan Putih
- Datuk Simajo Lelo[470]

Dua orang raja (*Datuk nan Baduo*) merupakan pucuk pimpinan di Singingi, yang terdiri dari:

- Datuk Jelo Sutan (raja adat)
- Datuk Bandaro (raja ibadat)

Pada akhir abad ke-19, Rajo Adat Buo terakhir berusaha keras agar dijadikan raja di sana, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kendati demikian, beliau tetapi dihormati dan menerima sokongan bagi kebutuhan sehari-harinya[471]. Kurang lebih bersamaan dengan itu, raja Gunung Sahilan beserta para penguasa Singingi menginginkan agar daerah mereka digabungkan dengan Sumatera Timur, karena akan memperoleh lebih banyak kekuasaan beserta kekayaan. Apabila digabungkan dengan Sumatera Barat, mareka hanya akan memperoleh kerja rodi saja. Itulah sebabnya, mereka lantas mengirimkan utusan menjumpai sultan Siak agar bersedia menjadi perantara mereka dengan gubernur Sumatera Timur.

Raja Gunung Sahilan menikah dengan saudara perempuan St. Abdul Majid (Angku Kuniang atau Tuan Bujang), yang merupakan anak Rajo Adat Buo (sehingga masih saudara lain ibu Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu dari Pagaruyung). Sebaliknya, St. Abdul Majid menikahi pula saudara perempuan raja Gunung Sahilan.

470. Lihat *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, halaman 16.
471. Lihat *Padang Riwayatmu Dulu*, halaman 211.

Itulah sebabnya, raja Gunung Sahilan mendukung St. Abdul Majid sebagai raja Singingi. Namun belakangan, St. Abdul Majid mengetahui bahwa dengan masuknya kawasan tersebut ke daerah Sumatera Timur, penanaman modal Belanda akan sangat besar. Akibatnya, timbul perselisihan dengan raja Gunung Sahilan mengenai pembagian keuntungan. Ia berpendapat bahwa sebagai putra Raja Adat Buo sudah sepantasnya ia memperoleh bagian lebih besar.

Beliau lantas menobatkan diri sebagai raja Singingi di Kotabaru dengan gelar Yang Dipatuan Saleh. Agar penobatannya diakui, St. Abdul Majid menyatakan bahwa hal itu telah direstui oleh Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu dari Pagaruyung, sehingga empat di antara enam *koto* mengakuinya. Melalui peperangan dua koto lainnya segera mengakui St. Abdul Majid. Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu sendiri tak mengetahui perihal penobatan tersebut. Datuk Jelo Sutan yang dirampas kedudukannya oleh St. Abdul Majid meminta perlindungan raja Gunung Sahilan, dengan janji bahwa jika St. Abdul Majid berhasil dikalahkan, Singingi akan mengakui kekuasaan Gunung Sahilan.

St. Abdul Majid beserta pengikutnya diperangi oleh Gunung Sahilan, sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Kuantan. Setelah mengetahui hal itu, Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu mendukung tindakan raja Gunung Sahilan dan mengangkatnya sebagai wakil mutlak di Singingi. Datuk Jelo Sutan memperoleh kembali kekuasaannya. Pada tahun 1901, sewaktu berkunjung ke Singingi, Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu memberikan hak-hak istimewa seorang raja (*larangan rajo*) pada Datuk Jelo Sutan beserta Datuk Bendahara[472]. Menurut *Regeerings Almanak*, Raja Datuk Bendahara dikukuhkan kedudukannya pada 11 Juli 1909.Selanjutnya, Raja Muhammad Sirih menerima pengukuhannya dari pemerintah kolonial pada 3 Februari 1920.

XIV. TAMBUSAI

Kini terletak di Kecamatan Tambusai, Propinsi Riau. Hikayat menuturkan bahwa penduduk kawasan Rokan berasal dari Semenanjung Melayu. Mereka menyusuri Sungai Rokan dan tiba di kawasan hulunya guna mencari perkampungan baru. Awalnya, mereka membentuk perkampungan yang disebut Karang Besar (Karang Bosa). Ketika itu, terdapat empat suku yang masing-masing dipimpin oleh seorang pucuk suku. Keempat pucuk suku di atas pada gilirannya dipimpin oleh seorang Datuk

472. Lihat *Padang Riwayatmu Dulu*, halaman 214.

Bendahara[473]. Meskipun demikian, karena masing-masing pucuk suku mementingkan masyarakatnya saja, di Rokan kerap terjadi perselisihan dan pertikaian; apalagi Datuk Bendahara gagal mengemban perannya selaku pimpinan yang disegani. Itulah sebabnya masyarakat Rokan lantas menghendaki seorang raja atau sultan.

Mereka lalu sepakat menghadap raja Pagarruyung guna memohon seorang raja atau sultan. Raja Pagarruyung menunjuk salah seorang putra beliau bernama Qahar guna ditakhtakan di kawasan Rokan. Dengan demikian, jadilah ia raja Tambusai pertama bergelar Sultan Mahyuddin atau Jinaputra yang juga digelari Raja Karang Bosa Rokan I. Raja Pagarruyung juga menunjuk seorang yang bertugas membantu raja Tambusai dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan gelar *datuk perpatih*. Saat berlangsungnya penobatan ini ditetapkan bahwa setiap pengangkatan raja Tambusai harus dibacakan catatan penting kerajaan bernama *Siri* beserta *Tarambo Siri*. Daerah kekuasaan Sultan Mahyuddin terletak di Harang Bosar (Karang Bosa) yang kini masuk kawasan Tapanuli Selatan. Beliau memiliki putra bernama Sultan Zainal yang bergelar Raja Karang Bosa (II). Sebagai pembantu beliau diangkatlah empat orang pejabat yang masing-masing bergelar Syarimaharaja, Datuk Paduka Tuan, Tumenggung, dan Paduka Raja[474]. Sultan Zainal memiliki putra-putra bernama Sultan Ahmad dan Tongku Muda serta putri-putri bernama Siti Kumala dan Siti Intan. Sultan Ahmad lalu menggantikan ayahnya dengan gelar Raja Karang Bosa (III). Ketika itu pembesar beliau juga ada empat orang, yakni Datuk Syari Paduka, Datuk Satiya Raja, Datuk Mangkuta Maja Laila, dan Datuk Maja.[475] Ia digantikan putranya, Sultan Abdullah yang bergelar Raja Tambusai (IV). Adapun gelar-gelar para pembesar beliau adalah Datuk Mengkudun, Datuk Satiyamaharaja, Sandara Raja, dan Datuk Majangsa.[476] Yang menjadi raja Tambusai kelima adalah putranya bernama Sultan Syaifuddin. Semasa pemerintahan Sultan Syaifuddin berdirilah Kerajaan Kunto Daressalam yang didirikan oleh dua orang putra raja Johor, yakni Sutan Ganjut dan Sutan Harimau.

Penguasa Tambusai berikutnya adalah Sultan Abdurrahman, saudara Sultan Syaifuddin, yang berputra Duli Yang Dipertuan Tuo serta Poromaisuri (Rojo Nogori Tingga I). Para pembesar beliau adalah Datuk Paduka Sandara, Datuk Sabidin Raja,

473. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, halaman 47.
474. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).
475. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).
476. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).

dan Datuk Paduka Pahlawan[477]. Duli Yang Dipertuan Tuo menjadi Raja Tambusai (VII). Beliau mengangkat empat orang pembesar yang masing-masing bergelar: Datuk Bandahara, Orang Kayo Maharaja, Paduka Simahraja, dan Paduka Mahajalaila[478]. Beliau mempunyai dua orang putra, yakni Tongku Rajo Mudo dan Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman. Tongku Rajo Mudo menjadi raja Rambah I, sedangkan Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman menjadi Raja Tambusai (VIII). Demi menjaga persatuan antara Kerajaan Tambusai dan Rambah diadakanlah ikrar kesetiaan yang disebut *Ikat Karang Padan*[479]. Putranya, Yang Dipertuan Saidina Mukammil menggantikannya dengan gelar Raja Tambusai (IX). Raja-raja Tambusai selanjutnya yang memerintah secara berturut-turut adalah Yang Dipertuan Sakti (Raja Tambusai X), Yang Dipertuan Bosa (Raja Tambusai XI), Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman II (Raja Tambusai XII), Duli Yang Dipertuan Jumadil Alam (Raja Tambusai XIII atau Abdul Hamid), dan Duli Yang Dipertuan Bosa II Maulana Abdul Wahid (Raja Rantaubinuang XIV). Gelar-gelar para pembesar semasa Sultan Yang Dipertuan Bosa adalah Tuk Bandahara, Tuk Orang Kayo Maharaja, Tuk Paduka Simahraja, dan Tuk Paduka Majalaila[480]. Pada masa pemerintahan Duli Yang Dipertuan Bosa II pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Rantaubinuang, dekat Kepenuhan.

Ketika itu yang menjadi imam di Tambusai adalah Maulana Kali. Beliau berasal dari Rambah, tetapi menikah di Tambusai. Maulana Kali memiliki seorang putra bernama Muhammad Saleh. Setelah menamatkan pendidikan agama di daerahnya, ia melanjutkan menuntut ilmu di Rao dan Bonjol. Selama menuntut ilmu itulah, Muhammad Saleh kerap pulang ke kampung halamannya dan mengajarkan masalah keagamaan pada rakyat. Itulah sebabnya, ia lalu dikenal sebagai Pakih Saleh. Bersamaan dengan itu, Muhammad Saleh berkenalan dengan ajaran Paderi yang sedang berkembang di tempatnya menuntut ilmu. Apa yang disampaikan Muhammad Saleh ternyata kurang berkenan di hati Sutan Mahmud, wazir Kerajaan Tambusai, sehingga timbul pertentangan di antara mereka.

Akhirnya, Muhammad Saleh memutuskan membangun surau tersendiri di Dalu-dalu. Kendati demikian, perseteruan antara Muhammad Saleh dan Sutan Mahmud belum mereda. Sutan Mahmud menganggap bahwa ajaran Muhammad Saleh yang

477. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).
478. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).
479. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, halaman 49.
480. Lihat *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (**www.TengkuDini.com**).

bernafaskan paham Paderi telah menyinggung wewenang kerajaan. Akibatnya, ia memengaruhi raja Tambusai beserta dewan adat agar menentang Muhammad Saleh. Demikianlah, Muhammad Saleh akhirnya terpaksa menyingkir dari Dalu-dalu menuju ke Rao. Pertikaian antara kaum adat di Minangkabau dengan kaum Paderi semakin memanas dan meletusnya Perang Paderi. Suasana bertambah keruh setelah ikut campurnya Belanda. Muhammad Saleh yang kemudian dikenal sebagai Tuanku Tambusai turut terjun dalam kancah peperangan itu. Karena keperkasaannya ia digelari pula Harimau dari Rokan.

Ia lalu memutuskan kembali ke kampung halamannya dan membangun kubu pertahanan di Dalu-dalu. Saat itu, pihak kerajaan yang kurang bersimpati pada Tuanku Tambusai telah mengosongkan Dalu-dalu. Tuanku Tambusai kemudian memimpin pasukannya menuju Batang Sosah dan mulai mendirikan perbentangan yang kuat guna menghadapi pasukan pemerintah kolonial. Pada mulanya, Belanda kewalahan menghadapi Tuanku Tambusai, namun seiring berjalannya waktu kemenangan beralih pada pemerintah kolonial. Tuanku Tambusai terpaksa melarikan diri ke Malaya.

مک کارن ڤرکارا ايت مک تيمبول لاه تنتڠ بشر مک بڠ نتيمبولن الله نوح لاڬي مک
فرهو نوح ايت کڤد تنتڠ حرام لاه ترهنتر ن کمدين درڤد ايت مک ترنيد الله ما
ن نوح سکالين مک ترهو کالي عوڠ ن سديکيت ڤد ماس ايت مک ترتاڤ الله
حام ممندڠ عورة ايبڽ ترهو کا ايت مک بڠ فاليڠ لي رام ميليهة عورة ايبڽ
ترهو کا ايت مک بڠ سکر لاه ياڤسن منتوفي عورة ايبڽ يڠ ترهو کا ايت
کمدين درڤد ايت مک باڠونله نوح درڤد ايت درڤد ايت نيد اما تنتڠ تيدور ادن کمد
ين مک بڠ بتاله نبي الله نوح کڤد انقڽ يڠ تيڬ اورڠ ايت افکه اڠکو مک تر
تاڤ کڤد رام مک افکه اڠکو مک ممالين کي موک کڤد حام مک افکه ياڤسي مغ
دفکي موک کڤد کن مک جواب ياڤسي تنتڠ دمات ايبکو ترنيد اعورة
ايبکو ترهو کي اکو ليهة مک اکو منتوفي ن عورة ايبکو يڠ ترهو کي ايت مک
کات ياڤسي حام ايت ترتاڤ مليهة عورة ايبکو ترهو کي ايت دان رام ايت
ممالينکي موک مليهة عورة ايبکو يڠ ترهو کي ايت ايتوڤون مک برڤکير
لي نوح مليهة کلاکون انقڽ يڠ تيڬ اورڠ ايت مک ادله حام ايت سوک لي ما
ليهة يڠ حرام مک رام ايت کنتر دي مليهة يڠ حرام مک ياڤسي ايت تکة اي
مليهة يڠ حرام کمدين درڤد ايت مک برکات نوح کڤد حام انق چوچو اڠکو لي جا
دي رجاي فاسيق دکالڽ يڠ فاسيق ايت منجاد توبة دان اد کلاڽ اورڠ يڠ
فسيق ايت ماتي ڤاي دري تو دان فاسيق يڠ توبة ايت [illegible] دامڤون
الله تعالى دان فاسيق يڠ تياد توبة ايت دبناساکن الله تعالى ايتله اد ن کمدين
درڤد ايت مک برکات ڤول نبي نوح کڤد انقڽ رام دان انقڽ چوچو اڠکوله يڠ
منجادي رجاي ظاليم برمول ظاليم ايت جک توبة اي اڤابيلا دامڤوني الله تعالى
دوسان دان جک تياد توبة اورڠ ظاليم ايت دبناساکن الله تعالى اکن
دي اخيرتڽ والله اعلم کمدين مک برکات ڤول نوح کڤد انقڽ ياڤسي دان

Halaman *Terombo Siri Kerajaan Tambusai* dari Ibu Tengku Dini (www.TengkuDini.com)

Sewaktu pasukan Tuanku Tambusai memasuki Dalu-dalu, Sultan Duli Yang Dipertuan Jumadil Alam Abdul Hamid beserta kerabat kerajaan telah menyingkir ke Rokan Hilir yang menjadi wilayah Siak. Sewaktu beliau mangkat, singgasana kerajaan diserahkan pada Sultan Duli Yang Dipertuan Bosa II Maulana Abdul Wahid. Kendati demikian, hal ini diprotes sultan Siak karena menobatkan raja di wilayah kekuasaannya. Untunglah sultan Siak dapat diberi penjelasan bahwa pengangkatan raja itu hanya sekedar pewarisan takhta semata.[481]

Kepemimpinan Duli Yang Dipertuan Bosa II diteruskan oleh putranya Yang Dipertuan Muhammad Soleh selaku Raja Rantaubinuang (XV). Ia digantikan oleh Sultan Zainal Abidin, yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda antara tahun 1901–1904. Beliau memohon bantuan Turki dalam rangka menghadapi Belanda, tetapi sultan Turki tidak mengabulkannya. Beliau juga pernah meminta dukungan sultan Perak dan Ipoh, yang hanya memberikan bantuan sekedarnya. Karena kalah dalam persenjataan, Sultan Zainal Abidin dapat ditundukkan oleh Belanda. Ia diasingkan ke penjara Suka Miskin dan setelah itu dipindah ke penjara Madiun hingga wafatnya pada tahun 1904. Itulah sebabnya Sultan Zainal Abidin memperoleh gelar Murhum Mangkat Madiun.

Sementara itu dari Dalu-dalu memerintah Tengku H. Muhammad Sutan Muruhum Qahar Raja di Daludalu (XVI). Ia digantikan secara berturut-turut oleh Tengku Abdul Hamid Sultan Jumadil Alam (Raja di Dalu-dalu XVII), Tengku Haji Muhammad Silung (Raja di Daludalu XVIII), Tengku Muhammad Yudo Yang Dipertuan Bosa (Raja di Daludalu XIX), dan Tengku Haji Ilyas Tengku Silung (Raja di Daludalu XX). Semasa pendudukan Jepang, adik raja Tambusai yang bernama Tengku Paltnasif pernah ditawan oleh Jepang, tetapi setelah itu dibebaskan kembali.

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI BELITUNG

I. BADAU

Didirikan pada abad ke-15 dengan raja pertamanya bernama Datuk Mayang Geresik. Pusat kerajaan berada di kawasan Pelulusan; sedangkan wilayahnya mencakup Badau, Ibul, Bangek, Bentaian, Simpang Tiba, Buding, Manggar, dan Gantung. Urutan raja-raja Badau berikutnya adalah: Batin Badau, Badih Patah, Datuk Badu, Datuk Deraim, Datuk Abdul Rachman, Datuk Abdul Lawal, Kik Mohammad Arief,

481. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, halaman 62.

dan Kik Djoeki. Sementara itu, keturunan yang sekarang adalah Bapak Djohar yang bekerja sebagai juru kunci museum Badau[482].

II. BALOK

Pendiri kerajaan ini adalah seorang bangsawan keturunan Kerajaan Mataram di Jawa yang bernama Kiai Agus Masud atau Kiai Agus Gedeh Ja'kub. Beliau kemudian bergelar Depati Cakraningrat I (1618-1661). Pengganti beliau, Kiai Agus Mending, bergelar Depati Cakraningrat II (1661-1696), yang memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Balok Lama ke Tebing Tinggi (kemudian dikenal sebagai Balok Baru). Raja Balok selanjutnya adalah Kiai Agus Gending, bergelar Depati Cakraningrat III (1696-1700). Semasa pemerintahan beliau, Belitung dibagi menjadi empat wilayah yang masing-masing dipimpin seorang *ngabehi*:

- Ngabehi Badau bergelar Ngabehi Singa Juda atau Singa Juda.
- Ngabehi Sijuk bergelar Ngabehi Mangsa Juda atau Krama Juda.
- Ngabehi Belantu bergelar Ngabehi Sura Juda.
- Ngabehi Buding bergelar Ngabehi Istana Juda[483].

Raja berikutnya adalah Kiai Agus Bustam (kakak Kiai Agus Gending), begelar Depati Cakraningrat IV (1700-1740). Semasa pemerintahannya agama Islam tersebar di Belitung. Beliau menjadi raja, karena putra mahkota bernama Kiai Agus Siasip tidak bersedia menjadi raja dan lebih memilih menjadi penghulu. Beliau merupakan penghulu pertama di Belitung[484]. Pada tahun 1705, Kiai Agus Bustam, mengangkat seorang ulama asal Mempawah bernama Datuk Achmad (dikenal juga sebagai Datuk Mempawah) selaku ngabehi di Belantu.

Penguasa berikutnya bernama Kiai Agus Abudin, bergelar Depati Cakraningrat V (1740-1755). Sikapnya yang keras menyebabkan timbulnya perpecahan dengan adiknya, Kiai Agus Usman, yang kemudian membangun pemukiman baru di sungai Cerucuk. Terjadi pertikaian antara kakak beradik ini, sehingga akhirnya Kiai Agus Usman meminta bantuan sultan Palembang. Utusan Palembang lantas menjemput Kiai Agus Abudin ke Palembang dan tidak memperkenannya kembali ke Belitung hingga wafatnya.

---

482. Lihat *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, halaman 6-7.
483. Lihat *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, halaman 6-7.
484. Lihat http://www.ubb.ac.id/featurelengkap.php?judul=Menguak%20Sejarah%20Di%20Pulau%20Belitung%20%28Belitong%20/%20Biliton%29&&nomorurut_berita=109, diunduh pada 25 November 2013.

Kiai Agus Usman menggantikannya sebagai Depati Cakraningrat VI (1755-1785). Sebagai imbalan atas bantuan Palembang, ia harus menyerahkan seribu keping besi setiap tahunnya. Beliau kemudian digantikan putranya, Kiai Agus Hatam, bergelar Depati Cakraningrat VII (1785-1815). Beliau mendatangkan para penambang timah China dari Johor. Istri kedua beliau adalah seorang keturunan China yang kemudian berganti nama menjadi Dayang Kuning. Pada zamannya, Belitung resmi menjadi jajahan Inggris (20 Mei 1812). Ketika itu, residen Inggris di Bangka, Mayor Gourt, mengangkat Raja Akil selaku penguasa Belitung, dengan tujuan memutuskan hubungan antara Depati Cakraningrat VII dengan Raden Keling yang berdiam di Toboali, Bangka, seorang tokoh yang tidak disukai Inggris. Dengan siasat liciknya, Raja Akil berhasil membunuh Depati Cakraningrat VII. Sepeninggal beliau, putranya bernama Kiai Agus Rahad, menggantikan kedudukan beliau sebagai Depati Cakraningrat VIII (1815-1856). Raja Akil sendiri kemudian berhasil diusir dari Belitung. Pada 1 Juli 1838, Kiai Agus Rahad diakui sebagai Depati Belitung.

Kiai Agus Rahad membagi daerah kekuasaannya menjadi enam distrik, di mana sebelumnya terdapat empat wilayah yang masing-masing dikepalai seorang *ngabehi*. Karena tidak memiliki putra mahkota, Kiai Agus Rahat digantikan oleh adiknya Kiai Agus Mohammad Saleh dengan gelar Depati Cakraningrat IX (1856-1873). Pada masa pemerintahan beliau berdirilah perusahaan penambangan timah bernama Biliton Maatschapij (15 November 1860), di mana Kiai Agus Mohammad Saleh sendiri memiliki saham pada tambang timah di Bengkuang, selaku cikal-bakal bagi kota Manggar. Pertambangan timah makin berkembang luas di Belitung dan banyak penambang China didatangkan ke sana. Pada tahun 1873, Kiai Agus Mohammad Saleh yang telah lanjut usia mengundurkan diri sebagai depati. Tugas pemerintahan diembankan pada Kiai Agus Jalil. Semenjak saat itu gelar depati dihapuskan, sehingga Kiai Agus Mohammad Saleh merupakan penguasa terakhir yang menyandang gelar Depati Cakraningrat.

Kiai Agus Jalil menagih janji Belanda terkait kesejahteraan rakyat, sehingga pada tahun 1874 dibangun sekolah rakyat pertama. Pada tahun 1876, Kiai Agus Mohammad Saleh meninggal. Tiga tahun kemudian, Belanda mengangkat Kiai Agus Endek (1879-1890) sebagai kepala distrik Belitung.yang berkedudukan di Tanjungpandan. Pada tahun 1890, Belitung dibagi menjadi lima distrik, yakni: Buding, Dendang, Gantung, Manggar, dan Tanjungpandan[485].

485. Lihat *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, halaman 8.

III. BELANTU

Raja pertamanya bernama Datuk Achmad bergelar Datuk Mempawah yang berkedudukan di Kelekak Ludai (Kelurahan Mentigi)[486]. Suatu ketika, ia berlayar sampai ke Kalimantan dan dalam perjalanannya kembali ke Belitung, beliau jatuh sakit serta meninggal dunia. Karena masih berada di dekat Kalimantan, jenazah beliau dibawa kembali ke sana dan dimakamkan di Mempawah. Itulah sebabnya beliau kemudian digelari Datuk Mempawah. Sebagai bukti bahwa beliau telah meninggal, potongan kukunya beserta rambutnya dibawa kembali ke Belitung dan dimakamkan di Kelekak Ludai.

Beliau digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Kiai Agus Tining dan Kiai Agus Kedjur. Makam mereka kini masih dapat dijumpai di Kelekak Ludai dan begitu pula halnya dengan pusaka-pusaka berupa keris, pedang, meriam kecil, beserta stempel bertuliskan aksara Arab: "Ngabehi Surayuda Kepala dari Belantu Negeri Belitung 1262."[487] Benda-benda pusaka ini masih disimpan oleh Kiagus Umar, bekas lurah Membalong yang masih keturunan raja Belantu.

Kiai Agus Deraip, yang merupakan keturunan keempat raja Belantu diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai *ngabehi* (kepala belantu), yang berkedudukan di kampung Membalong[488]. Ketika itu di Belitung terdapat empat orang *ngabehi*, yang masing-masing bekedudukan di Belantu (Membalong), Badau, Sijuk, dan Buding. Sesudah Kiagus Deraip, jabatan *ngabehi* dihapuskan dan sebagai pengganti beliau diangkatlah kemenakannya bernama Kiai Agus Mohamad Ali, yang dipindahkan menjadi *ngabehi* di Lenggang (Gantung). Selanjutnya secara berturut-turut yang menjadi penggantinya adalah Kiai Agus Adam, Kiai Agus Azan, dan terakhir Kiai Agus Umar[489]. Menurut catatan Kiai Agus Umar, pada tahun 1851 peduduk Belantu terdiri dari 450 jiwa suku Melayu, 464 jiwa suku Sawang, dan 27 jiwa orang Tionghoa.

IV. BUDING

Raja pertama Buding adalah Datuk Kemiring Wali Raib. Beliau secara berturut-turut digantikan oleh Taila, Duame, Kahar, dan Kadir[490].

486. Lihat *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, halaman 15.
487. Lihat *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, halaman 16.
488. Lihat *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, halaman 17.
489. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, halaman 8.
490. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924-1950*, halaman 8.

D. KERAJAAN-KERAJAAN DI BENGKULU

I. ANAK SUNGAI & MUKO MUKO

a. Cikal-bakal dan perkembangan Kerajaan Anak Sungai

Kerajaan ini kini berlokasi di bagian paling utara Propinsi Bengkulu. Wilayahnya meliputi lembah Sungai Menjuto di utara hingga Air Urai di selatan. Daerah ini sendiri masih dibagi menjadi Negeri Empat Belas Kota (Muko-Muko), Negeri Lima Kota (Bantal), Ketaun, dan lain sebagainya. Rakyat Anak Sungai terdiri dari suku Anak Sungai yang membuka areal persawahan serta membudi-dayakan lada Berdasarkan tradisi, Kerajaan Anak Sungai dianggap sebagai cabang Kerajaan Minangkabau. Kerajaan ini pada abad ke-17 merupakan vasal Kerajaan Indrapura, yang saat itu diperintah oleh Sultan Muzaffar Syah.

Kerajaan Indrapura menempatkan wakilnya di Anak Sungai, selaku kerajaan bawahannya, yang bergelar *raja adil*. Pada pertengahan abad ke-17, *raja adil* yang berkuasa di Anak Sungai adalah Tuanku Sungut, saudara sepupu Sultan Muhammad Syah (1660–1691) dari Indrapura. Para kurun waktu yang bersamaan, timbul keinginan memisahkan diri dari Indrapura. Niat ini didukung pula oleh Tuanku Sungut dan Tuanku Di Bawa Pauk sehingga menimbulkan intrik-intrik politik.

Pada 1685 dilakukan perjanjian dagang antara Sultan Muhammad Syah dengan Serikat Dagang Hindia Timur (EIC) milik Inggris, yang diwakili oleh Du Jardin. Pergolakan politik di Anak Sungai ini untuk sementara dapat diredakan dengan bantuan Inggris yang mendirikan kantor dagang dan pos pertahanan di Menjuto pada tahun 1686. Kekacauan terjadi lagi pada 1691 ketika Sultan Muhammad Syah dikudeta oleh Raja Mansur, yang berhasil merebut takhta dengan dukungan Belanda. Karena itu, Sultan Muhammad Syah terpaksa melarikan diri ke Menjuto. Saat itu, yang berkuasa di Anak Sungai adalah Raja Itam. Ketika wafat pada 1695, putranya yang bernama Gulemat diangkat sebagai penguasa Anak Sungai yang baru, walaupun masih di bawah umur.

Sultan Muhammad Syah memanfaatkan kematian Raja Itam dengan memasukkan kembali Anak Sungai sebagai bagian Indrapura. Tetapi keinginannya ditolak oleh Inggris yang tetap mempertahankan Gulemat. Inggris akhirnya menarik diri dari Bengkulu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Mansur menanamkan kembali kekusaan Indrapura dengan menempatkan salah seorang putranya bernama

Merah Bangun sebagai wakil Indrapura yang bergelar *raja adil* di Menjuto. Inggris mengajukan suatu kompromi dengan mengakui Merah Bangun dan Gulemat sebagai penguasa bersama Kerajaan Anak Sungai pada 16 September 1695. Selanjutnya, pada 26 September 1695, Inggris mengadakan perjanjian dagang dengan Anak Sungai dan memperoleh hak monopoli dagang di kawasan antara Menjuto dan Ketahun.

Agar tidak terjadi perselisihan, dilakukan pembagian wilayah, *raja adil* berkuasa atas Menjuto, sedangkan Gulemat menguasai daerah-daerah Kerajaan Anak Sungai lainnya. Pembagian itu tidak memuaskan Merah Bangun selaku *raja adil*. Ia menarik dari dari pemerintahan bersama pada tahun 1699 dan meninggalkan Gulemat sebagai penguasa tunggal Kerajaan Anak Sungai. Ia pindah ke Muko-Muko dan menjadi penentang Gulemat. Raja Makota, ayah tiri Gulemat, juga memberontak terhadap Gulemat dan berhasil merebut Menjuto pada tahun 1716. Tuanku di Bawa Pauk akhirnya diangkat sebagai penguasa Menjuto yang diakui oleh EIC dengan gelar Sultan Kecil Muhammad Syah (1716–1728).

Pada tahun 1728, Sultan Kecil Muhammad Syah dengan suka rela mengundurkan dirinya. Berdasarkan kesepakatan para kepala dusun (*proatin*) diajukan permohonan kepada sultan Indrapura agar putranya bernama Merah Bangun diangkat sebagai penguasa suatu negeri merdeka yang beribu kota di Muko-Muko. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Muko-Muko dengan Merah Bangun sebagai sultan pertamanya yang bergelar Sultan Gendam Mersah (1728–1752). Kerajaan Anak Sungai dengan demikian boleh dikatakan berakhir dan digantikan oleh Kerajaan Muko-Muko.

b. Era Kerajaan Muko-Muko

Sultan Pesisir Barat Syah (1752–1789) yang menggantikan Sultan Gendam Mersah memerintahkan rakyatnya menghancurkan perkebunan lada, karena komoditas tersebut malah menjadi sumber keresahan di negerinya. Demi membina hubungan yang baik dengan sultan, wakil EIC mengadakan kunjungan kehormatan padanya setiap tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, wakil pemerintah Inggris di Fort Malborough yang telah ditingkatkan statusnya menjadi kepresiden (*presidency*) pada tahun 1760 dengan seorang gubernur sebagai kepalanya makin kokoh cengkeramannya atas Bengkulu. Tanam paksa lada diberlakukan dan aparat mereka mulai bertindak sewenang-wenang demi meningkatkan kuota penyerahan lada.

Akibatnya, Sultan Pesisir Barat Syah melaporkan penindasan aparat pemerintahan Inggris pada gubernur EIC di Fort Marlborough. Namun laporan ini tak mendapatkan

tanggapan serius, sehingga rakyat mengadakan pertemuan rahasia pada tahun 1772. Selanjutnya pada tahun berikutnya (1773) kembali diajukan nota protes pada Residen Robert Hay (1766–1775). Tetapi tetap tak membuahkan hasil apa-apa. Itulah sebabnya, ketegangan yang terjadi laksana bara dalam sekam dan berpotensi meledak sewaktu-waktu.

Perlawanan terhadap Inggris benar-benar pecah pada tahun 1804, yang dipimpin oleh Sutan Asing, saudara sultan Muko Muko, dengan didukung oleh Pa Munchu dan Sutan Sidi (kepala daerah pegunungan). Mereka membakar beberapa dusun dan melarikan sejumlah penduduk. Inggris tidak tinggal diam dan mengirimkan pasukannya dari benteng Fort Marlborough di bawah pimpinan Letnan Hastings Dare pada 22 November 1804. Kendati terjadi pertempuran sengit, Inggris tak berhasil menangkap pucuk pimpinan pemberontakan, karena mereka melarikan diri ke pegunungan. Ekspedisi berikutnya dikirimkan pada 9 Februari 1805, tetapi tetap gagal menangkap ketiga pemimpin pemberontakan di atas. Berkat perantaraan Depati Koto Bahru pada 2 Maret 1805 dicapai perdamaian dengan pihak Inggris, yang meneruskan perjalanannya ke Muko Muko sebagai ajang unjuk kekuatan.

Semasa pemerintahan Raffless, kedudukan residen Inggris dihapuskan dan pemerintahan kerajaan diserahkan kepada Sultan Hidayat Syah (1789–1828), pengganti Sultan Pesisir Barat Syah. Selaku penguasa Muko Muko, ia menerima tunjangan 600 Ringgit sebulan dari Inggris. Bengkulu diserahkan oleh Inggris ke tangan Belanda pa tanggal 6 April 1825 berdasarkan *Traktat London*. Penyerahan ini tentu saja mencakup pula Kerajaan Muko-Muko. Saat berlangsungnya penyerahan ini, Muko Muko meliputi kawasan-kawasan Empat Belas Kota, Lima Kota (Bantal), dan Proatin Nan Kurang Satu Enam Puluh (Seblat). Wilayahnya terdiri dari 89 dusun dengan populasi 9.448 jiwa.

Pada mulanya pemerintah kolonial Belanda tetap membayar tunjangan sebesar 600 Ringgit sebagaimana yang telah dijanjikan Inggris. Namun belakangan Belanda menghentikan pembayaran tunjangan ini. Berkali-kali sultan menagihnya, tetapi Belanda menjawab bahwa penguasa Muko Muko itu seharusnya dapat mencari sendiri nafkah bagi dirinya dengan menarik pajak yang pantas dari rakyatnya. Akibatnya, sultan merasa dirinya merdeka dan menganggap Belanda tak berhak lagi campur tangan dalam urusan negerinya.

Sultan Takdir Khalifatullah (1828–1870) menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Muko Muko. Meskipun demikian kedudukannya hanya setara dengan bupati (*regent*). Berdasarkan surat keputusan no.41 tertanggal 22 April 1870, Belanda secara sepihak menghapuskan Kabupaten Muko Muko. Putra Sultan Takdir Khalifatullah bernama Sultan Hidayat (1870–1888) yang sempat mendampingi almarhum ayahnya sebagai bupati diangkat sebagai Datuk Pasar Muko Muko oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai penutup uraian mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Muko Muko, perlulah kiranya diuraikan pula mengenai urutan para sultan Muko Muko menurut Le Rutte. Daftar nama sultan yang terdapat pada sumber tersebut agak berbeda dan demikian pula angka tahunnya. Berikut ini adalah nama-nama sultan Muko Muko menurut sumber di atas yang ditulis dengan ejaan aslinya[491]:

1. Toeankoe Padoeka Sarie Maharadja Soeltan Gandam Sah, memerintah 1681–1761.
2. Toeankoe Soeltan Sarie Maharadja Pasissir Barat Sah, memerintah 1761–1806.
3. Toeankoe Sarie Maharadja Soeltan Chalipatoellah Indijat Sah, memerintah 1806–1833.
4. Toeankoe Sarie Maharadja Soeltan Hidajatoella Sah, memerintah 1833–1836.
5. Toeankoe Sarie Maharadja Soeltan Takadir Chalifatoellah Sah, memeritah 1836–1859.

Sultan Gendam Mersah tampaknya sama dengan Toeankoe Padoeka Sarie Maharadja Soeltan Gandam Sah. Selanjutnya, Sultan Hidayat Syah kelihatannya sama dengan Toeankoe Sarie Maharadja Soeltan Hidajatoella Sah. Sultan Sultan Takdir Khalifatullah dapat disamakan dengan Toeankoe Sarie Maharadja Soeltan Takadir Chalifatoellah Sah. Sumber-sumber lain memberikan informasi yang agak membingungkan. Asisten Residen Francis menyebutkan bahwa semasa pemerintahan Raffles di Bengkulu (1818–1824), yang berkuasa sebagai sultan di Muko Muko adalah Idaiattsa Khalifah Allah dengan gelarnya Sultan Selan. Sementara itu, Wellan, petugas pencatatan arsip Inggris, melaporkan bahwa pada 21 April 1822, yang diangkat sebagai sultan Muko Muko adalah Kalifat Allah Hidajat Shah.[492]

491. Lihat *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, halaman 56.
492. Lihat *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, halaman 56.

c. Sistem pemerintahan

Negara terbagi atas dusun-dusun yang masing dikepalai oleh seorang kepala dusun atau *proatin*. Masing-masing kepala dusun itu tunduk pada sultan; sedangkan terhadap para menteri, mereka memberikan penghormatan dan upeti pada waktu-waktu tertentu. Pola pemerintahan negeri ini berciri Melayu, dengan kekuasaan tertinggi secara teoritis berada di tangan sultan yang berkedudukan di Menjuto. Dalam melaksanakan tugasnya, sultan dibantu oleh dewan menteri. Di antara anggota dewan menteri, menteri negeri Empat Belas Kota atau Muko-Muko adalah yang tertinggi kedudukannya. Sementara itu menteri Lima Kota bertugas mengurusi keamanan dalam negeri.

Menariknya, menurut tradisi yang dianut di Muko Muko, sultan harus diangkat dan dipilih lagi di antara berbagai calon yang ada setiap tahunnya[493]. Kewenangan terbesar dalam memilih sultan ini berada di tangan menteri negeri Empat Belas Kota. Berdasarkan laporan Jack pada 4 April 1822 terdapat tiga calon sultan yang ikut serta dalam pemilihan, yakni sultan dari Indrapura, sultan yang sebelumnya menjabat, dan seorang calon baru. Kendati demikian, pemilihan dimenangkan oleh sultan lama, karena mendapat dukungan Raffles.

II. DEPATI TIANG EMPAT

a. Cikal-bakal dan perkembangan Kerajaan Depati Tiang Empat

Kerajaan ini terletak di daerah pegunungan Dataran Tinggi Bukit Barisan. Pada mulanya di kawasan ini belum ada kerajaan, dan suku bangsa Rejang yang mendiami daerah ini masih mengembara di Renah Sekalawi atau Pinang Belapis. Mereka hidup dari hasil hutan dan Sungai Ketahun. Setelah itu mereka mulai menetap di suatu tempat dan mengangkat pemimpin komunitasnya yang disebut *ajai*. Masyarakat masih hidup secara komunal, dalam artian belum mengenal milik perseorangan. Seluruh harta kekayaan dianggap milik bersama dan demikian pula dengan segenap kerugian beserta keuntungan yang mereka alami. Sesudah menetap di suatu tempat tersebut, mereka mulai mengenal kegiatan berladang.

Secara keseluruhan pada saat itu ada empat komunitas yang dipimpin ajainya masing-masing, yakni:

493. Lihat *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, halaman 183.

- Ajai Bitang memimpin komunitas yang ada di Pelabai, yakni daerah Marga Suku IX.
- Ajai Begelan Mato memimpin komunitas yang ada di Kuteui Bolek Tebo, yakni daerah Marga Suku VIII.
- Ajai Siang memimpin komunitas yang ada di Siang Lakat, yakni daerah Marga Jurukalang
- Ajai Tiea Keteko memimpin komunitas yang ada di Bandar Agung, yakni daerah Marga Suku IX.

Zaman pemerintahan para *ajai* ini diperkirakan berawal pada pertengahan abad ke-14 dan dikenal sebagai *Rejang Tiang Empat*[494]. Para *ajai* itu masih merupakan anggota masyarakat biasa, walaupun merupakan tokoh yang dihormati serta dipercaya memimpin rakyatnya.

Bersamaan dengan masa pemerintahan para *ajai* ini, datanglah empat orang biku kakak beradik dari Majapahit ke Renah Sekalawi; yakni Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bermano. Menurut Prof. Dr. Haji Abdullah Siddik, mereka bukan datang dari Majapahit, tetapi dari Melayu, yang saat itu menjadi bagian Majapahit[495]. Kedatangan mereka diperkirakan terjadi pada kurang lebih awal abad ke-15. Berkat kebijaksanaan mereka, keempat biku itu dipilih oleh para *ajai* sebagai pemimpin mereka. Biku Sepanjang Jiwo menggantikan Ajai Bitang memerintah di Pelabai. Biku Bembo menggantikan Ajai Siang dan memerintah dari Sukanegara dekat Tapus. Biku Bejenggo memerintah di Batu Lebar dekat Anggung Rejak di Kesambe. Biku Bermano berkedudukan di Kuteui Rukam.

Suku Rejang mulai bertambah banyak dan menyebar ke mana-mana. Selain itu, mereka mulai mengenal kegiatan persawahan di samping berladang. Pada masa ini tulisan telah dikenal. Suatu kali, legenda menyebutkan bahwa di negeri mereka berjangkit wabah penyakit, yang banyak memakan korban jiwa. Karena berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkal bencana tersebut dan semuanya tidak membuahkan hasil; mereka meminta bantuan seorang peramal. Ahli nujum meramalkan bahwa penyebab bencana tersebut adalah seorang beruk putih yang hidup di atas pohon besar bernama Benuang Sakti. Ke arah mana sang beruk menghadap saat mengeluarkan suara, di situlah akan timbul bencana. Karena itu, mereka sepakat mencari pohon Benuang

494. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 14.
495. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 14.

Sakti dan menebangnya. Mereka lalu berpencar ke empat penjuru guna menemukan pohon tersebut. Yang pertama kali menemukannya adalah Biku Bermano beserta anak buahnya. Namun anehnya ketika pohon itu hendak ditebang, bukannya roboh, tetapi malah bertambah besar. Akhirnya tibalah rombongan lainnya di tempat itu. Mereka juga tidak kunjung berhasil menebangnya. Oleh karenanya, mereka lalu bertapa memohon petunjuk dewata mengenai bagaimana cara merobohkan pohon itu.

Menurut petunjuk yang mereka terima dari dewata, untuk merobohkannya tujuh orang gadis muda harus diperintahkan berdiri mengelilingi pohon itu. Namun, mereka mempertimbangkan pula bahwa gadis yang berada di arah jatuhnya pohon tentunya akan menjadi korban. Karenanya, demi mengatasi bahaya tersebut, mereka menggali parit secara bergotong royong sebagai tempat perlindungan bagi ketujuh gadis agar tak ada seorangpun yang mati tertimpa pohon. Demikianlah, pohon itu akhirnya berhasil ditebang serta dirobohkan. Beruk putih yang berada di atasnya ikut raib seiring dengan tumbangnya pohon tersebut ke bumi.

Pada perkembangan selanjutnya, terbentuklah kesatuan masyarakat yang disebut *petulai*; yakni:

- Petulai Tubeui berpusat di Pelabai, di bawah pimpinan Biku Sepanjang Jiwo
- Petulai Jurukalang berpusat Sukanegeri, di bawah pimpinan Biku Bembo
- Petulai Selupuei berpusat di Batu Lebar, di bawah pimpinan Biku Bejenggo
- Petulai Bermani berpusat di Kueui Rukam, di bawah pimpinan Biku Bermano

Dengan demikian, terbentuklah *Rejang Empat Petulai*. Biku Sepanjang Jiwo kemudian kembali ke Majapahit. Oleh Kerajaan Pagarruyung (Minangkabau) sebagai penggantinya ditunjuk Rajo Megat (1505–1550), yang menikah dengan putri Ajai Bitang bernama Putri Gilan atau Putri Rambut Seguling, di mana ia tetap memerintah dari Pelabai. Rajo Megat digantikan oleh putranya bernama Raja Mawang (1550–1600), yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Kuteui Belau Sateun. Raja Mawang mempunyai tujuh orang anak; sedangkan putrinya yang bungsu bernama Serindang Bulan menikah dengan Tuanku Indrapura Sultan Muzaffar Syah (±1620–1660).

Pengganti Raja Mawang adalah putranya yang bernama Ki Karang Nio dengan gelar Sultan Abdullah (1600–1640). Sementara itu, saudara-saudaranya yang lain mendirikan kerajaan-kerajaan kecilnya sendiri di luar daerah Lebong yang disebut *migai* atau *merigi*. Sesudah wafatnya Sultan Abdullah Petulai Tubeui pecah menjadi

dua, yakni Petulai Suku VIII dan Suku IX. Petulai Suku VIII didirikan oleh putra Sultan Abdullah bernama Ki Pati yang berputra 8 orang, sehingga negerinya disebut Suku VIII. Putra yang lain, Ki Pandan, mendirikan Petulai Suku IX, karena putranya ada 9 orang.

Sementara itu, *petulai-petulai* lainnya, Jurukalang, Bermani, dan Selupu tetap bertahan dan menjadi asal usul orang Rejang yang tersebar ke mana-mana. Demi mempersatukan suku Rejang yang telah tersebar ke mana-mana, diadakan pertemuan besar di Lebong. Pertemuan ini dihadiri pula oleh orang-orang Rejang yang telah terserak di luar Lebong; di mana wakil-wakil mereka adalah empat orang pemimpin Sindang Empat Lawang, lima orang pemimpin Sindang Beliti, tiga orang pemimpin dari Ulu Musi, 11 orang pemimpin dari Ranah Pesisir, dan tujuh orang pemimpin dari Ranah Ketahun.

Pertemuan tersebut membicarakan masalah adat istiadat dan pembagian wilayah yang didiami oleh suku Rejang. Kawasan yang didiami suku Rejang akan dibagi menjadi empat kesatuan yang disebut luak; yakni Lebong, Ulu Musi, Lembok Beliti, dan Pesisir. Pecahan-pecahan Petulai Tubeui, yakni Petulai Suku VIII dan Suku IX diakui pula eksistensi dan demikian pula dengan pecahan-pecahannya di luar Lebong yang disebut *merigi*. Pemimpin Petulai Suku VIII, Ki Pati, yang berkedudukan di Karanganyar diberi gelar Depati Kemala Ratu. Selanjutnya, Ki Pandan, pendiri Petulai Suku IX, diberi gelar Rajo Depati. Pemimpin Petulai Bermani, yakni Sapau Lanang, yang berkedudukan di Kuteui Rukam digelari Depati Pasak Bumi. Rio Tado, pemimpin Petulai Jurukalang yang berkedudukan di Tapus digelari Depati Rajo Besar. Ajai Malang, kepala Petulai Selupu, digelari Depati Tiang Alam, yang berkedudukan di Alas Tebing. Dengan demikian terbentuklah susunan yang disebut *Depati Tiang Empat* dengan *rajo depati* sebagai pemimpin tertingginya.

b. Sistem pemerintahan

Pemimpin tertinggi atau raja Kerajaan Depati Tiang Empat disebut *rajo depati* memerintah di Lebong. Negeri ini terbagi menjadi empat kawasan yang disebut *luak*; yakni Luak Lebong, Luak Ulu Musi, Luak Lembak Beliti, dan Luak Pesisir, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *depati*. Raja dapat diumpamakan sebagai pemegang peti adat, sementara empat *depati* lainnya adalah pemegang anak-anak kuncinya. Warga kerajaan ini seluruhnya terdiri dari suku Rejang.

III. SELEBAR

Salah satu sumber sejarah menyebutkan bahwa Kerajaan Selebar berasal dari sebuah kerajaan kecil bernama Jenggalo. Letaknya berada di selatan Sungai Serut. Oleh seorang tokoh pemberani dan bijaksana yang namanya tak disebutkan, kerajaan ini diperluas ke daerah-daerah di sekelilingnya[496]. Sumber lainnya mengatakan bahwa cikal-bakal kerajaan ini adalah Rangga Janu, salah seorang bangsawan Majapahit. Kepergian Rangga Janu beserta beberapa bangsawan Majapahit ke Bengkulu ini disebabkan kerajaannya ditaklukkan oleh Adipati Unus dari Demak (kurang lebih tahun 1520-an).

Oleh karenanya, kedatangan Rangga Janu beserta saudara-saudaranya, Rangga Beru dan Rio (Ario) Bina dapat diperkirakan terjadi sekitar tahun-tahun tersebut. Karena kepandaian hatinya memikat raja Jenggalo, Rio Bina dijadikan penguasa daerah Bia Paku dan diberi gelar Rio Kajang Sebidang. Selanjutnya, karena sikapnya yang bijaksana, saat raja Jenggalo mengkat pada tahun 1565, Rangga Janu (1565–1638) diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Depati Payung Negara. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Teluk Selebar yang letaknya lebih strategis dan menguntungkan dari segi perniagaan. Semenjak saat itu, kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Selebar.

Seiring dengan bertambah jayanya Banten, Selebar mulai masuk ke dalam daerah pengaruh kesultanan tersebut. VOC yang membina hubungan persahabatan dengan Banten berkali-kali mengunjungi Selebar guna membeli lada sejak tahun 1624. Pada 5 Juli 1660, VOC di bawah pimpinan Balthasar Bort mengadakan perjanjian mengenai perdagangan lada dengan raja Selebar, Depati Bangsa Radin (1638–1710)–putra Rangga Janu. Berdasarkan catatan sejarah, sebagian besar lada yang diperjual-belikan di Banten berasal dari Selebar. Oleh karenanya, boleh disimpulkan bahwa Selebar merupakan salah satu penghasil lada yang penting.

Hubungan antara Selebar dengan Banten makin kokoh dengan kunjungan Depati Bangsa Radin ke Banten guna menghadap Sultan Abdullah Abdulfatah atau Ageng Tirtayasa (1650–1682) pada tahun 1668. Ia menerima surat pengakuan dari Banten sebagai raja Selebar dengan gelar Pangeran Nata Di Raja (Nata Di Raja I). Depati Bangsa Radin juga diberitakan menikah dengan Putri Kemayun, yakni anak

496. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 5, yang dikutip lagi dari *Bengkulu dalam Sejarah*, karya F. Burhan, jakarta, 1988, hal. 187 (catatan kaki no.5).

perempuan sultan Banten. Banten berniat melakukan monopoli perdagangan lada di Selebar. Untuk itulah, Sultan Ageng Tirtayasa memberikan piagam pada Depati Bangsa Radin yang isinya melarang perahu dagang yang membeli lada di Selebar membayar pajak pada negeri lain selain Banten. Pada piagam tersebut ditegaskan bahwa: "Apabila ada ada perahu dagang memuat merica di Pelabuhan Selebar dan membayar pajak kepada negeri lain, rampaslah segela perniagaannya..."[497]. Hasil rampasan itu kemudian harus dibagi dua; sebagian diserahkan pada Banten sedangkan sisanya diberikan kepada pedagang tersebut.

Setelah pudarnya pengaruh Banten, Selebar mengadakan perjanjian dengan EIC (Serikat Dagang Inggris) pada 16 Agustus 1695. Depati Bangsa Radin (Pangeran Nata Di Raja), yang dalam dokumen Inggris disebut Pangeran Ingalo (Jenggalu), menandatangani kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh raja Selebar itu, Inggris diberi hak memonopoli perdagangan lada di Selebar. Inggris diizinkan pula menguasai tanah seluas dua mil persegi yang dapat dipakai mendirikan gudang dan lain sebagainya. Sebagai balas jasa terhadap Pangeran Nata Di Raja, Inggris bersedia membayar 10 Dollar bagi tiap bahar lada yang diserahkan pada mereka. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan uang sejumlah 1 Dollar sebagai cukai bagi raja Selebar dan pembayaran 400 Dollar per tahun.

Tetapi Inggris memendam ketidak-sukaan terhadap Pangeran Nata Di Raja karena beliau masih menjalin hubungan baik dengan VOC. Mereka berniat menumbangkan kekuasaannya. Secara licik, wakil gubernur Inggris, Anthony Ettricke (1710–1711), mengundang Pangeran Nata Di Raja ke benteng Fort York milik mereka dan membunuhnya. Inggris menuduh bahwa raja Selebar itu melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Saudara Pangeran Nata Di Raja dipenjarakan di Fort York dan sebagai raja Selebar baru Inggris mengangkat Pangeran Intan Ali (1710–1720), salah seorang anggota keluarga Kerajaan Selebar.

Tindakan Inggris yang mengangkat Pangeran Intan Ali ini merupakan bagian politik pecah belah mereka, karena yang berhak menduduki takhta adalah putra almarhum Pangeran Nata Di Raja. Inggris bermaksud memantik pertikaian antara keluarga Kerajaan Selebar. Meski tidak puas dan kurang senang dengan pengangkatan tersebut, para bangsawan tidak melakukan tindakan apa-apa dan hanya menyimpan kekesalan dalam hati masing-masing saja.

---

497. *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, halaman 31.

Wakil pemerintahan Inggris yang memerintah di Fort Marlborugh statusnya adalah karesidenan (*residency*). Penyelenggaranya adalah seorang wakil gubernur (*deputy gouvernor*) dan suatu dewan (*council*), yang berada di bawah kekuasaan Fort St. George, Madras, India. Saat itu, kondisi di Eropa sedang memanas akibat pecahnya peperangan antara Inggris dan Prusia di satu pihak melawan Perancis, Austria, beserta Rusia. Peperangan ini berkecamuk antara 1756 hingga 1763. Kendati terjadi di benua Eropa, dampaknya terasa pula di Bengkulu yang menjadi daerah pengaruh Inggris. Pertempuran antara berbagai kerajaan Eropa di atas merembet ke Bengkulu. Pada April 1760, para pejabat EIC di Bengkulu mengungsi ke Batavia dengan membawa harta berharga serta sejumlah besar uang karena mendengar bahwa Perancis telah menguasai Natal beserta Tapanuli.

Bersamaan dengan itu, pada 30 Juli 1760 status Fort Marlborough diangkat menjadi kepresiden (*presidency*), sehingga setingkat dengan wakil EIC di Madras. Kedudukannya menjadi otonom dan Roger Carter yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur diangkat sebagai gubernur pertamanya. Fort Marlborough tidak bertanggung jawab lagi terhadap Madras, melainkan langsung kepada kantor pusat EIC di London. Pada 11 Agustus 1760, Perancis mengerahkan dua kapal perangnya di bawah pimpinan Laksamana Comte Charles d'Estaing menyerbu Bengkulu serta menduduki Fort Marlborough. Oleh karenanya, Inggris tidak lagi dapat menjalankan pemerintahannya di sana.

Kendati demikian, kekuasaan Perancis di Bengkulu tak panjang usianya karena pasukan mereka dilanda wabah penyakit dan banyak yang tewas. Oleh karenanya, pada bulan Maret 1761 mereka meninggalkan Bengkulu setelah memuati kapalnya dengan lada dan merusak bangunan-bangunan penting. Hengkangnya Prancis membuka kesempatan bagi Inggris menduduki Bengkulu kembali. Meski diduduki Prancis, hubungan dagang antara Bengkulu dengan pihak Inggris tidak terputus. Para pedagang Inggris tetap menjual candu demi menjaga agar rakyat tak berpaling pada bangsa Eropa lainnya.

Ekspedisi Inggris pimpinan Kapten Vincent dengan tujuan mengembalikan kekuasaan EIC tiba di Bengkulu pada 24 Juli 1761. Namun, Selebar yang saat itu diperintah oleh Nata Di Raja II (1720–1762) menolak kedatangan kembali Inggris dan melakukan perlawanan hingga tewas pada bulan April 1762. Pemerintahan EIC akhirnya aktif lagi di bulan September 1762. Sementara itu, raja Selebar yang gugur

dalam digantikan oleh putra sulungnya, Raja Muda Selebar, yang bergelar Nata Di Raja III (1762–1765). Karena usianya yang belum dewasa diangkatlah empat orang pemangku sebagai walinya. Penguasa Selebar ini ternyata kurang memberikan dukungannya pada Inggris, sehingga ia diturunkan dari kedudukannya dan diasingkan ke India.

Pada tahun 1766 di Pelabuhan Selebar tibalah kapal Nakhoda Lela, putra Kiai Demang Purwasidana. Ia berlabuh di Bengkulu dengan disertai tujuh orang pengiringnya. Mereka merupakan musuh-musuh VOC, yang secara bertahap sedang melebarkan payung kekuasaannya atas Kepulauan Nusantara. Atas izin pemerintah Inggris, mereka diizinkan menetap di Kota Bengkulu serta memperoleh perlindungan terhadap musuh-musuh mereka.

Uniknya, di Selebar pernah hidup seorang peranakan Inggris bernama Edward Coles. Ibu dan istrinya merupakan putri-putri Kerajaan Selebar. Ia merupakan tokoh yang dihormati oleh rakyat Bengkulu karena kerap membela dan melindungi mereka terhadap kesewenang-wenangan para residen Inggris. Julukannya di kalangan rakyat Bengkulu adalah Master Bedar. Selain memahami benar-benar memahami budaya dan adat istiadat setempat Coles mengenyam pula pendidikan Barat. Ada sumber yang mengatakan bahwa Coles sesungguhnya telah menganut agama Islam, tetapi tetap mempertahankan nama Inggrisnya.

Pangeran Nata Di Raja III digantikan oleh Pangeran Nata Di Raja IV (1765–1831). Pada zamannya berlangsung penyerahan Bengkulu ke tangan Belanda, sehingga tamatlah kekuasaan Inggris di Bengkulu. Ketika itu Selebar meliputi Andalas, Pagar Agung, dan Selebar. Kawasan ini terdiri dari 50 dusun dan penduduk berjumlah 6.962 jiwa. Pangeran Nata Di Raja V (1831–1864) merupakan pengganti Pangeran Nata Di Raja IV. Saat itu, kedudukannya adalah sebagai bupati (*regent*) Selebar. Belanda menghapuskan Kabupaten Selebar secara sepihak pada 22 Januari 1864 dan Pangeran Nata Di Raja V diberhentikan dari kedudukannya. Kendati demikian, ia kemudian diangkat sebagai kepala bagi empat pasar, yakni Kandang, Pasar Aceh, Selebar, dan Pondok Kapur–yang seluruhnya terletak di Teluk Selebar.

IV. SUNGAI ITAM

Kerajaan ini terletak di muara Sungai Itam dan warganya terdiri dari suku Lembak. Menurut naskah Melayu, kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh bangsawan bernama Senggaran Pati dari Lebak Beliti, Palembang. Karena difitnah telah membunuh

pamannya dan berzinah dengan anak perempuannya, Senggaran Pati yang juga dikenal sebagai Aswanda dijatuhi hukuman seumur hidup menjadi penjaga tempat pemandian keluarga raja di Sungai Musi. Suatu kali karena lalai, putri sultan bernama Sinar Rembulan yang sedang mandi disambar oleh buaya. Karenanya, Aswanda ditugaskan mencari dan membunuh buaya tersebut. Setelah berhasil menunaikan tugasnya, Aswanda melarikan diri dan mencari suaka ke Kerajaan Sungai Lemau.

Karena perilakunya yang baik, Senggaran Pati diangkat sebagai menantu Baginda Sebayam dan dianugerahi sebagian kerajaannya, yakni daerah antara Sungai Itam dan Sungai Bengkulu, hingga ke hulu Sungai Renah Kepayang. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Sungai Itam pada tahun 1650. Meskipun demikian, keturuna Senggaran Pati menyangkal riwayat yang tercantum dalam naskah Melayu di atas. Mereka menyatakan bahwa leluhurnya berasal dari Majapahit atau Pagarruyung. Senggaran Pati memerintah sebagai raja pertama Sungai Itam dengan gelar Depati Bangsa Raja (1650–1686). Semasa pemerintahannya hadirlah bangsa Inggris dengan armada dagangnya untuk berniaga. Kehadiran ini dipicu oleh terusirnya mereka dari Banten, karena kerajaan tersebut telah menyerahkan monopoli perdagangannya pada VOC (Belanda).

Raja Depati Bangsa Raja menandatangani pernjanjian dengan Inggris (diwakili Ralph Ord) yang berkaitan dengan perdagangan lada, pada tahun 1685. Sebelumnya Inggris juga mengadakan perjanjian pula dengan raja Sungai Lemau dan diizinkan mendirikan benteng Fort York. Selain itu, isinya juga menyatakan bahwa Inggris adalah satu-satunya yang berhak membeli lada di kawasan tersebut. Pada bulan November 1686, Depati Bangsa Raja mangkat dan digantikan oleh putranya, Raja Chalipa (1686–1740).

Wakil gubernur Inggris, Charles Barwell (1695–1696), mengundang para raja di Bengkulu, termasuk Raja Chalipa, pada 1 Juli 1695 ke suatu perjamuan besar. Raj-raja Sungai Lemau, Selebar, dan Sungai Itam, disambut baik oleh Inggris pada 5 Juli 1695. Kedatangan mereka disambut dengan tabuhan genderang dan dentuman meriam. Bahkan dua ekor kerbau dipotong guna melangsungkan perayaan tersebut. Tujuan Inggris kali ini adalah menjalin hubungan baik dengan raja-raja Bengkulu. Ketika EIC membentuk Pengadilan Pangeran (*Pengadilan Court*) di Bengkulu, yang merupakan lembaga kehakiman tertinggi di kawasan tersebut, Pangeran Bangsa Negara I (1750–1829) diangkat sebagai salah satu anggotanya.

Kekuasaan pemerintah Inggris atas Sungai Itam dan Bengkulu resmi berakhir pada tahun 1825, ketika kawasan tersebut diserahkan pada Belanda. Saat itu wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Bangsa Negara meliputi Lembak VIII, Proatin XII, serta Tepi Air dan di Darat. Sungai Itam terdiri dari 42 dusun dengan populasi 4.122 jiwa. Sungai Itam dijadikan sebagai salah satu kabupaten di Bengkulu. Dengan demikian, penguasanya dianggap setingkat dengan bupati (*regent*). Pangeran Bangsa Negara I digantikan oleh Pangeran Bangsa Negara II (1829–1862). Semasa pemerintahannya, Belanda menghapuskan Kabupaten Sungai Itam pada 25 Desember 1862.

V. SUNGAI LEMAU

a. Cikal-bakal Kerajaan Sungai Lemau

Kerajaan ini ada kaitannya dengan Sungai Serut (lihat pembahasan mengenai kerajaan tersebut). Ketika Sungai Serut beserta rajanya yang bernama Anak Dalam dihancurkan oleh Aceh pada sekitar 1615, para pemuka Kerajaan Depati Tiang Empat di Lebong berselisih paham mengenai siapakah yang pantas menggantikan Anak Dalam sebagai raja di sana. Karena tidak mencapai kata sepakat, mereka mengirim utusan ke Minangkabau guna meminta pendapat Raja Alam di Pagarruyung mengenai pemecahan masalah itu. Raja Alam mengirimkan Baginda Maharaja Sakti dari Sungai Tarab–salah seorang kerabatnya–guna ditakhtakan sebagai pengganti Anak Dalam.

Baginda Maharaja Sakti datang pada tahun 1625 dengan diiringi oleh empat orang menteri, sembilan rakyat biasa, dan dua pengawal. Bersama dengannya, ia membawa pusaka yang diperolehnya dari Raja Alam, berupa dua pucuk meriam bernama Si Gorong serta Si Curik, sebuah payung kebesaran, sebilah pedang bernama Jabatang, dan benda-benda lainnya. Ia dinobatkan sebagai raja Sungai Lemau dan memerintah dari 1625 hingga 1630. Kerajaan atau *petulai*nya diberi nama Semitoa atau Semitul yang berarti "guruh," karena pada saat penobatannya terdengar bunyi guruh.

Sebagai pusat pemerintahannya, Baginda Maharaja Sakti memilih muara Sungai Lemau, dan bukannya muara Sungai Serut (Sungai Bengkulu) seperti Kerajaan Sungai Serut dahulu. Selanjutnya diadakan perjanjian persahabatan antara Baginda Maharaja Sakti dengan bangsa Rejang, yang dilakukan dengan meminum air perendam keris pusaka. Perjanjian itu merupakan pengakuan bahwa Kerajaan Sungai Lemau berdiri sendiri dengan wilayah Renah Pesisir di utara hingga Air Urai di selatan; di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Rejang Belek Tebo (Kerajaan Rejang di balik Bukit

Barisan). Disepakati pula bahwa raja Sungai Lemau akan menangkis serangan yang berasal dari arah laut; sedangkan bila datang dari arah darat, Depati Tiang Empat yang akan menangkisnya.

Baginda Maharaja Sakti mendengar bahwa Raja Anak Dalam–yang kerajaannya dihancurkan oleh Aceh–beserta kaum kerabatnya, termasuk Putri Gading Cempaka masih hidup dalam pelarian di Gunung Bungkuk. Oleh karena itu, Baginda Maharaja Sakti mengirim utusan ke sana dan melamar Putri Gading Cempaka. Pinangan tersebut diterima dan Baginda Maharaja Sakti menikah dengan Putri Gading Cempaka. Semasa pemerintahannya, dilakukan penataan terhadap hukum adat dan tatanan pemerintahan. Penanaman lada selaku hasil utama Bengkulu juga digalakkan pula. Pada tahun 1668, Baginda Sebayam (gelar Tuan Pati Bangun Negara, memerintah 1650–1695), putra Baginda Maharaja Sakti, beserta Depati Bangsa Radin dari Selebar mengadakan kunjungan ke Banten untuk menyatakan bahwa kerajaan mereka kini berada di bawah perlindungan Banten. Sultan Banten saat itu, Abdul Fatah (Ageng Tirtayasa) memberikan piagam pengakuan pada Tuan Pati Bangun Negara yang terbuat dari tembaga dan juga gelar kehormatan Pangeran Raja Muda.

Semasa pemerintahan Tuan Pati Bangun Negara, pusat pemerintahan dipindahkan ke kuala Sungai Lemau bagian selatan, yakni ke sebuah tempat bernama Gajah Mengeram, karena terdapat sebuah bukit yang diapit oleh dua sungai, sehingga mirip seekor gajah sedang beristirahat dengan kepala menghadap ke hulu sungai. Selanjutnya, pada tahun 1685 tibalah tiga kapal dagang Inggris yang dipimpin oleh Ralph Ord di muara Sungai Bengkulu dengan tujuan menjalin hubungan perdagangan.

b. Perkembangan Kerajaan Sungai Lemau

Kedatangan Inggris di Bengkulu sebagaimana baru saja diungkapkan di atas,dipicu oleh jatuhnya Banten ke dalam jaring-jaring monopoli VOC. Oleh karenanya, para pedagang Inggris harus meninggalkan Banten. Mereka kemudian beralih ke Aceh, tapi Sultan Inayat Zakiatudin Syah (1677–1688) tidak mengizinkan Inggris mendirikan benteng di sana. Karenanya, mereka lalu bertolak ke Priaman. Namun karena suatu kesalahan, kapal Amoy Merchant milik mereka justru melewati Priaman dan malah tiba di muara Sungai Bengkulu pada 24 Juni 1685. Mereka lalu melakukan peninjauan apakah kedatangan mereka akan disambut dengan baik oleh penduduk. Seorang pedagang Indrapura bernama Orang Kaya Lela diutus untuk menemui para pedagang Inggris tersebut. Ternyata mereka dilakukan dengan ramah tamah

oleh penduduk setempat. Mereka menceritakan bahwa kedatangannya ke tempat itu karena diusir dari Banten yang telah jatuh ke tangan Belanda (VOC). Bahkan orang-orang Inggris itu untuk selanjutnya diizinkan menetap di Bengkulu agar dapat diselenggarakan perniagaan lada secara langsung dan bebas dengan mereka. Orang Kaya Lela menjanjikan pula akan memberikan bantuan apabila mereka mendapatkan masalah dengan sultan Banten.

Pertemuan diadakan antara raja Sungai Lemau, Tuan Depati Bangun Negara (disebut *old king* dalam dokumen Inggris), yang diwakili oleh putranya, Depati Bangsa Raja (disebut *young king* oleh Inggris), guna membicarakan mengenai perdagangan lada dan tempat menetap bagi bangsa Inggris. Pada mulanya raja tidak menyetujui luas tanah yang diminta Inggris (EIC) untuk mendirikan benteng. Ia juga tak menghendaki Inggris menempatkan meriamnya di darat dan menguasai tanah sejauh tembakan meriam tersebut. Tetapi akhirnya dicapai suatu kesepakatan pada 12 Juli 1685, di mana Inggris diizinkan mendirikan benteng di muara Sungai Bengkulu, yang diberi nama Fort York. Tujuannya adalah melindungi tempat pemukiman serta perniagaan lada mereka. Perjanjian itu ditanda-tangai oleh Ralph Ord selaku wakil EIC dan pangeran Sungai Lemau.

Pangeran Mangku Raja yang menggantikan Depati Bangsa Raja diberi kedudukan lebih tinggi dibandingkan rekan sejawatnya, raja Sungai Itam dan Selebar saat berlangsungnya upacara-upacara resmi. Pada tahun 1717, Pangeran Mangku Raja bahkan diberi kehormatan istimewa ketika menghadiri upacara besar EIC, sehingga ia menggelari dirinya Raja Kompeni (*Company's King*)[498]. Pangeran Mangku Raja digantikan oleh putranya, Pangeran Muhammad Syah I[499]. John Marsden yang menjabat sebagai residen Lais (1775–1780) pernah menjumpai penguasa Sungai Lemau ini. Ia merupakan raja yang cakap dan mahir dua bahasa, yakni Melayu serta Rejang. Pangeran Muhammad Syah I tercatat sebagai penguasa yang beradab serta penuh sopan santun. Ia bangga terhadap identitasnya sebagai orang Bengkulu dan menolak disebut Melayu. Pangeran tersebut memberitahu Marsden, "Melayu tidak, sir; orang ulu betul sayo."[500] Karena tidak memiliki keturunan, Pangeran Muhammad Syah I digantikan oleh kemenakannya, Pangeran Lenggang Alam (1755–1833).

498. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 54.
499. Lihat *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, halaman 47.
500. *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 61.

EIC membentuk *Pangeran Court* (Pengadilan Pangeran) pada tahun 1770 di Bengkulu. Ketuanya adalah residen Inggris beserta seorang penerjemah. Anggotanya terdiri dari Pangeran Lenggang Alam–raja Sungai Lemau, raja Sungai Itam, kapten Bugis, dua orang kapitan China, 4 orang datuk di Pasar Bengkulu, 4 orang datuk dari Pasar Melabro dan Tengah Padang; yakni Datuk Penurunan, Datuk Pasar Baru, Datuk Pondok Juada, dan Datuk Kampung Nias[501]. Waktu itu, raja Sungai Lemau telah banyak berkurang kekuasaannya, walaupun masih mendapatkan tempat terhormat, yakni beroleh kesempatan duduk di sebelah kanan residen Inggris dalam berbagai upacara resmi.

Raffless selaku wakil pemerintah Inggris di Bengkulu mengadakan perjanjian dengan Pangeran Lenggang Alam pada 4 Juli 1818, yang berisikan butir-butir sebagai berikut:[502]

- Membatalkan seluruh perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya dengan Kerajaan Sungai Lemau.
- Serikat Dagang Inggris (EIC) diberi hak memerintah Sungai Lemau berdasarkan azas keadilan, kesamaan, dan niat baik (justice, equity, and good policy).
- Tanam paksa lada dihapuskan.

Berdasarkan perjanjian di atas, Sungai Lemau masuk dalam kekuasaan Inggris dan Pangeran Lenggang Alam dijadikan semata-mata pegawai pemerintah kolonial dengan gelar bupati (*regent*).

Masih pada zaman pemerintahan Pangeran Lenggang Alam, kekuasaan atas Bengkulu termasuk Sungai Lemau dialihkan ke tangan Belanda. Penyerahan yang berlangsung pada tahun 1825 ini merupakan realisasi *Traktat London* (17 Maret 1824). Saat itu, wilayah Sungai Lemau meliputi Lais, Kertopati, Air Besi, Air Padang, Padang Betua, dan Sungai Lemau Ulu Bengkulu. Secara keseluruhan Sungai Lemau terdiri dari 143 dusun dengan populasi penduduk berjumlah 12.817 jiwa.

Pangeran Lenggang Alam mangkat pada bulan Juli 1833 dan roda pemerintahan dijalankan oleh putranya Raja Putu Negara. Kondisi Sungai Lemau banyak dirudung pemberontakan, hingga Belanda menobatkannya sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Pangeran Muhammad Syah II berdasarkan keputusan pemerintah kolonial no. 5 tertanggal 3 Agustus 1836. Kedudukannya hanya setingkat bupati, di mana hal ini

501. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, halaman 58.
502. Lihat *Sejarah Bengkulu: 1500–1900*, halaman 78.

berlangsung hingga tanggal 5 Desember 1861; yakni ketika Belanda menghapuskan selama-lamanya Kabupatan Sungai Lemau.

c. Kedatangan dan menetapnya bangsawan Madura di Sungai Lemau

Panembahan Cakraningrat IV dari Bangkalan memiliki empat orang putra; antara lain bernama Raden Surodiningrat, Raden Ranadiningrat, dan Raden Tumenggung Wiriodiningrat[503]. Kedua putra yang disebut belakangan ini merupakan keturunan Cakraningrat IV dengan putri-putri asal Bengkulu; masing-masing bernama Nyai Tengah dan Nyai Magih. Sewaktu pecah peperangan antara Cakraningrat IV melawan VOC, Raden Wiriodiningrat beserta Raden Sang Nata (putra Raden Ranadiningrat) diutus ke Bengkulu guna meminta bantuan Inggris. Kendati demikian, mereka gagal menunaikan tugasnya dan bahkan malah menetap di Bengkulu. Pada perkembangan selanjutnya, Cakraningrat IV mengalami kekalahan, tertawan, dan diasingkan ke Tanjung Harapan.

Raja Sungai Lemau menyambut baik kedatangan para bangsawan Madura ini dan menyediakan tempat kediaman bagi mereka di Kampung Tengah Padang. Mereka kemudian menikah dengan putri-putri bangsawan setempat. Sebagai contoh, Raden Sang Nata melangsungkan perkawinan dengan Sa'diah, salah seorang putri bangsawan Sungai Lemau. Raden Wiriodiningrat diterima dalam dinas ketentaraan Inggris. Ia menikah dengan Siti Juriyah yang berasal dari kalangan pemuka Bugis di Bengkulu. Putra tertua Raden Wiriodiningrat bernama Raden Tawan Alun (Raden Miradiningrat) kelak diangkat sebagai kapten Bugis. Pada tahun 1810, berlangsung pernikahan antara Raden Anom Zainal Abidin (keturunan Madura dan Bugis serta sekaligus cucu penguasa Sungai Lemau) dengan putri keempat Sultan Khalifatullah Inayat Syah dari Muko Muko. Dengan demikian, pertalian antara kaum bangsawan Madura, Bugis, dan Bengkulu menjadi semakin erat.

VII.SUNGAI SERUT (ULU BENGKULU)

a. Cikal-bakal dan perkembangan kerajaan

Kerajaan ini terletak di pesisir barat Sumatera, yakni di muara Sungai Serut. Konon, rajanya yang pertama adalah Ratu Agung (1550–1570). Menurut kepercayaan rakyat, ia adalah dewa dari Gunung Bungkuk, yakni sebuah gunung yang bentuknya mirip sosok orang tua yang sedang duduk dan bungkuk punggungnya. Ada pula yang

503. Lihat *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, halaman 68.

berpendapat bahwa Ratu Agung berasal dari Kerajaan Majapahit. Meskipun demikian, Prof Dr. H. Abdullah Siddik berpendapat bahwa Ratu Agung berasal dari Banten[504]. Ratu Agung merupakan penguasa yang telah menganut agama Islam. Hal ini terbukti dari sebuah karya berjudul *Tembo Bengkulu* karya Hassan Delais. Karya tersebut mencatat bahwa bilal, khatib, dan qadi hadir saat Ratu Agung wafat. Ia dimakamkan di Bengkulu Tinggi, yang kini disebut orang sebagai Keramat Batu Menjolo.

Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada kurang lebih pertengahan abad ke-16. Menurut Prof. Hoesein Djajadiningrat, Hasanuddin, sultan Banten pernah mengadakan perjalanan bersama Ratu Balo dan Ki Jongjo ke Lampung, Indrapura, Selebar, dan Bengkulu. Sultan Hasanuddin menikah dengan putri sultan Indrapura dan memperoleh hadiah perkawinan berupa daerah pantai barat Sumatera hingga sejauh kawasan Air Itam di sebelah utara. Ini sesuai pula dengan pemberitaan Marsden:

> Setelah menjadi raja di Banten dan bergelar pangeran, ia mengawini anak perempuran raja Indrapura. Raja Banten mendapatkan daerah Sullabares yang dihuni oleh orang-orang Bengkulu. Pemberian itu menjadi dasar klaim Raja Banten terhadap daerah pesisir. Bahkan VOC juga mendesak raja Banten agar ia mengajukan tuntutan terhadap kedaulatan daerah itu, sebelum perjanjian Paris pada tahun 1763.[505]

Peristiwa ini merupakan awal pengaruh Banten di daerah Bengkulu. Penduduk Kerajaan Sungai Serut termasuk suku Rejang Sabah yang berasal dari Lebong di Bukit Barisan. Jumlah mereka lebih banyak ketimbang suku Lembak, yang merupakan minoritas di sana.

Ratu Agung mempunyai tujuh orang anak, yakni Raden Jili, Monok Mincur, Lemang Batu, Taju Rumpun, Rindang Papan, Anak Dalam Muara Bengkulu, dan Putri Gading Cempaka. Di antara ketujuh orang anaknya itu, Anak Dalam (1570–1615) yang dipilih sebagai penggantinya. Semasa pemerintahannya, wilayah Sungai Serut menjadi makin luas, yakni mencapai dusun-dusun di tepi Air Lais dan Air Ketahun di utara serta Air Lampuing di selatan.

Pada abad ke-16 pada pedagang Aceh telah berdatangan ke kawasan ini dan bermukim di bukit dekat pantai, yang kini terkenal sebagai Bukit Aceh, guna membeli lada dan hasil bumi lainnya. Kerajaan ini musnah karena serbuan orang Aceh. Menurut *Tembo Bengkulu*, putra sultan Aceh terpesona melihat kecantikan putri Raja Anak Dalam

---

504. Lihat *Sejarah Bengkulu*: 1500–1990, halaman 2.
505. *Sejarah Sumatra* (terjemahan Indonesia), halaman 325.

bernama Gading Cempaka dan ingin menikahinya. Ia lalu menyampaikan niat ini pada ayahnya. Sultan Iskandar Muda menyetujui keinginan anaknya itu demi meningkatkan pengaruh Aceh di Bengkulu. Lamaran kemudian diajukan pada Raja Anak Dalam. Namun pinangan tersebut ditolak olehnya, sehingga mengakibatkan kemarahan Sultan Iskandar Muda. Aceh saat itu sedang mencapai puncak kejayaannya, sehingga dengan mudah mengalahkan Sungai Serut. Meskipun persenjataan Aceh lebih unggul, rakyat dengan gigih mempertahankan negerinya. Mayat-mayat bergelimpangan di Sungai Serut dan hanyut ke hulunya. Itulah sebabnya Sungai Serut kemudian diubah namanya menjadi Sungai Bengkulu (dari kata "Bangkahulu," yang berarti "bangkai (mayat) [hanyut] ke hulu." Raja Anak Dalam sendiri melarikan diri ke Gunung Bungkuk pada tahun 1615. Peristiwa ini menamatkan riwayat Kerajaan Sungai Serut.

Pemberitaan Banten yang telah menguasai kawasan Sumatera bagian selatan semenjak abad ke-17 juga tidak menyebut lagi mengenai Kerajaan Sungai Serut. Demikian pula dengan para pedagang Belanda yang tiba di Silebar pada tahun 1624. Mereka tak lagi menyinggung nama kerajaan ini. Kedua fakta di atas membuktikan bahwa Sungai Serut memang telah hancur pada seputar kurun waktu tesebut.

b. Sistem pemerintahan

Kerajaan Sungai Serut terdiri dari desa dan dusun-dusun yang mempunyai otonominya sendiri-sendiri; di mana raja hanya sebagai tokoh pemersatu. Masing-masing dusun itu mempunyai pimpinannya sendiri yang dipilih rakyat. Tugas mereka adalah menegakkan adat istiadat yang dianut rakyatnya.

VIII. Perekonomian dan sosial kemasyarakatan di kerajaan-kerajaan Bengkulu

Bengkulu terkenal sebagai penghasil lada bermutu tinggi; yang menjadi sumber penghasilan bagi Aceh dan Banten. Selanjutnya lada ini diekspor kembali ke mancanegara, seperti Portugis, Belanda, Inggris, China, Arab, Persia, India, Turki, dan lain sebagainya. Biasanya para pedagang tersebut membeli lada dalam partai besar. Rakyat Bengkulu banyak yang telah menganut agama Islam pada abad ke-17. Hal ini nampak nyata pada laporan Benyamin Bloome yang menjadi kepala kantor dagang EIC di Bengkulu setelah wafatnya Ralph Ord pada tahun 1686. Ia menyebutkan sebagai berikut:

> Kami tiba saat Rammazan mereka atau waktu puasa.....[506]

506. Diterjemahkan dari *Sejarah Bengkulu: 1500–1990* yang mencantumkannya masih dalam bahasa Inggris. Menurut catatan kaki no. 55, pernyataan itu dikutip dari John Bastin, Op. Cit. hal XIV (Introduction).

Yang disebut Rammazan tentu saja adalah bulan Ramadhan. Selain itu, Bloome mencatat pula bahwa warga bersumpah dengan menggunakan kitab suci Al Quran.

E. KERAJAAN-KERAJAAN YANG ADA DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

I. JAMBI

a. Cikal-bakal Kerajaan Jambi

Berdirinya Kesultanan Jambi beriringan dengan penyebaran Islam di kepulauan Nusantara. Kendati demikian, waktunya yang pasti sulit ditentukan. Perniagaan di Jambi makin meningkat di abad ke-16, bersamaan dengan merosotnya kekuasaan Majapahit. Konon pada sekitar tahun 1400 terdapat seorang raja bernama Tan Talanai yang memerintah Jambi dengan pusat pemerintahannya berada di Muara Jambi sekarang[507]. Ahli nujum meramalkan bahwa raja akan dibunuh oleh putranya. Karena itu, raja kemudian menghanyutkan putranya yang masih bayi itu di atas sebuah rakit. Setelah terkatung-katung di tengah lautan, rakit terdampar di negeri Siam. Putra Raja Tan Talanai itu ditemukan dan diangkat anak oleh raja Siam.

Raja Tan Talanai mendengar bahwa di Minangkabau terdapat tiga orang putri raja yang cantik jelita. Oleh sebab itu, raja berniat menikahi salah seorang di antara mereka, sehingga berlayarlah ia ke Minangkabau. Tan Talanai kemudian memilih salah seorang di antara ketiga putri tersebut yang bernama Selaras Pinang Masak. Kendati demikian, baik putri itu maupun orang tuanya kurang menyukai Raja Tan Talanai. Mereka mencari berbagai daya upaya agar pertunangan itu dibatalkan saja. Akhirnya, Raja Tan Talanai tidak jadi menikahi Putri Pinang Masak.

Sementara itu, putra raja yang dihanyutkan dengan rakit mendengar bahwa ia telah dibuang oleh ayahnya. Timbul keinginan membalas dendam perlakuan ayahnya. Putra raja dengan diiringi para pengikutnya berlayar ke Jambi. Ia berhasil membunuh Tan Talanai serta menyerahkan singgasana Jambi pada Putri Selaras Pinang Masak dan setelah itu kembali ke Siam. Putri Selaras Pinang Masak memindahkan ibukota Jambi ke Ujung Jabung, yang terletak di pesisir Jambi sekarang. Banyak pedagang dari Majapahit datang mengunjungi Jambi. Menurut legenda, merekalah yang menamai negeri itu Jambi; yakni dari kata *jambe* (dalam bahasa Jawa berarti "pinang").

---

507. Lihat *Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Tengah*, halaman 56.

Suatu ketika, di pulau Berhala datanglah seseorang bernama Datuk Panduko Berhala, yang mengaku sebagai keturunan bangsawan Turki. Sebagai bukti keningratannya, Datuk Panduko Berhala memperlihatkan sepucuk senapan pusaka yang dibawa dari negeri asalnya. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai tiga orang putra (masing-masing bernama Orang Kaya Pingai, Orang Kaya Kedataran, serta Orang Kaya Hitam) dan seorang putri bernama Orang Kaya Gemuk. Berdasarkan legenda di atas, sultan-sultan Jambi menganggap bahwa leluhur mereka adalah orang asing yang berasal dari Turki. Barangkali hal ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka.

Datuk Panduko Berhala dan Putri Selaras Pinang Masak memerintah bersama-sama negeri mereka. Ketiga putra mereka kemudian memerintah Jambi secara bergantian. Yang pertama-tama menjadi raja menggantikan orang tuanya adalah Orang Kaya Pingai (sekitar tahun 1480). Selanjutnya secara berturut-turut memerintahlah saudara-saudaranya; yakni Orang Kaya Kedataran (± 1490) dan Orang Kaya Hitam (± 1500). Raja yang disebut belakangan ini tersohor kesaktiannya. Waktu itu, Jambi masih merupakan vasal Majapahit. Orang Kaya Hitam ingin membebaskan negerinya dari kekuasaan Majapahit. Oleh karenanya, ia tidak lagi bersedia membayar upeti terhadap kerajaan besar di Jawa tersebut. Tentu saja raja Majapahit menjadi murka karenanya dan berniat menghabisi nyawa Orang Kaya Hitam.

Raja Majapahit menyadari bahwa tokoh sesakti Orang Kaya Hitam tak dapat dibunuh dengan senjata sembarangan. Konon hanya keris hasil tempaan besi asal sembilan desa yang sanggup membunuh Orang Kaya Hitam. Oleh sebab itu, raja Majapahit menitahkan seorang pandai besi menempanya. Orang Kaya Hitam mendengar rencana raja Majapahit itu. Ia segera berlayar ke Jawa dan membunuh pandai besi serta merampas keris tersebut. Pembunuhan ini menggusarkan hati raja Majapahit, namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, ia segera mengikat persahabatan dengan Orang Kaya Hitam dan menikahkan seorang putri Majapahit bernama Putri Ratu dengan raja Jambi tersebut. Setelah itu, kembalilah Orang Kaya Hitam ke negerinya. Keris yang dirampas dari Majapahit selanjutnya menjadi pusaka Kerajaan Jambi secara turun-temurun dan dinamai Seginje. Hanya pemegang keris ini saja yang diakui sebagai raja oleh rakyat Jambi. Ketika wakil presiden Moh. Hatta mengunjungi Jambi pada tahun 1946, rakyat menyerahkan sebilah keris sebagai

perlambang Keris Seginje, di mana peristiwa ini menandakan bahwa Kerajaan Jambi telah menyerahkan kedaulatannya pada pemerintah Republik Indonesia[508].

Semasa pemerintahan Orang Kaya Hitam, negeri Jambi dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut *kalbu*; antara lain: *Kalbu* VII Koto dan IX Koto dikepalai oleh Sunan Pulau Johor, Kalbu Marosebo dikepalai oleh Sunan Kembang Seri, *Kalbu* Jebus dikepalai oleh Orang Kaya Pingai, *Kalbu* Air Hitam dikepalai oleh Orang Kaya Gemuk, dan lain sebagainya. Pada abad ke-16, Majapahit mulai mengalami keruntuhannya. Bersamaan dengan kurun waktu ini, agama Islam mulai tersiar ke Jambi dan Orang Kaya Hitam menganut agama tersebut. Orang Kaya Hitam berputra dua orang, yakni Pangeran Ilang di Aor dan Paduka Narah.

Pangeran Ilang di Aor menggantikan ayahnya sebagai raja Jambi pada kurang lebih tahun 1515. Ia juga digelari Panembahan Rantau Kapas. Putranya bernama Panembahan Rengas Pandak menggantikan beliau pada 1540. Ia digantikan oleh putranya, Panembahan Bawa Sawo pada 1565. Penguasa Jambi ini memiliki beberapa orang putra, yakni Kyai Patih Mestong yang diangkat sebagai kepala *Kalbu* Singa Patih, Bangsa Mas diserahi memimpin *Kalbu* Payung, dan Panembahan Kota Baru yang menggantikannya sebagai raja Jambi pada tahun 1590. Salah seorang putra Panembahan Kota Baru bernama Pangeran Keda naik takhta pada tahun 1615 dengan gelar Sultan Abdul Kahar.

b. Perkembangan Kesultanan Jambi

Semenjak pertengahan tahun 1550-an hingga abad ke-17, para sultan Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perniagaan ini juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Pada tahun 1615, seorang pedagang Belanda bernama Abraham Strek tiba di Jambi dengan kapal *Wapen van Amsterdam*. Setahun kemudian (1616), dibukalah kantor perwakilan dagang VOC guna mengurus pembelian lada dan hasil bumi lainnya. Dengan demikian, para sultan Jambi menjadi makin kaya berkat monopoli perdagangan lada beserta pengenaan bea ekspor. Bahkan, pada tahun 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera, setelah Aceh. Berdasarkan sumber yang berasal dari VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), sultan berhasil meraup keuntungan 30-35 persen dari lada yang terjual[509].

508. Lihat *Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Tengah*, halaman 58.
509. Lihat *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, halaman 44.

Meskipun demikian, pada tahun 1623, kantor perwakilan dagang ini ditutup kembali karena kesulitan perhubungan dengan penduduk.

Pada tahun 1630, raja Johor menuntut Sultan Abdul Kahar agar menyerahkan wilayah Tungkal, tetapi tuntutan ini diabaikan saja oleh Jambi. VOC membuka kembali kantor perwakilan dagangnya di Jambi pada tahun 1636. Bersamaan dengan itu, tersiar kabar bahwa Jambi memihak Mataram yang memusuhi Belanda. Hendrik van Gont, kepala kantor perwakilang dagang Belanda, mengirim kabar kepada Gubernur Jenderal Antonie van Diemen di Batavia serta meminta agar Belanda mengerahkan tentaranya menyerang Jambi. Kendati demikian, Pangeran Depati, putra mahkota Jambi, menyangkal keterkaitannya dengan Mataram. Oleh karenanya, gubernur jenderal mengirim surat peringatan beserta hadiah pada sultan Jambi.

Sultan Abdul Kahar digantikan oleh Pangeran Depati Anom yang bergelar Sultan Agung Abdul Jalil (1643–1665) pada tahun 1643. Di tahun yang sama, diadakanlah perjanjian pertama antara Jambi dengan VOC. Berdasarkan berita yang diperoleh dari Andress Hogaert Blook, kepala kantor perwakilan dagang VOC masa itu, Jambi pada tahun 1664 berselisih dengan Johor. Sultan Agung Abdul Jalil turun takhta pada tahun 1665 dan digantikan oleh Sultan Seri Ingologo (1665–1688). Dua tahun kemudian (1667), pecah pertempuran dengan Johor yang dibantu Palembang. Tetapi Johor dapat dikalahkan oleh Jambi dengan dukungan VOC.

Prestasi Jambi sebagai salah satu perniagaan utama di Sumatera tidak berumur panjang. Pada tahun 1680-an, keberhasilan Jambi makin merosot setelah terjadi perselisihan dengan Johor di semenanjung Melayu sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Penyelundupan dan utang yang makin membengkak juga merupakan faktor-faktor utama kemerosotan Jambi. Pihak Inggris meninggalkan pos perdagangan mereka pada tahun 1679 karena merasa tidak menguntungkan lagi menjalankan perniagaan di sana, tetapi Belanda bertahan lebih lama di kawasan tersebut.

Memburuknya perekonomian itu mendorong campur tangan Belanda dalam kancah perpolitikan Jambi. Kala itu, Sybrandt Swart, kepala kantor perwakilan dagang VOC, mati dibunuh. Belanda menuduh Sultan Seri Ingologo berada di balik pembunuhan tersebut[510]. Dengan licik VOC mengundang sultan memasuki bentengnya. Mereka kemudian menangkap dan membuang sultan ke Batavia pada tahun 1688 saat ia datang memenuhi undangan itu. Tindakan ini berujung pada

510. Lihat *Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Tengah*, halaman 62.

pecahnya kesultanan Jambi menjadi dua, yakni Hulu dan Hilir, hingga bersatunya lagi kedua kesultanan tersebut di tahun 1720. Sebagai pengganti sultan yang diasingkan ke Batavia, salah seorang putra sultan bernama Pangeran Cakranegara diangkat sebagai raja dengan gelar Sultan Kyai Gedeh (1688–1696). Saudara sultan yang bernama Kyai Singa Pati tidak senang dengan penangkatan ini, karena menurut pesan Sultan Seri Ingologo, Pangeran Cakranegara tidak diperkenankan menjadi raja. Ia dianggap telah mengkhianati ayahnya, sehingga tak layak menjadi sultan Jambi. Kyai Singa Pati berpandangan bahwa yang lebih berhak menjadi sultan adalah Raden Jaelat.

Dengan dukungan Kyai Singa Pati, Raden Jaelat melakukan perlawanan terhadap Sultan Kyai Gedeh, tetapi terusir hingga Muara Tebo di *Kalbu* VII–IX Koto yang dahulu pernah diperintah oleh Sunan Pulau Johor. Ia mengumpulkan warga di sana dan setelah itu meminta pertolongan raja Pagarruyung, yang mengangkatnya sebagai sultan dengan gelar Sultan Seri Maharaja Batu. Dengan demikian, terdapat dua orang sultan di Jambi. Setelah dinobatkan menjadi sultan, Raden Jaelat kembali ke Jambi dan memerintah dari Mangojayo dekat Muara Tebo. Sementara itu, Sultan Kyai Gedeh mangkat di tahun 1696 dan digantikan oleh putranya, Sultan Mohammad Syah (1696–1740). Hubungan antara VOC dengan Jambi menjadi genting kala itu, sehingga ditutuplah kantor perdagangan mereka. Meskipun demikian, pada tahun 1707 Sultan Mohammad Syah mengirim utusan pada gubernur jenderal guna meminta agar kantor perwakilan tersebut dibuka kembali. VOC membuka kembali kantor perwakilan dagangnya, tetapi kali ini di Muara Kumpeh Ilir, yang diperkuat dengan benteng.

Dengan meninggalnya Kyai Singa Pati, Sultan Seri Maharaja Batu makin lemah kedudukannya. Oleh sebab itu, pada tahun 1720 ia memutuskan berdamai dengan Sultan Mohammad Syah, yang bersedia turun takhta dan selanjutnya Sultan Seri Maharaja Batu diakui sebagai satu-satunya sultan Jambi dengan gelar Sultan Suto Ingologo. Tetapi tak lama kemudian, Sultan Suto Ingologo ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia. Sultan Mohammad Syah mengambil alih pemerintahan lagi hingga wafatnya di tahun 1740.

Kini Jambi terpuruk dalam kemiskinan. Rakyat Jambi tidak lagi menanam lada dan beralih pada padi serta kapas. Ini disebabkan jatuhnya harga lada, sementara itu kapas impor yang berasal dari India membumbung harganya. Emas mulai menggantikan lada sebagai ekspor utama. Tetapi sultan hanya memperoleh sedikit keuntungan saja

dari perdagangan emas ini, karena penambang Minangkabau mengekspor produk mereka ke mana saja dan tidak harus ke Jambi, asalkan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, penambangan dan penjualan emas berada dalam kekuasaan orang Minangkabau dan sultan yang lemah tidak memiliki otoritas atas mereka. Itulah sebabnya semasa era ini, kas kerajaan menjadi kosong dan berbagai harta pusaka kesultanan terpaksa digadaikan. Akhirnya pada akhir abad ke-18, Jambi merupakan negara bawahan Kerajaan Minangkabau di Pagarruyung.

Sultan Mohammad Syah digantikan oleh Raden Tulip, putra Raden Jaelat, yang naik takhta dengan gelar Sultan Istera Ingalaga (1740–1770). Ia teringat akan pengasingan yang dilakukan Belanda terhadap ayahnya dan berniat mengusir VOC dari negerinya. Akhirnya setelah terjadi berbagai penyerangan, VOC menutup kantor dagangnya dan mengalihkan perhatian terhadap pesisir barat Sumatera, khususnya Bengkulu dan Padang. Letak kedua pelabuhan itu memang lebih strategis ketimbang Jambi yang tanahnya berawa-rawa. Sultan Istera Ingalaga mangkat pada tahun 1770 dan digantikan oleh Achmad Zainuddin yang bergelar Sultan Anom Seri Ingalaga (1770–1790). Setelah mangkatnya sultan ini, ia digantikan oleh putranya, Mas'ud Badaruddin yang bergelar Sultan Ratu Seri Ingalaga (1790–1811). Wakil VOC bernama Staving mengunjungi Jambi pada tahun 1791 dan sultan menawarkannya agar menduduki kembali benteng yang telah ditinggalkan sebelumnya.

Sultan Ratu Seri Ingalaga mangkat pada tahun 1811 dan digantikan oleh putranya Raden Denting, yang bergelar Sultan Mohammad Mahidin (Mohildin atau Agung Seri Ingalaga, memerintah 1811–1821) Intrik-intrik di Kesultanan Jambi masih belum berakhir, di mana perang saudara terus saja berkecamuk dengan berbagai alasan. Pada tahun 1811, para saudagar Arab dan anggota suku Raja Empat Puluh memimpin para penduduk kota bangkit melawan Sultan Mohildin yang berkuasa saat itu. Serangan ini dipicu oleh perlakuan buruk istrinya terhadap beberapa anak perempuan keluarga kaya. Menurut laporan Darpa Wiguna, istri sultan membunuhi gadis-gadis di ibukota karena cemburu terhadap ketidak setiaan suaminya. Sementara itu, sumber lainnya menyatakan bahwa istri sultan memerintahkan pembunuhan seorang gadis karena "berkomunikasi dengan roh jahat."[511] Mohildin meminta bantuan dan perlindungan saudaranya yang pernah menuntut takhta. Ia sepakat memberikan pertolongannya asalkan sultan berjanji mengangkat putranya, Raden Tabun, sebagai *pangeran ratu*

511. Lihat *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, catatan kaki nomor 33, halaman 46.

(putra mahkota) setelah sultan mangkat. Sultan menyatakan kesepakatannya, namun belakangan menolak bantuan tersebut, karena ternyata para musuhnya telah menghentikan pemberontakan, sehingga ia bisa kembali ke ibukota dengan aman.

Antara tahun 1817 hingga 1818, kembali terjadi perang saudara antara Mohildin dengan saudara sepupunya yang lain. Mohildin dikalahkan dan terpaksa melarikan diri serta menghimpun kekuatan di daerah hulu Tembesi. Sementara itu, putra mahkota menghabiskan waktunya dengan mengungsi ke Palembang. Tidak berapa lama saudara sepupunya itu berhasil ditewaskan. Ketegangan ini tetap berlanjut, karena setelah menjadi sultan, putra Mohildin yang bernama Facharuddin menunjuk saudaranya sebagai putra mahkota, dan bukannya Raden Tabun seperti janji ayahnya. Pengingkaran janji ini menimbulkan masalah besar, mengingat Raden Tabun yang diabaikannya itu merupakan saudagar kaya raya yang sanggup menghimpun kekuatan di utara Jambi. Solusi sementara bagi permasalahan ini adalah melalui perkawinan politis–pemecahan yang biasanya berlaku di seluruh Kepulauan Nusantara dan dunia pada umumnya; di mana kedua pihak yang bertikai saling menikahi saudara satu sama lain. Kendati demikian, upaya ini juga bukan merupakan solusi total dan ketegangan masih terus berlanjut hingga era 1840-an.

Sultan Facharuddin (1821–1841) tidak dapat dinobatkan menurut ketentuan adat, karena kondisi yang tak memungkinkan. Ia baru sempat menduduki singgasananya di keraton Jambi pada tahun 1833. Sebelumnya, ia tinggal berpindah-pindah di dataran tinggi yang padat penghuninya–terkadang di Muara Tebo dan Sarolangun (Tembesi Hulu) pada kesempatan lainnya. Ia menyerahkan kekuasaan atas kawasan dataran rendah pada kaum kerabatnya. Namun ini berarti bahwa keuntungan dan penghasilan yang diperoleh dari perdagangan menjauhinya. Perdagangan garam dan candu jatuh ke tangan kaum bangsawan kerabatnya, walau ia masih menerima sebagian hasilnya. Meskipun demikian, secara umum perdagangan di Jambi tidak banyak menghasilkan dan kalah dengan Palembang tetangganya. Kekuasaan pemerintahan saat itu pada kenyataannya tidak lagi berada di tangan sultan, melainkan kaum kerabatnya.

Jambi pada zaman itu merupakan kawasan yang tidak begitu menarik perhatian orang luar. Penulis-penulis Barat, seperti William Marsden yang menerbitkan buku *History of Sumatra* (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Sumatra*) pada tahun 1783 serta S. C. Crooke, memberikan laporan yang meremehkan

mengenai Jambi. Mutu komoditas di Jambi mengalami kemerosotan pula. Ini masih ditambah dengan buruknya kondisi pemerintahan, seperti yang dilaporkan Crooke:

> Mereka tidak punya bentuk-bentuk tetap hukum, kebijakan atau pemerintahan, dalam segala modifikasinya; tetapi sultan secara nominal adalah penguasa tertinggi dan sewenang-wenang. Dalam kenyataannya dia bodoh dan lemah, otoritasnya dirongrong dan dilanggar oleh setiap pemuka kelompok yang ambisius dan kerajaan sepenuhnya berada dalam keadaan kacau dan diperintah dengan sangat buruk.[512]

Seorang pejabat Belanda mengemukakan hal senada pada tahun 1836:

> Sudah jelas dengan sendirinya bahwa dalam sebuah kerajaan di mana penguasa hanya menyibukkan diri dengan memancing, berburu, dan sebangsanya, menyerahkan urusan [pemerintahan] kepada orang lain, banyak pelanggaran terjadi tanpa hukuman.[513]

Tentu saja laporan-laporan di atas sedikit banyak mengandung unsur subyektifitas juga. Adalah hal umum bagi bangsa Barat di masa abad ke-19 untuk mengukur kerajaan-kerajaan setempat berdasarkan nilai penting dan kekuatan mereka. Selain itu, sikap meremehkan juga merupakan sesuatu yang umum bagi bangsa Barat pada zaman itu. Selama suatu kerajaan merupakan mitra dagang yang kuat, VOC akan memberikan penilaian yang tinggi. Kendati demikian, laporan-laporan tersebut tetap layak dianggap informasi berharga mengenai kondisi Jambi di abad ke-19, yang lemah dan terpecah belah.

Perompakan merupakan sesuatu yang marak di perairan Nusantara pada masa itu. Di bulan Agustus dan Oktober 1829, C.E Praetorius, Residen Palembang yang baru saja memangku jabatannya, mengutus kerabat Kesultanan Jambi menghadap Sultan Facharuddin guna meminta bantuan melacak kapal Belanda yang dibajak. Sultan diminta pula untuk mengusir kaum perompak yang berada di kawasannya. Memang kondisi Jambi yang berawa-rawa merupakan tempat persembunyian ideal bagi kaum perompak. Menjelang awal abad ke-19, para perompak yang berasal dari kepulauan di sebelah barat Kalimantan membangun pangkalan yang kuat di Muara Saba. Bahkan pemimpin mereka, Tengku Long memperoleh pengaruh yang kuat di ibukota Jambi pada era 1820-an. Long diusir dari Jambi dan mencari perlindungan hingga ke Siak, tetapi ini tidak menyurutkan kegiatan perompakan. Praetorius

---

512. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, halaman 49.
513. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, halaman 49.

menyadari bahwa sultan saat itu lemah kedudukannya dan tidak mempunyai otoritas yang kuat. Intrik-intrik politik dan ketegangan antar kerabat kerajaan seperti yang telah diungkapkan di atas makin memperlemah institusi kesultanan. Selain itu, sultan sedang tidak berada di ibukotanya dan membantu Sultan Pagarruyung memerangi kaum Paderi. Oleh karenanya, Praetorius meminta agar ia sendiri yang diizinkan memimpin pasukan memerangi para bajak laut. Kendati demikian, usulan ini tidak dijalankan oleh pemerintah pusat di Batavia karena pertimbangan biaya. Ia hanya diperintahkan memperbaharui kontrak politik dan perjanjian dengan penguasa Jambi pada 1829, di mana kali ini pasal-pasalnya mencakup masalah perompakan. Kini pemerintah kolonial Belanda berniat melibatkan diri lebih dalam dengan Jambi, yang sebelumnya banyak mereka abaikan.

Latar belakang bagi kebijaksanaan tersebut adalah parahnya kekosongan kas keuangan Belanda pada masa itu, karena dipaksa memadamkan berbagai pemberontakan di Kepulauan Nusantara, seperti Perang Paderi dan Diponegoro. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan Sistem Tanam Paksa, yang berlaku efektif di Jawa. Sementara itu, kebijaksanaannya bagi Sumatera adalah dengan menguasai pusat-pusat perdagangan di sana. Meskipun demikian, van den Bosch menolak taktik penaklukan langsung. Para penguasa masih diizinkan memerintah negerinya tetapi harus diikat dengan perjanjian atau kontrak politik dengan Belanda.

Pada tahun 1832, Praetorius merilis kontak dengan Sultan Facharuddin dan mengusulkan pertemuan dengannya di Rawas (perbatasan Jambi dan Palembang). Sultan menyambut baik hal itu, karena membutuhkan bantuan Belanda mengamankan kekuasaannya yang sedang dilanda krisis di ibukota (antara lain permasalahan dengan Raden Tabun, seperti yang telah diulas sebelumnya). Dukungan Belanda dalam memerangi kaum perompak merupakan sesuatu yang positif. Selain itu, ia masih perlu menyelesaikan berbagai persengketaan lainnya dan didera kesulitan keuangan yang parah. Ia berharap Belanda dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Sultan segera mengirimkan nota balasan yang pada intinya sepakat mengadakan pertemuan dan perundingan dengan Praetorius. Namun belakangan, residen Belanda itu justru mengulur-ulur waktu pertemuan. Ekspedisi pengenalan medan Belanda sebagaimana yang telah diizinkan oleh sultan, ternyata dilakukan tanpa mengindahkan adat istiadat setempat. Sikap semacam ini menimbulkan kecurigaan

dalam diri sultan dan rakyat Jambi pada umumnya, bahwa Belanda secara diam-diam hendak mencaplok wilayah mereka.

Karena kebekuan suasana yang tak menentu itu, Facharuddin berupaya menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikannya. Ia terus berusaha mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Belanda. Pada bulan April 1833, sultan mengajukan kembali rencana perundingan dan hanya memperoleh jawaban bahwa residen akan menemuinya di perbatasan, tetapi tidak menyebutkan tanggalnya. Tanpa menunggu jawaban lebih jauh, Facharuddin menyampaikan pesan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke Rawas dengan disertai 200 orang pengiringnya, termasuk wanita, anak-anak, dan beberapa pembesar Palembang. Ketika laporan ini tiba pada Praetorius, ia merasa cemas dan menyangka bahwa sultan hendak melancarkan serangan. Terlebih lagi pecah insiden kecil-kecil yang dilakukan pengikut sultan. Kendati demikian, sultan tetap mengirimkan surat bahwa ia datang dengan maksud damai. Karena masing-masing pihak tetap bertahan dan tidak saling memercayai, pecah pertempuran antara Jambi dan Belanda, di mana Jambi mengalami kekalahan telak pada 16 Agustus 1833. Facharuddin sendiri harus menyelam di sungai dan berenang melawan arus demi menyelamatkan nyawanya.

Jambi diwajibkan menandatangani perjanjian sementara pada bulan November 1833; yang menyatakan:

- Jambi menempatkan dirinya di bawah kedaulatan pemerintah Belanda.
- Sultan akan menerima tunjangan dari pemerintah kolonial.
- Belanda diizinkan mempertahankan bentengnya di Muara Kompeh.
- Belanda diperkenankan memungut bea ekspor dan impor.
- Setiap terjadi konflik, Jambi berjanji memberikan bantuannya.
- Kesultanan Jambi akan memberitahukan setiap pergantian penguasa kepada pemerintah Belanda.

Perjanjian di atas diganti dengan suatu kontrak permanen yang disepakati pada tahun 1834. Selain itu, Sultan Fachruddin menjanjikan pula tak akan menjalin hubungan dengan musuh-musuh pemerintah kolonial. Pertanian di Jambi akan ditingkatkannya dan sultan akan melarang perbudakan. Meskipun demikian, Belanda tak mewajibkan sultan membebaskan budak-budak yang telah dimilikinya. Memang benar bahwa isi perjanjian di atas menghapuskan kedaulatan Jambi; tetapi Fachruddin sendiri merasa diuntungkan. Pertama-tama, ia menerima tunjangan

tahunan sebesar 8.000 Gulden, yang akan dibayar tiga bulan sekali. Uang ini sanggup mengatasi kemiskinannya yang parah. Residen Boers yang tiba di Jambi pada 1834, sangat terkejut menyaksikan parahnya kemiskinan yang diderita Kesultanan Jambi. Kamar-kamar tamu di istana nampak kosong melompong. Fachruddin sendiri bahkan meminta pembayaran di muka sebesar 200 Gulden. Kedua, Belanda berjanji menjunjung dan melindungi hak-haknya, sehingga Fachruddin merasa terlindung dari musuh-musuh internalnya.

Tak lama kemudian ada juga kekecewaan kedua belah pihak terhadap isi kontrak di atas. Namun Fachruddin meninggal pada tahun 1841 dan digantikan oleh saudaranya Abdulrachman Nazaruddin (1841–1855). Berdasarkan kesepakatan yang dijalin dengan pemerintah kolonial, Jambi hanya perlu memberitahukan pergantian penguasanya pada Belanda. Meskipun demikian, ucapan selamat baru diterima oleh Sultan Nazaruddin pada tahun 1843. Pengangkatan ini mengecewakan Raden Tabun, yang sekali lagi dilewatkan kesempatannya menjadi sultan. Akibatnya, timbul berbagai ketegangan dan pemberontakan melawan Nazaruddin pecah pada tahun 1842. Jambi terancam perang saudara. Residen Belanda sampai meminta petunjuk pemerintah pusat di Batavia mengenai apa yang harus dilakukan jika krisis semacam itu berlaku di Jambi. Untunglah hal-hal yang dikhawatirkan tak terjadi dan masing-masing pihak berdamai.

Semasa pemerintahan Nazaruddin datanglah seorang petualang Amerika bernama Gibson mengunjungi Jambi pada awal 1852. Ia mengutus anak buahnya bernama Charles Graham menyampaikan surat pada sultan Jambi yang isinya menjanjikan bantuan Amerika dalam melawan Belanda. Tentu saja hal ini hanya bualan Gibson. Kendati demikian, Gibson tertangkap oleh otoritas pemerintah kolonial dan dijatuhi hukuman penjara. Tetapi belum sampai masa hukumannya habis, Gibson berhasil melarikan diri pada bulan April 1853. Pada pembelaan dirinya, Gibson menyatakan dirinya tak bersalah. Pengalamannya itu kemudian dituangkan dalam buku berjudul *The Prison of Weltevreden and a Glance at the East Indian Archipelago* (1856).

Sultan Nazaruddin mangkat pada 18 Agustus 1855 dan digantikan oleh putra almarhum Sultan Fachruddin bernama Taha Safiuddin (1855–1858). Ibunya adalah seorang wanita keturunan Arab, yang mengajarkan padanya mengenai kancah perpolitikan di dunia Islam. Penguasa Jambi yang baru ini merupakan seorang terpelajar yang sanggup membaca dan menulis. Belanda tak lagi puas dengan sekedar

pemberitahuan diangkatnya penguasa di Jambi, sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tahun 1834. Mereka menuntut Sultan Taha Safiuddin bersumpah setia pada pemerintah kolonial dan menandatangani sebuah kontrak baru. Pada bulan Oktober 1857, delegasi Belanda di bawah pimpinan Residen Couperus bertolak ke Jambi guna merundingkan kontrak baru tersebut.

Pasal-pasal dalam kontrak yang disodorkan Belanda makin memangkas kekuasaan sultan Jambi. Sebagai contoh, Jambi dijadikan bagian Hindia Belanda (pasal 1); penggantian penguasa harus mendapatkan persetujuan pemerintah Belanda (pasal 23, 24, dan 25); dan segenap kegiatan perniagaan beserta administrasi internal kesultanan akan diawasi oleh Belanda (pasal 29). Tentu saja Taha tak sudi menandatangani kontrak seperti itu dan memilih menghindari perjumpaan dengan wakil pemerintah Belanda. Strategi mengelak ini akan terus dipergunakan Taha hingga akhir hayatnya di tahun 1904.

Di luar pengetahuan Belanda, Taha memohon bala bantuan pada Turki. Ia mengirim surat pada sultan Turki guna meminta pengesahan bahwa Jambi adalah wilayah Turki, sehingga tidak ada kekuatan asing yang berhak atasnya. Pangeran Marta Ningrat, sepupu Taha menitipkannya pada seorang pembesar Singapura yang dihadiahi 30.000 Dollar Spanyol agar menyampaikannya ke Istambul. Meskipun demikian, Turki yang pernah menjadi negara perkasa beberapa ratus tahun sebelumnya, lebih memilih menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat ketimbang membantu sesama negeri Muslim. Surat yang dikirim Taha itu sampai ke tangan sultan Turki, tetapi ia bersikap seolah-olah tak menerimanya.

Wakil pemerintah kolonial yang diperintahkan mengadakan perundingan dengan Taha terpaksa pulang dengan tangan hampa. Belanda belum berputus asa menghadapi sultan yang mereka anggap keras kepala tersebut. Perundingan tahap kedua mereka tawarkan pada bulan Desember 1857. Kali ini beberapa pasal yang menurut mereka memberatkan sultan direvisi. Masalah suksesi Kesultanan Jambi yang harus meminta persetujuan Belanda tak lagi dipermasalahkan. Larangan membangun benteng bagi sultan Jambi juga dicoret. Belanda mempertimbangkan bahwa berdasarkan sejarahnya orang Jambi tidak pernah membangun benteng sendiri, terkecuali beberapa buah yang tak pernah selesai di sekitar istana. Dilarang atau tidak, menurut hemat Belanda, Jambi tak akan sanggup mendirikan benteng pertahanannya. Oleh sebab itu, tidak masalah apabila pasal mengenai pelarangan itu dicoret saja. Selanjutnya, Belanda sudah cukup

puas mengawasi perdagangan saja. Singkat kata, Belanda optimis bahwa Taha pasti bersedia menandatangani perjanjian yang diperlunak itu. Sayangnya, dugaan Belanda ini ternyata meleset.

Sebelum kedatangan misi resmi yang akan dipimpin oleh Couperus dan Storm van's Gravensande, diutuslah delegasi pendahuluan membawa surat gubernur jenderal pada 20 Maret 1858. Kendati demikian, Taha jarang datang menjumpai mereka dan berupaya mengulur-ulur waktu. Biasanya urusan tersebut diserahkan pada Pangeran Marta Ningrat, yang saat itu menjabat sebagai *pangeran ratu* (putra mahkota). Masalah kontrak baru justru sangat jarang dibicarakan secara serius. Misi pendahuluan ini dapat dikatakan gagal. Couperus dan Storm tetap datang ke Jambi pada bulan Juni 1858. Namun Taha dengan tegas mengatakan bahwa ia menolak menyepakati kontrak baru dalam bentuk apapun dan tetap berpegang pada perjanjian tahun 1834, yang pernah ditanda-tangani oleh Sultan Fachruddin. Bila harus terjadi peperangan, ia menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Perundingan menemui jalan buntu.

Ditolak mentah-mentah seperti ini membangkitkan amarah pemerintah kolonial. Kini sudah tiba waktunya bagi mereka menempuh jalan kekerasan. Ultimatum disampaikan kepada Taha tanggal 2 September 1858. Ia diberi kesempatan dalam empat puluh delapan jam menyetujui kontrak baru atau diturunkan dari takhtanya. Begitu tenggang waktu yang diberikan habis, Taha menyatakan bahwa ia bersedia berunding. Rombongan diterima di tempat kediaman Pangeran Surio Nata Krama. Pangeran ratu yang ditugaskan menjumpai mereka menyampaikan bahwa Taha hanya bersedia menerima 12 pasal saja. Anehnya, kontrak kali ini adalah versi aslinya dan bukannya yang diperlunak sebagaimana versi revisinya. Pasal mengenai suksesi Kesultanan Jambi kembali diikut-sertakan; di mana aturan seperti ini tak dapat diterima Taha.

Perundingan berlangsung alot dan pemerintah kolonial kehabisan kesabaran. Ekspedisi militer dilancarkan pada 6 September 1858 dan dengan susah payah Belanda akhirnya berhasil menduduki istana. Ternyata Taha telah melarikan diri ke pedalaman. Pangeran Marta Ningrat diberi kesempatan menduduki takhta, tetapi ia menolaknya. Sebagai gantinya, Pangeran Prabu diangkat sebagai sultan Jambi yang baru dengan gelar Ahmad Nazaruddin (Ahman Nachruddin; 1858–1881). Ia bersedia menandatangani kontrak politik yang disodorkan oleh pemerintah kolonial. Pengangkatan ini menimbulkan konflik mengingat bahwa Sultan Taha Safiuddin

masih dianggap penguasa yang sah oleh rakyat. Apalagi, ia yang memegang keris pusaka kerajaan. Itulah sebabnya, para sultan Jambi yang diangkat Belanda boleh dikatakan lumpuh kekuasaannya. Semenjak penanda-tanganan kontrak di atas, praktis Jambi menjadi bawahan pemerintah kolonial.

Sebenarnya, upaya Belanda menduduki Jambi lebih dimaksudkan sebagai penegakan kedaulatannya di kawasan tersebut agar tidak jatuh ke tangan bangsa lainnya dan bukannya dari segi ekonomi. Pemasukan yang berasal dari Jambi boleh dikatakan kecil dan tak memiliki makna signifikan. Selama beberapa dasawarsa kemudian, Belanda lebih tertarik melakukan penelitian ilmiah di Jambi. Residen Palembang, van Ophuijsen, mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Kesultanan Jambi. Pada tahun 1861 dan 1867, ia berjumpa dengan Sultan Ahmad Nazaruddin dan memperoleh sambutan yang cukup baik. Sultan Ahmad Nazaruddin sendiri pernah menulis surat berisikan permohonan pengampunan bagi Sultan Taha; tetapi tampaknya surat ini tidak sampai pada van Ophuijsen. Meskipun demikian, van Ophuijsen sempat mendengar rumor mengenai permintaan amnesti ini dan menganggapnya sebagai gagasan yang baik. Dalam catatan hariannya, van Ophuijsen mengatakan bahwa Sultan Taha memiliki kemampuan yang lebih baik ketimbang Ahmad Nazaruddin. Jikalau ia dapat ditarik memihak pemerintah kolonial, sumbangsih yang diberikannya tidaklah kecil.

Dalam kunjungan pertamanya, van Ophuijsen berpendapat bahwa Taha merupakan pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya. Kendati demikian, setelah kunjungan kedua dan ketiganya, van Ophuijsen merombak total anggapannya ini dan menyatakan bahwa Taha merupakan sosok yang sangat dicintai rakyatnya. Berdasarkan adat Jambi, sultan yang masih memegang pusaka kerajaannya tetap dianggap sebagai penguasa dan wajib ditaati perintahnya oleh rakyat. Kenyataan inilah yang memicu dualisme kekuasaan di Jambi. Sultan Taha sendiri berkuasa penuh di dataran tinggi dan masih sanggup mengendalikan seluruh Jambi. Bahkan secara diam-diam ia masih menerima tunjangan tahunannya dari pemerintah Belanda; yakni melalui Ahmad Nazaruddin. Hal ini baru diketahui Belanda pada tahun 1879.

Dataran tinggi Jambi merupakan daerah yang strategis. Letaknya sulit dijangkau dan kawasan tersebut merupakan pemasok beras bagi dataran rendah; sehingga berpotensi mengendalikan daerah-daerah lainnya. Dengan diangkatnya Ahmad Nazaruddin sebagai sultan, lambat laun timbul dualisme kekuasaan di Jambi. Yang

pertama berada di tangan Sultan Taha; sedangkan yang satunya lagi adalah Sultan Ahmad Nazaruddin sendiri. Semasa pemerintahan Sultan Ahmad Nazaruddin, seorang keturunan Arab bernama Said Idrus dipercaya menangani urusan diplomatik kesultanan. Ia kerap bepergian ke Arabia, Mesir, Singapura, dan Batavia, sehingga sanggup menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Eropa. Pangeran Wiro Kesumo inilah yang menjadi penghubung antara dua pusat kekuasaan di atas.

Salah satu hal yang mengganjal hubungan rakyat Jambi dengan pemerintah kolonial adalah kewajiban vaksinasi cacar–salah satu ketetapan yang ada pada kontrak. Pada masa itu, rakyat Jambi belum mengetahui manfaatnya. Mereka mungkin mengira bahwa luka permanen akibat vaksinasi mirip tanda yang dicapkan pada seorang budak. Pangeran Wiro Kesumo memperlihatkan niat baiknya pada Belanda dengan mengizinkan kedua anaknya divaksinasi cacar pada tahun 1861. Seiring dengan berjalannya waktu, Belanda mendengar kabar tidak sedap dari Jambi. Seorang serdadu Belanda telah diserang dan terdengar desas-desus bahwa Pangeran Wiro Kesumo hendak membeli kapal uap dari Singapura. Pemerintah kolonial segera mengutus wakilnya Residen Pruys van der Hoeven ke Jambi. Ia memaksa sultan menemuinya. Ahmad Nazaruddin bersedia menemuinya dan pertemuan berlangsung hangat. Hal ini melegakan Pruys dan setelah itu ia dua kali mengunjungi sultan. Pertama-tama di rumah Pangeran Wiro Kesumo dan setelah itu di Dusun Tengah.

Kunjungan ke Dusun Tengah mencengangkan Pruys karena menyaksikan kumuhnya tempat kediaman sultan di sana; yakni bangunan tua reot beratap jerami. Bahkan sultan nampak benar-benar miskin karena tak punya perabotan, sehingga minta dipinjami kursi dari kapal. Meskipun demikian, pembicaraan boleh dikatakan diwarnai suasana persahabatan dan sultan berjanji memenuhi ketetapan kontrak mengenai vaksinasi cacar beserta penghapusan perbudakan. Pruys memandag optimis hasil pertemuan ini, walau tak sepenuhnya memuaskan dirinya.

Belanda berusaha membujuk Taha agar menghentikan sikap permusuhannya terhadap pemerintah kolonial. Pruys pada bulan Maret 1879 menawarkan pengampunan dan bersedia memberi tunjangan sebesar 3.000 Gulden apabila Taha bersedia meninggalkan dataran tinggi serta menetap di ibukota. Kerabat Taha diutus menyampaikan hal ini, tetapi tidak memperoleh jawaban apapun. Seorang Arab terkemuka bernama Syaikh Abdullah bin Abu Bakar diperintahkan oleh pemerintah kolonial mengunjungi Taha sebanyak lima kali. Namun, hal ini justru memancing

kemarahan sultan Jambi yang tak bersedia tunduk pada Belanda tersebut. Beliau justru mempertanyakan niat Belanda menjalin rekonsiliasi dengan dirinya. Kalau memang benar gubernur jenderal menganggapnya sebagai anak, mengapa ia memukuli dan menodongkan meriam terhadap dirinya. Taha menyatakan bahwa sekarang dirinya memang miskin tetapi bebas. Apabila beliau membangun rumah yang bagus guna melindunginya dari hujan, Belanda pasti akan membakarnya kalau ada kesempatan. Dengan demikian, seluruh upaya ini berujung pada kegagalan. Taha menyerukan rakyat yang masih setia padanya melakukan perlawanan. Dengan demikian, otoritas pemerintah kolonial tidak pernah tenang menjalankan tugasnya.

Sultan Ahmad Nazaruddin mangkat pada Juli 1881. Pangeran Marta Ningrat yang didukung oleh kerabat Taha dinobatkan sebagai sultan baru dengan gelar Mohildin (1881–1885). Bersedianya Pangeran Marta Ningrat diangkat sebagai sultan ini menggirangkan hati Belanda, karena mengira peluang perdamaian dengan Taha telah terbuka. Keberatan Pangeran Wiro Kesuma yang ingin mengangkat saudara istrinya sebagai sultan tidak ditanggapi. Upacara penobatan sultan baru dilakukan dengan penuh kemegahan pada 1882. Bertolak belakang dengan kesan yang hendak ditimbulkan sebelumnya di hadapan Belanda bahwa sultan-sultan Jambi miskin dan bersahaja, acara kali ini sangat mengesankan keagungan. Rangkaian acara ini kemudian disertai pula dengan penanda-tanganan kontrak politik.

Sultan Ahmad Nazaruddin
Sumber: *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*

Taha sendiri masih memainkan strategi menghindar dan berupaya mengecoh pemerintah kolonial. Ia berpura-pura mengutus putranya bernama Raden Mohamad seolah-olah hendak berbaikan dengan Belanda pada tahun 1884. Bila ini tak dilakukannya, ia akan kehilangan tunjangan tahunannya. Di samping politik seperti ini, Sultan Taha sebenarnya telah mempersiapkan dirinya bila diserang Belanda. Beliau menyadari adanya kemungkinan bahwa suatu saat konflik senjata dengan Belanda akan pecah juga.

Tanpa diduga sebelumnya, Sultan Mohildin mangkat pada bulan Pebruri 1885. Krisis melanda Kesultanan Jambi, karena belum ditentukan siapa yang layak menggantikannya dan pemerintahan sementara waktu dipegang oleh *pangeran ratu*. Bersamaan dengan itu, terjadi serangan-serangan terhadap orang-orang Belanda. Pada bulan Mei 1885 berlangsung serangan terhadap tujuh perwira dan pejabat Belanda yang sedang berada di tempat bermain biliar. Raden Anom, salah seorang bangsawan Jambi melancarkan serangannya terhadap Belanda yang bercokol di ibukota Jambi. Hampir setiap hari hingga Desember 1885 berlangsung baku tembak antara orang Jambi dengan pasukan Belanda yang bertahan dalam bentengnya.

Pangeran Cakra Ningrat akhirnya terpilih menjadi sultan Jambi pada bulan September 1886 dengan gelar Zainuddin (1886–1899). Sebagai *pangeran ratu* diangkatlah Pangeran Anom Kesumo Judo–putra Taha. Menjelang akhir abad ke-19, Belanda ingin membuka pertambangan minyak di Jambi. Pada bulan Desember 1897, Belanda membawa naskah perjanjian kontrak eksplorasi minyak bumi pada Sultan Zainuddin. Namun sultan mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan tak bisa hadir. *Pangeran ratu* sendiri juga tidak berani meninggalkan tempat kediamannya karena sedang berjangkit wabah cacar. Ketidak-hadiran para penguasa Jambi ini tampaknya telah dirancang oleh Taha sebagai wujud perlawanan pasifnya.

Kebekuan semakin berlarut-larut dan penambangan minyak bumi tak kunjung dapat direalisasikan. Pemerintah Belanda berencana menurunkan Sultan Zainuddin dari takhtanya. Belanda mempertimbangkan agar Pangeran Anom Kesumo Judo, yang merupakan putra Taha, diangkat sebagai sultan dengan diawasi dua orang wali pro Belanda. Pangeran Wiro Kesumo mengajukan dua calon bagi jabatan tersebut, yakni Pangeran Adipati dan Pangeran Prabu Negara, putra almarhum Sultan Mohildin. Diperkirakan bahwa dengan pengangkatan putranya sebagai sultan, Taha akan berhasil dilunakkan pendiriannya.

Belanda menawarkan tunjangan bagi Sultan Zainuddin apabila bersedia meninggalkan takhtanya. Kendati demikian, Taha ternyata tidak memperkenankan pengangkatan putranya sebagai sultan, sehingga timbul kemelut baru. Pemerintah kolonial menempuh strategi baru. Mereka mengeluarkan ketetapan bahwa Pangeran Anom Kesumo Judo tidak akan dapat diangkat sebagai sultan, sebelum Taha bersedia menerima status sebagai warga negara atau menyerah pada otoritas kolonial. Pewarisan sultan akan dialihkan pada Pangeran Adipati atau Pangeran Prabu Negara, jikalau Taha menolak tawaran ini. Sultan Zainuddin dicopot dari kedudukannya pada tahun 1899. Tetapi tindakan ini justru menciptakan kekosongan kekuasaan di Jambi. Taha sendiri tidak kunjung memperlihatkan niat berbaikan dengan pemerintah kolonial.

Kevakuman kekuasaan ini menimbulkan dilema pula bagi pemerintah kolonial, karena membuka peluang bagi Taha meneguhkan kembali haknya atas singgasana Jambi. Kaum bangsawan Jambi tidak pula mencapai kata sepakat mengenai pemilihan sultan berikutnya. Akhirnya pada tahun 1901, Residen Van Rijn van Alkemade mengambil alih peran sultan; di mana tahapan ini merupakan proses keruntuhan Kesultanan Jambi. Sementara itu, perlawanan terhadap Belanda pecah di mana-mana. Pada 10 Februari 1901, Belanda mengirim 200 pasukannya menduduki Muara Tembesi yang strategis letaknya. Penguasaan kawasan ini memudahkan Belanda melancarkan operasi militernya ke seluruh Jambi.

Kemelut yang melanda Jambi terus berlarut-larut, hingga pada bulan Maret 1904 Pangeran Prabu Negara menyerahkan keris pusaka Seginje pada pemerintah kolonial. Kurang lebih bersamaan dengan itu diserahkan pula keris Sendya Merjaya. Belanda menganggap hal ini sebagai kemenangan besar. Peristiwa ini secara formal mengakhiri Kesultanan Jambi. Satu per satu tanah lungguh yang dikuasai kaum bangsawan Jambi berpindah ke tangan Belanda. Kompeh diambil alih dari Pangeran Nata Menggala pada bulan Maret 1904. Tak lama berselang, Pangeran Ario Jaya Kesumo menyerahkan tanah yang dimilikinya pada pemerintah kolonial. Seluruh wilayah Jambi lambat laun berada di bawah cengkeraman Belanda.

Belanda kini mengalihkan sasarannya pada Taha. Pada 21 April 1904 karena dikhianati oleh pengikutnya, tempat persembunyiannya di Sungai Besar ditemukan. Serombongan pasukan diperintahkan menangkapnya. Seorang opsir lokal menyamar dengan mengenakan pakaian Jambi guna pengenalan medan. Baku tembak terjadi pada 26 April 1904 dan menghabisi nyawa tiga orang. Salah seorang di antara mereka adalah

Taha sendiri. Dengan demikian, berakhir sudah nasib pejuang yang membaktikan seluruh hidupnya mempertahankan kedaulatan negerinya. Beliau kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah RI.

c. Kedatangan Karl Hirsch yang memalukan

Peristiwa menarik menjelang berakhirnya Kesultanan Jambi adalah kedatangan seorang penipu bernama Karl Hirsch. Ia merupakan seorang dokter Hungaria yang saat itu berusia kurang lebih 30 tahun dan berdinas di angkatan bersenjata Turki. Hirsch mengaku bernama Abdullah Yusuf dan menyatakan dirinya sebagai wakil khusus sultan Turki. Penipu ini tiba di Jambi pada bulan April 1904. Namun meninggalkan Jambi dan berdiam di Jakarta dari bulan Mei hingga Agustus. Ke mana-mana Hirsch selalu mengenakan seragam Turki berhias tanda jasa, sehingga mudah baginya menjalin kedekatan dengan komunitas Arab yang ada di Jambi. Ternyata pemerintah kolonial telah mengawasinya dengan ketat. Ia pernah mengunjungi Shanghai dan dengan sesumbar menyatakan bahwa ia hendak mengeruk uang raja-raja yang mudah percaya.

Pada 7 September 1904 pagi-pagi buta, Hirsch kembali ke Jambi dengan ditemani seorang Turki serta dua orang Jambi. Ia kemudian meminta agar salah seorang di antara kedua orang Jambi itu mengundang *pangeran ratu* yang dijabat oleh Pangeran Marta Ningrat. Begitu Pangeran Marta Ningrat tiba Hirsch memperkenalkan dirinya sebagai utusan sultan Turki dan mencium pipi *pangeran ratu*. Dikenakannya seragam pasukan Turki pada Pangeran Marta Ningrat. Setelah itu, mereka bertolak ke tempat kediaman *pangeran ratu*.

Hirsch menyerukan agar kaum bangsawan dan rakyat Jambi bersama-sama mengangkat senjata melawan Belanda. Namun hal ini tidak didukung oleh seluruh bangsawan. Pangeran Wiro Kesumo menyatakan bahwa ia akan datang apabila pertemuan tersebut diselenggarakan sepengetahuan pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, di rumah Pangeran Marta Ningrat telah berkumpul sekitar 100 orang. Demi meyakinkan pendengarnya, Hirsch mengacungkan setumpuk telegram dan mengatakan bahwa ia harus mengirimnya pada sultan Turki guna memohon bantuan kapal perang. Ia mengatakan lebih jauh bahwa ongkos pengirimannya adalah 800 Gulden. Uang sejumlah itu terkumpul tak lama kemudian dan ia mengajak mereka semua bersumpah sehidup semati.

Aksi ini baru diketahui oleh Belanda pada pagi harinya, yakni pukul 07.30. Penangkapan segera dilakukan. Beberapa orang bangsawan yang terlibat diasingkan ke

luar Sumatera. Pangeran Prabu dan Pangeran Adipati diasingkan ke Madiun. Pangeran Marta Ningrat sempat melarikan diri tetapi kemudian menyerah pada pemerintah kolonial dan diasingkan ke Manado. Hirsch yang berniat menipu mereka dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun. Konsul jenderal Turki di Batavia bahkan menjauhkan diri dari kasus tersebut. Demikianlah petualangan Hirsch berakhir.

d. Perekonomian

Sumber-sumber Belanda menyatakan bahwa Jambi merupakan penghasil lada utama di pantai timur Sumatera semenjak abad ke-17. Jambi tidak memungut bea bagi bahan sandang yang dimasukkan ke negeri tersebut. Namun setiap ekspor lada dipungut pajak 10 %. Perniagaan lada pada saat itu banyak dikuasai oleh orang China. Sumber-sumber sejarah yang ada menyebutkan nama-nama para pedagang China yang mempunyai peran penting dalam perdagangan lada, antara lain "Kecil Yapon" atau dikenal juga sebagai "Orang Kaya Sirre Lela." Gelar *orang kaya* atau *rangkaya* ini menunjukkan bahwa ia telah diterima dalam masyarakat terkemuka Jambi. Kesuksesan para pedagang China ini menerbitkan iri hati bagi pedagang Belanda. Pada tahun 1634, para pedagang China mengadakan perjanjian bahwa bila tak membayar bea ekspor mereka akan datang dengan enam atau tujuh buah kapal. Dengan kata lain, seluruh hasil lada di Jambi akan dibeli. Pedagang China juga menjanjikan bahwa mereka akan mendatangkan ahli-ahli yang sanggup membuat meriam.

Pedagang China di Jambi berfungsi pula sebagai pedagang perantara. Petani lada yang berasal dari daerah dan pegunungan di kawasan Minangkabau membawa hasil kebunnya ke Jambi dengan menggunakan perahu. Umumnya, sekitar 100 hingga 150 perahu kecil yang membawa lada ke Jambi, di mana masing-masing perahu sanggup mengangkut sekitar 150 pikul lada. Para pedagang China membeli atau menukarnya dengan kain tenunan, yang pada gilirannya dijual lagi oleh petani lada ini di kampung halamannya.

Bea yang diperoleh dari perniagaan ini masuk ke perbendaharaan sultan beserta raja muda. Masing-masing di antara mereka menerima 10 % dari bea ekspor lada. Pembagiannya adalah sebagai berikut: sultan memperoleh bea yang berasal dari pedagang Belanda, Inggris, dan Tionghua; sedangkan raja muda menariknya dari pedagang Jawa beserta Melayu. Sementara itu, 90 % bea itu masuk ke kas para *orang kaya* atau *rangkaya*.

Mahalnya biaya ekspor dan pengangkutan menjadikan pedagang Belanda tidak datang lagi ke Jambi. Mereka yang mengundang agar kapal-kapal Jambi ke Batavia guna membawa sendiri hasil buminya berupa lada tersebut. Belakangan pada masa kemerosotannya (kurang lebih akhir abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18), mutu komoditas Jambi tidak lagi dianggap baik. Jambi tidak lagi menarik perhatian para pedagang asing. Marsden mengungkapkan:

> Pelabuhan di Jambi jarang didatangi, kecuali oleh saudagar-saudagar pribumi.[514]

Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa pamor Jambi sebagai salah satu pelabuhan internasional telah menurun dan para sultannya boleh dikatakan hidup dalam kemiskinan.

II. PALEMBANG

a. Cikal-bakal Kerajaan Palembang

Sejarah awal Kerajaan Palembang terkait dengan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di kepulauan Nusantara. Sebelumnya, Palembang telah menjadi salah satu pusat perniagaan yang ramai semenjak zaman Sriwijaya. Pada tahun 1500, Raden Patah, raja Demak yang konon juga berasal dari Palembang menjalin hubungan dengan kerajaan tersebut. Semenjak runtuhnya Demak pada tahun 1546, nama Palembang jarang disebut lagi dalam sejarah, hingga datangnya seorang tokoh bernama Ki Gede Sura ke kawasan tersebut. Ki Gede ing Suro Tuo ini merupakan cikal-bakal sultan-sultan Palembang berikutnya. Kedatangannya terkait dengan kekacauan akibat perang perebutan takhta di Demak pada tahun 1546. Pangeran Adiwijaya (Jaka Tingkir) berhasil mengalahkan Sultan Prawata dari Demak dan mendirikan Kerajaan Pajang.

Sebagian pengikut Demak yang dipimpin oleh Kiai Gede ing Suro Tuo melarikan diri ke Palembang dan mulai menegakkan kekuasaan di sana. Mereka lantas membangun pemukiman di Kuto Gawang, yakni suatu kawasan di sekitar Kampung Palembang Lamo. Armada Banten yang dipimpin Pangeran Maulana Muhamad melancarkan serbuan terhadap Palembang pada tahun 1596. Namun serangan ini gagal karena tewasnya Maulana Muhamad dan pasukan Banten ditarik mundur dari Palembang. Alasan serangan ini memiliki motif ekonomi, yakni monopoli lada. Perdagangan lada saat itu memang dikendalikan dua kerajaan besar di belahan

---

514. *Sejarah Sumatra* (terjemahan bahasa Indonesia) halaman 329.

barat Kepulauan Nusantara, yakni Aceh di utara dan Banten di Selatan. Palembang belum berada di bawah pengaruh kedua kesultanan besar tersebut; karena itu, Banten berambisi meluaskan kekuasaannya hingga ke sana.

Kiai Gede ing Suro Tuo ditunjuk oleh Sultan Trenggono mewakili Demak di Palembang[515]. Beliau sendiri tidak berputra dan digantikan oleh kemenakannya bernama Kiai Gede ing Suro Mudo (1573–1590). Para penguasa Palembang berikutnya belum menyandang gelar raja atau sultan dan masih dipandang sebagai bawahan Kerajaan Mataram. Sebelum Kiai Mas Endi mengangkat dirinya sebagai sultan, mereka biasanya hanya bergelar Kiai atau Pangeran saja. Sepeninggal Kiai Gede ing Suro Mudo terjadi perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh Kiai Mas Adipati (1590–1595). Saudara Kiai Mas Adipati bernama Den Arya menggantikannya, tetapi tidak lama memerintah. Perangai raja ini kurang baik dan ia menemui ajalnya di tangan suami seorang wanita yang baru menikah. Raja terpesona dengan kecantikan sang istri dan merebutnya, sehingga membangkitkan dendam dalam diri suaminya.

Setelah Den Arya terbunuh, saudaranya bernama Pangeran Madi ing Angsoko (1595–1629) tampil menggantikannya. Para penguasa Palembang berikutnya secara berturut-turut adalah Pangeran Madi ing Alit (1629–1630), Pangeran Sedo ing Puro (1630–1639), Pangeran Sedo ing Kenayan (1639–1650), Pangeran Sedo ing Pasarean (1651–1652), dan Pangeran Sedo ing Rajek (1652–1659). Setelah itu, berubahlah Palembang menjadi kesultanan.

Semasa pemerintahan Pangeran Madi ing Alit dan Pangeran Sedo in Puro, Mataram mengajak Palembang bersama-sama menyerang VOC. Yang menjadi perdana menteri atau mangkubumi semasa Pangeran Sedo in Kenayan adalah permaisurinya bernama Ratu Pembayun atau Ratu Sinuhun. Ketika itu, Belanda meminta izin mendirikan lojinya di Palembang. Ratu Sinuhun sendiri sangat disegani dan dianggap sebagai tokoh pertama yang mengodifikasi aturan adat di kawasan tersebut. Belanda memaksakan monopoli timah di Bangka pada zaman Pangeran Sedo in Pasarean. Akibatnya, timbul persaingan antara Belanda dan Inggris. Palembang yang merasa terjepit meminta bantuan Mataram dengan mengutus Pangeran Mangkurat. Mataram memang mengirimkan bala bantuannya, tetapi kalah.

Pangeran Seda ing Pasarean terluka dalam pertempuran, sehingga Pangeran Mangkurat terpaksa menggantikannya. Palembang akhirnya menandatangani

515. Lihat *Sejarah Daerah Sumatera Selatan,* halaman 71.

kontrak monopoli lada. Karena merasa dirugikan, armada Belanda dibawah pimpinan Laksamana van der Laan mengepung Palembang (1659). Benteng pertahanan di muara Plaju dan Pulau Kembara direbut. Sementara itu, kota Palembang dibumi hanguskan. Menjadi saksi mata bagi kehancuran kotanya, Pangeran Mangkurat sangat terpukul dan menyerahkan pemerintahan pada adiknya, Raden Tumenggung Palembang Kiai Mas Endi (Hindi) . Ia lalu meninggalkan Palembang dan wafat di Saka Tiga. Melalu perantaraan raja Jambi diadakan perdamaian antara Palembang dan Belanda. Kiai Mas Endi memberikan izin bagi Belanda mendirikan benteng di Sungai Aur. Setelah kakaknya–Pangeran Mangkurat–mangkat, Kiai Mas Endi menobatkan dirinya sebagai Sultan Abdulrahman. Gelar lain beliau adalah Sunan Cinde Balang.

b. Perkembangan Kesultanan Palembang selanjutnya

Penguasa Palembang pertama yang memakai gelar sultan adalah Kiai Mas Endi yang juga disebut Pangeran Ario Kesumo. Ia memutuskan hubungan dengan Jawa yang saat itu dikuasai Kerajaan Mataram dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Abdulrahman[516] (1659–1706). Kemudian, beliau digantikan oleh putranya dengan Ratu Agung, yang naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Mansur (1706–1714).

Sultan Palembang ketiga adalah Raden Uju, adik Muhammad Mansur, yang menduduki singgasana dengan gelar Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714–1724). Selanjutnya, ia digantikan oleh kemenakannya bernama Pangeran Jayo Wikramo, yang bergelar Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1758). Penerus singgasana Palembang berikutnya adalah Pangeran Adikesumo, yang merupakan putra kedua Mahmud Badaruddin I. Kakaknya yang seharusnya menggantikan takhta, mati kena amuk; sehingga Pangeran Adikesumo yang akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Palembang kelima. Gelarnya adalah Sultan Ahmad Najamuddin I (1758–1776)

Belanda pernah menyerang dan menghancurkan Palembang pada tahun 1680. Setelah itu, VOC berkesempatan melakukan monopoli perdagangan lada dan timah melalui perjanjian dengan sultan-sultan Palembang. Perjanjian ini diperbaharui lagi di bawah pemerintahan sultan ke-6, Mohammad Bahauddin (1776–1803), putra Sultan Ahmad Najamuddin I, pada tahun 1777. Perjanjian itu pada intinya menyebutkan bahwa sultan hanya diizinkan menjual lada dan timah kepada VOC dengan harga

516. Gelar lengkap beliau adalah Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam (lihat buku *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, halaman 7).

yang telah ditentukan oleh mereka. Bangsa Eropa lainnya tak boleh berdagang dan berlayar di Palembang. Untuk memperkokoh kekuasaannya, Belanda membangun benteng di tepi Sungai Musi yang diperkuat dengan 50–60 pasukan. Benteng ini dimaksudkan untuk mencegah upaya-upaya penyelundupan.

c. Palembang melawan kolonialisme

Sultan ke-7 Palembang, Mahmud Badaruddin II (1803–1821) merupakan penguasa Palembang paling terkemuka dan disegani, yang dengan gigih menentang kolonialisme. Ia merupakan putra sulung Sultan Muhammad Bahauddin dan sebelumnya bernama Raden Hasan. Antara tahun 1811 hingga 1816, Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, pemerintah Inggris mengirim surat pada sultan agar mengusir sisa-sisa pasukan Belanda yang bercokol di wilayah kekuasaannya. Surat dari Raffles yang dikirimkan akhir Mei 1811 itu menyatakan bahwa Inggris akan sangat berterima kasih apabila Sultan Badaruddin bersedia menghancurkan kubu pasukan Belanda di seantero wilayah kerajaannya. Bersama dengan surat itu, dikirimkan pula 80 pucuk senapan dan 10 karung mesiu. Di samping itu, Inggris menjanjikan pula bantuan militer. Badaruddin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang benteng Belanda di Sungsang, dekat muara Musi dan berhasil menaklukannya pada 14 September 1811; yakni empat hari sebelum penyerahan kekuasaan oleh Gubernur Jenderal Belanda Janssens kepada Inggris. Sultan kemudian memproklamasikan kemerdekaan dan kedaulatan Palembang. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan hukum internasional Palembang merupakan negara merdeka dan berdaulat. Empat hari setelah itu, yakni tanggal 18 September 1811 barulah dilangsungkan penyerahan kekuasaan antara pemerintah kolonial Belanda kepada Inggris di Tuntang; yang selanjutnya dikenal sebagai Perjanjian Tuntang. Kendati demikian, pemerintah kolonial Inggris mengincar tambang timah di Bangka dan Belitung, sehingga Raffles mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespey pada tahun 1812 guna menaklukkan Palembang.

Inggris berdalih bahwa setelah ditanda-tanganinya Perjanjian Tuntang, bekas wilayah jajahan Belanda, termasuk Kesultanan Palembang, menjadi milik Inggris. Meskipun demikian, Sultan Badaruddin II menyatakan bahwa empat hari sebelum penyerahan itu, pihaknya telah mengusir sisa-sisa pasukan Belanda dan memproklamasikan kemerdekaan kerajaannya. Palembang semenjak itu boleh dikatakan kembali berdaulat. Dengan demikian, sultan adalah tuan di negerinya sendiri

dan menampik dengan tegas apabila Inggris dianggap sebagai pewaris Belanda. Utusan yang dikirim Inggris pada sultan guna menuntut penyerahan tambang-tambang timah pulang dengan tangan hampa. Oleh karenanya, Inggris kini berniat mengerahkan kekuatan militernya menaklukkan Sultan Badaruddin II.

Pertempuran pecah antara Inggris dan Palembang. Inggris mengerahkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Robert Rollo Gillespie. Rakyat Palembang sudah memperkirakan bahwa cepat atau lambat Inggris pasti akan melancarkan serangannya terhadap mereka, sehingga mengadakan persiapan sebelumnya. Sultan memerintahkan adiknya, Raden Husin, yang bergelar Pangeran Adi Menggolo, memimpin benteng pertahanan kesultanan di Pulau Borang. Pasukan Inggris segera diturunkan menyerbu benteng tersebut. Pangeran Adi Menggolo menyadari bahwa angkatan perangnya bukanlah tandingan pasukan Inggris, baik dari segi persenjataan ataupun jumlah. Untuk itulah ia segera kembali ke Palembang, menghadap sultan dan melaporkan kondisi sebenarnya. Memaklumi kondisi angkatan perangnya, sultan mengundurkan diri ke pedalaman; tepatnya ke Muara Rawas pada bulan April 1812. Sebelumnya, sultan menyerahkan terlebih dahulu pucuk pimpinan kesultanan pada Pangeran Adi Menggolo; namun melarangnya menaikkan bendera Inggris atau membuat perjanjian apapun dengan musuh. Dengan demikian, Gillespie gagal menemui sultan, sehingga ekspedisi militer itu dapat dikatakan belum menuai hasil apapun.

Inggris kini menerapkan politik pecah belah (*devide et impera*), yakni dengan mengangkat Pangeran Adi Menggolo sebagai Sultan Ahmad Najamuddin II (1812–1818). Pada 17 April 1812, penguasa baru ini menandatangani perjanjian dengan Inggris, yang isinya adalah penyerahan Bangka dan Belitung. Pasukan Inggris kemudian ditarik kembali ke Batavia. Kesempatan ini dipergunakan Sultan Badaruddin II memperkuat pertahanannya. Ia membentuk pula satuan gerak cepat. Residen Palembang, Robinson, tanpa sepengetahuan pemerintah pusatnya di Batavia mengadakan perundingan kembali dengan Badaruddin yang saat itu masih berada di pedalaman. Ia berpandangan bahwa Badaruddin tidak dapat dikalahkan dengan jalan kekerasan dan karena itu, ia berniat menempuh jalan damai. Ia berhasil menemui Badaruddin dan memulihkan kedudukannya sebagai sultan, sedangkan adiknya diturunkan dari takhta pada 29 Juli 1813. Meskipun demikian, tindakan ini tidak disetujui oleh pemerintah pusat Inggris di Batavia. Mereka lalu mengirimkan ekspedisi

militer pada 13 Agustus 1813 yang bertujuan menumbangkan kembali Badaruddin dan menaikkan adiknya sebagai sultan lagi. Tetapi Badaruddin tetap bebas bergerak dan diizinkan tinggal di Keraton Muda yang letaknya di samping istama kesultanan.

Kekuasaan atas Kepulauan Nusantara balik lagi ke tangan Belanda pada tahun 1816. H.W. Muntinghe diangkat sebagai komisaris Belanda bagi Palembang dan Bangka pada 27 Oktober 1817. Muntinghe mendekati Badaruddin dan berniat menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin II dari takhtanya. Badaruddin mendapatkan kembali takhtanya setelah mengadakan perjanjian dengan Muntinghe pada 20 Juli 1818. Karena diturunkan dari takhta Sultan Ahmad Najamuddin II meminta bantuan pada Raffles selaku wakil Inggris yang kini diizinkan berkedudukan di Bengkulu. Menanggapi permohonan ini, pihak Inggris mengirimkan bala bantuan untuk menolong Ahmad di bawah pimpinan Kapten Selmond. Tetapi serangan ini berhasil digagalkan. Selmond ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sementara itu, Ahmad diasingkan ke Cianjur oleh Belanda.

Badaruddin kini berniat membebaskan tanah airnya dari cengkeraman kaum penjajah. Ia bertekad mengusir Belanda dari negerinya. Guna menghalangi gerak laju musuh melalui Sungai Musi, dibangunlah benteng dan ranjau-ranjau di sepanjang sungai tersebut. Benteng-benteng itu ada yang berupa tembok batu, tanggul, dan pagar duri. Pada dinding benteng bertembok dibuat lubang-lubang sebagai tempat menembak atau menombak musuh. Benteng-benteng lain juga dibangun, seperti di Kuto Besak, Pulau Kemaro, Mangun Tapo, dan Tambak Bayo. Benteng yang berada di Kuto Besak dilengkapi dengan parit di sekelilingnya. Sedangkan ketiga benteng lain yang baru saja disebutkan di atas diperkuat dengan tiang-tiang pancang kayu. Sebagai perintang gerak maju kapal-kapal musuh pada berbagai sisi benteng dipasang rantai-rantai besi. Sultan mengobarkan semangat rakyat pedalaman dalam melawan penjajah. Ke manapun Muntinghe mengirimkan ekspedisinya, perlawanan rakyat telah siap menyambutnya. Akibatnya demi mengamankan Palembang, Muntinghe terus-menerus meminta tambahan jumlah pasukan.

Pihak Belanda menyalahkan Sultan Mahmud Badaruddin II beserta putranya, Pangeran Ratu, atas perlawanan yang berkobar di kalangan rakyat Palembang. Karenanya, Belanda memaksa sultan menyerahkan putranya. Tetapi tuntutan Belanda ini ditolak mentah-mentah. Muntinghe memberikan ultimatum pada sultan: "Apa tuan sultan punya mau, semuanya Holanda suda siap. Jikalau Pangeran Ratu serta

sekalian Pangeran yang di bawahnya tiada diberikan, nantinya pukul dua ini hari juga Kota Sultan dipasang dari kapal perang."[517] Sultan tak gentar mendengar ultimatum ini. Dengan semangat menyala-nyala dipersiapkanlah berbagai antisipasi. Sultan memerintahkan menantu-menantunya, Pangeran Kramo Jayo beserta Pangeran Nato memimpin pertahanan di Baluwarti Kiri dan Kanan. Meriam-meriam ditempatkan di atas tembok kota dan pintu-pintu gerbang ditutup seluruhnya.

Akhirnya pada 20 Mei hingga 19 Juni 1819 pecah perang antara Palembang dan Belanda. Peristiwa inilah yang dikenal sebagai Perang Palembang. Kapal-kapal perang Belanda yang saat itu berlabuh di Muara Ogan bergerak menembaki Palembang. Pasukan Belanda diturunkan mendobrak pintu keraton yang terletak di bagian Baluwarti Kiri. Namun upaya mereka ini disambut oleh perlawanan gigih pasukan Kesultanan Palembang. Serdadu Belanda menjadi kalang kabut dibuatnya. Pasukan penjajah yang ditempatkan di Keraton Kuto Lamo segera dipindahkan ke Sungai Aur. Namun mereka tidak sempat lagi mempersiapkan dirinya, sehingga banyak yang menemui ajalnya di tangan pasukan Palembang.

Karena terdesak, Muntinghe mengirim utusan menghadap sultan guna memohon gencatan senjata. Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjiwa besar mengabulkan permohonan Belanda tersebut. Mereka menyepakati gencatan senjata hingga tangggal 15 Juni 1819. Ketika tenggang waktu gencatan senjata berakhir, Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Palembang. Ternyata, di luar dugaan Belanda, pasukan Palembang menggunakan rakit-rakit api buatan sendiri dalam menghadapi agresi tersebut. Akibatnya, kapal-kapal Belanda banyak yang terbakar. Kubu Belanda yang berada di Sungai Aur diluluh-lantakkan oleh tembakan meriam dari Keraton Kuto Besak. Pasukan kolonial mengalami kekalahan dan Muntinghe terpaksa melarikan diri ke Bangka pada sore harinya sebelum bertolak ke Batavia untuk menghadap gubernur jenderal guna melaporkan kekalahan tersebut.

Ketika Muntinghe tiba di Batavia pada 19 Juni 1819, Gubernur Jenderal van der Capellen sedang mengadakan perjalanan ke Cirebon. Oleh karena itu, Muntinghe menyusulnya ke sana. Dalam rapat membahas langkah-langkah yang perlu diambil guna menaklukkan Palembang, diputuskan bahwa Belanda akan mengirim ekspedisi militer lebih kuat di bawah pimpinan Laksamana Muda G.J. Wolterbeek dan Jenderal

517. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, halaman 26. Ejaan telah dialihkan menjadi EYD. "Dipasang" maksudnya "diserang."

Schobert. Sementara itu, Kolonel Bakker yang diperintahkan Muntinghe mengepung Palembang semenjak 10 Juli 1819 menemui kegagalan, karena angkatan perang Sultan Badaruddin II tetap sanggup mempertahankan dirinya.

d. Tamatnya Kesultanan Palembang

Ekspedisi militer baru diberangkatkan pada 22 Agustus 1819. Ikut serta bersama ekspedisi itu, Pangeran Jayo Ningrat, Pangeran Jayo Kramo (putra ke-3 Sultan Ahmad Najamuddin II), Raden Badaruddin, dan Pangeran Wikramo Gober. Turut sertanya bangsawan-bangsawan Palembang ini jelas sekali memperlihatkan bahwa Belanda sedang menerapkan strategi *devide et impera*nya; di mana demi menaklukkan Palembang dimanfaatkan para bangsawan Palembang sendiri yang sebelumnya mereka tawan. Akhir Agustus 1819, ekpedisi tiba di Mentok dan di sana diperkuat kembali dengan 4 kapal perang, beberapa kapal kecil, serta 500 pasukan. Kendati demikian, perjalanan selanjutnya tidaklah mudah, karena armada Belanda harus menghadapi perlawanan rakyat maupun rintangan alam; seperti Sungai Sungsang yang susah dilayari. Bersamaan dengan itu, Belanda mengirim utusan menemui Sultan Mahmud Badaruddin II dan menganjurkannya menyerah saja. Tentu saja seruan ini ditampik dengan tegas oleh beliau. Dengan adanya penolakan ini, Belanda menggerakkan pasukannya ke Palembang. Di luar dugaan, pasukan Belanda disambut serangkaian tembakan gencar yang berasal dari benteng Tambak Bayo pada 18 Oktober 1819; sehingga keadaan mereka menjadi kacau balau.

Serangan-serangan baru yang dilancarkan oleh Laksamana Muda Wolterbeek tidak berhasil membuat sultan bertekuk lutut. Bahkan, Belanda makin kagum dengan sistem pertahanan Palembang. Dewan Peperangan Belanda kembali bersidang dan kali ini mereka menerapkan siasat liciknya. Mereka berniat memanfaatkan Sultan Ahmad Najamuddin II yang diasingkan ke Cianjur beserta putranya, Prabu Anom, sebagai sandera. Selanjutnya, Belanda akan mengadu domba Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Ahmad Najamuddin II. Mula-mula Belanda mendekati Ahmad Najamuddin II yang tengah diasingkan di Cianjur dan berjanji bahwa bila Palembang berhasil direbut oleh pemerintah kolonial, putra sulungnya akan diangkat sebagai sultan; sedangkan Ahmad Najamuddin akan dianggkat sebagai *susuhunan* dengan gelar Susuhunan Husin Dhiauddin[518]. Kesepakatan dicapai pada tahun 1821. Oleh karenanya, Prabu Anom

518. Buku *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia* halaman 110 memberikan keterangan yang berbeda. Menurut buku tersebut putra Ahmad Najamuddin II bernama Hisim Diau'ddin. Padahal buku *Risalah Sejarah Perjuangan*

dan Ahmad Najamuddin II bersama-sama dengan Jenderal De Kock berangkat ke Palembang dalam suatu ekspedisi militer yang baru.

Ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal Baron de Kock ini diberangkatkan pada 9 Mei 1821. Sembilan belas kapal perang, 12 kapal pengangkut, 15 kapal meriam, 6 kapal perawat korban, 200 pucuk meriam, dan 3.000 serdadu dilibatkan dalam ekspedisi ini. Sebelum melancarkan serangan, Belanda melakukan perang urat syarat terlebih dahulu dengan memberitahukan bahwa Sultan Ahmad Najamuddin II beserta putra sulungnya berada di atas kapal. Ia menyerukan pada Mahmud Badaruddin II agar menyerah saja dan melimpahkan kekuasaan pada Prabu Anom, yang telah ditetapkan sebagai sultan Palembang berikutnya. Namun seruan ini tidak ditanggapi oleh pihak Palembang.

Pada 10 Juni 1821, Belanda mencoba menyerang benteng Tambak Bayo tetapi gagal. Serangan-serangan berikutnya juga mengalami kegagalan. Belanda menerapkan siasat liciknya lagi. Pada 22 Juni 1821 yang bertepatan dengan hari Jumat, Belanda sengaja tidak melancarkan serangannya. Sultan salah mengira bahwa Belanda menghormati hari suci umat Islam tersebut. Demi membalas sikap "baik" Belanda tersebut, Sultan memerintahkan agar serangan pada hari Minggu dihentikan sebagai wujud penghormatan terhadap hari suci umat Kristen itu. Siasat ini terbukti melengahkan sultan, karena justru pada hari Minggu tanggal 24 Juni 1821 Belanda melancarkan serangannya. Pasukan Palembang yang tidak siap dapat dikalahkan. Pulau Kemaro dan benteng-benteng lainnya diduduki Belanda, sehingga pertahanan Palembang praktis lumpuh. Belanda selanjutnya mengerahkan kembali angkatan perangnya melakukan blokade di muara Sungai Ogan agar Sultan Mahmud Badaruddin II tidak dapat mengundurkan diri ke pedalaman. Palembang berada di ambang kekalahannya.

Jenderal de Kock menulis surat pada 26 Juni 1821 yang ditujukan kepada Sultan Mahmud Badaruddin II disertai anjuran agar beliau menyerah saja, karena kondisinya sudah tak memungkinkan lagi baginya meneruskan perjuangan. Apabila peperangan dilanjutkan, lebih banyak korban jiwa berjatuhan dan Keraton Kuto Besak pasti akan dihancur leburkan oleh Belanda. Keesokan harinya, sultan mengutus Pangeran Adipati Tuo datang menemui de Kock guna menyampaikan protesnya mengapa

---

Sultan Mahmud Badaruddin II menyebutkan bahwa Husin Dhiauddin adalah gelar *susuhanan* bagi Ahmad Najamuddin II.

Belanda menyerang mereka di hari Minggu, padahal sultan beserta rakyat Palembang menghormati hari suci itu. Selanjutnya, sultan menyatakan bahwa ia bersedia menyerahkan pemerintahan Palembang pada saudaranya, asalkan tetap diizinkan tinggal di Palembang. Jenderal de Kock menolaknya karena gubernur jenderal telah memutuskan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II akan dibawa ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Ternate.

Pangeran Adipati Tuo lantas kembali menemui sultan; sementara itu, pasukan Belanda disiagakan di sekitar Keraton Kuto Besak dan bersiap melakukan pendaratan. Meskipun demikian, pendaratan dihentikan dan pasukan yang telah mendarat diperintahkan kembali ke kapal ketika de Kock melihat kedatangan Pangeran Adipati Tuo yang membawa jawaban dari kakaknya, Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada intinya, sultan bersedia memenuhi tuntutan Belanda dan meminta waktu dua hari mempersiapkan keberangkatannya ke Batavia. Tetapi ketika waktu dua hari telah habis, sultan belum juga mau diberangkatkan ke Batavia. Oleh karena itu, pada 30 Juni 1821 Jenderal de Kock mengutus Kapten Elout mendesak sultan agar segera naik ke kapal.

Dalam kondisi yang terjepit, Sultan Mahmud Badaruddin II pada 1 Juli 1821 mengutus putranya, Pangeran Prabu Kesumo Abdul Hamid dan menantunya, Pangeran Keramo Jayo Abdul Azim, menemui Prabu Anom dan Susuhunan Husin Dhiauddin (Sultan Ahmad Najamuddin II) menyerahkan takhta Kesultanan Palembang. Setelah itu selama dua hari berikutnya, Kapten Elout terus-menerus mendesak sultan agar bersedia segera diberangkatkan ke Batavia. Akhirnya, pada 3 Juli 1821, de Kock habis kesabarannya dan menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II. Beliau kemudian dinaikkan ke kapal *Dageraad* yang tiba di Batavia pada 28 Juli 1821. Pahlawan Palembang ini diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822. Di tempat pengasingannya, Belanda menyediakan suatu kompleks perkampungan sebagai tempat kediaman Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarganya, yang disebut "Kampung dan Jalan Palembang." Lokasinya kini menjadi kompleks kantor Bank Indonesia.

Rakyat Ternate ternyata sangat menghormati sultan, sehingga beliau dianggap sebagai sultan Ternate, karena memang saat itu takhta Kesultanan Ternate sedang kosong. Sultan Ternate kala itu juga dijatuhi hukuman pengasingan oleh Belanda. Tentu saja Belanda merasa khawatir dengan karisma sultan di mata rakyat Ternate

ini, sehingga buru-buru sultan Ternate dipulihkan kedudukannya. Sultan Mahmud Badaruddin II mangkat pada 26 November 1852[519] di Ternate. Selama hidup, beliau disegani baik oleh kawan maupun lawannya, termasuk Gubernur Jenderal van der Capellen. Berkat perjuangannya dalam mengusir penjajah, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai kesepakatan, Prabu Anom diangkat menjadi sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III (1821–1823). Tetapi tidak lama kemudian dicopot dari kedudukannya. Sultan Ahmad Najamuddin III melawan dan lari ke pedalaman. Perlawanan ini dapat dipatahkan dan pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapuskan, sehingga berada langsung di bawah pemerintahan Belanda. Bekas sultan Palembang, Ahmad Najamuddin III lantas diasingkan ke Ternate, tempat ia wafat pada tahun 1844. Ternyata, riwayat perlawanan rakyat Palembang tidak berhenti sampai di sini saja. Meskipun Belanda telah mengasingkan para sultan Palembang dan menghapuskan kerajaan tersebut, perlawanan rakyat yang mewarisi jiwa perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II masih terus berlanjut; seperti Pangeran Kramo Jayo yang melawan Belanda hingga 1851, perlawanan rakyat di Komering Ulu atau Tihang Alam (hingga 1854), dan masih disusul lagi oleh pergolakan rakyat di dusun Jati, Pasemah, Empat Lawang, dan Empat Petulai. Semua ini membuktikan bahwa jiwa perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan tidak pernah padam dalam sanubari rakyat Palembang.

e. Sistem pemerintahan

Kekuasaan tertinggi di Kesultanan Palembang berada di tangan sultan. Tetapi dalam mengeluarkan keputusan-keputusannya, sultan selalu mendasarinya dengan Alqur'an serta undang-undang kerajaan lainnya. Kitab Undang-undang yang penting di Palembang adalah *Sumber Cahaya* dan *Sindang Mardike*. Sistem peradilan di negeri ini dibagi menjadi dua; yakni yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan pidana. Perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan ditangani oleh seorang pejabat bergelar Pangeran Penghulu Nato Agamo. Ia membawahi pangeran-pangeran penghulu. Sedangkan, perkata-perkara pidana diurus oleh Tumenggung Karto Negaro.

Pejabat penting lainnya adalah syahbandar yang berkuasa di pelabuhan-pelabuhan. Tugasnya adalah menarik bea pelabuhan bagi kapal-kapal yang masuk

519. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, halaman 44. Tetapi buku *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia* menyebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin wafat pada tahun 1832.

berdasarkan jumlah anah buah kapalnya. Palembang telah menjalin hubungan perniagaan baik dengan kerajaan-kerajaan di dalam maupun luar negeri; antara lain Jawa, Bangka, China, Belanda (VOC), Riau, Singapura, Penang, Malaka, Siam, dan lain sebagainya.
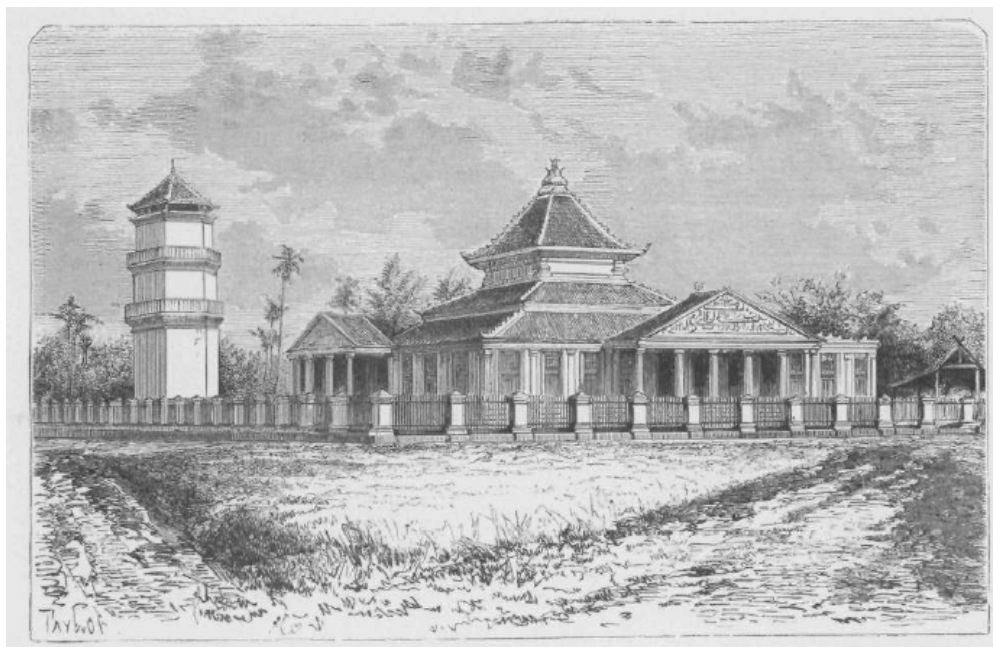
Mesjid di Palembang
Sumber: *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*

f. Sosial kemasyarakatan dan ekonomi

Penduduk Palembang terbagi menjadi dua golongan; yakni bangsawan dan rakyat jelata. Kaum bangsawan merupakan keturunan raja-raja, yang memperoleh statusnya berdasarkan keturunan. Meskipun demikian, kebangsawan ini juga dapat diperoleh dari anugerah raja. Kaum bangsawan ini diserahi tanah lungguh (*apanage*) berupa dusun-dusun. Mereka diwajibkan membantu sultan bila terjadi peperangan, dalam wujud penyediaan pasukan atau keperluan perang lainnya. Golongan bangsawan ini adalah yang tak memiliki tanah lungguh sebagai sumber penghasilannya. Oleh karenanya, mereka menggantungkan hidup dari membuat kerajinan tangan atau kegiatan usaha lainnya; seperti membuat benda-benda emas atau perak, berdagang, atau bertani.

Rakyat jelata terbagi menjadi golongan *miji* dan *senan*. Golongan *senan* lebih rendah dibanding miji dan mereka hanya boleh bekerja untuk sultan beserta kaum

bangsawan, seperti membuat atau memperbaiki perahu sultan, mendayung perahu milik sultan, dan lain sebagianya. Selain itu, masih ada penduduk asing yang terdiri dari orang-orang China dan Arab. Para pendatang yang berasal dari Arab memiliki kampungnya sendiri yang disebut Kampung Arab; sedangkan orang-orang China tinggal di rakit-rakit.

Sebagian besar rakyat Palembang menganut agama Islam. Namun ada juga yang memeluk Buddha dan Kristen. Meskipun demikian, sikap saling menghormati antar pemeluk agama telah dijunjung tinggi. Hal ini terbukti dengan sikap Sultan Mahmud Badaruddin II yang menghormati hari besar umat Kristen saat berlangsungnya Perang Palembang (lihat bagian mengenai Palembang melawan kolonialisme).

Sebelum kedatangan VOC, perniagaan merupakan salah satu unsur terpenting perekonomian Palembang. Hal ini ditunjang dengan hasil alamnya yang kaya, di mana Palembang merupakan penghasil rotan, damar, kapur barus, kemenyan, lilin, gading, beras, dan emas. Hasil-hasil ini dibeli oleh para pedagang China dan Arab untuk dijual kembali. Sebaliknya, pedagang-pedagang Palembang membeli kain sutera, keramik, obat-obatan, perkakas logam, teh manisan, dan lain sebagainya dari para pedagang China serta kain linen dari pedagang Arab. Barang-barang dari Jawa ada pula yang diperdagangkan di Palembang, seperti minyak kacang dan beras. Belakangan timah menjadi komoditas yang penting pula, seperti yang ditambang di Bangka dan Belitung. Akibatnya, kekuatan-kekuatan asing, seperti Belanda dan Inggris berlomba-lomba untuk menguasainya.

g. Kesusastraan dan kesenian

Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan penguasa Palembang yang menjunjung tinggi kesusastraan, yang terbukti dengan koleksi perpustakaannya. Rakyat Palembang terkenal pula mahir dalam seni arsitektur dan ukir mengukir. Oleh karenanya, banyak rumah tradisional Palembang yang dihiasi dengan ukir-ukiran kayu dengan motif bunga-bungaan serta dedaunan. Selain itu, media ukiran lainnya adalah emas, perak, dan gading. Seni tenun juga berkembang baik di Palembang, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diekspor.

Gendang dari Palembang
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta

III. LAMPUNG

a. Cikal bakal para penguasa di Lampung

Lampung merupakan daerah pengaruh Kesultanan Banten. Tradisi meriwayatkan adanya penguasa setempat bernama Jugawuda yang dikalahkan oleh Panji Anom. Di daerah Atar Berak ditemukan kursi-kursi batu, yang konon berasal dari zaman Hindu, yakni semasa kekuasaan Jugawuda[520]. Di kawasan Lampung sendiri dikenal sistem pemerintahan yang disebut ke*ratu*an. Pemimpinnya adalah seorang *ratu*. Tentu saja pengertian *ratu* di sini tidak harus seorang wanita. Sebagaimana halnya di berbagai bagian lain Kepulauan Nusantara, *ratu* juga boleh diterjemahkan sebagai "raja."

Cikal-bakal suku Lampung; yakni Abung, Wai Kanan, Sungkai, Tulang Bawang, Pubian, Komering, Kayu Agung, serta Peminggir/ Pesisir berasal dari Skala Berak. Leluhur mereka konon datang dari Pagaruyung dengan pimpinan rombongannya dikenal sebagai Sang Guru Satti atau Datu di Pagaruyung. Beliau memiliki tiga orang anak; yakni Sang Bebatak, yang bergerak ke utara dan menurunkan suku Batak; Sang Bebugis menuju ke arah timur yang selanjutnya menurunkan suku Bugis, dan Sang Begeduh yang menuju ke Sumatera bagian selatan serta menetap di Dataran Tinggi

520. Lihat *Sejarah Daerah Lampung*, halaman 38.

Ranau. Karena meletusnya bencana alam, mereka kemudian berpindah lagi ke selatan, yakni Bukit Pesagi Skala Brak. Mereka selanjutnya menjadi nenek moyang suku Lampung sekarang. Diperkirakan peristiwa ini terjadi pada kurang lebih abad ke-13. Di dalam *Kitab Kuntara Raja Nitti* yang memuat adat istiadat Lampung memang disebutkan bahwa leluhur orang Lampung berasal dari Pagaruyung.

Cucu Sang Begeduh bernama Umpu Serunting mendirikan *Keratuan* Pemanggilan. Beliau mempunyai lima orang putra; yakni: Indra Gajah yang menurunkan orang Abung; Blunguh yang menurunkan orang Peminggir, Pak Lang yang menurunkan orang Pubian; Pandan yang menghilang; dan Sangkan yang konon beradadi Sukadana Ham[521]. Karena serangan bajak laut, Keratuan Pemanggilan mengalami perpecahan. Masyarakatnya berpindah ke kawasan Abung. Keturunan Indra Gajah yang dipimpin Minak Rio Begeduh menetap di hulu Wai Abung serta mendirikan *Keratuan* Puncak. Armada Majapahit pernah singgah di Lampung pada zaman Minak Rio Begeduh, namun tidak masuk hingga ke pedalaman. Minak Rio Begeduh digantikan oleh putranya, Minak Paduka Begeduh. Namun, beliau mangkat karena dibunuh bajak laut. Keempat anak Minak Paduka Begeduh, yakni Unyai (bergelar Minak Trio Diso), Unyi (bergelar Ratu di Bumi), Uban (seorang putri), dan Subing, membangun berbagai perbentengan. Akhirnya, Subing berhasil membalaskan dendam ayahnya dengan memenggal kepala bajak laut tersebut. Kepalanya lantas ditanam di dekat makam ayahnya, yakni di bagian kaki. Sementara itu, tubuh bajak laut itu dikubur di tempat ia dibunuh.[522]

Menurut sumber lainnya, masuknya Islam ke Lampung dibawa oleh empat orang putra sultan Pagaruyung, yakni Umpu Bejalan Di Way dengan nama aslinya Inder Gajah-leluhur suku Abung; Umpu Belunguh, yang menurunkan suku Peminggir; Umpu Nyerupa dengan nama aslinya Sikin-leluhur suku Jelma Daya; dan Umpu Pernong, yang bernama asli Pak Lang-leluhur suku Pubian[523]. Berkuasanya empat pangeran Pagaruyung ini merupakan akhir kerajaan Hindu dengan ratu terakhirnya bernama Ratu Sekekhummong (Ratu Sekerumong). Selanjutnya mereka berempat membentuk perserikatan bernama Paksi Pak, yang berarti "empat serangkai."

Di antara berbagai ke*ratu*an tersebut terdapatlah *Keratuan* Pugung yang terletak di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah sekarang. Fatahillah menikahi

521. Lihat *Sejarah Sosial Daerah Lampung: Kotamadya Bandar Lampung,* halaman 67-68.
522. Lihat *Sejarah Sosial Daerah Lampung: Kotamadya Bandar Lampung*, halaman 69.
523. Lihat **http://melayuonline.com/ind/history/dig/409**, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

Putri Sinar Alam, putri Minak Raja Jalan, penguasa ke*ratu*an tersebut. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Hurairi, yang kelak menunaikan ibadah haji dan dikenal sebagai Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih. Beliau merupakan pendiri *Keratuan* Darah Putih (kini teletak di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan) dan menyandang gelar Minak Kelaja (Kejala) Ratu. Selain itu, dengan adanya jalinan kekerabatan di atas, masuklah Lampung ke dalam payung kekuasaan Banten.Hal ini dibuktikan dengan piagam tembaga yang ditemukan di Lampung. Isinya mengenai persahabatan antara Lampung dan Banten. Selain itu, masih terdapat pula piagam Sukau yang berasal dari tahun 1102 H atau sekitar 1691. Di dalamnya, nampak nyata kekuasaan Banten atas Lampung, di mana sultan-sultan Banten berhak memecat para kepala daerah di Lampung. Penguasa-penguasa setempat yang menjadi bawahan sultan diwajibkan pula mengumpulkan lada bagi Banten. Semasa pemerintahan Minak Kejala Ratu berlangsung hubungan yang sangat erat dengan Banten, di mana keduanya akan saling bantu membantu apabila diserang musuh.[524]

Kawasan Lampung bukanlah suatu wilayah terpusat yang dipimpin seorang raja, melainkan terdiri dari satuan-satuan kemasyarakatan kecil berdasarkan keturunan (genealogis) yang disebut ke*buaya*an. Dengan demikian, sistem pemerintahan kerajaan seperti di penjuru lain Kepulauan Nusantara tidaklah dikenal di Lampung. Tiadanya kesatuan masyarakat ini memudahkan Banten dalam menguasai Lampung. Besarnya pengaruh Banten ini menyebabkan para ketua adat (*penyimbang*) di Lampung mengadakan kunjungan pada sultan Banten. Mereka memohon pengukuhan atas kedudukan mereka selaku pemimpin adat kepada Banten dan pada sisi lain merupakan pengakuan terhadap kekuasaan Banten atas Lampung. Para *penyimbang* yang pulang ke negerinya akan dianugerahi tanda kekuasaan oleh sultan Banten berupa piagam tembaga dan masih dibekali pula dengan berbagai perlengkapan kebesaran lainnya. Bahkan, para pemuka adat di atas masih diberi hak menyandang gelar-gelar seperti punggawa, pangeran, ngabehi, raden, dan sebagainya.

Setelah masa berkuasanya Banten, di Lampung dikenal lima ke*ratu*an, yakni:[525]

- Ke*ratu*an Puncak
- Ke*ratu*an Balau
- Ke*ratu*an Pemanggilan

524. Lihat *Sejarah Sosial Daerah Lampung: Kotamadya Bandar Lampung*, halaman 66.
525. Lihat *Sejarah Daerah Lampung*, halaman 54.

- Ke*ratu*an Pugung
- Ke*ratu*an Darah Putih

Seluruh ke*ratu*an ini mengakui Banten sebagai pemimpin tertinggi mereka. Setelah melakukan kunjungan ke Banten, para pemimpin *kebuayaan* di *Keratuan* Puncak meningkatkan tata kehidupan kemasyarakatan dalam bentuk adat *pepadon*; yakni seluruh persoalan hidup masyarakat, pemerintahan, adat istiadat, sosial ekonomi, dan lain sebagainya harus didasari oleh musyawarah kaum *penyimbang*.

Berikut ini akan diulas riwayat jatuhnya Lampung ke dalam kekuasaan Banten menurut tradisi suku Abung. Karena memperebutkan warisan jabatan sebagai kepala adat, Menak Paduka dan Menak Kemala Bumi meminta pertolongan pada Hasanuddin[526]. Mereka sepakat mengakui Banten sebagai penguasa tertinggi atas Tulangbawang (Lampung). Namun Hasanuddin tidak bersedia menerimanya selama masih ada raja-raja lain di Lampung, seperti Raja Balau. Baik Menak Paduka dan Menak Kemala Bumi tak berani menggunakan jalan kekerasan melawan raja tersebut. Karena itu, Menak Kemala Bumi menikahi putri Raja Balau dan setelah itu membunuh mertuanya. Istri, anak, dan benda-benda berharga milik Raja Balau mereka persembahkan pada raja Banten. Hasanuddin menganugerahkan gelar Patih Jarumbang pada Menak Paduka dan Patih Prajurit kepada Menak Kemala Bumi. Raja Banten mengambil pula putri Raja Balau yang merupakan istri Menak Kemala Bumi, tetapi mengembalikannya dalam keadaan hamil. Patih Jarumbang dan Patih Prajurit menganut agama Islam di Banten dan menunaikan ibadah haji ke Mekkah[527]. Sekembalinya ke Lampung mereka dengan giat menyebarkan agamanya. Riwayat ini bertentangan dengan *Sajarah Banten* yang menyebutkan bahwa Raja Balau adalah salah seorang pemuka adat di Lampung yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Ia turut menyertai pasukan Banten menyerang Pakuan Pajajaran yang masih menganut agama Hindu.

b. Perlawanan terhadap kolonialisme di Lampung

Bangsa Portugis yang datang ke Kepulauan Nusantara pada abad ke-16 berniat menguasai perdagangan lada di Lampung. Oleh karenanya timbul perlawanan oleh Raja di Ngagul-Agul II yang berlangsung di Pugung Kembang Langgar (Kecamatan Pesisir Utara, dekat Krui). Demi memperkuat pertahanannya, Raja di Ngagul-Agul

526. Lihat *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, halaman 130.
527. Lihat *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, halaman 131.

II menjalin kerja sama dengan Inggris. Bersamaan dengan itu, kejayaan Banten juga mulai memudar, terutama pada abad ke-18 hingga 19.

Setelah diselingi oleh penjajahan Inggris antara tahun 1811 hingga 1816. Kekuasaan Belanda kembali lagi ke Lampung dan diangkatlah seorang asisten residen di Lampung. Penguasa Ke*ratu*an Darah Putih yang bernama Raden Intan I (1751–1828) sangat menentang kolonialisme di negerinya. Oleh karenanya, hubungan antara Raden Intan I dengan Belanda diwarnai oleh pertentangan. Pengaruh Raden Intan I sangat besar di Lampung, sehingga mau tidak mau Belanda berupaya mendekatinya. Pada bulan Juli 1817, Kruseman, asisten residen Belanda di Lampung menemui Raden Intan I di Kalianda.

Pertemuan ini membuahkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut[528]:

- Raden Intan I bersedia mengakhiri permusuhan dan membantu pemerintah Belanda.
- Pemerintah kolonial Belanda mengakui kedudukan Raden Intan I.
- Raden Intan I akan memperoleh tunjangan sebesar f. 1.200 per tahunnya; sedangkan saudara-saudaranya mendapatkan f. 600.

Tetapi perdamaian yang dicapai antara Belanda dan Raden Intan I tidak panjang umurnya. Tak berapa lama kemudian pertikaian merebak kembali.

Akhirnya, Belanda memutuskan jalan kekerasan dengan mengirimkan Lelievre beserta pasukan berkekuatan 35 orang di bawah pimpinan Letnan Misonius pada Desember 1825. Mereka berniat menangkap Raden Intan I dan membawanya ke Teluk Betung. Saat itu, Raden Intan I sedang sakit dan minta waktu dua hari untuk berangkat. Lelievre dan pasukannya menunggu sambil beristirahat di sana. Namun, pagi hari tanggal 13 Desember 1825, Raden Intan I dengan disertai para pengikutnya tiba-tiba menyerang orang-orang Belanda tersebut. Akibatnya, Lelievre tewas dan Letnan Misonius mengalami luka-luka, sehingga ia bersama sisa-sisa pasukannya terpaksa melarikan diri sehingga gagal menangkap Raden Intan I.

Tiga tahun kemudian, Raden Intan I mangkat, dan Belanda sementara waktu mengabaikan terlebih dahulu masalah Lampung karena sedang disibukkan oleh Perang Diponegoro. Pengganti Raden Intan I adalah putranya bernama Raden Imba II (1828–1834) dengan gelarnya Kusuma Ratu. Jalinan persekutuan melalui perkawinan diikat dengan Kesultanan Riau Lingga, di mana Raden Imba II menikahi saudari sultan

528. Lihat *Sejarah Daerah Lampung*, halaman 77.

Riau Lingga. Selain itu, penguasa Keratuan Darah Putih ini membina pula hubungan dengan para pelaut Bugis dan Sulu serta para penentang Belanda lainnya.

Sikap Raden Imba II ini menggelisahkan Belanda, sehingga Asisten Residen J.A. Du Bois mendesak pemerintah kolonial jangan menangguhkan lagi ekspedisi militernya ke Lampung. Menanggapi hal ini, Belanda mengirimkan sebuah kapal perang dan 300 serdadu di bawah pimpinan Kapten Hoffman pada 1832. Pasukan ini masih diperkuat pula dengan 100 pasukan Bugis. Meskipun demikian, ekspedisi ini gagal dan bahkan dalam peperangan di daerah Semangka melawan laskar rakyat pimpinan Batin Mangunang, Kapten Hoffman menderita luka-luka sehingga akhirnya menghembuskan nafasnya yang penghabisan.

Operasi militer baru kembali dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kali ini 400 serdadu pimpinan Kapten Bellhouder diterjunkan di Lampung. Angkatan perang Belanda ini ditambah lagi dengan serdadu-serdadu kulit hitam dari Afrika yang masih setengah liar[529]. Ternyata, ekspedisi ini mengalami nasib sama dengan sebelumnya. Pasukan Raden Imba II meraih kemenangan dan Kapten Bellhouder harus kehilangan nyawanya. Belanda belum berputus asa dan menurunkan lagi ekspedisi militer di bawah Kapten Pouwer pada tahun 1834, namun juga berakhir dengan kegagalan.

Demi menebus kekalahan beruntun ini, Belanda mendatangkan ekpedisi militer yang lebih besar ke lampung di bawah pimpinan Kapten Elout. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah 21 opsir dan 800 prajurit dilibatkan dalam operasi penaklukan Lampung ini. Belanda yang dipersenjatai dengan meriam-meriam besar berhasil merebut benteng Raja Gepeh pada 24 Oktober 1834. Namun, Raden Imba II beserta dua orang pengikutnya berhasil melarikan diri ke Riau Lingga. Kendati demikian, atas tekanan Belanda, Sultan Riau Lingga terpaksa menyerahkan Raden Imba II dan kedua hulubalangnya tersebut. Para tawanan ini kemudian dibawa ke Batavia. Selama berada dalam tahanan di Batavia, salah seorang pengikut Raden Imba II bernama Raden Mangunang meninggal dunia. Selanjutnya, pemerintah kolonial mengasingkan Raden Imba II bersama Lang Baruas, hulubalang lainnya, ke Pulau Timor.

Dengan dikalahkannya Raden Imba II, Belanda kini berkuasa di Lampung. Saat itu, kekuasaan Belanda sebenarnya belum mantap, yang terbukti dari sering beralihnya pemerintahan dari militer ke sipil dan sebaliknya. Pusat pemerintahan juga kerap

529. Lihat *Sejarah Daerah Lampung*, halaman 78.

berpindah tempat; yakni dari Ujai (dekat Kalianda) ke Brunai di Teluk Semangka. Kemudian beralih lagi ke Menggala (tepi Sungai Way Tulangbawang), Bumi Agung, Terbanggi, dan Teluk Betung. Berbagai pemberontakan masih terjadi, seperti yang dipimpin oleh Haji Wakhia, Wak Maas, dan Luru Satu

Kondisi keamanan yang masih labil belum mengizinkan Belanda bernafas lega; apalagi dengan dilantiknya Raden Intan II, putra tunggal Raden Imba II sebagai pemimpin Ke*ratu*an Darah Putih pada tahun 1850. Raden Intan II sendiri lahir menjelang ayahnya diasingkan ke Timor pada tahun 1834. Karena masih belum cukup umur, kekuasaan dijalankan oleh Dalem Mangkubumi (1834–1850) selaku walinya. Haji Wakhia yang memimpin perlawanan terhadap Belanda lantas menjalin hubungan dengan Raden Intan II. Sebagai persiapan menghadapi Belanda benteng-benteng yang pernah dibangun oleh Raden Imba II diperbaiki dan pusat pertahanan baru didirikan di berbagai tempat.

Ekspedisi militer yang didatangkan oleh pemerintah kolonial ke Lampung pada tahun 1851 berhasil menduduki kampung Merambung yang sebelumnya telah diperkuat oleh Raden Intan II beserta para pengikutnya. Namun pemimpin-pemimpin perlawanan tetap bertahan di benteng lainnya, sehingga tak dapat ditundukkan oleh Belanda. Pemerintah kolonial mencoba kembali jalan damai dengan menawarkan pengampunan serta biaya pendidikan apabila ia bersedia menghentikan perlawanannya. Tetapi tawaran ini ditampik oleh Raden Intan II. Gagal dengan bujukannya, sepasukan tentara di bawah pimpinan Kapten Yuch diterjunkan pada tahun 1851. Namun serangan ini dipatahkan oleh Raden Intan II.

Berkat upaya Kapten J.F. Kohler yang menjabat asisten residen Belanda di Lampung, perjanjian perdamaian dengan Raden Intan II tercapai pada tahun 1853. Kendati demikian, hubungan dengan Raden Intan II kembali memanas pada tahun 1853, karena penguasa Ke*ratu*an Darah Putih itu tak bersedia lagi mematuhi perjanjiannya dengan Belanda. Kondisi Lampung terus-menerus tidak aman, padahal Belanda ingin membukanya sebagai sasaran penanaman modal asing, mengingat kondisi tanahnya yang luas serta subur. Pasukan pemerintah kolonial tetap gagal membuat Raden Intan II beserta pengikutnya bertekuk lutut.

Asisten residen mendesak pemerintah pusat di Batavia agar mengirimkan ekspedisi militer yang lebih kuat. Permintaan ini dipenuhi pada tahun 1856. Armada Belanda berkekuatan 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut, dan puluhan perahu kecil,

diterjunkan di bawah pimpinan Kolonel Welesson, Mayor Nauta, Mayor van Oostade, dan Mayor A.W.P. Weitsel. Pendaratan dilakukan pada 10 Agustus 1856 di kawasan Pulau Sikepal. Ultimatum dikirimkan pada para pejuang dua hari kemudian (12 Agustus 1856), di mana mereka diperintahkan agar segera menyerah dalam waktu lima hari.

Ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Intan II beserta pengikutnya akan menyerahkan diri. Oleh karenanya, pasukan pemerintah kolonial segera bergerak ke daerah pedalaman. Pertempuran terjadi dengan pasukan Raden Intan II yang dipimpin oleh Singa Branta di Bandulu. Pada 17 Agustus 1856 benteng Bandulu berhasil direbut oleh Belanda. Selanjutnya serangan diarahkan untuk menduduki benteng Hawi Berak. Meskipun demikian, pada jam 8 pagi tanggal 18 Agustus 1856, betapa terkejutnya Belanda ketika mendengar bahwa benteng Bandulu dapat direbut kembali oleh para pejuang. Terpaksa mereka berbalik ke Bandulu dan menghujani benteng tersebut dengan tembakan mortir; sehingga akhirnya jatuh lagi ke dalam tangan pasukan kolonial. Bandulu kemudian dijadikan markas operasional mereka dan serangan-serangan ke kawasan lain mulai dilancarkan.

Belanda membagi pasukannya menjadi tiga yang akan menyerang pasukan Raden Intan II dari ketiga jurusan. Pasukan pertama di bawah pimpinan Kolonel Welesson bergerak dari pesisir selatan kemudian melingkari lereng timur Gunung Rajabasa ke arah utara. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Mayor van Oostade akan maju melalui Pulau Palubu, Kalianda, Way Urang, dan selanjutnya melingkari bagian barat Gunung Rajabasa menuju ke utara. Pasukan ini bertujuan merebut benteng Merambung. Pasukan ketiga berada di bawah komando Mayor Nauta. Mereka maju dari Penengahan dan ditugaskan merebut benteng Salai Tabuan.

Satu per satu kubu pertahanan para pejuang jatuh ke tangan pasukan kolonial Belanda. Benteng Hawi Berak direbut pada 19 Agustus 1856 oleh pasukan pimpinan Welesson. Kelompok ini lalu bergabung dengan pasukan Mayor Oostade dan berupaya menduduki benteng Merambung. Pada 27 Agustus 1856, pertahanan ini berhasil dikuasai Belanda. Selanjutnya, jatuh pula Pematang Sentok dan Katimbang. Setelah melalui pertempuran, Belanda berhasil menguasai Katimbang dan menjumpai persediaan bahan makanan dalam jumlah besar. Namun, Raden Intan II beserta pengikutnya telah melarikan diri. Para pejuang, seperti Haji Wakhya dan Wak Maas berguguran.

Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Raden Intan II, yang semenjak saat itu hanya dapat melakukan perlawanan secara bergerilya. Akhirnya, karena pengkhianatan Raden Ngerapat, kepala kampung Tataan Udik, yang memiliki dendam pribadi terhadap Raden Intan II, tokoh perlawanan Lampung ini berhasil ditangkap. Raden Ngerapat menipu Raden Intan II dengan mengajaknya berunding. Di tengah-tengah perundingan, datanglah pasukan Belanda menyergapnya. Raden Intan II yang hanya disertai seorang saudara sepupunya melakukan perlawanan mati-matian hingga gugur saat itu juga pada 5 Oktober 1856. Dengan gugurnya Raden Intan II ini, Belanda makin leluasa menduduki Lampung.

c. Sejarah Skala Brak

Konon, Kerajaan Skala Brak di Lampung telah berdiri semenjak abad ke-3 dengan rajanya bernama Buay Tumi[530]. Pada 1229, Skala Brak diperintah oleh Raden Seputar Alam yang memperistri seorang putri dari Banten dan dikaruniai dua orang putra beserta seorang putri; yakni Putri Kuning Sentana, Setumbak Bumi, dan Gading Turai[531]. Putri Kuning Sentana tidak berusia panjang dan meninggal saat berusia remaja. Sementara itu, Setumbak Bumi tetap menetap di Skala Brak; sedangkan saudaranya Gading Turai berdiam di Tulang Bawang. Raden Seputar Alam mangkat pada tahun 1332 dan digantikan oleh Setumbak Bumi. Beliau juga beristrikan putri asal Banten dan berputra Ratu Purbaya. Sesudah mangkatnya Setumbak Bumi pada tahun 1394, Ratu Purbaya memerintah Skala Brak menggantikan ayahnya. Kerajaan Skala Brak yang bercorak Hindu berakhir dengan kedatangan empat orang putra sultan Pagaruyung, sebagaimana telah diuraikan di atas. Keempat pangeran Pagaruyung merupakan cikal-bakal munculnya empat *Kepaksian* di Skala Brak; yakni *Paksi* Buay Bejalan di Way, Buay Belunguh, Nyerupa, dan Buay Pernong Skala Brak.

i. BUAY BEJALAN DI WAY

Didirikan oleh Umpu Bejalan Di Way. Menurut *Tambo Paksi Buay Bejalan Di Way* pasal 3, Umbu Bejalan Di Way bernazar menjadi seorang raja yang gagah berani; yakni sanggup melawan seratus orang[532]. Tambo ini ditulis oleh Ahmad Siradj (Pangeran Jaya Kesuma II) pada tahun 1938. Para sultan atau pasirah yang menggantikan Umpu Bejalan di Way secara berturut-turut adalah Ratu Tunggal,

530. Lihat http://melayuonline.com/ind/history/dig/409, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
531. Lihat *Batanghari Sembilan dari Abad ke Abad*, halaman 25.
532. Lihat http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

Kun Tunggal Simbang Negara, Ratu Mengkuda Pahawang, Puyang Rakkian, Puyang Raja Paksi, Dalom Sangun Raja, Raja Junjungan, Ratu Menjengau, Pangeran Siralaga, Dalom Suluh Irung, Pangeran Nata Marga, Pangeran Raja di Lampung, Raden Intan (Pangeran Jaya Kesuma I), Kasim (Pangeran Paku Alam), Dalom Raja Kalipah (Pangeran Puspa Negara I), Ahmad Siradj (Pangeran Jaya Kesuma II), Abdul Madjid (Suntan Jaya Indra)-suami Siti Asma Dewi Gelar Ratu Kemala Jagat, Suntan Jaya, Azrim Puspa Negara (Pangeran Jaya Kesuma III) dan Selayar Akbar[533].

Pangeran Nata Marga mengadakan perjanjian dengan Inggris pada 13 Maret 1799. Kasim (Pangeran Paku Alam) diangkat sebagai *pasirah* berdasarkan besluit pemerintah kolonial tanggal 1 Agustus 1871. Pangeran Puspa Negara I memperoleh pengukuhan sebagai *pasirah* tanggal 5 Mei 1881. Pangeran Jaya Kesuma II dikukuhkan sebagai *pasirah* dengan besluit tanggal 27 Oktober 1914. Karena Siti Asma Dewi (Ratu Kemala Jagat) merupakan seorang wanita, maka yang berkuasa sebagai pasirah adalah suaminya, Abdul Madjid bergelar Suntan Jaya Indra. Beliau mendapat pengukuhan sebagai *pasirah* tanggal 12 April 1939.

ii. BUAY BELUNGUH

Buay Belunguh beribukota di Kenali. Umpu Belunguh tidak beristri sehingga ia mengangkat tujuh orang kesayangannya sebagai anak, yakni Beringin Muda, Tatak, Tatau, Jaga, Kuning, Mandan, dan Sindi[534]. Di antara mereka yang menggantikan beliau adalah Kuning. Umpu Kuning mempunyai empat orang anak, yakni Pemuka Raja Anum, Pangeran Mangkubumi, Kimas Nganjaga Batin, dan Raden Mengunang. Pemuka Raja Anum beserta Kimas Nganjaga Batin menghadap sultan Banten dan memperoleh barang-barang kebesaran berupa payung, tombak, baju besi, pinggang, kain cindi, kain limar, kendi, kopiah hulubalang, dan baju panjang. Rangkaian penguasa Belunguh berikutnya adalah Sang Hiang Raja Nukah, Pangeran Jaya Kesuma, Depati Bangsa Raja, Pangeran Iro Belunguh, Raja Mahkota Alam, Batin Singa, Raden Ngaih, Keria Natar Kesuma, dan Depati Pasirah[535]. Keria Natar Kesuma memperoleh pengukuhan sebagai *pasirah* tanggal 8 Juni 1784. Sementara itu, Depati Pasirah dikukuhkan kedudukannya tanggal 6 November 1871.

533. Lihat http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
534. Lihat http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
535. Lihat http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

iii. BUAY NYERUPA

Umpu Nyerupa wafat pada tahun 1420 di Kaliandak, Lampung Selatan. Para pengganti beliau adalah Si Gajah gelar Ratu Piekulun Siba di Mesir, Tjerana gelar Dalam Piekulun Siba di Room, Si Gajah gelar Ratu Piekulun Siba di Mesir, Tjerana gelar Dalam Piekulun Siba Dirandak, Si Gajah Ratu Piekulun Siba Dimataram, Melawan Pangeran Ratu Piekulun Siba di Mataram, Si Rasan Piekulun Ratu di Lampung Siba di Banten (tahun 1737), Melawan Batin Junjungan Piekulun Ratu di Lampung, Si Rasan Dalam Purbajang Piekulun, Si Gajah Dalam Ratu Piekulun, Tjerana gelar Ratu Piekulun (membuat tambo dari kulit kayu pada tahun 1808), Si Gajah Batin Mengoenang Piekulun Bala Seriboe, Si Pikok gelar Dalam Piekulun (tahun 1849), Si Gajah Batin Piekulun, Merah Hakim gelar Sultan Ali Akbar (tahun 1860), Marah Hasan gelar Sultan Ratu Piekulun, Marah Hadis gelar Dalam Baginda Raja, Saifullah Hakim gelar Sultan Akbar Syah (Almah Ratu dari Tenumbang), Salman Marga Alam gelar Sultan Piekulun Jayadiningrat[536].

iv. BUAY PERNONG

Rangkaian penguasa yang pernah memerintah Buay Pernong adalah Sultan Iskandar Zulkarnain, Ratu Mumelar Paksi, Ratu Ngegalang Paksi, Ratu Buay Pernong, Umpu Jadi, Ratu Pangeran Semula Raja, Umpu Selalau Sangun Guru, Ratu Dipati Nyalawati, Umpu Raja Sultan, Umpu Raja Dunia, Umpu Batin Susuhunan, Umpu Batin Ratu, Umpu Raja Dunia Muda, Pangeran Singadiraja, Pangeran Purba, Pangeran Alip Jaya, Pangeran Batin Sekehendak, Pangeran Ringgau gelar Pangeran Batin Pasirah Purba Jaya Bindung Langit Alam Benggala (Sultan Kepaksian Pernong), Pangeran Haji Habiburrahman (Sempurna Jaya Dalom Permata Intan), Sultan Makmur Dalom Nata Diraja (Sultan Dalom Haji Merah Dani), Pangeran Suhaimi gelar Sultan Lela Muda Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi, yang memerintah hingga masa berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial, Pangeran Maulyana Balyan gelar Sultan Sempurna Jaya, dan Pangeran Edward Syah Pernong gelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi, selaku sultan Kepaksian Pernong Skala Brak ke-23[537].

---

536. Lihat **http://www.buaynyerupa.blogspot.com/**, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
537. Lihat **http://sultanskalabrak23.blogspot.com/2008/12/naik-takhta.html**, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

Pangeran Suhaimi pernah menjabat sebagai wedana dan kemudian pejabat tinggi di Tanjung Karang. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang tangkas dalam mengambil keputusan serta berpengetahuan luas. Selain itu, beliau pernah berjuang melawan Belanda[538]. Pangeran Maulana Balyan pernah mengenyam pendidikan Belanda di ELS, namun jiwa nasionalis beliau tidak pernah luntur sehingga turut berjuang melawan penjajah[539]. Yang Mulia Pangeran Edward Syah Pernong menjabat sebagai kapolwiltabes Semarang. Beliau terpilih pula sebagai ketua Forum Masyarakat Skala Brak (FMSB).

d. Budaya dan Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Lampung telah mengenal tulisan yang dikenal dengan *surat Lampung*. Kegunaannya antara lain mencatat silsilah mereka. Di antara berbagai silsilah tersebut ada yang telah mencapai 24 generasi. Apabila dihitung bahwa satu generasi berkisar antara 25 hingga 30 tahun, dapat disimpulkan bahwa mereka telah menghuni Lampung sekitar 600 hingga 700 tahun yang lampau. Ketua adat (*penyimbang*) besar peranannya dalam masyarakat Lampung. Mereka harus mengerti silsilah dan kisah asal-muasal leluhur kaumnya.

Rakyat mengenal pula filsafat hidup yang disebut *fi'il pesenggiri* yang meliputi[540]: kewajiban menjunjung moral tinggi, berjiwa besar, serta memahami kewajibannya (*fi'il pesenggiri*); meningkatkan kesempurnaan hidup, menjunjung tata krama, dan mematuhi tata tertib (*bejuluk-beadek*); berlaku hormat terhadap seluruh anggota masyarakat, hidup tolong menolong, serta menghormati tamu (*nemui nyimah*); melakukan musyawarah demi mencari mufakat (nengah nyappur); dan berjiwa sosial serta berbuat baik terhadap sesama manusia baik mengharapkan imbalan atau tidak (*sakai sembayan*).

Para pemuda (*meranai*) dan pemudi (*muli*) Lampung masih diizinkan bergaul bebas menurut batasan-batasan adat tertentu. Namun apabila telah menikah, kebebasan itu berakhir. Mereka kemudian melanjutkan hidupnya menurut tata susila yang digariskan oleh adat. Pada umumnya, masyarakat Lampung mendidik anaknya dengan lembah lembut. Seseorang anak dimanjakan dengan dibiarkan

538. Lihat **http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-suhaimi.html**, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
539. Lihat **http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-maulana-balyan.html**, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
540. Lihat *Sejarah Daerah Lampung*, halaman 124.

tanpa melakukan kegiatan apapun sepanjang hari. Para *penyimbang* memberikan penghargaan yang tinggi terhadap putra tertuanya, karena ia merupakan pewaris bagi kedudukan maupun hartanya.

GLOSARI

Amaf	=	sebutan bagi jabatan yang setingkat kepala desa (*temukung*) di Timor.
Arumpone	=	gelar bagi raja di Bone, selain *mangkau'e*
Bawar	=	pusaka yang dianugerahkan Sultan Aceh kepada raja-raja bawahannya.
Besluit	=	surat keputusan pemerintah kolonial Belanda.
Blah	=	suku, puak, atau keturunan di Tanah Gayo, Aceh.
Bobato	=	menteri atau anggota dewan kerajaan di Maluku.
Boki	=	sebutan bagi putri raja atau bangsawan wanita di Maluku dan daerah pengaruhnya.
Eenheidstaat	=	Negara Kesatuan (Belanda)
Fetnai	=	sebutan bagi putri raja di Timor.
Garwa padmi	=	permaisuri atau istri resmi raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Jannang	=	terkadang juga dieja *jennang*. Jabatan setingkat bupati bagi daerah-daerah bawahan atau taklukkan Gowa ataupun kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya.
Jogugu	=	sebutan bagi perdana menteri di Maluku (Ternate, Tidore, dll.) beserta daerah-daerah pengaruhnya.
Jumenengan	=	upacara penobatan raja-raja di Jawa.
Kaicili (*kaicil*)	=	gelar bagi putra raja di Maluku.
Kemutar	=	daerah-daerah taklukan atau vasal Kerajaan Sumbawa.

Kenpetai	=	polisi rahasia Jepang yang terkenal kebiadabannya.
Kolano	=	gelar lama raja-raja di Maluku.
Meo	=	panglima perang di Timor.
Mokole	=	sebutan bagi raja atau penguasa (terutama di Sulawesi Tengah).
Naimnuke	=	sebutan bagi putra raja di Timor.
Nusak	=	sebutan bagi kerajaan di Pulau Rote.
Nyaicili	=	gelar bagi putri raja di Maluku.
Pangeran ratu	=	jabatan setingkat perdana menteri
Penyimbang	=	kepala adat di Lampung.
Petulai	=	satuan kemasyarakatan atau kesukuan di Bengkulu.
Riwabatang	=	wali sultan di Sumbawa.
Salahakan	=	gubernur di kerajaan-kerajaan Maluku
Sangaji	=	gelar bagi raja di Kepulauan Maluku dan daerah pengaruhnya (seperti Solor dan Manggarai). Namun, gelar ini juga mencerminkan pengaruh Jawa.
Sonaf	=	sebutan bagi istana raja (terutama di Pulau Timor).
Suco	=	gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa penjajahan Jepang. Terkadang juga dieja *syuco*.
Sunan	=	gelar bagi raja-raja Mataram setelah Sultan Agung dan raja-raja Surakarta.
Syuco	=	lihat *suco*.
Wano kalada	=	desa inti atau induk di Pulau Sumba.
Weti	=	sebutan bagi upeti di Buton.
Zelfbestuurder	=	gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa pemerintahan kolonial Belanda.

Tambahan 1
KRONOLOGI RAJA-RAJA NUSANTARA PASCA KERUNTUHAN MAJAPAHIT

RAJA-RAJA DI JAWA

Raja-raja di Jawa Barat

BANTEN		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Sunan Gunung Jati	-
2	Maulana Hasanuddin	1552–1570
3	Maulana Yusuf	1570–1580
4	Maulana Muhammad	1580–1596
5	Sultan Abdul Kadir (Abulmufakhir Mahmud Abdul Kadir)	1596–1651
6	Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa)	1651–1683
7	Sultan Haji	1683–1687
8	Abdu'l Fadhl Muhammad Yahya	1687–1690
9	Abdu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin	1690–1733
10	Abdulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin	1733–1747
11	Syarifuddin Ratu Wakil	1747–1750
12	Abdulma'ali Muhammad Wasi'Zainul 'Alimin	1750–1753
13	Nasr Muhammad Arif Zainul Asiqin	1753–1773
14	Abdu'l Mafakhir Muhammad Aliuddin (Aliuddin I)	1773–1799
15	Abdu'l Muhammad Muhidin Zainussolihin	1799–1801
16	Abdu'l Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin	1801–1802
17	Sultan Wakil Pangeran Natawijaya	1802–1803
18	Aliuddin II	1803–1808
19	Sultan Wakil Pangeran Suramanggala	1808–1809
20	Muhammad Syafiudin	1809–1832

CIREBON		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Syekh Maulana Jati	-
	Panembahan Ratu I (Panembahan Emas)	1568–1649
	Panembahan Ratu II (Pangeran Karim)	1649–1666/ 1667
KACERBONAN		
1	Pangeran Wangsakerta (Panembahan Tohpati)	1666/ 1667–1714 Wakil Sultan Cirebon
2	Temenggung Secadipura	1714–1725 pemangku
3	Panembahan Gusti II	1725–1731
4	Temenggung Secadipura	1731–1752 pemangku
5	Panembahan Gusti III	1752–1773
1	Pangeran Raja Kanoman (Sultan Carbon Amirul Mu'minin)[541]	1808–1814
2	Pangeran Raja Hidayat "Raja Madenda"	1814–1851
3	Pangeran Raja Dendawijaya "Raja Madenda"	1851–1914
4	Pangeran Partaningrat "Raja Madenda"	1914–1931
5	Pangeran Raharjadiraja "Raja Madenda"	1931–1950
6	Pangeran Sidik Arjaningrat "Sultan Kacerbonan"	1950–1956
7	Pangeran Harkat Natadiningrat "Sultan Kacerbonan"	1960–1968
8	P. M. Mulyono Amir Natadiningrat	1968–1994
9	P. R. Abdul Ghani Natadiningrat SE.	1994, 1997-sekarang
KANOMAN		
1	Sultan Anom I Muhammad Badruddin	1677–1703
2	Sultan Anom II Raja Madureja Kadiruddin	1703–1706
3	Raja Kusuma	1706–1719 Wali sultan
4	Tumenggung Bau Denda	1719–1744
5	Sultan Anom III Alimuddin	1744–1798
6	Anom IV Muhammad Kaeruddin	1798–1803
7	Sultan Anom V Abusoleh Imamuddin	1803–1811
8	Sultan Anom VI Komaruddin	1811–1858
9	Sultan Anom VII Muhammad Komaruddin	1858–1873
10	Anom VIII Raja Zulkarnaen	1873–1934
11	Sultan Anom IX Raja Nurbuwat	1934–1935
12	Sultan Anom Nurus	1935–1989
13	Sultan Anom Pangeran Raja Adipati Haji Djalaludin	1989-2002
14	Sultan Anom Emiruddin	

541. Berdasarkan silsilah yang terdapat pada Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

KASEPUHAN		
1	Sultan Sepuh I Syamsuddin	1667–1697
2	Sultan Sepuh II Raja Tajul Arifin Jamaluddin	1697–1723
3	Sultan Sepuh III Raja Jaenuddin	1723–1753
4	Sultan Sepuh IV Raja Amir Sena Jaenuddin	1753–1773
5	Sultan Sepuh V Shafiuddin Matangaji	1773–1786
6	Sultan Sepuh VI Hasanuddin	1786–1791
7	Sultan Sepuh VII Joharuddin	1791–1815
8	Sultan Raja Udaka	1815–1845
9	Sultan Raja Sulaeman	1845–1880
10	Sultan Raja Atmaja	1880–1899
11	Sultan Sepuh Raja Aluda Tajul Arifin	1899–1942
12	Sultan Sepuh Raja Rajaningrat	1942–1969
13	Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Maulana Pakuningrat	
14	Sultan Sepuh Arief Natadiningrat	
KAPRABONAN[542]		
1	Pangeran Kusumawaningyun Kaprabon	1734–1766
2	Pangeran Brataningrat	1766–1798
3	Pangeran Raja Sulaiman Sulendraningrat Kaprabon	1798–1838
4	Pangeran Arifudin Kusumabratawirdja Kaprabon	1838–1878
5	Pangeran Adikusuma Adiningrat	1878–1918
6	Pangeran Angkawijaya Kaprabon	1918–1946
7	Pangeran Aruman Raja Kaprabon	1946–1974
8	Pangeran Herman Raja Kaprabon	1974–2001
9	Pangeran Hempi Raja Kaprabon	2001–sekarang

SUMEDANG LARANG		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Prabu Taji Malela	
2	Prabu Gajah Agung	
3	Sunan Pagulingan	
4	Ratu Rajamantri	
5	Sunan Guling	
6	Sunan Tuakan	
7	Nyimas Ratu Patuakan	
8	Nyimas Ratu Dewi Inten Dewata (Ratu Pucuk Umun)	
9	Prabu Geusan Ulun	
10	Aria Suriadiwangsa I	

542. Berdasarkan silsilah yang diperoleh di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung.

Raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur

BLAMBANGAN		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Lembu Miranda (Lembu Miruda)	±1478
2	Mas Sembar	
3	Bima Koncar	±1485–awal abad 16
4	Menak Pentor (Pati Pentor)	±1513–1531
5	Merak Pangseng	1531–
6	Santa Guna (Raja Denan)	1570–1588
7	Putra Santa Guna (nama tidak diketahui)	1588–1597
8	Istri Santa Guna (nama tidak diketahui)	1597
9	Mas Krian	1597–1632/ 1633
10	Tawang Alun I (Singasari)	1633–1638
Di bawah kekuasaan Mataram (1638–1645)		
11	Tawang Alun II (Mas Kembar)	± 1645–1691
12	Dalam Agung (Mancanapura), Dalam Pati (Senapati), dan Mancanegara (memerintah bersama)	1691–1692
13	Dalam Agung (Mancanapura)	1692–1697 memerintah sendiri
14	Pangeran Putra (Danureja)	1697–1736
15	Danuningrat (Mas Sepuh)	1736–1767
Para Tumenggung Banyuwangi		
1	Tumenggung Banyuwangi I (Mas Alit)	1773–1782
2	Tumenggung Banyuwangi II (Mas Talib)	1782–± 1818
3	Tumenggung Banyuwangi III (Raden Suranegara)	1820–1832
4	Tumenggung Banyuwangi IV (Raden Wiryahadikusuma)	1832–1867
5	Tumenggung Banyuwangi V (Raden Pringgakusuma)	1867–1881

DEMAK		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Raden Patah	1478–1518
2	Pati Unus	1518–1521
3	Sultan Trenggono	1521–1546
4	Sunan Prawoto	1546–1549
PAJANG		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijoyo)	1549–1582
2	Arya Pangiri (Sultan Ngawantipuro)	1583–1586
3	Pangeran Benawa (Sultan Prabuwijoyo)	1586–1587
MATARAM		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Panembahan Senopati (Radan Sutawijaya)	1587–1601
2	Panembahan Hanyakrawati (Raden Mas Jolang)	1601–1613

3	Sultan Agung	1613–1645
4	Amangkurat I	1645–1677
5	Amangkurat II	1680–1702
6	Amangkurat III	1702–1705
7	Pakubuwono I	1705–1719
8	Amangkurat IV	1719–1726
9	Pakubuwono II (gelar Pakubuwono bersambung pada raja-raja Surakarta0	1726–1742

MANGKUNEGARAN			
No.	**Nama raja**	Nama lain B.R.M = Bendoro Raden Mas K.P.H. = Kanjeng Pangeran Haryo G.R.M. = Gusti Raden Mas	**Tahun pemerintahan**
1	Mangkunegoro I	Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa	1757–1795
2	Mangkunegoro II		1796–1835
3	Mangkunegoro III	B.R.M Sarengat	1835–1853
4	Mangkunegoro IV	B.R.M. Sudiro	1853–1881
5	Mangkunegoro V	B.R.M. Sunito	1881–1896
6	Mangkunegoro VI	B.R.M. Suyitno	1896–1916
7	Mangkunegoro VII	B.R.M. Suparto atau K.P.H. Suryosuparto	1916–1944
8	Mangkunegoro VIII	B.R.M. Saroso	1944–1987
9	Mangkunegoro IX	G.R.M. Sujiwo Kusumo	1987–sekarang

PAKUALAMAN			
No.	**Nama raja**	Nama lain B.R.M = Bendoro Raden Mas G.P.H. = Gusti Pangeran Haryo K.P.H. = Kanjeng Pangeran Haryo G.R.M.H. = Gusti Raden Mas Haryo	**Tahun pemerintahan**
1	Paku Alam I	B.R.M. Sujadi atau Pangeran Notokusumo	1813–1829
2	Paku Alam II	Raden Tumenggung Nataningrat	1829–1858
3	Paku Alam III	G.P.H. Sasraningrat	1858–1864
4	Paku Alam IV	B.R.M. Nataningrat	1864–1878
5	Paku Alam V	B.R.M. Notowiliyo	1878–1900
6	Paku Alam VI	K.P.H. Natakusuma	1901–1902
7	Paku Alam VII	B.R.M. Surarjo	1903–1938
8	Paku Alam VIII	G.R.M.H. Sularso Kuntosuratno atau K.P.H. Suryodilogo	1938–1998
9	Paku Alam IX		1998–sekarang

SURAKARTA			
	Nama raja	**Nama lain** B.R.M. = Bendoro Raden Mas G. R. M. = Gusti Raden Mas	**Tahun pemerintahan**
1	Pakubuwono III	B.R.M. Gusti Suryadi	1749–1788
2	Pakubuwono IV	B.R.M. Gusti Subadya	1788–1820
3	Pakubuwono V	B.R.M. Gusti Subandi	1820–1823
4	Pakubuwono VI	G.R.M Sapardan	1823–1830
5	Pakubuwono VII	B.R.M. Malikus Shalihin	1830–1858
6	Pakubuwono VIII	G.R.M. Kusen	1859–1861
7	Pakubuwono IX	B.R.M. Gusti Duksina	1861–1893
8	Pakubuwono X	B.R.M. Gusti Sayidin Malikul Husna	1893–1939
9	Pakubuwono XI	G.R.M. Antasena	1939–1944
10	Pakubuwono XII	G.R.M Suryaguritna	1944–2004
11	Pakubuwono XIII[543]		2004–sekarang

YOGYAKARTA			
No.	**Nama raja**	Nama lain B.R.M. = Bendoro Raden Mas G.R.M = Gusti Raden Mas KGPH = Kanjeng Gusti Pangeran Haryo	**Tahun pemerintahan**
1	Hamengkubuwono I	B.R.M. Sujono atau Pangeran Mangkubumi	1755–1792
2	Hamengkubuwono II	G.R.M. Sundoro atau Sultan Sepuh	1792–1810 pemerintahan pertama
3	Hamengkubuwono III	G.R.M. Suroyo	1810–1811 pemerintahan pertama
	Hamengkubuwono II		1811–1812 pemerintahan kedua
	Hamengkubuwono III		1812–1814 pemerintahan kedua
4	Hamengkubuwono IV	G.R.M. Ibnu Jarot	1814–1823
	Hamengkubuwono V	G.R.M. Gathot Menol	1823–1826 pemerintahan pertama
	Hamengkubuwono II		1826–1828 pemerintahan ketiga
5	Hamengkubuwono V		1828–1855 pemerintahan kedua
6	Hamengkubuwono VI	G.R.M. Mustodjo	1855–1877
7	Hamengkubuwono VII	G.R.M. Murtedjo atau KGPH. Hangabehi	1877–1921

543. Gelar Pakubuwono XIII diklaim oleh dua orang, yakni Pangeran Hangabehi dan Pangeran Tedjowulan.

8	Hamengkubuwono VIII	G.R.M. Sudjadi	1921–1939
9	Hamengkubuwono IX (selanjutnya menjabat sebagai gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)	G.R.M. Dorojatun	1940–1988
10	Hamengkubuwono X (gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)	G.R.M. Herjuno Derpito atau KGPH. Mangkubumi	1989–sekarang

Raja-raja di Madura

BANGKALAN		
	Nama raja/ bupati	**Tahun pemerintahan**
1	Kyai Pragalbo (Pangeran Palakaran)	–1531
2	Pratanu (Panembahan Lemah Duwur)	1531–1592
3	Raden Koro (Kara) atau Pangeran Tengah	1592–1621
4	Pangeran Mas	1621–1624
5	Cakraningrat I	1624–1647
6	Cakraningrat II	1647–1707
7	Cakraningrat III	1707–1718
8	Cakraningrat IV	1718–1745
9	Setiadiningrat (Cakraadiningrat V)	1746–1770
10	Mangkuadiningrat (Cakraadiningrat VI)	1770–1780
11	Suroadiningrat (Cakraadiningrat VII) - Sultan Cakraadiningrat I	1780–1815
12	Sultan Cakraadiningrat II	1815–1847
13	Panembahan Cakraadiningrat VII	1847–1862
14	Cakradiningrat VIII	1862–1882
15	Raden Kasim (Hasim) atau Pangeran Suryanegara–bupati Bangkalan pertama	1882–1905
16	Suryanegara (Suryonegoro)	1905–1918
17	Suryawinata (Suryowinoto) atau Raden Adipati Ario Cakraningrat	1918–1950

PAMEKASAN		
	Nama raja/ bupati	**Tahun pemerintahan**
1	Ario Mengo atau Kiai Wonorono	
2	Pangeran Nugroho (Panembahan Bonorogo)	–1530
3	Panembahan Ronggo Sukowati (Rangga Sukawati)	
4	Pangeran Purboyo	
5	Pangeran Magetsari (Megasari)	
6	Raden Kanoman (Tumenggung Wirosari)	
7	Raden Gunungsari (Raden Dakseno atau Pangeran Gatotkoco). Gelarnya adalah Raden Adikoro I	

8	Tumenggung Joyonegoro	
9	Raden Mas Asral (Adikoro II atau Gatotkoco II)	
10	Raden Sujono (Adikoro III)	
11	Raden Ismail (Adikoro IV)	
12	Raden Tumenggung Ario Cokroadiningrat	
13	Raden Alsari (Tumenggung Ario Cokroadiningrat I atau Tumenggung Sepuh (Ghung Seppo))	
14	Raden Alsana (Raden Ario Jayingsari atau Raden Tumenggung Ario Cokroadiningrat II)	
15	Mangkuadiningrat	
16	Raden Banjir (Pangeran Adipati Suriokusumo)	
17	Mangkuadiningrat	
18	Raden Ario Condronagoro	1891–1922
19	Raden Adipati Ario Kartoamiprojo	
20	Raden Ario Abdul Aziz	
21	Raden Tumenggung Ario Notohadikusumo	

SUMENEP		
	Nama raja/ bupati	**Tahun pemerintahan**
1	Aria Wiraraja (Banyak Wide)	1269–1292
2	Ario Bangah	1292–1301
3	Ario Danurwendo (Lembusuranggono)	1301–1311
4	Ario Asropati	1311–1319
5	Panembahan Joharsari (Jokarsari)	1319–1331
6	Panembahan Mandaraka (Mondoroko atau Raden Piturut)	1331–1339
7	Pangeran Bukabu	1339–1348
8	Pangeran Baragung (Baragung Nataningrat)	1348–1358
9	Raden Anggung Rawit (Pangeran Setiadiningrat I)	1358–1366
10	Tumenggung Gajah Pramudo (Pangeran Setiadiningrat II)	1366–1386
11	Ario Pulang Jiwo (Panembahan Blingi)	1386–1399
12	Adipoday (Ario Bribin)	1399–1415
13	Joko Tole (Pangeran Setiadiningrat III)	1415–1460
14	Raden Begonondo	1460–1502
15	Raden Aria Wanabaya (Ario Wonoboyo atau Pangeran Sidhingpuri)	1502–1559
16	Pangeran Kanduruwan	1559–1562
17	Pangeran Lor I (Raden Wetan) dan Pangeran Wetan I (Raden Banten)	1562–1567
18	Pangeran Lor II (Raden Rajasa) dan Pangeran Wetan II (Raden Gedok)	1567–1580
19	Raden Abdullah (Pangeran Cakranegara I)	1580–1626
20	Tumenggung Anggadipa	1626–1644
21	Jayengpati	1644–1672

22	Tumenggung Yudanegara (Raden Bugan)	1672–1700
23	Tumenggung Pulang Jiwo dan Pangeran Sepuh	1700–1702
24	Cakranegara II (Pangeran Romo)	1702–1705
25	Tumenggung Wiromenggolo (Wiramenggala, Pangeran Purwonegoro, atau Purwanegara)	1705–1707
26	Pangeran Jimat atau Raden Ahmad (Cakranegara III)	1707–1737
27	Raden Alza atau Pangeran Lolos (Cakranegara IV)	1737–1750
28	Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro dan Bendoro Saud atau Tumenggung Tirtonegoro (Tirtanegara)	1750–1762
29	Panembahan Sumolo atau Natakusuma (Notokusumo) I	1762–1812
30	Abdurrahman (Sultan Pakunataningrat) atau Panembahan Natakusuma II	1812–1854
31	Muh. Soleh (Panembahan Natakusuma II)	1854–1879
32	Pangeran Mangkuadingrat	1879–1901
33	Raden Tumenggung Ario Pratamingkusumo	1901–1925
34	Raden Tumenggung Ario Prabuwinoto	1925–1929
35	Raden Samadikun Parwotohadikusumo	1929–1947
36	Raden Tumenggung Ario Amijoyo	1947–1948

Alternatif lain bagi kronologi penguasa Sumenep terdapat pada Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif, halaman 167–169:

- Pangeran Kanduruwan (1559–1562)
- Pangeran Wetan dan Pangeran Lor (1562–1567)
- Raden Keduk (1567–1574)–sama dengan Raden Gedok
- Raden Rajasa (1574–1599)
- Raden Abdullah (Cakranegara I, 1589–1626)
- Pangeran Anggadipa (1626–1644)
- Jayengpati (1644–1648)
- Raden Bugan (1648–1672)
- P.T. Pulangjiwo (1672–1678)
- Panembahan Romo (1678–1709)
- R.T. Wiromenggolo (1709–1731)
- Pangeran Jimat (1731–1744)
- Raden Alza (1744–1749)
- Kiai Lesap (1749–1750)
- R.A Tumenggung Tirtonegoro (1750–1762)

RAJA-RAJA DI SUMATERA

Uleebalang-uleebalang di Aceh

ACEH		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Ali Mughayat Syah	± 1514–1530
2	Salahuddin	1530–1531
3	Alauddin Riayat Syah (Al Kahhar)	1531–1571
4	Husin (Ali Riayat Syah)	1571–1579
5	Sultan Muda	1579
6	Sri Alam	1579
7	Zainal Abidin	1579
8	Alauddin Mansyur Syah	1579–1585
9	Sultan Buyung (Alauddin Riayat Syah)	1585–1589
10	Sultan Alauddin Riayat Syah Al Mukammal	1589–1604
11	Ali Riayat Syah	1604–1607
12	Iskandar Muda	1607–1636
13	Iskandar Thani Alauddin Mughayat Syah	1636–1641
14	Tajul Alam Safiatuddinsyah	1641–1675
15	Nurul Alam	1675–1677
16	Inayat Zakiatudin Syah	1677–1688
17	Kamalat Syah	1688–1699
18	Badrul Alam Sherif Hasham	1699–1702
19	Perkasa Alam	1702–1704
20	Jamal Al Alam	1704–1723
21	Jauhar al-Alam Amin al-Din (Juhar Alam)	1723
22	Undei Tebang (Syamsul Alam)	1723
23	Maharaja Lela, (Alauddin Ahmad Syah Juhan atau Alauddin Akhmadsyah)	1724–1735
24	Alauddin Juhan Syah	1735–1760
25	Alauddin Muhammad	1760–1781
26	Sinara (Badaruddin Juhan Syah)	1764–1765 Perebut tahta
27	Raja Udah (Sultan Sulaeman Syah)	1765 Perebut tahta
28	Alauddin Mahmud Syah Juhan (Alauddin Muhammad Syah)	1781–1795
29	Husin. (Jauhar Alam Syah)	1795–1823
30	Syaiful Alam	1815–1819 Sultan tandingan
31	Alauddin Muhammad Daud Syah	1823–1838
32	Sulaiman Ali Iskandar Syah	1838–1857
33	Aladdin Ibrahim Manysur Syah	1850–1870
34	Sultan Mahmud Syah II	1870–1874
35	Muhammad Daud	1874–1903

IDI (IDI RAYEU)[544]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Panglima Nyak Sim	
2	T. Ben Guci	
3	Teuku Cik Hasan Ibrahim Ibnu Guci	
4	Teuku Muhammad Hanafia	
5	Teuku Cik Muhammad Daud Syah	

PEUREULAK[545]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tok Po Kalam	
2	T. Muda Raja	
3	T. Nyak Plang	Pemerintahan pertama
4	T. Muda Rakna	
5	T. Nyak Plang	Pemerintahan kedua
6	T. Nyak Tam (T. Cik *Uleebalang* Negeri Peureulak)	
7	T. Ben Tam (T. Cik Krueng Baro)	
8	T. Abu Bakar (T. Cik Muda Peusangan)	1883–1914
9	T. Cik Muhammad Thajib	1914–1935
10	T. Cut Ahmad	1935–1944
11	Mr. T. Ismail Thajib	

PIDIE[546]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Teuku Pakeh Din	
2	Teuku Pakeh Batee Patah	
3	Teuku Pakeh Po Kalam	
4	Teuku Pakeh Daud	
5	Teuku Raja Pakeh Hussain	
6	Teuku Raja Pakeh Dalem	–1815
7	Teuku Raja Pakeh (Pakih) Sulaiman Ibnu Teuku Raja Pakeh	–1895
8	Teuku Raja Pakeh Muhammad Daud	1895–1897
9	Teuku Muhammad Hussain Geudong	1897–1905 Wakil raja
10	Teuku Raja Kuala Usman	1905–1915 Wakil raja
11	Teuku Raja Pakeh Muhammad Ali Kuto Baro	1915–1917
12	Teuku Muda Pakeh Dalam (Teuku Raja Muda atau Teuku Dalam)	1917–1920
13	Teuku Mahmud Pakeh	1920–1940
14	Teuku Raja Pakeh Sulaiman	1940–1946

544. Sumber: *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1.
545. Sumber: *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1.
546. Sumber: *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1.

PIRAK[547]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Teuku Tok Bineh Blang	
2	Teuku Keujruen Blang	
3	Teuku Di Matang	
4	Teuku Tok Pang Pirak	
5	Teuku La Seumana	
6	Teuku Ben Daud	

TRUMON		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Datuk Si Ruyung	± 1787
2	Leubé Dapa	–1814
3	Raja Bujang	1814–1832/ 1833
4	Seri Muda Paduka Alam Sultan Mansur Buda Bujang	1833–1884
5	Sultan Iskandar	1884–1893
6	Tengku Jafar	1893–1903
7	Tengku Muda Nasiruddin	1904–1910
8	Tengku Leh	1910–1927
9	Tengku Husein	1927–1942 pemerintahan pertama
10	Tengku Daud	1942–1945
11	Tengku Husein	1945–1946 pemerintahan kedua

Kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, Barat, dan Utara

ASAHAN		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Abdul Jalil	
2	Saidisyah	
3	Muhammad Rumsyah	
4	Abdul Jalil Syah II	1750–1765
5	Dewa Syah	1765–1805
6	Musa Syah	1805–1808
7	Muhammad Ali Syah	1808–1813
8	Muhammad Hussein Syah	1813–1859
9	Ahmad Syah	1859–1865 1886–1888
10	Muhammad Hussein Syah II	1888–1915
11	Saibun Abdul Jalil Rahmatsyah	1915–1956

547. Sumber: *Cut Nyak Meutia*, halaman 90.

BARUS HULU[548]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Alang Pardoksi	
2	Guru Marsakot	
3	Tuan Namura Raja	
4	Raja Kadir	
5	Tuan (Raja) Mualif	
6	Marah Pangsu	
7	Marah Sifat	
8	Raja Bongsu	
9	Sutan Marah Tulang	
10	Sutan Menawar Syah	
11	Sutan Marah Pangkat	
12	Raja Adil	1798–1824
13	Sutan Sailan	1824–
14	Sultan Limba' Tua	
15	Sutan Ma'in Intan	
16	Sutan Agama (Sutan Subum)	
17	Sutan Marah Tulang	–1853
BARUS HILIR		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Sutan Ibrahim	
2	Raja Usuf	
3	Sutan Adil	
4	Tuanku Sutan	
5	Marah Laut (Tuanku Bagonjong)	
6	Tuanku Sutan Perhimpunan	
7	Tuanku Raja Kecil	
8	Sutan Emas	
9	Sutan Main Alam	
10	Sutan Perhimpunan (Tuanku Sultan Ibrahim)	± 1834–1852

BILAH		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Raja Indra (Indra Alam atau Marhum Mangkat di Kumbul)	±1630–1650
2	Raja Unus (Marhum Mangkat di Gunung Suasa)	± 1650–1670
3	Raja Sulung (Marhum Mangkat di Simpang)	± 1670–1700
4	Raja Sulung Riau	±1700–1720
5	Sutan Bidar Alam Syah I (Marhum Mangkat di Maban)	± 1720–1760
6	Sutan Indra Alam Marhum Sakti	1760–1785
7	Sutan Rahmad Syah	1785–1800
8	Sutan Indra Alam (Marhum Sungai Abal)	1800–1835

548. Sumber utam: *Sejarah Raja-raja Barus: Dua Naskah dari Barus.*

9	Sutan Bidar Alamsyah II (Marhum Mangkat di Kota Lama)	1835–1865
10	Sutan Bidar Alamsyah III (Tengku Abbas atau Marhum Mangkat di Negeri Lama)	1865–1903
11	Sutan Bidar Alam Syah IV (Tengku Adil)	1904–1946

DELI		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Sri Paduka Gocah Pahlawan	1630–1653
2	Tuanku Panglima Perunggit	1653–1698
3	Tuanku Panglima Paderap	1698–1723
4	Tuanku Pasutan	1723–1761
5	Tuanku Panglima Amaludin	1761–1824
6	Sultan Osman Perkasa Alam	1824–1858
7	Sultan Amaludin Mahmud Perkasa Alam Syah	1858–1873
8	Sultan Mahmud al-Rasyid Perkasa Alam Syah	1873–1924
9	Sultan Amaludin II Perkasa Alam Syah	1925–1945
10	Sultan Osman II Perkasa Alam Syah	1945–1967
11	Sultan Azmi Perkasa Alam Syah	1967–1998
12	Sultan Osman III Mahmud Ma‘mun Paderap Perkasa Alam Syah	1998–2005
13	Sultan Mahmud Arfa Lamanjiji Perkasa Alam Syah	2005-sekarang

DENAI		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tuanku Tawar	
2	Tuanku Jabar	
3	Tuanku Manja Kaya	
4	Sutan Megah	
5	Rada Yaudin	
6	Sutan Berahim	
7	Raja Mahmud	1887–1907
8	Raja Sulaiman	1907–1919
Denai disatukan dengan distrik Ramunia pada 1925		

GUNUNG SAHILAN[549]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tengku Bujang Sakti	1700–1740
2	Tengku Elok	1740–1780
3	Tengku Muda	1780–1810
4	Tengku Hitam	1810–1850
5	Tengku Abdul Jalil	1850–1880
6	Tengku Daulat	1880–1905

549. Sumber: http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16# (diunduh 14 Pebruari 2010).

7	Tengku Abdurrahman	1905–1930
8	Tengku Sulung	1930–1941

HAMPARAN PERAK (XII KOTA)[550]		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tuan si Raja Hita	
2	Guru Patimpus	
3	Kecik	
4	Muhammad Syah	
5	Mahmud	
6	Ali	
7	Banuasim	
8	Sutan Sri Ahmad	–1920
9	Datuk Adil	
10	Datuk Gambak	
11	Datuk Hafiz Haberham	
12	Datuk Syariful Azas Haberham	

INDERAGIRI & KERITANG		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Merlang I (Kecik Mambang)	
2	Narasinga I	
3	Merlang II	
4	Narasinga II (Sultan Iskandar Alauddin Syah - Sultan Inderagiri pertama)	1508–1532
5	Usuluddin Hasan	1532–1557
6	Muhammad Syah (Raja Ahmad)	1557–1599
7	Jamaluddin Kramat Syah	1599–1664
8	Jamaluddin Sulaiman Syah	1664–1669
9	Jamaluddin Mudayat Syah	1669–1676
10	Usuluddin Ahmad Syah	1676–1687
11	Abdul Jalil Syah	1687–1700
12	Mansyur Syah	1700–1704
13	Muhammad Syah	1704–1707
14	Muzaffar Syah	1707–1715
15	Zainal Abidin (Raja Ali)	1715–1735
16	Hasan Salahuddin	1735–1765
17	Sunan (Raja Kecil Besar)	1765–1784
18	Sultan Ibrahim	1784–1815
19	Raja Mun	1815–1827
20	Raja Umar (Sultan Berjanggut Kramat)	1827–1838
21	Sultan Said	1838–1876
22	Raja Ismail (Ismail Syah)	1876–1877

550. Sumber Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman, halaman 19.

23	Raja Hussein	1877–1887
24	Isa	1887–1903
	perwalian	1903–1912
25	Mahmud	1912–1963

INDRAPURA		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
	Menurut Ranji Melayu Tinggi, Ranji Tinggi Indrapura[551]	
1	Sultan Jamalul Alam Yang Dipertuan Khalifatullah Alam Iskandar Alam Ibnu Adam Alaihis Sallam	
2	Sultan Jamalul Alam Sultan Daulat Sri Maharajo Dirajo Usli Kerajaan di Lingga Puri	
3	Khalifatul Alam Sultan Mahyidinsyah Daulat Jamalul Alam, Sultan Sri Maharajo Dirajo Muhammad Syah	Akhir abad 9
4	Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Srimaharajo Dirajo Alamsyah	
5	Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Firmansyah	
6	Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Gegar Alamsyah	
7	Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Usmansyah, Berdarah Putih	
8	Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Firmansyah	
9	Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Muhammadsyah	
10	Sultan Jamalul Alam Sultan Firmansyah	
11	Sultan Jamalul Alam Sultan Maradhu Alam Syah	
12	Sultan Jamalul Alam Sultan Madlafarsyah	
13	Sultan Jamalul Alam Sultan Usmansyah	1526–1565
14	Sultan Jamalul Alam Yang Dipertuan Daulat Sultan Gegar Alamsyah Muhammadsyah, Tuanku Berdarah Putih	1565–1600
15	Putri Syiah Bintang Purnama Raja Perempuan Inderapura	
16	Daulat Alam Sultan Ali Akbar Syah Sultan Muhammadsyah	1600–1635
17	Putri Bangun Rekna Cahaya Alam Raja Perempuan Inderapura	
18	Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Inayatsyah Muhammadsyah	1635–1660
19	Sultan Malafarsyah	1660–1687
20	Sultan Syahirullah Daulat Alam	1687–1707
21	Putri Linggo Geni Dewi Alam Raja Perempuan Inderapura	
22	Sultan Zam-zamsyah Gelar Sultan Firmansyah	1707–1737
23	Putri Mayang Sari. Ratu Kerajaan Inderapura	
24	Sultan Muhammad Syah	1737–1774
25	Putri Zahara Alam Bintang Cahaya Ratu Kerajaan Inderapura	
26	Sultan Inderahimsyah Gelar Sultan Muhammadsyah	1774–1804
27	Putri Sri Gading Bintang Purnama Putri Bangsawan	
28	Sultan Aiyatullahsyah Gelar Sultan Inayatsyah	1804–1840
29	Putri Jusma Alam Cahaya Ratu Kerajaan Inderapura	

551. http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=10150337212486942#!/note.php?note_id=110539502372094 (diunduh 13 Agustus 2011).

30	Daulat Alam Tuanku Sembah Tuanku Balindung Sultan Muhammad Arifinsyah Gelar Sultan Muhammadsyah	1840–1860
31	Putri Srihati Bintang Alam Raja Perempuan Inderapura/Tuanku Dusi	
32	Putri Bangun Cahaya Inderapura	
33	Daulat Alam Tuanku Sembah Tuanku Balindung Sultan Muhammad Baqi Gelar Sultan Firmansyah	1860–1891
34	Putri Zaenab Cakra Alam Inderapura	
35	Putri Nurmidah Gumala Cahaya	
36	Sultan Setiawansyah Gelar Sultan Muhammadsyah	1911–1966
37	Putri Gindan Dewi Alam Inderapura	
38	Sultan Zainal Rizalsyah Mustapura Gelar Sultan Inayatsyah	1966–1985
39	Sultan Burhanuddin Gelar Sultan Firmansyah Alamsyah	1985-2011
40	Sultan Indera Rahimsyah	2011-
Sumber lain		
1	Putih I	sekitar abad 14
2	Itam I	± 1380–± 1400
3	Bandara	± 1400–± 1430
4	Putih Muda	± 1430–± 1450
5	Sangam Diraja	± 1450–± 1480
6	Pahlawan	± 1480–± 1530
7	Munawar Syah	± 1530–± 1550
8	Itam II	± 1616–± 1624
9	Besar	± 1624–± 1630
10	Putih II	± 1630–± 1636
11	Muzaffar Syah (Malfarsyah)	± 1636–1660
12	Muhammad Syah	1660–1691
13	Mansur Syah	1691–1696
14	Sultan Pesisir	1696–1747
15	Mahmud Syah	1747–1766
16	Datuk Muda	1766–
17	Muhammad Syah II	–1792

KEPENUHAN[552]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Raja Purba	
2	To' Permaisuri	
3	Raja Aru	
4	Datuk Negeri Tingga	
5	Maruhum Sultan Sulaiman	
6	To' Maruhum Kayo	
7	To' Maruhum Sultan Makulah Yang Dahulu	
8	To' Sultan Makula Yang Dahulu	
9	To' Maruhum Sultan Sulaiman	
10	Sultan Makula	

552. Lihat http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja (diunduh tanggal 25 Maret 2010).

11	Sultan Sulaiman Yang Dipertuan Muda	
12	Yang Dipertuan Besar (Yang Dipertuan Muda dari Pagaruyung)	
13	Datuk Maruhum Merah Dada	
14	Tengku Muda Sahak	
15	Montuo Muda (Mencong)	
16	Tengku Sultan Sulaiman	

KOTA PINANG[553]		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Batara Sinomba	
2	Sultan Mangkuto Alam atau Sultan Musa	
3	Sultan Maharaja Alam	
4	Yang Dipertuan Besar Sultan Kahar	
5	Yang Dipertuan Muda	
6	Yang Dipertuan Hadndung	
7	Yang Dipertuan Mangkat di Simarkaluang	
8	Sultan Kumala atau Sultan Tua	
9	Sultan Muda	
10	Sutan Busu (Bungsu)	
11	Sutan Mustafa	
12	Sultan Ismail	
13	Yang Dipertuan Ma'mur Perkasa Alamsyah	

KUNTO DARESSALAM[554]		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tengku Panglima Besar Kahar Yang Dipertuan Besar	1878–1885
2	Tengku Syarif Yang Dipertuan Besar	1885–1895
3	Tengku Ali Kasim Yang Dipertuan Besar	1895–1905
4	Tengku Ali Tandun Yang Dipertuan Besar	1905–1910
5	Tengku Ishak Yang Dipertuan Muda	1910–1921
6	Tengku Ali Muhammad Tengku Panglima Besar	1921–1925
7	Tengku Kamaruddin Tengku Sultan Mahmud	1925–1935
8	Tengku Maali Tengku Pahlawan	1935–1942

KUALUH		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Yang Dipertuan Raja Muhammad Ishak Negeri Kualuh (Pangeran Muhammad Ishak)	1829–1882
2	Yang Dipertuan Tengku Naamatullah Alhaji Abdullah Syah (Tengku Naamatullah)	1882–1886
3	Yang Dipertuan Alhaji Muhammad Syah (Tengku Biung)	1886–1946

553. Sumber: Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, halaman 81-82

554. Lihat http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja (diunduh tanggal 25 Maret 2010).

LANGKAT		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Dewa Sakti	
2	Dewa Syahdan	± 1670
3	Raja Kahar	
4	Raja Badiuzzaman (Badiulzaman) atau Sutan Bendahara	
5	Raja Hitam (Indra Bungsu atau Tuanku Tampuk)	
6	Raja Ahmad (Tengku Sutan Ahmad)	1818–1840
7	Sultan Musa (gelar sultan mulai dipakai pertama kalinya)–Gelar lengkap: Tuanku Sultan Haji Musa al Khalid al Mahadiah Muazzam Shah	1840–1893
8	Abdul Azis Abdul Jalil Rahmad Shah (Sultan Abdul Azis)	1893–1927
9	Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah (Sultan Mahmud)	1927–1948

MINANGKABAU (PAGARRUYUNG)[555]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Maharajo di Rajo	
2	Sang Sapurba	
3	Maharajo Indo	
4	Maharaja Sako	
5	Adityawarman[556]	1347–1375
6	Rajo Hakad	1375–1425
7	Sultan Bakilab Alam	1425–1475
8	Sultan Pasambahan	1475–1560
9	Sultan Alif	1560–1580
10	Bandaharo, Indomo, dan Tuan Kali (pejabat sementara raja Pagarruyung)	1580–1600
11	Sultan Pamandangan	1600–1650
12	Sultan Ahmad Syah	1650–1680
13	Sultan Muning Syah I	1680–1720
14	Sultan Muning Syah II	1720–1770
15	Sultan Muning Syah III	1770–1819
16	Sultan Alam Bagagar Syah	1819–1833
	Menurut sumber lain:[557]	
1	Raja Adityawarman	1345–1375
2	Raja Ananggawarman	1375–1389
3	Raja Vijayawarman	1389–1403
4	Daulat Yang Dipertuan Sultan Bakilap Alam, Sultan Alif I, Yamtuan Raja Bagewang	
5	Daulat Yang Dipertuan Sultan Siput Aladin	

555. Sumber: Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, halaman 89.

556. Alternatif lain urutan raja-raja Minangkabau adalah: Adityawarman, Ananggawarman, Bakilap Alam, Pasambahan, Alif gelar Khalifatullah, Barandangan, Patah (Muning II), Muning III, Sembawang, dan Alam Bagagar Syah.

6	Daulat Yang Dipertuan Sultan Ahmadsah, Yamtuan Raja Barandangan	
7	Daulat Yang Dipertuan Sultan Alif II, Yamtuan Khalif	
8	Daulat Yang Dipertuan Sultan Alam Bagagar Alamsyah, Yamtuan Raja Lembang Alam	
9	Daulat Yang Dipertuan Sultan Alam Muningsyah I, Yamtuan Raja Bawang	
10	Daulat Yang Dipertuan Malenggang Alam, Yamtuan Raja Naro	
11	Daulat Yang Dipertuan Sultan Alam Muningsyah II Sultan Abdul Fatah, Sultan Abdul Fatah, Yamtuan Sultan Abdul Jalil I	
12	Daulat Yang Dipertuan Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah, Yamtuan Hitam	–1833
13	Daulat Yang Dipertuan Sultan Abdul Jalil II, Yang Dipertuan Garang	1833–1899
14	Daulat Yang Dipertuan Puti Reno Sumpu, Yang Dipertuan Babulu Lidah	1899–1912
15	Daulat Yang Dipertuan Gadih Hitam Puti Reno Aminah	1912–1926
16	Daulat Yang Dipertuan Sultan Ibrahim Tuanku Ketek	1926–1944
17	Daulat Yang Dipertuan Gadih Hitam Puti Reno Aminah	1944–1962
18	Daulat Yang Dipertuan Sultan Oesman Tuanku Tuo Drs	1962–1991
19	Daulat Yang Dipertuan Sultan Ismail Tuanku Mudo	1991-2002
20	Daulat Yang Dipertuan Sultan Muhammad Taufiq SH Tuanku Muda Mahkota Alam	2002-sekarang

PADANG		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
	Alternatif pertama[558]	
1	Saragih Dasalak (Raja Umar Baginda Saleh)	
2	Raja Bajanis dan Raja Geraha	
3	Lamkanuddin (Sutan Mangedar Alam)	
4	Syahdewa	
5	Syafdanah	± 1830
6	Raja Graha Marahkun (Marah Hakun)	
7	Marahuddin (Tuanku Maharaja Muda atau Tengku Haji Muhammad Nurdin)	–1885 pemerintahan pertama
8	Tuanku Berahman	1885–1888
9	Marahuddin (Tuanku Maharaja Muda)	1888–1914 pemerintahan kedua
10	Tengku Ibrahim dan Tengku Temenggung	1914–1925 wali
11	Tengku Alamsyah (Maharaja Bungsu)	1925–
	Alternatif kedua[559]	
1	Umar Baginda Saleh	
2	Marah Sudin	
3	Raja Saladin	

557. *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Dalam Sejarah dan Tambo Adatnya*, halaman 186–187.
558. *Sari Sejarah Serdang* 1.
559. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebingtinggi* dan silsilah karya Ibnu Hibban Saragih.

4	Marah Adam	
5	Raja Syahdewa	
6	Raja Sidin	
7	Raja Tebing Pangeran	1806–1823
8	Raja Mara Hakun	1823–1870
9	Marah Hudin (Tuanku Maharaja Muda atau Tengku Haji Muhammad Nurdin)	1870–1885 pemerintahan pertama
10	Tengku Sulaiman (wakil raja)	1885–1888
11	Marah Hudin (Tuanku Maharaja Muda atau Tengku Haji Muhammad Nurdin)	1888–1914 pemerintahan kedua
12	Tengku Jalaluddin (wakil raja)	1914–1928
13	Tengku Alamsyah	1928–1931
14	Tengku Ismail	1931–1933
15	Tengku Hasyim	1933–1946

PANAI[560]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tengku Sulung Riau	
2	Tengku Raja Murai	
3	Tengku Besar atau Yang Tuan Besar	
4	Tengku Sulung	
5	Tengku Sutan Mengedar Alam	
6	Tengku Abdullah, Sutan Gegar Alam	
7	Tengku Tengah Mohammad Tahir gelar Sutan Mengendar Alam Syah	
8	Tengku Sulung Syahnara	
9	Tengku Kelana Putra gelar Sutan Gagar Alam Rahmat	
Menurut sumber lainnya:		
1	Sutan Mangedar Alam	1813–1856
2	Sutan Gagar Alam	1856–1880
3	Sutan Mangedar Alamsyah	1880–1907
4	Sutan Gagar Alam Rahmatullah	1907–

PELELAWAN		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
Kerajaan Pekantua		
1	Maharaja Indra	1380–1420
2	Maharaja Pura	1420–1445
3	Maharaja Laka	1445–1460
4	Maharaja Sisya	1460–1480
5	Maharaja Jaya	1480–1505
Kerajaan Pekantua Kampar		
6	Munawar Syah	1505–1511

560. Sumber: *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, halaman 86.

7	Abdullah	1511–1515
8	Mahmud Syah I	1526–1528
9	Raja Ali (Sultan Alauddin Riayat Syah II)	1528–1530
Pemerintahan para mangkubumi		
10	Mangkubumi Tun Perkasa	1530–1551
11	Tun Hitam	1551–1575
12	Tun Megat	1575–1590
Kembalinya pemerintahan para raja		
13	Abdurrahman (Maharaja Dinda I)	1590–1630
14	Maharaja Lela I	1630–1650
15	Mahara Lela Bangsawan	1650–1675
16	Maharaja Lela Utama	1675–1686
17	Maharaja Wangsa Jaya	1686–1691
18	Maharaja Muda Lela	1691–1725
19	Maharaja Dinda II	1725–1750
20	Maharaja Lela Bungsu	1750–1775
21	Maharaja Lela II	1775–1798
22	Sayid Abdurrahman	1798–1822
23	Syarif Hasyim	1822–1828
24	Syarif Ismail I	1828–1844
25	Syarif Hamid	1844–1846
26	Syarif Jaafar	1866–1872
27	Syarif Abubakar	1872–1886
28	Tengku Sontol Said Ali	1886–1892
29	Syarif Hasyim II	1892–1930
30	Tengku Said Osman	1930–1941 pemangku sultan
31	Syarif Harun	1941–1946

PERCUT		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tuanku Jalaluddin	
2	Tuanku Tarim (Tarikh)	
3	Tuanku Malik	
4	Tuanku Sutan Syarif	
5	Tuanku Muhammad Daud	
6	Tuanku Matsyekh	
7	Tengku Bahri	
8	Tengku Muhammad Saleh	

SUKAPIRING		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Bagelit (Marah Sewah)	
2	Marah Umar	
3	Syahnabab	
4	Datuk Tajib	
5	Datuk Malat	
6	Pecah menjadi dua: Datuk Bagus di Kesawan dan Datuk Kahar di Kampung Baru	
7	Datuk Sri Bijaya	
8	Datuk Sri Pekerja Indra	
9	Datuk Ahmad Kamil Sri Andra Asmara	1923–

TAMBUSAI		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Mahyudin Raja Karang Bosa Rokan I (Jinaputra atau Muhammad Kahar)	
2	Zainal Raja Karang Bosa II	
3	Ahmad Raja Karang Bosa III	
4	Abdullah Raja Tambusai IV	
5	Syaifuddin	
6	Abdurrahman	
7	Duli Yang Dipertuan Tuo Raja Tambusai VII	
8	Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman Raja Tambusai VIII	
9	Duli Yang Dipertuan Yang Dipertuan Saidina Mukammil (Saidi Muhamil) Raja Tambusai IX	
10	Duli Yang Dipertuan Sakti Raja Tambusai X	
11	Yang Dipertuan Bosa Raja Tambusai XI	
12	Duli Yang Dipertuan Akhir Zaman II Raja Tambusai XII	
13	Duli Yang Dipertuan Jumadil Alam Raja Tambusai XIII (Abdul Hamid)	
14	Duli Yang Dipertuan Bosa II Maulana Abdul Wahid Raja Rantaubinuang XIV	
15	Yang Dipertuan Muhammad Soleh Raja Rantaubinuang XV	
16	Zainal Abidin	
17	Tengku H. Muhammad Sutan Muruhum Qahar Raja di Daludalu XVI	
18	Tengku Abdul Hamid Sultan Jumadil Alam Raja di Dalu-dalu XVII	
19	Tengku Haji Muhammad Silung Raja di Daludalu XVIII	
20	Tengku Muhammad Yudo Yang Dipertuan Bosa Raja di Daludalu XIX	
21	Tengku Haji Ilyas Tengku Silung Raja di Daludalu XX	

RAJA-RAJA DI TANAH BATAK

Raja-raja di Tanah Karo

BARUSJAHE[561]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Ompung Barus	
2	Pa Jambur Ligei	
3	Si Jambur Ligei	
4	Pa Tarejudi	
5	Si Tarejudi	
6	Sibayak Ampang	
7	Sibayak Gatar	
8	Sibayak Tanda Senina	
9	Sibayak Pa Unjuken dan Sibayak Pa Tempana (memerintah bersama)	
10	Pa Rajamantas dan Sibayak Pa Tempana (memerintah bersama)	Setelah 1916 Pa Rajamantas memerintah sendirian hingga 1929
11	Sibayak Garang Barus	1929–1937 pemangku raja
12	Sibayak Mandur Barus	1937–1946

KUTABULUH[562]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Sibayak Kuta Male	
2		
3		
4		
5	Sibayak Ajar Taki	
6		
7		
8	Sibayak Dalam	
9	Pa Nunggayang	
10	Sibayak Batir (Sibayak Pa Tolong) dan Sibayak Kumala (Sibayak Muda)	
11	Sibayak Nabung	
12	Sibayak Lit Malem	
13	Sibayak Rejin	1940–1946
Alternatif lain:[563]		
1	Sibayak Kuta Male	
2	Sibayak Kuta Buluh I	
3	Sibayak Kuta Buluh II	
4	Sibayak Kuta Buluh III	

561. Sumber: *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman jilid 3*, halaman 31–52.
562. Sumber: *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman jilid 3*, halaman 60-64.
563. Lihat Sejarah dan Kebudayaan Karo, halaman 135–163.

5	Sibayak Kuta Buluh IV	
6	Sibayak Pa Rolak	
7	Rolak (Sibayak Pa Nunggayang)	
8	Sibayak Ngalasi (Pa Jua)	
9	Sibayak Kumala (Sibayak Nguda)	
10	Sibayak Batiren (Pa Tolong)	
11	Sibayak Nabong	
12	Sibayak Lit Malem	
13	Sibayak A. Rejin	

LINGGA[564]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Raja	± abad 18
2	Ganci (Gancih) Raja, Katasenina, dan Pa Timbang Raja (memerintah bersama)	
3	Mariam, Rajakin, dan Timbangraja (memerintah bersama)	
4	Tempasraja dan Gunung (memerintah bersama)	
5	Paras, Laksa, dan Atuk (memerintah bersama)	
5	Rasingal (Pa Sendi), Pa Terang, dan Lambas (memerintah bersama)	Lambas berhenti tahun 1904 sehingga tinggal Rasingal dan Pa Terang yang memerintah
6	Rasingal (Pa Sendi)	Memerintah sendiri semenjak 1921 dan wafat pada 1934
6	Raja Kalelong (lahir ± 1900)	wafat tahun 1963

SARINEMBAH[565]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Si Pagit	
2	Si Ngobah dan Si Napa	Setelah Si Napa meninggal dunia, Si Ngobah menjadi satu-satunya raja Sarinembah, hingga 1923
3	Sibayak Elok	1923–1946

SUKA[566]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Mantangken	
2	Si Tindang	
3	Si Lige Ginting Suka Bere-Bere Sembiring Sinulaki	
4	Si Raja Negeri	
5	Si Renduh	

564. Sumber: *Sejarah Batak*, halaman 131 dan http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah2.htm (diunduh tanggal 29 Januari 2010).
565. Sumber: *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman jilid 3*, halaman 58–59.
566. Sumber: *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman jilid 3*, halaman 24–30.

6	Sibayak Biaknampe	
7	Sibayak Salangulah	
8	Si Tumpah (Sibayak Pa Nungsang)	
9	Pa Nimbak	1924–1926
10	Sibayak Ningguri	1926–
11	Sibayak Raja Sungkunen	–1946

Raja-raja di Tanah Simalungun

DOLOK (DOLOG) SILOU (SILO)		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tuan Horsik (Jigou)	
2	Tuan Sindarlela (Sibuangbuang)	

SILOU BUTTU (SILOU BOLAK)			SILOU DUNIA	
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tuan Hapoltakan (Raja Toriti)		Tuan Timbangraja	
2	Tuan Morahkalam		Tuan Rubun	
3	Tuan Moraijou (Morawijaya)		Tuan Bedarmaralam	
4	Tuak Saksaknijou		Tuan Rajomin	
5	Raja Jamera		Tuan Moraijou	
6	Tuan Naposo		Tuan Taring	

DOLOK SILOU		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Tuan Taring	
2	Tuan Lurni	
3	Tuan Tanjarmahei	1850–1912
4	Tuan Ragaim	1912–1942
5	Tuan Bandaralam	1942–1947

PANAI (PANEI)		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tuan Suha Bolak	
2	Marsita Juri (Parhuda Sitanjur)	
3	Raja Panei III	
4	Raja Panei IV	
5	Raja Panei V	
6	Raja Panei VI	
7	Raja Panei VII	
8	Raja Panei VIII	
9	Tuan Sarmalam	
10	Tuan Sarhalapa	
11	Tuan Jintama	
12	Tuan Jontama	±1870–1899

13	Tuan Jadiamat	1907–1920
14	Tuan Bosar Sumalam	1920–1946
15	Tuan Marga Bulan	1946

PURBA[567]		
No.	**Nama raja** **T= Singkatan dari Tuan**	**Tahun pemerintahan**
1	T. Pangultop Ultop	1624–1648
2	T. Ranjiman	1648–1669
3	T. Nanggaraja	1670–1692
4	T. Batiran	1692–1717
5	T. Bakkaraja	1718–1738
6	T. Baringin	1738–1769
7	T. Bona Batu	1769–1780
8	T. Raja Ulan	1781–1769
9	T. Atian	1800–1825
10	T. Horma Bulan	1826–1856
11	T. Raondop	1856–1886
12	T. Rahalim	1886–1921
13	T. Karel Tanjung	1921–1931
14	T. Mogang	1933–1947

RAYA[568]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tuan Si Pinang Sori	
2	Raja Raya Tuan Lajang Raya	
3	Raja Raya Simbolon	
4	Raja Gukguk	
5	Raja Unduk	
6	Raja Denggat	
7	Raja Minggol	
8	Raja Poso	
9	Raja Nengel	
10	Raja Bolon	
11	Raja Martuah	
12	Tuan Morahkalim	
13	Tuan Jimmahadim Tuan Huta Dolog	
14	Tuan Rondahaim (Tuanku Namabajan)	
15	Tuan Sumayan	
16	Tuan Gomok (Bajaraya)	
17	Tuan Yan Kaduk Saragih Garingging	1946 Terbunuh dalam revolusi sosial 1946

567. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Purba (diunduh tanggal 25 Desember 2009).
568. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Saragih (diunduh tanggal 25 Desember 2009).

SIANTAR[569]		
No,	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Namartuah Damanik (Puang Lima Parmata Tunggal, Raja Manualang, Datu Parmata Manunjung, Datu Parmata Manunggal, atau Datu Partiga-tiga-Sihapunjung)	
2	Raja Namaringis	
3	Raja Ramajim	
4	Raja Pagarujung	
5	Raja Nalongah	
6	Raja Nai Rih	
7	Raja Nai Horsik	
8	Raja Na Pitung	
9	Raja Namartuah	
10	Raja Saduraja	
11	Raja Namartuah	
12	Raja Sadurupa	
13	Raja Mapir (Raja Namatuah atau Nai Parsoburan)	±1850–±1880
14	Raja Sang Naualuh Damanik	1882–1904
	Tuan Marihat dan Tuan Sidamanik	Pemangku
15	Raja Riahkadim (Tuan Waldemar Tuhan Naga Huta)	1916–1930
	Tuan Sawadin Tuhan Bandar	Pemangku, 1930–1946

Sumber lain:

SIANTAR		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Raja Naihorsik	
2	Raja Hitam	
3	Raja Nai Halang	
4	Raja Namaringis	
5	Raja Namartuah atau Si Partiga-tiga (± 1860–± 1870)	
6	Raja Mopir atau Si Ali Urung (± 1870–± 1882)	
7	Sang Naualuh Damanik	1882–1904
8	Tuan Sidamanik dan Tuan Marihot	Dewan kerajaan
9	Tuan Waldemar Tuhan Naga Huta (Tuan Kadim)	1916–1930
10	Tuan Sawadin Tuhan Bandar	1930–1946

569. Urutan raja-raja ini berdasarkan silsilah dalam buku *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa,* halaman 36.

SILIMAKUTA		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Si Girsang (Datu Parulas)	
2	Raja Dungdung	
3	Raja Dingding	
4	Raja Guttar (gelar Parjolma Sappulu Onom)	
5	Pa Moreidup (Tuan Pamoraidup, gelar Tuan Nagasaribu) dan Pa Ngasami (Tuan Pangasami atau Tuan Siturituri)	–1932
6	Tuan Padi Raja	1934–1946

TANAH JAWA		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Muharaja	
2	Sorgalawan	
3	Djontaboelan	
4	Sorgahari	
5	Oesoel	
6	Djintanari	
7	Timboel	
8	Podang Rani	
9	Horpanaloean (Raja Maligas)	
	Tuan Sanggah Goraha	1907–1912
10	Tuan Jintar	1912–1917
	Puang Bolon boru Damanik	1917–1919
11	Tuan Sangmajadi	1919–1940
12	Tuan Kaliamsyah	1940–1946

Raja-raja di Bengkulu

ANAK SUNGAI & MUKO-MUKO		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tuanku Sungut	
2	Raja Itam	–1695
3	Gulemat dan Merah Bangun	Gulemat memerintah sendiri pada 1699
MENJUTO		
1	Tuanku di Bawa Pauk (Sultan Kecil Muhammad Syah)	1716–1728
MUKO-MUKO		
1	Merah Bangun (Sultan Gendam Mersah)	1728–1752
2	Pesisir Barat Syah	1752–1789
3	Hidayat Syah	1789–1828
4	Takdir Khalifatullah	1828–1870
5	Hidayat	1870–1888

DEPATI TIANG EMPAT		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Rajo Megat	1505–1550
2	Raja Mawang	1550–1600
3	Abdullah	1600–1640

SELEBAR		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Rangga Janu	1565–1638
2	Depati Bangsa Radin (Pangeran Nata Di Raja I)	1638–1710
3	Pangeran Intan Ali	1710–1720
4	Nata Di Raja II	1720–1762
5	Nata Di Raja III	1762–1765
6	Nata Di Raja IV	1765–1831
7	Nata Di Raja V	1831–1864

SUNGAI ITAM		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Senggaran Pati (Depati Bangsa Raja)	1650–1686
2	Raja Chalipa	1686–1740
3	Pangeran Bangsa Negara I	1750–1829
4	Pangeran Bangsa Negara II	1829–1862

SUNGAI LEMAU		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Baginda Maharaja Sakti	1625–1630
2	Baginda Sebayam (Tuan Pati Bangun Negara)	1650–1695
3	Depati Bangsa Raja	
4	Pangeran Mangku Raja	
5	Pangeran Muhammad Syah I	
6	Pangeran Lenggang Alam	1755–1833
7	Raja Putu Negara (Pangeran Muhammad Syah II)	1833–1861

SUNGAI SERUT (ULU BENGKULU)		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Ratu Agung	1550–1570
2	Anak Dalam	1570–1615

Raja-raja di Sumatera Selatan

JAMBI		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Tan Talanai	± 1400
2	Datuk Panduko Berhala dan Putri Selaras Pinang Masak	
3	Orang Kaya Pingai	± 1480–± 1490
4	Orang Kaya Kedataran	± 1490–± 1500
5	Orang Kaya Hitam	± 1500–± 1515
6	Pangeran Ilang di Aor (Panembahan Rantau Kapas)	± 1515–1540
7	Panembahan Rengas Pandak	1540–1565
8	Panembahan Bawa Sawo	1565–1590
9	Panembahan Kota Baru	1590–1615
10	Pangeran Keda (Sultan Abdul Kahar)	1615–1643
11	Pangeran Depati Anom (Sultan Agung Abdul Jalil)	1643–1665
12	Sultan Seri Ingologo	1665–1688

Jambi terpecah dua

	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
13	Pangeran Cakranegara (Sultan Kyai Gedeh).	1688–1696	Raden Jaelat (Sultan Seri Maharaja Batu)	1688–1720
14	Mohammad Syah	1696–1720 pemerintahan pertama		

Jambi bersatu lagi
Raden Jaelat menjadi raja seluruh Jambi

No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
15	Raden Jaelat (Sultan Seri Maharaja Batu atau Sultan Suto Ingologo)	1720–
16	Mohammad Syah	–1740 pemerintahan kedua
17	Istera Ingalaga	1740–1770
18	Achmad Zainuddin (Sultan Anom Seri Ingalaga)	1770–1790
19	Mas'ud Badaruddin (Sultan Ratu Seri Ingalaga)	1790–1811
20	Mohammad Mahidin (Mohildin atau Agung Seri Ingalaga)	1811–1821
21	Facharuddin	1821–1841
22	Abdulrachman Nazaruddin	1841–1855
23	Taha Safiuddin	1855–1858
24	Ahmad Nazaruddin (Ahman Nachruddin)	1858–1881
25	Mohildin	1881–1885
26	Zainuddin	1886–1899

PALEMBANG[570]		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Kiai Gede ing Suro Tuo	1552–1573
	Kiai Gede ing Suro Mudo (Kiai Mas Anom Adipati ing Suro)	1573–1590
	Kiai Mas Adipati	1590–1595
	Pangeran Madi ing Angsoko	1595–1629
	Pangeran Madi Alit	1629–1630
	Pangeran Sedo ing Puro	1630–1639
	Pangeran Sedo ing Kenayan	1639–1650
	Pangeran Sedo ing Pasarean	1651–1652
	Pangeran Sedo ing Rajek	1652–1659
Masa kesultanan		
1	Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam (Kiai Mas Endi atau Pangeran Ario Kesuma Abdurrohim)	1659–1706
2	Muhammad Mansur	1706–1714
3	Agung Komaruddin Sri Truno	1714–1724
4	Mahmud Badaruddin I	1724–1758
5	Ahmad Najamuddin I	1758–1776
6	Muhammad Bahauddin	1776–1803
7	Muhammad Badaruddin	1803–1812 pemerintahan pertama
8	Ahmad Najamuddin II	1812–1818
	Muhammad Badaruddin	1818–1821 pemerintahan kedua
9	Ahmad Najamuddin III	1821–1823

Raja-raja di Lampung

BUAY BEJALAN DI WAY[571]		
No.	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Umpu Bejalan di Way	
2	Ratu Tunggal	
3	Kun Tunggal Simbang Negara	
4	Ratu Mengkuda Pahawang	
5	Puyang Rakkian	
6	Puyang Raja Paksi	
7	Dalom Sangun Raja	
8	Raja Junjungan	
9	Ratu Menjengau	
10	Pangeran Siralaga	
11	Dalom Suluh Irung	
12	Pangeran Nata Marga	

570. Tahun pemerintahan bersumber dari buku *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II,* halaman 7- 8
571. Lihat http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

13	Pangeran Raja di Lampung	
14	Raden Intan (Pangeran Jaya Kesuma I)	
15	Kasim (Pangeran Paku Alam)	
16	Dalom Raja Kalipah (Pangeran Puspa Negara I)	
17	Ahmad Siradj (Pangeran Jaya Kesuma II)	
18	Abdul Madjid (Suntan Jaya Indra)-suami Siti Asma Dewi Gelar Ratu Kemala Jagat	
19	Suntan Jaya	
20	Azrim Puspa Negara (Pangeran Jaya Kesuma III)	
21	Selayar Akbar	

BUAY BELUNGUH[572]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Umpu Belunguh	
2	Umpu Kuning	
3	Pemuka Raja Anum	
4	Sang Hiang Raja Nukah	
5	Pangeran Jaya Kesuma	
6	Depati Bangsa Raja	
7	Pangeran Iro Belunguh	
8	Raja Mahkota Alam	
9	Batin Singa	
10	Raden Ngaih	
11	Keria Natar Kesuma	
12	Depati Pasirah	

BUAY NYERUPA[573]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Umpu Nyerupa	
2	Si Gajah gelar Ratu Piekulun Siba di Mesir	
3	Tjerana gelar Dalam Piekulun Siba di Room	
4	Si Gajah gelar Ratu Piekulun Siba di Mesir	
5	Tjerana gelar Dalam Piekulun Siba Dirandak	
6	Si Gajah Ratu Piekulun Siba Dimataram	
7	Melawan Pangeran Ratu Piekulun Siba di Mataram	
8	Si Rasan Piekulun Ratu di Lampung Siba di Banten	1737
9	Melawan Batin Junjungan Piekulun Ratu di Lampung	
10	Si Rasan Dalam Purbajang Piekulun	
11	Si Gajah Dalam Ratu Piekulun	
12	Tjerana gelar Ratu Piekulun	
13	Si Gajah Batin Mengoenang Piekulun Bala Seriboe	
14	Si Pikok gelar Dalam Piekulun	1849

572. Lihat http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.
573. Lihat http://www.buaynyerupa.blogspot.com/, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

15	Si Gajah Batin Piekulun	
16	Merah Hakim gelar Sultan Ali Akbar	1860
17	Marah Hasan gelar Sultan Ratu Piekulun	
18	Marah Hadis gelar Dalam Baginda Raja	
19	Saifullah Hakim gelar Sultan Akbar Syah (Almah Ratu dari Tenumbang)	
20	Salman Marga Alam gelar Sultan Piekulun Jayadiningrat	

BUAY PERNONG[574]		
No.	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Sultan Iskandar Zulkarnain	
2	Ratu Mumelar Paksi	
3	Ratu Ngegalang Paksi	
4	Ratu Buay Pernong	
5	Umpu Jadi	
6	Ratu Pangeran Semula Raja	
7	Umpu Selalau Sangun Guru	
8	Ratu Dipati Nyalawati	
9	Umpu Raja Sultan	
10	Umpu Raja Dunia	
11	Umpu Batin Susuhunan	
12	Umpu Batin Ratu	
13	Umpu Raja Dunia Muda	
14	Pangeran Singadiraja	
15	Pangeran Purba	
16	Pangeran Alip Jaya	
17	Pangeran Batin Sekehendak	
18	Pangeran Ringgau gelar Pangeran Batin Pasirah Purba Jaya Bindung Langit Alam Benggala (Sultan Kepaksian Pernong)	
19	Pangeran Haji Habiburrahman (Sempurna Jaya Dalom Permata Intan)	
20	Sultan Makmur Dalom Nata Diraja (Sultan Dalom Haji Merah Dani)	
21	Pangeran Suhaimi gelar Sultan Lela Muda Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi	
22	Pangeran Maulyana Balyan gelar Sultan Sempurna Jaya	
23	Pangeran Edward Syah Pernong gelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi	

574. Lihat http://sultanskalabrak23.blogspot.com/2008/12/naik-tahta.html, diunduh tanggal 31 Juli 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Drs. Ma'moen (ketua). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan–Bagian Proyek Inventarisasi & Pembinaan Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan, 1991/ 1992.

Abdullah, Prof. Dr. Hamid. *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, Grasindo, Jakarta 1991.

Abdullah, Taufik (ed.). *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Abidin, Prof. Mr. Dr. Andi Zainal. *Wajo' Pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara'*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

________, dibantu oleh: Sabang, Drs. Sudirman. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, Ujungpandang, 1999.

Adiningrat, KRAT. Mas'ud Thoyib. *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*.

Adjin, Abdul Hadi; Y. A. H., Salim; Sahib, Rosihan. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924–1950*, 1992.

Agung, Prof. DR. A.A. Gde Putra. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Agung, A.A. Gde Putra; Wirawan, A.A. Bagus; Sutjiatiningsih, Sri; Kuswiah, Wiwi (penyunting). *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi

Sejarah Nasional-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Direktorat Jenderal Kebudayaan-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999.

Ahmad, A. Samad. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1997.

Ahmad, Zakaria; Ibrahim, Muhammad; Sulaiman, Nasruddin. *Cut Nyak Meutia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1993.

Alisjahbana, Puti Balkis. *Natal Ranah Nan Data: Kisah Perjalanan Dilengkapi Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Daerah Natal*, Dian Rakyat, 1996.

Alkhajar, Eka Nada Shofa. *Pahlawan2 Yang Digugat: Tafsir Kontroversi Sang Pahlawan*, Penerbit Katta, Solo, 2008.

Alwi, Des. *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, Dian Rakyat, Jakarta, 2005.

Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2010.

Amran, Rusli. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

Amran, Rusli. *Padang Riwayatmu Dulu*, C.V. Yasaguna, 1988.

Anak Agung Gde Agung, Ide. *Bali in the 19th Century*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

________, *From The Formation of The State of East Indonesia Towards The Establishment of the United States of Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

________, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Andre, WP dkk. *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat,* Depbudpar, Pontianak, 2008.

Anonim. *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Ardhana, I Ketut. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Arfah, Muhammad; Amir, Muhammad; Alimuddin, Muhammad; Amin, Asmah; Ernawati, A; Rachmad, Nur Asia; Rosmiah, Andi. *La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang: Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Republik Indonesia,* diterbitkan: dengan biaya dana Inpres Daerah Tingkat-I Provinsi Sulawesi Selatan, 1997/ 1998.

Arifin, Winarsih Partaningrat. *Babad Blambangan*, Ecole Française de'Extrême-Orient & Yayasan Bentang Budaya, 1995.

Arsip Nasional. *Surat-surat Perdjanjian Antara Keradjaan-keradjaan Bali/ Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1811 s/d 1938*, Arsip Nasional, Jakarta, 1964.

Asba, A. Rasyid. *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

________, *Gerakan Sosial di Tanah Bugis: Raja Tanete Lapatau Menantang Belanda*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Aspar, Muhammad. *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2011.

Assegaff, A.S. *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, 1982

Azhari, Ichwan & Syafri, Syaiful. *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2009.

Azwar, Hj. Pocut Haslinda Muda Dalam. *Tun Sri Lanang: Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, Dewan Penerbit Yayasan Tun Sri Lanang, 2011.

Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, Badan Arsip Provinsi Jawa Timur, 2002.

Badan Perencana Pembangunan Daerah Wajo. *Spirit of Wajo*, Yayasan Penamas, 2000.

Banunaek, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Bell, Alexander Drs.(penanggung jawab); Widyatmika, Munandjar Drs. (ketua); Loimalitna, Chatarina SE. (sekretaris); Djukana, Vonny S.Sos (anggota); Otemusu, Simson (anggota); Paratu, Dorkas (anggota). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah, Nilai Tradisional - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinisi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Berg, H.J. van den; Kroeskamp, Dr. H.; Prijohutomo, Dr.; Simandjoentak, I.P. *Asia dan Dunia Sedjak 1500*, JB. Wolters, Jakarta, 1954.

Bigalke, Terance. W. *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, KITLV Press, Leiden, 2005.

Bilfaqih, H.S. Ali Amin. *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa*, C.V. Eka Jaya mandiri, Tarakan, 2006.

Bock, Carl. *The Head Hunters of Borneo: A Narrative of Travel Up the Mahakam and Down the Barito; also Journeyings in Sumatra*, Oxford University Press, 1985.

Bongenaar, Karel E.M. *De Ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indie: gedurende de Japanse bezeiting*, 2001.

Broersma, Dr. R. *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*, Boekhandel Cohen, Utrecht, 1925.

Budhisantoso, S.; Gani, Ambo; G.S., Husnah; B. Baco; Yunus, Ahmad. *Wasiat-wasiat Dalam Lontarak Bugis*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Bukhari, RA.; Burhan, Drs.; Kasman, Ir.; & Suhami, Drs. *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh, 2008.

Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP-PGRI) Pontianak, 2001.

Bunru, Drs. Baharuddin; Cakrawaty, Dra. Dian; Dra. Rusmini; Muhammading, Dra. Sahriah (editor). *Bendera Kerajaan Sawitto*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1995/ 1996.

Bustamam, Tengku Ferry. *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, ----

Chalik, Husein A (ketua); Bhurhanuddin, B.; Gonggong, Dr. Anhar. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984/ 1985.

Chambert-Loir, Henri. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Chamber-Loir, Henri; Abdullah, Massir Q.; Oman Fathurahman, Suryadi; Maryam Salahudin, Siti. *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, KPG, Jakarta, 2010.

Crawfurd F.R.S., John. *History of the Indian Archipelago*, *vol III*, Archibald Constable and Co., Edinburgh, 1820.

Creese, Helen; Putra, Dharma; & Nordholt, Henk Schulte (ed.). *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Cribb, Robert. *Historical Atlas of Indonesia*, Curzon Press, 2000.

Da Gomez, E. P. & Mandalangi, Oscar P. *Don Thomas Peletak Dasar Sikka Membangun*, Yayasan Pendidikan Thomas (Yapenthom), Maumere, 2003.

Damanik, Jahutar. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, Medan, 1987.

________, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, bekerja sama dengan P.D. Aslan, 1974.

Damayanti, Desi & Atmoko, Rudi. *Mengenal Pahlawan Bangsa: Sejarah Perjuangan & Kisah-kisah Kehidupan Mereka*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.

Davidson, Jamie S.; Henley, David; dan Moniaga, Sandra. *Adat Dalam Politik Indonesia*, KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

________, *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

________, *Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

________, *Lontarak TellumpoccoE*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

________, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

________, *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.

________, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984.

________, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

________, *Sejarah Daerah Lampung*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

________, *Sejarah Daerah Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

________, *Sejarah Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.

________, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 1996/ 1997.

________, *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

________, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/ 1979.

________, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusatenggara Timur*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah–Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978/ 1979.

________, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

________, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

________, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1977/ 1978.

________, *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

________, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

________, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah Nusa Tenggara Timur, 1979/ 1980.

________, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

________, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

________, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

________, *Syair Sultan Mahmud*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990.

________, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

________, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

Detaq, Aco. *Memperkenalkan Kota Kupang*, tanpa penerbit, 1972.

Detaq, Yakob Y. *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, Penerbit Nusa Indah, Flores, 1973.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Sistem Kemasyarakatan/ Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Sikka*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

________, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

Djajadiningrat, Hoesein. *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Djelenga, Ir. H. Lalu. *Keris di Lombok*, Yayasan Pusaka Selaparang, Mataram, Lombok, 2000.

Doko, I.H. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, Balai Pustaka, Jakarta 1981.

________, *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Drakard, Jane (penyunting). *Sejarah Raja-raja Barus: Dua Naskah dari Barus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Dwinanto, Djoko. *Perang Kusamba*, Balai Pustaka, 2007.

Dwiyanto M.Hum, Drs. Djoko. *Ensiklopedi Serat Centhini*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

________, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangannya*, Paradigma Indonesia, 2009.

Emanuel; Dyson, Laurentius; dan Matius, Paulus. *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, Citra Wacana, 2012.

Gayo, M.H. *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda*, P.N. Balai Pustaka, 1983.

Geschiedenis van Nederlandsch Indië, NV. Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel", Amsterdam 1938. Deel I: DR. A.N.J. Thomassen A Thessink van Der Hoop, Prof DR. N.J. Krom, & R. A. Kern; Deel II: Prof DR. C.C Berg, C. Wessels S.J. & DR. H. Terpstra.

Gomang, Drs. H. Syarifuddin; Hons, MA; Widiyatmika, Drs. Munandjar; Luth, Prof. Dr. Thohir. *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, JP. Books, Surabaya, 2008.

Gonggryp, G.F.E. *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1934.

Gouda, Dr. Frances. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900–1942*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.

Groeneveldt, W.P. *Nusantara Dalam Catatan Tionghua*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Guillot, Claude. *Banten Sejarah dan Peradaban (Abad X–XVII)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Haga, Dr. B.J. *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.

Hägerdal, Hans. *Kerajaan2 Indonesia: An alphabetic enumeration of the former princely states of Indonesia, from the earliest time to the modern period, with simplified genealogies and order of succession*, manuskrip yang tidak diterbitkan.

Hamkaz, Ismail. *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, 2000

Hanna, Willard A. & Alwi, Des. *Turbulent Times Past in Ternate and Tidore*, Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira, 1990.

Hanna, Willard Anderson. *Bali Profile: People, Events, Circumstances (1001–1976)*, American Universities Field Staff, New York, 1976 (reprinted by Rumah Budaya Banda Naira, 1990).

Harahap, E.St. *Perihal Bangsa Batak*, Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan - Dep. P.P. dan K., Jakarta, 1960.

Harahap SH., H. M. D. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1986.

Harahap, Parada. *Toradja.* N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, 1952.

Hardjasaputra, Sobana A. *Bupati di Priangan: Kedudukan dan Peranannya pada abad ke-17–19* dalam Seri Sundalana, Pusat Studi Sunda, Bandung, 2004.

Hasan; Darwis; Mahdi, Syakir; Haliadi. *Sejarah Poso*, Tiara Wacana, Yogya, 2004.

Hasan M. Hum, Drs.; Nuraedah S.Pd, M.Pd; Lumangino, Wieman Darsono S.Pd. *Sejarah Tojo Una-Una*, Penerbit Ombak, 2006.

Hasan, Sabriah. *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Heidhues, Mary Somers. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*, Yayasan Nabil, 2008.

Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, Kepustakaan Populer Gramedia; École française d'Extrême-Orient; STAIN Pontianak; & KITLV - Jakarta, 2010.

Heuken SJ, Adolf. *Be my Witness to the Ends of the Earth!: The Catholic Church in Indonesia before the 19th Century*, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2002.

Hisyam, Muhammad. *Sayyid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan*. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1983.

Hugronje, Snouck C. *Tanah Gayo dan Penduduknya*, INIS, Jakarta, 1996.

_________, *De Atjehers*, Batavia Landsdrukerij, 1893 (Terjemahan Inggris: *The Achehnese*, terjemahan A.W. S. O'Sullivan, Late E. J. Brill, Leyden, 1906).

_________, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1896–1936: Seri Khusus Inis jilid V*, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1991.

Husny, Tengku H.M. Lah. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1978.

Inglin, Flora. *UluMahakam: dari Long Iram sampai Long Apari: Riwayatmu Doeloe, Kini dan Esok*, CV. Sendawar Ayumas, 2005.

Ismail, M. Hilir. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Penerbit Lengge, Mataram, 2004.

Jonge, JHR. Mr. J. K. J. de. *De Opkomst van Het Nederlandisch Gezag in Oost Indie (1595–1610)*, 's Gravenhage, 1864.

Juniarti. *Raja Banawa Dari Belanda: Elite dan Konflik Politik Kerajaan Banawa 1888–1942*, Intra Pustaka Utama, Semarang, 2004.

Juwono, Harto & Hutagalung, Yosephine. *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, Ombak, 2005.

_________, *Tiga Tungku Sejarangan: Sejarah Kesultanan Indragiri Sampai Peristiwa 5 Januari 1949*, Ombak, 2006.

Kalimati, Wahyu Sunan. *Pilar-pilar Budaya Sumbaya*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, 2005.

Kam Hing, Lee. *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760–1824*, Oxford University Press, 1995.

Kana, Nico L. *Dunia Orang Sawu*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Kartadarmadja, Soenyata Drs. M (editor) & Kutoyo, Sutrisno (editor). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/ 1979.

Katoppo, E. Nuku: *Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makassar, 2004.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Kalimantan*, Kementerian Penerangan.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Sumatra Tengah*, Kementerian Penerangan.

Kertawibawa, Besta Besuki. *Pangeran Cakrabuana: Sang Perintis Kerajaan Cirebon*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2007

Kesuma, Andi Ima. *Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor*, Ombak, 2004.

Keuning, J. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17*, Bhratara, Jakarta, 1973.

Kila, Drs. Syahrir; Amir, Drs. Muhammad; Sarapang SS, Simon S. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata - Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan - Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2004.

Koentjaraningrat (red.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

Koestarta, Drs. Tarib (koordinator); Finandar, Drs. Fidy; ARS, M. Noor; Ahmad, Hasjim; Hanan, Drs. Sjahrial. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/ 1984.

Kolit, D.K. *Pengaruh Majapahit atas Kebudayaan Nusa Tenggara Timur*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Komando Resor Militer 121/ABW, Komando Distrik Militer 1206, *Sejarah Berdirinya Kota Putussibau yang Diawali dari Berdirinya Kerajaan Bunut,* Putussibau, 2006.

Kol, H.H. van. *Driemaal Dwars Door Sumatra En Zwerftochten Door Bali*, W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1914.

Kotten, BK.; Tukan, Beni; Kopong, Elias; Zesi, A.M.; Kotten, Domi D. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan–Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990–1991

Kozok, Uli. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja XII*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Kuntowijoyo. *Raja Priyayi dan Kawula*, Ombak, Yogyakarta, 2006.

Kurniawan, Dwi Mixa. *Maluku Negeri Para Raja*, PT. Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta, 2010.

Kutoyo, Sutrisno, dkk. (penyunting). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya–Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisinoal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Lahajir. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*, Galang Press, Yogyakarta, 2002.

Lapian, Adrian B. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Komunitas Bambu, 2008.

_________, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Latif, Abd. *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, Penerbit Ombak, 2014.

Leirissa, R. Z. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Balai Pustaka, 1996.

Lembaga Adat Nagari Talu. *Adaik Salingka Nagari Talu*, edisi I, 2008.

Lewis, E.D. & Mandalangi, Oscar Pareira (editor dan penerjemah). *Hikayat Kerajaan Sikka: Edisi Gabungan dari Dua Tulisan Tangan Tengang Sumber dan Sejarah Kerajaan Sikka oleh Dominicus Dionitius Pareira Kondi dan Alexander Boer Pareira*, Penerbit Ledalero, Maumere, 2008.

Locher-Scholten, Elsbeth. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830–1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Banana, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris, berjudul: *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907*).

Loebis, Parlindoengan. *Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi NAZI: Autobiografi Parlindoengan Loebis*, Komunitas Bambu, Depok, 2006.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid 3): Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

________, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008.

Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I Kalbar, 1975.

Lubis, Mhd. Arbain. *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, 1993.

Lubis M.S., Dr. Hj. Nina H. dkk. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, Alqaprint, Bandung, 2000.

Lufti, Drs. Muchtar; M S, Drs. Suwardi; Syair, Drs. Anwar; Amin, Drs. Umar. *Sejarah Riau*, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1977.

Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilas*,---------

Mahid, Syakir; Sadi, Haliadi, dan Darsono, Wilman. *Sejarah Kerajaan Bungku*, Penerbit Ombak, 2012.

Makkulau, M. Farid W. *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2008.

Manca, Lalu. *Sumbawa pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah*, Penerbit Rinta, Surabaya, 1984.

Mansoer, Drs. M.D.; Imran, Drs. Amrin; Safwan, Drs. Mardanas; Idris, Dra. Asmaniar Z.; Buchari, Drs. Sidi I. *Sedjarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.

Mangkuto, H.A. Dt. Rajo. *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Sejarah dan Tambo Adatnya*, Taushia, 2010.

Manyambeang, A. Kadir. & Mone, Abd. Rahim. *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo),* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1979.

Mappangara, Suriadi. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.

Mappasanda, H.A.M. (penerjemah). *Kerajaan Luwu: Catatan Gubernur Celebes 1888 D.F. van Braam Morris*, Toaccae Publishing, Makassar, 2007.

Marihandono, Djoko & Juwono, Harto. *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*, Banjar Aji, Yogyakarta, 2008.

Marsden, William. *Sejarah Sumatra*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris).

Matulada. dkk. (ed.). *Sawerigading*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990.

Maulana, Andi Munir, SH. *La Maddukelleng: Sultan Pasir, Arung Peneki, Arung Siengkang, Arung Matoa Wajo XXXI*, Lamacca Press, 2003.

Mboi, Ben. *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2011.

Melamba, Basrin. *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk bone, 1906–1942*, Pustaka Larasan, 2011.

Meuraxa, Dada. *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Pustaka Sedar, Medan, 1956.

Mirsha, Drs. I Gusti Ngurah Rai (koordinator); Parimartha, Drs. I Gde; Rama, Drs. Ida Bagus; Sukiada, Drs. I Nyoman; Ardhana, Drs. I Ketut; & Eddy, Drs. I Wayan Tagel. *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok Sampai Revolusi Fisik di Bali (1907–1950),* Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, 1989.

Moedjanto M.A., Drs. G. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755–1992*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Moestadji BA., H. Mohammad & Hadidjah HS., Hj. Didik. *Perjuangan Rakyat Madura dari Daerah RI ke Daerah RI*, Agung Karya Perkasa, Surabaya, 2003.

Mu'jizah. *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Mukhlis (editor). *Dinamika Bugis-Makassar*, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu sosial dan YHS.

Munandar, Agus Aris. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14–19*, Komunitas Bambu, 2005.

Munoz, Paul Michel. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah–Abad XVI)*, Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta, 2009 (terjemahan dari *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Penisula*, Editions Didier Millet, 2006).

Musa, H. Abd. Gaffar, Taufik, M., Agussalim, Musyawir. *Iyanae Paoda Adaengngi Attoriolonggne ri Tanete (Sejarah Kebudayaan Tanete)*, Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1990.

Napitupulu, S.P., Sanusi, Sidabutar S., Lubis, Mukti. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1991.

Nordholt, Henk Schulte, *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650–1940*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Noresah bt. Baharom, BSc (Ketua Editor). *Kamus Dewan: Edisi Keempat*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2010.

Noor, H. Muhammad. Calon *Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur: Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*.

Nooy-Palm, Hetty. *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde 87, jilid 1, The-Hague-Martinus Nijhoff, 1979.

Ointoe, Reiner Emyot, & Mokodampit, M. Firasat. *Bolaang Mongondow: Etnik, Budaya dan Perubahan*, Yayasan Bogani Karya & Pemda Kabupaten Boolang Mongondow, 1996.

P. Mukhlis; Poelinggomang, Edward; Kallo, Abdul Majid; Sulistio, Bambang; Thosibo, Anwar; Maryam, Andi. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1995.

Palar, H.B. & Anes, L.A. Minahasa: Sejarah dan Derap Langkahnya Menuju Kemerdekaan Indonesia, Tarsius Celebes, Manado, 1994.

Pangeran Haji Muda Indra Sri Negara, gelar Pangeran Bendahara. *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*, Majelis Pemangku Keraton Selimbau Darussalam, 2004/ 2005.

Panghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985.

Panitia Seminar Sejarah Lounusa Maatita di Amahai, *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, manuskrip tidak diterbitkan.

Parera, A.D.M. *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor: Suatu Kajian atas Peta Politik Pemerintahan Kerajaan-kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994.

Patiara, Drs. John; Renwarin, Drs. Herman; Soedharto, Drs. Bondan; Palangan, M. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.

Pattipeilohy, J.J. SH. *Arsitektur Tradisional Masyarakat Ohirata*,--

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta Paris, Jakarta, 2006 (terjemahan Indonesia dari *The Bugis*, Oxford Blackwell Publishers Ltd, 1996).

Pelzer, Karl J. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang. *Kupang dari Masa ke Masa*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Tanjungpinang: Land of Malay History*, Pemerintah Kota Tanjungpinang - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006.

Perret, Daniel. *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta 2010.

Pik Tjoe, Tan. *Madoera en zijn Vorstenhuis*, Boekhandel Kolf,-----

Poelinggomang, Edward L. *Kerajaan Mori, Sejarah dari Sulawesi Tengah*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008.

________, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed & Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia III*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

________, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

________, *Sejarah Nasional Indonesia V*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Praja, Putra. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, manuskrip tidak diterbitkan.

Prinst SH., Darwan dan Prinst SH., Darwin. *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, Yrama.

Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali. *Sejarah Perang Jagaraga*, Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali, tahun 1980/ 1981.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1978.

Purba SH., D. Kenan & Poerba, Drs. J.D. *Sejarah Simalungun*, Bina Budaya Simalungun, Parsadaan Ni Purba Pak-pak, Boru Pakon Panagolan, Jakarta, 1995.

Purba Tambak, Drs. Herman. *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, Edisi Kedua, Pematang Siantar, 2008.

Purwadi, M. Hum, Dr. *The History of Javanese Kings: Sejarah Raja-raja Jawa*, Ragam Media, 2010.

Purwadi, M. Hum, Dr. & Dwiyanto, Drs. Djoko. *Kraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesustraan, dan Kebudayaan,* Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Pustaha Panei Bolon.

Putra, Heddy Shri Ahimsa. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gajah Mada University Press, 1988.

Putro, Brahma. *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, Penerbit Ulih Saber, Medan, 1995.

Raba, Manggaukang. *Fakta-fakta Tentang Samawa*, Yayasan Pemuda Kreatif Sumbawa–KASA Indoneisa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, 2002.

Rahman, Drs. Ansar; Achmad, H. Ja'; Muhadi. *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, Pemerintah Kota Pontianak, 2000.

Ranawidjaja, Mr. Usep. *Swapradja: Sekarang dan dihari Kemudian*, Penerbit Djambatan.

Rapi, H. Ahmad Massiara Daeng. *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan*, Lembaga Penelitian & Pelestarian Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan dari Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1988.

Rauf, Prof. Dr. H. La Ode Abdul. *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Resink G.J. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.

Rifai, Mien A. *Lintasan Sejarah Madura*, Yayasan Lebbur Legga, Surabaya 1993.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, NR Publishing, Yogyakarta, 2007.

Rizal, Hannabi; Tika, Zainuddin; & Syam, M. Ridwan. *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1 dan 2, Pustaka Refleksi, Makassar, 2007.

Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, LKiS, Yogyakarta, 2006 (judul asli: *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Cornell University Press, 1995).

Ruchiat, Rachmat. *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*, Masup Jakarta, 2011.

Rudyansjah, Tony. *Kekusaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Sagimun, M.D. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.

Said, Mohammad. *Atjeh Sepandjang Abad*, diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961.

Said, Moehamad. *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Keradjaan-Keradjaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, N.V. Handelmaatschappij en Drukkerij "Sinar Deli", Medan, April 1937.

Said, H. Mohammad. *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912–1932*, UI-Press.

Saleh. Idwar M. *Pangeran Antasari*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1993.

Salim, Syahbuddin. *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983.

Salindeho, Winsulangi & Sombowadile, Pitres. *Kawasan Sangihe–Talaud–Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, Fuspad, Jogja, 2008.

Samin, Prof. Suwardi M, dkk. *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006

Samingoen, Ir. Sampoerno (pengantar). *Album Arsitektur Tradisional Aceh. Sumatera Barat. Sulawesi Selatan, Nusatenggara Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Media Kebudayaan, 1983/1984.

Samroni, Imam; Astiyanto, Heniy; Sugiarto, Toto; Ebo, Kurnia; Munarsih; Rudi; Hananti, Hilda; Yusdani; Megandaru; Sukatmi; Yuliani; Sulistyorini, Dyah;

Soekirman; Junita, Dewi. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*, Pura Pustaka Yogyakarta, 2010.

Sangti, Batara. *Sejarah Batak*, Karl Sianipar Company, Balige, 1978.

Schoorl, Pim. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton,* Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Sedyawati, Edi & Zuhdi Susanto (penyunting). *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Sellato, Bernard. *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000, Center* for International Forestry Research, Jakarta, 2001.

Setiyanto, Agus. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Siddik, Prof. Dr. H. Abdullah. *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, Balai Pustaka, 1996.

Sidemen, Ida Bagus. *Nilai Historis Uang Kepeng*, Larasan–Sejarah, Denpasar, 2002.

Sinaga, Rosmaida & Syukur, Abdul. *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, Ruas, 2013.

Sinar, Tengku Luckman. *Sari Sejarah Serdang 1*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

________, *Sari Sejarah Serdang 2*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

________, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, Kesultanan Negeri Serdang, 2001.

Sitonda, Mohammad Natsir. *Sejarah Massenrempulu jilid 1*, Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012.

Situmorang, Sitor. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII–XX*, Komunitas Bambu, Jakarta 2004.

Soebandi, Jro Mangku Gde Ktut. *Mengenal Leluhur dari Dunia Babad*, Penerbit BP, Denpasar. 1998.

Soejono, Imam. *Yang Berlawanan*, Resist Book, Yogyakarta, 2006.

Soelarto, B. *Sekitar Tradisi Ternate*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ---

Stuart-Fox, David J. *Pura Besakih: Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2010.

Stutterheim, Dr. W. F. *Het Hinduisme in de Archipel*, seri *Cultuurgeschiedenis van Indonesie II*, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta, 1951.

Sudrajat, M. Usep, & Ardi, Toni. *Atlas Lengkap Kabupaten Sumedang*, CV. Sudrajat & CV Cintya Group, 2013.

Sueta, Drs. I Wayan. *Babad Ksatrya Taman Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1992.

Suhusilawane, Dra. Florence, et.al. *Sejarah Kerajaan Kisar*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.

Sulendraningrat, P.S. *Sejarah Cirebon*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Sunardjo SH., RH. Unang. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983.

Suny, Prof Dr. Ismail. *Bungai Rampai Tentang Aceh*, Penerbit Bhratara Karya Askara, Jakarta, 1980.

Supit, Bert. *Minahasa*, Sinar Harapan, 1986.

Suprayitno. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2001.

Sutaba, I Made; Astawa, Anak Agung Gede Oka; Wirawan, Anak Agung Bagus. *Sejarah Gianyar Dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, Pemerintah Kabupaten Gianyar-Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007.

Suyanto, Sunar Tri. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Surakarta Hadiningrat*, Tiga Serangkai, Solo, 1985.

Syahzaman & Hasanuddin. *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, Romeo Grafika, Pontianak, 2003.

Tajabu, A. *Riwayat Benteng Otanaha, Otahiya, dan Ulupahu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1986.

Tambak, T.B.A. Purba. *Sejarah Simalungun*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Tamburaka, M.A., Prof. DR. H. Rustam E, et. al. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun* (Cetakan Kedua), Unhalu Press, 2010.

Tangke, W. Wanua dan Nasyaruddin, Anwar (editor). *Orang Soppeng Orang Beradab: Sejarah, Silsilah Raja-raja, Obyek Wisata*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2006.

Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.

Tasrif S.H., S. *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, Balai Buku Media, Djakarta, 1966.

Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Selatan, Palembang, 1981.

Terombo Siri Kerajaan Tambusai dari Ibu Tengku Dini (www.TengkuDini.com).

Tim Bali. *Islam Masuk Jembrana*, PT. Karya Unipress, 1984.

Tim Sejarah Yayasan Kerti Budaya (Drs. A.A.N. Putra Darmanuraga-penulis utama). *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, 2011.

Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *Cerbon*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta 1982.

Tjandrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Tobing, Adniel L. *Sedjarah Si Singamangaraja I-XII*, Toko Buku & Co. Penerbit Mutiara, Tarutung, 1951.

Tjokrowinoto, Prof. Drs. H. Sardanto. *Sejarah Hari Jadi Kota Semarang: Edisi Revisi*, Wisma Tjakrawinatan, Semarang, 2004.

Umberan, Musni; Nurcahyani, Lisyawati; Purba, Juniar; Hendraswati. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1994.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional. *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Untoro, Heriyanti Ongkodharma, *Kapitalisme Pribumi Awal: Kesultanan Banten 1522–1684*, Komunitas Bambu, 2007.

Usfinit, Alexander Un. *Maubes Insana: Salah Satu Masyarakat di Timor dengan Struktur Adat yang Unik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Usman, Syafaruddin & Din, Isnawita. *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Media Pressindo, 2009.

Usman, Syafaruddin. *Dari Koubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 2010.

________, *Landak Dibalik Nukilan Sejarah*.

Utomo, Mulyanto; Susilo, Wahyu; & Achmadi, Farid. *Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*, PT. Aksara Solopos, Solo, 2004.

Utrecht, Dr. E. *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Penerbitan Sumur Bandung, 1962.

Van Bemmelen, Sita & Raben, Remco (penyunting). *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Veth, P. J. *Borneo's Wester Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch Voorafgegaan der Eene Algemeene Sehets des gansehen Eilands* (jilid 1 dan 2), Zalbommen Joh. Noman en Zoon, 1854.

Vlekke. Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2008 (Terjemahan dari: *Nusantara: A History of Indonesia*).

Wahl, S.L. van der. (penyunting). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942*, Penerbit Djambatan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Wallace, Alfred Russel. *Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009 (terjemahan bahasa Inggris dari *The Malay Archipelago. The Land of the Orang-utan and the Bird of Paradise. A Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature*, Macmilland and Company, London, 1869).

Wani, Drs. Yusuf A.; Ansyori, M. Nur; Ismail, M. Yusuf; Balip, A. Gopar. *Batanghari Sembilan dari Abad ke Abad*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1980.

Widyatmika, Munandjar. *Syarif Abdurahman bin Abubakar Algadrie Pendiri Kota Waingapu*, Pusat Pengembangan Madrasah, Kupang, 2005.

________, *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, Pusat Pengembangan Madrasah NTT, 2007.

Willink, H.D. Tjeenk. *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*, Harlem, 1883.

Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. 4th ed.

Wiryawan, Hari. *Mangkunegoro VII & Awal Penyiaran Indonesia*, LPPS, Solo, 2011.

Wiryoprawiro, Zein M. *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*, Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP ITS Surabaya, 1986.

Wolf, Charles Jr. *The Indonesian Story: The Birth, Growth, and Structure of Indonesian Republic*, John Day Company, New York, 1948.

Yamin, Muhammad. *Atlas Sedjarah*, Djambatan, 1956.

Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, *Babad Buleleng*, Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, 1974.

Yudoseputro, Wiyoso. *Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama*, Yayasan Seni Visual Indonesia, 2008.

Yusuf, Drs. Tayar; Effendy, Drs. Rousman; Kutoyo Sutrisno. *Sejarah Sosial Daerah Lampumg:Kotamadya Bandar Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984/1985.

Zahari, A.M. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) III*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

Zaman, Kahrul. *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934: Perjuangan Sebuah Negeri yang Berdaulat untuk Memenuhi Kehendak Rakyat*, Maharani Persada, Mataram, 2005.

Zuhdi, Susanto (penyunting). *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.

Zuhro, R. Siti, dkk. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Penerbit Ombak, 2009.

Zulkarnain, Drs. H. Iskandar (ketua). *Sejarah Sumenep*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.

ARTIKEL, JURNAL, & TESIS

Achyan, Drs. Ade Djamadin. *Aji Melayu: Pendiri Kerajaan Sintang dan Perkembangan Sejarah Kerajaan Melayu di Kabupaten Sintang*, makalah seminar di Hotel Holiday Inn, Kuching, Sarawak, 22-24 Agustus 2006.

Caldwell, I & Bougas, W. of *The Early History Binamu and Bangkala*, South Sulawesi dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 160 (2004), no: 4, Leiden, 456-510 (didownload dari http://www.kitlv-journals.nl).

Suryadi. *Sepucuk Surat dari Seorang Bangsawan Gowa di Tanah Pembuatan (Ceylon)* dalam Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, vol. 10 No.2, Oktober 2008, halaman 214–245, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Mansoben, Johszua Robert. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*, tesis doktoral di Rijkuniversiteit te Leiden, 14 Juni 1994.

Mattulada, Prof. Dr. H.A. *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia, no. 48 th XV Januari April 1991, halaman 133–156, Jurusan Antropologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Okushima, Mika. *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 20 (2002).*

________, *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 21 (2003).*

Schapper, Antoinette. *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor* dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, XXXIX, 1897.

SURAT KABAR

Geger Pakualaman Mencuat Kembali, *Jawa Pos*, 19 Oktober 2009, halaman 11.

Penobatan, Sultan Deli XIV Isap Permen, Jawa Pos, 23 Juli 2005, halaman 1.

Permaisuri Jogja Bacabub Bantul, Jawa Pos, 19 Oktober 2009, halaman 11

Raja Minta Diikutsertakan Pembahasan RUU Hukum Adat, Suara Merdeka, 8 Agustus 2009, halaman 2.

Raja Jogja Tak Harus Sultan: Hamengkubuwono X Bicara Suksesi Kraton, Jawa Pos, 14 Mei 2010, halaman 16.

Raja Kembar Keraton Solo Berakhir, Jawa Pos, 21 Mei 2012, halaman 3.

VCD

Situs-situs Tiga Kerajaan Besar yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan: Amanatun (Onam), Amanuban (Banam), dan Mollo (Oenam), Hasta Community–dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek.S.T., M.T.

WEBSITE

http://www.kitlv-journals.nl/

http://kitlv.pictura-dp.nl/

http://www.kutaikartanegara.com

http://kerajaan-indonesia.blogspot.com

http://www.sultanpalembang.com

http://www.kesultananasahan.com/

http://melayuonline.com/?lang=Indonesia

http://pagatan.co.cc/sejarah-kerajaan-tanah-bumbu

http://www.royaltimor

http://www.sidrap.go.id/

http://pinrangkab.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=10

http://pangkep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=68

http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/04/roborob.html

http://pontianakonline.com/

http://www.sumbawanews.com/berita/photo/perjalanan-ke-sumbawa-23-keris-pedang-kerajaan-sumbawa.html

http://www.dompu.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=103&Itemid=104

http://mandar.web44.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1

http://www.polewalimandarkab.go.id/index.php?jenis=content&id=202

http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/album/144#9.JPG

http://east-borneo.co.cc/general/50-history

http://peusangan.wordpress.com/2008/12/01/the-history-of-uleebalang-keudjroeen-peusangan-bag-terakhir/#comment-260

http://beritasore.com/2007/05/22/titah-raja-raja-untuk-amandemen-uud-45/

epress.anu.edu.au/austronesians/sharing/pdf/ch08.pdf

http://epress.anu.edu.au/austronesians/precedence/mobile_devices/index.html

http://kratonsurakarta.com/pakubuwono1.shtml

http://thetidung.blogspot.com/

http://www.thefreelibrary.com/Abang+in+the+middle+and+upper+Kapuas%3a+additional+evidence.-a0166350035

http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=117

http://kerajaanbanjar.wordpress.com/silsilah-anak-sultan/

http://www.guide2womenleaders.com/indonesia_substates.htm

http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t16300.html

http://www.inimaumere.com/2008/10/kerajaan-nita.html

http://www.inimaumere.com/2008/04/don-thomasketurunanpendidikan-dan.html

http://iimanda.multiply.com/journal/item/2/Kerajaan_Kotawaringin_Yang_Pertama

http://jalian.wordpress.com/2008/02/18/peranan-keturunan-sultan-kotawaringin-di-beberapa-bidang-sebelum-dan-sesudah-tahun-1950-an/

http://www.bongkar.co.id/khas-kaltim/cerita-khas-johansya-balham/850-sambaliung-berontak.html

http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html

http://sumedanglarang.blogspot.com/

http://anakgununglakaan.blogspot.com/

http://www.gatra.com/artikel.php?id=23352
http://www.myheritage.com/site-50124411/kerajaan-bone-web-site
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-tanah-hitu.html
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-pagatan.html
http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4426&Itemid=9
http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=sejsobe
www.geocities.com/konferensinasionalsejarah/didik_prajoko.pdf
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1840.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1900.htm
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/35387
http://www.putralangkat.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kingdom-manganitu-kauhis.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html
http://www.mandailing.org/ind/asal-ren2.html
http://aneukcotirie.blogspot.com/2009/02/teuku-panglima-maharaja-tibang-muhammad.html
http://nazarmargolang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=85
http://www.pinatih.org/category/sejarah
http://www.semestaindonesia.com/cbn/?p=2404
http://www.karoweb.or.id/page/3/
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah1.htm
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah2.htm
http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16#
http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=news.detail&id_news=22

http://buol.org/bole/node/1
http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja
http://belitungkab.go.id/module.php?id=sejarah1
http://frirac.multiply.com/journal
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3027
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/12/02424075/batas.keraton.majapahit.harus.segera.ditentukan
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=30034
http://www.antaranews.com/print/?i=1185687059
http://forum.detik.com/showthread.php?p=2529504
http://sinagaeone.blogspot.com/
http://rajasamusamuvi.blogspot.com
http://en.rodovid.org/wk/Person:305400
http://www.buaynyerupa.blogspot.com/
http://sultanskalabrak23.blogspot.com/2008/12/naik-tahta.html
http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-suhaimi.html
http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-maulana-balyan.html
http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/
http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/
http://melayuonline.com/ind/history/dig/409
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#W.C5.82adcy_Attinggoli
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#Kr.C3.B3lowie_Suwawy
http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/sejarah-kerajaan-karangasem.html
http://www.ubb.ac.id/featurelengkap.php?judul=Menguak%20Sejarah%20Di%20Pulau%20Belitung%20%28Belitong%20/%20Biliton%29&&nomorurut_berita=109
http://manukallodanga.wordpress.com
http://khuzmayudi.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-mula-nama-kotabaru-tanah.html

RIWAYAT HIDUP

Ivan Taniputera dilahirkan pada 1974 di Semarang, Jawa Tengah. Seselesai pendidikan SMA pada 1992, setahun kemudian ia melanjutkan studinya ke *Technische Fachhochschule* (*University of Applied Science*) Berlin, Jerman. Setelah lulus pada 1997, ia kembali tanah air dan bekerja sebagai tenaga profesional. Sebelum buku *Ensiklopedi Kerajaan Nusantara*, pemerhati sejarah ini juga punya karya lain seperti *History of China* dan *Astrologi dan Sejarah Dunia*, yang diterbitkan oleh penerbit Ar-Ruzz Media.

Bersalaman dengan Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Tanggal 31 Mei 2011

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Pahlawan Nasional Indonesia

Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)

K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)

K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)

Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman *alias* Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun *alias* Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)

Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
Teuku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)

Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Teuku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Suropati (1660–1706)
Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)

Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Marthen Indey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)

Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku *alias* Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)

Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun *alias* Garamata (1852–1942)
Bagindo Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)

Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo *alias* Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma *alias* John Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)

K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)

BHINNEKA TUNGGAL IKA

AR·RUZZMEDIA